Laporan Tahunan
2018

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

AKSELERASI PERTUMBUHAN UMKM Melalui **DIGITALISASI LAYANAN PERBANKAN** Untuk MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

AKSELERASI PERTUMBUHAN UMKM Melalui

DIGITALISASI LAYANAN PERBANKAN

Untuk MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Keberlanjutan Tema

2014

Senantiasa Berinovasi dalam Melayani

2015

The Biggest National Payment Bank

2016

Kerja Nyata bagi Negeri

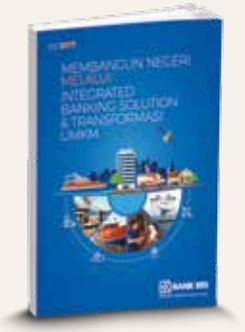

2017

Membangun Negeri Melalui *Integrated Banking Solution* & Transformasi UMKM

Dalam upaya untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan menjawab tantangan era disrupsi digitalisasi saat ini, BRI konsisten mengembangkan kompetensi di sektor unggulan UMKM yang didukung kualitas jaringan berbasis teknologi digital terkini, disertai penyempurnaan kegiatan operasional sesuai praktek tata kelola perusahaan terbaik. Melalui arahan strategis yang bijaksana dan kerja keras yang berkualitas sepanjang tahun, BRI mampu mencatat kinerja keuangan yang sangat baik pada tahun 2018.

Di tengah kondisi bisnis perbankan yang penuh tantangan, BRI berhasil menjalankan fungsi *intermediary*-nya dengan baik. Tercatat penyaluran kredit maupun pengumpulan dana masyarakat oleh BRI mampu tumbuh di atas rata-rata industri. Loyalitas nasabah dan kualitas layanan yang meningkat membuat basis nasabah BRI terus tumbuh. BRI juga mampu mencatat pertumbuhan pendapatan non-bunga yang semakin baik, ditopang naiknya transaksi *e-channel*. Selain itu, *business process reengineering* yang dilakukan mampu meningkatkan efisiensi dalam operasional bisnis BRI. Hal tersebut berdampak pada keberhasilan BRI dalam membukukan pertumbuhan laba bersih *double digit*, naik 11,6% mencapai Rp32,4 triliun, dengan nilai aset Rp1.296,8 triliun, terbesar di indonesia.

Raihan kinerja yang sangat positif mengukuhkan komitmen BRI dalam memajukan sektor UMKM sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional. BRI juga terus mendukung inklusi keuangan yang menyeluruh dan berkualitas melalui dukungan BRI pada berbagai program pemerintah, maupun melalui program digitalisasi dan peningkatan kualitas *operational excellence*.

MENCATAT **PERTUMBUHAN BISNIS** YANG **SIGNIFIKAN**

Aset
tumbuh 15%, mencapai
Rp**1.269,9** triliun

Kredit
mencapai
Rp**820** triliun
tumbuh 14,1%

Dana Pihak Ketiga
tumbuh 12,2%
mencapai
Rp**944,3** triliun

Ekuitas
tumbuh 10,3%
mencapai
Rp**185,3** triliun

Laba Bersih
tumbuh 11,6%, mencapai
Rp32,4 triliun
Pendapatan
Recovery
tumbuh 22,9%
mencapai
Rp6,2 triliun
Pendapatan Fee
& Commission
tumbuh 15,1%,
mencapai
Rp12,0 triliun
Pendapatan
e-channel dan
e-banking
mencapai
Rp3,2 triliun
tumbuh 16,2%
NPL
Gross*
sebesar
2,14%
*data bank saja
Cash Management System
Layanan Perbankan
Agen BRI
Bisnis
Tentang BRI
E-Banking

AKSELERASI **PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM** MELALUI **LAYANAN DIGITAL PERBANKAN**

BRISPOT

BRISPOT adalah sebuah aplikasi berbasis digital dengan konsep *one stop service* yang memungkinkan *Loan Officer* untuk melakukan proses kredit secara *end-to-end*, dimanapun dan kapanpun.

BRISPOT terbukti dapat mempercepat *turn-around-time* proses pelayanan pinjaman mikro dari sebelumnya 3-5 hari menjadi rata-rata kurang dari 2 hari. BRISPOT juga telah dilengkapi dengan aspek mitigasi risiko terbaik di kelasnya.

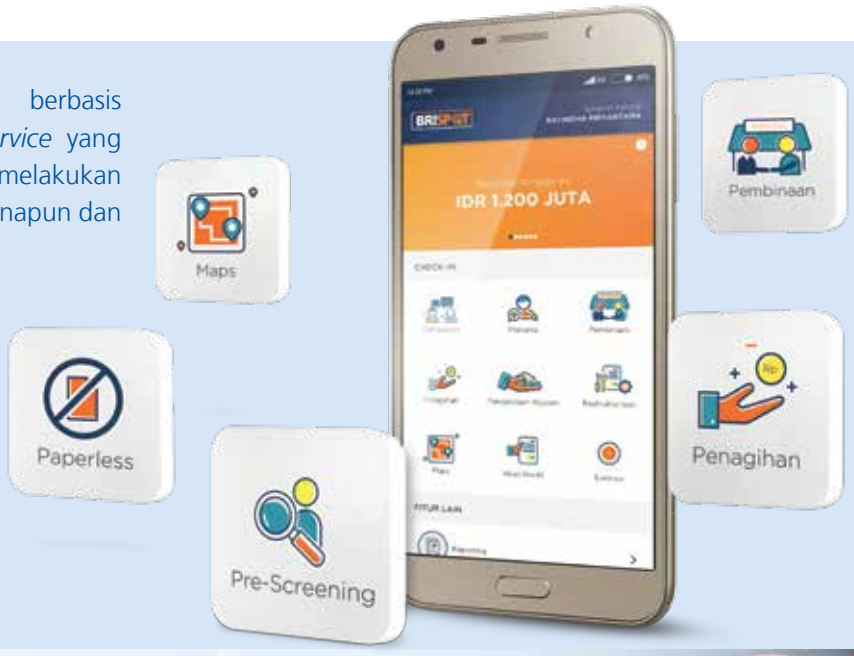

BRILINK

BRIlink merupakan layanan *branchless banking* BRI untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sebagai perwujudan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) dan LKD (Layanan Keuangan Digital) serta menjaga kedaulatan rupiah. Dalam hal ini, BRI menjalin kerja sama dengan nasabahnya untuk menjadi agen yang dapat melayani transaksi perbankan secara *online* dengan menggunakan berbagai *device* seperti *electronic data capture* (EDC) atau ponsel pintar.

Jumlah Agen BRILINK mencapai
401.550 Agen

Fee Based Income BRILINK mencapai
Rp448,8 miliar
tumbuh 177,8% *year on year.*

Transaksi Finansial BRILINK mencapai
378,7 Juta transaksi
tumbuh 87,4% *year on year.*

Nilai transaksi BRILink sebesar
Rp512,7 triliun

PERJALANAN 123 TAHUN BRI MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR)

LAYANAN BRI DI TAPAL BATAS INDONESIA

Kisah Amir, Pejuang Kredit BRI di Perbatasan

Amir yang berkerja sebagai Mantri Bank BRI Kantor Unit Koya, berkomitmen mencari nasabah di pelosok-pelosok distrik yang berbatasan langsung Papua Nugini. Tak kenal jarak dan waktu, Amir selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan selalu memperhatikan kepuasan nasabahnya.

https://20.detik.com/tapal-batas/20181011-181002132/kisah-amir-pejuang-kredit-bri-di-perbatasan

Money Changer BRI, Agen BRILink, Teras BRI di Perbatasan. Membantu Masyarakat di Perbatasan dan Upaya BRI Menjaga Kedaulatan Rupiah di Perbatasan RI-PNG

Terletak di penghujung jalan masuk Pos Lintas Batas Perbatasan (PLBN) Skouw, sebuah fasilitas *money changer* tampak begitu mencolok bagi pelintas perbatasan. Bangunan yang didominasi warna putih biru tersebut berada di sisi jalur masuk bagi pelintas batas dari Papua Nugini (PNG) menuju pasar di seberang wilayah yang masuk Indonesia. Dibangun oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini sejak Mei 2017 lalu, *money changer* ini jadi satu-satunya yang dimiliki perbankan nasional di perbatasan Indonesia-PNG. Tempat penukaran uang ini sangat dibutuhkan bagi para warga Papua Nugini yang hendak berbelanja berbagai kebutuhan di Pasar Skouw yang hanya buka tiga kali dalam sepekan.

"Masyarakat sekitar sangat terbantu dengan keberadaan BRI di perbatasan. Baik dengan keberadaan *money changer*, Agen BRILink, dan juga Teras BRI di perbatasan. Hal ini terasa nyata sekali bahwa keberadaan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Sebagai contoh BRI melayani penukaran mata uang kina yang transaksi per bulannya mencapai Rp7-8 miliar, bahkan terdapat Agen BRILink yang transaksinya mencapai ribuan per-bulan".

TUMBUH POSITIF DAN BERKELANJUTAN

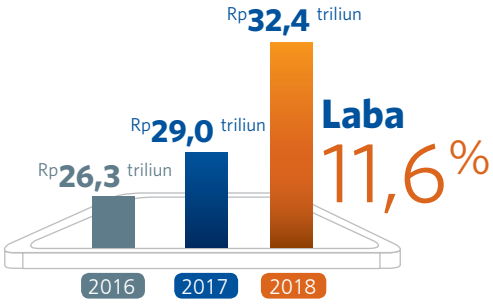

Laba bersih pada 2018 mencapai **Rp32,4 triliun,** atau tumbuh **11,6%** *year on year*

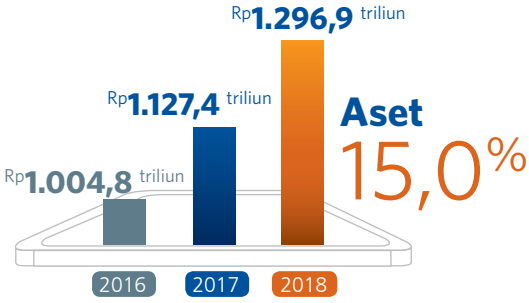

Aset pada 2018 mencapai **Rp1.296,9 triliun**, **tumbuh 15,0%** *year on year*

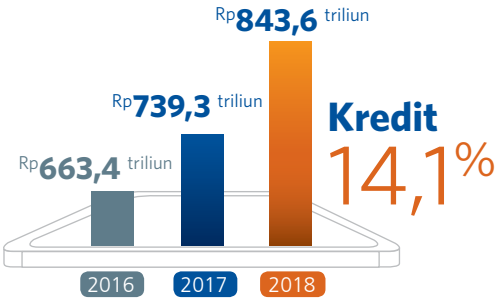

Kredit pada 2018 mencapai **Rp843,6 triliun, tumbuh 14,1%** *year on year*

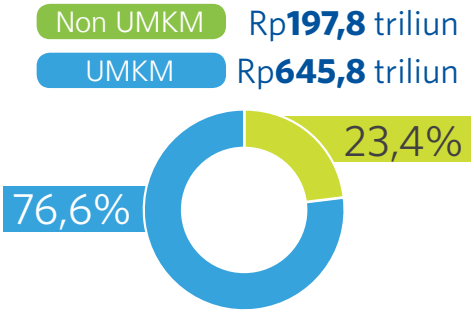

DPK Rp944,3 triliun

2018 **12,2%**

Dana Pihak Ketiga pada 2018 mencapai **Rp944,3 triliun,** tumbuh **12,2%** *year on year*

KUR Rp80,2 triliun

2018 **64,9%**

Bank BRI berhasil menyalurkan KUR **Rp 80,2 T** kepada lebih dari **3,9 juta debitur** hingga 2018, Bank BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia dengan portofolio **64,9%**

NPL Gross

BRI* **2,14%**

Industri **2,67%**

*data bank saja

Pertumbuhan Kredit mampu diimbangi dengan tetap terjaganya kualitas penyaluran kredit. Tercermin dari NPL *gross* yang tercatat sebesar **2,27%**, lebih baik dari industri.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mampu mencatat pertumbuhan kinerja yang positif dan berkelanjutan hingga akhir tahun 2018. Prestasi ini tak lepas dari komitmen Bank BRI terhadap pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Bank BRI sebagai
Agen Pembangunan

Dengan kinerja positif yang dicapai, Perseroan optimis mampu tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap fokus terhadap pemberdayaan UMKM. Bank BRI juga akan terus mendorong inklusi dan literasi keuangan ke seluruh penjuru negeri serta menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan.

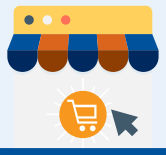

AGEN BRILINK

401.550 Agen

TERAS BRI KAPAL

3 Unit

RUMAH KREATIF BUMN

53 Unit
302.942 UMKM

KARTU TANI

3 Juta Kartu

PKH/BPNT

3,8 Juta / **2,6** Juta

BUMDES

125 Kota/Kab
17.545 Rekening

BALKONDES

Balkondes BRI Duta Menoreh, Desa Tanjungsari, Borobudur

SERTIFIKASI LAHAN

Pembiayaan
Rp**12,7** Miliar
kepada **657** Petani
di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Selatan

REDISTRIBUSI ASET PERHUTANAN SOSIAL

7.099 Petani
26.701 Hektar
lahan di Sumsel, Jambi, Sumbar, Jabar dan Jateng

BRI SENANTIASA MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

Kartu Tani

1. Jumlah kartu tani yang diterima 2.962.681 kartu
2. Jumlah Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang telah diakuisisi 6.028 KPL

Program Rumah Kreatif BUMN (RKB)

- ✓ Anggota RKB: 298.537 UMKM
- ✓ Anggota blanja.com: 3.895 UMKM yang telah diberikan pelatihan 1.742 UMKM

Balai Ekonomi Desa (Balkondes)/ Ekonomi Kerakyatan

1. Telah terlaksana 12 kali Kegiatan aktivitas Balkondes, terdiri dari 4 kali pelatihan UMKM & pengelolaan Balkondes, 3 kali kegiatan Belajar Siswa Desa, 5 kali Olahraga Desa)
2. Partisipasi dalam kegiatan Kementrian BUMN (Kunker BUMN & ICW *visit* Balkondes)

Dukungan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas

Mendukung pembangunan infrastruktur & konektivitas dengan pemberian fasilitas kepada beberapa perusahaan

Sinergi BPD

Saat ini BRI telah menjalin kerjsama berupa MoU dengan beberapa BPD. Selain itu juga terdapat kerjasama tanpa MoU / PKS secara umum dalam bentuk kerjasama di bidang treasury & bisnis internasional

Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Telah terbit kartu IUMK sebanyak 81.713 kartu dari target 34.231 kartu (211%)

Peningkatan literasi & Inklusi Keuangan:

Smart Village

Sejalan dengan kegiatan BRI Inkubasi yang dilakukan di 5 kota (Solo, Bandung, Makasar, Malang & Padang)

Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

1. Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1-3
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1-9

Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi

1. Jumlah BUMDes saat ini 32.246, dan yang telah menjadi Agen BRILink sebanyak 2.458 BUMDes.
2. Akuisisi rekening BUMDes sebanyak 16.567 rekening.

PERJALANAN DIGITAL BANKING BRI

2006
Kartu Kredit BRI

2007
Pengembangan *Core Banking* BRINETS

2008
Cash Management System untuk BUMN

2009
Migrasi sistem dari *BDS* ke *BRINETS Web*, pengenalan *Internet banking*

2012
E-Buzz BRI & BRIZZI

2013
19 Dec : *Self Service Banking (Hybrid Banking)*
20 June : T-Bank

2014
12 Des : BRILink

2016
E Pasar BRI, BRI Sat

2015
4 Agustus
Teras BRI Kapal

2017
Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III di Ambon

Perjalanan Digital Banking BRI

DAFTAR ISI

.17 IKHTISAR KINERJA UTAMA

18 Ringkasan Kinerja Bisnis 2018
20 Ringkasan Kinerja Keuangan 2018
22 Ikhtisar Keuangan
24 Ikhtisar Saham
27 Ikhtisar Obligasi
30 Aksi Korporasi
31 Pembayaran Dividen
31 Penghentian Sementara Perdagangan Saham / Penghapusan Pencatatan Saham
32 Peristiwa Penting

.43 LAPORAN MANAJEMEN

44 Laporan Dewan Komisaris
55 Laporan Direksi
68 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
69 Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

.71 PROFIL PERUSAHAAN

72 Identitas Perseroan
73 Makna Logo
74 Riwayat Singkat BRI
79 Bidang Usaha Sesuai Anggaran Dasar
80 Produk dan Jasa
84 Wilayah Operasional
86 Jejak Langkah
88 Struktur Organisasi
90 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama
92 Budaya Perusahaan
94 Profil Dewan Komisaris
102 Profil Direksi
114 Profil *Senior Executive Vice President* (SEVP)
116 Demografi Karyawan
118 Komposisi Pemegang Saham
121 Struktur Perusahaan
122 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
124 Kronologi Pencatatan Saham
129 Kronologi Penerbitan Efek Lain
133 Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang
134 Penghargaan dan Sertifikasi
142 Sertifikasi
143 Peringkat BRI
144 Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan
148 Informasi Pada *Website* Perusahaan
149 Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

.155 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

156 Perekonomian Global
156 Perekonomian Indonesia
159 Proyeksi 2019
160 Industri Perbankan Nasional
161 Tinjauan Industri Perbankan dan BRI
162 Proyeksi Kinerja Perbankan Indonesia Tahun 2019
163 Rencana Strategis Bank
166 Bank BRI untuk Indonesia
176 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
178 Bisnis Mikro
179 Bisnis Mikro
194 Bisnis Ritel
215 Bisnis Korporasi
236 Bisnis Entitas Anak
260 Tinjauan Keuangan
318 Sumber Daya Manusia
352 Teknologi Informasi & Operasional

.381 TATA KELOLA PERUSAHAAN

386 Pelaksanaan Roadmap GCG
388 Kebijakan Tata Kelola
389 Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola
398 Tata Kelola Teknologi Informasi
406 Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Daftar Isi

417 Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guidelines of Corporate Goverance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*
419 Rencana Peningkatan GCG 2019
420 Rapat Umum Pemegang Saham
435 Dewan Komisaris
475 Rekomendasi Dewan Komisaris 2018
502 Direksi
519 Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi
532 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
556 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
556 Pengungkapan Hubungan Afiliasi
557 Organ Pendukung Dewan Komisaris
560 Komite Audit
584 Komite Nominasi dan Remunerasi
602 Komite Pengawas Manajemen Risiko
618 Komite Tata Kelola Terintegrasi
634 Komite Direksi
657 Sekretaris Perusahaan
668 Hubungan Investor
671 Satuan Kerja Audit Internal
684 Akuntan Publik
686 Fungsi Kepatuhan
690 Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
696 Manajemen Risiko
828 Sistem Pengendalian Internal
836 Perkara Penting Yang Dihadapi Perseroan
839 Akses Informasi Data Perusahaan
842 Kode Etik
844 Budaya Perusahaan
845 *Whistleblowing System*
847 Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
847 Kebijakan & Prosedur Anti Korupsi
848 Program Pengendalian Gratifikasi
851 Kebijakan Perlindungan Hak Kreditur
851 Kebijakan Perlindungan Nasabah
854 Benturan Kepentingan
855 Pencegahan *Insider Trading*
856 Pengadaan Barang dan Jasa
861 Pengelolaan Aktiva Tetap
863 Rencana Strategis Bank 2018
864 Kebijakan Lainnya
866 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan
866 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Dana Besar (*Large Exposure*)
870 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik
870 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LKHPN)
871 Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

.877

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

879 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan
884 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
890 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
906 Program Kemitraan
910 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

.915

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2018

Ikhtisar Kinerja Utama

PADA TAHUN 2018, BRI BERHASIL MENCATAT PENCAPAIAN KREDIT SEBESAR RP820 TRILIUN, TUMBUH 14,1% DIBANDING TAHUN 2017 SEBESAR RP719 TRILIUN. KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERBESAR YAITU MENCAPAI RP645,8 TRILIUN ATAU 76,6% DARI TOTAL KREDIT BRI. HAL INI SELARAS DENGAN ASPIRASI BRI UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN SEKTOR UMKM.

Ringkasan Kinerja Bisnis 2018

BISNIS MIKRO

Bisnis Mikro mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar **9,8% dari Rp15,6 triliun** di tahun 2017 menjadi

Rp17,2 triliun di tahun 2018.

BISNIS RITEL

Laba Bisnis Ritel mencatat pertumbuhan laba bersih **sebesar**

18,5%

dari Rp9Triliun di tahun 2017 menjadi Rp10,6 triliun di tahun 2018.

BISNIS KORPORASI

Bisnis Korporasi mencatat pertumbuhan laba bersih **sebesar**

4,5%

dari **Rp767,3 miliar** di tahun 2018.

BISNIS ENTITAS ANAK

Bisnis entitas anak mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar

24,4%

dari Rp575,8 miliar di tahun 2017 menjadi **Rp716,5 miliar** di tahun 2018.

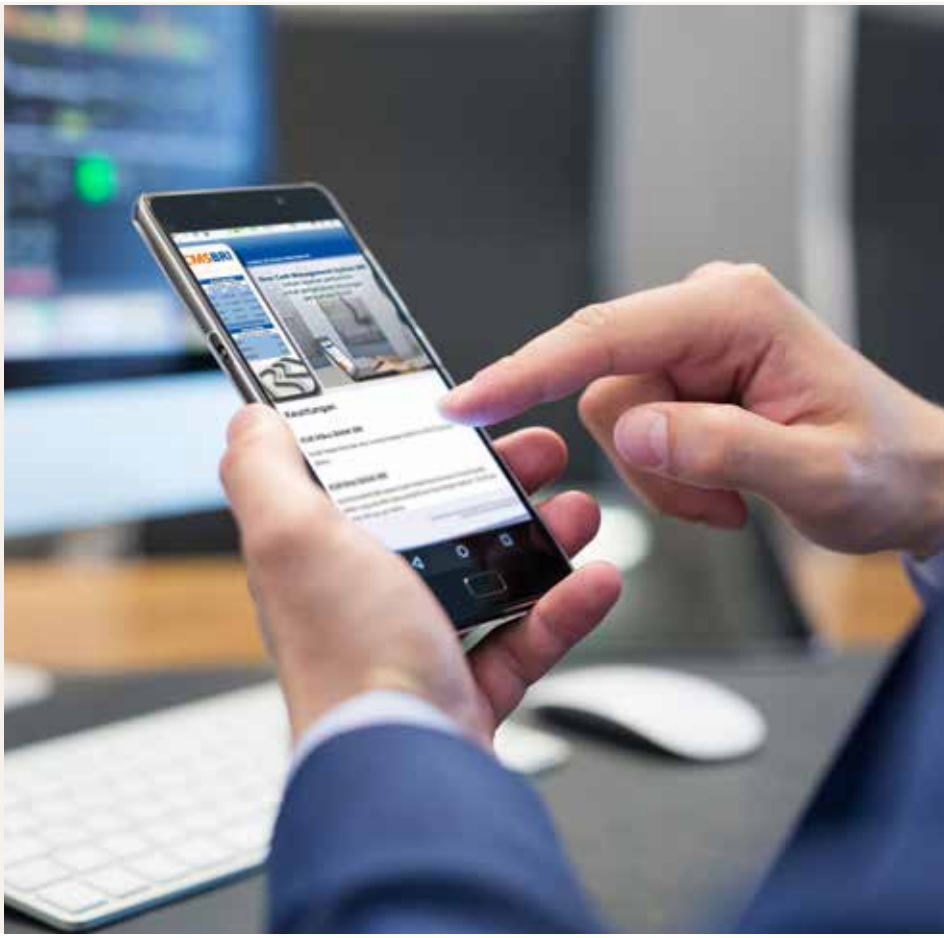

Ringkasan Kinerja Keuangan 2018

ASET

Aset **sebesar**
Rp1.296,8triliun
naik 15,03% yoy pada 2018, dari tahun sebelumnya Rp1.127,4 triliun

LIABILITAS

Liabilitas **sebesar**
Rp1.111,6triliun
pada 2018, **naik 15,9% yoy** dari tahun sebelumnya Rp959,4 triliun

EKUITAS

Ekuitas **sebesar**
Rp185,2 triliun
tumbuh 10,28% yoy pada 2018, dari tahun sebelumnya Rp168 triliun

TABUNGAN

Tabungan **sebesar**
Rp387,2triliun
pada 2018, **naik 10,8% yoy** dari tahun sebelumnya Rp349,4 triliun

GIRO

Giro **sebesar**
Rp180,7triliun
pada 2018, **naik 22,5% yoy** dari tahun sebelumnya Rp147,4 triliun

DEPOSITO

Deposito **sebesar**
Rp376,4triliun
pada 2018, **naik 9,2% yoy** dari tahun sebelumnya Rp344,8 triliun

Ringkasan Kinerja Keuangan 2018

LABA OPERASIONAL

Laba Operasional **tumbuh 13,3% yoy sebesar**
Rp41,7triliun
pada 2018, dari tahun sebelumnya Rp36,8 triliun

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Operasional Lainnya **tumbuh 21,5% yoy sebesar**
Rp23,4triliun
pada 2018, dari tahun sebelumnya Rp19,2 triliun

LABA BERSIH

Laba Bersih **tumbuh 11,6% yoy sebesar**
Rp32,4triliun
pada 2018, dari tahun sebelumnya Rp29,04 triliun

BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Beban Bunga dan Syariah **sebesar**
Rp33,9triliun
pada 2018 naik 13,5% yoy dari tahun sebelumnya Rp29,9 triliun

PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan Bunga dan Syariah **tumbuh 8,4% yoy sebesar**
Rp111,58triliun
pada 2018 dari tahun sebelumnya Rp102,9 triliun

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Beban Operasional Lainnya **sebesar**
Rp41,9triliun
pada 2018, naik 8,7% yoy dari tahun sebelumnya Rp38,6 triliun

Ikhtisar Keuangan

(Rp Miliar)

Neraca	2014*)	2015	2016**)	2017	2018
Total Aset	801.984	878.426	1.004.802	1.127.448	1.296.898
Total Aset Produktif	728.094	781.931	991.719	1.128.476	1.178.512
Kredit – *Gross*	510.697	581.095	663.420	739.337	843.598
Obligasi Rekap Pemerintah	4.304	3.816	3.318	3.318	1.505
Penyertaan Saham Neto	252	269	12	83	460
Total Liabilitias	704.278	765.299	857.268	959.440	1.111.623
Dana Pihak Ketiga	622.322	668.995	754.526	841.656	944.269
- Giro	90.052	114.367	142.547	147.436	180.669
- Tabungan	236.395	272.471	303.270	349.441	387.180
- Deposito	295.875	282.157	308.709	344.780	376.420
Liabilitas berbeban bunga lainnya	57.435	68.601	70.354	78.744	119.632
Modal/Ekuitas	**97.706**	**113.127**	**147.534**	**168.008**	**185.275**
Laba/Rugi					
Pendapatan Bunga					
- Dengan Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	75.122	85.434	94.016	102.912	111.583
- Tanpa Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	74.876	85.192	93.815	102.834	111.482
Pendapatan Bunga Bersih					
- Dengan Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	51.442	58.280	65.439	73.018	77.666
- Tanpa Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	51.197	58.038	65.237	72.940	77.565
Pendapatan Operasional Lainnya	9.299	13.855	17.288	19.271	23.425
Biaya Operasional Lainnya	(26.715)	(31.276)	(35.157)	(38.614)	(41.990)
Biaya CKPN	(5.719)	(8.900)	(13.804)	(17.254)	(18.321)
Laba Sebelum Pajak	30.804	32.494	34.047	37.023	41.754
Laba Bersih Tahun Berjalan	24.227	25.411	26.285	29.045	32.418
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	24.215	25.398	26.234	28.997	32.351
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	11,69	13,05	61,21	72,35	30,10
Laba Rugi Komprehensif	24.482	24.872	41.446	30.881	28.941
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	24.467	24.861	41.385	30.808	28.911
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan non Pengendali	14,67	11,05	61,21	72,35	30,10
Laba Bersih per Saham (Rp)	981,59	1.030,43	214,04	236,93	264,66

TOTAL ASET

(Rp miliar)

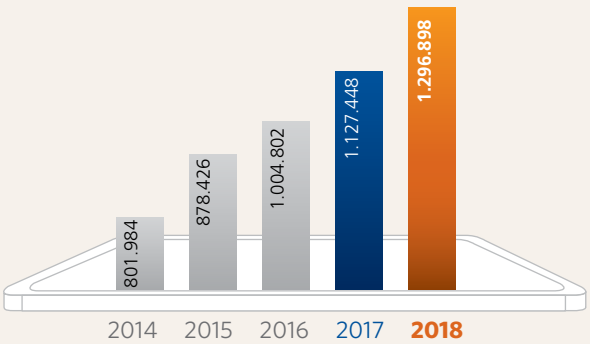

KREDIT - GROSS

(Rp miliar)

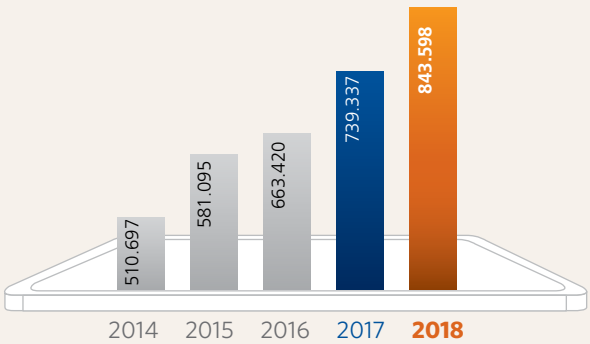

Ikhtisar Keuangan

(Rp Miliar)

Neraca	2014*)	2015	2016**)	2017	2018
RASIO KEUANGAN (BANK SAJA)					
Permodalan					
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	18,31%	20,59%	22,91%	22,96%	21,21%
Aktiva Produktif					
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	1,09%	1,33%	1,46%	1,38%	1,41%
Aset Produktif Bermasalah	1,26%	1,57%	1,61%	1,59%	1,62%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,40%	2,37%	2,75%	3,11%	3,26%
Kredit Bermasalah (NPL *Gross*)	1,69%	2,02%	2,03%	2,10%	2,14%
Profitabilitas					
R O A	4,73%	4,19%	3,84%	3,69%	3,68%
R O E	31,19%	29,89%	23,08%	20,03%	20,49%
N I M	8,51%	8,13%	8,00%	7,93%	7,45%
B O P O (*Operating Expenses to Operating Income*)	65,42%	67,96%	68,69%	69,14%	68,48%
Rasio Lancar					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas					
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset					
Likuiditas					
L D R	81,68%	86,88%	87,77%	88,13%	89,57%
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
- Pihak Tidak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
- Pihak Tidak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Giro Wajib Minimum	8,07%	9,31%	6,94%	6,52%	7,16%
Posisi Devisa Neto	3,86%	2,33%	6,67%	4,22%	3,74%

Angka kinerja keuangan tersebut di atas merupakan laporan keuangan konsolidasi BRI dengan entitas anak untuk tahun 2014: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRIngin Remittance Co. Ltd Hongkong dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera; untuk tahun 2015: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRIngin Remittance Co. Ltd Hongkong dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera; untuk tahun 2016: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; dan untuk tahun 2017: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama; dan untuk tahun 2018: PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd Hongkong, PT Asuransi BRILife, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama.

Rasio Keuangan menggunakan data bank saja.

*) Terdapat Restatement pada Laporan Keuangan Publikasi setelah penyajian kembali karena penerapan PSAK No. 24: Imbalan Kerja

**) Pada tahun 2016 peningkatan aset dan modal dikarenakan adanya revaluasi aset tetap sebesar Rp14,3 triliun

TOTAL LIABILITAS

(Rp miliar)

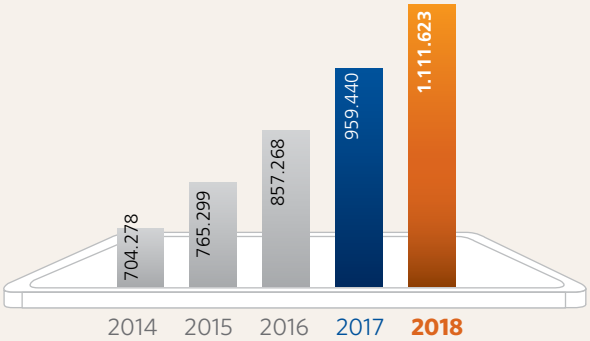

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

(Rp miliar)

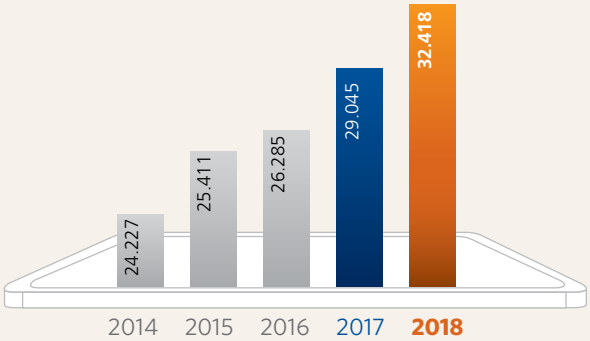

Ikhtisar Saham

2017

Pergerakan Harga Saham, Volume dan Kapitalisasi Pasar

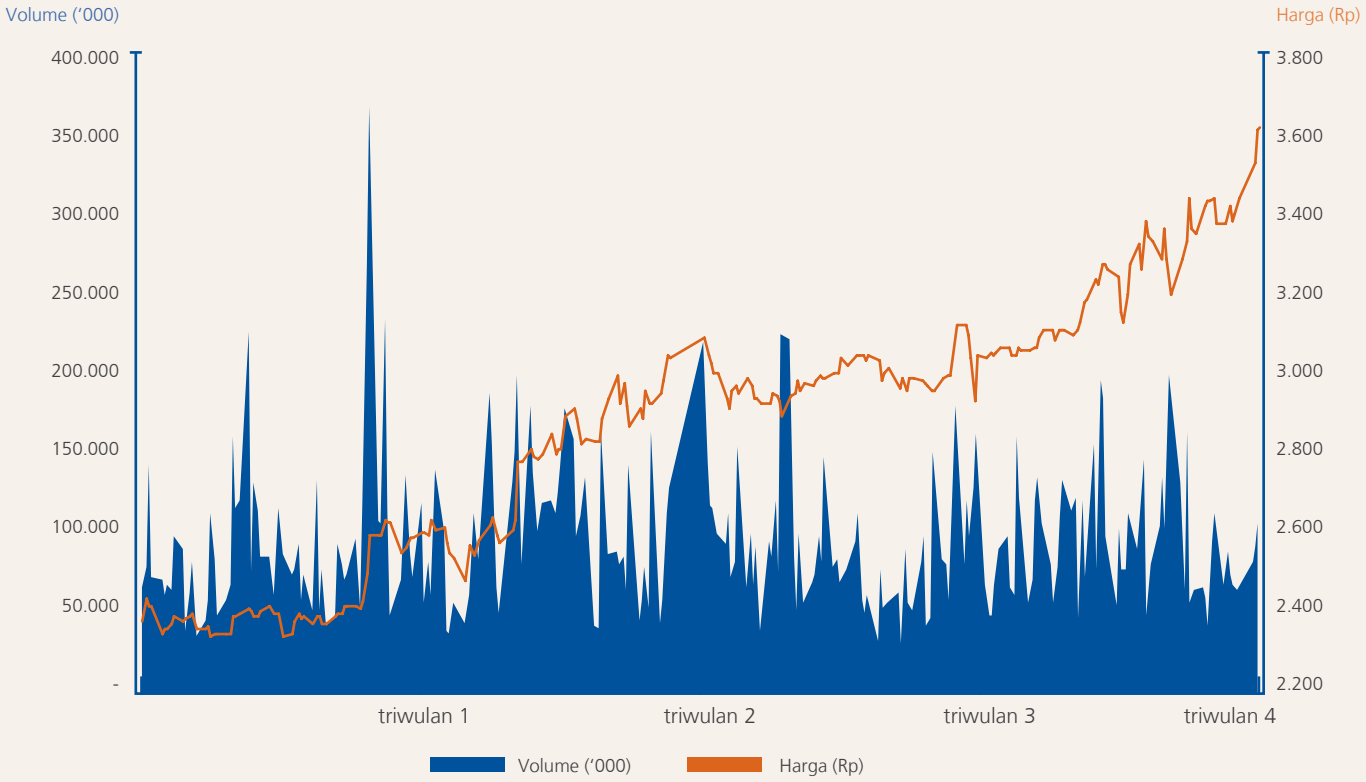

Kinerja Saham per 31 Desember 2017

Tahun	Harga Lembar/Saham				Jumlah Lembar Saham	Volume Transaksi (Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2017	**2.350**	**3.640**	**2.340**	**3.640**	**-**	**23.211.823.300**	**-**
Triwulan ke-1	2.350	2.640	2.340	2.595	123.345.810.000	5.965.294.500	320,08
Triwulan ke-2	2.595	3.060	2.485	3.050	123.345.810.000	5.359.020.000	376,20
Triwulan ke-3	3.000	3.135	2.900	3.055	123.345.810.000	5.878.135.000	376,82
Triwulan ke-4	3.055	3.640	3.050	3.640	123.345.810.000	6.009.373.800	448,98

Ikhtisar Saham

2018

Pergerakan Harga Saham, Volume dan Kapitalisasi Pasar

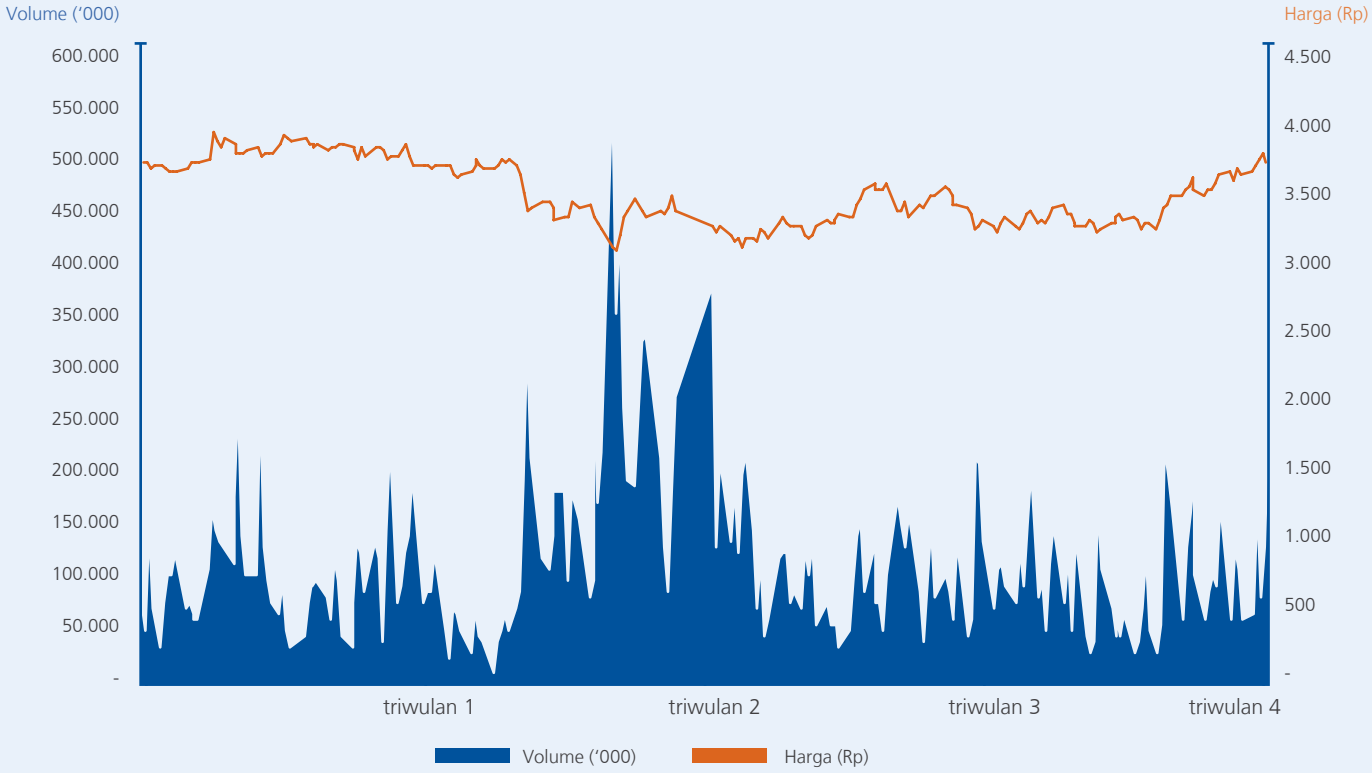

Kinerja Saham per 31 Desember 2018

Tahun	Harga Lembar/Saham				Jumlah Lembar Saham	Volume Transaksi (Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2018	3.690	3.920	2.720	3.660		28.131.320.100	
Triwulan ke-1	3.690	3.920	3.530	3.600	123.345.810	7.159.651.000	444,04
Triwulan ke-2	3.500	3.660	2.720	2.840	123.345.810	8.999.924.100	350,30
Triwulan ke-3	2.890	3.410	2.830	3.150	123.345.810	7.056.550.400	388,53
Triwulan ke-4	3.150	3.710	2.910	3.660	123.345.810	6.966.375.800	451,44

Indikator Kinerja Saham BRI

Indikator	BRI	
	2017	2018
Harga Penutupan (Rp)	3.640	3.660
Harga Terendah (Rp)	2.340	2.720
Harga Tertinggi (Rp)	3.640	3.920
Rata-rata volume perdagangan harian	97.528.669	125.760.422
PE (x)	15,3	17,23
PBV (x)	2,7	2,58
Kapitalisasi Pasar (Rp triliun)	448,98	451,44

Ikhtisar Saham

Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham BRI Tahun 2018

Dinamika makroekonomi global pada tahun 2018 berdampak pada kondisi pasar modal di Indonesia yang ditandai dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 20%, pada level 6.056 dari posisi tahun sebelumnya yang berada di level 6.356. Penurunan ini terutama didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kenaikan suku bunga acuan yang meningkatkan *cost of capital*. Selain itu terdapat trend pelemahan ekonomi global seperti potensi kenaikan rate The Fed dan ketidakpastian kebijakan perdagangan AS akan mempengaruhi psikologi investor. Namun secara makro kondisi perekonomian Indonesia masih relatif baik yang ditandai tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) sebesar 5,2% dan tingkat inflasi yang rendah (2,9%). Selain itu pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur yang semakin meningkat juga menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, pada tahun 2018 BRI juga mencatat kinerja yang lebih baik. Pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 14.1% *year on year*, diatas industri perbankan yang sebesar 12,05% *year on year*, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 12,2% *year on year*, lebih baik dari rata-rata industri sebesar 7.19% *year on year*. BRI juga berhasil menjaga kualitas kredit dimana NPL terjaga pada level 2,14% (Bank saja) dibawah rata-rata industri yang sebesar 2,67%.

Harga saham BRI tertinggi sepanjang tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.920 pada tanggal 23 Januari 2018 dan yang terendah sebesar Rp2.720 pada 22 Mei 2018. BRI juga menjadi salah satu perusahaan publik yang paling likuid dimana rata-rata volume perdagangan saham BRI adalah sebesar 125,7 juta lembar saham atau senilai Rp414,9 miliar/hari.

Ikhtisar Obligasi

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	*Coupon/ Discount Rate*	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013	USD	25 Sept'03	30 Okt'13	150.000.000	120	7.75	B3	Moodys	Memperkuat permodalan
2	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	IDR	9 Jan'04	9 Jan'14	500.000.000.000	120	13.50	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
3	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	IDR	22 Des'09	22 Des'14	2.000.000.000.000	60	10.95	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
4	Senior Notes due 2018	USD	28-Mar-13	28-Mar-18	500.000.000	60	2.95	Baa3	Moodys	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
5	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	IDR	10 Okt'14	15 Okt'15	300.000.000.000	370 hari	8.75	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
6	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	IDR	10 Okt'14	10 Okt'16	60.000.000.000	24	9.25	AAA	Fitch Indonesia	
7	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	IDR	10 Okt'14	10 Okt'17	360.000.000.000	36	9.50	AAA	Fitch Indonesia	
8	MTN BRI Tahap II Tahun 2014	IDR	24 Des'14	29 Des'15	520.000.000.000	370 hari	8.90	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *Prudential Banking* dan *good corporate governance*.
9	NCD BRI Tahun 2014 Seri A	IDR	2 Des'14	2 Mar'15	165.000.000.000	3	8.00	Tidak ada Rating NCD	-	Ekspansi bisnis melalui Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
10	NCD BRI Tahun 2014 Seri B	IDR	2 Des'14	2 Jun'15	790.000.000.000	6	8.60	Tidak ada Rating NCD	-	
11	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	22 Apr'15	22 Jul'15	595.000.000.000	3	7.10	Tidak ada Rating NCD	-	
12	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	22 Apr'15	22 Okt'15	1.020.000.000.000	6	8.00	Tidak ada Rating NCD	-	
13	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	22 Apr'15	22 Jan'16	265.000.000.000	9	8.10	Tidak ada Rating NCD	-	
14	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	25 Jun'15	7 Jul'16	655.000.000.000	370 hari	8.40	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
15	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	25 Jun'15	3 Jul '18	925.000.000.000	36	9.20	AAA	Pefindo	

Ikhtisar Obligasi

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	*Coupon/ Discount Rate*	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
16	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	19 Jan'16	8 Feb'17	808.000.000.000	370 hari	8.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
17	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	4 Mei'16	30 Mei'17	1.212.000.000.000	370 hari	7.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
18	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	1 Des'16	6 Des'17	616.000.000.000	370 hari	7.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
19	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	12 Apr'17	16 Apr'18	1.131.000.000.000	370 hari	7.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
20	MTN Bank BRI Tahap I Tahun 2016	IDR	16 Sept'16	21 Sept'17	1.925.000.000.000	370 hari	7.40	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Belum Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	*Coupon/ Discount Rate*	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	25 Jun'15	3 Jul'20	1.420.000.000.000	60	9.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	19 Jan'16	4 Feb'19	1.018.500.000.000	36	9.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
3	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	IDR	19 Jan'16	4 Feb'21	2.823.500.000.000	60	9.60	AAA	Pefindo	

Ikhtisar Obligasi

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	*Coupon/ Discount Rate*	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
4	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	4 Mei'16	25 Mei'19	2.437.000.000.000	36	8.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	IDR	4 Mei'16	25 Mei'21	701.000.000.000	60	8.70	AAA	Pefindo	
6	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	2 Des'16	1 Des'19	964.000.000.000	36	8.00	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	IDR	2 Des'16	1 Des'21	193.000.000.000	60	8.20	AAA	Pefindo	
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	IDR	2 Dec'16	1 Des'23	477.000.000.000	84	8.65	AAA	Pefindo	
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	IDR	2 Dec'16	1 Des'26	2.350.000.000.000	120	8.90	AAA	Pefindo	
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	12 Apr'17	11 Apr'20	1.743.500.000.000	36	8.10	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	IDR	12 Apr'17	11 Apr'22	925.000.000.000	60	8.30	AAA	Pefindo	
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	IDR	12 Apr'17	11 Apr'27	1.300.500.000.000	120	8.80	AAA	Pefindo	
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	25 Agu'17	24 Aug'20	980.500.000.000	36	7.60	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	IDR	25 Agu'17	24 Aug'22	1.652.500.000.000	60	8.00	AAA	Pefindo	
15	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	IDR	25 Agu'17	24 Aug'24	2.517.000.000.000	84	8.25	AAA	Pefindo	

Ikhtisar Obligasi

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	*Coupon/ Discount Rate*	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
16	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	IDR	22 Feb'18	21 Feb'23	1.837.000.000.000	60	6.65	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
17	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	IDR	22 Feb'18	21 Feb'25	605.000.000.000	84	6.90	AAA	Pefindo	
18	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	IDR	27 Jun'18	26 Jun'23	500.000.000.000	60	7.70	AA	Pefindo	Memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK *Recovery Plan* dan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier* 2) dan selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan peningkatan aset produktif.
19	Senior Unsecured Notes Due 2023	USD	16 Juli '18	20 Juli '23	500.000.000	60	4,63	Baa3 BBB-	Moodys Fitch	Memperkuat Struktur Pendanaan Umum

Aksi Korporasi

22 Februari 2018:

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A, jatuh tempo pada 21 Februari 2023, dengan nilai nominal Rp1.837.000.000.000 dan *coupon rate* sebesar 6,65%, serta peringkat AAA dari Pefindo.

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B, jatuh tempo pada 21 Februari 2025, dengan nilai nominal Rp605.000.000.000 dan *coupon rate* sebesar 6,90%, serta peringkat AAA dari Pefindo.

16 Juli 2018:

Senior Unsecured Notes BRI Due 2023 jatuh tempo pada 20 Juli 2023 dengan nilai nominal USD500.000.000 dan *coupon rate* sebesar 4,63 serta peringkat Baa3 dari Moodys dan BBB- dari Fitch.

27 Juni 2018:

Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018, jatuh tempo pada 26 Juni 2023, dengan nilai nominal Rp500.000.000.000 dan *coupon rate* sebesar 7,70%, serta peringkat AA dari Pefindo.

20 Desember 2018

Pengambilalihan Sarana NTT Ventura sebesar 97% kepemilikan senilai Rp3,1 miliar.

21 Desember 2018

Pengambilalihan Danareksa Sekuritas sebesar 67% kepemilikan senilai Rp447 miliar.

20 Desember 2018

Penyertaan minoritas pada Danareksa Investment Management sebesar 35% kepemilikan senilai Rp372 miliar.

Pembayaran Dividen

Target RUPS	Tanggal Pembayaran	Tahun	Rasio Pembayaran Dividen	Dividen (Rp Miliar)	Dividen Per Saham
2004	23 Juli 2004	2003	75,01	990	84,19
2005	5 Juli 2005	2004	50	1.816	152.88
2006	10 Juli 2006	2005	50	1.904	156,18
2007	2 Juli 2007	2006	50	2.129	173,04
2008	7 Juli 2008	2007	50	2.419	196,34
2009	3 Juli 2009	2008	35	2.085	168,82
2010	15 Juli 2010	2009	30	2.192	132,08
2011	15 Juni 2011	2010	20	2.294	70,04
2012	15 Mei 2012	2011	20	3.017	122,28
2013	15 April 2013	2012	30	5.556	225,23
2014	4 Mei 2014	2013	30	6.348	257.22
2015	22 April 2015	2014	30	7.272	294,8
2016	22 April 2016	2015	40	7.619	311,66
2017	13 April 2017	2016	40	10.478	428,61
2018	4 April 2018	2017	45	13.048	106,74*

*) Setelah *Stock split* 1:5 pada Oktober 2017

Penentuan besaran dividen diputuskan dalam RUPST sebagai organ utama perusahaan. Dalam RUPST 2018 untuk tahun buku 2017, telah diputuskan pembayaran dividen sebesar Rp13.048 miliar atau rasio *Dividend Pay Out*/DPO sebesar 45%. Dalam proses penentuan DPO tersebut, manajemen berhak untuk mengajukan besaran dividen dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta memperhatikan pemenuhan rasio kecukupan modal (CAR). Dengan implementasi Basel III yang dimulai pada Januari 2015 secara bertahap sampai dengan implementasi penuh pada Januari 2019, maka tingkat minimum CAR yang harus dijaga adalah sebesar 14,75%.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham / Penghapusan Pencatatan Saham

Sampai dengan penerbitan Laporan Tahunan 2018 ini, Bank BRI tidak mengalami atau mendapat penghentian sementara dalam perdagangan saham Perseroan ataupun penghapusan pencatatan saham.

Peristiwa Penting

3 JANUARI

BRI Jaman Now

Bank BRI membuka tahun 2018 dengan mengadakan CEO Speech dengan tajuk "BRI Jaman Now". Direktur Utama Bank BRI memberikan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan juga memaparkan rencana serta target yang akan dicapai oleh Bank BRI di tahun 2018.

19 JANUARI

Rapat Kerja Nasional 2018

Jajaran Direksi bersama *Executive Vice President* Bank BRI menggelar Rapat Kerja Nasional di awal tahun untuk memberikan kesamaan visi dan misi dalam menghadapi tantangan dan strategi 2018.

20 JANUARI

SABRINA, Inovasi Layanan Digital Perbankan Terbaru Dari BRI

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah Bank BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai BRI *New Assistance* yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.

24 JANUARI

Analyst Meeting Triwulan 4-2017

Bank BRI terus mengukuhkan diri sebagai bank terbesar di Indonesia dengan mencatatkan laba sebesar Rp29,04 Triliun dan Aset sebesar Rp1.076 Triliun pada akhir 2017. Menjadikan Bank BRI sebagai bank dengan laba terbesar di Indonesia selama 13 tahun berturut-turut dan asset terbesar sejak tahun 2015.

26 JANUARI

Sambut Asian Games 2018, BRI Luncurkan Kartu Kredit Edisi Khusus

Bank BRI kembali meluncurkan inovasi baru untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan meluncurkan Kartu Kredit BRI Touch Edisi Khusus Asian Games 2018. Bank BRI sendiri menjadi *official prestige partner* pada perhelatan Asian Games 2018.

30 JANUARI

Beasiswa Nusantara Cerdas Angkatan 4, Wujud Komitmen BRI Majukan Dunia Pendidikan di Indonesia

Di awal tahun 2018, Bank BRI kembali menggelar kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) BRI Peduli di bidang Pendidikan. Kali ini Bank BRI menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyelenggarakan Program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) Angkatan 4 yang diselenggarakan di Gedung A, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

Peristiwa Penting

11 FEBRUARI

Sasar Anak Muda, BRI Gelar 'BRI-Bekasi Jaman Now'

Bank BRI menjalin kerjasama bersama Korps. Lalu Lintas (Korlantas) POLRI dan Pemerintah Kota Bekasi menyelenggarakan *event* yang diperuntukkan bagi kalangan millennial muda "BRI-Bekasi Jaman Now" yang diselenggarakan di Bekasi. Acara yang menyasar 200.000 pengunjung dengan target utama kalangan muda millennial ini menghadirkan acara konsep creativepreneur event dan pesta rakyat yang diperuntukkan bagi seluruh Nasabah Bank BRI, khususnya sektor UMKM.

22 FEBRUARI

BRI Raih Penghargaan Bergengsi Dari Euromoney

Bank BRI meraih penghargaan internasional dari majalah ekonomi Euromoney sebagai "*The Best Bank in Indonesia For Private Banking: Succession Planning Advice and Trust*". Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Bank BRI Handayani di London.

28 FEBRUARI

Dorong UMKM Go Digital, Bank BRI Jalin Kerjasama dengan Lazada

Bank BRI kembali mendorong penguatan segmen usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dengan menjalin kerjasama dengan Lazada dalam hal pengembangan UMKM di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank BRI dan Lazada tentang Layanan Perbankan dan Dukungan *Event* yang bertema UPGRADE UKM.

2 MARET

Peran BRIsat Mendukung Program BBM Satu Harga di Pedalaman Papua

Bank BRI mengoperasikan jaringan BRIsat untuk dimanfaatkan oleh Agen BRILink di wilayah yang belum terjangkau sinyal provider seluler yakni di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Jayapura. Hal ini ditujukan dalam rangka memfasilitasi akses keuangan penduduk di Pegunungan Arfak yang sebelumnya harus menempuh perjalanan selama 4 jam ke unit kerja perbankan terdekat di Kecamatan Trafi. Langkah ini sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan BBM 1 harga yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Peristiwa Penting

5 MARET

Dorong Ekspor UMKM, BRI Gelar BRICRAFT 2018

Bank BRI menggelar *event* untuk mendorong ekspor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kali ini, BRI menggelar Pelatihan Wirausaha Karya Kriya Untuk Menjadi Pelaku UMKM Orientasi Ekspor berjuluk BRICRAFT 2018 di Jakarta 5-6 Maret 2018. BRICRAFT 2018 diselenggarakan sebagai bentuk komitmen BRI untuk mengembangkan bisnis karya kriya secara global melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB).

22 MARET

Bank BRI Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BRI Tahun 2018 memutuskan perubahan manajemen Bank BRI. Ahmad Solichin L, Supari, dan Osbal Saragi R dilantik menjadi Direksi Bank BRI.

24 MARET

Perkuat Perekonomian Desa, BRI Implementasikan Program Padat Karya Tunai di Klaten

Salah satu langkah nyata kontribusi Bank BRI dalam Program Padat Karya Tunai, BRI tengah melaksanakan CSR BRI Peduli Lingkungan berupa pemadatan jalan dan normalisasi saluran irigasi yang dilaksanakan di Dukuh Pilangsari, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno.

21 MARET

Tindak Lanjuti Instruksi Presiden, BRI Luncurkan Student Loan "BRIGUNA Pendidikan"

Menyambut arahan Presiden Joko Widodo, Bank BRI meluncurkan BRIGuna Pendidikan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2.

2 APRIL

BRI Luncurkan Indonesia Mall Serta Perbarui Tampilan Laman Resmi Korporat

Dalam rangka meningkatkan kelas UMKM, Bank BRI mendorong UMKM *Go Digital* dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan *startup-startup market place* sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas.

Peristiwa Penting

3 APRIL

BUMDes Mitra BRI Tembus Pasar Global

Bank BRI terus tunjukkan komitmen mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah naik kelas dengan cara meningkatkan promosi produk lokal di tingkat internasional. Kali ini, Bank BRI mengirimkan BUMDes Mitra Bisnis untuk mengikuti Pameran Indonesia *Archipelago Exhibition* (ARCHEX) 2018 yang diselenggarakan di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kuala Lumpur, Malaysia.

20 APRIL

BRI Bank Pertama Di Indonesia Gunakan Sertifikat Elektonik (*Digital Signature*) Untuk Otentikasi

Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Bank BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang menggunakan sertifikat elektronik (*Digital Signature*) sehingga diharapkan dapat meningkatkan keabsahan, perlindungan dan keamanan rekening nasabah.

4 MEI

Resmikan Money Changer Di Perbatasan Malaysia, Upaya BRI Jaga Kedaulatan Rupiah

Sebagai bentuk nyata komitmen menjadi lembaga keuangan terdepan yang turut menjaga kedaulatan Rupiah di perbatasan, Bank BRI meresmikan layanan *money changer* di Teras BRI Aji Kuning, wilayah terdekat dengan perbatasan patok 3 di Pulau Sebatik.

8 MEI

Peran BRIsat Dongkrak Perekonomian Desa Di Halmahera Barat

Bank BRI kembali memperluas penetrasi inklusi dan literasi keuangan ke pelosok negeri dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Kali ini, BRI mendorong perekonomian desa di Halmahera Barat dengan menghubungkan tiga BUMDes Binaan BRI yang juga merupakan Agen BRILink dengan jaringan komunikasi BRISat. Ketiga BUMDes tersebut berada di Desa Golago Kusuma, Desa Sidodadi dan Desa Pasalulu yang termasuk wilayah *blankspot* di Halmahera Barat.

Peristiwa Penting

8 JUNI

Bank BRI bersama dengan HIMBARA Gelar Buka Puasa Bersama Ribuan Anak Yatim Piatu

Dalam rangka bulan Ramadhan 1439 H Bank BRI mengadakan rangkaian kegiatan seperti Buka Bersama dengan 3.500 orang anak Yatim-Piatu bersama Himbara di JCC, Pembagian sembako sebanyak 64 ribu paket di seluruh Indonesia, dan Mudik Bareng BRI yang memberangkatkan sebanyak 12.200 pemudik ke berbagai daerah di Indonesia dengan 4 moda transportasi.

24 JULI

BRI Meriahkan Gelaran Kirab Obor Asian Games 2018 di Denpasar

Dalam rangka menyambut Asian Games 2018 Bank BRI melakukan Kirab Obor di Denpasar yang dihadiri oleh Komisaris Utama Bank BRI Andrinof A. Chaniago sebagai *Torch Bearer* dan di Jakarta dengan perwakilan *Torch Bearer* dari BRI yaitu Direktur Konsumer Handayani.

17 AGUSTUS

Bank BRI Apresiasi Prestasi Tim PASKIBRAKA Nasional 2018

Bank BRI memberikan apresiasi kepada Tim Paskibraka Nasional HUT RI ke-73 berupa tabungan BRI BritAma dengan total nilai Rp241 juta untuk 68 orang anggota Paskibraka dan 42 Pembina Paskibraka.

20 AGUSTUS

BRI Apresiasi Kemenangan TIMNAS U – 16 di Piala AFF 2018

Bank BRI sebagai *official banking partner* PSSI, memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U-16 yang berhasil menjuarai Piala AFF 2018 berupa tabungan BRI BritAma dengan total nilai Rp840 juta untuk 23 pemain, 1 pelatih kepala, 3 pelatih, dan 11 orang official tim.

30 AGUSTUS

Raih 6 Penghargaan Internasional, *Digital Innovation* BRI diakui Dunia

Pengakuan *Digital Innovation* BRI diakui dunia dengan mendapatkan 6 penghargaan sekaligus. 5 penghargaan The Indonesia Country Awards 2018 datang dari Asian Bankers Awards 2018 dan 1 penghargaan dari International Data Corporation (IDC) Digital Transformation Awards 2018.

Peristiwa Penting

3 SEPTEMBER

Jokowi ganjar Atlet, Pelatih dan *Official Team* Asian Games dengan Tabungan BritAma

Bank BRI menjadi *Official Prestige Partner* dalam gelaran akbar Asian Games 2018, dan menjadi *official banking partner* untuk Tim Indonesia sehingga dipercaya untuk menyalurkan bonus untuk para atlet Indonesia yang berprestasi di Asian Games.

6 SEPTEMBER

Bank BRI Gelar *Public Expose* di Semarang

Bank BRI menggelar public expose di Semarang. Hadir dalam acara tersebut *Senior Executive Vice President* (SEVP) *Treasury & Global Services* Bank BRI Listiarini Dewajanti, Head of Investor Relations Bank BRI Achmad Royadi, dan Pemimpin Wilayah BRI Semarang Fidri Arnaldy. Acara ini merupakan *public expose* kedua Bank BRI di tahun 2018, sebelumnya telah dilakukan *public expose* di Jakarta (29/8) dan akan berlanjut di Makassar.

13 SEPTEMBER

BRI Dukung Penyelenggaraan Temu Nasional Kowani dan International Council of Women (ICW)

Bank BRI mendukung penuh penyelenggaraan Temu Nasional Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan pertemuan *International Council Woman* (ICW) yang diselenggarakan pada 13-18 September 2018 di Jogjakarta. Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 perempuan dari organisasi yang tergabung di Kowani, BKOW, GOW dan organisasi perempuan lainnya dari seluruh Indonesia serta 200 delegasi dari 80 negara yang tergabung dalam ICW.

17 SEPTEMBER

BRI Bangun 300 Rumah dan 375 MCK untuk Korban Gempa Lombok

Bank BRI terus berupaya membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Pulau Lombok. Kali ini, Bank BRI memberikan bantuan 300 rumah sebagai hunian sementara dan mendirikan 375 fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Hadir dalam serah terima rumah dan MCK tersebut Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Direktur Jaringan dan Layanan Bank BRI Osbal Saragi Rumahorbo.

23 SEPTEMBER

Sponsori Asian Paragames 2018 Bank BRI Meriahkan Parade Momo

Sebagai *Official Prestige Partner* Asian Paragames 2018, Bank BRI turut memeriahkan Parade Momo yang digelar oleh Indonesia Asian Para Games Official Commitee (INAPGOC) di Monumen Nasional. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Konsumer Bank BRI Handayani, Ketua Indonesia Asian Para Games *Official Committee* 2018 (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari, dan *Chief Executive Officer* (CEO) *Asian Paralympic Committee* (APC) Tarek Souei.

Peristiwa Penting

25 SEPTEMBER

BRI Buka Gerai *Money Changer* Satu Satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo

Bank BRI meresmikan pembukaan gerai *money changer* terbarunya yang terletak di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seremoni pembukaan tersebut diselenggarakan di Terminal Kedatangan Bandara Labuan Bajo pada tanggal 25 September 2018 dengan dihadiri oleh Wakil Pemimpin Wilayah BRI Denpasar Dwi Harsono dan Kepala Bandara Komodo Djarot Subianto. Dengan peresmian ini, Bank BRI menjadi satu satunya institusi keuangan yang menyediakan layanan *Money Changer* di area Bandara Komodo Labuan Bajo.

2 OKTOBER

BRI Berikan Bantuan Bagi Korban Bencana di Palu dan Donggala

Bank BRI secara aktif terus mengirimkan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Tercatat BRI telah menyalurkan bantuan senilai Rp2 miliar yang terdiri dari sembako, obat obatan, tenda darurat, terpal, pakaian, makanan dan minuman cepat saji serta perlengkapan harian lainnya. Bank BRI juga membuka dapur umum untuk korban gempa dan tsunami di Palu yang berlokasi di Kantor Cabang BRI Palu.

5 OKTOBER

BRI Turut Promosikan Kopi Indonesia dan Bantu Donasi lewat Program '*a Cup for Solidarity*'

Dalam perhelatan IMF-WB Annual Meeting Forum Bank BRI hadir dengan *campaign "a Cup For Solidarity"* by BRIKopi dengan tujuan mempromosikan kopi Indonesia kepada dunia internasional khususnya para delegasi peserta IMF-WB Annual Meeting Forum yang disajikan oleh barista-barista terbaik Indonesia. Hal ini juga disambut baik oleh Presiden Jokowi dan jajaran Menterinya yang menyempatkan mampir dan menikmati kopi tersebut. Setiap gelas yang dinikmati akan dikonversi oleh Bank BRI menjadi Rp100.000 dan dalam kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan sebesar kurang lebih Rp1,5 Miliar untuk disalurkan ke korban bencana Lombok dan Palu.

13 OKTOBER

Global Finance Nobatkan BRI Sebagai Bank Terbaik di Indonesia Selama 3 Tahun Berturut turut

Bank BRI dinobatkan sebagai Bank terbaik di Indonesia versi Majalah Global Finance. Dengan demikian hal ini menjadikan Bank BRI sebagai Bank terbaik di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut.

Peristiwa Penting

13 OKTOBER

Jokowi Resmi Beri Bonus Atlet Asian Para Games 2018 Lewat Tabungan BritAma Bisnis

Bank BRI juga menjadi *official prestige partner* untuk penyelenggaraan Asian Paragames 2018 dan kembali dipercaya untuk menyalurkan bonus bagi para atlet Indonesia yang berprestasi di Asian Paragames.

11 NOVEMBER

BRI Dukung Keberhasilan Program Perhutanan Sosial di Jawa Barat

Bank BRI terus mendukung keberhasilan program pemerintah terkait distribusi akses lahan perhutanan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dengan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Bank BRI bersama HIMBARA mendukung penuh penyaluran program Perhutanan Sosial di Taman Hutan Rakyat, Bandung, Jawa Barat.

29 OKTOBER

BRI Promosikan Kopi Indonesia Sekaligus Berdonasi untuk Konservasi Laut di Acara *Our Ocean Conference* (OOC) 2018

Campaign "*a Cup for Solidarity*" by BRIKopi terus berlanjut, kali ini di ajang *Our Ocean Conference* di Bali. Bank BRI berhasil mengkonversi tiap gelas yang dinikmati oleh para delegasi di acara tersebut sebesar Rp150 juta yang disalurkan kepada Pandu Laut untuk pelestarian laut Indonesia.

21 NOVEMBER

Rayakan HUT BRI ke 123 BRIRUN 2018 Solo Series Diikuti 10.000 Peserta

Bank BRI mengadakan BRI Run 2018 Solo Series yang melibatkan 10.000 *runners* sebagai rangkaian kegiatan HUT BRI yang ke-123. Hal ini menjadikan BRI Run 2018 Solo Series sebagai *The Biggest Free Running Event in* Indonesia.

29 OKTOBER

Rumah Kreatif BUMN Milik BRI Dinobatkan Sebagai RKB Terbaik

Menteri BUMN Rini M Soemarno menyerahkan penghargaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Terbaik kepada Direktur Utama Bank BRI Suprajarto. Rumah Kreatif BUMN (RKB) milik Bank BRI dinobatkan sebagai RKB Terbaik oleh Kementerian BUMN pada penganugerahan BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) Awards 2018. Apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Bank BRI yang secara konsisten melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM melalui RKB.

Peristiwa Penting

22 NOVEMBER

BRI Sabet Penghargaan dari Pemerintah sebagai Bank Penyalur KUR Terbaik

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memberikan penghargaan kepada Bank BRI sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbaik I tahun 2018. Disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga kepada Direktur Mikro dan Kecil Bank BRI Priyastomo di Jakarta.

28 NOVEMBER

Bank Indonesia Nobatkan BRI Sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik

Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada BRI sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018 yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Presiden RI Joko Widodo, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Direktur Utama BRI Suprajarto.

16 DESEMBER

Rayakan HUT BRI ke-123, 65.000 Keluarga Besar BRI Ikuti BRIFFEST 2018

Bank BRI menutup rangkaian acara HUT BRI ke-123 dengan mengadakan BRI *Family Festival* 2018 (BRIFFEST 2018) serentak di seluruh Indonesia sebagai wujud apresiasi Bank BRI kepada seluruh pekerja beserta keluarga. BRIFFEST 2018 wilayah Jabodetabek diadakan di Jakarta Convention Center dengan melibatkan lebih dari 65.000 peserta.

BUMN
Hadir untuk negeri

BANK BRI

KEBEBASAN BERTRANSAKSI

SELALU ADA DI JARIMU

Kemana pun, di mana pun dan kapan pun mobile banking BRI selalu hadir memberi kemudahan di setiap transaksi dengan layanan perbankan tanpa batas menggunakan jarimu.

e-Banking BRI

Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman

CONTACT **BRI 14017 / 1500017** | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

MOBILE BRI Banking

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Manajemen

FOKUS DAN ASPIRASI BRI PADA TAHUN 2018 ADALAH UNTUK MENJADI PENYEDIA LAYANAN UMKM TERDEPAN DAN MERAIH KEUNGGULAN OPERASIONAL MELALUI PERBANKAN DIGITAL. KONSISTEN DENGAN HAL TERSEBUT, BRI TERUS MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DI SEKTOR UMKM YANG DIDUKUNG TEKNOLOGI TERKINI. BRI TERUS MEMPROMOSIKAN INKLUSI KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO. SEBAGAI HASILNYA, BRI MAMPU MENYALURKAN KREDIT MKM SENILAI RP611,67 TRILIUN UNTUK 11,36 JUTA NASABAH DI SELURUH INDONESIA. BRI JUGA TERUS MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH SEJALAN DENGAN PERANANNYA SEBAGAI SALAH SATU AGEN PEMBANGUNAN.

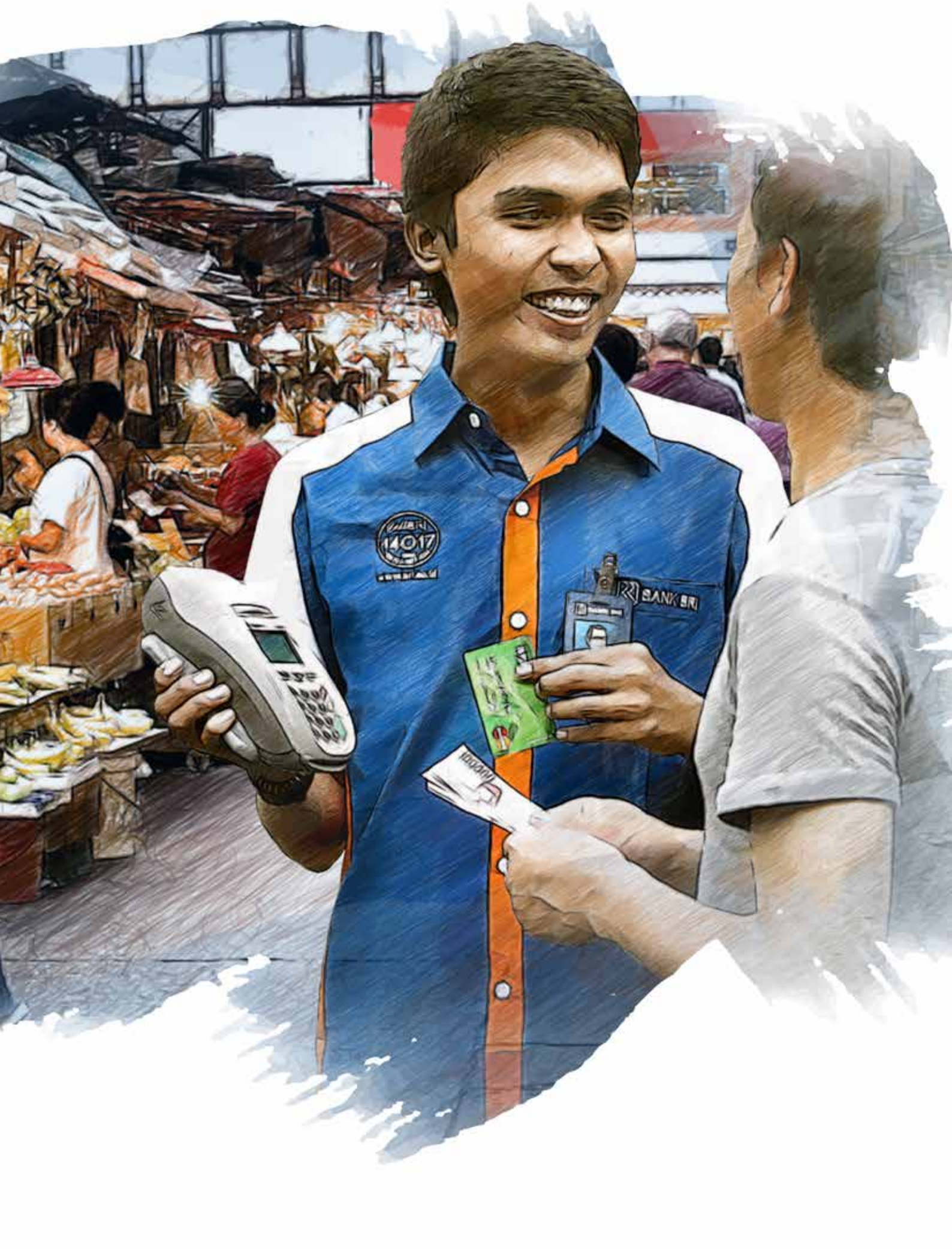
1407

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga kita mampu menyelesaikan perjalanan di tahun 2018 yang penuh dinamika ini, dengan capaian hasil yang lebih baik dan membanggakan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Perseroan", berhasil menorehkan prestasinya, tidak saja dilihat dari perspektif bisnis perbankan tetapi juga dalam menjalankan peran sebagai *agent of development* sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi semua *stakeholder*. Kami yakin visi yang sudah dicanangkan menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent*, semakin cepat terwujud.

SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2018, PERSEROAN TELAH MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA LEBIH DARI 3,9 JUTA DEBITUR SENILAI RP80,2 TRILIUN, SEBANYAK 3 JUTA KARTU TANI, PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KEPADA SEKITAR 3,8 JUTA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KEPADA 2.6 JUTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) SERTA MENGELOLA BUMDES DI 125 KOTA/KABUPATEN. PERSEROAN JUGA MENGELOLA 53 RUMAH KREATIF BUMN (RKB) BRI DENGAN 302.942 USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BINAAN.

Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Laporan Dewan Komisaris

Aset Perseroan secara konsolidasian mencapai Rp1.296,99 triliun di akhir tahun 2018 telah menempatkan Peseroan menjadi konglomerasi keuangan terbesar, juga perolehan laba yang mencapai Rp32,42 triliun adalah yang tertinggi dan berturut-turut selama 13 tahun terakhir. Perseroan dapat memelihara likuiditas pada tingkat yang aman sepanjang tahun 2018 dan mampu mengelola kualitas kredit dengan *non-performing loan (NPL)* sebesar 2,27%. Modal Perseroan juga semakin kuat yang tercermin pada rasio kecukupan modal *(Capital Adequacy Ratio)* mencapai 21,21%, jauh di atas ketentuan regulator. Secara umum, kinerja keuangan Perseroan tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan/atau menunjukkan pertumbuhan yang positif di semua indikator utama.

Peran serta Perseroan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, baik dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak-pihak lainnya, patut dibanggakan. Setidak-tidaknya sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada lebih dari 3,9 juta debitur senilai Rp80,2 triliun, sebanyak 3 juta Kartu Tani, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sekitar 3,8 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 2.6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mengelola BUMDES di 125 kota/kabupaten. Perseroan juga mengelola 53 Rumah Kreatif BUMN (RKB) BRI dengan 302.942 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan. Melalui RKB BRI, Perseroan dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan menginisiasi BRIincubator untuk melakukan pendampingan, menciptakan dan memfasilitasi UMKM menjadi *well literate* dan naik kelas. Selain itu, juga aktif dalam program *branchless banking* Bank Indonesia dan *financial inclusion* Otoritas Jasa Keuangan, dengan membuka 401.550 agen BRILink yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sejauh ini, Perseroan juga telah melaksanakan tanggung jawab sosial *(Corporate Social Responsibility)* dengan konsisten dan berkesinambungan, baik dalam kegiatan maupun anggaran. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 dalam rangka pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui tujuh klaster program bina lingkungan yaitu Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Membangun, Indonesia Takwa, Indonesia Lestari, dan Indonesia Sejahtera. Program bina lingkungan BRI Peduli merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (*SDGs) Indonesia.

Perseroan dalam kapasitas sebagai entitas utama konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia, melalui perencanaan bisnis yang tepat dan membangun sinergi di semua aspek yang disertai dengan pengawasan yang efektif, berhasil membawa kinerja semua entitas perusahaan anak menjadi lebih baik. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan tujuh persetujuan aksi korporasi yang meliputi tambahan penyertaan modal pada perusahaan anak, akuisisi perusahaan lain dan rencana strategis lainnya. Aksi korporasi berupa akuisisi dan menjadi pemegang saham mayoritas PT. Danareksa Sekuritas dan PT. BRI Ventura Investama menjadikan Perseroan memiliki tujuh perusahaan anak sehingga konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia semakin lengkap dalam menyediakan layanan jasa keuangan. Dengan demikian, harapan menjadi *financial integrated solution* bagi semua segmen nasabah dengan bermacam ragam kebutuhan layanan keuangan dapat dipenuhi dengan lebih mudah, cepat dan efisien.

Selama tahun 2018, Perseroan menerbitkan berbagai produk dan layanan jasa baru, memperkaya *bussiness model* dan menyempurnakan *bussiness process*, baik dalam rangka mempertahankan *existing customer* maupun menyasar *new customer*, termasuk mereka yang tergolong milenial. Tidak saja terbatas dalam konteks Perseroan sebagai lembaga intermediasi tetapi juga penyedia layanan jasa sistem

pembayaran yang handal, terpercaya dan efisien. Didukung dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang mengarah pada *digital banking* pada semua produk dan aktivitas akan meningkatkan daya saing Perseroan dalam menghadapi tuntutan yang semakin kompleks dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dewasa ini. Disertai perbaikan pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan internalisasi nilai-nilai utama Perseroan *(Integrity, Professionalism, Trust, Innovation* dan *Customer Centric)*, kami yakin bahwa Perseroan akan selalu dapat memenangkan persaingan dan tumbuh secara berkelanjutan. Keyakinan kami semakin bertambah dengan adanya pengakuan dan pemberian penghargaan terhadap prestasi dan capaian kinerja Perseroan oleh berbagai lembaga yang kredibel, baik lembaga domestik maupun internasional.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanan pengawasan aktif terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawabannya, Dewan Komisaris menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib kerja, yang selalu disesuaikan dengan perubahan ketentuan dan tuntutan yang dihadapi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris, yaitu dalam rangka memperoleh informasi, melakukan analisis dan evaluasi, mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi, dilakukan secara langsung melalui forum rapat dan kunjungan ke unit kerja-unit kerja Perseroan serta secara tidak langsung melalui laporan-laporan yang diterima. Selama tahun 2018, diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur terkait, dan rapat-rapat Dewan Komisaris dengan pejabat Perseroan tertentu dan pihak-pihak terkait lainnya. Kunjungan ke unit kerja, juga dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung implementasi kebijakan di tataran operasional dan permasalahannya, yang mencakup unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Audit Intern Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit dan Agen BRILink serta perusahaan anak. Laporan-laporan yang diterima Dewan Komisaris bersumber dari internal Perseroan dan dari pihak eksternal, termasuk surat dari regulator, otoritas dan masyarakat.

Materi yang menjadi obyek pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2018, mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan kinerja keuangan, *supporting activities*, penerapan prinsip kahati-hatian dan transparansi, pengelolaan risiko, penerapan *good corporate governance*, pelaksanaan fungsi kepatuhan, pengendalian intern, startegi anti *fraud*, pengendalian intern dan *whistleblowing system*. Sementara itu, pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam kapasitas Perseroan sebagai entitas utama konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia, utamanya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengendalian Risiko

Capaian bisnis, peran sebagai *agent of development* dan tanggungjawab sosial sebagaimana tersebut di atas, pada waktu yang bersamaan dibarengi dengan keberhasilan mengelola risiko Perseroan. Hasil penilaian sendiri *(self assessment)* risiko dalam seluruh aktivitas fungsional Perseroan pada triwulan IV tahun 2018 tidak berbeda dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya yaitu peringkat komposit 2 atau *low to moderate*, merupakan gabungan dari faktor risiko inheren dinilai *low to moderate* dan faktor KPMR dinilai *satisfactory*.

Laporan Dewan Komisaris

Pengelolaan risiko Perseroan sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan juga mengadopsi *best practice* yang didukung dengan sistem informasi manajemen risiko yang memadai sehingga ketepatan penilaian dapat diyakini, baik faktor risiko inheren maupun faktor kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR). Parameter dan limit yang ditetapkan pada setiap jenis risiko pada tahun 2018 sudah cukup mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terukur serta dilakukan penyempurnaan beberapa aspek KPMR. Penetapan risiko dibahas dan ditetapkan dalam forum *Risk Management Committee*, yang diselenggarakan setiap triwulan dan disampaikan dalam forum rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Direktur terkait.

Good Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG),* yang terdiri dari *governance structure, governance process* dan *governance outcome* telah menjamin dan membuktikan terselenggaranya dengan baik *day to day operation* atas 11 (sebelas) faktor GCG sebagaimana ketentuan yang diatur oleh *regulator.* Perseroan juga mengadopsi prinsip dan standar *best practice* penerapan GCG yang berlaku secara umum, termasuk perbankan seperti *Principles of Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Co-Operational Development (OECD), ASEAN Corporate Governance Scoredcard (ACGS)* serta Pedoman Umum GCG Indonesia dan Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan dalam rangka menyempurnakan kebijakan dan memastikan penerapan GCG sejalan dengan tuntutan perubahan dan tantangan yang dihadapi Perseroan, termasuk bekerjasama dengan ACGS untuk memperoleh penilaian dan masukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pembahasan mengenai kualitas GCG tidak hanya sebatas di lingkup Perseroan tetapi secara berkala juga dilakukan bersama dengan perusahaan anak dalam konteks konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia, yang diikuti dengan pengawasan oleh entitas utama.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Memastikan bahwa kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan atas setiap aktivitas fungsional Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan regulator senantiasa menjadi komitmen Perseroan. Dewan Komisaris bersama Direksi terus mendorong pelaksanaan fungsi kepatuhan semakin baik di semua level organisasi dan fungsi, antara lain dengan membangun dan menyempurnakan sistem dan sosialisasi. Kesalahan pelaporan kepada regulator yang berdampak pada pengenaan sanksi kewajiban membayar, sebagai akibat *human error* dan kelemahan sistem, menjadi salah satu yang harus dihindari.

Pengendalian Intern

First line of defence, second line of defence dan *third line of defence* dalam kerangka pengendalian intern Perseroan, secara umum sudah berfungsi efektif memberikan keyakinan yang memadai. Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan fungsi ini, yaitu unit kerja bisnis, operasional dan *support* telah dibekali pedoman kerja dan dukungan sistem, unit kerja pengelola risiko telah melakukan pemantauan dan memberikan masukan serta unit kerja pangawasan intern telah melakukan pengawasan dan audit dengan baik.

Temuan audit, baik yang dilakukan oleh otoritas pengawas, akuntan publik maupun Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan tindak lanjut oleh Perseroan, dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala. Temuan audit yang belum selesai ditindak lanjuti, terus dipantau oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit agar dapat diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan rekomendasi auditor. Temuan audit tersebut juga menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kesesuian dan efektivitas pelaksanaan audit serta digunakan sebagai dasar menetapkan Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan mengaudit Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Strategi Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi

Selama setahun terakhir, *fraud* dilakukan oleh oknum internal Perseroan, eksternal dan kerjasama keduanya dengan modus yang semakin bervariasi, baik dengan cara konvensional maupun dengan bantuan sarana teknologi informasi dan digital. Frekuensi kejadian dan kerugian yang ditimbulkan menjadi perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dalam kaitan dengan risiko reputasi dan menjaga kepercayaan masyarakat, mengingat pihak yang disasar dan dirugikan adalah Perseroan dan nasabah Perseroan.

Upaya pengendalian *fraud* terus dilakukan melalui perbaikan 4 (empat) pilar strategi yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Sistem deteksi dini dengan yang dikembangkan Perseroan dengan perangkat teknologi sistem informasi dan berbagai metodologi pendekatan, yang pada intinya mengarah pada pengetahuan mengenai profil pekerja Perseroan dan nasabah yang lengkap dan akurat dalam prinsip *Know Your Employee* dan *Know Your Customer*, menjadi sangat penting. Dalam waktu bersamaan *law enforcement* disertai dengan *punishment* yang tegas kepada mereka pelaku *fraud* yang sudah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan saat ini, diharapkan dapat mengarah pada *zero fraud*.

Perseroan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perseroan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, salah satunya dengan menyampaikan surat pengumuman larangan memberikan dan menerima gratifikasi kepada seluruh pengurus dan pekerja Perseroan menjelang hari raya keagamaan. Selanjutnya, untuk mendukung hal ini, Perseroan telah membentuk unit kerja Unit Pengendalian Gratifikasi BRI yang memberikan layanan informasi dan pelaporan gratifikasi.

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Pengelolaan *whistleblowing system* Perseroan telah ada sejak tahun 2013 dan terus diperbaiki sistemnya agar efektif sebagai salah satu sarana dalam mendukung terselenggaranya *governance* Perseroan yang baik. Semua pihak, baik internal Perseroan maupun ekternal dapat menggunakan saluran komunikasi yang disediakan yaitu telepon, *sms, e-mail* dan *website* Perseroan untuk menyampaikan informasi kepada pengelola *whistleblowing system,* dalam hal ini adalah Satuan Kerja Audit Intern.

Pandangan atas pengelolaan *Whistleblowig system* di Perusahaan telah dilaksanakan secara *governance* secara independen. Dalam pengelolaannya senantiasa dilakukan evaluasi sehingga penerapannya semakin meningkat.

Setiap triwulan, Dewan Komisaris memantau untuk memastikan pengelolaan *whistleblowing system* berjalan efektif, termasuk tindak lanjutnya, melalui laporan dan pembahasan dengan Satuan Kerja Audit Intern. Seluruh informasi yang diterima melalui *whistleblowing system* selama tahun 2018 telah ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, termasuk informasi yang tidak mengandung kebenaran.

Rencana Kerja Tahun 2019

Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Perseroan tahun 2019 yang disusun secara realistis dengan berdasarkan asumsi makro yang relevan dan mengacu pada angka-angka perkiraan yang dikeluarkan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris optimis target kinerja keuangan dan non-keuangan akan tercapai mengingat secara historis Perseroan selalu dapat mencapai target yang ditetapkan dan adanya inisiatif strategis di setiap aktivitas fungsional guna mendukung pencapaian target tersebut.

Inisiatif strategis tersebut dibangun sesuai dengan *destination statement* yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya dengan tahapan yang *in-line* dengan *corporate plan* dalam kerangka mencapai visi menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent* di tahun 2022. *Destination statement* tahun 2019 adalah *Leading Consumer Banking in Indonesia* sangat relevan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi serta harapan *stakeholders*, termasuk peran Perseroan sebagai *agent of development*.

Laporan Dewan Komisaris

Rekomendasi

Berdasarkan capaian dan prestasi pada tahun 2018 dan target yang dtetapkan dalam Rencana Kerja Perseroan tahun 2019 serta memperhatikan predikasi kondisi perekonomian dan tantangan berupa tuntutan *stakeholders* yang semakin kompleks dan perubahan lingkungan yang cepat, Dewan Komisaris menengarai masih cukup ruang untuk peningkatan kinerja Perseroan menjadi lebih baik lagi, antara lain :

- Terus berinovasi mengembangkan *bussiness model* dan *bussiness process* disertai penguatan nilai-nilai utama Perseroan agar mampu menjawab tantangan dan memberikan solusi di era *digital*;
- Mendorong peningkatan aktivitas *transactional banking* utamanya yang berbasis *digital,* yang pada gilirannya akan memperbesar pangsa *current account-saving account (CASA)* sehinga menurunkan *cost of fund* dan meningkatkan *fee based income;*
- Mengurangi *non-performing loan*, lebih selektif dalam restrukturisasi kredit dan meningkatkan *recovery* kredit yang sudah dihapusbuku;
- Meningkatkan sinergi bisnis dengan perusahaan anak dan antar perusahaan anak sehingga kontribusi perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia semakin meningkat; dan
- Mengendalikan risiko operasional dan risiko kredit.
- Menjadikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) semakin efektif dan optimal dalam membawa kelompok sasaran naik kelas.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 22 Maret 2018, memutuskan menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris dan pengangkatan Saudara Hadiyanto sebagai Komisaris Perseroan. Selanjutnya, Saudara Jeffry J. Wurangian mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris Perseroan karena menjadi calon tetap anggota legislatif, yang berlaku efektif sejak diterimanya surat pengunduran diri oleh Perseroan pada tanggal 20 September 2018.

Dengan demikian susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2018 terdiri dari Komisaris Utama/Komisaris Independen, Wakil Komisaris Utama, dua orang Komisaris dan empat orang Komisaris Independen, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Penutup

Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi atas capaian kinerja Perseroan sehingga menjadi yang terbesar dan berkontribusi dalam perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Bisnis Perseroan dan konglomerasi keuangan Bank Rakyat Indonesia mampu tumbuh membanggakan di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang moderat dan ekonomi global yang tumbuh melandai disertai ketidak pastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Direksi atas kerjasama yang terjalin sangat baik selama ini.

Kepada semua pekerja Perseroan, dari Kantor Pusat sampai unit kerja terkecil yang berlokasi di pelosok, di daerah terpencil dan di perbatasan, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya disertai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama ini dalam memajukan Perseroan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ungkapan terimakasih juga, saya sampaikan kepada semua *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan dan kerjasama yang baik dengan Perseroan.

Jakarta, 9 April 2019

Atas Nama Dewan Komisaris

Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama/Independen

DEWAN KOMISARIS

1. **A. Sonny Keraf**
Komisaris Independen

2. **Andrinof A. Chaniago**
Komisaris Utama/Komisaris Independen

3. **Hadiyanto**
Komisaris

4. **Rofikoh Rokhim**
Komisaris Independen

Dewan Komisaris

5. **A. Fuad Rahmany**
Komisaris Independen

6. **Gatot Trihargo**
Wakil Komisaris Utama/Komisaris

7. **Nicolaus Teguh Budi Harjanto**
Komisaris

8. **Mahmud**
Komisaris Independen

Suprajarto
Direktur Utama

LAPORAN DIREKSI

FOKUS DAN ASPIRASI BRI PADA TAHUN 2018 ADALAH UNTUK MENJADI PENYEDIA LAYANAN UMKM TERDEPAN DAN MERAIH KEUNGGULAN OPERASIONAL MELALUI PERBANKAN DIGITAL. KONSISTEN DENGAN HAL TERSEBUT, BRI TERUS MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DI SEKTOR UMKM YANG DIDUKUNG TEKNOLOGI TERKINI. BRI TERUS MEMPROMOSIKAN INKLUSI KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO. SEBAGAI HASILNYA, BRI MAMPU MENYALURKAN KREDIT MKM SENILAI RP611,67 TRILIUN UNTUK 11,36 JUTA NASABAH DI SELURUH INDONESIA. BRI JUGA TERUS MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH SEJALAN DENGAN PERANANNYA SEBAGAI SALAH SATU AGEN PEMBANGUNAN.

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan lindungan yang diberikan-Nya sepanjang tahun 2018. Kami bangga bahwa segenap upaya BRI pada tahun itu berhasil membuahkan kinerja positif dan berkelanjutan sebagaimana terlihat pada indikator pertumbuhan usaha secara keseluruhan. BRI juga terus memantapkan perannya sebagai pemberdaya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Indonesia melalui berbagai inisiatif yang dijalankannya. Selanjutnya, perkenankan kami menyajikan rangkuman kinerja BRI pada tahun 2018.

KONDISI MAKRO EKONOMI

Kondisi Ekonomi Global di tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kebijakan normalisasi suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) serta *trade conflict* antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Membaiknya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya target inflasi di Amerika Serikat mendorong Bank Sentral Amerika Serikat terus melanjutkan kebijakan normalisasi suku bunga acuan dengan menaikkan suku bunga sebanyak empat kali menjadi 2,25-2,5%. Sementara itu, kebijakan proteksionisme perdagangan yang diterapkan oleh AS pada pertengahan tahun 2018 yang diikuti dengan penerapan kebijakan yang sama oleh Tiongkok menyebabkan tensi perang dagang semakin tinggi.

Laporan Direksi

Di tengah meningkatnya volatilitas ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu mempertahankan tren perbaikan pertumbuhan. Terjaganya daya beli dan investasi yang masing-masing tumbuh 5,05% dan 6,67% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2018 menjadi 5,17% (yoy), merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tingkat inflasi turut terkendali pada tingkat 3,13%, yakni sesuai dengan target pemerintah pada kisaran 3,5% ± 1%. Sementara itu, realisasi pendapatan negara tahun 2018 adalah senilai Rp1.924,3 triliun atau mencapai 102,52% terhadap APBN 2018 dan defisit APBN 2018 turun menjadi 1,76% terhadap PDB dari 2,51% di tahun 2017.

Ke depan, dampak perang dagang masih menjadi salah satu risiko global yang harus menjadi perhatian dampaknya, namun di sisi lain ketidakpastian pasar keuangan sedikit mereda setelah arah kebijakan moneter The Fed AS lebih *dovish* dengan menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR). Untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2019, diperkirakan relatif lebih baik, atau mampu tumbuh sekitar 5,1-5,3%, dengan masih ditopang oleh konsumsi dan investasi.

KONDISI PERBANKAN NASIONAL

Selama tahun 2018, kondisi industri perbankan tercatat cukup dinamis. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuannya, BI 7 Day Reverse Repo Rate, 6 (enam) kali dengan total kenaikan 175 bps. Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah *pre-emptive* dan *ahead of the curve* Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mengantisipasi tren kenaikan suku bunga AS serta meningkatnya risiko di pasar keuangan global.

Meskipun suku bunga acuan meningkat, terjaganya daya beli dan investasi mampu meningkatkan pertumbuhan kredit Industri. Pada Tahun 2018, pertumbuhan kredit industri perbankan dapat mencapai 11,75% (yoy) meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 8,24% (yoy).

Disisi lain, terjadi perlambatan penghimpunan dana. Pada akhir 2018, pertumbuhan DPK tercatat hanya 6,45% atau lebih lambat bila dibandingkan pertumbuhan DPK tahun 2017 yang sebesar 9,35%. Dengan pertumbuhan kredit diatas pertumbuhan DPK, rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) tercatat naik menjadi 94,04% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 90,04%.

Stabilitas industri perbankan terjaga, terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) yang berada pada level sehat 22,97% dan rasio kredit bermasalah (NPL) menurun dari 2,59% pada tahun 2017 ke 2,37% pada tahun 2018. Proses bisnis perbankan berjalan dengan lebih efisien, terlihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang membaik, dari sebelumnya 78,64% pada tahun 2017 menjadi 77,86% pada tahun 2018.

ULASAN STRATEGI DAN KINERJA BRI

Pengembangan bisnis BRI berpedoman pada strategi jangka panjang untuk setiap segmen usaha dan perusahaan anak. BRI berfokus menumbuhkan dan mempertahankan pangsa pasar di segmen mikro, menjadi yang terdepan sebagai penyedia *salary-based loan* di segmen konsumer, menargetkan raihan minimal 21% pangsa pasar di segmen ritel dan menengah, meningkatkan profitabilitas segmen korporasi serta terus mendorong kontribusi perusahaan anak. Secara spesifik, fokus tema pada tahun 2018 adalah menjadi Bank penyedia layanan UMKM terdepan dan meraih keunggulan operasional melalui perbankan digital.

Secara keseluruhan, BRI mencatat pertumbuhan kinerja konsolidasi yang baik pada berbagai indikator: secara *year-on-year* (yoy), pendapatan bunga dan syariah bersih tumbuh 6,37% menjadi Rp77,67 triliun di tahun 2018 dari Rp73,02 triliun di tahun 2017, pendapatan operasional lainnya tumbuh 21,56% menjadi Rp23,43 triliun dari Rp19,27 triliun sehingga laba operasional BRI tumbuh 13,36% menjadi Rp41,73 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp36,81 triliun. Dengan efisiensi BRI yang semakin baik, biaya operasional lainnya tercatat tumbuh moderate 8,74% di tahun 2018 menjadi Rp41,99 triliun

dari tahun sebelumnya Rp38,61triliun. Kualitas kredit BRI yang terjaga pada 2,14% menyebabkan BRI mencatatkan kenaikan biaya provisi yang cukup rendah 4,7% menjadi sebesar Rp17,79 triliun, sehingga laba bersih tumbuh 11,61% menjadi Rp32,42 triliun dari Rp29,05 triliun.

Dari sisi neraca BRI, total aset tumbuh 15,03% *year-on-year* (yoy) menjadi Rp1.296,9 triliun dari Rp1.127,45 triliun yang didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 14,1% dari Rp739,34 triliun menjadi Rp843,6 triliun. Dari sisi pengumpulan Dana Pihak Ketiga, tercatat simpanan tumbuh 12,19% menjadi Rp944,27 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp841,66 triliun, sedangkan ekuitas BRI mampu tumbuh 10,28% yoy menjadi Rp185,28 triliun dari Rp168,01triliun di tahun 2017.

Dibandingkan dengan industri, kinerja BRI (bank saja) tercatat unggul dalam beberapa parameter utama, seperti pertumbuhan penyaluran kredit, kualitas kredit (*gross* NPL), penghimpunan dana pihak ketiga, serta peningkatan efisiensi operasional, yang terlihat dari membaiknya rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Dalam hal kinerja per segmen usaha, konsisten dengan kekuatan BRI di segmen UMKM terutama segmen bisnis mikro, kredit mikro BRI yang disalurkan kepada sekitar 10 juta nasabah mikro tercatat tumbuh 15,33% yoy dengan outstanding kredit mencapai Rp291,62 triliun dari sebelumnya tercatat sebesar Rp252,85 triliun. Pertumbuhan kredit mikro BRI ini didukung dengan keberhasilan BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2018 sebesar Rp80,18 triliun kepada 3,94 juta nasabah KUR sehingga *outstanding* KUR BRI pada akhir 2018 tercatat sebesar Rp77,69 triliun. Pencapaian tersebut menjadikan BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia dengan portofolio 64,9% dari total target penyaluran KUR nasional 2018 sebesar Rp123,56 triliun.

Di segmen ritel, kredit BRI tercatat tumbuh 18,27% menjadi sebesar Rp320,05 triliun dari Rp270,6 triliun. Ekspansi bisnis di segmen ini didukung oleh pertumbuhan kredit ritel komersial serta kredit konsumer. Tercatat kredit kepemilikan rumah tumbuh 22,6% dari Rp22,12 triliun menjadi Rp27,12 triliun. Dari segmen ini, BRI juga mendapatkan dana pihak ketiga ritel sebesar Rp341,33 triliun atau naik 12,12% dan *fee-based income* dari transaksi ritel senilai Rp6,81 triliun.

Selanjutnya, pada segmen korporasi, BRI mencatatkan *outstanding* pinjaman senilai Rp192,68 triliun meningkat 4,4% dari posisi Rp184,55 pada tahun sebelumnya. Untuk segmen ini, BRI memiliki target berupa peningkatan profitabilitas, dengan cara semakin memperluas cakupan layanan perbankan yang dapat dinikmati oleh nasabah korporasi BRI. Hasil dari strategi ini dapat dilihat dari meningkatnya *fee-based income* yang berasal dari bisnis korporasi yang mencapai Rp2,36 triliun meningkat 39,1% (yoy) dan secara langsung mendukung pertumbuhan dana murah, terutama giro dari nasabah korporasi BRI.

Sesuai dengan tema strategi tahun 2018, pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan infrastruktur teknologi informasi yang dikembangkan dan diterapkan oleh BRI. Aplikasi seperti BRISPOT Mikro yang telah diterapkan di seluruh unit kerja mikro terbukti mempercepat waktu proses pelayanan kredit mikro dari sebelumnya membutuhkan waktu 3-5 hari menjadi hanya 1-2 hari. Selain itu, pengembangan aplikasi BRILink Web secara signifikan mendorong ekspansi *branchless banking* BRI, tercatat jumlah Agen BRILink meningkat 121.800 agen selama tahun 2018, sehingga pada akhir tahun 2018 BRI telah mempunyai 401.550 ribu Agen BRILink.

Optimalisasi dari jumlah data nasabah dan transaksi perbankan yang sangat besar yang dimiliki BRI juga telah dilakukan melalui teknologi *big data*. Terlebih lagi, operasional *big data* BRI saat ini sudah dilengkapi dengan sertifikat ISO 27001, sehingga diharapkan proses pengolahan informasi akan lebih terukur, *secure* dan *accountable*. *Use cases* yang telah dimiliki seperti *Fraud Detection System, Credit Risk Scoring* serta aplikasi *Merchant Assesment* secara intensif telah digunakan untuk mendukung operasional BRI.

Dukungan BRI terhadap Program Pemerintah

Dengan keberadaan BRI yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, menjadikan BRI sebagai salah satu pelaku utama dalam memberikan dukungan pada pemberdayaan UMKM serta mendorong ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilihat dari peranan BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2015, yang mencapai Rp235,45 triliun kepada 12,56 juta pelaku UMKM. Dukungan BRI terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan, juga ditunjukkan dengan keberhasilan meningkatkan kapasitas ekonomi para debitur KUR. Secara kumulatif untuk segmen KUR Mikro,

Laporan Direksi

kami mencatat terdapat 2,15 juta debitur yang berhasil naik kelas dengan total pinjaman mencapai Rp52,7 triliun. BRI selalu berkomitmen untuk turut mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini tidak saja dapat dilihat dari infrastruktur >9.600 jaringan kerja BRI yang didukung oleh 3 (tiga) buah Teras Kapal BRI untuk melayani nasabah di tempat-tempat terpencil, seperti di Kep. Seribu, Labuan Bajo dan Halmahera Selatan serta 371 unit kerja BRI yang terletak di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia namun juga dengan dukungan 401.550 agen BRILink yang konsisten bekerja membuka akses layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia di mana pun mereka berada. Sepanjang tahun 2018, tercatat transaksi agen BRILink menembus angka Rp512,69 triliun dengan 378,72 juta transaksi finansial. Tingginya nilai transaksi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap keberadaan agen bank di sekitarnya.

Selain itu, guna mendekatkan akses keuangan bagi petani, BRI telah menyalurkan lebih dari 3,03 juta kartu tani. Selain itu BRI juga menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan, dimana Tahap 1-4 telah selesai 100% dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 3,85 juta. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1-12 telah selesai 100%, disalurkan kepada 2,67 juta penerima.

Dengan komitmennya untuk mengembangkan segmen UMKM, secara aktif BRI telah mendirikan 53 Rumah Kreatif BUMN (RKB) dengan anggota binaan sebanyak 302.942 pelaku UMKM. Bahkan BRI bekerjasama dengan Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perdagangan telah mengembangkan Sistem Aplikasi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) serta kartu *co-branding* IUMK, yang mempunyai fungsi sebagai ID pelaku IUMK. Sampai dengan akhir tahun 2018, BRI telah memberikan pinjaman kepada 60.367 pemegang kartu IUMK dengan total *outstanding* Rp1,32 triliun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) binaan BRI telah tersebar di 125 kota/kabupaten dengan jumlah rekening operasional BUMDes mencapai 17.545 rekening. Sebagai upaya untuk menghadirkan *One Stop Services* di Desa, Bank BRI bersinergi dengan BUMN lain mendirikan BUMN *Shop*. BUMN *Shop* merupakan sinergi BUMN dalam usaha peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, dimana BUMDes akan dijadikan agen BRILink, agen RPK Bulog, Pertashop, agen pupuk dan *Wifi Corner*.

Kinerja Perusahaan Anak

Pada tahun 2018, profitabilitas Entitas Anak mencapai Rp716,51 triliun meningkat 24,44% dibanding tahun 2017 sebesar Rp575,81 triliun.

- BRIsyariah membukukan laba bersih sebesar Rp106,59 miliar atau naik sebesar 5,45% yoy dari tahun 2017 sebesar Rp101,09 miliar.
- BRI Agro membukukan peningkatan laba bersih sebesar Rp204,21 miliar atau naik sebesar 45,2% yoy dari tahun 2017 sebesar Rp140,49 miliar.
- BRI Life membukukan laba bersih sebesar Rp600,34 miliar atau meningkat 82,91% dari tahun 2017 yang sebesar Rp328,22 miliar.
- BRI Finance membukukan laba bersih sebesar Rp62,86 miliar atau meningkat 25,19% dari tahun 2017 sebesar yang Rp50,21 miliar.
- BRI Remittance membukukan peningkatan Laba Bersih sebesar Rp314,08 juta atau naik sebesar 114,52% yoy dari tahun 2017 sebesar Rp146,41 juta.

Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, BRIsyariah telah melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering*/IPO), dimana BRIsyariah merupakan anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama yang melaksanakan IPO. Dari hasil IPO tersebut, BRISyariah memperoleh dana sebesar Rp1,34 triliun dan dana tersebut akan digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis.

Pada akhir tahun 2018, BRI telah melakukan akuisisi 2 (dua) perusahaan menjadi Perusahaan Anak BRI yaitu PT Danareksa Sekuritas yang merupakan Perusahaan Efek dengan kepemilikan sebesar 67% dan PT BRI Ventura Investama yang merupakan Perusahaan Modal Ventura dengan kepemilikan sebesar 97,61%.

Dengan diakuisisinya Danareksa Sekuritas, BRI ingin meningkatkan porsi nasabah Danareksa Sekuritas dari segmen ritel. BRI dapat memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan karena BRI memiliki jangkauan hingga ke pelosok Indonesia. Sehingga akses baik jaringan kantor maupun *mobile application* BRI akan terbuka lebar. Diharapkan ke depan hal ini akan meningkatkan *economies of scale* bagi bisnis Danareksa Sekuritas. Di sisi bisnis institusi, banyak institusi yang dilayani BRI juga telah dilayani oleh Danareksa Sekuritas, terutama nasabah BUMN dan kami akan semakin mengoptimalkan potensi bisnis dan kerjasama yang ada dengan para nasabah institusi tersebut.

Pengambil alihan PT BRI Ventura Investama (dahulu PT Sarana NTT Ventura) atau yang kita sebut BRI Ventures diharapkan dapat membantu BRI melakukan investasi pada *Fintech* atau *Financial Enablers* yang *align* dengan kebutuhan BRI untuk men-*deliver* inovasi layanan keuangan kepada nasabah.

Dengan bertambahnya 2 perusahaan tersebut, saat ini jumlah perusahaan anak BRI Group menjadi 7 (tujuh), yakni BRIsyariah, BRI Agro, BRI Life, BRI Finance, BRI Remittance, BRI Venture dan Danareksa Sekuritas. Ini merupakan upaya BRI untuk menjadi *integrated financial solutions* bagi nasabah. Dengan demikian, seluruh Entitas Anak BRI semakin selaras memberikan layanan keuangan yang lengkap dan beragam.

Di samping itu, pada tahun 2018, BRI juga melakukan penyertaan saham kepada PT Danareksa Investment Management (DIM) yang bergerak di bidang Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi dengan kepemilikan sebesar 35%. Untuk meningkatkan *economies of scale* dari DIM, BRI akan memaksimalkan potensi pertumbuhan bisnis bagi DIM baik melalui pengembangan bisnis *wealth management* BRI maupun dengan penempatan *Asset Under Management* (AUM) dari BRI Group.

Realisasi Target

Angka Bank Saja

Keterangan	Target 2016	Realisasi 2016	Pencapaian (%)	Target 2017	Realisasi 2017	Pencapaian (%)	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian (%)
Aset	964,55	964,00	99,94	1.054,98	1.076,44	102,03	1.213.156	1.234.200	101,73
Laba Bersih	25,44	25,75	101,22	27,76	28,47	102,56	31.608	31.701	100,29
Kredit yang Diberikan	653,70	635,29	97,18	715,29	708,00	98,98	796.627	804.338	100,97
Dana Pihak Ketiga	719,00	723,85	100,67	787,12	803,33	102,06	900.738	898.033	99,70
BOPO	71,30%	68,69%	97,71	69,62%	69,14%	100,69	68.41%	68.48%	99,90
LDR	90,92%	87,77%	96,54	90,88%	88,13%	96,97	88.44%	89.57%	101,28
NPL (Gross)	2,16%	2,03%	93,98	2,11%	2,10%	100,47	2.35%	2.14%	109,10
NPL (Net)	1,25%	1,09%	87,20	1,18%	0,88%	125,42	1.05%	0.92%	112,20
NIM	8,09%	8,00%	98,89	7,85%	7,93%	101,02	7.57%	7.45%	98,39
CAR	21,92%	22,91%	104,52	21,29%	22,96%	107,84	21.39%	21.21%	99,16

Laporan Direksi

Secara umum, kinerja BRI (Bank saja) sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dari sepuluh indikator kinerja sebagaimana ditampilkan dalam tabel, enam indikator kinerja mencapai atau bahkan melampaui targetnya. Sebanyak empat indikator, Dana Pihak Ketiga, BOPO, NIM dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), memang tidak memberikan pencapaian penuh, tetapi menunjukkan selisih yang tidak jauh dibanding target.

Terkait dengan pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI melihat bahwa pertumbuhan DPK yang dicatatkan BRI sudah jauh lebih tinggi (11,78%) dari pertumbuhan industry (6,45%). Kondisi makro ekonomi yang cukup menantang di tahun 2018 memberikan tekanan pada pertumbuhan DPK di industry perbankan. Ke depan, BRI akan semakin mengoptimalkan *competitive advantage* yang dimiliki, berupa jaringan kerja serta peningkatan fitur produk DPK untuk dapat semakin ekspansif dalam pengumpulan dana masyarakat, khususnya CASA.

Pertumbuhan CASA akan secara langsung berdampak pada pencapaian NIM dan BOPO BRI. Pada tahun 2018, BRI melihat kendala pada pencapaian NIM dan BOPO BRI terkait erat dengan kenaikan BI7DRR sebanyak 175 bps, yang memberikan tekanan cukup besar pada biaya bunga. Dengan perbaikan komposisi CASA maka tekanan pada biaya bunga diharapkan akan berkurang. Ditambah dengan strategi *Business Process Re-engineering* yang sudah dijalankan oleh BRI, seperti pembuatan aplikasi BRISPOT, maka diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi di BRI serta secara langsung akan memperbaiki BOPO.

Adapun terkait dengan rasio CAR, BRI melihat bahwa besaran *capital* yang dimiliki BRI saat ini, bukan merupakan suatu kendala bagi BRI. Dengan CAR BRI sebesar 21.21%, maka *capital* BRI berada pada posisi yang sangat aman, karena masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat minimum CAR yang harus dijaga, sebesar 14.75%, sehingga BRI masih mempunyai ruang yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis BRI. Untuk itu, strategi yang akan diterapkan adalah lebih pada optimalisasi *capital* yang saat ini dimiliki BRI.

Ke depan, kami yakin bahwa melalui upaya yang lebih baik lagi ke depannya semua indikator kinerja dapat memenuhi target masing-masing.

Tantangan

Kondisi makro ekonomi yang tumbuh moderat menghadapi tekanan global memengaruhi sikap banyak korporasi terhadap pengembangan usahanya. Selain itu, ada pula hal-hal lain yang perlu diantisipasi Bank seperti ASEAN *free-trade* dan rencana pembentukan perusahaan *holding* BUMN untuk sektor perbankan dan jasa keuangan.

Hal-hal di atas menciptakan peluang dan tantangan tersendiri bagi industri perbankan. Sebab itulah Bank perlu memperkuat struktur aset dan liabilitas, aktif berinovasi dalam hal produk dan layanan, dan meneruskan proses digitalisasi agar siap menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang baru.

PANDANGAN KE DEPAN

Banyak hal yang kami pertimbangkan saat menyusun pandangan dan strategi bisnis ke depan. Profil demografi Indonesia, kondisi likuiditas perbankan Indonesia, arah kebijakan pemerintah, integrasi ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan memengaruhi persaingan antar bank, dan preferensi nasabah pada teknologi digital yang memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman perbankan lebih efisien dan praktis adalah beberapa hal yang kami perhitungkan saat menyusun rencana untuk 2019.

Mempertimbangkan hal-hal di atas dan selaras dengan rencana kerja jangka panjang BRI, tema tahun 2019 adalah ***Leading Consumer Banking in Indonesia***. Tema yang merepresentasikan penguatan BRI pada segmen ini merangkum aspirasi BRI menjadi pemimpin pasar di bisnis *consumer banking* didukung pengembangan TI dan *re-engineering* proses bisnis. Beberapa hal yang akan menjadi fokus BRI untuk merealisasikan tema 2019 adalah peningkatan pangsa pasar segmen konsumer, menjaga kualitas aset, peningkatan pertumbuhan dana murah dan komposisi CASA, menerapkan keunggulan operasional, dan membangun sinergi BUMN untuk daya saing yang lebih baik.

Dengan strategi ini, prospek usaha Perseroan memberikan optimisme pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan nilai tambah bagi *shareholders* dan *stakeholders*.

PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL*

Menghadapi era persaingan dan tuntutan bisnis yang semakin ketat, percepatan pengembangan dan pemerataan kompetensi menjadi prioritas utama BRI. Bank juga memiliki pernyataan tujuan untuk pengelolaan *human capital* tahun 2018, yakni *Build and Deliver Compelling Employee Value Proposition*. Pernyataan tujuan ini sejalan dengan proses transformasi Bank dan visi 2022 sebagai *Home to the Best Talent*. Mengacu pada tujuan itu, fokus pengelolaan *human capital* pada tahun 2018 berada pada penyempurnaan kebijakan *human capital*, implementasi *talent management system*, perluasan program pengembangan karir, penajaman sistem penilaian kinerja, dan penetrasi budaya kerja pada semua pekerja.

Berdasarkan fokus tersebut, beberapa inovasi dan terobosan dalam aspek pengelolaan *human capital* telah kami lakukan pada 2018, antara lain adalah penerapan aplikasi *e-recruitment* untuk keseluruhan proses rekrutmen, termasuk fitur *video-based assessment* dan *online test* yang memungkinkan kandidat menjalani proses seleksi dari tempatnya berada. Dengan akses yang lebih mudah, sistem BRI menjaring sekitar 250 ribu CV pelamar. Terobosan lain adalah penyempurnaan sistem manajemen kinerja (SMK) secara *online*, dimana pencapaian target individu khususnya tenaga pemasar BRI dilakukan secara otomatis, sehingga dapat dipantau dengan mudah oleh masing-masing pekerja.

Otomasi juga kami terapkan pada proses bisnis di bidang *human capital* melalui aplikasi BRISTARS, aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses oleh seluruh pekerja. BRI juga meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu di bidang HC, terkait pengelolaan data, komunikasi, dan pembayaran kompensasi dan tunjangan dengan layanan berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat. Kami juga bangga dapat melaporkan bahwa BRI Corporate University mampu merealisasikan targetnya menjadi *The Best Corporate University In Indonesia* lebih dini pada 2018, dari target tahun 2021.

Komitmen sungguh-sungguh BRI terhadap pengelolaan HC adalah hal vital bagi kelangsungan usaha Bank, terlebih mengingat jumlah tenaga kerja BRI yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Per tahun 2018, BRI mengelola total 123.929 pekerja dibandingkan 130.787 orang pada tahun sebelumnya. Keberhasilan upaya Bank memberikan tempat kerja terbaik bagi pekerja tercermin dari beberapa skor yang diraih Bank dalam *employee survey* internal. Dalam hal keterikatan (*engagement*), sebanyak 76% pekerja menyatakan terikat (*engaged*) dibandingkan 71,9% pada tahun 2017. Dari segi kepuasan, 90% pekerja menyatakan puas bekerja di BRI.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG LAYANAN

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut inovasi produk dan layanan perbankan yang terintegrasi dengan sistem digital. Kemampuan beradaptasi dari sisi teknologi ini tidak hanya didorong oleh perilaku nasabah yang berubah, tetapi juga kompetisi layanan keuangan yang kini diwarnai oleh pemain-pemain baru jasa keuangan yang bertumpu pada teknologi, yaitu perusahaan *financial technology* atau *fin-tech*.

Untuk dapat terus memberikan layanan terbaik dan menyeluruh bagi nasabah, BRI telah menetapkan tiga kerangka strategi: *core digitization, digital ecosystem*, dan *new digital proposition*. BRI pun membentuk Divisi Kerjasama Teknologi pada bulan Juni 2018, suatu langkah strategis agar pengembangan TI Bank dapat berjalan penuh dan dapat mendukung penciptaan ekosistem bisnis yang melibatkan semua segmen usaha.

Dalam rangka menjawab tantangan disrupsi digital, BRI memperkuat posisinya dengan melakukan pengembangan produk-produk *digital banking* sesuai dengan tantangan bisnis saat ini. Selain BRISPOT di atas, BRI pada tahun 2018 meluncurkan produk berorientasi nasabah seperti BRIMOLA yang mendukung distribusi LPG 3 kg dan terintegrasi dengan sistem pembayaran nontunai BRIVA, JUNIO SMART yang merupakan *platform* manajemen pendidikan

Laporan Direksi

berbasis *web*, BRI STORE yang melayani kebutuhan pemain ritel, dan BRI *Billing Management* yang memudahkan pelaku usaha mengelola piutang. Guna mendorong optimalisasi teknologi dalam produk dan layanan, pada 2018 BRI menyusun IT *Enterprise Architecture* (ITEA) periode 2018-2022 yang memetakan kegiatan strategis untuk pengembangan TI hingga lima tahun ke depan.

Lepas dari manfaat besar yang diberikan oleh teknologi, isu keamanan dan kerahasiaan data adalah risiko TI yang harus dihadapi BRI. Berkomitmen melindungi nasabah, BRI akan terus membangun inisiatif-inisiatif strategis terkait keamanan data seperti menyusun *Enterprise Security Architecture*, *Enterprise Fraud Detection System*, maupun implementasi *Biometrics Authentication*.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah komitmen yang dimiliki oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh pekerja BRI. Menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang telah digariskan di dalam aturan dan kebijakan Bank dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senantiasa menjadi pedoman bagi setiap individu di BRI.

Ketaatan terhadap tata kelola turut menyumbang pencapaian kinerja BRI sepanjang tahun 2018. Menyadari peran nyata tata kelola, BRI pun selalu berusaha memperbaiki pelaksanaan aspek ini dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2018, penguatan tata kelola kami lakukan melalui, antara lain, penandatanganan komitmen GCG oleh seluruh insan BRI, sosialisasi penerapan strategi *anti fraud* dalam Forum Peningkatan Kinerja BRI, revitalisasi kebijakan dan penambahan saluran pelaporan *whistleblowing system* pada situs perusahaan, dan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi dan peningkatan tata kelola konglomerasi keuangan.

BRI juga rutin mengukur kinerjanya di bidang tata kelola. Selain melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*), BRI juga mengikuti penilaian yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang independen. Dari Corporate Governance Performance Index (CGPI), kami mendapatkan skor 89,06 dengan predikat Sangat Terpercaya (Most Trusted Company). Selain itu, dari penilaian yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) BRI memperoleh penghargaan The Best Overall Good Corporate Governance Award.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Komitmen BRI untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Kegiatan kami di bidang ini dinaungi oleh program BRI Peduli dengan visi "menjadi yang terdepan dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan nilai & manfaat yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan".

BRI Peduli mengidentifikasi tujuh sektor sebagai bidang kegiatannya, yakni tanggap bencana, pendidikan, kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, pengembangan sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial untuk penghapusan kemiskinan. Secara total, pada tahun 2018 BRI telah menyalurkan Rp163,63 miliar untuk pelaksanaan kegiatan BRI Peduli.

BRI juga memperhatikan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Bagi BRI sebagai bank BUKU 4, peraturan ini menetapkan bahwa BRI harus telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan per Januari 2019. Untuk mengintegrasikan risiko lingkungan sosial dan tata kelola ke dalam aspek bisnisnya, pada tahun 2018, BRI telah meyusun Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability) BRI dimana didalamnya telah diatur

mengenai Kerangka Keberlanjutan BRI baik dari sisi *Asset, Liabilities* maupun *Operation* dan *Human Capital*, yang kemudian juga dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan (RAKB) BRI untuk tahun 2019-2023. Bahkan BRI telah menerapkan kebijakan kredit tertentu untuk nasabah yang bergerak di bidang eksplorasi sumber daya alam. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa, dalam hal pelaporan, sejak tahun 2012, BRI telah menyusun Laporan Berkelanjutan yang berpedoman pada kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI).

Tanggung jawab sosial BRI pun mencakup pula pekerja dan nasabah. Melalui pengelolaan hubungan industrial yang baik, selain kepuasan pekerja yang tinggi, BRI pun mencatat tingkat *turnover* pekerja yang sangat rendah, sebesar 2,97% atau jauh di bawah tingkat *tunover* industri yang mencapai 12%. Untuk nasabah, melalui pelayanan berorientasi pada kepuasan konsumen, survei yang dilakukan lembaga independen Financial Wealth Group pada tahun 2018 menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 96,3% meningkat dari 94,1% pada tahun sebelumnya.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan BRI pada 22 Maret 2018, Bank dengan hormat mengakhiri masa bakti Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Susy Liestiowaty sebagai Direktur Kepatuhan. Selain itu, terdapat penambahan dan perubahan nomenklatur dalam komposisi Direksi sebagai berikut:

Nomenklatur Semula	Menjadi
Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	Direktur *Corporate Banking*
	Direktur Ritel dan Menengah
Direktur Kredit Mikro dan Kecil	Direktur Mikro dan Kecil
Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	Direktur Keuangan
Direktur *Digital Banking* dan Teknologi Informasi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
-	Direktur Kepatuhan

RUPST selanjutnya menunjuk nama-nama berikut untuk mengisi posisi tersebut:

Nama	Jabatan sebelumnya	Jabatan baru
Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	Direktur *Corporate Banking*
Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Kecil	Direktur Mikro dan Kecil
Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	Direktur Keuangan
Indra Utoyo	Direktur *Digital Banking* dan Teknologi Informasi	Direktur Teknologi Informarsi dan Operasional
Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	Direktur Manajemen Risiko
Ahmad Solichin Lutfiyanto	-	Direktur Kepatuhan

Laporan Direksi

RUPST juga mengangkat Supari, Osbal Saragi Rumarhorbo, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto masing-masing sebagai Direktur Ritel dan Menengah, Direktur Jaringan dan Layanan, dan Direktur Kepatuhan.

Dengan demikian, komposisi lengkap Direksi sejak ditutupnya RUPST 22 Maret 2018 adalah:

Nama	Jabatan
Suprajarto	Direktur Utama
Kuswiyoto	Direktur *Corporate Banking*
Supari	Direktur Ritel dan Menengah
Priyastomo	Direktur Mikro dan Kecil
Handayani	Direktur Konsumer
Osbal Saragi Rumarhorbo	Direktur Jaringan dan Layanan
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembangaan
R. Sophia Alizsa	Direktur *Human Capital*
Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan

Selanjutnya, BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 3 Januari 2019. RUPSLB memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat masa bakti Kuswiyoto sebagai Direktur *Corporate Banking*, menambah nomenklatur Wakil Direktur Utama, dan mengangkat Sunarso untuk mengisi nomenklatur baru.

Dengan demikian, sejak ditutupnya RUPSLB pada 3 Januari 2019, komposisi Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Suprajarto	Direktur Utama
Sunarso	Wakil Direktur Utama
Supari	Direktur Ritel dan Menengah
Priyastomo	Direktur Mikro dan Kecil
Handayani	Direktur Konsumer
Osbal Saragi Rumarhorbo	Direktur Jaringan dan Layanan
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembangaan
R. Sophia Alizsa	Direktur *Human Capital*
Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan

Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua rekan yang telah mengakhiri masa tugasnya bersama BRI atas kontribusi pemikiran mereka. Kami juga mengucapkan selamat datang pada anggota Direksi baru, yang kami yakin akan meneruskan semangat membawa BRI maju untuk Indonesia.

APRESIASI

Mewakili Direksi, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja BRI atas komitmen dan dedikasi yang mereka berikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas petunjuk dan arahan yang diberikan. Tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada semua nasabah, mitra usaha, pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan atas dukungan yang tidak pernah putus diberikan kepada BRI. Sinergi BRI dan semua pihak yang terkait adalah adalah sumber energi kami untuk memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 9 April 2019
Atas nama Direksi

Suprajarto
Direktur Utama

DIREKSI

1. **Supari**
Direktur Ritel dan Menengah

2. **R. Sophia Alizsa**
Direktur *Human Capital*

3. **Suprajarto**
Direktur Utama

4. **Osbal Saragi Rumahorbo**
Direktur Jaringan dan Layanan

5. **Sis Apik Wijayanto**
Direktur Hubungan Kelembagaan

6. **Kuswiyoto**
Direktur *Corporate Banking*

Direksi

7. **Mohammad Irfan**
Direktur Manajemen Risiko

8. **Ahmad Solichin Lutfiyanto**
Direktur Kepatuhan

9. **Haru Koesmahargyo**
Direktur Keuangan

10. **Priyastomo**
Direktur Mikro dan Kecil

11. **Indra Utoyo**
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi

12. **Handayani**
Direktur Konsumer

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 9 April 2019

DEWAN KOMISARIS

Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Gatot Trihargo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris

A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen

A. Sonny Keraf
Komisaris Independen

Mahmud
Komisaris Independen

Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen

Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris

Hadiyanto
Komisaris

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 9 April 2019

DIREKSI

Suprajarto
Direktur Utama

Haru Koesmahargyo
Direktur Keuangan

Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Kepatuhan

Mohammad Irfan
Direktur Manajemen Risiko

Kuswiyoto**)
Direktur *Corporate Banking*

Priyastomo
Direktur Mikro dan Kecil

Sis Apik Wijayanto
Direktur Hubungan Kelembagaan

Indra Utoyo
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi

R. Sophia Alizsa
Direktur *Human Capital*

Handayani
Direktur Konsumer

Supari
Direktur Ritel dan Menengah

Osbal Saragi R.
Direktur Jaringan dan Layanan

Catatan:
**) Pada tanggal 03 Januari 2019, Ybs. efektif tidak lagi menjabat sebagai Direktur *Corporate Banking* BRI

Profil Perusahaan

BRI MENGINTEGRASIKAN OPERASIONAL SELURUH JARINGAN KERJA YANG TERDIRI DARI KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU, BRI UNIT, KANTOR KAS, TERAS BRI DAN TERAS MOBILE SERTA LEBIH DARI 309.776 JARINGAN E-CHANNEL, YANG MENCAKUP 24.684 ATM, DAN 284,426 EDC TERMASUK 401.550 JARINGAN AGEN BRILINK. HAL TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MEMBENTUK *FINANCIAL ECOSYSTEM* YANG MAMPU MENJANGKAU SELURUH PENJURU NEGERI UNTUK MEMASTIKAN TERCAPAINYA INKLUSI KEUANGAN.

Identitas Perusahaan

NAMA PERUSAHAAN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

BIDANG USAHA
Perbankan

SEGMEN USAHA
- Bisnis Mikro
- Bisnis Ritel
- Bisnis Korporasi
- Bisnis Entitas Anak

DASAR HUKUM PENDIRIAN
Undang-Undang No 21 Tahun 1968

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Rp6.167.290.500.000

MODAL DASAR
Rp15.000.000.000.000

JARINGAN
- 1 Kantor Pusat
- 19 Kantor Wilayah
- 468 Kantor Cabang (Termasuk Kantor Cabang Khusus dan Kantor Cabang Luar Negeri)
- 609 Kantor Cabang Pembantu
- 5.381 BRI Unit
- 964 Kantor Kas
- 2.069 Teras BRI
- 133 Mobile Teras BRI

TANGGAL PENDIRIAN
16 Desember 1895

JUMLAH KARYAWAN
89.943

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
- Pemerintah Indonesia 56,75%
- Publik 43,25%

BURSA EFEK
Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003.

KODE SAHAM
BBRI

KANTOR PUSAT
Gedung BRI I
Jl Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
No. Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279
No. Fax : (62-21) 250-0077
Website : www.bri.co.id

SEKRETARIAT PERUSAHAAN
Corporate Secretary Division
Gedung BRI 1, Lt.15 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Email : humas@bri.co.id

Call center
Tel. : (021) 5751966
Fax. : (021) 5700916

Makna Logo

Melayani Dengan Setulus Hati

DIREKSI BANK RAKYAT INDONESIA MELALUI SURAT KEPUTUSAN NO.S.3-DIR/2/1985 TANGGAL 28 FEBRUARI 1985 MENETAPKAN BERLAKUNYA LOGO BANK RAKYAT INDONESIA.

Bentuk segi empat sama sisi dengan garis sudut lengkung. Empat sisi yang sama menandakan keseimbangan dengan garis legkung yang artinya dinamis/fleksibel dalam menyikapi perkembangan zaman.

Bold huruf BRI dengan huruf kapital menandakan ketegasan.

Garis, bentuk dan pewarnaan (*bold*) secara tegas, sederhana serta terukur dengan maksud untuk menghadirkan kesan-kesan yang merupakan cerminan dari sistem manajemen yang baik, kemudahan-kemudahan maupun keamanan yang tercermin secara imaginatif pada logotype tersebut.

Ungkapan bentuk secara totalitas yang sederhana diharapkan mempercepat proses pengenalan dan mudah untuk diingat.

Bentuk dan pewarnaan secara tegas dan teratur diharapkan akan mampu menampilkan suatu kesan lembaga yang modern dan profesional, sehingga tercermin ciri dunia perbankan yang mementingkan ketelitian dan ketepatan. Ini berkaitan dengan kesan management modern dalam suatu kegiatan usaha nasional yang mempunyai wawasan internasional dan berlandasakan semangat pembaharuan.

Garis, bentuk dan pewarnaan ditampilkan secara lugas untuk memberi kesan sederhana tetapi mantap dengan harapan mampu mencerminkan salah satu misi BRI sebagai bagian terdepan dalam mengemban kebijaksanaan pemerintah dalam memenuhi pelayanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang paling kecil dan terpencil sampai yang besar di kota-kota.

Warna biru melambangkan rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan. Sebagai perusahaan yang fokus pada pelayanan jasa keuangan, BRI bertekad dapat memberikan kenyamanan tersebut dengan menyediakan berbagai layanan yang aman, fasilitas yang canggih dan lengkap, serta jaringan terluas untuk para nasabah.

Riwayat Singkat BRI

Perubahan Nama Bank Rakyat Indonesia

1895

De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden

Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen

De Poerwokertosche Hulp Spaaren Landbouw Credietbank atau Volksbank

1912

Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene

1934

Algemene Volkscredietbank (AVB)

1942

Syomin Ginko

1946

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Riwayat Singkat BRI

1960
Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN)

1968
Bank Rakyat Indonesia (Bank Umum)

1992
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

2003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 10 November 2003

Riwayat Singkat BRI

Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI", "Bank", atau "Perseroan") dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Indlandsche Hoofden, Hulp en Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen, Syomin Ginko, sampai akhirnya resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan UU No. 21 tahun 1968.

Pada tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2003, dengan kode saham BBRI. Pada tahun 2007, BRI mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA), yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRIsyariah. Unit Usaha Syariah milik BRI kemudian dipisahkan dari BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank BRIsyariah (BRIsyariah) pada 1 Januari 2009 dan kemudian pada tanggal 3 Maret 2011 BRI mengakuisisi saham PT Agro Niaga Tbk dari Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).

Sejak awal berdiri, BRI konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menjadi pelopor microfinance di Indonesia. Komitmen ini tetap dijaga sampai saat ini dan dengan dukungan pengalaman memberikan layanan perbankan terutama di segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi sebagai bank dengan laba terbesar selama 14 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh insan BRI yang tak pernah berhenti berinovasi dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis.

Riwayat Singkat BRI

Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan *self-service banking* di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking pada tahun 2013.

Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil Nusantara. Di tahun 2015, BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut. Lalu, di tahun 2016, sejarah baru kembali terukir. Pada 18 Juni 2016 pukul 18.38 waktu Kourou, Guyana Prancis, BRI meluncurkan BRIsat. Ini menjadikan BRI bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Pengadaan satelit ini adalah bagian dari rencana strategis BRI untuk memperkuat infrastruktur penunjang layanan digital masa depan, yang bisa membawa teknologi perbankan berkualitas dari pusat kota sampai ke pelosok.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, BRI memiliki ATM hingga 22.684 unit, jumlah mesin EDC sebanyak 284.425 unit, serta jumlah mesin CRM sebanyak 2.609 unit, termasuk 401.550 agen BRILink. Jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut menjadi bukti konsistensi BRI dalam menjangkau yang tidak terjangkau.

Perluasan jaringan juga terus dilakukan. Untuk memperkuat eksistensi bisnis di kancah global, BRI membuka unit kerja di luar negeri. Di tahun 2015 BRI membuka kantor di Singapura. Sebelumnya telah berdiri unit kerja di beberapa negara lain seperti BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, dan BRI Remittance Hong Kong. Pada tahun 2017, BRI membuka unit kerja di Timor Leste.

Untuk menjawab perkembangan pasar dan keragaman kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan, BRI mempunyai target untuk menjadi *integrated financial service group*, yaitu satu grup perusahaan yang menyediakan berbagai layanan atau jasa keuangan kepada nasabahnya, baik layanan perbankan, asuransi, remitansi, maupun layanan keuangan lainnya.

Elaborasi di segmen asuransi dan pembiayaan kian terlihat pada tahun 2015, BRI menambah anggota baru yang bergerak di bidang asuransi dengan mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) dan disusul pada tahun 2016 BRI menambah penyertaan saham pada PT BTMU- BRI Finance dari 45% menjadi 99% sehingga BRI menjadi pemegang saham pengendali. Dengan selesainya proses tersebut, PT BTMU BRI Finance kemudian berganti nama menjadi PT BRI Multifinance Indonesia.

Setiap langkah korporasi dan rencana kerja yang dijalankan adalah bagian dari upaya memberikan layanan perbankan yang lengkap bagi para nasabah, terutama sektor UMKM. Dengan kehadiran BRIsat, BRI dapat memaksimalkan layanan *digital banking*. Berbagai inisiatif digital bagi UMKM mulai beroperasi di tahun 2016, mulai dari pembangunan Teras BRI Digital, pengembangan e-Pasar, sampai pembukaan *co-working space*. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2018 dengan meluncurkan Indonesia Mall dan mengadakan Cowork Festival. Semua inisiatif untuk UMKM dilakukan untuk menciptakan UMKM yang unggul di era ekonomi digital.

Selain itu pada tahun 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste. BRI juga resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera.

Pada tahun 2017 BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2017 yang telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.

Riwayat Singkat BRI

Guna memajukan sektor UMKM, BRI terus berkomitmen memberikan kemudahan layanan perbankan utamanya melalui inovasi perbankan digital. Oleh karena itu, BRI sejak tahun 2017 telah meluncurkan BRISPOT dan terus dikembangkan di tahun 2018. BRISPOT adalah sebuah aplikasi *mobile-based* dengan konsep *one stop service* bagi *Account Officer* untuk proses kredit *end to end.*

Pada tahun 2018, dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai BRI *New Assistance* yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.

Selain itu, Bank BRI mendorong UMKM Go Digital dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan startup-startup market place sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas. BRI juga meresmikan BRI Institute sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau *National Capacity Building* di segmen UMKM.

Sebagai entitas, BRI Group merupakan sebuah grup keuangan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lengkap, mulai dari layanan perbankan konvensional maupun syariah, asuransi dan multifinance. Hal ini sesuai dengan rencana jangka panjang BRI 2018-2022 untuk mencapai aspirasi sebagai penyedia jasa keuangan terintegrasi.

Untuk mencapai aspirasi tersebut, pada bulan Desember 2018 BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Venture) dan PT Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM).

BRI Venture akan dikembangkan menjadi Corporate Venture Capital (CVC) untuk melakukan *strategic investment* terutama kepada perusahaan *growth-stage startup* yang memiliki potensi sinergi dengan BRI Group dan/atau potensi *capital gain*.

Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 7 (tujuh) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRI Syariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures) dan Sekuritas (Danareksa Sekuritas).

Semua inisiatif ini dilakukan untuk terus merealisasikan aspirasi menjadi perbankan yang unggul di era ekonomi digital saat ini.

Bidang Usaha Sesuai Anggaran Dasar

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 81 tanggal 23 April 2015 Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0926947 tanggal 23 April 2015, Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar BRI adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. Membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
    1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
    2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
    3. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
    4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    5. Obligasi;
    6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya;
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Produk dan Jasa

Produk Simpanan

Tabungan BRI BritAma

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAmaX, serta BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR.

Tabungan BRI Junio & Junio Rencana

Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak- anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.

Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari Internet Banking dan Mobile Banking. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes TKI, Simpedes Umum, Simpedes Impian dan Simpedes Kredit Pangan. Selain itu Bank BRI memiliki produk simpanan lainnya yaitu:

1. Tabunganku
2. SimPel (Simpanan Pelajar)
3. Tabungan Haji
4. Deposito (Rupiah *and Foreign Exchange*)
5. Giro (Rupiah *and Foreign Exchange*)

Produk Pinjaman

Kredit Mikro

Kupedes
Kupedes merupakan kredit usaha dan kredit konsumtif untuk badan usaha mikro maupun perorangan yang memenuhi persyaratan.

KUR Mikro
KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula.

Kredit Konsumer
- Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
- Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
- Kartu Kredit

Kredit Ritel Komersial
- Kredit Agunan Kas
- Kredit Investasi (KI)
- Kredit Modal Kerja (KMK)
- KMK Ekspor
- KMK Konstruksi
- KMK Konstruksi BO-I
- Kredit Waralaba
- Kredit SPBU
- Kredit Resi Gudang
- Kredit Pemilikan Gudang
- KMK Talangan SPBU
- Kredit Pre-Financing
- Kredit Post-Financing
- Kredit Distributor

Kredit Program
- Resi Gudang (Subsidi & Komersial)
- KUR Ritel BRI
- KUR TKI BRI
- KUR Tanaman Keras

Kredit Menengah/ Korporasi
- Kredit Modal Kerja (KMK)
- Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)
- Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)
- Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)
- Kredit Investasi (KI)
- Kredit Sindikasi

BRIGuna
Kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap. BRIGuna menyediakan 3 jenis produk pilihan, yaitu BRIGuna Karya, untuk karyawan aktif yang masih memiliki penghasilan tetap, kemudian BRIGuna Umum, yaitu kredit yang diberikan sejak pegawai tetap hingga masa pensiun, sedangkan BRIGuna Purna, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi pensiunan.

Produk dan Jasa

Jasa

Cash Management System

Layanan CMS BRI memungkinkan nasabah korporasi melakukan monitoring dan transaksi keuangan perusahaan secara langsung melalui fasilitas *online*. Juga menyediakan fasilitas *national pooling*, *added value service* dari GiroBRI untuk nasabah grup korporasi, yang menyediakan saldo terkonsolidasi serta memungkinkan anggota grup melakukan *borrowing* berdasarkan saldo konsolidasi yang diperjanjikan, serta fasilitas *corporate virtual account* berupa layanan tambahan *virtual account* yang memudahkan nasabah dalam melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terintegrasi dengan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*), serta berbagai layanan *cash management* lainnya.

Jasa Kelembagaan

- SIM (Surat Izin Mengemudi) - Online
- MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
- E-Tax (Electronic Tax)
- Hospital Online
- SPP-Online Mahasiswa
- Visa on Arrival (VoA)
- Layanan terkait Nasabah Instasi Kerja Sama (NIK)
- Layanan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Layanan terkait Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)
- Kartu Identitas Multifungsi (KIM)
- KTA Elektronik
- E-Samsat
- E-Tilang (Tilang Online)
- PDAM Online
- BPJS-TK Service Point Office

Jasa Bisnis dan Keuangan

- Bank Garansi
- Bank Kliring
- Bill Payment
- Penerimaan Setoran
- Transaksi Online
- Transfer LLG (Lalu Lintas
- Giro) dan RTGS (Real Time Gross Settlement)

E-Banking

- ATM BRI
- Mobile Banking BRI
- Phone Banking BRI
- Internet Banking BRI
- CRM BRI
- EDC BRI
- BRIZZI (Electronic Money BRI)

Jasa Layanan Bisnis Internasional

- Layanan Impor
- Penerbitan Letter of Credit (LC)
- Penerbitan Amendment LC
- Fasilitas Kredit Impor
- Pre-Impor Financing (Penangguhan Jaminan Impor)
- Post-Impor Financing (KMKI &Trust Receipt)
- Layanan Ekspor
- Advising LC
- LC Confirmation
- Jasa Penagihan Ekspor
- Outward Documentary Collection
- Outward Clean Collection
- Pre-Shipment Financing (KMKE)
- Post-Shipment Financing
- Negosiasi Wesel Ekspor
- Diskonto Wesel Ekspor Berjangka
- Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka
- Refinancing LC
- Risk Participation

Produk dan Jasa

- Banker Acceptance
- USD Local Settlement
- Guarantee (Standby LC)
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- Bill Purchase Financing
- Money Changer

BRIfast Remittance

BRIfast Remittance adalah layanan remittance BRI untuk melayani pengiriman uang ke luar negeri maupun penerimaan uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan Remittance BRI meliputi fitur *outgoing remittance* ke 144 *currency* di seluruh dunia, fitur *incoming remittance credit to* BRI *account* (kiriman masuk ke rekening BRI) dan *credit to other bank account* (kiriman masuk ditujukan ke rekening bank lain), serta fitur *incoming remittance cash pick-up* (kiriman masuk tanpa rekening diambil tunai) yang dapat dicairkan di seluruh unit kerja BRI serta agen BRIlink BRI di Indonesia secara *real time online*.

Jasa Layanan Treasury

- Transaksi Valuta Asing/ Foreign Exchange
- Transaksi Swap
- Transaksi Forward
- Jasa Wali Amanat
- Jasa Agen Penjual Efek
- Jasa Kustodian
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI)

BRI Prioritas

Layanan Wealth Management dari BRI untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan dari nasabah terpilih BRI. Dengan konsep *one stop financial solution* dalam mengelola keuangan nasabah yang didukung tenaga pemasar yang profesional dan tersertifikasi, layanan Wealth Management BRI menawarkan antara lain produk Reksa Dana, Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bond Ritel, Sukuk Tabungan, DPLK, dan produk-produk Bancassurance.

Wilayah Operasional

Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan *E-Channel*

Jaringan Kantor Wilayah Indonesia

Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.647 unit kerja, 309.776 jaringan *e-channel* dan 401.550 agen BRIlink yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Unit Kerja

Outlets	2014	2015	2016	2017	2018
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	19	19	19	19	19
Kantor Cabang	461	467	467	468	468
Kantor Cabang Pembantu	584	603	609	610	609
BRI Unit	5,293	5,360	5,380	5,382	5,381
Kantor Kas	971	983	984	992	964
Teras BRI	2,457	2,543	2,545	2,536	2,069
Teras BRI Keliling	610	636	638	638	133
Jumlah Unit Kerja Operasional | Total	**10,396**	**10,612**	**10,643**	**10,646**	**9,647**

Total Unit Kerja termasuk 5 Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)

Wilayah Operasional

BRI mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari Kantor Pusat, 19 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 468 Kantor Cabang (termasuk 5 Unit Kerja Luar Negeri), 609 Kantor Cabang Pembantu, 964 Kantor Kas, 5.381 BRI Unit, 2.069 Teras BRI dan 133 Teras BRI Keliling.

E-Channel

E-Channel	2014	2015	2016	2017	2018
ATM	20,792	22,792	24,292	24,684	22,684
EDC	131,204	187,758	257,712	302,921	284,426
CRM	392	892	1,392	1,992	2,609
E-Buzz	55	57	57	57	57
Total	**152,443**	**211,499**	**283,453**	**329,654**	**309,776**
Agen BRIlink	-	50.259	84.550	279.750	401.550

Jejak Langkah

1895

Raden Aria Wiriatmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen (1895), De Poerwokertosche Hulp Spaar- en Landbouw Credietbank atau Volksbank dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene (1912). Tahun 1934 berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (AVB), hingga pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama menjadi Syomin Ginko (1942-1945).

1946

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama Syomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian.

1960

Pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

1968

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Pemerintah kembali menetapkan nama Bank Rakyat Indonesia dengan status sebagai bank umum.

1969

BRI ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya bank yang bertugas menyalurkan kredit program Bimbingan Masal (Bimas) dan mulai dibentuknya BRI Unit.

1984

Setelah dihentikannya program Bimas oleh Pemerintah, BRI mulai mengelola bisnis mikro secara komersial yang disalurkan melalui BRI Unit.

1992

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992, terjadi perubahan status badan hukum BRI menjadi perusahaan perseroan (Persero).

2003

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan *ticker* "BBRI". Kini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI.

2007

BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah.

2009

Interkoneksi *real time online* seluruh jaringan kerja yang pada saat itu berjumlah 6.480 unit kerja.

2011

- Tanggal 11 Januari 2011, melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1: 2.
- Tanggal 3 Maret 2011, penandatanganan Akta Akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk. antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).
- Tanggal 16 Desember 2011, penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (Hong Kong).

2013

BRI Hybrid Banking merupakan layanan *self-service banking* yang pertama di Indonesia.

2018

- Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan Artificial Intelligence bernama Sabrina sebagai BRI New Assistance yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.
- Bank BRI mendorong UMKM Go Digital dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan *startup-startup market place* sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas.
- BRI menerbitkan beberapa surat berharga berikut:
  - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A, jatuh tempo pada 21 Februari 2023, dengan nilai nominal Rp1,837,000,000,000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,65%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
  - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B, jatuh tempo pada 21 Februari 2025, dengan nilai nominal Rp605,000,000,000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,90%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
  - Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018, jatuh tempo pada 21 Juni 2023, dengan nilai nominal Rp500,000,000,000 dan *coupon/ discount rate* sebesar 7,70%, serta peringkat AA dari Pefindo.
- BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Venture) dan PT Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM). Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 7 (tujuh) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRI Syariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures) dan Sekuritas (Danareksa Sekuritas).
- BRI juga meresmikan BRI Institute sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau National Capacity Building di segmen UMKM.

2017

- Pada tanggal 14 Maret 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste
- Pada tanggal 24 Februari 2017 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.

2016

- Tanggal 18 Juni 2016, pukul 18.38 Waktu Kourou, Guyanan Prancis, satelit milik BRI, BRIsat meluncur dengan sukses. BRIsat menjadi infrastruktur penunjang layanan digital Bank BRI.
- BRI Mengakuisisi BTMU Finance yang bergerak di bidang *multifinance*. BTMU Finance berubah nama menjadi BRI Finance.
- Meluncurkan layanan *full-digital branch* di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan juga program digitalisasi untuk UMKM seperti e-Pasar, Teras BRI Digital. 1 Juta Domain Gratis Untuk UMKM dan Rumah Kreatif BUMN.

2015

- Pada tahun 2015 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Singapura serta mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life)
- Pada tanggal 4 Agustus 2015 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum dapat menikmati layanan perbankan.
- BRI juga meresmikan BRI Corporate University sebagai sarana penunjang yang komprehensif bagi pendidikan pekerja.

2014

- Jaringan ATM BRI terus bertumbuh mencapai 20.792 unit ATM dan EDC menembus angka 131.204 unit, merupakan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia.
- BRI telah melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan Space System/ Loral (SSL) dan Arianespace pada tanggal 28 April 2014.

Struktur Organisasi

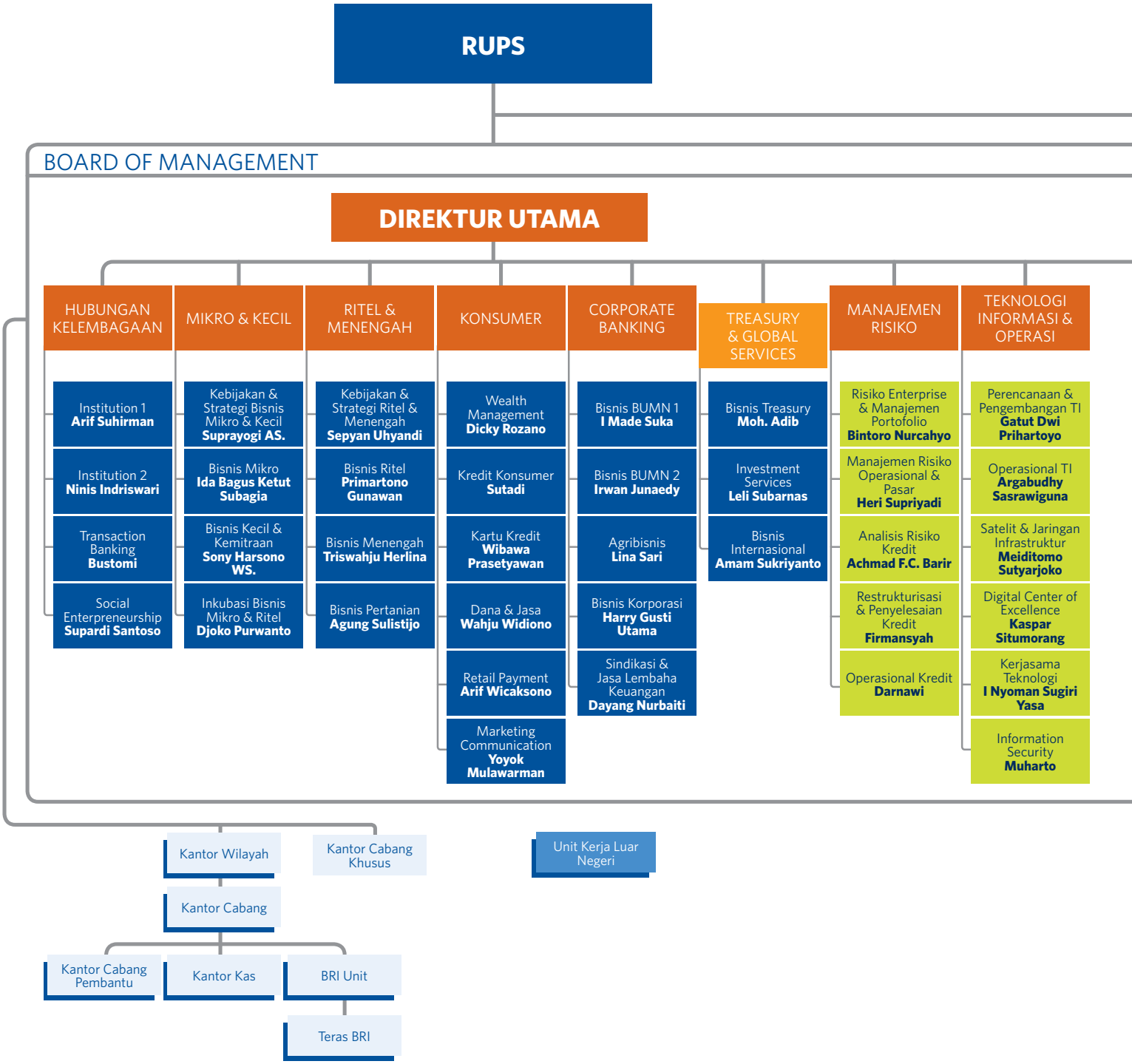

Struktur Organisasi

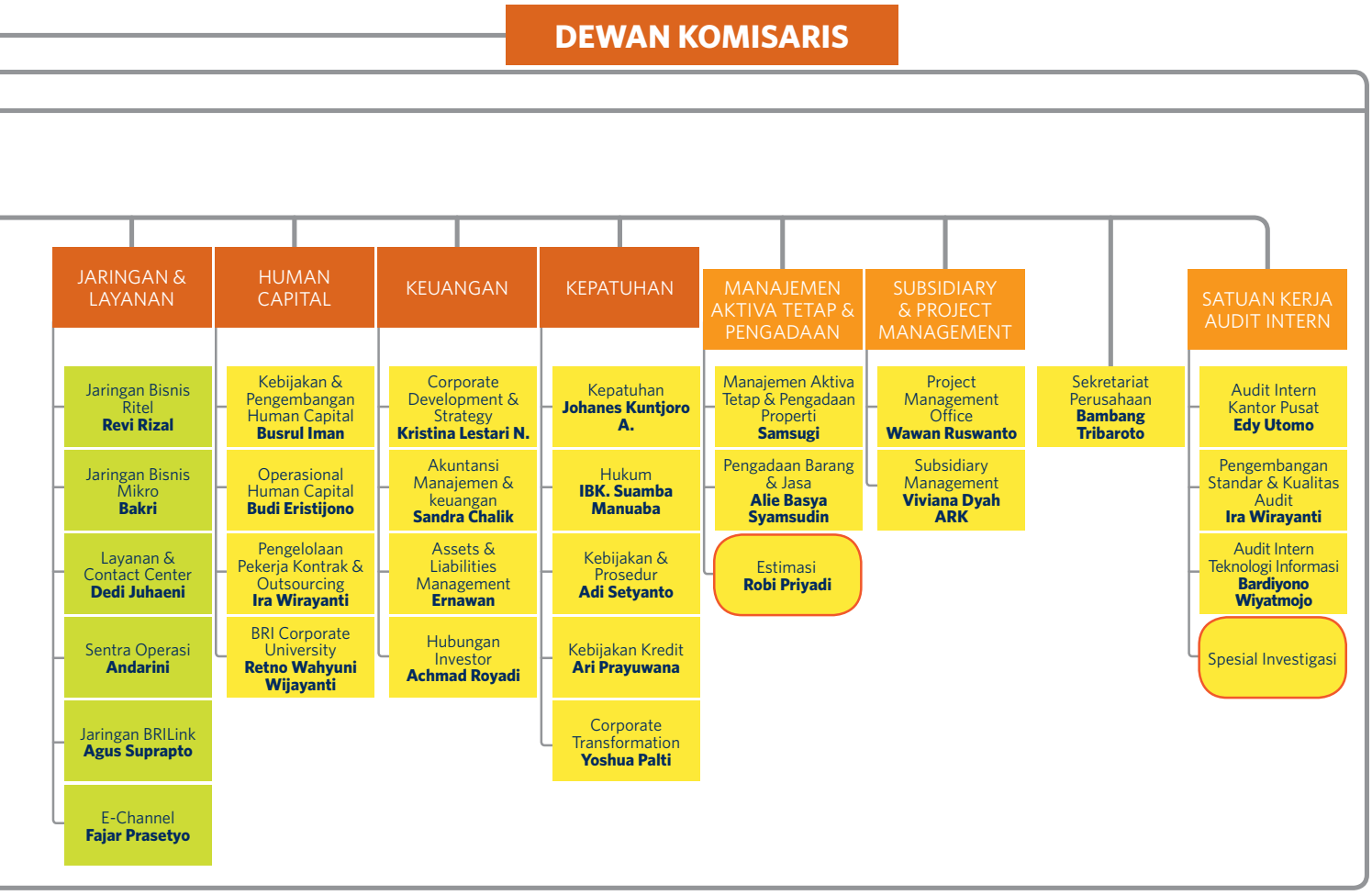

Komite Dewan Komisaris : Audit, Nominasi & Remunerasi, Pemantau Manajemen Risiko, Tata Kelola Terintegrasi

Komite Direksi : Manajemen Risiko, Kebijakan Kredit, Kredit ALCO, Kebijakan Human Capital, TI, Capital & Investment, Evaluasi Jabatan, Produk, Project Management Office, Pengadaan Barang & Jasa

Direksi SEVP Bisnis Penunjang Bisnis Support

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama

Visi

Menjadi

The Most Valuable Bank

di Asia Tenggara dan

Home to the Best Talent

Misi

- Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui:
  - Sumber Daya Manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*)
  - Teknologi informasi yang handal dan *future ready*
  - Jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip *operational* dan *risk management excellence*.
  - Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.

Persetujuan Visi dan Misi

Visi & Misi BRI telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan NOKEP. 403-DIR/CDS/05/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Nilai-Nilai Utama

Integrity

Integrity yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai integrity adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan.

Professionalism

Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai *professionalism* adalah *continuous learner* dan *fairness*.

Trust

Trust yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan & saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai *trust* adalah saling menghargai & mengutamakan kepentingan Perseroan dan Negeri.

Innovation

Innovation yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/ kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai *innovation* adalah visioner dan pionir perubahan.

Customer Centric

Customer Centric yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai *customer centric* adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan *collaborative*.

Budaya Perusahaan

BRILiaN

Budaya BRI yakni BRILIAN, **10 Sikap Perilaku**, **20 Indikator Perilaku** dan **20 Tindakan Budaya Kerja** menunjukkan komitmen dan tekad BRI untuk menjadikan BRI sebagai bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dan terdepan dalam membangun ekonomi bangsa.

BRILiaN (**BRI dengan Lima Nilai**) meliputi nilai-nilai pokok yang dikelompokkan sebagai berikut:

- ✓ ***Integrity***
- ✓ ***Professionalism***
- ✓ ***Trust***
- ✓ ***Innovation***
- ✓ ***Customer Centric***

10 (Sepuluh)

Sikap Perilaku Insan BRI

adalah sikap dan perilaku setiap insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja BRI (BRILiaN)

1. Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan
2. Selalu menjaga kehormatan, dan nama baik pribadi dan perusahaan
3. Handal, prudent, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Berorientasi ke masa depan.
5. Sebagai panutan dan berjiwa besar.
6. Tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan.
7. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan.
8. Terampil, ramah, senang melayani
9. Memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai.
10. Mengembangkan sikap kerja sama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan.

20 (Dua Puluh)

Indikator Perilaku

adalah parameter yang digunakan untuk mengukur implementasi sikap dan perilaku insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja

1. Mengutamakan kepentingan Perusahaan.
2. Mendorong dan menghargai keberanian menyampaikan apa adanya, termasuk penyimpangan.
3. Menepati janji dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
4. Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja.
5. Melaksanakan tugas dengan hati-hati, sesuai ketentuan dan menerima konsekuensinya.
6. Menggunakan sumber daya secara optimal.
7. Selalu meningkatkan kemampuan kompetensi.
8. Berani mencoba gagasan baru dan cara-cara kerja yang lebih baik.
9. Selalu memberikan keteladanan yang baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.
10. Mau menerima kritik saran untuk kebaikan.
11. Selalu bertindak tanpa pilih kasih.
12. Yakin dan berani mengambil keputusan yang benar
13. Memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah
14. Melayani dengan cepat, tepat, akurat dengan tetap sopan santun.
15. Memberikan solusi terbaik untuk nasabah dengan senang hati.
16. Bertindak konsisten dan menjaga mutu layanan dengan memperhatikan kepentingan nasabah.
17. Bertindak objektif berdasarkan sikap, perilaku, dan prestasi dalam mempertahankan dan mengembangkan Pekerja.
18. Saling menghormati antar sesama, atasan dan bawahan
19. Memberikan penghargaan kepada individu/kelompok berprestasi.
20. Melakukan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan prestasi dan kontribusi pada Perusahaan.

Budaya Perusahaan

Selanjutnya terdapat juga

20 (Dua Puluh)

Tindakan Budaya Kerja

yang merupakan faktor keberhasilan awal (*early success factor*) dalam implementasi Budaya Kerja BRI

1. Berdoa bersama setiap pagi hari.
2. Selalu tepat waktu dalam memenuhi perjanjian (jam kantor, rapat, pertemuan bisnis, penyampaian laporan).
3. Jujur dalam melaksanakan presensi.
4. Tidak merokok di dalam kantor.
5. Menggunakan telepon, komputer dan fasilitas dinas lainnya hanya untuk keperluan dinas.
6. Menggunakan fasilitas kantor secara efektif dan efisien.
7. Menggunakan jam kerja seoptimal mungkin dan beristirahat sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Membantu bawahan dan rekan sekerja apabila yang bersangkutan menghadapi kesulitan.
9. Menyelenggarakan dialog secara berkala dengan staf dan bawahan untuk berbagi informasi & memotivasi.
10. Menanggapi dan menyelesaikan komplain pada kesempatan pertama sesuai dengan kewenangannya.
11. Ramah (senyum & sapa) dalam memberikan pelayanan kepada nasabah (internal & eksternal).
12. Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja (tempat kerja, mushola, gudang, toilet).
13. Memberikan penghargaan secara langsung kepada yang berhasil dengan baik dalam kinerja maupun perilaku (penghargaan tidak harus dalam bentuk finansial).
14. Meningkatkan kepedulian dan pemahaman untuk dapat mengenali dan mengendalikan risiko.
15. Meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan kondisi sarana penunjang layanan.
16. Meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk BRI dan perbankan pada umumnya.
17. Menjaga perilaku & penampilan sebagai bankir profesional sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
18. Memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah baik internal dan eksternal.
19. Mengembangkan kompetensi untuk mendukung tuntutan organisasi dan persaingan.
20. Berkoordinasi secara efektif dan efisien dengan pihak internal dan eksternal.

Profil Dewan Komisaris

Andrinof A. Chaniago

Komisaris Utama / Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	56 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Menyelesaikan pendidikan Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (1990), gelar Diploma, The National Development Courses, Fu Hsing Kang College (2004), Taiwan dan gelar Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004).
Riwayat Pekerjaan	Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) (2015-2017), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS (2014-2015), dan Direktur Eksekutif, CIRUS Surveyors (2008-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama/Independen BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017.
Rangkap Jabatan	Saat ini aktif sebagai Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia (2006 – sekarang).
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris

Gatot Trihargo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	58 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih gelar Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1989); *Master of Accounting and Financial Information Systems* (MAFIS) dari Cleveland State University, Ohio, USA (1993), dan meraih Doktor bidang Manajemen Stratejik dari Universitas Padjajaran, Bandung (2016).
Riwayat Pekerjaan	Pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain di Kementerian BUMN (2014-2015), Komisaris PT Pertamina (Persero) (2014-2015), Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014), Deputi Bidang Usaha Jasa di Kementerian BUMN (2013-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Wakil Komisaris Utama BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-99/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015. Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI.
Rangkap Jabatan	Saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi di Kementerian BUMN (2015-sekarang).
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris

Ahmad Fuad Rahmany

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	64 tahun
Domisili	Depok
Pendidikan	Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (1981), Master of Art bidang Economics dari Duke University, North Carolina, USA (1987) dan meraih gelar Doktor bidang Economics dari Vanderbilt University, Tenesse, USA (1997).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (2014-2015), Anggota Dewan Direktur Non Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2013-2014), Direktur Jenderal Pajak, kementrian Keuangan (2011-2014), Komisioner ex-officio Lembaga Penjamin Simpanan (2009-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-85/D.03/2015 tanggal 19 Mei 2015. Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Audit, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris

A. Sonny Keraf
Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	60 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih gelar Sarjana Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta (1988), meraih gelar Master in Philosophy dari The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (1992), dan gelar Doctor (Ph.D.) in Philosophy dari The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (1995).
Riwayat Pekerjaan	Pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dan Wakil ketua Komisi VII DPR RI, Oktober (2004–2009), dan Menteri Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup (1999-2001), dan Dosen Luar Biasa Program Pasca sarjana S3 Universitas Indonesia (2001-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-98/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015. Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.
Rangkap Jabatan	Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Gorontalo Sejahtera Mining (2015-sekarang), Anggota Dewan Energi Nasional (2014-sekarang), dan aktif sebagai Pengajar di UNIKA Atmajaya Jakarta (1988-sekarang).
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris

Mahmud

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	60 tahun
Domisili	Ciputat, Tangerang Selatan
Pendidikan	Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1982), dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran (2002).
Riwayat Pekerjaan	Pernah menjabat sebagai Advisor Senior, Grup Dukungan Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Jakarta (2016), Kepala Departemen DPB1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta (2013-2016), Kepala Departemen DPB1 Bank Indonesia Jakarta (2013), Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Makassar (2012-2013).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-40/PB.12/2017 tanggal 3 Maret 2017. Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko, Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.
Rangkap Jabatan	Saat ini juga menjabat sebagai External Faculty Member, Bank Indonesia Institute (2016-Sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris

Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	47 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1993), Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994), gelar Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) Paris (2000), gelar D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (2002), dan gelar Ph.D. bidang Economics (Applied Macro and Micro Economics, Development Studies in Finance) dari Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris (2005).
Riwayat Pekerjaan	Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2017), Komite Pelayanan dan Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan (2016-2017), Kinerja Organisasi dan SDM di BPJS Ketenagakerjaan (2016-2017), Tim Task Force/Satgas Desa Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (2016-2017), Tim Task Force/Satgas Migas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (2014-2015), Komite Audit dan Komite Risiko PT POS Indonesia (Persero) (2012-2015), dan Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit (2008-2013).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018. Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.
Rangkap Jabatan	Saat ini aktif sebagai Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Indonesia (2006-sekarang).
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris

Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	46 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada (1996), gelar M.A. Ilmu Politik dari Ohio University, Ohio, USA (2003), dan Ph.D, Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Northern Illinois University (2010).
Riwayat Pekerjaan	Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (2016-2017), Dosen Paramadina University (2016), Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik (PERSEPI) (2013-2016), Direktur Eksekutif Populi Center (Public Opinion & Policy Research) (2013-2015).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017. Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.
Rangkap Jabatan	Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2016-sekarang), dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) 2015-sekarang).
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Dewan Komisaris

Hadiyanto
Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	56 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (1986), Certificate International Tax Program, Harvard University, USA (1993), gelar LL.M dari Harvard University Law School, USA (1993), dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2012).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (2006 - 2008), Dewan Pengawas Gelora Bung Karno (2010 - 2011), Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (2011- 2015), Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (2007 - 2012), Komisaris Utama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (2007 - 2009), Komisaris PT Tuban Petro Indonesia (2007-2013), Dewan Direktur Indonesia LPEI (Eximbank), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan (2006-2015), Komisaris PT Telkom Indonesia (2012-2018).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK No: SR-194/PB.12/2018 tanggal 21 September 2018. Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.
Rangkap Jabatan	Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan (2015-sekarang), Ketua Dewan Pengawas pada RS Dr. Cipto Mangunkusumo (2016-sekarang), dan Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015-sekarang).
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Suprajarto
Direktur Utama

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	62 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Ekonomi, UPN Yogyakarta (1982), Gelar Magister Manajemen, Manajemen Pemasaran, Universitas Padjajaran, Bandung (2001), dan Gelar Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung (2014).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Direktur Bidang Jaringan dan Layanan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2015).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-70/PB.12/2017 tanggal 3 Mei 2017.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Haru Koesmahargyo
Direktur Keuangan

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	51 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989), dan Gelar MBA, Investment Banking, Emory University, Amerika Serikat (2000).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Strategi Bisnis & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018), Direktur Strategi & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Presiden Komisaris PT BTMU BRI Finance (2014-2015), Kepala Divisi Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), dan General Manager, Kantor Cabang New York PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-109/D.03/2015 tanggal 8 Juni 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur Keuangan.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Mohammad Irfan

Direktur Manajemen Risiko

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	59 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Perikanan, Institut Pertanian Bogor (1982), dan Gelar Magister Manajemen, LPPM, Jakarta (1998).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018), Direktur Korporasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Pemimpin Wilayah Jakarta I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-100/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur Manajemen Risiko.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Kuswiyoto*

Direktur Corporate Banking

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	53 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya (1986), dan Gelar MBA Finance, Washington University, Amerika Serikat (1997).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Kelembagaan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Komisaris, PT Bringin Indotama Sejahtera Finance (2013-2014), Pemimpin Wilayah Jakarta 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015), Pemimpin Wilayah Makassar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-207/D.03/2015 tanggal 4 November 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur *Corporate Banking*.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) efektif menjabat s/d 03 Januari 2019

Profil Direksi

Sis Apik Wijayanto

Direktur Hubungan Kelembagaan

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	57 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Administrasi Niaga, Universitas Brawijaya, Malang (1988), dan Gelar Magister Manajemen, Universitas Airlangga, Surabaya (2007).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Institution PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2017), Direktur Funding & Distribution PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2015-2016), Pemimpin Wilayah Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015), Pemimpin Wilayah Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), dan Pemimpin Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-85/D.03/2016 tanggal 20 Mei 2016. Bertanggungjawab sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Priyastomo
Direktur Mikro dan Kecil

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	55 tahun
Domisili	Tangerang
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987), dan Gelar Magister Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kredit Mikro dan Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018), Direktur Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016), Pemimpin Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016), Pemimpin Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016), Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), dan Pemimpin Wilayah Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-105/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016. Bertanggungjawab sebagai Direktur Kredit Mikro dan Kecil.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Indra Utoyo

Direktur Teknologi Informasi & Operasi

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	56 tahun
Domisili	Bandung
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1985), Gelar Magister Communication and Signal Processing, Imperial College, University of London, UK (1994), dan Doctor Candidate, Strategic Management, Universitas Indonesia, Jakarta (2014).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018), Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom Group, PT Telkom (2016-2017), CEO CFU Digital Service Telkom Group, PT Telkom (2016-2017), Komisaris Utama, PT Metra Digital Innovation (Telkom MDI) (2016-2017), dan Komisaris Utama, PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) (2009-2016).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017. Bertanggungjawab sebagai Direktur Teknologi Informasi & Operasi.
Rangkap Jabatan	Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom (2012-sekarang), dan Komisaris Utama PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) (2009-Sekarang).
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

R. Sophia Alizsa

Direktur *Human Capital*

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	59 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Jember, Jember (1983), dan Gelar Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2004).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan Jaringan, Perum Jamkrindo (2015-2017), Pemimpin Cabang Khusus, PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk (2010-2015), dan Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. 01.KDK.03/2018 tanggal 13 April 2018. Bertanggungjawab sebagai Direktur *Human Capital*.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Handayani
Direktur Konsumer

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	53 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya (1988), dan Gelar Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran, Bandung (2001).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2016-2017), Direktur Komersial, PT Garuda Indonesia Tbk (2014-2016), Direktur Marketing & Alternate Distribution, PT AXA Mandiri (2013-2014).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Konsumer BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. KEP-44/D.03/2018 tanggal 14 Maret 2018. Bertanggungjawab sebagai Direktur Konsumer.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Supari

Direktur Ritel dan Menengah

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	52 tahun
Domisili	Sidoarjo
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana bidang Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya, Malang (1989), dan Gelar Master Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Transformation BRI (2017-2018), SEVP Manajemen Jaringan BRI (2016-2018), Pemimpin Wilayah BRI Kantor Wilayah Makassar (2015-2016), dan Pemimpin Wilayah BRI Kantor Wilayah Padang (2014-2015).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-34/KDK.03/2018 tanggal 04 Desember 2018. Bertanggungjawab sebagai Direktur Ritel dan Menengah.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Osbal Saragi Rumahorbo

Direktur Jaringan dan Layanan

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	53 tahun
Domisili	Pondok Aren, Tangerang Selatan / South Tangerang
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Sarjana Sosek Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1989), dan Gelar Magister Manajemen Akuntansi, Universitas Sumatera Utara (2011).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 (2016-2018), Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 3 (2016), dan Pemimpin Wilayah BRI Kantor Wilayah Bandar Lampung (2015-2016).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-150/PB.12/2018 tangal 27 Juli 2018. Bertanggungjawab sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Direksi

Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Kepatuhan

Kewarganegaraan	Indonesia
Umur	48 tahun
Domisili	Serpong, Tangerang Selatan
Pendidikan	Meraih Gelar Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Jember (1988), dan Gelar Magister Manajemen, Marketing/MIS, UGM Adger Collage University Norway (1999).
Riwayat Pekerjaan	Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital BRI (2017-2018), Kepala Divisi Transaction Banking BRI (2016-2017), dan Wakil Kepala Divisi Jaringan Bisnis Ritel BRI (2012-2016).
Penunjukkan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan serta teah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-150/PB.12/2018 tanggal 27 Juli 2018. Bertanggungjawab sebagai Direktur Kepatuhan.
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Profil Senior Executive Vice President (SEVP)

Gunawan Sulistyo

SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

54 tahun, Warga Negara Indonesia,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai Pejabat Level SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan sejak 1 Mei 2017 berdasarkan SK No. 428-DIR/KPS/05/2017 tanggal 24 Mei 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang & Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Deputy Chief Learning Officer BRI Corporate University.

Riwayat Pendidikan

Meraih Magister Management bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tri Wintarto

Kepala Audit Intern

56 tahun, Warga Negara Indonesia,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai Kepala Audit Intern, Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak 1 Mei 2017 berdasarkan SK No. 427-DIR/KPS/05/2017 tanggal 24 Mei 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur, Kantor Inspeksi Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Inspektur, Kantor Inspeksi Jakarta 3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kepala Divisi Bisnis Program Pangan dan Kemitraan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Pemimpin Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar S2 bidang Manajemen dari Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Profil Senior Executive Vice President (SEVP)

Listirarini

SEVP Treasury & Global Services

53 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai Pejabat Level SEVP Treasury & Global Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sejak Juli 2018 berdasarkan. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Development and Strategy PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, General Manager BRI New York Agency, dan Kepala Desk Hubungan Investor BRI.

Riwayat Pendidikan

Meraih Sarjana Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989), dan Master of Business (Banking and Finance), Monash University, Melbourne, Australia (1999).

Demografi Karyawan

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	2016	2017	2018
Senior Executive Vice President	4	5	3
Executive Vice President	86	98	103
Vice President	193	209	198
Assistant Vice President	380	345	353
Senior Manager	747	735	766
Manager	1.248	1.331	1.320
Assistant Manager	4.992	5.41	5.599
Officer	12.214	12.003	11.945
Assistant	73.469	72.722	69.656
Total	**93.333**	**92.858**	**89.943**

*di luar pekerja *outsourcing*

Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	2016	2017	2018
SLTA / Setingkat	3,133	2.652	2.308
Diploma	12,055	10.134	10.595
Strata 1	76,966	78.867	75.797
Strata 2	1,172	1.202	1.237
Strata 3	7	3	6
Total	**93.333**	**93.679**	**89.943**

*di luar pekerja *outsourcing*

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status	2016	2017	2018
Pekerja Tetap	58,811	60.764	60.973
Pekerja Kontrak	34,262	31.994	28.970
Trainee	64	100	63
Outsourcing	36,197	37.929	33.949
Total	**129,334**	**130.787**	**125.039**

Pengembangan Kompetensi Pekerja dan Persamaan Kesempatan untuk Masing-Masing Level Organisasi

Development Program

Program pendidikan kepada calon pekerja BRI atau pekerja BRI bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi pada suatu jabatan tertentu. Program ini terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. *Management Development Program*
   Program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja untuk persiapan menduduki jabatan dengan *corporate title* jabatan mulai dari level jabatan *Assistant* sampai dengan *Executive Vice President*.

2. *Competency Development Program*
   Program pendidikan yang disusun berdasarkan hasil analisa kompetensi, kebutuhan perusahaan dan kondisi *actual* di unit kerja. Program ini dibagi dalam dua kelompok besar, yakni *hard competency* dan *soft competency* untuk setiap level *Job Title*.

3. *Master & Doctoral Degree Program*
   Program pendidikan kepada pekerja BRI yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pekerja melalui jenjang Pendidikan formal antara lain Pasca Sarjana Strata 2 dan Strata 3.

Demografi Karyawan

No	Corporate Title	Developing Learning Program	
		Management Developing Learning Program	Competency Development Learning Program
1	*Executive Vice President*	*Executive Vice President Developing Program*	Pemimpin Wilayah, Kepala Divisi dan Inspektur
2	*Vice President*	*Vice President Developing Program*	Wakil Pemimpin Wilayah, Wakil Kepala Divisi dan Wakil Inspektur
3	*Assictant Vice President*	*Assistant Vice President Developing Program*	Pemimpin Cabang, Kepala Bagian dan Group Head
4	*Senior Manager*	*Senior Management Developing Program*	
5	*Manager*	*Manager Developing Program*	Pemimpin Cabang Pembantu, Wakil Kepala Bagian, Priority Banking Manager, Manajer Pemasaran, Manajer Operasional dan Manajer Bisnis Mikro
6	*Assistant Manager*	*Assistant Manager Developing Program*	Asisten Manajer Operasional, Asisten Manajer Bisnis Mikro, Asisten Manajer Pemasaran Dana, Asisten Manajer Pemasaran Kredit
7	*Officer*	*Supervisor Developing Program*	Supervisor, Kepala Unit, Staff dan jabatan setingkat Officer lainnya
8	*Assistant*	*Assistant Developing Program*	Relationship Manager Kredit & Dana, Mantri, CS, Teller dan jabatan setingkat Assistant lainnya

Realisasi Biaya Pelatihan dan Jumlah Peserta Pendidikan Tahun 2018	
Realisasi Biaya	Rp 603,053 miliar
Realisasi Peserta	131,114 peserta *in class*
	2,672,110 peserta *e-learning*

No	Mata Anggaran	Realisasi Desember 2018*) (Dalam Juta Rupiah)	Realisasi Jumlah Peserta	Realisasi Biaya/Peserta**) (Dalam Ribu Rupiah)
1	*Development*	106.678	9.548	11.173
2	*Enhancement*	323.566	2.793.673	116
3	FPK & FGD	155.736	104.542	1.490
4	Sosialisasi	3.418	61.436	56
5	Literasi	443	3	147.887
6	*Support*	13.211	-	-
Total		603.053	2.969.202	203

*) Dalam Juta Rupiah
**) Dalam Ribu Rupiah

Komposisi Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham BRI pada akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 46.403 pemegang saham yang terdiri dari 44.203 pemodal nasional dan 2.199 pemodal asing. Mayoritas kepemilikan saham BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 56,75%. Masyarakat memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 43,25% dan tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari total saham sebagaimana tercatat dalam Biro Administrasi Efek. Pemodal asing memiliki porsi kepemilikan 34,37% dan sisanya pemodal nasional dengan porsi kepemilikan 8,87%.

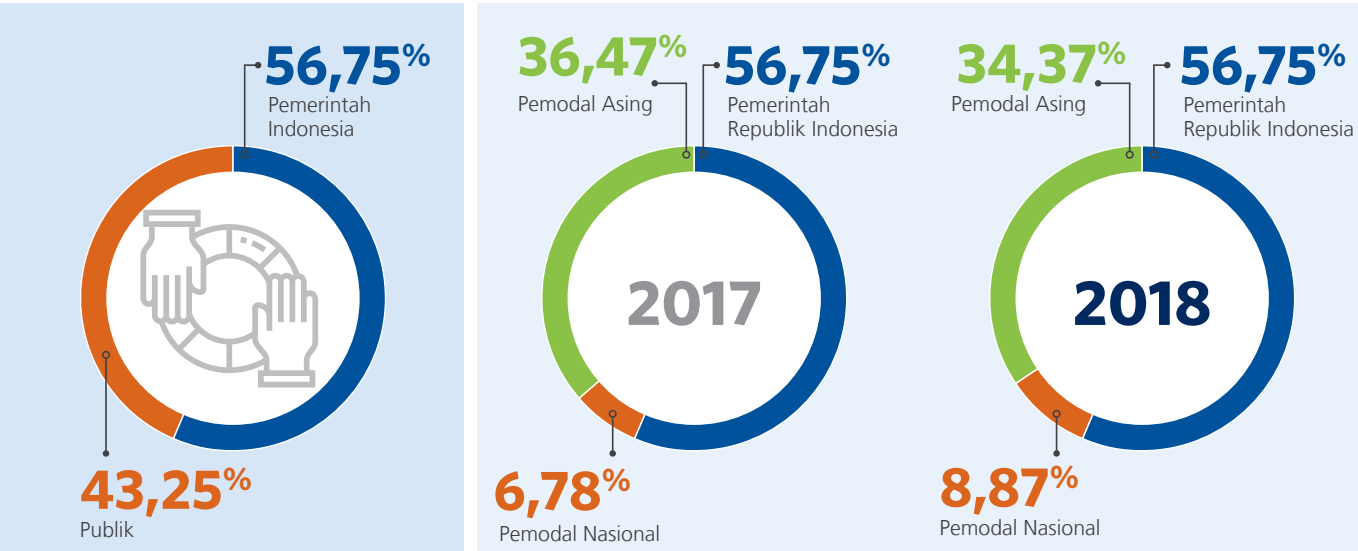

Komposisi Pemegang Saham BRI Posisi 31 Desember 2018

Kategori	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi
Negara RI	**1**	**70.000.000.000**	**56,75%**
Publik	**46.402**	**53.345.810.000**	**43,25%**
Pemodal Nasional	**44.203**	**10.945.506.492**	**8,87%**
Perorangan	41.935	1.283.300.312	1,04%
Karyawan	1.511	154.448.600	0,12%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,001%
Bank	2	1.108.667.500	0,89%
Koperasi	9	3.548.427	0,002%
Yayasan	30	121.490.200	0,09%
Dana Pensiun	164	1.027.553.000	0,83%
Asuransi	101	2.814.198.400	2,28%
Perseroan Terbatas	109	1.483.083.303	1,20%
Reksa Dana	341	2.947.626.750	2,38%
Pemodal Asing	**2.199**	**42.400.303.508**	**34,37%**
Perorangan	151	46.156.100	0,04%
Badan Usaha Asing	2.048	42.354.147.408	34,33%
Total	**46.403**	**123.345.810.000**	**100%**

Komposisi Pemegang Saham

20 Pemegang Saham Terbesar BRI Posisi 31 Desember 2018

No	Nama	Saham	(%)
1	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	1.294.645.300	1,05
2	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	1.043.573.685	0,85
3	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS	818.636.918	0,66
4	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	804.766.701	0,65
5	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	740.542.500	0,60
6	JPMCB NA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY	721.908.900	0,59
7	HSBC BANK PLC S/A SAUDI ARABIAN MONETARY	691.519.295	0,56
8	THE NT TST CO S/A FIDELITY INVESTMENT TR	505.247.900	0,41
9	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING	495.279.400	0,40
10	PT AIA FINL - UL EQUITY	433.051.500	0,35
11	BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDEN	422.848.600	0,34
12	THE NT TST CO S/A HERMES INVESTMENT FUND	415.043.856	0,34
13	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUND	394.315.864	0,32
14	BNYM RE VIRTUS VONTOBEL EMERGING MARKETS	392.206.083	0,32
15	NT TST CO S/A GENERATION IM FUND PUBLIC	374.228.100	0,30
16	RBC S/A VONTOBEL FUND - MTX SUITANABLE E	345.299.900	0,28
17	JPMBL SA UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	342.378.930	0,28
18	SSB OBIH S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKE	337.523.110	0,27
19	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.-JPMCB NA RE -	337.222.070	0,27
20	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW	334.220.795	0,27

Komposisi Pemegang Saham

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Desember 2017		31 Desember 2018	
		Lembar Saham	(%)	Lembar Saham	(%)
DEWAN KOMISARIS					
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Independen	-	-	-	-
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	-	-	249.700	0.0002
A Fuad Rahmany	Komisaris Independen	-	-	-	-
A Sony Keraf	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mahmud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Rofikoh Rohim	Komisaris Independen	-	-	-	-
Vincentius Sonny Loho*	Komisaris	-	-	-	-
Jeffry W. Wurangian	Komisaris	-	-	237.900	0.0002
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	-	-	188.700	0.00015
Hadiyanto**	Komisaris	-	-	-	-

*) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018
**) Diangkat sesuai RUPST 22 Maret 2018

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Desember 2017		31 Desember 2018	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
DIREKSI					
Suprajarto	Direktur Utama	-	-	466.100	0.00038
Sis Apik Wijayanto	Direktur	700,000	0.00057	1.328.700	0.00100
Susy Liestyowati *	Direktur	2,900,000	0.00235		
Donsuwan Simatupang *	Direktur	142,500	0.00012		
Mohammad Irfan	Direktur	170,000	0.00014	698.700	0.00057
Haru Koesmahargyo	Direktur	-	-	528.700	0.00043
Kuswiyoto	Direktur	-	-	528.700	0.00043
Priyastomo	Direktur	-	-	528.700	0.00043
Indra Utoyo	Direktur	-	-	419.500	0.00034
R Sophia Alizsa	Direktur	25,000	0.00002	142.100	0.00010
Handayani	Direktur	-	-	106.600	0.00008
Ahmad Solichin Lutfiyanto**	Direktur	-	-	585.000	0.00047
Supari**	Direktur	-	-	-	-
Osbal Saragi R**	Direktur	-	-	410.500	0.0003

*) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018
**) Diangkat sesuai RUPST 22 Maret 2018

Struktur Perusahaan

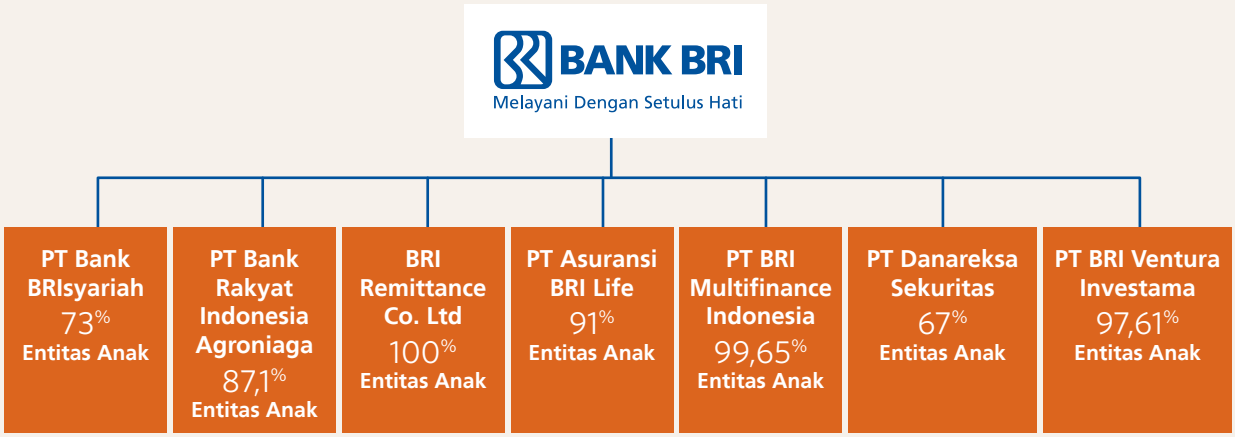

Entitas Asosiasi

PT Bahana Artha Ventura 35,00% Entitas Asosiasi	**PT Danareksa Investment Management** 35,00% Entitas Asosiasi	**PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia** 8,00% Entitas Asosiasi	**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** 3,00% Entitas Asosiasi	**PT Pemeringkat Efek Indonesia** 0,21% Entitas Asosiasi

Daftar Entitas Anak dan/ atau Entitas Asosiasi

ENTITAS ANAK

Nama Perusahaan	Jenis Usaha/ Bidang Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Jumlah Aset	Kepemilikan %	Mulai Beroperasi	Alamat
PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah)	Bank Umum Syariah	19 Desember 2007	Rp 37,92 triliun	73,00%	16 Oktober 2008 Masih Beroperasi	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta 10160
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)	Bank Umum Swasta Nasional	3 Maret 2011	Rp 23,33 triliun	87,10%	8 Februari 1990 Masih Beroperasi	Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	Pembiayaan	16 Desember 2011	Rp 3,62 triliun	99,00%	7 April 2005 Masih Beroperasi	Wisma 46 Lantai 10-Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta
PT Asuransi BRI Life (BRI Life)	Perusahaan Asuransi Jiwa	14 Desember 2015	Rp 9,38 triliun	91,00%	28 Oktober 1987 Masih Beroperasi	Graha Irama lt.2,5,7,11 & 15, Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 & 2, Jakarta 12950, Indonesia
PT Danareksa Sekuritas (DS)	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	21 Desember 2018	Rp 869,1 miliar	67,00%	1 Juli 1992 Masih Beroperasi	Gedung Danareksa Lantai 2, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 , Jakarta 10110
PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)	Perusahaan Modal Ventura	20 Desember 2018	Rp 7,20 miliar	97,61%	22 Januari 1998 Masih Beroperasi	Gedung Ad Premier Lt 6 Jl. TB Simatupang No.5, RT.5/RW.7, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta 12550
BRI Remittance Co. Ltd. (BRI Remittance)	Remittance	1 Agustus 1983	Rp 6,86 miliar	100.00%	1 Agustus 1983 Masih Beroperasi	Room 1115, 11/F, Lippo Center, Tower II, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

ENTITAS ASOSIASI

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Jumlah Aset	Kepemilikan %	Mulai Beroperasi	Alamat
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	Modal Ventura	21 November 2017	Rp 1.82 triliun	35,00%	5 Agustus 1992 Masih Beroperasi	Wisma Prima Lantai 5, Jl. Kapten P. Tendean No. 34, Jakarta Selatan 12790
PT Danareksa Investment Management (DIM)	Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	20 Desember 2018	Rp 216,63 miliar	35,00%	9 Oktober 1992 Masih Beroperasi	Gedung Danareksa Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 , Jakarta 10110
PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia (SBPI)	Investasi	1 Juni 1981	Rp 169,45 miliar	8,00%	27 Oktober 1981 Masih Beroperasi	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jl. HR Rasuna Said Kav 62 Kuningan Jakarta Selatan 12920
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Lembaga Penyelesaian Efek	5 Desember 1997	Rp 2 triliun	3,00%	11 November 1998 Masih Beroperasi	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor, JL. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Pemeringkat Efek	15 Juni 1995	Rp 185,05 miliar	0,21%	21 Desember 1993 Masih Beroperasi	Panin Tower Senayan City, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora, Jakarta 12220

Kronologi Pencatatan Saham

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*) sebesar 3.811.765.000 Saham Biasa Seri B kepada investor domestik maupun asing. Jumlah saham tersebut merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia sebesar 2.047.060.000 dan saham portepel sebesar 1.764.705.000.

Penawaran Saham Perdana tersebut berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam - sekarang OJK (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/ PM/2003) tanggal 31 Oktober 2003).

Saham yang ditawarkan bernominal Rp500,00 dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp875,00, serta dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Dengan dilakukannya penawaran saham perdana ini, BRI menerbitkan dua jenis saham; Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna diterbitkan dan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

Selanjutnya pada 10 November 2003, BRI melaksanakan opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan pada 3 Desember 2003 melakukan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi). Divestasi dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih serta opsi penjatahan, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

Penggunaan Dana IPO

No.	Penggunaan Proceed IPO (Rp miliar)	Rencana	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Pencapaian
1	*Upgrade Core banking* dan IT *System*	883,27	196,24	564,35	646,96	698,87	723,36	883,27	100%
2	Ekspansi jaringan kerja	441,63	213,68	419,34	441,63	441,63	441,63	441,63	100%
3	Riset dan Pengembangan Produk	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	100%
	Total Proceed	1.472,11	557,13	1.130,90	1.235,80	1.287,71	1.312,20	1.472,11	100%

Kronologi Pencatatan Saham

Management Stock Option Plan (MSOP)

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (*Management Stock Option Plan*/ MSOP).

Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI tercatat sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa exercise MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009, sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010.

Ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No.1-A Lamp.Keputusan Direksi BEJ No.Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek.

Saham MSOP yang telah di-exercise sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan berakhirnya masa exercise, masih terdapat 18,3 juta lembar saham yang tidak di-exercise yang terdiri dari 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III.

Tahapan MSOP	Jumlah Saham MSOP (lembar)	Tanggal dimulainnya MSOP	Tanggal Berakhirnya Tahapan MSOP	Harga	Saham di exercise
Tahap I	235.294.100	10 November 2003	9 November 2008	Rp962,50	230.999.000
Tahap II	235.294.100	10 November 2004	9 November 2009	Rp1.750,00	230.047.000
Tahap III	117.647.050	10 November 2005	9 November 2010	Rp20.907 s/d Rp8.649*)	108.830.000
Jumlah	588.235.250				569.876.000

*) MSOP tahap III di eksekusi dalam 8 kali periode dengan harga sesuai aturan Bapepam-LK dan BEI

Keseluruhan opsi yang dialokasikan dalam MSOP Tahap I, II dan III berjumlah 588.235.250 lembar, dimana sampai dengan akhir periode pelaksanaannya, opsi yang di-*exercise* berjumlah 569.876.000 lembar. Eksekusi opsi tersebut menyebabkan tambahan equity perusahaan sebesar Rp1.366.089.110.750.

No.	Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah
1	Modal Disetor	115.500	115.024	54.415	284.938
2	Agio	106.837	287.559	474.490	686.886
3	Modal lain-lain (Lembar Saham x *Option Value*)	27.117	80.889	10.259	212.265
	Jumlah	249.454	483.471	633.164	1.366.089

Dengan berakhirnya exercise MSOP pada tahun 2010 maka kepemilikan saham pemerintah menjadi 56,75%

Kronologi Pencatatan Saham

Tahun	Pemilik Saham				Nominal (Rp)	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp Juta)	Aksi Korporasi
	Pemerintah		Masyarakat					
	Jumlah	%	Jumlah	%				
2003	7.000.000.000	59,50	4.764.705.000	40,50	500	11.764.705.000	5.882.353	IPO tanggal 10 November 2003 Jumlah saham setelah IPO 11.764.705.000 (tercatat di BEJ)
2004	7.000.000.000	59,07	4.850.090.500	40,93	500	11.850.090.500	5.925.045	Exercise MSOP 85.385.500
2005	7.000.000.000	58,16	5.035.700.500	41,84	500	12.035.700.500	6.017.850	Exercise MSOP 185.610.000
2006	7.000.000.000	56,97	5.286.421.500	43,03	500	12.286.421.500	6.143.211	Exercise MSOP 250.721.000
2007	7.000.000.000	56,83	5.317.800.500	43,17	500	12.317.800.500	6.158.900	Exercise MSOP 31.379.000
2008	7.000.000.000	56,79	5.325.299.500	43,21	500	12.325.299.500	6.162.650	Exercise MSOP 7.499.000
2009	7.000.000.000	56,77	5.329.852.500	43,23	500	12.329.852.500	6.164.926	Exercise MSOP 4.553.000
2010	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000	6.167.291	Exercise MSOP 4.728.500
2011	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	Stock Split 1:2 tanggal 11 Januari 2011
2012	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2013	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2014	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2015	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2016	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2017	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291	Stock Split 1:5 tanggal 10 November 2017
2018	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291	

Stock Split

Dengan berakhirnya exercise MSOP pada tahun 2010 maka kepemilikan saham pemerintah menjadi 56,75%. Pada tahun 2018, BRI tidak memiliki Program ESOP/MSOP yang masih berjalan.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan telah melakukan aksi pemecahan saham (stock split) sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2011 dan 2017.

Stock Split Tahun 2011

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2011, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari semula Rp500 per saham menjadi Rp250 per saham (Rasio 1:2).

Harga saham sebelum stock split sebesar Rp9.300,00 pada tanggal 10 Januari 2011 menjadi sebesar Rp4.800 pada penutupan perdagangan 11 Januari 2011. Dengan adanya stock split dimaksud, per 11 Januari 2011 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan stock split adalah 12.334.581.000 lembar dan 24.669.162.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah stock split.

Kronologi Pencatatan Saham

Stock Split Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5).

Harga saham sebelum stock split sebesar Rp16.450 pada tanggal 9 November 2017 menjadi sebesar Rp3.280 pada penutupan perdagangan 10 November 2017. Dengan adanya stock split dimaksud, per 10 November 2017 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan stock split adalah 24.669.162.000 lembar dan 123.945.810.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Kronologi dari pencatatan saham yang terkait dengan aksi korporasi ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Stock Split Tahun 2011

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum Stock Split	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000
Setelah Stock Split	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000

Pelaksanaan Stock Split Tahun 2017

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum Stock Split	14.000.000.000	56,75	10,669,162,000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah Stock Split	70.000.000.000	56,75	53,345,810,000	43,25	50	123.345.810.000

Stock Buy Back

Selama tahun 2018 tidak terdapat aksi *stock buy back*. Perusahaan telah melakukan aksi pembelian kembali saham (*stock buy back*) pada tahun 2015-2016. BRI melakukan *buy back* selama tiga bulan yaitu dari tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 dengan total pembelian sebanyak 221.718.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.419 triliun. Target awal pelaksanaan *buy back* ini direncanakan sebesar Rp2,5 triliun dengan ketentuan jumlah saham *buy back* BRI tidak melebihi 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

Pelaksanaan Buy Back Saham di tahun 2015-2016

Total Jumlah saham	Rata-rata Harga Pembelian	Peningkatan Laba per Lembar Saham
221.718.000 lembar	Rp 10.910/lembar	Rp9.5/lembar

*sebelum *stock split* 1:5

Kronologi Pencatatan Saham

Dalam melaksanakan pembelian kembali saham dan/ atau obligasi, Perseroan mengikuti kebijakan-kebijakan eksternal yang berlaku diantaranya:

- Undang-undang (UU) RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK (POJK) No 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No 22/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan
- Bank Indonesia (PBI) No 15/12/PBI/2013 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan buyback ini berasal dari kas internal Perseroan dan diyakini bahwa biaya tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan untuk membiayai kegiatan Perseroan. Seluruh transaksi buy back telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2016. Saham yang telah dibeli direncanakan untuk program MSOP/ESOP (*Management Stock Option/ Employee Stock Option*).

Bond Buy Back

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perseroan belum pernah melaksanakan pembelian kembali obligasi.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham/ Penghapusan Pencatatan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2018 tidak terdapat penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) untuk BRI.

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013	USD	25 Sept'03	30 Okt'13	150.000.000	120	7.75	B3	Moodys	Memperkuat permodalan
2	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004 Bank BRI	IDR	9 Jan'04	9 Jan'14	500.000.000.000	120	13.50	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
3	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 Bank BRI	IDR	22 Des'09	22 Des'14	2.000.000.000.000	60	10.95	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
4	Senior Notes due 2018	USD	28-Mar-13	28-Mar-18	500,000,000	60	2.95	Baa3	Moodys	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
5	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	IDR	10 Okt'14	15 Okt'15	300.000.000.000	370 hari	8.75	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
6	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	IDR	10 Okt'14	10 Okt'16	60.000.000.000	24	9.25	AAA	Fitch Indonesia	
7	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	IDR	10 Okt'14	10 Okt'17	360.000.000.000	36	9.50	AAA	Fitch Indonesia	
8	MTN BRI Tahap II Tahun 2014	IDR	24 Des'14	24 Des'15	520.000.000.000	370 hari	8.90	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *Prudential Banking* dan *good corporate governance*.
9	NCD BRI Tahun 2014 Seri A	IDR	2 Des'14	2 Mar'15	165.000.000.000	3	8.00	Tidak ada Rating NCD	-	Ekspansi bisnis melalui Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
10	NCD BRI Tahun 2014 Seri B	IDR	2 Des'14	2 Jun'15	790.000.000.000	6	8.60	Tidak ada Rating NCD	-	
11	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	22 Apr'15	22 Jul'15	595.000.000.000	3	7.10	Tidak ada Rating NCD	-	
12	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	22 Apr'15	22 Okt'15	1.020.000.000.000	6	8.00	Tidak ada Rating NCD	-	
13	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	22 Apr'15	22 Jan'16	265.000.000.000	9	8.10	Tidak ada Rating NCD	-	

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
14	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	2 Jul'15	7 Jul'16	655.000.000.000	370 hari	8.40	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
15	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	2-Jul-15	3-Jul-18	925,000,000,000	36	9.20	AAA	Pefindo	
16	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	5 Feb'16	8 Feb'17	808.000.000.000	370 hari	8.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
17	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	25 Mei'16	30 Mei'17	1.212.000.000.000	370 hari	7.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
18	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	1 Des'16	6 Des'17	616.000.000.000	370 hari	7.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
19	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	11-Apr-17	16-Apr-18	1,131,000,000,000	370 hari	7.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
20	MTN Bank BRI Tahap I Tahun 2016	IDR	16 Sept'16	21 Sept17	1.925.000.000.000	370 hari	7.40	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Belum Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	2 Jul'15	3 Jul'20	1.420.000.000.000	60	9.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	5 Feb'16	4 Feb'19	1.018.500.000.000	36	9.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
3	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	IDR	5 Feb'16	4 Feb'21	2.823.500.000.000	60	9.60	AAA	Pefindo	
4	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	25 Mei'16	25 Mei'19	2.437.000.000.000	36	8.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	IDR	25 Mei'16	25 Mei'21	701.000.000.000	60	8.70	AAA	Pefindo	
6	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	1 Des'16	1 Des'19	964.000.000.000	36	8.00	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	IDR	1 Des'16	1 Des'21	193.000.000.000	60	8.20	AAA	Pefindo	
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	IDR	1 Dec'16	1 Des'23	477.000.000.000	84	8.65	AAA	Pefindo	
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	IDR	1 Dec'16	1 Des'26	2.350.000.000.000	120	8.90	AAA	Pefindo	

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Belum Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	11 Apr'17	11 Apr'20	1.743.500.000.000	36	8.10	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	IDR	11 Apr'17	11 Apr'22	925.000.000.000	60	8.30	AAA	Pefindo	
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	IDR	11 Apr'17	11 Apr'27	1.300.500.000.000	120	8.80	AAA	Pefindo	
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24 Agu'17	24 Aug'20	980.500.000.000	36	7.60	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	IDR	24 Agu'17	24 Aug'22	1.652.500.000.000	60	8.00	AAA	Pefindo	
15	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	IDR	24 Agu'17	24 Aug'24	2.517.000.000.000	84	8.25	AAA	Pefindo	
16	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	IDR	21-Feb-18	21-Feb-23	1,837,000,000,000	60	6.65	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.
17	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	IDR	21-Feb-18	21-Feb-25	605,000,000,000	84	6.90	AAA	Pefindo	
18	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	IDR	21-Jun-18	21-Jun-23	500,000,000,000	60	7.70	AA	Pefindo	Memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK Recovery Palan dan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) dan selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan peningkatan aset produktif.

Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang

Nama & Alamat	Jasa	Biaya (Rp)	Periode Penugasan
PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Tel. (62-21) 5150515 Fax. (62-21) 5150330 E-mail: callcenter@idx.co.id	Intitusi Pasar Modal ▸ Penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana perdagangan efek ▸ Penyedia sarana penyebarluasan informasi ▸ Pengawasan transaksi perdangan yang wajar	Rp160.875.000	sejak 2003 s/d 2018
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5299 1003 Fax. (62-21) 5299 1129 Website:www.ksei.co.id	Kustodian ▸ Jasa penyimpanan efek dalam bentuk elektronik ▸ Jasa penyelesaian transaksi efek ▸ Jasa administrasi efek ▸ Jasa distribusi hasil corporate action	Rp424.277.235	2018
PT Datindo Entrycom Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 Tel. (62-21) 570 9009	Biro Administrasi Efek ▸ Jasa Administrasi Efek ▸ Jasa Penyelenggaraan RUPS ▸ Jasa Pembayaran Dividen	Rp413.959.700	2018
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower Senayan City Lantai 17 Jl. Asia Afrika Kav. 19 Jakarta	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp1.174.500.000	2018
PT Fitch Rating Indonesia Prudential Tower Lantai 20 Jl. Jend Sudirman Kav. 79 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5795 7755 Fax. (62-21) 5795 7750	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp704.430.400	2018
Moody's Singapore Pte. Ltd. 50th Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp1.232.250.000	2018
Standard & Poors 30 Cecil Street #17-01/08 Prudential Tower Singapore 049712 Tel. (65) 6438 2881 Fax. (65) 6438 2321	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp811.666.000	2018
Purwantono, Sungkoro, & Surja **(Ernst & Young)** Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5289 5000 Fax. (62-21) 5289 4100	Kantor Akuntan Publik ▸ Jasa Audit Laporan Keuangan ▸ Jasa Review Audit Terbatas	Rp13.545.000.000	2018

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN NASIONAL

.1 CSR Award
25 Januari 2018
Sindo Weekly
Best CSR Kategori Pendidikan
Jakarta

.2 Indonesia CSR Award
23 Februari 2018
Economic Review
Predikat Platinum
Jakarta

.3 Indonesia Netizen Brand Choice Award
23 Februari 2018
Warta Ekonomi
Bank Buku IV
Jakarta

.4 Indonesia Top Digital Public Relation Award (ITDPA) 2018
25 Januari 2018
Tras N Co Indonesia
Bank
Jakarta

.5 The Big-7
23 Februari 2018
Economic Review
The Best Of The Best CSR of The Year 2018
Jakarta

.6 Indonesia Corsec & Corp. Comm Award (ICCA)
2 Maret 2018
Economic Review
Best Corporate Secretary
Jakarta

Penghargaan dan Sertifikasi

.5 .6 .8

.7

Indonesia Information Technology Award

2 Maret 2018
Economic Review
Best IT
Jakarta

.8

Obsession Media Group Award

22 Maret 2018
Obsession Media Group
Best Achiever in Company
Jakarta

.9

Jawara Finansial Award 2018

29 Maret 2018
Warta Ekonomi
Top Used Bank in Commercial Bank Based on Business Activities/Buku 4 & Top Saving Account Product & Top Saving Deposit Product & Top Digital Banking Product & Top Credit Card Product
Jakarta

.10

Indonesia Wow Brand Champion

8 Maret 2018
PT Markplus Indonesia
Gold Kategori Tabungan/ Saving Account
Jakarta

.11

Award PR Indonesia

29 Maret 2018
PR Indonesia
Best PR
Surabaya

Penghargaan dan Sertifikasi

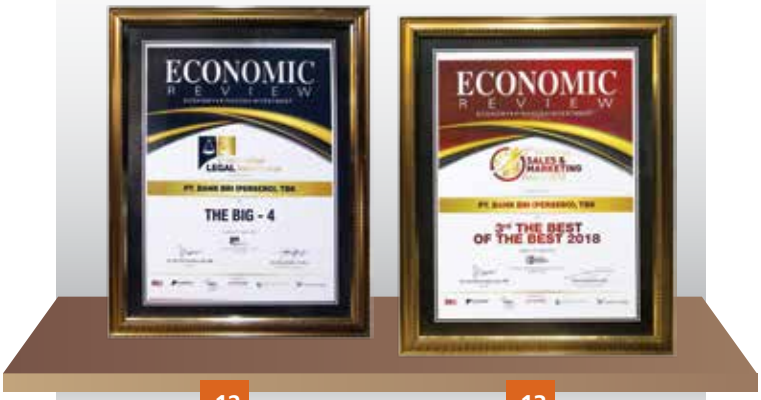

.12 .13

.14 .19 .20

.12

The Big-4
13 April 2018
Economic Review
Bank
Jakarta

.13

3rd The Best of The Best 2018
13 April 2018
Economic Review
Bank
Jakarta

.14

Economic Review Award 3rd Best of The Best 2018
13 April 2018
Economic Review (ISMA)
Finance
Jakarta

.15

100 Best Listed Companies 2018
14 Mei 2018
Majalah Investor
Perbankan
Jakarta

.16

Economic Review 1st Legal Award 2018
13 April 2018
Economic Review (ILA)
Finance
Jakarta

.17

Indonesia Most Admired Companies
9 Mei 2018
Warta Ekonomi
Perbankan
Jakarta

.18

Top 100 Enterprises 2018
29 Juni 2018
Warta Ekonomi
Perbankan
Jakarta

Penghargaan dan Sertifikasi

.19

The Most Tax Friendly Corporate
6 Agustus 2018
Tempo Media Grup
Perusahaan BUMN
Jakarta

.20

Indonesia Green Company & Sri Kehati Award
11 Juli 2018
Kehati
Perbankan
Jakarta

.21

Asean Best Public Companies
26 Juli 2018
SWA
Peringkat 1 Indonesian Best Public Companies
Jakarta

.22

Infobank The Highest Tax Payer State Owned Enterprises In Banking Sector
26 September 2018
Infobank
Finance
Jakarta

.23

As a Constituent of Sustanable Responsible Investment
11 Juli 2018
Kehati
Perbankan
Jakarta

.24

Asean Best Public Companies
26 Juli 2018
SWA
Peringkat 2 Asean Best Public Companies
Jakarta

.25

InfoBank The Most Profitable State Owned Enterprises In Banking
26 September 2018
Infobank
Finance
Jakarta

Penghargaan dan Sertifikasi

.26

Infobank Atas Kinerja Keuangan "Sangat Bagus"

26 September 2018
Infobank
Finance
Jakarta

.27

Diversity Of The Board (Kategori Bank Konvensional)

26 September 2018
Indonesia Banking School (TEMPO)
Perbankan
Jakarta

.28

The Best Parenting Bank

26 September 2018
Indonesia Banking School (TEMPO)
Perbankan
Jakarta

.29

RED HAT Innovation Awards APAC 2018 (Digital Transformation)

26 September 2018
Red Hat (APAC)
Finance
Jakarta

.30

The Best Bank In Digital Services

26 September 2018
Indonesia Banking School (TEMPO)
Perbankan
Jakarta

.31

The Most Efficient Bank

26 September 2018
Indonesia Banking School (TEMPO)
Perbankan
Jakarta

Penghargaan dan Sertifikasi

.32

Indonesia Living Legend Award

11 Oktober 2018
SWA
Perbankan
Jakarta

.33

The Most Favourite Leadership 2018 (Perbankan)

21 November 2018
Property Bank
Grand Property Award

.34

The Top 50 Companies Forbes 2018

29 November 2018
Indonesia Forbes
Best Of The Best Awards 2018
Jakarta

.35

Economic Challenges Awards 2018

13 November 2018
Metro TV
Industri Perbankan
Jakarta

.36

Sebagai Penyalur KUR 2018 Terbaik I

22 November 2018
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
KUR Award
Jakarta

.37

Emitmen Dengan Penambahan Investor Karyawan Tertinggi 2018

Desember
IDX (Indonesia Stock Exchange)
Finance
Jakarta

PENGHARGAAN INTERNASIONAL

.1

2017 Asia Sustainability Reporting Awards

06 Februari 2018
ASRA (Asia Sustainability Reporting Awards)
Asia's Best Reporting on the SDG's
Singapura

.2

Asia's Best CFO

8 Juni 2018
Corporate Governance Asia
Finance
Hongkong

.3

National Winner For Marketing 3.0 Awardee of The Year 2018

18 September 2018
Asia Marketing Excellence Award
Perbankan
China

.4

Euro Money Award

22 Februari 2018
Euro Money
The Best Bank in Indonesia For Private Banking: Succession Advice and Trust
London

.5

Best Investor Relations Company

8 Juni 2018
Corporate Governance Asia
Finance
Hongkong

.6

Award Asia Excellent Marketing, Guangzhou

18 September 2018
AMF
Finance
Guangzhou

.7

Asia's Best CEO

8 Juni 2018
Corporate Governance Asia
Finance
Hongkong

.8

Best CSR

18 September 2018
Asia Money
Perbankan
China

Penghargaan dan Sertifikasi

.9

The Best Automated Advisory Initiative, Application or Programme : SABRINA

30 Agustus 2018
Asian Bankers
Perbankan
Jakarta

.10

The Best Frictionless Customer Relationship Management: SABRINA

30 Agustus 2018
Asian Bankers
Perbankan
Jakarta

.11

The Best Innovation Centre by Financial Institution

30 Agustus 2018
Asian Bankers
Perbankan
Jakarta

.12

The Best Productivity, Efficiency and Automation Initiative, Application or Programme : BRISPOT

30 Agustus 2018
Asian Bankers
Perbankan
Jakarta

.13

The Best E-Commerce Proposition: Indonesian Mall

30 Agustus 2018
Asian Bankers
Perbankan
Jakarta

.14

Best Operating Model Master

30 Agustus 2018
International Data Corporation (IDC)
Perbankan
Jakarta

.15

Best Bank Indonesia In The Global Finance

16 Oktober 2018
Global Finance
Finance
Bali

Sertifikasi

ISO 9001:2015

Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 21 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan ruang lingkup "Design of Accounting Policy & Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Budget Planning and Control, and Corporate Financial & Tax Compliance" dari Lembaga Sertifikasi PT SGS Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Divisi AMK selalu melakukan peningkatan kualitas penyusunan dan pengawasan Kebijakan Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder BRI dalam rangka menjamin kewajaran Laporan Keuangan.

Divisi Asset & Liabilities Management berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 6 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2021 dengan ruang lingkup Preparation of Data for Financial Statement dan Provision of External Report (Laporan Bulanan Bank Umum). Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI selalu melakukan peningkatan kualitas dalam penyiapan data untuk laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh BRI dapat semakin baik.

Divisi Sentra Operasi BRI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 8 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan 8 (delapan) ruang lingkup meliputi: "Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, Payment System Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury and e-Banking Settlement, Cash and Trade Finance" dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di BRI sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 13 Januari 2018 Sampai dengan 9 Desember 2020 terkait dengan "Provision of Inventory, Purchase Payment and Archiving Service". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.

BRI Corporate University berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register yang berlaku sejak 25 Desember 2016 sampai dengan 24 Desember 2019. Adapun sertifikasi ini mengakui management System Standard BRI Corporate University dalam hal "Provision of Banking Training Services". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI Corporate University selalu melakukan peningkatan kualitas operasional pendidikan dan mengutamakan kepuasan peserta didik.

Divisi Bisnis Internasional berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register Indonesia yang berlaku sejak 8 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 Dengan sertifikasi ini management System Standard Divisi Bisnis Internasional diakui dalam hal "Provision of Trade Processing Centre Service Including Supporting Function of Policy and Development & Monitoring Trade Finance". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI selalu melakukan peningkatan kualitas operasional sehingga menjadi perantara perdagangan yang terpercaya.

Divisi Operasional Human Capital BRI telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 19 September 2018 sampai dengan 9 November 2021. Hal ini menunjukkan bukti komitmen BRI dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada Pekerja. Sertifikat ISO ini diberikan untuk sistem manajemen mutu di bidang pengelolaan data, komunikasi, dan pembayaran kompensasi dan benefit Human Capital dengan layanan berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat.

ISO 27001:2013

Divisi Digital Center of Excellence juga telah memperoleh sertifikat ISO 27001:2013 yang berlaku sejak 14 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2021 dari Lembaga BSI dengan ruang lingkup *the management of information security in provision of big data* dan *analytics*. Hal tersebut menunjukkan keseriusan BRI untuk mengembangkan teknologi big data yang akan mendukung strategi pengembangan bisnis BRI ke depan.

Peringkat BRI

FITCH	
Long Term Foreign Currency IDR	BBB-, Stable Outlook
Short Term Foreign Currency IDR	F3
Support Rating Floor	BBB-
Support Rating	2
Viability Rating	bbb-
National Long-Term Rating	AAA (idn), Stable Outlook
Rupiah Subordinated Debt	A+ (idn)
Senior Unsecured Notes	BBB-

Standard and Poor's	
Outlook	Positive
Long Term Foreign Issuer Credit	BB+
Long Term Local Issuer Credit	BB+
Short Term Foreign Issuer Credit	B
Short Term Local Issuer Credit	B

MOODY'S	
Outlook	Stable
Bank Deposit	Baa2/P-2
Bank Financial Strength	D+
Baseline Credit Assessment	baa2
Adjusted Baseline Credit Assessment	baa2
Counterparty Risk Assessment	Baa1(cr)/P-2(cr)

PEFINDO	
National Rating	id AAA, Stable Outlook

PERINGKAT NEGARA INDONESIA	
Standard and Poor's	BBB-, Stable Outlook
Fitch	BBB, Stable Outlook
Moody's	Baa2, Stable Outlook
Japan Credit Rating Agency	BBB, Stable Outlook

Alamat Kantor dan/ atau Kantor Perwakilan

ALAMAT JARINGAN KANTOR

KANTOR PUSAT

Gedung BRI I dan II,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Tel. : (021) 2510244, 2510254, 2510264
Fax. : (021) 2500065, 2500077

KANTOR WILAYAH

Banda Aceh

Jl. Cut Meutia No. 17
Banda Aceh
Tel. : (0651) 22822
Fax. : (0651) 23487, 22352

Bandar Lampung

Jl. Raden Intan No.51 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35118
Tel. : (0721) 259340
Fax. : (0721) 259397

Bandung

Gedung Menara BRI Lt.4, Jl. Asia Afrika 57 - 59, Bandung
Tel. : (022) 4200363, 4207977
Fax. : (022) 4236710

Banjarmasin

Jalan Jend A. Yani KM 3,5 No 151 Banjarmasin
Tel. : (0511) 3252056, 3257057, 3251647, 3251649
Fax. : (0511) 3252992, 32521649

Denpasar

Jalan Hayam Wuruk No 123, Denpasar
Tel. : (0361) 228715
Fax. : (0361) 225402

Jakarta 1

l. Veteran No.8, Jakarta Pusat
Tel. : (021) 3840802
Fax. : (021) 3453685

Jakarta 2

Jl. Gatot Subroto Kav.9-11
Gedung Mulia Lt.2 No. 72,
Jakarta Selatan 13330
Tel. : (021) 52920581,52920585
Fax. : (021) 52920586, 52920587

Jakarta 3

Jl. Kapten Soebianto Djojokusumo Kav CBD II No.I, Kel. Lengkong Gudang, Kec.Serpong
Tel. : (021) 29703751 ex 52
Fax. : (021) 7255732

Jayapura

Gedung BRI
Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II, Kel. Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99112
Tel. : (0967) 524652, 524453
Fax. : (0967) 524862, 537191

Makassar

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM 4, Kel.Karuwisi Utara, Kec. Panakukkang, Kota Makassar
Tel. : (0411) 312498, 323507
Fax. : (0411) 312731

Malang

Jl. Laksmana Martadinata 80 Lt. 4, Malang
Tel. : (0341) 555422, 555425, 555620, 555423, 555420
Fax. : (0341) 555421

Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan

Manado
Jl. Sarapung No.4-6, Manado
Tel. : (0431) 863592, 863378
Fax. : (0431) 862779, 866966

Medan
Jalan Putri Hijau No 2A, Medan
Tel. : (061) 45256666, 4528323
Fax. : (061) 4536082

Padang
Jl Bagindo Azis Chan No. 30 Padang
Tel. : (0751) 7052111, 7052528 / (Sementara) (0751) 71045, 778910 892311, 892312
Fax. : (0751) 7054995 / (0751) 72653

Palembang
Jl. Kapten A. Rivai No.15, Palembang
Tel. : (0711) 310173, 310178
Fax. : (0711) 312343

Pekanbaru
Jl. Jenderal Sudirman No. 11-11A
Rt. 01/RW 01 Simpang Tiga, Pekanbaru
Tel. : (0761) 7865016 - 18
Fax. : (0761) 7865019

Semarang
Jl. Teuku Umar No. 24 Semarang
Tel. : (024) 8311110
Fax. : (024) 8318436

Surabaya
Jalan Jend Basuki Rahmat No 122-138 Gedung BRI Tower Lt 20, Surabaya
Tel. : (031) 5324230

Yogyakarta
Jl. Cik Di Tiro No.3 Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Tel. : (0274) 510850,520268
Fax. : (0274) 514166, 584883

KANTOR CABANG KHUSUS

Gedung BRI II
Jl. Jend. Sudirman Kav. No
Tel. : (021) 5709060
Fax. : (021) 5713181

KANTOR CABANG LUAR NEGERI

New York Agency
140 Broadway 30th Floor
New York, NY 10005
Tel. : +1 212 3793840
Fax. : +1 212 3793850

Hong Kong Representative
Room 2211, 22/F Lippo Center Tower 2
89 Queensway, Hong Kong
Tel. : (852) 25271318
Fax. : (852) 28623693

Singapore Branch
50 Collyer Quay, #08-06,
Oue Bayfront, Singapore 049321
Tel. : +65 68050686

Cayman Island
Cayman Island Branch
190 Elgin Avenue Grand Cayman,
KY1-9005, Cayman Island

BRI Timor-Leste Branch
Grand Diocese Colmera Complex,
Rua Nicolau Dos Reis Lobato
Colmera Dili, Timor Leste
Tel. : +6703311372

Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan

Kantor Wilayah dan Unit Kerja Dibawah binaan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	BRI Unit	Teras BRI	Teras BRI Keliling	Teras BRI Kapal
Banda Aceh	11	15	9	141	35	1	-
Bandar Lampung	14	16	13	188	60	-	-
Bandung	30	45	61	608	233	26	-
Banjarmasin	31	31	23	290	124	7	-
Denpasar	31	27	19	297	159	4	1
Jakarta 1	26	54	73	96	70	21	-
Jakarta 2	32	69	66	191	77	-	-
Jakarta 3	36	55	42	260	107	-	1
Jayapura	13	13	12	86	40	1	-
Makassar	36	28	22	348	132	-	-
Malang	24	36	21	528	205	5	-
Manado	17	18	16	205	53	43	1
Medan	24	34	27	270	105	15	-
Padang	14	8	11	157	54	-	-
Palembang	21	29	14	234	94	-	-
Pekanbaru	22	20	19	171	100	1	-
Semarang	22	38	45	421	144	-	-
Surabaya	25	39	24	290	125	8	-
Yogyakarta	33	34	58	600	152	1	-
Kantor Cabang Khusus	-	-	5	-	-	-	-

Alamat Kantor dan/atau Kantor Perwakilan

Perusahaan Anak

PT Bank BRISyariah (BRI Syariah)
Jl. Abdul Muis No. 2-4,
Jakarta 10160
Tel. : (021) 3450226, 3450227
Fax. : (021) 3513812

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
Gedung BRI Agro
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta 12740
Tel. : (021) 79199980
Fax. : (021) 79199950

BRI Remittance Company Ltd Hongkong (BRI Remittance)
Flat 22 G/F Bay View 33
Moreton Terrace
Causeway Bay,
Hong Kong
Tel. : +852 25271318
Fax. : +852 28613693

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
Kantor Pusat BRI Life
Gedung Graha Irama
Lt. 2, 5, 7, 11 & 15,
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta 12950
Tel. : (021) 5261260, 5261261
Fax. : (021) 5261258, 5261472

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
Wisma 46 Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta
Tel. : (021) 5745333
Fax. : (021) 5745444

PT Danareksa Sekuritas (DS)
Gedung Danareksa Lantai 2,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 , Jakarta 10110

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
Gedung Ad Premier Lt 6
Jl. TB Simatupang No.5, RT.5/RW.7, Ragunan,
Ps. Minggu, Jakarta 12550

Informasi Pada Website Perusahaan

Sebagai perusahaan terbuka, Bank BRI memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh stakeholder melalui situs web resmi Bank BRI dengan alamat www.bri.co.id yang berdasar pada peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015. POJK tersebut mewajibkan web perusahaan emiten untuk mencantumkan informasi, yakni:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain itu, sesuai dengan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi, secara garis besar, website BRI berisi:

- Situs Perusahaan;
- Karir;
- Hubungan Investor;
- Perusahaan Anak;
- GCG; dan
- CSR BRI.

Informasi pada situs perusahaan terdiri dari:

- Informasi umum tentang BRI yang terdiri dari: Sejarah BRI, Visi dan Misi, Informasi Umum Emiten, Manajemen, dan Informasi Bagi Investor.
- Informasi tentang produk Simpanan, yang terdiri dari: Tabungan, Deposito dan Giro BRI.
- Informasi tentang produk Pinjaman, yang terdiri dari: Pinjaman Mikro, Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah, serta BRIGuna.
- Informasi tentang produk Internasional, yang terdiri dari: BRI Trade Finance & Services, BRIFast Remittance, Financial Institution, BRI Money Changer, Unit Kerja Luar Negeri.
- Informasi tentang Jasa Bank, yang terdiri dari: Jasa Bisnis, Jasa Keuangan, Jasa Kelembagaan, E-Banking, dan Treasury.
- Informasi tentang Produk Konsumer, yang terdiri dari: Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Kendaraan Bermotor.
- Informasi tentang Investasi Perbankan, yang terdiri dari: DPLK, ORI & SR, Jasa Wali Amanat, Jasa Kustodian.
- Informasi tentang Layanan Prioritas, yang terdiri dari: Produk Layanan & Privileges, Reksadana, Kartu BRIPrioritas, Outlet, Kriteria Nasabah.
- Informasi tentang Info Lelang, yang terdiri dari: Lelang Aset, Lelang Pengadaan
- Informasi tentang GCG, yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Anggaran Dasar, Struktur dan Kebijakan GCG, Kode Etik, Asean Corporate Governance Scorecard, Komite Audit termasuk Piagam Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Whistleblowing System, dan Hak-hak Pemegang Saham.
- Pada bagian Karir, BRI membuka kesempatan berkarir kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi karyawan melalui menu e-recruitment BRI.
- Sementara bagian Hubungan Investor menjelaskan mengenai *overview*, Informasi Keuangan, GCG, Layanan bagi Pemegang Saham, Event, dan Berita.
- Selanjutnya pada bagian perusahaan anak memberikan informasi umum mengenai perusahaan anak dan dapat disambungkan dengan website masing-masing perusahaan anak.
- Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Website BRI telah memuat, Struktur Grup Perusahaan, Profl Dewan Komisaris dan Direksi, serta Informasi bagi Pemegang Saham.

Website BRI juga memenuhi standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mencakup:

- Part A. Rights of Shareholders
- Part B. Equitable Treatment of Shareholders
- Part C. Role of Stakeholder
- Part D. Disclosure & Transparancy
- Part E. Responsibilities of the Board

Secara keseluruhan, Website BRI telah mencerminkan komitmen BRI dalam menjunjung asas keterbukaan dan transparansi.

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Pendidikan / Pelatihan Dewan Komisaris/atau Anggota Komite Komisaris Selama Tahun 2018

Komisaris	Tempat	Tanggal	Penyelenggara	Materi
Andrinof A. Chaniago	New York	29-30 Agust 2018	Harvard Extention School	Leadership Coaching Strategies
A. Sonny Keraf	New York	16-20 April 2018	SRW & Co.	Asean global leadership program
	Jerman	02-09 Juli 2018	LPPI	Risk Management as Performance Enabler
Mahmud	Jerman	02-09 Juli 2018	LPPI	Risk Management as Performance Enabler
Rofikoh Rokhim	Philadelphia	23 -26 April 2018	Wharton	Levereging Neuroscience for business impact
	Amerika Serikat	19-24 Agust 2018	Stanford Business School	People, Culture, and Performance: Strategies From Silicon Valley
Nicolaus TB Harjanto	Roma dan Milan	06-14 Oktober 2018	LPPI - IBI	International Risk Management & Treasury Dealer Refreshment Program For Executives
Handayani	Frankfurt dan Paris	22-29 Juli 2018	CWMA	The 4th international CWM Exectuive Europe Program 2018
Jeffry J. Wurangian	Boston	11-17 Maret 2018	Harvard Business School	Executive education finance : Launching New Ventures

Pendidikan / Pelatihan Direksi/atau Anggota Komite Direksi Selama Tahun 2018

No	Nama Peserta	Nama Pendidikan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	**Handayani** Direktur Konsumer	*The 4th international CWM Exectuive Europe Program 2018*	22.07.2018	Frankfurt dan Paris
2	**Priyastomo** Direktur Mikro & Kecil	*Risk Management Certification Refresher Program For Banks Executives "Strategic Bank Management" Workshop*	07.08.2018	Amsterdam, Belanda
3	**Priyastomo** Direktur Mikro & Kecil	*Enterprise Risk Management* Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Perusahaan	15.08.2018	Jakarta
4	**Sis Apik Wijayanto** Direktur Hubungan Kelembagaan	*Key Risk Management Challenges in 2019 "Credit Quality, Active Credit Portofolio Management & Stress Testing and Also Credit Scoring"*	06.12.2018	Batam
5	**Indra Utoyo** Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	*Key Risk Management Challenges in 2019 "Credit Quality, Active Credit Portofolio Management & Stress Testing and Also Credit Scoring"*	06.12.2018	Batam

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Sertifikasi Direksi, dan Dewan Komisaris Tahun 2018

Nama	Jabatan	Sertifikasi /*Refreshment* MR		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Waktu
Supari	Direktur Ritel & Menengah	LSPP	Tingkat 5	11 Januari 2018
Osbal Saragi R	Direktur Jaringan & Layanan	BSMR	Tingkat 5	06 April 2018
R. Sophia Alizsa	Direktur *Human Capital*	BSMR	Tingkat 5	06 Januari 2018
Ahmad Solichin	Direktur Kepatuhan	BSMR	Tingkat 5	06 April 2018
Hadiyanto	Komisaris	LSPP	Tingkat 1	14 Mei 2018

Daftar Pendidikan/Pelatihan Yang Diikuti Jajaran Komite Audit Tahun 2018

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota Komite Audit selama tahun 2018 dapat dilihat pada daftar pendidikan/ training Dewan Komisaris selama Tahun 2018.

Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2018

Pelatihan/training yang diikuti oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama Tahun 2018 dapat dilihat pada daftar pendidikan/training Dewan Komisaris selama Tahun 2018.

Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
1.	*Enhancement Special Request* Sekretaris Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018	6 -7 Oktober 2018 Denpasar	BRI Corporate University
2.	*Understanding Media Policies in Digital Era & Creative Writing For Corporate Publication*	5 – 7 Februari 2018, Padang	PR Indonesia
3.	Sertifikasi Kehumasan	6 – 7 Maret 2018, Jakarta	PERHUMAS
4.	*Social Media Summit*	1 – 2 Maret 2018, Bali	Social Bakers
5.	*Corporate Governance Officer Intermediate 1*	12 – 13 September 2018, Jakarta	Indonesian Corporate Secretary Association
6.	*Corporate Governance Leadership Program*	15 – 16 November 2018, Yogyakarta	Indonesia Institute For Corporate Directorship

Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Audit Internal Tahun 2018

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
1.	*In House Training* (IHT) *Special Request* Bahaya Narkoba	8 Januari 2018, Jakarta	BRI Corporate University
2.	*Special Request* Bagi Inspektur Kanins BRI Selindo	18 Januari 2018, Jakarta	BRI Corporate University
3.	*Trainer of Trainer* (TOT) *Awareness* ISO 9001:2015	1 – 2 Februari 2018, Jakarta	BRI Corporate University
4.	*Special Request* Internal Audit ISO 9001:2015 jajaran SKAI Bidang PSKA	31 Januari 2018, Jakarta	BRI Corporate University
5.	*Special Request* Bagi Auditor Kanins Selindo Materi Indikator Risiko Fraud	12 – 14 Maret 2018, Jakarta	BRI Corporate University
6.	*Special Request* Bagi Inspektur Kanins BRI ke 2- Tahun 2018	26 Maret 2018, Jakarta	BRI Corporate University

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Audit Internal Tahun 2018

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
7.	Pendidikan IHT BRISPOT Ritel Pekerja Jajaran Kanwil Jakarta 2	23 April 2018, Jakarta	BRI Corporate University
8.	LHC - *In House Training Assessment Center Assessor Certification* (ACAC)	23 – 27 April 2018, Jakarta	BRI Corporate University
9.	*Special Request Data Analytics & Continous Audit*	27 April 2018, Jakarta	BRI Corporate University
10.	*Special Request Secure Code Training* (PCI-DSS)	21 – 25 Mei 2018, Jakarta	BRI Corporate University
11.	*Special Request* Bagi Wakil Kepala Audit Intern BRI Selindo	30 – 31 Juli 2018, Jakarta	BRI Corporate University
12.	*Special Request* AS/400	15 – 26 Oktober 2018, Jakarta	BRI Corporate University
13	Pendidikan *Enhancement Special Request In House Training* Aplikasi Pinjaman Mikro (BRISpot) dan Proses Bisnis Baru Pinjaman untuk Fase 1 dan 2	2 September 2018, Jakarta	BRI Corporate University
14	*Special Request* Auditor Kanins BRI Padang	19 – 20 April 2018, Padang	BRI Corporate University
15	*Special Request* Auditor Kanins BRI Pekanbaru Tahun 2018	7 – 9 Maret 2018, Padang	BRI Corporate University
16.	TOS - *Enhancement Special Request* Implementasi APU PPT Tahun 2018	17 – 18 April 2018, Jakarta; 5 – 7 Juli 2018, Padang ; 3 – 4 Mei 2018, Bandung; 7 – 8 Mei 2018, Yogyakarta; 9 – 10 Juli 2018, Medan; 16 – 17 Juli, Surabaya; 27 – 28 Agustus 2018, Makassar;	BRI Corporate University
17.	RCA - *Enhancement* Program *Special Request* Aplikasi MyBRI 2018_RAK	18 April 2018, Makassar & Surabaya; 19 – 20 April 2018, Jakarta & Bandung; 22 – 23 Mei 2018, Yogyakarta; 17 – 18 Juli 2018,Padang; 18 Juli 2018, Medan	BRI Corporate University
18.	Pendidikan *Enhancement Special Request* Materi Perpajakan Tahun 2018	15 – 16 Oktober 2018, Padang	BRI Corporate University
19.	*Special Request* Auditor AIW BRI Jakarta 3	14 – 15 Desember 2018, Jakarta	BRI Corporate University
20.	*Special Request* Auditor Kanins BRI Palembang Tahun 2018	23 – 27 April 2018, Jakarta	BRI Corporate University
21.	RCA - *Enhancement* Program *Special Request* Aplikasi MyBRI 2018_RAK	19 – 20 April, Bandung;	BRI Corporate University
22.	*Enhancement Special Request* Auditor Kanins BRI Jakarta 3 Cluster Kalimantan Barat Tahun 2018	25 – 30 April 2018, Jakarta	BRI Corporate University
23.	*Special Request* Kanins BRI Lampung	24 – 25 Mei 2018, Jakarta	BRI Corporate University

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Audit Internal Tahun 2018

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
24.	*Enhancement Special Request* Auditor Kanins BRI Jakarta 3 Cluster Jakarta dan Banten	30 – 31 Juli 2018, Jakarta	BRI Corporate University
26.	*Special Request* Auditor Kanins BRI Jakarta 1 Tahun 2018	7 – 8 Agustus 2018, Jakarta	BRI Corporate University
27.	*Special Request* Auditor Kanins BRI Jakarta 2 ke-1 Tahun 2018	4 – 25 April 2018, Bandung	BRI Corporate University
28.	TOS - Auditor Audit Intern Wilayah Jakarta 2	30 Juli 2018, Bandung	BRI Corporate University
29.	*Special Request* Pekerja Kanins BRI Bandung Tahun 2018	1 – 3 Agustus 2018, Bandung	BRI Corporate University
30.	Pendidikan *Enhancement Special Request* Auditor Kanins BRI Bandung Tahun 2018	3 – 7 Desember 2018, Bandung	BRI Corporate University
31.	*Special Request* Auditor Kanins BRI Yogyakarta ke-1 Tahun 2018	1 – 2 Maret 2018, Yogyakarta	BRI Corporate University
32.	*Enhancement Special Request* bagi RAU Kanins BRI Semarang Tahun 2018	25 – 27 April 2018, Yogyakarta	BRI Corporate University
33.	*Special Request* Auditor Kanins BRI Yogyakarta Materi Penulusuran Data *Fraud* Menggunakan *Tools* BRI Pusat Data	21 September 2018, Yogyakarta	BRI Corporate University
34.	Workshop Penyusunan Struktur Gaji dan Skala Upah	5 – 6 Februari 2918, Jakarta	Kontan Academy
35.	*Gain Foundational Knowledge of Cyber Security With Cybersecurity*	21 – 23 Mei 2018, Jakarta	ISACA Indonesia
36.	*Workshop Digital Forensic*	3 – 5 Juli 2018, Bogor	ACFE
37.	*National Anti Fraud Conference* (NAFC) Tahun 2018	19 – 20 Juli 2018, Bandung	ACFE
38.	Konferensi Nasional III Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Tahun 2018 (Peran Auditor Internal dalam Peningkatan *Governance, Risk and Control* (GRC) di Era Disruptif)	9 – 10 Agustus 2018, Solo	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI)
39.	*National Conference* Tahun 2018 (*Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times*)	28 – 29 Agustus 2018, Bali	IIA
40.	Konferensi Nasional X IAIB Tahun 2018 (*Fostering an Innovative Internal Auditing as a Key Element in Innovative Banking*)	8 – 9 November 2018, Yogyakarta	IAIB

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Audit Internal Tahun 2018

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
41.	Workshop "Fraud dalam Investasi Surat Berharga (*Securities Fraud in Indonesia*)"	7 – 8 November 2018, Surabaya	ACFE
42.	Workshop "*Mobile Forensic Investigation Course*"	21 – 22 November 2018, Bogor	ACFE
43.	*Key Risk Management Challenges in 2019* "*Credit Quality, Active Credit Portofolio Management & Stress Testing and Also Credit Scoring*"	6 – 7 Desember 2018, Batam	BARA
44.	*Fraud Risk Management*	5 – 6 September 2018, Semarang	ACFE
45.	*Logistic And Supply Chain Management Concept, Strategy and Implementation*	25 – 27 September 2018, Yogyakarta	Yogya Smart Indotama
46.	*Computer Hacking Forensic Investigator*	17 – 21 September 2018, Jakarta	Inovasi Informatika Indonesia
47.	Workshop Anti Korupsi "Mencegah Korupsi di Korporasi	25 September 2018, Jakarta	Indonesia Corruption Watch
48.	*Indonesia Cyber Security Forum*	18 – 19 Oktober 2018, Bali	Indonesia Cyber Security Forum
49.	*Document Control & Digital Filling System*	6 – 8 November 2018, Yogyakarta	Gama
50.	*Training Needs Analysis*	6 – 8 November 2018, Yogyakarta	Insmart
51.	Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit	6 – 7 Desember 2018, Jakarta	LPFA
52.	*E-Banking And E-Commerce Fraud And Operational Risk*	4 – 6 Desember 2018, Yogyakarta	Media Edutama
53.	Teknik Identifikasi dan Deteksi Atas Kecurangan (Fraud) Manajemen dan Laporan Keuangan	18 – 20 Desember 2018, Yogyakarta	Media Edutama
54.	*Conference "Internal Auditing and Fraud Prevention"*	16 – 17 Juli 2018, Malaysia	Marcusevans
55.	2018 Asia Pacific CACS (*Computer Audit, Control and Security*)	20 – 21 September 2018, Thailand	ISACA
56.	*Certified Chief Information Security Officer* (CCISO)	9 – 10 April 2018, Jakarta	Andalan Teknologi Inovasi

Analisis & Pembahasan Manajemen

PADA TAHUN 2018, PEREKONOMIAN INDONESIA MAMPU TUMBUH STABIL DITENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL. PERTUMBUHAN EKONOMI DIDUKUNG TINGKAT INFLASI YANG RENDAH, DEFISIT FISKAL YANG TERJAGA SERTA SISTEM PERBANKAN YANG KOKOH.

Profitabilitas BRI tetap terjaga dengan laba bersih sebesar

Rp**32,42** triliun

ROA 3,68%, dan ROE 20,49%.

Pengembangan bisnis didukung kecukupan modal yang memadai dengan CAR sebesar **21,21**%

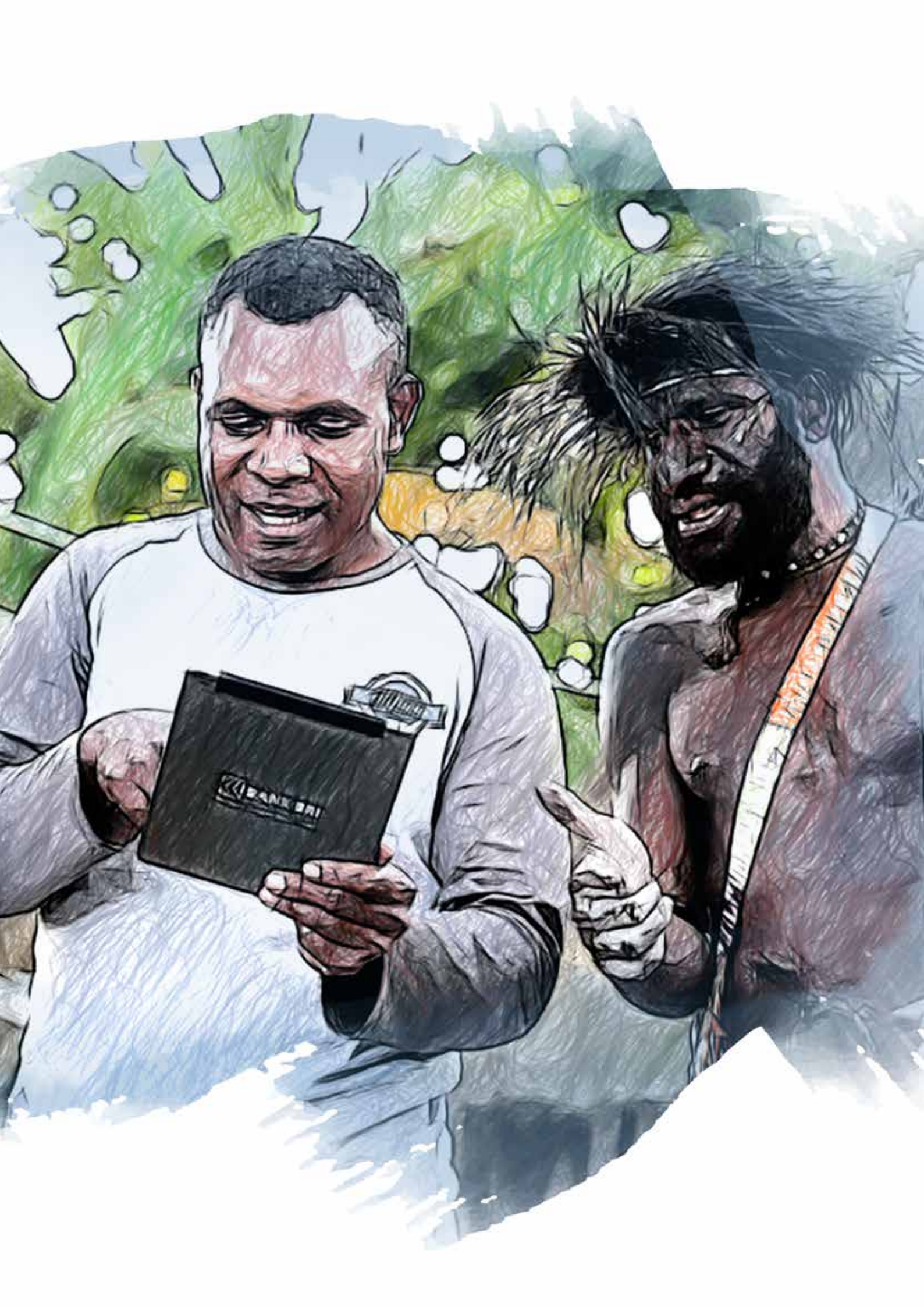
BANK BAI

Perekonomian Global

Tahun 2018 merupakan tahun yang cukup menantang bagi perekonomian Global, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di tahun ini seperti ketidakpastian perang dagang antara Amerika Serikat dan China, melemahnya kinerja ekonomi negara-negara zona Eropa dan Jepang, serta peningkatan tingkat suku bunga dan tekanan *capital outflow* pada negara-negara berkembang seperti Argentina, Brazil, Turki, Afrika Selatan, dan Mexico.

Namun demikian, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia umumnya akan tetap kuat pada jangka menengah meskipun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi beberapa periode yang lalu, termasuk di negara-negara eksportir komoditas.

Dari sisi moneter, selama tahun 2018 the Fed melaksanakan kebijakan normalisasi moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak empat kali dari 1,5% ke 2,5%. Namun diakhir tahun 2018 Chairman the Fed juga menyebutkan tingkat suku bunga the Fed telah mendekati level normal, hal ini menjadi salah satu sinyal positif bagi perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam menghadapi tahun 2019.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook yang terbit pada Oktober 2018, memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2018 dan 2019 akan tetap sama dengan level pertumbuhan di 2017 yakni sebesar 3,7%.

Perekonomian Indonesia

Indikator	2016	2017	2018
Pertumbuhan PDB (%)	5,03	5,07	5,17
Nominal PDB (USD Miliar)	932,31	1.015,38	1042,15
PDB/Kapita (USD)	3.605	3.877	3,927
Ekspor (USD miliar)	145,19	168,83	180,06
Impor (USD miliar)	135,65	156,98	188,63
Neraca Perdagangan (USD miliar)	8,78	11,84	-8,57
Cadangan devisa (USD miliar)	116,36	130,20	117,21
Suku Bunga Acuan (%) *7 Day Reverse Repo*	4,75	4,25	6
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13
IHSG (nilai riil)	5.297	6.356	6.111

Sumber: BPS, BI 2018
Catatan : Konversi dengan kurs Rp 14.000,-

Di tengah gejolak yang terjadi pada ekonomi global, perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada tahun 2018. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada pada level 5,17%, lebih tinggi 10 basis *point* dibandingkan dengan tahun 2017 yang berada pada level 5,07%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi produksi ditopang oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,99%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 10,79%

Perekonomian Indonesia

Sementara itu Konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor dengan komposisi terbesar dari sisi pengeluaran yakni sebesar 54,21% dari PDB. Konsumsi Rumah tangga tumbuh 5,05% di sepanjang 2018, lebih tinggi dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 4,95%. Meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh sub-kelompok restoran dan hotel yang tumbuh signifikan sebesar 5,74%, selain itu daya beli yang terjaga dan tingginya keyakinan konsumen juga turut menjaga pertumbuhan konsumsi.

Untuk investasi, pertumbuhannya masih tumbuh cukup tinggi yang ditopang investasi bangunan, terkait proyek infrastruktur dan properti, maupun investasi non bangunan. Di sisi pengeluaran pemerintah, realisasi anggaran tetap tumbuh terutama untuk belanja barang serta belanja pegawai. Pada sisi perdagangan, ekspor tetap tumbuh positif di tengah tekanan global.

TREND PDB INDONESIA TAHUN 2010 – 2018 (%)

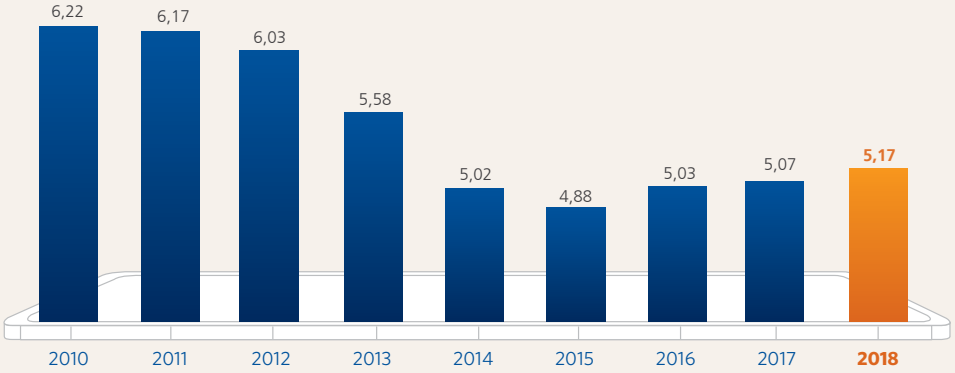

Sumber data:BPS Desember 2018, diolah

Rupiah di sepanjang 2018 mengalami tekanan terhadap penguatan Dollar Amerika Serikat, namun volatilitas pergerakan rupiah selama periode tersebut masih tetap terjaga. Secara *year to date* (ytd) sampai dengan kuartal III 2018 Rupiah melemah sebesar 9,94% ke level Rp14.903 per Dollar AS. Pada akhir 2018 Rupiah bergerak menguat ke level Rp14.330, namun secara year to date sampai dengan akhir Desember Rupiah tetap terdepresiasi sebesar 5,72%. Pergerakan Rupiah yang terjaga dan tren penguatan nilai Rupiah di akhir tahun menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi tahun 2019.

PERGERAKAN RUPIAH TERHADAP USD

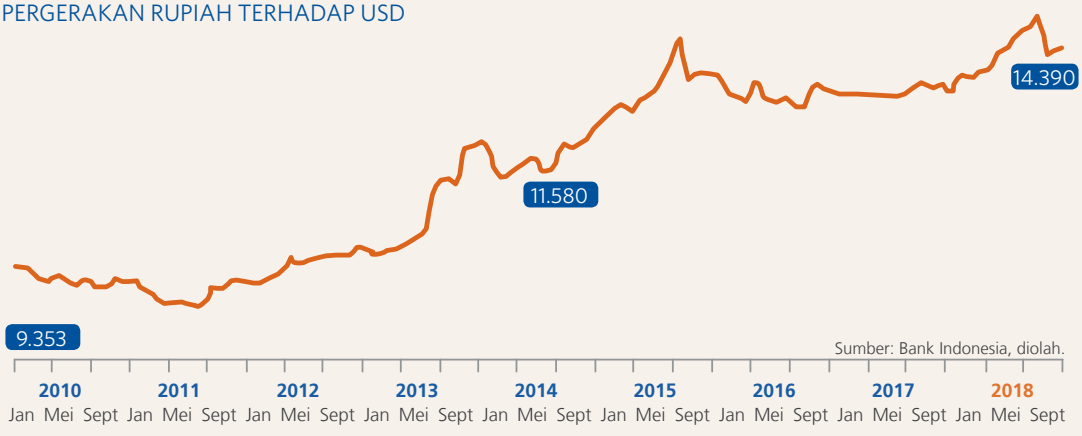

Sumber: Bank Indonesia, diolah.

Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2018 diikuti dengan inflasi yang rendah, yang berada pada level 3,13% sesuai dengan target pemerintah yang berada pada kisaran 3,5% ± 1%. Selain inflasi yang rendah angka defisit fiskal Indonesia di tahun 2018 juga terjaga, defisit APBN di tahun 2018 berada pada level 1,72%, lebih baik dari defisit APBN pemerintah pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 2,19%.

Pertumbuhan ekonomi yang baik didukung posisi cadangan devisa yang berada pada level cukup tinggi sebesar USD117,21 miliar yang setara dengan pembiayaan 6,5 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Hal ini menunjukkan fundamental perekonomian yang cukup kokoh terhadap risiko ketidakpastian global.

PERGERAKAN INFLASI DAN BI 7DRRR
Sumber: Bloomberg, diolah

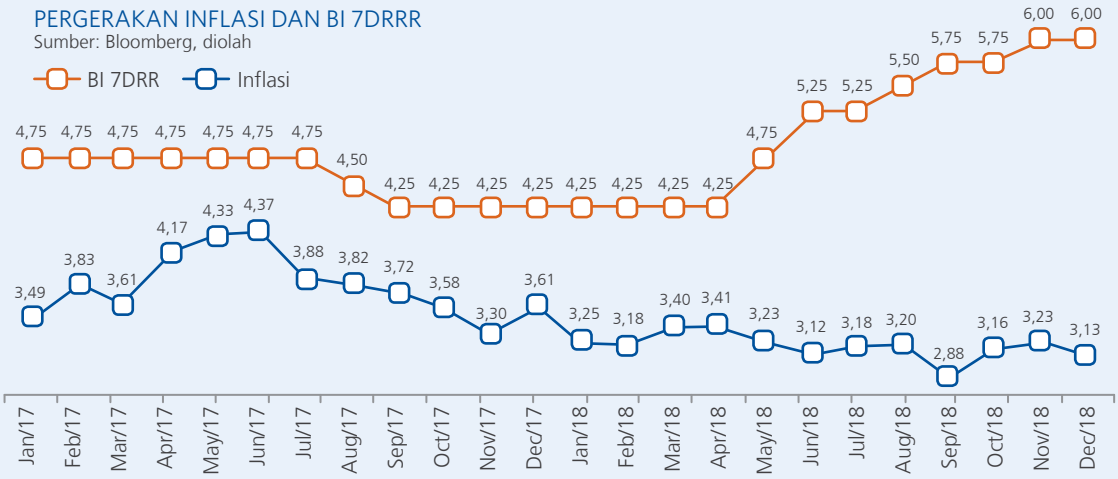

Di pasar keuangan, Laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2018, menyebutkan risiko pembiayaan utang Indonesia meningkat. Namun demikian, Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar utang karena tingkat utang luar negeri relatif rendah; kecukupan dan likuiditas modal sektor keuangan yang kuat; serta fondasi moneter dan fiskal yang cukup.

Menghadapi ketidakpastian global, Bank Indonesia telah berupaya menjalankan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sepanjang tahun 2018, BI menaikkan tingkat suku bunga acuan, BI 7 *Days Reverse Repo Rate*, sebesar 175 *basis point*.

BI 7 Days RR berada di level 6% di akhir tahun 2018. Selain meningkatkan tingkat bunga, BI juga memperkenalkan DNDF (*Domestic Non-Delivery Forward*) untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Proyeksi 2019

Pada tahun 2019, perekonomian global diproyeksikan stabil dan tetap tumbuh positif. IMF memproyeksikan pertumbuhan global di level 3,7% sama seperti pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Sementara OECD memperkirakan perekonomian global akan tumbuh di level 3,5%.

Meski diproyeksikan tetap tumbuh positif, namun perekonomian global diperkirakan masih diliputi risiko ketidakpastian. Hal itu disebabkan beberapa faktor antara lain ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat dan mitra dagangnya yang kemungkinan masih terjadi, normalisasi kebijakan moneter AS yang terus berlanjut, gejolak harga minyak, risiko cuaca ekstrim, ketegangan geopolitik, dan tekanan tingkat bunga dan arus keluar modal di negara-negara berkembang.

Di tengah situasi global tersebut, Pemerintah dalam APBN 2019 menyusun asumsi dasar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi di level 3,5%, dan nilai Rupiah sebesar Rp15.000.

Proyeksi Perekonomian Indonesia 2019

No.	Asumsi	2019		
		Proyeksi* Pemerintah	OJK	Proyeksi BRI**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	5,2 - 5,3	5,10 - 5,25
2	BI 7 Days rate (%)	-	-	6,25 - 6,50
3	Inflasi (%	3,5	3,5 - 4,0	4,00 - 4,30
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000	-	15.150 - 15.350

Sumber:
* Konferensi Pers APBN 2019
** Grup Economist & Corporate Research BRI

Industri Perbankan Nasional

Kinerja keuangan industri perbankan Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator kunci sebagai berikut:

Indikator Keuangan Utama Perbankan Indonesia

Indikator	2016	2017	2018
Aset (Rp Triliun)	6.730	7.387	8.068
Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (Rp Triliun)	4.377	4.738	5.294
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	4.837	5.289	5.630
Laba setelah pajak (Rp Triliun)	107	131	150
CAR (%)	22,93	23,18	22,97
NPL (%)	2,93	2,59	2,37
NIM (%)	5,63	5,32	5,14
ROA (%)	2,23	2,45	2,55
BOPO (%)	82,22	78,64	77,86
LDR (%)	90,70	90,04	94,78

Secara umum kondisi kinerja perbankan Indonesia di tahun 2018, masih terjaga dengan baik yang terlihat dari tingkat ketahanan permodalan (CAR) yang kuat yaitu pada level 23,97%. Hal ini cukup memadai untuk mendukung ekspansi kredit sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan risiko. Kinerja intermediasi perbankan relatif moderat seiring dengan membaiknya penyaluran kredit dan perlambatan penghimpunan dana. Kredit industri perbankan mampu tumbuh 11,73% dibanding tahun 2017. Sementara Dana Pihak Ketiga hanya mampu tumbuh 6,45% sehingga berdampak pada peningkatan LDR menjadi 94,78%.

Aset industri perbankan hanya tumbuh sebesar 5,17% *Year on Year (YoY)* dan laba naik sebesar 14,5%, sehingga rentabilitas perbankan yang ditunjukkan rasio imbal hasil terhadap aset (*return on assets* atau ROA) meningkat menjadi 2,52%.

Kualitas aset yang ditunjukkan *non performing loan* (NPL) meningkat dari 2,59% di tahun 2017 menjadi 2,37% di tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari situasi makroekonomi yang tumbuh moderat sehingga berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu rasio biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) sedikit menurun menjadi sebesar 77,86% dari 78,64% di tahun 2017.

Tinjauan Industri Perbankan dan BRI

Pertumbuhan Kredit 2018

Peran intermediasi perbankan di tahun 2018 mengalami peningkatan. Penyaluran kredit di industri perbankan naik 11,73% menjadi sebesar Rp5.294 triliun dari tahun 2017 yang mencapai Rp4.738 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan kredit BRI di tahun 2018 berada di atas pertumbuhan industri perbankan, yaitu sebesar 14,1% dari Rp739,34 triliun di tahun 2017 menjadi Rp843,59 triliun. Pangsa pasar kredit BRI juga mengalami kenaikan dari 15,6% menjadi 15,93%

PERTUMBUHAN KREDIT BRI VS INDUSTRI
(%)

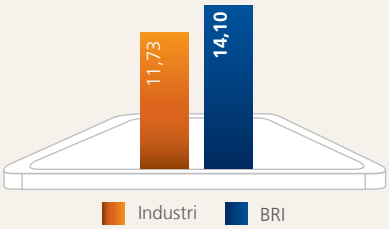

PANGSA PASAR KREDIT BRI
(%)

Kualitas Kredit

Kualitas kredit industri perbankan yang ditunjukkan dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) mengalami perbaikan dari 2,59% di tahun 2017 menjadi 2,37% di tahun 2018. Kualitas kredit BRI berada pada level yang lebih baik dari industri, NPL *gross* BRI berada pada level 2,14% di tahun 2018.

NON PERFORMING LOAN (NPL) BRI VS INDUSTRI
(%)

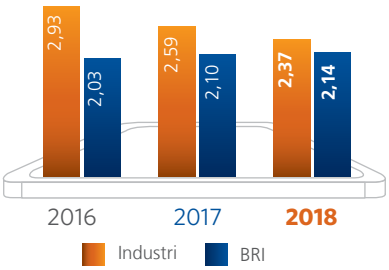

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan pada tahun 2018 mencapai Rp5.630 triliun, naik 6,45% dari tahun 2017 sebesar Rp5.289 triliun. Sementara itu, penghimpunan DPK BRI lebih baik dari industri DPK BRI mencapai Rp944,27 triliun di 2018, meningkat 12,19% dari tahun 2017 sebesar Rp841,66 triliun. Pangsa pasar DPK BRI juga mengalami peningkatan dari 15,91% menjadi 16,77%.

PERTUMBUHAN DPK BRI VS INDUSTRI
(%)

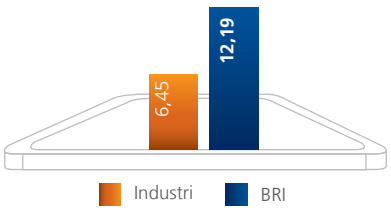

PANGSA PASAR DPK BRI
(%)

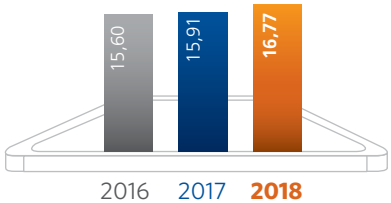

Likuiditas

Loan to Deposit Ratio (LDR) industri meningkat dari 90,04% di tahun 2017 menjadi 94,78% di tahun 2018. LDR BRI juga menunjukkan tren yang sama dari 88,13% di tahun 2017 menjadi 89,57% di tahun 2018.

LDR BRI VS INDUSTRI
(%)

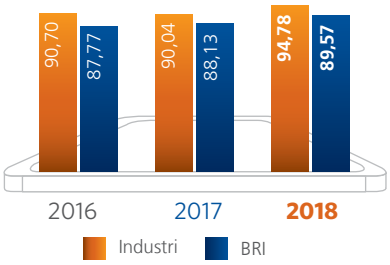

Profitabilitas

Profitabilitas industri perbankan Indonesia yang ditunjukkan oleh rasio *Net Interest Margin* (NIM) mengalami tekanan pada tahun 2018. NIM industri perbankan mencapai 5,14% di tahun 2018, turun dari tahun 2017 sebesar 5,32%. Dengan komitmennya untuk tetap fokus pada sektor UMKM, BRI mampu menjaga NIM diatas industri. NIM BRI sebesar 7,45% di tahun 2018 atau lebih tinggi dari industri perbankan. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 7,93%, juga lebih tinggi dari industri.

NIM BRI VS INDUSTRI
(%)

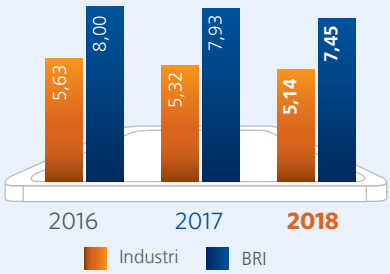

Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional

Industri perbankan mencatat perbaikan pada sisi efisiensi, yang ditunjukkan dengan penurunan rasio BOPO dari 78,64% di tahun 2017 menjadi 77,86% di 2018. Sementara itu BRI mampu lebih efisien dari industri. BOPO BRI berada pada level 68,48% di tahun 2018, lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 69,14%.

BOPO
BRI VS INDUSTRI
(%)

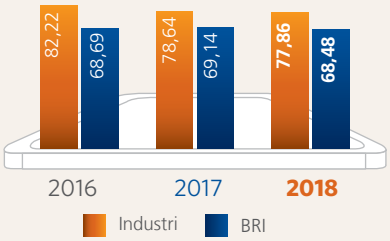

Proyeksi Kinerja Perbankan Indonesia Tahun 2019

Pada tahun 2019, kinerja perbankan diproyeksikan masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan LPS memperkirakan pertumbuhan kredit dua digit, sedangkan DPK diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 8%-11%.

YoY %	2017		2018		2019 Proyeksi	
	Kredit	DPK	Kredit	DPK	Kredit	DPK
OJK	8.24%	9.35%	9,21%	6,4%	10%-13%	8%-10%
BI	8.24%	9.35%	9,21%	6,4%	10%-12%	9%-11%
LPS	8.24%	9.35%	9,21%	6,4%	12.4%	9%

Tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh industri perbankan adalah arah kebijakan dan regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah dan otoritas moneter dan jasa keuangan. Berikut beberapa rencana penerapan regulasi yang memberikan dampak terhadap bisnis perbankan, meliputi:

a. Rencana pembentukan Holding BUMN sektor Perbankan dan Jasa Keuangan.
b. Penerapan ASEAN *Free-Trade*
c. Implementasi PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Kewajiban Penyimpanan *Floating* Dana *Electronic Money* di Bank BUKU IV.
d. Peraturan wajib parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) bagi pengusaha sektor sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku 1 Januari 2019.

Penerapan kebijakan-kebijakan di atas tersebut merupakan peluang dan tantangan bagi industri perbankan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu bank perlu memperkuat struktur aset dan liabilitas yang dimiliki, berinovasi aktif dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer centric*), dan memperbaiki bisnis proses dengan perbaikan pada *service level agreement* (SLA) dan proses digitasi maupun digitalisasi sehingga kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan lebih produktif.

Rencana Strategis Bank

RENCANA JANGKA PENDEK BRI TAHUN 2019

BRI menetapkan tema tahunan pada penyusunan perencanaan perusahaan di Tahun 2019 yaitu ***Leading Consumer Banking in Indonesia.*** Fokus dari tema tersebut adalah BRI sebagai pemimpin pasar dalam bisnis *consumer banking* yang didukung dengan pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan *re-engineering* proses bisnis untuk menghadapi perubahan dan menangkap peluang bisnis di masa mendatang sehingga aspirasi BRI menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara dan *Home to the Best Talent* tercapai. Adapun pemangku kepentingan yang dipertimbangkan dalam penentuan ukuran keberhasilan tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, nasabah, pekerja dan masyarakat.

Rencana Jangka Pendek yang akan dilakukan untuk dalam kurun waktu satu tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- **Meningkatkan Pangsa Pasar *Consumer Banking***
  BRI memiliki target untuk meningkatkan pangsa pasar segmen konsumer dengan fokus utama pada *salary based loan*, CASA dan jumlah nasabah pengguna aktif *e-channel* disertai dengan inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang berbasis TI (digitasi dan digitalisasi).

- **Tetap Menjaga Fokus Pertumbuhan Aset di Segmen UMKM**
  BRI tetap melanjutkan fokus pada pertumbuhan *asset* bisnis di segmen UMKM dengan meningkatkan penetrasi pasar Mikro melalui ekspansi produk kredit mikro serta optimalisasi potensi *value chain* pada bisnis UMKM.

- **Menjaga Kualitas Aset**
  Kualitas kredit akan dikelola dengan melanjutkan restrukturisasi pinjaman di bidang Mikro dan Ritel. Untuk Segmen Menengah, Korporasi dan BUMN, upaya menjaga kualitas kredit akan diwujudkan dengan fokus kepada pertumbuhan BRI pada potensi bisnis yang berhubungan dengan *trickle down business*.

- **Meningkatkan Pertumbuhan Dana Murah dan Menjaga Komposisi CASA**
  Dilihat dari sisi liabilitas, BRI akan menerapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan kinerja DPK melalui strategi pemasaran yang efektif baik di segmen Mikro, Ritel maupun Korporasi. Caranya dengan pengembangan produk simpanan yang *customer centric*, meningkatkan *usage* BRILink melalui agen untuk membangun *barrier* di bisnis *retail payment,* serta mengembangkan peluang bisnis *wholesale transaction banking* di segmen Korporasi. BRI menargetkan ekspansi dana murah untuk menjaga komposisi CASA dikisaran 60-64%.

- **Menerapkan *Operational Excellence***
  Strategi dalam mencapai tingkat *operational excellence* antara lain melalui *Business Process Re-Engineering* terutama di segmen Mikro, Ritel, Menengah dan Korporasi, meningkatkan MIS sebagai sumber data yang *reliable* dan mendukung pengambilan keputusan, serta menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) minimal berdasarkan standar industri.

- **Membangun Sinergi BUMN untuk meningkatkan daya saing**
  BRI senantiasa berupaya menciptakan *value* untuk *stakeholders* termasuk untuk Pemerintah. Salah satu hal yang dilakukan adalah memperkuat sinergi antar BUMN untuk meningkatkan daya saing. Beberapa hal yang dilakukan adalah implementasi ATM dan EDC Merah Putih, pembangunan Rumah Kreatif BUMN dan sindikasi pembiayaan infrastruktur.

Program Jangka Pendek tersebut merupakan bagian dari Rencana Korporasi 2018-2022 yang berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI serta faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan. Beberapa faktor tersebut, antara lain:

- Kondisi demografis Indonesia dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif kelas menengah dengan daya beli yang semakin tinggi dan semakin didominasi oleh generasi *millenial* yang akrab dengan teknologi digital.

Rencana Strategis Bank

- Arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang akan membutuhkan pendanaan dari perbankan serta pengembangan dan pemberdayaan pedesaan.
- Integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan perdagangan bebas antar-negara ASEAN yang akan berpengaruh terhadap persaingan bank-bank baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.
- Perubahan preferensi nasabah yang berpengaruh kepada pertumbuhan nasabah yang *digitally savvy* yaitu perubahan perilaku para nasabah yang lebih menyukai cara digital yang membuat bisnis mereka lebih cepat, lebih aman dan hemat waktu. Para nasabah menyukai cara bertransaksi yang tidak lagi dibatasi waktu dan tempat.

RENCANA JANGKA MENENGAH

Rencana jangka menengah merupakan bagian dari sasaran jangka panjang BRI (lima tahunan) yang merupakan implementasi Visi dan Misi Bank BRI. Target jangka menengah meliputi sasaran usaha yang akan ditempuh dalam tiga tahun ke depan, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 melalui strategi 5C's (CASA, Customer Focus, Credit Excellence, Capabilities, Culture).

a. CASA (*Liabilities*)
   1. Perbaikan *funding structure* dengan fokus pada penghimpunan dana murah
   2. *Strengthening micro saving value proposition*
   3. Implementasi *funding strategy* diantaranya melalui *Branch sales Effectiveness* dan *Funding War Room*
   4. *Strategic partnership* dengan instansi lain seperti Bank Pembangunan Daerah.

b. *Customer Focus (Fee-Based Income)*
   1. Pengembangan kapasitas *transaction banking* dalam rangka meningkatkan *fee based income*
   2. Membangun *customer based* yang informatif dan produktif
   3. Melakukan inovasi produk dan layanan yang berorientasi pada nasabah *(customer centric)* dengan memanfaatkan Big Data
   4. Meningkatkan *cross selling* produk perusahaan anak untuk memberikan layanan dan solusi keuangan terintegrasi bagi nasabah
   5. Kolaborasi dan *partnership* dengan *startup* atau *fintech* dalam rangka menciptakan ekosistem digital

c. *Credit Excellence (Asset)*
   1. Fokus pada segmen kredit yang memiliki profitabilitas tinggi
   2. Meningkatkan kinerja bisnis konsumer dan menjaga kinerja segmen UMKM
   3. Meningkatkan profitabilitas segmen korporasi melalui solusi perbankan yang terintegrasi
   4. Menangkap potensi *value chain*
   5. Menjaga kualitas *earning assets.*
   6. Meningkatkan inklusi dan literasi keuangan

d. *Capabilities* (IT, Data & Network)
   1. *Build Future ready platform* melalui pengembangan teknologi dan inovasi
   2. *Leverage Data Governance & Analytics*
   3. Peningkatan produktifitas Jaringan Kerja

e. *Culture (Human Capital)*
   1. Meningkatkan akuntabilitas Sistem Manajemen Kinerja melalui penetapan KPI yang produktif dan *career path* yang terarah.
   2. Optimalisasi *talent pool & group talent mobility*
   3. Meningkatkan produktifitas pekerja diantaranya *Hiring freeze* dan *Shifting* pekerja *support* ke bisnis.

RENCANA STRATEGIS JANGKA PANJANG

Dalam penyusunan *Corporate Plan* 2018-2022, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI, penyusunan Rencana Jangka Panjang akan menjadi *guideline* proses transformasi BRI. Sampai dengan Tahun 2022, BRI memiliki aspirasi untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia* serta *Home to The Best Talent.*

Rencana Strategis Bank

Fokus Bisnis 2018-2022

Mikro	Konsumer	Ritel & Menengah	Korporasi	Perusahaan Anak
Mempertahankan & menumbuhkan *market share* pada segmen mikro	Tetap menjadi yang terdepan dalam *Salary Based Loan* sekaligus menduduki peringkat 3 besar di kategori lain	Menjadi bank yang terdepan di segmen Ritel dan Menengah di Indonesia	Peningkatan profitabilitas segmen korporasi	Peningkatan kontribusi Perusahaan Anak

Rencana BRI tersebut akan diimplementasikan dalam 3 *waves of transformation* sebagai berikut:

2017 - 2018
STRENGHTHEN FOUNDATION & DEFEND CORE BUSINESS

2017
Integrated Banking Solutions Embrace performance driven culture

2018
Leading MSME & Operational Excellence through Digital Banking

2019 - 2021
ACHIEVE TOP TIER STATUS IN INDONESIA ACROSS SEGMENTS

2019
Leading Consumer Banking in Indonesia

2020
Integrated Financial Solution

2021
Most Valuable Banking Group in Indonesia

2022 Onward
SUSTAIN TOP TIER POSITION AND MAKE BRI THE MOST VALUABLE BANK IN SOUTHEAST ASIA

2022
Most Valuable Bank in Southeast Asia and Home to the Best Talent

Bank BRI untuk Indonesia

RINGKASAN

BRI menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan(PKH) sebesar **Rp6,72 triliun** kepada 3,85 juta KPM dan Penyaluran BPNT sebesar Rp1,4 trilliun kepada 2,67 juta KPM

Menyalurkan KUR sebesar **Rp6,89 miliar** kepada 2.662 petani penerima SK Perhutanan Sosial

Jumlah RKB BRI sebanyak 53 unit dengan 302.942 anggota dan dinobatkan sebagai **BUMN RKB Terbaik oleh Kementerian BUMN**

BANSOS PKH
(Rp triliun)

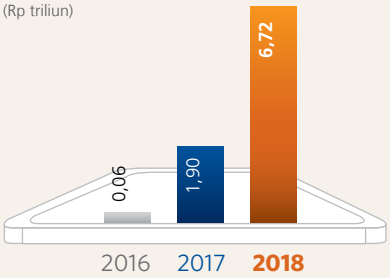

KARTU TANI

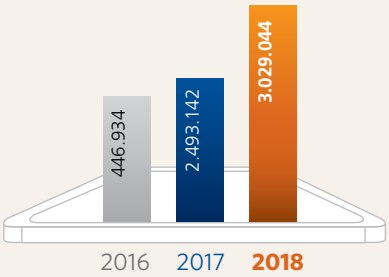

Kartu Tani yang dibagikan BRI kepada petani sebanyak **3,03 juta kartu**

Mengakuisisi rekening BUMDes sebanyak **17.545 rekening**

Penyaluran pinjaman sebesar **Rp1,29 triliun** kepada 2.346 pelaku usaha mikro dan kecil pemegang kartu IUMK

Jumlah rekening Simpanan Pelajar menjadi 20,40 juta rekening dengan Saldo sebesar **Rp3.995 miliar** sebagai dukungan program Inklusi Keuangan

Bagi BRI, berinvestasi pada kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan sama pentingnya dengan berinvestasi pada masa depan bisnis perusahaan. Pendekatan ini memicu BRI untuk membuat suatu organisasi khusus di dalam perusahaan yang menangani program-program tersebut malalui Divisi Social Entrepreneurship dan Desk Inkubasi Bisnis, dengan fokus kepada akses terhadap Pengentasan Kemiskinan (Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai), Pemberdayaan Masyarakat Desa (melalui BUMDes), Peningkatan Kesejahteraan Petani (Kewirausahaan Pertanian), dan akses terhadap Inklusi Keuangan, serta kegiatan sosial lainnya.

Bank BRI Untuk Indonesia

Sebagai bentuk dukungan BRI tersebut serta menunjang kelancaran program Pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BRI berperan serta dalam program-program sebagai berikut:

Program Bansos Non Tunai PKH dan BPNT

Dalam menjalankan fungsinya sebagai agent of development. BRI diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyalurkan program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan mekanisme distribusi sebagai berikut:

a. Setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan sistem perbankan, untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.
b. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas keuangan inklusif.
c. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu.

Sebagai perwujudan dan implementasi ketiga hal tersebut diatas maka BRI bersama HIMBARA bekerjasama dengan Kementerian Sosial mengembangkan sistem penyaluran bantuan non tunai dengan membuat satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimana pencairannya melalui Agen Bank dan E-Channel Bank sebagai penyalur bantuan.

Adapun wilayah penyaluran BRI telah tersebar di 33 Provinsi, 258 Kabupaten/Kota, 3.080 Kecamatan dan 31.424 Desa. Dalam mendukung program ini BRI telah menyediakan infrastruktur jaringan berupa:

Infrastruktur BRI	2017	2018
Kartu ATM (KKS)	2,2 juta	3,85 juta
Agen BRILink	49.090	57.312
Jaringan BRISat	-	28 Titik

BRI juga diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan di daerah *remote area* yang masih susah dari jangkauan signal komunikasi (*blankspot*) dengan memanfaatkan jaringan satelit (BRISAT) yang dimiliki oleh BRI. Saat ini terdapat 28 titik Agen BRILink Penyalur BPNT yang mengunakan jaringan BRISat yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

Pada tahun 2018, BRI telah menyalurkan bantuan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
a. 3,85 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima PKH dengan nominal bantuan sebesar Rp6,72 triliun.
b. 2,67 juta KPM Penerima BPNT dengan total nominal bantuan sebesar Rp1,4 triliun.

Program Bansos dilayani oleh 236 Kantor Cabang BRI di seluruh Indonesia.

Keterlibatan BRI dalam penyaluran Program Bansos tersebut merupakan salah satu wujud komitmen mendukung Program Pemerintah. Dengan begitu, BRI turut berperan serta dalam:

1) Peningkatan inklusi keuangan dengan menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan bank (*unbankable*) menjadi terlayani perbankan (*bankable*).
2) Pengentasan kemiskinan dengan menurunnya angka kemiskinan.
3) Pemberdayaan masyarakat dimana KPM menjadi lebih paham terkait perbankan serta meningkatkan taraf hidup KPM maupun Agen BRILink.

Program Kewirausahaan Pertanian

Program Kewirausahaan Pertanian merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Program ini bertujuan untuk mendorong petani dalam skala ekonomi tertentu agar berkelompok menjadi wirausaha. Pemerintah memberikan dukungan melalui sarana prasarana pertanian modern. Syarat untuk bisa mencapai nilai keekonomian program Kewirausahaan Pertanian untuk pertanian padi minimal seluas 4.000 Ha.

Dalam mengimplementasikan program ini, BRI telah melakukan *pilot project* di Kabupaten Tasikmalaya dengan total luasan lahan sebesar 5.535 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Cisayong, Sukaratu, Sukahening dan Jamanis. Skema program ini sebagai berikut: (lihat skema program kewirausahaan)

Peran BRI dalam mendukung program Kewirausahaan Pertanian antara lain sebagai berikut:

1. Ikut membina Perusahaan *off taker* hasil petani yaitu PT Mitra Desa Bersama (MDB) Cisuka.
2. Membagikan Kartu Tani kepada 9.436 petani yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Cisayong, Sukahening, Sukaratu dan Jamanis.
3. Memberikan kredit mikro kepada 1.394 Petani dengan nominal *outstanding* sebesar Rp32,15 miliar.

Dalam skema kewirausahaan pertanian tersebut diatas, PT MDB menjadi *off taker* gabah hasil panen petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kemudian diolah melalui Rice Milling Unit (RMU) menjadi beras Premium dan dilakukan pengemasan. Selanjutnya, dijual kepada BUMDes-BUMDes yang ada di ke 4 Kecamatan tersebut. Saat ini PT MDB Cisuka telah memasok kebutuhan beras kepada 5 BUMDes di 4 Kecamatan tersebut.

Skema Program Kewirausahaan Pertanian

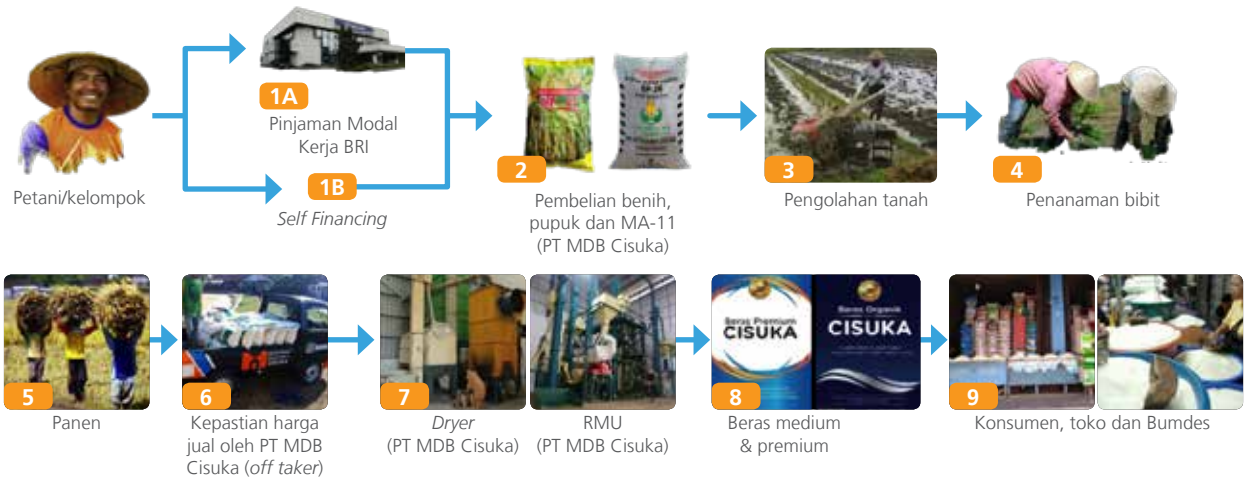

1A. Petani mengajukan pinjaman modal kerja di BRI
1B. Petani menggunakan dana sendiri
2. Petani membeli benih & pupuk di PT MDB Cisuka
3. Petani mengolah tanah dengan mesin traktor
4. Petani menanam bibit
5. Petani memanen hasil pertanian
6. Petani menjual gabah menggunakan jasa angkut
7. Pengeringan gabah melalui dryer & penggilingan menggunakan mesin RMU
8. Beras medium & premium dengan kemasan
9. Penjualan ke konsumen, toko & BUMDES (khususnya Tasikmalaya)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam hal BUMDes, Bank BRI bekerjasama dengan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan pendampingan dan pembinaan BUMDes dengan azas simbiosis mutualisme meliputi:

a. Memberikan edukasi literasi keuangan
b. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan
c. Melakukan pendampingan dan sosialisasi tata cara pendirian BUMDes
d. Menjadikan BUMDes sebagai Agen BRILink

Kerjasama ini secara efektif dimulai sejak Januari 2017 dan telah menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2017 rekening BUMDes yang terakuisisi sebanyak 7.153 rekening bertambah menjadi 17.545 rekening pada tahun 2018.

Bank BRI Untuk Indonesia

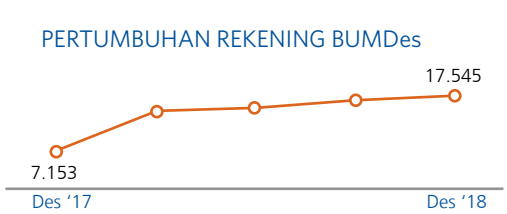

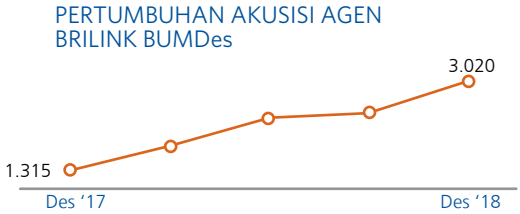

Adapun Pola Pendampingan BRI kepada BUMDes dapat diilustrasikan pada grafik di bawah ini.

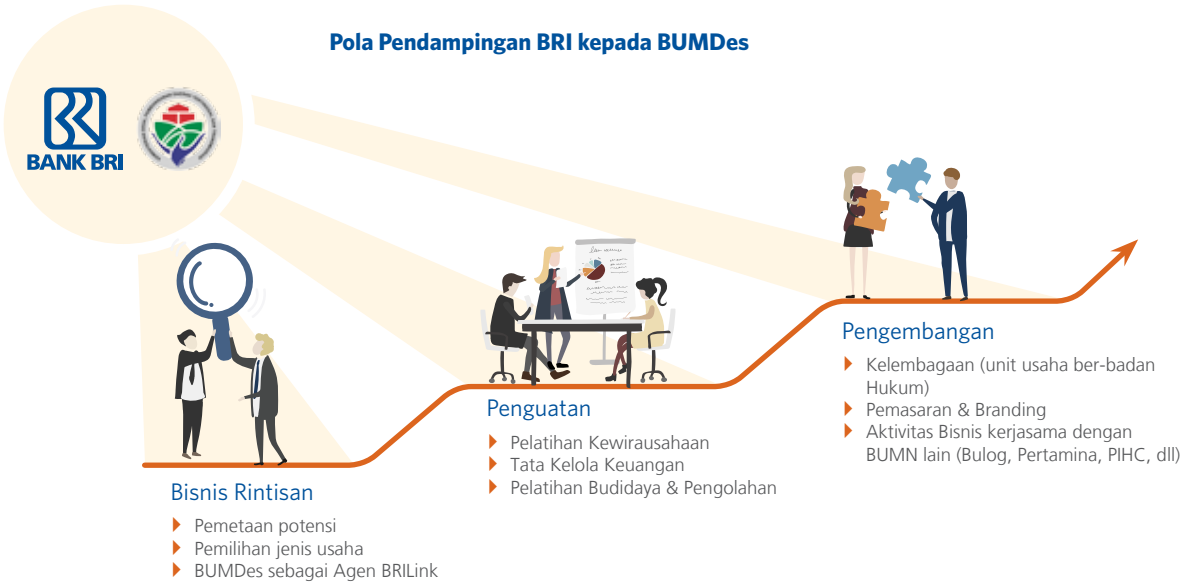

Dalam kerjasama pembinaan BUMDes ini diharapkan *social impact* yang akan dihasilkan antara lain Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penciptaan Lapangan Kerja, dan berujung pada pengembangan ekonomi desa. Selain itu, Brilink BUMDes juga dapat meningkatkan tingkat literasi keuangan desa.

Sebagai contoh, BUMDes binaan Bank BRI yang bernama BUMDes Maju Mandiri yang terletak di DI Yogyakarta sukses mengelola usaha pariwisata yaitu Goa Pindul yang kini omzetnya mencapai Rp2,4 miliar ditahun 2018.

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 14 November 2018 bahwa untuk pengembangan bisnis BUMDes ke depannya, maka BUMN diharapkan dapat bersinergi untuk menambah aktivitas bisnisnya sesuai potensi dengan model bisnis BUMN Shop sebagai berikut:

Agen Bank (Laku Pandai BRILink)

Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog

Pertashop (Pertamina)

Agen Pupuk Non-Subsidi

Testimoni *Succes Story*

Darwi Ditolong KUR BRI dan Perhutanan Sosial

Darwi adalah seorang petani palawija penerima SK Perhutanan Sosial di Pati Jawa Tengah. Ia mengelola lahan seluas 1,5 hektar. Pada awal tahun 2018, permintaan komoditas ketela pohon dari pabrik tapioka di Pati mulai menunjukkan peningkatan. Akibatnya, kalangan petani belomba-lomba untuk menanam ketela pohon. Hal ini berdampak pada kelangkaan bibit ketela pohon di daerahnya. Pada satu sisi, beberapa petani dapat memperoleh bibit ketela pohon dari luar daerah Pati. Namun disisi lain, petani yang tidak memiliki modal cukup seperti Darwi harus gigit jari.

Di tengah kesulitan mendapatkan bibit ketela, secercah harapan muncul saat Mantri KUR BRI mengabarkan kepada Darwi adanya skema pembiayaan untuk petani pemegang SK Perhutanan Sosial seperti dirinya.

Informasi itu bagai setitik sinar di ujung lorong kegelapan bagi Darwi. Ia pun bergegas mengurus persyaratan sampai akhirnya mendapatkan fasilitas KUR BRI tersebut untuk pertama kali sebesar Rp 5 juta. Dari dana itu, ia membeli bibit ketela pohon dari Purworejo, yang berjarak 205 km dari Pati.

Seiring perjalanan waktu, sembilan bulan kemudian ketela pohon berhasil dipanen oleh Darwi. Nasib baik lagi-lagi berpihak padanya, dengan meningkatnya harga jual ketela pohon hampir 200 persen dari yang diperkirakan.

Berbekal hasil panen tersebut, Darwi pun melunasi KUR BRI, dan sisanya digunakan untuk modal usaha tani selanjutnya. Kesuksesan Darwi bersama KUR BRI dalam mengelola lahan Perhutanan Sosial telah menginspirasi petani penerima SK Perhutanan Sosial lainnya.

Kisah sukses Darwi membuktikan kehadiran BRI berhasil mengatasi kendala akses permodalan yang selama ini dihadapi oleh petani kecil khususnya petani-petani penerima SK Perhutanan Sosial.

Bank BRI Untuk Indonesia

Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan Program Redistribusi Aset yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini bertujuan untuk menurunkan ketimpangan sosial, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menurunkan kemiskinan dengan cara memberikan akses legal pengelolaan hutan selama 35 tahun kepada masyarakat setempat.

Sampai tahun 2019, Pemerintah akan mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial, dalam bentuk lima skema yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

Bank BRI turut mendukung Program Perhutanan Sosial tersebut melalui penyaluran dana KUR sebesar Rp12,7 miliar kepada 657 petani atau 100% petani penerima SK Perhutanan Sosial serta pemberian kartu tani sejak tahun 2017.

Selain itu, BRI juga turut serta memberikan bantuan sarana alat produksi seperti traktor tangan, perontok gabah, pemipil jagung, alat kemas, tandon dan pompa air. Pemberian bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan biaya beban usaha tani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi petani.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

BRI bekerjasama dengan Kementerian Koperasi & UKM, dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Aplikasi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil serta kartu *Co-Branding* Izin Usaha Mikro Kecil (Kartu IUMK). Kartu IUMK adalah kartu *co-branding* yang berfungsi sebagai *ID* pelaku IUMK dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan manfaat kartu debit BRI.

Penerbitan IUMK ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mempermudah akses pembiayaan. Selain itu, mereka perlu diberikan legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Sebagai bagian dari dukungan BRI pada implementasi program ini, BRI turut membantu dalam penyediaan Sistem Database bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, menyediakan sistem aplikasi IUMK tersebut mulai dari fungsi admin di kecamatan/ kelurahan/kantor desa hingga pada fungsi pelaporan dan monitoring bagi Kementrian terkait.

Kartu IUMK tersebut digunakan sebagai ID Pemilik Usaha Mikro Kecil (PUMK) sekaligus merupakan kartu debit BRI yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi. BRI juga memberikan kemudahan akses fasilitas kredit bagi para PUMK dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penerbitan kartu IUMK ini dapat dilakukan di seluruh unit kerja BRI yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sampai dengan 2018 BRI telah menerbitkan sebanyak 84.354 kartu Debit *Co-Branding* IUMK dengan saldo sebesar Rp147 miliar.

BRI juga telah memberikan pinjaman kepada 60.367 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pemegang Kartu IUMK dengan total *outstanding* sebesar Rp1,32 triliun. Adapun kartu tersebut memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal (ID) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berizin resmi serta mempermudah akses keuangan melalui kartu kredit dan kemudahan akses pembiayaan perbankan. IUMK juga berperan membantu pemerintah dalam tersedianya sistem aplikasi IUMK yang dapat diakses dari tngkat Kecamatan, kabupaten, provinsi hingga Kementerian.
2. Tersedianya database Pelaku Ijin Usaha Mikro dan Kecil secara detail *By Name By Address*.
3. Kemudahan dalam monitoring terhadap sebaran dan perkembangan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia sebagai bahan evaluasi dan kebijakan.

Rumah Kreatif BUMN (RKB)

Kementerian BUMN bersama Badan Usaha Milik Negara membangun RKB (Rumah Kreatif BUMN) sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar, dan membina para pelaku UMKM agar menjadi UMKM Indonesia yang berkualitas. RKB bertujuan untuk mendampingi dan mendorong para pelaku UMKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran, dan kemudahan akses permodalan.

Untuk UMKM yang ingin menjadi anggota RKB syaratnya cukup mudah dengan mendatangi RKB terdekat untuk didaftarkan dan registrasi mandiri di *website* www.rkb.id. Selanjutnya dapat mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh RKB.

Konsep pembinaan RKB meliputi antara lain *Go Modern*, *Go Digital*, *Go Online* dan *Go Global*. *Go Modern* untuk mempersiapkan dan membina UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, *branding*, dan *packaging*. *Go Digital* untuk penggunaan aplikasi digital dalam otomasi proses bisnis dan pemasaran. *Go Online*, untuk memperluas akses pasar UMKM secara online melalui *e-commerce*. *Go Global* untuk mempersiapkan dan membantu UMKM dalam hal penjualan berbasis *export*

RKB BRI pertama kali diresmikan oleh Menteri BUMN pada tanggal 11 Desember 2018 di Solo.

Pada tahun 2018, jumlah RKB BRI sebanyak 53 unit dengan anggota mencapai 302.942 orang. Jumlah anggota meningkat dibanding pada tahun 2017 yang tercatat sebanyak 286.330 orang. Kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan RKB BRI pada tahun 2018 meningkat tajam, dari sebelumnya hanya 908 kegiatan pada tahun 2017 menjadi 2.220 kegiatan di tahun 2018.

	2017	2018
Jumlah RKB	52	53
Anggota	286.330	302.942
Pelatihan	908	2.220

Salah satu RKB unggulan milik BRI adalah RKB Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Sogan, Kota Yogyakarta. RKB tersebut beranggotakan 43.198 UMKM yang aktif mengadakan *gathering* antar anggota untuk bertukar pikiran dan mengikuti pelatihan. Acara pelatihan yang diadakan di antaranya Cara Menghadapi Disrupsi, Bedah Bisnis, dan Prospek Bisnis. Selain itu sebanyak 679 UMKM anggota RKB Yogyakarta juga telah *Go Online* dengan melakukan pemasaran produk melalui *e-commerce* www.blanja.com.

Keterlibatan BRI dalam Program RKB mendapatkan apresiasi dari Kementerian BUMN. Pada 29 Oktober 2018, BRI berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian BUMN sebagai **BUMN dengan RKB Terbaik** pada ajang BUMN Hadir Untuk Negeri *Award* di Yogyakarta. RKB BRI dianggap terbaik dibanding BUMN lain dinilai dari kegiatan yang telah terlaksana, pengelolaan RKB, infrastruktur pendukung, dan publikasi media.

Kartu Tani

Dalam rangka mendukung program pemerintah dan sinergi BUMN untuk mewujudkan data tunggal pertanian dan pengendalian penyaluran subsidi pupuk, maka BRI bersama HIMBARA bekerjasama dengan Kementerian Pertanian mengembangkan sistem *database* petani dan menyediakan transaksi non tunai pembelian pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Kartu Tani adalah kartu debet *co-branding* antara Himbara dengan Kementerian Pertanian yang di antaranya berfungsi untuk identitas petani, membaca kuota pupuk bersubsidi, transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap, dan transaksi perbankan pada umumnya melalui *electronic channel*.

Penyerahan Kartu Tani Award Jawa tengah 2018 kepada Petugas Penyuluh Pertanian Terbaik yang mendukung Program Kartu Tani

Bank BRI Untuk Indonesia

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Tani dii Kuios Pupuk Lengkap oleh Dinas Pertanian dan BRI

Kartu Tani pertama kali diinisiasi BRI di provinsi Jawa Tengah pada 4 Maret 2015. Kemudian pada 20 Februari 2017, Menteri Pertanian bersama dengan Menteri BUMN serta Bank HIMBARA melaksanakan uji coba program Kartu Tani di Pulau Jawa. BRI mendapat tugas membagi Kartu Tani di wilayah Banten, Jateng, Yogyakarta dan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.47/ Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, Kartu Tani diberikan kepada Petani yang tergabung di kelompok tani dan melakukan usaha tani dengan luasan lahan maksimal 2 Ha untuk sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perternakan serta maksimal 1 Ha untuk sektor Perikanan Budidaya. Petani bersama Kelompok Tani wajib membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK) yang akan diunggah di sistem E-RDKK Kementerian Pertanian oleh Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan. Selanjutnya Bank akan membuka rekening dan menerbitkan Kartu Tani bagi Petani yang sudah terdaftar di E-RDKK Kementerian Pertanian.

Setiap transaksi pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dapat dimonitor oleh pemerintah secara *real-time online* melalui *dashboard* yang disediakan BRI, sehingga pemerintah dapat memastikan penyaluran pupuk bersubsidi telah tepat sasaran *by name by address*. Selain itu *dashboard monitoring* membantu produsen pupuk dalam memperoleh data sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi dan data sumber penagihan subsidi biaya produksi pupuk ke pemerintah. BRI juga memanfaatkan data petani penerima Kartu Tani sebagai *pipeline* pinjaman untuk meningkatkan skala usaha budidaya petani.

Penggunaan Kartu Tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap yang juga berperan sebagai agen Laku Pandai, merupakan bentuk literasi dan inklusi keuangan bagi ekosistem pertanian Indonesia. Dengan adanya Kartu Tani, Petani mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga kegiatan budidaya tidak terganggu. Selain itu petani yang datanya sudah terdaftar di sistem berkesempatan mendapatkan manfaat tambahan seperti bantuan sarana produksi pertanian lainnya, penyerapan hasil panen dari perusahaan *off-taker*, pendaftaran asuransi pertanian, dan pembiayaan dari perbankan.

Pada tahun 2018, BRI telah melaksanakan pembagian Kartu Tani kepada 3,03 juta petani, meningkat 21,7% dibanding 2,49 juta petani pada tahun 2017. BRI juga telah bekerjasama dengan 6.087 unit Kios Pupuk Lengkap, meningkat dari tahun 2017 sebesar 5.611 unit. Berikut data kinerja Kartu Tani yang telah dilakukan BRI:

	2017	2018
Kartu Tani	2.493.142	3.029.044
Saldo Simpanan (Rp miliar)	157	312

BRI juga memberikan pinjaman kepada sebanyak 127.858 petani dengan total plafon Rp 4,3 miliar.

BRIncubator

BRIncubator adalah program pengembangan atau kegiatan kompetisi antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang potensial untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM untuk naik kelas termasuk secara digital dan fokus pada validasi ekspor (*export validation*).

Sepanjang tahun 2018, BRIncubator telah dilaksanakan di 5 Kota, yaitu Padang, Bandung, Solo, Malang, dan Makassar dengan peserta masing-masing kota sebanyak 100 UMKM yang merupakan anggota Rumah Kreatif BUMN BRI. Dari 100 UMKM tersebut diseleksi dan menghasilkan 25 UMKM kelas inkubasi dan 25 UMKM kelas Akselerasi untuk masing-masing kota.

Selama kurang lebih 4 bulan para UMKM terpilih mengikuti proses BRIncubator yang terdiri dari *Workshop*, *Meet Up, Mentoring*, dan *Monitoring* yang prosesnya terekam dalam aplikasi IncubatorApps.

Pada tahap akhir program, sebanyak 25 UMKM terbaik diundang ke Malam Penganugerahan BRIncubator pada tanggal 11 Desember 2018 di Jakarta untuk melakukan presentasi usahanya di depan para juri yang terdiri dari Retno Wahyuni Wijayanti (Chief Learning Officer Corporate University BRI), Leontinus Alfa Edison (Co Founder dan Direktur PT Tokopedia), dan Rama Mamuaya (CEO Daily Social).

Berdasarkan hasil penilaian juri terpilih 3 juara BRIncubator, yaitu:
- Juara 1 Rendang Uni Adek dari Padang Panjang (usaha rendang kemasan),
- Juara 2 Restu Ibu dari Malang (usaha tepung adonan bakso),
- Juara 3 Eank Solo dari Solo (usaha sangkar burung dari limbah pipa paralon).

Para pemenang mendapatkan hadiah uang tunai untuk pengembangan usahanya dan terus mendapatkan pendampingan dari Rumah Kreatif BUMN agar *Go Global* dan siap memasuki pasar ekspor. Berikutnya, program BRIncubator akan diperluas hingga menjangkau lebih banyak peserta dan kota di seluruh wilayah Indonesia.

Tabungan Inklusi Keuangan

Simpanan Pelajar (Simpel) yang diinisiasi oleh OJK merupakan produk tabungan yang memberikan kemudahan persyaratan pembukaan rekening bagi pelajar. Tujuannya untuk meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan menumbuhkan kebiasaan menabung di kalangan pelajar.Tabungan Simpel yang dapat diakses di seluruh jaringan unit kerja BRI.

Program Inklusi Keuangan yang dilakukan BRI melalui Tabungan Simpel terus mendapatkan tanggapan positif dari pelajar di seluruh Indonesia. Tabungan Simpel juga merupakan sarana penyaluran dana Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah rekening menjadi 20,39 juta rekening, dibanding tahun 2017 sebesar 17,51 juta rekening. Tercatat pada tahun 2018, saldo tabungan Simpanan Pelajar sebesar Rp 3,99 triliun.

Atas partisipasi BRI dalam menyukseskan program Inklusi Keuangan, OJK memberi penghargaan kepada BRI sebagai **Bank Terbaik Pendukung Program Pemerintah Melalui Simpel** pada kegiatan FinExpo dan *Sundown Run* 27 Oktober 2018 di Jakarta.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

STRUKTUR BISNIS

BISNIS MIKRO

- BISNIS MIKRO
- LAYANAN BRILINK
- BISNIS PROGRAM

Bisnis Mikro ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, sedangkan Bisnis Program ditujukan untuk mendukung program Pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.

BISNIS RITEL

- BISNIS PINJAMAN RITEL KONSUMER
- BISNIS PINJAMAN RITEL KOMERSIAL & MENENGAH
- BISNIS SIMPANAN RITEL
- BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

Bisnis Ritel ditujukan untuk melayani wirausaha kecil dan menengah (UKM) antara lain layanan pembiayaan konsumer dan komersial.

BISNIS KORPORASI

- BISNIS KORPORASI BUMN
- BISNIS KORPORASI NON BUMN
- BISNIS SINDIKASI & JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
- BISNIS DANA INSTITUSI & *TRANSACTION BANKING*
- BISNIS INTERNASIONAL
- BISNIS TREASURY
- BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Segmen Bisnis Korporasi BRI melayani korporasi besar dan institusi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non-BUMN yang memberikan *trickle down business* bagi segmen UMKM, dengan menyediakan rangkaian lengkap produk kredit dan simpanan serta jasa perbankan meliputi layanan perbankan internasional, *treasury* dan jasa penunjang pasar modal. Selain itu segmen bisnis ini melakukan pinjaman sindikasi dan pemberian fasilitas *limit committed* dan *uncommitted* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam negeri.

BISNIS ENTITAS ANAK

- PT BANK BRISYARIAH – BRISYARIAH
- PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK – BRI AGRO
- PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA – BRI FINANCE
- PT ASURANSI BRI LIFE – BRI LIFE
- BRI REMITTANCE CO. LTD. – BRI REMITTANCE
- PT BRI VENTURA INVESTAMA – BRI VENTURE
- PT DANAREKSA SEKURITAS – DS

Aktivitas bisnis Entitas Anak meliputi perbankan konvensional dan syariah, layanan pembiayaan, layanan remitansi, asuransi jiwa, modal ventura dan sekuritas.

Bisnis Mikro

RINGKASAN

Menyalurkan pinjaman Mikro dengan outstanding sebesar **Rp291,62 triliun** di tahun 2018, **tumbuh 15,33%** dari Rp252,85 triliun di tahun 2017.

Laba tahun berjalan Bisnis Mikro **tumbuh sebesar 9,78%** dari Rp15,64 trilliun di tahun 2017 menjadi **Rp17,17 triliun** di tahun 2018

Outstanding Simpanan Mikro tumbuh sebesar 11,42% YoY dari Rp243,79 triliun di tahun 2017 menjadi **Rp271,65 triliun** di tahun 2018.

Mencatat Dana Murah Mikro sebesar **84,9%** dari total perolehan Dana Mikro.

PINJAMAN BISNIS MIKRO
(Rp triliun)

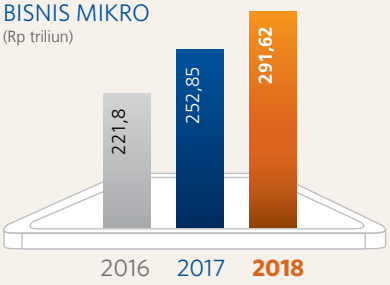

SIMPANAN BISNIS MIKRO
(Rp triliun)

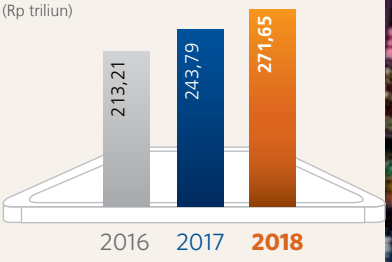

DANA MURAH BISNIS MIKRO
(%)

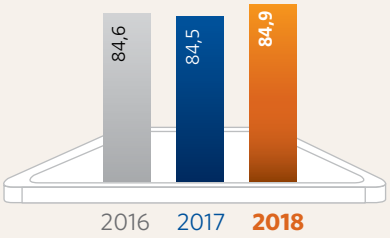

LABA BISNIS MIKRO
(Rp triliun)

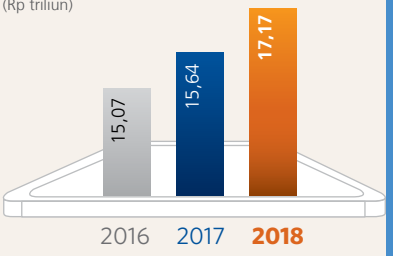

PROFITABILITAS TAHUN 2018

Profitabilitas segmen bisnis Mikro tercermin dalam pencapaian laba segmen yang tumbuh 9,78% dari Rp15,64 trilliun di tahun 2017 menjadi Rp17,17 trilliun di tahun 2018.

Bisnis Mikro

BRI melalui **Bisnis Mikro mendukung pengembangan Usaha Mikro** dan **Kecil di Indonesia** serta **membantu mensukseskan program pemerintah** dalam **Literasi** dan **Inklusi Keuangan** serta **pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan,** dan **terluar (3T).**

BRI menyalurkan kredit mikro sebesar **Rp274,26 triliun** kepada **10 juta usaha mikro di seluruh Indonesia** di tahun 2018, meningkat 14,53% dibanding tahun 2017 sebesar 239,46 triliun.

Outstanding Simpanan Mikro **tumbuh sebesar 11,42%** YoY dari Rp243,79 triliun di tahun 2017 menjadi **Rp271,65 triliun** di tahun 2018.

Kualitas dari kredit mikro yang disalurkan terjaga dengan NPL sebesar **1,01%**

Komposisi Dana Murah Mikro stabil dikisaran **84%** selama 3 tahun terakhir

PINJAMAN MIKRO
(Rp triliun)

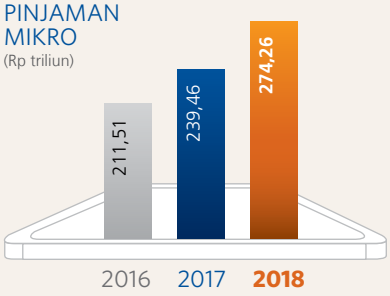

DEBITUR MIKRO
(Rp juta)

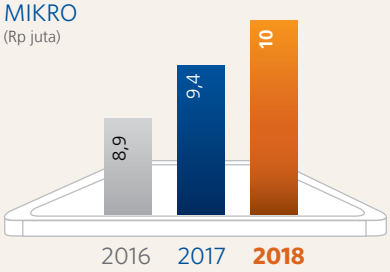

SIMPANAN MIKRO

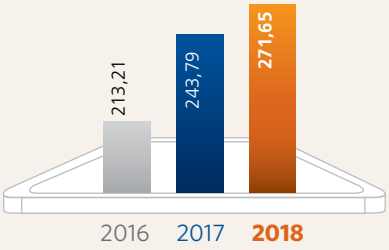

PROGRAM & STRATEGI BISNIS MIKRO TAHUN 2018

Melihat potensi pembiayaan mikro di Indonesia masih besar, BRI memposisikan Bisnis Mikro sebagai bisnis utama Bank. Sesuai dengan visi BRI untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia*. Perseroan telah melangkah ke perbaikan secara terus menerus pada proses bisnis internal untuk semakin meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Dalam hal ini, BRI telah melakukan inisiatif strategis BRIVOLUTION melalui *re-engineering* proses bisnis pinjaman melalui implementasi BRISPOT di segmen bisnis mikro.

BRISPOT Mikro telah dijalankan secara terencana dengan metode yang lincah dan mengedepankan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dimulai dari fase *strategic assessment*, *design clinic*, *prototyping*, *continuous iteration*, uji coba sampai akhirnya dilaksanakan *roll out* secara nasional yang perkembangannya senantiasa dipantau oleh *Steering Committee*.

Bisnis Mikro

Bisnis mikro tetap menjadi bisnis utama BRI karena kompetensi BRI dalam melayani bisnis ini sudah teruji dalam beberapa siklus ekonomi. Selain itu, BRI juga melihat bahwa pembiayaan Usaha Mikro di Indonesia masih memiliki ruang pengembangan potensi yang sangat luas. Beberapa strategi yang akan dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penerapan konsep *community banking* melalui penerapan kebijakan realokasi pekerja bisnis mikro di daerah asal atau sekitarnya.
2. Fokus kepada peningkatan kapabilitas (keahlian, pengetahuan, dan teknologi) tenaga pemasar dalam hal *cross-selling* dan kemampuan *leadership* di jajaran manajemen bisnis mikro di seluruh Indonesia.
3. Melakukan *profiling* nasabah untuk menggali potensi dari *existing customer* dalam rangka *cross selling* dengan tujuan untuk pengoptimalan produk yang dapat menghasilkan *Fee-Based Income*.
4. Mengalokasikan *resources* khusus untuk implementasi program-program pemerintah Dengan demikian, tenaga pemasar mikro dapat fokus untuk meningkatkan *volume* pembiayaan melalui produk pinjaman Kupedes.
5. Melakukan *review* jenjang karir pekerja bisnis mikro sehingga dapat memberikan motivasi bagi pekerja untuk terus meningkatkan kinerjanya.
6. Melakukan revitalisasi/rejuvenasi *product proposition* dan fitur mikro terutama untuk perolehan simpanan dan *Fee-Based Income*.
7. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai untuk proses bisnis yang efektif dan efisien.
8. Melanjutkan *business process re-engineering* untuk layanan fitur produk pinjaman dan simpanan (melalui aplikasi BRISPOT).

Implementasi BRISPOT di segmen bisnis Mikro terbukti dapat mempercepat waktu proses pelayanan pinjaman dari sebelumnya 3-5 hari menjadi rata-rata kurang dari 2 hari. Dari aspek produktivitas, *re-engineering business process* tersebut mampu meningkatkan produktivitas per Mantri lebih dari 20%. Selain itu, BRISPOT Mikro juga telah dilengkapi dengan fitur mitigasi risiko terbaik di kelasnya.

KINERJA BISNIS MIKRO TAHUN 2018

Melalui inovasi produk yang beragam dan strategi bisnis yang sesuai, Bisnis Mikro mencatat pencapaian kinerja yang positif sepanjang tahun 2018.

Kinerja Pinjaman Mikro

Outstanding kredit Mikro BRI di tahun 2018 mencapai Rp274,26 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 10 juta orang atau tersebut tumbuh 14,53% dibanding tahun 2017 yang tercatat Rp239,46 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 9,4 juta.

Pertumbuhan pinjaman yang positif diiringi dengan kualitas aset yang terjaga. Tingkat kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* atau NPL) Bisnis Mikro tercatat sekitar 1% selama 3 tahun berturut-turut. Kinerja ini menunjukkan komitmen BRI dalam melaksanakan fungsi intermediasi dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian.

Kinerja Simpanan Mikro

Sementara untuk Simpanan Mikro melalui Tabungan Simpedes sebagai produk utamanya, BRI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp271,65 triliun di tahun 2018, meningkat 11,42% dari tahun 2017 sebesar Rp243,79 triliun. Sedangkan perolehan dana murah (CASA) mikro tercatat sebesar 84,9% dari total DPK.

Bisnis Mikro

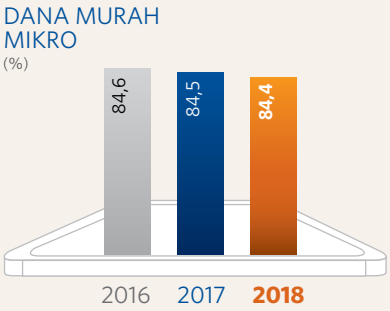

Dari sisi kinerja operasional, jaringan layanan Mikro BRI pada tahun 2018 tercatat sebanyak 5.381 BRI Unit, 2.065 Teras BRI/ Teras Kantor yang dioperasikan, tersebar di seluruh Indonesia; 133 Teras Mobile/ Teras Keliling (38 Teras Keliling diantaranya adalah kendaraan 4WD untuk menjangkau nasabah di wilayah pegunungan), 3 Teras Kapal untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat di kawasan pesisir, serta 401.550 Agen BRILink. Berikut jaringan layanan Mikro BRI sampai tahun 2018:

5.381 BRI Unit

2.065 Teras BRI/Teras Kantor

133 Teras Mobile/ Teras Keliling

3 Teras Kapal

401.550 Agen BRILink

Outlet	2016	2017	2018
BRI Unit	5.380	5.382	5.381
Teras BRI	2.545	2.536	2.065
Teras Mobile	635	635	133
Teras Kapal	3	3	3
Total	**8.563**	**8.556**	**7.582**
Agen BRILink	84.550	279.750	401.550

Selain memberikan layanan reguler, Teras BRI juga berperan memulihkan layanan perbankan di daerah-daerah yang mengalami bencana. BRI mengoperasikan empat mobil Teras BRI Keliling dan satu mobil E-Buzz di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pasca gempa 7 Skala Richter yang terjadi awal Agustus 2018. Demikian pula pasca gempa Palu dan Donggala pada akhir September 2018, BRI mengerahkan 13 mobil Teras BRI Keliling dan satu mobil E-Buzz untuk pemulihan pelayanan di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Saat ini, strategi BRI untuk pengembangan jaringan kerja adalah melalui Agen BRILink. Hal ini dapat dilihat melalui pertumbuhan jumlah agen BRILink yang meningkat sebanyak 121.800 agen selama tahun 2018 menjadi sebanyak 401.550 agen.

Bisnis Mikro

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

BRI memiliki komitmen untuk mendukung program Pemerintah antara lain melalui peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat, melalui Bisnis Mikro, BRI telah memasarkan produk *Basic Saving Account* (BSA), yaitu Produk Tabunganku sebanyak 7,6 juta rekening dan Tabungan Simpanan Pelajar sebanyak 15,97 juta rekening.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah 3T, BRI memiliki layanan unit kerja operasi (UKO) Mikro *Remote Area* yang minimal memenuhi salah satu kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Jarak antara Kanca Induk dengan UKO tersebut terbilang jauh dengan waktu tempuh ≥ 2 jam perjalanan.
2. Akses ke lokasi UKO sulit (melewati wilayah perairan, perbukitan, hutan, dan lain sebagainya).
3. Transportasi umum tidak memadai atau tidak setiap waktu ada dan beroperasional.

Selain itu, BRI juga melayani nasabah di *remote area* melalui layanan Teras Kapal yang dilengkapi fasilitas layanan perbankan digital berbasis satelit (BRIsat). Teras BRI Kapal dioperasikan untuk menjangkau dan melayani nasabah di beberapa pulau kecil di Indonesia yang belum terjangkau layanan perbankan. Saat ini BRI memiliki 3 Teras Kapal yang melayani wilayah Kepulauan Seribu, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Halmahera Selatan.

Layanan Teras Kapal tak hanya mencari basis nasabah baru, tetapi juga memiliki tujuan sosial. Salah satunya seperti di lakukan Teras Kapal Bahtera Seva III, dimana BRI memberi layanan rumah kreatif untuk melayani nasabah dari kalangan UKM. Sepanjang tahun 2018 ada 52 pelaku UKM yang dibantu dan dibina.

UKO Mikro *Remote Area* tahun 2018

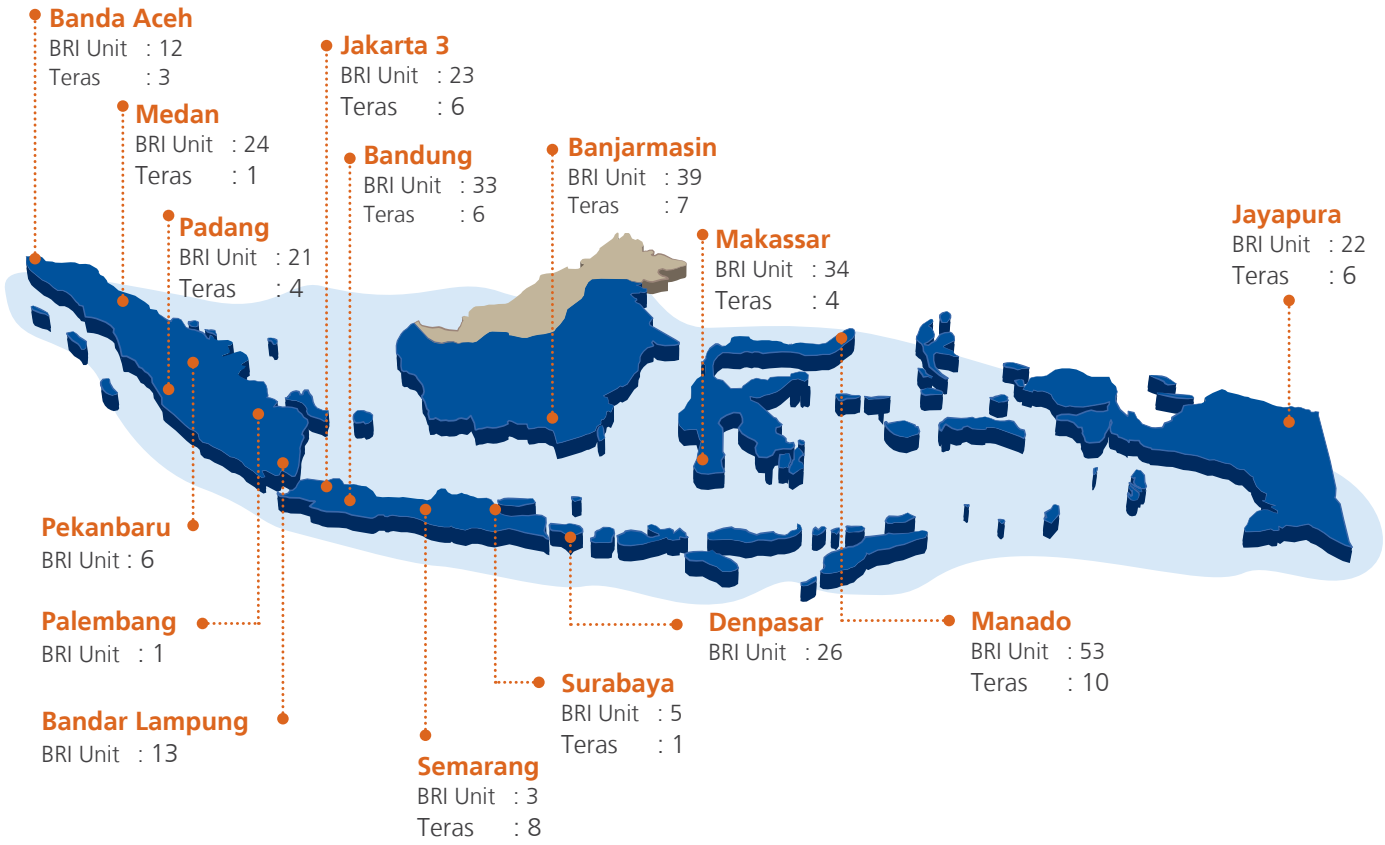

Rute Operasional Teras Kapal BRI

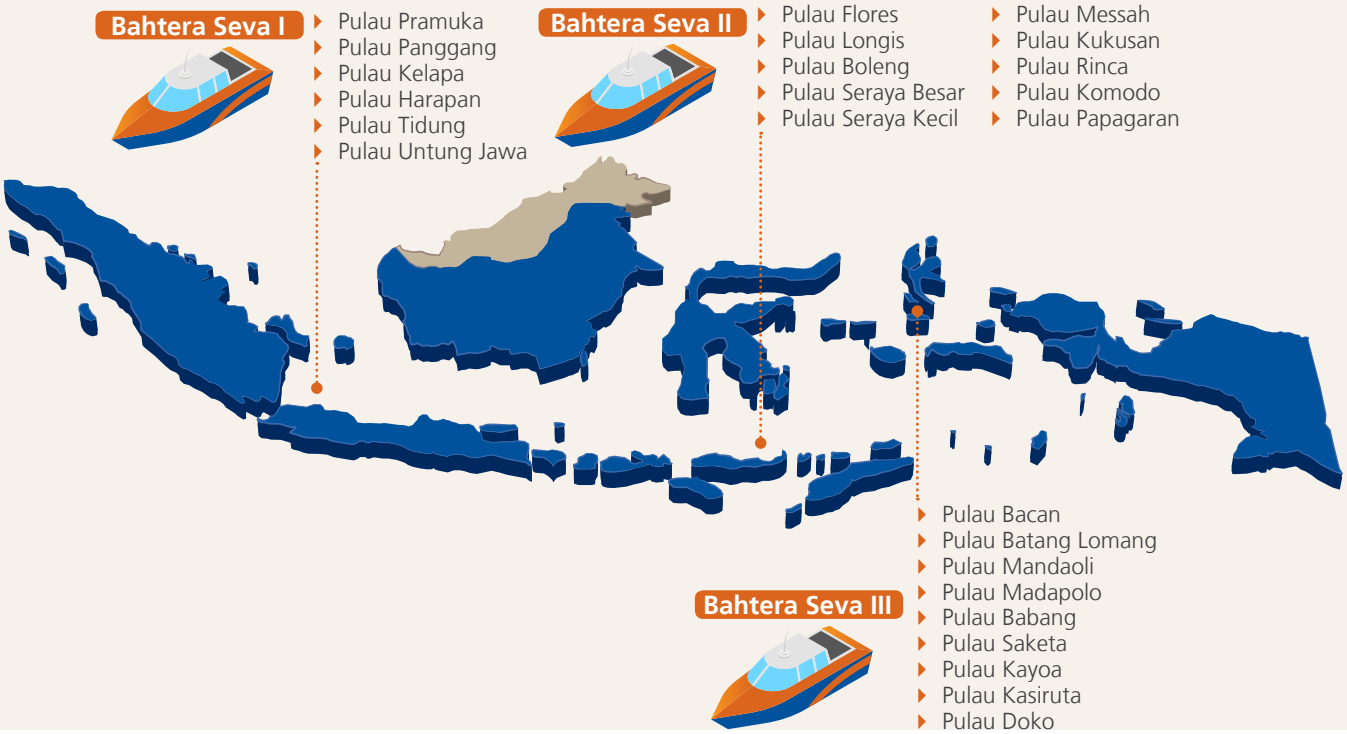

Bisnis Mikro

STRATEGI BISNIS MIKRO TAHUN 2019

Strategi BRI berikutnya akan difokuskan untuk memperkuat dan mempertahankan kepemimpinan di segmen mikro yang merupakan *core business* BRI. Dengan jumlah unit kerja yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia serta didukung dengan sumber daya manusia yang handal, Bisnis Mikro BRI optimis tetap tumbuh dengan baik, sehingga target jangka panjang porsi kredit mikro terhadap total kredit BRI sebesar 40% dapat tercapai ditengah meningkatnya kompetisi dari *fintech company* berupa *peer to peer lending* yang berbasiskan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bisnis Mikro BRI fokus terhadap inovasi dan peningkatan produktivitas sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan operasional, baik yang bersumber dari pendapatan bunga maupun pendapatan non bunga (seperti pendapatan *recovery* dan *Fee based income*/ FBI), melalui strategi:
   - Melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam rangka *cross selling* penjualan asuransi kerugian kepada *existing customer* dengan tujuan untuk mengoptimalkan produk yang dapat menghasilkan FBI.
   - Melakukan revitalisasi/ rejuvenasi tabungan Simpedes untuk mendukung perolehan FBI.
   - Melakukan *review* terkait dengan kebijakan penanganan kualitas kredit mikro dan peningkatan pendapatan *recovery*.
   - Melakukan revitalisasi/ rejuvenasi *product proposition* tabungan Simpedes dalam mendukung perolehan Dana Pihak Ketiga.
   - Melakukan pengembangan produk pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk menangkap peluang melalui Kupedes Ekstra Cepat (KECE).
2. Penyempurnaan bisnis proses yang efektif dan efisien untuk mendukung akselerasi pencapaian pinjaman dan simpanan:
   - Melakukan koordinasi dengan Divisi terkait dalam penyempurnaan *business process* untuk layanan fitur produk pinjaman dan simpanan.
   - Melakukan *review* kebijakan untuk mendukung *re-engineering* proses bisnis.

BRILINK

RINGKASAN

Jumlah Agen BRILink meningkat sebesar 43,54% YoY dari 279.750 agen di 2017 menjadi **401.550** agen di 2018.

CASA BRILink meningkat 39,95% dari Rp3,93 triliun di tahun 2017 menjadi **Rp5,5** triliun di tahun 2018.

Jumlah Transaksi Finansial BRILink sebesar **378,72 juta transaksi**, meningkat **87,42%** dari tahun 2017 sebesar 202,07 juta transaksi.

Nilai transaksi BRILink sebesar **Rp512,69** triliun di tahun 2018 meningkat 72,04% dari tahun 2017 sebesar Rp298 triliun.

Menghasilkan *Fee Based Income* sebesar **Rp448,82** miliar di tahun 2018, meningkat 177,79% dari tahun 2017 sebesar Rp161,57 miliar.

Mendukung Program Pemerintah antara lain Inklusi Keuangan di Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T), **Program BBM Satu Harga di Papua,** dan **Listrik Pintar di Pontianak**.

JUMLAH AGEN BRILINK

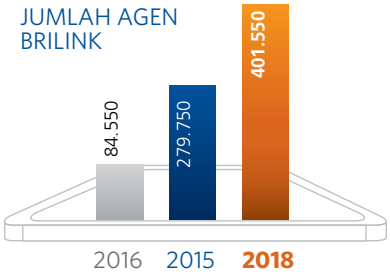

FEE BASED INCOME
(Rp miliar)

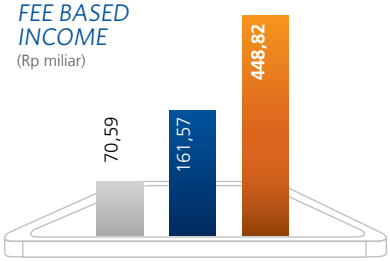

JUMLAH TRANSAKSI
(dalam juta)

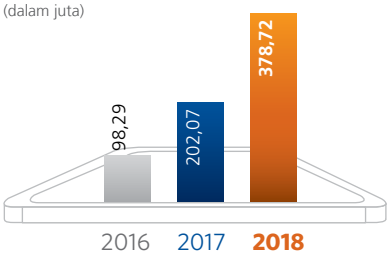

CASA
(Rp triliun)

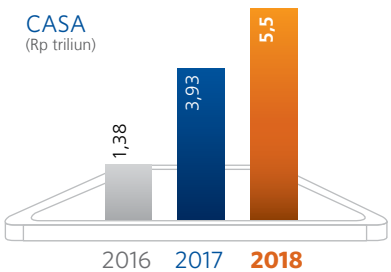

VOLUME TRANSAKSI
(Rp triliun)

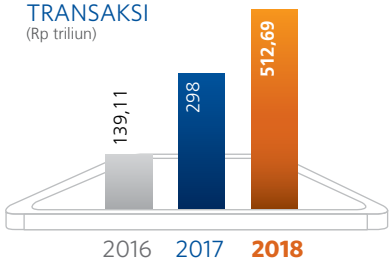

BRILINK

BRILink merupakan layanan *branchless banking* BRI untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sebagai perwujudan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) dan LKD (Layanan Keuangan Digital) serta menjaga kedaulatan rupiah. BRILink yang diluncurkan BRI pada tahun 2014, terus dikembangkan sesuai kebutuhan nasabah dan turut mendukung berbagai program pemerintah. Berikut beberapa program dan strategi pengembangan BRILink pada tahun 2018:

1. Fokus Kepada Kualitas Agen BRILink
   Didukung dengan pertumbuhan jumlah Agen BRILink sebagai salah satu bentuk strategi perluasan *delivery channel*, BRI fokus pada peningkatan produktivitas BRILink dengan menjaga kualitas layanan Agen BRILink. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut serta menjaga kelancaran operasional Agent BRILink, BRI memberikan dukungannya melalui Petugas Agen BRILink.

2. Transformasi Layanan BRILink
   Sejalan dengan perkembangan teknologi yang ditandai paradigma *Internet of Things*, BRILink menjawab tantangan ekonomi digital dengan fokus pada akuisisi agen berbasis *platform mobile* yang lebih aman, efisien, dan *reliable* yang selanjutnya disebut BRILink Mobile. BRILink Mobile juga diharapkan dapat menarik minat generasi milennial untuk ikut serta menyukseskan program keuangan inklusif. BRI juga melayani *Referral* pinjaman dari Agen BRILink melalui BRISPOT dengan mekanisme e-Form.

3. Mendukung Program Pemerintah
   BRI turut berperan serta dalam mendukung program peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan kepada masyarakat melalui program LKD-BI dan Laku Pandai-OJK. Selain itu BRI melalui Agen BRILink juga berpartisipasi aktif dan bersinergi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial daerah untuk bersama-sama menyalurkan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

   Bank BRI juga berkomitmen kuat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah melalui Agen BRILink. Aktivitas transaksi bantuan sosial yang sejauh ini telah dilakukan diantaranya meliputi pemberian Bantuan Pangan non Tunai, Program Keluarga Harapan, Pencairan Kartu Tani dan sinergi Agen BRILink dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

   Pada tahun 2018, BRILink juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membuka layanan zakat di warung-warung serta kios-kios kecil untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat melalui alternatif tempat pembayaran zakat yang semakin banyak dan proses yang mudah.

4. Mendukung Inklusi Keuangan di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
   Dengan memanfaatkan teknologi BRIsat sebagai perwujudan dari inovasi teknologi, BRI mampu memperluas layanan BRILink di daerah tanpa sinyal (*blankspot*). BRI telah melakukan akuisisi dan ekspansi bisnis keagenan hingga kepelosok negeri termasuk di daerah 3T.

KINERJA BRILINK TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, BRILink terus menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari sisi transaksi, perolehan dana, jumlah agen, maupun volume transaksi. Pencapaian jumlah Agen itu telah melampui target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebanyak 380.000 agen. Hal ini menunjukkan respons masyarakat yang berminat untuk menjadi Agen BRILink sangat besar, sejalan dengan manfaat yang akan diperoleh para Agen tersebut.

Transaksi finansial BRILink tumbuh 87,42%, dari 202,07 juta transaksi di tahun 2017 menjadi 378,72 juta transaksi pada tahun 2018. Peningkatan transaksi finansial ini mencerminkan layanan BRILink sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansialnya.

Dari kinerja BRILink, BRI memperolah *Fee Based Income* sebesar Rp448,82 miliar di tahun 2018, tumbuh 177,79% dari tahun 2017 sebesar Rp161,57 miliar. Peningkatan ini berdampak positif terhadap Pendapatan BRI secara keseluruhan. Selain itu, BRILink juga meningkatkan perolehan dana murah (CASA) sebesar Rp5,5 triliun, tumbuh 39,95% dari tahun 2017 Rp3,93 triliun. Sementara volume transaksi dari BRILink sebesar Rp512,69 triliun.

Perkembangan BRILink 2016-2018

	2016	2017	2018
Agen BRILink	84.550	279.750	401.550
Transaksi Finansial (ribuan)	98.292	202.074	378.722
Fee based Income (Rp juta)	70.585	161.568	448.817
CASA (Rp juta)	1.382.660	3.930.473	5.498.974
Volume transaksi (Rp triliun)	139,11	298	512,69

STRATEGI BISNIS BRILINK TAHUN 2019

Pada tahun 2019, BRILink akan fokus dalam melakukan akuisisi secara merata pada *rural area* serta *remote area* di Indonesia sebanyak 451.550 Agen BRILink. Sampai tahun 2018, BRILink telah hadir di lebih dari 80% kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan diharapkan mampu mewujudkan strategi perluasan *delivery channel* dengan dukungan teknologi BRISat dan inovasi perkembangan teknologi terkini. Sehingga kedepan BRILink dapat terus berkomitmen untuk mendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Jangkauan yang luas yang dimiliki BRI dalam penyebaran BRILink menjadi kekuatan tersendiri menyukseskan program inklusi keuangan yang merupakan bagian dari Nawacita Pemerintah. Oleh sebab itu, BRI perlu meningkatkan sinergi dengan Agen BRILink. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pelayanan masyarakat serta bisnis perbankan seperti potensi *fee based income* melalui pemasaran Tabungan BSA, Referral Pinjaman serta Asuransi.

Ke depan, BRI berupaya memanfaatkan jaringan BRILink untuk berkolaborasi dengan pelaku bisnis digital dan perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*), *Startup*, dan *E-commerce* sebagai upaya memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat.

Inovasi BRILink dalam memperkaya fitur-fitur baik terkait layanan perbankan, pembayaran, dan pembelian yang dibutuhkan akan terus dikembangkan. Hal itu seiring dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan praktis.

BRILINK

DUKUNGAN BRILINK TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Untuk mewujudkan komitmen dan semangat BRI dalam menjangkau hingga ke seluruh pelosok dan seluruh kalangan, terutama masyarakat *unbanked* di Indonesia, BRI fokus dalam melakukan pengembangan bisnis keagenan yaitu Agen BRILink yang dimulai pada tahun 2014. Melihat respon masyarakat yang positif, dan dilihat dari pertumbuhan agen BRILink di setiap tahunnya, pada tahun 2018 BRI melakukan pengembangan BRILink dengan menggunakan aplikasi pada *smartphone*. Pengembangan tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatkan kontribusi BRI kepada Negara. BRI juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah melalui sinergi yang dilakukan bersama BUMN maupun lembaga pemerintah lainnya. Bentuk dukungan BRI tersebut dapat terlihat melalui aktivitas berikut:

Layanan Agen BRILink di Papua

BRI Menjangkau Hingga ke Pelosok Negeri

BRI telah mengoperasikan jaringan satelitnya yaitu BRIsat, untuk mendorong inklusi keuangan di wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Jayapura. Para Agen BRILink di daerah tersebut memanfaatkan jaringan BRIsat untuk memfasilitasi akses keuangan penduduk setempat. Sebelumnya, mereka harus menempuh perjalanan selama empat jam ke unit kerja perbankan terdekat di Kecamatan Trafi.

Dukungan BRI pada Program BBM Satu Harga di Papua

Kehadiran para agen BRILink di Pegunungan Arfak telah berdampak positif terhadap masyarakat dan pengelola Pangkalan BBM setempat. Sebelumnya, pangkalan BBM di Pegunungan Arfak harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan transaksi pembayaran transfer via bank di Trafi. Dengan beroperasinya agen BRILink di Pegunungan Arfak yang didukung dengan jaringan komunikasi BRISat, pengelola pangkalan BBM dan masyarakat tidak perlu menempuh medan yang berat menuju Trafi. Pemanfaatan jaringan BRISat tersebut dapat memfasilitasi akses keuangan di kawasan tersebut.

BRILINK

*Layanan pembayaran Listrik Pintar di Kalimantan Barat

Dukungan BRI pada Program Listrik Pintar

BRILink juga hadir di Kalimantan Barat untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar rekening listrik serta mempermudah mendapatkan *voucher* atau token listrik. Hal itu karena pelanggan PLN di Kalimantan Barat tersebar luas dan secara geografis berada di beberapa tempat yang sulit dijangkau. Dengan adanya Agen BRILink, dapat memudahkan masyarakat setempat untuk menjangkau pelanggan di wilayah yang sulit, terutama di daerah pedalaman. Diharapkan, Agen BRILink dapat menjadi jembatan yang memberikan kemudahan masyarakat khususnya pelanggan PLN dalam pembelian token ataupun transaksi dalam pembayaran rekening listrik, khususnya di desa yang tidak ada loket pembelian token listrik. Hal itu sejalan dengan program Pemerintah agar masyarakat menggunakan Listrik Pintar.

Layanan Pembayaran Zakat

Terkait dengan penghimpunan dan pendistribusian zakat nasional, seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 untuk mengamanahkan pengelolaan zakat nasional kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Untuk itu, BRILink bekerja sama dengan Baznas membuka layanan zakat di warung-warung serta kios-kios kecil. Hal itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat melalui alternatif tempat pembayaran zakat yang semakin banyak dan proses yang mudah.

Layanan Pembayaran Zakat di Agen BRILink

Bisnis Program

RINGKASAN

Outstanding total pinjaman Bisnis Program tercatat sebesar

Rp17,36 triliun

di tahun 2018, **meningkat 29,65%** dari tahun 2017 sebesar Rp13,39 triliun.

Pada tahun 2018, BRI telah menyalurkan KUR sebesar

Rp80,18 triliun

kepada 3,94 juta debitur meningkat sebesar 15,2% dari Rp69,606 trilliun di tahun 2017.

Outstanding Kredit Pangan sebesar

Rp3,72 triliun

atau tumbuh 19% dari tahun 2017 sebesar Rp3,13 triliun. Sedangkan *outstanding* kredit resi gudang subsidi mencapai Rp11,38 miliar.

Jumlah debitur KUR "naik kelas" meningkat, yaitu

378.588 debitur

KUR Mikro naik menjadi debitur Kupedes.

PINJAMAN PROGRAM
(Rp triliun)

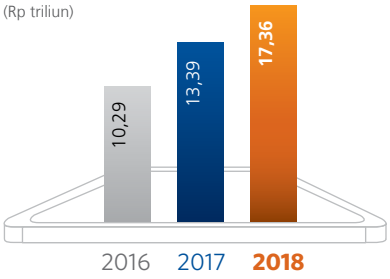

BRI secara konsisten mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki perekonomian, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan layanan usaha mikro kecil dan menengah. BRI merupakan salah satu Bank penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan manfaat antara lain mempercepat pengembangan usaha sector riil, perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pembiayaan sesuai dengan program Nawacita.

Salah satu indikator keberhasilan penyaluran Kredit kepada sektor UMKM adalah adanya peningkatan skala usaha dari debitur tersebut, yang oleh Bank diukur melalui adanya penambahan fasilitas kredit yang mencerminkan adanya perkembangan skala usaha.

Pada tahun 2018 sebanyak 378.588 debitur KUR Mikro (plafond sampai dengan Rp25 juta) meningkat menjadi debitur Kupedes (plafond sampai dengan Rp200 juta).

PRODUK DAN JASA BISNIS PROGRAM

Berikut penjelasan mengenai produk dan jasa Bisnis Program BRI:

1. KUR Mikro
   KUR Mikro bertujuan melayani pengembangan sektor produktif (non-perdagangan) dan non produktif (perdagangan) pemberdayaan usaha mikro. Skema pinjaman KUR Mikro terdiri dari modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk usaha produktif melalui penjaminan kredit. Target nasabah meliputi pemilik bisnis perseorangan dengan maksimum plafond kredit sebesar Rp25 juta. Pinjaman ini disubsidi pemerintah dan dijamin oleh asuransi kerugian kredit dari perusahaan asuransi BUMN.

2. KUR Kecil
   KUR Kecil memberikan layanan sama dengan KUR Mikro namun untuk pengusaha dengan skala usaha yang lebih besar, dengan maksimum plafond sebesar Rp500 juta.

Bisnis Program

3. KUR TKI
   KUR TKI merupakan program bantuan pemerintah untuk TKI yang memiliki usaha sampingan di lokasi domisili asal TKI tersebut. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup TKI serta menyediakan lapangan kerja sebagai persiapan menjelang masa tidak produktif bekerja di luar negeri.

4. Kredit Pangan
   Kredit Pangan bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

5. Kredit Resi Gudang
   Kredit Resi Gudang merupakan program pinjaman untuk membantu petani yang memiliki persediaan yang dapat dijaminkan dalam jangka pendek.

6. Pinjaman Kemitraan
   Pinjaman Kemitraan memiliki suku bunga lunak yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat *unbanked* yang memiliki usaha produktif dengan potensi pengembangan lebih lanjut. Pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan diberikan kepada mitra binaan penerima pinjaman kemitraan.

7. Kartu Tani
   Kartu Tani merupakan kartu multi fungsi yang berguna sebagai kartu identitas serta kartu layanan keuangan. Para petani yang telah memiliki kartu tani yang telah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL).

8. Program Jaring
   Program Jaring merupakan inisiasi OJK untuk mendukung pembangunan kemaritiman sesuai dengan program Nawacita Pemerintah dengan memberikan akses terhadap produk-produk Jasa Keuangan, khususnya akses terhadap pembiayaan.

9. Bantuan Sosial
   Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli pangan di e-Warung KUBE PKH/ pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

Bisnis Program

SEKTOR INDUSTRI BISNIS PROGRAM

BRI berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI kepada pemerintah untuk menyalurkan ke Sektor Produksi (Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Jasa).

STRATEGI BISNIS PROGRAM TAHUN 2018

Selama tahun 2018, strategi Bisnis Program yang telah diimplementasikan antara lain:

- Mengembangkan program pemasaran berbasis komoditi pertanian
- Pengembangan/evaluasi kapabilitas dan produktifitas sumber daya manusia melalui program *in house training* dan *workshop*.
- Optimalisasi *value chain* internal dan eksternal dengan melakukan penyelarasan potensi *trickle down business*
- Menjalankan program pemasaran tematik penyaluran pinjaman pangan.

KINERJA BISNIS PROGRAM TAHUN 2018

BRI senantiasa mendukung program Pemerintah terutama dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya *outstanding* Pinjaman Bisnis Program menjadi sebesar Rp17,36 triliun, meningkat 29,7% dari tahun 2017 sebesar Rp13,39 triliun. Pencapaian ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keberhasilan Penyaluran KUR
   Pada tahun 2018, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp80,17 triliun kepada 3,95 juta debitur. Sejak tahun 2015 total penyaluran KUR BRI mencapai Rp235,45 triliun kepada 12,56 juta debitur. Hal ini sebagai bukti keseriusan BRI dalam mengembangkan sektor UMKM Indonesia.

   Kunci sukses penyaluran KUR BRI tidak terlepas dari strategi yang dilaksanakan antara lain, tersedianya tenaga pemasar khusus KUR yaitu Mantri untuk KUR Mikro dan RM Pangan untuk KUR Kecil. Hal ini juga didukung dengan tersedianya pola pemasaran melalui komunitas bisnis/kelompok usaha yang tersedia di setiap wilayah, serta melibatkan secara aktif para agen BRILink untuk dapat mengarahkan para pelaku usaha di wilayahnya. Selain itu, penyaluran KUR tetap mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian pemberian kredit sehingga kualitas kredit tetap terjaga.

2. *Outstanding* Kredit Pangan dan Resi Gudang
   Outstanding Kredit Pangan sebesar Rp3,72 triliun, atau tumbuh 19% dari tahun 2017 sebesar Rp3,13 triliun. Sedangkan *outstanding* kredit resi gudang subsidi mencapai Rp11,38 miliar.

3. Terjaganya Kualitas Aset
   Selain keberhasilan dalam penyaluran pinjaman, BRI juga memperhatikan kualitas pinjaman dengan terjaganya tingkat NPL Pinjaman Bisnis Program terjaga di kisaran 1% selama tiga tahun terakhir. Bahkan, untuk NPL KUR hanya 0,97% di tahun 2018.

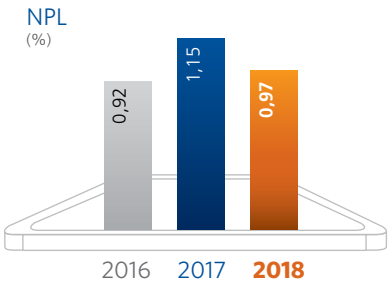

4. Penyaluran Program Pemerintah
   BRI menjadi agen pemerintah dalam penyaluran 172.588 kartu Jaring Nelayan, 3,02 juta Kartu Tani dan akuisisi Kios Pupuk Lengkap sebanyak 6.087 unit. BRI juga menyalurkan bantuan sosial melalui program Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai masing-masing kepada 3,85 juta orang dan 2,5 juta orang.

BRI berhasil meningkatkan fasilitas kredit debitur atau biasa disebut "naik kelas" sebagai salah satu indikator keberhasilan penyaluran kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penambahan fasilitas kredit diasumsikan sebagai peningkatan skala usaha dari debitur. Sepanjang tahun 2018, sebanyak 378.588 debitur KUR Mikro (plafond sampai dengan Rp25 juta) meningkat menjadi debitur Kupedes (plafond sampai dengan Rp200 juta).

STRATEGI & PENGEMBANGAN BISNIS PROGRAM 2019

BRI terus berinovasi mengembangkan Bisnis Program agar pertumbuhan positif dapat meningkat di tahun 2019. Untuk itu, BRI memiliki strategi pengembangan bisnis sebagai berikut:

- Meningkatkan produktivitas melalui implementasi *business process re-engineering* yaitu BRISpot.
- Optimalisasi *value chain* dari *trickle down business* nasabah korporasi untuk pengembangan penetrasi pelaku usaha kecil secara masif dan *close system.*
- Peningkatan CASA melalui peningkatan transaksi dan penurunan biaya dana.
- Pengembangan sistem informasi manajemen (MIS) yang lebih informatif dan akurat untuk meningkatkan kualitas monitoring kredit.
- Implementasi program penghargaan *relationship manager* terbaik untuk mendukung peningkatan produktivitas.

Bisnis Ritel

RINGKASAN

Outstanding Kredit Ritel mencapai **Rp320,05 triliun**, meningkat **18,27%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp270,6 triliun

Simpanan Ritel mencapai **Rp341,33 triliun**, meningkat **12,12%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp304,44 triliun

Fee Based Income Bisnis Ritel mencapai **Rp6,81 triliun**, meningkat **10,91%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp6,14 triliun

Profitabilitas Bisnis Ritel mencapai **Rp10,62 triliun**, meningkat **18,39%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp8,97 triliun

KREDIT BISNIS RITEL
(Rp triliun)

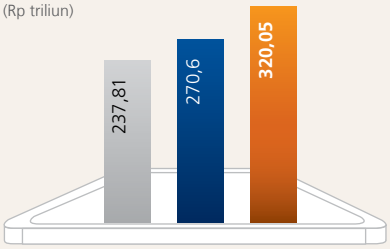

SIMPANAN BISNIS RITEL
(Rp triliun)

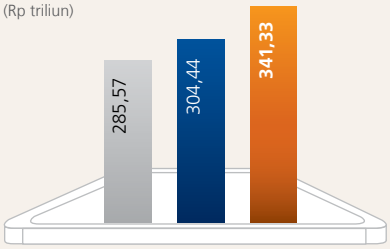

FEE BASED INCOME BISNIS RITEL
(Rp triliun)

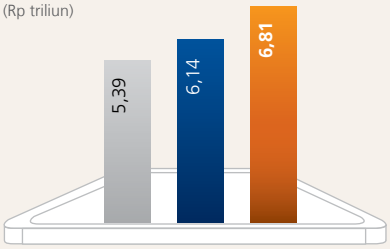

LABA SETELAH PAJAK BISNIS RITEL
(Rp triliun)

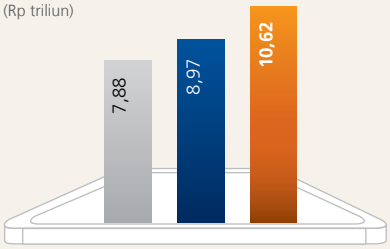

Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer

RINGKASAN

BRIGUNA
(Rp triliun)

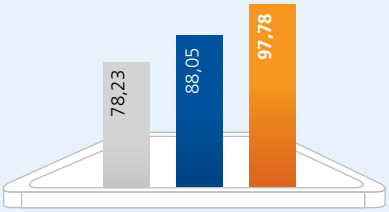

Outstanding Kredit BRIGuna mencapai Rp**97,78** triliun **meningkat 11,05%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp88,05 triliun

KKB
(Rp triliun)

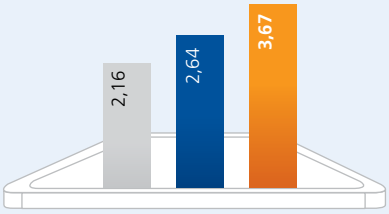

Outstanding KPR **mencapai Rp27,12 triliun**, meningkat **22,6%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp22,12 triliun

KPR
(Rp triliun)

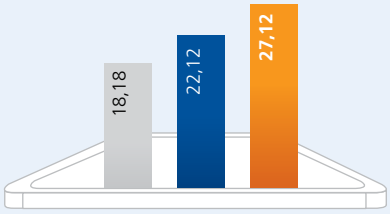

Outstanding KKB **mencapai Rp3,67 triliun**, meningkat **39,01%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp2,64 triliun

KARTU KREDIT
(Rp triliun)

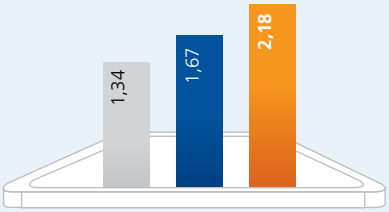

Outstanding Kartu Kredit **mencapai Rp2,18 triliun**, meningkat **30,09%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp1,67 triliun

PRODUK BISNIS PINJAMAN RITEL KONSUMER

Sejalan dengan perubahan gaya hidup konsumen. BRI melalui Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dengan aneka ragam produk yang menawarkan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. BRIGuna
   Merupakan kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen nasabah berpenghasilan tetap. BRIGuna menyediakan 3 jenis pilihan, yaitu BRIGuna Karya, BRIGuna Umum, dan BRIGuna Purna. BRIGuna Karya ditujukan untuk karyawan aktif yang memiliki penghasilan tetap. BRIGuna Umum ditujukan untuk pegawai tetap hingga masa pensiun. BRIGuna Purna diperuntukkan bagi nasabah yang sudah pensiun.

Dalam perkembangannya, produk BRIGuna mendapatkan *respons* positif dari nasabah. Hal itu mendorong BRI untuk terus berinovasi mengembangkan produk tersebut dengan pangsa pasar yang lebih luas. Hasilnya terlihat dengan diluncurkannya dua produk baru yaitu BRIGuna Pendidikan dan BRIGuna Talangan. Rincian kedua produk baru BRIGuna tersebut sebagai berikut:

- BRIGuna Pendidikan merupakan kredit yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki penghasilan tetap (*fixed income*) dan diangkat sebagai pegawai tetap disuatu instansi/ perusahaan untuk keperluan membayar uang kuliah dari jenjang S1, S2 & S3. BRIGuna Pendidikan memiliki sejumlah keunggulan antara lain:
  - Angsuran fleksibel
  - Plafond Kredit maksimal Rp250 juta
  - Persyaratan mudah
  - Suku bunga kompetitif
  - Jangka waktu sampai dengan 10 tahun

- BRIGuna Talangan adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur yang berstatus pegawai tetap yang akan memasuki usia pensiun (maksimal 1 tahun menjelang pensiun) dan memiliki hak pesangon/ Tunjangan Hari Tua (THT)/ Santunan Asuransi. BRIGuna Talangan memiliki sejumlah keunggulan antara lain:
  - Persyaratan mudah
  - Suku bunga kompetitif
  - Jangka waktu sampai dengan 12 bulan
  - Skema angsuran fleksibel, yaitu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dibayar setiap bulan atau dipotong pada saat realisasi kredit.

2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
   KPR merupakan kredit konsumtif perumahan baik untuk pembelian baru/bekas, ambil alih, pembangunan serta renovasi dengan obyek berupa rumah tinggal, rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan). Terdapat beberapa jenis KPR yang disesuaikan dengan karakteristik nasabah, yaitu:

   a. KPR Khusus ASN, TNI dan POLRI adalah KPR Reguler BRI Non Subsidi yang telah disesuaikan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada ASN, TNI, dan POLRI

   b. KPR Subsidi (KPRS) dan KPR Guru & Tenaga Kependidikan
      Merupakan program pemberian fasilitas KPP dan KPR Sejahtera (FLPP) dari Bank BRI kepada kalangan guru dan tenaga kependidikan. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan di antaranya:
      - Bebas administrasi dan biaya provisi
      - Suku bunga kompetitif.

   c. KPRS ASRI
      Merupakan program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI dengan batasan gaji pokok maksimal Rp4 juta. Produk KPRS ASRI mempunyai sejumlah keunggulan antara lain:
      - Suku bunga kompetitif
      - Bebas administrasi dan biaya provisi
      - Uang muka minimal sesuai ketentuan *Loan to Value* (LTV)
      - Tenor maksimal 20 tahun atau mencapai usia pensiun

   d. KPRS atau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan Program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) dengan batasan gaji pokok maksimal sebesar Rp4 juta.
   e. Program-program KPR *seasonal* seperti KPR HOKI, KPR Lebaran, KPR Merdeka dan KPR HUT.

3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
   Merupakan kredit dalam rangka pembiayaan kendaran roda 2, roda 2 premium dan roda 4 yang dilakukan melalui pola langsung maupun pola kerjasama.
4. Kartu Kredit
   Merupakan kredit tanpa agunan berbasis kartu yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi di *merchant-merchant* kerja sama.

STRATEGI BISNIS PINJAMAN RITEL KONSUMER TAHUN 2018

Untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar dari masing-masing produk Pinjaman Ritel Konsumer, BRI telah melaksanakan sejumlah program dan strategi sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:

BRIGuna

- Digitalisasi proses kredit BRIGuna untuk mempercepat *turn around time* dan meningkatkan produktivitas pinjaman.
- Pengembangan fitur produk, terutama pada fitur *transfer of branch* (TOB).
- Strategi pertumbuhan dengan fokus melakukan penetrasi pada portofolio nasabah *payroll* dan memaksimalkan pemanfaatan *value chain* nasabah eksisting.
- Program pemasaran BRIGuna Nasional Tematik dan Program Khusus kepada Instansi dengan beragam promo menarik, antara lain:
  a. Program Grebeg Kementerian, BUMN & TNI – Polri.
  b. Suku Bunga BRIGuna Khusus untuk beberapa instansi.
  c. Program BRIGuna Merdeka RI ke - 73.
  d. Program BRIGuna HUT BRI ke - 123.

KPR dan KKB

- Mengakselerasi pertumbuhan melalui program pemasaran, yaitu:
  a. Program *seasonal* KPR & KKB (Hoki, Lebaran, Merdeka, dan HUT).
  b. Program *Sales fee* untuk KPR *primary* dari *Developer* PKS (Perjanjian Kerja Sama) dan Agen Properti PKS.
  c. KPR Solusi yang diberikan kepada Calon Debitur yang berminat untuk melakukan pembelian properti lelang.
  d. Program KPR *Take Over Top Up* Spesial.
  e. Program KKB VIP Prioritas dan *Premium Car* yang diberikan kepada nasabah prioritas berdasarkan aktivitas transaksi dan saldo yang ada di rekening BRI.
  f. Program KPP (Kredit Kepemilikan Properti) & KKB *Pre Approval*.
  g. Pemasaran HOP dan COP ke instansi atau perusahaan yang telah memiliki PKS dengan BRI.
- Simplifikasi persyaratan dan perbaikan bisnis proses.
- Pengendalian kualitas kredit dengan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi baik secara *on site* maupun *off site* secara berkala.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian program penghargaan untuk para tenaga pemasar terbaik.

Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit untuk memenuhi beragam keperluan sudah menjadi salah satu ciri masyarakat modern. BRI senantiasa mengembangkan inovasi produk kartu kredit sebagai bagian dari upaya merealisasikan aspirasi menjadi pemimpin pasar di perbankan konsumer.

Strategi Bisnis Kartu Kredit di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi *value chain business*, khususnya Korporasi serta anak perusahaan dan nasabah dari *Corporate Card*.
- Optimalisasi Internal Marketing melalui jaringan kantor cabang.
- Mengembangkan sistem *collection* baru.
- Meningkatkan volume transaksi kartu kredit BRI melalui program-program kerjasama dengan *merchant* baik berupa diskon maupun cicilan.

Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer

KINERJA BISNIS PINJAMAN RITEL KONSUMER TAHUN 2018

Tetap terjaganya daya beli masyarakat di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi serta adanya strategi bisnis yang tepat membuat kinerja bisnis Pinjaman Ritel Konsumer tetap positif sepanjang tahun 2018. Nasabah tetap antusias dalam menggunakan produk dari BRI untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kebutuhan dasar maupun memenuhi tuntutan gaya hidup modern. Berikut kinerja dari masing-masing produk Ritel Konsumer:

BRIGuna

Outstanding BRIGuna pada tahun 2018 mencapai Rp97,78 triliun, meningkat 11,05% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp88,05 triliun.

BRIGuna	Tahun			Pertumbuhan 2017-2018	
	2016	2017	2018	Rp	%
Outstanding (Rp triliun)	78,23	88,05	97,78	9,73	11,05%

KPR

Outstanding kredit KPR pada tahun 2018 sebesar Rp27,12 triliun atau tumbuh 22,6% dari tahun 2017 yang sebesar Rp22,12 triliun.

KPR	Tahun			Pertumbuhan 2017-2018	
	2016	2017	2018	Rp	%
Outstanding (Rp triliun)	18,18	22,12	27,12	5	22,6%

KKB

Outstanding KKB pada tahun 2018 mencapai Rp3,67 triliun, meningkat 39,01% dibanding tahun 2017 sebesar Rp2,64 triliun.

KKB	Tahun / Year			Pertumbuhan 2017-2018	
	2016	2017	2018	Rp	%
Outstanding (Rp triliun)	2,16	2,64	3,67	1,03	39,01%

Kartu Kredit BRI

Minat nasabah untuk memiliki kartu kredit BRI dan kemudian melakukan transaksi semakin meningkat. Hal itu ditunjukan dengan jumlah kartu kredit BRI pada tahun 2018 yang mencapai 1,68 juta kartu, meningkat 21,74% dibanding tahun 2017 sebesar 1,38 juta kartu. Dari jumlah tersebut, akuisisi kartu kredit baru BRI sebesar 295 ribu kartu, meningkat 11,14% dibanding tahun 2017 sebesar 261 ribu kartu.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah kartu, pinjaman kartu kredit BRI tercatat sebesar Rp2,18 triliun, meningkat 29,51% dibanding tahun 2017 sebesar Rp1,68 triliun. Volume transaksi sebesar Rp7,47 triliun, meningkat 18,76% dibanding tahun 2017 sebesar Rp6,29 triliun.

Peningkatan jumlah kartu dan transaksi mendorong kenaikan *fee based income* (FBI), sebesar 40,87% menjadi Rp312,84 miliar dibandingkan Rp222,08 miliar di tahun 2017.

Kartu Kredit	Tahun / Year			Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2017-2018
Outstanding Kredit (Rp triliun)	1,34	1,67	2,18	30,09%
Jumlah Kartu (juta)	1,13	1,38	1,68	21,74%
New card (juta)	0,16	0,26	0,29	25,00%
End Nett Receivable (ENR) (Rp triliun)	1,35	1,68	2,18	29,51%
Sales Volume (Rp triliun)	4,66	6,29	7,47	18,74%
FBI (Rp miliar)	183,51	222,08	312,84	40,87%

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI senantiasa mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program Pemerintah adalah mengatasi kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan perumahan (*backlog*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyediakan pembiayaan perumahan dengan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). BRI turut mendukung langkah tersebut dengan menyalurkan kredit FLPP ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri dengan realisasi 1.161 unit naik 92,54% dari tahun 2017.

Dukungan BRI pada program Pemerintah juga terwujud dalam implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya transaksi dan melindungi data nasabah. Dukungan diberikan dengan menyesuaikan fitur maupun biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS PINJAMAN RITEL KONSUMER TAHUN 2019

Sesuai dengan aspirasi BRI untuk menjadi pemimpin pasar *Consumer Banking* di Indonesia, pengembangan subsegmen Pinjaman Ritel Konsumer akan diarahkan untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Perluasan kerjasama dan pemanfaatan *trickle down business* dari korporasi besar, pemerintahan, dan swasta akan semakin ditingkatkan. Hal ini untuk meningkatkan pangsa pasar konsumer BRI dan menaikkan pendapatan baik dari sisi bunga maupun pendapatan non bunga (*fee based income*). Berikut strategi Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer pada tahun 2019:

- Mendorong pertumbuhan dan pangsa pasar dalam segmen *secured/unsecured lending* yang didukung oleh penguatan *collection* dan *underwriting*.
- Melakukan transformasi keseluruhan jaringan cabang konsumer untuk mengoptimalkan peluang bisnis.
- Meningkatkan digitalisasi proses pinjaman secara menyeluruh untuk meningkatkan *customer experience* dan efisiensi bisnis.
- Meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran yang terintegrasi.

Bisnis Pinjaman Ritel Komersial & Menengah

KREDIT RITEL & MENENGAH
(Rp triliun)

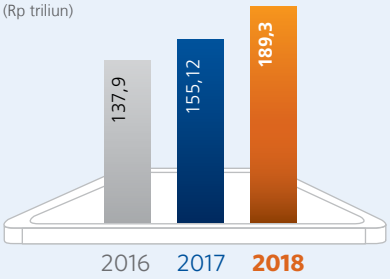

VOLUME BANK GARANSI
(Rp triliun)

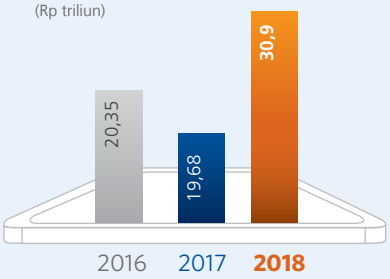

RINGKASAN

Outstanding Kredit Ritel Komersial dan Menengah **mencapai Rp189,3 triliun**, meningkat **22,03%** dari tahun 2017 sebesar Rp155,12 triliun

Volume Bank Garansi **mencapai Rp30,9 triliun**, meningkat **57,01%** dari tahun 2017 sebesar Rp19,68 triliun

PRODUK BISNIS PINJAMAN RITEL KOMERSIAL & MENENGAH

BRI melalui bisnis Ritel Komersial dan Menengah memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah antara lain:

1. Kredit Modal Kerja
   Fasilitas kredit produktif untuk pembiayaan operasional usaha dalam rangka proses produksi atau tambahan modal kerja. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya jangka waktu dan pengembalian kredit sesuai dengan karakter bisnis debitur; dan *New Account Sweep*.
2. Kredit Investasi
   Fasilitas kredit produktif dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, atau penggantian biaya perolehan (*refinancing*) barang modal. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan seperti jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan arus kas debitur.
3. Kredit Mitra/*Supply Chain Financing*
   - KMK *Pre-Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada *vendor*/ pemasok untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
   - KMK *Post Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada *vendor*/ pemasok untuk membiayai pengambilalihan piutang atas tagihan penyelesaian proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
   - KMK *Distributor* (Distributor Financing) adalah fasilitas kredit modal kerja kepada distributor/agen, khusus untuk pembayaran pembelian produk kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
   - Kredit Investasi Mitra adalah fasilitas kredit investasi dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, termasuk *refinancing* aktiva tetap dalam rangka mendukung operasional bisnis mitra Perusahaan Inti rekanan BRI.

Produk-produk tersebut memiliki sejumlah keunggulan antara lain:
- Suku bunga dan biaya kredit menarik
- Relaksasi agunan dan *Sharing* Dana Sendiri
- Operasionalisasi secara *digital* melalui Modul *Supply Chain* pada *Cash Management System* BRI

Bisnis Pinjaman Ritel Komersial & Menengah

4. KMK Dinamis
   KMK Dinamis adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dengan fitur berupa insentif suku bunga kredit yang berubah dinamis secara otomatis setiap bulan**,** berdasarkan penyaluran transaksi keuangan dan *performance* Giro BRI debitur pada bulan sebelumnya**.** Keunggulannya memiliki suku bunga kredit yang lebih menarik dibanding kredit konvensional dan *New Account Sweeep*.

5. Kredit Ritel Dengan Pola Angsuran Tetap
   Merupakan fasilitas kredit produktif untuk tujuan modal kerja maupun investasi yang diperuntukkan bagi debitur segmen ritel dengan sistem pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga dengan jumlah tetap. Keunggulan produk dengan pola angsuran tetap antara lain:
   - Jangka waktu kredit hingga 5 tahun
   - Maksimal angsuran adalah 80% dari RPC

6. Bank Garansi *Online*
   Bank Garansi (BG) *online* adalah fitur pengajuan Bank Garansi serta *monitoring* Bank Garansi BRI secara *online* dan digital pada *Cash Management System* BRI. Produk ini memiliki keunggulan, yaitu:
   - Pengajuan Bank Garansi secara *online* dan digital melalui CMS BRI, tanpa perlu datang langsung ke unit kerja BRI.
   - *Bouwheer* dapat melakukan konfirmasi dan monitoring keabsahan dan jatuh tempo Bank Garansi melalui CMS BRI tanpa perlu konfirmasi manual ke unit kerja BRI.

7. KMK *Accepted Invoice* BPJS Kesehaan
   Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada Faskes untuk pengambilalihan tagihan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan *invoice* yang telah disetujui. Keunggulannya sebagai berikut:
   - Pembiayaan sebesar 100% dari nilai *Invoice*
   - Tanpa agunan tambahan

8. *Invoice Financing* melalui *Platform* Investree *(Fintech Peer To Peer Lending)*
   BRI melakukan kolaborasi dengan perusahaan *financial technology* (fintech) antara lain dalam penyaluran *invoice financing* dengan skema kerjasama yang dilakukan melalui *platform online* di https://www.investree.id. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya:
   - Prosedur pelayanan kredit secara digital dan cepat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
   - Biaya kredit relatif murah
   - Tanpa agunan tambahan

Bisnis Pinjaman Ritel Komersial & Menengah

STRATEGI & PROGRAM BISNIS PINJAMAN RITEL KOMERSIAL & MENENGAH TAHUN 2018

Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah memiliki sejumlah strategi dan program dalam upaya mencapai target yang ditentukan. Strategi yang dijalankan telah memperhitungkan banyak faktor seperti kondisi ekonomi, target pasar, maupun peluang bisnis. Sepanjang tahun 2018, strategi dan program yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi *Loan Portofolio Guidelines* sebagai panduan dalam penyaluran kredit yang sehat dan secara spesifik disesuaikan dengan potensi dan risiko di masing-masing wilayah kerja BRI.
- Optimalisasi *Early Warning System* dalam rangka mendukung aktivitas monitoring RM sehingga lebih cepat mengetahui dan mengatasi gejala debitur yang berpotensi *default*.
- Pelaksanaan Forum *Pipeline Management* secara rutin di seluruh unit kerja dalam rangka menciptakan ekspansi dan pertumbuhan kredit yang terencana dan terarah, yang didukung dengan *New Mapping Model* untuk mendukung *pipeline management*.
- Optimalisasi *Supply Chain Financing* kepada 10 Perusahaan Inti utama rekanan BRI serta Pelaksanaan Program Pemasaran secara tematik per wilayah.
- Optimalisasi kerjasama penyaluran kredit dengan berbagai *Fintech peer-to-peer lending*.
- Fokus Terhadap *Value Chain Business* (VCB) Divisi Bisnis Korporasi: aktivitas proses akuisisi sampai dengan realisasi secara intensif terhadap debitur hasil TDB.
- Implementasi BRISpot Ritel secara bertahap dimana pelayanan, prakarsa dan putusan kredit dilakukan secara digital dengan *gadget* sehingga menciptakan *Service Level Agreement* (SLA) yang lebih cepat dan *paperless*.

KINERJA BISNIS PINJAMAN RITEL KOMERSIAL & MENENGAH TAHUN 2018

Pada tahun 2018, BRI melakukan kebijakan resegmentasi untuk lebih meningkatkan kinerja bisnis Ritel Komersial dan Menengah. Hasil resegmentasi mendefinisikan Kredit Ritel Komersial adalah kredit dengan plafon sampai dengan Rp25 miliar, dan Kredit Menengah dengan plafon lebih dari Rp25 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

Sepanjang tahun 2018 kinerja bisnis Ritel Komersial dan Menengah adalah sebagai berikut:

Bisnis Ritel Komersial

Kredit Ritel Komersial mencapai Rp165,72 triliun, atau meningkat 28,15% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp129,31 triliun.

Bisnis Menengah

Kredit Menengah mencapai Rp23,58 triliun sedikit menurun apabila dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp25,81 triliun. Penurunan kredit menengah ini karena strategi BRI yang memilih tumbuh secara selektif untuk menjaga kualitas kredit menengah.

(Rp triliun)

Kredit	Tahun			Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2017-2018
Kredit Ritel	115,68	129,31	165,72	28,15%
Kredit Menengah	22,22	25,81	23,58	-8,64%
Total	137,9	155,12	189,3	22,03%

Volume Bank Garansi

Pada tahun 2018, produk Bank Garansi terealisasi dengan volume sebesar Rp30,9 triliun dengan jumlah warkat sebesar 18.838 warkat. Jumlah itu naik dibanding posisi Desember 2017, dimana volume Bank Garansi sebesar Rp19,68 triliun dengan jumlah warkat 12.293 warkat. Realisasi Bank Garansi tertinggi pada tahun 2018 ada pada produk *Performance Bond* dengan volume sebesar Rp13,1 triliun dan Warkat sebanyak 7.058 warkat.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

BRI melalui segmen Bisnis Ritel Komersial dan Menengah telah mendukung program Pemerintah terutama dalam peningkatan jumlah pengusaha kelas menengah. Selain itu, turut meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

STRATEGI BISNIS PINJAMAN RITEL KOMERSIAL & MENENGAH TAHUN 2019

Ekspektasi pertumbuhan makroekonomi yang lebih baik pada tahun 2019 menjanjikan peluang bisnis yang lebih dinamis termasuk di segmen Bisnis Ritel Komersial dan Menengah. Strategi perhimpunan Bisnis Ritel Komersial & Menengah tahun 2019, sebagai berikut:

- Optimalisasi penggunaan BRISpot Ritel untuk meningkatkan produktifitas pinjaman Ritel Komersial.
- Menjalankan aktivitas Program Pemasaran bisnis Ritel & Menengah disesuaikan dengan kondisi persaingan bisnis.
- Optimalisasi *value chain business* khususnya dengan nasabah Korporasi potensial.
- Implementasi forum *pipeline*.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pemasar (RM & BM) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- Melakukan kerjasama *partnership* dengan perusahaan *peer to peer lending*.
- Pengembangan *Dashboard* KPI untuk tenaga pemasar.
- Bekerjasama dengan perusahaan asuransi terkait mekanisme *transfer risk*.
- Menciptakan ekosistem komunitas dengan kerjasama dan IT melalui aplikasi "Agritech".

Bisnis Simpanan Ritel

GIRO
(Rp triliun)

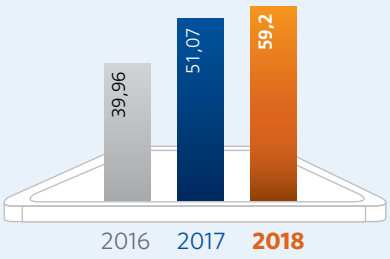

TABUNGAN
(Rp triliun)

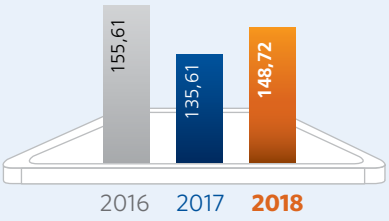

DEPOSITO
(Rp triliun)

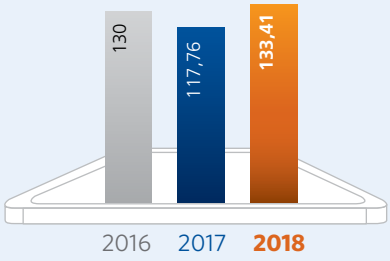

RINGKASAN

Dana Pihak Ketiga **mencapai Rp341,33 triliun**, meningkat **12,12%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp304,44 triliun

Tabungan **mencapai Rp148,72 triliun**, meningkat **9,67%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp135,61 triliun

Giro **mencapai Rp59,2 triliun**, meningkat **15,93%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp51,07 triliun

Deposito **mencapai Rp133,41 triliun**, meningkat **13,29%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp117,76 triliun

CASA **meningkat sebesar 11,38%** menjadi **Rp207,92 triliun** dibanding tahun 2017 sebesar Rp186,68 triliun atau 60,91% dari total DPK

CASA
(Rp triliun)

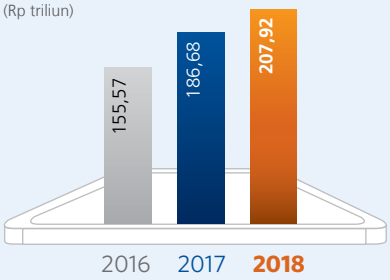

SIMPANAN BISNIS RITEL
(Rp triliun)

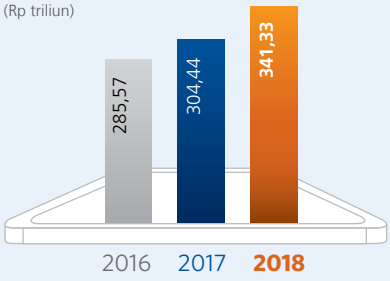

PRODUK BISNIS SIMPANAN RITEL

BRI memiliki produk Simpanan Ritel yang beragam untuk memenuhi kebutuhan seluruh nasabah. Pada tahun 2018, produk Simpanan Ritel antara lain:

Tabungan BRI BritAma

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas e-banking yang semakin memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Selain itu, Tabungan ini memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri yang diberikan secara gratis kepada nasabah.

Sejalan dalam kebutuhan nasabah yang semakin beragam, BRI terus mengembangkan Tabungan BRI BritAma dalam berbagai jenis varian sebagai berikut:

- **BritAma Bisnis**
  Produk tabungan BRI yang diutamakan untuk berbisnis dengan memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis nasabah.

- **BritAma Edisi Khusus Anak Muda**
  Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

- **BritAma Rencana**
  Tabungan investasi dengan setoran tetap bulanan yang dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah.

- **BritAma Valas**
  Tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 10 jenis *currency* meliputi USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, JPY, SAR dan GBP dengan pilihan mata uang USD, AUD, SGD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY, dan SAR.

Tabungan BRI Junio

Produk Tabungan BRI Junio dikhususkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung dan memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas *e-Banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik. Para orang tua tidak perlu khawatir dengan adanya berbagai fasilitas transaksi, karena transaksi anak dapat tetap dimonitor melalui SMS Notifikasi yang dikirim ke nomor *handphone* orang tua.

Tabungan BRI SiMuda

Tabungan BRI SiMuda merupakan tabungan yang ditujukan kepada perorangan khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda pada kelompok usia 18-30 tahun. Produk ini dilengkapi dengan fitur asuransi dan/atau produk investasi.

Tabungan BRI SiMuda dilengkapi dengan dua fitur yaitu SiMuda RumahKu yang digunakan untuk menabung DP KPR Rumah dan SiMuda InvestasiKu yang dapat digunakan oleh nasabah untuk berinvestasi Reksadana. Produk Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi premi gratis pada tahun pertama.

Tabungan Haji

Produk Tabungan Haji ditujukan untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci. Nasabah dapat melakukan setoran Tabungan Haji di seluruh Unit Kerja BRI. Tabungan ini dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa gratis yang dapat memberikan kenyamanan kepada nasabah.

Giro BRI

Produk Giro BRI memiliki fitur Mass Debet, *Account Sweep* hingga fasilitas *Salary crediting* yang memudahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji kepada pekerja secara efektif dan efisien.

Bisnis Simpanan Ritel

Giro BRI menyediakan beragam pilihan mata uang di antaranya IDR, USD, SGD, AUD, CNY, JPY, EUR, GBP, SAR, NOK, AED dan HKD. Untuk kemudahan transaksi, selain Cek dan Giro Bilyet, BRI memberikan fasilitas kartu Debit, IBBiZ (Internet Banking Bisnis) atau CMS (*Cash Management System*) yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Untuk memudahkan para nasabah yang membutuhkan fasilitas penerimaan setoran atau pembayaran, BRI menawarkan fasilitas BRIVA (BRI Virtual Account) yang juga menargetkan pasar perdagangan digital. BRIVA memperluas sayap melalui kerjasama dengan berbagai fintech dan *e-commerce* ternama di antaranya Tokopedia, tiket.com dan berbagai platform digital lainnya.

DEPOBRI (Deposito BRI)

Deposito BRI sebagai pilihan investasi bagi nasabah tersedia dalam berbagai pilihan mata uang, baik Rupiah maupun valas dengan suku bunga yang kompetitif. Produk ini cocok bagi nasabah yang menginginkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan produk tabungan. Untuk kemudahan pembukaan rekening, nasabah diberikan pilihan pembukaan melalui unit kerja BRI yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia atau melalui *Internet Banking*. Dengan setoran awal yang terjangkau, nasabah juga diberikan fleksibilitas untuk memilih mekanisme pemberian bunga, baik langsung diberikan melalui rekening atau ingin ditambahkan ke dalam komponen pokok deposito (*add on*).

BRI telah mengembangkan produk Deposito *Scriptless* untuk mengakomodir kebutuhan nasabah yang memiliki banyak bilyet. Deposito *Scriptless* merupakan deposito yang bukti penempatan dananya berupa email notifikasi agar para nasabah dapat mengelola rekening depositonya lebih efektif dan efisien.

PROGRAM & STRATEGI BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2018

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 2018 difokuskan pada perolehan dana murah (CASA), yaitu Giro dan Tabungan. Aktivitas pemasaran dilakukan dengan berpedoman pada tiga pilar strategi, yaitu akuisisi, retensi, dan *maintenance*. Sejalan dengan hal tersebut, BRI juga telah melaksanakan berbagai program, baik di tingkat lokal (inisiasi dari masing-masing unit kerja) maupun program nasional, antara lain:

- BritAma *Hot Deal* yang merupakan program *direct gift* bagi nasabah perorangan yang menempatkan dana minimal Rp150 juta selama jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan nasabah.
- BritAma *Great Deal*, yaitu program *reward* bagi debitur kredit modal kerja atau kredit investasi yang menempatkan dana minimal Rp10 juta yang diendapkan selama jangka waktu tertentu.
- Program Juara Dana, yaitu program penghargaan bagi RM Kredit Briguna dan Konsumer yang berhasil mendapatkan dana segar yang diendapkan selama jangka waktu tertentu.
- Nabung Untung BritAma merupakan program hadiah langsung kepada nasabah yang berkomitmen menempatkan dananya minimal 6 bulan dengan nominal dana yang diblokir sebesar Rp25 juta.
- Program THTB (*The Highest The Better*) yaitu program penghargaan bagi tenaga pemasar dana di Unit Kerja Ritel (Kanca dan KCP) atas kontribusi peningkatan kinerja CASA ritel.

Selain program pemasaran, upaya perolehan dana murah juga dilakukan melalui aktivitas *cross selling* khususnya dengan nasabah pinjaman ritel, menengah, dan konsumer.

KINERJA BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, implementasi strategi bisnis berjalan dengan baik sehingga berdampak positif terhadap pencapaian kinerja. Perolehan DPK sebesar Rp341,33 triliun, meningkat Rp36,9 triliun atau 11,63% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp304,44 triliun.

Produk giro mengalami peningkatan tertinggi dibanding produk tabungan dan deposito. Giro meningkat 15,93% menjadi Rp59,20 triliun. Tabungan meningkat 9,67% menjadi Rp148,72 triliun dan deposito naik 13,29% menjadi Rp133,41 triliun. Perolehan dana CASA meningkat 11,38% menjadi Rp207,92 triliun.

Rp triliun

Simpanan	Tahun			Pertumbuhan 2017-2018	
	2016	2017	2018	Rp	%
Giro	39,96	51,07	59,20	8,13	15,93%
Tabungan	115,61	135,61	148,72	13,11	9,67%
Deposito	130,00	117,76	133,41	15,65	13,29%
Total	285,57	304,44	341,33	36,89	11,63%
CASA	155,57	186,68	207,92	21,25	11,38%
CASA (%)	54,48	61,32	60,91		

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah terutama dalam peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu ditunjukkan antara lain melalui produk Tabungan BRI SiMuda yang mendukung program OJK untuk melaksanakan literasi keuangan serta memberikan edukasi dalam mengenalkan instrumen asuransi dan investasi kepada pemuda.

Selain itu, dengan fasilitas BRIVA BRI membangun sinergi dengan melayani penerimaan angsuran atau setoran dari instansi BUMN dan BUMD. Hal ini sejalan dengan program Sinergi BUMN untuk menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS SIMPANAN RITEL TAHUN 2019

BRI terus melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan perolehan dana dengan berfokus pada peningkatan dana CASA. Oleh karena itu strategi pengembangan Bisnis Simpanan Ritel yang akan dilakukan pada tahun 2019, meliputi:

Strategi Pengembangan Tabungan

BRI berupaya untuk melakukan peremajaan produk tabungan dan fitur transaksi serta memberikan pengalaman baru bagi nasabah BRI Eksisting maupun nasabah baru dengan melakukan pengembangan produk, antara lain BRImo. Produk BRImo merupakan pengembangan produk tabungan berbasis digital, yang dapat memberikan pelayanan tabungan mulai dari pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan fitur-fitur lainnya dalam satu aplikasi.

Bisnis Simpanan Ritel

BRI juga akan melakukan pengembangan sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung kerjasama antara BRI dengan sekolah. Aplikasi ini nantinya akan memudahkan sekolah untuk melakukan manajemen pengelolaan sekolah yang meliputi akademik, administrasi, dan informasi dalam satu platform aplikasi.

Strategi Pengembangan Giro

Pengembangan produk Giro berfokus pada penambahan fitur dan fasilitas baru, selain peningkatan kualitas fitur dan fasilitas yang telah ada. Hal ini untuk merealisasikan misi menjadi pilihan utama giro operasional dan transaksional para pelaku bisnis UMKM.

Direncanakan pada tahun 2019, akan dilakukan beberapa pengembangan produk di antaranya, penambahan fasilitas kartu untuk memudahkan transaksi giro valas para pengusaha, khususnya para pelaku ekspor-impor, meningkatkan kualitas dan jumlah user CMS (*Cash Management System*) dan IBBiz (Internet Banking Bisnis), serta menyempurnakan aplikasi e-statement untuk memberikan kemudahan monitoring transaksi bagi para pengusaha. Selain itu, BRIVA sebagai salah satu fitur Giro BRI juga akan memperluas jangkauan wilayah hingga ke Timor Leste.

BRI juga akan melakukan penyempurnaan aplikasi-aplikasi yang erat kaitannya dengan Giro BRI di antaranya penyempurnaan aplikasi *Mass Debet, Account Sweep* dan *Salary Crediting* dengan harapan dapat mengakomodir seluruh kebutuhan transaksi para nasabah yang mengutamakan kemudahan dan aksesibilitas tinggi.

BRI juga akan melakukan pengembangan aplikasi *billing management* yang digunakan untuk memberikan nilai tambah bagi para nasabah giro. Aplikasi ini memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan piutangnya secara otomatis melalui sistem.

Strategi Pengembangan Deposito

Pada tahun 2019, strategi pengembangan deposito akan diarahkan pada pasar kalangan milenial. Untuk itu, produk deposito dirancang dengan memberikan imbal hasil menguntungkan, dapat dibuka melalui *e-channel* BRI dan menawarkan fleksibilitas perubahan pembayaran bunga, rekening tujuan pembayaran bunga, jangka waktu dan nominal deposito tanpa melakukan penutupan rekening seperti pada fitur Deposito Flexy.

Selain itu, BRI akan menambah channel pembukaan rekening yang selama ini baru dapat dilakukan melalui unit kerja dan internet banking. Rencananya, pembukaan rekening deposito dapat melalui CMS (*Cash Management System*).

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, akan didukung oleh program-program pemasaran yang sudah dicantumkan dalam *marketing plan* 2019, antara lain Program BritAma Bebas Bayar, Program BritAma Jalan-Jalan, Program BritAma *Digital Acquisition*, Program *Hot Deal*, Program Giro *Ultimate*, Program Deposito nabung Seru-Belanja Seru, Program Bulding to Bulding, dan Program *Tactical* Khusus *Merchant*, dan Program *Winback*.

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

RINGKASAN

Fee Based Income Jasa Perbankan Ritel mencapai **Rp6,81 triliun** meningkat 10,9% dari tahun 2017 Rp6,14 triliun

AUM Nasabah Prioritas **meningkat 18,57%** sebesar **Rp97,77 triliun** dari tahun 2017 sebesar Rp82,48 triliun

Jumlah **kartu BRIZZI** mencapai **12,8 juta kartu** meningkat sebesar **43,9%** dari tahun 2017 sebanyak 8,9 juta kartu

FEE BASED INCOME
JASA PERBANKAN RITEL
(Rp triliun)

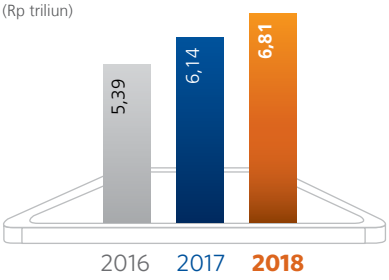

KARTU BRIZZI
(Juta)

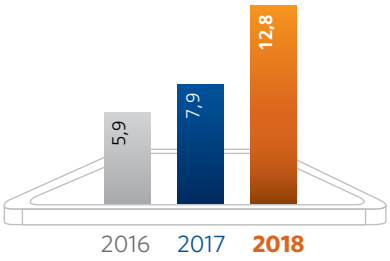

ASSET UNDER MANAGEMENT
(Rp trilliun)

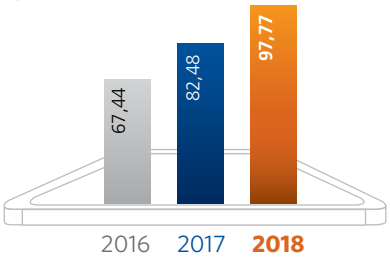

PRODUK BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

BRI memiliki produk dan layanan jasa perbankan ritel yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Pada tahun 2018, produk dan layanan jasa perbankan ritel BRI antara lain:

Internet Banking BRI

Merupakan salah satu fasilitas perbankan yang dapat dipergunakan untuk mengakses rekening simpanan melalui jaringan internet. Internet banking BRI memiliki beragam keunggulan, yaitu mudah dimengerti dan digunakan, memudahkan nasabah saat melakukan transaksi perbankan di setiap saat, aman saat melakukan transaksi perbankan, cukup menggunakan m-Token dan nasabah tidak perlu membawa perangkat tambahan.

Mobile Banking BRI

Mobile Banking BRI dapat digunakan untuk mengakses rekening simpanan nasabah melalui ponsel. SMS banking BRI akan melayani kebutuhan transaksi perbankan nasabah dengan 2 jenis layanan, yakni berbasis menu dan *Plain text*. SMS berbasis menu yaitu layanan SMS Banking yang menggunakan menu sebagai perintah transaksinya. Sementara *plain text* merupakan layanan SMS Banking dengan mengirimkan perintah transaksi yang akan dilakukan ke nomor 3300.

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

BRIZZI

BRIZZI
uang isi ulang BRI

Merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa dipakai untuk membayar transaksi belanja atau transaksi lainnya yang disediakan oleh penyedia barang atau jasa. Semua transaksi BRIZZI dapat dilakukan di seluruh merchant dengan menggunakan mesin EDC BRI. Isi ulang (*top up*) BRIZZI saat ini juga mudah dan dapat dilakukan di *merchant-merchant* yang telah bekerja sama dengan BRI, seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Yomart, dan lain-lain. Selain itu, kartu BRIZZI juga dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran jalan tol, KRL, parkir, maupun transportasi umum lainnya seperti Transjakarta.

Debit Online

e-Pay BRI
Bayar Online Praktis dan Aman

Merupakan metode pembayaran yang memungkinkan nasabah melakukan pembayaran menggunakan Kartu Debit BRI pada merchant online Mastercard dilengkapi dengan OTP (*One Time Password*)/3DS. Transaksi *e-commerce* dengan menggunakan fasilitas debit *online* BRI memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan saat bertransaksi.

T-Bank

Tbank
Uang Elektronik dengan HP

T-Bank BRI merupakan layanan yang menggunakan nomor ponsel pintar sebagai nomor rekening. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI. Sebagai pengguna T-Bank, nasabah bisa menikmati layanan transfer dan tarik tunai tanpa harus memiliki rekening bank.

Beberapa kemudahan yang diberikan T-Bank BRI, antara lain isi saldo (*top up*) yang mudah melalui beberapa channel alternatif yang dapat digunakan di antaranya melalui Unit Kerja BRI, Mesin ATM BRI/Bank Lain, Mesin CRM, EDC, Agen BRILink, Internet Banking, hingga *Mobile Banking*. Penarikan tunai tanpa kartu di jaringan ATM BRI.

Produk Investasi

BRI memiliki beragam produk investasi untuk memudahkan pilihan bagi nasabah yang ingin meningkatkan nilai aset yang dimilikinya. Produk investasi BRI yaitu Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bond Ritel, Sukuk Tabungan, SBN yang diritelkan Valas (INDON & INDOIS), SBN yang diritelkan Rupiah, *Swap Deposit*, dan Dana Pensiun Lembag Keuangan (DPLK).

Selain produk investasi tersebut, BRI bekerja sama dengan Manajer Investasi terpercaya dan terkemuka seperti BNP Paribas Investment Partners, Danareksa Investment Management, Kresna Asset Management, Trimegah Aset Management, MNC Asset Management, Schroder Investment Management Indonesia, Bahana TCW Investment Partners, Manulife Asset Management, Sucorinvest Asset Management, Syailendra Capital, Henan Putihrai Asset Management dan Ashmore Asset Management yang memiliki beragam varian produk reksa dana, antara lain reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan terproteksi.

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

Selain reksa dana, BRI memiliki produk investasi bancaasurance dengan *selling point* tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Portofolio nasabah Bancassurance BRI terbagi dalam tiga segmen, yaitu segmen mikro, ritel, dan prioritas. BRI bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi rekanan seperti PT. Asuransi BRI Life (BRIlife), PT. AIA Financial, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Asuransi Jiwa Sequis Life, PT. Asuransi Cigna, PT. Jasindo, PT. Asuransi Ramayana, PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur (BRINS) dan PT. Asuransi Raksa Pratikara.

Untuk melayani kebutuhan nasabah *high end*, BRI memiliki layanan BRI Prioritas yang antara lain mencakup:

One Stop Banking Services	Professional Experts for Priority Banking Manager, Priority Banking Officer & Priority Banking Assistant	ATM, Debit, and ID Membership	Higher Transaction Limit	Access to Many Exclusive Privileges	International Privileges By Premium Debit MasterCard	BRI Prioritas Mobile App & Microsite

Exclusive Business Center BRI Prioritas	Exclusive Business Meeting Room Facilities	WiFi Connection	Special Parking Area	Special Rate for Safe Deposit Box	Priority Access for BRI Prioritas (021) 5758899 - 0800 1017 017

Nasabah *high end* juga dapat menikmati layanan *Privilege* untuk melengkapi *one stop services* BRI, di antaranya:

Jenis *Privilege*	*Privilege* bagi Nasabah
1. *Travel Privilege*	· *Free Access to BRI Lounge in Kualanamu International Airport Departure Medan* · *Free Access to Executive Lounge in many airports across Indonesia.* · *Personal Travel Assistance* · *Private Aircraft Reservation* · *Ultimate Privilege with Railink* · *Airport Pick-Up Service*
2. *Lifestyle Privilege*	· *Free Annual Fee BRI Platinum Credit Card.* · *Special privileges from BRI Infinite Credit Card.* · *Special Birthday Gift.* · *Exclusive Event Invitation.* · *Free Exclusive Bussiness Meeting Room.* · *One Year Complimentary lifestyle or Business Magazine.* · *Luxurious Movie Promo.* · *High End Merchant Promo.* · *Terrasse Premium Magazine.* · *Hotel and Restaurant Special Offer.*
3. *Concierge Service*	· *Medical Concierge Service.* · *Exclusive Medical Evacuation.* · *Cake/Gift/Flower Order & Delivery Service.*
4. *Education & Information Privilege*	· *Overseas Study Planning.* · *Market Update*

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

PROGRAM & STRATEGI BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2018

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis *digital banking* BRI telah melaksanakan sejumlah program.

BRI juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kenyamanan bertransaksi nasabahnya dengan memperkuat pengamanan transaksi melalui kerjasama dengan Mastercard dalam bentuk *National Fraud System* dan pengembangan internal melalui teknologi *big data* yang dimiliki BRI yaitu untuk aplikasi *Fraud Detection System*.

Sementara itu untuk strategi BRI Prioritas yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengembangan *Customer Portfolio Management*, yaitu sistem yang dapat menyajikan dan melaporkan portfolio Nasabah Prioritas secara menyeluruh dan inovatif.
2. *Reenginering business process Bancassurance* mulai dari *refferal system*, *sales reporting & monitoring tools* dan *database integration*.
3. Penambahan Fitur Penjualan Produk reksa dana secara *installment & top up* secara digital melalui e-channel BRI.
4. Penambahan Produk Investasi berupa Reksa Dana *Open End* (Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, dan Saham), Reksa Dana Terproteksi, *Swap Deposit*, dan Obligasi yang diritelkan.
5. Penambahan Produk *Bancassurance* sesuai dengan kebutuhan nasabah pada setiap segmen (Segmen Mikro, Segmen Ritel & Segmen Korporasi).
6. Membuat program penjualan *Wealth Management* untuk meningkatkan kinerja produk simpanan dan produk investasi lainnya.
7. Peningkatan Kemampuan PBO dan PBM melalui *assestment soft & hard skill*, pelatihan tenaga pemasar, dan pengembangan sistem *monitoring* kinerja.
8. Penambahan *outlet* BRI Prioritas (Sentra Layanan BRI Prioritas dan *Priority Lounge*).
9. Kerja sama dengan perusahaan yang menyediakan *privilege* dalam hal *travel, lifestyle, education*, dan *concierge service*.

KINERJA BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, kinerja segmen bisnis Jasa Perbankan Ritel BRI mencatatkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini disebabkan faktor internal maupun eksternal. Secara internal, program dan strategi yang direncanakan terimplementasi sesuai rencana. Sementara faktor eksternal antara lain kebijakan pemerintah seperti mewajibkan pembayaran elektronik di jalan tol. Hal ini berdampak bagus bagi bisnis uang elektronik seperti BRIZZI.

Jumlah pengguna kartu BRIZZI sebanyak 12,76 juta, naik 47,53% dibanding tahun 2017 sebanyak 8,67 juta pengguna. Peningkatan jumlah pengguna kartu BRIZZI tersebut juga sejalan dengan peningkatan jumlah transaksi kartu BRIZZI sebesar 872% dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara volume dari transaksi BRIZZI mencapai Rp5,8 triliun.

Jumlah transaksi e-banking BRI juga berhasil tumbuh dua digit di tahun 2018 sebesar 42%. Pertumbuhan transaksi di channel *internet banking* BRI sebesar 85% menunjukkan bahwa semakin banyaknya para *tech savvy customers* yang menggunakan saluran digital banking BRI. Transaksi di Merchant BRI pada 2018 telah menembus angka 2,45 miliar transaksi dengan total *sales volume* sebesar Rp56,84triliun. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan yang tinggi terhadap *merchant-merchant* BRI. Peningkatan transaksi maupun volume digital banking BRI berdampak terhadap pendapatan jasa (*fee based income*) yang mencapai Rp3,2 triliun.

Kartu Debit dan Uang Elektronik	Tahun			Pertumbuhan 2017-2018 %
	2016	2017	2018	
Kartu BRIZZI (juta)	5,9	8,7	12,8	47,13
Volume BRIZZI (Rp triliun)	0,3	0,8	5,8	625
Kartu Debit BRI (juta)	45,8	56,2	44,6	-20,64
Volume merchant BRI (Rp triliun)	32,4	51,8	56,8	9,65
Transaksi *e-commerce* (juta)	0,2	1,1	6,6	500
Volume e-commerce (Rp triliun)	0,1	0,8	3	275

E-Banking	Tahun			Pertumbuhan 2017-2018 %
	2016	2017	2018	
Pengguna *Mobile Banking*	15,3	18,5	22,7	22,7
Transaksi *Mobile Banking*	219,5	277,4	317,6	14,49
Pengguna *Internet Banking*	6,9	8	12,6	57,5
Transaksi *Internet Banking*	219,1	311,5	574,9	84,46
Fee based income (Rp triliun)	5,4	6,1	6,8	11,48

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

Kinerja Layanan Prioritas juga menunjukkan pertumbuhan positif. *Asset Under Management* (AUM) Nasabah BRI Prioritas tumbuh sebesar 18,54%, dari Rp82,5 triliun di tahun 2017 menjadi Rp97,8 triliun di tahun 2018. Jumlah Dana Pihak Ketiga Nasabah BRI Prioritas tumbuh sebesar 17,16% dari Rp74,0 triliun pada 2017 menjadi Rp86,7 triliun pada 2018. Begitu pula dengan jumlah Nasabah BRI Prioritas yang meningkat dari49.033nasabah menjadi 61,054 di tahun 2018. Fee Based Income meningkat sebesar 52,44%, dari Rp231,1 miliar di tahun 2017 menjadi Rp352,3 miliar pada 2018.

	2016	2017	2018
Asset Under Management (AUM) (Rp triliun)	67,44	82,48	97,77
Produk Simpanan (DPK) (Rp triliun)	60,88	73,98	86,68
Fee Based Income (Rp miliar)	163,8	227,2	379,4
Jumlah Nasabah	40.267	49.033	61.054

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah terutama dalam peningkatan literasi keuangan dan penyediaan alat pembayaran elektronik. Hal itu ditunjukkan antara lain melalui produk Tabungan BRI SiMuda yang mendukung program OJK untuk melaksanakan literasi keuangan serta memberikan edukasi dalam mengenalkan instrumen asuransi dan investasi kepada pemuda. Selain itu, dengan fasilitas BRIVA BRI membangun sinergi dengan melayani penerimaan angsuran atau setoran dari instansi BUMN dan BUMD. Hal ini sejalan dengan program Sinergi BUMN untuk menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia.

Dukungan BRI terhadap peningkatan penggunaan alat pembayaran elektronik dilakukan melalui kartu BRIZZI yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran seperti jalan tol, belanja, dan lain sebagainya.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS JASA PERBANKAN RITEL TAHUN 2019

Pada tahun 2019, pengembangan bisnis digital banking BRI akan difokuskan pada penyediaan *customer experience* yang jauh lebih baik dan berfokus pada segmen target millennial. Kelompok milenial diprediksi akan semakin mendominasi pelaku transaksi perbankan. Selain itu, berbagai macam pengembangan produk dan fitur akan terus dilakukan BRI demi bersaing secara kompetitif dengan para bank kompetitor maupun perusahaan-perusahaan *fintech*.

Di bisnis layanan Prioritas, BRI akan melakukan penetrasi pasar di segmen *MIllennials, Women, dan Netizen* (MIWON) melalui pendekatan spesifikasi produk investasi serta perlindungan asuransi yang disesuaikan untuk kebutuhan pasar. Dalam hal layanan, Bank BRI menawarkan kemudahan transaksi serta layanan informasi yang berbasis digital. Untuk itu, Bank BRI menggunakan strategi *Digital Branding* berupa *community event, digital testimonial campaign*, serta *marketing event* yang melibatkan para *influencer* yang memberikan pengaruh lebih kepada para MIWON.

Bisnis Korporasi

RINGKASAN

Outstanding Kredit Korporasi **mencapai Rp192,68 triliun**, meningkat **4,4%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp184,55 triliun

Simpanan Korporasi **mencapai Rp285,06 triliun**, meningkat **11,75%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp225,09 triliun

Fee Based Income Bisnis Korporasi **mencapai Rp2,36 triliun**, meningkat **39,1%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,7 triliun

Profitabilitas Bisnis Korporasi **mencapai Rp767,32 miliar**, meningkat **4,54%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp734,02 triliun

KREDIT KORPORASI
(Rp triliun)

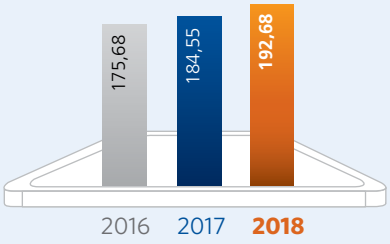

SIMPANAN KORPORASI
(Rp triliun)

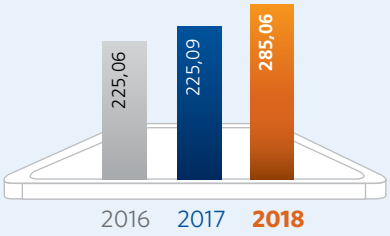

FEE BASED INCOME KORPORASI
(Rp triliun)

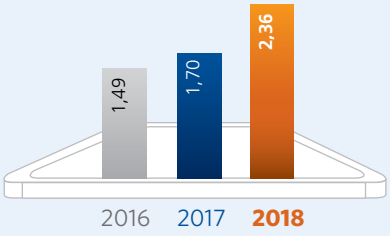

PROFITABILITAS KORPORASI
(Rp miliar)

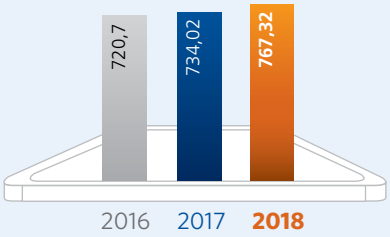

Bisnis Korporasi BUMN

RINGKASAN

Outstanding Kredit Korporasi BUMN **mencapai Rp106,56 triliun**, meningkat **9,71%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp97,13 triliun

KREDIT KORPORASI BUMN
(Rp triliun)

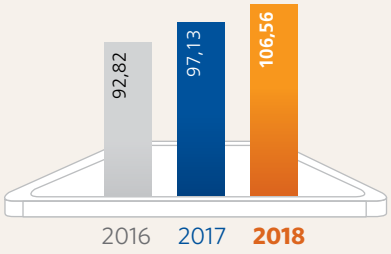

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, BRI memiliki tanggung jawab lebih dalam mendukung program-program pemerintah dalam upaya pembangunan perekonomian negara tanpa mengenyampingkan profitabilitas serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Dengan mempertimbangkan potensi bisnis yang ada, serta *risk weighted asset* yang rendah, BRI fokus membidik perusahaan BUMN terkemuka, baik induk maupun Anak BUMN dengan tetap memperhatikan arah pengembangan perusahaan yaitu sebagai *driver of growth for microbanking, transaction banking, support subsudiary* dan *implementation to the digital banking*.

STRATEGI BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2018

Pada tahun 2018 pengembangan bisnis korporasi BUMN fokus pada peningkatan *outstanding* kredit yang berkualitas serta mampu memberikan peluang *value chain business,* penghimpunan dana serta peningkatan profitabiltas melalui optimalisasi transaksi bisnis nasabah.

Meningkatkan *Outstanding* Pinjaman yang Berkualitas

Penyaluran kredit korporasi BUMN difokuskan pada usaha yang berkualitas yang dilakukan oleh BRI sendiri maupun dengan memperkuat kerjasama dengan perbankan lain melalui pembiayaan sindikasi, *club deal* serta pemanfaatan fasilitas *sell down* dari bank asing.

Mengoptimalkan Transaksi Bisnis Nasabah

Guna meningkatkan profitabilitas bisnis korporasi, BRI mengembangkan layanan perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah seperti *Cash Management System* (CMS), layanan *host to host,* BRIVA dan *corporate card*.

Memperluas Penetrasi Pasar Melalui *Closed System Financing*

BRI terus berupaya untuk melakukan penetrasi pasar melalui *closed system financing* dengan mengoptimalkan *value chain business* yang dapat mendorong pertumbuhan kredit UMKM, antara lain melalui pemberian fasilitas kredit dengan skema khusus, fasilitas kredit kepada *vendor,* subkontraktor, *supplier,* distributor dan mitra binaan, serta fasilitas kredit konsumer seperti KPR, KKB, dan BRIGUNA kepada karyawan yang bekerja di perusahaan BUMN yang menjadi nasabah BRI.

KINERJA BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Bisnis Korporasi BUMN mencatat kinerja yang positif.

Pada tahun 2018, outstanding Kredit Korporasi BUMN mencapai Rp106,56 triliun atau tumbuh 9,71% dari tahun 2017 yang sebesar Rp97,13 triliun.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, BUMN terlibat dalam pengerjaan proyek mulai dari pembiayaan sampai pelaksanaan teknis. BRI sebagai salah satu BUMN di sektor jasa keuangan, memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut melalui pembiayaan sindikasi maupun skema lainnya.

Selain itu BRI juga ikut serta dalam pembiayaan terhadap BUMN untuk mendukung transaksi-transaksi ekspor dan impor dalam mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri.

STRATEGI BISNIS KORPORASI BUMN TAHUN 2019

Di tahun 2019 pengembangan bisnis korporasi akan difokuskan pada penyaluran kredit yang berkualitas, perbaikan kualitas kredit dan optimalisasi profitabilitas bisnis.

Meningkatkan Penyaluran Kredit

Penyaluran Kredit akan baik kepada debitur baru maupun dengan mengoptimalkan fasilitas yang masih dimiliki oleh debitur eksisting. BRI akan membidik perusahaan BUMN terkemuka baik induk maupun Anak BUMN yang dapat menjadi sumber pertumbuhan segmen UMKM BRI.

Memperbaiki Kualitas Kredit

Upaya perbaikan kualitas kredit akan terus dilakukan antara lain dengan menyusun *exit strategy* bagi debitur yang bermasalah, penyempurnaan sistem manajemen risiko dalam proses penyaluran kredit serta peningkatan kompetensi SDM.

Meningkatkan Profitabilitas Bisnis

Peningkatan profitabilitas bisnis akan difokuskan dengan terus meningkatkan transaksi bisnis nasabah melalui BRI dengan pengembangan sistem layanan yang terintegrasi. Selain itu, BRI juga akan mengimplementasikan manajemen profitabilitas pada setiap nasabah.

Bisnis Korporasi Non BUMN

RINGKASAN

Outstanding Kredit Korporasi Non BUMN **mencapai Rp86,12 triliun**, meningkat **4,36%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp82,52 triliun tidak termasuk UKLM

KREDIT KORPORASI NON BUMN
(Rp triliun)

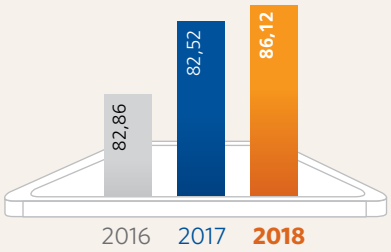

Bisnis Korporasi Non BUMN BRI terus berkembang dan menjadi salah satu segmen yang mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan *competitive position* BRI. Setiap pemberian kredit kepada Korporasi Non BUMN harus memiliki peluang *value chain business* dan *cross-selling* sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan Bisnis Ritel, Kecil dan Menengah, serta Bisnis Konsumer BRI.

Segmen Bisnis Korporasi Non BUMN BRI terdiri dari sub-segmen agribisnis dan korporasi. Sasaran utama pengembangan kredit agribisnis adalah pembiayaan pada komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan *multiplier effect* kepada UMKM. Sementara untuk sektor non-agribisnis, penyaluran kredit cukup bervariasi ke beberapa sektor, antara lain energi, transportasi dan industri pengolahan.

STRATEGI BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2018

Menjaga pertumbuhan portofolio kredit yang sehat dengan fokus pada penyaluran kredit di sektor-sektor unggulan dan mengoptimalkan fasilitas yang masih dimiliki oleh debitur eksisting.

Mengembangkan *Integrated Banking Solution*

Mengembangkan *Client Service Team (CST)* kepada nasaba korporasi untuk meningkatkan pemberian fasilitas selain kredit, antara lain fasilitas *forex line* dan *trade finance*. Peran RM sebagai *financial advisor* juga ditingkatkan melalui program pendidikan dan pelatihan.

Mengoptimalkan *Value Chain Business*

Mengidentifikasi potensi bisnis nasabah melalui aplikasi *Dashboard Account Planning* dan mengembangkan produk-produk unggulan seperti *supply chain financing* dan *distributor financing*.

KINERJA BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018 Bisnis Korporasi Non BUMN mencatat pertumbuhan positif baik dalam aspek Kredit, Simpanan maupun *Fee Based Income*.

Outstanding Kredit Korporasi Non BUMN mencapai Rp86,12 triliun, tumbuh 4,36% dari tahun 2017 yang sebesar Rp82,52 triliun, ditopang oleh pembiayaan di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri gula.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

BRI melalui segmen bisnis Korporasi Non BUMN telah mendukung program pemerintah terutama dalam membiayai sektor usaha produktif berorientasi ekspor seperti komoditas kelapa sawit dan turut membiayai usaha korporasi yang terkait dengan infrastruktur dasar seperti kelistrikan untuk mendukung peningkatan elektrifikasi.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS KORPORASI NON BUMN TAHUN 2019

Pertumbuhan bisnis korporasi non BUMN di tahun 2019 akan dijaga pada level yang moderat dengan fokus pada perbaikan kualitas kredit dan peningkatan profitabilitas bisnis.

Memperbaiki Kualitas Kredit

Upaya perbaikan kualitas kredit akan terus dilakukan antara lain dengan menyusun *exit strategy* bagi debitur yang bermasalah, penyempurnaan sistem manajemen risiko dalam proses penyaluran kredit serta peningkatan kompetensi SDM.

Meningkatkan Profitabilitas Bisnis

Peningkatan profitabilitas bisnis akan difokuskan dengan terus meningkatkan transaksi bisnis nasabah melalui BRI dengan pengembangan sistem layanan yang terintegrasi. Selain itu, BRI juga mengimplementasikan manajemen profitabilitas pada setiap nasabah.

Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank

RINGKASAN

Fee Based Income Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank BRI **mencapai Rp183,21 miliar**, meningkat **452,2%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp33,18 miliar

FEE BASE INCOME BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
(Rp miliar)

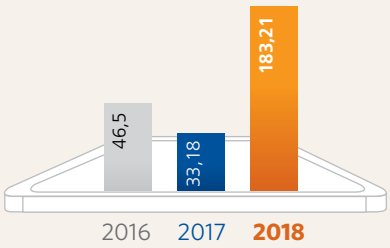

BRI membentuk struktur organisasi Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank pada tahun 2017. Bisnis ini memiliki dua lini utama yaitu bisnis jasa sindikasi dan pemberian fasilitas limit terutama *uncommitted line* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam negeri.

Bisnis pembiayaan sindikasi ditujukan untuk nasabah korporasi yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dengan lebih dari satu kreditur. Sindikasi BRI telah berpengalaman dalam menangani kredit sindikasi dari berbagai sektor bisnis seperti infrastruktur, kelistrikan, manufaktur, *oil & gas*, perdagangan/ hotel/restoran, perkebunan, pertambangan dan properti yang meliputi jasa *arranger, facility agent, escrow agent*, dan *security agent*.

Sementara itu, Bisnis Jasa Keuangan Non Bank meliputi *security line, foreign exchange line, trade finance line*, fasilitas pinjaman jangka pendek, fasilitas *intraday*, Bank Garansi dan penjaminan untuk berbagai kebutuhan khususnya untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang menjadi target penyaluran kredit BRI meliputi perusahaan pembiayaan (multifinance), asuransi, sekuritas, lembaga keuangan khusus dan lembaga keuangan non bank lain.

STRATEGI BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TAHUN 2018

Pada tahun 2018, BRI melalui Bisnis Sindikasi memprioritaskan penyaluran kredit terutama infrastruktur dan kelistrikan. Selain hal tersebut Sindikasi BRI aktif bekerjasama dengan Bank Himbara, Lembaga Pembiayaan, Bank Swasta Nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperbanyak *Partner Base* dan *Customer Base*.

Sementara itu, pada Bisnis Jasa Lembaga Keuangan Non Bank prioritas pemberian fasilitas diutamakan kepada Perusahaan Asuransi untuk Fasilitas penjaminan dan Kontra Bank Garansi, Fasilitas *Intraday* untuk Perusahaan Sekuritas dan *Security Line* untuk meningkatkan pendapatan *Fee Based Income* dan pendapatan bunga non pinjaman, serta memperluas hubungan kemitraan dengan mitra strategis untuk mengoptimalkan peluang bisnis, terutama yang memberi *value chain business* bagi segmen bisnis BRI lainnya.

KINERJA BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Bisnis Sindikasi & Jasa Lembaga Keuangan Non Bank telah menghasilkan *fee based income* sebesar Rp183,21 miliar atau meningkat 452,2% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp33,18 miliar, sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit dan layanan yang diberikan oleh BRI kepada mitra dan nasabahnya.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Melalui kegiatan sindikasi dengan perbankan lain dalam beberapa proyek infrastruktur, BRI telah mendukung terlaksananya program-program Pemerintah sebagaimana termuat dalam program Nawacita.

STRATEGI BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TAHUN 2019

Pada masa mendatang, Bisnis Sindikasi dan Jasa Keuangan Non Bank akan terus memperkuat kerja sama dan sinergi dengan perbankan lain baik dengan sesama bank BUMN, swasta nasional, asing, perusahaan anak BRI dan bank anggota Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda). Peningkatan kerja sama ini difokuskan untuk memacu pertumbuhan *fee based income* BRI.

Sementara untuk pengembangan bisnis IKNB, BRI akan meningkatkan limit dan utilisasi limit fasilitas existing, dan perusahaan-perusahaan sekuritas serta asuransi potensial. Selain itu, akan meningkatkan optimalisasi rantai nilai atas nasabah IKNB BRI. Sejalan dengan hal tersebut, BRI akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan implementasi digitalisasi yang dapat mempersingkat proses bisnis.

Bisnis Dana Institusi & *Transaction Banking*

SIMPANAN DANA INSTITUSI
(Rp triliun)

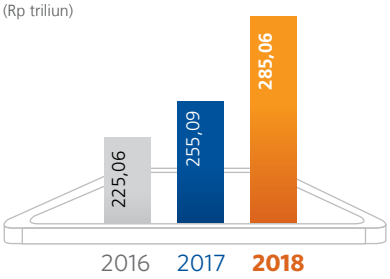

FEE BASED INCOME TRANSACTION BANKING
(Rp miliar)

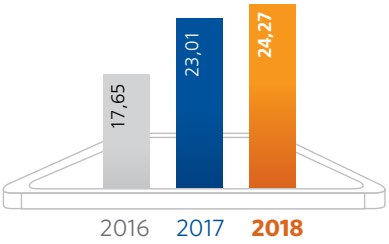

VOLUME TRANSAKSI CMS
(Rp triliun)

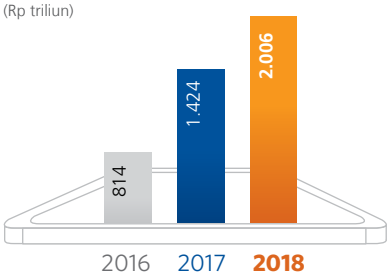

RINGKASAN

Simpanan Institusi **mencapai Rp285,06 triliun**, meningkat **11,75%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp255,09 triliun

Fee Based Income Transaction Banking **mencapai Rp24,27 miliar** meningkat **5,46%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp23,01 miliar

Volume transaksi *Cash Management System* (CMS) **mencapai Rp2.006 triliun**, meningkat **40,87%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.424 triliun

Bisnis Dana Institusi meliputi pengelolaan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui kementerian atau lembaga pemerintah dan juga dana dari pemerintah daerah serta swasta. Selain itu, BRI juga menyediakan *transaction banking* atau *Cash Management System* (CMS) yang merupakan solusi layanan keuangan nasabah perbankan berbasis digital yang dilengkapi berbagai fitur.

STRATEGI BISNIS DANA INSTITUSI TAHUN 2018

Pengembangan Produk

Produk-produk bisnis Dana Institusi terus dikembangkan sesuai kebutuhan nasabah (*customer centric*) terutama pada area sistem rekonsiliasi, *complain handling*, dan sistem peringatan dini.

Meningkatkan Kualitas Monitoring Kinerja

Perangkat monitoring portofolio Dana Institusi terus dikembangkan untuk memantau kinerja internal. Selain itu, dalam setiap skema kerja sama dengan nasabah BRI senantiasa meningkatkan kualitas layanan.

Meningkatkan *Transaction Banking* (CMS)

BRI terus mengembangkan inovasi strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan dengan tetap memperhatikan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan sesuai kebutuhan nasabah korporasi. Inovasi yang dikembangkan antara lain melalui akuisisi Platform CMS *End-to-End* dan pengembangan *platform supply chain financing*.

KINERJA BISNIS DANA INSTITUSI TAHUN 2018

Penghimpunan Dana Institusi

Pada tahun 2018 dana institusi mencapai Rp285,06 triliun atau meningkat 11,57% dari tahun 2017 sebesar Rp255,09 triliun. Dana Institusi terdiri dari Dana Kelembagaan dan Dana Korporasi. Dana Kelembagaan mencapai Rp82,15 triliun atau 28,82% dari total Dana Institusi, sementara Dana Korporasi mencapai Rp202,9 triliun atau 71,18% dari total Dana Institusi.

Fee Based Income

Fee Based Income dari bisnis Dana Institusi sebesar Rp73,26 miliar di tahun 2018 meningkat 0,82% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp72,66 miliar. Sementara itu *fee based income transaction banking* mencapai Rp24,27 miliar atau meningkat 5,46% dari tahun 2017 sebesar Rp23,01 miliar.

Kinerja *Cash Management System* (CMS)

Sepanjang tahun 2018, jumlah nasabah CMS BRI meningkat 30,46% menjadi 19.682 nasabah dibanding tahun 2017 sebesar 15.087 nasabah. Sementara itu, frekuensi transaksi meningkat sebesar 19,33% menjadi 46,9 juta transaksi dan volume transaksi CMS meningkat sebesar 40,9% menjadi Rp2.006 triliun.

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

BRI melalui bisnis Dana Institusi mengelola dana-dana yang bersumber dari anggaran negara maupun swasta dengan dukungan teknologi digital. Hal itu sejalan dengan program Pemerintah dalam meningkatkan *cashless society* untuk mendukung peningkatan efisiensi ekonomi.

STRATEGI BISNIS DANA INSTITUSI TAHUN 2019

Kompetisi perolehan Dana Pihak Ketiga institusi dan *transaction banking* diprediksi akan semakin ketat pada tahun mendatang. Untuk itu BRI telah menyiapkan sejumlah strategi tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

Peningkatan CASA

Peningkatan komposisi CASA BRI dilakukan melalui *closed payment system* berbasis *digital banking*. Selain itu, menyelaraskan produk-produk perbankan dan anak perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga, serta mengelola penyaluran APBN Kementerian sampai dengan satuan kerja (satker) daerah.

Memperluas Pangsa Pasar *Transaction Banking* dan Penyediaan *Fully Integrated Banking Services*

Perluasan pangsa pasar BRI akan dilakukan melalui ekstensifikasi *customer base* dengan memperkuat kapabilitas *transaction banking* melalui pengembangan CMS *end-to-end* dan *Supply Chain Financing*. Sementara *fully integrated banking services* akan dilakukan melalui pengembangan ekosistem bisnis nasabah, optimalisasi *coverage model* (pemetaan RM, desain *client service team* berdasarkan segmen dan *product specialist*), dan pengembangan *monitoring value chain* nasabah korporasi.

Bisnis Internasional

RINGKASAN

BRI meluncurkan Kartu Pekerja Migran Indonesia (KPMI) untuk melayani segmen nasabah pekerja migran

Fee Based Income Bisnis Internasional **mencapai Rp1,59 triliun**, meningkat **54,82%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,03 triliun

FEE BASED INCOME BISNIS INTERNASIONAL
(Rp triliun)

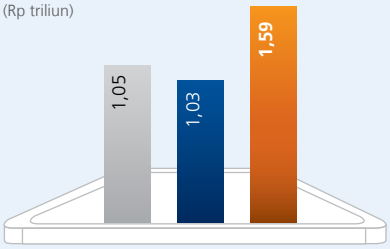

VOLUME TRANSAKSI *TRADE FINANCE*
(Rp triiun)

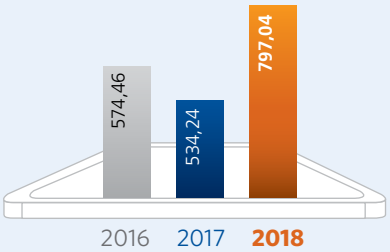

Volume transaksi trade finance **mencapai Rp797,04 triliun** meningkat **49,19%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp534,24 triliun

Volume transaksi *Remittance* **mencapai Rp1.238 triliun**, meningkat **49,70%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp827 triliun

Bisnis Internasional BRI terdiri dari *trade finance*, bank koresponden, remitansi, dan *money changer*. Secara operasional, keempat lini bisnis tersebut dikoordinasi oleh Divisi Bisnis Internasional di tingkat Kantor Pusat, di tingkat Kantor Wilayah dan didukung oleh Unit Kerja Operasional, termasuk unit kerja luar negeri BRI di New York, Cayman Islands, Singapura, Hong Kong dan Timor-Leste. Selain itu, BRI juga memiliki *Remittance Representative* untuk meningkatkan layanan bisnis remitansi di Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

PRODUK DAN JASA BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis Internasional BRI terdiri dari *trade finance*, bank koresponden, remitansi, dan *money changer*. Keunggulan Produk dan Jasa Bisnis Internasional BRI, antara lain:

Didukung Pekerja Profesional dan Tersertifikasi

Bisnis Internasional BRI didukung oleh pekerja yang profesional serta bersertifikasi internasional. Adapun sertifikasi internasional yang dimiliki antara lain *Certified Documentary Credit Specialist* (CDCS), *Certified Specialist for Demand Guarantee* (CSDG), dan *Certified International Trade Finance* (CITF) yang diterbitkan oleh *The London Institute of Banking & Finance* yang bekerja sama dengan *International Chamber of Commerce* (ICC) dan terus diperbarui berkala.

Bisnis Internasional

Didukung *Counterparts* dan Unit Kerja

Bisnis Internasional BRI didukung lebih dari 1.200 Bank Koresponden di seluruh belahan dunia. Selain itu bekerja sama dengan lebih dari 60 *Remittance Company* dan dukungan Unit Kerja seluruh Indonesia**.** Untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah akan mata uang asing, BRI juga menyediakan layanan jual beli mata uang asing dalam 22 jenis mata uang, melalui layanan yang tersedia unit kerja operasional di seluruh Indonesia dan telah terkoneksi secara *real time online*.

Trade Finance Solution

BRI *Trade Finance Solution* sebagai bentuk integrasi layanan perdagangan internasional maupun domestik diklasifikasikan menjadi *Trade Product, Trade Services,* dan *Trade Finance*. Adapun rincian terkait BRI *Trade Finance Solution* diuraikan sebagai berikut:

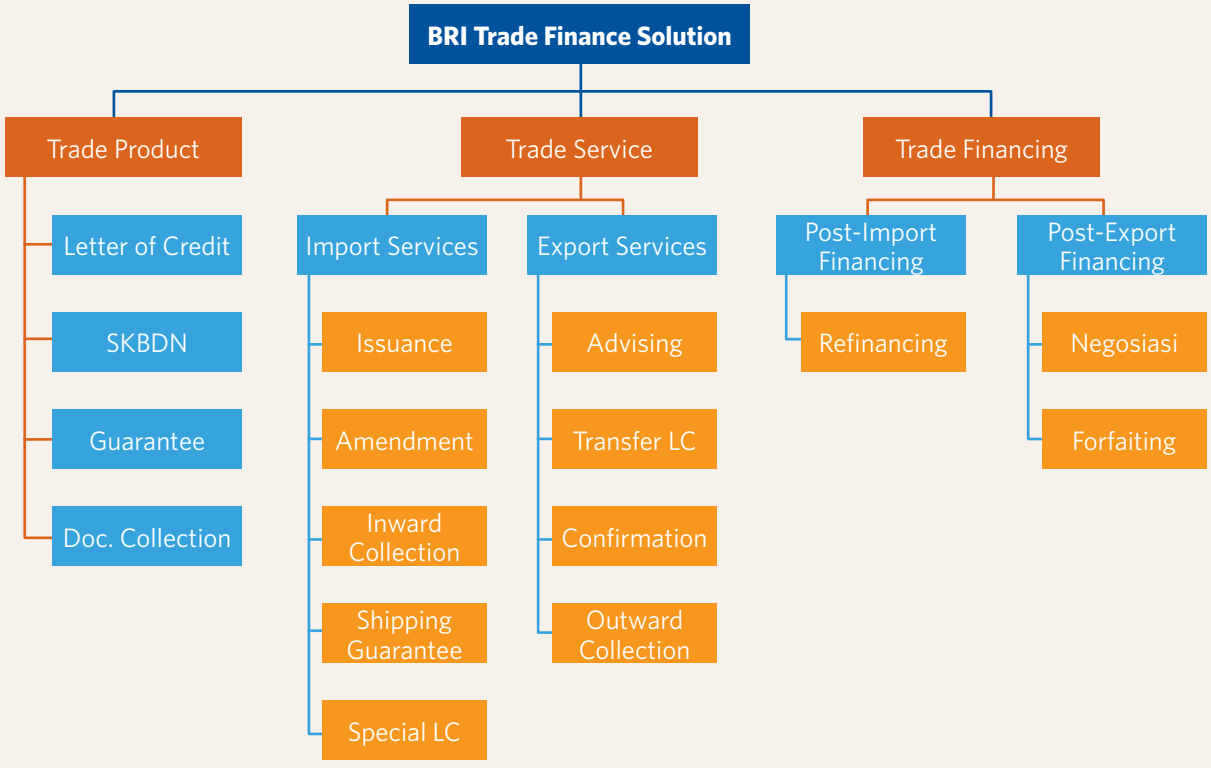

Bisnis Internasional

STRATEGI BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2018

Bisnis Internasional BRI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah yang semakin beragam dan dinamis. Selain itu, untuk meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan melalui volume transaksi baik *trade finance*, *remittance*, *money changer* maupun transaksi bank koresponden. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan bisnis internasional BRI pada tahun 2018 mengusung tema *Modernization International Business Services*. Semangat tema ini kemudian diterapkan dalam strategi sebagai berikut:

Peningkatan Daya Saing

- Meningkatkan keahlian, skill, dan kapabilitas pekerja terkait Bisnis Internasional
- Meningkatkan eksistensi dan jaringan BRI di luar negeri
- Meningkatkan *Brand Awareness*.

Pengembangan Produk

- Pengembangan layanan *Bundling* Produk *Trade Finance* kepada nasabah inti.
- Melakukan inovasi produk *trade finance* sesuai dengan perkembangan pasar

Peningkatan Kualitas Layanan Nasabah

- Mengoptimalkan *digital banking* dalam pelayanan *Trade Finance*
- Pemberian *reward* program untuk pekerja, *counterpart* dan nasabah

Optimalisasi Organisasi Bisnis Internasional

- Klasifikasi unit kerja berdasarkan potensi sebagai dasar penetapan KPI
- Pemetaan fungsi *relationship manager* dan efektivitas *monitoring* unit kerja luar negeri

Peningkatan Efisiensi Proses Bisnis

- Melakukan otomasi operasional transaksi *Correspondent Banking*
- Meningkatkan performa sistem Bisnis Internasional

KINERJA BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, kinerja keuangan dan kinerja operasional Bisnis Internasional menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja Keuangan

Volume transaksi *Trade Finance* meningkat sebesar 49,19% dari Rp534,24 triliun di tahun 2017 menjadi Rp797,04 triliun di tahun 2018. Peningkatan itu karena adanya transaksi Penerbitan dan Negosiasi *Letter of Credit* (L/C) dari nasabah-nasabah BUMN dan Korporasi. Peningkatan kinerja juga didapatkan dari transaksi *Supply Chain Financing* (SCF), dari nasabah-nasabah BUMN dan Korporasi yang mengalami kenaikan signifikan.

Volume transaksi *Money Changer* menurun sebesar 2,44% dari Rp19,27 triliun di tahun 2017 menjadi Rp18,80 triliun di 2018. Penurunan terjadi akibat adanya pembatasan transaksi mata uang Papua New Guinea Kina (PGK) dan adanya *force major* (bencana alam) yang terjadi sepanjang 2018 terutama di Lombok dan Palu. Sementara, volume transaksi Remitansi meningkat sebesar 49,70% dari Rp827 triliun di tahun 2017 menjadi Rp1.238 triliun di tahun 2018. Peningkatan transaksi terjadi karena perluasan jaringan kerjasama BRI di dalam maupun luar negeri. Volume Remitansi BRI paling banyak disumbangkan dari Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah (Saudi Arabia dan UAE).

Selain kenaikan volume transaksi, bisnis Bank Koresponden juga mencetak pencapaian yang sangat signifikan melalui peningkatan pendapatan sebesar 176,14% dari Rp62,14 miliar pada 2017 menjadi Rp171,61 miliar pada 2018.

Bisnis Internasional

Kinerja Keuangan Bisnis Internasional Tahun 2018

Keterangan	Tahun			Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2017-2018
Fee Based Income (Rp triliun)	1,05	1,03	1,59	54,82%

Volume Transaksi Bisnis Internasional Tahun 2018

(Rp triliun)

Keterangan	Tahun			Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2017-2018
Volume Transaksi *Trade Finance*	574,56	534,24	797,04	49,19%
Volume Transaksi *Remittance*	783	827	1.238	49,7%
Volume Transaksi *Money Changer*	13,24	19,27	18,80	-2,44%

Peningkatan pendapatan berdampak pada naiknya *fee based income* Bisnis Internasional sebesar 54,82%, dari Rp1,03 triliun di tahun 2017 menjadi Rp1,59 triliun di tahun 2018. Rinciannya *fee based income* dari bisnis *trade finance* sebesar Rp1,32 triliun, *fee based income* dari bisnis *remittance* mencapai Rp123,18 miliar, dan *fee based income* dari bisnis *money changer* mencapai Rp126,82 miliar.

Kinerja Non Keuangan

Bisnis Internasional mengambil beberapa kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja operasional. Berikut pencapaian pada tahun 2018:

1. Telah berhasil memiliki *Front End System* (Portal) *trade finance* yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah sehingga mengoptimalkan *digital banking* dalam pelayanan *Trade Finance*.
2. Berhasil melakukan *upgrade* sistem *Trade Finance Back End System* menjadi *latest version* sehingga meningkatkan performa dan keandalan sistem *Core* Bisnis Internasional.
3. BRI telah ikut bergabung dengan member SWIFT GPI.
4. Bisnis *money changer* telah menambah 4 *currencies* baru yang dapat dilayani di BRI *Money Changer* (VND, PHP, TWD, dan INR) sehingga jumlah mata uang yang dapat dilayani di BRI Money Changer menjadi 22 *currencies*.
5. Penambahan 8 *Counterpart* Luar Negeri baru dari Negara Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan UAE.
6. *Launching* KPI (Kartu Pekerja Indonesia) sehingga BRI bisa melayani segmen nasabah TKI dengan metode akusisi di dalam maupun di luar negeri.

DUKUNGAN KEPADA PROGRAM PEMERINTAH

Bisnis Internasional BRI selain berorientasi pada peningkatan profit, juga turut mendukung program-program Pemerintah. Sepanjang tahun 2018, bentuk dukungan yang diberikan antara lain:

- Memberikan literasi keuangan kepada calon pekerja migran pra-keberangkatan sekaligus pembuatan rekening BRI sebagai tabungan.
- BRI kembali melakukan pendistribusian dana *living cost* haji ke lebih dari 203 ribu jamaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.
- BRI *Money Changer* turut mendukung penyelenggaraan ajang internasional Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang dan Asian Para Games 2018 dengan membuka gerai di 32 titik lokasi.

Bisnis Internasional

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2019

Perkembangan bisnis global yang semakin kompleks menuntut perbankan untuk menyediakan produk dan layanan yang fleksibel, cepat, mudah, dan aman. Menghadapi perubahan yang semakin dinamis pada masa mendatang, BRI memiliki sejumlah program dan strategi pada tahun 2019, sebagai berikut:

Trade Finance

1. Pengembangan *Supply Chain Financing* yang didukung program asuransi.
2. Penyempurnaan produk *trade finance* yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan nasabah yang semakin berkembang.

Correspondent Banking

1. Meningkatkan status Kantor Perwakilan BRI di Hongkong yang masih berstatus *Representative Office* menjadi *Full Branch Office* pada tahun 2019.
2. Melakukan ekspansi bisnis ke beberapa negara Asia lainnya guna memperluas jaringan bisnis internasional.

Remitansi

1. Integrasi Bisnis BRIfast dengan unit kerja luar negeri
2. Pemasaran Kartu Pekerja Migran Indonesia (KPMI) untuk segmen nasabah pekerja migran.
3. Pemasaran dan integrasi *Cross Border Payment Solution* (CBPS) BRI.

Money Changer

1. Memperluas kerjasama *business-to-business* dan pembukaan gerai *offsite* BRI *Money Changer*.
2. Meluncurkan aplikasi money changer mobile untuk para dealer yang dapat di akses dimanapun dan kapanpun.
3. Pembentukan *vault* atau gudang tempat sortir dan penampungan *banknotes (Banknotes Processing Center)*.
4. Penambahan 2 mata uang asing yang dapat dilayani di BRI *Money Changer* sehingga jumlah mata uang yang dapat dilayani menjadi 24 *currencies*.

Bisnis Treasury

KEUNTUNGAN SPOT DAN DERIVATIF
(Rp miliar)

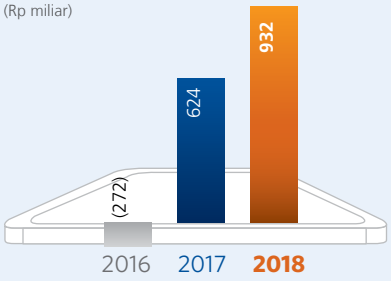

PENDAPATAN BUNGA AKTIVA PRODUKTIF NON KREDIT
(Rp triliun)

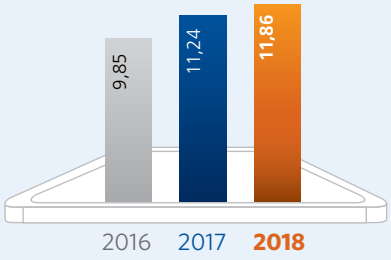

Bisnis *Treasury* meliputi bisnis dengan *counterparty* mencakup transaksi valuta asing, *money market*, dan *derivatif*. Penguatan Bisnis *Treasury* dilaksanakan oleh Divisi Bisnis *Treasury* yang memiliki 17 jaringan regional (Bisnis Internasional & *Treasury* Kantor wilayah BRI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

RINGKASAN

Keuntungan Spot dan Derivatif **mencapai Rp932 miliar** meningkat **33,03%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp624 miliar

Pendapatan bunga aktiva produktif non kredit **mencapai Rp11,86 triliun** meningkat **5,52%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11,24 triliun

STRATEGI BISNIS TREASURY TAHUN 2018

BRI terus mengembangkan bisnis *Treasury* yang didukung dengan teknologi terkini sebagai salah satu sumber *fee based income*. Adapun strategi Bisnis *Treasury* di Tahun 2018 antara lain:

Active Portfolio Management

Selama tahun 2018, Bisnis *Treasury* melakukan *active portfolio management* dengan mengoptimalkan *excess* likuiditas *switching low yield asset* ke *high yield asset* dengan mempertimbangkan potensi risiko.

Pendalaman Pasar Keuangan

Bisnis *Treasury* aktif melakukan pendalaman pasar keuangan dengan memperluas basis nasabah antara lain institusi keuangan baik Bank dan industri keuangan non Bank seperti perusahaan asuransi dan Dana Pensiun.

Pengembangan Teknologi

Dari sisi pengembangan teknologi, Bisnis *Treasury* telah melakukan implementasi BRIefx *Client* yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan valas. Selain itu, telah mengimplementasikan BRI *Swap Deposit* yang merupakan produk untuk memenuhi kebutuhan alternatif investasi nasabah.

Bisnis *Treasury*

KINERJA BISNIS TREASURY TAHUN 2018

Pengelolaan *Portfolio Banking* dan *Trading Book* yang optimal serta fokus terhadap pelayanan nasabah menjadi salah satu kunci tercapainya target Bisnis *Treasury*. Secara garis besar, pertumbuhan transaksi *Treasury* selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Volume transaksi surat berharga di pasar primer tumbuh 129,48%.
2. Volume transaksi surat berharga di pasar sekunder baik transaksi penjualan dan pembelian tumbuh 18,91%.
3. Volume transaksi foreign exchange untuk keperluan klien tumbuh sebesar 20,30%.

Aktiva produktif non kredit Bisnis *Treasury* meningkat sebesar 27,11% menjadi Rp347,84 triliun di tahun 2018 dari tahun 2017 yang sebesar Rp273,14 triliun. Peningkatan itu antara lain dari naiknya penempatan pada Bank Lain menjadi Rp28,37 triliun dan surat berharga menjadi sebesar Rp129,29 triliun. Selain itu, Bisnis *Treasury* juga mencatatkan pendapatan bunga non kredit sebesar Rp10,38 triliun.

(Rp juta)

Keterangan	2016	2017	2018	Pertumbuhan 2017-2018
Penempatan pada BI termasuk GWM	124.851.387	97.260.008	131.360.496	35,06%
Penempatan pada Bank Lain	16.442.192	16.783.506	28.378.628	69,09%
Tagihan Derivatif - Aset	93.649	145.928	469.342	221,63%
Surat Berharga	115.463.268	124.611.710	129.292.926	3,76%
Repo - Aset	7.358.032	12.200.619	36.703.287	200,83%
Reverse Repo	155.737	16.496.292	9.396.553	-43,04%
Tagihan Akseptasi - Aset	5.602.843	5.637.833	11.583.506	105,46%
Aktiva Produktif Non Kredit	**269.967.108**	**273.135.896**	**347.184.738**	**27,11%**

(Rp triliun)

Keterangan	2016	2017	2018	Pertumbuhan 2017-2018
Pendapatan Bunga Non Kredit	9,85	11,24	11,86	5,52%

Dengan pencapaian kinerja keuangan yang terus bertumbuh dan berbagai inisiatif strategis yang dilakukan, Kementerian Keuangan menetapkan BRI sebagai salah satu *Dealer* Utama terbaik.

DUKUNGAN KEPADA PROGRAM PEMERINTAH

BRI sebagai *Dealer* Utama ikut serta dalam kegiatan pendalaman pasar keuangan dengan melakukan pengelolaan *portfolio* yang optimal dan perluasan basis nasabah antara lain bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan aset manajemen.

BRI aktif melakukan quotasi harga jual-beli surat berharga dan transaksi Treasury lainnya yang kompetitif dan *up to date*. Luasnya jaringan pemasaran baik unit kerja di dalam negeri maupun luar negeri menjadi nilai tambah BRI dalam kegiatan tersebut. Pencapaian ini menunjukan BRI aktif dalam mendukung pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dukungan ini akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

BRI aktif berperan serta dalam kegiatan tender Surat Berharga Negara, terbukti pada ajang penghargaan bertajuk Dealer Utama 2017 yang digelar oleh Kementerian Keuangan RI dimana BRI berhasil memborong 3 penghargaan sekaligus yaitu sebagai Dealer Utama Terbaik tahun 2017, Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana tahun 2017, dan Peserta Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terbaik Kedua tahun 2017.

STRATEGI DAN RENCANA KERJA BISNIS TREASURY TAHUN 2019

Bisnis *Treasury* akan berfokus pada keseimbangan portfolio untuk mendukung kinerja Bank di tahun mendatang. Untuk itu, strategi yang akan dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat struktur pendanaan yang kuat dengan melakukan diversifikasi *funding*, salah satunya dengan menerbitkan *green bonds*.
2. Pengembangan produk treasury, antara lain *Currency Swap Deposit*, Produk *Hedging* Syariah atas nilai tukar, *Forward Rate Agreement*, dan *Overnight Index Swap*.
3. Optimalisasi *flow* transaksi *Treasury* melalui upaya intensifikasi *anchor client*, baik BUMN, non-BUMN, dan institusi pemerintah.
4. Berperan sebagai *Market Maker* dengan tetap aktif melakukan quotasi harga yang kompetitif dan *up to date* sehingga berdampak pada peningkatan transaksi *treasury*.

Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

FEE BASED JASA PENUNJANG PASAR MODAL
(Rp miliar)

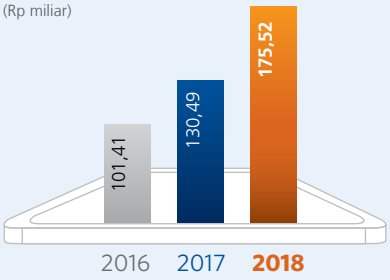

FEE BASED INCOME DPLK
(Rp miliar)

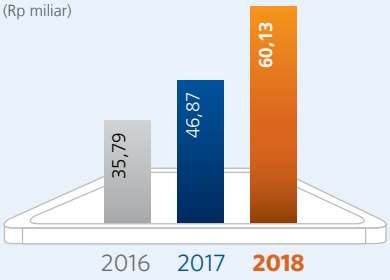

FEE BASED INCOME KUSTODIAN
(Rp miliar)

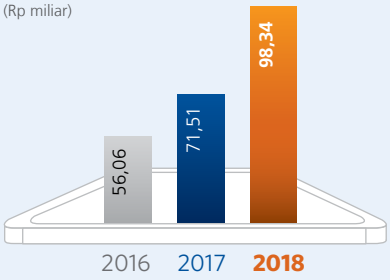

RINGKASAN

Fee Based Income Jasa Penunjang Pasar Modal **mencapai Rp175,52 miliar**, meningkat **34,49%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp130,5 miliar

Aset kelolaan Kustodian **mencapai Rp359,11 triliun**, meningkat **20,19%** dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp298,79 triliun

Jumlah Giro Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terdaftar **sebanyak 12.230 rekening**, meningkat **264%**

ASET KELOLAAN KUSTODIAN
(Rp triliun)

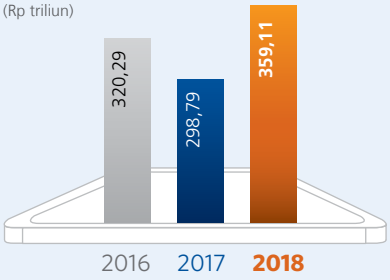

ASET KELOLAAN DPLK
(Rp miliar)

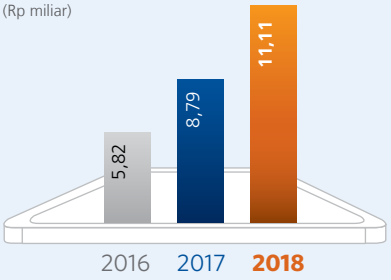

Layanan Jasa Penunjang Pasar Modal antara lain Jasa Wali Amanat, Kustodian, *Trust*, Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI), baik untuk nasabah korporasi maupun nasabah ritel.

STRATEGI BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2018

BRI telah mengembangkan bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal sebagai salah satu bagian memperdalam pasar keuangan serta meningkatkan *fee based income*. Strategi bisnis yang telah dilakukan pada tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

Penetrasi Pasar

a. Melakukan sosialisasi produk jasa penunjang pasar modal kepada seluruh unit kerja BRI.
b. Melakukan pemasaran produk DPLK kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
c. Melaksanakan resiprokal bisnis dengan *underwriter* pada saat pengadaan jasa *underwiter*.

Pengembangan Pasar

a. Melaksanakan Program Akuisisi Korporat dengan tambahan benefit asuransi.
b. Melaksanakan Program Desa Nabung Saham di tahun 2018 bekerja sama dengan BEI, KSEI, dan Perusahaan Efek.

Pengembangan Sistem

a. Melakukan *upgrading Custodian System*.
b. Digitalisasi layanan operasional lainnya seperti pengembangan sistem pembukaan RDN untuk transaksi jual-beli saham.
c. Pengembangan *website* DPLK BRI (http://dplk.bri.co.id) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin antusias dengan jasa pasar modal.

KINERJA BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, BRI terus meningkatkan kinerja Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal sebagai bagian dari upaya merealisasikan aspirasi menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia*. Pencapaian kinerja finansial dan non finansial dari Bisnis ini sesuai dengan yang ditargetkan.

Total *Fee Based Income* (FBI) sebesar Rp175,5 miliar di tahun 2018 atau meningkat 34,5% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp130,5 miliar. Secara rinci, perolehan FBI disumbang dari FBI DPLK sebesar Rp60,13 miliar, FBI Kustodian Rp98,34 miliar, dan FBI Wali Amanat Rp10,68 miliar.

(Rp miliar)

Keterangan				Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2017-2018
Fee Based Income DPLK	35,79	46,87	60,13	28,29%
Fee Based Income Kustodian	56,06	71,51	98,34	37,53%
Fee Based Income Trust	2,75	3,91	6,35	62,21%
Fee Based Income Wali Amanat	6,81	8,2	10,68	30,26%
Total *Fee Based Income*	101,41	130,49	175,52	34,49%

Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

Sementara untuk aset kelolaan Kustodian sebesar Rp359,11 triliun di tahun 2018, meningkat 20,19% dari tahun 2017 Rp298,79 triliun. Aset kelolaan DPLK mencapai Rp11,11 triliun, meningkat 26,39% dari tahun 2017 yang sebesar Rp8,79 triliun.

(Rp triliun)

Keterangan	2016	2017	2018	Pertumbuhan 2017-2018
Aset Kelolaan Kustodian	320,29	298,79	359,11	20,19%
Aset Kelolaan DPLK	5,82	8,79	11,11	26,39%

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Kinerja DPLK BRI yang mulai beroperasi sejak tahun 2006 terus bertumbuh sepanjang tahun 2018. Hal itu terlihat dari peningkatan aset kelolaan sebesar 26,39% menjadi Rp11,11 triliun. Peningkatan ini disebabkan antara lain naiknya kepesertaaan DPLK BRI. Sementara *Fee Based Income* (FBI) DPLK sebesar Rp60,13 miliar, meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp46,87 miliar.

Kinerja investasi DPLK BRI mencatatkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan (NAB/UP) masing-masing paket investasi menghasilkan imbal hasil sebesar 6,46% untuk DPLK BRI Pasar Uang, 9% untuk DPLK BRI Pendapatan Tetap, 3,59% untuk DPLK BRI Saham, 6,45% untuk DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan 6,28% untuk DPLK BRI Berimbang Syariah.

Kustodian

BRI merupakan Bank Kustodian pertama yang mengelola Efek Beragun Aset di Indonesia. Sepanjang tahun 2018, aset kelolaan kustodian BRI sebesar Rp359,11 triliun, meningkat 20,19% dibandingkan tahun 2017 Rp298,78 triliun. Dari pengelolaan aset tersebut, Kustodian BRI memperoleh *fee based income* sebesar Rp98,34 miliar, naik 37,52% dari tahun 2017 sebesar Rp71,51 miliar.

Trust

Bisnis *Trustee* BRI menghasilkan *fee based income* sebesar Rp3,33 miliar, turun 14,83% dibanding tahun 2017 sebesar Rp3,91 miliar.

Wali Amanat

Fee based income yang dihasilkan dari bisnis Wali Amanat sebesar Rp5,81 miliar, turun 29,15% dari tahun 2017 sebesar Rp8,2 miliar.

Rekening Dana Nasabah (RDN)

BRI turut berkontribusi dalam memajukan pasar modal di Indonesia antara lain dengan menyediakan layanan Giro Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk keperluan penyelesaian transaksi di pasar modal.

Pada tahun 2018, jumlah RDN yang terdaftar sebanyak 12.230 rekening meningkat 264% dibandingkan tahun 2017 yang sebanyak 3.360 rekening. Peningkatan jumlah rekening merupakan hasil dari perluasan kerja sama yang dilakukan BRI dengan perusahaan-perusahaan efek.

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMERINTAH

Pasar modal memiliki peran strategis dalam peningkatan perekonomian terutama di investasi portfolio. Pemerintah terus mengembangkan kinerja pasar modal baik dari sisi jumlah investor, jumlah anggota bursa maupun infrastruktur pendukung. BRI turut mendukung langkah pemerintah tersebut, antara lain dengan menjadi bank kustodian maupun penyediaan produk dan layanan pendukung pasar modal.

STRATEGI PENGEMBANGAN JASA PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2019

BRI akan fokus pada pengembangan produk dan perbaikan di bisnis jasa penunjang pasar modal pada masa mendatang. Strategi yang akan diimplementasikan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Jasa Penunjang Pasar Modal
   a. Melakukan *upgrade* Sistem DPLK (*Front End* sampai dengan *Back End System*)
   b. Pengembangan sistem dengan *financial technology company*
   c. Mengembangkan TCS *Management System* (*Front End* sampai dengan *Back End System*)
   d. Mengembangkan *Back Office Integration* dengan *Central Security Depository* untuk layanan jasa kustodian.

2. Pengembangan Produk
   Melakukan inovasi produk dan layanan DPLK sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui penambahan manfaat lainnya.

3. Peningkatan Pemasaran Produk dan Jasa Penunjang Pasar Modal, antara lain:
   a. Melakukan penetrasi market kepada target market yang spesifik seperti program akuisisi millenial dan program DPLK BRI Individu tambahan untuk pekerja BRI sebagai *captive market* DPLK BRI.
   b. Akuisisi nasabah baru melalui *joint marketing* dengan unit kerja BRI lain.
   c. Peningkatan *brand awareness* melalui media digital.
   d. Mendorong penjualan DPLK melalui seluruh unit kerja BRI dengan menyelenggarakan program penjualan khusus.
   e. Melakukan sosialisasi dan edukasi produk DPLK kepada pihak internal maupun eksternal BRI serta fokus pada sektor pekerja informal.
   f. Pemasaran jasa Wali Amanat melalui pihak Lembaga Penunjang Pasar Modal untuk melengkapi pemasaran langsung kepada emiten
   g. Melaksanakan Program Desa Nabung Saham bekerjasama dengan BEI, KSEI, dan Perusahaan-perusahaan Efek.
   h. Melaksanakan pengelolaan *Escrow Account* untuk beberapa *pipeline* dalam target bisnis.

Bisnis Entitas Anak

Outstanding Kredit, Piutang dan Pembiayaan Syariah Entitas Anak mencapai **Rp39,26 triliun**, meningkat **25,27%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp31,34 triliun

Simpanan Entitas Anak mencapai **Rp46,24 triliun**, meningkat **20,64%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp38,33 triliun

Profitabilitas Entitas Anak mencapai **Rp716,51 triliun**, meningkat **24,44%** dibanding tahun 2017 sebesar Rp575,81 triliun

KREDIT, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH ENTITAS ANAK
(Rp triliun)

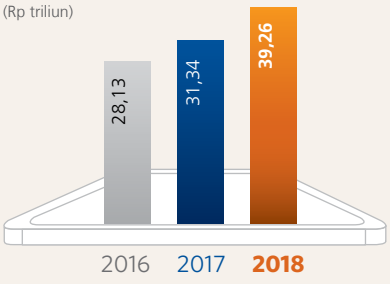

SIMPANAN ENTITAS ANAK
(Rp triliun)

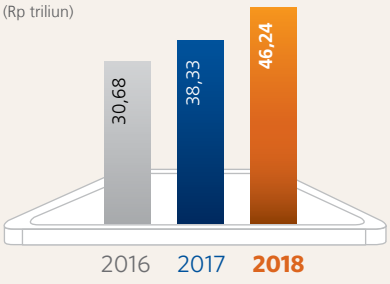

LABA SETELAH PAJAK ENTITAS ANAK
(Rp miliar)

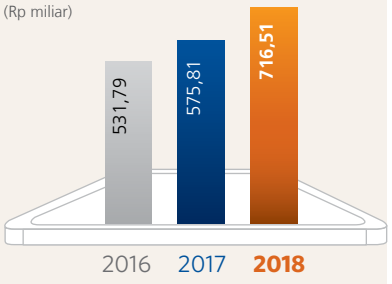

BRI adalah induk usaha dari kelompok perusahaan jasa keuangan yang terdiri dari:

1. PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah)
2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
3. BRI Remittance Company Ltd (BRI Remittance)
4. PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
5. PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
6. PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)
7. PT Danareksa Sekuritas

Pada tahun 2018, BRI telah melakukan akuisisi 2 perusahaan menjadi Perusahaan Anak BRI yaitu PT BRI Ventura Investama yang merupakan Perusahaan Modal Ventura dengan kepemilikan sebesar 97,61% dan PT Danareksa Sekuritas yang merupakan Perusahaan Efek dengan kepemilikan sebesar 67%. Di samping itu, BRI juga melakukan penyertaan saham kepada PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi dengan kepemilikan sebesar 35%. Penyertaan saham tersebut diharapkan dapat

Bisnis Entitas Anak

memberikan sinergi bisnis BRI Grup yang meliputi layanan perbankan konvensional dan syariah, layanan remittance, layanan asuransi jiwa, layanan pembiayaan, layanan pasar modal, dan layanan modal ventura.

Dengan demikian, Entitas Anak BRI semakin selaras memberikan layanan keuangan yang lengkap dan beragam sehingga BRI dapat mewujudkan *integrated financial solution* bagi nasabah.

Profitabilitas Bisnis Entitas Anak

Pada tahun 2018, segmen bisnis Entitas Anak BRI mencapai laba sebesar Rp 716,51 miliar, meningkat sebesar 24,44% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp575,81 miliar.

RINGKASAN

BRIsyariah membukukan Laba Bersih sebesar **Rp106,59** miliar atau **naik sebesar 5,45% YoY** dari tahun 2017 sebesar Rp101,09 miliar.

LABA BERSIH BRI SYARIAH
(Rp miliar)

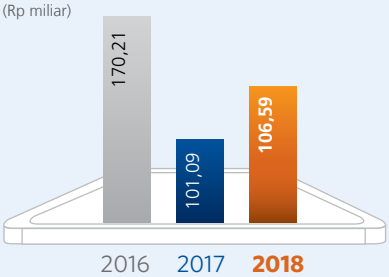

LABA BERSIH BRI AGRO
(Rp miliar)

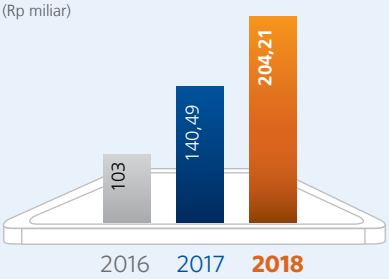

BRI Agro membukukan Laba Bersih sebesar **Rp204,21** miliar atau **naik sebesar 45,2% YoY** dari tahun 2017 sebesar Rp140,49 miliar.

LABA BERSIH BRI FINANCE
(Rp miliar)

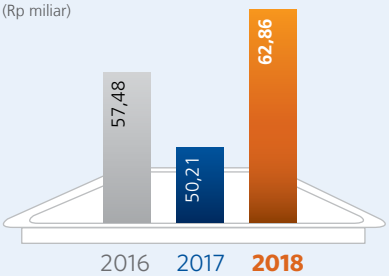

BRI Finance membukukan Laba Bersih sebesar **Rp62,86** miliar atau **meningkat 25,19%** dari tahun 2017 sebesar yang Rp50,21 miliar.

BRI Remittance membukukan Laba Bersih sebesar **Rp314,08** juta atau **naik sebesar 114,52% YoY** dari tahun 2017 sebesar Rp146,41 juta.

LABA BERSIH BRI REMITTANCE
(Rp juta)

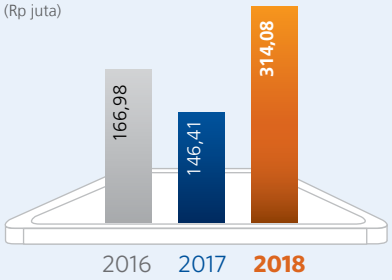

BRI Life membukukan Laba Bersih sebesar **Rp600,34** miliar atau **meningkat 82,91%** dari tahun 2017 yang sebesar Rp328,22 miliar.

LABA BERSIH BRI LIFE
(Rp miliar)

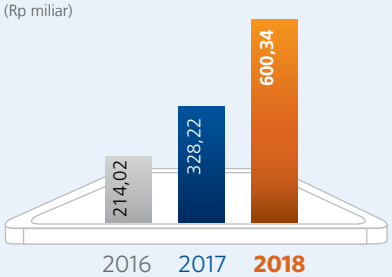

Bisnis Entitas Anak

PT BANK BRISYARIAH TBK (BRISYARIAH)

Ringkasan Kinerja BRIsyariah Tahun 2018

	2016	2017	2018*	Growth
Laba setelah Pajak	Rp170,21 miliar	Rp101,09 miliar	Rp106,59 miliar	5,44%
Total Aset	Rp27,69 triliun	Rp31,54 triliun	Rp37,93 triliun	20,26%
Total Pembiayaan	Rp17,66 triliun	Rp18,42 triliun	Rp21,86 triliun	18,68%
Total DPK	Rp22,05 triliun	Rp26,37 triliun	Rp28,86 triliun	9,44%

*Unaudited

BRIsyariah menunjukkan kinerja yang positif dengan peningkatan aset sebesar 20,26% YoY atau tumbuh sebesar Rp6,39 triliun dan laba tumbuh Rp5,5 miliar. Namun pencapaian kinerja yang baik tersebut tidak lepas dari tantangan yang dihadapi. Kinerja BRIsyariah masih mengalami tekanan pada kualitas kredit, sehingga BRIsyariah memilih untuk fokus pada pertumbuhan yang selektif dan mendorong perbaikan kualitas kredit.

Profil Perusahaan

PROFIL PERUSAHAAN (Identitas Perusahaan)	
Nama Perusahaan	PT Bank BRI Syariah Tbk
Alamat	Jln. Abdul Muis No. 2-4 Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160
No. Tlp	021-3450226/3450227
No. Fax	021-3518812/3441904
Website	www.brisyariah.co.id

Bisnis Entitas Anak

Sejarah pendirian PT Bank BRIsyariah Tbk (selanjutnya disebut BRIsyariah atau Bank) tidak terlepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRIsyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. BRIsyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menenteramkan. BRIsyariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRIsyariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRIsyariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses *rebranding* logo dilakukan, untuk menumbuhkan *brand equity* BRIsyariah sehingga semakin kuat, seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset. BRIsyariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan demi pengembangan terus dilakukan. Dibalik pengembangan-pengembangan tersebut, BRIsyariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRIsyariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2007
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta.

2008
- Bank Indonesia mengeluarkan izin usaha melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008.
- 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku.

2009
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 Tentang Penetapan Penggunaan izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah BRI Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank BRI Syariah.
- 1 Juli 2009 Grand Launching BRIsyariah oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

2010
- Peluncuran 7 Nilai Budaya Kerja BRIsyariah : PASTI OKE yaitu Profesional, Antusias, penghargaan SDM, Tawakal, Integritas, Orientasi bisnis dan Kepuasan pelanggan.
- *Live Core Banking System* SYIAR (*Syariah Integrated & Automated Realtime*) yang dilengkapi dengan aplikasi *electronic Financing*.
- *Originating System* (eFOS) dan *Management Information System* (MIS).

2011
- Implementasi Layanan Syariah Bank BRI Syariah di 18 Kantor Cabang BRI.

2012
- BRISyariah mengukuhkan diri sebagai bank syariah Pertama di dunia yang memiliki layanan *mobile banking* di 4 (empat) *market online* yaitu Blackberry, App World, Google Play, Apple Store dan Nokia Store.
- Peluncuran Tabungan Impian BRIsyariah.

Bisnis Entitas Anak

2013
- Rebranding Tabungan BRIsyariah iB menjadi Tabungan Faedah BRIsyariah iB.
- BRI Syariah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

2014
- Peluncuran internet banking BRIsyariah.
- Implementasi Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL) untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan secara cepat dan akurat.

2015
- BRIsyariah ditunjuk oleh OJK sebagai Indonesia *First Movers on Sustainable Banking*.
- BRIsyariah sebagai Bank Syariah Pertama di Indonesia yang meluncurkan Laku Pandai Syariah BRISSMART.
- BRIsyariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

2016
- BRIsyariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRIsyariah tahun 2016 untuk memperkuat permodalan.

2017
- Bank Syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 milar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah.
- Bekerjasama dalam penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk PNS dan swasta untuk pembiayaan KPR FLPP.
- Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

2018
- BRIsyariah menjadi Perusahaan Terbuka (*go public*) pada tanggal 9 Mei 2018.
- Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka dengan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta perubahan data perseroan (Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir) sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berturut-turut dengan nomor AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018, Nomor : AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018.
- Surat OJK Nomor S-37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran BRIsyariah menjadi Bank syariah pertama yang terjun ke lantai bursa (*listed*) dengan kode saham BRIS.
- IPO ini menjadi yang pertama bagi sebuah Bank Syariah dengan status perusahaan anak BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia.

Bisnis Entitas Anak

Susunan Manajemen

Per 31 Desember 2018, susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi BRIsyariah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama Independen	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	Eko Suwardi
Komisaris	Fahmi Subandi
Direksi	
Direktur Utama	Moch. Hadi Santoso
Direktur	Wildan
Direktur	Agus Katon Eko S
Direktur	Kokok Alun Akbar
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua DPS	KH. Didin Hafidhuddin
Anggota DPS	M. Gunawan Yasni

Tinjauan Keuangan Tahun 2018

Pada tahun 2018, BRIsyariah berhasil membukukan Aset sebesar Rp37,93 triliun atau naik 20,26% dari tahun 2017 sebesar Rp31,54 triliun. Pertumbuhan Aset pada tahun 2018 didorong oleh kenaikan Pembiayaan Syariah sebesar 18,68% atau mencapai Rp21,86 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp18,42 triliun. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada tahun 2018 juga meningkat 9,44% atau mencapai Rp28,86 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp26,37 triliun. BRIsyariah masih mampu membukukan laba bersih sebesar Rp106,59 miliar, yang meningkat 5,44% dari tahun 2017. Selain itu BRIsyariah juga memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang baik yaitu sebesar 29,69%.

Ringkasan peristiwa penting sepanjang tahun 2018 :

13 Februari 2018
BRIsyariah ajak para pelajar SDN 06 Makasar Jakarta Timur ikut serta di acara peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di *main hall* Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

13 Maret 2018
BRIsyariah menjalin Kerjasama dengan Pertamina

2 April 2018
BRIsyariah Jalin Kerjasama dengan RS Haji Jakarta. BRIsyariah menjadi satu-satunya bank syariah yang menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Haji Jakarta

3 April 2018
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Jasa dan Layanan Jaringan Perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank BRI Syariah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta

4 April 2018
Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Bilateral PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank BRI Syariah dengan PT Kimia Farma Tbk, Jakarta

5 April 2018
Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank BRIsyariah Tbk, Jakarta

17 April 2018
BRIsyariah Seluruh Indonesia siap melayani masyarakat yang ingin melunasi Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) 2018. Dalam waktu 1,5 hari, sudah lebih 11 ribu calon jamaah haji yang melakukan pelunasan biaya pelaksanaan ibadah haji melalui BRIsyariah

18 April 2018
BRIsyariah mengadakan acara Temu Calon Investor atau *Investor Gathering* di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta

Bisnis Entitas Anak

2 - 4 Mei 2018
BRIsyariah melakukan masa penawaran umum untuk publik yang berlangsung pada 2 - 4 Mei 2018 bertempat di lapangan olah raga Bank BRI, Sudirman, Jakarta. Total saham yang ditawarkan BRIsyariah kepada masyarakat dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 lembar saham

9 Mei 2018
BRIsyariah menjadi bank syariah pertama yang terjun ke lantai bursa (listed) dengan kode saham BRIS. IPO ini menjadi yang pertama bagi bank syariah dengan status perusahaan anak BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia

11 Mei 2018
Kuliah Umum Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk sekaligus pemberian CSR beasiswa Berfaedah bagi Mahasiswa IAIN Ponorogo berprestasi dari keluarga tidak mampu. Ponorogo

11 Mei 2018
BRIsyariah salurkan CSR penanaman pohon klengkeng di Kampung *Down Syndrome* Kabupaten Ponorogo

28 Mei 2018
BRIsyariah dukung pembayaran zakat di Istana Negara RI melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jakarta

31 Mei 2018
BRIsyariah dan tujuh perbankan nasional lainnya bersama WWF Indonesia membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Delapan bank ini tercatat sebagai penggerak pertama dalam bidang *sustainable banking*. Inisiatif keuangan berkelanjutan merupakan implementasi dari praktik keuangan berkelanjutan yang inklusif pada sektor jasa keuangan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari proyek pertama yaitu *first step to sustainable bank* yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015 lalu.

9 Agustus 2018
BRIsyariah dan Grab Jalin Kerjasama Pembiayaan bagi Merchant Grab Food di Surabaya

9-10 Agustus 2018
BRIsyariah luncurkan Program Semarak Haji dan Umrah 2018 di Cito Mall Surabaya, 9 - 10 Agustus 2018. Dalam program yang didukung oleh BRIlife dan BRINS ini, BRIsyariah menggandeng lima travel haji khusus dan umrah terpilih. Kelima travel tersebut adalah Wahana, Aerohajj, Sahid Tour, Al Qadri dan Musfiratur.

28 Agustus 2018
BRIsyariah bersama tujuh bank pemerintah lainnya melakukan penandatanganan kerjasama MoU implementasi *e-court* dengan Mahkamah Agung RI di Jakarta

5 September 2018
Ketua DPS BRIsyariah Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MSc. menyampaikan *sharing session* mengenai Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah di Masa Depan bagi seluruh pegawai milenial Elnusa di acara Elnusa Syariah Expo di Graha Elnusa Jakarta

6 September 2018
BRIsyariah tawarkan produk digital perbankan syariah bagi seluruh pegawai Elnusa di event Elnusa Syariah Expo di Graha Elnusa, Jakarta

7 September 2018
Penerimaan Award dari BAZNAS sebagai UPZ (Unit Penghimpun Zakat) Terbaik 2018 oleh Bapak Agus Katon Eko S

15 September 2018
BRIsyariah berpartisipasi di event Festival Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan turut mengkampanyekan penukaran kartu ATM BRIsyariah berlogo GPN kepada masyarakat Cilegon, Banten

15 September 2018
BRIsyariah berpartisipasi dalam event #PantangPlastik International Coastal Cleanup Day 2018 yang digagas Greenpeace di Tangerang, Banten

Bisnis Entitas Anak

16 September 2018
BRIsyariah turut mendukung program Bank Indonesia dan berpartisipasi dalam kampanye Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diselenggarakan di Jambi

6 Oktober 2018
DPS BRIsyariah M. Gunawan Yasni hadir dan memberikan souvenir kepada nasabah milenial yang membuka tabungan di booth BRIsyariah pada Expo Perbankan Syariah, iB Vaganza yang digagas oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) di Blok M Square, Jakarta

7 Oktober 2018
Pasca gempa dan tsunami Palu, BRIsyariah bekerjasama dengan YBM BRI gelar bakti sosial faedah kesehatan bagi korban bencana alam gempa bumi di Palu - Donggala, Sulawesi Tengah

10 November 2018
Penyerahan Dana CSR FAEDAH Kesehatan Dalam Rangka Hari Pahlawan Bekerjasama dengan Kodam Jaya/ Jayakarta – Jakarta Timur

17 November 2018
Milad 10 Tahun BRIsyariah luncurkan buku Satu Dasawarsa

17 November 2018
Milad 10 Tahun BRIsyariah luncurkan inovasi Produk Uang Elektronik BRIZZI BRIS (Co Branding), New BRISSMART dan kartu ATM Platinum dan Gold BRIsyariah berlogo GPN.

14 Desember 2018
BRIsyariah menjadi satu-satunya bank syariah yang menjadi rekanan PT PLN (Persero) Tbk dalam penerbitan bank garansi. Sebelumnya BRsyariah juga telah menjalin kerjasama transaksi keuangan dengan PLN dalam hal pembayaran PPOB transaksi *cashless*.

18 Desember 2018
Penandatanganan MOU Program e-samsat Kaltim antara BRIsyariah dengan Tim Pembina Samsat Kaltim di Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

18 Desember 2018
Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek Sindikasi antara BRIsyariah dengan PT Angkasa Pura I (Persero) di Jakarta

21 Desember 2018
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional BRIsyariah dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Mitra Penyalur KPR Sejahtera FLPP Tahun 2019.

28 Desember 2018
BRIsyariah gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ubah susunan pengurus perseroan.

Bisnis Entitas Anak

Strategi Pengembangan Bisnis tahun 2019

Pada Tahun 2019 PT Bank BRI Syariah, Tbk. memiliki arsitektur pertumbuhan yang terdiri dari 7 fondasi dan 3 pilar untuk menjadi **"Leading Sharia Bank in Indonesia".** Adapun **7 fondasi** tersebut yaitu:

1. Inovasi melalui riset pengembangan, penyederhanaan produk, dan proses bisnis.
2. Peningkatan Dana Pihak Ketiga yang berfokus pada CASA.
3. Ekspansi jaringan dengan pembukaan serta pelatihan Kantor Layanan Syariah (KLS) dan *Share Office* dengan BRI.
4. Membangun *Customer Experience* Melalui *Digital Banking*.
5. Meningkatkan *Brand Awareness* dan *Marketing Campaign*.
6. Sinergi dengan BRI untuk menetapkan model Tata Kelola dan kerangka *Performance Management*.
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani untuk Mewujudkan Sumber Daya Insani Berkompeten, Profesional dan Berintegritas.

Sedangkan untuk **3 pilar** yaitu:

1. Memimpin di segmen Retail-Consumer.
2. Memanfaatkan nasabah *Commercial* BRI.
3. Mengembangkan Bisnis Retail-SME, Retail-Linkage, serta mengembangkan layanan Bisnis Retail-Mikro Berbasis Digital.

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK

Ringkasan Kinerja BRI Agro Tahun 2018

	2016	2017	2018*	Growth
Total Aset	Rp11,38 triliun	Rp16,33 triliun	Rp23,33 triliun	42,87%
Total Kredit yang Disalurkan	Rp8,18 triliun	Rp10,98 triliun	Rp15,67 triliun	42,71%
Total Simpanan (DPK)	Rp9,22 triliun	Rp12,42 triliun	Rp18,07 triliun	45,49%
Laba Setelah Pajak	Rp103 miliar	Rp140,49 miliar	Rp204,21 miliar	45,2%

*Unaudited

Profil Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) adalah salah satu bank umum devisa nasional yang mempunyai visi menjadi Bank dengan layanan terbaik dan fokus di sektor agrobisnis, seperti perkebunan, perikanan, peternakan dan pengolahan produk terkait.

Bank BRI Agro didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) pada 27 September 1989 dengan nama PT Bank Agroniaga, dengan fokus pada pembiayaan di sektor agribisnis. Di tahun 2003, PT Bank Agroniaga menjadi perusahaan publik berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 tertanggal 30 Juni 2003 sehingga namanya berubah menjadi PT Bank Agroniaga Tbk dengan kode perdagangan AGRO, dan pada tahun 2006 berhasil meningkatkan status sebagai Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/Kep.GBI/2006 tertanggal 8 Mei 2006.

Pada tanggal 3 Maret 2011, BRI mengakuisisi kepemilikan saham Bank Agro dan secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 88,65%. Pasca proses akuisisi, pada 10 Oktober 2012, BRI mengukuhkan sinergi dengan Bank Agro dan melakukan pergantian nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk disingkat BRI Agro. Sampai dengan 31 Desember 2018, BRI Agro merupakan entitas anak BRI dengan kepemilikan saham mayoritas oleh

Bisnis Entitas Anak

BRI sebesar 87,10%. Sementara 6,32% dimiliki oleh Dana Pensiun Perkebunan dan 6,58% dimiliki oleh publik.

Dengan mengusung visi untuk mewujudkan Bank Komersial terkemuka yang fokus pada sektor pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis di Indonesia, BRI Agro memiliki misi sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik pada segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama sektor agribisnis untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Memenuhi kebutuhan pokok jasa dan layanan perbankan yang berkualitas, didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
3. Memberikan manfaat yang optimal bagi para stakeholder

Sampai dengan tahun 2018, BRI Agro memiliki jaringan operasi sebanyak 18 Kantor Cabang dan 20 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Medan, Rantau Prapat, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Balikpapan, Pontianak dan Makassar. Disamping itu BRI Agro juga memiliki 4 Kantor Kas.

Di tahun 2018, BRI Agro memiliki total sumber daya manusia sebanyak 729 orang dengan latar belakang beragam disiplin ilmu yang relevan dalam mendukung kegiatan utama perusahaan.

Susunan Manajemen

Dalam melaksanakan kegiatannya, BRI Agro sampai dengan akhir tahun 2018 dipimpin oleh 4 orang anggota Direksi, serta 3 orang Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Jabatan	**Nama**	**Jabatan**	**Nama**
Plt. Komisaris Utama/Independen	: Heru Sukanto	Direktur Utama	: Agus Noorsanto
Komisaris Independen	: Anna Maria Tjiadarma	Direktur	: Ebeneser Girsang
Komisaris	: Edwind Sinaga*)	Direktur	: Herry Prayudi
		Direktur	: Bambang Krisminarno

Keterangan :
*) Dinyatakan efektif setelah lulus *fit & proper test* OJK

Tinjauan Keuangan Tahun 2018

Pada tahun 2018, BRI Agro membukukan kinerja yang menggembirakan. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif dan sektor agribisnis yang menurun, BRI Agro mampu membukukan peningkatan aset sebesar 42,87% dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar Rp16,33 triliun menjadi Rp23,33 triliun. Kredit yang disalurkan BRI Agro juga meningkat 42,71% sehingga mencapai Rp15,67 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh keberhasilan penghimpunan dana pihak ketiga yang tumbuh 45,49% mencapai Rp18,07 triliun. Di tahun 2018, BRI Agro mampu membukukan peningkatan laba bersih setelah pajak sebesar 45,2% menjadi Rp204,21 miliar.

Dengan peningkatan laba tersebut, BRI Agro mampu mempertahankan ROA pada level 1,54%. Mampu menjaga rasio CAR-nya pada posisi yang cukup tinggi 28,34% jauh diatas kebutuhan minimal modal sesuai ketentuan regulator, sedangkan tingkat LDR berhasil dijaga pada level 86,72%.

Bisnis Entitas Anak

Peristiwa Penting dan Strategi Pengembangan Tahun 2018

Januari 2018
Pada bulan Januari 2018, BRI Agro membuka Kantor Cabang Pembantu Harapan Indah

April 2018
Pada bulan April 2018 BRI Agro melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mei 2018
Pada bulan Mei 2018, BRI Agro Relokasi KCP Cikditiro ke Tebet

Juni 2018
RUPS Luar Biasa BRI Agro pada bulan Juni 2018 dengan agenda *Right Issue* / Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII BRI Agro. Pada bulan Juni 2018, BRI Agro melakukan penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar Rp 1,5 triliun

Juli 2018
Pada bulan Juli 2018, BRI Agro melakukan *Public Expose* kinerja BRI Agro Triwulan II 2018

Agustus 2018
Pada bulan Agustus 2018, BRI Agro melakukan *Investor Summit*

September 2018
Pada bulan September 2018, melakukan HUT ke 29

Oktober 2018
Pada bulan Oktober 2018, diselenggarakan peringatan Puncak HUT BRI Agro ke 29 sekaligus peluncuran produk Internet Banking BRI Agro, *Co-Branding* BRIZZI, Prime Card

Strategi Pengembangan Bisnis tahun 2019

Strategi pengembangan BRI Agro tahun 2019 merupakan bagian dari strategi pengembangan jangka panjang yang disusun secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi BRI Agro "Menjadi Bank Dengan Layanan Terbaik Dan Fokus di Sektor Agribisnis". Strategi pengembangan BRI Agro di Tahun 2019, difokuskan pada dua hal yaitu peningkatan layanan kepada nasabah berbasis pada Teknologi Informasi dan membangun kapasitas untuk mendukung pengembangan *Agri Sector Solution* dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengelola usaha perbankan secara profesional dengan *business objective* yang jelas dan terarah sesuai karakter dan budaya perusahaan yang kokoh, efektif dan efisien guna mencapai tingkat rentabilitas yang optimal serta peningkatan daya saing secara sehat.
2. Memperkuat *traditional business model* dalam pembiayaan agribisnis baik segmen ritel maupun korporasi.
3. Menyusun *agri sector spesific solution* untuk menjadi bank spesialis dan terbaik di bidang agribisnis.
4. Bermitra dengan perusahaan dan *business agent* untuk memberikan referensi nasabah yang memiliki potensi di bidang agribisnis.
5. Mengembangkan *Digital Ecosystem* bagi perusahaan dan *supplier* yang bergerak di sektor agribisnis dengan menggunakan platform berupa aplikasi sebagai medianya.
6. Mengembangkan *Center of Excellence* untuk melakukan riset pada sektor agribisnis, dengan tujuan untuk dapat menyediakan data dan informasi bagi para pelaku di sektor agribisnis.
7. Mengembangkan layanan perbankan berbasis teknologi (Digital Banking) untuk fungsi *funding* dan *lending* sebagai solusi atas keterbatasan jaringan unit kerja.
8. Meningkatkan porsi segmen agribisnis pada portofolio kredit yang diberikan.
9. Bersinergi dengan BRI *Group* agar dapat menjangkau dan melayani nasabah dengan cakupan yang lebih luas.

Bisnis Entitas Anak

BRI REMITTANCE COMPANY LTD. (BRI REMITTANCE)

Ringkasan Kinerja BRI Remittance Tahun 2018

	2016	2017	2018*	Growth
Aset	Rp5,95 miliar	Rp8,37 miliar	Rp6,87 miliar	-17,92%
Laba Rugi	Rp166,98 juta	Rp146,41 juta	Rp314,08 juta	114,52%
Nominal Transaksi	Rp282,54 miliar	Rp494,77 miliar	Rp396,53 miliar	80,14%
Jumlah Transaksi	70.920	96.309	103.680	7,65%

*Unaudited

Profil Perusahaan

Sebelumnya perusahaan bernama BRingin Remittance Company, karena saham dimiliki oleh PT.Bringin Jiwa Sejahtera (BJS), kemudian dalam perkembangannya pada Bulan Oktober Tahun 2012 kepemilikan saham BJS di BRIngin Remittance diambil alih 100% oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sehingga nama perusahaan berubah menjadi BRI Remittance Company Ltd.

Sesuai dengan License No. 12-08-00742 yang diperoleh dari Hong Kong Customs & Excise Department, BRI Remittance Company Ltd adalah badan usaha yang diijinkan melaksanakan bisnis dalam kriteria *money service* (*money service operator*) secara khusus yaitu bidang bisnis remitansi (pengiriman uang) dari Hong Kong ke Indonesia. BRI Remittance Company saat ini melayani kebutuhan transaksi keuangan (menabung dan pengiriman uang) lebih dari 60.000 nasabah Bank Rakyat Indonesia yang umumnya bekerja sebagai *domestic worker* dan berdomisili di Hong Kong.

Sampai dengan saat ini BRI Remittance memiliki 4 kantor Cabang yang tersebar di berbagai wilayah potensial domisili Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong sebagai berikut:

No.	Lokasi Kantor Cabang	Alamat
1.	Causeway Bay (Main Branch)	Flat 22 G/F Bayview 33 Moreton Terrace Causeway Bay, Hongkong
2.	Yen Long	Shop 25 1/F Hop Yick Building
3.	Tsuen Wan	Shop 214 2/F Lik Sang Plaza
4.	Mong Kok	137 Sai Yee Street Mongkok

Susunan Manajemen BRI Remittance

BRI Remittance Hong Kong dipimpin oleh 1 (satu) orang *Executive Director* dan 1 (satu) orang *Non-Executive Director,* yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Gigieh Perkasa	*Executive Director*
2.	Roby Firmansjah Sastraatmadja	*Non - Executive Director*

Tinjauan Kinerja Tahun 2018

a. Laba BRI Remittance tahun 2018 sebesar HKD 162,410, meningkat sebesar [93%] dibandingkan tahun 2017 sebesar HKD 84,328.Terdapat beberapa faktor penting yang mendukung peningkatan jumlah laba tersebut, pertama peningkatan jumlah transaksi *remittance* yang didukung oleh relokasi kantor cabang di lokasi yang lebih strategis serta infrastruktur layanan yang semakin baik, kedua dengan dapat digunakannya mesin EDC sangat membantu layanan nasabah yang ingin melakukan transfer, dari layanan transfer ini menghasilkan pendapatan *non remittance* yang sangat baik.

b. Total Aset BRI Remittance tahun 2018 sebesar HKD 3,738,434, mengalami penurunan sebesar [16%] dibandingkan tahun 2017 yang sebesar HKD 5,024,372 yang disebabkan penurunan jumlah Piutang karena hampir seluruh transaksi remitansi yang belum valid telah dapat diverifikasi dan diproses transaksinya.

c. Jumlah Transaksi *Remittance* di BRI Remittance adalah sebesar 103,680 transaksi sampai dengan akhir tahun 2018, meningkat sebesar 8% dibandingkan tahun 2017 sebesar 96,309 transaksi.

Peristiwa Penting dan Strategi Tahun 2018

a. Memulai proses penggantian *core system* BRI Remittance

Manajemen BRI remittance menilai bahwa *core system* yang selama ini digunakan sudah tidak dapat mendukung upaya ekspansi bisnis perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan *core system* yang baru selain akan terhubung secara *host to host* dengan *system* BRIfast *remittance* sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara *real time*, penggantian *core system* juga akan mendukung pengembangan BRI Remittance mobile apps. Selain memfasilitasi transaksi *core system* BRI Remittance yang baru ini juga akan menyediakan fungsi Sistem Informasi manajemen dan SDM.

b. Melengkapi infrastruktur kantor dengan mesion Kiosk

Dengan mesin kiosk (*touch screen*) diharapkan dapat membantu layanan nasabah baik untuk proses pembukaan rekening maupun layanan *remittance* tanpa melalui teller

c. Melakukan penggantian website BRI Remittance dan membuat domain email korporasi

Manajemen memandang penting membuat *website* resmi perusahaan yang *representative*, selain sebagai media komunikasi dan *contact point* nasabah, *website* yang baik sangat penting karena menjadi review lembaga otoritas serta juga dapat menjadi rujukan *counterpart* yang ingin bekerja sama dengan BRI Remittance. *Website* BRI Remittance dapat diakses melalui alamat *website* www.brchk.com. Selain website saat ini BRI remittance juga telah memiliki domain alamat *email* korporasi dan tidak lagi menggunakan alamat *email* publik, sehingga menunjang *image* sebagai perusahaan yang bonafide.

Strategi Pengembangan Tahun 2019

Di tahun 2019, BRI Remittance akan fokus pada peningkatan transaksi remittance dengan beberapa strategi sebagai berikut :

a. Menyelesaikan penggantian *core system* secara keseluruhan.

b. Fokus pada pemasaran menggunakan *mobile apps*

c. Mencari sumber pendapatan dari layanan non remittance.

d. Melaksanakan *cross selling* produk Perusahaan Induk.

Bisnis Entitas Anak

PT ASURANSI BRI LIFE (BRI LIFE)

Ringkasan Kinerja BRI Life Tahun 2018

	2016	2017	2018	Growth
Laba Bersih	Rp214,02 miliar	Rp328,22 miliar	Rp600,34 miliar	82,91%
Aset	Rp6,18 triliun	Rp8,16 triliun	Rp9,38 triliun	14,95%
Ekuitas	Rp1,6 triliun	Rp2,2 triliun	Rp2,23 triliun	6,07%
Premi Netto	Rp2,48 triliun	Rp3,79 triliun	Rp4,23 triliun	11,39%
Hasil Investasi	Rp480,15 miliar	Rp567,99 miliar	Rp473,56 miliar	-16,63%

Profil Perusahaan

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) merupakan salah satu entitas anak perusahaan Bank BRI yang bergerak di bidang asuransi jiwa, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 91%.

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) yang semula bernama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1987 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuat oleh Notaris Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 181/ KM.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

Pada akhir Desember 2015, telah dilakukan akuisisi atas PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 91% dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Asuransi BRI Life (BRI Life).

Pengambilalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHUAH.01.03-0000524 tanggal 06 Januari 2016. Sampai tahun 2015 jumlah kantor penjualan telah mencapai 41 kantor penjualan konvensional dan 11 kantor penjualan syariah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia antara lain: Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Kediri, Jember, Sidoarjo, Malang, Denpasar, Gianyar, Lampung, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Batam, Makassar, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Balikpapan dan Banjarmasin, sedangkan untuk kantor pelayanan (SCO) terdapat di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Malang.

Pada tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Akta Notaris Nomor 31, terdapat perubahan Perseroan dimana sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera berubah menjadi PT Asuransi BRI Life. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa PT Asuransi BRI Life merupakan anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan tersebut tertuang dalam Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai Nama Perseroan (dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life), Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, Perubahan Seri Saham, serta perubahan pada pasal-pasal yang lain. Perubahan akta ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU0004875. AH.01.02 tanggal 27 Februari 2017.

Memasuki usia 31 tahun, kiprah BRI Life semakin dikenal luas sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional yang telah melayani lebih dari 9,2 juta nasabah melalui program-program asuransi unggulan yang bermanfaat dan menguntungkan. BRI Life juga didukung dengan beragam produk asuransi BRI Life yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi produk: AJK, Individu, Korporasi, Syariah, Bancassurance dan Mikro.

Susunan Manajemen BRI Life

Berdasarkan Akta Notaris Erni Rohaini, SH, Nomor 1 Tanggal 02 Oktober 2018 dan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH nomor 47 tanggal 20 maret 2017 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Asuransi BRI Life, ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Tri Wintarto	Komisaris Utama
Siswarin Dwi Hendarsapti	Komisaris
Mulabasa Hutabarat	Komisaris Independen
M. Rizqi R. Nasution	Komisaris Independen
Sapto Haryono Wahyu	Komisaris

Dewan Direksi	
Gatot Mardiwasisto Trisnadi	Direktur Utama
Dany Cahya Rukmana	Direktur Keuangan, Investasi, dan IT.
Khairi Setiawan	Direktur MSDM dan Kepatuhan
Ansar Arifin	Direktur Teknik dan Operasional
Anik Hidayati	Direktur Pemasaran dan Bisnis Asuransi Syariah
Sugeng Sudibjo	Direktur Bisnis Korporasi

Dewan Pengawas Syariah	
Moh. Hidayat	Dewan Pengawas Syariah
Agus Haryadi	Dewan Pengawas Syariah
Siti Haniatunnisa	Dewan Pengawas Syariah

Tinjauan Keuangan Tahun 2018

Pada tahun 2018 BRI Life membuku Aset sebesar Rp9,38 triliun atau tumbuh 14,95% dari tahun 2017 yang sebesar Rp 8,16 triliun. BRI Life juga membukukan laba bersih sebesar Rp600,34 miliar meningkat sebesar 82,91% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp328,22 miliar. Peningkatan Laba didukung oleh peningkatan Pendapatan Premi Netto sebesar 11,39% atau menjadi sebesar Rp4,23 triliun dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp3,79 triliun.

Bisnis Entitas Anak

Dengan Laba dan Aset tersebut, maka ROA dan ROE BRI Life tahun 2018 masing-masing 6,86% dan 29,78%. Rasio tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 4,61% untuk ROA dan 17,53% untuk ROE. Ekuitas tahun 2018 juga meningkat sebesar 6,07% dari realisasi tahun 2017 dari Rp2,10 triliun menjadi Rp2,23 triliun.

Peristiwa Penting dan Strategi Pengembangan Tahun 2018

BRI Life terus mengembangkan inovasi produk dimana telah meluncurkan 16 (enam belas) produk baru yang diterbitkan untuk kanal distribusi *In-Branch Sales Bancassurance* dan distribusi *Agency* (Konvensional & Syariah). Berbagai upaya dan inovasi dilakukan BRI Life untuk mempercepat laju pencapaian target perusahaan, diantaranya semakin disempurnakannya layanan berbasis digital bagi nasabah, mulai dari awal pembelian hingga *after sales service*.

Melalui penjualan asuransi mikro, BRI Life akan tetap bersinergi dengan induk perusahaan dengan fokus menggarap kanal distribusi pemasaran Bancassurance. Untuk mendukung tujuan tersebut, BRI Life mengimplementasikan berbagai Strategi Inisiatif yang fokus terhadap pengembangan kanal Distribusi Bancassurance, Bisnis Affinity, Bisnis Korporasi dan Bisnis *Agency* dengan menargetkan peningkatan kualitas channel distribution dan sales force melalui pengembangan IT secara terintegrasi. Adapun hal-hal yang telah dilakukan selama 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Manajemen dan Komisaris.
2. Sinergi dengan perusahaan induk melalui Likuidasi DPLK Bringin Jiwa Sejahtera, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-95/D.05/2018 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Jiwa Sejahtera.
3. Restrukturisasi Sales Management (Target, Evaluasi dan Remunerasi).
4. Remapping Tenaga Penjualan pada kanal Distribusi Bancassurance (BFA, BAM & BRH).
5. Launching aplikasi Mylife yang memungkinkan seluruh pekerja dapat berpartisipasi dalam penjualan produk produk asuransi mikro.
6. Launching Penjualan Asuransi Mikro melalui Digital Marketplace (Gofit, Pasarpolis, OY, FASTPAY, Tokopedia & Gojek).
7. Launching E-learning untuk tenaga penjual melalui Myclass.
8. Launching AJKO gen 2 untuk produk AJK.
9. Penataan ulang tugas & fungsi kantor SCO dengan pemanfaatan jaringan BRI.

Strategi Pengembangan Tahun 2019

Strategi Produk

Pada tahun 2019, BRI Life akan menjalankan inisiatif strategi produk pada saluran pemasaran sebagai berikut:

1. Bisnis Referensi
   Strategi produk untuk saluran bisnis Referensi pada tahun 2019 meliputi:
   - Aplikasi My Referral
   - Produk Davestera, UL Hybrid, Medicare Cashless, Lentera
   - Corporate Bancassurance Sales (CBS)
2. Bisnis Korporasi
   Strategi produk untuk saluran bisnis Referensi pada tahun 2019 meliputi peluncuran produk Family Plan.
3. Bisnis Agency
   Pada tahun 2019, saluran Bisnis Agency akan menuju pada General Agency.
4. Bisnis Distribusi
   - Aplikasi My Life sebagai tools penjualan bagi Bank Staff.
   - Produk siswaKu, PensiunKu, WarisanKu.
   - Bisnis melalui *Platform*.

Strategi Proses

1. Pengembangan *Core Insurance System*
2. Pengembangan AJKO gen-2
3. E-PKS Agen Brilink
4. Manajemen Big Data sebagai *mapping & profilling* data nasabah yang dihubungkan dengan layanan dan produk-produk Asuransi BRI Life.
5. Pemanfaatan Big Data BRI untuk sumber *refferal* bagi seluruh tenaga penjual BRI Life.
6. *Auto Underwriting*
7. Jet Klaim
8. E-Polis dan E-Klaim

Strategi *People*

1. Penetapan kembali & Internalisasi Budaya Kerja
2. Implementasi Human Capital
3. Rekrutmen *Bancassurance Financial Advisor* (BFA), 3000 FC.
4. Remapping BFA, BAM & BRH sesuai dengan kompetensi dan potensi bisnis masing masing daerah.
5. E- Learning via aplikasi My-Class
6. Sales Activity Management melalui aplikasi MyActivity
7. Talent Development Program untuk menciptakan kaderisasi pemimpin masa depan untuk BRI Life
8. Perbaikan Skema Remunerasi baik tenaga penjual maupun pegawai organik
9. Reorganisasi Divisi agar dapat ditatalaksanakan dengan efektif dan effisien
10. Pengembangan *Innovation center* untuk melahirkan ide dan gagasan baru yang lebih inovatif dan mempunyai nilai tambah untuk perusahaan
11. Pengembangan BRI Life Community sebagai sarana untuk mewujudkan *work life balanced* pekerja.

Bisnis Entitas Anak

PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

Ringkasan Kinerja BRI Finance Tahun 2018

Laporan Posisi Keuangan

Aset

2016	2017	2018	Growth
Rp2,4 triliun	Rp2,61 triliun	Rp3,63 triliun	39,08%

Liabilitas

2016	2017	2018	Growth
Rp1,79 triliun	Rp1,94 triliun	Rp2,79 triliun	43,81%

Ekuitas

2016	2017	2018	Growth
Rp615 miliar	Rp664 miliar	Rp833 miliar	25,45%

Laporan Laba Rugi

Pendapatan Bunga

2016	2017	2018	Growth
Rp101,35 miliar	Rp206,3 miliar	Rp298,74 miliar	44,81%

Beban

2016	2017	2018	Growth
Rp43,87 miliar	Rp156,09 miliar	Rp235,88 miliar	58,9%

Laba Bersih setelah pajak

2016	2017	2018	Growth
Rp57,48 miliar	Rp50,21 miliar	Rp62,86 miliar	25,19%

Laporan Laporan Pembiayaan

Pembiayaan Baru

2016	2017	2018	Growth
Rp1,21 triliun	Rp1,53 triliun	Rp2,34 triliun	52,94%

Piutang Pembiayaan

2016	2017	2018	Growth
Rp2,2 triliun	Rp2,49 triliun	Rp3,41 triliun	36,95%

Profil Perusahaan

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang *multifinance*, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,6%. Pada mulanya BRI Finance berdiri pada tahun 1983 sebagai perusahaan patungan antara The Sanwa Bank Limited, Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nama perusahaan PT Sari Usaha Leasing. PT. Sari Usaha Leasing adalah salah satu perusahaan perintis untuk industri pembiayaan di Indonesia setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-465/KM.11/1983. Pada tahun yang sama, BRI Finance melakukan perubahan nama menjadi PT Sanwa-BRI Leasing.

Di tahun 1991, BRI Finance mendapatkan izin usaha untuk menjalankan bisnis *multifinance* sehingga melakukan penamaan ulang menjadi PT Sanwa-BRI Finance. Seiring dengan terjadinya proses merger yang dilakukan oleh The Sanwa Bank Ltd, Jepang menjadi The UFJ Bank Ltd, Jepang, nama BRI Finance disesuaikan menjadi PT UFJ-BRI Finance di tahun 2002 dan menjadi PT BTMU-BRI Finance di tahun 2008.

Pada 30 September 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia membeli saham BRI Finance dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jepang. Kepemilikan saham Perusahaan resmi dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia sebesar 1%. Seiring dengan peralihan saham, PT BTMU-BRI Finance mengubah namanya PT BRI Multifinance Indonesia dengan merk dagang BRI Finance. Perubahan ini menjadikan BRI Finance sebagai bagian dari jasa keuangan terintegrasi dan jaringan keuangan terbesar di Indonesia guna memperkuat posisi di industri keuangan Indonesia. Pada tanggal 24 Desember 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan penambahan modal disetor sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) kepada BRI Finance sehingga terjadi peningkatan kepemilikan saham dari sebesar 99,0% menjadi 99,6% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 0,4%.

BRI Finance memfokuskan bisnis di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Dari sisi geografi, BRI Finance melakukan bisnis secara menyeluruh dan mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan tidak terpaku pada merk, tipe, area atau industri tertentu.

Susunan Manajemen BRI Finance Tahun 2018

DEWAN KOMISARIS	
I Komang Sudiarsa *	Presiden Komisaris
Boyke Budiono	Komisaris Independen
Ngalim Sawega *	Komisaris
DIREKSI	
Wisto Prihadi	Presiden Direktur
Achmad Chairul Ganie	Direktur Bisnis
Handayatni Ariefiana Harjanti	Direktur Operasional
Willy Halim Sugiardi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

*) dinyatakan efektif setelah lulus fit & proper test OJK

Bisnis Entitas Anak

Tinjauan Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018, BRI Finance membukukan Laba Bersih setelah Pajak sebesar Rp62,86 miliar atau tumbuh sebesar 25,19% dari tahun 2017, dengan Total Aset sebesar Rp3,63 triliun atau tumbuh sebesar 39,08% ditengah ekonomi yang kurang kondusif dan lesunya industri pembiayaan nasional. Pencapaian ini mendorong *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) BRI Finance masing-masing sebesar 2,4% dan 7,6%.

Peristiwa Penting dan Strategi Tahun 2018

Peristiwa penting BRI Finance selama tahun 2018, antara lain:

1.

Membuka 9 Kantor Pemasaran baru yang berlokasi di Depok, BSD, Cirebon, Semarang, Malang, Banyuwangi, Pekanbaru, Lampung dan Banjarmasin. Total unit kerja yang dimiliki BRI Finance menjadi 1 Kantor Pusat (Jakarta), 4 Kantor Cabang (Surabaya, Bandung, Samarinda dan Medan) serta 16 Kantor Pemasaran

2.

Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda Perubahan Pengurus pada Juli 2018 dan peningkatan penyertaan modal disetor pada Desember 2018.

3.

Mendapatkan pemeringkatan Perusahaan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan nilai *rating* AA- dan *outlook stable*.

4.

Penambahan modal disetor sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di bulan Desember 2018.

Strategi Pengembangan Tahun 2019

Pada tahun 2019, fokus utama BRI Finance yaitu pengembangan pembiayaan multiguna (konsumer) khususnya kendaraan bermotor dan mengoptimalkan pembiayaan investasi dan modal kerja di unit kerja dengan tetap fokus pada segmen *non-cyclical*. Strategi inisiatif yang akan dijalankan oleh BRI Finance antara lain

1. Meluncurkan produk dan penawaran yang bisa memenangkan nasabah
2. Membangun jaringan distribusi melalui sinergi *office channeling* dengan BRI
3. Mambangun tim *Consumer Leadership* yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kompetensi
4. Mengembangkan sistem *e-financing application* dengan *advanced IT infrastructure* yang bisa memberikan pelayanan yang akurat, cepat dan memuaskan.

PT BRI VENTURA INVESTAMA

Ringkasan Kinerja Tahun 2018

Aset	Pendapatan Usaha	Laba Bersih
Rp7,2 miliar	Rp1,27 miliar	Rp446 juta

(PT BRI Ventura Investama menjadi Perusahaan Anak BRI pada tanggal 20 Desember 2018)

Profil Perusahaan

PT. BRI Ventura Investama (BRI Ventures) adalah entitas anak usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang Modal Ventura, kepemilikan saham PT. BRI (Persero) Tbk adalah sebesar 97.61% dari total saham yang dikeluarkan perusahaan. Sementara sebesar 2.39% dimiliki oleh: PT. Bank Central Asia (1.48%), Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI (0.37%), dan sisanya dimiliki oleh perseorangan (0.54%).

PT. BRI Ventura Investama (dahulu PT. Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura) diresmikan pada tanggal 21 Februari 1998 di Kupang – NTT dengan mengantongi ijin usaha modal ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 75/KMK.05/1998 yang ditetapkan pada tanggal 19 Februari 1998. Pendiri perusahaan adalah PT. Bahana Artha Ventura (BAV) yang merupakan anak usaha PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dalam rangka pengembangan usaha modal ventura bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh Indonesia yang menjadi perhatian PT BPUI maka PT. BAV bersinergi dengan perbankan nasional dan pemerintah daerah NTT secara pribadi melalui penempatan saham.

Pada tanggal 29 Juni 2018, pemegang saham pengendali (PT. BAV) melakukan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku calon investor bagi perusahaan.

Sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tersebut, maka pada tanggal 14 Desember 2018 nama perusahaan berubah menjadi PT. BRI Ventura Investama sekaligus memindahkan kantor pusat ke Jakarta. Pada tanggal 20 Desember 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi saham milik PT. BAV dalam perusahaan sebanyak 97,61% dari total saham perseron. Dengan demikian sejak saat itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dari BRI Ventures. Saat ini terdapat 2 aktifitas utama BRI Ventures yaitu:

1. Pembiayaan usaha produktif di Kupang, NTT.
2. Aktifitas investasi di Jakarta.

Susunan Manajemen

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hendra Patriawan
Komisaris	:	Albert Wilson Riwukore

Direksi

Direktur Utama	:	Yulia Nevida
Direktur	:	Fredrik Pieter Hendrik Lestuny

Strategi Pengembangan BRI Ventures di Tahun 2019

BRI Ventures akan menjadi kendaraan BRI Group untuk meningkatkan laju pertumbuhan bisnis (sebagai *engine of growth*) melalui aktivitas investasi ke perusahaan inovatif yang dapat membawa pertumbuhan dan model bisnis baru.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target adalah dengan melakukan investasi kepada perusahaan teknologi *(high-growth startups)* yang berpotensi untuk memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan.

Fokus investasi BRI Ventures kepada startup dalam fase pertumbuhan yang dapat berdampak langsung terhadap bisnis BRI.

Area investasi BRI Ventures adalah kepada perusahaan inovatif yang berpotensi meningkatkan kapabilitas, berdampak positif terhadap bisnis, dan membuka akses untuk ekosistem baru bagi Bank BRI dan grup usaha.

Secara garis besar, BRI Ventures akan menggunakan kriteria investasi sebagai berikut :

- Kualitas tim manajemen
- Potensi pasar yang besar dan tumbuh
- Kualitas produk dan model bisnis yang teruji (perusahaan memiliki rencana pengembangan yang jelas dan terukur)

Untuk pembiayaan usaha produktif yang selama ini menjadi fokus bisnis , dalam tahun 2019, perusahaan akan melanjutkan aktivitas pembiayaan eksisting dengan memperhatikan kualitas pembiayaan yang lebih sehat dan menguntungkan.

Bisnis Entitas Anak

PT DANAREKSA SEKURITAS

Ringkasan Kinerja Tahun 2018

Aset	Ekuitas	Pendapatan
Rp869,1 miliar	Rp533,45 miliar	Rp193,85 miliar

(PT Danareksa Sekuritas menjadi Perusahaan Anak BRI pada tanggal 21 Desember 2018)

Profil Perusahaan

PT Danareksa Sekuritas ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 25 tanggal 1 Juli 1992. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7248. HT.01.01.Th.92 tanggal 3 September 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 5392 tanggal 27 Oktober 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., No. 91 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Th.2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 9870 tanggal 7 April 2009.

Pada tahun 2009 terdapat perubahan pada maksud dan tujuan Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., No. 49 tanggal 16 Desember 2009. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-02042 tanggal 25 Januari 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 Tambahan No. 1801 tanggal 11 November 2010.

Pada tahun 2011 terdapat perubahan yakni pengalihan saham Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., No. 21 tanggal 21 September 2011 dan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat pemberitahuan perubahan data Perusahaan dalam No. AHU-AH.01.10-31539 tanggal 4 Oktober 2011.

Pada tahun 2017 terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu pada pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dengan adanya penambahan kegiatan usaha lain yang dituangkan dalam akta notaris Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., No. 1 tanggal 5 Juli 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013998. AH.01.02.Th.2017 tanggal 7 Juli 2017.

Perubahan terakhir dilakukan untuk pengalihan saham Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 52 tanggal 21 Desember 2018 yang telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat pemberitahuan perubahan data Perusahaan dalam No. AHU-AH.01.03-0279737 tanggal 26 Desember 2018.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 dan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992.

Pada tanggal 21 Desember 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi saham PT Danareksa Sekuritas dari PT Danareksa (Persero) sebanyak 67,00% atau 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta) lembar saham dari total saham perseron. Dengan demikian sejak saat itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Pemegang Saham Mayoritas dari PT Danareksa Sekuritas.

Perusahaan berdomisili di Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta. Perusahaan memiliki 188 orang karyawan tetap pada tanggal 31 Desember 2018.

Susunan Manajemen

Susunan Dewan Komisaris

1. Damhuri Nasution : Komisaris

Susunan Dewan Direksi

1. Jenpino Ngabdi : Direktur Utama
2. Budi Susanto : Direktur
3. Boumediene S. Halomoan : Direktur
4. R. M. Irwan : Direktur
5. Saidu Solihin : Direktur
6. Santi Suryandari : Direktur

Ringkasan Peristiwa Penting

1. Pengunduran diri R.A.M. Irwan Satya Utama dari jabatan selaku Komisaris terhitung tanggal 1 Maret 2018

2. Pemberhentian dengan hormat Bondan Pristiwandana dari jabatan selaku Komisaris dengan berakhirnya masa jabatan terhitung tanggal 27 Juni 2018

3. Pengangkatan Damhuri Nasution sebagai Komisaris Perseroan terhitung tanggal 27 Juni 2018

4. Pemberhentian dengan hormat Erizal selaku Direktur Perseroan terhitung tanggal 1 Juli 2018

5. Pengangkatan R. Muhamad Irwan sebagai Direktur Perseroan terhitung tanggal 1 Juli 2018

6. Pengalihan saham PT Danareksa Sekuritas dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Danareksa (Persero) kepada PT Danareksa (Persero) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham

7. Pengalihan saham PT Danareksa Sekuritas dari PT Danareksa (Persero) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta) lembar saham

Strategi Utama Perseroan

Danareksa Sekuritas memiliki beberapa target utama di tahun 2019 yaitu untuk menjadi pemain utama dalam bisnis penjaminan emisi, dimana Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi dalam transaksi IPO/penawaran umum. Perusahaan juga akan memperkuat posisi sebagai penasihat keuangan (*financial advisory*) dan menjadi pilihan utama bagi BUMN dan afiliasi serta perusahaan swasta untuk bersaing dengan konsultan asing. Dari sisi *brokeraging*/ perantara perdagangan efek, Perusahaan menargetkan nilai perdagangan mencapai Rp1 triliun per harinya, dimana hal ini dapat tercapai melalui jaringan nasabah ritel dan institusi. Sebagai bentuk komitmen untuk memasyarakatkan pasar modal Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan berupaya untuk memperluas jaringan investor ritel/ individu melalui media *online trading* seiring dengan berkembangnya era digital secara global. Tentunya hal ini juga akan didukung dengan infrastruktur sistem informasi yang solid dan mumpuni.

Tinjauan Keuangan

Profitabilitas BRI tetap terjaga dengan laba bersih sebesar

Rp32,42 triliun

ROA 3,68%, dan ROE 20,49%. Pengembangan bisnis didukung kecukupan modal yang memadai dengan CAR sebesar **21,21%**

Pada Tinjauan Keuangan, Bank BRI menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan untuk industri perbankan Indonesia.

Seluruh materi uraian ini disusun berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (PSS-EY) sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00035/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian BRI untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI tersebut juga disampaikan sebagai Lampiran dalam Laporan Tahunan ini.

Pada bulan Desember 2018, BRI telah melakukan akuisisi BRI Ventures, dahulu PT Sarana NTT Ventura serta PT Danareksa Sekuritas. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan saham PT BRI Ventura sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f). Berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, PT Danareksa (Persero) telah menjual kepemilikannya atas PT Danareksa Sekuritas sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI.

Transaksi-transaksi jual beli tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Untuk penyajian transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan metode penyatuan kepemilikan, laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan seakan-akan penggabungan usaha tersebut terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(Rp juta)

Ringkasan Neraca	2016		2017		2018		Pertumbuhan (%)
	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	2017-2018
Kas	25.212.226	2,51	24.798.037	2,20	27.421.625	2,11	10,58
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	5,54	58.155.479	5,16	71.159.442	5,49	22,36
Penempatan pada Bank Indonesia serta Giro dan Penempatan pada Bank Lain	89.529.628	8,91	61.289.274	5,44	99.695.406	7,69	62,66
Surat berharga yang dimiliki-netto	145.223.545	14,45	215.604.217	19,12	221.123.295	17,05	2,56
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.318.434	0,33	3.317.840	0,29	1.505.273	0,12	(54,63)
Kredit, Piutang Syariah dan Pembiayaan	663.420.218	66,02	739.336.520	65,58	843.598.404	65,05	14,10
CKPN kredit -/-	(22.806.452)	(2,27)	(30.104.137)	(2,67)	(35.603.123)	(2,75)	18,27
Penyertaan–netto	11.718	0,00	83.100	0,01	460.096	0,04	453,67
Aset tetap–netto	24.524.133	2,44	24.752.035	2,20	26.914.859	2,08	8,74
Tagihan derivatif-netto	103.907	0,01	162.912	0,01	485.810	0,04	198,20
Tagihan akseptasi-netto	5.692.583	0,57	5.693.425	0,50	11.643.003	0,90	104,50
Aset Pajak Tangguhan	2.539.713	0,25	3.286.732	0,29	5.114.653	0,39	55,62
Aset lain	12.396.074	1,24	21.072.055	1,87	23.379.549	1,79	10,95
Total Aset	**1.004.801.673**	**100,00**	**1.127.447.489**	**100,00**	**1.296.898.292**	**100,00**	**15,03**

Pada tahun 2018, aset BRI tumbuh sebesar 15,03% menjadi Rp1.296,9 triliun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp1.127,45 triliun. Peningkatan aset terutama ditopang dari pertumbuhan aset-aset produktif seperti kredit yang naik sebesar 14,10% dan mempunyai komposisi 65,05% terhadap total aset.

Kas dan Giro Pada Bank Indonesia

Posisi kas pada tahun 2018 sebesar Rp27,42 triliun, naik 10,58% dibanding tahun 2017 sebesar Rp24,80 triliun. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya kebutuhan likuiditas dari unit kerja BRI. Sementara Giro pada BI naik 22,36% dari Rp58,16 triliun di tahun 2017 menjadi Rp71,16 triliun di tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI), BRI harus memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) Utama dalam rupiah sebesar 6,5% dan untuk mata uang asing (valas) sebesar 8%. Saldo Giro pada BI tersebut telah merepresentasikan GWM Rupiah sebesar 7,16% dan GWM Valas sebesar 8,01%, sehingga BRI telah memenuhi ketentuan GWM dari BI.

Penempatan pada Bank Indonesia serta Giro dan Penempatan pada Bank Lain

Giro dan penempatan pada bank lain menunjukkan kenaikan sebesar 62,66% dari Rp61,29 triliun di tahun 2017 menjadi Rp99,7 triliun di tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp23,3 triliun dan *Interbank Call Money* sebesar Rp8,82 triliun selama tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.

Tinjauan Keuangan

Efek-efek

Portfolio surat berharga (Efek) yang dimiliki Bank mengalami kenaikan sebesar 2,56% dari Rp215,6 triliun di tahun 2017 menjadi Rp221,12 triliun di tahun 2018. Sebagian besar Efek yang dimiliki BRI adalah obligasi pemerintah dan Sertifikat Bank Indonesia.

Obligasi Rekap Pemerintah

BRI mencatatkan kepemilikan obligasi rekap dari pemerintah sebesar Rp1,51 triliun, turun apabila dibandingkan posisi tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp3,32 triliun karena banyak obligasi rekap dari pemerintah yang jatuh tempo di tahun 2018. Obligasi rekap pemerintah yang jatuh tempo di tahun 2018 sebesar Rp30,27 miliar, sebesar Rp375 miliar jatuh tempo pada tahun 2019, dan sisanya sebesar Rp1,1 triliun jatuh tempo pada tahun 2020.

Kategori	Tenor	2016	2017	2018
Tersedia untuk dijual	2018-2020	718.434	717.840	30.273
Dimiliki hingga jatuh tempo	2018-2020	2.600.000	2.600.000	1.475.000
Total		**3.318.434**	**3.317.840**	**1.505.273**

Kredit Yang Disalurkan

Pada 2018, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp843,6 triliun, meningkat 14,1% dibanding 2017 yang sebesar Rp739,34 triliun. Pertumbuhan kredit mayoritas terjadi di segmen mikro dan ritel yang masing-masing tumbuh Rp38,77 triliun (15,33%) dan Rp43,2 triliun (15,03%) menjadi Rp291,6 triliun dan Rp330,6 triliun pada tahun 2018. Pertumbuhan di segmen tersebut sejalan dengan komitmen BRI untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terbesar dalam struktur usaha di Tanah Air.

Penyaluran kredit di segmen mikro salah satunya ditopang oleh pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai komitmen BRI dalam mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan UMKM. Total penyaluran KUR BRI tahun 2018 sebesar Rp80,18 triliun. Dengan penyaluran tersebut outstanding kredit KUR mikro tahun 2018 menjadi Rp77,69 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp69,18 triliun (naik Rp8,51 triliun atau 12,3%). Sedangkan *outstanding* kredit KUR ritel tahun 2018 naik Rp3,6 triliun atau 36,29% menjadi Rp13,52 triliun pada tahun 2018.

Pertumbuhan kredit UMKM yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total kredit membuat komposisi kredit UMKM pada tahun ini sebesar 75,88%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 75,15%. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI untuk fokus pada penyaluran kredit UMKM.

Kredit Yang Disalurkan Berdasar Mata Uang

(Rp juta)

Segmen	2016	2017	2018	Pertumbuhan (%) 2017-2018
Mikro	221.802.205	252.850.654	291.615.908	15,33
Rupiah	221.802.205	252.850.654	291.615.908	15,33
Valas	-	-	-	-
Ritel	252.989.680	287.436.229	330.633.963	15,03
Rupiah	242.857.971	276.062.883	316.065.763	14,49
Valas	10.131.709	11.373.346	14.568.200	28,09
Korporasi	168.679.090	178.695.785	197.760.286	10,67
Rupiah	120.517.077	118.598.989	124.639.193	5,09
Valas	48.162.013	60.096.796	73.121.093	21,67
Total Kredit Non Pembiayaan dan Piutang Syariah	643.470.975	718.982.668	820.010.157	14,05

Tinjauan Keuangan

Kredit Yang Disalurkan Berdasar Mata Uang

(Rp juta)

Segmen	2016	2017	2018	Pertumbuhan (%) 2017-2018
Rupiah	585.177.253	647.512.526	732.320.864	13,10
Valas	58.293.722	71.470.142	87.689.293	22,69
Pembiayaan dan Piutang Syariah	17.748.943	17.864.869	20.178.401	12,95
Piutang Sewa Pembiayaan	2.200.300	2.488.983	3.409.846	37,00
Total Kredit yang disalurkan	663.420.218	739.336.520	843.598.404	14,10
CKPN	22.806.452	30.104.137	35.603.123	18,27
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	**640.613.766**	**709.232.383**	**807.995.281**	**13,93**

Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Segmen Operasi

(Rp juta)

Segmen	2016	2017	2018	Pertumbuhan (%) 2017-2018
Ritel	252.989.680	287.436.229	330.633.963	15,03
Mikro	221.802.205	252.850.654	291.615.908	15,33
Korporasi	168.679.090	178.695.785	197.760.286	10,67
Pembiayaan dan Piutang Syariah	17.748.943	17.864.869	20.178.401	12,95
Piutang Sewa Pembiayaan	2.200.300	2.488.983	3.409.846	37,00
Total Kredit yang Disalurkan	663.420.218	739.336.520	843.598.404	14,10
CKPN	22.806.452	30.104.137	35.603.123	18,27
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	**640.613.766**	**709.232.383**	**807.995.281**	**13,93**

Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Penggunaan

(Rp juta)

Segmen	2016	2017	2018	Pertumbuhan (%) 2017-2018
Kupedes	211.417.693	239.446.222	274.265.895	14,54
Modal Kerja	186.324.358	206.806.224	244.518.672	18,24
Konsumer	101.031.288	115.320.021	131.665.922	14,17
Investasi	114.261.862	126.173.046	139.994.286	10,95
Program	10.547.008	15.132.136	19.794.242	30,81
Sindikasi	19.845.592	16.066.562	9.737.048	(39,40)
Karyawan Kunci	43.174	38.457	34.092	(11,35)
Pembiayaan dan Piutang Syariah	17.748.943	17.864.869	20.178.401	12,95
Piutang Sewa Pembiayaan	2.200.300	2.488.983	3.409.846	37,00
Total Kredit yang disalurkan	663.420.218	739.336.520	843.598.404	14,10
CKPN	22.806.452	30.104.137	35.603.123	18,27
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	**640.613.766**	**709.232.383**	**807.995.281**	**13,93**

Tinjauan Keuangan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk untuk menutup kerugian akibat terjadinya penurunan nilai kredit. Perhitungan penilaian CKPN menggunakan pendekatan secara *individual impairment* dan *collective impairment*. Metode *individual impairment* digunakan untuk kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan yaitu di atas Rp5 miliar dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai. Sedangkan *collective impairment* untuk kredit yang memiliki nilai di bawah Rp5 miliar serta kredit dengan nilai di atas Rp5 miliar tetapi tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai.

CKPN BRI pada tahun 2018 sebesar Rp35,6 triliun, naik 18,27% dari tahun 2017 sebesar Rp30,10 triliun. Kenaikan CKPN ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BRI untuk mengantisipasi dampak dari fluktuasi kondisi makro ekonomi terhadap kualitas aset. Dengan peningkatan CKPN ini, Rasio Penutupan Atas Kredit Bermasalah (NPL *Coverage Ratio*) meningkat dari 195,54% pada tahun 2017 menjadi 200,61% pada tahun 2018.

Dalam melakukan mitigasi risiko kredit, selain membentuk CKPN yang memadai, BRI juga memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit.

BRI memperhitungkan agunan sebagai arus kas masa datang apabila kredit tersebut *collateral dependent* atau pelunasan kredit berasal dari agunan atau pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas peningkatan agunan. Dalam menetapkan nilai agunan, BRI menggunakan nilai yang lebih rendah di antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan. Penilaian kembali nilai wajar atau nilai pasar agunan dilakukan secara berkala. BRI telah memiliki prosedur untuk memastikan eksekusi agunan, jaminan atau asuransi kredit dilakukan pada nilai yang wajar. Metodologi perhitungan CKPN yang lebih mendetail dibahas di bagian Manajemen Risiko.

Penghapusan Aset Kredit dan Perolehan Kembali (Pendapatan *Recovery*)

Pada tahun 2018, BRI melakukan penghapusan aset kredit sebesar Rp12,16 triliun, naik 27,57% dibanding tahun 2017 sebesar Rp9,53 triliun. Penghapusan kredit merupakan langkah terakhir setelah BRI melakukan restrukturisasi kredit dan usaha penyelesaian lainnya namun nasabah tetap tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap BRI karena usahanya bermasalah.

Penghapusan aset kredit sebagian besar terjadi di segmen Mikro dan Ritel komersial sesuai dengan komposisi *outstanding* kredit Mikro dan Ritel yang mencapai 56,85% dari total kredit BRI. Pendapatan *recovery* yang dihasilkan sebesar Rp6,3 triliun, naik 24,98% dari tahun 2017 sebesar Rp5,04 triliun, atau mencapai *recovery rate* sebesar 51,86%. Rincian Pendapatan *Recovery* dibahas pada bagian Laporan Laba Rugi.

Penyertaaan Saham

Pada tahun 2018, penyertaan saham BRI sebesar Rp460,1 miliar, tumbuh sebesar 453,39% dibanding tahun 2017 sebesar Rp83,1 miliar. Peningkatan ini terjadi karena BRI melakukan investasi di PT Danareksa Investment Management sebesar Rp372,27 miliar dengan kepemilikan saham sebesar 35% dan Lembaga Pembayaran Nasional sebesar Rp3,5 miliar dengan kepemilikan saham sebesar 17,50%. Kepemilikan PT Danareksa Investment Management pada 31 Desember 2018 adalah 65% dimiliki PT Danareksa (Persero), 35% dimiliki oleh BRI, PT Bahana Artha Ventura menjadi Rp72,61 miliar dari tahun 2017 yang sebesar Rp71,38 miliar. Kepemilikan PT Bahana Artha Ventura pada 31 Desember 2018 adalah 64,65% dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, 35% dimiliki oleh BRI dan 0,35% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dan 17,5% untuk Lembaga Pembayaran Nasional, PT Pemeringkat Efek Indonesia dimiliki BRI sebesar 7,97%.

Tinjauan Keuangan

(Rp juta)

Nama Perusahaan	Sektor Bisnis	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Investasi 2016	2017	2018
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	-	-	372.271
PT Bahana Artha Ventura	Modal Ventura	35,00	-	71.382	72.607
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	7,97	7.978	7.978	7.978
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17,50	-	-	3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa Penitipan Surat Berharga	4,30	1.275	1.275	1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	2,00	1.000	1.000	1.000
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Non Bank	8,00	536	536	536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan Kesehatan	1,68	220	220	220
PT Menara Proteksi Indonesia	Properti	2,00	200	200	200
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,87	135	135	135
BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	77	77	77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00	77	77	77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	66	66	66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana Olahraga	0,64	50	50	50
PT Kendari Expressindo Bahari	Transportasi	8,33	50	50	50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75	35	35	35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana Olahraga	0,24	25	25	25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13	23	23	23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non Bank	0,03	20	20	20
PT Danareksa Finance	Lembaga keuangan	0,01	1	1	1
PT BTMU BRI Finance	Pembiayaan	45,00	-	-	-
PT Kelola Jasa Artha	Remitansi	14,22	-	-	-
PT Bringin Gigantara	Pengadaan Barang, jasa, dan IT	5,14	-	-	-
Total			**11.768**	**83.150**	**460.146**
Cadangan kerugian Penurunan nilai			**(50)**	**(50)**	**(50)**
Total Neto			**11.718**	**83.100**	**460.096**

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua penyertaan diklasifikasikan "Lancar" kecuali penyertaan yang dilakukan PT BRI Ventura Investama (entitas anak) pada PT Kendari Expressindo Bahari.

Pada Pada tahun 2018, BRI telah menerima dividen tunai dari PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia sebesar Rp11,72 miliar sedangkan tahun 2016, menerima dividen tunai dari PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp170 juta dan Rp11 juta.

Tinjauan Keuangan

Pada tahun 2018, BRI Agro (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp7 juta, Rp6 juta, dan Rp25 juta, sedangkan pada tahun 2017, dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp8 juta, Rp13 juta dan Rp19 juta, dan pada tahun 2016, dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp7 juta, Rp21 juta dan Rp26 juta.

Pada tahun 2018, PT Danareksa Sekuritas (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari PT Pemeringkat Efek Indonesia sebesar Rp776 juta.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 jumlah cadangan kerugian nilai atas penyertaan saham yang dibentuk adalah masing-masing sebesar Rp50 juta. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham yang dibentuk telah memadai.

Aset Tetap

Pada tahun 2018, jumlah aset tetap BRI sebesar Rp26,91 triliun, naik 8,74% dibanding tahun 2017 sebesar Rp24,75 triliun. Peningkatan ini karena adanya penambahan nilai bangunan, komputer dan mesin serta perlengkapan kantor.

(Rp juta)

Aset Tetap	2016	2017	2018	Pertumbuhan (%) 2017-2018
Hak atas tanah	15.799.496	16.134.127	17.300.589	7,23
Bangunan	3.160.913	3.675.421	4.959.992	34,95
Kendaraan bermotor	2.153.644	2.204.637	2.284.879	3,64
Komputer dan mesin	6.407.952	7.097.817	8.286.786	16,75
Perlengkapan Kantor	1.482.991	1.593.957	1.808.142	13,44
Aset tetap museum	184	184	184	0,00
Satelit	-	3.284.664	3.284.664	0,00
Satelit Dalam Pengembangan	3.275.613	-	-	-
Total Biaya Perolehan	**32.280.793**	**33.990.807**	**37.925.236**	**11,57**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.359.559	1.529.321	1.785.676	16,76
Kendaraan bermotor	1.420.049	1.705.407	1.955.595	14,67
Komputer dan mesin	3.835.864	4.607.771	5.516.494	19,72
Perlengkapan Kantor	1.141.188	1.268.536	1.405.897	10,83
Satelit	-	127.737	346.715	171,43
Total Akumulasi Penyusutan	**7.756.660**	**9.238.772**	**11.010.377**	**19,18**
Nilai Buku Neto	**24.524.133**	**24.752.035**	**26.914.859**	**8,74**

Aset Lain-lain

Pos aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dari obligasi pemerintah, piutang nasabah, agunan yang diambil alih, tagihan nasabah, piutang lain-lain dan aset lainnya. Total aset lain-lain sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp23,38 triliun, naik 10,95% dibanding tahun 2017 sebesar Rp21,07 triliun. Peningkatan aset lain-lain terutama ditopang dari adanya tagihan kepada Perum Bulog sebesar Rp297,85 miliar, naik 30,25% dari tahun 2017 sebesar Rp228,68 miliar, dan beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp2,25 triliun, naik 262,9% dari tahun 2017 sebesar Rp617,83 miliar.

LIABILITAS

(Rp juta)

Ringkasan Neraca	2016		2017		2018		Growth (%)
	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	2017-2018
Simpanan Nasabah	754,526,374	88,02	841.656.450	87,72	944.268.737	84,95	12,19
Giro	142,546,863	16,63	147.435.604	15,37	180.669.095	16,25	22,54
Tabungan	303,270,288	35,38	349.440.873	36,42	387.179.625	34,83	10,80
Deposito	308,709,223	36,01	344.779.973	35,94	376.420.017	33,86	9,18
Liabilitas Segera	5,410,313	0,63	6.584.201	0,69	8.462.958	0,76	28,53
Simpanan dari Bank lain	2,229,538	0,26	5.593.367	0,58	9.131.158	0,82	63,25
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7,302,398	0,85	12.136.684	1,26	37.379.394	3,36	207,99
Pinjaman diterima	35,013,680	4,08	29.408.694	3,07	40.457.429	3,64	37,57
Surat Berharga yang Diterbitkan	24,800,781	2,89	30.619.658	3,19	31.190.216	2,81	1,86
Liabilitas lainnya	27,984,492	3,27	33.440.657	3,49	40.733.069	3,66	21,81
Total Liabilitas	**857,267,576**	**100,00**	**959.439.711**	**100,00**	**1.111.622.961**	**100,00**	**15,86**

Pada tahun 2018, total liabilitas BRI sebesar Rp1.111,62 triliun, meningkat 15,86% dibanding tahun 2017 sebesar Rp959,44 triliun. Meningkatnya liabilitas terutama didorong oleh naiknya pertumbuhan Simpanan Nasabah sebesar Rp102,61 triliun, atau naik 12,19% dari tahun 2017.

(Rp juta)

Simpanan Nasabah	2016	2017	2018	Growth (%) 2017-2018
Giro	141.419.020	145.529.168	178.097.981	22,38
Giro wadiah	1.127.843	1.766.901	2.277.850	28,92
Giro Mudharabah	-	139.535	293.264	110,17
Tabungan	298.110.406	343.420.737	379.918.705	10,63
Tabungan Wadiah	4.176.761	4.749.652	5.601.811	17,94
Tabungan Mudharabah	983.121	1.270.484	1.659.109	30,59
Deposito Berjangka	293.029.378	326.417.937	357.413.513	9,50
Deposito Berjangka Mudharabah	15.679.845	18.362.036	19.006.504	3,51
Total simpanan nasabah	754.526.374	841.656.450	944.268.737	12,19
Komposisi Giro dan Tabungan/CASA	59,09%	59,04%	60,14%	1,86
Komposisi Deposito	40,91%	40,96%	39,86%	-2,69

Tinjauan Keuangan

Perkembangan digital banking telah mengubah perilaku nasabah bank dalam menempatkan dananya. Kini, besaran suku bunga simpanan yang ditawarkan bukan lagi faktor tunggal yang dapat menarik dana nasabah. Kemudahan pelayananan yang didukung teknologi digital menjadi nilai lebih bagi bank untuk menghimpun dana simpanan nasabah.

Jumlah Simpanan nasabah BRI sebesar Rp944,27 triliun, tumbuh 12,19% dibanding tahun 2017 sebesar Rp841,66 triliun. Pertumbuhan Simpanan terutama ditopang kenaikan Giro dan Tabungan masing-masing sebesar 22,54% dan 10,8%. Sementara produk Deposito tumbuh sebesar 9,18%.

Struktur Simpanan terdiri dari perolehan dana murah, Giro dan Tabungan (CASA) sebesar 60,14% dan Deposito sebesar 39,86%. Penghimpunan CASA yang lebih tinggi dibanding Deposito sejalan dengan kebijakan BRI untuk menekan biaya dana. Perolehan dana murah ditopang oleh keberadaan 10.325 unit kerja BRI yang tersebar hingga ke pelosok Nusantara dan keberadaan agen BRILink yang sudah mencapai 401.550 agen.

TOTAL SIMPANAN NASABAH
(Rp juta)

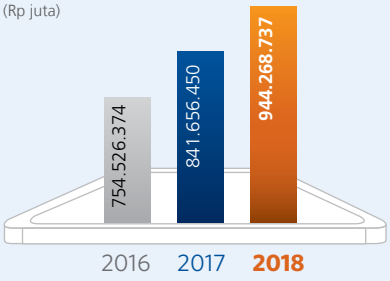

Liabilitas Segera

Liabilitas Segera antara lain terdiri dari kewajiban BRI sebagai bank penerbit kartu ATM dan Kartu Kredit, kiriman uang, dana setoran cek, titipan deposito, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BRI, dan penampungan bantuan sosial. Liabilitas Segera pada tahun 2018 sebesar Rp8,46 triliun, tumbuh 28,53% dibanding tahun 2017 sebesar Rp6,58 triliun. Pertumbuhan terutama ditopang dari kenaikan titipan *advance payment*, titipan setoran pajak, titipan ATM dan kartu kredit, penampungan dana bantuan sosial, dan titipan asuransi.

Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya

Pos ini digunakan sebagai salah satu fasilitas pendanaan jangka pendek antar bank (*interbank call money*) dan bagian dari strategi manajemen likuiditas. Simpanan yang masuk dalam pos ini yaitu giro, tabungan, deposito berjangka, *interbank call money*, dan *deposit on call*.

Pada tahun 2018, Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya sebesar Rp9,13 triliun, tumbuh 63,25% dibanding tahun 2017 sebesar Rp5,59 triliun. Peningkatan pos ini terutama berasal dari naiknya *Interbank Call Money,* yang tercatat naik 214,88% dari Rp1,11 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp3,49 triliun di tahun 2018.

Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Pada tahun 2018, jumlah Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali sebesar Rp37,38 triliun, naik 207,91% dibanding tahun 2017 sebesar Rp12,14 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan strategy diversifikasi funding selain Dana Pihak Ketiga.

Tinjauan Keuangan

Pinjaman yang Diterima

Pada tahun 2018, jumlah Pinjaman yang Diterima sebesar Rp40,46 triliun, naik 37,57% dibanding tahun 2017 sebesar Rp29,41 triliun. Pinjaman yang diterima antara lain berasal dari pihak sebagai berikut:

Counterparty	Nominal	Jatuh Tempo
China Development Bank Corporation	Rp13,06 triliun	16 September 2025
Sindikasi Club Loan	Rp12,1 triliun	30 Maret 2019, 30 September 2019, 13 Desember 2019, 30 September 2020, 19 Desember 2021, & 19 Desember 2022
BNP Paribas	Rp1,8 triliun	24 Mei 2019, 8 Juli 2019, & 23 November 2019
Pinjaman Bilateral	Rp728,15 miliar	03 Februari 2025
Pinjaman Lain-lain	RP12,77 triliun	-
Total	**Rp40,46 triliun**	

1. Pinjaman China Development Bank Corporation sebesar Rp13,06 triliun. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang, memiliki tenor 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025 serta transaksi lintas batas antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.
2. Pinjaman Sindikasi Club Loan sebesar Rp12,1 triliun atau sekitar USD1.250 juta. Pinjaman ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile*. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam beberapa tahap, sebesar USD325 juta akan jatuh tempo pada 30 Maret 2019, sebesar USD155 juta akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019, sebesar USD 200 juta akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019, sebesar USD70 juta akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020, sebesar USD235 juta akan jatuh tempo pada 19 Desember 2021, dan sebesar USD265 juta akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022.

Surat Berharga Yang diterbitkan

Pada akhir tahun 2018, Surat Berharga yang diterbitkan berada pada posisi sebesar Rp31,19 triliun, naik 1,86% dibanding tahun 2017 sebesar Rp30,62 triliun. Penerbitan Surat Berharga yang dilakukan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

	Nominal	Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV (Rp juta)	2.442.000	Seri A: 21 Februari 2023
		Seri B: 21 Februari 2025
Global Bond BRI (USD)	500 juta	20 Juli 2023

Namun tercatat terdapat surat berharga yang telah jatuh tempo selama 2018 yaitu:
1. Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri B dengan nominal Rp925 miliar yang jatuh tempo pada 3 Juli 2018.
2. Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A dengan nominal Rp1.131 miliar yang jatuh tempo pada 16 April 2018.

Liabilitas Lainnya

Pos ini terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, liabilitas imbalan kerja dan liabilitas lain-lain.

Pada tahun 2018, Liabilitas lainnya sebesar Rp40,73 triliun, naik 21,81% dibanding tahun 2017 sebesar Rp33,44 triliun. Peningkatan ini terutama karena naiknya liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain.

Tinjauan Keuangan

EKUITAS

(Rp juta)

Komponen	2016	2017	2018	Growth (%) 2017-2018
Modal Saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291	-
Tambahan modal disetor - bersih	2.773.858	2.773.858	2.692.663	(2,93)
Surplus revaluasi aset tetap-bersih	13.824.692	13.824.692	13.824.692	-
Selisih Kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	23.490	54.199	49.850	(8,02)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual -bersih	75.618	1.813.625	(2.070.378)	(214,16)
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	665.870	706.403	1.154.343	63,41
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(2.418.948)	(2.418.948)	(2.418.948)	-
Opsi saham	-	-	10.971	-
Cadangan kompensasi atas saham bonus	-	-	426.670	-
Ekuitas *merging entity*	483.908	443.016	-	(100,00)
Total Saldo Laba	125.309.471	143.827.697	163.130.389	13,42
Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Induk	146.905.250	167.191.833	182.967.543	9,44
Kepentingan Non Pengendali	628.847	815.945	2.307.788	182,84
Total Ekuitas	147.534.097	168.007.778	185.275.331	10,28

BRI memiliki ekuitas sebesar Rp185,28 triliun, meningkat 10,28% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp168,01 triliun. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan naiknya saldo laba sebesar 13,42% dibanding tahun 2017 menjadi Rp163,13 triliun. Disisi lain BRI membayar dividen sebesar 45% dari laba tahun 2017.

Memperhatikan perkembangan kinerja bisnis BRI serta dalam rangka meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang pada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Direksi BRI memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi manajemen dan pekerja/*Management and Employee Stock Ownership Program* (MESOP). Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.

Program MESOP akan diselesaikan paling lambat pada 31 Maret 2020 dan akan dibayarkan dengan saham.

LAPORAN LABA RUGI

BRI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp32,42 triliun di tahun 2018, meningkat 11,61% dibanding tahun 2017 sebesar Rp29,05 triliun. Peningkatan laba tidak lepas dari naiknya pendapatan bunga dan bagi hasil di tengah kondisi makroekonomi yang menantang.

Tinjauan Keuangan

(Rp juta)

Komponen	2016	2017	2018	Growth (%) 2017-2018
Pendapatan Bunga	91.379.317	100.093.333	108.458.358	8,36
Pendapatan Bagi Hasil -Syariah	2.636.677	2.819.042	3.124.446	10,83
Dikurangi : beban bunga dan Syariah	(28.576.804)	(29.894.281)	(33.917.032)	13,46
Pendapatan bunga dan bagi hasil - netto	65.439.190	73.018.094	77.665.772	6,37
Pendapatan Premi	3.038.864	3.788.965	4.178.213	10,27
Biaya klaim	(2.760.154)	(3.403.551)	(3.232.491)	(5,03)
Pendapatan Premi - netto	278.710	385.414	945.722	145,38
Pendapatan Operasional lainnya	17.287.857	19.271.287	23.425.430	21,56
Beban Penyisihan Penghapusan Kerugian Penurunan Nilai atas keuangan dan non keuangan - netto	(13.700.241)	(16.994.115)	(17.792.693)	4,70
Beban Pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi -netto	347	(1.239)	912	(173,61)
Pembalikan cadangan (beban penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset - non keuangan - netto	(103.705)	(258.524)	(528.982)	104,62
Dikurangi : Beban Operasional Lainnya	(35.156.837)	(38.614.076)	(41.990.284)	8,74
Laba operasional	34.045.321	36.806.841	41.725.877	13,36
Pendapatan Non Operasional -netto	1.714	216.395	27.817	(87,15)
Laba sebelum pajak	34.047.035	37.023.236	41.753.694	12,78
Beban Pajak	(7.761.784)	(7.978.187)	(9.335.208)	17,01
Laba bersih sebelum pos luar biasa	26.285.251	29.045.049	32.418.486	11,61
Laba Bersih	26.285.251	29.045.049	32.418.486	11,61

Pendapatan dan Beban Bunga

Pos Pendapatan tersebut merupakan kontributor utama untuk meningkatkan profitabilitas Perseroan. Pendapatan BRI sebagian besar dikontribusi dari pendapatan bunga dan bagi hasil syariah. Sementara beban bunga dan syariah pertumbuhannya sejalan dengan penghimpunan dana yang dilakukan BRI yang berasal dari penyaluran kredit, pembiayaan syariah maupun aset non kredit lainnya.

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Bagi Hasil - Syariah

Sejalan dengan komposisi kredit, piutang syariah dan pembiayaan yang mendominasi 65,58% dari total aset yang dimiliki BRI, maka pendapatan bunga yang berasal dari kredit serta pembiayaan syariah juga tercatat sebesar 89,04% dari total pendapatan bunga BRI. Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan bunga kredit dan pendapatan bunga non kredit. Sepanjang tahun 2018, pendapatan bunga naik sebesar 8,43% dari Rp102,91 triliun di tahun 2017 menjadi Rp111,58 triliun. Pendapatan bunga kredit tercatat sebesar Rp96,23 triliun, atau memiliki porsi sebesar 86,24% dalam struktur pendapatan bunga. Sedangkan pendapatan bunga non kredit porsinya sebesar 13,76%. Sementara Pendapatan bagi hasil-syariah meningkat sebesar 10,83%, dari Rp2,82 triliun di tahun 2017 menjadi Rp3,13 triliun di tahun 2018.

Tinjauan Keuangan

Komposisi Pendapatan Bunga secara rinci termuat dalam tabel sebagai berikut :

(Rp juta)

Komponen	2016		2017		2018		Growth (%)
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2017-2018
Kredit yang diberikan	81.057.953	86,22	88.108.116	85,61	96.224.941	86,24	9,21
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	201.241	0,21	78.020	0,08	100.364	0,09	28,64
Surat Berharga yang dimiliki	7.609.791	8,09	8.913.955	8,66	9.082.912	8,14	1,90
Penempatan pada Bi dan bank lain	982.287	1,04	1.144.862	1,11	1.113.603	1,00	(2,73)
Giro pada Bank Indonesia	158.570	0,17	158.770	0,15	100.677	0,09	(36,59)
Lainnya	1.369.475	1,46	1.689.610	1,64	1.835.861	1,65	8,66
Pendapatan bagi hasil-syariah	2.636.677	2,80	2.819.042	2,74	3.124.446	2,80	10,83
Total Pendapatan Bunga	94.015.994	100,00	102.912.375	100,00	111.582.804	100,00	8,43

Beban Bunga

(Rp juta)

Keterangan	2016		2017		2018		Growth (%)
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2017-2018
Deposito	17.114.973	59,89	16.429.538	54,96	17.957.244	52,94	9,30
Tabungan	2.886.158	10,10	2.703.451	9,04	3.014.237	8,89	11,50
Giro	1.661.252	5,81	2.102.010	7,03	2.636.745	7,77	25,44
Simpanan dari Bank lain & LK lainnya	638.251	2,23	576.919	1,93	814.364	2,40	41,16
Surat berharga yang diterbitkan	1.129.485	3,95	2.226.531	7,45	2.378.334	7,01	6,82
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	378.230	1,32	533.985	1,79	1.057.039	3,12	97,95
Pinjaman yang diterima	2.106.449	7,37	3.039.849	10,17	1.570.122	4,63	(48,35)
Lain-lain	1.626.504	5,69	1.040.408	3,48	3.113.310	9,18	199,24
Beban syariah	1.035.502	3,62	1.241.590	4,15	1.375.637	4,06	10,80
Total Beban Bunga	28.576.804	100,00	29.894.281	100,00	33.917.032	100,00	13,46

Tinjauan Keuangan

Pada tahun 2018, kenaikan BI 7 *Days Reverse Repo* (BI7DRR) sebanyak 175 bps sejak Mei 2018 sampai dengan November 2018 menyebabkan beban bunga tumbuh 13,46% dari Rp29,89 triliun di tahun 2017 menjadi Rp33,92 triliun pada tahun 2018. Peningkatan beban bunga sejalan dengan naiknya beban bunga dari dana pihak ketiga (DPK) dengan peningkatan terbesar pada bunga Giro sebesar 25,44% menjadi Rp2,64 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan giro yang cukup tinggi selama tahun 2018 dari Rp2,1 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp2,64 triliun pada tahun 2018 atau meningkat 25,44%. Sementara Beban Syariah sebesar Rp1,38 triliun, naik 10,8% dibanding tahun 2017 sebesar Rp1,24 triliun.

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bersih

Dampak dari kenaikan BI7DRR yang penyesuaiannya lebih cepat dilakukan pada sisi liabilitas dibandingkan pada sisi aset menyebabkan pendapatan bunga dan bagi hasil bersih tumbuh *moderate* 6,37% dari tahun 2017 sebesar Rp73,02 triliun menjadi Rp77,67 triliun pada tahun 2018.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini antara lain terdiri dari *fee based income* (provisi dan komisi lainnya), penerimaan kembali atas aset yang telah dihapusbukukan, keuntungan transaksi mata uang asing dan keuntungan hasil penjualan dan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekap pemerintah.

Pada tahun 2018, Pendapatan Operasional Lainnya sebesar Rp23,43 triliun, naik 21,56% dibanding tahun 2017 sebesar Rp19,27 triliun. Peningkatan terutama disebabkan naiknya *fee based income* yang diterima serta penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(Rp juta)

Keterangan	2016		2017		2018		Growth (%)
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2017-2018
Fee Based Income	9.226.076	53,37	10.442.411	54,19	12.018.941	51,31	15,10
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	4.496.838	26,01	5.050.717	26,21	6.209.435	26,51	22,94
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekap Pemerintah - Netto	34.602	0,20	55.555	0,29	338.097	1,44	508,58
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekap pemerintah - Netto	450.895	2,61	784.501	4,07	534.952	2,28	(31,81)
Keuntungan Selisih Kurs - Netto	-	-	184.077	0,96	951.009	4,06	416,64
Lain-lain	3.079.446	17,81	2.754.026	14,29	3372996	14,40	22,48
Total Pendapatan Operasional Lainnya	17.287.857	100,00	19.271.287	100,00	23.425.430	100,00	21,56

Penerimaan Kembali Aset Yang Telah Dihapusbukukan (Pendapatan *Recovery*)

Pendapatan *recovery* tercatat sebesar Rp6,3 triliun, naik 24,98% dibanding tahun 2017 Rp5,04 triliun. Pertumbuhan pendapatan *recovery* yang cukup signifikan tersebut menunjukkan keberhasilan upaya BRI dalam percepatan penyelesaian lelang serta penagihan untuk kredit yang telah dihapusbukukan.

Tinjauan Keuangan

Tabel Pendapatan Jasa (Fee Based Income)

(Rp juta)

Keterangan	2016		2017		2018		Growth (%)
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2017-2018
Jasa Administrasi Simpanan	3.678.763.00	39,87	3.778.315.00	36,18	3.841.412.00	31,96	1,67
Jasa Transaksi *Non E-Channel*	655.302.00	7,10	655.099.00	6,27	768.884.00	6,40	17,37
Jasa Transaksi *E-Channel* dan *E-Banking*	2.246.025.00	24,34	2.760.110.00	26,43	3.205.930.00	26,67	16,15
Jasa CMS	17.656.00	0,19	23.015.00	0,22	24.271.00	0,20	5,46
Jasa Perkreditan	1.170.623.00	12,69	1.496.012.00	14,33	1.683.441.00	14,01	12,53
Jasa Trade Finance	775.136.00	8,40	791.659.00	7,58	1.265.042.00	10,53	59,80
Jasa Transaksi Bisnis Internasional	126.970.00	1,38	147.750.00	1,41	179.960.00	1,50	21,80
Jasa Kartu Kredit	183.511.00	1,99	222.080.00	2,13	312.840.00	2,60	40,87
Jasa Investment Services	111.180.00	1,21	141.345.00	1,35	201.693.00	1,68	42,70
Jasa Produk Asuransi	225.555.00	2,44	254.970.00	2,44	373.594.00	3,11	46,52
Jasa Lainnya	35.355.00	0,38	172.056.00	1,65	161.874.00	1,35	(5,92)
Total	9.226.076	100,00	10.442.411	100,00	12.018.941	100,00	15,10

Didominasi jasa *Trade Finance* yang tumbuh sebesar 59,8% pada tahun 2018 atau sebesar Rp1,27 triliun dimana pada tahun 2017 sebesar Rp791,66 miliar yang menunjukkan keberhasilan strategi BRI untuk meningkatkan penggunaan layanan perbankan BRI oleh nasabah korporasi BRI. Untuk jasa transaksi *e-channel* dan *e-banking* tercatat pada tahun 2018 sebesar Rp3,21 triliun, tumbuh 16,15% dari tahun 2017 sebesar Rp2,76 triliun.

Beban Operasional Lainnya

Beban Operasional Lainnya terdiri dari Tenaga Kerja Dan Tunjangan, Umum dan Administrasi, Kerugian Transaksi Mata Uang Asing dan Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi rekap Pemerintah.

Pada tahun 2018, Beban Operasional Lainnya BRI tercatat sebesar Rp41,99 triliun, naik 8,74% dibanding tahun 2017 tercatat sebesar Rp38,61 triliun. Peningkatan tersebut mayoritas berasal dari biaya tenaga kerja dan tunjangan yang mempunyai komposisi 53,4% dari total beban operasional lainnya dan tercatat naik 9,7% dari Rp20,44 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp22,42 triliun pada tahun 2018. Peningkatan biaya tenaga kerja sejalan dengan penerapan kebijakan pemberian insentif yang lebih menarik kepada tenaga pemasar BRI, yang dikaitkan dengan kinerja dari masing-masing pekerja BRI tersebut . Pertumbuhan biaya umum dan administrasi dikarenakan meningkatnya biaya pengadaaan barang dan jasa pihak ketiga.

Tabel Beban Operasional Lainnya

(Rp juta)

Keterangan	2016		2017		2018		Growth (%)
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2017-2018
Tenaga Kerja dan Tunjangan	18.593.976	52,89	20.440.958	52,94	22.423.271	53,40	9,70
Umum dan Administrasi	12.043.907	34,26	13.199.431	34,18	14.364.278	34,21	8,82
Kerugian transaksi mata uang asing - neto	274.109	0,78	-	-	-	-	-
Lain-lain	4.244.845	12,07	4.973.687	12,88	5.202.735	12,39	4,61
Total Beban Operasional Lainnya	35.156.837	100,00	38.614.076	100,00	41.990.284	100,00	8,74

Tinjauan Keuangan

Biaya Provisi

Pembentukan biaya provisi (cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan) tercatat sebesar Rp17,79 triliun, naik 4,7% dibanding tahun 2017 sebesar Rp16,99 triliun. Peningkatan biaya provisi yang relatif rendah tersebut, menunjukkan keberhasilan dari upaya BRI dengan menjaga kualitas kredit. Hal ini dapat dilihat dari NPL Rasio yang terjaga pada 2,27% di tahun 2018.

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2018, beban pajak penghasilan sebesar Rp9,34 triliun, naik 17,01% dibanding tahun 2017 sebesar Rp7,98 triliun. Peningkatan beban pajak sejalan dengan peningkatan pendapatan. Tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada BRI adalah sebesar 20%, BRI mendapat pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai perusahaan terbuka yang paling sedikit 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dimiliki lebih dari 300 orang dan masing-masing hanya boleh memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%. BRI telah melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Laba Bersih

Perolehan Laba bersih BRI tercatat sebesar Rp32,42 triliun, naik 11,61% dibanding tahun 2017 sebesar Rp29,05 triliun. Konsistensi BRI dalam melakukan ekspansi bisnisnya di segmen UMKM, kemampuan meningkatkan *fee based income*, keberhasilan dalam menjaga komposisi dana murah serta kemampuan untuk menjaga kualitas kredit dan efisiensi operasional bisnis membuat BRI mampu mempertahankan pencapaian laba bersih pada tahun 2018.

Penghasilan Komprehensif

BRI mencatatkan kerugian komprehensif sebesar Rp3,48 triliun, dibanding tahun 2017 yang membukukan penghasilan komprehensif sebesar Rp1,84 triliun. Kerugian timbul karena adanya kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek.

Total Laba Komprehensif

Pada tahun 2018, Laba Komprehensif sebesar Rp28,94 triliun, turun dibanding tahun 2017 sebesar Rp30,88 triliun. Penurunan ini dikarenakan turunnya penghasilan komprehensif yang dialami BRI.

Laba Tahun Berjalan	2016*)	2017*)	2018
Penghasilan Komprehensif Lainnya:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	159.569	61.655	159.569
Pajak penghasilanterkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(530.727)	(15.414)	(150.455)
Surplus revaluasi aset tetap	14.315.527	-	-
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(25.579)	30.709	(4.349)
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	1.658.696	2.286.250	(5.141.381)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(416.996)	(527.459)	1.216.705
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	15.160.520	1.835.741	(3.477.661)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	41.445.771	30.880.790	28.940.825

*Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Tinjauan Keuangan

LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas

Deskripsi	2016	2017	2018
Kas Bersih yang diperoleh dari Kegiatan Operasi	22.178.738	39.067.326	57.262.380
Kas Bersih yang digunakan untuk Kegiatan Investasi	(3.325.650)	(30.921.668)	(26.999.124)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	7.076.118	(10.846.957)	(1.071.548)
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	25.929.206	(2.701.299)	29.191.708
Penambahan kas dari akuisisi BRI Finance	0	0	0
Pengaruh Perubahan Kurs	1.279	(427)	(52.076)
Kas dan Setara Kas awal tahun	163.388.757	189.319.242	186.617.516
Kas dan Setara Kas akhir tahun	**189.319.242**	**186.617.516**	**215.757.148**

Jumlah Kas dan Setara Kas BRI pada tahun 2018 sebesar Rp215,76 triliun, naik 15,62% dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp186,62 triliun. Peningkatan Kas dan Setara Kas disebabkan meningkatnya kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi serta adanya penurunan aktifitas investasi dibandingkan dengan tahun 2017.

Arus Kas Dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2018 kas bersih dari kegiatan operasi tercatat sebesar Rp57,26 triliun naik dibandingkan 2017 yang tercatat sebesar Rp39,07 triliun. Jumlah kas dari operasi (sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi) sebesar Rp43,99 triliun, turun dibanding tahun 2017 sebesar Rp51,46 triliun.

Arus Kas Untuk Kegiatan Investasi

Jumlah kas yang digunakan untuk investasi sebesar Rp27 triliun, turun dari tahun 2017 sebesar Rp30,92 triliun. Penurunan disebabkan kenaikan Efek-efek dan obligasi rekap yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Kenaikan Efek dan Obligasi Rekap di tahun 2018 sebesar Rp25,19 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2017 sebesar Rp28,92 triliun.

Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2018, total pengeluaran Kas untuk Pendanaan sebesar Rp1,07 triliun, turun dibanding tahun 2017 sebesar Rp10,85 triliun. Penurunan pengeluaran kas untuk pendanaan terutama disebabkan meningkatnya jumlah penerimaan pinjaman yang diterima menjadi Rp10,83 triliun dari tahun 2017. Walaupun tetap ada peningkatan pembayaran dividen dari Rp10,48 triliun di tahun 2017 menjadi Rp13,05 triliun, dan pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo dari Rp4,92 triliun menjadi Rp8,94 triliun di tahun 2018. BRI juga memperoleh penerimaan atas pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp9,6 triliun.

RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan berikut dihitung dari kinerja keuangan entitas induk.

	URAIAN	2016	2017	2018
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	22,91	22,96	21,21
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,46	1,38	1,41
3	Aset prduktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,61	1,59	1,62
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,75	3,11	3,26
5	NPL *Gross*	2,03	2,10	2,14
6	NPL *Net**	1,09	0,88	0,92
7	*Return on Asset* (ROA)	3,84	3,69	3,68
8	*Return on Equity* (ROE)	23,08	20,03	20,49
9	*Net Interest Margin* (NIM)	8,00	7,93	7,45
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	68,69	69,14	68,48
11	*Loan to Deposit Ratio* (LDR)	87,77	88,13	89,57
Kepatuhan (*Compliance*)				
1	a. Persentase pelanggaran BMPK			
	i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
	ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
	b. Persentase pelampauan BMPK			
	i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
	ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
2	Giro Wajib Minimum (GWM)			
	a. GWM Utama Rupiah	6,94	6,52	7,16
	b. GWM Valuta Asing	8,03	8,15	8,01
3	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	6,67	4,22	3,73

Tinjauan Keuangan

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank dalam membayar utang dapat dilihat dari berbagai rasio keuangan sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

- ***Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

  Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pinjaman dengan simpanan (*loan to deposit ratio* atau LDR). Pada tahun 2018, LDR BRI tercatat sebesar 89,57%, sedikit naik dari tahun 2017 sebesar 88,13%. Peningkatan LDR menunjukkan fungsi intermediasi dijalankan dengan baik oleh BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio LDR tersebut berada pada kisaran target LDR BRI yaitu 90% +/- 2% yang merupakan level optimal untuk menjaga profitabilitas BRI.

- **Rasio Intermediari Makroprudensial (RIM)**

  Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, diharapkan RIM perbankan sebesar 80% sampai 92%. Dalam perhitungan RIM, diperhitungkan surat berharga yang diterbitkan dan ditatausahakan oleh KSEI dan tidak dimiliki oleh bank minimal 2 bulan sebelum tanggal laporan dan obligasi korporasi yang dimiliki. Pada tahun 2018, rasio RIM BRI sebesar 88,5%, meningkat dibanding RIM tahun 2017 sebesar 87,79%.

- ***Liquidity Coverage Ratio* (LCR)**

  Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, BRI melakukan pengelolaan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang merupakan rasio antara *high quality liquid asset* (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 hari kedepan dalam skenario stres. Pada tahun 2018, LCR BRI sebesar 217,44% dan LCR konsolidasi sebesar 217,97%. Dengan pencapaian LCR tersebut, BRI berhasil mempertahankan rasio kecukupan likuiditas jauh diatas batas minimal sebesar 100%.

- **Rasio Profitabilitas**

  Di industri perbankan, rasio profitabilitas umumnya diukur dengan menggunakan tingkat imbal hasil terhadap aset (*Return on Assets* atau ROA), imbal hasil terhadap ekuitas (*Return on Equity* atau ROE) dan marjin pendapatan bunga bersih (NIM).

Rasio Profitabilitas (%)

	2016	2017	2018
ROA	3,84	3,69	3,68
ROE	23,08	20,03	20,49
NIM	8,00	7,93	7,45

- ***Return On Assets* (ROA)**

  ROA BRI di tahun 2018 sebesar 3,68%, tercatat stabil apabila dibanding komposisi tahun 2017 yang tercatat sebesar 3,69%. Hal ini antara lain disebabkan kemampuan BRI menjaga kualitas aset serta meningkatkan porsi sumber alternatif pendapatan seperti *fee based income* dan pendapatan *recovery*, serta menjaga pertumbuhan OPEX yang moderat.

- ***Return on Equity* (ROE)**

  Dengan melakukan strategi optimalisasi kapital seperti pembayaran dividen yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018, ROE BRI sebesar 20,49%, atau meningkat 46 bps dibanding tahun 2017 sebesar 20,03%.

- ***Net Interest Margin* (NIM)**

  Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) BRI pada tahun 2018 sebesar 7,45% atau lebih rendah dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar 7,93%. Penurunan NIM terutama disebabkan naiknya beban bunga sebagai dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI7DRR sebanyak 175 bps pada tahun 2018.

Rasio Efisiensi

- **Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)**

  Pada tahun 2018, Rasio BOPO BRI sebesar 68,48%, turun sedikit dari tahun 2017 sebesar 69,14%. Penurunan BOPO disebabkan terkendalinya beban operasional sebagai dampak dari *business process re-engineering,* berupa digitasi proses bisnis yang dijalankan oleh BRI yang berdampak pada peningkatan efisiensi.

  Selain itu, kemampuan BRI menjaga kualitas asetnya, pada akhirnya mampu menahan kenaikan biaya provisi yang perlu dibentuk.

Rasio Efisiensi (%)

	2016	2017	2018
BOPO (%)	68,69	69,14	68,48

- **Rasio Modal - *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**
  Rasio kecukupan permodalan (CAR) mencerminkan kemampuan Bank untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pada tahun 2018, CAR BRI tercatat sebesar 21,21%, sedikit menurun dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 22,96%. Rasio CAR tersebut masih jauh diatas ketentuan regulator perbankan yang sebesar 9%-10% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko tingkat 2. Serta sudah memenuhi seluruh ketentuan Basel III untuk tahun 2018 yaitu untuk *capital buffer* sebesar 2,5% serta untuk *bank systemic* sebesar 1,75%.

- **Rasio Kepatuhan**
  - **Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**
    Pada tahun 2018, BRI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun tidak terkait, yang tidak memenuhi atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

  - **Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)**
    PDN merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah terhadap modal. Pada tahun 2018, rasio PDN sebesar 3,73%, turun dari tahun 2017 sebesar 4,22%. Angka PDN tersebut masih jauh di bawah jumlah maksimum yang ditetapkan BI tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, yaitu sebesar 20% dari modal.

TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kolektabilitas piutang dapat diukur dengan rasio kualitas aset atau Non Performing Loan (NPL). Kolektibilitas kredit yang direpresentasikan dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2018 sebesar 2,27%, sedikit meningkat dari tahun 2017 sebesar 2,23% namun masih jauh dibawah ketentuan BI yaitu maksimal sebesar 5%. BRI akan terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas asetnya.

Kolektabilitas Kredit Tahun 2016-2018*

(Rp juta)

	2016	2017	2018
Kredit	663.420.217	739.336.520	843.598.403
Lancar	619.793.792	692.099.915	793.276.668
Perhatian Khusus	29.474.869	30.784.126	31.173.877
Kurang Lancar	3.730.004	2.995.624	2.479.185
Diragukan	1.756.805	4.229.123	2.380.777
Macet	8.664.747	9.227.732	14.287.896
NPL	14.151.556	16.452.479	19.147.858
NPL(%)	2,13	2,23	2,27

*Laporan keuangan konsolidasi

TRANSAKSI SPOT DAN TRANSAKSI DERIVATIF

BRI melakukan transaksi lindung nilai untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing dan juga lindung nilai terhadap suku bunga. Dalam hal ini, BRI tidak menerbitkan transaksi derivatif untuk tujuan perdagangan. Pada praktiknya, transaksi spot dan transaksi derivatif mengacu pada sistem manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan dan praktik terbaik. Seluruh transaksi derivatif yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan BRI maupun nasabah.

Tinjauan Keuangan

Sepanjang tahun 2018, BRI melakukan transaksi spot dan transaksi derivatif dalam bentuk swap mata uang dan suku bunga, swap suku bunga, Option, Pembelian dan Penjualan Forward mata uang asing, Swap mata uang asing, pembelian dan penjualan spot mata uang asing. Secara rinci transaksi spot dan derivatif yang dilakukan BRI termuat dalam tabel berikut:

Transaksi	Tagihan Derivatif			Liabilitas Derivatif		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Swap mata uang dan suku bunga	32.204	64.708	25.671	179.286	115.981	67.944
Swap suku bunga	59.443	60.475	69.307	53.780	54.261	91.211
Option mata uang	-	10.218	23.951	-	11.341	20.774
Option saham	12.250	16.984	16.468	-	-	-
Pembelian dan Penjualan Forward mata uang asing	-	6.883	72.275	1.991	15.156	94.922
Swap mata uang asing	-	2.740	276.071	112.160	3.334	56.195
Pembelian dan penjualan spot mata uang asing	10	904	2.067	-	785	1.297
Total	**103.907**	**162.912**	**485.810**	**347.217**	**200.858**	**332.343**

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Pengelolaan struktur modal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko yang inherent dalam mengelola bisnisnya tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

Pada tahun 2018, BRI memiliki CAR sebesar 21,21%, sedikit turun dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 22,96%. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, menyebutkan bahwa profil risiko level 2 (*satisfactory*) memiliki minimal CAR sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Diluar ketentuan minimal CAR tersebut BRI diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang terdiri dari:

1. *Capital conservation buffer* sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
2. *Countercyclical Buffer* sebesar 0% dari ATMR.
3. *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1% dari ATMR.

Sehingga total CAR minimum BRI berada di level 11,76%-13,32% maka CAR BRI pada tahun 2018 yang sebesar 21,21% telah memenuhi ketentuan regulator perbankan dan jasa keuangan tersebut.

Secara struktur permodalan, pada tahun 2018, BRI memiliki modal inti (Tier-1) sebesar Rp164,93 triliun dan Modal Pelengkap (Tier-2) sebesar Rp8,69 triliun. Sedangkan rasio Tier-1 mencapai 20,15% atau diatas ketentuan minimal rasio Tier-1 sebesar 6%. Tier-1 BRI terdiri dari CET-1 karena sumber utama modal BRI adalah laba ditahan. Oleh karena itu Rasio CET-1 BRI sebesar 20,15%, atau jauh diatas ketentuan minimum sebesar 4,5% yang ditentukan oleh Regulator.

Tabel Struktur Modal BRI

Komponen	Konsolidasian (Rp juta)		
	2016	2017	2018
Modal Inti (Tier 1)	136.670.139	154.668.699	164.924.546
Modal Inti Utama (CET 1)	136.670.139	154.668.699	164.924.546
Modal Pelengkap (Tier 2)	6.240.293	7.083.240	8.693.875
Total Modal Tersedia	142.910.432	161.751.939	173.618.421
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	502.423.401	566.659.194	659.319.661
ATMR untuk Risiko Pasar	9.535.428	6.889.063	11.078.731
ATMR untuk Risiko Operasional	111.898.899	130.967.728	148.209.848
Total ATMR	623.857.728	704.515.985	818.608.240
Rasio CAR	22,91%	22,96%	21,21%
Rasio CET 1	21,91%	21,95%	20,15%
Rasio Tier 1	21,91%	21,95%	20,15%
Rasio Tier 2	1%	1,01%	1,06%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00%	9,00%	9,00%

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2018, BRI melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak untuk investasi barang modal, yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018, yaitu:

Objek	Nilai (Rp juta)
Jasa kontraktor pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto Paket 2	845.950
Pengadaan ATM	564.260
Sewa perangkat Hub dan Remote VSAT Fase-1 Integrasi BRIsat	278.543
Sewa saluran komunikasi	275.895
Pengadaan Mesin AS/400 Power-8 (E880)	220.000
Jasa kontraktor pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto Paket 1	112.900
Pengadaan *Cash Recycling Mechine* (CRM)	192.958
Jasa *maintenance agreement*	80.000
Pengadaan EDC	74.572
Upgrade server di DC GTI dan Tabanan	69.027
Pengadaan mesin *mainframe*	69.000

Sumber pendanaan dari ikatan material tersebut seluruhnya berasal dari dana internal Perseroan. Adapun denominasi mata uang yang digunakan adalah dalam bentuk Rupiah, sehingga BRI tidak melakukan perlindungan risiko kurs.

Tinjauan Keuangan

Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2018, BRI melakukan investasi barang modal yang terdiri dari:

Belanja Barang Modal	Konsolidasi (Rp juta)		
	2016	2017	2018
Tanah dan Bangunan	903.822	957.857	2.555.168
Meubelair dan Inventaris	143.069	125.049	248.210
Kendaraan	243.909	84.034	88.353
Komputer dan Perangkat Lunak	1.422.607	750.309	1.243.266
Satelit dalam Pengembangan	959.041	183.877	-
Total	**3.672.448**	**2.101.126**	**4.134.997**

KEBIJAKAN LINDUNG NILAI

BRI telah menerapkan prinsip lindung nilai sebagai upaya meminimalkan risiko dengan penjelasan sebagai berikut:

Kebijakan Umum

Transaksi Lindung Nilai (*hedging*) meliputi transaksi yang dilakukan dalam rangka melindungi nilai aset keuangan, kewajiban keuangan, pendapatan dan biaya serta arus kas baik secara *on balance sheet* maupun *off balance sheet* dari risiko suku bunga dan/atau risiko nilai tukar untuk posisi *Banking Book* dan *Trading Book*.

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai (*hedging*) berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Transaksi dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif tindak lanjut dan mitigasi risiko apabila terjadi pelampauan limit moderate pada parameter Profil Risiko Pasar.
2. Transaksi dapat dilakukan apabila terdapat indikasi perubahan kondisi ekonomi makro yang dianggap dapat menimbulkan kerugian, yang ditunjukkan antara lain oleh tren perubahan variabel pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar.
3. BRI dilarang memelihara posisi atas transaksi Lindung Nilai yang dilakukan oleh pihak terkait.
4. BRI wajib meneruskan (*pass-on*) transaksi pihak terkait pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada bank lain yang bukan pihak terkait.

Teknik Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan baik secara makro (*macro hedging*) atau mikro (*micro hedging*).

- ***Macro Hedging***

  Teknik ini digunakan untuk memitigasi dampak risiko ekonomi terhadap seluruh portofolio BRI. *Macro hedging* dilakukan melalui usulan Divisi *Assets and Liabilities Management* untuk diputus oleh ALCO.

- ***Micro Hedging***

  Micro hedging dilakukan BRI pada level transaksi secara individual. Transaksi ini dapat dilakukan sendiri oleh Divisi Treasury tanpa usulan divisi bisnis pengelola portofolio terkait, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta kemampuan untuk kontrol atas transaksi Lindung Nilai yang dilakukan.

  Pada tahun 2018, tagihan derivatif untuk tujuan lindung nilai yang dilakukan BRI sebesar Rp485,81 miliar, naik dari tahun 2017 yang sebesar Rp162,91 miliar. Sementara liabilitas derivatif sebesar Rp332,34 miliar.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali komitmen dan kontinjensi milik BRIS (entitas anak) (berdasarkan prinsip syariah) dilakukan dengan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Pada tahun 2018, jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp1,16 miliar. Jumlah liabilitas komitmen pada tahun 2018 sebesar Rp158,09 triliun, meningkat 22,4% dibandingkan tahun 2017. Peningkatan dikarenakan naiknya fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan dan bertambahnya penjualan spot dan mata uang asing. Dalam periode yang sama, liabilitas kontinjensi meningkat sebesar 31,9% yang dipengaruhi oleh peningkatan pada *Standby* L/C dan Garansi Bank.

Deskripsi	2016	2017	2018
Komitmen			
Tagihan Komitmen	12.219.746	4.038.459	16.316.902
Pembelian Spot dan Mata Uang Asing	12.219.746	4.038.459	16.316.902
Liabilitas Komitmen	136.821.075	129.159.708	158.089.597
Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur yang belum digunakan	120.916.072	107.073.032	130.854.091
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	8.541.152	8.980.671	8.693.691
Penjualan Spot dan Mata Uang Asing	7.109.202	13.000.508	18.476.485
Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Debitur yang belum digunakan	254.649	105.497	65.330
Komitmen - Neto	**(124.601.329)**	**(125.121.249)**	**(141.772.695)**
Kontijensi			
Tagihan Kontijensi	45.208	70.905	112.273
Tagihan Bunga dalam Penyelesaian	45.208	70.905	112.273
Liabilitas Kontijensi	24.523.015	34.030.380	44.886.051
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk :			
Standby L/C	3.838.190	10.841.726	13.535.519
Garansi Bank	20.684.825	23.188.654	31.350.532
Kontijensi - Neto	**(24.477.807)**	**(33.959.475)**	**(44.773.778)**

Tinjauan Keuangan

SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH

Secara umum SBDK dihitung berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana nasabah, beban operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta komponen profit margin dari penyaluran kredit. Perhitungan SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko dari debitur, yang besarnya tergantung dari penilaian terhadap risiko masing-masing debitur. Untuk itu, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Perhitungan SBDK berlaku untuk jenis kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR). Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Namun demikian, Bank Indonesia menyerahkan klasifikasi kredit tersebut sesuai dengan kriteria internal bank. Tekanan eksternal yang membuat BI menetapkan strategi kebijakan moneter sehingga bulan Mei 2018 sampai dengan November 2018 BI secara agresif menaikan suku bunga acuan BI7DRR sebanyak 175 bps. Hal ini secara langsung berakibat pada kenaikan biaya dana yang mengalami penyesiauan pada tingkat suku bunga simpanan lebih cepat dibandingkan suku bunga pinjaman. Hal ini secara langsung berpengaruh pada pencapaian NIM dan BOPO BRI pada tahun 2018. Terkait dengan CAR, dengan posisi CAR sebesar 21,21% jauh diatas ketentuan minimal CAR sebesar 14,75% maka CAR BRI masih pada posisi yang sangat aman.

Suku Bunga	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
TMT Desember 2018	9,95%	9,95%	17,50%	9,98%	12,50%

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website www.bri.co.id.

PENCAPAIAN DAN TARGET 2018

Angka Bank Saja

Keterangan	Target 2016	Realisasi 2016	Pencapaian (%)	Target 2017	Realisasi 2017	Pencapaian (%)	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian (%)
Aset	964,55	964,00	99,94	1.054,98	1.076,44	102,03	1.213.156	1.234.200	101,73
Laba Bersih	25,44	25,75	101,22	27,76	28,47	102,56	31.608	31.701	100,29
Kredit yang Diberikan	653,70	635,29	97,18	715,29	708,00	98,98	796.627	804.338	100,97
Dana Pihak Ketiga	719,00	723,85	100,67	787,12	803,33	102,06	900.738	898.033	99,70
BOPO	71,30%	68,69%	97,71	69,62%	69,14%	100,69	68.41%	68.48%	99,90
LDR	90,92%	87,77%	96,54	90,88%	88,13%	96,97	88.44%	89.57%	101,28
NPL (Gross)	2,16%	2,03%	93,98	2,11%	2,10%	100,47	2.35%	2.14%	109,10
NPL (Net)	1,25%	1,09%	87,20	1,18%	0,88%	125,42	1.05%	0.92%	112,20
NIM	8,09%	8,00%	98,89	7,85%	7,93%	101,02	7.57%	7.45%	98,39
CAR	21,92%	22,91%	104,52	21,29%	22,96%	107,84	21.39%	21.21%	99,16

Pada tahun 2018, pencapaian kinerja BRI (Bank saja) secara umum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Namun demikian, ada beberapa target yang belum terpenuhi seperti DPK, BOPO, dan NIM serta CAR. Terkait dengan DPK, tekanan eksternal memberikan pengaruh yang signifikan. Keluarnya dana asing memberikan tekanan pada likuiditas rupiah di dalam negeri. Namun pertumbuhan DPK BRI (12,19%) tercatat masih diatas pertumbuhan DPK Industri (6,45%) sehingga pangsa pasar DPK BRI meningkat dari sebelumnya 15,91% di tahun 2017 menjadi 16,77% di tahun 2018.

TARGET 2019

Pada tahun 2019, kondisi *business environment* diproyeksi relatif stabil. Pertumbuhan GDP meningkat dan tingkat inflasi terjaga dengan baik serta tekanan eksternal yang menurun menopang stabilnya nilai tukar rupiah, sehingga tekanan kenaikan suku bunga berkurang di tahun 2019.

Dari sisi internal, *business process re-engineering* seperti digitasi proses penyaluran kredit, terutama kredit mikro diharapkan dapat mendorong pertumbuhan segmen bisnis unggulan BRI tersebut. Oleh karena itu, target finansial BRI yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan Kredit 12% - 14%
- Posisi LDR dijaga pada level 90% +/-2%
- Pertumbuhan Biaya Operasional 9%-11%
- Kualitas kredit atau NPL dijaga pada level 2,0%-2,2%
- Rasio kecukupan modal dijaga diatas 20%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL PERIODE LAPORAN

Pada tanggal 3 Januari 2019, BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait dengan agenda perubahan pengurus perseroan, pemegang saham BRI menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Jeffry J. Wurangian sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal 20 September 2018.
b. Memberhentikan dengan hormat Kuswiyoto sebagai Direktur Corporate Banking, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.
c. Mengangkat Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama.

PROSPEK USAHA

Prospek Ekonomi Makro

Di tengah trend ekonomi global, perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada tahun 2018. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada pada level 5,17%, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang dari konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah yang meningkat. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 55,74% terhadap PDB tetap tumbuh karena daya beli yang terjaga serta tingginya keyakinan konsumen. Sementara investasi, mengalami pertumbuhan cukup tinggi yang ditopang investasi bangunan, terkait proyek infrastruktur dan properti, maupun investasi non bangunan. Di sisi pengeluaran pemerintah, realisasi anggaran tetap tumbuh terutama untuk belanja barang serta belanja pegawai. Pada sisi perdagangan, ekspor tetap tumbuh positif di tengah tekanan global.

Tinjauan Keuangan

Indikator	2016	2017	2018
Pertumbuhan PDB (%)	5,03	5,07	5,17
Nominal PDB (USD Miliar)	932,31	1.015,38	1042,15
PDB/Kapita (USD)	3.605	3.877	3,927
Ekspor (USD miliar)	145,19	168,83	180,06
Impor (USD miliar)	135,65	156,98	188,63
Neraca Perdagangan (USD miliar)	8,78	11,84	-8,57
Cadangan devisa (USD miliar)	116,36	130,20	117,21
Suku Bunga Acuan (%) *7 Day Reverse Repo*	4,75	4,25	6
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13
IHSG (nilai riil)	5.297	6.356	6.111

Sumber: BPS, BI 2018
Catatan : Konversi dengan kurs Rp 14.000,-

TREND PDBINDONESIA TAHUN 2014 – TRIWULAN IV 2018

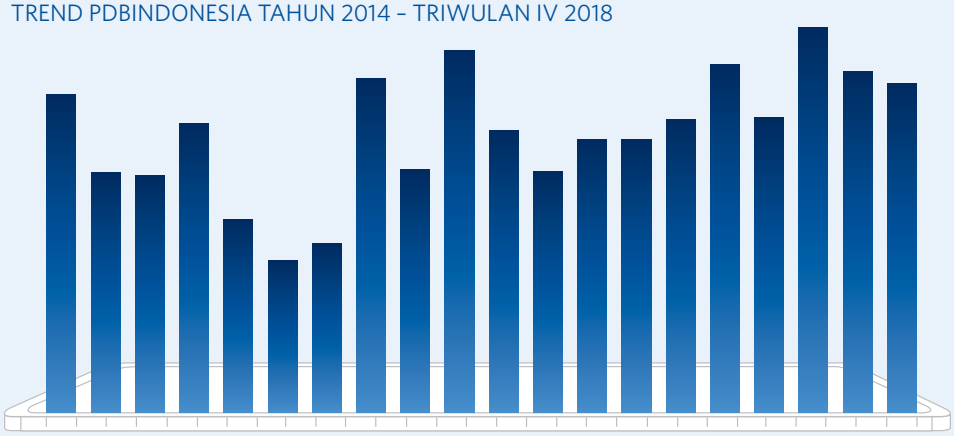

Sumber data:BPS, 2019

PERGERAKAN RUPIAH TERHADAP USD

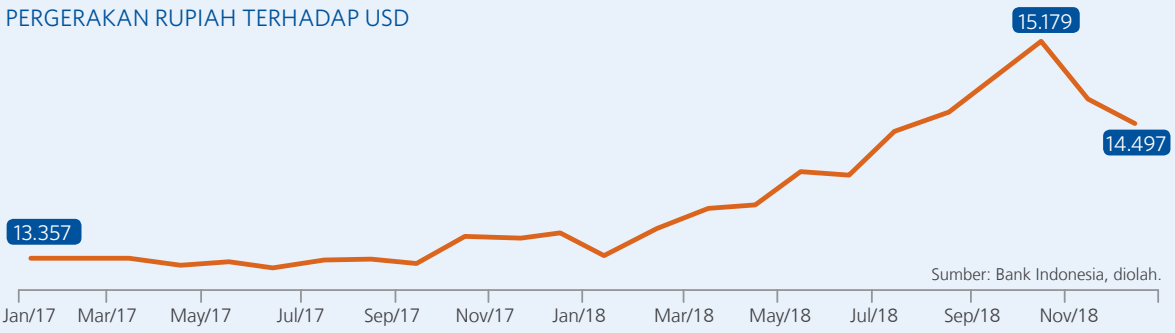

Sumber: Bank Indonesia, diolah.

Tinjauan Keuangan

PERGERAKAN INFLASI DAN BI 7DRRR
Sumber: Bloomberg, diolah

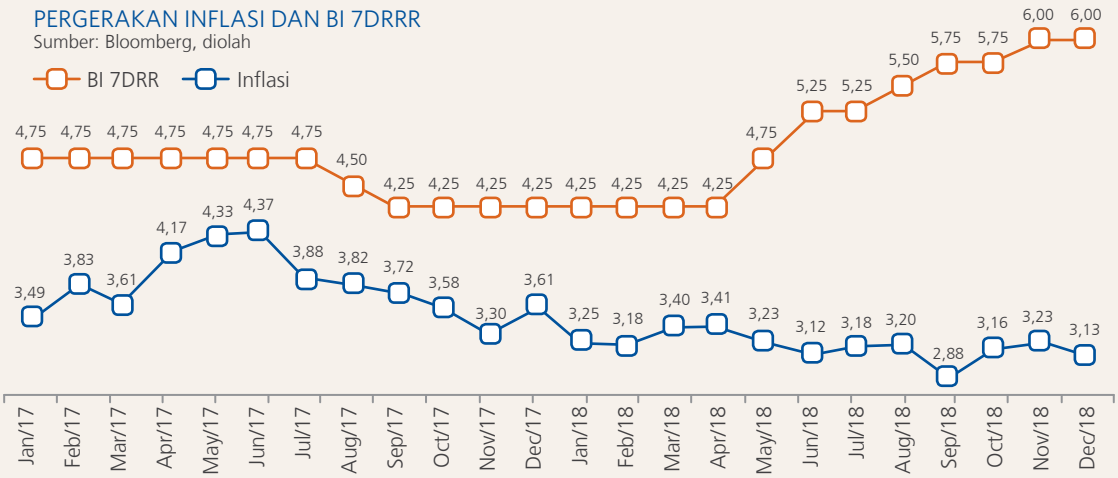

Prospek Industri Perbankan

Pada tahun 2019, kinerja perbankan diperkirakan kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan LPS memperkirakan pertumbuhan kredit dua digit, sedangkan DPK diperkirakan akan berada pada interval 8%-11%.

YoY %	2017		2018		2019	
	Kredit	DPK	Kredit	DPK	Kredit	DPK
OJK	8,24%	9,35%	10%-12%	10%-12%	10%-13%	8%-10%
BI	8,24%	9,35%	10%-12%	9%-11%	10%-12%	9%-11%
LPS	8,24%	9,35%	10%	7.6%	12.4%	9%

Tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh industri perbankan adalah arah kebijakan dan regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah dan otoritas moneter dan jasa keuangan. Berikut beberapa rencana penerapan regulasi yang memberikan dampak terhadap bisnis perbankan, meliputi:

a. Rencana pembentukan Holding BUMN sektor Perbankan dan Jasa Keuangan.
b. Penerapan ASEAN *Free-Trade*
c. Implementasi PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Kewajiban Penyimpanan *Floating* Dana *Electronic Money* di Bank BUKU IV.
d. Peraturan wajib parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) bagi pengusaha sektor sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku 1 Januari 2019.

Penerapan kebijakan-kebijakan di atas merupakan peluang dan tantangan bagi industri perbankan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu bank perlu memperkuat struktur aset dan liabilitas yang dimiliki, berinovasi aktif dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer centric*), dan memperbaiki bisnis proses dengan perbaikan pada *service level agreement* (SLA) dan proses digitasi maupun digitalisasi sehingga kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan lebih produktif.

Tinjauan Keuangan

Prospek Usaha BRI

Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2019 yang diproyeksikan lebih baik dibandingkan tahun 2018, diharapkan berdampak positif pada sektor konsumsi rumah tangga domestik seiring peningkatan daya beli masyarakat. Dukungan dari kondisi makro disertai dengan perbaikan proses bisnis internal BRI diharapkan akan menunjang ekspansi bisnis BRI.

- Bisnis Mikro
  Untuk memaksimalkan potensi bisnis di segmen Mikro, salah satunya adalah dengan mengelola produk KUR agar dapat menjadi *pipeline* kredit Mikro komersial, yaitu Kupedes. Optimisme tersebut ditunjang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah terkait pengembangan sektor usaha Mikro seperti terlihat dari peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI dari Rp79,74 triliun di tahun 2018, menjadi Rp86,97 triliun di tahun 2019. Ini merupakan peluang bagi BRI untuk menjaga pertumbuhan kredit Mikro yang memiliki keunggulan dan terbukti menjadi pemimpin pasar pinjaman Mikro melalui Kupedes dan KUR.

- Bisnis Konsumer
  Potensi di segmen Konsumer akan dimaksimalkan dengan produk unggulan Briguna, yaitu pinjaman untuk segmen pekerja berpenghasilan tetap, serta KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah melalui optimasi *cross-sell* dengan segmen Korporasi dan BUMN.

- Dana Murah
  Peningkatan penyaluran kredit terutama di segmen Konsumer dan Mikro tersebut diharapakan akan diimbangi dengan kemampuan BRI dalam menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan Simpedes dan Britama. Dengan meningkatnya porsi APBN untuk subsidi non energi dan pos transfer dana ke daerah, diharapkan akan menyumbang pada pertumbuhan Simpanan di segmen Mikro seperti yang terlihat pada 2 tahun sebelumnya.

- Operasional Bisnis
  BRI akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi dengan membatasi pembukaan unit kerja operasional dan rekrutmen pegawai. Sehingga untuk mempertahan kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, BRI akan mendorong pertumbuhan bisnis agen BRILink, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan membangun *Big Data* dan menyelaraskan proses bisnis pada berbagai sistem prakarsa dan putusan kredit.

- Kualitas Aset
  Untuk kualitas kredit, BRI masih akan melakukan strategi menjaga tingkat rasio NPL (*Non Performing Loan*) tahun 2019 dikisaran 2,0% sampai dengan 2,2% dengan memaksimalkan penyelesaian kredit melalui intensifikasi kerjasama dengan kejaksaan untuk pelaksanaan eksekusi agunan.

ASPEK PEMASARAN

Pencapaian kinerja BRI di tahun 2018 tidak dapat terlepas dari keberhasilkan kegiatan komunikasi pemasaran (marketing communication) atas produk dan layanan perusahaan. Kegiatan komunikasi pemasaran secara intens dilakukan BRI untuk meningkatkan *awareness*, *knowledge*, dan *activation* dari produk, jasa, dan layanan serta program yang dimiliki oleh Bank BRI baik kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) maupun calon nasabah (meningkatkan *purchase intention*).

Implementasi strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi (*Integrated Marketing Communication*) melalui media komunikasi yang efektif & efisien mampu menciptakan *awareness* yang optimal serta, *positioning* yang tepat dan relevan untuk masing-masing *target audience* di tiap segmen, serta meningkatkan *brand value* bagi Bank BRI.

Untuk mengkomunikasikan produk dan layanan kepada nasabah maupun masyarakat umumnya, beragam program pemasaran dan promosi produk dan layanan telah dilakukan dengan memperhatikan segmentasi pasar, preferensi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Bank BRI memaksimalkan media komunikasi seperti *Above The Line* (cetak dan elektronik), *Below The Line*, *Media Out of Home* (OOH) dan juga didukung media digital dan Social Media Bank BRI yaitu Instagram (@bankbri_id), Twitter (@promo_BRI, @BANKBR_ID, @KontakBRI) dan Facebook (@BRIofficialpage / Bank BRI) dan Youtube (Bank BRI) dengan jumlah total followers mencapai 849,192 followers di 2018.

Beragam aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan untuk nasabah secara umum dibuat sesuai dengan segmentasi dan preferensi nasabah Bank BRI adalah sebagai berikut :

Bank BRI sebagai *Official Prestige Partner* Asian Games & Asian Para Games 2018

Dalam rangka mendukung Bangsa Indonesia dalam ajang Olahraga International Terbesar se-Asia yaitu Asian Games & Asian Para Games 2018, Bank BRI Bersama BUMN Hadir Untuk Negeri menjadi *Official Prestige Partner* Asian Games & Asian Para Games 2018. Hal ini dilakukan oleh BRI sebagai salah satu penguatan *Brand Images* dan *Brand Awareness* yang digambarkan dari banyaknya nilai positif dalam olahraga seperti ketekunan dalam berlatih, sportivitas dan integritas yang sejalan dengan budaya kerja BRI.

Beragam aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh Bank BRI sebagai salah satu *Official Prestige* Partner, BRI meluncurkan produk yang di desain khusus dengan karakter-karakter Asian Games yaitu Kartu BRIZZI Edisi Asian Games 2018, Kartu BRI Touch Edisi Asian Games 2018 dan Kartu Debit Edisi Spesial Asian Games 2018. Tujuan BRI meluncurkan 3 (tiga) produk Edisi Spesial Asian Games 2018 untuk menyatukan momentum Asian Games 2018 dengan menyukseskan gerakan nasional non tunai (*Cashless Society*) yang tengah digalakkan Pemerintah.

Selain meluncurkan 3 (tiga) produk Edisi Spesial Asian Games 2018, BRI juga menyelenggarakan rangkaian acara untuk memeriahkan penyambutan Asian Games antara lain Road To Asian Games Apresiasi Atlet Bulu Tangkis Tim Thomas Uber Cup Indonesia, BRI Sunday Fest Asian Games Series, Road To Asian Games Proteksi Atlet Tenis Indonesia, Parade Asian Games 2018 dan melakukan pemasaran serta promosi melalui media komunikasi *Above The Line* dan *Out of Home*.

Sebagai Official Prestige Partner, Bank BRI juga turut mendukung dan menyambut Asian Para Games 2018. Aktfitas pemasaran dan promosi untuk menyambut Asian Para Games 2018 antara lain peluncuran kartu BRIZZI Edisi Spesial Asian Para Games 2018. Bank BRI pun menyambut dan meramaikan dengan kegiatan – kegiatan seperti Test Event Asian Para Games 2018 dengan mendirikan Booth Money Changer dan branding event, mendirikan booth Asian Para Games di acara Harmoni Pasar Klewer, Parade Momo dan BRI Sunday Fest yang diikuti penyerahan Obor Asian Para Games 2018 ke Direktur Utama Bank BRI.

Selain itu Bank BRI juga ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya bank penyalur bonus bagi para atlit.

Peluncuran Produk Baru

Tahun 2018 Bank BRI bersinergi dengan Kementerian Pariwisata Indonesia meluncurkan Kartu Kredit BRI Wonderful Indonesia sebagai wujud dukungan menuju target 270

Tinjauan Keuangan

Juta wisatawan nusantara. Kartu ini merupakan kerja sama penerbitan Co-Branding Card antara Bank BRI dengan Kementrian Pariwisata, dimana Bank BRI berperan untuk mempopulerkan Brand Wonderful Indonesia. Kartu Kredit BRI *Wonderful Indonesia* juga dilengkapi fitur - fitur menarik lainnya, seperti keuntungan dalam bentuk *Rewards Point* setiap transaksi menggunakan kartu tersebut, yang dapat ditukar ke Garuda Miles dan atau Big Point Air Asia. Pemilik kartu mendapatkan *double point* untuk transaksi di MCC Travel & Tour, Airlines, *double point* untuk transaksi di MCC Hotel.

Selain itu, Bank BRI juga meluncurkan produk Tabungan SiMuda (Mahasiswa dan Pemuda) yang merupakan inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tabungan SiMuda sendiri memiliki fitur yang dikhusukan kepada Mahasiswa dan Pemuda untuk melakukan investasi sejak dini seperti SiMuda Rumahku (DP Rumah) dan SiMuda InvestasiKu (Investasi Reksa Dana).

Untuk mendukung program Pemerintah bidang Pendidikan, Bank BRI meluncurkan produk pinjaman bernama Briguna Pendidikan yang memberikan kemudahan dan membantu untuk bisa meneruskan Pendidikan ke jenjang level yang lebih tinggi.

Peluncuran produk – produk baru Bank BRI lainnya yaitu penerbitan kartu debit Berlogo GPN, Kartu Kredit BRI World Access, Co-Branding BRIZZI dengan Universitas Ternama di Indonesia, dan produk digital Bank BRI yaitu REMBO dan PINANG yang dikelola oleh entitas anak Bank BRI.

Event/Aktivitas Hobi

a. Music

Tahun 2018, Bank BRI memanjakan milenial dengan berbagai macam acara musik baik dalam negeri maupun manca negara antara lain Harmoni Pasar Klewer, Fifth Harmony Concert : PSA Tour, Yovie Widianto & His Friends, Back in Block Trio Lestari 2018, Musi Festival 2018 dan Mariah Carey : Live in Concert Bersama BUMN.

Nasabah BRI dapat menikmati berbagai benefit dan privilege bagi pemergang kartu Bank BRI (Kartu Kredit BRI, Debit BRI, BRI Prioritas, dan E-Pay) dimana BRI memberikan berbagai kemudahan dan keistimewaan bagi Nasabah seperti promo diskon pembelian tiket s/d 50% , promo penukaran BRI Poin, jalur masuk VIP tanpa antrian serta games dan hadiah menarik lainnya di Booth Bank BRI.

b. *Food*

Bagi pecinta kuliner, Bank BRI memberikan berbagai promo yang ditawarkan untuk Nasabah Bank BRI khususnya pemegang Kartu Kredit BRI dan Kartu Debit BRI di berbagai restoran ternama di Seluruh Indonesia antara lain Pizza Hut, McD, Dum Dum, Es Teller 77, Secret Recipe, CFC, CoCo, Bakso Afung, Abuba Steak, dan lain-lain. Bank BRI juga mengadakan event bagi pecinta kuliner seperti Festival Kuliner Ramadhan, Pasar Nusantara dan Pasar Tiban.

c. *Travel*

Tren berlibur yang saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dimanfaatkan oleh Bank BRI dengan program promosi menawarkan tiket pesawat dan paket liburan bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan travel agent seperti Lion Air Exhibition, Air Asia dan Garuda Indonesia *Online Travel Fair* (GOTF) 2018 dan beberapa program kerja sama lainnya seperti promo Diskon Garuda Indonesia, promo Kartu Kredit JCB & Maskapai Asing seperti ANA Airlines, dan Turkish Airlines. Penawaran yang diberikan berupa harga special untuk kelas bisnis. Untuk pemesanan hotel dan paket wisata, Bank BRI bekerja sama dengan Accor Hotel Group, Traveloka, Tiket.com, dan Agoda dengan penawaran diskon dan harga spesial.

d. *Sport*

Dalam rangka mendukung olahraga baik nasional maupun internasional, Bank BRI mewujudkan dukungannya pada berbagai event olahraga yang berlangsung selama tahun 2018 diantaranya IBL 2018, DBL, JRBL, Toba Ganesha Run, Kartini Run, Sun Down Family Run Bersama OJK, TNI Run, Oeang Run, Electric Run dan Golf Tournament seperti Indonesia Open dan Junior Golf Tournament. Bank BRI juga memiliki event lari tahunan dengan nama BRI Run.

e. Fashion

BRI bekerja sama dalam penyelenggaraan berbagai acara peragaan busana maupun aksesoris antara lain *Versace Spring Summer 2018 Collection*, *Ramadhan Fashion Soiree*, Batik Alleira, Membatik oleh Dharmapertiwi, dan *Spring Summer Collection Show by* Sapto Djojokartiko, *Passion Jewellery*. BRI juga memberikan kemudahan bagi nasabah berupa program diskon, program cicilan 0% dan program penukaran poin unutk beberapa produk ternama seperti Polo by Ralph Lauren, Banana Republic, Guess, GAP, Superdry dan lainnya.

Pangsa Pasar (Bank Saja)

Pangsa pasar BRI dalam hal aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap industri terus menunjukkan peningkatan. Berikut pangsa pasar BRI dalam tiga tahun terakhir.

Tabel Pangsa Pasar BRI 2016-2018

Tahun	Aset			Kredit			DPK		
	BRI	Industri	Pangsa	BRI	Industri	Pangsa	BRI	Industri	Pangsa
2016	964.001	6.729.799	14,32%	635.291	4.377.195	14,51%	723.845	4.836.758	14,97%
2017	1.076.438	7.387.634	14,57%	708.001	4.737.972	14,94%	803.327	5.289.377	15,19%
2018	1.234.200	7.877.836*)	15,67%	804.338	5.160.155*)	15,16%	898.033	5.573.389*)	16,11%

*) Data November 2018

PANGSA ASET
(%)

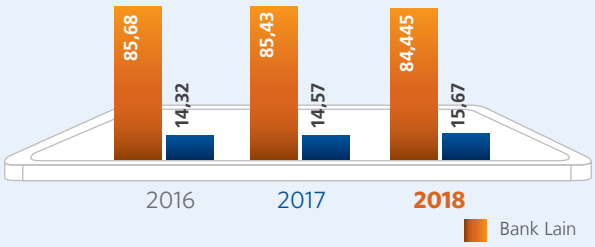

PANGSA KREDIT
(%)

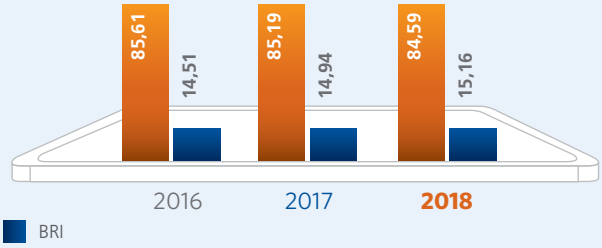

Tinjauan Keuangan

Strategi Pemasaran 2019

Dalam rangka meningkatkan bisnis Bank BRI baik dari sisi simpanan maupun pinjaman, di perlukan dukungan aktifitas komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Strategi komunikasi bertujuan untuk meningkatkan *awareness, knowledge, dan activation* dari produk dan jasa serta program yang dimiliki oleh Bank BRI baik kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) maupun calon nasabah (meningkatkan *purchase intention*).

Secara umum, dalam mencapai tujuan Bank BRI di akhir 2022 untuk menjadi "The Most Valuable Bank in South East Asia and Home to The Best Talent", melalui tema strategi di tahun 2019 yaitu "Leading Consumer Banking in Indonesia" maka strategi pemasaran Bank BRI akan lebih difokuskan kepada produk-produk yang secara substansi berbasis kepada individu/ritel baik pada sisi transaksi, *lending*, dan khususnya pada *funding*.

Aktifitas kegiatan pemasaran Bank BRI mulai 2019 ke depan juga akan banyak dipengaruhi oleh beberapa kondisi baik eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, penurunan NIM perbankan mengakibatkan pendapatan dari sisi FBI harus ditingkatkan melalui produk-produk yang menghasilkan transaksi. Selain itu, pengaruh dari perkembangan generasi milenial dan post milenial yang memiliki habit *"consumerism as life"* juga memerlukan pendekatan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara dinamis dan dikomunikasikan melalui saluran komunikasi yang lebih fleksibel, personal dan mudah diakses seperti penggunaan saluran komunikasi digital karena generasi ini sangat berpotensi menjadi nasabah masa depan Bank BRI. Dari sisi internal, dari sisi r*etail funding* dalam hal ini tabungan, adalah sebuah *entry gate* untuk menggunakan produk & fitur *E-Banking* yang mampu menjadi lokomotif utama dalam penerimaan dari sisi *fee based income*.

Bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi *backbone* bisnis Bank BRI dan ditargetkan untuk meningkat *market share*-nya tentu juga akan mendapat prioritas khusus untuk menjamin *sustainability*-nya dari aspek *awareness, image, & loyalty*. Selain itu, Strategi komunikasi juga difokuskan untuk segmen *Business to Business (B2B)* dan dilakukan secara lebih *customized* agar lebih optimal dalam menangkap peluang & potensi dari *value chain* di pasar. Program-program yang dapat memperkuat struktur dana dalam hal ini *CST Program* akan mendapatkan perhatian lebih mengingat peranan strategisnya untuk menjamin stabilitas pendanaan dan juga *price competitiveness*.

BRI juga menangkap potensi bisnis dari bidang jasa pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan dengan konsep *one stop financial solution* dalam pengelolaan keuangan nasabah. Beberapa strategi untuk meningkatkan penghimpunan dana dan pendapatan *fee based income* BRI antara lain:

1. Mengadakan program skala Nasional/ Regional terpadu dan terintegrasi dengan unit kerja lain termasuk perusahaan anak BRI untuk membangun suatu ekosistem yang dapat meningkatkan *value* dan *profit* bagi BRI.
2. Memanfaatkan *value chain* nasabah korporasi untuk meningkatkan penghimpunan dana terutama giro dan tabungan.
3. Mendorong *cross selling* asuransi, investasi dan produk layanan keuangan lainnya kepada nasabah *existing* disertai dengan pengembangan sistem aplikasi pendukung kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi seperti aplikasi *customer portfolio management*, *medallion* dan aplikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan bisnis dan nasabah (*customer need*) BRI.
4. Implementasi *sales effectiveness program* yang fokus pada kolaborasi pertumbuhan CASA dan produktivitas *cross selling* produk yang berorientasi terhadap kebutuhan nasabah.

Meningkatkan *customer experience* di seluruh *e-channel* dan *e-banking* BRI serta melakukan strategi pengembangan produk dan pemasaran yang berfokus kepada pasar sasaran kaum muda milenial, perempuan, dan netizen (pengguna aktif internet).

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Dalam memutuskan besaran dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, BRI memerhatikan faktor proyeksi pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor

sustainable tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun ke depan. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Jumlah Dividen Yang Dibagikan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 22 Maret 2018, dengan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp28,47 triliun, maka dengan rasio 45%, dividen yang dibagikan adalah Rp13,05 triliun. Pemegang saham menyetujui peningkatan rasio pembayaran dividen dari 40% dari laba bersih pada tahun 2017 menjadi 45% dari laba bersih pada tahun 2018. Jumlah dividen tunai per saham sebesar Rp106,75 dan dibayarkan pada tanggal 25 April 2018 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018.

Tabel Pembayaran Dividen BRI

Keterangan	2016	2017	2018
Laba Bersih (Rp miliar)	26.285,25	29.045,05	32.418,49
Persentase Pembagian Dividen (%)	30	40	45
Dividen Kas per Saham (Rp penuh)	311,66	428,61	106,75
Tanggal Pembayaran	22-Apr-16	13-Apr-17	25-Apr-18

KONTRIBUSI BAGI NEGARA

Seiring dengan pertumbuhan usaha BRI telah berkontribusi bagi negara baik secara tidak langsung maupun langsung. Kontribusi tidak langsung yang telah diberikan BRI adalah turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit maupun layanan perbankan lainnya. BRI juga turut terlibat dalam berbagai program pemerintah terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan antara lain penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, BRI turut menjaga kedaulatan bangsa dengan memberi layanan perbankan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) yang didukung teknologi satelit BRISat.

Adapun kontribusi langsung BRI bagi negara adalah dalam bentuk setoran pajak serta pembayaran dividen kepada Pemerintah RI sebagai pemegang saham utama BRI. Berikut kontribusi Pajak dan dividen yang telah dilakukan BRI.

Tabel Kontribusi Pajak dan Dividen

No	Jenis Pajak	2016	2017	2018
1	PPh Pasal 21	1.029.521	834.583	1.319.719
2	PPh Pasal 22	33.817	20.789	19.541
3	PPh Pasal 23	104.646	133.348	170.931
4	PPh Pasal 26	756.000	959.794	1.102.587
5	PPh Final pasal 4 ayat (2)	4.020.859	3.904.048	4.197.500
	Sub Jumlah Pajak Potput	**5.944.843**	**5.852.562**	**6.810.278**
6	PPN & Bea Materai	116.204	108.370	156.647
7	PPh Badan (Corporate Tax)	8.877.164	9.064.649	9.845.709
8	Dividen	4.363.259	6.000.477	7.472.281
	Jumlah (Pajak + Dividen)	**19.301.470**	**21.026.058**	**24.284.915**

Tinjauan Keuangan

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Pada tahun 2018, BRI telah memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan yang masih berjalan. BRI memiliki Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen (*Management Stock Option Plan*/MSOP) sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Management Stock Option Plan (MSOP)).

Pekerja BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM

BRI melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering* atau IPO) pada 10 November 2003. Sesuai dengan penjelasan pada prospektus IPO, perincian penggunaan dana yang diperoleh dari IPO yakni sebesar Rp1,47 triliun adalah sebagai berikut:

No	Penggunaan *Proceed* IPO	Rencana	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Pencapaian
1	*Upgrade Core Banking* dan IT *System*	883,27	196,24	564,35	646,96	698,87	723,36	883,27	100%
2	Ekspansi jaringan kerja	441,63	213,68	419,34	441,63	441,63	441,63	441,63	100%
3	Riset dan pengembangan produk	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	100%
	Total	**1.472,11**	**557,13**	**1.130,90**	**1.235,80**	**1.287,71**	**1.312,20**	**1.472,11**	**100%**

Pada posisi 31 Desember 2018, sejak tahun 2009 seluruh dana IPO telah digunakan sehingga tidak terdapat saldo dana hasil penawaran umum oleh BRI.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

BRI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan. BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dalam kegiatan normal usaha. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel berikut menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi tersebut.

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Kementerian Pertahanan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
Karyawan kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan Syariah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Adhimix Precast Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Aerotrans Services Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Angkasa Pura I (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Piutang dan Pembiayaan Syariah
PT Asuransi Jiwasraya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Asuransi Jasa Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Aset Tetap
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Aset Tetap
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Bank BNI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bank Mandiri Taspen	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Tinjauan Keuangan

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT Bank Syariah Mandiri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT BTN Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT BNI Multifinance	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Citra Waspphutowa	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan Pembiayaan Syariah
PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Kredit yang diberikan, Tagihan Akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, Garansi yang diterbitkan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Tagihan akseptasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Kimia Farma (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Kimia Farma Trading dan Distribusi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Koperasi Karyawan BRI Syariah	Hubungan kepengurusan	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan	Tagihan akseptasi
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Len Industri (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Len Railways System	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Mandiri Utama Finance	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Kredit yang diberikan, Tagihan Akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, tagihan wesel ekspor dan wesel tagih

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pertamina Patraniaga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Perkebunan Nusantara XI	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pembangkitan Jawa-Bali	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek
PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Telekomunikasi Selular Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Beton Precast Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Piutang dan pembiayaan syariah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi
Yayasan Pendidikan Telkom	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah

Tinjauan Keuangan

TRANSAKSI SIGNIFIKAN

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

(Rp juta)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
ASET			
Giro pada bank lain			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	146.848	95.995	62.270
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.553	17.429	26.291
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5	3.982	3.809
PT Bank Syariah Mandiri	74	33	44
PT Bank BNI Syariah	74	79	3
	163.554	**117.518**	**92.417**
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	200.000	135.675	1.200.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	58.400	43.400	650.200
PT Mandiri Utama Finance	-	-	200.000
PT BNI Multifinance	-	-	100.000
PT Sarana Multigriya Finansial	-	-	100.000
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	36.000
PT BTN Syariah	4.000	8.550	30.200
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.220	7.200	29.500
PT Bank BNI Syariah	2.000	2.000	2.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000	135.675	2.000
	472.620	**332.500**	**2.349.900**
Efek-efek (Catatan 7)			
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	92.284.499	123.064.282	141.668.852
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.481.711	1.367.453	1.905.291
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	843.790	1.386.317	1.685.747
PT Pupuk Indonesia (Persero)	116.011	990.729	990.581
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	460.620	645.144	982.849
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	296.580	480.181	912.628
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	142.070	682.133	707.878
PT Pegadaian (Persero)	569.660	627.632	634.129
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	89.573	617.343	426.530
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	231.282	237.256	388.149
Lain-lain	4.532.365	4.089.882	3.717.873
	101.048.161	**134.188.352**	**154.020.507**
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih			
PT Pertamina (Persero)	932	799.827	2.429.223
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	2.000.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	190.513	18.267	801.173
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-	665.197
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	-	497.832

Tinjauan Keuangan

(Rp juta)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	3.134	122.201
PT Waskita Beton Precast Tbk	167.995	7.797	69.447
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	-	58.105
PT Wijaya Karya Beton Tbk	30.455	14.134	51.060
PT Aerotrans Services Indonesia	-	4.719	39.009
Lainnya	246.362	45.541	125.408
	636.257	**893.419**	**6.858.655**
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah			
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	**3.318.434**	**3.317.840**	**1.505.273**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			
PT Asuransi Jiwasraya	-	-	1.149.156
PT Bank Mandiri Taspen	-	-	102.213
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	229.983	-	-
	229.983	**-**	**1.251.369**
Kredit yang diberikan			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	27.446.991	27.039.931	23.616.099
Perum BULOG	16.112.248	9.049.660	16.316.937
PT Pertamina (Persero)	-	1.760.382	11.575.627
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.621.845	1.776.795	3.032.393
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.968.132	2.375.195	2.897.733
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.735.635	2.438.770	2.893.383
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	4.307.997	3.450.797	2.804.944
PT Trans Jabar Tol	-	748.931	2.438.362
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	-	-	2.338.069
PT Petrokimia Gresik	980.595	1.428.976	2.222.289
Lain-lain	39.539.172	46.166.684	40.651.278
	93.712.615	**96.236.121**	**110.787.114**
Piutang dan Pembiayaan Syariah			
PT Waskita Beton Precast Tbk	-	400.000	512.000
PT Pegadaian (Persero)	300.000	400.000	400.000
PT Adhimix Precast Indonesia	-	-	314.043
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	-	229.824
PT Citra Waspphutowa	-	-	213.515
PT Kimia Farma (Persero)	-	-	110.000
PT Kimia Farma Trading and Distribusi	-	-	100.000
PT Koperasi Karyawan BRI Syariah	112.576	105.436	92.410
PT Prima Armada Raya	-	-	85.798
Yayasan Pendidikan Telkom	-	-	85.370
Karyawan kunci	13.346	17.180	9.946
Lain-lain	80.916	74.482	285.525
	506.838	**997.098**	**2.438.431**

Tinjauan Keuangan

(Rp juta)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
Tagihan Akseptasi			
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	-	-	716.140
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	66.490	274.365	421.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	136.471	173.595
PT Pertamina (Persero)	-	607.723	57.812
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	119.260	189.270	51.003
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	-	-	12.031
PT Pertamina Patra Niaga	23.759	-	11.326
PT Len Industri (Persero)	6.459	2.379	7.975
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	-	241	7.953
PT Len Railways System	-	2.131	7.593
Lainnya	278.677	126.536	11.265
	494.645	**1.339.116**	**1.477.693**
Penyertaan saham			
PT Danareksa Investment Management	-	-	372.271
PT Bahana Artha Ventura	-	71.382	72.607
	-	**71.382**	**444.878**
Total aset dari pihak-pihak berelasi	**200.583.107**	**237.493.346**	**281.226.237**
Total aset konsolidasian	**1.004.801.673**	**1.127.447.489**	**1.296.898.292**
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	**19,96%**	**21,06%**	**21,68%**

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 30 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(Rp juta)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
LIABILITAS			
Giro			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	44.484.819	45.075.744	53.016.669
Karyawan kunci	632	1.547	26.672
Lain-lain	23.533	19.629	1.435
	44.508.984	**45.096.920**	**53.044.776**
Tabungan			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	18.806	80.414	89.093
Karyawan kunci	86.529	147.366	167.112
Lain-lain	6.150	11.933	44.581
	111.485	239.713	300.786
Deposito Berjangka			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	79.043.913	93.732.744	85.832.772
Karyawan kunci	118.601	120.479	157.555
Lain-lain	828.258	1.592.220	1.878.913
	79.990.772	**95.445.443**	**87.869.240**

Tinjauan Keuangan

(Rp juta)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	**499.475**	**1.146.162**	**1.251.129**
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	**1.454.477**	**1.465.014**	**1.934.600**
Liabilitas Akseptasi			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	**494.645**	**1.339.116**	**1.477.693**
Pinjaman yang Diterima			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	**105.510**	**5.685**	**454.595**
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci			
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	369.514	275.514	366.707
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	80.094	61.379	129.433
Nilai kini kewajiban tunjangan hari tua	68.082	61.989	92.444
Nilai kini kewajiban cuti besar	42.531	37.813	54.069
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	37.807	29.720	42.492
Nilai kini kewajiban program manfaat lain pembayaran manfaat pasti	-	-	11.523
	598.028	**466.415**	**696.668**
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	**127.763.376**	**145.204.468**	**147.029.487**
Total liabilitas konsolidasian	**857.267.576**	**959.439.711**	**1.111.622.961**
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	**14,90%**	**15,13%**	**13,23%**

(Rp juta)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
KOMITMEN DAN KONTINJENSI PADA REKENING ADMINISTRATIF			
Garansi yang diterbitkan			
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.348.096	2.516.028	3.479.242
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.457.968	2.316.148	2.361.314
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	225.841	714.859	2.333.382
PT Pertamina (Persero)	141.439	1.428.608	1.922.168
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.507.044	1.252.015	1.254.834
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	298.690	407.897	1.178.058
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	640.776	572.200	1.003.360
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.310.583	1.897.681	882.663
PT Pertamina Hulu Rokan	-	-	719.000
PT Telekomunikasi Selular Tbk	463.357	492.264	519.702
Lain-lain	3.605.578	5.919.721	5.061.296
	13.999.372	**17.517.421**	**20.715.019**

Tinjauan Keuangan

(Rp juta)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor			
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	947.591	1.512.405	1.263.630
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	270.468	-	748.692
PT Pindad (Persero)	62.824	514.038	542.655
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.477.564	248.777	426.691
Kementerian Pertahanan	541.153	93.905	409.729
PT Pupuk Kalimantan Timur	-	53.504	260.822
PT Pertamina (Persero)	835.210	756.452	196.051
PT Perkebunan Nusantara XI	-	4.344	190.210
PT Petrokimia Gresik	86.325	38.430	168.222
PT Pembangkitan Jawa-Bali	103.498	107.853	123.510
Lain-lain	2.129.483	2.463.202	755.917
	6.454.116	**5.792.910**	**5.086.129**
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi			
Gaji dan tunjangan Direksi	74.062	92.556	362.081
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	27.543	29.863	128.603
	101.605	**122.419**	**490.684**
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci			
Tantiem Direksi	217.443	239.461	268.226
Tantiem Dewan Komisaris	84.028	99.622	99.290
Bonus dan insentif karyawan kunci	103.171	94.456	40.088
Total	**404.642**	**433.539**	**407.604**

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(%)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
ASET			
Giro pada Bank lain	0.016	0.010	0.007
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0.047	0.029	0.181
Efek-efek	10.057	11.902	11.876
Tagihan Wesel Ekspor dan wesel tagih	0.063	0.079	0.529
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	0.330	0.294	0.116
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	0.023	-	0.096
Kredit yang Diberikan	9.326	8.536	8.542
Piutang dan Pembiayaan Syariah	0.050	0.088	0.188
Tagihan Akseptasi	0.049	0.119	0.114
Penyertaan Saham	-	0.006	0.034
Total	**19.961**	**21.063**	**21.683**

(%)

	31 Desember		
	2016	2017	2018
LIABILITAS			
Giro	5.192	4.700	4.772
Tabungan	0.013	0.025	0.027
Deposito Berjangka	9.331	9.948	7.905
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	0.058	0.119	0.113
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	0.170	0.153	0.174
Liabilitas Akseptasi	0.058	0.140	0.133
Pinjaman yang Diterima	0.012	0.001	0.041
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan Kunci	0.070	0.049	0.063
Total	**14.904**	**15.134**	**13.228**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, BRI (Entitas Induk) telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (pihak berelasi).

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Investasi

Pada tahun 2018, BRI melakukan investasi dengan pembelian tanah sebesar Rp1,17 triliun, penambahan bangunan sebesar Rp1,39 triliun, penambahan kendaraan baik roda empat maupun roda dua sebesar Rp88,35 miliar, komputer dan mesin sebesar Rp1,24 triliun, dan perlengkapan kantor sebesar Rp125,05 miliar.

Ekspansi

Selama tahun 2018, BRI melakukan pembukaan 145 kantor kas dan penambahan 121.800 Agen BRILink. Kegiatan ekspansi terutama ditujukan untuk menambah jaringan *e-channel* sebagai salah satu upaya meningkatkan akses keuangan dan literasi keuangan termasuk di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar.

Divestasi

Selama tahun 2018, BRI baik secara individu maupun konsolidasi tidak melakukan kegiatan divestasi.

Akuisisi

Pada tanggal 20 Desember 2018, BRI telah mengakusisi PT Sarana NTT Ventura (menjadi PT BRI Ventura Investama atau BRI Ventures) dengan porsi kepemilikan sebesar 97,61%. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, BRI juga telah mengakusisi PT Danareksa Sekuritas (DS) dengan porsi kepemilikan sebesar 67%.

Restrukturisasi Utang dan/atau Restrukturisasi Modal

Pada tahun 2018, BRI tidak melakukan restrukturisasi utang maupun restrukturisasi modal.

Tinjauan Keuangan

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.03/2018 Tgl. 26 Maret 2018	Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge	1. Penetapan bank sistemik di pasar keuangan domestik bertujuan untuk mengidentifikasi Bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik. Dengan demikian diperlukan suatu metodologi dalam melakukan asesmen tingkat sistemik suatu bank secara domestik yang mencerminkan adverse effect yang berpotensi terjadi dalam hal bank sistemik mengalami kegagalan. Risiko yang bersumber dari bank sistemik dimitigasi melalui penetapan *capital surcharge* berdasarkan tingkat dampak sistemik Bank terhadap sistem keuangan domestik. Penetapan *capital surcharge* tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan dalam kondisi normal. 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) menetapkan bank sistemik dan *Capital Surcharge* yang dilakukan setiap semester. Bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik wajib membentuk *capital surcharge*. 3. Dalam menetapkan bank sistemik, OJK menyusun metodologi dengan menggunakan indikator: a. Ukuran bank (*size*) b. Kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*); dan c. Keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*) 4. OJK menetapkan *capital surcharge* dalam 5 (lima) kelompok (*bucket*). Besaran *capital surcharge* masing-masing *bucket* adalah : a. 1,0% dari ATMR bagi Bank Sistemik *Bucket 1* b. 1,5% dari ATMR bagi Bank Sistemik *Bucket 2* c. 2,0% dari ATMR bagi Bank Sistemik *Bucket 3* d. 2,5% dari ATMR bagi Bank Sistemik *Bucket 4* e. 3,5% dari ATMR bagi Bank Sistemik *Bucket 5*	BRI sebagai bank yang telah ditetapkan bank sistemik memiliki kewajiban untuk memenuhi *capital surcharge*.

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
2	Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 Tgl. 29 Maret 2018	Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1. Sebagai kelanjutan dari reformulasi Kerangka Operasional Kebijakan Moneter yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dilakukan langkah percepatan penguatan manajemen likuiditas bank melalui penyempurnaan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi lembaga perbankan konvensional dan syariah. Langkah penguatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penambahan besaran GWM dalam Rupiah bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang wajib dipenuhi secara rata-rata, pemberlakuan kewajiban pemenuhan dan perhitungan GWM secara rata-rata untuk GWM dalam valuta asing bagi BUK dan pemberlakuan kewajiban pemenuhan dan perhitungan GWM secara rata-rata untuk GWM dalam Rupiah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). 2. Penguatan ini merupakan upaya meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan agar menjadi lebih efisien sehingga dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dan mendukung pendalaman pasar keuangan selain dapat menopang stabilitas pergerakan suku bunga pasar uang sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.	Terdapat perubahan peraturan yang menjadi acuan dalam pemenuhan likuiditas bank, namun total kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK tidak berubah yaitu 6,5% dari DPK dalam Rupiah BUK dan total kewajiban pemenuhan GWM dalam valas BUK juga tidak berubah yaitu 8% dari DPK dalam valas BUK.

Tinjauan Keuangan

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
3	Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tgl. 29 Maret 2018	Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1. Bank Indonesia memperkenalkan instrumen kebijakan makroprudensial yaitu Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM d/h. GWM-LFR) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM d/h. GWM Sekunder) yang merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi perbankan. 2. Instrumen kebijakan RIM diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sedangkan dengan instrumen kebijakan PLM, diharapkan dapat mengatasi risiko likuiditas perbankan mengingat risiko likuiditas ini mampu mengamplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. 3. Kebijakan ini juga diimplementasikan pada perbankan syariah sehingga dapat memperkuat intermediasi dan meningkatkan ketahanan perbankan syariah (RIM Syariah dan PLM Syariah). 4. Instrumen kebijakan makroprudensial ini bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. 5. Kebijakan RIM dan PLM bagi bank konvensional telah dikenal sebelumnya melalui kebijakan GWM-LFR dan GWM sekunder yang merupakan bagian dari kebijakan GWM. Sedangkan bagi bank syariah, kebijakan RIM Syariah telah diterapkan dalam bentuk rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang juga merupakan bagian dari kebijakan GWM. Dalam perkembangannya instrumen-instrumen ini mengalami penyempurnaan antara lain: a. dengan menambahkan komponen surat berharga untuk menghasilkan perhitungan RIM dan RIM Syariah b. fleksibilitas dalam penerapan PLM c. memperkenalkan instrumen kebijakan PLM Syariah bagi bank syariah.	BRI wajib memenuhi GWM-RIM dan PLM sesuai ketentuan terbaru yang diatur oleh Bank Indonesia.

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
4	Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia No. 20/30/PADG/2018 Tgl. 30 November 2018	Perubahan atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	**Latar Belakang Pengaturan** Sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan, Bank Indonesia meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah dengan menambah porsi GWM rata-rata dalam Rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS yang semula sebesar 2% (dua persen) menjadi sebesar 3% (tiga persen) guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perubahan kewajiban dimaksud dinyatakan dalam peraturan pelaksanaan (PADG) tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. **Substansi Pengaturan** Perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi hal-hal sebagai berikut: a. GWM dalam Rupiah bagi BUK: 1) Porsi GWM rata-rata yang semula 2% menjadi 3% 2) Porsi GWM harian yang semula 4,5% menjadi 3,5% b. GWM dalam Rupiah bagi BUS dan UUS: 1) Porsi GWM rata-rata yang semula 2% menjadi 3% 2) Porsi GWM harian yang semula 3% menjadi 2%	BRI wajib memenuhi GWM Rupiah dan GWM Valuta Asing sesuai ketentuan terbaru yang diatur oleh Bank Indonesia.
5	Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tanggal 4 Mei 2018	Uang Elektronik	**Latar Belakang :** a. model bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik (UE) semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Uang Elektronik; b. disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan permohonan izin UE perlu disikapi dengan penguatan aspek kelembagaan guna menyaring penyelenggara UE yang kredibel, antara lain melalui pengaturan minimum modal disetor, komposisi kepemilikan saham, pengelompokan perizinan, penambahan modal disetor seiring dengan perkembangan kegiatan, serta mekanisme pengelolaan dana *float* yang lebih rinci;	1. BRI sebagai Penyelenggara Uang Elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib untuk mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan pengembangan produk dan/atau aktivitas dan kerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan Uang Elektronik.

Tinjauan Keuangan

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
			c. penyelenggaraan UE perlu didasarkan pada kondisi keuangan yang baik agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia, dengan senantiasa mengedepankan penguatan perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta minimalisasi risiko sistemik; d. keterkaitan antara penyelenggaraan kegiatan UE dan penyelenggaraan kegiatan bisnis lain yang makin erat dan kompleks, khususnya yang dilakukan dalam satu entitas atau kelompok bisnis yang sama, menuntut penguatan pelaksanaan pengawasan secara terintegrasi terhadap penyelenggara UE dan pihak terafiliasi yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan uang elektronik. **Cakupan pengaturan PBI Uang Elektronik ini meliputi**: a. ketentuan umum; b. prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan UE; c. perizinan dan persetujuan penyelenggaraan UE, antara lain mencakup kewajiban dan pengelompokan izin, persyaratan umum dan aspek kelayakan, tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan, penilaian kemampuan dan kepatutan; pemegang saham pengendali, evaluasi izin; serta kebijakan perizinan dan persetujuan; d. penyelenggaraan UE, antara lain mencakup penerapan manajemen risiko, standar keamanan sistem informasi, pemrosesan transaksi UE di wilayah Indonesia, interkoneksi dan interoperabilitas, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, penerapan prinsip perlindungan konsumen, penyelenggaraan kegiatan UE, dan penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD); e. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan; f. laporan dan pengawasan; g. sanksi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.	2. BRI wajib menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Uang Elektronik ini mulai berlaku.

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
6	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 tahun 2017	Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	a. Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi dengan syarat sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR, dan memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). b. KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan KUR Khusus. Penyaluran KUR tersebut diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor jasa produksi. c. Untuk maksimal plafond diatur sebagai berikut: · KUR Mikro maksimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu. · KUR Kecil diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu. · KUR Penempatan TKI maksimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) · KUR Khusus diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. d. Suku bunga KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus adalah 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/ anuitas yang setara. e. Penyalur KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). f. Calon penerima KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri ini.	BRI akan melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan internal BRI terkait Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, KUR Mikro, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus.

Tinjauan Keuangan

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
			g. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/ pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.	
7	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tanggal 2 Agustus 2018	Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	a. Bank Umum Konvensional (BUK) wajib melakukan perhitungan kredit dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio *Loan to Value* (LTV) untuk Kredit Properti (KP). b. Ketentuan ini mengatur tentang Tata cara penilaian agunan serta Kriteria Penilai independen. c. Dalam ketentuan ini terdapat penyesuaian rasio LTV untuk fasilitas ke-1 serta fasilitas ke-2 dan seterusnya dibandingkan dengan rasio LTV sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 18/16/PBI/2016. d. Terdapat perubahan pengaturan perihal Kewajiban Administratif dan Kewajiban Bank dalam memenuhi ketentuan Rasio LTV dalam hal bank memberikan Kredit tambahan (*top up*) berdasarkan Properti yang masih menjadi agunan dari KP sebelumnya. e. Dalam hal Bank memberikan KP dengan mengambil alih (*take over*) KP dari Bank lain, Bank wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. f. Terdapat perubahan pengaturan perihal kewajiban Bank yang memberikan KP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh. g. Dalam hal Bank memberikan KP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh, maka Bank wajib melakukan pencairan KP secara bertahap sebagaimana diatur pada peraturan ini. h. Dalam implementasi pengaturan Rasio LTV, Bank wajib mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian KP yang diatur dalam ketentuan ini. i. Bank dapat mengalihkan KP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun untuk KP bermasalah.	1. BRI akan memperhatikan pengaturan LTV dalam PBI dimaksud mengingat saat ini terdapat pelonggaran ketentuan LTV dari Bank Indonesia. 2. BRI akan me-*review* kembali kebijakan dan prosedur yang terkait dengan KPR dan KKB.

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
			j. Bank harus memiliki pedoman internal dalam pemberian KP serta sistem informasi untuk pemantauan implementasi pengaturan Rasio LTV. k. KP untuk pelaksanaan program perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari Peraturan Bank Indonesia ini dengan persyaratan sebagaimana diatur pada peraturan ini. l. Bagi Bank yang memberikan KKB wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagaimana diatur dalam peraturan ini. m. Bank dilarang memberikan Kredit untuk pemenuhan Uang Muka bagi KP atau KKB kepada debitur. n. Bank yang melanggar ketentuan dalam PBI ini dapat dikenakan sanksi.	
8	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ POJK.03/2018 tanggal 16 Agustus 2018	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa	a. Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. Lebih lanjut diatur bahwa bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. b. Penetapan kualitas Kredit dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang merupakan bagian dari komponen dalam faktor penilaian berupa kemampuan membayar. c. Ketentuan ini juga mengatur tentang persyaratan minimal dalam rangka penilaian agunan khusus untuk rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). d. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	BRI akan me-*review* kembali kebijakan internal BRI tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan memperhatikan pengaturan pada POJK Nomor 14/POJK.03/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa.

Tinjauan Keuangan

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
9	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.03/2018 Tgl. 15 Agustus 2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit atas Batas Maksimum Penyaluran dana Bank Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa	a. Resume dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 Tgl. 15 Agustus 2018 adalah pengecualian perhitungan BMPK atau BMPD terhadap penyediaan dana yang berorientasi ekspor kepada Lembaga Keuangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign* serta kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional. b. Pengecualian tersebut juga berlaku untuk penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari Lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign* serta kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional. Didalam POJK ini juga menambahkan kategori terkait tujuan pembangunan yaitu pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dengan ditetapkan penambahan kategori tersebut untuk penyediaan Dana Bank kepada BUMN yang bertujuan membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional maka ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal Bank	BRI akan mengatur secara khusus ke dalam bentuk Surat Penegasan perihal POJK Nomor 15/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa.
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2018 Tanggal 16 Agustus 2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/ POJK.03/2017 Tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah	**Latar Belakang :** a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. b. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu adanya kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor prioritas dalam hal ini adalah sektor perumahan. **Substansi Pengaturan** Ketentuan ayat (2) pasal 2 dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/ atau Pengolahan Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6093) diubah, dan Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :	BRI akan menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dengan melakukan review kebijakan internal BRI tentang Kredit Modal Kerja Konstruksi agar sejalan dengan tujuan Pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu dengan mendorong pertumbuhan sektor prioritas khususnya sektor perumahan.

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
			a. Pasal 2 ayat (2) Larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk : · Pengalihan Kredit atau Pembiayaan dari Pengembang kepada Pengembang lain untuk penyelamatan **Kredit atau Pembiayaan** sepanjang tidak menambah **baki debet** Kredit atau Pembiayaan. · Perpanjangan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan untuk penyelamatan **Kredit atau Pembiayaan**, tanpa menambah **baki debet** kredit atau pembiayaan. · Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan/atau pembelian atau penjaminan Surat Berharga atau Surat Berharga Syariah dari pengembang untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah guna pembangunan Rumah Sederhana, dengan persyaratan tertentu, dan/atau. · Pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk Pengolahan Tanah kepada Pengembang, dengan persyaratan tertentu.	
			b. Pasal 2 ayat (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah : · untuk Rumah Sederhana tidak bersusun, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang dibiayai digunakan unuk pembangunan Rumah Sederhana tidak bersusun beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni Rumah Sederhana yang bersangkutan. · untuk rumah susun sederhana, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh luas lantai digunakan untuk pembangunan rumah susun sederhana beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni rumah susun sederhana yang bersangkutan.	

Tinjauan Keuangan

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak Bagi BRI
			· Untuk rumah toko (ruko), paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk pembangunan rumah toko (ruko) beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial untuk keperluan hunian dan usaha dari pemilik rumah toko (ruko), atau · untuk kios atau los pasar tradisional, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk penggunaan kios atau los pasar tradisional beserta fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial untuk kepentingan usaha pemilik kios atau los pasar tradisional. c. Pasal 2 ayat (4) Persyaratan tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah : · pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk Pengolahan Tanah ditujukan untuk pembangunan rumah tapak atau rumah susun, dan bukan kawasan komersial. · terdapat perjanjian antara Bank dengan Pengembang yang memuat syarat bahwa Pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian, dan · pencairan Kredit atau Pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang di biayai.	

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

BRI dan entitas anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2018, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

No	Kebijakan Akuntansi	Materi Perubahan	Dampak Perubahan terhadap BRI
1	PSAK No. 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas Tentang Prakarsa Pengungkapan:	Mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non kas.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
2	PSAK No. 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan Tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan	· Perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan. · Untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak. · Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut. · Beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar bahwa entitas akan mencapai hal tersebut.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporankeuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
3	PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"	Saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur *investee*-nya pada nilai wajar atas dasar investasi per investasi.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
4	PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain",	Persyaratan pengungkapan dalam PSAK No. 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP 10 - PP 16, juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK No. 58 "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Tinjauan Keuangan

No	Kebijakan Akuntansi	Materi Perubahan	Dampak Perubahan terhadap BRI
5	PSAK No. 13 (Amendemen 2017), "Properti Investasi"	Mengamendemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Selain itu, Amendemen PSAK No. 13 tentang Pengalihan Properti Investasi juga mengkarakteristik ulang daftar keadaan dalam paragraf 57(a)-(d) sebagai daftar contoh yang tidak komprehensif.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
6	PSAK No. 53 (Amendemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham"	Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi "Pembayaran Berbasis Saham", bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
7	PSAK No.111, "Akuntansi *Wa'd*",	Mengatur entitas yang memberi atau menerima *wa'd* tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa'd* ketika menjadi akad. PSAK No.111 ini dilengkapi dengan contoh penerapan wa'd pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.	Tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Ancaman kelangsungan usaha BRI bisa bersumber dari potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi. Untuk mengantisipasi dampak dari potensi gangguan tersebut, Direksi BRI mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) yang diatur dalam Surat Edaran BRI NOSE: S.26-DIR/DMR/12/2016.

Tujuan kebijakan BCM antara lain melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan Unit Kerja Operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha).

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja.

Pelaksanaan uji coba BCM dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana termasuk di dalamnya Gedung Kantor Pusat yaitu Gedung BRI 1 dan 2, Gedung IT dan Gedung BRI *Corporate University* serta Asrama Siswa di Ragunan.

Implementasi BCM sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja BRI. Seperti diketahui, pada tahun 2018 terjadi bencana gempa bumi dan tsunami dengan kekuatan 7,4 SR yang berpusat di utara Kota Palu yang berdampak pada operasional dan bisnis Unit Kerja BRI di Palu, Donggala, Sigi, Mamuju dan sekitarnya. Dengan adanya BCM, kelangsungan usaha unit kerja BRI di lokasi bencana dapat segera ditangani dan memastikan usaha tetap berlangsung seperti sedia kala.

Sumber Daya Manusia

PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL* BRI FOKUS PADA PENGEMBANGAN KAPABILITAS DAN KOMPETENSI PEKERJA UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN MELALUI DIGITALISASI DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT.

Di era persaingan bisnis yang semakin kompetitif dengan tuntutan bisnis yang semakin kompleks, BRI tetap fokus terhadap pengembangan *human capital*. *Human Capital* BRI merupakan salah satu aset utama Perusahaan untuk mendukung terwujudnya visi Perusahaan menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia* dan *Home to the Best Talent* di tahun 2022. Oleh karena itu percepatan dan pemerataan pengembangan kapabilitas/kompetensi Pekerja menjadi prioritas utama yang dilakukan BRI.

BRI telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 pada bidang pengelolaan SDM yang merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Pekerja. Melalui sertifikasi ini dapat dipastikan bahwa sistem pengelolaan data, komunikasi, serta pembayaran kompensasi dan benefit *human capital* di Perusahaan telah berjalan sesuai dengan manajemen mutu yang baik. Adapun seluruh layanan kepada Pekerja tersebut diberikan melalui media berbasis teknologi yang cepat, tepat, dan akurat.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL*

Desain pengelolaan dan pengembangan *human capital* BRI berpedoman pada Arsitektur *Human Capital* yang telah ditetapkan. Adapun tahapan *employee lifecycle* pada kerangka strategi pengelolaan *Human Capital* BRI terdiri dari:

Planning (Perencanaan)	***Acquiring*** (Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan)	***Development*** (Pengembangan)	***Retaining and Maintaining*** (Menjaga dan Mempertahankan)	***Performance Management*** (Manajemen Kinerja)	***Termination*** (Pemutusan Hubungan Kerja)

Dalam rangka menyelaraskan kerangka strategi pengelolaan *Human Capital* di BRI dengan *prevalent practices* pengelolaan *human capital* di industri, pada tahun 2018 BRI mengkaji ulang pedoman strategi pengelolaan *Human Capital*. Peran Pekerja yang belum tergambar dalam kerangka strategi pengelolaan *Human Capital* sebelumnya akan dirangkai dan dimunculkan dalam konsep *employee value proposition*.

ARSITEKTUR *HUMAN CAPITAL*

STRATEGI PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL* 2018

Guna memastikan kebijakan pengelolaan *human capital* berlangsung sesuai dengan rencana, BRI menyadari diperlukannya strategi operasional yang tepat dan sesuai dengan karakteristik serta budaya kerja Perusahaan. Implementasi strategi yang tepat akan berdampak pada kepuasan (*satisfaction*), keterikatan (*engagement*) dan produktivitas (*productivity*) Pekerja yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2018, strategi operasional pengelolaan *Human Capital* yang diterapkan BRI meliputi:

a. ***Planning*** (Perencanaan)
Perencanaan *human capital* di BRI dilakukan dengan mengintegrasikan rencana bisnis Perusahaan

Sumber Daya Manusia

dan rencana kebutuhan *human capital* sehingga didapatkan rumusan dengan hasil yang akurat untuk menghasilkan tingkat produktivitas yang optimal (*right people*, *right skills*, *right place*, *right time*, *right cost*). Selain perencanaan kebutuhan tenaga kerja tahunan (*headcount planning)* untuk tahun 2019, pada tahun 2018 BRI mulai mengadaptasi perencanaan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang (*strategic workforce planning/SWP*).

b. *Acquiring* (Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan)

Acquiring merupakan proses untuk mendapatkan kandidat Pekerja terbaik yang dibutuhkan dengan memerhatikan proyeksi ketersediaan tenaga kerja. Sebagai entitas dengan pertumbuhan organisasi dan perkembangan bisnis yang dinamis, BRI memerlukan dukungan pemenuhan *human capital* yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, proses *acquiring* di BRI dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan/atau seleksi dengan prioritas pengisian berasal dari kandidat putra-putri daerah setempat.

Proses rekrutmen dan menarik kandidat Pekerja dilakukan melalui kerja sama antara BRI dengan lembaga pendidikan tinggi terbaik di Indonesia dalam bentuk partisipasi pada *job fair* maupun *campus hiring* serta *outreach recruitment program* lainnya. Selain itu, sejak tahun 2013 pun BRI telah meluncurkan aplikasi *e-recruitment* yang bertujuan untuk memperluas cakupan penjaringan kandidat-kandidat Pekerja terbaik di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2018, aplikasi *e-recruitment* telah dapat digunakan untuk seluruh proses rekrutmen dari mulai penerimaan berkas lamaran sampai dengan dokumentasi hasil rekrutmen Pekerja BRI di seluruh Indonesia. Selain itu, BRI juga telah mengembangkan fitur *video based assessment* dan *online test* yang memungkinkan setiap kandidat Pekerja untuk dapat mengikuti proses rekrutmen secara digital tanpa perlu mendatangi lokasi seleksi. Melalui fitur tersebut, setiap tahunnya rata-rata terkumpul ± 250.000 *curiculum vitae* (CV) baru pada sistem *e-recruitment*.

c. *Development* (Pengembangan)

BRI fokus dalam mengembangkan kompetensi Pekerjanya baik yang bersifat *hard competency* maupun *soft competency*. Pengembangan kompetensi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi Pekerja dalam kerangka 70-20-10 *model for learning development*.

Selain itu, BRI juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pekerja untuk mengembangkan kariernya. Hal ini dilakukan dengan cara menambah jenis kewenangan tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari level saat ini (*job enrichment*) atau dengan cara menambah jumlah tugas dan tanggung jawab Pekerja di level yang sama di luar tugas dan tanggung jawab saat ini (*job enlargement*).

Sumber Daya Manusia

Program pengembangan karier juga dilaksanakan berdasarkan prinsip *fair opportunity*, dimana setiap Pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan faktor kebutuhan Perusahaan, *job family* jabatan yang dituju, kemampuan Pekerja (*capability*), predikat kinerja, *talent classification*, ketersediaan jabatan, dan persyaratan lainnya.

d. *Retaining and Maintaining* (Menjaga dan Mempertahankan)

Salah satu kunci untuk memenangkan persaingan dalam merebut dan mempertahankan Pekerja terbaik (*talent war*) di Perusahaan adalah melalui sistem pengelolaan remunerasi yang baik. Sistem remunerasi yang baik juga dapat menarik kandidat talenta terbaik di luar Perusahaan untuk bergabung serta dapat memelihara motivasi Pekerja agar selalu memberikan kinerja unggul yang konsisten. Oleh karena itu, pengelolaan sistem remunerasi di BRI dilaksanakan dengan asas adil secara internal namun tetap kompetitif secara eksternal, sejalan dengan strategi Perusahaan, dan patuh terhadap regulasi.

Penerapan strategi remunerasi di BRI dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, *prevalent practices* industri, dan kemampuan Perusahaan agar dapat mengakomodasi perubahan demografi Pekerja serta pengelolaan biaya tenaga kerja.

Secara umum, implementasi sistem remunerasi BRI meliputi pemberian upah, penyesuaian besaran upah setiap tahun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), Tunjangan Cuti Tahunan, dan Tunjangan Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 6 tahunan. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi Pekerja dan anggota keluarganya, yang meliputi jaminan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, persalinan, rawat gigi, *General Medical Check Up*, tunjangan penggantian kacamata serta program kesehatan pensiunan. BRI juga memberikan kompensasi yang bersifat variabel kepada Pekerja di antaranya adalah tunjangan kemahalan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan tertentu, kompensasi lembur, bonus pencapaian kinerja, serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk kepemilikkan saham oleh Pekerja. Sedangkan untuk menunjang kedinasan, BRI memberikan fasilitas kedinasan meliputi tunjangan sewa rumah, rumah dinas, dan kendaraan dinas sewa.

Hubungan Industrial

Perusahaan meyakini bahwa seluruh insan BRI adalah aset sekaligus tulang punggung Perusahaan dalam mencapai setiap tujuan. Oleh karena itu, Perusahaan selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka dan positif. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Perusahaan adalah dengan cara menjaga hubungan yang kondusif antara Pekerja dan Perusahaan.

Dalam menjalin hubungan dengan Pekerja, BRI senantiasa menjunjung prinsip dasar pengelolaan hubungan industrial yaitu:

Menjunjung Kebebasan Berserikat

Setiap Pekerja BRI diperkenankan untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapatnya. Di lingkup Perusahaan, setiap Pekerja dapat secara mudah mendaftarkan diri dan bergabung dalam keanggotaan Serikat Pekerja. Serikat Pekerja BRI adalah partner strategis Perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis.

Sumber Daya Manusia

Beberapa hal yang dilakukan Perusahaan guna menjaga keharmonisan hubungan industrial antara Perusahaan dan Pekerja di antaranya diwujudkan dengan:

1. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara BRI bersama Serikat Pekerja (SP) BRI. Pada tahun 2017 BRI bersama SP BRI telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2017-2019 di mana dalam dokumen PKB tersebut telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai administratif kepegawaian, hak, kewajiban, benefit, dan fasilitas Perusahaan dan Pekerja. PKB ini pun telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai sarana mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Perusahaan terbaru, sebagai sarana menampung segala aspirasi/ usulan dari Pekerja, dan juga sebagai sarana koordinasi antara manajemen Perusahaan dengan Pekerja sehingga perselisihan atau permasalahan yang mungkin timbul di Unit Kerja dapat dideteksi lebih dini.
3. Pelaksanaan pertemuan berkala antara Pengurus Serikat Pekerja Nasional dengan Manajemen Tingkat Pusat.
4. Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan *level of engagement* Pekerja terhadap Perusahaan dan melakukan bentuk komunikasi lain seperti dalam kegiatan ibadah, sosial, olah raga, seni, dan kegiatan lain yang melibatkan Pekerja.

Menerapkan Kebijakan Anti-Diskriminasi

BRI senantiasa menjunjung asas kesetaraan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di setiap fungsi pengelolaan human capital (dari proses perencanaan kebutuhan sampai dengan pemutusan hubungan kerja). Salah satu bentuk penerapan asas kesetaraan di Perusahaan adalah dengan dibukanya kesempatan bekerja bagi Pekerja disabilitas. Adapun posisi yang dapat diisi dan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan disesuaikan dengan tingkat keahlian dan keterampilan masing-masing Pekerja disabilitas.

Pada tahun 2018, jumlah Pekerja disabilitas BRI berjumlah 95 orang dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	2018		
	Pria	Wanita	Total
Kantor Pusat	21	13	34
Kantor Wilayah	34	27	61
Total	**55**	**40**	**95**

Program Keberagaman

Sebagai salah satu Bank yang memiliki jangkauan yang tersebar di seluruh Indonesia, demografi insan BRI sangatlah beragam. Perusahaan meyakini bahwa keberagaman yang ada di BRI merupakan sebuah nilai tambah yang dapat membantu Perusahaan untuk tetap menjadi yang terbaik. Oleh karena itu Perusahaan memiliki komitmen untuk mendukung setiap program keberagaman yang ada. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan Perusahaan melalui alokasi anggaran pengembangan jasmani dan rohani yang dapat digunakan untuk pelaksanaan peringatan kegiatan kegamaan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung keberagaman.

Penanganan Keluhan Pekerja

Selain melalui sarana LKS Bipartit, Perusahaan pun menyediakan sarana alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan informasi dan penanganan keluhan seluruh Pekerja yang dapat diakses secara mudah dan *realtime*. Selain melalui layanan *Call Center Human Capital*, pada tahun 2018 Perusahaan telah meluncurkan layanan *chatbot* di aplikasi Telegram yang diberi nama BRIGITA. Melalui BRIGITA, seluruh Pekerja BRI dapat mengajukan pertanyaan terkait ke-SDM-an yang akan dibalas secara *realtime*.

Monitoring Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin

Sebagai bentuk penguatan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan memfasilitasi pelaporan pelanggaran disiplin oleh Pekerja melalui sarana *Whistle Blowing System* (WBS) yang langsung dimonitor oleh manajemen puncak Perusahaan.

Sumber Daya Manusia

Manajemen berkomitmen untuk menegakkan disiplin Pekerja di Perusahaan sebagai usaha mempertahankan suasana dan etos kerja yang baik. Untuk itu, Perusahaan pada tahun 2018 telah melakukan *enhancement* pada Aplikasi Portal Hubungan Industrial. *Enhancement* yang dilakukan tersebut memungkinkan Manajemen Kantor Pusat memantau setiap progress penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di seluruh Unit Kerja BRI.

e. *Performance Management* (Manajemen Kinerja)

BRI mendasarkan penilaian kinerja pada 2 (dua) hal, yaitu (i) pencapaian kinerja Pekerja atas *key performance indicator* (KPI) yang disepakati, dan (ii) pemenuhan atau peningkatan kompetensi Pekerja.

Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk (i) memastikan kinerja Pekerja selaras dengan kinerja Perusahaan, (ii) mendorong, memotivasi, dan mengarahkan Pekerja untuk selalu meningkatkan kinerjanya, (iii) mewujudkan hubungan yang jelas antara pencapaian rencana kinerja dengan pengembangan karier Pekerja (promosi jabatan), dan (iv) predikat hasil penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penetapan kompensasi dan *benefit* serta penentuan *talent class* Pekerja.

Dalam rangka menciptakan iklim *performance driven culture* di Perusahaan, BRI melakukan penajaman pada aspek penilaian kinerja, di antaranya ditempuh dengan cara standardisasi konten Sasaran Kinerja Objektif (SKO) Pemimpin Unit Kerja, Pekerja di jabatan struktural, dan tenaga pemasar. Penajaman juga dilakukan dengan menarik dan mengunci nilai Sasaran Kompetensi (SK) di awal sebelum periode evaluasi SKO dan penerapan 360° *competency review* di sebagian Unit Kerja Kantor Pusat.

f. *Termination* (Pemutusan Hubungan Kerja)

Perbankan dan jasa keuangan merupakan industri berbasis kepercayaan di mana setiap aspek dalam bisnis ini diatur secara ketat (*highly regulated*) dalam setiap aspeknya. Dalam aspek pengelolaan *human capital*, Perusahaan senantiasa memastikan seluruh ketentuan hubungan ketenagakerjaan yang diberlakukan telah sesuai dan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Beberapa jenis PHK yang berlaku di BRI di antaranya adalah:

1. Atas Permintaan Sendiri
2. Tidak Cakap
3. Kelebihan Tenaga Kerja
4. Mencapai Usia Pensiun
5. Ditahan Pihak Yang Berwajib
6. Dinyatakan Bersalah Berdasarkan Putusan Pengadilan
7. Dikenakan Hukuman Disiplin
8. Alasan Kesehatan
9. Meninggal Dunia

Adapun rincian data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi selama tahun 2018 di BRI adalah sebagai berikut:

Jenis PHK	Pria	Wanita	Total
Mencapai Usia Pensiun	654	161	815
Alasan Kesehatan	9	7	16
Atas Permintaan Sendiri	1.073	685	1.758
Meninggal Dunia	97	40	137
Lain-lain	276	92	368
Total	**985**	**2.109**	**3.094**

Sumber Daya Manusia

FOKUS PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL* 2018

Sejalan dengan transformasi yang sedang berjalan di Perusahaan serta selaras dengan *destination statement* pengelolaan *human capital* tahun 2018 yakni *Build and Deliver Compelling Employee Value Proposition*, maka fokus pengelolaan *human capital* pada tahun 2018 dititikberatkan pada:

1. Penyempurnaan kebijakan *human capital* secara umum
2. Implementasi *talent management system*
3. Perluasan program pengembangan karier Pekerja
4. Penajaman sistem penilaian kinerja
5. Penetrasi budaya kerja

Penyusunan *Human Capital General Policy*

Sebagai bank komersial terkemuka di Indonesia dengan visi menjadi *The Most Valuable Bank in Southeast Asia* dan *Home to the Best Talent* di tahun 2022, BRI memerlukan dukungan *human capital* yang handal serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan visi besar Perusahaan.

Guna mendukung terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan penyusunan sebuah Kebijakan Umum yang berfungsi sebagai panduan pengelolaan *human capital* dengan tujuan untuk memastikan keselarasan seluruh kebijakan-kebijakan di bidang *human capital* di BRI maupun Perusahaan Anak dan Perusahaan terafiliasi BRI.

Talent Management System

BRI memprioritaskan proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan untuk memastikan kesinambungan organisasi. Pada tahun 2018, BRI telah menyempurnakan Kebijakan *Talent Management* yang dijadikan sebagai fondasi untuk menyempurnakan mekanisme *succession plan*. Dengan mekanisme *succession plan* yang baik, pengisian jabatan kunci (*key jobs*) dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut BRI telah mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi nama Brilliance.

Pada Desember 2018, jumlah Pekerja BRI tercatat sebanyak 89.943 orang, turun 3.65% (*year to date*) dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar 93.351 orang. Penurunan tersebut disebabkan oleh penerapan kebijakan *selective growth* dan *hiring freeze* untuk mengoptimalkan produktivitas Pekerja saat ini yang terlihat dari peningkatan *Earning per Employee* (EPE) mencapai Rp518 juta per Pekerja Tetap dibandingkan Rp306 juta per Pekerja tetap di tahun 2017.

Perluasan Program Pengembangan Karier Pekerja

Talent Mobility

Salah satu bentuk penerapan *talent mobility* adalah penerapan program pengembangan karier dalam bentuk pengayaan maupun pengembangan tugas ke Perusahaan Anak BRI maupun Perusahaan terafiliasi BRI secara vertikal (promosi) maupun horizontal (rotasi/ mutasi). Pengayaan tersebut dapat memberikan *insight* yang berbeda bagi para Pekerja karena dapat menjalani pengalaman penugasan di Perusahaan/ Institusi dengan fokus bisnis yang berbeda dengan BRI, sehingga diharapkan hal tersebut dapat memperkaya pengalaman dan menambah keahlian para Pekerja.

Pengembangan Karier Berbasis Kinerja

BRI secara prinsip memberi kesempatan yang sama kepada setiap Pekerja untuk mengembangkan kariernya. Pengembangan karier mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang jenjang karier Pekerja dan dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan khusus yang terencana, seperti pengayaan, *job enrichment*, dan *job enlargement*.

Penajaman Sistem Penilaian Kinerja

Sebagai bagian dari sistem pengelolaan *human capital*, Perusahaan secara rutin melakukan penilaian kinerja Pekerja berdasarkan rencana sasaran kinerja yang telah disepakati pada awal tahun serta dilengkapi dengan penilaian mengenai sikap kerja dan kompetensi Pekerja.

Sumber Daya Manusia

Agar penerapan sistem manajemen kinerja di Perusahaan tetap relevan dengan *prevalent practices*, BRI secara konsisten terus menyempurnakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang dimiliki. Pada tahun 2018 Perusahaan melakukan standardisasi *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mayoritas jabatan yang bertujuan untuk menciptakan sistem penilaian kinerja yang objektif bagi seluruh Pekerja BRI, sehingga BRI dapat memberikan apresiasi kepada Pekerja baik dari segi karier, kompensasi, pendidikan dan lainnya.

Pada tahun 2018, tercatat terobosan yang signifikan dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK), khususnya bagi Tenaga Pemasar BRI. BRI telah menyempurnakan modul SMK secara *online* dimana pencapaian dari target-target individu tenaga pemasar dilakukan secara otomatis, sehingga Pekerja dapat langsung memonitor pencapaian targetnya masing-masing.

Penilaian Kinerja

Pada tahun 2018 telah dilakukan siklus *performance appraisal* per triwulan pada SMK Tenaga Pemasar BRI. Hal ini merupakan upaya mendukung tercapainya aspirasi *"Home to The Best Talent"* yaitu internalisasi *performance driven culture* kepada setiap Pekerja BRI. Perusahaan akan menjadikan siklus *performance appraisal* per triwulan sebagai fondasi untuk membangun budaya peduli pada kinerja sehingga diharapkan strategi tersebut dapat meningkatkan produktivitas Pekerja BRI khususnya Tenaga Pemasar.

Tunjangan Berbasis Kinerja

Perusahaan juga memberikan penghargaan berupa insentif yang bersifat variabel. Skema insentif merupakan penggabungan dari skema insentif sebelumnya yang dimaksudkan agar Tenaga Pemasar lebih termotivasi dalam mencapai targetnya.

REVITALISASI BUDAYA KERJA

Corporate culture merupakan salah satu fondasi pilar untuk mendukung pencapaian aspirasi Perusahaan dan menjawab tantangan bisnis jangka panjang. Budaya Kerja dibentuk untuk dapat menjadi pijakan Perusahaan dan sebagai panduan seluruh insan BRI dalam berperilaku dan bertindak, serta memiliki *value* dalam mendukung kinerja Perusahaan.

Implementasi Revitalisasi Budaya Kerja BRI dirumuskan dalam:

- Lima nilai pokok (*core values*) Budaya Kerja yang disebut dengan BRILiaN. Nilai-nilai pokok merupakan nilai penting yang menjadi pedoman bagi Pekerja dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan dengan nasabah, sesama Pekerja serta pihak eksternal lainnya;
- Sepuluh sikap perilaku utama insan BRI; dan
- Dua puluh tindakan budaya kerja insan BRI.

Core Values Budaya Kerja

Untuk mencapai Budaya Kerja yang terinternalisasi dengan baik maka dibutuhkan perilaku (*behavior*), simbol, dan sistem. Oleh karena itu BRI menggagas lima nilai inti (*core value*) budaya kerja Perusahaan sebagai berikut:

Integrity

Integrity yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai *integrity* adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan.

Professionalism

Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai *professionalism* adalah *continous learner* dan *fairness*.

Sumber Daya Manusia

Trust

Trust yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan dan saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai *trust* adalah saling menghargai dan mengutamakan kepentingan Perusahaan dan Negeri.

Innovation

Innovation yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai *innovation* adalah visioner dan pionir perubahan.

Customer Centric

Customer Centric yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai *customer centric* adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan *collaborative*.

Ruang lingkup Revitalisasi Budaya Kerja meliputi:

Program Revitalisasi Budaya Kerja terdiri dari dua program, yaitu:
1. Program Internalisasi Budaya Kerja; dan
2. Program Eksternalisasi Budaya Kerja.

Program Internalisasi Budaya Kerja

Beberapa program Internalisasi Budaya Kerja BRI yang telah dibentuk di antaranya adalah:

Forum Peningkatan Kinerja (FPK)	Merupakan forum yang dibentuk sebagai wadah agar Pekerja dapat berpartisipasi aktif dalam penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap Unit Kerja dalam rangka pencapaian target Unit Kerja.
***Focus Group Discussion* (FGD)**	Merupakan forum diskusi yang diselenggarakan dengan pihak internal maupun eksternal sebagai rangkaian dari kegiatan FPK. Forum ini merupakan mekanisme formal untuk meningkatkan budaya keterbukaan dalam rangka peningkatan kinerja Unit Kerja. Pembahasan dalam FGD antara lain meliputi kualitas layanan, permasalahan, kritik dan saran, serta solusi di suatu Unit Kerja.

SportArtcular	Merupakan kegiatan olahraga dan seni yang diselenggarakan oleh Perusahan berkolaborasi dengan seluruh BRI Community dalam rangka menyambut HUT BRI.
Family Gathering (FG)	Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk penyegaran (*refreshing*) bagi Pekerja dan keluarganya sekaligus sebagai sarana untuk menerapkan prinsip mengenal Pekerja (*Know Your Employee*).
***Change Agent Forum* (CAF)**	Merupakan forum yang diselenggarakan di Unit Kerja BRI dalam rangka menciptakan, menyusun, mengembangkan serta evaluasi dan monitoring program-program Budaya Kerja BRI.
The Best Change Agent	Merupakan sebuah program penghargaan kepada *Change Agent* terbaik yang dipilih melalui proses seleksi dengan kriteria tertentu.
Pendampingan Pekerja Baru (PPB)	Merupakan program pendampingan kepada Pekerja baru di suatu Unit Kerja selama 1 (satu) tahun dengan didukung buku pedoman yang telah disiapkan bertujuan untuk membantu proses penyesuaian Pekerja baru.
BRI Excellent Award (BEA)	Merupakan program penghargaan kepada Pekerja dan Unit Kerja yang secara konsisten memiliki kinerja, budaya dan inovasi terbaik pada Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencari talenta terbaik, serta mendorong munculnya budaya-budaya positif untuk mendukung daya saing Perusahaan.
Forum BRI Millenials	Merupakan program internalisasi budaya kerja yang ditujukan kepada Pekerja millennials BRI berupa forum diskusi untuk membahas kondisi Perusahaan atau perbankan terkini dengan suasana yang santai.

Program Eksternalisasi Budaya Kerja

Program Eksternalisasi Budaya Kerja BRI diantaranya:

BRI Communities (BRIComm)	BRI Communities (BRIComm) telah dibentuk dan disahkan oleh Direktur Utama BRI pada tanggal 25 April 2018 pada acara BRILiaN Shine. BRI Communities merupakan kumpulan komunitas yang dibentuk oleh Pekerja BRI yang memiliki minat ketertarikan terhadap suatu aktivitas atau kegiatan yang sama. Saat ini BRI telah memiliki 23 komunitas yang mencakup berbagai aktivitas, beberapa diantaranya adalah komunitas sepeda, fotografi, basket, golf, lari, *band*, *dance*, tenis dan lainnya.
Bussines Gathering	Merupakan kegiatan *relationship* yang dilakukan oleh Pekerja BRI dengan nasabah maupun komunitas tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah BRI.
Kegiatan Sosial (BRI Peduli)	Merupakan bentuk kegiatan tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan.
Kegiatan Keagamaan	Merupakan kegiatan keagamaan yang dikelola oleh Badan Pengurus Kerohanian BRI.

Sumber Daya Manusia

Monitoring Implementasi Budaya Kerja Perusahaan

Pelaksanaan Budaya Kerja BRI mampu menghasilkan peningkatan kualitas pengelolaan *human capital* yang tercermin dari naiknya tolak ukur berikut ini:

1. Nilai *Corporate Value Self Assessment* (CVSA) yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan nilai-nilai Budaya Perusahaan oleh seluruh Insan BRI dan dilaporkan secara *real time on line* oleh *Change Agent* (CA) yang telah ditetapkan di masing-masing Unit Kerja.
2. Nilai BRI *Internal Service Survey* (BISS) yang merupakan hasil survei atau input dari nasabah, baik internal maupun eksternal kepada masing-masing Unit Kerja BRI perihal Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
3. Nilai *Corporate Culture Index* (CCI) yang menunjukkan rasio antara kinerja Unit Kerja dengan nilai CVSA dan BISS. Nilai CCI merupakan *index* pengukuran untuk mengidentifikasi keterkaitan antara besaran kinerja Perusahaan dibanding dengan budaya organisasi.

Budaya Inovasi dengan BRI Excellent Award (BEA)

Untuk meningkatkan *engagement* dan daya saing inovasi, Perusahaan secara periodik menyelenggarakan ajang BRI Excellent Award (BEA).Direksi BRI memandang pemberian penghargaan kepada Pekerja dan Unit Kerja yang secara konsisten menunjukkan kinerja unggul adalah suatu hal yang penting. Dalam program BEA 2018, Perusahaan membuka kesempatan seluas-luasnya bagiPekerja untuk berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Animo Pekerja untuk berpartisipasi dalam ajang BEA 2018 pun baik, hal ini terbukti dengan dikirimkannya 1.026 proposal ide oleh seluruh Pekerja BRI seluruh Indonesia.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN *HUMAN CAPITAL*

BRI telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengelola *human capital* berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dalam proses pengelolaan *human capital*, mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Prinsip pengelolaan SIM bersifat *dual control* agar dapat menghasilkan data/ informasi yang akurat dan komprehensif.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan *human capital*, pengembangan sistem TI terus dilakukan yang mengarah kepada otomasi dan *Employee Self Service* (ESS) dengan dukungan aplikasi BRISTARS, yaitu aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja untuk melakukan layanan secara mandiri dan menjalankan proses bisnis di bidang *human capital*. Selain dapat diakses melalui *web*, pada tahun 2018 Perusahaan pun melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi BRIStars versi *mobile* yang memungkinkan Pekerja mengakses aplikasi ke-SDM-an dalam genggaman.

PENGEMBANGAN *HUMAN CAPITAL*

Kebijakan

Pelatihan dan pengembangan *human capital* dilakukan dengan mengacu pada kerangka yang mencakup aspek dan metode pengembangan *human capital* dengan kesempatan yang sama untuk semua Pekerja BRI. Pelatihan dan pengembangan termasuk pengenalan organisasi, visi dan misi, budaya kerja perusahaan, kompetensi teknis yang diperlukan, dan keterampilan kepemimpinan. Kerangka pelatihan dan pengembangan

Program unggulan yang diseleksi melalui kegiatan BEA selanjutnya dikembangkan untuk diwujudkan dan diimplementasikan oleh Perusahaan. Salah satu dari penerapan ide inovasi yang telah direalisasikan sejak tahun sebelumnya dan telah berjalan pada tahun 2018 adalah Aplikasi BRISPOT yang merupakan sebuah transformasi digital di proses bisnis pinjaman Mikro.

Sumber Daya Manusia

dibentuk berdasarkan kebutuhan bisnis dan diselaraskan dengan strategi *human capital* Perusahaan.

BRI memiliki 2 (dua) jenis program pendidikan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan diselaraskan dengan strategi *human capital* Perusahaan, yaitu *Development Program* (*Competency Development Program dan Management Development Program)*, dan *Enhancement Program* dengan penjelasan sebagai berikut :

Development Program

Program pendidikan kepada calon pekerja BRI atau pekerja BRI bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi pada suatu jabatan tertentu. Program ini terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. *Management Development Program*
   Program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja untuk persiapan menduduki jabatan dengan *corporate title* jabatan mulai dari level jabatan *Assistant* sampai dengan *Executive Vice President.*
2. *Competency Development Program*
   Program pendidikan yang disusun berdasarkan hasil analisa kompetensi, kebutuhan perusahaan dan kondisi aktual di unit kerja. Program ini dibagi dalam dua kelompok besar, yakni *hard competency* dan *soft competency* untuk setiap level *Job Title*.
3. *Master & Doctoral Degree Program*
   Program pendidikan kepada pekerja BRI yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pekerja melalui jenjang Pendidikan formal antara lain Pasca Sarjana Strata 2 dan Strata 3.

Enhancement Program

Program peningkatan kompetensi pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) level, yaitu *Basic, Intermediate* dan *Advanced* yang disesuaikan dengan tingkat jabatan pekerja. Parameter yang digunakan untuk menentukan level tersebut antara lain *variety of business product, sales mode, degree of analysis*, latar belakang peserta pendidikan, *business scale, business model*, *branch level*, dan lain-lain.

Daftar *Development Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	Tujuan Pendidikan
1	AMP Mikro	AMP Mikro *Development Program*	Peserta mampu memahami *update* ketentuan dan kebijakan bisnis mikro, memahami tutorial BRISPOT, memahami AML & CFT.
2	Kaunit	Kaunit *Development Program*	Peserta mampu memahami AML & CFT, mengelola manajemen risiko, memahami gugatan sederhana, memahami produk simpanan BRI, pinjaman mikro dan layanan *e-banking.*
3	Mantri Kupedes	Mantri Kupedes *Development Program* (*Reguler*)	Peserta mampu memahami AML & CFT, memahami manajemen risiko dan GCG, melaksanakan budaya kerja BRILian, memahami produk simpanan BRI, pinjaman mikro dan layanan *e-banking.*
4	Mantri Kupedes	Mantri Kupedes *Development Program* (*Shifting*)	Peserta mampu memasarkan produk simpanan BRI, pinjaman mikro dan layanan *e-banking*.
5	Mantri KUR	Mantri KUR *Development Program* (*Reguler*)	Peserta mampu memahami AML & CFT, memahami manajemen risiko dan GCG, melaksanakan budaya kerja BRILian, memahami produk simpanan BRI, pinjaman mikro dan layanan *e-banking*.
6	Mantri KUR	Mantri KUR *Development Program* (*Shifting*)	Peserta mampu memasarkan produk simpanan BRI, pinjaman mikro dan layanan *e-banking*.
7	SPBM	SPBM *Development Program*	Peserta dapat memahami bisnis Agen BRILink, menerapkan *funding culture,* menerapkan budaya kerja BRILian, memahami BRISPOT.
8	Petugas Agen BRILink	Petugas Agen BRILink *Development Program*	Peserta mampu memahami *product knowledge,* simpanan dan pinjaman mikro BRI*, memahami* laku pandai dan layanan keuangan digital.
9	Petugas Administrasi Rumah Kreatif BUMN (RKB)	Petugas Administrasi RKB *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan budaya kerja, hak, kewajiban dan larangan pekerja serta BRIlian, memahami *product knowledge* dan *e-banking*.

Sumber Daya Manusia

Daftar *Development Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	Tujuan Pendidikan
10	RM Dana Ritel	RM Dana Ritel *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan kerja sebagai RM Dana Ritel di Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu.
11	*Sales Person* Dana, Jasa, dan *E-Channel*	*Sales Person* Dana, Jasa, dan *E-Channel Development Program*	Peserta memahami *product knowledge* BRI, baik produk simpanan, layanan perbankan & *e-channel*.
12	RM Fungsi Kredit Ritel	RM Fungsi Kredit Ritel *Development Program First Level*	Peserta mampu melakukan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis ritel komersial, pemasaran terpadu (*Integrated Banking Solution*), *monitoring* portofolio kredit, dana, dan jasa bank lainnya.
13	RM Fungsi Kredit Ritel	RM Fungsi Kredit Ritel *Development Program Second Level*	Peserta mampu melakukan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis ritel komersial, pemasaran terpadu (*Integrated Banking Solution*), *monitoring* portofolio kredit, dana, dan jasa bank lainnya.
14	RM Kredit Briguna	RM Kredit Briguna *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan kerja sebagai *Relationship Manager* di Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu yang meliputi kegiatan : - Identifikasi Potensi dan Kompetisi bisnis - Pemasaran dan *monitoring* portofolio kredit, dana, dan jasa bank lainnya - Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah.
15	RM Kredit Konsumer	RM Kredit Konsumer *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan kerja sebagai *Relationship Manager* di Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu yang meliputi kegiatan : - Identifikasi Potensi dan Kompetisi bisnis - Pemasaran dan *monitoring* portofolio kredit, dana, dan jasa bank lainnya - Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah.
16	RM Kredit Program	RM Kredit Program *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan kerja sebagai *Account Officer* di Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu yang meliputi kegiatan : - Identifikasi Potensi dan Kompetisi bisnis - Pemasaran dan *monitoring* portofolio kredit, dana, dan jasa bank lainnya - Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah.
17	Pekerja *Collection*	Pekerja *Collection Development Program*	Peserta mampu melakukan identifikasi permasalahan debitur kartu kredit.
18	Asisten Manajer Operasional & Layanan	Asisten Manajer Operasional & Layanan *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan operasional Kantor Cabang, yang meliputi : - Pengelolaan kegiatan pemasaran produk simpanan dan jasa *transaction banking* simpanan lainnya - Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional layanan & *e-channel*. - Pengelolaan AML & CFT

Sumber Daya Manusia

Daftar *Development Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	Tujuan Pendidikan
19	Supervisor Kantor Cabang Pembantu	Supervisor Kantor Cabang Pembantu *Development Program*	Peserta mampu mensupervisi - Kegiatan pemasaran produk simpanan dan jasa transaksi bank lainnya, - Kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional & e-channel - Kegiatan perencanaan terkait pengelolaan AML & CFT - Kegiatan pengelolaan *human capital*
20	Supervisor BRI Unit	Supervisor BRI Unit *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan operasional BRI Unit yang meliputi : - Pengelolaan layanan terhadap setiap aktivitas perbankan - Mengelola e-channel (ATM, EDC & *e-channel* lainnya) - Mengelola dan memonitor Kas BRI Unit - Mengelola kegiatan operasional secara efisien dan *prudent* - Mengelola SDM.
21	Supervisor Layanan Kas	Supervisor Layanan Kas *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan Pelayanan Prima, administrasi Kas, Rekonsiliasi, manajemen rasio kas dan *Cash Machine* di Unit Kerja.
22	Supervisor Layanan *Operasional*	Supervisor Layanan Operasional *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berupa supervisi atas layanan yang terkait pembukaan rekening, kegiatan *cross selling* dan *bundling*, pemeliharakerjaan data nasabah termasuk CIF serta mensupervisi kegiatan layanan Prima.
23	Supervisor Penunjang Operasional	Supervisor Penunjang Operasional *Development Program*	Peserta mampu mensupervisi : - Pengelolaan anggaran biaya dan peningkatan *fee based income* - Pengelolaan administrasi kesekretariatan - Pengelolaan *human capital* secara tertib - Pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistik - Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat IT & *e-channel*
24	Supervisor Penunjang Bisnis	Supervisor Penunjang Bisnis *Development Program*	Peserta mampu mensupervisi kegiatan *support* pemasaran, penjualan dan pengelolaan kredit & administrasi kredit.
25	RAU Sumber *Associate Auditor*	RAU Sumber *Associate Auditor Development Program*	Peserta mampu memahami organisasi & piagam audit intern, *business risk framework*, peran *internal audit*, *monitoring*, melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit individual.
26	RAU Sumber Ka Unit	RAU Sumber Ka Unit *Development Program*	Peserta mampu memahami organisasi & piagam audit intern, *business risk framework*, peran *internal audit*, *monitoring*, melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit individual.
27	RAK	RAK *Development Program*	Peserta mampu memahami organisasi & piagam audit intern, *business risk framework*, peran internal audit, *monitoring*, melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit individual.
28	*Associate Auditor*	*Associate Auditor Development Program*	Peserta mampu memahami organisasi & piagam audit intern, *business risk framework*, peran internal audit, *monitoring*, melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit individual.
29	*Lateral Joiner*	*Lateral Joiner Development Program*	Peserta mampu memahami organisasi & piagam audit intern, *business risk framework*, peran internal audit, monitoring, melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit individual.

Sumber Daya Manusia

Daftar *Development Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	Tujuan Pendidikan
30	Petugas ADK	Petugas ADK *Development Program*	Peserta mampu melakukan administrasi dan dokumentasi kredit.
31	*Customer Service* BRI Unit	*Customer Service* BRI Unit *Development Program*	Peserta dapat melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan.
32	Petugas Dana, Jasa dan Rekonsiliasi	Petugas Dana, Jasa dan Rekonsiliasi *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi operasional & dana jasa.
33	*Customer Service* Kanca	*Customer Service* Kanca *Development Program*	Peserta mampu mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab CS, melaksanakan layanan pembukaan rekening, fasilitas lainnya & pelayanan.
34	*Teller*	*Teller Development Program*	Peserta mampu melaksanakan pengelolaan kas *Teller*, transaksi nasabah (tunai dan non tunai) dan pemasaran produk-produk.
35	Petugas Devisa	Petugas Devisa *Development Program*	Peserta mampu memahami *overview* layanan *Trade Finance* BRI, *Incoterm* dan *Remittance*, Kebijakan Umum Bisnis Internasional *&* Mitigasi Risiko Transaksi Internasional
36	Dunner	Dunner *Development Program*	Peserta mampu memahami deskripsi kerjaan Dunner, Dasar Perkreditan, *Product Knowledge* Pinjaman Kredit Konsumer serta mengaplikasikan Penerimaan dan Penyelesaian Komplain Nasabah
37	Petugas Bansos	Petugas Bansos *Development Program*	Peserta mampu memahami Alur Bansos, *Overview* Penugasan, *Monitoring* dan Evaluasi, *Complain Handling*, *Knowledge*.
38	Petugas IT	Petugas IT *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat IT dan *e-channel*.
39	Sekretaris	Sekretaris *Development Program*	Peserta dapat melaksanakan tanggung jawab utama, mengagendakan dan mendokumentasikan surat atau dokumen masuk-keluar.
40	Petugas Administrasi Unit	Petugas Administrasi Unit *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan Administrasi dan Pelaporan Portofolio Kredit mikro, dana dan jasa bank lainnya, kesekretariatan dan *human capital*, serta ketersediaan logistik.
41	Petugas Penunjang Operasional	Petugas Penunjang Operasional *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran biaya dan peningkatan *fee based income* di Kantor Cabang, kegiatan pengelolaan *human capital*, kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistik, dan kegiatan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.
42	Petugas *Trade Processing Centre*	Petugas *Trade Processing Centre Development Program*	Pekerja baru mampu menjalankan aktivitas *trade processing center.*
43	*Contact Centre Skill* Kartu Kredit	*Contact Centre Skill* Kartu Kredit *Development Program*	Peserta mampu memahami ketentuan kartu kredit, kartu kredit, & *Risk Management.*
44	*Agent Helpdesk*	*Agent Helpdesk Development*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan operasional layanan *Helpdesk* berupa information center dan *complaint handling* yang disampaikan oleh nasabah internal (Unit Kerja Operasional BRI) melalui *Contact Center* & *Telesales Channel* yaitu *Call & Non Call* (*Social Media* yang dikelola oleh BRI).

Daftar *Development Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	Tujuan Pendidikan
45	*Agent Contact Center Skill Banking*	*Agent Contact Center Skill Banking Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan operasional layanan *Contact Center Skill Banking* berupa *information center* dan *complaint handling* yang disampaikan oleh nasabah perbankan BRI, nasabah Prioritas BRI, nasabah BRILink & *Merchant*, dan nasabah inti kerjasama.
46	*Credit Investigator*	*Credit Investigator Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penilaian agunan, verifikasi legalitas agunan dan usaha serta proses pengikatan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
47	Petugas Kliring	Petugas Kliring *Development Program*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan pelayanan prima administrasi dan operasional terkait kliring.
48	Analis Risiko Kredit	Analis Risiko Kredit *Development Program*	Peserta diharapkan mampu melaksanakan analisis dan evaluasi risiko kredit.
49	Staf Bagian Bisnis Internasional dan *Treasury* Kantor Wilayah (Staf BIT Kanwil)	Staf Bagian Bisnis Internasional dan *Treasury* Kantor Wilayah (Staf BIT Kanwil) *Development Program*	Peserta diharapkan mampu memahami produk, jasa dan proses bisnis internasional dan *treasury*.
50	*Officer Development Program* (ODP) Internal	*Officer Development Program* (ODP) Internal	Bertujuan untuk mempersiapkan kader pimpinan BRI yang berasal dari pekerja BRI yang beprestasi unggul untuk mengisi jabatan strategis.
51	PPS Umum	*Staff Development Program* (PPS Umum)	Bertujuan untuk menyiapkan Staf yang siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
52	PPS IT	*IT Staff Development Program* (PPS IT)	Bertujuan untuk menyiapkan Staf IT yang siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
53	*All Supervisor*	*Supervisor Development Program (Management Development Program)*	Bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin yang mampu memimpin suatu fungsi organisasi sebagai *first line manager* dan menjalankan dasar perbankan secara umum.
54	*Assistant Manager*	*Assistant Manager Development Program*	Bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin yang mampu memimpin beberapa fungsi organisasi dan menggunakan pengetahuan perbankan secara pro aktif dalam unit kerjanya.
55	*Manager*	*Manager Development Program*	Bertujuan untuk memberikan bekal (*hard skill, soft skill, attitude*) bagi pekerja yang akan dan telah menduduki jabatan sebagai *Manager*.
56	Pemimpin Cabang Pembantu	Pemimpin Cabang Pembantu *Development Program*	Bertujuan untuk memberikan bekal (*hard skill, soft skill, attitude*) bagi pekerja yang akan dan telah menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu.
57	Pemimpin Cabang	Pemimpin Cabang *Development Program*	Bertujuan untuk memberikan bekal (*hard skill, soft skill, attitude*) bagi pekerja yang akan dan telah menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang.

Sumber Daya Manusia

Daftar *Development Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	Tujuan Pendidikan
58	*Assistant Vice President* dan *Vice President*	*Assistant Vice President Development Program* (AVPDP) dan *Vice President Development Program* (VPDP) (*Management Development Program*)	Bertujuan untuk memberikan bekal (*hard skill, soft skill, attitude*) yang akan dan telah menduduki jabatan di level *Assistant Vice President* dan *Vice President*.

Daftar *Enhancement Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	*Learning Objective*
1	MP Mikro	MP Mikro *Enhancement Program*	Peserta mampu memahami *critical point* atas risiko operasional, risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi dalam mengelola bisnis mikro.
2	AMP Mikro	AMP Mikro *Enhancement Program*	Peserta mampu menerapkan Panduan layanan BRI Unit, memonitor penerapan APU PPT, memahami *product knowledge* simpanan BRI, pinjaman mikro dan layanan *e-banking*.
3	Kaunit	Kaunit *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan pengelolaan kredit mikro bermasalah, *monitoring* proses asuransi pinjaman, melaksanakan APU PPT.
4	Mantri Kupedes	Mantri Kupedes *Enhancement Program*	Peserta dapat mengelola Asuransi Kupedes, menerapkan Panduan layanan BRI Unit & melaksanakan strategi penjualan.
5	Mantri KUR	Mantri KUR *Enhancement Program*	Peserta dapat memahami *product knowledge* simpanan, pinjaman mikro dan layanan *e-banking,* melakukan pembinaan debitur mikro.
6	Mantri Briguna	Mantri Briguna *Enhancement Program*	Peserta dapat memahami ketentuan asuransi Briguna, *product knowledge* simpanan dan pinjaman Briguna, memahami kebijakan Briguna.
7	Petugas Agen BRILink	Petugas Agen BRILink *Enhancement Program*	Peserta dapat memahami hak dan tanggung jawab PAB, memahami *product knowledge* simpanan BRI & pinjaman Mikro.
8	Petugas Administrasi RKB	Petugas Administrasi RKB *Enhancement Program*	Peserta dapat memahami tugas dan tanggung jawab Koordinator/PA RKB, memahami *product knowledge* simpanan BRI & pinjaman Mikro.
9	RM Dana Ritel	RM Dana Ritel *Enhancement Program* Tahun 2019	Peserta mampu melakukan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis dana, dan jasa bank lainnya.
10	*Sales Person* Dana, Jasa & *E-Channel*	*Sales Person* Dana, Jasa & *E-Channel Enhancement*	Peserta mampu melakukan kegiatan pendukung akuisisi dan pemasaran simpanan ritel & jasa bank lain.
11	*Relationship Manager* Kredit Ritel	*Relationship Manager Kredit Ritel Enhancement Program* (*Advanced*)	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran debitur/calon debitur & memprakarsai kredit dengan pola pendekatan bisnis *transaction*.

Sumber Daya Manusia

Daftar *Enhancement Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	*Learning Objective*
12	RM Kredit Program	RM Kredit Program *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pengendalian kualitas kredit secara memadai.
13	*Relationship Manager* Kredit NPL	*Relationship Manager* Kredit NPL *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan penyelesaian kredit bermasalah intrakomtabel & ekstrakomtabel melalui saluran hukum untuk meminimalisir risiko dalam rangka melindungi kepentingan BRI.
14	*Relationship Manager* Kredit Konsumer	*Relationship Manager* Kredit Konsumer *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran debitur/calon debitur & memprakarsai kredit membangun hubungan dengan perusahaan untuk progam HOP / COP.
15	*Relationship Manager* Kredit BRIguna	*Relationship Manager* Kredit BRIguna *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran debitur/calon debitur & memprakarsai kredit dengan pola kegiatan identifikasi potensi & kompetisi bisnis briguna.
16	AMPK Konsumer	AMPK Konsumer *Enhancement Program*	Peserta mampu menerapkan fungsi *leadership* dengan membangun potensi diri dalam berkomunikasi.
17	Asisten Manager Pemasaran Kredit	Asisten Manager Pemasaran Kredit *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran debitur/calon debitur pola pendekatan bisnis *transaction*.
18	RM Kredit Pertanian	RM Kredit Pertanian *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran & memprakarsai kredit sektor pertanian.
19	AMPD	AMPD *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan dentifikasi potensi dan kompetisi bisnis dana dan jasa bank lainnya, dan pemasaran serta *monitoring* portofolio dana dan jasa bank lainnya.
20	Supervisor Penunjang Bisnis	Supervisor Penunjang Bisnis *Enhancement Program* (*Basic*)	Peserta mampu mengelola kegiatan pemasaran produk pinjaman, pelaksanaan dan supervisi kegiatan administrasi kredit.
21	Supervisor Penunjang Bisnis	Supervisor Penunjang Bisnis *Enhancement Program* (*Intermediate*)	Peserta mampu mengelola kegiatan pemasaran produk pinjaman, pelaksanaan dan supervisi kegiatan administrasi kredit.
22	Petugas ADK Komersial & Program	Petugas ADK Komersial & *Program Enhancement* (*Basic*)	Peserta mampu Melaksanakan kegiatan administrasi kredit.
23	Petugas ADK Komersial & Program	Petugas ADK Komersial & *Program Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu Melaksanakan kegiatan administrasi kredit.

Sumber Daya Manusia

Daftar *Enhancement Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	*Learning Objective*
24	Petugas ADK Briguna & Konsumer	Petugas ADK Briguna & *Konsumer Enhancement* (*Basic*)	Peserta mampu melaksanakan kegiatan program pemasaran kredit konsumer, melakukan proses pencairan kredit, mengelola dokumen kredit dan menyusun laporan kredit.
25	Petugas ADK Briguna & Konsumer	Petugas ADK Briguna & *Konsumer Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu melaksanakan Restrukturisasi kredit konsumer, melaksanakan proses pencairan kredit, dan melakukan penyusunan laporan kredit.
26	*Associate Auditor*	*Associate Auditor Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta dapat melaksanakan Audit Brinet.
27	*Resident Auditor Unit*	*Resident Auditor Unit Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu melaksanakan pemeriksaan secara efektif dan efisien.
28	*Resident Auditor* Kanca	*Resident Auditor* Kanca *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta dapat melaksanakan audit dan memberikan konsultasi sebagai SBP (*Strategic Business Partner*) di Kantor cabang, KCP, Kantor Kas, serta *outlet* BRI lainnya.
29	Supervisor BRI Unit	*Supervisor* BRI Unit *Enhancement* (*Basic*)	Peserta mampu mengelola kegiatan pemasaran dan jasa *transaction banking* lainnya, melaksanakan ketentuan dan kebijakan BRI, mengelola dan memantau BRI.
30	Supervisor Penunjang Operasional	Supervisor Penunjang Operasional *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu mensupervisi kegiatan pengelolaan SDM melakukan pengawasan Transaksi Keuangan Bank untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional dan pengawasan.
31	Petugas Penunjang Operasional	Petugas Penunjang Operasional Kanca *Enhancement* (*Basic*)	Peserta mampu melaksanakan ketentuan Kelogistikan, ketentuan pengelolaan *human capital*.
32	Petugas Administrasi Unit	Petugas Administrasi Unit *Enhancement* (*Basic*)	Peserta mampu melaksanakan kegiatan Administrasi dan Pelaporan Portofolio Kredit mikro, dana dan jasa bank lainnya, kesekretariatan dan *human capital*.
33	Manajer Operasional & Layanan	Manajer Operasional & Layanan *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan dan jasa *transaction banking* lainnya; Pelaksanaan dan Pengawasan layanan dan operasional kantor, *e-channel* dan logistik, Pengelolaan AML & CFT, Kegiatan administrasi, Perencanaan, implementasi dan operasional *e-channel*.
34	Asisten Manager Operasional & Layanan	Asisten Manager Operasional & Layanan *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu melaksanakan kegiatan operasional Kantor Cabang, yang meliputi: - Mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan dan *jasa transaction banking* simpanan lainnya. - Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional termasuk e-channel. - Pengelolaan AML & CFT.
35	Supervisor Layanan Kas	Supervisor Layanan Kas *Enhancement* (*Basic*)	Peserta mampu melakukan *update product knowledge*, *awareness* layanan, pengawasan operasional, APU PPT rahasia bank, serta melakukan pengelolaan dan pengamanan kas.

Daftar *Enhancement Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	*Learning Objective*
36	*Customer Service* Unit dan PA KUR	*Customer Service* Unit dan PA KUR *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu melaksanakan layanan dan edukasi perbankan, proses pemeriksaan registrasi simpanan dan pinjaman.
37	Supervisor Layanan Kas	Supervisor Layanan Kas *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta dapat melakukan pembukuan & verifikasi dengan benar proses pengelolaan kas dengan baik, mengerti produk terbaru dan melakukan praktek *digital banking*, mengerti resiko tentang APU & PPT serta rahasia Bank.
38	Petugas IT	Petugas IT *Enhancement*	Peserta mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat IT dan *e-channel* termasuk *complain handling* dan *problem solving* untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional .
39	Supervisor KCP	Supervisor KCP *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta dapat melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memaksimalkan proses bisnis dan menjamin keakuratan dalam melakukan aktivitas operasional.
40	CS KC/KCP/ KK	CS KC/KCP/KK *Enhancement*	Peserta mampu melakukan pelayanan nasabah secara profesional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan tindak pidana.
41	Petugas Devisa	Petugas Devisa *Enhancement* (*Basic*)	Peserta dapat melaksanakan kegiatan pelayanan prima operasional *trade finance* untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi.
42	Petugas Devisa	Petugas Devisa *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta dapat melaksanakan kegiatan pelayanan prima operasional *trade finance* untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi.
43	Petugas Dana Jasa	Petugas Dana Jasa *Enhancement* (*Intermediate*)	Peserta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab adminitrasi operasional dana, jasa, *trade finance* untuk mencapai target *fee based income* yang telah ditetapkan.
44	Supervisor Layanan Opersional	Supervisor Layanan Opersional *Enhancement*	Peserta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab SLO dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
45	*Relationship Manager (RM) Kredit*	*Relationship Manager* (RM) Kredit Korporasi *Enhancement* Program	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran produk pinjaman segmen korporasi serta *cross selling* produk simpanan dan jasa bank lainnya.
46	Analis Risiko Kredit	Analisis Risiko Kredit *Enhancement* Program	Peserta mampu menerapkan wawasan dan pengetahuannya terkait antara lain analisis laporan keuangan, kepailitan, perpajakan untuk dapat mendukung pekerjaannya sebagai analis risiko kredit.
47	Kepala Bagian Analis Risiko Kredit	Kepala Bagian Analis Risiko Kredit *Enhancement* Program	Peserta mampu memahami kondisi makro ekonomi, produk-produk *trade finance* dan *treasury*, serta *company valuation* untuk mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
48	*Relationship Manager* (RM)	*Relationship Manager* (RM) Dana Korporasi *Enhancement* Program	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran jasa keuangan dan mobilisasi dana serta *trickle down business* melalui kerjasama secara intensif dan berkesinambungan dengan nasabah.

Sumber Daya Manusia

Daftar *Enhancement Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	*Learning Objective*
49	*Regional Relationship Manager* (RRM)	*Regional Relationship Manager* (RRM) Dana Korporasi *Enhancement* Program	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran jasa keuangan dan mobilisasi dana serta *trickle down business* melalui kerjasama secara intensif dan berkesinambungan dengan nasabah.
50	Kepala Bagian Staf Divisi *Investment Services* (DIS)	Kepala Bagian Staf Divisi *Investment Services* (DIS) *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran jasa *trust* dan *corporate services*, jasa kustodian, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar target bisnis tercapai sehingga meningkatkan *fee based income* BRI.
51	Staf Bisnis Internasional dan *Treasury* (BIT) *Enhancement Program*	Staf Bisnis Internasional dan *Treasury* (BIT) *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran bisnis internasional dan produk *treasury* untuk pencapaian kinerja dan ekspansi bisnis Internasional serta pencapaian kinerja dan target pemasaran produk *treasury*.
52	Kepala Bagian Bisnis Internasional dan *Treasury* (BIT)	Kepala Bagian Bisnis Internasional dan *Treasury* (BIT) *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran bisnis internasional dan produk *treasury* untuk pencapaian kinerja dan ekspansi bisnis Internasional serta pencapaian kinerja dan target pemasaran produk *treasury*.
53	*Group Head*, Kabag, Staf dan *Dealer* Divisi *Treasury Business*	*Group Head*, Kabag, Staf dan *Dealer* Divisi *Treasury Business Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan produk *treasury* nasabah korporasi dan ritel, yang meliputi transaksi foreign *exchange*, *money market*, *fixed income*, dan derivatif serta mendukung pengelolaan portofolio.
54	*Relationship Manager* (RM)	*Relationship Manager* (RM) Menengah *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran dan pemberian layanan *integrated banking solution* kepada nasabah segmen menengah dan *value chain*- nya untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, dana (*average balance*), dan *fee based income* dari nasabah segmen menengah dan *value chain*-nya.
55	*Relationship Manager* (RM)	*Relationship Manager* (RM) RM Menengah Pertanian *Enhancement Program*	Peserta mampu melakukan kegiatan pemasaran dan pemberian layanan *integrated banking solution* kepada nasabah segmen menengah pertanian dan *value chain*-nya untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, dana (*average balance*), dan *fee based income* dari nasabah segmen menengah pertanian dan *value chain*-nya.

Sumber Daya Manusia

Daftar *Enhancement Program*

No	Jabatan	Nama Kurikulum	*Learning Objective*
56	Manajer Pemasaran	Manajer Pemasaran *Enhancement Program*	Peserta mampu menerjemahkan suatu strategi dalam tindakan nyata dan tertib dalam pelaksanaannya, memahami tentang Era Digital, melakukan *Sales Supervisory* (*sales Couching and Counselling*) yang tepat, melakukan *communication*, *negotiation and presentation skill* secara tepat untuk mendapatkan nasabah.
56	Pemimpin Cabang Pembantu	Pemimpin Cabang Pembantu *Enhancement Program*	Peserta mampu menerjemahkan suatu strategi dalam tindakan nyata dan tertib dalam pelaksanaannya; memaksimalkan pendapatan, mengefisiensikan biaya dan menata portofolio di Unit Kerja.
57	Pemimpin Cabang	Pemimpin Cabang *Enhancement Program* (*Branch Simulator*)	Peserta dapat melakukan pengelolaan Unit Kerja (UKER) dengan menggunakan pendekatan 4DX, menemukan *lead measure* sesuai permasalahan yang ada di unit kerja masing-masing.

Pada tahun 2018, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan realisasi jumlah peserta pendidikan sejumlah 2.987.284 peserta dengan komposisi 4.4% merupakan pendidikan *In Class* dan 90% *e-Learning*, serta sisanya sebesar 3.5% merupakan peserta FPK/FGD dan 2.1% untuk sosialiasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	2016	2017	2018
1	*Development*	12.769	11.326	9.895
2	*Enhancement*	1.202.377	1.604.946	2.799.661
3	FPK/FGD	128.163	93.691	109.762
4	Sosialisasi	149.114	63.231	67.963
5	Literasi	-	-	3
TOTAL		**1.492.423**	**1.773.194**	**2.987.284**

Untuk program pendidikan *enhancement* termasuk pendidikan sertifikasi, *public course* dan *e-Learning*. Sedangkan untuk Pendidikan *development* termasuk Pendidikan *master degree*/S2.

Dalam menyelenggarakan program pengembangan *human capital*, BRI didukung oleh 8 *learning center* di seluruh Indonesia yang dilengkapi kapasitas rata-rata 500 peserta, tenaga pengajar profesional dari berbagai disiplin bisnis BRI, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai dan terbaru yang didukung secara optimal menggunakan teknologi informasi.

Untuk mendukung operasional pelatihan dan pengembangan kompetensi, BRI menggunakan *Enterprise Learning Management System*, yaitu sistem dan teknologi informasi terpadu untuk pengelolaan pendidikan yang mencakup pengelolaan data peserta pendidikan, data program pendidikan, penyimpanan dan distribusi materi pendidikan, evaluasi hasil pendidikan, dan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.

Sumber Daya Manusia

BRI Corporate University

Fasilitas pendidikan yang disediakan BRI Corporate University sejak didirikan pada tahun 2015 yang lalu merupakan realisasi dari komitmen BRI untuk meningkatkan kapasitas Pekerja melalui program pendidikan berkualitas sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perusahaan dan tujuan strategis. Adapun arsitektur BRI Corporate University dijabarkan dengan penjelasan berikut:

Arsitektur BRI Corporate University terdiri dari komponen berikut ini:

- **Landasan Dasar**
  Landasan dasar adalah hal-hal pokok yang melandasi seluruh kegiatan pendidikan di BRI Corporate University, yang terdiri dari:

  a. *Corporate Strategic Objectives*
  Seluruh kegiatan pendidikan BRI Corporate University harus selaras dengan tujuan strategis Perusahaan.

b. *Personal Character, Culture, Values & Competency*
Pendidikan BRI Corporate University mencerminkan dan menumbuhkan karakter, budaya, nilai dan kompetensi Pekerja yang baik dan sejalan dengan upaya pencapaian tujuan strategis perusahaan.

- ***Building Block***
Building block adalah elemen-elemen penunjang operasional BRI Corporate University yang terdiri dari:

a.	***Program Design & Development***	Perancangan dan pengembangan kurikulum, silabus dan materi pendidikan yang berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan, memenuhi kaidah pendidikan, dan menerapkan *best practice* pendidikan terkini.
b.	***Profesional Lecturer***	*Lecturer* atau pengajar yang memiliki keahlian pada bidang pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan *core business* dan *core competency* BRI, dan menguasai kompetensi penyampaian dan pengelolaan pendidikan.
c.	***Students Motivation***	Peserta Program Pendidikan yang memiliki budaya belajar aktif dan motivasi tinggi dalam mengembangkan kompetensinya untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
d.	***Modern Facilities***	Fasilitas pendidikan yang modern, lengkap, nyaman, dan sesuai dengan aktivitas Program Pendidikan yang dinamis.
e.	***Adequate Budget***	Ketersediaan anggaran pendidikan yang sesuai untuk menunjang Program Pendidikan.
f.	***Technology***	Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi terkini untuk mendukung kegiatan Program Pendidikan mengikuti perkembangan kebutuhan peserta Program Pendidikan.
g.	***Branding & Marketing***	*Internal* dan *Public awareness* terhadap komitmen Perusahaan pada kegiatan pendidikan yang berkesinambungan.
h.	***Quality Assurance & Measurement***	Pengelolaan mutu dan pengukuran kinerja Program Pendidikan
i.	***Alliances***	Kerjasama atapun *partnership* dengan pihak ketiga yang mendukung BRI Corporate University dalam mencapai visi, misi, dan sasaran strategis.
j.	***Risk & Compliance***	Seluruh kegiatan Program Pendidikan memperhatikan aspek risiko terhadap *human capital* dan Perusahaan, dan aspek *compliance* terhadap ketentuan yang berlaku.

Seluruh elemen ini menjadi dasar *integrated management system* BRI Corporate University.

- ***Academy***
Academy merupakan bagian BRI Corporate University yang menyusun program pendidikan yang sesuai dengan *core business* dan *core competency* yang dimiliki oleh BRI.

- ***Enterprise Learning Management System (Learning Management & Knowledge Management System)***
Enterprise Learning Management System adalah sistem dan teknologi informasi terpadu untuk pengelolaan pendidikan yang mencakup pengelolaan data peserta pendidikan, data Program Pendidikan, penyimpanan dan distribusi materi pendidikan, evaluasi hasil pendidikan, dan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.

Sumber Daya Manusia

- ***Output* BRI Corporate University**

  Output dari BRI Corporate University adalah pekerja yang memiliki karakter, kompetensi dan berkinerja unggul (*high character, competency & performance employees*), dan lahirnya pimpinan-pimpinan yang berjiwa *enterpreneur* (*great enterpreneur leaders*).

  Output tersebut pada akhirnya mendukung tercapainya *Center of Excellence* sebagai visi dari BRI Corporate University.

Roadmap

Long Term

ROADMAP

	2018	2019	2020	2021	2022
Destination Statement	*Leading MSME & Operational Excellence Through Digital Banking*	*Leading Consumer Banking in Indonesia*	*Integrated Financial Solution*	*The Most Valuable Banking Group in Indonesia*	***Most Valuable Bank in SEA & Home to The Best Talent***
Human Capital Roadmap	*Build & Deliver Compelling EVP*	*Ensuring Performance Driven*	*Strengthen BRI Employee Brand*	*Preserving BRI Position as the Employer Choice*	***Home to The Best Talent***
BRI Corpu Roadmap	*The Best Corporate University in Indonesia*	*Integrated Learning Solution for BRI Group*	*Integrated Operation Excellence for BRI Group*	*Intelligence Learning (Intelligent, Personalized, Digital Data Driven)*	***Center of Professional Excellence***

Terdapat perubahan dalam *roadmap* yang telah ditetapkan sebelumnya di mana BRI Corporate University menargetkan predikat *The Best Corporate University In Indonesia* di tahun 2021 dapat terealisasi lebih dini pada tahun 2018, yaitu dengan diperolehnya predikat The Best Corporate University di Indonesia dari majalah SWA di tahun 2018. Untuk itu target BRI Corporate University pada tahun 2021 adalah membangun pendidikan bagi pekerja BRI yang bersifat *personalized* dan berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh mesin (*artificial intelligence*).

Sumber Daya Manusia

Program pelatihan berlandaskan pada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pendidikan bagi pekerja di dalam suatu perusahaan, yaitu Kompetensi Melakukan Pekerjaan; Tantangan Bisnis; dan Manajemen & *Leadership*.

Untuk menjawab aspek-aspek tersebut, BRI memiliki 2 (dua) jenis program pendidikan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu *Development Program* (*Competency Development Program dan Management Development Program)*, dan *Enhancement Program*.

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program-program pendidikan tersebut, BRI memiliki Pekerja dengan jabatan *Learning Designer* dan *Lecturer*. *Learning Designer* adalah pekerja yang bertanggung jawab dalam melakukan analisa, mengembangkan kurikulum, menyusun bahan pelajaran dan merancang evaluasi pendidikan. Sedangkan *Lecturer* adalah pekerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu dan ditugaskan untuk melakukan kegiatan *knowledge and skill transfer* sesuai dengan kurikulum, silabus, bahan pelajaran dan metode yang telah ditetapkan.

Dalam menciptakan sistem yang memungkinkan tercapainya proses pembelajaran yangberkompetensi atau target pembelajaran yang ditetapkan, BRI menggunakan langkah sistematik berupa sistem pendidikan berkelanjutan (*Continuous Learning*). *Continuous Learning* adalah kemampuan untuk secara berkelanjutan membangun dan mengembangkan *skill*, *knowledge* dan *attitude* Pekerja sehingga dapat secara efektif melakukan pekerjaannya dan dapat beradaptasi secara cepat terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Di dalam *Continuous Learning*, selain menggunakan *Formal Learning* (pembelajaran yang terjadi di dalam kelas) juga digunakan *Informal Learning* seperti pelaksanaan *Coaching & Mentoring*, *Community of Practice* (COP), *On The Job Learning*, Forum Kolaborasi Online, dan lain-lain.

Sumber Daya Manusia

SMARTUBE

Pengetahuan seorang pekerja merupakan aset yang sangat penting bagi Perusahan. Aset tersebut akan menjadi sia-sia jika tidak diketahui oleh pekerja yang lainnya serta tidak terdokumentasikan dengan baik. Hal yang dapat dilakukan bagi Perusahaan untuk dapat mendokumentasikan pengetahuan suatu Pekerja adalah dengan menciptakan *Knowledge Management System* (KMS). KMS merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh Pekerja. KMS bertujuan untuk dapat mengubah *Tacit Knowledge* (pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang belum terdokumentasikan) menjadi *Explicit Knowledge* (pengetahuan yang sudah terdokumentasikan).

KMS yang dimiliki BRI terdapat pada *platform* yang dinamakan BRISmart. Di dalam BRISmart terdapat fitur yang dinamakan Smartube. Smartube dapat digunakan oleh pekerja untuk menonton video-video yang berfungsi sebagai *sharing knowledge* kepada pekerja. Dengan adanya Smartube, pekerja dapat melakukan proses pembelajaran dengan lebih menarik dan tidak membosankan atau dengan kata lain berfungsi sebagai salah satu media *collaborative learning* dan *knowledge management*.

BRI INSTITUTE

BRI mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis BRI, selanjutnya disebut "BRI Institute", yang didasari adanya kebutuhan akan *human capital* yang kompeten dan mampu menghadapi tantangan di era digital saat ini.

Sejalan dengan aspirasi BRI menjadi *Home To The Best Talent* pada tahun 2022, visi ini perlu didukung dengan terus berupaya meningkatkan kapasitas *human capital* yang telah ada dan akan bergabung di BRI, sehingga nantinya BRI dapat menjadi "rumah pilihan" bagi *talent-talent* terbaik Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pendidikan non formal maupun pendidikan formal yang berkualitas bagi seluruh Pekerja BRI.

Sumber Daya Manusia

Pada sisi pendidikan non formal, BRI telah memiliki Corporate University, yang pada tahun 2018 berhasil terpilih sebagai *Indonesia's Best Practices of Corporate University* untuk kategori *Financial Services* dan *Best of the Best Indonesia's Best Practices of Corporate University* untuk seluruh industri. Pada sisi pendidikan formal, BRI selalu bekerjasama dengan Universitas terbaik di Indonesia guna merekrut talent-talent terbaik untuk bergabung bersama BRI. Selain itu BRI juga telah secara rutin mengirimkan pekerja terbaiknya untuk mengikuti program S2 di beberapa Universitas yang berkualitas antara lain di USA, UK, Australia dan Asia.

Untuk lebih mendukung visi menjadi *Home To The Best Talent*, BRI berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal. Pendirian lembaga pendidikan formal berupa sebuah Perguruan Tinggi bukanlah suatu proses yang mudah. Dalam perjalanannya persyaratan dan prosedur harus dipenuhi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Sejak tahun 2016, Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan Moratorium terhadap pendirian Perguruan Tinggi baru. Pendirian Perguruan Tinggi baru hanya diperkenan untuk Perguruan Tinggi Vokasi dan Institut Teknologi dengan program studi di bidang *STEM* atau *Science,Technology*, *Engineering* dan *Mathematic*.

Moratorium tersebut menjadi salah satu alasan BRI memilih untuk mendirikan Perguruan Tinggi berbentuk Institut Teknologi. Alasan lainnya adalah, bentuk Institut Teknologi dipandang sesuai dengan bisnis BRI karena kebutuhan pemenuhan human capital BRI yang kompeten di bidang teknologi kedepannya akan semakin besar mengingat Industri keuangan dan perbankan merupakan salah satu industri yang paling terdisrupsi oleh kemajuan teknologi digital yang terjadi saat ini.

Sesuai ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi baru hanya dapat didirikan oleh badan hukum yang berprinsip nirlaba yang disebut sebagai "Badan Penyelenggara". Guna mempersiapkan hal tersebut maka melalui Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, dibentuklah sebuah Yayasan, yaitu Yayasan BRIlian Indonesia Gemilang (YBIG).YBIG inilah yang kemudian bertindak sebagai "Badan Penyelenggara" dan melakukan prosespengajuan permohonan pendirian perguruan tinggi baru kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pada akhirnya Institut Teknologi dan Bisnis BRI yang selanjutnya disebut BRI Institute telah resmi mendapatkan Izin Pendirian dari KementerianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhitung mulai tanggal 14 November 2018.

Sumber Daya Manusia

BRI Institute melalui 6 (enam) Program Studi di bidang teknologi yang fokus pada teknologi keuangan mikro, teknologi asuransi, perbankan syariah digital, bisnis dan keuangan perbankan digital, perbankan digital, dan teknologi kewirausahaan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan *human capital* yang kompeten bagi BRI pada khususnya dan industri keuangan di Indonesia pada umumnya dalam menghadapi persaingan di era ekonomi digital yang sudah berjalan.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pada tanggal 15 Oktober 2018 BRI Corporate University mendapat *award* dalam ajang *Indonesia's Best Practices of Corporate University* 2018 yang diselenggarakan oleh majalah SWA dengan menyisihkan 23 peserta lainnya. BRI Corporate University selain mendapatkan juara 1 di kategori *financial services* juga menerima penghargaan sebagai *best of the best* untuk semua sektor (*financial services, non financial services* dan *manufacturing & processing*).

Indonesia's Best Practice of

CORPORATE UNIVERSITY 2018
1ST PLACE

Perusahaan	Learning Need Analysis	Learning Design	Learning Delivery	Learning Evaluation	Leadership Learning	Digital Learning	Integrated Learing	Skor Akhir	Rating
Bank BRI	90,83	91,67	90,00	90,50	89,17	91,67	92,00	90,83	EXCELLENT

BIAYA PENGEMBANGAN *HUMAN CAPITAL*

Biaya pendidikan dan pengembangan *human capital* BRI di tahun 2018 tercatat sebesar Rp603 miliar. BRI berhasil melakukan efisiensi biaya pendidikan sebesar 32,9% dengan biaya per pekerja sebesar Rp202.000 per peserta melalui implementasi teknologi (*e-learning*). Berikut rincian biaya pendidikan *human capital* BRI tahun 2018:

LEARNING COST

Rupiah (Juta)

Program	Real 2018
Development	106.678
Enhancement	323.566
Total Dev & Enh	**430.244**
FPK/FGD	155.736
Sosialisasi	3.418
Literasi	444
Support	13.211
Total FPK, Sos, Literasi, & Support	**172.809**
Total Biaya	**603.053**

LEARNING PARTICIPANTS

Rupiah (Juta)

Program	2017	2018	%
Development	11,326	9.895	(12,6)%
Enhancement	1,604,946	2.799.661	74,4%
Total Dev & Enh	**1,616,272**	**2.809.556**	**73,8%**
FPK/FGD	93,691	109.762	17,2%
Sosialisasi	63,231	67.963	7,5%
Literasi	-	3	-
Total FPK, Sos & Literasi	**156,922**	**177.728**	**13,3%**
Total Peserta	**1,773,194**	**2.987.284**	**68,5%**

Sumber Daya Manusia

LEARNING COST EFFICIENCY

***Learning Cost Efficiency* (Biaya per Peserta)**

Rupiah (Ribu)

Program	2017	2018	% *Efficiency*
Development	11.623	10.781	7,2%
Enhancement	159	116	27,3%
Biaya per Peserta I	**239**	**153**	**36,0%**
FPK/FGD	1.465	1.419	3,1%
Sosialisasi	63	50	20,5%
Literasi	-	147.887	-
Biaya per Peserta II	**936**	**972**	**(3,9)%**
Total Biaya per Peserta I & II	**301**	**202**	**32,9%**

Terjadi efisiensi sebesar 32.5% dibandingkan realisasi Dec 2017, yang dipengaruhi oleh : Peningkatan jumlah peserta *Enhancement* yang didominasi oleh *e-learning*, sehingga menyebabkan biaya per peserta yang lebih murah.

LEARNING EFFECTIVITY

Selama tahun 2018 BRI telah melakukan program pendidikan *development* dan *enchancement* kepada 2.987.284 peserta pendidikan. Hasil dari evaluasi terhadap efektivitas pendidikan BRI mencapai 87,21.

Program	*Learning Evaluation*			*Total Evaluation*
	Level 1	Level 2	Level 3	
Development	85.20	87.60	-	86.88
Enhancement	81.19	91.17	86.60	87.26
Average	**81.20**	**91.16**	**86.33**	**87.21**

Note:
Passing Grade 75
Level 1 : *Student Reaction & Satisfaction* (30%)
Level 2 : *Student Learning Result (Skill & Knowledge Improvement)* (50%)
Level 3 : *Student Learning Behaviour (Application)* (20%)

PENGELOLAAN REMUNERASI

Penilaian Kinerja dan Remunerasi

BRI menerapkan penilaian kinerja berbasis kompetensi untuk memastikan hasil yang objektif dan *fair*. Sistem penilaian kinerja pada tahun 2018 pun terus disempurnakan. Dalam menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) pada proses Sistem Manajemen Kinerja (SMK), BRI selalu mengintegrasikan target Perusahaan kepada seluruh Pekerjanya, sehingga KPI Individu dan KPI Perusahaan dapat sejalan.

Perusahaan secara konsisten melakukan standardisasi konten KPI untuk seluruh Jabatan di BRI (kecuali Staff dan Petugas Administrasi), hal ini dimaksudkan untuk mempertajam penilaian kinerja sehingga objektivitas dan keadilan penilaian kinerja dapat terjaga. Selain standardisasi konten KPI pada tahun 2018 Perusahaan telah melakukan otomasi pencapaian target KPI untuk Jabatan Tenaga Pemasar dan mengimplementasikan *monitoring* pencapaian KPI dengan siklus *Performance Appraisal* pertriwulan.

BRI merancang struktur remunerasi Pekerja berdasarkan beberapa faktor seperti prestasi kerja, kompetensi, dan tingkat biaya hidup di masing-masing geografis Unit Kerja untuk memastikan sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

Jenis Kompensasi dan Benefit

Kompensasi dan benefit bagi Pekerja BRI, yaitu:

- Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan.
- Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja.

- Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, BRI memberikan fasilitas berupa *benefit* kepada Pekerja. *Benefit* ini diterima selama masa kerja seperti program pemeliharaan kesehatan maupun yang diterima setelah berakhirnya hubungan kerja seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh Perusahaan sejenis di industri perbankan.
- Untuk meningkatkan *engagement* Pekerja dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perusahaan dan memberikan motivasi/ insentif jangka panjang kepada Pekerja agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI memberikan *Management and Employee Stock Ownership Program* (MESOP) kepada Pekerja BRI di tahun 2017. Pekerja yang diberikan alokasi saham adalah Pekerja tetap dengan kinerja tertentu. Pemberian hak saham (tanggal *Grant*) ditetapkan pada tangal 31 Desember 2016 dengan periode *vesting* selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Kenaikan Kompensasi

BRI menerapkan strategi *merit increase* dalam penerapan pemberian kompensasi Pekerja. Artinya Pekerja yang memiliki kinerja tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi pula. Atau bisa dibilang kenaikan upah berbanding lurus dengan kinerja Pekerja.

Pada tahun 2018 BRI juga melakukan penyesuaian besaran kompensasi upah serta formula tunjangan kinerja yang lebih menantang dari tahun-tahun sebelumnya, terutama bagi para tenaga pemasar yang merupakan ujung tombak Perusahaan.

PROGRAM PENSIUN

Untuk meningkatkan kenyamanan bagi Pekerja selama masih aktif bekerja, BRI menyiapkan program pemberian *benefit* setelah berakhirnya hubungan kerja atau masa pensiun. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup:

- Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
- Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
- Program Tunjangan Hari Tua (THT)
- Program Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek
- Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)
- Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens)

Dalam masa persiapan pensiun, Pekerja berhak mendapatkan pendidikan kewirausahaan dari Perusahaan sebagai bekal untuk memasuki masa pensiun.

KINERJA PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL*

Tingkat *Turnover*

Kepuasan (*satisfaction*) Pekerja BRI terhadap pengelolaan *Human Capital* salah satunya diukur dari tingkat *turnover*. Pada tahun 2018, tingkat *turnover* mencapai sebesar 2.97%, lebih rendah dari tingkat *turnover* secara industri yang mencapai 12%.

Angka *turnover* tersebut menunjukkan bahwa upaya Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan Pekerja telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Perusahaan untuk menjaga tingkat *turnover* tersebut diantaranya adalah memberikan kompensasi pada tingkat yang kompetitif dibandingkan industri, *benefit* yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, jenjang karier yang memotivasi serta lingkungan kerja yang kondusif.

Tingkat Keterikatan

Employee Survey tahun 2018 yang diselenggarakan secara internal menunjukkan bahwa 76% Pekerja menyatakan terikat dengan Perusahaan (*engaged*). Hasil tersebut meningkat dibandingkan *survey* tahun 2017 sebesar 71,9%. Sedangkan untuk tingkat *satisfaction* di tahun 2018, 90% Pekerja menyatakan puas bekerja di BRI.

PERSENTASE KETERIKATAN PEKERJA BRI PERIODE 2016 – 2018
(%)

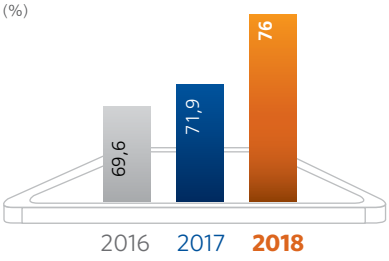

Perusahaan meyakini bahwa keterikatan yang dinyatakan Pekerja tersebut merupakan dampak dari penerapan berbagai inisiatif di bidang pengelolaan *human capital* BRI. Untuk selanjutnya, Perusahaan akan tetap berkomitmen menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan *engagement* Pekerja terutama Pekerja generasi Y sebagai mayoritas Pekerja di BRI yang mencapai 80% dari total Pekerja.

Sumber Daya Manusia

Tingkat Produktivitas

Pada tahun 2018, tingkat produktivitas Pekerja yang diukur dari *Earning per Employee* (EPE) mencapai Rp518.81 juta per Pekerja Tetap. Jumlah ini meningkat dibandingkan pencapaian EPE tahun 2017 yang sebesar Rp306 Juta/ Pekerja.

PROFIL *HUMAN CAPITAL* BRI

Berdasarkan generasi pada profil *human capital* BRI pada tahun 2018, mayoritas adalah Generasi Y dengan komposisi sebanyak72,67%, Generasi X sebanyak 22,03%, dan *Baby Boomers* sebanyak 5,30%. Dominasi generasi Y pada komposisi Pekerja BRI menunjukan bahwa Perusahaantelah siap untuk bertransformasi menjadi *digital banking* yang didukung oleh ciri khas generasi Y sebagai generasi "*tech savvy*".

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Komposisi Pekerja BRI menurut level organisasi adalah sebagai berikut:

Level Organisasi	2016	2017	2018
Senior Executive Vice President	4	5	3
Executive Vice President	86	98	103
Vice President	193	209	198
Assistant Vice President	380	345	353
Senior Manager	747	735	766
Manager	1,248	1,331	1,320
Assistant Manager	4,992	5,41	5,599
Officer	12,214	12,003	11,945
Assistant	73,469	72,722	69,656
Total	**93,333**	**92,858**	**89,943**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Pada tahun 2018 status Pekerja BRI umumnya adalah Pekerja tetap sebanyak 60.973 orang, Pekerja kontrak sebanyak 28.970 orang, dan Pekerja *outsourcing* 33.949 orang. Adapun komposisi Pekerja BRI menurut status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Status	2016	2017	2018
Pekerja Tetap	58,811	60.764	60.947
Pekerja Kontrak	34,262	31.994	28.970
Trainee	64	100	63
Outsourcing	36,197	37.929	33.949
Total	**129,334**	**130.787**	**123.929**

Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, *Trainee*) Berdasarkan Pendidikan

Mayoritas Pekerja BRI berdasarkan tingkat pendidikan merupakan lulusan Strata-1 dan Diploma. Profil komposisi Pekerja BRI menurut pendidikan dan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Pendidikan	2016	2017	2018
SLTA / Setingkat	3,133	2.652	2308
Diploma	12,055	10.134	10595
Strata 1	76,966	78.867	75797
Strata 2	1,172	1.202	1237
Strata 3	7	3	6
Total	**93.333**	**93.679**	**89.943**

Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, *Trainee*) Berdasarkan Usia

Profil komposisi Pekerja BRI menurut usia dan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Range Usia	2016	2017	2018
< 25	8.279	6.235	4.635
> 50	4.805	4.805	4.767
25 - 30	48.882	46.616	41.304
31 - 35	14.291	17.638	21.606
36 - 40	7.615	8.503	9.023
41 - 45	4.125	3.940	3.980
46 - 50	5.336	5.121	4.628
Total	**93.333**	**92.858**	**89.943**

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Komposisi Pekerja BRI dilihat dari generasi mayoritas per Desember 2018 merupakan Generasi Y yaitu sebesar 72,67% atau sebanyak 65.359 orang Pekerja.

Usia	2016			2017			2018		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Baby Boomers (>50 tahun)	3.550	1.255	4.805	3.367	1.438	4.805	3.185	1.582	4.767
gen X (35-50 tahun)	10.642	6.434	17.076	11.032	6.532	17.564	12.644	7.173	19.817
Gen Y (18-34 tahun)	38.282	33.170	71.452	38.035	32.454	70.489	35.451	29.908	65.359
Total	**52.474**	**40.859**	**93.333**	**52.434**	**40.424**	**92.858**	**51.280**	**38.663**	**89.943**

Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, *Trainee*) Berdasarkan *Gender*

Dukungan Perusahaan terhadap isu kesetaraan gender terlihat dalam praktik penerimaan Pekerjanya dengan komposisi yang cukup seimbang antara Pekerja wanita 42.98% dan Pekerja pria 57.02% dengan rincian sebagai berikut:

Gender	2016	2017	2018
Wanita	40.859	40.424	38.662
Pria	52.474	52.434	51.281
Total	**93.333**	**92.858**	**89.943**

STRATEGI PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL* TAHUN 2019

Sejalan dengan strategi bisnis Perusahaan di tahun 2019 yaitu mendorong pertumbuhan bisnis secara agresif khususnya di segmen konsumer, maka fokus pengelolaan sumber daya manusia di BRI adalah memastikan terimplementasinya budaya *performance driven culture* sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan keterikatan (*engagement*) Pekerja di Perusahaan.

Adapun sejumlah program kerja yang telah disusun dan dipersiapkan oleh BRI adalah:

1. Penerapan kebijakan *performance management* yang selaras dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh BRI, Unit Kerja, dan individu Pekerja.
2. Penguatan *talent management system*
3. Pengkinian ketentuan-ketentuan pengelolaan human capital
4. Implementasi *outreach recruitment program* dalam rangka mendapatkan talent terbaik dan sebagai sarana peningkatan *employer brand* BRI
5. Pemberian kesempatan pelatihan dan bimbingan kerja bagi angkatan kerja Indonesia yang belum berpengalaman (lulusan Akademi & Perguruan Tinggi) melalui perluasan Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) di BRI dimana program ini merupakan bentuk kontribusi aktif Perusahaan dalam membangun bangsa (*Nation Building*).

Teknologi Informasi & Operasional

BRI MENJADIKAN ASPEK PEOPLE SEBAGAI SALAH SATU HAL YANG UTAMA UNTUK MELAKSANAKAN STRATEGI FUNGSIONAL TI. SELANJUTNYA BRI JUGA MEMPERSIAPKAN DIRI DENGAN MELAKUKAN PENYUSUNAN IT ENTERPRISE ARCHITECTURE (ITEA) PERIODE 2018-2022 UNTUK MENGAWAL IMPELEMENTASI STRATEGI FUNGSIONAL TI TERSEBUT.

Teknologi digital telah mendorong perubahan dalam setiap sektor ekonomi. Banyak perubahan dan perkembangan model bisnis kemudian memicu persaingan dalam industri perbankan, dimana, persaingan bukan lagi hanya sebatas lembaga *financial intermediary*, tetapi juga dapat secara langsung memiliki peranan yang besar dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh teknologi kini dapat digunakan untuk menjangkau populasi yang belum menggunakan jasa bank (*unbankable*) sampai dengan wilayah yang belum memiliki jaringan komunikasi seluler (*blankspot)* sehingga teknologi dapat mempercepat inklusi keuangan dan membuka kesempatan bisnis baru serta mendukung fungsi perbankan sebagai penyalur program pemerintah. Sementara bagi nasabah, perbankan diharapkan dapat memberikan layanan perbankan yang mudah, cepat, tanpa batas, aman dan memberikan *customer experience* yang baik. Kebutuhan ini menuntut perbankan untuk senantiasa melakukan inovasi, baik produk maupun layanan, sehingga dapat memenuhi ekspektasi nasabah.

Sesuai dengan dokumen IT Strategy Plan 2018-2022 dan perkembangan perbankan saat ini, ada beberapa tantangan yang sekaligus dapat menjadi peluang baru bagi perbankan, antara lain sebagai berikut :

1. Disrupsi rantai nilai perbankan
   Meningkatnya persaingan non-tradisional menyebabkan tekanan dan disrupsi penentuan harga.

2. Perkembangan makro ekonomi
   Tren makro ekonomi yang semakin menantang berpotensi menyebabkan pertumbuhan perbankan melambat.

3. Perubahan regulasi
   Dengan meningkatnya tantangan pada pengelolaan profitabilitas dan likuiditas perbankan, regulator senantiasa melakukan penyesuaian regulasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan.

4. Perubahan preferensi nasabah
   Ada potensi terjadinya perubahan preferensi nasabah dengan cepat, sehingga memiliki potensi perkembangan nasabah yang semakin paham digital dan meningkatnya perkembangan teknologi nasabah korporasi.

5. Pertumbuhan segmen baru.
   Perkembangan segmen pertumbuhan baru dengan adanya peluang-peluang pertumbuhan baru yang sesuai dengan bisnis bank.

Kebijakan Teknologi Informasi

Kebijakan teknologi informasi BRI berdasar pada visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan, *Roadmap* Pengembangan kedepan serta pedoman dalam *IT Governance*.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI BRI

TEMA

Menjadi "The Most Valuable Bank di Asia Tenggara" dan "Home to The Best Talent".

VISI

Menjadi penyedia teknologi yang berfokus pada nasabah (*customer centric*) dengan solusi dan layanan yang andal, aman, dan responsif melalui inovasi dan kolaborasi.

MISI

1. Mengembangkan talenta digital terbaik dan membangun budaya kerja inovatif.
2. Menerapkan tata kelola TI secara Bi-modal untuk kolaborasi yang lebih cepat dan andal dengan lini bisnis.
3. Membangun platform ICT yang bersifat *future-ready*, yaitu andal, aman, dan responsif.
4. Mengoptimalkan tata kelola data & *analytics* dalam rangka menyajikan sumber informasi tunggal (*single source of truth*) terkait dengan data nasabah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat.
5. Menciptakan digital bank yang inovatif yang berfokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric solutions and services*)

Dalam rangka merealisasikan visi dan misinya, BRI melakukan upaya untuk mendorong sinergi. Adapun sinergi dengan Anak Perusahaan BRI dalam hal Teknologi dan Inovasi dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti:

Cost Reduction

Meningkatkan efisiensi biaya melalui pembelian dengan skala ekonomi kolektif.

Cost Avoidance

Melakukan penghematan biaya melalui sharing of resources dan konsolidasi layanan dan kegiatan TI.

Revenue Enhancement

Menciptakan sumber pendapatan baru melalui *sharing platform* dan informasi.

Group Buying

Melakukan pengadaan produk dan layanan TI secara kolektif guna mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari vendor.

Join Operation

Melakukan *Shared Services* atau *co-location* operasional TI sehingga dapat melakukan efisiensi biaya operasional.

Application & E-channel

Melakukan kolaborasi *development* pembuatan aplikasi yang terintegrasi dan dapat digunakan bersama.

Standardization

Menerapkan standarisasi melalui *sharing best practices*.

Talent Development

Melakukan kolaborasi dalam hal pengembangan talenta pekerja secara organik dan mendukung percepatan proses perekrutan talenta secara digital.

Teknologi Informasi & Operasional

Roadmap dan Program Kerja Utama TI

Dalam merealisasikan visi dan misi TI BRI Periode Tahun 2018-2022, arahan *Roadmap* strategis TI (IT *Strategic Directions*) telah ditetapkan dengan disusun berdasarkan 5 (lima) pilar strategi fungsional yaitu:

1. *Nurture Digital Talent*
2. *Drive Bimodal IT Governance*
3. *Build Future Ready ICT Platform*
4. *Leverage Data & Analytics*
5. *Deliver Innovative Digital Banks*

Tema	2018	2019 - 2020	2021 - 2022
Nurture Digital Talent	Professional ICT Certification & Digital Product Manager	ICT & Digital Talent Pool Program dan Impactfull Performance Evaluation	Home of Best ICT & Digital Talent (BRI Group)
Drive Bi-modal IT Governance	Mengembangkan Business-IT Governance & Alignment dengan metode Agile & DevOps	Mengembangkan Agile & DevOps Maturity untuk Business & IT	Bimodal IT Governance yang Baik
Build Future Ready ICT Platform	Mengembangkan CBS yang handal, Middleware, Network & IT Service Delivery Capabilities dengan Digital Resiliency	Mengembangkan Robust & Secure ICT Architecture & Operations	Best Practice dalam Agile ICT Infrastructure
Leverage Data & Analytics	Mengembangkan Basic Data setup & Big Data Analytics	Meningkatkan proses Data Management & Monetize Big Data Analytics	Data Management dan Big Data Analytics yang Handal
Deliver Innovative Digital Banks	Mengembangkan Digital Banking & Partnership with Open API	Peran sebagai kreditur pada Digital Banking & Integrated API Ecosystem	The Best Digital Banking & Integrated API Platform di Asia Tenggara

BRI mulai mengadopsi metodologi pengembangan secara Bimodal (*waterfall* dan *agile*) dan menjaga keselarasan pemenuhan inisiatif strategis antara bisnis dengan IT. Pada 2018 juga telah disusun IT Enterprise Architecture (ITEA) periode 2018-2022.

Teknologi Informasi & Operasional

Peranan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong terealisasinya visi dan misi Perseroan. Untuk itu, TI BRI telah menyusun strategi fungsional TI dan menjadikan aspek *people* sebagai hal yang utama untuk melaksanakan strategi fungsional TI tersebut. Pada 2018, BRI telah mempersiapkan untuk memunculkan *talent-talent* digital untuk mengembangkan produk-produk digital yang inovatif dan profesional di bidangnya. BRI mulai mengadopsi metodologi pengembangan secara Bimodal (*waterfall* dan *agile*) secara bertahap dengan secara terus menerus menjaga keselarasan pemenuhan inisiatif strategis antara bisnis dengan IT.

Untuk mendorong optimalisasi teknologi dalam produk dan layanan, BRI menyadari bahwa diperlukan ketersediaan *ICT Platform* yang *future ready.* Pada 2018, BRI melakukan persiapan diantaranya dengan menyusun IT *Enterprise Architecture (ITEA)* periode 2018-2022. Berdasarkan ITSP dan ITEA yang disusun, BRI akan melaksanakan beberapa inisiatif strategis untuk memodernisasi sistem *Core Banking*, *Middleware*, *Data Management*, *Network*, maupun infrastruktur yang digunakan pada seluruh jaringan unit kerja BRI sehingga akan meningkatkan *IT Service Delivery*. Beberapa tren hasil analisis data yang digunakan untuk keputusan strategis di BRI juga semakin diperkuat dengan teknologi *Big Data Analytics*, seperti *credit scoring* maupun *merchant assessment*.

Sementara itu, untuk menjawab tantangan disrupsi *digital banking*, BRI semakin memperkuat posisinya dengan melakukan pengembangan produk-produk *digital banking* sesuai dengan tantangan bisnis saat ini. Di lain sisi BRI terus memperkuat bisnis prosesnya dengan melakukan digitalisasi *consumer loan* maupun *micro loan* (BRISPOT dan MyBRI).

Dengan menjunjung tinggi *privacy* dan keamanan terhadap nasabah, BRI berkomitmen untuk menjalankan inisiatif-inisiatif strategis terkait *security* seperti menyusun *Enterprise Security Architecture*, *Enterprise Fraud Detection System*, maupun implementasi *Biometrics Authentication*.

IT *Governance* dan Manajemen Risiko

Penerapan kebijakan untuk pengelolaan TI dilakukan dengan berpedoman pada prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang mendukung pengelolaan risiko TI dan tetap memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Tata kelola TI BRI mencakup standar yang memberikan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif dan efisien sehingga mencerminkan suatu proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan Tata Kelola TI.

BRI berkomitmen membangun perilaku yang sesuai dengan standar etika BRI dalam rangka menerapkan menejemen yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pelaksanaanya, BRI senantiasa mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai *GCG*, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran. Adapun kebijakan Tata Kelola Perusahaan untuk kerangka kerja dalam tata kelola IT BRI mengacu pada aturan/regulasi yang berlaku.

Teknologi Informasi & Operasional

Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

Rincian Kerangka Acuan GCG dan Manajemen Risiko TI

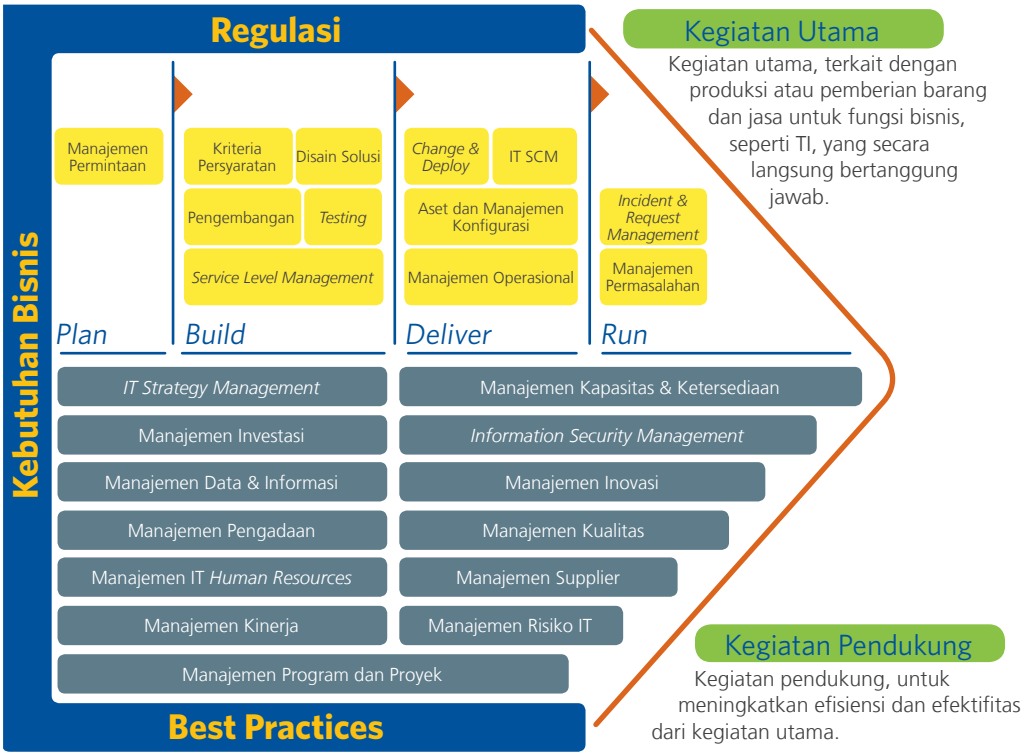

Teknologi Informasi & Operasional

Untuk mendukung peningkatan daya saing perusahaan dan memenuhi kebutuhan nasabah dalam layanan perbankan yang terpercaya, BRI konsisten mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan teknologi dan sistem informasi yang handal. BRI memanfaatkan dukungan teknologi ISO untuk meningkatkan kualitas layanan agar semakin kompetitif, efisien serta mampu mengurangi resiko operasional.

ISO 9001:2015 adalah suatu standar Internasional untuk system Manajemen Mutu dimana ISO 9001:2015 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. Untuk itu BRI sudah mengimplementasikan ISO 9001:2015 sebagai landasan penerapan *QMS* (*Quality Management System*) operasional termasuk operasional Teknologi Informasi di BRI.

Perkembangan SDM TI

Untuk mendukung impelementasi TI sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan Perseroan, BRI secara terus menerus melakukan pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM yang difokuskan pada bidang-bidang yang sesuai kebutuhan Perusahaan. Sampai dengan Desember 2018 tercatat ada 782 orang jumlah Sumber Daya Manusia pada 6 Divisi dibawah Direktorat Teknologi Informasi dan Operasi terdiri dari:

Jumlah SDM TI Berdasarkan Status

Jumlah SDM TI Berdasarkan Status	Total
Divisi Perencanaan dan Pengembangan TI	242
Divisi Operasional TI	311
Desk Information Security	11
Divisi Kerjasama Teknologi	78
Divisi Digital *Center of Excellence*	43
Divisi Satelit dan Jaringan Infrastruktur	97
Total	**782**

Training dan Sertifikasi Kompetensi TI

Dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM TI, BRI terlebih dulu melakukan riset terhadap materi-materi pelatihan yang dibutuhkan. Terkait pelatihan dalam rangka pengembangan serta peningkatan kompetensi khususnya bidang TI, BRI telah melakukan mapping kebutuhan pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja yang bersifat teknis, non teknis serta manajerial pekerja sesuai kebutuhan. Pelatihan dan Sertifikasi yang telah diikuti maupun dimiliki antara lain sebagai berikut:

A. Pelatihan
1. *Developing Windows Azure and Web Services*
2. *KONY* (*Digital Saving* dan *Software* MADP)
3. *Application Performance Management* (*APM*)
4. *DevoOps Foundation*
5. *Aplication Development Lifecycle Management* (*ADLM*)
6. Bahasa Pemrograman Go (Golang)
7. *Managing IT Projects Effectively*
8. Fundamental *IT Process Control and Improvement*
9. *Android Application Development & Programming*
10. *Building Web Application with Yii*
11. *Computer Hacking Forensic Investigator*
12. *UI - UX Techniques and Material Design*
13. *PMP Exam Preparation Training*
14. *Prince2 Practitioner*
15. *Progressive Web Application (PWA)*
16. *Data Science with Python*
17. Oracle Database 12c : *Administration Workshop*
18. *Building Web Application with Node.Js*
19. *E-Commerce & Fintech Zaman Now*
20. *IT Governance Essentials Using COBIT® 5*
21. *Data Science for Manager*
22. *System Analyst and Design*
23. *Programming for Data Analytic*
24. *Implementing a SQL Data Warehouse 2016*
25. *RHCE Rapid Track Course*
26. *Project Management Knowledges*
27. *Block Chain Workshop*

Teknologi Informasi & Operasional

B. Sertifikasi

Jenis Sertifikasi	Keterangan
Microsoft Certified Professional (MCP)	Sertifikasi keahlian dari Microsoft Corporation segala hal yang berkaitan dengan sistem operasi Microsoft dan juga server.
Certified Secure Programmer .NET	Sertifikasi dalam keamanan dalam bahasa pemrograman .Net
Implementing a Data warehouse with Microsoft SQL Server	Sertifikasi keahlian dari Microsoft yang berkaitan dengan *SQL server* serta implementasinya.
Certified IT Capacity Planning Expert (CICPE)	Merupakan program sertifikasi *expert* di bidang *IT Capacity Planning.*
IT Infrastructure Library	Sertifikasi program keahlian dalam melakukan konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasionalnya dalam teknologi Informasi (TI).
Red Hat Certified Engineer (RHCE)	Program sertifikasi untuk keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan administrator sistem pada sistem *Red Hat Enterprise Linux.*
Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)	Program sertifikasi untuk kemampuan dan keahlian *core* sistem administrator yang diperlukan dalam lingkungan Red Hat Enterprise Linux.
EC-Council Network Security Administrator (ENSA)	Sertifikasi yang dirancang untuk memberikan keterampilan yang diperlukan untuk menganalisis ancaman keamanan internal dan eksternal terhadap jaringan, dan untuk mengembangkan kebijakan keamanan yang akan melindungi informasi perusahaan.
Certified Data Science Specialist (CDSS)	Program sertifikasi keahliaan pada bidang *Data Scientist.*
Certified Application Security Engineer (CASE)	Program pelatihan dan sertifikasi mencakup kegiatan keamanan dalam semua fase Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC): perencanaan, pembuatan, pengujian, dan penerapan aplikasi.
Developing ASP. NET MVC Web Application	Merupakan program sertifikasi dengan keahlian implementasi dan infrastruktur ASP.Net, pengembangan aplikasi, konsep *controller* dan *action* untuk mengelola *workflow* sebuah aplikasi.
CDCP (Certified Data Center Professional)	Merupakan program sertifikasi *expert* di bidang IT Data Center.
Certified in the Governance of Enterprise Information Technology (CGEIT)	Merupakan program sertifikasi professional di manajemen atau konsultasi tata kelola teknologi informasi yang diadakan oleh ISACA.
International Software Testing Qualification Board (ISTQB) Agile Tester	Merupakan program sertifikasi untuk *software tester* dengan konsep *agile.*
International Software Testing Qualification Board (ISTQB) Tester (Business Analyst)	Merupakan program sertifikasi untuk *software tester* dari segi pemahaman terhadap proses bisnis.
Certified Data Science For Manager (CDSM)	Program ini bertujuan memfasilitasi para manajer perusahaan dan peserta lainnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai big data secara umum maupun pengetahuan dan kemampuan terkait data *science* dan *machine learning.*

Jenis Sertifikasi	Keterangan
Certified Ethical Hacker (CEH)	Salah satu tingkatan sertifikasi yang ditawarkan oleh *EC-Council*, lembaga sertifikasi di bidang *cyber security*.

Realisasi Inisiatif TI 2018

Pada tahun 2018, BRI telah menyelesaikan berbagai strategi inisiatif di bidang TI, diantaranya BRI merealisasikan proyek untuk menyukseskan program digitalisasi layanan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejalan dengan visi BRI untuk menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara & *Home to The Best Talent*, selama 2018 terdapat beberapa proyek aplikasi TI yang telah dilaksanakan untuk mendukung bisnis Perusahaan serta sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan program digitalisasi layanan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018 antara lain:

MyBRI Application	Aplikasi untuk memfasilitasi nasabah dan pekerja dalam proses pengajuan Pinjaman Konsumer (BRIGUNA dan KPR) serta pengajuan Kartu Kredit dari Bank BRI yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan mudah, cepat, dan transparan.
New Cash Management System (CMS)	Aplikasi untuk nasabah korporasi.
BRILink Mobile	Aplikasi yang digunakan oleh agen Brilink (nasabah BRI) yang diakses *via mobile apps*.
New BRI Mobile	Aplikasi *mobile banking* BRI dengan tampilan dan fitur terbaru untuk meningkatkan *customer experience*.
Customer Relationship Management (CRM)	Aplikasi untuk membantu BRI melakukan analisis mengenai nasabah.
Enhancement Front End Core Banking System	Sebagai solusi peningkatan *performance* dalam pelayanan transaksi *teller*.
Infrastructure upgrade	Aplikasi untuk *Credit Card Management System* (*Cardlink*).
Collection and Recovery System Credit Card	Aplikasi untuk *Credit Card* BRI.
Upgrade TI Plus System	Aplikasi untuk transaksi *trade finance* BRI.
BRISTARS Mobile	Aplikasi internal pekerja untuk memenuhi fitur kepegawaian seperti, *Digital Office*, *E-Cuti*, *E-Reimburse*, Data Pekerja, Agenda, dll.
Europay, Mastercard and Visa (EMV) Debit Card	Merupakan implementasi EMV Visa/Mastercard pada terminal ATM BRI.
BRISIM Web/ Mobile	Sebagai portal *gateway* informasi data *warehouse* maupun data insight BRI.
BRI Application Programming Interface (API)	Aplikasi untuk meningkatkan kerjasama antara BRI dengan pihak ketiga.

Teknologi Informasi & Operasional

Dalam rangka mendukung digitalisasi, BRI melakukan pengembangan dan *enhancement* untuk mempermudah pembayaran/ pembelian yang bisa dilakukan oleh nasabahnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dan kerjasama lainnya, serta untuk mendukung fleksibilitas bisnis. Pengembangan tersebut diantaranya adalah:

SIM Online	Integrasi fitur dan aplikasi BRI dengan aplikasi SIM *Online* Kepolisian Republik Indonesia sebagai sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk membuat dan memperpanjang SIM.
E-Samsat	Integrasi fitur dan aplikasi BRI dengan Samsat dalam menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*.
KTA	Kartu pegawai pada Polri yang menggunakan sistem elektronik dengan dilengkapi *chip* untuk menyimpan data anggota dan *magnetic stripe* untuk kepentingan perbankan dan berfungsi juga sebagai kartu identitas, ATM, alat pembayaran dan transaksi perbankan lainnya.
E-Tax	Produk berbasis *online* yang terintegrasi dengan fitur dan aplikasi BRI yang menyediakan akses pembayaran pajak secara *online*.

Investasi dan Eksploitasi TI

Beberapa proyek utama dalam bidang IT untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Divisi Inisiasi	Nama Proyek
1	**Divisi Jaringan Kerja Kantor**	Pengadaan *Cash Replenishment Machine* (CRM)
		Uker baru 2018 KCP 1, Unit 2, KK 8, Teras 11
		Pengadaan *EDC,* baik EDC *Merchant* maupun UKO
2	**Divisi Satelit dan Jaringan Infrastruktur**	Integrasi Jaringan Komunikasi BRI Fase I dan II
		Network & Security Enhancement (*Network, Application, Data Center, Business Processes Procedures*)
3	**Divisi Transaction Banking**	Akuisisi *Platform CMS* Fitur Korporasi *end to end*
		Pengembangan *Supply Chain Financing Platform*
4	**Desk Contact Center**	Membangun Sistem *Complain Handling* yang terintegrasi
		Chatbot berbasis *NLP* (*Neuro Linguistik Programming*)
5	**Divisi Wealth Management**	Upgrade BRIVEST - MEDALION
6	**Divisi Bisnis Internasional**	Upgrade System Trade Finance "TI PLUS" dan Supply Chain Financing Platform
		Pengembangan Bisnis *Crossborder Payment System*
		SWIFT Customer Security Program
		Swift GPI
7	**Divisi Investment Services**	*Project Upgrade Sistem Core Custody CIPS* - MEDALION
8	**Divisi Kartu Kredit**	Pengadaan Sistem *Collection & Recovery*
9	**Divisi Perencanaan dan Pengembangan TI**	*Enterprise Data Warehouse* (*EDW*)

No	Divisi Inisiasi	Nama Proyek
10	**Divisi Digital Center of Excellence**	Pengembangan Big Data BRI
11	**Divisi Akuntansi dan Manajemen**	Implementasi IFRS 9 (PSAK 71)
12	**Divisi Kepatuhan**	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Produk & Aktivitas Baru (PAB)
13	**Divisi Corporate Transformation**	Modernisasi *Core Banking System*
		Modernisasi *Middleware*
		Data *Reporting Architecture*
		Merubah bisnis proses kredit konsumer : - Enhance MyBRI - Pembangunan CLF (Perangkat TI)
		Meluncurkan program efektivitas bisnis pada cabang ritel berskala besar
		Pengembangan Aplikasi Enhance untuk *sales activities & back office*
		Meningkatkan *customer experience* dalam berbagai *channel* digital
		Pengembangan Aplikasi *CRM*
		Membentuk *funding war room* terpusat
		Pengembangan *Dashboard Web* dan *Mobile*

KERJASAMA TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi saat ini mendorong semakin banyaknya para pelaku *startup* dan *fintech* di Indonesia baik di segmen *financial* maupun *non-financial* yang menghadirkan layanan berbasis platform digital kepada perusahaan maupun *end customer*. Potensi pasar Indonesia yang cukup besar ditandai dengan jumlah populasi keempat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia melalui investasi permodalan di *start up* dan *fintech*. Selain *digital payment* dan *lending* yang telah lebih dulu berkembang di Indonesia, saat ini berkembang *start up* yang mengkhususkan layananannya di beberapa segmen spesifik diantaranya *supply chain non financing, invoicing system,* dan *education services*. Perkembangan di pasar tersebut telah mendorong perbankan untuk terus melakukan perbaikan layanan kepada nasabahnya.

Dunia perbankan saat ini memasuki era digital sebagai salah satu pendukung revolusi 4.0, dimana "*Internet of Things* (IOT)" menjadi *crucial touch point* bagi perbankan dalam memberikan service kepada nasabahnya. Kemajuan teknologi telah mendorong perbankan untuk melangkah ke layanan yang lebih komprehensif bagi nasabahnya melalui penyediaan platform digital sebagai *user interface* antara bank dan nasabahnya. Hal tersebut telah mendorong Bank BRI sebagai Bank di Indonesia yang memiliki basis nasabah terbesar dan terluas untuk terus melakukan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan terus berupaya untuk menjangkau layanan keuangan bagi para masyarakat luas melalui 3 kerangka strategi, diantaranya: *digitize core, build digital ecosystem,* dan *embed in our customer's life*.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Bank BRI untuk menghadapi perkembangan teknologi adalah melalui pembentukan Divisi Kerjasama Teknologi pada Bulan Juni Tahun 2018. Divisi Kerjasama Teknologi salah satunya dibentuk untuk menciptakan sebuah inovasi *banking services* yang berbasis teknologi untuk menciptakan ekosistem bisnis di beberapa segmen baik korporasi, institusi, *retail payment, transaction*, dan mikro.

Pada tahun 2018, telah diluncurkan beberapa inovasi melalui pembuatan ecosystem *platform* yang menitik beratkan kepada *customer experience* melalui sebuah product yang *customer centric* untuk melayani beberapa segmen bisnis diantaranya:

Teknologi Informasi & Operasional

a. **BRIMOLA**: sebuah platform *supply chain non financing* berbasis web dan aplikasi *smartphone* khusus LPG 3 kg bersubsidi yang secara khusus dibuat untuk mempermudah *ordering system* dari pangkalan ke agen Pertamina serta menyediakan solusi *cashless* dalam rangka pembayaran melalui BRIVA dalam rangka menangani risiko *cash handling* serta transparansi informasi kuota LPG oleh pangkalan.

Sistem Ordering Gas LPG 3Kg
Pertamina - Agen - Pangkalan

☑ CASA ☐ FBI ☑ Loan

b. **JUNIO SMART**: sebuah platform manajemen pendidikan dan sekolah yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, guru, dan bagian administrasi sekolah untuk sharing informasi terkait silabus pendidikan, absensi, pembayaran biaya sekolah dalam rangka menciptakan sebuah environment yang kondusif untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. platform Junio Smart berbasis web dan aplikasi secara khusus dibuat untuk melayani segmen sekolah dasar, menengah, sekolah tingkat atas dan pendidikan setingkat.

School Management System

☑ CASA ☑ FBI ☐ Loan

c. **BEST STORE**: sebuah platform *ordering system* berbasis web dan aplikasi yang dapat digunakan untuk para retailer dalam melakukan pemesanan barang kepada distributor dengan dilengkapi fitur unggulan *online inventory* dan status *payment* guna memberikan kemudahan bagi retailer dan distributor dalam pengelolaan persediaan barang dan *cash flow*.

Supply chain platform untuk
ekosistem perdagangan

☑ CASA ☑ FBI ☑ Loan

d. **BRI Billing Management**: sebuah platform pengelolaan *invoicing/billing* secara elektronik yang dapat digunakan untuk segmen usaha properti, pengelolaan gedung, pengelolaan tenant, dan small medium enterprise guna menciptakan sebuah *billing management* terpadu. BRI *billing management* didukung dengan layanan *invoice tracking*, *payment status*, dan *reporting* untuk dapat memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan piutangnya.

B2B2C Integrated Billing
Management System

☑ CASA ☑ FBI ☐ Loan

DIGITAL BANKING

Di era digital dibutuhkan inovasi produk dan layanan yang terintegrasi dengan kekuatan *digital system*. Untuk menjadi pemimpin di persaingan era digital, arah pengembangan produk dan layanan BRI mengandung 3(tiga) komponen utama: *Core Digitization, Digital Ecosystem dan New Digital Proposition.*

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam setiap sektor ekonomi termasuk industri perbankan. Kini, fungsi perbankan bukan lagi hanya sebatas lembaga intermediari, tetapi meluas sebagai pintu gerbang system pembayaran nasional (*national payment gateway*). Dalam era *digital banking* saat ini, pelayanan nasabah yang mudah, cepat, efisien, dan aman menjadi prioritas utama. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi produk dan jasa layanan yang terintegrasi dengan didukung dengan kekuatan *digital system*. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada tiga komponen utama yang menjadi arah pengembangan produk dan jasa layanan BRI untuk memimpin persaingan di era digital.

Pencapaian Tahun 2018

1. BRI *Core Digitization*

Implementasi dari BRI *Core Digitization* adalah MyBRI dan BRISPOT. BRI *Core Digitization* memberikan pengalaman digital ke dalam layanan BRI kepada nasabah melalui contoh implementasi:

- Optimalisasi *channels* BRI
- Digitalisasi Terintegrasi
- Standarisasi sistem dan Simplifikasi

2. *Digital Ecosystem*

Implementasi dari *digital ecosystem* adalah program akselerasi untuk UMKM (Indonesia Mall). *Digital Ecosystem* merupakan kegiatan membangun ekosistem untuk menawarkan produk dan layanan jasa diluar bisnis inti BRI :

- *Platform digital* untuk industri
- Membangun bisnis model baru
- Kerjasama dengan perusahaan *fintech*

3. *New Digital Proposition*

Implementasi BRI API. BRI menciptakan inovasi produk dan layanan digital secara independen dengan mengoptimalkan jaringan kerja dan infrastruktur BRI.

- Meningkatkan *mobile channel* BRI
- Optimalisasi sistem digital untuk menjangkau pasar yang masih belum terlayani secara konvensional
- Meningkatkan kapasitas digital produk BRI
- *Enabling cross function system with subsidiaries*

Digital Strategy Framework

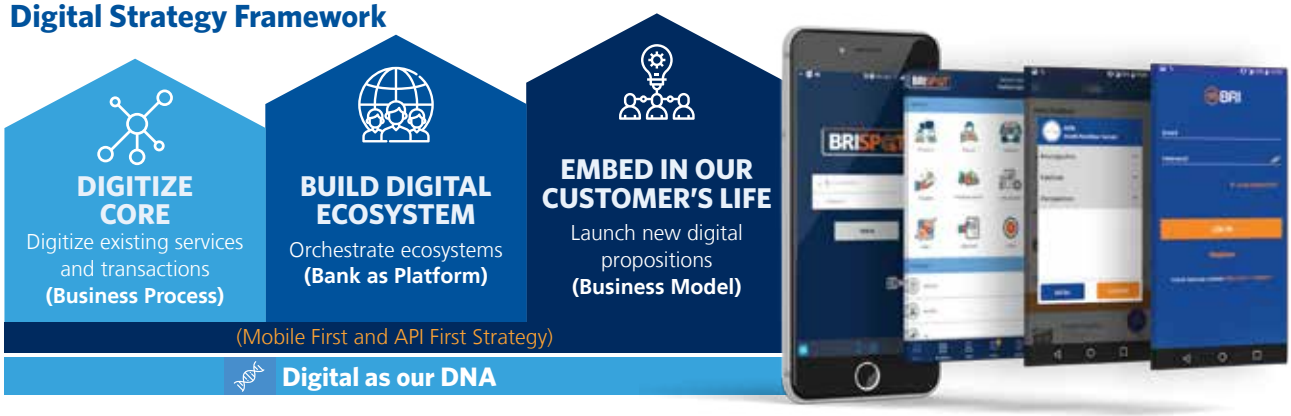

Teknologi Informasi & Operasional

OFFICIAL STORE INDONESIA MALL

Melalui program Indonesia Mall, produk-produk unggulan dari UMKM binaan BRI dapat langsung di akses di *e-commerce* rekanan. Hal ini sekaligus membantu UMKM untuk meningkatkan jangkauan penjualan produk UMKM yang dapat terhubung ke beberapa *e-commerce*.

Salah satu pengembangan yang dilakukan BRI untuk mendorong digitalisasi adalah melalui *e-commerce*. Untuk itu, dibentuklah Official Store Indonesia Mall. Indonesia Mall adalah bagian dari program BRIncubator sebagai bentuk kerjasama BRI dengan *e-commerce* untuk mendorong UMKM BRI *go online*. Melalui program Indonesia Mall, produk-produk unggulan dari UMKM binaan BRI dapat langsung di akses di *e-commerce* rekanan dan dapat membantu UMKM tersebut untuk meningkatkan jangkauan penjualan produk. Melalui Indonesia Mall, UMKM binaan BRI dapat terhubung ke beberapa *e-commerce* sekaligus. Ke depannya kerjasama dengan *e-commerce* akan terus ditingkatkan agar semakin meningkatkan *exposure* produk UMKM lokal.

Selain itu untuk menunjang *platform* tersebut dan sebagai wujud komitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia, BRI juga telah memiliki program inkubasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha mereka. Selama tahun 2018, seluruh UMKM binaan BRI yang mengikuti program Indonesia Mall berhasil meningkatkan penjualan sebesar 58% per bulannya.

Teknologi Informasi & Operasional

Pada tanggal 30 Agustus 2018, Indonesia Mall BRI berhasil mendapatkan penghargaan "The Best E-Commerce Proposition dari The Asian Bankers Awards 2018".

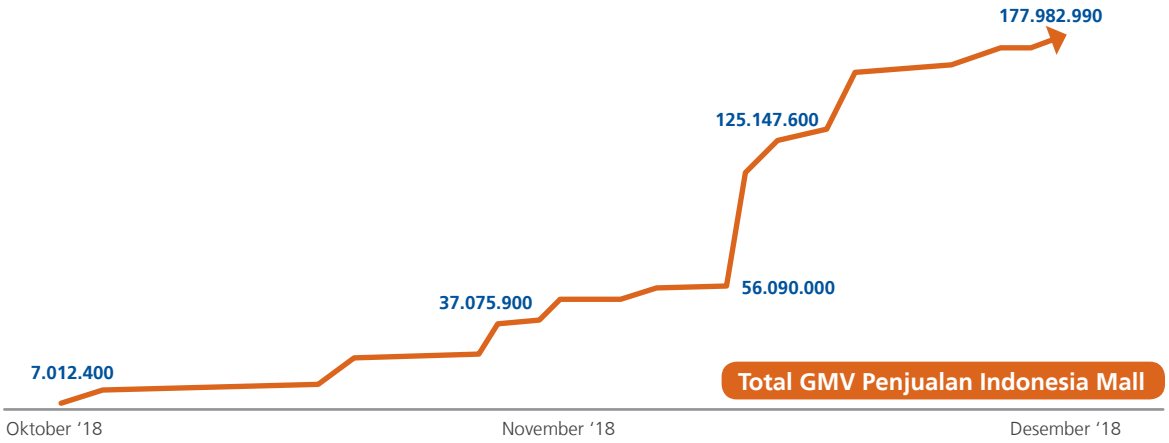

27 Total UMKM Terdaftar

Big Data & Analytics

Revenue Increased

58%

Penjualan per bulan dari seluruh UMKM binaan Bank BRI yang mengikuti program Indonesia Mall berhasil meningkat 58%

Teknologi Informasi & Operasional

Selama kita bergabung di Indonesia Mall, banyak keuntungan yang kita dapatkan dari segi penjualan pastinya kita meningkat drastis karena segmen pasar yang lebih luas dan produk kita semakin banyak dikenal secara luas. Jadi untuk promosi dan pengenalan produk kita sangat terbantu dengan Indonesia Mall. Terima kasih Indonesia Mall.

Asep & Rahmat - Pinnacle Strudel

Setelah mengikuti program dari Bank BRI yaitu Indonesia Mall pendapatan per bulan saya menjadi bertambah, dari 2x lipat menjadi 3x lipat. Selain pendapatan yang meningkat, penjualan produk-produk yang saya buat pun lebih mudah untuk dijual. Tak lupa Indonesia Mall memberikan ilmu baru yang berguna serta teman-teman baru seperjuangan. Terima kasih Indonesia Mall.

Matriun - MS SLeman

Semua pasti mengakui bahwa pemasaran adalah bagian utama dalam usaha. Di era digital hari ini pemasaran online tak bisa diabaikan. Dan hadirnya Indonesia Mall ditengah-tengah UKM sangat membantu, terutama bagi saya. Penjualan *marketplace* melalui Indonesia Mall menjadikan saya dan rekan-rekan UKM mengenal dan merasakan yang namanya Flash sale. Saya sangat berterima kasih akan adanya kerja sama ini. Koordinasi antara tim Indonesia Mall dengan UKM sangat ramah. Terima kasih Indonesia Mall.

Susi Harini - Bayam AADS

Sebagai orang gaptek alias gagap teknologi, Indonesia Mall sebagai mall on-line BRI telah benar-benar membantu saya dalam pemasaran produk secara online yang selama ini masih dilakukan dengan cara konvensional. Dengan konsep Indonesia Mall saya menatap masa depan lebih optimis. Matur nuwun BRI, matur nuwun Indonesia Mall.

Puthut Puthut Hatmoko - Belluci

INVESTREE PARTNERSHIP

Bank BRI bekerjasama dengan perusahaan *fintech* salah satunya adalah Investree dalam hal penyaluran *Invoice Financing*. Produk *Invoice Financing* memiliki skema kredit sama dengan produk BRI yaitu KMK *Post Financing* yatu pembiayaan tagihan atas proyek yang telah dilaksanakan namun belum mendapatkan pembayaran dari *bouwheer* (pemilik proyek). Beberapa persyaratan selain perizinan usaha untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan *invoice financing* antara lain usaha *Payor* telah berjalan minimal 2 (dua) tahun. Selain itu usaha debitur telah memperoleh laba bersih pada 1 (satu) tahun terakhir. Kemudian usaha yang dibiayai tidak termasuk usaha yang dilarang pemerintah/BKPM dan tidak termasuk Daftar Hitam maupun kredit macet Bank Indonesia.

Saat ini total penyaluran pinjaman dengan skema channeling dengan Investree mencapai Rp29,45 miliar dengan jumlah 62 debitur.

Mitigasi risiko dari skema pinjaman dilakukan melalui Asuransi Penjaminan Kredit (Jamkrindo) serta penggunaan *escrow account* atau *join account*.

Teknologi Informasi & Operasional

BIG DATA

Dalam jangka waktu dan sejarah yang panjang, BRI telah mengumpulkan "segudang" data yang memiliki potensi besar. Data ini merupakan "lumbung emas" bagi BRI. Untuk itu, BRI berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas dari *Big Data and Analytics* guna memanfaatkan data ini secara maksimal dalam hal analisa risiko kredit (*credit risk analytics*) yang nantinya diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan BRI.

Dunia digital saat ini terus membahas mengenai pemanfaatan *big data* dalam menunjang kegiatan bisnis. Seperti diketahui, tahun 2018 menjadi tahun pencapaian yang signifikan bagi BRI, karena sudah hadir dan melayani masyarakat Indonesia selama 123 tahun. Dalam jangka waktu dan sejarah yang panjang, BRI telah mengumpulkan "segudang" data yang memiliki potensi besar dan sangat berharga untuk menjawab berbagai macam permasalahan bisnis. Data ini merupakan "lumbung emas" bagi BRI, karena belum digunakan secara maksimal, sampai dengan saat BRI memulai membangun kapabilitas "*Big Data*".

Belum optimalnya pemanfaatan Big Data menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi BRI. Adapun penyebab utamanya adalah, lokasi data yang "***silo***" di berbagai macam sumber, dan infrastruktur yang tidak "***scalable***" untuk memproses kegiatan deep analytics. Oleh sebab itu, sejak tahun 2017, BRI berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas dari *Big Data and Analytics* guna memanfaatkan data ini secara maksimal dalam hal analisa risiko kredit (*credit risk analytics*) terutama dalam hal *assessment* pinjaman baru kepada calon nasabah baru maupun optimalisasi nasabah eksisting sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan BRI dengan jauh lebih cepat dan efisien.

CREDIT RISK ANALYTICS

Early Warning System

Untuk menjalankan fungsi *Early Warning System, BRI membangun paltform Modular Scoring Platform. Modular Scoring Platform* adalah *dashboard* yang menampilkan prediksi kemungkinan gagal bayar dari nasabah eksisting tiap bulan. Selain itu *platform* ini mampu mengkombinasikan data demografi nasabah dengan data transaksi finansial nasabah. Melalui metode ini akan semakin mempermudah pemimpin unit kerja BRI untuk melakukan pemantauan kualitas pinjaman nasabah beserta prediksi kelancaran pembayaran ke depan.

Behavior Scoring

Untuk memantau behavior scoring, BRI menggunakan *Platform modular scoring* yang mampu menyediakan informasi yang berkaitan dengan data demografi, *behaviour,* dan data transaksi finansial nasabah eksisting sehingga tingkat risiko nasabah bisa diprediksi dan direkomendasikan untuk mendapatkan penawaran suplesi di setiap unit kerja BRI.

Credit Underwriting Produk Digital

Untuk memantau *credit underwriting* produk digital, BRI membuat fitur yang memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk memudahkan dalam penambahan modul *credit scoring* beberapa produk pinjaman BRI, termasuk mengintegrasikan modul-modul yang ada dengan SLIK, Dukcapil, dll. Selain itu seluruh data pinjaman bisa disimpan ke dalam *big data* untuk dilakukan analisa.

Merchant Assesment - BRILink *Agent*

Dengan menggunakan teknologi *Big Data Analytics,* diharapkan mampu menyediakan rekomendasi Agen BRILink prospektif.

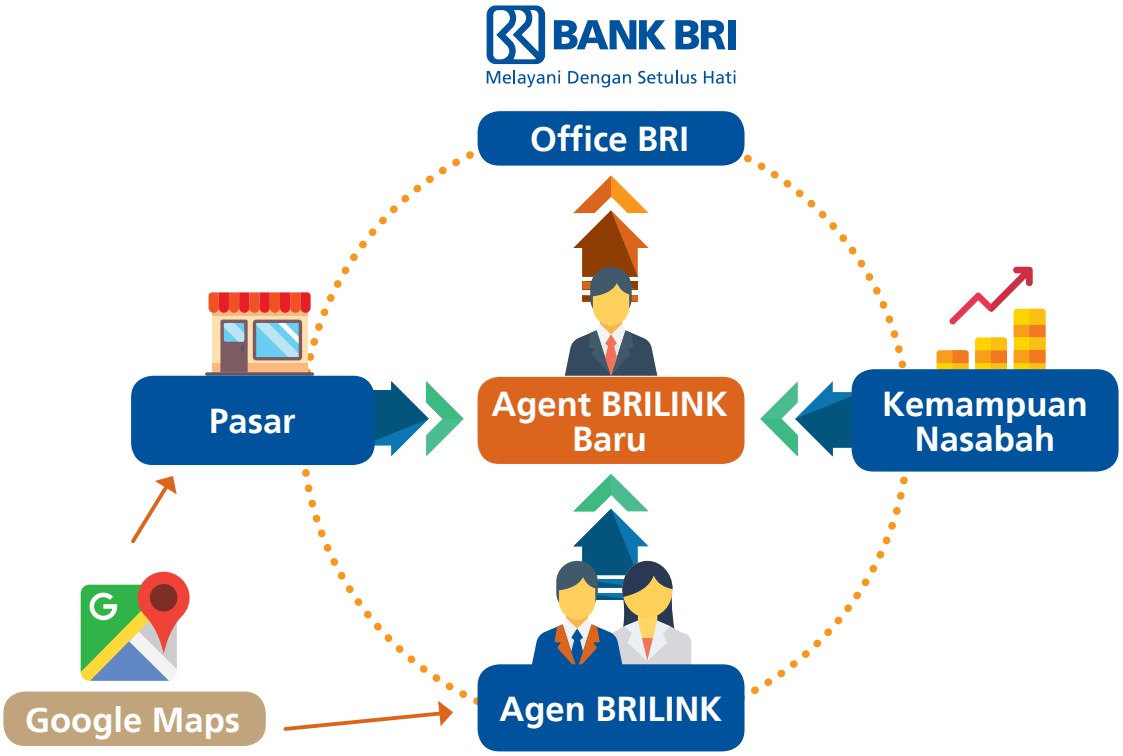

BRI menyadari bahwa perkembangan bisnis perbankan selalu dihadapkan dengan risiko bisnis maupun risiko operasional. Terjadinya *fraud* yang disebabkan perilaku yang menyimpang baik dari sisi internal maupun internal perusahaan ini tetap menjadi tantangan dan perhatian BRI ke depannya. Melalui optimalisasi TI, tantangan ini bisa dijawab dengan menggunakan *Big Data Analytics* melalui fitur BRI Force dan *Early Warning System* untuk mengantisipasi perilaku dan risiko *fraud* yang seringkali dihadapi dunia perbankan untuk kemudian dilakukan tindakan pencegahan.

Fraud Detection – BRI Force

BRI Force menyediakan deteksi *realtime* terhadap anomali transaksi *fraud* berdasarkan pola perilaku nasabah.

- 30s Deteksi perilaku transaksi nasabah
- System yang terintegrasi untuk menunjang proses investigasi dan pelaporan fraud bagi pihak yang berkepentingan.
- Memvisualisasikan pola perilaku untuk masing-masing nasabah dalam suatu periode data dengan cepat dan mudah.

Early Warning System

Early Warning System merupakan *dashboard* yang menampilkan prediksi kemungkinan gagal bayar dari nasabah ritel eksisting setiap bulan.

- Mengkombinasikan data demografi nasabah dengan data transaksi finansial nasabah
- Mempermudah Pemimpin uker dan RM untuk melakukan pemantauan kualitas pinjaman nasabah-nasabahnya beserta prediksinya ke depan
- Dapat diakses melalui BRISIM, sistem informasi manajemen di BRI
- Dapat diintegrasikan dengan eksisting aplikasi yang dimiliki oleh BRI
- Maintain dan update model dapat dilakukan dengan lebih *simple*.

Teknologi Informasi & Operasional

STRATEGI JANGKA PANJANG DIGITAL BANKING DAN TEKNOLOGI INFORMASI

***Roadmap Digital Banking* Tahun 2018-2022**

2018

- *Nurture Great Digital Talent*
- *Establish Big Data and Leverage data Analytics*
- *Launch Digital Banking and establish partnership with open API*

2019-2020

- *Establish ICT and Digital talent pool program with impactful performance evaluation*
- *Monetizing Data Analytics*
- *Leader in Digital Banking and Integrated API Ecosystem*

2021-2022

- *Home for Best ICT and Digital Talent (Holding and Subsidiaries)*
- *Mature Data Management and Strong Analytics*
- *The Best Digital Banking and Integrated API Platform in SEA*

Operasional

Pengelolaan operasional perusahaan tidak terlepas dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang membutuhkan layanan perbankan. Divisi Sentra Operasi BRI bertanggung jawab mengelola pemrosesan dan monitoring transaksi operasional perbankan di seluruh jaringan kerja BRI.

Pengembangan Operasional Tahun 2018

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin meningkat, BRI senantiasa mengembangkan sistem operasionalnya. Selama tahun 2018, Divisi STO melakukan pengembangan sistem dan operasional sebagai berikut:

1. *Enhancement Centralised Payment System*

Proses *payment* BRI dilakukan secara *centralized* di Divisi STO, BRI berupaya dalam melaksanakan proses operasional secara cepat, aman, akurat, rendah risiko dan memiliki kemampuan untuk memproses jutaan transaksi per hari dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan jumlah *database* nasabah yang sangat besar.

Untuk menjaga kualitas sistem operasional agar semakin handal, efisien, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis serta *comply* terhadap kebijakan regulator, maka pada tahun 2018 telah dilakukan pengembangan sistem *Straight Through Processing* transaksi Kliring, Otomasi Transaksi *outgoing* transfer ke Bank Lain, Otomasi Pelaporan Transaksi Surat Berharga Antar Bank (format baru), Pengembangan sistem *Electronic Journal* ATM secara online, serta melengkapi Fungsi Rekonsiliasi Transaksi Untuk Fitur-Fitur Baru e-Banking.

a. Pengembangan Sarana Penunjang Keberlangsungan Operasional

Untuk menjaga *sustainability* kegiatan operasional dan sebagai sarana *back up system*, pada tahun 2018 telah disempurnakan *alternate site centralized* operasional di Jalan S Parman untuk transaksi RTGS, Kliring, *Remittance, treasury*, serta *back up system* proses rekonsiliasi transaksi untuk wilayah Jabodetabek.

b. *Peningkatan Kapasitas Produksi Kartu*

Untuk meningkatkan kapasitas produksi kartu dan percepatan migrasi kartu *magnetic stripe* ke *chip* sesuai kebijakan Bank Indonesia, BRI telah melakukan penambahan 2 (dua) mesin personifikasi kartu. Target dari BI untuk tahun 2018 migrasi sebanyak 30% dari total kartu ATM/Debit BRI dan dapat direalisasikan lebih dari target yaitu 35%..

c. *Operational Excellence*

Operasional BRI pada tahun 2012 telah memperoleh Standarisasi Kualitas Mutu ISO 9001 : 2008. Seiring dengan berjalannya waktu, Standarisasi Kualitas Mutu ISO 9001:2008 berubah menjadi Standarisasi Kualitas Mutu ISO 9001:2015 sejak tahun 2017 untuk 9 (sembilan) ruang lingkup meliputi *Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, E-Banking Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury and E-Banking Settlement, Cash Operation and Trade Processing Centre* dari Badan Sertifikasi PT. Lloyd's Register Indonesia

Strategi Operasional Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan *Customer Experience Excellence* di bidang operasional, BRI telah menetapkan strategi operasional tahun 2019 sebagai berikut :

1. Simplifikasi Proses Operasional (*Straight Through Processing* pemrosesan transaksi, otomasi proses transaksi untuk meminimalkan risiko operasional, meningkatkan keakuratan data dan efisiensi proses)
2. *Compliance* terhadap Kebijakan Regulator (Implementasi Topologi infrastruktur Sistem Pembayaran yang *comply* terhadap Kebijakan BI, Menjaga kapasitas produksi Kartu ATM/Debit untuk pemenuhan target kartu NSICCS, Persiapan Implementasi *Balance Sheet Relief*)
3. *Reliable Human Resources* melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas pekerja serta sertifikasi khusus pekerja operasional
4. *Centralized Back Office Organization and improving Internal Control supported by real time data.*

Manajemen Aktiva Tetap

DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN AKTIVA TETAP, BRI SENANTIASA BERPEDOMAN PADA PENGELOLAAN AKTIVA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. SEJALAN DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI BRI DAN DALAM PENGELOLAAN AKTIVA, BRI MENGEMBANGKAN APLIKASI BRISMILE (SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LOGISTIK ELEKTRONIK). BRSMILE MERUPAKAN PENYEMPURNAAN DARI APLIKASI SEBELUMNYA YAITU PORTAL LOGISTIK YANG DIKEMBANGKAN SECARA *INHOUSE* OLEH BRI.

Aset merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan. Aktiva tetap menjadi bagian dari aset perusahaan. Dengan manajemen aktiva tetap yang baik, perusahaan dapat menjaga nilai aktiva tetap yang dimiliki tetap tinggi, memiliki usia yang lebih panjang, serta menghindari kerusakan terhadap aset yang bisa menyebabkan turunnya nilai jual.

Pengeloalaan aktiva tetap BRI menjadi tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Properti (MAT). Secara garis besar, Unit Kerja ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Pengadaan Properti seperti pembangunan dan renovasi, maupun sewa dan beli properti, serta penyediaan fasilitas gedung seperti genset, AC, pintu kluis, dan sebagainya. Disamping itu, juga bertanggungjawab atas pemeliharaan dan optimalisasi aktiva tetap, pengelolaan sistem informasi aktiva tetap, dan penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan aktiva tetap.

Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap

Pengelolaan Aktiva Tetap BRI berpedoman pada Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) yang telah ditetapkan oleh Direksi. KEMAL BRI memperoleh pengesahan dari Direksi pada tahun 2011 dan diberlakukan terhitung mulai tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara.

Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan mekanisme kontrol dan tantangan perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

Pengelolaan Aktiva Tetap Tahun 2018

Dalam melakukan pengelolaan aktiva tetap, BRI senantiasa berpedoman pada pengelolaan aktiva yang efektif dan efisien. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi di BRI dan dalam pengelolaan aktiva, BRI mengembangkan aplikasi BRISmile (Sistem Manajemen Informasi Logistik Elektronik). BRSmile merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yaitu Portal Logistik yang dikembangkan secara *inhouse* oleh BRI. Dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa modul yaitu:

1. Modul pengadaan aktiva tetap.
2. Modul pengelolaan aktiva tetap yang terdiri antara lain asuransi aktiva tetap, relokasi, *reclass* aktiva tetap dan penghapusbukuan aktiva tetap.
3. Modul anggaran.

Manajemen Aktiva Tetap

Realisasi Strategi dan Operasional Tahun 2018

BRISmile dapat diakses di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah sampai di level Kantor cabang (Kanca)/Campus sehingga pengelolaan aktiva tetap dapat lebih efisien dan efektif. Adapun efisiensi yang didapatkan atas pengelolaan aktiva tetap melalui BRISmile adalah sebagai berikut:

1. Unit kerja BRI dapat melihat dan melakukan monitoring atas pencatatan aktiva tetap di unit kerjanya secara *on line* sehingga permasalahan terutama yang berkaitan dengan selisih antara fisik aktiva tetap dan rincian data di BRISmile dapat segera diselesaikan. Unit kerja dapat memastikan bahwa aktiva tetap yang diterima sudah tercatat di BRISmile.

2. Bertambahnya unit kerja BRI dan adanya resupervisi unit kerja BRI membutuhkan pengelolaan aktiva tetap yang bersifat desentralisasi terutama yang berkaitan dengan relokasi (perpindahan) aktiva tetap antar unit kerja.

3. Proses asuransi aktiva tetap termasuk didalamnya penutupan asuransi dan pembayaran klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap dapat dilakukan secara *on line* dengan pihak penanggung (asuradur) sehingga proses penutupan asuransi dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pada saat dilakukan secara manual sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian aktiva tetap BRI. Selain itu, progress klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap BRI dapat dimonitoring oleh unit kerja yang melakukan pengajuan klaim asuransi melalui BRISmile. Selanjutnya setelah terdapat persetujuan klaim dari asuradur maka pembayaran klaim dilakukan secara otomatis.

4. Proses penghapusbukuan dapat dilakukan sendiri oleh unit kerja BRI mulai dari usulan sampai dengan penghapusan dari pencatatan di BRISmile. Proses ini memberikan kemudahan unit kerja untuk melakukan monitoring atas *progress* setiap usulan penghapusbukuan yang diajukan.

5. Modul anggaran dalam BRISmile memberikan kemudahan dalam penyusunan anggaran BRI. Hal ini dikarenakan usulan dari setiap unit kerja dilakukan melalui sistem sehingga kebutuhan unit kerja dapat langsung dimonitor dan di analisa oleh Kantor Pusat.

6. Proses pengadaan aktiva tetap dimulai dari input ijin prinsip pengadaan, ijin prinsip hasil pengadaan dan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan pengiriman/distribusi aktiva tetap ke unit kerja BRI dapat dilakukan melalui Aplikasi BRISmile sehingga dapat diketahui *progress* semua pengadaan aktiva tetap yang sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan di Kanpus, Kanwil, Kanins, dan BRI Corporate University sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas setiap pengadaan aktiva tetap yang dilakukan termasuk waktu dan kendala yang dihadapi.

7. Proses pengajuan usulan sampai dengan pencatatan aktiva tetap sewa/beli properti dan pembangunan/ renovasi Gedung BRI sudah dapat dilakukan melalui BRISmile sehingga *progress* usulan atau pembangunan/renovasi dapat langsung dimonitor oleh unit kerja BRI.

8. Saat ini modul BRISmile telah terhubung (*interface)* langsung dengan Brinets, dimana mayoritas transaksi pembukuan dilakukan otomatis melalui BRISmile, sehingga tidak diperlukan lagi pembukuan manual oleh unit kerja.

9. Kebutuhan informasi mengenai aktiva tetap BRI baik untuk kepentingan internal maupun eksternal terutama data yang terkait dengan laporan keuangan BRI dapat lebih cepat dan akurat. Adapun laporan yang dapat dihasilkan dari BRISmile ini antara lain laporan rincian aktiva tetap, laporan mutasi aktiva tetap, laporan penghapusbukuan aktiva tetap, laporan penutupan asuransi aktiva tetap, dll.

Manajemen Aktiva Tetap

10. Untuk memudahkan pihak manajemen dalam mengambil strategi kebijakan yang berkaitan dengan aktiva tetap telah dibuatkan dashboard pengadaan, usulan sewa/beli properti, dan pembangunan/ renovasi gedung sehingga kebijakan yang diambil tepat waktu dan tepat sasaran.

11. Selama tahun 2018 terdapat beberapa modul yang telah dikembangkan oleh BRI, yaitu:
    a. Modul Pengadaan dan distribusi barang cetakan
       Modul pengadaan barang cetakan dan distribusi barang cetakan (*security printing/ non security printing*) yang terintegrasi dengan pembukuan BRINETS dan *digital office*.

    b. Modul SIM BPKB Kendaraan Bermotor
       Modul Sistem Informasi Manajemen BPKB yang berfungsi mendistribusikan BPKB dari vendor penyedia kendaraan ke Uker pemilik kendaraan yang belum menerima fisik BPKB yang terintegrasi dengan *digital office*.

    c. Modul Verifikasi Pembayaran
       Modul yang berfungsi untuk memverifikasi nota persetujuan fiat bayar.

    d. Modul Pembebanan Biaya Amortisasi Otomatis Untuk Bangunan Sewa dan *Upgrading* Bangunan Sewa
       Modul yang berfungsi untuk dilakukan pembebanan amortisasi secara otomatis untuk bangunan sewa dan *upgrading* bangunan sewa.

    e. Tanda Daftar Rekanan Online
       Modul yang berfungsi untuk mempermudah proses bagi pihak ketiga yang ingin menjadi rekanan BRI mulai dari proses pendaftaran rekanan dengan metode online di situs BRI sampai penerbitan Tanda Daftar Rekanan BRI.

Revaluasi aset

Sepanjang tahun 2018, BRI tidak melakukan revaluasi aktiva tetap.

Pengadaan Barang dan Jasa

BRI MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERKUALITAS DENGAN SELALU MENEKANKAN PENTINGNYA PENERAPAN PRINSIP GCG. OLEH KARENA ITU, UNTUK MENCIPTAKAN PROSES PENGADAAN YANG BERKUALITAS, SALAH SATU LANGKAH YANG DILAKUKAN ADALAH MENJAGA TRANSPARANSI DALAM SETIAP PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN.

Pengadaan adalah proses kegiatan dalam rangka memenuhi atau menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa perusahaan dengan cara membeli atau sewa atau kerja sama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya dilakukan melalui rekanan perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk.

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BRI bertujuan untuk mendukung operasional bank dan kinerja bisnis secara umum. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang aman, efektif, dan efisien.

Kebijakan

Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) merupakan pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta tetap memperhatikan prinsip *GCG* (*Good Corporate Governance*).

KEMAL BRI diberlakukan terhitung mulai tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara. Tujuan dari disusunnya KEMAL BRI adalah:

a. Sebagai pedoman dalam pengelolaan aktiva tetap dan pelayanan logistik yang berkualitas kepada seluruh unit kerja BRI.
b. Sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa di BRI sehingga proses pengadaan di BRI.

Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan mekanisme kontrol dan tantangan perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan proses pengadaan, Bank mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan meliputi:

a. Efisien	Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan daya kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
b. Efektif	Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.

Pengadaan Barang dan Jasa

c.	**Kompetitif**	Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
d.	**Transparan**	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.
e.	**Adil dan Wajar**	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.
f.	**Akuntabel**	Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BRI dilakukan sebagai berikut:

Penjelasan:

a. Dalam rangka menunjang kegiatan operasional BRI diperlukan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur tersebut dibutuhkan suatu proses pengadaan.

b. Dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan dibutuhkan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan metode pengadaan. Pada tahun 2017 telah dibentuk **Grup Estimasi**, yaitu unit kerja independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan HPS pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.

c. Proses pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa Metode, diantaranya adalah Swakelola, Pembelian langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbuka.

d. Dalam proses pengadaan tersebut akan dilakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh kualitas dan harga terbaik.

e. Dalam rangka memperoleh kesesuaian antara kebutuhan BRI dengan penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa maka dalam proses pengadaan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi sampai ditentukannya pemenang penyedia barang/jasa.

f. Apabila telah ditetapkan pemenang, BRI menyediakan waktu sanggah apabila ada pihak yang berkeberatan dalam proses pengadaan yang telah dilakukan atau terhadap penetapan pemenang. Hal tersebut dilakukan oleh BRI dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kaidah *Good Corporate Governance*.

Pengelolaan Rekanan

a. Penyedia barang dan/atau jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa di BRI pada prinsipnya perlu memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR) BRI. TDR (Tanda Daftar Rekanan) adalah keterangan dalam format sertifikat atau surat yang berisi penjelasan bahwa pihak penyedia barang/jasa yang tercantum di dalamnya telah terdaftar sebagai Rekanan BRI, sebagai syarat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di BRI.

b. BRI telah memiliki daftar rekanan penyedia barang/jasa yang dapat digunakan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa di BRI. Daftar rekanan tersebut diperoleh dari seleksi atas kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi rekanan BRI sampai dengan penyedia barang/jasa yang lolos seleksi menjadi rekanan telah dilakukan secara transparan, guna menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

c. Evaluasi terhadap Rekanan, evaluasi dilakukan terhadap rekanan dengan variable penilaian meliputi *procurement process*, *quality*, *delivery*, *responsiveness*, dan *maintenance period*.

d. Aplikasi Pegelolaan rekanan, BRI telah mengembangkan aplikasi pengelolaan TDR (Tanda Daftar Rekanan) yang terintegrasi dengan BRISMILE mulai dari pendaftaran rekanan yang dilakukan secara mandiri oleh vendor (melalui intranet BRI), proses evaluasi legalitas dan usaha vendor sampai penerbitan Tanda Daftar Rekanan BRI (TDR BRI) oleh BRI.

Pengadaan Barang dan Jasa

Strategi dan Program Kerja Tahun 2018

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa berperan sebagai pendukung bisnis dan operasional BRI. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan yang aman, efektif, dan efisien.

Berikut beberapa strategi yang diterapkan selama tahun 2018:

- **Pengadaan dengan *multi vendor***
  Strategi multi vendor mempercepat proses pemenuhan barang dan/atau jasa.

- **Pengadaan dengan *blanket order***
  Penerapan strategi tersebut mempercepat proses pemenuhan barang dan jasa yang bersifat rutin dengan jumlah yang relatif besar, serta mengefisiensikan biaya operasional pengadaan.

- **Sinergi BUMN**

- **Penggunaan Aplikasi BRISMILE**
  Dengan menggunakan sistem tersebut, monitoring proses dan reporting hasil pengadaan dapat dilakukan secara elektronik/system.

Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa serta Implementasi *e-procurement*

BRI melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dengan selalu menekankan pentingnya penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, untuk menciptakan proses pengadaan yang berkualitas, salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga transparansi dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan.

Program kerja yang telah dilakukan untuk mendukung transparansi pelaksanaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Penilaian Finansial menggunakan Aplikasi *E-Procurement Modul E-Auction*
- Pengumuman lelang pengadaan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik.
- Sertifikasi ISO 9001:2015

Sertifikasi ISO 9001:2015

BRI telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 terkait dengan proses pengelolaan persediaan, administrasi pengadaan, serta pembayaran. Dengan diraihnya Sertifikasi ISO 9001:2015 tersebut, diharapkan tingkat kepercayaan mitra kerja kepada BRI akan meningkat karena transparansi terhadap prosedur pengadaan yang lebih baik.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pencapaian persentase *cost efficiency* (target 10% terhadap anggaran)

Efisiensi menjadi hal yang penting dilakukan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, BRI selalu menjaga agar *cost efficiency* berhasil ditekan sehingga proses pengadaan barang dan jasa lebih efektif.

Index Kepuasan Pelanggan Internal dan Eksternal

No.	Nama *Survey*	Responden	Hasil *Survey* FGD I 2018		Hasil *Survey* Tahap II 2018		*Max* Skala
			Index	Keterangan	*Index*	Keterangan	
1	BRI *Internal Service Survey* (BISS)	Divisi Kantor Pusat	4.48	Sangat Puas	4.60	Sangat Puas	5,00
2	BRI *External Service Survey* (BESS)	Rekanan/Mitra Kerja	4.15	Sangat Puas	4.50	Sangat Puas	5,00

Tata Kelola Perusahaan

PENCAPAIAN BRI ATAS PANGSA PASAR MIKRO DAN UMKM DI ATAS TARGET TAHUN 2018 TIDAK LEPAS DARI PELAKSANAAN FUNGSI MASING-MASING ORGAN TATA KELOLA YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN .

PADA TAHUN 2018, BRI BERHASIL MENERAPKAN PRAKTIK TATA KELOLA YANG FLEKSIBEL TERHADAP KEBUTUHAN USAHA DENGAN TETAP MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU. HAL INI MEMBERIKAN NILAI LEBIH BAGI PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG AKSELERASI PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM MELALUI DIGITALISASI LAYANAN PERBANKAN.

Tata Kelola Perusahaan

KOMITMEN TATA KELOLA

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan di seluruh level kerja BRI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik *(Good Corporate Governance/GCG)* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BRI menyadari pentingnya penerapan GCG sebagai dasar dalam mencapai visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, BRI senantiasa meningkatkan kualitas penerapan struktur dan proses GCG pada setiap tingkatan organisasi guna menjaga kelangsungan usaha serta memastikan *outcome* GCG yang lebih baik dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan BRI termasuk nasabah dan pemerintah.

Pencapaian kinerja melalui peningkatan aset perusahaan dan pencapaian laba selama dekade terakhir merupakan wujud atas *outcome* keberhasilan penerapan GCG. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen Bank BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap jenjang organisasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional Bank.

Untuk mewujudkan tujuan Perusahaan dalam peningkatan kualitas GCG, komitmen seluruh insan BRI dapat digambarkan sebagai berikut:

Tata Kelola Perusahaan

PENGHARGAAN GCG

Penerapan GCG yang tercermin melalui *governance outcome* sepanajang 2018 telah mendapatkan pengakuan dengan tercapainya beberapa penghargaan di bidang tata kelola sebagai berikut :

Most Trusted Company
Corporate Governance Performance Index

Best Finance & Top 50 The Biggest Market Capitalization PLCs in Indonesia
(ASEAN Corporate Governance Scorecard)

PENERAPAN GCG

Dasar penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
7. Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
8. Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
9. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Surat Edaran OJK No.13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
12. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tangal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tata Kelola Perusahaan

BRI juga mengadopsi standar terbaik serta pedoman dan *best practice* terkini dalam meningkatkan kualitas mutu penerapan GCG antara lain :

1. Prinsip-prinsip GCG oleh *Organization for Economic Cooperation and Development.*
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard.*
3. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance.*
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* oleh *Basel Committee on Banking Supervision.*

PRINSIP GCG DAN PENERAPANNYA

Prinsip-prinsip GCG diimplementasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan dan/atau memaksimalkan nilai dan performa perusahaan dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

Prinsip GCG tersebut dirumuskan dalam menopang aktivitas usaha berkelanjutan BRI sebagai berikut:

Transparansi

1. Bank mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Bank mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi dan misi Bank, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan Bank.
3. Prinsip keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban informasi rahasia Bank dan Nasabah sesuai peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas

1. Bank menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* dan *stakeholders*.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS.
3. Bank menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan *stakeholders* lainnya sesuai ketentuan berlaku.
4. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Bank.

5. Bank memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
6. Bank memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi Bank.
7. Bank memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

Tanggung Jawab

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank.
2. Bank memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam
3. Bank bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Indenpendensi

1. Bank menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif.
2. Bank melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan.

Kewajaran dan Kesetaraan

1. Bank memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
2. Bank memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta adanya akses keterbukaan informasi.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap tingkatan organisasi BRI dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. BRI juga terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang telah terbukti memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

Hal tersebut bertujuan untuk:

1. Mendukung Visi dan Misi Bank.
2. Mendukung pencapaian tujuan bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan kepada *shareholders* dan *stakeholders* bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja Bank.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara efektif dan efisien.
8. Mengoptimalkan hubungan *risk return* yang konsisten dengan strategis Bank.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank didasari prinsip-prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.
11. Membantu terwujudnya *good corporate citizen.*

Pelaksanaan *Roadmap* GCG

BRI terus berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. Tahapan pelaksanaan GCG di BRI dituangkan dalam bentuk *Roadmap* berkelanjutan yang pada pelaksanannya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. *Roadmap* BRI adalah sebagai berikut:

2000-2001

- Penerapan GCG yang tertuang dalam *business plan*
- Komitmen manajemen dalam visi misi, *core value*, dan *corporate culture*
- GCG *policy* (*Charter*)

2002-2005

- Kebijakan Kode Etik BRI
- Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi
- Pedoman Sekretariat Perusahaan
- Panduan transparansi dan pengungkapan
- Piagam Komite Audit
- Kebijakan Umum Manajemen Risiko
- Kebijakan Peraturan Disiplin
- Peraturan Ketenagakerjaan
- Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi
- Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi
- Revisi Kebijakan Umum Logistik.

2006-2009

- Panduan Komite Komite Nominasi dan Remunerasi
- Panduan Komite Pengawas Manajemen Risiko
- Piagam Audit (*Audit Charter*)
- Arsitektur SDM.

2010-2012

- Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).
- Kebijakan Penerapan Budaya Kepatuhan.
- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- Kebijakan Strategi *Anti Fraud*.
- Standar *Service Level Agreement* (SLA).

2013

- Kebijakan Prinsip Mengenal Pekerja (*Know Your Employee*).
- Pelaksanaan Program Bina Lingkungan.
- Pedoman Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendidikan.

2014

- Pengkinian Kebijakan dan Prosedur Audit Intern.
- Pelaksanaan Program Pendampingan Pekerja Baru.
- BPO Penerapan APU dan PPT.
- Pedoman Penilaian peningkatan Kesehatan Bank .
- *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
- Ketentuan *Security* Teknologi Sistem Informasi BRI.

2015

- Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang BRI.
- Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang BRI.
- Kebijakan Umum Manajemen Risiko.
- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*).
- Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
- Piagam Audit Intern BRI.
- *IT Strategic Plan*.
- BRI kembali meraih penghargaan:
  1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index.*
  2. *The Best Overall* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD)

Pelaksanaan Roadmap GCG

2016

- Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi BRI bersama KPK.
- *Disaster Recovery Plan* (DRP) Teknologi Informasi BRI.
- Implementasi aplikasi *Knowledge Management* yaitu *sharing of knowledge* (ketentuan internal dan eksternal, publikasi hasil kajian/ riset, dan *training*) kepada seluruh pekerja.
- Implementasi *E-learning* ke seluruh pekerja BRI.
- BRI kembali meraih penghargaan:
  1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index.*
  2. *The Best Overall dalam acara Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

2017

- Pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi BRI.
- BRI kembali meraih penghargaan:
  1. *Most Trusted Company based on Corporate Governance Performance Index.*
  2. *The Best Overall* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

2018

- Kebijakan BRI tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Implementasi *Recovery Plan* bagi Bank sistemik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- *Review* kebijakan *Whistleblowing System* dan penerapan sarana pelaporan WBS pada *website* BRI.

IMPLEMENTASI GCG 2018

Penerapan GCG BRI untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Komitmen GCG oleh seluruh insan BRI.
2. Sosialisasi penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam Forum Peningkatan Kinerja BRI.
3. Penyampaian laporan *Self Assessment* GCG.
4. Penyampaian laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi.
5. Pelaksanaan RUPS Tahun 2018.
6. Pembayaran Dividen tidak melebihi jangka waktu dari 1 bulan sejak diumumkan risalah pelaksanaan RUPS.
7. Pelaksanaan *Corporate Governance Performance Index* (CGPI) yang diadakan oleh The Indonesia Institute for *Corporate Governance* dan BRI memperoleh skor 89,06 dengan predikat Sangat Terpercaya (*Most Trusted Company*).
8. Pertisipasi dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
9. *E-learning* pengendalian gratifikasi.
10. *Redesign Corporate Website* Bank BRI.
11. Revitalisasi kebijakan dan sarana pelaporan *Whistleblowing System* pada *Website* Perusahaan.
12. Penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi BRI dan konglomerasi keuangan.

Kebijakan Tata Kelola

Dalam implementasi GCG, BRI memiliki kebijakan internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab pada setiap level organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.281-DIR/ DKP/12/2011 tentang Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/15/2012 dan Nokep. S.104-DIR/ DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep. S.64-DIR/ DKP/12/2013 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep. S.65-DIR/ DKP/12/2013 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep. S.339-DIR/ DKP/07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Surat Edaran Direksi BRI Nose. S.27-DIR/DKP/12/2016 tentang *Whistleblowing System* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep:S.11-DIR/ DKP/03/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep:S.1023-DIR/KPS/11/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9. Pedoman Tata Tertib Komisaris.
10. Kebijakan Dividen.
11. Surat Keputusan Dewam Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No:04-KOM/BRI/09/2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

SKB (GCG *Policy Charter*) dirumuskan berdasarkan perkembangan bisnis BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta *best practice* GCG yang mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yaitu komitmen, struktur, proses dan hasil yang dijabarkan pada bagan berikut:

Komitmen Tata Kelola

- Visi dan Misi
- Nilai Perusahaan
- *Board Charter*
- Kode Etik
- Pelestarian Lingkungan

Struktur Tata Kelola

- Organ Utama
  - RUPS
  - Dewan Komisaris
  - Direksi
- Organ Pendukung
  - Komite
  - Sekretaris Dewan Komisaris
  - Sekretariat Perusahaan
  - Satuan Kerja Kepatuhan
  - Satuan Kerja Audit Internal
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Kebijakan dan Prosedur
  - Rencana Strategi bank
  - Kebijakan Bisnis Bank
  - Transparansi dan Pengungkapan

Proses Tata Kelola

- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
- Pelaksanaan fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Tata Kelola Teknologi Informasi (IT *Governance*)
- Pengelolaan Anak Perusahaan

Hasil Tata Kelola

- Kesinambungan usaha
- Perlindungan Nasabah
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai *Good Corporate Citizen*.
- Kemanfaatan Bank Bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

1. KOMITMEN TATA KELOLA

Visi dan Misi

BRI mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Misi kemudian menjelaskan cara BRI dalam mencapai tujuan tersebut. Secara lebih jelas Visi dan Misi dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan (*Core Value*)

Core Value BRI mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, untuk kemudian ditanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja. Secara lebih jelas *Core Value* dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

BRI mempunyai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat struktur, pembagian tugas dan tanggung jawab, etika kerja, tata cara rapat, organisasi, dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, yang digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan usaha Perusahaan. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Bab Dewan Komisaris.

Kode Etik

BRI menyusun Kode Etik Bank sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku insan BRI dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI diseluruh jenjang organisasi. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Bab Kode Etik.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian kerja bersama (PKB) disusun untuk mengatur syarat-syarat kerja sebagai hasil perundingan dan kesepakatan antara BRI dengan serikat pekerja BRI, yang kemudian menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja. PKB merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya menjunjung hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja. Secara lebih jelas Perjanjian Kerja Bersama dijelaskan pada Bab SDM.

Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BRI sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala. Secara lebih jelas peran BRI dalam pelestarian sumber daya alam dijelaskan pada Bagian Tanggung jawab Sosial Perusahaan.

2. STRUKTUR TATA KELOLA

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 stuktur GCG terdiri atas 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pelaksanaannya, guna memastikan efektifitas GCG, dan menciptakan mekanisme kontrol *check and balance*, maka struktur Tata Kelola BRI juga meliputi Organ Pendukung serta Kebijakan dan Prosedur sebagai berikut:

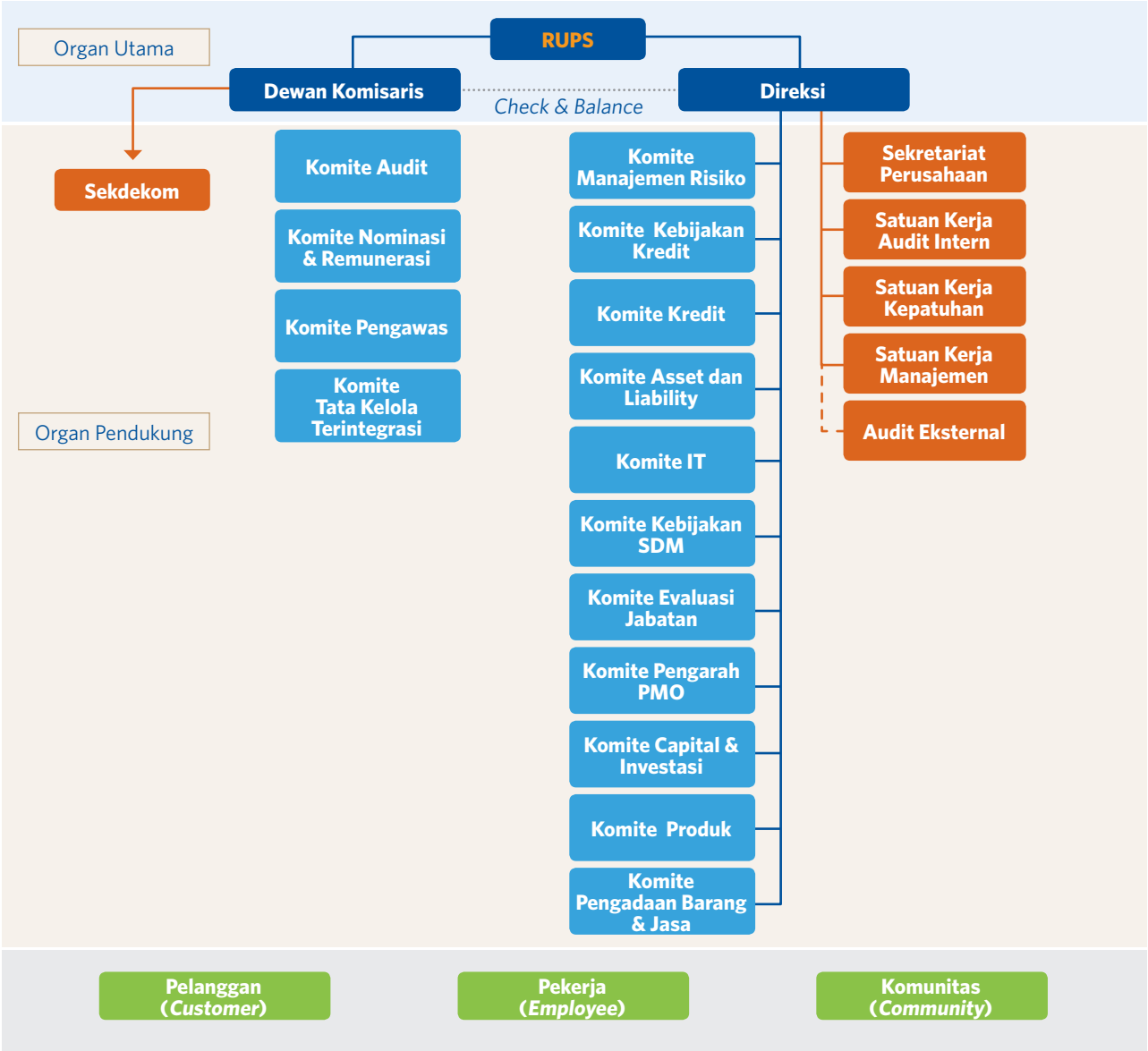

Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

RUPS

RUPS adalah organ tertinggi di struktur GCG. RUPS merupakan forum pemegang saham untuk pengambilan keputusan serta meminta pertanggungjawaban atas hal berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dengan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank oleh Direksi termasuk memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Bank termasuk mewakili Bank dengan pihak ketiga didalam maupun diluar pengadilan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Organ Pendukung Struktur Tata Kelola

Komite Dibawah Dewan Komisaris

a. Komite Audit
b. Komite Nominasi dan Remunerasi
c. Komite Pemantau Manajemen Risiko
d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Komite Dibawah Direksi

a. *Asset & Liabilities committee* (ALCO)
b. *Risk Management committee*.
c. Komite Kredit.
d. Komite capital & Investasi.
e. Komite Kebijakan Perkreditan.
f. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
g. Komite Kebijakan *Human Capital*.
h. Komite Evaluasi Jabatan.
i. *Project Management Office Steering Committee*
j. Komite Produk
k. Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Direksi tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Dewan Komisaris

Merupakan organ yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Perusahaan

Merupakan organ pendukung bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang berperan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing - masing terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta sebagai penghubung dan pengelola komunikasi baik antara perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal diantaranya pemegang saham, regulator serta pihak lain yang

Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

berkepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Perusahaan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM). Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Manajemen Risiko akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Kepatuhan

Merupakan Unit kerja independen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi kepatuhan di BRI. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Kepatuhan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Audit Intern

Audit Internal merupakan unit kerja yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern bertugas sebagai penyedia *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Audit Intern akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Audit Ekstern

Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh Eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa keuangan (BPK), pemeriksa lain sesuai regulasi dan kantor akuntan Publik. Bank wajib menunjuk akuntan Publik dan kantor akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Kebijakan dan Prosedur

Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris dan insan Perseroan, kebijakan internal Bank dievaluasi dan disempurnakan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (*policy owner*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.

Kebijakan Penyusunan Rencana Bank

Rencana Bank meliputi:

a. Rencana Jangka Panjang (RJP/*Corporate Plan*) yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan usaha atau st*rate*gi Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.
b. Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan rincian pelaksanaan st*rate*gi dan program kerja serta target-target kinerja Bank jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.
c. Rencana kerja anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan rincian target-target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

Kebijakan Usaha

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk *Standard Operating Procedure* yang mencakup surat edaran, surat keputusan, Buku Prosedur Operasional dan/atau Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan sejalan dengan kebijakan GCG. Asas GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen internal Bank. Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas usaha baru harus dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kebijakan Pengawasan

Pengawasan Bank diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) garis pertahanan/*Three Lines of Defense* yaitu:

a. *First Line of defense* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggungjawab menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. *Second Line of defense* merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
c. *Third Line of Defense* merupakan pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada *First Line* dan *Second Line of Defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari:
a. Kebijakan pengendalian internal, yang disusun dengan memperhatikan ruang lingkup:
   1) Lingkungan pengendalian, contoh: penerapan konsep *three line of defense*.
   2) Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh: *risk assessment* terhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank.
   3) Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan struktur bank, contoh: kebijakan pengawasan atasan langsung, *dual control* dan sebagainya.
   4) Sistem informasi dan komunikasi, contoh: informasi yang tersedia di dalam *Data Warehouse* (DWH).
   5) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian intern, contoh: kebijakan penerapan perangkat manajemen risiko.
b. Kebijakan pengawasan internal, antara lain meliputi kebijakan audit Intern, Strategi Anti *Fraud*, kajian hukum dan pengujian kepatuhan.
c. Kebijakan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Transparansi dan Pengungkapan

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam:
a. Panduan transparansi dan pengungkapan (*Transparency and Disclosure Guidelines*)
b. Kebijakan Rahasia Bank.
c. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.
d. Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

3. PROSES TATA KELOLA

Proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai perwujudan komitmen dan implementasi atas struktur tata kelola yang ada, guna mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Proses Tata kelola BRI di antaranya meliputi:
1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
   RUPST/RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS diumumkan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
   Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan atas dasar pertanggungjawaban, itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi.
   Pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi tersebut di implementasikan melalui penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
   Kegiatan usaha Bank dilakukan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan mengikuti strategi Bank dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Pengelolaan SDM Bank dilakukan dengan mengacu pada anggaran dasar dan rencana kerja bidang SDM, dengan berpedoman prinsip-

prinsip GCG, serta mendukung pencapaian tujuan usaha Bank.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
   Tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank harus menjadi bagian dari sasaran strategis Bank, dan dilaksanakan dengan didasari prinsip-prinsip GCG.
6. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT *Governance*)
   Bank memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap teknologi Informasi yang handal, efektif, efisien, akurat dan terpercaya. Untuk itu Bank terus memastikan TI dikembangkan dengan berpedoman pada prinsip GCG dan dapat memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, serta mendukung pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.
7. Pengelolaan Anak Perusahaan
   Pengembangan usaha anak Perusahaan dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama Bank. Dengan demikian pengelolaan anak Perusahaan harus berpegang pada pedoman dan praktik terbaik GCG, serta berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.
8. Sosialisasi Kebijakan Bank
   Seluruh kebijakan Bank wajib disosialisasikan/dikomunikasikan kepada seluruh karyawan sesuai bidang kerja/tugasnya dengan baik dan lengkap sebagai acuan atas pelaksanaan pekerjaan, serta kepada pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

4. HASIL TATA KELOLA

Hasil pelaksanaan GCG terwujud dalam bentuk:

1. Kesinambungan Usaha
   BRI menjaga keberlangsungan usaha melalui penerapan GCG *best practices* di seluruh elemen organisasi, dengan mengacu kepada prinsip GCG: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kewajaran dan Kesetaraan. Hasil GCG terlihat pada kinerja keuangan BRI yang semakin baik, diantaranya sebagai berikut :
   a. Pertumbuhan Kredit sebesar 14,1% (yoy).
   b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 12,2% (yoy).
   c. Pertumbuhan Asset sebesar 15,2% (yoy).
   d. Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan sebesar 11,6% (yoy).
2. Perlindungan Nasabah
   BRI senantiasa menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah sesuai prinsip GCG yang akan dibahas lebih rinci pada sub Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai *Good Corporate Citizen*.
   BRI tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan laba namun juga berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui program CSR. Program-program tersebut bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya terhadap segmen Usaha Mikro dan kecil (UMK). Selain itu, BRI juga mendukung program lingkungan yang salah satunya melalui komitmen *Green Banking* dalam operasional harian dan *Green Financing* dalam proses pemberian kredit.
4. Kemanfaatan Bank Bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional
   Selaras dengan tujuan visinya, yaitu *Integrated Banking Solution*, BRI berkomitmen memberikan pelayanan yang didukung kehandalan teknologi, jaringan yang luas serta peningkatan produk dan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

   Hal ini telah terbukti melalui keragaman produk, inovasi teknologi dan jaringan diantaranya dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau calon nasabah yang belum *bankable*, Pengoperasian Teras kapal untuk menjangkau daerah terluar dan kerjasama dengan agen BRILink untuk mendukung program *financial inclusion* dengan memperluas jangkauan akses layanan bank kepada masyarakat.

Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

MEKANISME PENERAPAN GCG

Dalam rangka memastikan tercapainya GCG *Excellent* di BRI, maka implementasi GCG pada Bank dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: perumusan, implementasi serta *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga mewujudkan GCG *Excellent*.

Hubungan Struktur, Mekanisme dan Hasil Tata Kelola

Tata kelola Perseroan diterapkan dalam suatu rangkaian terintegrasi yang meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu *structure, process*, dan *outcome*. Ketiga aspek tersebut dijalankan oleh Perseroan dalam upaya menjamin tersedianya struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, memaksimalkan efektivitas proses pelaksanaan tata kelola, dan mendorong terciptanya *outcome* tata kelola yang berkualitas untuk memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan.

Struktur Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

Structure	*Process*	*Outcome*
Struktur, komposisi, kriteria, jumlah dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kriteria ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta keberagaman Dewan Komisaris & Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian internal lebih optimal.	Kinerja positif perseroan diantaranya pencapaian laba meningkat, kinerja keuangan yang baik dan kuatnya struktur modal perusahaan.
Perseroan wajib memiliki komite dan satuan kerja dalam menjalankan fungsi pengendalian intern.	Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian intern, Dewan Komisaris membentuk 4 (empat) komite dalam pengawasan perusahaan. Direksi membentuk 3 (tiga) Satuan Kerja dalam pengendalian intern perusahaan.	Komite dibawah Dewan Komisaris diantaranya Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawas Manajemen Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Satuan Kerja dibawah Direksi diantaranya Satuan Kerja Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, Tugas dan tanggung jawab pada setiap fungsi organ perusahaan ditetapkan dalam bentuk Kebijakan, Pedoman, Tata Tertib, dan Prosedur.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerja didasarkan pada level jabatan/bidang tugas serta pemisahan fungsi jabatan (*segregation of duty*) dalam menjalankan fungsi pengendalian intern.	Terdapat Daftar Uraian Jabatan pada setiap level jabatan dalam struktur organisasi perusahaan.
Rencana strategi bisnis Bank sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.	Penyusunan rencana strategi bank dilakukan secara komprehensif dan terukur yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada *shareholders* dan seluruh jenjang organisasi.	Rencana strategis Bank menggambarkan keberlanjutan perusahaan dan kontribusi positif kepada *shareholders* dan *Stakeholders*.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Pengelolaan Teknologi Informasi (TI) bertujuan untuk menerapkan manajemen risiko sehubungan dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan digitalisasi dalam layanan bisnis perbankan

Tata kelola TI tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI No. S.874-DIR/PPT/10/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi BRI. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dan kontrol bagi seluruh Satuan Kerja Teknologi Informasi untuk melaksanakan penatakelolaan dan pengendalian risiko penggunaan IT di BRI.

Kebijakan tata kelola TI mencakup antara lain :

a. Peran dan Tanggung Jawab Manajemen dalam Pengelolaan Teknologi Informasi.
b. Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi.
c. Aktifitas Operasional Teknologi Informasi.
d. Penyediaan, Pengendalian Risiko dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
e. Pengamanan Teknologi Informasi.
f. Rencana Pemulihan Bencana.
g. Layanan Perbankan Elektronik.
h. Audit Internal Teknologi Informasi.
i. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi.
j. Penyediaan Jasa Teknologi Informasi.
k. Pelaporan Teknologi Informasi.

Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi terdiri atas kerangka kerja utama (*primary activities*) maupun kerangka kerja pendukung (*supporting activities*) dalam memberikan nilai tambah kepada *stakeholders*.

Penerapan Tata Kelola TI untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SF 1 Nurture Great Digital Talent | **SF 2** Drive Bimodal IT Governance | **SF 3** Build Future Ready ICT Platform | **SF 4** Leveraging Data Governance & Analytics | **SF 5** Deliver Innovative Digital Bank

Strategi Fungsional (SF)	Program Utama	Program Kerja
Nurture GreatDigital Talent	*ICT Certification & Digital Product Manager*	- International IT *Certifications(Talent Skill Enhancement)* - 10 Professional *Certification* (IT *Operation*) - 14 Professional *Certifications* (*Satellite & Telecommunication Network*) - 50 Product Manager (*Digital Center of Excellence*)
Drive Bimodal IT Governance	*Establish Business-ITGovernance &Alignment*	- *Policy and Guidance for Demand Management* - ITSP – ITEA 2018 – 2022 - *Upgrade and Enhancement Cardlink* - *New CMS and Supply Chain System* - *Upgrade* TI Plus - BRISTARS Mobile - BRILink Mobile - Tabungan Perumahan Rakyat - IT Operation ISO 9001:2015 - *Design Clinic, Bring-IT-on*
	Drive Agile & DevOps method	- *Application Development Life Cycle Management (ADLM Implementation* - *Dev Ops OperationalImplementation* - *Dev Ops* (Circleci, Github,Sonarcloud.io)

Tata Kelola Teknologi Informasi

Strategi Fungsional (SF)	Program Utama	Program Kerja
Build Future Ready Platform	*Perform Gap Analysis & NewCBS Development*	- *New* CBS UKLN *Implementation* - *New* CBS Gap *Analysis and Development*
	Implement Middleware Enhancement	- *Enterprise Service Bus Deployment*
	Excel Network & IT ServiceDelivery	- *Application Performance Mgmt* (APM) *Implementation* - *Core Application Enhancements*(Part of NSE Project) - *Independent Data Center* - *Tier 3 Implementation* - *Professional BuildingManagement* & Ops - Iaas & PaaS *Implementation* - BRIsat *Integration Phase*-2 - *integrated*-NMS (Pre-IOC) - *Core Network Reingeneering* - *Backup Satellite Planning* - BRI *Box implementation*
	Initiate Digital resilience & Fraud Detection system	- *Biometrics Authentication* - *Enterprise Security Architecture Implementation* - EMV *Debit Card* (Kartu Berchip) - *Fraud Detection*
Leverage Data Governance & Analytics	*Build Basic Data setup & Big Data Analytics*	- *Enterprise Data Warehouse (Architecture)* - *Master Data Management (Architecture)* - BRISIM *Mobile* - Iaas & PaaS *Implementation* - *Credit Scoring* - *Merchant Assessment &Analytics Use Cases*
Deliver Innovative Digital Bank	*Implement Digital Banking for MSME & Consumer*	- *International IT Certifications (Talent Skill Enhancement)* - *Development Support for DigitalBanking MSME & Consumer Applications* (BRISPOT & MyBRI) - New BRI Mobile - BRI *Digital Collaboration* - Hybrid BRIsat for BRIlink Agent - BRI *Digital Bank*
	Launch Digital Partnership thruOpen API	- *Development Support* for Open API - Open API (*Payment, Wallet*, CS) - *Corporate Venture Capital* - BRI *Incubator* - ID-Lab (Indonesia Mall)

Tata Kelola Teknologi Informasi

Evaluasi dan Penilaian GCG 2018

Dalam rangka menjaga pelaksanaan GCG agar selalu sesuai dengan standar terbaik yang sejalan dengan *Roadmap* GCG Perseroan serta sebagai pemenuhan atas komitmen GCG, maka BRI melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan GCG (GCG *Assessment*) secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mekanisme GCG di Bank.

Evaluasi dan Penilaian GCG Dari Pihak Internal, Regulator dan Pihak Eksternal

Evaluasi dan penilaian penerapan GCG dilaksanakan oleh BRI melalui 2 pendekatan yaitu penilaian oleh pihak ekternal dan pihak regulator yang *mandatory* sesuai POJK Tata Kelola bagi Bank Umum.

Evaluasi dilaksanakan secara periodic sesuai dengan ketentuan regulator (semesteran), selanjutnya evaluasi periode 1 (satu) tahun sekali oleh pihak eksternal yang independen. Penilaian dan evaluasi penerapan oleh Komite dibawah Dewan Komisaris secara berkala sesuai prinsip pengawasan yang berlaku.

Selain itu penilaian secara *self assessment* dengan penerapan prinsip GCG berdasarkan standar ACGS (ASEAN *Corporate Governance Scorecard*) juga dilakukan dan di *review* untuk senantiasa menuju kearah perbaikan berdasarkan international *best practice*.

Self Assessment GCG 2018

Berdasarkan POJK No:55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No:13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank harus melakukan Penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *Governance* yaitu:

1. *Governance Structure*
   Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders*.
2. *Governance Process*
   Penilaian bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehigga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders*.
3. *Governance Outcome*
   Penilaian bertujuan untuk menilai *outcome* yang memenuhi harapan *Stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) tersebut dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari 11 faktor penilaian tata kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Penilaian *Self Assessment* GCG dilakukan 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun. Adapun hasil penilaian GCG selama periode tahun 2018 dengan nilai komposit 2 (BAIK) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi
2018	PK-2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome* yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas atas perinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI.

Analisa	
Struktur Tata Kelola	Aspek struktur tata kelola (*Governance Structure)* di BRI telah dilaksanakan secara memadai dengan terbentuknya struktur organisasi terdiri dari organ utama dan organ pendukung perusahaan, ketersediaan rencana bisnis, kebijakan, dan prosedur dalam pelaksanaan GCG.
Proses Tata Kelola	Aspek proses tata kelola (*Governance Process*) telah dilaksanakan dengan baik, setiap organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan. BRI secara kontinyu dan konsistem melakukan *review* dan evaluasi dalam upaya peningkatan efektifitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan.
Hasil	Aspek hasil tata kelola (*Governance Outcome*) telah dilaksanakan dengan baik. Pengungkapan & transparansi informasi dilakukan secara memadai dan tidak adanya pelanggaran BPMK. Bank BRI secara kontinyu melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan sistem pelaporan BRI dalam rangka peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada *stakeholders*.

Self Assessment Tata Kelola Integrasi

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No:15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BRI sebagai entitas utama melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan 3 aspek yaitu struktur, proses dan hasil meliputi 7 indikator yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
6. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.

Hasil penilaian *self assessment* Tata Kelola Terintegrasi tahun 2018 adalah:
Berdasarkan hasil penilaian Tata Kelola BRI sebagai entitas utama tahun 2018 medapat Peringkat Komposit (2) atau dengan nilai **Baik** dengan rincian sebagai berikut:

Peringkat	Definisi
2	Konglomerasi Keuangan BRI dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Analisa *Stucture Governance*	
Kekuatan	**Kelemahan**
1. BRI telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Tata Kelola Integrasi Konglomerasi Keuangan BRI 2. Seluruh Direksi BRI memiliki pengetahuan bidang perbankan dan dan bisnis utama Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan (LJK KK) BRI 3. Seluruh Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. 4. Entitas Utama dan LJK KK saling menunjang dan sinergi dalam kegiatas bisnis. 5. BRI memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. 6. BRI memiliki kebijakan Prosedur dan Penetapan *Limit* Risiko	Prosedur pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi belum diatur terpisah.
Tindak Lanjut: Fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi sedang menyusun Piagam Audit Intern Terintegrasi dan Panduan Umum Audit bagi Grup BRI.	
Analisa *Governance Process*	
Kekuatan	**Kelemahan**
1. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada LJK KK BRI 2. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK KK BRI dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap laporan (audit, kepatuhan, profil risiko, dan *review* kebijakan manajemen risiko) terintegrasi. 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melakukan *review* dan evaluasi fungsi kepatuhan LJK KK BRI setiap triwulan. 5. Satuan Kerja Kepatuhan bersama LJK KK BRI melakukan IHT APU PPT, assistensi pelaporan FATCA-CRS, *resume* ketentuan eksternal dan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi. 6. SKAI Teritegrasi melaksanakan *joint audit* dengan SKAI LJK.	Pelaksanaan dan pelaporan manajemen risiko terintegrasi masih perlu dilakukan penyelerasan ketentuan setiap LJK khususnya LJK non Bank.
Tindak Lanjut: Bank BRI akan melakukan penyesuaian prosedur internal terkait penerapan manajemen risiko BRI dan LJK KK BRI.	

Tata Kelola Teknologi Informasi

Governance Outcome	
Kekuatan	**Kelemahan**
1. Direksi BRI memastikan temuan dan rekomendasi dari SKAI dan auditor eksternal telah ditindaklanjuti oleh LJK KK BRI 2. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi. 3. LJK KK berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Komite Tata Kelola Terintegrasi. 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan LJK KK BRI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 5. SKAI Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	Hasil penilaian profil risiko LJK KK BRI memperoleh nilai komposit 2
Tindak Lanjut: BRI dan LJK KK BRI akan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.	

Corporate Governance Performance Index (CGPI)

CGPI diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan.

Pelaksanaan CGPI pada tahun 2018 dengan tema "**Transformasi Model Bisnis dalam Kerangka GCG**" dilakukan penilaian terhadap 3 aspek yaitu:

1. *Governance Structure* meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
2. *Governance Process* meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
3. *Governance outcome* meliputi *output, outcome* dan *impact* dari proses implementasi GCG.

Hasil penilaian terhadap CGPI berdasarkan penilaian tahun 2018 mendapat skor 89,06 poin dengan peringkat **Sangat Terpercaya (*Most Trusted*)** dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Grafik Skor CGPI tahun 2013 - 2018

Tata Kelola Teknologi Informasi

ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

BRI juga telah senantiasa meningkatkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* sesuai kriteria ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang mengadopsi prinsip *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Penilaian penerapan GCG berdasarkan kriteria ACGS dilakukan oleh pihak independen yaitu RSM Indonesia dengan penilaian sebagai berikut:

1. Hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Hasil penilaian tingkat praktik GCG sesuai kriteria ACGS pada tahun 2018, BRI memperoleh peringkat "*Good*".

Penilaian Kinerja Direksi Melalui Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKU) BUMN

Penilaian Kinerja Direksi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dilakukan dengan metode Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai dengan surat Kementerian BUMN No.S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang terdiri dari 6 (enam) proses dan 1 (satu) kategori hasil yaitu:

1. Kepemimpinan.
2. Perencanaan Strategi.
3. Fokus Pelanggan.
4. Pengukuran Analisis dan Manajemen Pengetahuan.
5. Fokus Tenaga Kerja.
6. Fokus Operasi.
7. Hasil.

Hasil penilaian KPKU terhadap BRI selama 3 tahun terakhir yaitu:

Proses penilaian KPKU terhadap BRI untuk tahun 2018 masih berjalan di tahun 2019. Hasil penilaian KPKU BRI tahun 2018 akan dimuat pada situs perusahaan.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Infrastruktur *Corporate Governance*

BRI memiliki struktur tata kelola, diantaranya:

1. Anggaran Dasar BRI Nomor: 5 tanggal 3 Desember 2018 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0272183 tanggal 06 Desember 2018.
2. Arsitektur Kebijakan BRI disahkan pada tahun 2016.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kode Etik BRI.
4. Tata Tertib (*Board Manual)* Dewan Komisaris.
5. Tata Tertib (*Board Manual)* Direksi.
6. Piagam Komite Audit.
7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Piagam Komite Pengawas Manajemen Risiko.
9. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep: S.339-DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Keuangan.
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep: S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI.
13. Surat Keputusan Nokep: S.209-DIR/DML/09/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KEMAL-BRI).
14. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.08-DIR/KPT/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal Kebijakan *Whistleblowing System* BRI.
15. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep: S.11-DIR/DKP/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
16. Surat Edaran Direksi BRI No: S.05-DIR/MOP/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Strategi Anti *Fraud* BRI.
17. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.
18. Pedoman Penyusunan Bisnis Bank.
19. Surat Keputusan Nokep: S.296-DIR/CDS/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Kebijakan Umum Rencana Bisnis Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka, yang mengatur tentang 5 aspek, 8 prinsip dan 24 rekomendasi penerapan prinsip tata kelola.

Penerapan rekomendasi tersebut dalam GCG BRI adalah sebagai berikut :

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
A.	**Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.**			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	a. Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote)*. Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. b. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara *(voting)* tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	a. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BRI dilaksanakan menggunakan metode pemungutan suara satu hak suara (*one vote one share)*. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan dan Petugas mengumpulkan hak suara dengan menghampiri seluruh pemegang saham yang hadir. b. Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: 1. Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BRI yang diumumkan kepada pemegang saham melalui website perseroan. 2. Prosedur pengambilan suara (*voting*) melibatkan Pihak Independen yaitu Notaris, PT Datindo Entrycom, Kantor Akuntan Publik. Proses pengumpulan hak suara telah diatur dalam Anggaran Dasar BRI dan Tata Tertib RUPS yang dimuat pada *website* Perusahaan. **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	a. RUPST Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi yaitu 9 (sembilan) orang Dewan Komisaris dan 10 (sepuluh) orang Direksi. b. Tidak terdapat RUPS Luar Biasa pada tahun 2018 **Keterangan : Memenuhi**
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs *Web* Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs *Web* dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Risalah rapat dipublikasikan dalam *website* perseroan maksimal 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 26 Maret 2017 untuk RUPST Bank. Publikasi risalah rapat dimuat dalam harian Kontan dan Investor Daily, serta melalui *website* Perseroan yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun (www.bri.co.id). **Keterangan : Memenuhi**
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup st*rat*egi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini mencakup aktivitas hubungan investor diantaranya *analyst meeting, public expose* bertujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Bank BRI memiliki satu unit kerja khusus yaitu Divisi Investor Relation yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan investor. Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan ini dan juga diungkapkan melalui *Website* Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com). **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs *Web*.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah di upload dalam situs web perseroan yaitu www.bri.co.id dan www.ir-bri.com. **Keterangan : Memenuhi**
B	**Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**			
	Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI posisi 31 Desember 2018 adalah 9 (sembilan) orang yang terdiri 5 (lima) Komisaris Independen dan 4 (empat) Komisaris non Independen. **Keterangan : Memenuhi**
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris BRI. **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Charter* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) **Keterangan : Memenuhi**
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Manual* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta *website* Perseroan (www.bri.co.id) **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diungkapkan pada laporan tahunan BRI 2018 pada Bab Dewan Komisaris. **Keterangan : Memenuhi**
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan Suksesi Direksi disampaikan pada Bab Komite Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan BRI 2018 **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
C	**FUNGSI DAN PERAN DIREKSI**			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah melalui pertimbangan matang dan telah mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Direksi BRI tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) Direksi **Keterangan : Memenuhi**
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Penilaian kemampuan & kepatutan dilakukan untuk meyakini bahwa kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi telah sesuai dengan kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun kebutuhan Perseroan dan diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini. **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Sesuai POJK 06/2015 tentang Transparansi dan Publikasi laporan bank, Direktur yang membidangi/membawahi bidang akuntansi atau keuangan di jabat oleh Haru Koesmahargyo memiliki **keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, antara lain :** Pendidikan : 1. Meraih gelar MBA, *Investment Banking*, dari Emory University, Amerika Serikat (2000). 2. Sarjana Teknik Industri Pertanian, dari Universitas Brawijaya, Malang (1989). Pengalaman : 1. Kepala Divisi Treasury, 2. General Manager Kantor Cabang Luar Negeri BRI New York, 3. Presiden Komisaris BTMU-BRI Finance. Tambahkan pendidikan terkait bidang akuntansi **Keterangan : Memenuhi**
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Direksi berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Charter* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta website Perseroan (www.bri.co.id) **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian hasil Penilaian Kinerja Direksi pada laporan Tahunan BRI Tahun 2018. **Keterangan : Memenuhi**
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada *Board Charter*. Kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BRI. **Keterangan : Memenuhi**
D	**PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN**			
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading.*	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan BRI tentang *Insider Trading* diatur dalam: 1. Kode Etik BRI (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor 06-KOM/BRI/12/ 2013 dan Nomor S.65 DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013). 2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02 – KOM/ BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012)

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Pelaksanaan penerapan Strategi Anti *fraud* di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.25-DIR/DMR/12/2016 Tentang Strategi Anti *Fraud* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Strategi Anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut: 1. Pencegahan. 2. Deteksi. 3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi. 4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Perusahaan juga memiliki kebijakan terkait praktik korupsi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep:S.11-DIR/DKP/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen BRI bersama KPK dalam pencegahan korupsi. **Keterangan : Memenuhi**
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau *vendor* dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau *vendor*, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau *vendor*.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.35-DIR/MAT/12/2015 perihal Pendaftaran Rekanan Penyedia Barang dan Jasa PT. Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. BRI memiliki mengembangkan aplikasi manajemen vendor yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE yang mencakup proses pendaftaran dan seleksi Calon rekanan, monitoring, pemeliharaan rekanan (*Vendor Maintenance*) sampai dengan evaluasi performance rekanan sehingga BRI mempunyai database dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI. **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur . Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur. **Keterangan : Memenuhi**
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *Whistleblowing System*	Kebijakan sistem *Whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *Whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *Whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Kebijakan mengenai *Whistleblowing System* di BRI yang diatur Surat Edaran Direksi Nomor.S.08-DIR/KPT/05/2018. Kebijakan *Whistleblowing System* BRI mengatur tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan, sarana pelaporan, perlindungan & kerahasiaan pelapor, unit pengelola *Whistleblowing System*. Pembahasan terkait. **Keterangan : Memenuhi**
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Insentif jangka panjang pekerja terdapat dalam Bagian Kesejahteraan Pekerja dalam Laporan Tahunan BRI Tahun 2018. **Keterangan : Memenuhi**

Penerapan Tata Kelola Perusahan Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
E	**KETERBUKAAN INFORMASI**			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs *Web* diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada Stakeholders melalui media teknologi informasi, selain *website* Perseroan. *Omni Channel* BRI adalah sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yang tersedia yaitu: 1. Tatap muka melalui *Customer Service* di seluruh Unit kerja operasional BRI 2. Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400 / *Premium call* melalui 021-5758899 dan 08001017017 3. SMS 0812 12 14017 Web chat melalui website www.bri.co.id Email callbri@bri.co.id Telegram 0812 12 14017 *Internet Banking* di https://ib.bri.co.id *4. Twitter* di @kontak_bri 5. F*acebook* di Bank BRI Official **Keterangan : Memenuhi**
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2018 menyampaikan kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. **Keterangan : Memenuhi**

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guidelines of Corporate Goverance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya Perusahaan.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Nota Dinas Sekdekom Nomor: B.41-Sekdekom/05/2015 tentang Panduan Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*) diantaranya Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Nota Dinas Sekdekom Nomor: B.41-Sekdekom/05/2015 tentang Panduan Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*) diantaranya Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: a. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS b. Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pengawas Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantarnaya memberikan arahan dan pengawasan kepada Direksi dalam kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerja perseroan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 5 Struktur *Governance* Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris BRI memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan. Hal ini terlihat dalam keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan pelaksanaan *Fit and Proper Test*. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan perbankan terkini dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan baik di dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Guidelines of Corporate Goverance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank BRI memiliki fungsi Manajemen Risiko yang berfungsi diantaranya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko Perusahaan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Divisi yaitu Divisi *Enterprise Risk and Portofolio Management* dan Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Pasar. Dalam upaya fungsi pengawasan, Direksi mengkomunikasikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pengawas Manajemen Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian profil risiko Bank dilakukan dan disampaikan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris setiap triwulan.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, monitor dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dilakukan oleh Komite Pengawas Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Review* dan evaluasi fungsi kepatuhan dilakukan setiap semesteran.
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi BRI berada langsung dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Struktur remunerasi Bank BRI mengacu terhadap Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Penerapan Tata Kelola Remunerasi Bank BRI disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI 2018 pada Bab Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, *Depositor*, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Pengungkapan dan transparansi Bank BRI kepada Pemegang saham disampaikan melalui *website* perusahaan www.bri.co.id terhadap informasi terkini. Keterbukaan informasi Bank BRI juga disampaikan pada Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan *Public Expose*.

Rencana Peningkatan GCG 2019

Rencana peningkatan GCG BRI pada tahun 2019:
1. *Review* pedoman GCG dan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Implementasi aplikasi *Whistleblowing System*
3. Peningkatan *awareness* budaya anti korupsi.
4. Internalisasi budaya kepatuhan ke seluruh pekerja.
5. Penerapan standar dan kualitas ISO 9001:2015

Monitoring implementasi GCG

Monitoring implementasi GCG Bank BRI dilakukan oleh beberapa organ perusahaan diantaranya:

1. Fungsi Kepatuhan
   Memiliki fungsi untuk membantu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Satuan Kerja Audit Intern
   SKAI memiliki fungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

3. Komite Audit
   Komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi
   Komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum Pemegang saham (RUPS) sebagai salah satu organ utama Bank memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BRI. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menggunakan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan *strategis* perusahaan dengan mengacu pada batasan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BRI.

Dasar Hukum RUPS

Pelaksanaan RUPS BRI mengacu dan telah sesuai pada ketentuan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Bursa efek Indonesia No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang kewajiban Penyampaian Informasi.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi**.**

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 56,75%, saham Seri A Dwiwarna.

Hak Pemegang Saham

Saham BRI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu

1. Saham Seri A Dwiwarna
   Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.
2. Saham Seri B.
   Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan permodalan.
   c. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   f. Persetujuan pemindahtanganan asset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain.
   h. Persetujuan penggunaan laba.
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta akses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.

Diluar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar yaitu:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun mealui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

Rapat Umum Pemegang Saham

2. Menerima informasi terkait BRI yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.
3. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan BRI dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
4. Menerima pembagian sisa hasil likudasi Bank dalam hal terjadinya kepailitan.
5. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
6. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.
7. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
8. Meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan /aksi korporasi yang merugikan pemegang saham atau Perseroan.
9. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS sepanjang berkaitan dengan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Seluruh Pemegang Saham harus dapat:
   a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
2. Pemegang Saham Pengendali harus dapat:
   a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
   b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
   c. Mengupayakan akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan, dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan.
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan hubungan dengan pemegang saham

Hubungan dengan Pemegang saham diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dalam bagian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Segala komunikasi dengan para Pemegang Saham merupakan tanggung jawab juru bicara perusahaan. Semua Semegang Saham harus mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama (*equitable treatment*) secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.08-DIR/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk.

Perlakuan yang Sama terhadap Seluruh Pemegang Saham

BRI menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham yang tercermin dari:

a. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.
b. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal Investor Relations antara lain melalui interaksi langsung pada acara *Public Expose, Non-deal Roadshow, Press Conference,* atau *1-on-1 Meeting, Conference Call*, dan Email, serta Dokumen

yang tersedia pada *website* Perusahaan, *Investor Relations*, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audited, dan *Highlights* Kinerja Keuangan Perusahaan.

c. Jumlah komisaris independen di atas batas minimum Bank Indonesia, yaitu 5 orang Komisaris dari total 8 orang Komisaris.

d. Pemegang saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank, diantaranya informasi kinerja perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS.

PENYELENGGARAAN RUPS 2018

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahun 2018 sudah memenuhi ketentuan POJK. 32/POJK.04/2014 sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan
Pemberitahuan kepada OJK	Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS	Pengumuman RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 21 hari sebelum RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Pengumuman RIngkasan Risalah RUPS	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RUPS, dipublikasikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Penyampaian Risalah RUPS	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.

Prosedur Korum

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
1	Pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2	Persetujuan Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham

Prosedur Korum

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
3	Perubahan terkait Direksi, Dewan Komisaris, Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari $^{1}/_{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari $^{3}/_{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4	Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran Perseroan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari $^{3}/_{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
6	Di luar dari Mata Acara 1 s.d 5 tersebut di atas *Outside of Agenda 1 to 5 above*	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $^{1}/_{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.	Disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $^{1}/_{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Tata Tertib RUPS

Tata tertib dalam pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Tata tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Kesempatan diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan/ tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara RUPS.
3. Pimpinan RUPS atau Direktur yang ditunjuk Pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi pertanyaan/ tanggapan dari pemegang saham.
4. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan/ tanggapan selesai dijawab. Suara hanya dapat disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
5. Penghitungan dan/atau validasi suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak Independen yaitu Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

BRI telah menyediakan akses terhadap Informasi untuk memungkinkan pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya:

1. RUPS, sebagai media di mana Perusahaan dapat berkomunikasi dengan Pemegang Saham, menyampaikan Informasi mengenai Perseroan dan memungkinkan Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
2. Media elektronik seperti Situs web (*website*) Bursa Efek dan Situs web (*website*) Perseroan yang dapat diakses dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dimana tersedia berbagai dokumen, laporan dan publikasi yang dapat dengan mudah diunduh baik oleh Pemegang Saham maupun publik.
3. Email dan Kontak telepon resmi Perseroan untuk menyampaikan dan mengetahui Informasi terkini Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham

4. Media komunikasi lain agar Pemegang Saham dapat terus memperoleh informasi terkini diantaranya *conference call, Investor/Analyst meeting, non-deal roadshow, conference, public expose* dan *Investor/ Analyst gathering*.

Upaya mengajak pemegang saham hadir dalam RUPS

BRI berupaya agar seluruh Pemegang Saham hadir dan menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang disebarkan secara tepat waktu melalui *website* Perusahaan, Bursa Efek serta Koran Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
2. Memaparkan materi dari setiap mata acara rapat sebagai referensi Pemegang Saham.
3. Membuka akses bagi Pemegang Saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan terkait penyelenggaraan RUPS melalui kontak yang tersedia di *website* Perusahaan.

Ketentuan pemungutan suara RUPS

1. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Tata cara pemungutan suara dalam RUPS yaitu:
   a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
   b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan mata acara yang sedang dibicarakan.
   c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
   d. Pimpinan RUPS akan mengumumkan hasil pemungutan suara.
3. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.
4. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan RUPS, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.

Pemungutan Suara RUPS Melibatkan Pihak Independen

Dalam penyelenggaraan RUPS, BRI tidak hanya mengundang para Pemegang Saham namun juga selalu melibatkan pihak Independen terutama dalam pemungutan dan perhitungan suara, yaitu:

1. Notaris

Notaris bertugas membuat risalah/berita acara RUPS BRI. Dalam setiap kegiatan RUPS, Notaris secara langsung menyaksikan dan mendengar proses berjalannya RUPS serta memberikan pendapat/ saran/koreksi yang diperlukan sehubungan dengan RUPS.

2. Biro Administrasi Efek (pihak independent)

Biro Administrasi Efek Perseroan adalah pihak independen yang bertugas untuk melaksanakan pencatatan pemilik efek, dan secara berkala memberikan pengkinian laporan kepada perusahaan. Dalam proses penyelenggaraan RUPS, tugas Biro Administrasi Efek antara lain:

a. Menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) bagi karyawan dan pemegang saham yang sahamnya dalam *omnibus account* serta mendistribusikan KTUR tersebut ke alamat yang bersangkutan.
b. Melakukan registrasi dan validasi Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.
c. Melakukan perhitungan suara baik kuorum maupun pengambilan keputusan pada setiap mata acara dengan sistem elektronik.
d. Menyediakan materi cetakan sehubungan dengan administrasi pemungutan suara.

Rapat Umum Pemegang Saham

Selain Notaris dan Biro Administrasi Efek, RUPS juga dihadiri oleh pihak independen lain sesuai dengan mata acara yang diselenggarakan dalam RUPS diantaranya:

1. Kantor Akuntan Publik
   Kantor Akuntan Publik bertindak sebagai pihak independen yang melakukan audit atas penyajian laporan keuangan BRI secara wajar dan menyampaikan masukan serta saran- saran perbaikan kepada Manajemen.
2. Konsultan Jasa Penilai Independen dan Konsultan Hukum
   Konsultan Jasa Penilai Independen dan Konsultan Hukum adalah pihak independen yang selalu terlibat dalam hal terdapat aksi korporasi seperti penerbitan efek bersifat hutang, *merger*, akuisisi, pengambilalihan, dan lainnya. Konsultan Jasa Penilai Independen bertugas memastikan kewajaran nilai transaksi sedangkan Konsultan Hukum memastikan transaksi yang akan dilakukan telah sesuai dengan proses dan prosedur berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2018

Pelaksanaan RUPST 2018 telah memenuhi POJK No. 32/POJK.04/2014.

Tahapan RUPST

Tanggal	Aktivitas	Keterangan
22.01.2018	Pemberitahuan RUPST kepada OJK	Pemberitahuan RUPST kepada OJK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS. (Comply)
13.02.2018	Pengumuman RUPST	Pengumuman RUPST 14 hari sebelum pemanggilan RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Investor Daily, Kontan dan Tempo) www.idx.co.id dan www.bri.co.id (Comply).
28.02.2018	Pemanggilan RUPST	Pemanggilan RUPST 21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Investor Daily, Kontan dan Tempo) www.idx.co.id dan www.bri.co.id (Comply).
22.03.2018	RUPST	RUPST 2018 diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2018 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210.
26.03.2018	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPST	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPST dan telah dimuat melalui media cetak (Bisnis Indonesia,Kontan, Tempo, Investor Daily) www.idx.co.id dan www.bri.co.id (*Comply*).
29.03.2018	Penyampaian Risalah Rapat	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPST. (*Comply*).

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
Mata Acara Kedua	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
Mata Acara Ketiga	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Keempat	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham

Mata Acara Kelima	Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
Mata Acara Keenam	Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
Mata Acara Ketujuh	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Mata Acara Kedelapan	Perubahan Pengurus Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan total jumlah 106.940.941.244 saham setara dengan 87.48% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	
Dewan Komisaris*	1. Andrinof A. Chaniago 2. Gatot Trihargo 3. A.Sonny Keraf 4. Mahmud 5. Rofikoh Rokhim 6. A. Fuad Rahmany 7. Vincentius Sonny Loho 8. Jeffry J. Wurangian 9. Nicolaus Teguh Budi H	1. Komisaris Utama/ Komisaris Independen 2. Wakil Komisaris Utama/ Komisaris 3. Komisaris Independen 4. Komisaris Independen 5. Komisaris Independen 6. Komisaris Independen 7. Komisaris 8. Komisaris 9. Komisaris
Direksi*	1. Suprajarto 2. Haru Koesmahargyo 3. Indra Utoyo 4. Susy Liestiowaty 5. Sis Apik Wijayanto 6. Handayani 7. R. Sophia Alizsa 8. Mohammad Irfan 9. Priyastomo 10. Kuswiyoto	1. Direktur Utama 2. Direktur 3. Direktur 4. Direktur 5. Direktur 6. Direktur 7. Direktur 8. Direktur 9. Direktur 10. Direktur

*) RUPS dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI

Kesempatan mengajukan pernyataan/ pendapat

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Dalam RUPST jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Pertama	5 (lima) Pemegang Saham/perwakilan pemegang saham
Mata Acara Kedua	2 (dua) Pemegang Saham/perwakilan pemegang saham
Mata Acara Ketiga	Tidak Ada

Rapat Umum Pemegang Saham

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Keempat	Tidak Ada
Mata Acara Kelima	Tidak Ada
Mata Acara Keenam	Tidak Ada
Mata Acara Ketujuh	Tidak Ada
Mata Acara Kedelapan	Tidak Ada

Akta No.50 tanggal 22 Maret 2018

Berita Acara RUPST

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
Kesatu	1	Kristoforus Antonius	2,400	Berapa target laba dan NPL untuk tahun 2018	Terkait dengan target 2018, pertumbuhannya ditargetkan antara 9% sampai 11%. Kemudian untuk NPL antara 2% sampai 2.2%.
Kesatu	2	Untara Hadi	1,700	Mohon dibuatkan lembar evaluasi RUPST dan RUPSLB serta Laporan bagi investor yang berisi antara lain: 1. Ketepatan Waktu 2. Ketepatan Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 3. Pembahasan masalah 4. Pengungkapan materi/ penjelasan dan sejenisnya 5. Makanan/minuman 6. dan lain-lain Guna meningkatkan mutu RUPST dan RUPSLB yang bersangkutan	Akan dicoba untuk penuhi dan ini memang hal yang positif sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Kesatu	3	Ratoelam P. Sianturi	4,500	Saran agar saat memperkenalkan Komisaris dan Direksi tidak perlu tepuk tangan karena mereka adalah pemegang amanah bukan selebritis/	Belum bisa komentar

Rapat Umum Pemegang Saham

Akta No.50 tanggal 22 Maret 2018

Berita Acara RUPST

Mata Acara	Nomor	Nama Penanya	Jumlah Saham Kepemilikan (lembar)	Pertanyaan	Jawaban
Kesatu	4	Laurensia Irianti, selaku kuasa dari Rahadi Santoso	12,849,600	Penjelasan dengan Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Neto (CKPN) yang dijelaskan pada halaman 789 sebesar Rp 16,994 T. Mohon laporan keuangan diminimalisasi untuk efisiensi dan kenyamanan.	Saran untuk Laporan Keuangan agar diminimalisasi akan dipertimbangkan.
Kesatu	5			Mengenai penjelasan pada annual report, apakah benar terdapat penghapusan pinjaman?	Dijelaskan pada halaman 218
Kedua	1	Laurensia Irianti, selaku kuasa dari Rahadi Santoso	12,849,600	Mohon pada setiap penyampaian dividen, disampaikan nominal deviden tahun 2017 untuk per lembar saham. Berapa Rupiah peningkatan dividen dibandingkan dengan dividen tahun 2016?	Nominal per lembar saham sebesar Rp 106,74 atau naik sebesar 24.5% dibandingkan tahun sebelumnya
Kedua	2	Ibnu K. Hajar	300	Kondisi ekonomi cukup stabil, apakah tidak berlebihan laba ditahan 55%?	Laba ditahan 55% sudah melalui kajian yang panjang dan berkomunikasi dengan Pemegang Saham Seri A. Adapun kedepannya diharapkan laba dapat tumbuh lebih baik lagi.
Kedua	3			Siapa wakil Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang hadir?	Pemegang Sahan A Dwiwarna yang hadir mewakili adalah Bapak Hamra

Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme elektronik dan dilakukan oleh pihak independent (Biro Administrasi Efek)

Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama	
Keputusan	1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan No. RPC-5581/PSS/2018 tanggal 24 Januari 2018. b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporan No. RPC-5812/PSS/2018 tanggal 19 Februari 2018. c. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II dan Tahap III tahun 2017 dengan jumlah emisi sebesar Rp10.250.000.000.000 (Sepuluh Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah).
	2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 106.230.183.454 Saham (99,34%) Tidak Setuju: 217.563.900 Saham (0,20%) Abstain: 493.193.890 Saham (0,46%)
Status	Telah diselesaikan

Rapat Umum Pemegang Saham

Mata Acara Kedua		
Keputusan	1.	Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2017 sebesar Rp 28.996.534.838.032,20 (dua puluh delapan triliun – sembilan ratus sembilan puluh enam miliar – lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh dua koma dua puluh rupiah) yakni: dividen sebesar 30% atau Rp 8.698.960.451.409,66 (delapan triliun – enam ratus sembilan puluh delapan miliar – sembilan ratus enam puluh juta – empat ratus lima puluh satu ribu – empat ratus sembilan – koma enam enam rupiah) dan ditambah dividen spesial sebesar 15% atau Rp 4.349.480.225.704,83 (empat triliun – tiga ratus empat puluh sembilan miliar – empat ratus delapan puluh juta – dua ratus dua puluh lima ribu – tujuh ratus empat – koma delapan tiga rupiah) sehingga total dividen sebesar 45% atau Rp 13.048.440.677.114,50 (tiga belas triliun – empat puluh delapan miliar – empat ratus empat puluh juta – enam ratus tujuh puluh tujuh ribu – seratus empat belas – koma lima nol rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 57,27% saham sebesar Rp 7.472.280.892.834,35 (tujuh triliun – empat ratus tujuh puluh dua miliar – dua ratus delapan puluh juta – delapan ratus sembilan puluh dua ribu – delapan ratus tiga puluh empat – koma tiga lima rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	2.	Sebesar 55% atau Rp 15.948.094.160.917,70 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju : 106.304.978.704 Saham (99,40%) Tidak Setuju/ : 404.735.950 Saham (0,38%) Abstain: 231.226.590 Saham (0,22%)	
Status	Telah diselesaikan	
Mata Acara Ketiga		
Keputusan	1.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2018.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 96.930.724.839 Saham (90,64%) Tidak Setuju: 6.853.266.820 Saham (6,41%) Abstain: 3.156.949.724.839 Saham (2,95%)	
Status	Telah diselesaikan	
Mata Acara Keempat		
Keputusan	1.	Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2018 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham

	3.	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 100.276.501.351 Saham (93,77%) Tidak Setuju: 5.791.191.753 Saham (5,41%) Abstain: 873.248.140 Saham (0,82 %)	
Status	Telah diselesaikan	
Mata Acara Kelima		
Keputusan Resolution	1.	Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2017. *Approve the Recovery Plan of the Company in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.03/2017.*
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 106.688.803.104 Saham (99,76%) Tidak Setuju: 6.871.750 Saham (0,01%) Abstain: 245.266.390 Saham (0,23%)	
Status	Telah diselesaikan	
Mata Acara Keenam		
Keputusan	1.	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perubahan-perubahannya.
	2.	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/07/2017 dan perubahan-perubahannya.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 106.256.701.464 Saham (99,36%) Tidak Setuju: 573.689.190 Saham (0,54%) Abstain: 110.550.590 Saham (0,10 %)	
Status	Telah diselesaikan	

Rapat Umum Pemegang Saham

Mata Acara Ketujuh

Keputusan Resolution

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju: 74.012.920.084 Saham (69,21%)
Tidak Setuju : 29.783.954.515 Saham (27,85%)
Abstain: 3.144.066.645 Saham (2,94%)

Status

Telah diselesaikan

Mata Acara Kedelapan

Keputusan Resolution

1. Mengukuhkan pemberhentikan dengan hormat Sdr. Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Manajemen Risiko, terhitung sejak 21 Maret 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Susy Liestiowaty sebagai Direktur Kepatuhan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
3. Merubah Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	Direktur *Corporate Banking*
-	Direktur *Retail* dan Menengah
Direktur Kredit Mikro dan Ritel	Direktur Mikro dan Kecil
Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	Direktur Keuangan
Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
-	Direktur Kepatuhan

4. Mengalihkan Penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

Nama	Semula	Menjadi
Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	Direktur *Corporate Banking*
Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel	Direktur Mikro dan Kecil
Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	Direktur Keuangan
Indra Utoyo	Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	Direktur Manajemen Risiko

Dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

Rapat Umum Pemegang Saham

5.	Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: 1) Sdr. Supari sebagai Direktur *Retail* dan Menengah 2) Sdr. Osbal Saragi Rumahorbo sebagai Direktur Jaringan dan Layanan 3) Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan
6.	Memberhentikan dengan hormat Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
7.	Mengangkat Sdr. Hadiyanto sebagai Komisaris Perseroan.
8.	Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9.	Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,4 dan 5 serta pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: a) Direksi

Nama	Jabatan
Suprajarto	Direktur Utama/ President Director
Kuswiyoto	Direktur *Corporate Banking*
Supari	Direktur *Retail* dan Menengah
Priyastomo	Direktur Mikro dan Kecil
Handayani	Direktur Konsumer
Osbal Saragi Rumahorbo	Direktur Jaringan dan Layanan
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan
R. Sophia Alizsa	Direktur *Human Capital*
Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan

Rapat Umum Pemegang Saham

b) Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Nama	Jabatan
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
Mahmud	Komisaris Independen
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
Jeffry J. Wurangian	Komisaris
Hadiyanto	Komisaris

10. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara kedelapan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) terhadap calon-calon Direksi dan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju : 74.491.243.732 Saham (69,66%) Tidak Setuju: 29.225.011.168 Saham (27,33%) Abstain: 3.224.686.344 Saham (3,01%)
Status	Telah diselesaikan

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2018

Pada tahun 2018 BRI tidak melaksanakan RUPS Luar Biasa.

Realisasi RUPS

RUPS Tahun sebelumnya (RUPST 2016)

Terdapat 1 (satu) dari 6 (enam) mata acara pada RUPST tahun 2016 yaitu: Mata Acara kelima
Penyaluran periode pertama akan diberikan pada triwulan kedua tahun 2019

RUPS Tahun Buku 2017

RUPS Tahunan 2017

Seluruh keputusan RUPS Tahunan 2017 telah direalisasikan seluruhnya (100%) sehingga tidak ada lagi putusan pada RUPS Tahunan 2017 yang perlu direalisasikan lebih lanjut.

RUPS Luar Biasa Tahun 2017

Seluruh keputusan RUPS Luar Biasa 2017 telah direalisasikan seluruhnya (100%) sehingga tidak ada lagi putusan pada RUPS Luar Biasa 2017 yang perlu direalisasikan lebih lanjut.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang dewan komisaris Badan usaha Milik negara.
c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik negara.
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 / POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39 / SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon Anggota Direksi, dan calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/ POJK.03/2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
h. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan & Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.03/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Umum.

Kriteria, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Kriteria

Kriteria Dewan Komisaris BRI disusun berdasarkan POJK nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No.27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta ketentuan internal Dewan Komsiaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit.
   b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
   b. Jabatan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
   b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Dewan Komisaris

5. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila:
   a. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya.
   b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Selain itu secara khusus seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Pemenuhan PBI No. 12/23/2010 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan dimana Dewan Komisaris wajib mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK (dahulu Bank Indonesia) yang mencakup persyaratan integritas kompetensi, dan reputasi keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank sebagai berikut :
   a. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya.
   b. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.
   c. Memiliki Kemampuan untuk melakukan pengelolaan *strategis* dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Secara internal, seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Pernyataan Integritas yang didokumentasikan oleh BRI.

Sistem Prosedur Nominasi

Sistem dan Prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
1. Komite Nominasi dan Remunerasi menjaring Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
2. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, antara lain melalui penelurusan rekam jejak /daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
4. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris.
5. Hasil pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Nota Dinas kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut sekaligus merupakan dokumen rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
6. Calon anggota Dewan Komisaris yang terpilih diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai ketentuan Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Calon Pihak Utama (Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dalam rangka memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Dewan Komisaris yang meliputi persyaratan: integritas, reputasi keuangan dan kompetensi serta kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Dewan Komisaris

Prosedur Pengangkatan

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang diangkat belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK.

Untuk memperoleh persetujuan atas anggota Dewan Komisarisnya, Perseroan mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK meliputi penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka Perseroan melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

Bagi calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Prosedur Pemberhentian

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Meninggal dunia
b. Masa jabatannya berakhir
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS
d. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri)

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat pula diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Pengunduran Diri Dewan Komisaris Atas Tindakan Kejahatan Keuangan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Calon Pihak Utama (Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dewan Komisaris Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.

Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Komisaris	Jabatan	Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK	Pelaksana Fit And Proper Test	Hasil
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/Independen	19 Juli 2017	OJK	Lulus
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	10 Juni 2015	OJK	Lulus
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	26 Mei 2017	OJK	Lulus
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	10 Juni 2015	OJK	Lulus
5	Mahmud	Komisaris Independen	28 Februari 2017	OJK	Lulus
6	Rofikoh Rokhim*	Komisaris Independen	31 Januari 2018	OJK	Lulus
7	Hadiyanto**	Komisaris	21 September 2018	OJK	Lulus
8	Vincentius Sonny Loho***	Komisaris	05 September 2012	OJK	Lulus
9	Jeffry J. Wurangian****	Komisaris	19 Juli 2017	OJK	Lulus
10	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017	OJK	Lulus

*) Dinyatakan Lulus *Fit & Proper Test* OJK tahun 2018 berdasarkan Surat OJK No.:SR-18/PB.12/2018 tanggal 31 Januari 2018
**) Dinyatakan Lulus *Fit & Proper Test* OJK tahun 2018 berdasarkan berdasarkan Surat OJK No.:SR-194/PB.12/2018 tanggal 21 September 2018
***) Efektif menjabat sampai dengan 22 Maret 2018
****) Efektif menjabat sampai dengan 20 September 2018

TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman berupa Tata Tertib Dewan Komisaris yang telah diperbaharui dan disahkan melalui SK Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 dengan rincian sebagai berikut :

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris secara kolegial melakukan pengawasan terhadap fungsi pengelolaan Perseroan. Peran Dewan Komisaris mencakup aktivitas memberikan nasehat dan arahan kepada Direksi atas penerapan kebijakan-kebijakan Perseroan dalam melaksanakan aktivitas usaha sesuai st*rate*gi dan tujuan BRI.

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

a. Memimpin pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
b. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
c. Mengkoordinasikan dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaan program Kerja Dewan Komisaris.
d. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
7. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
9. Memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dewan Komisaris

Kewajiban

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari :
   a. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP);
   b. Rencana Bisnis Bank (RBB);
   c. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), dan
   d. Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi sesuai peraturan perundangan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Memberitahukan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya :
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan; yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada regulator.
5. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
8. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
9. Menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi.
10. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
11. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
14. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
15. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
16. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
17. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi;
18. Melakukan Pengawasan Aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
    a. mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
    b. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
19. Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:
    1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    3) Mengevaluasi dan mengambil keputusan atas permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
20. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan serta memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan;

21. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU & PPT;
22. Mengarahkan tumbuhnya budaya dan kepedulian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank;
23. Memantau Tingkat Kesehatan Bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha;
24. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Perseroan terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
25. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
26. Menyampaikan laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh Pengurus; menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya; dan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
28. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Perseroan setiap triwulan kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna;
29. Memastikan bahwa komite - komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif; dan
30. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ruang Lingkup BOC

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya yang meliputi:

1. Pengawasan pasif, yaitu melalui telaah atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Manajemen, surat-surat yang diterima dari OJK, Bank Indonesia dan lembaga lain serta informasi lain yang diperoleh dari pihak ketiga lainnya.
2. Pengawasan aktif, yaitu melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Komite Komisaris bersama Direktur dan pejabat terkait, rapat dengan auditor eksternal dan pihak ketiga lainnya, serta melalui kunjungan kerja ke Unit Kerja.

Strategi dan Kebijakan	Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Tata Kelola Perusahaan	Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: a. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS. b. Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS. c. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.

Dewan Komisaris

Manajeman risiko	Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko dengan menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
Kepatuhan	Memberitahukan kepada regulator mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada regulator serta melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Larangan Dewan Komisaris

Sesuai dengan *Board Charter* yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku
2. Memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta;
   b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legistatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundangundangan;
3. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
4. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris;
5. Terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Memberikan atau menawarkan kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Melibatkan diri pada penjualan atau pembelian atas efek dimana yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam (*insider trading*).

Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan berupa adanya status terpidana dari pihak yang berwenang maka anggota Dewan Komisaris dimaksud wajib mengundurkan diri. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Masa Jabatan

Masa jabatan Komisaris satu periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama satu periode dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan Dewan Komisaris melalui keputusan RUPS.

Etika

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Apabila terdapat suatu benturan kepentingan, maka setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut; dan
4. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi kode etik Perseroan.

Waktu Kerja

Waktu kerja DewanKomisaris adalah saat namun tidak terbatas pada Rapat Dewan Komisaris dan waktu kunjungan kerja Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membuat rencana kerja setiap awal tahun dan melakukan penilaian sendiri (*self Assessment*) berdasarkan pencapaian kerja Dewan Komisaris dan *Key performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian sendiri, Dewan Komisaris juga melakukan *Review* atas pelaksanaan tugas komite-komite dan sekretariat di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan hasil *review* serta *self assessment* kinerja Dewan Komisaris dan Komite di dinyatakan bahwa seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018 dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Kriteria Penilaian

Indikator atau kriteria kinerja Dewan Komisaris diukur dari pencapaian atas program kerja/ rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun. Adapun program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi perspektif *Learning& Growth, Internal process, compliance* dan *financial*.

Dewan Komisaris

Dalam tahun 2018, Dewan Komisaris telah menetapkan aspek-aspek yang menjadi Indikator kinerja utama, sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian		Indikator	Parameter	Bobot (%)
1	***Learning & Growth Perpective***	Organisasi Dewan Komisaris	a	Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
			b	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi organ dibawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi	2,00
			b	Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh Anggota Komisaris dinyatakan lulus *fit and proper test* OJK dan memenuhi kewajiban Sertifikasi MR sesuai ketentuan	2,00
			c	Program pendidikan/*training* / seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali	2,00
	Sub Total					**10,00**
2	***Internal Procces***	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50
			b	Pengesahan RBB dan/ atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00
		Pelaksanaan	a	Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00
			b	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal 4 bulan sekali.	10,00
			c	Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan yang disampaikan kepada Pemagang Saham Seri A Dwi Warna b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian		Indikator	Parameter	Bobot (%)
			d	Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50
			e	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00
		Pengawasan	a	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Seluruh Kanwil dikunjungi minimal satu kali oleh Anggota Dewan Komisaris	7,50
				Pelaksanaan *review* pengendalian internal	*Review* atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50
			b	Pelaksanaan *review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			c	Pelaksanaan *review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eskternal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			d	Pelaksanaan *review* Laporan Keuangan	*Review* Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Sub Total				**50,00**

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian		Indikator	Parameter	Bobot (%)
3	***Compliance Prespective***	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai *Good Corporate Governance*	a	Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* GCG	Penilaian *Self Assessment* GCG dilaksanakan setiap Semster sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			b	Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian *Self Assessment* GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			c	Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	5,00
			d	Skor penilaian CGPI lebih baik dari tahun sebelumnya	Skor penilaian CGPI sesuai dengan target	2,50
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a	Pelaksanaan *review* atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan *review* atas Laporan Profil Risiko setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00
			b	Pelaksanaan fungsi kepatuhan	Skor *self assessment review* Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	2,50
			c	Pelaksanaan *review* atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan *review* atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap Semster sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			d	Pelaksanaan *review* Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan *review* Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semster sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Sub Total				**30,00**

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian		Indikator	Parameter	Bobot (%)
4	***Financial Perspective***	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a	Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50
			b	Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50
			c	NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50
			d	CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50
		Sub Total				**10,00**
				TOTAL		**100,00**

Pencapaian indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
Nilai 80 - 100 = Sangat Baik
Nilai 70 - < 80 = Baik
Nilai 55 - < 70 = Cukup Baik
Nilai < 55 = Kurang Baik

3. Mekanisme Proses Penilaian

Dewan Komisaris melakukan *self assessment* terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Dewan Komisaris. *Assessment* dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan hasilnya sebagai dasar untuk mengambil langkah perbaikan dalam peningkatan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris.

***4. Review*/Hasil Penilaian dan Pengungkapan**

Berdasarkan hasil *self assessment* Dewan Komisaris sesuai dengan target dan indikator yang ditetapkan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) Dewan Komisaris tahun 2018 memperoleh skor **100,27** dengan kriteria "Sangat Baik" dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)
1	***Learning & Growth Perspective***	Organisasi Dewan Komisaris	a	Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris compliance dengan ketentuan yang berlaku	2,00
			b	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi organ dibawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	2,00
			b	Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh Anggota Komisaris dinyatakan lulus fit and propertest OJK dan memenuhi kewajiban Sertifikasi MR sesuai ketentuan	2,00
			c	Program pendidikan/ *training* /seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali	2,00
	Sub Total					**10,00**
2	**Internal Procces**	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50
			b	Pengesahan RBB dan/ atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00
		Pelaksanaan	a	Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00
			b	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal 4 bulan sekali.	10,00

Dewan Komisaris

Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir
Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK, KBUMN dan Regulator	Sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	1,00	2,00
Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK, KBUMN dan Regulator		1,00	2,00
Setiap Dewan Komisaris yang baru diangkat memperoleh program orientasi Dewan Komisaris	Selama Tahun 2018 terdapat satu Anggota Dewan Komisaris baru Bpk.Hadiyanto dan sudah mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	1,00	2,00
8 (Delapan) Anggota Komisaris dinyatakan lulus fit and propertest OJK dan memenuhi kewajiban Sertifikasi MR sesuai ketentuan	8 (Delapan) Anggota Komisaris dinyatakan lulus fit and propertest OJK dan memenuhi kewajiban Sertifikasi MR sesuai ketentuan	1,00	2,00
Seluruh Anggota Dewan Komisaris minimal mengikuti satu kali *training* atau seminar dalam satu tahun	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan *training* minimal satu kali dalam setahun	1,00	2,00
			10,00
RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKAP Dewan Komisaris Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	1,00	2,50
Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan tanggapan atas usulan RBB ke Direksi Paling lambat tanggal 30 November 2018	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas RBB BRI 2019-2021dan RKAP 2019 melalui surat Dewan Komisaris Nomor : R.76-KOM/11/2018 tanggal 21 November 2018	1,00	5,00
Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan	Selama tahun 2018, terdapat 40 tanggapan dan persetujuan yang disampaikan Dewan Komisaris atas seluruh permohonan yang disampaikan Direksi	1,00	5,00
Dewan Komisaris minimal melaksanakan rapat sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi minimal 4 bulan sekali.	selama Tahun 2018 terdapat 55 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan 45 Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris	1,00	10,00

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)
			c Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan yang disampaikan kepada Pemagang Saham Seri A Dwi Warna b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50
			d Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50
			e Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00
		Pengawasan	a Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Seluruh Kanwil dikunjungi minimal satu kali oleh Anggota Dewan Komisaris	7,50

Dewan Komisaris

Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir
a. Dewan Komisaris menyampaikan surat Nominasi Pengurus Perseroan paling lambat Minggu III Maret 2018. b.Kebijakan Nominasi Perseroan tersedia sesuai ketentuan	a. Usulan calon Pengurus Perseroan BRI disampaikan melalui Nota Dinas KNR No.: R.07- KNR/03/2018 tanggal 21 Maret 2018. b. Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015	1,00	2,50
a. Terdapat ketentuan Dewan Komisaris terkait Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna disampaikan paling lambat Minggu I Juni 2018	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tersedia antara lain sebagai berikut: 1. SK Dewan Komisaris No.01-KOM/01/2015 tanggal 20 Januari 2015. 2. SK Dewan Komisaris No: 09-KOM/09/2015 tanggal 08 September 2015 3. SK Dewan Komisaris SK Dewan Komisaris No: 09-KOM/09/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi 4. SK Dewan Komisaris No: 09-KOM/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi 5. SK Dewan Komisaris No: 04-KOM/09/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi Yang Ditangguhkan 6. SK Dewan Komisaris Nomor: SR.12-KOM/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Rekomendasi KNR atas usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan tantiem atas kinerja tahun 2017	1,00	2,50
Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan tanggal 22 Maret 2018	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2018 disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: R.29-KOM/03/2018 pada tanggal 06 Maret 2018	1,00	5,00
Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja ke 19 Kanwil	Selama Tahun 2018 Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja sebanyak 26 kali ke 19 Kanwil	1,00	7,50

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)
			Pelaksanaan *review* pengendalian internal	*Review* atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50
			b Pelaksanaan *Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			c Pelaksanaan *Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eskternal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			d Pelaksanaan *Review* Laporan Keuangan	*Review* Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Sub Total			**50,00**
3	**Compliance Prespective**	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai *Good Corporate Governance*	a Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* GCG	Penilaian *Self Assessment* GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50

Dewan Komisaris

Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir
Review atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.	*Review* atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris B.77-KOM/05/2018 Tentang Evaluasi Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2018	1,00	2,50
Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target sebanyak 4 kali	Rekomendasi tertulis atas hasil pemeriksaaan audit internal berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi : a. Surat Dewan Komisaris R.22-KOM/02/2018 tentang Laporan Hasil Audit Semester II Tahun 2018 b. Surat Dewan Komisaris Nomor R.11-KA/05/2018 tentang Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2018 c. Surat Dewan Komisaris Nomor : R.62-KOM/08/2018 tentang Laporan hasil Audit Triwulan II Tahun 2018 d. Surat Dewan Komisaris Nomor: R.82-KOM/12/ tentang Laporan hasil Audit Triwulan III Tahun 2018	1,00	2,50
Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit eskternal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Nomor: B.142-KOM/08/2018 tentang Tindak lanjut *management letter*	1,00	2,50
Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Telaah Laporan keuangan dilaksanakan setiap triwulan dan berdasarkan penelaahan dan Diskusi SKAI dengan Komite Audit tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang disebabkan ketidak konsistenan penyajian pos-pos di dalam Draft Laporan Keuangan PT BRI (Persero) TbK	1,00	2,50
			50,00
Self Assessment GCG dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Dewan Komisaris telak melaksanakan *self assessment* GCG dan memberikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Dewan Komisaris Nomor: B.03-Sekkom/01/2018 Pelaksanaan *Self Assessment* GCG Semester II 2017 dan surat Dewan Komisaris Nomor: B.40 -Sekkom /07/2018 tentang Pelaksanaan *Self assessment* GCG Semester I 2018	1,00	2,50

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)
			b	Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian *Self Assessment* GCG terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			c	Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	5,00
			d	Skor nilai *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)	Skor CGPI sesuai dengan target	2,50
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a	Pelaksanaan *Review* atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan *Review* atas Laporan Profil Risiko setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00
			b	Pelaksanaan fungsi kepatuhan	a. Pelaksanaan *review* atas fungsi kepatuhan BRI dilaksanakan setiap Semster. b. Nilai *self Assessment Review* Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	2,50
			c	Pelaksanaan *Review* atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan *Review* atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50

Dewan Komisaris

Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir
Penilaian *Self Assessment* GCG Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Penilaian *Self Assessment* GCG Terintegrasi dilaksanakan s2 kali dalam satu Tahun	1,00	2,50
Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	1,00	5,00
Target Skor nilai CGPI lebih tinggi dari tahun sebelumnya 87,74	Skor CGPI 89.06	1,00	2,50
Terdapat rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris Pelaksanaan *Review* atas Laporan Profil Risiko setiap 3 bulan selama Tahun 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui: a. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.41-KOM/03/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017 b. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.94 - KOM/06/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2018 c. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.165 - KOM/09/2018 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2018 d. Surat Dewan Komisaris Nomor B.267/ KOM/12/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2018	1,00	10,00
peringkat risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (*Low to Moderate)* menurut assessment OJK	Risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (*Low to Moderate*)	1,00	2,50
Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas *Review* fungsi kepatuhan dan tingkat kesehatan bank yang dilaksanakan setiap semester selama tahun 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank melaui: a. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.41-KOM/03/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan b. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.165 - KOM/09/2018 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2018	1,00	2,50

Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)
			d	Pelaksanaan *review* Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan *Review* Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Sub Total				**30,00**
4	**Financial Perspective**	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a	Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50
			b	Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50
			c	NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50
			d	CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50
		Sub Total				**10,00**
	TOTAL					**100,00**

Penilaian Eksternal Dewan Komisaris

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tersebut kepada RUPS dalam laporan tahunan Perseroan, dimana berdasarkan laporan tersebut RUPST menyatakan serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir
Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester diberikan melalui: a. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.83-KOM/05/ tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi Semester II 2017. b. Surat Nomor: B.98-KOM/06/2018 tentang Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2017 c. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.81-KOM/05/2018 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester II Tahun 2017. d. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.129-KOM/08/2018 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi Semester I 2018. e. Surat Dewan Komisaris Nomor: B.219-KOM/11/2018 tentang Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2018	1,00	2,50
			30,00
31,61	31,7	1,0029	2,51
1.213	1.234	1,02	2,54
2,35%	2,14%	1,10	2,75
21,39%	21,21%	0,99	2,48
			10,27
			100,27

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS

Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2018 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/ Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2018 yang seluruhnya tercapai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan/ perundangan yang berlaku.

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS

Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2018 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/ Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2018 yang seluruhnya tercapai, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Tahunan Perseroan. Di samping itu dalam Anggaran Dasar BRI juga diatur kewajiban Dewan Komisaris untuk menyusun program kerja yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disusun oleh Direksi.

Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan perseroan selama tahun berjalan.

2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan *Self Assessment* GCG

Dewan Komisaris juga melakukan *self assessment* GCG terkait penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester dengan menggunakan Kertas Kerja *self assessment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK. *Self assessment* dimaksud meliputi *assessment* terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris (faktor 1), Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (faktor 3) dan Penanganan Benturan Kepentingan (faktor 4).

Kriteria Evaluasi *Self Assessment* GCG oleh Dewan Komisaris

Self assessment GCG tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan kedalam 3 (tiga) aspek *governance* yaitu: *governance structure, governance process* dan *governance outcome* yang harus di dukung dengan data/informasi dan dokumen yang memadai, seperti kebijakan internal, laporan internal, laporan Bank, dan/atau pengungkapan-pengungkapan lainnya yang telah dipublikasikan.

Pihak yang Melakukan *Assessment* GCG Dewan Komisaris

Penilaian *Self Assessment* GCG Dewan Komsisaris dilakukan oleh Dewan Komsiaris dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.

Hasil *Self Assessment* GCG oleh Dewan Komisaris

Hasil *self* assessment GCG Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah dengan peringkat implementasi sebagai berikut:

Aspek Penilaian	Peringkat Implementasi*
Governance Structure	1
Governance Process	1
Governance Outcome	1
Rata-rata	**1 (sangat Baik)**

*) Hasil tersebut merupakan *self assessment* Dewan Komisaris

3. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Lemabaga Independen

Salah satu mekanisme penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang berasal dari eksternal adalah melaluipenilaian terhadap implementasi *Good Corporate Governance* Perseroan adalah *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) melalui program riset penerapan GCG: *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Prosedur & Kriteria Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Pelaksanaan *assessment Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dilakukan melalui 4 (empat) tahap penilaian yaitu 1) *Self assessment*, 2) Penilaian Dokumentasi, 3) Penilaian Makalah, dan 4) Observasi Wawancara terhadapt aspek *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome* BRI.

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan *assessment* kinerja Dewan Komisaris berdasarkan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah lembaga *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Assessment Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Berdasarkan penilaian pihak independen tersebut skor penilaian Perseroan masuk dalam kategori "Sangat Terpercaya" dengan total point 89,06 (*Governance Structure*: 22,90, *Governance Process:* 38,16, dan *Governance Outcome* : 28,00). Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan penilaian tahun sebelumnya dengan total point 87,74.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris wajib memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan maupun sebagai individu, sesuai dengan kebutuhan Bank. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.

Keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dapat membantu efisiensi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan berasal dari beragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, jenis kelamin, usia dan pengalaman sebagaimana tertuang pada profil masing-masing anggota Dewan Komisaris, yaitu dari kalangan praktisi perbankan, cendikiawan/ akademisi, birokrasi dan mereka yang pernah berkarir sebagai pengambil keputusan/kebijakan di bidang regulasi maupun korporasi yang berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Dewan Komisaris

Keberagaman anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja/ Pengalaman Kedirekturan	Keahlian
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	56	Pria	· S1 Ilmu Politik Universtas Indonesia · Diploma Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan · S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia	1. Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group (CGS) 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 3. Komisaris Utama Angkasa Pura I 4. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia	Ilmu Sosial, Ekonomi & Politik
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	58	Pria	· Diploma, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) · Diploma IV,Sekolah Tinggi Akuntansi Negara · S2 Master Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan, Cleveland State University Ohio – USA · S3 Doktor Manajemen Strategik, Universitas Padjajadran	1. Asisten Deputi Informasi dan Admistrasi Kementrian BUMN 2. Komisaris PT Adhi Karya (Persero) 3. Komisaris PT Jiwasraya (Persero) 4. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II Kementrian BUMN 5. Komisaris PT Telkom 6. Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementrian BUMN 7. Komisaris PT Pertamina 8. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN. 9. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan, Kementerian BUMN	1. Accounting 2. *Risk Management* 3. Audit 4. Finance 5. Manajemen Strategik

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja/ Pengalaman Kedirekturan	Keahlian
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	64	Pria	· S1 Ekonomi, Universitas Indonesia · S2 Master of Art, Duke University, Durham, North Carolina, USA · S3 Economics, Venderbilt University, Tenesse, USA	1. Komisaris PT Danareksa (Persero) 2. Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara, Kementerian Keuangan 3. Komisaris PT Bank Internasional Indonesia 4. Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Departemen Keuangan 5. Deputi Keuangan dan Pendanaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, Departemen Keuangan 6. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) 7. Komisioner *ex officio* Lembaga Penjamin Simpanan 8. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan 9. Anggota Dewan Direktur Non Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 10. Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminiun (Persero)	1. Ilmu Ekonomi 2. Makro 3. Fiskal 4. Pasar 5. Financial

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja/ Pengalaman Kedirekturan	Keahlian
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	60	Pria	· S1 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara · S2 The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia · S3 The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia	1. Dosen Etika Bisnis & Etika Profesi Akuntansi, Universitas Atmajaya 2. Anggota Dewan Energi Nasional 3. Komisaris PT Gorontalo Sejahtera Mining 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI 5. Anggota DPR RI Komisi VIII DPR RI	1. Etika Bisnis 2. Lingkungan Hidup 3. Filsafat 4. Ilmu Politik 5. Legislasi 6. nergi dan Sumber Daya Mineral
Mahmud	Komisaris Independen	65	Pria	· S1 Ekonomi Perusahaan Universitas Diponegoro · S2 Manajemen Keuangan Universitas Padjadjaran	1. Pemimpin BI Pekanbaru 2. Deputi Pemimpin BI Surabaya 3. Direktur DPIP Bank Indonesia 4. Kepala Departemen DPIP 5. Kepala Kpw Makassar Bank Indonesia 6. Kepala Departemen DPB1, BI Jakarta 7. Kepala Departemen DPB1, Otoritas Jasa Keuangan 8. Advisor Senior, Grup Dukungan Strategis Dewan Komisioner, Otoritas Jasa Keuangan	1. Perbankan 2. *Risk Management* 3. *Finance*

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja/ Pengalaman Kedirekturan	Keahlian
Rofikoh Rokhim*)	Komisaris	47	Wanita	· S1 Ekonomi Manajemen UII Yogyakarta · S1 Public Administration Universitas Gadjah Mada · S2 Public Finance French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA), Paris · S2 gelar D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris · S3 EcoNomics (Applied Macro and Micro EcoNomics, Development Studies in Finance) Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris	1. Head of Bisnis Indonesia Intelliggence Unit 2. Komite Audit dan Komite Risiko, PT. POS Indonesia 3. Satgas Migas, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral 4. Satgas Desa, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal 5. Komisaris Utama, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) 6. Dosen dan Peneliti, Fakultas EkoNomi dan Bisnis,Univesitas Indonesia	1. Ekonomi 2. Manajemen 3. Public Administration 4. Finance 5. Research
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	46	Pria	· S1 Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada · S2 Ilmu Politik, Ohio University, Athens, Ohio, USA · S3 Ilmu Politik, Northern Illinois University, USA	1. Direktur Eksekutif Populi Center (Public Opinion & *Policy* Research) 2. Perhimpunan Survei Opini Publik (PERSEPSI) 3. Komisaris PT Permodalan Nasional Madani 4. Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) 5. Staff Khusus Mensesneg Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan Sekretariat Negara Republik Indonesia	1. Hubungan Internasional 2. Ilmu Sosial 3. Public Communication

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja/ Pengalaman Kedirekturan	Keahlian
Hadiyanto**)	Komisaris	56	Pria	· S1 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran · S2 Hukum (LL.M) Harvard University Law of School · S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran	1. Dewan Pengawas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 2. Komisaris PT.Telkom Indonesia 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4. Ketua Dewan Pengawas RS Dr. Cipto Mangunkusumo 5. Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	1. Ilmu Hukum 2. *Human Capital* Management 3. Keuangan Negara
Vincentius Sonny Loho***)	Komisaris	60	Pria	· D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara · D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara · S2 Public *Policy* and Management, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA	1. Kepala Sub Direktorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan 2. Direktur Pembinaan Keuangan Bidang Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan 4. Anggota Dewan Konsultasi IAI Kompartemen Sektor Publik	1. Keuangan Negara 2. Publik Management 3. Pengelolaan Asset dan Investasi

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja/ Pengalaman Kedirekturan	Keahlian
Jeffry J. Wurangian****)	Komisaris	64	Pria	· S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi · S2 M.sc., Agricultural Economics, Oklahoma State University, Oklahoma, USA. · S2 MBA., European University, Belgium, Joined Program with IEU School of Business · S3 Doktor Ekonomi, Universitas Merdeka, Malang. · S3 Ph.D program, Ag. Economics, all courseworks completed, Oklahoma State University, Oklahoma, USA	1. Direktur Utama PT. Bank Sulut 2. Direktur Marketing PT. Bank Sulut *3. Vice President Saseka Finance* 4. Direktur Operasi Bank Mitra Niaga 5. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kerjasama BUMN 6. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)	Banking

*) Efektif mulai 1 Februari 2018
**) Efektif mulai 21 September 2018
***) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018
****) Efektif sampai dengan 20 September 2018

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHAN TAHUN 2018

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain itu, jumlah anggota Dewan Komisaris perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan Dewan Komisaris BRI selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris pada 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Maret 2018

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/Independen	56	RUPST 15 Maret 2017
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	58	RUPST 19 Maret 2015
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	64	RUPST 19 Maret 2015
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	60	RUPST 19 Maret 2015
5	Mahmud	Komisaris Independen	60	RUPST 15 Maret 2016
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	47	RUPSLB 18 Oktober 2017
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	60	RUPST 28 Maret 2012
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	64	RUPST 19 Maret 2015
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	46	RUPST 15 Maret 2017

Susunan Dewan Komisaris 22 Maret 2018 sampai dengan 20 September 2018

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 22 Maret 2018, RUPS mengangkat Sdr. Hadiyanto Sebagai Komisaris menggantikan Sdr. Vincentius Sonny Loho, sehingga susunan Dewan Komisaris BRI periode 22 Maret 2018 sampai dengan 20 September 2018 sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	56	RUPST 15 Maret 2017
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	58	RUPST 19 Maret 2015
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	64	RUPST 19 Maret 2015
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	60	RUPST 19 Maret 2015
5	Mahmud	Komisaris Independen	60	RUPST 15 Maret 2016
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	47	RUPSLB 18 Oktober 2017
7	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	64	RUPST 19 Maret 2015
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	46	RUPST 15 Maret 2017
9	Hadiyanto	Komisaris	56	RUPST 23 Maret 2018

Susunan Dewan Komisaris 20 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Berdasarkan keputusan surat pengunduran diri Sdr. Jeffry J. Wurangian pada tanggal 20 September 2018, susunan Dewan Komisaris BRI periode 20 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	56	RUPST 15 Maret 2017
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	58	RUPST 19 Maret 2015
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	64	RUPST 19 Maret 2015
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	60	RUPST 19 Maret 2015
5	Mahmud	Komisaris Independen	60	RUPST 15 Maret 2016
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	47	RUPSLB 18 Oktober 2017
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	46	RUPST 15 Maret 2017
8	Hadiyanto	Komisaris	56	RUPST 23 Maret 2018

PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris selama tahun 2018 sebagai berikut:

	KNR	KPMR	KTKT	KA
Ketua	Andrinof A. Chaniago	Mahmud	Mahmud	A. Fuad Rahmany
Anggota	Gatot Trihargo	Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	A. Sonny Keraf
	Mahmud	A. Fuad Rahmany	Gatot Trihargo	Rofikoh Rokhim
	A. Fuad Rahmany	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Hadiyanto	
	A. Sonny Keraf			
	Rofikoh Rokhim			
	Nicolaus Teguh Budi Harjanto			
	Hadiyanto			

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan POJK No: 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pada Bank Umum, Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen dimana Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib menyampaikan Pernyataan Independensi Komisaris Independen dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ Perseroan tersebut mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris hingga derajat

kedua. Dengan kondisi demikian, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

1. Hubungan Keuangan
   Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.
2. Hubungan Keluarga
   Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.

Bahwa Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar. Adapun data tersebut dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris (BOC)												
Andrinof A. Chaniago		√		√		√		√		√		√
Gatot Trihargo		√		√	√			√		√		√
A. Fuad Rahmany		√		√		√		√		√		√
A. Sonny Keraf		√		√		√		√		√		√
Mahmud		√		√		√		√		√		√
Rofikoh Rokhim*)				√		√		√		√		√
Nicolaus teguh Budi Harjanto		√		√		√		√		√		√
Hadiyanto**)					√			√		√		√
Vincentius Sonny Loho***)				√	√			√		√		√
Jeffry J. Wurangian****)				√		√		√		√		√

*) Efektif 1 Februari 2018 – 31 Desember 2018
**) Efektif 21 September 2018 – 31 Desember 2018
***) Efektif 1 Januari 2018 – 22 Maret 2018
****) Efektif 1 Januari 2018 – 20 September 2018

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK-03/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

1. Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
2. Lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Berikut adalah pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018:

No	Nama	Jabatan	Periode	Jabatan Lain Saat Ini	Nama Perusahaan/ instansi Lain
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2006 – sekarang	Pengajar di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Universitas Indonesia
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	Juli 2015 - sekarang	Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan	Kementerian BUMN
			2014 – sekarang	Anggota Dewan Pengurus Nasional	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
			2010 – sekarang	Presiden Association	Certified *Fraud* Examiner (CFE) - Indonesia Chapter
			2010 - sekarang	Anggota Dewan Kehormatan	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
			2009 - sekarang	Anggota Dewan Penguji	*Certified Professional Management Accountant* (CPMA)
			2009 - sekarang	Anggota Dewan Penguji	*Center for Sustainability Reporting* (NCSR)
			2016 - sekarang	Ketua umum	Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	1998 - sekarang	Dosen Etika Bisnis & Etika Profesi Akuntansi	Universitas Atma Jaya Jakarta
			2014 - sekarang	Anggota	Dewan Energi Nasional *National Energy Board*
			2016 - sekarang	Komisaris Independen	PT Gorontalo Sejahtera Mining
5	Mahmud	Komisaris Independen	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		
6	Rofikoh Rokhim*)	Komisaris Independen	2006 - sekarang	Dosen dan Peneliti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.	Univesitas Indonesia

Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Periode	Jabatan Lain Saat Ini	Nama Perusahaan/ instansi Lain
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	2015 - Sekarang	Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Hubungan Kelembagaan	Kementerian Sekretariat Negara
8	Hadiyanto**)	Komisaris	2015-sekarang	Sekretaris Jenderal	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
			2016-sekarang	Ketua Dewan Pengawas	RS Dr. Cipto Mangunkusumo
			2015-sekarang	Dewan Pengawas	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
9	Vincentius Sonny Loho***)	Komisaris	2014 - sekarang	Anggota Dewan Konsultatif	IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik
10	Jeffry J. Wurangian***)	Komisaris	2015 - sekarang	Wakil Ketua Umum Bidang pengembangan Kerja sama BUMN	Kamar Dagang Industri Nasional (KADIN)

*) Efektif 1 Februari 2018 – 31 Desember 2018
**) Efektif 21 September 2018 – 31 Desember 2018
***) Efektif 1 Januari 2018 – 22 Maret 2018
****) Efektif 1 Januari 2018 – 20 September 2018

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS 2018

Anggota Dewan Komisaris BRI telah menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga melalui Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Perseroan.

Komisaris Independen tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Sejalan dengan independensi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Per 31 Desember 2018, tidak ada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham 5% atau lebih di dalam Perseroan maupun perusahaan atau bank atau lembaga keuangan bukan bank lain.

No	Komisaris	Kepemilikan Saham lebih dari 5%			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
1	Andrinof A. Chaniago	-	-	-	-
2	Gatot Trihargo	-	-	-	-
3	A. Fuad Rahmany	-	-	-	-
4	A. Sonny Keraf	-	-	-	-
5	Mahmud	-	-	-	-
6	Rofikoh Rokhim*)	-	-	-	-
7	Nicolaus teguh Budi Harjanto	-	-	-	-

No	Komisaris	Kepemilikan Saham lebih dari 5%			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
8	Hadiyanto**)	-	-	-	-
9	Vincentius Sonny Loho***)	-	-	-	-
10	Jeffry J. Wurangian****)	-	-	-	-

*) Efektif 1 Februari 2018 – 31 Desember 2018
**) Efektif 21 September 2018 – 31 Desember 2018
***) Efektif 1 Januari 2018 – 22 Maret 2018
****) Efektif 1 Januari 2018 – 20 September 2018

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

BRI memiliki kebijakan program orientasi dan pendidikan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.43-DIR/SKP/01/2018 tanggal 17 Januari 2018, dengan program pendidikan dan orientasi sebagai berikut:

1. Program Orientasi dilaksanakan khusus bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat melalui RUPS BRI atau sesuai permintaan Dewan Komisaris apabila diminta;
2. Program Orientasi dilaksanakan khusus bagi Anggota Direksi yang baru diangkat melalui RUPS BRI atau sesuai permintaan Direksi apabila diminta;
3. Program pendidikan dilaksanakan oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
4. Program Orientasi yang diadakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi baru meliputi:
   a. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi & Misi, Strategi, Rencana Jangka Menengah & Jangka Panjang, kinerja dan keuangan.
   b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, dan aturan-aturan yang relevan.
   c. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan, dan ketentuan GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris/ Direksi.
   d. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi.
   e. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi.

Dewan Komisaris

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program Orientasi diadakan untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Program Orientasi merupakan program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru. Pelaksanaan program ini berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya. Tujuan dari program orientasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan;
2. Menambah pengetahuan untuk dan Komisaris baru mengenai Visi, Misi, Profil dan tujuan Bank BRI;
3. Memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang dan larangan sebagai Komisaris BRI;
4. Memberikan pedoman, gambaran tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
5. Menambah pemahaman Dewan Komisaris mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI;
6. Menambah pemahaman mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI; pemahaman *value creation* untuk para *stakeholders*, manajemen risiko, pemahaman industri perbankan atau bisnis perusahaan anak Bank BRI;
7. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis BRI;
8. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.

Program Orientasi Dewan Komisaris Tahun 2018 :

Peserta	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Pemberi Materi	Materi orientasi
Hadiyanto Komisaris	Ruang Rapat Sekjen, Gedung Djuanda I lantai 4 Kompleks Kementerian keuangan RI, 04 April 2018	1. Divisi Manajemen Risiko 2. Divisi Seketariat Perusahaan 3. Divisi Corporate Development & Strategy 4. Sekretariat Dewan Komisaris 5. Divisi Kepatuhan	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI. 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi, 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi; 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

BRI memiliki Kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris BRI dalam menunaikan tugasnya.

Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis;
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung joleh pengetahuan hasil pendidikan;
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Tempat	Tanggal	Penyelenggara	Materi
Andrinof A. Chaniago	Xiamen, Tiongkok	27 -29 April	Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok	Pembicara
	New York & Boston, Amerika	25-31 Agustus	Harvard Business School	Kunjungan Kerja ke BRI New York dan Mengikuti *Training* : *Leadership Coaching Strategies*
Gatot Trihargo	Davos - Klosters, Switzerland	23-26 Januari/ January	World Economic Forum	*World Economic Forum Annual Meeting 2018 : Creating a Shared Future in a Fractured World*
A. Fuad Rahmany	Brunei Darussalam	7-8 November 2018	ASEAN *Bankers Association*	*48th ASEAN Banking Council Meeting*
A. Sonny Keraf	New York, USA	16-20 April	SRW & Co.	*ASEAN Global Leadership Program : Transforming ASEAN Organizations, The Leadership Imperactive*
	Dusseldorf - Frankfurt, Germany	02-09 Juli/July	LPPI	*Executive Risk Management Refreshment Program : Risk Management as Performance Enabler*
Mahmud	Dusseldorf - Frankfurt, Germany	02-09 Juli/July	LPPI	*Executive Risk Management Refreshment Program : Risk Management as Performance Enabler*

Dewan Komisaris

Komisaris	Tempat	Tanggal	Penyelenggara	Materi
Rofikoh Rokhim*	Philadelphia, USA	23 -26April	Wharton - University of Pennsylvania	*Wharton's Introduction to Brain Science for Business MBA Course : leveraging Neuroscience for Business Impact*
	San Francisco, Amerika	19-24 Agust	Stanford Business School	*Training : People, Culture and Performance - Strategies from Silicon Valley*
Nicolaus TB Harjanto	Roma, Milan, Italy	06-14 Oktober	LPPI - IBI	*International Risk Management & Treasury Dealer Refreshment Program for Executives*
Hadiyanto**	*Selama tahun 2018 tidak mengikuti program pelatihan*			
Jeffry J. Wurangian***	Boston, USA	11-17 Maret	Harvard Business School	*Executive Education Finance : Launching New Ventures*

*) Efektif mulai 1 Februari 2018
**) Efektif mulai 21 September 2018
***) Efektif 1 Januari 2018 – 22 Maret 2018
***) Efektif 1 Januari 2018 s.d 20 September 2018

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang Manajemen Risiko sesuai syarat minimum standar sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan perubahan Peraturan Bank Indonesia dimaksud dengan No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010.

Memperhatikan hal tersebut dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemenuhan syarat sebagai Dewan Komisaris, selain mengikuti berbagai *training* dan *conference*, Dewan Komisaris Perseroan senantiasa membekali diri dengan sertifikasi manajemen risiko yang mendukung tugas nya sebagai Pengawas Perseroan. Adapun sertifikasi yang diikuti oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Title	Sertifikasi /Refreshment MR		
		Lembaga	Tingkat	Waktu
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama / Independen	LSPP	Level 2	21 April 2017
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	BSMR	Tingkat 1	11 April 2015
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	BSMR	Tingkat 2	9 April 2017
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2 Mei 2015
Mahmud	Komisaris Independen	BSMR	Level 5	7 Februari 2017
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2 November 2017
Nicolaus T. Budi Harjanto	Komisaris	LSPP	Level 1	6 April 2017
Hadiyanto	Komisaris	LSPP	Level 1	14 Mei 2018

Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris 2018

Selain melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi, Dewan Komisaris juga memberikan berbagai rekomendasi dan masukan kepada manajemen berdasarkan atas laporan rutin manajemen ke Dewan Komisaris maupun berdasarkan atas kejadian atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
16-Jan-18	B.06-KOM/01/2018	Perkembangan produk Bank *Assurance* dan/atau produk bank dengan pihak III
19-Jan-18	B.10-KOM/01/2018	Kejadian *fraud* berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik triwulan IV 2017
19-Jan-18	B.13-KOM/01/2018	Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh regulator triwulan IV/2017
31-Jan-18	B.17-KOM/01/2018	Arahan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2018
02-Mar-18	B.29-KOM/03/2018	Hasil *review* atas pengkinian *draft* piagam audit intern
09-Mar-18	B.35-KOM/03/2018	Pengenaan sanksi Kesalahan laporan SID/SILK dan gagal settlement aktivasi *treasury* oleh Bank Indonesia
15-Mar-18	B.41-KOM/03/2018	Laporan profil risiko triwulan IV th 2017, laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendaanaan teroris (APU & PPT) semester II tahun 2017, Laporan tingkat kesehatan bank semester II th 2017, laporan pelaksanaan strategi anti *fraud* semester II th 2017
08-May-18	B.75-KOM/05/2018	*Loan portfolio Guidelines* tahun 2018
08-May-18	B.81-KOM/05/2018	Laporan pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi semester II 2017
15-May-18	B.84-KOM/05/2018	Temuan hasil kunjungan kerja Dewan Komisaris BRI periode triwulan I th 2018
28-May-18	B.90-KOM/05/2018	Laporan pengawasan Dewan komisaris atas kinerja BRI triwulan I tahun 2018
04-Jun-18	B.94-KOM/06/2018	Laporan profil risiko triwulan I th 2018
21-Jun-18	B.98-KOM/06/2018	*Review* profil risiko terintegrasi semester II tahun 2017
26-Jun-18	B.101-KOM/06/2018	Evaluasi implementasi tata kelola DPLK BRI
17-Jul-18	B.113-KOM/07/2018	Kejadian *fraud* berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik triwulan II/2018
07-Aug-18	B.129-KOM/08/2018	Penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi semester I tahun 2018
16-Aug-18	B.132-Kom/08/2018	Evaluasi implementasi tata kelola DPLK BRI
29-Aug-18	B.142-KOM/08/2018	Tindak lanjut management letter atas audit audit umum laporan keuangan tahun 2017

Dewan Komisaris

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
20-Sep-18	B.165-KOM/09/2018	Laporan profil risiko semester I (triwulan II) tahun 2018, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Program anti pencucian uang (APU) dan Pencegaha terosis (PPT) semester I tahun 2108, Laporan tingkat kesehatan bank semester I tahun 2018, dan Laporan pelaksanaan st*rate*gi anti *fraud* semester I tahun 2018
12-Nov-18	B.219-KOM/11/2018	*Review* profil risiko terintegrasi semester I tahun 2018
27-Feb-18	SR.04-KOM/01/2018	Evaluasi kinerja Direksi PT BRI Persero Tbk
29-Mar-18	SR.07-KOM/03/2018	Matrik kendali usulan penempatan wakil perseroan di perusahaan anak atau patungan BUMN
08-May-18	SR.12-KOM/05/2018	Rekomendasi KNR atas usulan penghasilan
09-Jan-18	R.04-KOM/01/2018	Pelaksanaan self Assessment GCG semester II tahun 2017
15-Jan-18	R.08-KOM/01/2018	Penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi semester II tahun 2017
06-Feb-18	R.11-KOM/02/2018	Laporan evaluasi kinerja investasi DPLK BRI semester II tahun 2017
06-Feb-18	R.12-KOM/02/2018	Konsultasi Kredit
13-Feb-18	R.13-KOM/02/2018	Kinerja keuangan dan investasi DPLK BRI tahun 2017
13-Feb-18	R.14-KOM/02/2018	Surat laporan kepatuhan BRI semester II/2017 kepada OJK
27-Feb-18	R.22-KOM/02/2018	Laporan pokok pokok hasil audit semester II tahun 2017
27-Feb-18	R.25-KOM/02/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja BRI semester II th 2017
27-Feb-18	R.26-KOM/02/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja BRI triwulan IV tahun 2017
08-Jun-18	R.44-KOM/06/2018	Evaluasi Laporan pokok-pokok hasil Audit triwulan I tahun 2018
08-Jun-18	R.45-KOM/06/2018	Laporan evaluasi Komite audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2017 & KAP PSS (EY)
26-Jun-18	R.46-KOM/06/2018	Laporan Evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa Audit atas informasi keuangan historis DPLK BRI thun buku 2018 & KAP NSS
26-Jun-18	R.47-KOM/06/2018	Evaluasi kinerja keuangan dan investasi audited DPLK BRI Tahun 2017
30-Jul-18	R.50-KOM/07/2018	Laporan evaluasi kinerja Investasi DPLK BRI Semester I Tahun 2018
30-Jul-18	R.52-KOM/07/2018	Restrukturisasi kredit dan kredit bermasalah segmen bisnis menengah dan korporasi
30-Jul-18	R.53-KOM/07/2018	Laporan Hasil Audit (LHA) audit operasional aplikasi asuransi agunan kredit online (A3KOL)
21-Aug-18	R.59-KOM/08/2018	Revisi kebijakan remunerasi PT BRI (Persero) Tbk
23-Aug-18	R.60-KOM/08/2018	Konsultasi Kredit
23-Aug-18	R.61-KOM/08/2018	Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sd triwulan II tahun 2018
24-Aug-18	R.62-KOM/08/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI triwulan II Tahun 2018
24-Aug-18	R.63-KOM/08/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI smester I tahun 2018
27-Nov-18	R.77-KOM/11/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT. BRI (Persero) Tbk triwulan III tahun 2018
04-Dec-18	R.79-KOM/11/2108	Penyampaian usulan calon kepala SKAI BRI

PROGRAM KERJA PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Dewan Komisaris Program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program kerja Dewan Komisaris disusun dalam suatu dokumen yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris yang disusun setiap awal Tahun anggaran. Dalam melaksanakan RKA tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan komite Tata kelola Terintegrasi. Agar tugas, kewajiban dan tanggung jawab dapat terlaksana secara efektif, Dewan Komisaris menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu seluruh anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite yang berasal dari Non Komisaris, serta Sekretariat Dewan Komisaris, untuk mendukung pencapaian program kerja Dewan Komisaris tersebut.

Adapun realisasi program kerja Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Nominasi Direksi BRI

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2017 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi KNR. Adapun proses Nominasi yang terjadi selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Nominasi dalam RUPS Tahunan Tahun 2018.
Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan proses Nominasi Calon Direksi dan Komisaris dari Internal Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk diputus dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan Proses Nominasi Direksi dan Rekomendasi KNR adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
1	Usulan Nominasi Direksi	21 Maret 2018	Usulan calon Direktur Utama dan bakal calon anggota Direksi BRI disampaikan melalui Nota Dinas KNR No.: R.07- KNR/03/2018 tanggal 21 Maret 2018

b. Nominasi dalam RUPSLB Tahun 2019
Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan proses Nominasi Calon Direksi yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk ditetapka dalam RUPSLB tanggal 03 Januari 2019 sesuai dengan surat Kementerian BUMN No.SR-742/MBU/11/2018 Tanggal 05 November 2018 yang salah satu agendanya adalah perubahan Pengurus Perseroan.

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
1	Perubahan Pengurus BRI dalam RUPSLB 2019	28 Desember 2018	1. Usulan *Update Top Talent* PT. BRI (Persero) Tbk disampaikan melalui Surat Direksi No. SR.24-KOM/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 2. Usulan calon Perubahan PT. BRI (Persero) Tbk. disampaikan melalui Surat Direksi No. SR.25-KOM/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

Dewan Komisaris

2. Nominasi Calon Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar BRI, salah satu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah mengusulkan Wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan anak yang memberikan kontribusi signifikan bagi perseroan dan/ atau bernilai strategis. Memperhatikan hal tersebut, selama Tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris telah melaksanakan proses Nominasi terhadap calon wakil persoroan yang diusulkan oleh Direksi untuk ditempatkan kepada anak perusahaan dan Pihak terkait antara lain sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
1	Nominasi Calon Komisaris dan Direktur PT BRIsyariah	04 Januari 2018	Persetujuan Calon Komisaris dan Direktur PT BRIsyariah disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris No.: SR.02-KOM/01/2018
2	Nominasi Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRI Agroniaga	29 Maret 2018	Persetujuan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRI Agroniaga disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris No.: SR.08-KOM/04/2018
3	Nominasi Calon Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura	17 April 2018	Persetujuan Calon Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris No.: SR.09-KOM/04/2018
4	Nominasi Calon Komisaris dan Direksi BRI Life	7 Juni 2018	Persetujuan Calon Komisaris dan Direksi BRI Life disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris No.: SR.14-KOM/06/2018
5	Nominasi Calon Komisaris dan Direksi BRI Multifinance indonesia (BRI Finance)	24 Juli 2018	Persetujuan Calon Komisaris dan Direksi BRI Multifinance indonesia (BRI Finance) disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris No.: SR.16-KOM/07/2018

3. Evaluasi Kinerja Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Komite Nominasi dan remunerasi harus melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi sesuai dengan KPI Direksi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi Direksi tersebut antara lain untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi serta melakukan *review* kembali atas kompetensi masing-masing Direksi.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kinerja Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Output
Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	27 Februari 2018	Surat tertulis Dewan Komisaris melalui surat Dewan Komisaris SR.04-KOM/01/2018 Evaluasi Kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk

4. Penyusunan Kebijakan/Ketentuan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Bahwa dalam rangka memastikan tata kelola pemberian remunerasi untuk mendorong prudent risk taking oleh Pejabat Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, bank harus memiliki kebjakan tata kelola remunerasi .

Berdasarkan ketentuan tersebut KNR telah menyusun kebijakan Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI yang telah ditetapkan melalui SK bersama Direksi dan Komisaris SK Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan No. 1023-DIR/KPS/11/2017 Surat tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam rangka implementasi kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta mendorong dilakukannya *prudent risk taking*, sebagai wujud peningkatan tata kelola, sebagian remunerasi yang bersifat variabel ditangguhkan pembayarannya untuk jangka waktu tertentu, pada tahun 2018 KNR telah menyusun Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Materi	Realisasi Waktu	Output
Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	12 September 2018	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 04-KOM/09/2018 tanggalm 12 September 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

5. Review Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan dengan hasil keputusan RUPST Tahun 2018, RUPST memberi kewenangan kepada Dewan komisaris untuk menetukan struktur dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan komsiaris kepada Dewan komisaris setelah mendapatkan eprsetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Berdasarkan keptusan tersebut, KNR menyampaikan *review* dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang meliputi usulan honorarium/gaji Dewan Komisaris dan Direksi, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2018, usulan tantiem atas kinerja Tahun Buku 2017 untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pelaksanaan *review* dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu	Output
Review Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	8 Mei 2018	Usulan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Dewan Komisaris Nomor SR.12-KOM/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Rekomendasi KNR atas usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan tantiem atas kinerja tahun 2017.

Dalam merumuskan usulan remunerasi KNR dibantu oleh Konsulltan Independen Willis Towers Watson, *review* dilaksanakan dengan melakukan survey kajian berdasarkan benchmark dengan perusahaan berkelas dunia di dalam negeri atau regional Asia Tenggara sesuai dengan Permen No.06/MBU/2017 yang antara lain memiliki kriteria skala usaha yang dianggap setara, mempunyai usaha inti yang sejenis atau kompleksitas usaha yang sama, serta dapat diketahui indikator kinerjanya serta dapat diketahui biaya Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan tersebut.

Dewan Komisaris

6. Review atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan

KNR menyampaikan rekomendasi mengenai hasil *Review* atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dimaksud menjadi bahan bagi Dewan Komisaris dalam rangka pemberian pendapat dan saran kepada Direksi untuk memastikan Perseroan selalu menetapkan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan visi misi Perseroan. *Review* dilakukan dengan mengevaluasi implementasi Arsitektur *Human Capital*, Kebijakan *Human Capital* dan laporan serta pemaparan Direktur *Human Capital* serta sistem remunerasi Pekerja BRI.

Pelaksanaan dan realisasi *review* atas implementasi remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu	Output
Review Kebijakan Ketenagakerjaan	18 Desember 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris kepad Direksi Nomor: R.85-KOM/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Remunerasi Pekerja BRI.

Hal-hal yang menjadi *concern* KNR dan Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan dan pengelolaan *Human Capital* BRI antara lain sebagai berikut:

a. Mengembangkan program Inovatif untuk menjangkau talenta terbaik dan mendorong BRI menjadi pilihan utama talenta terbaik untuk bekerja.
b. Mengembangkan *Integrated Talent Management System* (ITMS) secara terintegrasi baik di BRI maupun dengan Perusahaan Anak serta mengkaji jenjang karier pegawai untuk memperkuat hubungan kinerja dan kemajuan karir jangka panjang.
c. Strategi dan rencana Manajemen dalam pengelolaan SDM mengahadapi era *digital banking* dan *fintech*.
d. Mendesain kembali penilaian kinerja untuk memastikan proses yang adil dan transparan.
e. Menyelaraskan kembali mekanisme remunerasi untuk memberikan penghargaan terhadap pegawai serta distribusi kerja yang berkeadilan.
f. Mengkaji kembali struktur remunerasi pekerja, khususnya besaran remunerasi yang diterima setiap bulan, sehingga lebih menarik bagi *best talent* untuk bergabung dengan BRI.
g. Remunerasi bagi pekerja dalam setiap level jabatan comparable dengan industri sehingga mendorong tingkat produktivitas pekerja.
h. Akselerasi pemenuhan formasi Jabatan struktural, diharapkan manajemen melakukan relaksasi dengan memberikan kepercayaan kepada *talent-talent* muda yang bagus maupun *afirmatif* untuk pekerja di daerah untuk dapat memenuhi formasi jabatan tersebut.
i. Mengembangkan strategi dan desain *training* secara konglomerasi dengan perusahaan anak yang menunjang pengetahuan dan kemampuan Pekerja secara koglomerasi.

7. Review terhadap Visi/Misi Perusahaan dan Pemberian Persetujuan atas Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RKA Perseroan

Review terhadap Visi/Misi perusahaan dilakukan secara berkala bersamaan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP), sedangkan untuk *review* strategi perusahaan dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya, bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank, Direksi berkewajiban menyusun Rencana Bisnis dan harus mendapatkan persetujuan atas rencana Bisnis Perseroan.

Dewan Komisaris

Sebelum memberikan persetujuan atas rencana bisnis bank, Dewan Komisaris melakukan *review* atas usulan Rencana Bisnis untuk memastikan bahwa rencana tersebut telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, serta memperhatikan aspek internal dan eksternal dengan cakupan yang komprehensif serta asas perbankan yang sehat.

Disamping memberikan persetujuan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Perseroan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat dua bulan setelah periode laporan.

Pembahasan dan persetujuan atas Rencana Bisnis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Materi Penelaahan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Persetujuan Revisi RBB th 2018-2020 dan RKAP tahun 2018	6 Juni 2018	Surat Dewan Komisaris BRI Nomor: R.43-KOM/06/2018 tentang Persetujuan Rencana Jangka Panjang BRI 2018-2022
2	Persetujuan RBB tahun 2019-2021 dan RKAP tahun 2019	21 November 2018	Surat Dewan Komisaris BRI Nomor R.76-KOM/11/2018 tentang Persetujuan RBB tahun 2019-2021 dan RKAP tahun 2019

8. Penelaahan Laporan Keuangan

Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan mencakup laporan keuangan triwulan dan tahunan. Hasil penelaahan tersebut dapat berupa tanggapan kepada Direksi untuk penyempurnaan atau perbaikan laporan sebelum dipublikasikan.

Realisasi penelaahan laporan keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Materi Penelaahan	Waktu Pelaksanaan	Hasil Penelaahan Laporan Keuangan
1.	Laporan Keuangan akhir Tahun 2017	18 Januari 2018	Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian KAP yang menyebabkan KAP percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian PT.BRI (Persero) Tbk. dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penelaahan dan diskusi dituangkan dalam risalah rapat No.: B.02-KA/01/2018
2.	Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2018	17 April 2018	Berdasarkan penelaahan dan Diskusi SKAI dengan Komite Audit tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang disebabkan ketidak konsistenan penyajian pos-pos di dalam Draft Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk. TW I Tahun 2018. Penelaahan dan diskusi dituangkan dalam risalah rapat No.: 10 - KA/04/2018

Dewan Komisaris

No.	Materi Penelaahan	Waktu Pelaksanaan	Hasil Penelaahan Laporan Keuangan
3.	Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2018	27 Juli 2018	Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian KAP yang menyebabkan KAP percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian PT.BRI (Persero) Tbk. dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penelaahan dan diskusi dituangkan dalam risalah rapat No.: 12 - KA/07/2018 16-KA/10/2018
4.	Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2018	23 Oktober 2018	Berdasarkan penelaahan dan Diskusi SKAI dengan Komite Audit tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang disebabkan ketidak konsistenan penyajian pos-pos di dalam Draft Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk. TW III Tahun 2018. Penelaahan dan diskusi dituangkan dalam risalah rapat No.: 16-KA/10/2018

9. Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal

Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan *monitoring* tindak lanjut temuan oleh manajemen.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka memantau tindak lanjut temuan hasil audit. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan perbaikan sesuai dengan komitmen dan saran yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik, OJK, BI, BPK dan Satuan Kerja Audit Internal atau regulator lainnya. Pelaksanaan pemantauan dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin dengan Satuan Kerja Audit Internal dan apabila dipandang perlu akan mengundang Direksi/Divisi terkait atau unit kerja terkait.

Realisasi pelaksanaan evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris atas Perencanaan Audit Tahunan Tahun 2018 dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit ditargetkan sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	*Output*
1	Evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris atas Perencanaan Audit Tahunan Tahun 2018	08 Mei 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi dalam surat Dewan Komisaris B.77-KOM/05/2018 Tentang Evaluasi Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2018
2	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Semester II Tahun 2017	27 Februari 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi R.22-KOM/02/2018 tentang Laporan Hasil Audit Semester II Tahun 2018

No	Materi	Realisasi Waktu	*Output*
3	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Triwulan I Tahun 2018	8 Juni 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor R.11-KA/05/2018 tentang Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2018
4	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern dan Terintegrasi Triwulan II Tahun 2018	21 Agustus 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor : R.62-KOM/08/2018 tentang Laporan hasil Audit Triwulan II Tahun 2018
5	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Triwulan III Tahun 2018	11 Desember 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: R.82-KOM/12/ tentang Laporan hasil Audit Triwulan III Tahun 2018

10. Evaluasi pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi DPLK BRI dan Evaluasi Kinerja DPLK BRI

Dewan Komisaris selaku Pengawas DPLK BRI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi DPLK BRI dan Evaluasi Kinerja DPLK BRI.

Realisasi pengawasan tersebut tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Materi	Realisasi Waktu	*Output*
1	Evaluasi pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi DPLK BRI tahun buku 2017.	26 Juni 2018	Surat Dewan Komisaris No. R.46-KOM/06/2018 tentang Laporan Evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa Audit atas informasi keuangan historis DPLK BRI thun buku 2018 & KAP NSS
2	Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI Semester II 2017	13 Februari 2018	Surat Dewan Komisaris Kepada Pengurus DPLK No : R.13-KOM/02/2018 tentang Kinerja keuangan dan investasi DPLK BRI tahun 2017
3	Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI Semester I 2018	30 Juli 2018	Surat Dewan Komisaris Kepada Pengurus DPLK No R.50-KOM/07/2018 tentang Laporan evaluasi kinerja Investasi DPLK BRI Semester I Tahun 2018

11. *Review* Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai POJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank setiap semester yang telah mendapat persetujuan Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan yang mencakup penilaian profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Dewan Komisaris

Evaluasi Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Materi	Realisasi Waktu	Output dan Rekomendasi	Keterangan
1	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Juli - Desember 2017	14 Maret 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.41-KOM/03/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester II tahun 2017, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2017.	Berdasarkan hasil komposit *self-assessment* dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, Peringkat Tingkat Kesehatan BRI semester II tahun 2017 berada pada peringkat 2 (sehat) dengan rincian sebagai berikut : · Profil Risiko : Peringkat 2 (sehat) · GCG : Peringkat 2 (sehat) · Rentabilitas : Peringkat 1 (sangat sehat) · Permodalan : Peringkat 1 (sangat sehat) Kondisi BRI pada periode Semester II Tahun 2017 secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Januari - Juni 2018	20 September 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.165 - KOM/09/2018 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester I tahun 2018, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester I Tahun 2018	Berdasarkan hasil komposit *self assessment* dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, Peringkat Tingkat Kesehatan BRI semester I tahun 2018 berada pada peringkat 2 (sehat) dengan rincian sebagai berikut : · Profil Risiko : Peringkat 2 (sehat) · GCG : Peringkat 2 (sehat) · Rentabilitas : Peringkat 1 (sangat sehat) · Permodalan : Peringkat 1 (sangat sehat) Kondisi BRI pada periode Semester I Tahun 2018 secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

12. Evaluasi Kebijakan dan Penerapan Tata Kelola DPLK

Sesuai POJK No 16/POJK.05/ 2016, tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, Dewan Pengawas membuat laporan pengawasan secara berkala memuat tentang evaluasi kinerja atas laporan keuangan, investasi, penerapan GPFG/ GCG.

Pelaksanaan *Review* dan evaluasi kinerja dan kebijakan dan Tata Kelola DPLK tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Materi	Target Waktu	Output
1.	Evaluasi implementasi tata kelola DPLK BRI	26 Juni 2018	Surat Dewan Komisaris Kepada Pengurus DPLK No : B.101-KOM/06/2018 tentang Evaluasi implementasi tata kelola DPLK BRI

13. *Review* dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, maka perlu didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun otoritas berwenang lainnya.

Dewan Komisaris melakukan *Review* dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terutama terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku menyangkut pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain berupa Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (CAR), BMPK, Posisi Devisa Neto (PDN), Transaksi Derivatif, Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valuta Asing, dan Tingkat Kredit Bermasalah (NPL). Apabila hasil *Review* bulanan Dewan Komisaris diketahui terjadi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris akan memberikan saran dan pendapat paling lambat dua minggu setelah laporan diterima.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga melakukan *Review* dan evaluasi terhadap Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, sesuai dengan POJK 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Review dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Materi	Realisasi Waktu	Output	Keterangan
1.	*Review* dan evaluasi pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2017	14 Maret 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.41-KOM/03/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester II tahun 2017, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2017.	· Pada Semester II tahun 2017 terdapat 266 pengujian prinsip kehati-hatian terhadap Putusan Kredit dan Non Perkreditan, Perjanjian Kerjasama Bidang Kredit dan Non Perkreditan dan Kebijakan Kredit dan Non Perkreditan. · 145 Pemberian tanggapan Kepatuhan dan Pelaksanaan *Review* Kebijakan Internal. · 85 Resume & Analisis Dampak · Pemantjauan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang meliputi CAR, BMPK, NPL, PDN, transaksi Derivatif dan LCR tidak melanggar ketentuan yang berlaku. · Risiko Keptuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (*Low to Moderate*) menurut *assessment* OJK.

Dewan Komisaris

No	Materi	Realisasi Waktu	Output	Keterangan
2.	*Review* dan evaluasi pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2018	20 September 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.165 - KOM/09/2018 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester I tahun 2018, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester I Tahun 2018	• Pada Semester I tahun 2018 terdapat 163 pengujian prinsip kehati-hatian terhadap Putusan Kredit dan Non Perkreditan, Perjanjian Kerjasama Bidang Kredit dan Noon Perkreditan dan Kebijakan Kredit dan Non Perkreditan. • 119 Pemberian tanggapan Kepatuhan dan Pelaksanaan *Review* Kebijakan Internal. • 44 *Resume* & Analisis Dampak • Pemantjauan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang meliputi CAR, BMPK, NPL, PDN, transaksi Derivatif dan LCR tidak melanggar ketentuan yang berlaku. • Risiko Keptuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (*Low to Moderate*) menurut *assessment* OJK.

14. Review dan Evaluasi Profil Risiko

Dewan Komisaris melakukan *review* dan evaluasi terhadap penilaian profil risiko yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan (*inherent risk*) yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Pelaksanaan *review* dan evaluasi terhadap penilaian profil risiko adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output	Keterangan
1.	Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017	14 Maret 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.41-KOM/03/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester II tahun 2017, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2017.	Peringkat Profil Risiko pada Triwulan IV Tahun 2017 secara komposit pada peringkat 2 (dua) atau *Low to Moderate*.

No	Materi	Realisasi Waktu	Output	Keterangan
2.	Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2018	4 Juni 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Dewan Komisaris Nomor: B.94 - KOM/06/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2018	Peringkat Profi risiko pada Triwulan I Tahun 2018 secara komposit tetap pada peringkat 2 (dua) atau *Low to Moderate*.
3.	Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2018	20 September 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.165 - KOM/09/2018 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester I tahun 2018, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester I Tahun 2018	Peringkat Profi risiko pada Triwulan II Tahun 2018 secara komposit tetap pada peringkat 2 (dua) atau *Low to Moderate*.
4.	Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2018	18 Desember 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Dewan Komisaris Nomor B.267/KOM/12/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2018	Peringkat Profi risiko pada Triwulan III Tahun 2018 secara komposit tetap pada peringkat 2 (dua) atau *Low to Moderate*.

15. Review Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum bahwa bank disyaratkan untuk membangun 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan satu sama lain yaitu:

a. Pencegahan;
b. Deteksi;
c. Investigasi, pelaporan dan sanksi;
d. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, BRI wajib menerapkan manajemen risiko di mana pengawasan aktif dari Dewan Komisaris merupakan salah satu aspek penting dari manajemen risiko. KPMR akan melakukan evaluasi secara berkala mengenai penerapan empat pilar strategi pengendalian *fraud* di BRI.

Pelaksanan *review* dan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	*Output*
1.	Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II 2017	14 Maret 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.41-KOM/03/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester II tahun 2017, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2017.

Dewan Komisaris

No	Materi	Realisasi Waktu	*Output*
2.	Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I 2018	20 September 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.165 - KOM/09/2018 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester I tahun 2018, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester I Tahun 2018

16. Review Laporan Pelaksanaan Program APU PPT

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Otoritas Jaka Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum bahwa Bank wajib menerapkan program APU PPT. Ayat (1) pasal 5 menyatakan bahwa program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal 5 dinyatakan bahwa penerapan program APU PPT mencakup pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Pelaksanaan *review* secara berkala terhadap Pelaksanaan Program APU PPT tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Materi	Realisasi Waktu	*Output*
1.	Laporan Pelaksanaan Program APU PPT Semester II Tahun 2017	14 Maret 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.41-KOM/03/2018 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester II tahun 2017, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2017.
2.	Laporan Pelaksanaan Program APU PPT Semester I Tahun 2018	20 September 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui Surat Dewan Komisaris Nomor: B.165 - KOM/09/2018 tentang Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Semester I tahun 2018, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* Semester I Tahun 2018

17. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank.

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process dan governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Hasil penilaian *governance outcome* juga mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Review Pelaksanaan GCG Tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	*Output*	Keterangan
1.	*Self assesment* periode Semester II Tahun 2017	08 Januari 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Dewan Komisaris Nomor: B.03-Sekkom/01/2018 Pelaksanaan *Self Assessment* GCG Semster II 2017	GCG Bank BRI pada Semester II Tahun 2017 mendapat peringkat 1 (Sangat Baik) melalui *self assessment* GCG BRI, namun terdapat penyesuaian nilai oleh OJK menjadi peringkat 2 (Baik).
2.	*Self assesment* periode Semester I Tahun 2018	3 Juli 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Dewan Komisaris Nomor: B.40 -Sekkom /07/2018 tentang Pelaksanaan *Self assessment* GCG Semester I 2018	GCG Bank BRI pada Semester I Tahun 2018 mendapat peringkat 2 (Baik) menurut *self assessment* GCG BRI dan penilaian OJK.

18. Review Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa Keuangan. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Otoritas Jasa Keuangan, Audit paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun buku berakhir.

Ruang lingkup kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terhadap KAP antara lain meliputi:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Dewan Komisaris

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik yang dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahun keuangan 2017 oleh KAP Purwanto Sungkoro Surja (KAP PSS EY) dan Evaluasi pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2017 oleh KAP Noor Salim, Sursehan & Sinarahardja (KAP NSS) dengan rincian sebagai berikut :

No	Evaluasi KAP	Ruang Lingkup Evaluasi			
		Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dan/atau KAP dengan Standar Audit Yang Berlaku	**Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan**	**Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik**	**Rekomendasi perbaikan yang diberikan.**
1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahun keuangan 2017 oleh KAP Purwanto Sungkoro Surja (KAP PSS EY)	Pelaksanaan audit oleh KAP PSS EY dilakukan sesuai dengan dengan Standar audit yang berlaku. Standar audit Yang digunakan sebagai acuan, antara lain, Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [POJK].	KAP PSS Telah memiliki *time table* audit untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ruang lingkup audit. Dalam pelaksanaannya, KAP PSS telah menyelesaikan seluruh agenda pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam time table audit tersebut. Dalam pelaksanaan audit berdasarkan *time table* Audit tersebut, KAP PSS telah menyelesaikan isu-isu akuntansi yang ditemukan di lapangan, termasuk estimasi dan judgement yang signifikan yang terjadi. Ketersediaan data dari unit kerja di BRI yang dibutuhkan oleh KAP PSS secara tepat waktu telah mendukung pelaksanaan audit Sesuai dengan *time table* audit yang sudah disepakati.	Berdasarkan diskusi dengan KAP PSS. Komite Audit meyakini bahwa risiko Audit (Identifikasi *inherent risk*, dan *control risk* serta meminimalkan *detection risk*) dapat diminimalkan melalui perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit yang diidentifikasi telah memadai untuk dapat mendeteksi *material miss statement* di dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan, baik yang disebabkan *error*. Dengan demikian, Komite Audit meyakini bahwa KAP PSS telah melakukan pengujian atas transaksi dengan jumlah Uji Petik yang memadai.	Rekomendasi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: R.45 -KOM/06/2018 tanggal 8 Juni 2018

No	Evaluasi KAP	Ruang Lingkup Evaluasi			
		Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dan/atau KAP dengan Standar Audit Yang Berlaku	Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan	Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik	Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
2	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2017 oleh KAP Noor Salim, Sursehan & Sinarahardja (KAP NSS).	Pelaksanaan audit oleh KAP NSS dilakukan sesuai dengan dengan standar audit yang berlaku. Standar audit Yang digunakan sebagai acuan, antara lain, standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	Ketersediaan data secara tepat waktu yang dibutuhkan KAP NSS sesuai *time table* audit yang sudah disepakati.	Komite Audit meyakinkan bahwa cakupan jasa yang diberikan kepada KAP NSS telah sesuai dengan standar*auditing* yang berlaku, tidak ada penugasan asuransi dan non-asurans yang dilakukan bersamaan.	Rekomendasi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: R.46 -KOM/06/2018 tanggal 26 Juni 2018

Berdasarkan Evaluasi KAP tersebut di atas Komite Audit berkeyakinan bahwa pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 oleh KAP PSS telah dan Audit Atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2017 oleh KAP Noor Salim, Sursehan & Sinarahardja (KAP NSS) sesuai dengan standar audit yang berlaku.

19. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka memantau tindak lanjut temuan hasil audit. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan perbaikan sesuai dengan komitmen dan saran yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik, OJK, BI, BPK dan Audit Intern. Pelaksanaan pemantauan dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin dengan Satuan Kerja Audit Internal dan apabila dipandang perlu akan mengundang Direksi/Divisi terkait atau mendalami di unit kerja terkait.

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan audit adalah sebagai berikut:

No	Materi	Waktu Pelaksanaan	*Output*
1.	*Management Letter* atas audit umum laporan keuangan Tahun 2017	22 Agustus 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Nomor: B.142-KOM/08/2018 tentang Tindak lanjut management letter hasil audit umum atas laporan keuangan BRI Tahun buku 2017 oleh KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Surya (EY)

Dewan Komisaris

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut tersebut diatas Dewan Komisaris telah menyempaikan rekomendasi kepada Manajemen antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya sadar risiko (*risk culture*) pada setiap unit kerja BRI terutama dalam aktifitas perkreditan dan operasional, sehingga terdapat keseragaman pemahaman terhadap bisnis proses guna meminimalisir terjadinya *human error;*
b. Setiap pemimpin Unit Kerja BRI harus meastikan bahwa fungsi pengendalian melekat, yaitu fungsi *"maker", "checker",* dan *"signer"* pada setiap bisnis proses dan aktifitas telah berjalan secara efektif;
c. Pekaksanaan restrukturisasi kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk mematuhi peraturan dan ketentuan baik internal maupun eksternal;
d. Memastikan bahwa pengembangan aplikasi LAS *Trade Finance* dan implementasinya telah dilaksanakan secara baik dan efektif sehingga rekonsiliasi dan pencatatan transaksi L/C, Bank Garansi, dan SBLC menjadi lebih akurat;
e. Menyempurnakan dan mengembangkan system penatausahaan dan kearsipan di seluruh Unit Kerja BRI sehingga penatausahaan dokumen dapat dilakukan secara rapid an lengkap guna memudahkan *audit trail* dan berfungsi sebagai *alert system* yang efektif guna menghindari potensi kerugian BRI;
f. SKAI beserta Audit Intern Wilayah (AIW) harus memastikan bahwa komitmen/ *action plan* dengan status "Selesai" telah benar-benar sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, termasuk komitmen dan perbaikan-perbaikan tersebut telah dilakukan secara baik dan efektif oleh Unit Kerja terkait sehingga tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan dating;
g. Menindaklanjuti komitmen-komitmen dan tindak lanjut *(action plan)* yang masih berstatus "Pantau" dan memastikan bahwa seluruh komitmen atau *action plan* tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah menjadi komitmen.

20. Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Rangkain Audit Laporan Keuangan BRI.

Pelaksanaan pengadaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Rangka Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018 dilaksanakan di bawah koordinasi Dewan Komisaris BRI melalui Komite Audit dengan menggunakan ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, bahwa Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas; dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

Dewan Komisaris telah melakukan proses seleksi dan penunjukan KAP sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris NOKEP: 01-KOM/BRI/01/2018 tanggal 25 Januri 2018 ditetapkan bahwa proses pengadaan Jasa Audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Tim Pengadaan dibawah koordinasi Komite Audit.
b. Tim Teknis, adalah tim yang bertugas antara lain membuat ruang lingkup, menyampaikan alokasi anggaran pengadaan jasa KAP, mempersiapkan Terms of Reference (TOR) dan melakukan penilaian teknis calon KAP yang akan ditunjuk berdasarkan kriteria teknis dan pengalaman masing-masing KAP serta meminta kepada Tim Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan.

c. Tim Penyusun HPS yang bertugas antara lain menyusun dan menganalisa Harga Perkiraan Sendiri/ *Owner Estimate* Pengadaan Jasa KAP Laporan Keuangan BRI dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
d. Tim Pengadaan adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan proses pengadaan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain mencakup mengusulkan harga perkiraan
e. Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang disampaikan Komite Audit terkait dengan proses pengadaan jasa audit Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL Perseroan Tahun Buku 2018, Dewan Komisaris telah memutuskan dan menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagai KAP yang akan melakukan tugas dengan Surat Perintah Kerja B.284.P-PBJ/PJN/03/2018 tanggal 9 Maret 2018. Adapun ruang lingkup Pelaksanaan Audit oleh KAP yang ditunjuk meliputi hal-hal sebagai berikut:
    1. Audit umum dan memberikan opini atas laporan keuangan Tahun 2018 konsolidasi Perseroan dan entitas anak yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
    2. Audit umum dan memberikan opini atas laporan keuangan PKBL Perseroan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

21. Review atas Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Profil Risiko Terintegrasi

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, maka perlu didukung dengan pengendalian intern guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan penyelesaian action plan atas semua risiko yang terjadi dan pelanggaran pengendalian intern.

Review dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Intern Terintegrasi dilakukan secara Semesteran dengan memperhatikan Laporan Semesteran Direktur Kepatuhan Perseroan dan LJK anggota konglomerasi Perseroan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan juga dengan memperoleh penjelasan melalui presentasi dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Disamping itu Dewan Komisaris melalui KTKT melakukan *Review* dan evaluasi terhadap Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Pelaksanaan *review* atas kecukupan pengendalian internal terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	*Output*
Hasil *Review* Laporan Hasil Kepatuhan Terintegrasi Semester II Tahun 2017	11 Mei 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Dewan Komisaris Nomor: B.83-KOM/05/ tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi Semester II 2017.
Review hasil Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2017	21 Juni 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris melaui surat Nomor: B.98-KOM/06/2018 tentang Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2017

Dewan Komisaris

Materi	Realisasi	*Output*
Hasil *review* Laporan Hasil Audit Terintegrasi Semester II Tahun 2017	8 Mei 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris melaui surat Nomor: B.81-KOM/05/2018 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester II Tahun 2017
Hasil *review* Laporan Hasil Kepatuhan Terintegrasi Semester I Tahun 2018	7 Agustus 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melaui surat Dewan Komisaris Nomor: B.129-KOM/08/2018 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi Semester I 2018.
Review hasil Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2018	12 November 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris melaui surat Nomor: B.219-KOM/11/2018 tentang Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2018

22. Persetujuan Aksi Korporasi Pada Perusahaan Anak

Setiap aksi korporasi yang meliputi tambahan modal pada perusahaan anak, penyertaan/akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan dan rencana strategis lainnya harus mendapat persetujuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Peseroan harus persetujuan Dewan Komisaris.

Persetujuan Aksi Korporasi berupa tambahan modal pada perusahaan anak, penyertaan/akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan dan rencana strategis lainnya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Materi	Realisasi	*Output*
1	Tambahan Modal pada PT Bank BRIsyariah sebesar Rp1 Triliun	8 Januari 2018	Surat Dewan Komisaris No. R.02-KOM/01/2018 tentang Persetujuan atas Penyertaan pada Modal pada PT Bank BRIsyariah
2	Tambahan Modal pada PT Bank BRIsyariah sebesar Rp600 Miliar	20 Februari 2018	Surat Dewan Komisaris No. R.17-KOM/02/2018 tentang Persetujuan atas Penyertaan pada Modal pada PT Bank BRIsyariah
3	Penawaran Umum Perdana Saham BRIsyariah	23 April 2018	Surat Dewan Komisaris No. R.39-KOM/04/2018 tentang Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham BRIsyariah
4	Tambahan Modal BRI Agro tahun 2018 dan rencana program MESOP BRI Agro dengan cara : 1. Eksekusi waran senilai Rp69.954.770.210,-; 2. Eksekusi HMETD senilai Rp.975 Miliar; 3. MESOP BRI Agro sebanyak 350.000.000 lembar saham.	8 Mei 2018	Surat Dewan Komisaris No. R.41-KOM/05/2018 tentang Persetujuan atas Penyertaan pada Modal pada PT Bank BRIsyariah

No	Materi	Realisasi	*Output*
5	Penyertaan Modal pada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura dengan cara : 1. Pembelian saham NTT Ventura sebanyak 97,61% dengan nilai Rp3.090.096.336,- 2. Menambah penyertaan modal pada NTT Ventura sebesar Rp200 Miliar	26 September 2018	Surat Dewan Komisaris No. R.67-KOM/09/2018 tentang Persetujuan atas Penyertaan pada Modal pada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura
6	Penyertaan Modal Pada PT Danareksa Sekuritas sebesar sebesar 67% dengan nilai harga wajar	27 September 2018	Surat Dewan Komisaris No R.68-KOM/09/2018 tentang Persetujuan atas Penyertaan pada Danareksa Sekuritas
7	Penyertaan Modal Pada PT Danareksa Invesment Managemen sebesar 35% dengan nilai harga wajar.	27 September 2018	Surat Dewan Komisaris No R.69-KOM/09/2018 tentang Persetujuan atas Penyertaan pada Danareksa Invesment Management

23. Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Dewan Komisaris melakukan *Review* dan persetujuan terhadap pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan Anak atau Pihak Terkait lainnya dengan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Peseroan dan atau Surat Edaran Direksi Perseroan.

Persetujuan pemberian fasilitas penyediaan dana kepada perusahaan anak atau pihak terkait tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	*Output*
1.	Penyedian dana kepada pihak terkait an. PT. BRINS	9 Januari 2018	Surat Dewan Komisaris No : R.03-KOM/01/2018 tentang Persetujuan atas Penyedian dana kepada pihak terkait an. PT. BRINS
2.	Penyedian dana kepada kepada pihak terkait an A. Fuad Rahmany	3 Juli 2018	Surat Dewan Komisaris No : R.48-KOM/07/2018 tentang Persetujuan atas Penyedian dana kepada pihak terkait an. A Fuad Rahmany
3.	Penyedian dana kepada kepada pihak terkait an A. Fuad Rahmany	13 November 2018	Surat Dewan Komisaris No : R.73-KOM/10/2018 tentang Persetujuan atas Penyedian dana kepada pihak terkait an. A Fuad Rahmany

Dewan Komisaris

24. Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat terhadap setiap pemberian kredit yang memenuhi kriteria kredit yang harus dikonsultasikan Direksi kepada Dewan Komisaris sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi Perseroan. Konsultasi kredit tersebut dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah terdapat putusan kredit oleh Direksi.

Selama tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 3 kali Konsultasi Kredit dengan rincian sebagai berikut :

No	Materi	Realisasi	*Output*
1	Konsultasi Kredit 6 Debitur	6 Februari 2018	Surat Dewan Komisaris No : R.12-KOM/02/2018 tentang Konsultasi Kredit
2	Konsultasi Kredit 4 Debitur	3 Agustus 2018	Surat Dewan Komisaris No : R.55-KOM/08/2018 tentang Konsultasi Kredit
3	Konsultasi Kredit 4 Debitur	23 Agustus 2018	Surat Dewan Komisaris No : R.60-KOM/08/2018 tentang Konsultasi Kredit

25. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai kegiatan operasional dan implementasi kebijakan Perseroan di unit kerja. Kegiatan operasional unit kerja yang dievaluasi pada pokoknya meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan operasional di unit kerja yang bersangkutan, seperti perkreditan, pendanaan, layanan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan aspek lainnya. Hasil kunjungan kerja dapat dijadikan sebagai bahan Dewan Komisaris dalam merumuskan rekomendasi penyempurnaan dan/atau dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan.

Kunjungan Kerja selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja		Komisaris	Pelaksanaan	Laporan Kunjungan
1	Pekanbaru	Kanca Batam Nagoya, Kanca Batam Center, Kanca Singapore	Andrinof A Chaniago	26-28 Maret	B.04-KOM/04/2018
2	Padang	Kanwil Padang, Unit Tarusan, Kanca Painan	Andrinof A Chaniago	20 - 22 April	
3	Lampung	Kanca Bengkulu, Kanca Curup, Unit Kembang Seri	Andrinof A Chaniago	24-26 Juni 5-6 Juli	B.12-KOM/07/2018
4	Hongkong	BRI Remitence	Andrinof A Chaniago	29 April - 1 Mei	B.09-KOM/05/2018
5	Jakarta 1	Kanwil Jakarta 1	Gatot Tri Hargo	23-Feb	
6	Jakarta 3	Kanca Mempawah, Kanca Singkawang	Gatot Tri Hargo	30 Agus - 1 Sep	B.15-KOM/09/2018
7	Bandung	1. Kanwil Bandung, 2. Kanca Purwakarta, 3. Kanca Subang, 4. Sendik Bandung	A. Fuad Rahmany	12 - 13 April	B.07-KOM/04/2018
8	Banda Aceh	KCP Sabang	A. Fuad Rahmany		B.22-KOM/10/2018
9	Surabaya	Kanca Mojokerto, Kanca Jombang	Rofikoh Rokhim	10 - 12 Mei	B.10-KOM/05/2018
10	Makassar	1. Kanca Ambon, 2. Unit Kairatu 3. Kanca Masohi	Rofikoh Rokhim	12 - 14 April	B.06-KOM/04/2018
11		1. Atambua 2. Timor Leste	Rofikoh Rokhim	9-11 September	B.17-KOM/09/2018

Dewan Komisaris

No.	Unit kerja		Komisaris	Pelaksanaan	Laporan Kunjungan
12	Jayapura	Kanca Manokwari, Nabire, wamena	A. Sonny Keraf		B.19-KOM/09/2018
13	Banjarmasin	Kanca Balikpapan, Tanah grogor, Sangatta	A. Sonny Keraf		B.20-KOM/10/2018
14	Denpasar	1. Kanwil Denpasar, 2. Kanins Denpasar, 3. Kanca Negara, Bangli 4. Kanca Singaraja, 5. KCP BRI Unit	A. Sonny Keraf	7-9 Maret	B.01-KOM/03/2018
15	Semarang	Kanwil Semarang	Mahmud		B.25-KOM/11/2018
16	Pekanbaru	Kanwil Pekanbaru, AIN Wilayah Pekanbaru, Kanca Pekanbaru Sudirman, Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai, Unit Simpang Baru, Cabang Batam Nagoya, Cabang Batam Center, KCP Botania,	Mahmud	10-12 Oktober	B.21-KOM/10/2018
17	Yogyakarta	Kanwil Yogyakarta,Kanca Purwokerto,Kanca Bayumas,Kanca Bantul	Nicolaus TB Harjanto	18 - 21 April	B.08-KOM/04/2018
18	Palembang	Jambi	Nicolaus TB Harjanto	15-17 November	B.14-KOM/08/2018
19	Yogyakarta	Kanwil Yogyakarta	Nicolaus TB Harjanto	30 Agus - 1 Sep	B.16-KOM/09/2018
20	Palembang	Kanwil Palembang	Nicolaus TB Harjanto		B.23-KOM/11/2018
21	Medan	1. Kanca Tarutung, 2. KCP Siborong Borong, 3. Unit Siborong, 4. Teras Tomok	V. Sonny Loho	14 - 17 Maret	B.02-KOM/03/2018
22	Malang	1. Kanwil Malang 2. BRI Unit Singosari I 3. Kanca Malang Martadinata	Hadiyanto	28 – 29 November 2018	B.24-KOM/12/2018
23	Manado	1. Kanca Airmadidi, 2. Unit Bersehati, 3. Kanwil Manado	Jeffry J. Wurangian	4 - 6 Aprl	B.5-KOM/04/2018
24	Manado	1. Kanca Tahuna 2. Kanwil Manado	Jeffry J. Wurangian	26 - 29 Mei	B.11-KOM/06/2018
25	Newyork Agency	Newyork Agency	Jeffry J. Wurangian	7 Maret 2018	B.03-KOM/03/2018
26	Manado	Kanca Tahuna, Kanca Tondano	Jeffry J. Wurangian	16-19 September	B.18-KOM/09/2018
27	Jakarta 2	Kanwil Jakarta 2	Hadiyanto	27 Desember	B.24-KOM/12/2018

26. Pengawasan yang bersifat khusus

Pengawasan yang bersifat khusus dilakukan terhadap hal-hal yang dianggap perlu pendalaman lebih lanjut atau hal-hal yang bersifat st*rate*gis dan memerlukan keputusan segera. Dalam Tahun 2018, permasalahan khusus yang menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah:

a) Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi (IT), termasuk transformasi pengembangan IT dan Digital Banking BRI ;
b) Pengelolaan Manajemen risiko, khususnya terkait dengan upaya peningkatan pengelolaan risiko operasional dan likuiditas;
c) Optimalisasi struktur pendanaan dan memperbaiki sumber dana berbiaya murah (CASA), melalui program-program yang terstruktur terkait intensifikasi akuisisi dan retensi nasabah, serta dana-dana ritel yang tidak sensitif terhadap suku bunga.
d) Pengembangan perusahaan anak (Bank BRI Agro, Bank BRIsyariah, BRI Life & BRI Finance), antara lain terkait dengan rencana penambahan penyertaan modal pada perusahaan anak, tata kelola perusahaan anak dalam kerangka tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi dan *alignment* bisnis perusahaan anak dengan Perseroan sebagai induk.
e) Pengembangan solusi dan layanan transaksional, serta akses *e-channel* yang terintegrasi terkait *business model* menuju *digital banking*.
f) Restrukturisasi kredit menengah & korporasi dan *Review* portofolio aktiva produktif.
g) Evaluasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BRI.
h) Progress pengembangan *Core Banking System* (CBS) BRI.
i) Pengembahan SDM dalam rangka mewujudkan Visi BRI sebagai *home to the best talent* serta proses transformasi melalui program Brivolution untuk menghadapai era digital banking dan Fintech.

Pengembangan Manajemen Information System (MIS) yang berbasis Big Data sehingga seluruh data yang ada di BRI tersusun dengan baik, terintegrasi dan bermanfaat dalam mengembangkan bisnis, mengambil keputusan st*rate*gis, pengelolaan manajemen risiko, kegiatan marketing dan lain sebagainya secara lebih cepat, tepat, murah, efisien dan terstruktur.

JENIS-JENIS KEPUTUSAN YANG MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS 2018

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi. Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
19-Jan-18	B.11-KOM/01/2018	Ijin prinsip rencana kerjasama pinjam pakai sebagain gedung sebagian gedung BRI proklamasi
19-Jan-18	B.12-KOM/01/2018	Penyelesaian sisa dana kegiatan program BL BRI Peduli
20-Feb-18	B.19-KOM/02/2018	Dokumen rencana aksi (*Recovery Plan*) PT. BRI (Persero) Tbk
08-May-18	B.77-KOM/05/2018	Persetujuan perencanaan audit tahunan (PAT) SKAI th 2018
18-May-18	B.86-KOM/05/2018	Persetujuan usulan perubahan organisasi BRI
05-Sep-18	B.145-KOM/09/2018	Permohonan persetujuan perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT
06-Sep-18	B.146-KOM/09/2018	Usulan thershold atas tindakan direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris BRI dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
08-Sep-18	B.164.a-KOM/09/2018	Persetujuan kebijakan perkredian
15-Oct-18	B.198-KOM/10/2018	Pengadaan jasa audit KAP

Dewan Komisaris

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
07-Nov-18	B.218-KOM/11/2018	Usulan pemberian kewenangan kepada direksi untuk memutus penghapusbukuan aktiva tetap
15-Nov-18	B.227-KOM/2018	Ijin pelaksanaan jasa audit KAP untuk laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun 2018
21-Nov-18	B.229-KOM/11/2018	Persetujuan atas penyertaan pendiri dalam rangka perubahan peraturan dana pensiun BRI
27-Nov-18	B.239-KOM/11/2018	Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT BRI (Persero) Tbk
06-Dec-18	B.254-KOM/12/2018	Penyampaian kembali usulan *threshold* atas tindakan direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna
08-Jan-18	SR.02-KOM/01/2018	Persetujuan bakal calon Komisaris dan Direksi PT. BRIsyariah
05-Apr-18	SR.08-KOM/04/2018	Permohonan persetujuan bakal calon anggota Komisaris dan Direksi BRI Agroniaga
17-Apr-18	SR.09-KOM/04/2018	Permohonan persetujuan bakal calon anggota Komisaris dan Direksi PT Bahana Artha Ventura
17-Apr-18	SR.10-KOM/04/2018	Penetapan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura
22-May-18	SR.13-KOM/05/2018	Persetujuan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi BRI Multifinance indonesia (BRI Finance)
07-Jun-18	SR.14-KOM/06/2018	Persetujuan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi BRI Life
24-Jul-18	SR.16-KOM/07/2018	Persetujuan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
08-Jan-18	R.02-KOM/01/2018	Persetujuan tambahan modal PT Bank BRIsyariah
09-Jan-18	R.03-KOM/01/2018	Penyedian dana kepada pihak terkait an. PT. BRINS
15-Jan-18	R.07-KOM/01/2018	Penggantian Kepala Divisi sekretariat perusahaan BRI
19-Feb-18	R.16-KOM/02/2018	Persetujuan HPS pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tahun 2018
20-Feb-18	R.17-KOM/02/2018	Persetujuan tambahan modal PT. Bank BRIsyariah
22-Feb-18	R.19-KOM/02/2018	Persetujuan *review* HPS Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik tahun 2018
06-Mar-18	R.29-KOM/03/2018	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2018
16-Mar-18	R.30-KOM/03/2018	Pengadaan jasa konsultan terkait penyusunan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris & Direksi
20-Mar-18	R.33-KOM/03/2018	Rekomendasi Komite audit atas penunjukkan KAP tahun 2018
23-Apr-18	R.39-KOM/04/2018	Persetujuan pelaksanaan penawaran umum perdana saham BRIsyariah Th 2018
08-May-18	R.41-KOM/05/2018	Persetujuan tambahan modal BRI Agro Tahun 2018 dan rencana program MESOP dan LTI BRI Agro
06-Jun-18	R.43-KOM/06/2018	Persetujuan Revisi RBB th 2018-2020 dan RKAP tahun 2018
03-Jul-18	R.48-KOM/07/2018	Penyediaan dana kepada pihak terkait Sdr Ahmad Fuad Rahmany
26-Sep-18	R.67-KOM/09/2018	Persertujuan aas rencana penyertaan modal pada PT Sarana Nusa tenggara timur ventura
27-Sep-18	R.68-KOM/09/2018	Persetujuan penyertaan modal pada PT Danareksa Sekuritas
27-Sep-18	R.69-KOM/09/2018	Persetujuan penyertaan modal pada PT Danareksa Invesment Managemen
21-Nov-28	R.75-KOM/11/2018	Persetujuan pedoman kerjasama pendayagunaan aktiva tetap BRI
21-Nov-28	R.76-KOM/11/2018	Persetujuan RBB tahun 2019- 2021 dan RKAP tahun 2019
27-Nov-18	R.78-KOM/11/2018	Persetujuan dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) BRI tahun 2019-2023

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen wajib terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya.

Keberadaan Komisaris Independen adalah untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Kriteria Komisaris Independen

BRI memiliki sebanyak 5 (lima) Komisaris Independent dari total 9 (Sembilan) anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen BRI telah melebihi jumlah minimal 50% anggota Komisaris Independen sesuai dengan jumlah yang disyaratkan oleh POJK Nomor 55/ POJK.03/2016.

Adapun kriteria Komisaris Independen BRI adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BRI atau pun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/ Perusahaan bukan keuangan, BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta.
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
6. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
7. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
8. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pernyataan Independensi

Seluruh Komisaris Independen BRI secara bersama-sama telah menyampaikan pernyataan sebagai Komisaris Independen.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Andrinof A. Chaniago, Komisaris Utama/Komisaris Independen**
2. **A. Fuad Rahmany, Komisaris Independen**
3. **Mahmud, Komisaris Independen**
4. **A. Sonny Keraf, Komisaris Independen**
5. **Rofikoh Rokhim, Komisaris Independen**

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 19 Desember 2017
Komisaris Independen
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen

Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama / Komisaris Independen

Rofikoh Rokhim*
Komisaris Independen

A. Sonny Keraf
Komisaris Independen

Mahmud
Komisaris Independen

**) Efektif setelah dinyatakan lulus Fit & Proper Test OJK*

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Dewan Komisaris Badan usaha Milik negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya, Peraturan Direksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar BRI.

KRITERIA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Kriteria

Kriteria Direksi BRI telah memenuhi persyaratan sebagai mana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sebagai berikut:

Kualifikasi Umum
1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik negara, Badan usaha Milik daerah, badan usaha milik swasta; b. anggota Dewan Komisaris/dewan Pengawas pada Badan usaha Milik negara; c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; d. pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Kualifikasi Umum
Pemenuhan PBI No. 12/23/2010 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*)
Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (dahulu Bank Indonesia).
Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank (SEOJK 39/ SEOJK.03/2016)
Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
Persyaratan Integritas
Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi wajib memiliki: a. Akhlak dan moral yang baik; b. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan d. Tidak termasuk dalam daftar Tidak lulus.

Pengangangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan

Prosedur pengangkatan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. calon anggota Direksi yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan kompetensi terlebih dahulu di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi BRI melalui penelurusan pengalaman professional dan riwayat hidup. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Nota Dinas Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Dewan Komisaris atas dasar Rapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan persetujuan atas calon anggota Direksi. Hasil putusan rapat Dewan Komisaris tersebut sekaligus menjadi dasar rekomendasi calon Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Calon anggota Direksi kemudian diangkat melalui keputusan RUPS yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu kepada POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Penilaian OJK dilaksanakan melalui antara lain penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka BRI melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

Pemberhentian

Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:

a. Meninggal dunia
b. Masa jabatannya berakhir
c. Diberhentikan dalam RUPS, disebabkan alasan yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
d. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk rangkap jabatan yang dilarang, maupun pengunduran diri.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Direksi

Pengungkapan Kebijakan Direktur Pengganti dan SEVP

Dalam memastikan kelancaran dan efektivitas operasional perusahaan pada saat Direktur dan SEVP berhalangan hadir, BRI memiliki kebijakan Penetapan Direktur Pengganti yang tertuang dalam SK Direksi BRI No. S.20-DIR/CDS/05/2017.

Direktur Pengganti

1. Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur Pengganti pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan Direktur yang digantikan.
2. Direktur Pengganti berlaku efektif apabila Direktur yang digantikan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
3. Direktur Utama Pengganti I adalah Wakil Direktur Utama.
4. Direktur Utama Pengganti II adalah 1 (satu) Direktur, kecuali Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan, apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir dengan tetap memperhatikan *four eyes principle* sebagaimana diatur dalam ketentuan Perusahaan tentang perkreditan.
5. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka tugasnya dapat dirangkap oleh Direktur Utama dan tidak diperlukan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
6. Wakil Direktur Utama pengganti II adalah 1 (satu) Direktur, kecuali Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan, apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir.
7. Direktur Kepatuhan Pengganti harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai berikut:
   a. Direktur lain, kecuali Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.
   b. Direktur Kepatuhan Pengganti dilarang membawahkan fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank, *treasury*, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang & jasa, teknologi informasi dan audit intern.
   c. Apabila Direktur Kepatuhan Pengganti membawahkan fungsi-fungsi pada butir 'b' Ayat ini, maka tugas utamanya digantikan oleh Direktur Pengganti.
8. Direktur Pengganti I ditetapkan apabila Direktur tidak ada atau berhalangan hadir.
9. Direktur Pengganti II ditetapkan apabila Direktur dan Direktur Pengganti I tidak ada atau berhalangan hadir.
10. Direktur Pengganti III ditetapkan apabila Direktur, Direktur Pengganti I dan Direktur Pengganti II tidak ada atau berhalangan hadir.
11. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur Pengganti I s.d III menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur Pengganti.
12. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III, Direktur Utama serta Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti.

SEVP Pengganti

1. Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan SEVP yang tugasnya diambil alih.
2. Pengambilalihan tugas SEVP berlaku efektif apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurangkurangnya 1 (satu) hari.
3. Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.
4. Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.

5. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur I dan Direktur II tersebut menjalankan tugas untuk mengambil alih tugas SEVP, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP.
6. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP dan Direktur Utarna serta Wakil Direktur Utarna tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat mengambil alih tugas SEVP.

PEDOMAN TATA TERTIB DIREKSI

Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*Board charter*) Nokep 801-DIR/SKP/11/2015 tanggal 11 November 2015.

Board charter Direksi berisi tentang aturan dan panduan tentang tata kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Perseroan.

Board charter Direksi berisi antara lain:
1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Wewenang dan kewajiban Direksi
4. Nilai-nilai perusahaan
5. Etika kerja Direksi
6. Waktu kerja Direksi
7. Rapat Direksi
8. Struktur Keanggotaan Direksi
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

a. Melaksanakan keputusan RUPS.
b. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
c. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
d. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain.
e. Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Direksi

Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan

a. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan.
b. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
c. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko

a. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
b. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
c. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Bank, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memiliki kewenangan dibawah ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

1. Menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan.
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya diluar pokok yang dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban

Berdasarkan Anggaran Dasar Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan Rencana Kerja lainnya serta Perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan.

Direksi

5. Menyusun Laporan Keuangan pada butir 4 diatas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
10. Menyimpan ditempat kedudukan Perseroan; Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
11. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
14. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Karyawan/ Pegawai, serta organ yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan dan pengabdiannya secara penuh kepada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
20. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
21. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
22. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan:
    a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank tempat yang bersangkutan maupun pada Bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan didalam dan diluar negeri.
    b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Direksi

Etika Kerja

1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi perseroan maupun anak perusahaannya.
2. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
3. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
   a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
   b. Anggota Dewan Komisaris/ dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
   d. Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislative dan atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.
   e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
4. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada perusahaan lain.
5. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. proyek bersifat khusus.
   b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawabdan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
   c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada poin 1.
6. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perseroan.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, pembagian tugas masing-masing Direksi BRI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertujuan untuk memastikan agar fungsi pengelolaan Perseroan lebih efektif dan efisien. Pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi

Nama	Ruang Lingkup Pekerjaan
Suprajarto Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Kuswiyoto Direktur *Corporate Banking*	Menjalankan tugas dan wewenang dalam : • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis BUMN, Agribisnis, Bisnis Korporasi serta Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Supari Direktur Ritel dan Menengah	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kebijakan & Strategi Bisnis Ritel & Menengah, Bisnis Ritel, Bisnis Menengah, dan Bisnis Pertanian; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Priyastomo Direktur Mikro dan Kecil	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kebijakan Bisnis Mikro & Kecil, Bisnis Mikro, Bisnis Kecil & Kemitraan, dan Inkubasi Bisnis Mikro & Ritel; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Handayani Direktur Konsumer	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis Wealth Management, Kredit Konsumer, Kartu Kredit, Dana & Jasa, Retail Payment dan Marketing Communication; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Direksi

Nama	Ruang Lingkup Pekerjaan
Osbal Saragi Rumahorbo Direktur Jaringan dan Layanan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Bisnis Ritel, Jaringan Bisnis Mikro, Jaringan Brilink, *E-Channel*, Layanan & Contact Center, dan Sentra Operasi; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Haru Koesmahargyo Direktur Keuangan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap Corporate Development & Strategy, Akuntansi Manajemen & Keuangan, Assets & Liabilities Management, dan Hubungan Investor; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Indra Utoyo Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perencanaan & Pengembangan TI, Operasional TI, Satelit & Jaringan Infrastruktur, Digital Center of Excellence, Kerjasama Teknologi dan Information Security; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan Kelembagaan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam : • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis Institution, Transaction Banking dan Social Entrepreneurship; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
R. Sophia Alizsa Direktur *Human Capital*	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Human Capital serta BRI Corporate University; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Nama	Ruang Lingkup Pekerjaan
Mohammad Irfan Direktur Manajemen Risiko	Menjalankan tugas dan wewenang dalam : • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio, Manajemen Risiko Operasional & Pasar, Analisis Risiko Kredit, Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, dan Operasional Kredit; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Kepatuhan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam : • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kepatuhan, Hukum, Kebijakan & Prosedur, Kebijakan Kredit, dan Corporate Transformation; • mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENUNJANG DIREKSI

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi tugasnya, Direksi BRI dapat membentuk komite-komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Per 31 Desember 2018 terdapat 11 komite dibawah Direksi yaitu:

a. Komite *Asset* dan *Liability*
b. Komite Manajemen Risiko
c. Komite Kredit
d. Komite Permodalan dan Investasi
e. Komite Kebijakan Pekreditan
f. Komite Pengarah Teknologi Informasi
g. Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia
h. Komite Evaluasi Jabatan
i. Komite Pengarah Proyek
j. Komite Produk
k. Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Direksi menilai bahwa seluruh Komite telah melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman dan Direksi diwujudkan dalam bentuk keberagaman kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi. Keberagaman Direksi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan dapat membantu Perseroan dalam mencapai target dan tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka Panjang.

Tabel Data Keberagaman Komposisi Direksi Bank BRI

Usia	Jenis Kelamin	Agama	Latar Belakang Pendidikan/Bidang Studi	Pengalaman Kerja	Pengalaman Kedirekturan/di bidang industri perbankan atau keuangan
Keberagaman usia Direksi mulai dari usia 48 s/d 62 tahun	Terdapat Direksi BRI berjenis kelamin lakilaki dan perempuan	Terdapat keberagaman lebih dari 1 agama	Direksi BRI memiliki latar belakang Pendidikan S3 manajemen bisnis, Pendidikan akuntansi, MBA, Magister Manajemen, ilmu pertanian dokter gigi, magister administrasi bisis, Teknik Elektro Komunikasi, *Communication and Signal Processing*	Pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di bidang keuangan/ finansal dan/atau pengalaman di bidang tugas yang Direksi dijabat saat ini.	Direksi Bank BRI memiliki pengalaman kedirekturan sebelum menjadi Direksi Bank BRI, Direksi Bank BRI memiliki pengalaman di dunia perbankan dan atau bidang tugas yang saat ini diemban oleh yang bersangkutan.

KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2018 DAN PERUBAHANNYA

Melalui prosedur pengangkatan Direksi, jumlah komposisi Direksi ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan st*rate*gis Bank. Pada tahun 2018 terdapat perubahan komposisi Direksi melalui RUPST tanggal 22 Maret 2018 dimana RUPST menyetujui dan/atau mengukuhkan pemberhentian Sdr. Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Sdri. Susy Liestiowaty sebagai Direktur Kepatuhan. Selanjutnya RUPST menyetujui pengangkatan:

1. Sdr. Supari sebagai Direktur Retail dan Menengah.
2. Sdr. Osbal Saragi Rumahorbo sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.
3. Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan

Komposisi Direksi Dalam Periode 01.01.2018 – 22.03.2018

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Suprajarto	Direktur Utama	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Priyastomo	Direktur Mikro dan Kecil	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Kuswiyoto	DIrektur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	RUPSLB tanggal 12 Agustus 2015
Indra Utoyo	Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Haru Koesmahargyo	Direktur Str*ate*gi Bisnis dan Keuangan	RUPST tanggal 19 Maret 2015

Komposisi Direksi Dalam Periode 01.01.2018 – 22.03.2018

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
R. Sophia Alizsa	Direktur *Human Capital*	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017

Komposisi Direksi Dalam Periode 22.03.2018 – 31.12.2018

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Suprajarto	Direktur Utama	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Kuswiyoto	Direktur *Corporate Banking*	RUPSLB tanggal 12 Agustus 2015
Supari	Direktur *Retail* dan Menengah	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Priyastomo	Direktur Mikro dan Kecil	RUPST tanggal 23 Maret 2016
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Osbal Saragi Rumahorbo	Direktur Jaringan dan Layanan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	RUPST tanggal 15 Maret 2017
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPST tanggal 23 Maret 2016
R. Sophia Alizsa	Direktur *Human Capital*	RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017
Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko	RUPST tanggal 19 Maret 2015
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	RUPST Tanggal 22 Maret 2018

INDEPENDENSI DIREKSI

Pedoman dan Tata Tertib Direksi (*Board Charter*) BRI mengatur tentang Independensi Direksi dimana Direksi wajib mendahukan kepentingan Perseroan diatas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu serta menghindari potensi benturan kepentingan atas transaksi yang dilaksanakan oleh Bank.

Selain proses pengambilan keputusan oleh Direksi wajib terlepas dari tekanan atau intervensi pihak manapun.

BRI memastikan adanya independensi Direksi melalui jajaran Direksi yang seluruhnaya anggotanya :

1. tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun dengan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan
2. tidak memiliki jabatan rangkap diluar BRI.

Direksi

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

1. Seluruh Anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi baik dalam hubungan keuangan, keluarga atau kepengurusan.
2. Seluruh anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesame anggota Dewan Komisaris lainnya, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
5. Seluruh anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRI.

Hingga 31 Desember 2018, tidak ada anggota Direksi yang miliki hubungan afiliasi dengan saham pengendali, maupun dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris baik secara keuangan, kepengurusan maupun hubungan keluarga.

Bahwa Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar. Adapun data tersebut dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Anggota Direksi (BOD)												
Suprajarto		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√
Kuswiyoto		√		√		√		√		√		√
Indra Utoyo		√		√		√		√		√		√
Mohammad Irfan		√		√		√		√		√		√
Haru Koesmahargyo		√		√		√		√		√		√
Susy Liestiowaty*				√		√		√		√		√
Donsuwan Simatupang*				√		√		√		√		√
Sis Apik Wijayanto		√		√		√		√		√		√
Handayani		√		√		√		√		√		√
R. Sophia Alizsa		√		√		√		√		√		√
Suprajarto		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√
Kuswiyoto		√				√		√				√
Osbal Saragi Rumahorbo**				√		√				√		√
Ahmad Solichin Lutfiyanto**				√		√				√		√

*) Efektif 1 Januari 2018 – 22 Maret 2018
**) Diangkat melalui RUPST pada tanggal 22 Maret 2018

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Direksi BRI telah memenuhi ketentuan Rangkap Jabatan sebagaimana terdapat pada Peraturan yang berlaku. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Direksi BRI per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Desember 2017		30 Desember 2018	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
DIREKSI					
Suprajarto	Direktur Utama	-	-	466,100	0.00038
Sis Apik Wijayanto	Direktur	700,000	0.00057	1,328,700	0.00107
Susy Liestyowati *	Direktur	2,900,000	0.00235		
Donsuwan Simatupang *	Direktur	142,500	0.00012		
Mohammad Irfan	Direktur	170,000	0.00014	698,700	0.00057
Haru Koesmahargyo	Direktur			528,700	0.00043
Kuswiyoto***	Direktur	-	-	528,700	0.00043
Priyastomo	Direktur	-	-	528,700	0.00043
Indra Utoyo	Direktur	-	-	419,500	0.00034
R Sophia Alizsa	Direktur	25,000	0.00002	142,100	0.00010
Handayani	Direktur			106,600	0.00003
Osbal Saragi Rumahorbo**	Direktur	-	-	410,500	0.00033
Ahmad Solichin Lutfiyanto**	Direktur	-	-	585,000	0.00047
Jumlah					

*) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018
**) Efektif sejak 22 Maret 2018
***) efektif sampai dengan 03 Januari 2019

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI SAHAM OLEH DIREKSI 2018

Transaksi saham yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BRI sepanjang tahun 2018 telah dilaporkan pada Perusahaan dalam 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transaksi atas saham yang dilaksanakan oleh anggota Direksi BRI sepanjang tahun 2018 di laporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Program Kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank BRI dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka tantiem Direksi dan Dewan Komisaris yang ditangguhkan dalam bentuk saham perusahaan (BBRI). Program ini hanya merupakan program kepemilikan saham dalam rangka pemberian porsi tantiem yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan/syarat pencairan yang telah ditetapkan. Program ini hanya berlaku bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Independen yang menjabat selama periode tahun 2017.

Direksi

Adapun program tersebut di eksekusi pada tanggal 26 September 2018 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Pembelian /Penjualan Saham	
			Lembar	Tanggal transaksi
1	Suprajarto	Direktur Utama	466.100	26 September 2018
2	Kuswiyoto	Direktur	528.700	26 September 2018
3	Sis Apik Wijayanto	Direktur	528.700	26 September 2018
4	Haru Koesmahargyo	Direktur	528.700	26 September 2018
5	Handayani	Direktur	106.600	26 September 2018
6	Priyastomo	Direktur	528.700	26 September 2018
7	Indra Utoyo	Direktur	419.500	26 September 2018
8	Mohammad Irfan	Direktur	528.700	26 September 2018
9	R. Sophia Alizsa	Direktur	106.600	26 September 2018
10	Nicolaus T B Harjanto	Komisaris	188.700	26 September 2018
11	Jeffry J Wurangian	Komisaris	237.900	26 September 2018
12	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	249.700	26 September 2018

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisaris Independen dan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan.

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Program Orientasi Direksi

Setiap anggota Direksi BRI yang baru bergabung wajib mengikuti Program Orientasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Visi, misi dan st*rate*gi Perseroan.
2. Prinsip-prinsip GCG di dalam Perseroan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Pengenalan organ – organ Perseroan beserta tugas dan kewenangannya termasuk Komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2018 program orientasi telah dilaksanakan pada minggu pertama setelah Direksi baru diangkat pada RUPS untuk DIreksi BRI yang baru diangkat yaitu Sdr. Supari , Sdr. Osbal Saragi Rumahorbo dan Ahmad Solichin Lutfiyanto.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Pengembangan kompetensi dan pelatihan Direksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Direksi dalam menunaikan tugasnya.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pelatihan anggota sepanjang tahun 2018:

No	Nama Peserta	Nama Pendidikan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	**Handayani** Direktur Konsumer	*The 4th international CWM Exectuive Europe Program 2018*	22.07.2018	Frankfurt dan Paris
2	**Priyastomo** Direktur Mikro & Kecil	*Risk Management Certification Refresher Program For Banks Executives "Strategic Bank Management" Workshop*	07.08.2018	Amsterdam, Belanda
3	**Priyastomo** Direktur Mikro & Kecil	*Enterprise Risk Management* Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Perusahaan	15.08.2018	Jakarta
4	**Sis Apik Wijayanto** Direktur Hubungan Kelembagaan	*Key Risk Management Challenges in 2019 "Credit Quality, Active Credit Portofolio Management & Stress Testing and Also Credit Scoring"*	06.12.2018	Batam
5	**Indra Utoyo** Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	*Key Risk Management Challenges in 2019 "Credit Quality, Active Credit Portofolio Management & Stress Testing and Also Credit Scoring"*	06.12.2018	Batam

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertifikasi manajemen risiko sepanjang tahun 2018 yang diikuti anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi /*Refreshment* MR		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Waktu
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama / Independen	LSPP	Level 2	21 April 2017
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	BSMR	Tingkat 1	11 April 2015
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	BSMR	Tingkat 2	9 April 2017
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2 Mei 2015
Mahmud	Komisaris Independen	BSMR	Level 5	7 Februari 2017
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2 November 2017
Nicolaus T. Budi Harjanto	Komisaris	LSPP	Level 1	6 April 2017
Hadiyanto	Komisaris	LSPP	Level 1	14 Mei 2018

PEMANTAUAN EVALUASI DAN STRATEGI BANK

Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas strategi 2018 yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pemantauan dan evaluasi strategi 2018 dilaksanakan dalam bentuk:

- Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan tugas sesuai dengan struktur GCG yaitu fungsi eksekutif dan pengawasan termasuk dalam hal pemantauan dan evaluasi atas strategi Bank. Dalam hal ini baik strategi Bank dalam bentuk RKAP (tahunan), RBB (3 tahunan) serta *Corporate Plan* (Jangka Panjang).
- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam periode semesteran, evaluasi dilakukan oleh Direksi kemudian selanjutnya dimintakan pendapat dan putusan bersama dengan Dewan Komisaris BRI. Hal ini sudah dilaksanakan rutin dan selanjutnya apabila terdapat Revisi akan dimintakan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

RENCANA SUKSESI DIREKSI

Suksesi Direksi perusahaan dilaksanakan berdasarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Pelaksanaan suksesi Direksi mempertimbangkan dari berbagai aspek segi bidang pekerjaan, pengalaman kerja dan kepemimpinan. Prinsip pelaksanaan Suksesi Direksi didasarkan pada asas Tata Kelola Perusahaan yang baik sehingga dapat menjamin keberlangsungan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

BRI memiliki kebijakan *talent pool candidate* untuk menyeleksi pegawai-pegawai yang potensial untuk menduduki posisi pimpinan di Perusahaan maupun Perseroan BUMN lain. Selain itu perusahaan juga secara berlaka melakukan evaluasi terhadap pejabat eksekutif maupun pejabat dibawahnya untuk dapat menjadi penerus selanjutnya sehingga kepemimpinan dan karakter tetap cocok dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan diperlukan oleh perusahaan.

Kandidat yang terpilih kemudian diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya menjalani prosedur pencalonan Direksi berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2018 disampaikan pada sub bab Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI TAHUN 2018

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan berdasarkan KPI Direksi yang disusun di awal tahun berjalan.

Pihak Penilai Kinerja

Penilaian Kinerja Direksi tahun 2018 dinilai oleh Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris di setiap triwulan dalam bentuk evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI).

Selanjutnya Dewan Komisaris menyusun Laporan Pengawasan dan disampaikan kepada:

a. Kementrian BUMN dan OJK secara berkala di tiap semester tahun buku bersangkutan.
b. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai dasar untuk RUPS dalam menentukan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di tahun buku berikutnya.

Indikator Penilaian Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan dengan mengacu KPI Direksi yang kemudian di kelompokkan menjadi aspek kinerja sebagai berikut:

- Keuangan: Fokus perusahaan untuk meningkatkan revenue dan meminimasi biaya.
- Nasabah: Fokus perusahaan untuk meningkatkan persepsi Pelanggan terhadap "*value proposition*" Perusahaan. Pelanggan yang dimaksud disini mencakup nasabah internal, nasabah eksternal, termasuk regulator.
- Inovasi: Fokus Perusahaan untuk meningkatkan inovasi produk/layanan, *customer value*, dan efektivitas proses bisnis
- Pekerja: Fokus Perusahaan untuk meningkatkan pengembangan organisasi, kemampuan, dan engagement Pekerja.

Mekanisme Penilaian

Direksi BRI memperoleh target Kontrak Manajemen dari Kementrian BUMN RI berupa target-target dengan aspek :

1. Keuangan & Pasar
2. Fokus Pelanggan
3. Efektivitas Produk & Proses
4. Fokus Tenaga Kerja
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, & Tanggung Jawab Kemasyarakatan
6. *Agent of Development*

Aspek-aspek tersebut memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) serta bobot atas KPI tersebut.

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Hasil Penilaian 2018

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan kontrak manajemen serta hasil penilaian tersebut bersifat kolektif dan kolegial yang mencerminkan kinerja masing-masing Direksi termasuk Direktur Utama. Metode penilaian kinerja Direksi merupakan *self assessment* atas pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan aspek-aspek penilaian kontrak manajemen tahun 2018.

Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2018

Aspek		KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
Keuangan & Pasar	1	*Market Capitalization Growth*	4.80%	Lebih tinggi dari industri bank (Jakfin)	4.34
	2	Laba Setelah Pajak (*Earning After Tax*-EAT)	4.80%	Lebih tinggi dari tahun lalu	5.35
	3	*Cost to Income Ratio* -CER	4.80%	Lebih baik dari tahun lalu	4.82
	4	Rasio NPL	4.80%	Lebih baik dari industri bank	5.99
Fokus Pelanggan	5	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan oleh Surveyor Independen	8.80%	Lebih baik dari dari tahun lalu	10.12
	6	Implementasi atas PAB yang telah disetujui OJK	8.80%	Minimum 80%	10.12
Efektivitas Produk& Proses	7	Peningkatan produk & layanan perbankan yang sudah terdigitalisasi (Misalnya: dari *teller* menjadi *e-channel*)	5.60%	Lebih baik dari tahun lalu	6.27
	8	Pengembangan sistem subrogasi online untuk KUR	4.80%	Terlaksananya sistem subrogasi online untuk KUR	4.8
	9	Pertumbuhan Agen *Branchless Banking*	5.60%	Lebih baik dari tahun lalu	7.28
Fokus Tenaga Kerja	10	*Employee Productivity*	7.20%	Lebih tinggi dari tahun sebelumnya	7.7
	11	*Employee Engagement Survey*	6.40%	Lebih tinggi dari tahun sebelumnya	6.48
Kepemimpinan, Tata Kelola, & Tanggung Jawab Kemasyarakatan	12	Skor KPKU	4.80%	Lebih baik dari tahun lalu	4.83
	13	*Corporate Governance Perception Index* (CGPI)	4.80%	Lebih baik dari tahun lalu	4.83
	14	Realisasi Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	4.00%	Realisasi minimal 80% dari anggaran RKAP	4.6
Agent of Development	15	Realisasi total pendapatan bunga dari BUMN / Total pendapatan bunga	2.00%	Lebih tinggi dari tahun sebelumnya	1.36
	16	Realisasi DPK dariBUMN / Total DPK	2.00%	Lebih tinggi dari tahun sebelumnya	1.63
	17	Implementasi ATM, EDC Merah Putih	2.00%	Sesuai target Kementerian BUMN	1.97
	18	Peningkatan *fee based income*	2.00%	Lebih tinggi dari tahun lalu	2.31
	19	Peningkatan pendapatan non interest	2.00%	Lebih tinggi dari tahun lalu	2.44
	20	Peningkatan jumlah Rumah Kreatif	2.00%	Lebih tinggi dari tahun lalu	2
	21	Peningkatan jumlah BUMDES	2.00%	Lebih tinggi dari tahun lalu	2.6
	22	Pembiayaan Bank Himbara pada sektor infrastruktur	2.00%	Lebih tinggi dari tahun lalu	2.6
	23	Realisasi Penyaluran KUR	2.00%	Sesuai target Pemerintah	2
	24	Realisasi Penyaluran Bansos dan Kartu Tani	2.00%	Sesuai target Pemerintah	2
Total			100.00%		108,42

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BRI telah memiliki kebijakan tata kelola remunerasi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015. Kebijakan tata kelola remunerasi BRI diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep:S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI.

Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:

a. Latar belakang dan Tujuan kebijakan remunerasi. Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perusahaan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.
b. Evaluasi kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. Perusahaan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaharuinya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perusahaan.
c. Indenpendasi remunerasi bagi pekerja di unit kontrol. Remunerasi yang diterima Pekerja disusun berdasarkan jabatan Pekerja melalui hasil evaluasi jabatan, sehingga Remunerasi yang diterima Pekerja di unit kontrol tidak terkait dengan unit kerja yang di awasi.

Cakupan kebijakan remunerasi dan implementasi per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri.

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perusahaan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perusahaan mengadakan peninjauan terhadap Tunjangan Premium secara periodik apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perusahaan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak.

Remunerasi dikaitkan dengan risiko meliputi:

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan *Person Grade* dan/ atau *Job Grade* Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah midpoint (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/ eksposur risiko Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perusahaan akan menangguhkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variabel.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

a. Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja. Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perusahaan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.
b. Metode remunerasi individu dengan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu. Dalam pemberian kompensasi variabel bagi Pekerja,

besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja tergantung dari pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja dan kinerja individu dimana masing-masing komponen tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.

c. Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai.
Pada awal tahun Perusahaan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak akan memperoleh kompensasi variabel.

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

a. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan, Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/ BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
   1. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
   2. Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah setinggi-tingginya 20% dari tantiem.

b. Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (Malus). Perusahaan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT yang terbukti melakukan *Individual Fraud*.

PROSEDUR PENENTUAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang tersebut, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/ MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari: honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

Berdasarkan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang serta menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dalam setiap RUPS Tahunan mengajukan usulan mengenai penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi setelah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, *business size*, dan hasil survei remunerasi dalam industri perbankan.

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

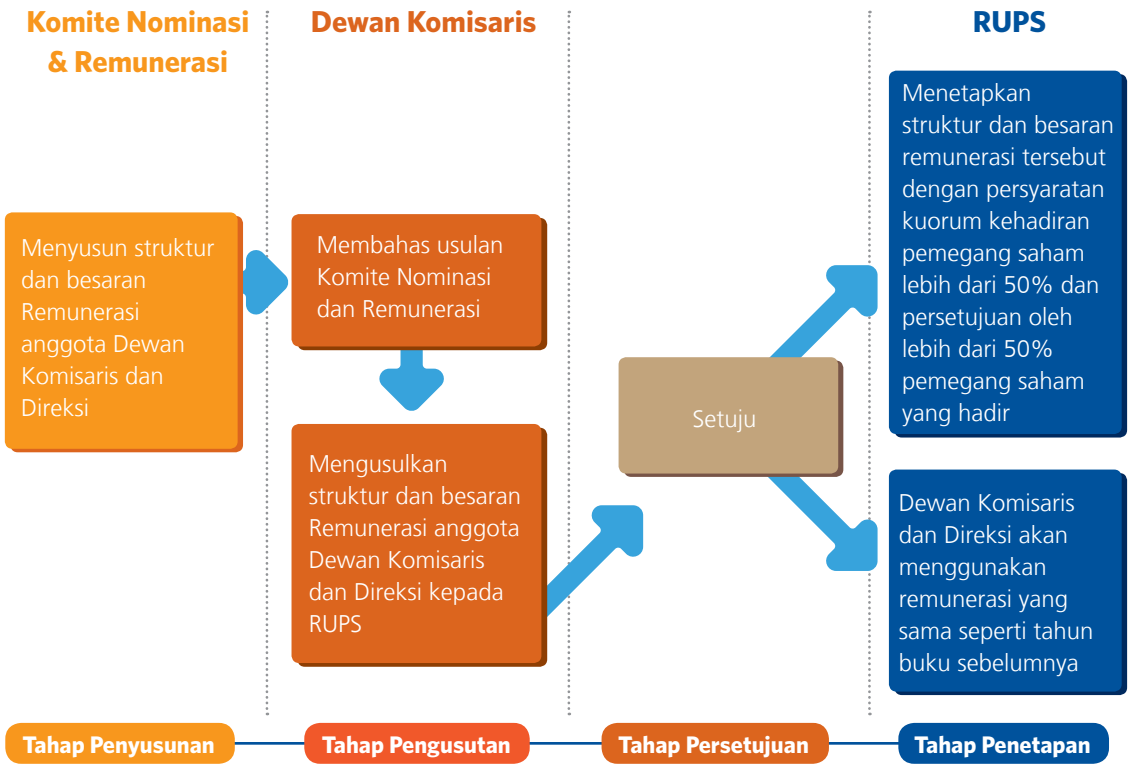

Tahapan Prosedur	Aktivitas
Penyusunan	**Komite Nominasi dan Remunerasi** Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan st*rate*gi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.
Pengusulan	**Dewan Komisaris** Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Penetapan	**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya.

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

1. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

a. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017, telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
   2) Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah 10% dari Tantiem.

b. Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (*Malus*)
Perusahaan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa:
   1) Terbukti adanya *Individual Fraud*.
   2) *Restatement* laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
   3) Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk.

2. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan remunerasi

Salah satu prinsip remunerasi Perusahaan adalah kompetitif secara eksernal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan bekerjasama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

3. Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan jumlah nominalnya.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 tahun.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

5. Remunerasi yang bersifat Variable meliputi :

a. Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel. Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
   1) Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan; dan
   2) Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut.:
      i. Tunjangan Kinerja.
      Tunjangan Kinerja merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun. Tunjangan Kinerja bertujuan untuk mendorong motivasi Pekerja, memberikan *reward* secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.
      ii. Bonus.
      Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.

b. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Direksi, Dewan Komisaris dan

Pekerja).

c. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
   - Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
   - Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
   - Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

6. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima remunerasi bersifat variabel selama 1 (satu) tahun.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima remunerasi bersifat variabel selama 1 (satu) tahun

No	Nama	Direksi dan Dewan Komisaris	Jenis Remunerasi Variabel (yang ditangguhkan)*
1	Suprajarto	Direktur Utama	Saham
2	Priyastomo	Direksi	Saham
3	Kuswiyoto	Direksi	Saham
4	Haru Koesmahargyo	Direksi	Saham
5	R Sophia Alizsa Se	Direksi	Saham
6	Sis Apik Wijayanto	Direksi	Saham
7	Handayani	Direksi	Saham
8	Indra Utoyo	Direksi	Saham
9	Mohammad Irfan	Direksi	Saham
10	Andrinof A Chaniago	Komisaris Utama	*Cash*
11	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	Saham
12	Jeffry J Wurangian	Komisaris	Saham
13	Nicolaus T B Harjanto	Komisaris	Saham
14	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	*Cash*
15	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	*Cash*
16	Mahmud	Komisaris Independen	*Cash*
17	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	*Cash*
18	Tri Wintarto	SEVP BRI (pegawai 1 level dibawah Direksi)	*Cash*
19	Gunawan Sulistyo	SEVP BRI (pegawai 1 level dibawah Direksi)	*Cash*

*) remunerasi yang ditangguhkan dengan presentase tertentu atas pencapaian kinerja tahun buku 2017

Keterangan	Jumlah	Total Nominal (Rp)
Direksi/BOD	9 orang	11.415 juta
Komisaris/BOC	8 orang	5.026 juta
Pekerja/Workers	89.944 orang	5,5 Triliun

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

7. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Taker Pihak yang ditetapkan menjadi MRT adalah sbb.:

a. Direksi
b. Dewan Komisaris
c. *Senior Executive Vice President* (SEVP)

8. Share Option yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.

a. Kebijakan *Share Option*
   Data telah disajikan dalam sub bab *Share Option*
b. Jumlah Saham yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat Eksekutif sebelum diberikan *Share Option*.
   Terdapat pada sub bab Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris BRI.
c. Jumlah *Share Option* yang diberikan. Jumlah *Share Option* mempertimbangkan aspek pencapaian kinerja perusahaan, unit kerja dan individu serta memperhitungkan stock option yang telah dialokasikan untuk kebijakan *share option*.
d. Jumlah *share option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir tahun 2018. Pada tahun 2018, belum dilakukan eksekusi terhadap *share option*.
e. Harga opsi yang diberikan
   Data telah disajikan dalam sub bab *Share Option*)
f. Jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*
   Data telah disajikan dalam sub bab *Share Option*

9. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio Gaji/ *Salary Ratio*	2016	2017	2018
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	49.47	37.93	36.04
Gaji Direksi Tertinggi dan Terenda	1.11	1.11	1.18
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1.11	1.11	1.11
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1.84	2.10	2.56

10. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon pekerja selama 1 tahun pertama bekerja.

Belum terdapat pemberian kompensasi variabel yang dijamin tanpa syarat.

11. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.

Tidak terdapat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.

12. Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan	
	Tunai	Saham
Direksi	Rp102.740 juta	Rp11.415 juta
Dewan Komisaris	Rp45.238 juta	Rp5.026 juta
SEVP	2,36 Miliar	Tidak ada

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

13. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam satu tahun.

a. Remunerasi yang bersifat Tetap atau Variabel.

Deskripsi	Total
Kompensasi yang bersifat tetap	10.503.547 Juta
Kompensasi yang bersifat variable	5.513.378 Juta

b. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perusahaan.
- Upah Bulanan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- Tunjangan cuti
- Tunjangan Kinerja
- Bonus/Tantiem

14. Informasi kuantitatif mengenai:

a. Total remunerasi yang masih ditangguhkan baik penyesuaian implisit atau eksplisit.
Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.

b. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan penyeseuaian eksplisit selama tahun 2018.
Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.

c. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama tahun 2018.
Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

1. Honorarium dan Tantiem Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 50% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan masing-masing sebesar 95% dan 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	1) THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2) Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh.
Transportation Allowance	a. Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris. b. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut 1) Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana huruf a di atas 2) Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.
Post-Tenure Insurance	a. Diikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. b. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun
Club Membership Allowance	Diberikan 2 (dua) keanggotaan club Profesi.
Corporate Clothing	Diberikan 2 (dua) stel jas corporate dan 1 (satu) baju batik per Tahun.

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

3. Fasilitas

Tipe	Penjelasan
Kesehatan	a. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan. b. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 (dua puluh lima) Tahun c. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: 1) rawat jalan dan obat; 2) rawat inap dan obat; 3) *medical check up*. d. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penggantian Frame setiap 2 (dua) Tahun maksimal sebesar Rp.15 juta. 2) Penggantian Lensa setiap 1 (satu) Tahun. e. *Medical check up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) *Medical check up* diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun. 2) *Medical check up* dilakukan di dalam negeri. f. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping
Fasiltitas Bantuan Hukum	1) Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. 2) Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku

4. Fasilitas Lainnya. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas lain dalam rangka pelaksanaan tugas operasionalnya berupa perjalanan dinas, pemberian laptop/ipad dan pengemudi yang diberikan sesuai ketentuan intern perusahaan yang diatur dalam suatu keputusan Direksi.

Besaran Remunerasi dan Fasilitas Anggota Dewan Komisaris Tahun 2018

Struktur dan Besaran Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris BRI tahun buku 2018

No	Nama	Gaji (Rp)	THRK (Rp)	Tantiem Tahun Buku 2017 (Rp)	Tunjangan Perumahan (Rp)	Tunjangan Transportasi (Rp)	Premi Asuransi Purna Jabatan (Rp)	Pakaian Corporate (Rp)	Tunjangan Komunikasi (Rp)
Dewan Komisaris BRI									
1	Andrinof A Chaniago *)	√	√	√	-	√	√	-	-
2	Gatot Trihargo	√	√	√	-	√	√	-	-
3	A. Fuad Rahmany	√	√	√	-	√	√	√	-
4	A. Sonny Keraf	√	√	√	-	√	√	√	-
5	Jefrry J. Wurangian *******)	√	√	√	-	√	√	√	-
6	Mahmud	√	√	√	-	√	√	-	-
7	Nicolaus T.b Harjanto *)	√	√	√	-	√	√	√	-
8	Rofikoh Rokhim ***)	√	√	√	-	√	√	√	-
9	Hadiyanto *****)	√	√	-	-	√	√	-	-
10	Mustafa Abubakar **)	-	-	√	-	-	-	-	-
11	Ahmad Fuad **)	-	-	√	-	-	-	-	-
12	Adhyaksa Dault ****)	-	-	√	-	-	-	-	-
13	Vincentius Sonny Loho ******)	√		√	-	√	√	√	-
	Jumlah Total	14,282,985,003	1,224,300,000	94,975,766,160	-	2,856,597,001	4,064,400,000	165,474,145	-

Keterangan :
*) Diangkat oleh RUPS tanggal 15 Maret 2017
**) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 15 Maret 2017
***) Diangkat oleh RUPS tanggal 18 Oktober 2017
****) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 18 Oktober 2017
*****) Diangkat oleh RUPS tanggal 22 Maret 2018
******) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 22 Maret 2018
*******) Diberhentikan oleh RUPSLB pada tanggal 03 Januari 2019 berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 20 September 2018

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris BRI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun (2018)	
	Orang	Jutaan
Remunerasi:		
Gaji**	10	14,282
Tunjangan Rutin***	10	4,246
Tantiem*	12	94,975
Fasilitas Dalam Bentuk Natura:		
Transportasi	13	2,856
Santunan Purna Jabatan	10	4,064
Jenis Remunerasi/Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Diatas Rp 2 Miliar	12	38,714
Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar**	2	5,217
Di atas Rp 500juta s/d 1 Miliar	-	-
Di bawah Rp 500 juta	-	-

*) termasuk Dewan Komisaris yang menjabat pada periode 2017 namun tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 22 Maret 2018
**) Termasuk Dewan Komisaris yang diberhentikan pada RUPST tanggal 22 Maret 2018 dan RUPSLB tanggal 03 Januari 2019
***) Tunjangan terdiri dari THR, Transportasi dan pakaian Corporate

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris R.42-KOM/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1) Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 95% dan Direksi sebesar 90%.
2) Tunjangan

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp27,5juta,- per bulan. termasuk didalamnya biaya utilitas.	Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan.
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus *fit and proper test* oleh OJK.
Keanggotaan Klub		Direktur Utama/Wakil Direktur Utama: · 2 (dua) keanggotaan Golf. · 2 (dua) keanggotaan *Club Financial*. · 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (*family club*) · 2 (dua) club profesi. Direktur: · 1 (satu) keanggotaan Golf. · 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (*family club*). · 2 (dua) club profesi
Pakaian corporate		Berupa 2 (dua) stel jas corporate dan 1 (satu) baju batik per tahun.
Komunikasi	Biaya pulsa diganti sesuai dengan pemakaian	Diberikan 2 (dua) unit HP yang dapat diganti setiap tahun.

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

3. Fasilitas

Tipe	Penjelasan
Kesehatan	a. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Direksi dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan. b. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 (dua puluh lima) Tahun c. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Rawat jalan dan obat; b. Rawat inap dan obat; c. *Medical check up*. d. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penggantian Frame setiap 2 (dua) Tahun maksimal sebesar Rp.15 juta. 2. Penggantian Lensa setiap 1 (satu) Tahun. e. *Medical check up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. *Medical check up* diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun. 2. *Medical check up* dilakukan di dalam negeri. f. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping.
Fasiltitas Bantuan Hukum	1) Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. 2) Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku

Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran Remunerasi dan Fasilitas Anggota Direksi Tahun 2018

Struktur dan Besaran Remunerasi dan Fasilitas Direksi BRI tahun buku 2018

No	Nama	Gaji (Rp)	THRK (Rp)	Tantiem Tahun Buku 2017 (Rp)	Tunjangan Perumahan (Rp)	Tunjangan Transportasi (Rp)	Premi Asuransi Purna Jabatan (Rp)	Pakaian Corporate (Rp)	Tunjangan Komunikasi (Rp)
Direksi BRI									
1	Suprajarto *)	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Indra Utoyo *)	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Mohammad Irfan	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Haru Koesmahargyo	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Kuswiyoto	√	√	√	-	√	√	√	√
6	Sis Apik Wijayanto	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Priyastomo	√	√	√	√	√	√	√	√
8	R. Sophia Alizsa ***)	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Handayani ***)	√	√	√	√	√	√	-	√
10	Supari *****)	√	√	-	√	√	-	√	√
11	Osbal Saragi Rumahorbo *****)	√	√	-	√	√	√	√	√
12	Ahmad Solichin Lutfiyanto *****)	√	√	-	√	√	√	√	√
13	Susy Liestiowaty ******)	√	-	√	√	√	-	-	√
14	Donsuwan Simatupang ******)	√	-	√	√	√	-	√	√
15	Asmawi Syam **)	-	-	√	-	-	-	-	-
16	Sunarso ****)	-	-	√	-	-	-	-	-
17	Randi Anto ****)	-	-	√	-	-	-	-	-
18	Zulhelfi Abidin **)	-	-	√	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	40,397,080,644	3,415,500,000	257,021,233,840	4,069,112,903	907,154,516	9,405,000,000	556,710,000	416,599,743

Keterangan :
*) Diangkat oleh RUPS tanggal 15 Maret 2017
**) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 15 Maret 2017
***) Diangkat oleh RUPS tanggal 18 Oktober 2017
****) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 18 Oktober 2017
*****) Diangkat oleh RUPS tanggal 22 Maret 2018
******) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 22 Maret 2018
*******) Diberhentikan oleh RUPSLB pada tanggal 03 Januari 2019 berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 20 September 2018

Direksi Bank BRI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun (2018)	
	Orang	Jutaan
Remunerasi:		
Gaji**	14	40,397
Tunjangan Rutin***	14	9,365
Tantiem*	13	257,031
Fasilitas Dalam Bentuk Natura:		
Transportasi	12	907
Santunan Purna Jabatan	12	9,405
Jenis Remunerasi/Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Diatas Rp 2 Miliar	12	38,714
Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar**	2	5,217
Di atas Rp 500juta s/d 1 Miliar	-	-
Di bawah Rp 500 juta	-	-

*) termasuk Direksi yang menjabat pada periode 2017 namun tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 22 Maret 2018
**) Termasuk Direksi yang diberhentikan pada RUPST tanggal 22 Maret 2018
***) Tunjangan terdiri dari THR, Tunjangan perumahan, Transportasi dan pakaian Corporate

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris dibagi menjadi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris berlangsung secara berkesinambungan. Inisiatif rapat gabungan ini dapat berasal dari Dewan Komisaris maupun Direksi. Melalui rapat gabungan ini, didapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional harian Perseroan.

Etika Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama. Bila Komisaris Utama berhalangan atau tidak ada, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama dan bila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka panggilan rapat dapat dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat oleh Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris (RaDewan Komisaris) dilakukan secara tertulis, dan disampaikan secara fisik atau melalui media elektronik.
6. Panggilan rapat seperti tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
7. Pedoman pelaksanaan rapat ditetapkan sebagai berikut :
   a. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
   b. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
   c. Agenda dan jadwal rapat merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris.
   d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu, mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan, dan membagikan agenda rapat dan materi diskusi.
   e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
   f. Materi rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi/Direktur, harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.
8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

2. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
3. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam kuasa sebagaimana dimaksud, anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumentasi

Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Pedoman pembuatan risalah rapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik yang hadir dan yang memberikan serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom maupun Rakom) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris 2018

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris BRI telah mengadakan rapat dengan penjelasan mengenai Agenda dan jumlah kehadiran anggota BOC sebagai berikut:

1. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA	SL	AAC	GT	RR	AFR	ASK	MHD	HD	JJW	NTB	Keterangan
1	24 Januari 2018	Pembahasan kinerja keuangan tw IV tahun 2017	1	1	0		1	1	1		1	1	Kuorum
2	2 Mei 2018	Pembahasan Kinerja BRI Triwulan I tahun 2018		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
3	5 Juni 2018	Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2018 dan RBB BRI Tahun 2018-2020		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA	SL	AAC	GT	RR	AFR	ASK	MHD	HD	JJW	NTB	Keterangan
4	30 Juli 2018	Pembahasan Kinerja Keuangan BRI Triwulan II Tahun 2018. Pembahasan Realisasi Pelaksanaan RBB 2018-2020 sampai dengan triwulan II tahun 2018		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
5	30 Juli 2018	Pembahasan Rencana Penyertaan pada PT. Sarana Nusa Tenggara Ventura (NTT)		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
6	21 Agustus 2018	Pembahasan Tindak lanjut hasil audit dalam management letter tahun buku 2017		1	1	0	1	1	1		1	1	Kuorum
7	23 Oktober 2018	Pembahasan Kinerja Keuangan Tw III 2018, Pembahasan Realisasi RBB BRI Tahun 2018-2020 sampai dengan Tw III Tahun 2018		1	1	1	1	1	1	1		1	Kuorum
8	21 November 2018	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019-2021 dan RKAP BRI Tahun 2019		1	1	1	1	1	1	1		0	Kuorum
TOTAL RAPAT			**1**	**8**	**8**	**7**	**8**	**8**	**8**	**2**	**6**	**8**	
TOTAL KEHADIRAN			**1**	**8**	**7**	**6**	**8**	**8**	**8**	**2**	**6**	**7**	
% TOTAL KEHADIRAN			**100%**	**100%**	**88%**	**86%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**88%**	

2. Rapat Dewan Komisaris dan Direktur Bidang

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	SL	AAC	GT	RR	AFR	ASK	MHD	HD	JJW	NTB	Keterangan
1	Kamis, 4 Januari 2018	Pembahasan persetujuan penambahan modal untuk BRIsyariah	1	1	0		1	1	0		1	1	Kuorum
2	Selasa, 30 Januari 2018	Kinerja keuangan dan Investasi DPLK tahun 2017	0	1	1		1	1	1		1	1	Kuorum
3	Selasa, 30 Januari 2018	Konsultasi Kredit dengan komisaris *7debitur: PT. Toba Pengembangan Sejahtera, PT Mitratama Perkasa, PT Adikarya Gemilang, PT Tribakti Sarimas, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Cibitung Tanjungpriok Port Tollways, PT Kereta Api Indonesia	1	1	1		1	1	1		1	1	Kuorum

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	SL	AAC	GT	RR	AFR	ASK	MHD	HD	JJW	NTB	Keterangan
4	Selasa, 6 Februari 2018	Peningkatan penyertaan modal Bank BRIsyariah melalui mekanisme Kapitalisasi Laba	1	1	1		1	1	1		1	0	Kuorum
5	Selasa, 27 Februari 2018	Rencana Strategic Partnership BRI Life	1	1	1	1	1	0	1		1	1	Kuorum
6	Selasa, 6 Maret 2018	Portofolio Guideline Tahun 2018	1	1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
7	Jumat, 16 Maret 2018	Persetujuan Penambahan Modal BRI Agro	1	1	0	1	1	0	1		1	1	Kuorum
8	Jumat, 16 Maret 2018	Progres report perbaikan IT, Penanganan Cyber Attack BRI, dan Kesiapan *E-Channel* BRI Menghadapi Kejahatan Cyber	0	1	1	1	1	0	1		0	1	Kuorum
9	Selasa, 3 April 2018	1. Evaluasi tugas dan tanggung jawab komite kebijakan perkreditan (Implementasi POJK No.42/POJK.03/2017) 2. Review kebijakan umum perkreditan		1	0	1	1	1	1		1	1	Kuorum
10	Selasa, 15 Mei 2018	Persetujuan usulan organisasi BRI		1	1	1	1	1	1		0	1	Kuorum
11	Selasa, 15 Mei 2018	Progres Perbaikan Permasalahan IT, Jaringan & Layanan, dan Consumer Banking BRI		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
12	Selasa, 26 Juni 2018	Persetujuan *Threshold* Anggaran Dasar		1	1	0	1	1	1		1	1	Kuorum
13	Selasa, 10 Juli 2018	Pembahasan Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah BRI		1	0	1	1	1	1		1	1	Kuorum
14	Selasa, 17 Juli 2018	1. Pembahasan Kinerja DPLK BRI Semester I Tahun 20 18 2. Pembahasan Dampak Penerapan POJK No.16/ POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
15	Selasa, 17 Juli 2018	Pembahasan Rencana Penyertaan Modal pada Perusahaan Modal Ventura (PT. Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura)		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
16	Selasa, 24 Juli 2018	Konsultasi Kredit Empat Debitur Korporasi (PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT. Trimegah Sekuritas)		0	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
17	Jumat, 27 Juli 2018	Pembahasan Rencana Pengembangan Organisasi yang Mengelola Bina Lingkungan		1	1	0	1	0	1		1	0	Kuorum
18	Jumat, 10 Agustus 2018	Konsultasi Kredit		1	1	1	0	0	1		0	0	Kuorum

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	SL	AAC	GT	RR	AFR	ASK	MHD	HD	JJW	NTB	Keterangan
19	Jumat, 10 Agustus 2018	1. Pembahasan Rencana Penyertaan pada PT. Sarana Nusa Tenggara Ventura (NTT) 2. Pembahasan Rencana Penyertaan BRI pada Perusahaan sekuritas		1	0	1	1	0	1		1	1	Kuorum
20	Selasa, 14 Agustus 2018	Persetujuan atas rencana penyertaan modal pada PT Danareksa Sekuritas		1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
21	Selasa, 21 Agustus 2018	Kesiapan Manajemen SDM BRI terkait *Integrated Talent Manajemen System* BUMN		1	1	0	0	1	1		0	1	Kuorum
22	Selasa, 4 September 2018	Rencana Penyertaan Modal pada PT Dana Reksa *Investment Management*		1	0	1	1	1	1		0	0	Kuorum
23	Rabu, 12 September 2018	Pemaparan Rencana Aksi Korporasi BRI		1	1	1	1	1	1		1	0	Kuorum
24	Selasa, 25 September 2018	Profil risiko terintegrasi semester I tahun 2018 & transaksi intra group semester I tahun 2018		1	1	1	0	1	1	1		1	Kuorum
25	Selasa, 25 September 2018	Usulan penyertaan modal pada BRI finance		1	1	1	0	1	1	1		0	Kuorum
26	Selasa, 2 Oktober 2018	Pembahasan *Integrated Talent Management System* (ITMS) BRI dan Hal Strategis terkait Pengelolaan *Human Capital* BRI		1	1	1	1	1	1	1		1	Kuorum
27	Jumat, 26 Oktober 2018	Sesi 1 & 2 - Strategi Initiative RBB BRI Tahun 2019-2021 (Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018)		1	1	0	1	1	1	1		1	Kuorum
28	Jumat, 26 Oktober 2018	Sharing Session bersma Dir Jaringan & Layanan (Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018)		1	1	1	1	1	1	1		1	Kuorum
29	Selasa, 30 Oktober 2018	Pembahasan Rencana *Strategic Partnership* BRI Life		1	0	1	1	1	1	1		1	Kuorum
30	Senin, 5 November 2018	Persetujuan SE Kerjasama Pendayagunaan Aktiva Tetap		1	1	0	1	1	1	0		0	Kuorum
31	Selasa, 13 November 2018	Implementasi dan *Review* Kebijakan *Recovery Plan* BRI		1	1	1	1	1	1	1		1	Kuorum
TOTAL RAPAT			**8**	**31**	**31**	**27**	**31**	**31**	**31**	**8**	**23**	**31**	
TOTAL KEHADIRAN			**6**	**30**	**24**	**22**	**27**	**25**	**30**	**7**	**18**	**24**	
% TOTAL KEHADIRAN			**75%**	**97%**	**77%**	**81%**	**87%**	**81%**	**97%**	**88%**	**78%**	**77%**	

3. Rapat Internal Dewan Komisaris

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	SL	AAC	GT	RR	AFR	ASK	MHD	HD	JJW	NTB	Keterangan
1	Selasa, 9 Januari 2018	*Market update and economic outlook 2018*	1	1	1		1	1	1		1	1	Kuorum
2	Jumat, 9 Februari 2018	1. Pembahasan laporan Pelaksanaan PKBL thn 2017 2. Rencana PKBL tahun 2018 3. Arahan rencana kerja anggaran PKBL tahun 2018	1	0	1	1	1	1	0		1	1	Kuorum
3	Senin, 12 Februari 2018	*Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018*	1	1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
4	Selasa, 13 Februari 2018	*Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018*	1	1	1	1	1	1	1		1	1	Kuorum
5	Selasa, 24 April 2018	Pemaparan Kinerja, Bisnis Model & Strategi Bisnis BRI Life Finance		1	1	0	1	0	1		1	1	Kuorum
6	Selasa, 15 Mei 2018	Kinerja keuangan DPLK April 2018, Closing Meeting audit DPLK		1	1	1	1	1	1		0	0	Kuorum
7	Selasa, 24 Juli 2018	Persetujuan atas Akuisisi NTT ventura, Update hasil diskusi dengan OJK IKNB terkait Tata Kelola DPLK BRI, Pendidikan atau Training untuk Anggota Komite.		1	0	1	1	1	1		1	1	Kuorum
8	Selasa, 7 Agustus 2018	Pembahasan Rencana Penyertaan pada PT. Sarana Nusa Tenggara Ventura (NTT) & Penetapan Susunan komite dibawah Dewan Komisaris BRI		1	1	1	1	0	1		1	1	Kuorum
9	Selasa, 18 September 2018	*Sharing session* dengan EY Transformasi SDM		0	1	1	1	1	1		0	1	Kuorum

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

NO	HARI & TANGGAL RAPAT	AGENDA	SL	AAC	GT	RR	AFR	ASK	MHD	HD	JJW	NTB	Keterangan
10	Selasa, 18 September 2018	1. Persetujuan Penyertaan Modal pada PT Danareksa Investment Management; 2. Pembahasan Arahan Dewan Komisaris dalam Rakernas BRI dengan tema "Strategi dan Evaluasi Pencapaian Target tahun 2018"		1	1	1	1	1	1			1	Kuorum
11	Selasa, 2 Oktober 2018	Pengambilan Keputusan Persetujuan Penambahan Modal BRI Finance		1	1	1	1	1	1	1		1	Kuorum
12	Kamis, 25 Oktober 2018	*Review Tata Tertib Komite (Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018)*		1	1	1	1	1	1	1		0	Kuorum
13	Kamis, 25 Oktober 2018	*Review Tata Tertib Dewan Komisaris & Komite (Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018)*		1	1	1	1	1	1	1		1	Kuorum
14	Kamis, 25 Oktober 2018	*Realisasi KA & KNR RKA 2018 & RKA 2019 (Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018)*		1	0	1	1	1	1	1		1	Kuorum
15	Kamis, 25 Oktober 2018	*Pengarahan dari Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan (Rapat kerja Dewan Komisaris BRI tahun 2018)*		1	1	1	1	1	1	1		1	Kuorum
16	Rabu, 21 November 2018	Persetujuan Dewan Komisaris atas Penyertaan Pendiri Dalam Rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI		1	1	0	1	0	1	0		0	Kuorum
TOTAL RAPAT			**4**	**16**	**16**	**15**	**16**	**16**	**16**	**6**	**9**	**16**	
TOTAL KEHADIRAN			**4**	**14**	**14**	**13**	**16**	**13**	**16**	**5**	**7**	**13**	
% TOTAL KEHADIRAN			**100%**	**88%**	**88%**	**87%**	**100%**	**81%**	**100%**	**83%**	**78%**	**81%**	

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis-Jenis Keputusan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris 2018

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi. Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
19-Jan-18	B.11-KOM/01/2018	Ijin prinsip rencana kerjasama pinjam pakai sebagain gedung sebagian gedung BRI proklamasi
19-Jan-18	B.12-KOM/01/2018	Penyelesaian sisa dana kegiatan program BL BRI Peduli
20-Feb-18	B.19-KOM/02/2018	Dokumen rencana aksi (*Recovery Plan*) PT. BRI (Persero) Tbk
08-May-18	B.77-KOM/05/2018	Persetujuan perencanaan audit tahunan (PAT) SKAI th 2018
18-May-18	B.86-KOM/05/2018	Persetujuan usulan perubahan organisasi BRI
05-Sep-18	B.145-KOM/09/2018	Permohonan persetujuan perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT
06-Sep-18	B.146-KOM/09/2018	Usulan thershold atas tindakan direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris BRI dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
08-Sep-18	B.164.a-KOM/09/2018	Persetujuan kebijakan perkredian
15-Oct-18	B.198-KOM/10/2018	Pengadaan jasa audit KAP
07-Nov-18	B.218-KOM/11/2018	Usulan pemberian kewenangan kepada direksi untuk memutus penghapusbukuan aktiva tetap
15-Nov-18	B.227-KOM/2018	Ijin pelaksanaan jasa audit KAP untuk laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI Tahun 2018
21-Nov-18	B.229-KOM/11/2018	Persetujuan atas penyertaan pendiri dalam rangka perubahan peraturan dana pensiun BRI
27-Nov-18	B.239-KOM/11/2018	Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT BRI (Persero) Tbk
06-Dec-18	B.254-KOM/12/2018	Penyampaian kembali usulan *threshold* atas tindakan direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna
08-Jan-18	SR.02-KOM/01/2018	Persetujuan bakal calon Komisaris dan Direksi PT. BRIsyariah
05-Apr-18	SR.08-KOM/04/2018	Permohonan persetujuan bakal calon anggota Komisaris dan Direksi BRI Agroniaga
17-Apr-18	SR.09-KOM/04/2018	Permohonan persetujuan bakal calon anggota Komisaris dan Direksi PT Bahana Artha Ventura
17-Apr-18	SR.10-KOM/04/2018	Penetapan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura
22-May-18	SR.13-KOM/05/2018	Persetujuan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi BRI Multifinance indonesia (BRI Finance)
07-Jun-18	SR.14-KOM/06/2018	Persetujuan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi BRI Life
24-Jul-18	SR.16-KOM/07/2018	Persetujuan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
08-Jan-18	R.02-KOM/01/2018	Persetujuan tambahan modal PT Bank BRIsyariah
09-Jan-18	R.03-KOM/01/2018	Penyedian dana kepada pihak terkait an. PT. BRINS
15-Jan-18	R.07-KOM/01/2018	Penggantian Kepala Divisi sekretariat perusahaan BRI
19-Feb-18	R.16-KOM/02/2018	Persetujuan HPS pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tahun 2018
20-Feb-18	R.17-KOM/02/2018	Persetujuan tambahan modal PT. Bank BRIsyariah
22-Feb-18	R.19-KOM/02/2018	Persetujuan *review* HPS Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik tahun 2018
06-Mar-18	R.29-KOM/03/2018	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2018
16-Mar-18	R.30-KOM/03/2018	Pengadaan jasa konsultan terkait penyusunan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris & Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
20-Mar-18	R.33-KOM/03/2018	Rekomendasi Komite audit atas penunjukkan KAP tahun 2018
23-Apr-18	R.39-KOM/04/2018	Persetujuan pelaksanaan penawaran umum perdana saham BRIsyariah Th 2018
08-May-18	R.41-KOM/05/2018	Persetujuan tambahan modal BRI Agro Tahun 2018 dan rencana program MESOP dan LTI BRI Agro
06-Jun-18	R.43-KOM/06/2018	Persetujuan Revisi RBB th 2018-2020 dan RKAP tahun 2018
03-Jul-18	R.48-KOM/07/2018	Penyediaan dana kepada pihak terkait Sdr Ahmad Fuad Rahmany
26-Sep-18	R.67-KOM/09/2018	Persertujuan aas rencana penyertaan modal pada PT Sarana Nusa tenggara timur ventura
27-Sep-18	R.68-KOM/09/2018	Persetujuan penyertaan modal pada PT Danareksa Sekuritas
27-Sep-18	R.69-KOM/09/2018	Persetujuan penyertaan modal pada PT Danareksa Invesment Managemen
21-Nov-28	R.75-KOM/11/2018	Persetujuan pedoman kerjasama pendayagunaan aktiva tetap BRI
21-Nov-28	R.76-KOM/11/2018	Persetujuan RBB tahun 2019- 2021 dan RKAP tahun 2019
27-Nov-18	R.78-KOM/11/2018	Persetujuan dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) BRI tahun 2019-2023

Rekomendasi Dewan Komisaris 2018

Selain melaksanakan fungsi pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi, Dewan Komisaris juga memberikan berbagai rekomendasi dan masukan kepada manajemen berdasarkan atas laporan rutin manajemen ke Dewan Komisaris maupun berdasarkan atas kejadian atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
16-Jan-18	B.06-KOM/01/2018	Perkembangan produk Bank *Assurance* dan/atau produk bank dengan pihak III
19-Jan-18	B.10-KOM/01/2018	Kejadian *fraud* berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik triwulan IV 2017
19-Jan-18	B.13-KOM/01/2018	Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh regulator triwulan IV/2017
31-Jan-18	B.17-KOM/01/2018	Arahan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2018
02-Mar-18	B.29-KOM/03/2018	Hasil *review* atas pengkinian *draft* piagam audit intern
09-Mar-18	B.35-KOM/03/2018	Pengenaan sanksi Kesalahan laporan SID/SILK dan gagal settlement aktivasi *treasury* oleh bank indonesia
15-Mar-18	B.41-KOM/03/2018	Laporan profil risiko triwulan IV th 2017, laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendaanaan teroris (APU & PPT) semester II tahun 2017, Laporan tingkat kesehatan bank semester II th 2017, laporan pelaksanaan strategi anti *fraud* semester II th 2017
08-May-18	B.75-KOM/05/2018	*Loan portfolio Guidelines* tahun 2018
08-May-18	B.81-KOM/05/2018	Laporan pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi semester II 2017
15-May-18	B.84-KOM/05/2018	Temuan hasil kunjungan kerja dewan komisaris BRI periode triwulan I th 2018
28-May-18	B.90-KOM/05/2018	Laporan pengawasan Dewan komisaris atas kinerja BRI triwulan I tahun 2018
04-Jun-18	B.94-KOM/06/2018	Laporan profil risiko triwulan I th 2018
21-Jun-18	B.98-KOM/06/2018	*Review* profil risiko terintegrasi semester II tahun 2017
26-Jun-18	B.101-KOM/06/2018	Evaluasi implementasi tata kelola DPLK BRI
17-Jul-18	B.113-KOM/07/2018	Kejadian *fraud* berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik triwulan II/2018
07-Aug-18	B.129-KOM/08/2018	Penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi semester I tahun 2018

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
16-Aug-18	B.132-Kom/08/2018	Evaluasi implementasi tata kelola DPLK BRI
29-Aug-18	B.142-KOM/08/2018	Tindak lanjut management letter atas audit audit umum laporan keuangan tahun 2017
20-Sep-18	B.165-KOM/09/2018	Laporan profil risiko semester I (triwulan II) tahun 2018, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Program anti pencucian uang (APU) dan Pencegaha terosis (PPT) semester I tahun 2108, Laporan tingkat kesehatan bank semester I tahun 2018, dan Laporan pelaksanaan st*rate*gi anti *fraud* semester I tahun 2018
12-Nov-18	B.219-KOM/11/2018	*Review* profil risiko terintegrasi semester I tahun 2018
27-Feb-18	SR.04-KOM/01/2018	Evaluasi kinerja direksi PT BRI Persero Tbk
29-Mar-18	SR.07-KOM/03/2018	Matrik kendali usulan penempatan wakil perseroan di perusahaan anak atau patungan BUMN
08-May-18	SR.12-KOM/05/2018	Rekomendasi KNR atas usulan penghasilan
09-Jan-18	R.04-KOM/01/2018	Pelaksanaan self Assessment GCG semester II tahun 2017
15-Jan-18	R.08-KOM/01/2018	Penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi semester II tahun 2017
06-Feb-18	R.11-KOM/02/2018	Laporan evaluasi kinerja investasi DPLK BRI semester II tahun 2017
06-Feb-18	R.12-KOM/02/2018	Konsultasi Kredit
13-Feb-18	R.13-KOM/02/2018	Kinerja keuangan dan investasi DPLK BRI tahun 2017
13-Feb-18	R.14-KOM/02/2018	Surat laporan kepatuhan BRI semester II/2017 kepada OJK
27-Feb-18	R.22-KOM/02/2018	Laporan pokok pokok hasil audit semester II tahun 2017
27-Feb-18	R.25-KOM/02/2018	Laporan pengawasan dewan komisaris atas kinerja BRI semester II th 2017
27-Feb-18	R.26-KOM/02/2018	Laporan pengawasan dewan komisaris atas kinerja BRI triwulan IV tahun 2017
08-Jun-18	R.44-KOM/06/2018	Evaluasi Laporan pokok-pokok hasil Audit triwulan I tahun 2018
08-Jun-18	R.45-KOM/06/2018	Laporan evaluasi Komite audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2017 & KAP PSS (EY)
26-Jun-18	R.46-KOM/06/2018	Laporan Evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa Audit atas informasi keuangan historis DPLK BRI thun buku 2018 & KAP NSS
26-Jun-18	R.47-KOM/06/2018	Evaluasi kinerja keuangan dan investasi audited DPLK BRI Tahun 2017
30-Jul-18	R.50-KOM/07/2018	Laporan evaluasi kinerja Investasi DPLK BRI Semester I Tahun 2018
30-Jul-18	R.52-KOM/07/2018	Restrukturisasi kredit dan kredit bermasalah segmen bisnis menengah dan korporasi
30-Jul-18	R.53-KOM/07/2018	Laporan Hasil Audit (LHA) audit operasional aplikasi asuransi agunan kredit online (A3KOL)
21-Aug-18	R.59-KOM/08/2018	Revisi kebijakan remunerasi PT BRI (Persero) Tbk
23-Aug-18	R.60-KOM/08/2018	Konsultasi Kredit
23-Aug-18	R.61-KOM/08/2018	Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit sd triwulan II tahun 2018
24-Aug-18	R.62-KOM/08/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI triwulan II Tahun 2018
24-Aug-18	R.63-KOM/08/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI smester I tahun 2018
27-Nov-18	R.77-KOM/11/2018	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT. BRI (Persero) Tbk triwulan III tahun 2018
04-Dec-18	R.79-KOM/11/2108	Penyampaian usulan calon kepala SKAI BRI

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rencana Rapat Dewan Komisaris 2019

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, setiap awal Tahun melalui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite (KNR, KPMR, KA dan KTKT) menyusun agenda rapat rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Rutin yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Rapat Tahun 2019	Waktu
1	Pengadaan Auditor Independen (KAP)	Minggu ke IV Januari 2019
2	Pengawasan Realisasi RBB Semester II Tahun 2018	Minggu ke I Februari 2019
3	Evaluasi Kecukupan pengendalian internal	Minggu ke III Februari, Mei, Agustus dan November *2019*
4	*Review* dan Evaluasi Profil Risiko	Minggu ke I Februari, Mei, Agustus dan November *2019*
5	*Review* Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Minggu II Maret dan Agustus 2019
6	Evaluasi Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	Minggu ke II Februari 2019
7	Pembahasan Proses Nominasi & Remunerasi Direksi	Minggu ke III Februari *2019*
8	Pembahasan Laporan Keuangan akhir Tahun 2018	Minggu ke IIFebruari 2019
9	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2019	Minggu ke III April 2019
10	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	Minggu ke IV Juni 2019
11	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2019	Minggu ke III Juli 2019
12	Pengawasan Realisasi RBB Semester I Tahun 2019	Minggu I Agustus 2019
13	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019	Minggu ke III Oktober 2019
14	*Review* atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan	Minggu ke IV Oktober 2019
15	Rencana Bisnis Bank 2020-2022	Minggu ke II April 2019
16	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 serta Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2019	Minggu ke II November 2019

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur didalam Anggaran Dasar BRI Pasal 13 sebagai berikut:

Etika	1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan agenda yang disesuaikan dengan Kalender Manajemen. Penjadwalan rapat tersebut ditetapkan dalam Rapat Direksi. 4. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Selain rapat yang telah terjadwal tersebut, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 5. Selain Rapat Direksi yang telah dijadwalkan tersebut, Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: a. dipandang perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi atau b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris. 6. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada angka (6) hanya dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
Pemanggilan Rapat	1. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili perseroan 2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili, atau surat elektronik (e-mail). 3. Pemanggilan Rapat disampaikan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak 4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. 5. Pemanggilan tertulis untuk rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. 6. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi. 7. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pengambilan Keputusan	1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ jumlah anggota Direksi. 2. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. 5. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 6. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Hak Suara *Voting Rights*	1.	Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
	2.	Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
	3.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
	4.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
	5.	Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama, atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2018
Bulan Januari s/d 20 Maret 2018 (susunan Direksi s/d 22 Maret 2018 atau sebelum pelaksanaan RUPST tahun 2018)
Kehadiran Rapat dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Suprajarto	Mohammad Irfan	Haru Koesmahargyo
1	16 Januari 2018	1.Update Progress Proyek BRISPOT dan MYBRI	1	1	1
		2.Update Networks & Service Enhancement dan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran			
		3. Brand Plan tahun 2018			
		4. Pembahasan kenaikan upah			
2	30 Januari 2018	1. Permohonan Persetujuan Ketentuan Pemberian Bantuan Bagi Pekerja BRI Yang Terkena Bencana	1	1	1
		2. Permohonan Persetujuan Ketentuan Home Base Bagi Pekerja BRI			
		3. Progress Digital Banking BRI			
		4. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Anak BRI			
3	6 Februari 2018	1.Update BRIVolution & Permohonan Putusan Inislatif Branch In Box	1	1	1
4	13 Februari 2018	1.Laporan Kartu Kredit & Kartu Debit BRI	1	1	1
5	26 Februari 2018	1. Update Penanganan Transaksi Kartu Kredit dan Kartu Debit	1		1
6	27 Februari 2018	1.Putusan Branch Box	1	1	1
		2.Pengembangan Perusahaan Anak Dana Pensiun			
7	13 Maret 2018	1.Update Penanganan Transaksi Kartu Kredit dan Kartu Debit		1	1
8	14 Maret 2018	1. Update Penanganan Transaksi Kartu Kredit dan Kartu Debit	1	1	
9	20 Maret 2018	1. Pengadaan BRIBox Oleh Tim *Network & Services Enhancement* (NSE)	1	1	1
		2. Putusan Penyertaan Modal BRI			
		3. Penetapan Perubahan Struktur Organisasi BRI			
REKAP Kehadiran Masing-masing Direksi			8	8	8
% Kehadiran Masing-masing Direksi			89%	89%	89%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2018
23 Maret s/d 31 Desember 2018 (susunan Direksi 22 Maret 2018 s/d Desember 2018 atau setelah pelaksanaan RUPST tahun 2018)
Kehadiran Rapat dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:
RUPST 2018

No.	Tanggal	Agenda	Suprajarto	Mohammad Irfan	Haru Koesmahargyo	Kuswiyoto
1	23 Maret 2018	1. Perubahan Struktur Organisasi Induk BRI Pasca RUPST 2018	1	1	1	
		2. Pembagian Wilayah Binaan Direksi/ SEVP Pasca RUPST 2018				
		3. Penetapan Direktur Pengganti Pasca RUPST 2018				

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi Yang Hadir								% Kehadiran	Total Direksi yang Hadir
Kuswiyoto	Sis Apik Wijayanto	Priyastomo	Indra Utoyo	R. Sophia Alizsa	Handayani	Susy Liestyowati	Donsuwan Simatupang		
	1	1	1	1	1	1	1	82%	9
1	1	1	1	1	1	1	1	100%	11
1	1		1	1			1	73%	8
1		1	1	1	1	1		82%	9
1	1	1	1		1	1		73%	8
1	1	1		1			1	73%	8
1	1	1	1	1	1	1	1	91%	10
1	1		1		1	1	1	73%	8
1	1	1	1	1	1	1	1	91%	10
8	8	7	8	7	7	7	7		
89%	89%	78%	89%	78%	78%	78%	78%		

Direksi Yang Hadir								% Kehadiran	Total Direksi yang Hadir
Sis Apik Wijayanto	Priyastomo	Indra Utoyo	R. Sophia Alizsa	Handayani	Supari	Osbal Saragi Rumahorbo	Ahmad Solichin Lutfiyanto		
1	1	1	1	1	1	1	1	92%	11

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2018

23 Maret s/d 31 Desember 2018 (susunan Direksi 22 Maret 2018 s/d Desember 2018 atau setelah pelaksanaan RUPST tahun 2018)

Kehadiran Rapat dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:

RUPST 2018

No.	Tanggal	Agenda	Suprajarto	Mohammad Irfan	Haru Koesmahargyo	Kuswiyoto
2	27 Maret 2018	1. Laporan Kinerja Keuangan Triwulan I 2018	1	1	1	1
		2. Tindak Lanjut Rencana Pembangan Menara BRI Medan				
		3. Rencana Penerbitan USD Global Bond				
3	5-Apr-18	1. Organisasi Subsidiary Management Unit (SMU)	1		1	1
		2. Strategi Percepatan Migrasi Kartu Ber-Chip (NSICCS)				
4	17-Apr-18	1. Pengadaan LED Videotron Gedung BRI 2	1	1	1	1
		2. Laporan Profil Risiko BRI Triwulan I Tahun 2018				
		3. Investasi Perusahaan e-KYC				
5	24-Apr-18	1. NPL dan NPL *Coverage* Maret 2018 Dalam Rangka *Limited Review*	1	1	1	1
6	25-Apr-18	Ijin Pelaksanaan dan Anggaran Pengadaan LED Videotron Gedung BRI 2	1	1	1	1
7	30-Apr-18	1. Presentasi Terkait Penawaran Jasa Sewa Videotron Gedung BRI 2	1	1	1	1
		2. Pemaparan Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2018				
8	8 Mei 2018	1. Penerbitan Global Bond 2018	1	1		1
9	9 Mei 2018	1. Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Rumah Untuk Instansi Tertentu		1	1	1
10	16 Mei 2018	1. Revisi RKAP 2018	1	1	1	1
		2. Migrasi Kartu Debit/Kredit Ber-Chip				
		3. Laporan Penanggulangan *Skimming & Social Engineering*				
		4. Posko Layanan Libur Lebaran				
		5. Agenda Bidang Remunerasi				
11	22 Mei 2018	1. Revisi RKAP 2018	1	1	1	1
		2. Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi BRI				
		3. Revitalisasi Museum BRI Purwokerto				
12	26 Mei 2018	Tindak Lanjut RBB BRI	1	1	1	1
13	30 Mei 2018	1. Pembahasan Threshold Persetujuan dari Dewan komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwama	1	1	1	1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi Yang Hadir									
Sis Apik Wijayanto	Priyastomo	Indra Utoyo	R. Sophia Alizsa	Handayani	Supari	Osbal Saragi Rumahorbo	Ahmad Solichin Lutfiyanto	% Kehadiran	Total Direksi yang Hadir
1	1		1	1			1	75%	9
1		1	1	1	1	1	1	83%	10
1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
1	1		1		1	1	1	83%	10
1		1	1	1	1	1	1	92%	11
1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1	1	1	1	1			67%	8
1	1	1	1	1	1			75%	9
1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
1	1	1	1		1	1		83%	10
	1	1	1	1	1	1	1	92%	11

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2018
23 Maret s/d 31 Desember 2018 (susunan Direksi 22 Maret 2018 s/d Desember 2018 atau setelah pelaksanaan RUPST tahun 2018)
Kehadiran Rapat dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:
RUPST 2018

No.	Tanggal	Agenda	Suprajarto	Mohammad Irfan	Haru Koesmahargyo	Kuswiyoto
14	1 Juni 2018	1. Fasilitas *bank line*	1	1	1	1
		2. Rencana *Corporate Action*				
15	22-23 juni 2018	*1. Client Service Team*	1	1	1	1
		2. Talent Management System				
		3. Penambahan Prognosa Juni 2018				
		4. *Channel* Update BRI				
		5. Update Direktorat Ritel dan Menengah				
		6. Channel Update BRI				
		7. Rencana BRISAT				
		8. Pembahasan *Fee Based Income*				
16	4 Juli 2018	*1. Update Progress* BRI *As a Platform*	1		1	
17	10 Juli 2018	1. Tindaklanjut Rencana *Corporate*	1	1	1	1
18	7 Agustus 2018	*Action Current Issues* Direktorat Jaringan & Layanan	1	1	1	1
19	13 Agustus 2018	1. Rencana *Corporate Action*	1	1	1	1
20	28 Agustus 2018	1. Update Proyek Rencana *Corporate Action*		1		1
21	4-Sep-18	2. Update BRISat		1	1	1
		3. Tindak Lanjut Gempa Lombok				
		Update kinerja BRISyariah				
22	18-Sep-18	Rencana Pengembangan beberapa Investasi	1	1	1	1
23	25-Sep-18	Rencana Pelaksanaan Co-Work Festival Tahun 2018	1	1	1	1
		Materi Rakernas Bank BRI tanggal 20 – 21 September 2018				
		Usulan Perubahan Komite Kredit Direksi BRI				
24	02 Oktober 2018	Investment Opportunity untuk CASA Leadership Bank BRI	1	1	1	1
		Pembentukan Tim Task Force				
		1. Project Rencana Aksi korporasi				
25	04 Oktober 2018	2. Program BUMN Millenials	1	1	1	1
		Update Kondisi bencana Palu				
		1. Permohonan Putusan – Struktur Transaksi Project Rencana perusahaan				

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi Yang Hadir									
Sis Apik Wijayanto	Priyastomo	Indra Utoyo	R. Sophia Alizsa	Handayani	Supari	Osbal Saragi Rumahorbo	Ahmad Solichin Lutfiyanto	% Kehadiran	Total Direksi yang Hadir
	1	1	1	1	1	1	1	92%	11
	1	1	1	1	1	1	1	92%	11
1	1	1		1	1	1	1	83%	9
1	1	1	1	1	1	1	1	92%	11
1	1		1	1	1	1	1	100%	12
		1	1		1	1	1	75%	9
1	1	1	1	1	1	1	1	83%	10
	1	1	1	1	1	1	1	83%	10
1	1	1		1	1	1	1	92%	11
1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
1		1	1	1			1	75%	9

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2018

23 Maret s/d 31 Desember 2018 (susunan Direksi 22 Maret 2018 s/d Desember 2018 atau setelah pelaksanaan RUPST tahun 2018)

Kehadiran Rapat dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:

RUPST 2018

No.	Tanggal	Agenda	Suprajarto	Mohammad Irfan	Haru Koesmahargyo	Kuswiyoto
26	09 Oktober 2018	2. Permohonan Putusan – *Shareholders Agreement Project*	1	1	1	1
		1. Prognosa 2018 dan Usulan RKAP 2019				
27	16 Oktober 2018	2. Update BRI Ventures	1	1	1	1
		1. Update Project *Corporate Action*				
28	23 Oktober 2018	2 Update kinerja BRISyariah	1	1	1	1
		1. Kenaikan Manfaat Pensiun Bulanan bagi Pensiunan BRI				
29	30 Oktober 2018	2. Pembahasan Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2018 dan *Concern Analyst/Investor*	1	1	1	
		1. Penyampaian Draft RKAP 2019				
30	6-Nov-18	2. Update Project rencana *Corporate Action*	1	1	1	
		1. Penyampaian Draft RKAP 2019				
31	13-Nov-18	2. Paparan Eksekutif Dalam Rangka Kegiatan Observasi Pada CGPI Tahun 2017	1	1	1	1
		3. Update BRI Corporate University				
		1. Persetujuan RBB 2019 – 2021 dan RKAP 2019				
32	15-Nov-18	2. Organisasi Kanwil	1	1	1	1
		3. Sponsorship Branding Bank BRI				
		Monitoring Kinerja perusahaan				
33	21-Nov-18	Sinergi Bank BRI	1	1		1
34	22-Nov-18	1. Platform Ecosystem IT	1	1		1
35	27-Nov-18	2. Persetujuan Acara HUT BRI ke – 123	1	1	1	1
		1. Rencana Bisnis Perusahaan Anak				
36	04 Desember 2018	2. Update kegiatan BRI Run tahun 2018	1	1	1	1
		1. Rencana Bisnis Perusahaan Anak				
37	11 Desember 2018	1. Rencana Bisnis Perusahaan Anak	1	1	1	1
38	18 Desember 2018	2. Review Remunerasi	1	1	1	1
		3. Update BRI Family Festival - Rangkaian HUT BRI 123				
		4. Review Tindak Lanjut Gempa di Palu dan Sekitarnya				
		1. Rencana Bisnis Perusahaan Anak				

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi Yang Hadir										
	Sis Apik Wijayanto	Priyastomo	Indra Utoyo	R. Sophia Alizsa	Handayani	Supari	Osbal Saragi Rumahorbo	Ahmad Solichin Lutfiyanto	% Kehadiran	Total Direksi yang Hadir
	1	1	1		1	1	1	1	92%	11
	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1	1	1	1	1	1	1	1	92%	11
	1	1		1	1	1	1	1	83%	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1	1	1	1		1	1	1	83%	10
	1	1	1			1	1	1	75%	9
	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12
	1		1	1	1	1	1	1	92%	11

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi selama tahun 2018
23 Maret s/d 31 Desember 2018 (susunan Direksi 22 Maret 2018 s/d Desember 2018 atau setelah pelaksanaan RUPST tahun 2018)
Kehadiran Rapat dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi pada Rapat Direksi/Radisi (minimal 1 kali dalam 1 bulan) telah memenuhi dengan rincian data sebagaimana data berikut:
RUPST 2018

No.	Tanggal	Agenda	Suprajarto	Mohammad Irfan	Haru Koesmahargyo	Kuswiyoto
39	21 Desember 2018	2. Update Transformasi IT 3. Collection and Recovery System Prognosa Kinerja Keuangan Desember Tahun 2018	1		1	
40	27 Desember 2018	Prognosa Kinerja Keuangan Desember Tahun 2018		1		1
41	28 Desember 2018	Prognosa Kinerja Keuangan Desember Tahun 2018		1		1
42	30 Desember 2018	Prognosa Kinerja Keuangan Desember Tahun 2018		1		1
43	31 Desember 2018	Prognosa Kinerja Keuangan Desember Tahun 2018		1		1
REKAP Kehadiran Masing-masing Direksi			44	48	43	46
% Kehadiran Masing-masing Direksi			85%	92%	83%	88%
TOTAL JUMLAH RAPAT MASING-MASING DIREKSI			52	52	52	52

Rapat Konsultasi Direksi kepada Dewan Komisaris

Sebagaimana terdapat dalam anggaran BRI, Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam tugas pengawasan dimaksud Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai Perseroan kepada Direksi termasuk kegiatan operasional dalam pemberian kredit dan penjelasan lain yang diminta Komisaris.

1. Kredit yang harus dikonsultasikan Direksi kepada Komisaris adalah Pemberian kredit berupa kredit *direct*, kredit *contingent* (BG/ SBLC, dll) termasuk kredit Sindikasi dengan kriteria sebagai berikut: Pemberian kredit baru dan atau pemberian tambahan kredit/suplesi dengan total eksposure risiko 1 (satu) triliun rupiah ke atas atau ekuivalen dalam valas, dan atau bila menurut pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada Komisaris.
2. Penetapan besaran eksposure tersebut di atas didasarkan pada besaran eksposure debitur individual
3. Pemberian kredit diluar butir 1 di atas tidak perlu dikonsultasikan dengan Komisaris, namun setiap 3 bulan Direksi wajib menyampaikan laporan pemberian kredit kepada Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi Yang Hadir										
	Sis Apik Wijayanto	Priyastomo	Indra Utoyo	R. Sophia Alizsa	Handayani	Supari	Osbal Saragi Rumahorbo	Ahmad Solichin Lutfiyanto	% Kehadiran	Total Direksi yang Hadir
	1		1	1		1	1	1	67%	8
	1	1	1	1	1	1	1	1	83%	10
	1	1	1	1	1	1		1	75%	9
	1	1	1	1	1	1		1	75%	9
	1	1	1	1	1	1			67%	8
	45	44	47	46	44	41	36	39		
	87%	85%	90%	88%	85%	95%	84%	91%	43	52
	52	52	52	52	52	43	43	43		

Rencana Rapat Direksi Tahun 2019

Dalam rangka mendukung kinerja dan perencanaan kegiatan setiap awal tahun melalui Rapat Direksi, Direksi telah menyusun agenda rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Direksi yang rutin ditetapkan Direksi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Rapat Tahun 2019	Waktu
1	Evaluasi Kinerja dan Pelaporan tahun buku 2018	Minggu ke II Januari 2019
2	Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2019	Minggu ke I April 2019
3	Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2019	Minggu ke I Juli 2019
4	Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2019	Minggu ke II Oktober 2019
5	Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2019	Minggu ke II Januari 2020
6	Evauasi dan rencana Revisi Rencana Bisnis Bank 2020-2022	Minggu ke II Juni 2019
7	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019	Minggu ke IV Juni 2019
8	Aktivitas operasional dan putusan perusahaan yang membutuhkan persetujuan melalui Rapat Direksi	Minimal dilaksanakan 1 bulan sekali di tahun 2019

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 56,75%, saham Seri A Dwiwarna.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi

1. Seluruh Anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi baik dalam hubungan keuangan, keluarga atau kepengurusan.
2. Seluruh anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesame anggota Dewan Komisaris lainnya, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
5. Seluruh anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRI.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan atas beban Perseroan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Negara BUMN No:Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
b. Anggaran Dasar Perusahaan

Lahir di Klaten tanggal 11 Januari 1982. Meraih gelar Master of Sains dari Universitas Indonesia, gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, dan gelar Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BRI sejak 1 Juli 2017 sampai sekarang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep.: 06-KOM/BRI/06/2017 tanggal 13 Juni 2017. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Agustus 2015-Mei 2017) dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (September 2013-Agustus 2015).

Disamping sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BRI, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja pada Kementerian BUMN (sejak Juli 2017). Pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN (April 2014 - Juni 2017) dan Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur (Desember 2011 - April 2014).

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pedoman dan tata tertib kerja, Sekretariat Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf, Sekretaris Komisaris, dan Pelaksana di Lembaga Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris yaitu:
   a. Menyusun dan/atau menerima/ mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris dan/atau Komite mengenai agenda rapat, serta memfinalisasi agenda rapat berdasarkan prioritas dan *urgency* permasalahan.
   b. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan memperoleh materi rapat dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris atau kepada Komite jika permasalahan perlu mendapatkan masukan dan analisa Komite.
   c. Mengusulkan waktu dan tempat pelaksanaan rapat serta mendistribusikan undangan rapat kepada pihak-pihak yang perlu hadir.
   d. Menyusun risalah rapat dan menyimpan salinannya.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris yaitu:
   a. Melakukan seleksi atas surat-surat ataupun dokumen lainnya yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, menetapkan prioritas surat dan/ atau dokumen tersebut berdasarkan *urgency* permasalahan dan menindaklanjutinya sesuai kepentingan masing-masing surat dan/atau dokumen dimaksud;
   b. Membuat catatan khusus dari surat dan/ atau dokumen yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, khususnya yang memiliki tingkat kepentingan/kompleksitas yang tinggi.
   c. Menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris atas surat dan/atau dokumen tersebut diatas;

Organ Pendukung Dewan Komisaris

d. Mempersiapkan korespondensi lainnya dengan pihak manajemen Perseroan, pihak eksternal, dan pihak-pihak lainnya, khusus hal-hal yang telah mendapatkan keputusan Dewan Komisaris yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite;
e. Mendokumentasikan arsip Lembaga Dewan Komisaris dan memastikan central
f. filing yang *up-date* dan sistematis untuk memudahkan pencarian dokumen serta tindak lanjut;
g. Menjadwalkan dan mengkoordinasikan acara dan kegiatan Dewan Komisaris antara lain keikutsertaan dalam program *training/ workshop*/seminar, kunjungan kerja, perjalanan dinas, dan lain-lain;
h. Memastikan tersedianya sarana dan logistik untuk mendukung kelancaran acara-acara Dewan Komisaris sebagaimana diatas, dan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan operasional Dewan Komisaris lainnya antara lain ATK, *reimbursement* kesehatan, dan lainlain; dan
i. Mempersiapkan pidato/sambutan ataupun bahan presentasi Dewan Komisaris sesuai kebutuhan yang menyangkut hal-hal yang tidak terkait dengan tugas-tugas Komite.

4. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/ atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
5. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyusun laporan tentang pelaksanaan *Self Assessment* GCG Dewan Komisaris dan Komite setiap Semester, berkoordinasi dengan divisi Kepatuhan.
7. Mengkoordinasikan tercapainya pelaksanaan tugas Komite-Komite dan organ yang berada dibawah Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengkoordinasikan dan melakukan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/ informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:
   a. Menetapkan data/informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan masukan Komite, surat masuk, dan permasalahan yang memerlukan penanganan/tindak lanjut; dan
   b. Mengkoordinasikan pengumpulan data/ informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal terkait.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi yaitu:
    a. Memperoleh masukan dari Dewan Komisaris/ Komite mengenai rencana kegiatan Tahunan;
    b. Menetapkan prioritas rencana kegiatan tersebut diatas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara lebih optimal dan efektif;
    c. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dari masing-masing kegiatan tersebut diatas untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
    d. Menindaklanjuti anggaran yang telah disetujui tersebut dengan Divisi Sekretariat Perseroan untuk dapat difinalisasi dan dikonsolidasikan dengan anggaran Tahunan Perseroan.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham pada:
    a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait; dan
    b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris 2018

1. Kunjungan Kerja
   Sekretariat Dekom bersama-sama dengan Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR), Komite Audit (KA), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR) amendampingi Dewan Komisaris untuk melakukan kunjungan kerja ke Unit-unit Kerja Perseroan.

   Selama Tahun 2018 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris melakukan sebanyak 27 kali kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah beserta Unit Kerja Supervisinya, Divisi Kantor Pusat, dan Unit Kerja Luar Negeri.

2. Persetujuan & Pengawasan Rencana Kerja Perseroan
   Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Perseroan yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selama Tahun 2018. Disamping itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode laporan.

   Selama Tahun 2018 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan Persetujuan, Rekomendasi dan Konsultasi Kredit. Tercatat selama Tahun 2018 Dewan Komisaris telah memberikan Persetujuan sebanyak 40 kali, Rekomendasi sebanyak 46 kali dan Konsultasi Kredit sebanyak 3 kali.

3. Laporan Tahunan Dewan Komisaris
   Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris selama Tahun 2018 yang akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS Tahun 2019.

4. Rapat Kerja Dewan Komisaris
   Dalam rangka melakukan *review* atas realisasi RKA Dekom Tahun 2017 serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dekom Tahun 2018, Sekretariat Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah melaksanakan Rapat Kerja Dewan Komisaris di Jakarta pada tanggal 12-13 Februari 2018.

Program Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka pengembangan kompetensi, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti Pendidikan, Seminar maupun *Conference* untuk mendukung tugasnya. Selama Tahun 2018 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Judul
9-10 Juli 2018	**Jakarta**	*Management Development International* –Tack International	*Problem Solving & Decision Making*

Komite Audit

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan mandat untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tertanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/ SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan FungsiAudit Intern Bank Umum (SPFAIB).
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMNsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
11. Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan perubahannya yang terakhir.
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16Desember 2013 Nomor: 06-KOM/BRI/12/2013 atau S.05-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit

Komite Audit BRI memiliki Buku Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (*Audit Charter*) yang menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit. Pedoman Komite Audit disahkan oleh disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 11-KOM/11/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Struktur Komite

1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
   a. seorang Komisaris Independen;

Komite Audit

b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; dan
c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
4. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
5. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Per 31 Desember 2018, kenggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Profesi	Masa Jabatan
A. Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen	Juni 2015 – sekarang
A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen	Juni 2015 – sekarang
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Oktober 2017 – sekarang
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 – sekarang
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 – sekarang
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Independent Party	Desember 2016 – sekarang

Profil Komite

A. Fuad Rahmany	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Juni 2015 - sekarang Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris.
A. Sonny Keraf	Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Juni 2015 - sekarang Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
Rofikoh Rokhim	Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Oktober 2017 – sekarang Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen Periode: Februari 2016 – sekarang Lahir di Singaraja Bali, 19 Mei 1954. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT BRI (Persero) Tbk sejak Juli 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006).

Komite Audit

Pamuji Gesang Raharjo	Anggota Komite /Audit Pihak Independen Periode: Februari 2016 – sekarang Lahir di Jakarta, 10 April 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Februari 2016. Sebelumnya merupakan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT BRI (Persero) Tbk. Pernah berkarir dalam berbagai posisi pada PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk; PT Bank Danahutama; PT Pegadaian (Persero); dan pernah menjabat Direktur Eksekutif Risk Management center Indonesia (RMcI). Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta (1996), gelar Magister Manajemen bidang kekhususan Manajemen Risiko diperoleh dari Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003), dan meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2014. Memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan memperoleh *Certified of Financial Consultant* (CFC) dari *Institute of Financial Consultant*, Canada (2013).
Sunuaji noor Widiyanto	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen Periode: Desember 2016 – sekarang Lahir di Yogyakarta, 1 Januari 1960, Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Desember 2016. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai Inspektur di Kantor Inspeksi BRI Yogyakarta (2014-2016) dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat BRI (2012-2014). Yang bersangkutan pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BRI Nasional selama 2 (dua) periode (2006-2012). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1996) dan memperoleh sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tahun 2015.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

a. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit, memiliki pemahaman tentang konsep auditing dan mempunyai latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit minimal 10 tahun (sekurang-kurangnya satu anggota).
b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan perbankan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
c. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
d. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiiasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI dibuktikan dengan tandatangan pernyataan independen Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Sebelum menjabat, anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan BRI dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan BRI.

Komite Audit

No	Kriteria Independensi	A. Fuad Rahmany	A. Sonny Keraf	Rofikoh Rokhim	Pamuji Gesang Rahardjo	Sunuaji Noor Widiyanto	I Gde Yadnya Kusuma
1.	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√
2.	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√
3.	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Laporan Keuangan
   a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
   b. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
   c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
   d. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
2. Pengendalian Internal
   Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.

Komite Audit

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
   a. Memantau efektivitas kerja SKAI.
   b. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
   c. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
   d. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
   e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
4. Auditor Independen
   a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
   b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
   c. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
      - Alasan pendelegasian kewenangan; dan
      - Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
   d. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit harus mempertimbangkan:
      1) Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
      2) Ruang lingkup audit;
      3) Imbalan jasa audit;
      4) Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
      5) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
      6) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
      7) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
      8) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
   e. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   f. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
   g. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
   h. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*preapproval*) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP.

i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui:
   1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku;
   2) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
   4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
   5) Hal lainnya.

j. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/atau Pengurus DPLK BRI, sesuai dengan lampiran 2.

5. Kepatuhan (*Compliance*)
   a. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
   b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
6. Pengaduan Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.
7. Lain-Lain
   a. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
   b. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
   c. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

Wewenang

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KPI dan Pencapaian 2018

Indikator atau kriteria kinerja Audit diukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota Komite Audit dalam setiap rapat. Adapun program kerja Komite Audit bukan KTKT disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Secara umum seluruh KPI Komite Audit telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Audit tahun 2018 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit yang memenuhi ketentuan korum rapat dalam setiap mengambil keputusan.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT 2018

I. Komite Audit dengan SKAI BRI

1. Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2018.
   a. Komite Audit telah m*ereview* dan menelaah draft Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2018 yang diajukan oleh SKAI BRI melalui surat no. B.3-SKA/PSA/04/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permohonan Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) Tahun 2018;
   b. Dalam rangka persiapan penyusunan Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI tahun 2018 tersebut, Komite Audit telah melakukan pembahasan secara teknis dengan jajaran SKAI dalam Rapat Komite Audit yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2017 yang dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit No. 18-

Komite Audit

KA/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan berdasarkan rapat tersebut telah disepakati bahwa SKAI akan mengajukan secara tertulis Draft Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2018 tersebut kepada Dewan Komisaris BRI;

c. Namun demikian SKAI BRI baru mengajukan kembali draft PAT SKAI Tahun 2018 tersebut kepada Dewan Komisaris melalui surat SKAI no. B.3-SKA/PSA/04/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permohonan Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) Tahun 2018.

d. Komite Audit telah mereveiew dan menelaah kembali draft Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2018 yang diajukan oleh SKAI tersebut, dan Komite Audit telah membuat Nota Dinas No. B.29-KA/04/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Evaluasi Terhadap Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2018 kepada Dewan Komisaris; dan

e. Dewan Komisaris BRI telah memberikan persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI BRI Tahun 2018 melalui surat no. B.77-KOM/05/2018 tanggal 8 Mei 2018.

2. Laporan Hasil Audit (LHA)
Secara periodik, Komite Audit telah melakukan *review* terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) yang disampaikan oleh SKAI. Proses *review* LHA SKAI tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Perencanaan Audit Tahunan yang telah disusun oleh SKAI dan disetujui Dewan Komisaris, telah dilaksanakan dengan baik oleh SKAI, termasuk untuk meyakinkan kualitas pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan oleh SKAI.

Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah melakukan kegiatan *review* dan evaluasi terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) SKAI sebagai berikut:

No.	Periode LHA	No. & Tanggal Surat SKAI	Hari/Tanggal Pelaksanaan Rapat KA	Output	
				Nodin KA.	Surat Dekom
1.	Tw. IV/2017	R. 08-SKAI/ ALA/02/2018 tanggal 08.02.2018	Selasa, 20.02.2017 Risalah Rapat KA No. 06-KA/ 02/2018	R. 01-KA/02/2018 tanggal 22.02.2018	R.23-KOM/02/2018 tanggal 27.02.2018
2.	Semester II/ 2017	R.124/DIR/ SKA/02/2018 tanggal 22.02.2018	*Review* didasarkan pada laporan hasil *review* periode Tw.III &Tw.IV tahun 2017	R.05-KA/02/2018 tanggal 27.02.2018	R.22-KOM/02/2018 tanggal 27.02.2018
3.	Tw.I/2018	R. 20-SKAI/ ALA/05/2018 tanggal 09.05.2018	Selasa, 22.05.2018 Risalah Rapat KA No. 11-KA/ 05/2018	R.11-KA/05/2018 tanggal 23.05.2018	R.44-KOM/06/2018 tanggal 08.06.2018
4.	Tw.II (Semester I)/ 2018	R.35-SKAI/ ALA/05/2018 tanggal 06.08.2018	Selasa, 07.08.2017 Risalah Rapat KA No. 13-KA/08/2018	R.15-KA/08/2018 tanggal 14.08.2018	R.61-KOM/08/2018 tanggal 23.08.2018
5.	Tw.III/2018	R. 80.e-SKAI/ ALA/11/2018 tanggal 09.11.2018	Rabu, 21.11.2018	R.18-KA/12/2018 tanggal 04.12.2018	R.82-KOM/12/2018 tanggal 11.12.2018

Komite Audit

3. Penelaahan Komite Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Secara Triwulanan.
Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Publikasi Perseroan, baik yang diaudit oleh KAP (*audited*) maupun yang tidak diaudit (*unaudited*). Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan diskusi dengan KAP PSS (EY) atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan hasil audit umum dan *review* terbatas (*limited review*), yaitu sebagai berikut:

No	Posisi Laporan Keuangan Publikasi	Pelaksanaan Rapat Komite Audit
1.	31 Desember 2017 (*audited*)	Kamis, 18 Januari 2018 Risalah Rapat KA No. 02-KA/01/2018 tanggal 18.01.2018
2.	31 Maret 2018 (*limited review*)	Senin, 30 April 2018 Risalah Rapat KA No. 10-KA/04/2018 tanggal 30.04.2018

Untuk Laporan Keuangan Publikasi Perseroan yang tidak diaudit (*unaudited*) dan berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris dengan Direksi BRI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016, SKAI telah mendapat penugasan untuk berkoordinasi dengan Komite Audit dalam me*review* Laporan Keuangan Publikasi Perseroan secara triwulanan yang tidak diaudit (*unaudited*) tersebut sebelum dipaparkan Direksi kepada Dewan Komisaris dan/atau dipublikasikan. Selanjutnya Komite Audit melakukan pembahasan terhadap hasil penelaahan hasil *review* SKAI atas Laporan Keuangan tersebut dalam Rapat Komite Audit bersama-sama dengan SKAI. Hasil penelaahan tersebut dapat berupa pendapat Komite Audit terhadap Draft Laporan Keuangan Perseroan dimaksud dan tanggapan kepada Direksi untuk penyempurnaan atau perbaikan yang diperlukan sebelum dipublikasikan yang dituangkan dalam Nota Dinas Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah melakukanpenelaahan hasil *review* SKAI terhadapLaporan Keuangan Publikasi Perseroan yang tidak diaudited (*unaudited*). yaitu sebagai berikut:

No.	Periode Laporan Keuangan Publikasi	Output
1.	Semester I Tahun 2017 (*unaudited*)	- Risalah Rapat KA No. 12-KA/07/2018 tanggal 27.07.2018 - Nota Dinas KA No.B.46-KA/07/2018 tanggal 30 Juli 2018
2.	Triwulan III Tahun 2018 (*unaudited*)	- Risalah Rapat KA No. 16-KA/10/2018 tanggal 23.10.2018 - Nota Dinas KA No.B.61-KA/10/2018 tanggal 09.10.2018

4. Penelaahan Laporan *Whistle Blower System* (WBS)
Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan *Whistle Blower System* (WBS) maupun pengaduan atau pelaporan tertulis yang diterima Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pelaksanaan penelaahan Laporan *Whistle Blower System* (WBS) dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi dan pembahasan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) triwulanan yang disampaikan SKAI dalam Rapat Komite Audit.

Secara kumulatif, selama periode bulan Januari s/d. Desember 2018 total pengaduan/pelaporan yang diterima melalui *Whistle Blower System* (WBS) BRI sebanyak 124 laporan. Seluruh pengaduan/pelaporan tersebut telah ditindaklanjuti SKAI, baik melalui investigasi maupun penelitian dan tindaklanjut oleh unit kerja terkait sesuai kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. 50 laporan statusnya dapat dinyatakan "Selesai".
b. 74 laporan masih "Dalam Proses" penelitian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

Untuk pengaduan dan pelaporan tertulis lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan atau Komite Audit, setelah dilakukan penelaahan oleh Komite Audit selanjutnya dimintakan klarifikasi secara tertulis kepada SKAI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain pengaduan an. Haji

Komite Audit

Mustafa Natsir Nai, Debitur Kanca BRI Takalar dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia terkait Laporan Tindak Pidana an. I Gusti Made Ines Rasyka. Pada sisi lain, selama periode tahun 2018 tidak terdapat pengaduan atau pelaporan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

5. Pengangkatan Kepala SKAI
   Menunjuk Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang menyebukan bahwa Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan sehubungan dengan Kepala SKAI BRI saat ini, yaitu Sdr. Tri Wintarto akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019, Komite Audit telah berinisiasi melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.17-KA/11/2018 tanggal 28 November 2018 dan surat Dewan Komisaris No. R.79-KOM/11/2018 tanggal 4 Desember 2018 agar Direktur Utama BRI dapat menyiapkan dan menyampaikan minimal tiga orang calon pengganti Kepala SKAI kepada Dewan Komisaris, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab II Pasal 6 POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2018, yaitu antara lain:
   a. memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
   b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
   c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
   d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
   e. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
   f. mematuhi kode etik audit internal;
   g. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
   h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
   i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

6. Dalam rangka penyampaian "*tone of the top*" kepada segenap jajaran auditor, anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris didampingi oleh anggota Komite Audit dari pihak independen juga ikut berpartisipasi dalam program *In-house Training* (IHT) yang diselenggarakan oleh Audit Intern Wilayah (AIW) pada akhir tahun 2018, yaitu:
   a. Bpk. A. Fuad Rahmany dan Sdr. Sunuaji Noor Widiyanto pada tanggal 3 Desember 2018 pada IHT AIW Bandung.
   b. Bpk. A. Sonny Keraf dan Sdr. Pamuji Gesang Raharjo pada IHT Bandar Lampung yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018,
   c. Ibu Rofikoh Rokhim dan Sdr. Sahat Pardede (Staf Ahli Dewan Komisaris) pada IHT AIW Jakarta 3 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018.

7. *Customer Satisfaction Survey* (CSS) SKAI BRI
   Komite Audit telah mengisi kuesioner terkait *Customer Satisfaction Survey* (CSS) yang disampaikan SKAI melalui surat No. B.3-SKAI/PSA/01/2018 tanggal 10 Januari 2018, dan selanjutnya melalui Surat Komite Audit No. B.12-KA/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal *Pengisian Customer Satisfaction Survey (CSS) terhadap SKAI BRI*, Komite Audit telah menyampaikan masukan/saran bagi perbaikan kinerja SKAI kedepan, yaitu:
   a. menindaklanjuti hasil kajian dan peluang peningkatan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Laporan Kajian atas Aktivitas Internal Audit yang dilakukan oleh PT. Deloitte Konsultan Indonesia terhadap *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) sebagaimana yang disampaikan kepada Komite Audit melalui Nota Dinas

Komite Audit

SKAI No. B.155-SKA/PKA/12/2017 tanggal 8 Desember 2017;

b. melakukan penyempurnaan aplikasi BRISMA, khususnya menambahkan kodefikasi sehingga hasil evaluasi dan kajian SKAI terhadap faktor penyebab kelemahan pengendalian intern dapat lebih mencerminkan akar permasalahan (*root cause*) yang sebenarnya dan memberikan nilai tambah bagi SKAI dalam memberikan rekomendasi perbaikan tindak lanjut yang tepat kepada Manajemen BRI (*auditee*);
c. mempercepat proses penyempurnaan aplikasi PDE (Pusat Data Elektronik) sebagai sarana dan sumber informasi yang lebih *up to date* dan valid bagi jajaran SKAI sebagai alat deteksi dini dan atau mendukung pelaksanaan audit;
d. meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka dengan Komite Audit, antara lain segera melaporkan temuan-temuan audit yang sifatnya signifikan dan st*rate*gis yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan mengganggu aktivitas usaha BRI serta pencapaian RKAP;
e. Laporan Hasil Audit SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris/Komite Audit agar lebih komprehensif, objektif, dan tepat waktu, termasuk informasi permasalahan /temuan audit yang masih belum disepakati dan atau ditindaklanjuti oleh Manajemen/Direksi;
f. meningkatkan intensitas forum komunikasi (forkom) antar jajaran Kantor Inspeksi (Kanins) Selindo dan Komite Audit sebagai forum *sharing session* dalam rangka peningkatan kualitas audit dan peran sebagai "*Strategic Business Partner*"; dan
g. melakukan kajian kembali terhadap pelaksanaan peran dan tanggung jawab "*2nd line of Defense*" oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dalamsistem pengendalian intern Perseroan, sehingga memungkinkan fungsi "*2nd line of defense*" tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh jajaran SKAI.

Selanjutnya, melalui surat No. B.12-SKA/PSA/12/2018 tanggal 7 Desember 2018, SKAI mengirimkan kembali Customer Satisfaction Survey (CSS) tahun 2018 dan telah diisi dan dilengkapi oleh Komite Audit melalui surat No. B.65-KA/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan masukan/saran bagi perbaikan SKAI sebagai berikut:

a. jajaran SKAI dan Audit Intern Wilayah (AIW) harus terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi, sehingga dapat mewujudkan visi SKAI menjadi "*Trusted Advisor*" yang dapat memberikan nilai tambah bagi BRI dan jajaran manajemen (*auditee*). Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan maupun program sertifikasi auditor untuk seluruh jajaran auditor, baik yang ada di SKAI maupun AIW;
b. jajaran SKAI dan AIW masih perlu meningkatkan kedalaman analisis tentang akar permasalahan (*root cause*) dari berbagai temuan audit dan hasil identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan pengendalian intern, sehingga SKAI dan AIW dapat memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang tepat (tidak bias) dan *applicable* kepada Manajemen BRI (*Auditee*). SKAI dan AIW perlu meningkatkan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit-unit kerja yang diaudit;
c. implementasi *Monitoring* Bersama (Monber) masih perlu lebih ditingkatkan lagi sebagai bentuk upaya preventif SKAI dan AIW dalam mencegah terjadinya *fraud* dan atau penyimpangan/pelanggaran prosedur yang dapat menimbulkan potensi risiko kerugian, baik finansial maupun non finansial bagi BRI;
d. SKAI dan AIW harus bersikap independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran secara obyektif dan tidak memiliki benturan kepentingan sesuai dengan kode etik profesi dan standar audit yang berlaku umum. Jajaran SKAI dan AIW harus menjadi teladan bagi jajaran manajemen;

Komite Audit

e. Secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi BRISMA, PDE, dan aplikasi pendukung (*audit tools*) lainnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektfivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI; dan
f. SKAI diminta secara proaktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas perbaikan/pengembangan sistem dan teknologi informasi yang sedang dilakukan oleh Manajemen BRI. Pemantauan tersebut mencakup aspek *availability system*, *reliability*, *confidentiality*, *integrity* dan *security*, termasuk telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait manajemen risiko teknologi informasi dan *IT Governance*. Hasil evaluasi dan audit IT tersebut agar dikomunikasikan dan dibahas secara berkala dengan Direktur IT, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan dan pengamanan yang diperlukan.

8. Lain-lain
   a. Komite Audit telah memberikan pendapat dan masukan terkait pengkinian Piagam Audit Intern SKAI dalam pembahasan Draft Piagam Audit Intern pada Rapat Dewan Komisaris pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 (Risalah Rapat Komite Audit No. 04-KA/01/2018) terkait dengan permintaan pendapat dan masukan atas pengkinian draft Piagam Audit Intern yang disampaikan SKAI melalui surat Kepala SKAI No. B.8-SKA/PSA/01/2018 tanggal 11 Januari 2018. Selanjutnya Komite Audit kembali me*review* Piagam Audit Intern BRI yang telah direvisi yang disampaikan SKAI melalui surat No. 15-SKA/PSA/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal *Permintaan Masukan Pengkinian Draft Piagam Audit Intern* dan memberikan persetujuan atas pengkinian Piagam Audit Intern BRI tersebut melalui nota dinas Komite Audit No. B.20-KA/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan surat Dewan Komisaris No. B.29-KOM/03/2018 tanggal 2 Maret 2018.
   b. Komite Audit juga telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Hasil Audit operasional aplikasi asuransi agunan kredit online (ASKOL) tahun 2018 yang disampaikan SKAI melalui surat No. R.34-SAI/TSI/05/2018 dan R.35-SAI/TSI/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, dan selanjutnya melalui nota dinas KA No. R-14-KA/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 dan surat Dewan Komisaris No. R.53-KOM/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 Komite Audit telah meminta kepada Direksi BRI untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan sesuai dengan hasil audit dimaksud.

II. Komite Audit dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang *Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan* dan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang *Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan*, peran Komite Audit dalam proses penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis kepada Perseroan adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan penunjukan AP dan/atau KAP.

Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tersebut dengan mempertimbangkan:
1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP
2. Ruang lingkup audit
3. Imbalan jasa audit
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
7. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, bila ada.

Komite Audit

Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penunjukan dan pelaksanaan audit umum oleh AP dan/atau KAP, yang mencakup:

1. Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tahun buku 2017, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Melaksanakan rapat dengan KAP PSS (EY) pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dengan agenda pembahasan perkembangan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2017, yang dituangkan dalam risalah Rapat KA No. 01-KA/01/2018.
   b. Melaksanakan *closing meetin*g pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dengan agenda pemaparan dan pembahasan laporan hasil audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. BRI (Persero), Tbk dan Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2017 yang dilaksanakan oleh KAP PSS (EY).
   c. Tindak lanjut terhadap "*Management Letter*" hasil audit umum KAP PSS (EY) atas laporan keuangan konsolidasi PT. BRI (Persero), Tbk. tahun buku 2017 melalui Nota Dinas Komite Audit No. B.49-KA/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal *Management Letter atas Audit Umum Laporan Keuangan Tahun Buku 2017*.
   d. Komite Audit BRI telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2017 oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS/EY), dan hasil evaluasi Komite Audit tersebut telah disampaikan melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.12-KA/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 dan Surat Dewan Komisaris No. R.45-KOM/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 kepada Direksi untuk disampaikan kepada OJK sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan SE OJK tersebut di atas.

2. Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tahun buku 2018, yang mencakup kegiatan-kegiatan antara lain:
   a. Pembentukan Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan Tim Pengadaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL PT. BRI (Persero), Tbk. tahun buku 2018 melalui Nota Dinas Komite Audit No. B.10-KA/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01-KOM/BRI/01/2018 tanggal 25 Januari 2018.
   b. Memberikan persetujuan ijin pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2018.
   c. Hadir dalam rapat *Aanwijzing* (pemberian penjelasan) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, rapat evaluasi penilaian proposal teknis dan finansial yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dan rapat klarifikasi dan negosiasi harga yang dilaksanakan pada tanggal 20, 21 dan 23 Februari 2018.
   d. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.09-KA/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal *Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2018*. Selanjutnya melalui surat No. R.33-KOM/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal usulan KAP yang melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2018, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi BRI menindaklanjuti pengusulan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tahun 2018, termasuk menindaklanjuti hasil keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta kebijakan yang berlaku.
   e. Terkait dengan pelaksanaan audit umum atas

Komite Audit

laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2018, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 telah dilaksanakan Rapat Komite Audit dengan KAP PSS (EY) dengan agenda pembahasan dalam rangka *Kick-off Meeting* pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2018 (Risalah Rapat Komite Audit No. 14-KA/08/2018).

f. Dalam rangka memenuhi kewajiban Komite Audit dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal *Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan*, Komite Audit telah hadir secara langsung (*field visit*) dalam pelaksanaan "*exit meeting*" atas hasil audit umum KAP PSS (EY) yang dilaksanakan dalam empat *batch* pada beberapa Kanca BRI dan Kantor Audit Intern Wilayah (AIW) yang menjadi sampel audit, yaitu sebagai berikut:

Batch 1 – hari Kamis tanggal 13 September 2018

No	Kantor Cabang BRI	Anggota KA/Staf Ahli Yang Hadir
1	Kanca BRI Jkt. Veteran	Sahat Pardede (Staf Ahli Dewan Komisaris)
2	Kanca BRI Jkt. Sudirman	Sunuaji Noor Widiyanto (Anggota Komite Audit)
3	Kanca BRI Jkt. Psr. Minggu	I Gde Yadnya Kusuma (Anggota Komite Audit)
4	Kanca BRI Jkt. Kemayoran	Pamuji Gesang Raharjo (Anggota Komite Audit)

Batch 2 – hari Jumat tanggal 28 September 2018

No	Kantor Cabang BRI	Anggota KA/Staf Ahli Yang Hadir
1	Kanca BRI Jakarta Kota	Sahat Pardede (Staf Ahli Dewan Komisaris)
2	Kanca BRI Balikpapan	Sunuaji Noor Widiyanto (Anggota Komite Audit)
3	Kanca BRI Denpasar Renon	I Gde Yadnya Kusuma (Anggota Komite Audit)
4	Kanca BRI Jkt. Kemayoran	Pamuji Gesang Raharjo (Anggota Komite Audit)

Batch 3 – hari Jumat tanggal 17 Oktober 2018

No	Kantor Cabang BRI	Anggota KA/Staf Ahli Yang Hadir
1	Kanca BRI BRI Medan Hijau	Sahat Pardede (Staf Ahli Dewan Komisaris)
2	Kanca BRI Merauke	Sunuaji Noor Widiyanto (Anggota Komite Audit)
3	Kanca BRI Bengkulu	I Gde Yadnya Kusuma (Anggota Komite Audit)
4	Kanca BRI Bandung Dewi Sartika	Pamuji Gesang Raharjo (Anggota Komite Audit)

Batch 4 – Audit Intern Wilayah (AIW)

No	Kantor Audit Intern Wilayah	Anggota KA/Staf Ahli Yang Hadir
1	AIW Denpasar	Sunuaji Noor Widiyanto (Anggota Komite Audit)
2	AIW Semarang	I Gde Yadnya Kusuma (Anggota Komite Audit)
3	AIW Surabaya	Pamuji Gesang Raharjo (Anggota Komite Audit)
4	AIW DKI I	Sahat Pardede (Staf Ahli Dewan Komisaris)

g. Pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2018 yang dilaksanakan oleh KAP PSS (EY), pada saat Laporan Kegiatan Komite Audit ini dibuat masih berlangsung dan direncanakan akan selesai pada tanggal 23 Januari 2018.

3. *Review* Terbatas Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Maret 2018
   a. Melalui Nota Dinas Komite Audit No. R-06/KA/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan surat Dewan Komisaris No. R.29-KOM/03/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI Tahun Buku 2018, hasil RUPS BRI tahun 2018 telah menyetujui penunjukan KAP PSS (EY) untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidaian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2017 atau periode lainnya serta *review* terbatas atas laporan keuangan konsolidasian interim per 31 Maret 2018.
   b. Komite Audit telah mengundang KAP PSS (EY) dalam rapat Komite Audit pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 terkait dengan laporan perkembangan (progress report) atas pelaksanaan *limited review* laporan keuangan konsolidasian BRI per 31 Maret 2018. Hasil pembahasan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit No. 09-KA/04/2018 tanggal 17 April 2018.

Mengadakan Rapat Komite Audit dengan KAP PSS (EY) pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan agenda *closing limited review* atas laporan keuangan konsolidasian BRI per 31 Maret 2018. Hasil pembahasan telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit No. 10-KA/04/2018 tanggal 30 April 2018.

III. Komite Audit Dengan OJK, Bank Indonesia PPATK dan BPK RI

Komite Audit melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, PPATK dan BPK RI. Pemantauan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap laporan hasil audit/pemeriksaan yang diterima Komite Audit atau dilakukan pembahasan dengan SKAI secara bersamaan dalam Rapat Komite Audit terkait Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) SKAI secara triwulanan dan/atau meminta SKAI untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK/Bank Indonesia/PPATK dan BPK RI.

Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK/Bank Indonesia/PPATK/BPK RI, yaitu antara lain:

No.	No. Surat OJK/Bank Indonesia/ PPATK/BPK RI	Perihal/Obyek Pemeriksaan
1.	Surat OJK No. 19/1261/DSSK/Srt/Rhs tanggal 13 Desember 2017	Hasil Pemeriksaan Implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) Dalam Program Bantuan Sosial
2.	Surat OJK No. SR.133/PB.31/2017 tanggal 22 Desember 2017	Laporan Hasil Pemeriksaan Posisi 31 Maret 2017
3.	Surat OJK No. SR-2/PB31/2018 tanggal 17 Januari 2018	Pemeriksaan Khusus Risiko Operasional Aktivitas Teknologi Informasi
4.	Surat OJK No. SR-13/PB.31/2018 tanggal 7 Februari 2018	Pemeriksaan Khusus Risiko Pasar dan Likuiditas Pada Aktivitas *Treasury*
5.	Surat BPK No. 50/S/XX/02/2018 tanggal 2 Februari 2018	Resume Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada BRI
6.	Surat OJK No. S.20/PB313/2018 tanggal 13 Februari 2018	Laporan Pengawasan *off-site* dan *on-site* BRI New York Agency Tw. IV tahun 2016 s/d. Tw.III tahun 2017.

Komite Audit

No.	No. Surat OJK/Bank Indonesia/ PPATK/BPK RI	Perihal/Obyek Pemeriksaan
7.	Surat Bank Indonesia No. 20/495/DSSK/ Srt/Rhs tanggal 20 Maret 2018	Kasus *Fraud* pada Sistem Pembayaran Bank Saudara
8.	Surat OJK No. S-61/PB.313/2018 tanggal 22 Mei 2018	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Pelaksanaan Rencana Bisnis BRI Semester II/2017
9.	Surat Bank Indonesia No. 20/836/DSS/ srt/B tanggal 31 Mei 2018	Rencana Penerbitan Produk Co-Branding Kartu Debit & BRIZZI Bank Saudara
10.	Surat OJK No. s-70/PB.313/2018 tanggal 13 Juli 2018	Penyelesaian Pengaduan Nasasbah an. Sdr. Agussalim
11.	Surat Bank Indonesia No. 20/1245/DSSK/ Srt/B tanggal 2 Agustus 2018	Pengembangan Fitur Pembayaran Melalui Aplikasi MyQR BRI
12.	Surat Bank Indonesia No. 20/1158/DSSK/ Srt/B tanggal 18 Juli 2018	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sistem Pembayaran Bank Saudara
13.	Surat Bank Indonesia No. 20/1193/DSSK/ Srt/Rhs tanggal 24 Juli 2018	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Implementasi Ketentuan *Loan to Value* (LTV) posisi 31 Desember 2017
14.	Surat Bank Indonesia No. 20/1312/DSSK/ Srt/Rhs tanggal 16 Agustus 2018	Pemeriksaan Implementasi Kebijakan LTV Kredit Properti
19.	Surat Bank Indonesia No. 20/1497/DSSK/ Srt/Rhs tanggal 20 September 2018	Hasil Pemeriksaan Tematik *Skimming* Bank Saudara
15.	Surat OJK No. S.107/PB.313/2018 tanggal 17 Oktober 2018	Rencana Pemasaran Produk Reksadana Danareksa Mawar
16	Surat OJK No. S.112/PB.313/2018 tanggal 25 Oktober 2018	Laporan Penunjukkan KAP Dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun 2018 dan Hasil Evaluasi Komite Audit.
17.	Surat OJK No. SR.123/PB.31/2018 tanggal 30 Oktober 2018	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisaris PT. BRI (Persero), Tbk.
18.	Surat OJK No. SR.122/PB.31/2018 tanggal 30 Oktober 2018	Laporan Hasil Pemeriksaan PT. BRI (Persero), Tbk Posisi 31 Januari 2018.

Pada sisi lain, Komite Audit juga telah melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pengenaan sanksi denda/kewajiban membayar oleh regulator secara berkala berdasarkan surat-surat OJK, Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lainnya yang diterima oleh Komite Audit. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk memberikan pendapat dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris agar pengenaan sanksi kewajiban membayar tersebut menjadi minimal atau tidak terulang kembali.

Komite Audit telah menyampaikan hasil pemantauan pengenaan sanksi denda/kewajiban membayar oleh regulator tersebut melalui nota dinas Komite Audit No. B.04-KA/01/ 2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Surat Dewan Komisaris No. B.13-KOM/01/2018 tanggal 19 Januari 2018 perihal *Pengenaan Sanksi Kewajiban membayar oleh regulator periode Oktober sd Desember 2017 (Triwulan IV/2017)*.

Komite Audit telah m*ereview* beberapa surat Bank Indonesia yang terkait dengan pengenaan sanksi kewajiban membayar selama periode tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

No.	No & Tanggal Surat OJK/BI	Jenis Sanksi	Nilai Sanksi (Rp.)
1.	Surat BI No. 20/715/DSSK/Srt/Rhs tanggal 2 Mei 2018	Terlambat menyampaikan Laporan Kantor Pusat Bank Umum	1.000.000
2.	Surat BI No. 20/945/DPKL_GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 9 Juli 2018	Salah input sandi non bank (13 item) pada Laporan Harian Bank Umum (LHBU)	650.000
3.	Surat BI No. 20/1312/DSSK/Srt/Rhs tanggal 16 Agustus 2018	Kesalahan Laporan LBU dari hasi pemeriksaan Bank Indonesia terhadap implementasi kebijakan *Loan to Value* (LTV) kredit properti.	13.600.000

IV. Komite Audit Dengan Manajemen

1. Tindak Lanjut dan Pemenuhan Komitmen Direksi BRI atas Hasil Audit

   Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pemantauan yang dilakukan oleh Komite Audit atas pelaksanaan komitmen dan rencana tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan, baik oleh SKAI BRI maupun OJK, Bank Indonesia, BPK RI dan KAP sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dan dipaparkan SKAI dalam Laporan Hasil Audit (LHA) secara triwulanan.

   Untuk hasil audit SKAI berdasarkan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) Triwulanan yang memerlukan perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti oleh Direksi, Komite Audit memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur Utama melalui surat Dewan Komisaris yang ditembuskan pula kepada SKAI.

   Selanjutnya untuk hasil audit SKAI yang disampaikan secara khusus kepada Komite Audit dan laporan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia, BPK RI dan KAP ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut kepada Direksi BRI. Selama periode tahun 2018, terdapat beberapa hasil temuan audit yang dimintakan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut kepada Direksi, yaitu:

No.	Materi	No & Tanggal Nota Dinas KA / Surat Dewan Komisaris
1.	Pemeriksaan OJK	- R.04-KA/02/2018 tanggal 27.02.2018 - R.24-KOM/02/2018 tanggal 27.02.2018
2.	Pemeriksaan OJK Terhadap BRI New York Agency	- R.04-KA/02/2018 tanggal 27.02.2018 - R.24-KOM/02/2018 tanggal 27.02.2018
3.	LHA audit operasional aplikasi asuransi agunan kredit on-line (A3KOL) tahun 2018.	- R.14-KA/07/2018 tanggal 26.07.2018 - R.53-KOM/07/2018 tanggal 30.07.2018

2. Penelahaan Atas Laporan Kejadian *Fraud* Yang Diperkirakan Berdampak Signifikan

   Komite Audit juga melakukan penelaahan atas Laporan-laporan Kejadian *Fraud* yang berdampak signifikan kepada Perseroan yang disampaikan Direktur Kepatuhan kepada OJK. Selanjutnya Komite Audit menyampaikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan Direksi. Selama periode tahun 2017, Komite Audit telah melakukan penelahaan Laporan Kejadian *Fraud* Diperkirakan Berdampak Signifikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan Fraud Yang DIperkirakan Berdampak Signifikan	No. & Tanggal Nota Dinas KA & Surat Dewan Komisaris
1.	September s/d. Desember 2017	- B.05-KA/01/2018 tanggal 17.01.2018 - B.10-KOM/01/2018 tanggal 19.01.2018
2.	Januari s/d. Maret 2017	- B.23-KA/04/2018 tanggal 04.04.2018

Komite Audit

V. Komite Audit Dengan DPLK BRI

1. Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI
   Menunjuk pasal 24 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Dewan Komisaris sebagai Pengawas DPLK BRI wajib menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK Semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

   Berdasarkan POJK tersebut, Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap perkembangan kinerja investasi DPLK BRI secara berkala berdasarkan laporan kinerja investasi DPLK BRI yang diterima. Hasil penelaahan dan evaluasi Komite Audit selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, termasuk pendapat dan rekomendasi Komite Audit atas laporan kinerja investasi DPLK BRI yang selanjutnya dituangkan dalam surat Dewan Komisaris kepada Pengurus DPLK BRI dan disampaikan kepada OJK.

   Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah melakukan penelaahan dan evaluasi atas investasi kinerja DPLK BRI sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	No. & Tanggal Nota Dinas KA /Surat Dewan Komisaris
1.	Evaluasi Laporan Kinerja dan Investasi DPLK BRI Tahun 2017 (*audited*)	- B.15-KA/02/2018 tanggal 06.02.2018 - R.11-KOM/02/2018 tanggal 06.02.2018
2.	Evaluasi Laporan Kinerja dan Investasi DPLK Semester I Tahun 2018	- B.37-KA/06/2018 tanggal 26.06.2018 - R.47-KOM/06/2018 tanggal 26.06.2018

2. Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Investasi DPLK BRI
   Terkait dengan pelaksanaan audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Investasi DPLK BRI tahun buku 2017, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit antara lain:
   a. Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun Buku 2017
      - *Kick-off Meeting* atas pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan dan kLaporan Investasi DPLK BRI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018.
      - Melakukan pembahasan dengan Tim Audit KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja (NNS) terkait perkembangan (*progress report*) pelaksanaan audit umum atas Laporan Keuangan DPLK BRI tahun buku 2017 dalam forum Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018.
      - Melakukan *Closing Meeting* dengan Tim Audit KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja (NNS) dalam Rapat Dewan Komisaris selaku Dewan Pengawas DPLK BRI pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018.
      - Menyusun dan menyampaikan Laporan hasil evaluasi komite audit PT. BRI (Persero) Tbk terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis DPLK BRI tahun buku 2017 oleh KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja (KAP NNS) kepada OJK melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.13-KA/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan surat Dewan Komisaris No. R.46-KOM/06/2018 tanggal 26 Juni 2018.
   b. Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun Buku 2018
      - Berkoordinasi dengan Divisi Pengadaan barang dan Jasa BRI untuk melakukan proses pengadaan KAP yang akan melakukan audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun Buku 2018 melalui Nota Dinas Komite Audit No. B.60-KA/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan surat Dewan Komisaris

No. B.198-KOM/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Pengadaan Jasa Audit KAP Untuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun 2018.
- Memberikan rekomendasi persetujuan atas usulan HPS Jasa Audit KAP untuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi
- Memberikan rekomendasi atas penunjukan KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) yang akan melaksanakan pemberian jasa audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun Buku 2018.

VI. Kegiatan Internal dan Kegiatan Lainnya Komite Audit

1. Me*review* surat Menteri BUMN No.S-755/MBU/12/2018 tanggal 29 Desember 2017 perihal Mekanisme Penyetoran ke Kas Negara Atas Sisa Dana Bina Lingkungan Peduli dan selanjutnya melalui Nota Dinas Komite Audit No. B.09-KA/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan surat Dewan Komisaris No. B.12-KOM/01/2018 tanggal 19 Januari 2018 menyampaikan hal tersebut kepada Direksi BRI.
2. Menunjuk surat Direktur Kepatuhan BRI No. B.03-DIR/DKP/AML/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Jasa Konsultan EY Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT), dan melalui surat No. B.69-KA/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 Komite audit meminta kepada Direktur Kepatuhan untuk menyampaikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan oleh EY dalam pemberian jasa konsultan penerapan APU & PPT dan Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) tetap dalam posisi independen sebagai Auditor Independen untuk melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017.
   Selanjutnya melalui surat No. B.04-DIR/DKP/AML/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, Direktur Kepatuhan BRI menyampaikan kembali Permohonan Ijin Penggunaan Jasa Konsultan EY Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT). Atas hal tersebut Komite Audit telah meminta klarifikasi kepada KAP PSS (EY) terkait dengan ruang lingkup pekerjaan jasa tersebut dan independensi KAP PSS yang saat ini berpotensi menjadi Akuntan Publik (AP) dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit umum atas laporan konsolidasian PT. BRI (Persero), Tbk dan Entitas Anaknya untuk posisi 31 Desember 2018 dan pemberian jasa *review* terbatas laporan keuangan konsolidasian interim PT. BRI (Persero) Tbk per tanggal 31 Maret 2018.
3. Komite Audit juga melakukan penelaahan dan pemberian rekomendasi atas permohonan persetujuan yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, yaitu terkait permohonan ijin prinsip rencana kerja sama pinjam pakai sebagian Gedung Proklamasi antara BRI dengan PT. Mitra BUMDes Nusantara berdasarkan surat Direksi BRI No. B.01-DIR/MAT/01/2018 tanggal 2 Januari 2018. Selanjutnya hasil penelaahan dimaksud dituangkan dalam Nota Dinas Komite Audit No. B.06-KA/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan surat Dewan Komisaris No. B.11-KOM/01/2018 tanggal 19 Januari 2018.
4. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang terkait dengan penelaahan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, Komite Audit telah melakukan pembahasan dengan Divisi Kepatuhan, SKP, dan unit kerja terkait lainnya dalam rapat Komite Audit pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, agar Perseroan menggembangkan saluran berbasis web yang memungkinkan laporan WBS yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan dapat langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh Komite Audit tanpa melalui SKAI (Risalah Rapat Komite Audit No. 07-KA/03/2018).
   Selanjutnya Komite Audit kembali mengundang Divisi Kepatuhan, SKP dan unit kerja terkait lainnya dalam Rapat Komite Audit yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 perihal tindak lanjut pengembangan sistem pelaporan WBS yang terkait dengan proses

Komite Audit

akuntansi dan pelaporan keuangan. Hasil pembahasan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit No. 15-KA/09/2018. Namun demikian, pengembangan Laporan WBS terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut belum selesai dan masih berlanjut hingga saat ini.

5. Ikut mendampingi kunjungan kerja anggota Dewan Komisaris ke beberapa Kanwil BRI, Kanca BRI, KCP BRI, BRI Unit, dan unit-unit kerja BRI lainnya, termasuk secara khusus hadir dalam pelatihan internal (*in-house training* – IHT) yang diselenggarakan oleh beberapa Kantor Audit Intern Wilayah (AIW), yaitu AIW Bandar Lampung, dan Jakarta 3. Dalam IHT AIW tersebut di atas, Komite Audit mensosialisasikan peran, fungsi dan tanggung jawab Lembaga Komisaris, khususnya Komite Audit serta menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pengendalian internal dan penerapan tata kelola, baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan BRI. Hal ini merupakan bagian dari penyampaian "*tone of the top*" dari Lembaga Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit kepada segenap jajaran di lingkungan BRI, khususnya unit-unit kerja yang dikunjungi.
6. Komite Audit bersama-sama dengan Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite lainnya melakukan koordinasi dan pembahasan lainnya sesuai dengan penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Pendidikan dan Pelatihan Anggota Komite 2018

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota Komite Audit selama tahun 2018 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2018.

Rapat Komite

Sesuai dengan POJK No.55/POJK.04/2015 dan Piagam Komite, Komite Audit BRI mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
3. Setiap pemanggilan Rapat dapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris, atau dilakukan secara lisan atau media komunikasi lainnya.
4. Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik.
5. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
6. Setiap rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
7. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Risalah rapat Komite Audit harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.
10. Risalah rapat Komite Audit merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
11. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Komite Audit

Pelaksanaan Rapat 2018

Pada tahun 2018 Komite Audit telah mengadakan 16 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
A. Fuad Rahmany	Ketua	16	16	100%
A. Sonny Keraf	Anggota	16	13	81%
Rofikoh Rokhim	Anggota	16	13	81%
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	16	14	88%
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	16	15	94%
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	16	14	88%

Agenda Rapat

No	Materi Rapat	Waktu	Jumlah Anggota yang Hadir	Keterangan
1	Pembahasan dengan KAP PSS-EY Perkembangan Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. BRI (Persero) Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2017	9 Januari 2018	6	Kuorum
2	*Closing Meeting* Atas Audit Laporan Keuangan BRI Tahun 2017	18 Januari 2018	7	Kuorum
3	Pembentukan TIM KAP untuk audit atas laporan keuangan dan PKBL tahun 2018	23 Januari 2018	7	Kuorum
4	Pengkinian piagam Audit intern BRI	23 Januari 2018	7	Kuorum
5	*Progres Report* Audit Laporan Keuangan DPLK tahun 2017	30 Januari 2018	7	Kuorum
6	Pembahasan laporan hasil audit Triwulan IV tahun 2017	20 Februari 2018	7	Kuorum
7	Pembahasan *progress report* rencana implementasi PSAK 71	10 April 2018	6	Kuorum
8	*Progres Report Limited Review* Laporan Keuangan TW I 2018 Bersama KAP EY	17 April 2018	5	Kuorum
9	*Closing Limited Review* atas Laporan Keuangan BRI Tw. I tahun 2018	30 April 2018	6	Kuorum
10	Pembahasan Laporan hasil audit triwulan I tahun 2018	22 Mei 2018	7	Kuorum
11	Pembahasan Telaah Laporan Keuangan BRI semester I tahun 2018	27 Juli 2018	6	Kuorum
12	Pembahasan pokok pokok hasil audit SKAI triwulan II 2018	7 Agustus 2018	6	Kuorum
13	Kick off Meeting Audit Laporan Keuangan tahun 2018 bersama EY	14 Agustus 2018	7	Kuorum
14	Pembahasan dan Rencana Tindak Lanjut atas Kejadian *fraud* di Kantor Cabang BRI Pluit, Kantor Cabang BRI Samarinda II, Kantor Cabang BRI Surabaya Manukan, dan Unit Kerja BRI lainya	15 Oktober 2018	6	Kuorum
15	Pembahasan Telaah Laporan Keuangan Tw III 2018	23 Oktober 2018	7	Kuorum
16	Pembahasan Laporan Hasil Audit TW III tahun 2018	21 November 2018	4	Kuorum

Komite Audit

Tindak Lanjut Rapat

Seluruh hasil kegiatan pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh komite Audit di dokumentasikan dalam risalah rapat dan ditindaklanjuti dengan berbagai surat Ke Dewan Komisaris dan pihak terkait.

Remunerasi Komite Audit 2018

Remunerasi bagi angota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap angota Komite.

Khusus Anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan peghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN No. PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agutus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2018

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	***Learning & Growth Perspective***	Organisasi Komite	Komposisi Anggota Komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KA sesuai dengan POJKPeraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Dekom No: 07-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KA BRI. Komposisi Anggota KA telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KA pada Tahun 2019	Piagam Audit pada Tahun 2018 telah di update dan ditetapkan kembali melalaui SK Dekom Nokep: 11 -KOM/11/ 2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit BRI	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KA telah lulus *fit & proper test* OJK dan/ atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KA telah lulus *fit & proper test* OJK serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KA	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Dekom No: 07-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KA BRI, Masa jabtan ketua dan Anggota KA tidak melebihi ketentuan	5	5
2	***Internal Process Perspective***	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KA pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	RKAP KA pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Satu bulan sekali (12 kali)	Selama Tahun 2018 dilaksanakan 16 kali Rapat KA	5	5

Komite Audit

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
			Evaluasi dan persetujuan Direksi atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT)	setahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris melalaui Nota Dinas No. B.29-KA/04/2018 tanggal 26 April 2018 Tentang Evaluasi Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2018	5	5
			Memberikan Rekomendasi terkait usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	setahun sekali	1. Rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.09-KA/03/2018 Tanggal 20 Maret 2018 perihal Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2018. 2. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap KAP dan/ Akuntan Publik telah disampaikan melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.12-KA/05/2018 tanggal 31 Mei 2018	5	5
			Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Dekom	sesuai tugas dan arahan Dekom	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	5	5
		Pengawasan	reviu laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Setiap Triwulan	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalaui Nota Dinas: 1. Nota Dinas KA No. 02-KA/01/2018 Tanggal 18 Januari 2018. 2. Nota Dinas KA No. 10-KA/04/2018 tanggal 30 April 2018 3. Nota Dinas KA No. B.46-KA/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 4. Nota Dinas KA No. B.61-KA/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018	10	10
			reviu laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komsiaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebagai berikut: 1. Risalah Rapat KA No.: B.02-KA/01/2018 tanggal 18 januari 2019 2. Risalah Rapat KA No.: 12 - KA/07/2018 16-KA/10/2018 Tanggal 17 April 2018 3. Risalah Rapat KA No.: 10 - KA/04/2018 tanggal 27 Juli 2018 4. Risalah Rapat KA No.: 16-KA/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018	10	10

Komite Audit

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
			Reviu terhadap pengelolaan *Wisthleblower System*	setahun sekali	Secara kumulatif, selama periode Tahun 2018 total pengaduan/pelaporan yang diterima melalui *Whistle Blower System* (WBS) BRI sebanyak 124 laporan. Seluruh pengaduan/pelaporan tersebut telah ditindaklanjuti SKAI bersamaan dengan proses reviu pelaksanaan Audit internal BRI, baik melalui investigasi maupun penelitian dan tindaklanjut oleh unit kerja terkait sesuai kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut: a. 50 laporan statusnya dapat dinyatakan "Selesai". b. 74 laporan masih "Dalam Proses" penelitian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.	5	5
			Reviu pelaksanaan audit umum Laporan keuangan dan kinerja DPLK BRI	setahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalaui Nota Dinas: 1. Nota Dinas KA - B.15-KA/02/2018 Tanggal 06 Februari 2018. 2. Nota Dinas KA - B.37-KA/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018.	10	10

Komite Audit

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
			Reviu tindaklanjut Management Letter dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan oleh Pihak eksternal.	setahun sekali	1. reviu Management Letter disampaikan melalaui Nota Dinas Komite Audit No. B.49-KA/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal *Management Letter* atas Audit Umum Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. 2. Selama periode tahun 2018, Komite Audit telah menyampaikan 18 kali penelaahan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK/Bank Indonesia/PPATK/BPK RI	5	5
			Penelahaan Atas Laporan Kejadian *fraud* yang diperkirakan Berdampak Signifikan	setahun sekali	Rekomendasi dan saran disampaikan melalui Nota Dinas No: B.05-KA/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan No: B.23-KA/04/2018 tanggal 04 April 2018.	5	5
3	***Compliance Perspective***	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini hasil pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BRI Wajar Tanpa Pengecualian	10	10
Total						**100**	**100**

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas untuk meninjau kebijakan remunerasi dan memberikan saran dan rekomendasi atas prosedur pemilihan kandidat dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak ketiga independen didalam komite dibawah Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
11. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
12. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perubahannya yang terakhir.
14. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Desember 2013 No. 06-KOM/BRI/12/2013 atau S.05-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 08 Maret 2010 No. 01-KOM/BRI/03/2010 atau Nokep S.14-DIR/ DKP/03/2010 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Piagam Komite

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengatur tentang tujuan pembentukan, keanggotaan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kedudukan, etika kerja serta etika rapat. Panduan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan bidang manajemen SDM. Panduan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi telah di*Review* dan disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat keputusan Dewan Komisaris No: B.13-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman dan tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan Kebijakan Nominasi dan Kebijakan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris ;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen;

Struktur KNR

Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 34/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, sebagai berikut:

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (*ex officio*).
2. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
3. Dewan Komisaris dapat mengangkat Pihak Independen sebagai anggota Komite, dengan ketentuan:
   a) wajib memenuhi syarat:
      i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
      ii. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/ atau Remunerasi; dan
      iii. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
   b) Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
   c) Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
5. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
7. Masa jabatan anggota tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
8. Penggantian anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen;
   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/ atau perbankan.
3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko, bidang keuangan dan/atau perbankan.
4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
   a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko;
   b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
   d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
   e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan

Komite Nominasi dan Remunerasi

f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.

5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
   a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
   b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
8. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan sampai dengan 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Profesi
Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Independen
Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
Rofikoh Rokhim*	Anggota	Komisaris Independen
A. Solichin Lutfiyanto	Anggota	Ex-officio - Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

*) Efektif 1 Februari 2018

Susunan Keanggotaan 22 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
7	Jeffry J. Wurangian *	Anggota	Komisaris
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
9	Hadiyanto**	Anggota	Komisaris
10	Busrul Iman**	Anggota	*Ex-officio* (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

* Efektif sampai dengan 20 September 2018
** Efektif Mulai 1 Oktober 2018
*** Efektif mulai tanggal 1 Juli 2018

Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Andrinof A. Chaniago Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Gator Trihargo Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Wakil Komisaris Utama	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
A. Fuad Rahmany Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
A. Sonny Keraf Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Mahmud Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Vincentius Sonny Loho Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Jeffry J. Wurangian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Nicolaus Teguh Budi Harjanto Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Rofikoh Rokhim Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hadiyanto Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Busrul Iman **Anggota Komite KNR (01 Juli 2017-Sekarang)**	Lahir di Surabaya 1 Februari 1964. Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Ekomomi Akuntansi dari Seklah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan gelar MM Manajemen S*trate*gic dari Universitas Di[ponegoro. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, antara lain Wakil Pemimpin wilayah Palembang (2012-2014), Wakil Pemimpin wilayah Palembang (2014-2015), Kepala Divisi restrukturisasi Kredit Bermasalah (2015-2017), pemimpin Wilayah Malang (2017-2018), dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan *Human Capital* (2018-sekarang).

Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

1. Mempunyai integritas, obyektifitas, mentalitas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi
2. Mampu bersikap independen, yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip *Good Corporate Governance*.
3. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif, diutamakan berpengalaman dalam manajemen SDM antara lain perencanaan suksesi, pengembangan karir, evaluasi kinerja serta berpengalaman mengelola sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja Perusahaan.
5. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
6. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
7. Mampu berkomunikasi dengan efektif.

Independensi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota KNR memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara anggota lainnya memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komisaris Independen merupakan anggota KNR yang tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali Perseroan dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Tugas Tanggung Jawab Wewenang dan Larangan

Fungsi Nominasi

a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan;
   iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
e. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Calon Wakil Perseroan yang akan dijadikan Pengurus Perusahaan anak yang diusulkan oleh Direksi.
g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk meminta informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia dari pihak internal.

Larangan Komite

1. Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Menerima penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris bagi anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite.

KPI dan Pencapaian 2018

Indikator atau kriteria kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dikukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KNR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KNR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksankan proses nominasi pengurus perseroan dan anak perusahaan, evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan.

Secara umum seluruh KPI KNR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KNR tahun 2018 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KNR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KNR dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap pengambilan keputusan.

Kegiatan Komite 2018

Fokus Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Nominasi Direksi BRI

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2017 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi KNR. Adapun proses Nominasi yang terjadi selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Nominasi dalam RUPS Tahunan Tahun 2018.
   Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan proses Nominasi Calon Direksi dan Komisaris dari Internal Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk di Putus dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan Proses Nominasi Direksi dan Rekomendasi KNR adalah sebagai berikut:

No	Materi	Target Waktu dalam RKA	Realisasi Waktu	Output
1	Usulan Nominasi Direksi	Minggu Ketiga Maret 2018	21 Maret 2018	Usulan calon Direktur Utama dan bakal calon anggota Direksi BRI disampaikan melalui Nota Dinas KNR **No.: R.07- KNR/03/2018 tanggal 21 Maret 2018**
2	Perubahan Pengurus BRI dalam RUPSLB 2019	Minggu keeempat Maret 2018	28 Desember 2018	a. Usulan *Update Top Talent* PT. BRI (Persero) Tbk b. Usulan calon Perubahan PT. BRI (Persero) Tbk. disampaikan melalui Nota Dinas KNR **R.17-KNR/12/2018 tanggal 28 Desember 2018**

b. Nominasi dalam RUPSLB Tahun 2019.
Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan proses Nominasi Calon Direksi yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk ditetapka dalam RUPSLB tanggal 03 Januari 2019 sesuai dengan surat Kementerian BUMN No.SR-742/MBU/11/2018 Tanggal 05 November 2018 yang salah satu agendanya adalah perubahan Pengurus Perseroan.

No	Materi	Target Waktu dalam RKA	Realisasi Waktu	Output
1	Perubahan Pengurus BRI dalam RUPSLB 2019	Minggu keempat Maret 2018	28 Desember 2018	1. Usulan *Update Top Talent* PT. BRI (Persero) Tb 2. Usulan calon Perubahan PT. BRI (Persero) Tbk. disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.17-KNR/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

2. Nominasi Calon Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar BRI, salah satu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna adalah mengusulkan Wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan anak yang memberikan kontribusi signifikan bagi perseroan dan/ atau bernilai st*rate*gis. Memperhatikan hal tersebut, selama Tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris telah melaksanakan proses Nominasi terhadap calon wakil persoroan yang diusulkan oleh Direksi untuk ditempatkan kepada anak perusahaan dan Pihak terkait antara lain sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
1	Nominasi Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT BRIsyariah	04 Januari 2018	Usulan Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT BRIsyariah disampaikan dalam Nota Dinas KNR
2	Nominasi Persetujuan Calon Komisaris dan Direksi PT. BRI Life	19 Februari 2018	Usula Calon Komisaris dan Direksi PT. BRI Life disampaikan dalam Nota Dinas KNR
3	Nominasi bakal calon komisaris dan direksi BRI Life	29 Maret 2018	Usulan bakal calon komisaris dan direksi BRI Life disampaikan dalam Nota Dinas KNR
4	Nominasi Persetujuan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRI Agroniaga	29 Maret 2018	Usulan Persetujuan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRI Agroniaga disampaikan dalam Nota Dinas KNR
5	Nominasi Bakal Calon Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura	17 April 2018	Usulan rekomendasi Bakal Calon Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura disampaikan dalam Nota Dinas KNR
6	Nominasi Perubahan Usulan Bakal Calon Komisaris dan Direksi BRI Life	20 April 2018	Usulan Perubahan Usulan Bakal Calon Komisaris dan Direksi BRI Life disampaikan dalam Nota Dinas KNR
7	Nominasi Pengangkatan Anggota Komisaris dan Direksi BRI Multifinance indonesia (BRI Finance)	22 Mei 2018	Usulan Pengangkatan Anggota Komisaris dan Direksi BRI Multifinance indonesia (BRI Finance) disampaikan dalam Nota Dinas KNR

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
8	Nominasi Bakal Calon Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga (BRI Agro)	09 Oktober 2018	Usulan Bakal Calon Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga (BRI Agro) disampaikan dalam Nota Dinas KNR
9	Nominasi Bakal Calon Pengurus PT. BRIsyariah Tbk	21 Desember 2018	Usulan Bakal Calon Pengurus PT. BRIsyariah Tbk disampaikan dalam Nota Dinas KNR
10	Nominasi Calon Pengurus PT BRI Agroniaga Tbk	28 Desember 2018	Nominasi Calon Pengurus PT BRI Agroniaga Tbk disampaikan dalam Nota Dinas KNR

3. Evaluasi Kinerja Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Komite Nominasi dan remunerasi harus melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi sesuai dengan KPI Direksi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi Direksi tersebut antara lain untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi serta melakukan *Review* kembali atas kompetensi masing-masing Direksi.

Pelaksanaan kegiatanEvaluasi kinerja Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Output
Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	Minggu II Maret 2017	02 Maret 2017	Surat tertulis KNR / Dewan Komisaris melalui surat Dewan Komisaris SR.04-KOM/01/2018 Evaluasi Kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk

4. Penyusunan Kebijakan/ Ketentuan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Bahwa dalam rangka memastikan tata kelola pemberian remunerasi untuk mendorong *prudent risk taking* oleh Pejabat Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, bank harus memiliki kebjakan tata kelola remunerasi .

Berdasarkan ketentuan tersebut KNR telah menyusun kebijakan Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI yang telah ditetapkan melalui SK bersama Direksi dan Komisaris SK Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor:09-KOM/BRI/11/2017 dan Nomor 1023-DIR/KPS/11/2017 Surat tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam rangka implementasi kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta mendorong dilakukannya *prudent risk taking*, sebagai wujud peningkatan tata kelola, sebagian remunerasi yang bersifat variabel ditangguhkan pembayarannya untuk jangka waktu tertentu, pada tahun 2018 KNR telah menyusun Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Materi	Target Waktu dalam RKA	Realisasi Waktu	Output
Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Minggu ke II september 2018	12 September 2018	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 04-KOM/09/2018 tanggalm 12 September 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

5. Review Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan dengan hasil keputusan RUPST Tahun 2018, RUPST memberi kewenangan kepada Dewan komisaris untuk menetukan struktur dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan komsiaris kepada Dewan komisaris setelah mendapatkan eprsetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Berdasarkan keptusan tersebut, KNR menyampaikan *Review* dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang meliputi usulan honorarium/gaji Dewan Komisaris dan Direksi, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun 2018, usulan *tantiem* atas kinerja Tahun Buku 2017 untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pelaksanaan *Review* dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu dalam RKA	Realisasi Waktu	Output
Review Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Minggu ke I Juni 2018	05 April 2017	Usulan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: R.06-KNR/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Rekomendasi KNR atas usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan tantiem atas kinerja tahun 2017.

Dalam merumuskan usulan remunerasi KNR dibantu oleh Konsulltan Independen Willis Towers Watson, *Review* dilaksanakan dengan melakukan *survey* kajian berdasarkan *benchmark* dengan perusahaan berkelas dunia di dalam negeri atau regional Asia Tenggara sesuai dengan Permen No.06/MBU/2017 yang antara lain memiliki kriteria skala usaha yang dianggap setara, mempunyai usaha inti yang sejenis atau kompleksitas usaha yang sama, serta dapat diketahui indikator kinerjanya serta dapat diketahui biaya Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan tersebut.

6. Review atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan

KNR menyampaikan rekomendasi mengenai hasil *Review* atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dimaksud menjadi bahan bagi Dewan Komisaris dalam rangka pemberian pendapat dan saran kepada Direksi untuk memastikan Perseroan selalu menetapkan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan visi misi Perseroan. *Review* dilakukan dengan mengevaluasi implementasi Arsitektur *Human Capital*, Kebijakan *Human Capital* dan laporan serta pemaparan Direktur *Human Capital* serta sistem remunerasi Pekerja BRI.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan dan realisasi *Review* atas implementasi remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu	Realisasi Waktu	Output
Review Kebijakan Ketenagakerjaan	Minggu Pertama November 2018	18 Desember 2018	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris kepad Direksi Nomor: R.85-KOM/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Remunerasi Pekerja BRI.

Hal-hal yang menjadi *Concern* KNR dan Dewan Komisaris terkait dengan Kebijakan dan pengelolaan *Human Capital* BRI antara lain sebagai berikut:

a. Mengembangkan program Inovatif untuk menjangkau talenta terbaik dan mendorong BRI menjadi pilihan utama talenta terbaik untuk bekerja.
b. Mengembangkan *Integrated Talent Management System* (ITMS) secara terintegrasi baik di BRI maupun dengan Perusahaan Anak serta mengkaji jenjang karier pegawai untuk memperkuat hubungan kinerja dan kemajuan karir jangka panjang.
c. Strategi dan rencana Manajemen dalam pengelolaan SDM mengahadapi era *digital banking* dan *fintech*.
d. Mendesain kembali penilaian kinerja untuk memastikan proses yang adil dan transparan.
e. Menyelaraskan kembali mekanisme remunerasi untuk memberikan penghargaan terhadap pegawai serta distribusi kerja yang berkeadilan.
f. Mengkaji kembali struktur remunerasi pekerja, khususnya besaran remunerasi yang diterima setiap bulan, sehingga lebih menarik bagi best talent untuk bergabung dengan BRI.
g. Remunerasi bagi pekerja dalam setiap level jabatan comparable dengan industri sehingga mendorong tingkat produktivitas pekerja.
h. Akselerasi pemenuhan formasi Jabatan struktural, diharapkan manajemen melakukan relaksasi dengan memberikan kepercayaan kepada *talent-talent* muda yang bagus maupun *afirmatif* untuk pekerja di daerah untuk dapat memenuhi formasi jabatan tersebut.
i. Mengembangkan strategi dan desain *training* secara konglomerasi dengan perusahaan anak yang menunjang pengetahuan dan kemampuan Pekerja secara koglomerasi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite 2018

Selama Tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan, mencakup:

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris Tahun 2018
3. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS. Usulan tersebut telah melalui proses nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses calon Direksi dan Komisaris yang sesuai dengan Rencana Strategi Perusahaan.
4. Melakukan *Review* dan kajian atas Remunerasi Direksi dan Komisaris sesuai kinerja Perseroan, *size business*, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan.
5. Melaksanakan proses Nominasi dan memberikan rekomendasi calon Pengurus Perseroan dan Perusahaan Anak.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenaiperpanjangan masa kerja anggota Komite yang berasal dari luar Komisaris.
7. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan.
8. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *Review* dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

Komite Nominasi dan Remunerasi

9. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *Review* perkembangan kinerja bulanan Perseroan dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
10. Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota komite selama tahun 2018 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2018.

Rapat Komite

Kebijakan Rapat

Pengaturan Rapat Komite sebagaimana terdapat dalam Piagam Komite adalah sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
6. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
7. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite;
8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang memutuskan;
10. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
11. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
12. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
13. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud;
14. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
15. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
16. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakah Rapat sebanyak 15 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat	No. Notulen	Jumlah Kehadiran	Keterangan
4 Januari 2018	Nominasi Calon pengurus Komisaris & Direksi BRIsyariah	01-KNR/01/2018	7	Kuorum
15 Januari 2018	Wawancara calon kepala divisi SKP	02-KNR/01/2018	7	Kuorum
6 Maret 2018	Proses Usulan Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun 2018, Perubahan Remunerasi Tenaga Ahli Dewan Komiaris	04 - KNR/03/2018	7	Kuorum
13 Maret 2018	Usulan Pengurus BRI Life	03-KNR/03/2018	6	Kuorum
21 Maret 2018	Evaluasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018	06 - KNR/03/2018	9	Kuorum
29 Maret 2018	Usulan Calon Komisaris dan Direktur BRI Life & BRI Agro	05 - KNR/03/2018	6	Kuorum
3 Mei 2018	Pembahasan Remunerasi Direksi & Komisaris bersama Willis Tower Watson	07-KNR/05/2018	6	Kuorum
8 Mei 2018	Pembahasan Remunerasi Direksi & Komisaris bersama Willis Tower Watson	08-KNR/05/2018	7	Kuorum
22 Mei 2018	Nominasi Penggurus BRI Finance	09-KNR/05/2018	8	Kuorum
25 September 2018	a. Penetapan Tanggal Efektif Bpk Hadiyanto Sebagai Komisaris BRI, b. Pembahasan Kontrak Anggota Komite Non Dewan Komisaris.	10-KNR/09/2018	6	Kuorum
8 Oktober 2018	Pembahasan Nominasi Pengurus Bank Agro (Komisaris Utama)	11-KNR/10/2018	5	Kuorum
11 Desember 2018	a. Evaluasi kebijakan remunerasi Pekerja BRI *b. Review* kebijakan promosi, mutasi, dan pengisian formasi jabatan strategis BRI c. Shifting pekerja BRI d. Isu lain terkait kebijakan *Human Capital*	12-KNR/12/2018	6	Kuorum
17 Desember 2018	a. Evaluasi Efektifitas SEVP dalam Organisasi Manajemen BRI; b. Penyusunan *Guideline Assesment* Eksekutif BRI oleh Komisaris dalam rangka mengisi *Talent Pool* BRI dan Kementerian BUMN; c. Persiapan RUPS LB tgl 3 Januari 2019	13-KNR/12/2018	6	Kuorum
21 Desember 2018	Nominasi Penggurus BRI	14-KNR/12/2019	9	Kuorum
21 Desember 2018	Usulan perubahan Dewan Direksi BRI Agroniaga dan BRIsyariah.	15-KNR/12/2020	9	Kuorum

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Andrinof A. Chaniago	Ketua	15	15	100%
Gatot Trihargo	Ketua	15	12	80%
A. Fuad Rahmany	Anggota	15	13	87%
A. Sonny Keraf	Anggota/Ketua	15	13	87%
Mahmud	Anggota	15	14	93%
Rofikoh Rokhim	Anggota	15	14	93%
Vincentius Sonny Loho*	Anggota	5	4	80%
Jeffry J. Wurangian**	Anggota	9	7	78%
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	15	12	80%
Hadiyanto***	Anggota	10	8	80%
A. Solichin Lutfiyanto*****	Anggota	5	4	80%
Busrul Iman******	Anggota	6	6	100%

* Efektif sampai dengan 20 September 2018
** Efektif sampai dengan 20 September 2018
*** Efektif Mulai 1 Oktober 2018
**** Efektif Mulai 1 Oktober 2018
***** Efektif mulai tanggal 1 Juli 2018

Tindak Lanjut Rapat/*Meeting Follow Up*

Dokumen rekomendasi atau hasil *Review* kebijakan yang dikeluarkan oleh KNR dalam Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tanggal	No Surat	Perihal
04-Jan-18	R.01-KNR/01/2018	Rekomendasi Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT. BRIsyariah Tbk.
19-Feb-18	R.02-KNR/02/2018	Rekomendasi Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT. Asuransi BRI Life
13-Mar-18	R.03-KNR/03/2018	Penyesuaian Honorarium Tenaga Ahli Dewan Komisaris
16-Mar-18	R.04-KNR/03/2018	Pengadaan Jasa Konsultan Terkait Penyusunan Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi BRI
29-Mar-18	R.05-KNR/03/2018	Rekomendasi Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT. BRI Agroniaga. Tbk
29-Mar-18	R.05-KNR/03/2018	Rekomendasi Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT. BRI Agroniaga
08-Mei-18	R.06-KNR/05/2018	Rekomendasi KNR Atas Usulan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan Tantiem Atas Kinerja Tahun 2017
21-Mar-18	R.07-KNR/05/2018	Rekomendasi KNR atas Penetapan Bakal Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Akan Diusulkan Dalam RUPST Tahunan BRI Tahun 2015
22-Mei-18	R.08-KNR/05/2018	Rekomendasi Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT BRI Finance Indonesai
14-Agust-18	R.09-KNR/08/2018	Revisi Kebijakan Remunerasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
09-Okt-18	R.10-KNR/10/2018	Rekomendasi Bakal Calon Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk.
11-Des-18	R.11-KNR/12/2018	Permohonan Persetujuan Bakal Calon Pengurus PT BRIsyariah Tbk.
19-Des-18	R.14-KNR/12/2018	Permohonan penetapan Kadiv SKP dan Kepala SKAI BRI
28-Des-18	R.15-KNR/12/2018	Permohonan persetujuan calon pengurus PT. Agroniaga Tbk
28-Des-18	R.16-KNR/12/2018	Rekomendasi TOP Talent BRI
28-Des-18	R.17-KNR/12/2018	Pembahasan Usulan Pengurus BRI

Rencana Rapat 2018

Pembahasan /Discussion	Target Waktu /Time
Nominasi Direksi dan Komisaris	Minggu I Maret 2019
Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	Minggu I Maret 2019
Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak	Minggu IV April 2019
Review Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Minggu II Mei 2019
Review dan penyusunan Struktur Remunerasi Direksi dan Komisaris untuk Tahun 2018	Minggu I Juni 2019
Review Kebijakan *Human Capital*	Minggu I September 2019
Review Kebijakan Remunerasi Pekerja	Minggu I September 2019

Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat Honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2018

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	***Learning & Growth Perspective***	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KNR sesuai dengan POJKPeraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Dekom No: 08-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KNR BRI. Komposisi Anggota KNR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KNR pada Tahun 2019	Piagam KNR telah di review dan di update melalui Nokep Dekom NO : 13-KOM/11/ 2018 Tentang Pedoman tata Tertib KNR.	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Seluruh Anggota KNR Lulus Fit & Propertest OJK dan/ atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	8 (Delapan) Anggota Komisaris anggota KNR dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* OJK dan selalu *update* pendidikan setiap Tahun	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan masa jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Dekom No: 08-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KNR BRI, Masa jabatan ketua dan Anggota KNR tidak melebihi ketentuan	5	5
2	***Internal Process Perspective***	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKAP KNR pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	5	5

Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Sesuai ketentuan, rapat Komite dilaksanakan minimal sekali dalam 4 bulan	Selama tahun 2019 dilaksankan 15 kali rapat KNR	10	10
			Nominasi pengurus BRI	Minimal sekali dalam setahun	1. Usulan calon Direktur Utama dan bakal calon anggota Direksi BRI disampaikan melalui Nota Dinas KNR No.: R.07-KNR/03/2018 tanggal 21 Maret 2018. 2. Usulan perubahan Calon Pengurus PT. BRI (Persero) Tbk. disampaikan melalui Nota Dinas KNR R.17-KNR/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.	10	10
			Nominasi pengurus anak perusahaan	Tentative sesuai dengan usulan Direksi	1. 1. Usulan Bakal Calon Komisaris dan Direktur PT BRIsyariah disampaikan dalam Nota Dinas KNR Nomor: R.01-KNR/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018. 2. Usulan Calon Komisaris dan Direksi PT. BRI Life disampaikan dalam Nota Dinas KNR Nomor: R.01-KNR/02/2018 Tanggal 19 Februari 2018. 3. Usulan Bakal Calon Komisaris dan direksi BRI Agro NIaga disampaikan dalam Nota Dinas KNR Nomor: R.05-KNR/03/2018 Tanggal 29 Maret 2018. 4. Usulan Pengangkatan Anggota Komisaris dan Direksi BRI Multifinance indonesia (BRI Finance) disampaikan dalam Nota Dinas KNR Nomor: R.08-KNR/05/2018 tanggal 22 Mei 2018. 5. Usulan Bakal Calon Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga (BRI Agro) disampaikan dalam Nota Dinas KNR Nomor R.10-KNR/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018. 6. Usulan Bakal Calon Pengurus PT. BRIsyariah Tbk disampaikan dalam Nota Dinas KNR Nomor: R.11-KNR/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 7. Nominasi Calon Pengurus PT BRI Agroniaga Tbk disampaikan dalam Nota Dinas KNR Nomor: R.15-KNR/12/2018 tanggal 28 Desember 2018	10	10

Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
			Reviu dan menyusun rekomendasi Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Usulan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: R.06-KNR/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Rekomendasi KNR atas usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan tantiem atas kinerja tahun 2017.	10	10
			Mereviu/ menyusun Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR telah menyususn Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 04-KOM/09/2018 tanggal12 September 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	10	10
		Pengawasan	Review Kebijakan Ketenagakerjaan dan remunerasi Pekerja secara periodik	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris kepad Direksi Nomor: R.85-KOM/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Remunerasi Pekerja BRI.	10	10
3	***Compliance Perspective***	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Evaluasi kinerja Direksi	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Surat tertulis KNR / Dewan Komisaris melalui surat Dewan Komisaris SR.04-KOM/01/2018 Evaluasi Kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk	5	5
			Pelaksanaan penilaian self assesment kinerja Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Dilaksanakan sekali dengan nilai hasil *self assessment* Dekom 99,97%	5	5
			Penilaian kinerja Organ Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Penilaian Kinerja Komite Dekom dan evaluasi Anggota Komite telah dilaksanakan setiap akhir tahun dan disampaikan dalam Annual Report BRI	5	5
Total						**100**	**100**

Opini Komite Nominasi & Remunerasi Terhadap Pelaksanaan Nominasi Dan Remunerasi Perusahaan

Komite Remunerasi dan Nominasi menilai, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan calon Direksi, setiap calon terlebih dahulu harus lulus *assessment* yang dilakukan oleh pihak independen dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi calon pengurus Perseroan berdasarkan data Top talent BRI yang berasal dari Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau Direksi Perusahaan Anak yang selanjutnya menjalani proses *fit and proper test* oleh Dewan Komisaris dengan metode wawancara langsung.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai, pengukuran kinerja untuk Dewan Komisaris dan untuk Direksi yang dilakukan secara kolektif kolegial saat ini dinilai telah mencukupi. Selain saat ini telah dikembangkan penilaian kinerja individu, khususnya untuk Direksi, yang dapat mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Direksi tanpa mengesampingkan bahwa terdapat kinerja individu Direksi yang bersifat kolegial (dipengaruhi/ mempengaruhi kinerja Direksi lain atau harus dikerjakan bersama Direksi lain).

Dalam hal kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat satu tingkat dibawah Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi menilai bahwa Direksi telah menerapkan sistem, kriteria dan prosedur yang prudent, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Terkait dengan remunerasi, Perusahaan dinilai telah menerapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan kinerja yang dicapai, *benchmark* ke industri dan *peers group* serta didasarkan pada evaluasi yang komprehensif yang dibantu oleh pihak independen yang kompeten. Demikian pula dengan penetapan remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan diterapkan secara wajar, adil dan memotivasi pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan remunerasi yang diberikan dalam industri.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan Suksesi Direksi ditetapkan dalam kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015.
Secara Umum Kebijakan Sukses Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

Kebijakan Umum Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
b. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu:
    1) Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
    2) Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
    3) Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
c. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris;
d. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
f. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
    1) Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
    2) Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon;
g. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

Prosedur Nominasi Direksi dan Komisaris

Prosedur pemilihan Bakal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:
a. Komite Nominasi dan Remunrasi (KNR) menjaring Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan assessment oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Bakal calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi. C
c. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal calon, sebagai berikut:
    1) Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama;
    2) Komite Nominasi dan Remunerasi menjaring bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjaringan ini melibatkan lembaga assessment profesional/

Komite Nominasi dan Remunerasi

eksternal atau *Professional Search Firm* yaitu: PPM Manajemen Assesment Center Indonesia (AcI) Telkom), DDI, Bina Potensia, SHL dan LMFE UI, selanjutnya hasil assessment tersebut diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.

3) Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/ perusahaan patungan, evaluasi dilakukan dengan cara:
   i. Melakukan interview/wawancara terhadap Bakal calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
   ii. Meminta Bakal calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal calon sesuai dengan persyaratan.
4) Untuk Bakal calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.

d. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal calon yang terpilih menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
e. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
f. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk sleanjutnya di sampaikan dalam RUPS.
g. RUPS Menentukan susunan dan perubahan anggota Direksi BRI, dalam hal anggota Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK. calon anggota Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
h. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
i. OJK berwenang untuk Memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau peNolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Komite Pengawas Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merupakan salah satu Organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. KPMR bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

1. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR). Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota KPMR. Panduan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi KPMR dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko BRI.

Panduan kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko di *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau regulasi terkait lain yang berlaku. Panduan Kerja KPMR disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengangkatan dan Pemberhentian

KPMR dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan penerapan manajemen risiko Perseroan. Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan melalui SK Direksi Nokep: 317-DIR/KPS/04/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Penetapan Kembali Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Struktur Komite

1) Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2) Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite.

Struktur dan Keanggotaan anggota KPMR per Desember 2018 adalah:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keterangan
Mahmud	Ketua	15 Maret 2017-sekarang	Komisaris Independen
Andrinof A. Chaniago	Anggota	15 Maret 2017-Sekarang	Komisaris Utama
A. Fuad Rahmany	Anggota	Juni 2015 – sekarang	Komisaris Independen
Jeffry J. Wurangian	Anggota	Juni 2015 – sekarang	Komisaris
Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	15 Maret 2017-sekarang	Komisaris
Indrayeti	Anggota	Juni 2015 – sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
Tubagus A. Maulana	Anggota	Juni 2015 – sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
Suindiyo	Anggota	Juni 2015 – sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
Totok Hermiyanto	Anggota	Juni 2015 – sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan

Komite Pengawas Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite

1) Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen;
   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2) Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/ atau perbankan.
3) Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/ atau perbankan.
4) Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
   a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko;
   b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
   d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
   e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
   f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6) Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
   a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
   b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
7) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

Profil Komite

Profil anggota Komite Pemantau Risiko Periode 2018 adalah sebagai berikut:

Mahmud Ketua KPMR/ Komisaris Independen Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per 15 Maret 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Andrinof A. Chaniago Angota KPMR/ Komisaris Independen Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per 15 Maret 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Komite Pengawas Manajemen Risiko

A. Fuad Rahmany Angota KPMR/ Komisaris Independen Periode: Juni 2015-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per Juni 2015, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Jeffry J. Wurangian Angota KPMR/ Komisaris Independen Periode: Juni 2015-September 2018	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per Juni 2015 – September 2018, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Nicolaus T. Budi Harjanto Angota KPMR/ Komisaris Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per 15 Maret 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Indrayeti Angota KPMR Pihak Independen Periode: Agustus 2014-Sekarang	Lahir di Sungai Liat, 9 Oktober 1972. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Agustus 2014. Sebelumnya berkarir di bank BUMN lain dan beberapa bank swasta dalam berbagai posisi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995) dan gelar *Master of Commerce* dari University of New South Wales (2000).
Tubagus A. Maulana Angota KPMR Pihak Independen Periode: Februari 2016-Sekarang	Lahir di Jakarta, 7 Mei 1971. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Februari 2016. Sebelumnya berkarir sebagai dosen dan konsultan. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari IPB (1995) dan gelar *MBA Banking and Finance* dari University of Birmingham (2000), MSc *Finance* dari University of Strathclyde (2001) dan PhD *in Finance* dari University of Strathclyde (2007).
Suindiyo Angota KPMR Pihak Independen Periode: Desember 2015-Sekarang	Lahir di Blora 27 April 1959. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Desember 2015. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk dalam berbagai posisi antara lain Inspektur (*Executive Vice President* bidang Audit), *Vice President Loan Restructuring and Recovery*, *Vice President* Administrasi Kredit dan *Vice President* Pusdiklat. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Komisaris Lembaga Keuangan Non Bank. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1985) dan gelar *Master of Business Administration Finance* dari Virginia *Polytechnic Institute and State University* (Virginia Tech) (1994).
Totok Hermiyanto Angota KPMR Pihak Independen Periode: Desember 2015-Desember 2018	Lahir di Banjarmasin, 22 Juni 1959. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Desember 2015. Sebelumnya berkarir lebih dari 30 tahun di Bank Indonesia sebagai Pengawas Bank, Auditor dan Kepala Perwakilan. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro 1983 dan *Master of Business Administration* dari Wollongong University Australia (1996).

Komite Pengawas Manajemen Risiko

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Sesuai dengan Pedoman Tata tertib KPMR Anggota Komite paling kurang terdiri dari Seorang Komisaris Independen, Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

a. Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
b. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.

Independensi

Seluruh anggota KPMR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI, bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Syarat Independensi Anggota KPMR BRI antara lain sebagai berikut:

a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota KPMR;
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi;
d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
e. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain.

No	Kriteria Independensi	Mahmud	Andrinof A. Chaniago	A. Fuad Rahamny	Jeffry J. Wurangian	Nicolaus T. Budi Harjanto	Indrayeti	Tubagus NA. Maulana	Suindiyo	Totok Hermiyanto
1.	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Kriteria Independensi	Mahmud	Andrinof A. Chaniago	A. Fuad Rahamny	Jeffry J. Wurangian	Nicolaus T. Budi Harjanto	Indrayeti	Tubagus NA. Maulana	Suindiyo	Totok Hermiyanto
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

KPMR membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/*limit* risiko yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.

Tugas dan tanggung KPMR adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan;
7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;

11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko Perseroan;
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan;
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan;
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan; dan
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

KPI dan Pencapaian 2018

Indikator atau kriteria kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dikukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KPMR dalam setiap rapat.

Adapun program kerja KPMR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menelaah dan memantau penerapan manajemen risiko di BRI.

Secara umum seluruh KPI KPMR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPMR tahun 2018 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KPMR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KPMR dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

KEGIATAN KOMITE 2018

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
1.	Mengevaluasi dan menganalisis secara berkala kecukupan kebijakan umum manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan	Telah dilakukan pada Desember 2018	Nodin B.34-KPMR/12/2018 tanggal 19 Desember 2018

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
2.	Mengevaluasi dan menganalisis kebijakan umum perkreditan dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris	Telah dilakukan pada September 2018, sesuai regulator setiap 3 tahun Kebijakan Perkreditan harus di*review* dan *review* terakhir dilakukan pada Januari 2016.	Nodin B. 25- KPMR/09/2018 tanggal 18 September 2018 Perubahan terkait dengan Peraturan OJK No.42/POJK.O3/2O17, tanggal 12 Juli 2017 dan perubahan nomenklatur Direktorat (Perubahan Organisasi BRI)
3.	Mengevaluasi penerapan *Good Pension Fund Governance* yang mencakup aspek-aspek tata kelola DPLK, manajemen risiko, kebijakan investasi dan aturan-aturan baik internal maupun eksternal	Evaluasi telah dilakukan pada Juni 2018, sesuai dengan batas waktu ketentuan regulator.	Nodin B. 15-KPMR/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 • Melengkapi pedoman tata kelola agar sesuai pasal 4 POJK No. 16/ POJK.05/2016. • Melakukan evaluasi terhadap Pedoman Penerapan Manajemen Risiko DPLK BRI sebagaimana disyaratkan pada ayat 2 pasal 5 POJK Nomor 1/POJK.05/2015 • Memastikan terpenuhinya seluruh rekomendasi OJK terkait dengan perbaikan peringkat risiko operasional DPLK BRI
4.	Mengevaluasi dan menganalisis laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan	• Maret 2018 • Mei 2018 • Agustus 2018 • Desember 2018	Nodin B. 09- KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 Nodin B. 14-KPMR/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 Nodin B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Nodin B. 31-KPMR/12/2018 tanggal 14 Desember 2018
5.	Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan	• Evaluasi pengukuran risiko dengan melakukan *review* parameter dan *limit* risiko • Evaluasi pengukuran Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Kebijakan *limit*, parameter risiko dan *risk statement* serta penyempurnaan RCSA berdasarkan hasil rapat KPMR dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 15-17 Maret 2018 di Sentul.

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
6.	Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	• Evaluasi RMC berdasarkan rapat 21 Februari 2018, 30 Mei 2018 dan 28 September 2018. • Evaluasi SKMR berdasarkan hasil kunjungan ke unit-unit kerja, laporan-laporan yang dibuat oleh DMR, laporan hasil audit dan masukan dari regulator.	• Menyarankan agar identitifikasi risiko memperhatikan dinamika bisnis dan kondisi ekonomi. • Mendiskusikan dengan DMR *issue* terkait likuiditas BRI yang masuk dalam pra krisis likuiditas level 1, dan berpendapat bahwa manajemen risiko likuiditas di BRI telah dijalankan sesesuai dengan prosedur yang berlaku.
7.	Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan	Evaluasi telah dilaksanakan pada: • Maret 2018 untuk semester II/2017 • Agustus 2018 semester I/2018	Nodin B. 09- KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 Nodin B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018
8.	Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan	Evaluasi telah dilaksanakan pada: • Maret 2018 untuk semester II/2017 • Agustus 2018 semester I/2018	Nodin B. 09- KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 Nodin B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018
9.	Mengevaluasi dan menganalisis Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank	Evaluasi telah dilaksanakan pada: • Maret 2018 untuk semester II/2017 • Agustus 2018 semester I/2018	Nodin B. 09- KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 Nodin B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
10.	Mengevaluasi Portfolio Perkreditan/ Portfolio *Guideline*	• Evaluasi portofolio guidelines • Evaluasi portofolio aktiva produktif, termasuk juga restrukturisasi kredit dan kredit bermasalah segmen menengah dan korporasi	Nodin No. B. 12-KPMR/04/2018 tanggal 30 April 2018 Nodin No. B. 16-KPMR/07/2018 tanggal 26 Juli 2018
11.	Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris	Memberikan masukan 10 proposal kredit untuk 2 kali rapat konsultasi kredit	• Nodin B. 04 -KPMR/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 (7 debitur). • Nodin B. 21 –KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 (3 debitur).
12.	Mengevaluasi dan menganalisis paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris	Evaluasi dan analisis proposal penyediaan dana/modal kepada pihak terkait	• Nodin B. 02 -KPMR/01/2018 tanggal 9 Januari 2018. • Nodin No. R. 02-KPMR/07/2018 tanggal 03 Juli 2018. • Nodin No. R. 32-KPMR/12/2018 tanggal 18 Desember 2018.
13.	Mengevaluasi recovery plan BRI secara tahunan dan memberikan rekomendasi penyempurnaannya kepada Komisaris BRI mencakup indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.	November 2018	· Nodin B.29 –KPMR/11/2018 tanggal 27 November 2018.

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
14.	Mengevaluasi dan menganalisa rencana aksi korporasi yang meliputi namun tidak terbatas pada tambahan modal pada perusahaan anak, penyertaan modal/akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan dan rencana *strate*gis BRI lainnya.	Telah dilakukan *review* untuk rencana aksi korporasi	• Nodin No. B. 01-KPMR/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 persetujuan tambahan modal kepada perusahaan anak tahun 2018 • Nodin No. B. 06-KPMR/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 persetujuan peningkatan penyertaan modal kepada perusahaan anak melalui mekanisme kapitalisasi laba ditahan • Nodin No. B. 05-KPMR/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 evaluasi rencana *strate*gic partnership perusahaan anak. • Nodin No. B. 10-KPMR/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 Persetujuan Tambahan Modal kepada perusahaan anak dan rencana program MESOP serta LTI perusahaan anak. • Nodin No. R. 01-KPMR/04/2018 tanggal 27 April 2018 persetujuan tambahan modal kepada PT. BRI Agroniaga, Tbk dan rencana program MESOP perusahaan anak. • Nodin No. B. 19 –KPMR/10/2018 tanggal 10 Agustus persetujuan penyertaan modal kepada perusahaan Ventura. • Nodin No. B. 20-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 persetujuan penyertaan modal kepada perusahaan Sekuritas • Nodin No. B. 24-KPMR/09/2018 tanggal 18 September 2018 persetujuan penyertaan modal kepada perusahaan Investment Management • Nodin No. B. 26-KPMR/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 persetujuan tambahan penyertaan modal kepada anak perusahaan.

Komite Pengawas Manajemen Risiko

Pendidikan dan Pelatihan 2018

Anggota KPMR BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; atau minimal dua tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan. Latar belakang anggota KPMR BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen st*rate*gis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota KPMR selama tahun 2018 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2018.

Rapat Komite

Kebijakan Rapat Kebijakan Rapat KPMR adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
6. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen;
8. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat;
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite yang memutuskan;
11. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
12. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
13. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
14. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
15. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
16. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurangkurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen memberikan persetujuannya secara tertulis.

Komite Pengawas Manajemen Risiko

Pelaksanaan Rapat Tahun 2018

Pada tahun 2018, KPMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan sebagai berikut :

Tanggal/Date	Agenda	Jumlah Kehadiran Anggota / Total present members	Keterangan/ *Remarks*
Jumat, 2 Februari 2018	1. Profil risiko Triwulan IVI tahun 2017 2. Pelaksanaan fungsi kepatuhan & GCG semester II tahun 2017 3. Pelaksanaan program APU & PTT semester II tahun 2017 4. Strategi Anti *Fraud* Semester II tahun 2017. 5. Penilaian tingkat kesehatan bank semester II tahun 2017	6	Kuorum
Selasa, 17 April 2018	Pembahasan Profil Risiko TW I Tahun 2018	9	Kuorum
Selasa, 7 Agustus 2018	Profil Risiko triwulan II tahun 2018 Fungsi Kepatuhan triwulan II tahun 2018 Tingkat Kesehatan Bank triwulan II tahun 2018 Strategi Anti *Fraud*	6	Kuorum
Selasa, 13 November 2018	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2018	8	Kuorum

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Mahmud	Ketua	4	4	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	4	3	75%
A. Fuad Rahmany	Anggota	4	4	100%
Jeffry J. Wurangian	Anggota	3	2	67%
Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	4	3	75%
Indrayeti	Anggota	4	2	50%
Tubagus A. Maulana	Anggota	4	4	100%
Suindiyo	Anggota	4	4	100%
Totok Hermiyanto	Anggota	4	3	75%

Remunerasi KMPR

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat Honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Komite Pengawas Manajemen Risiko

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2018

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	***Learning & Growth Perspective***	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KPMR sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Dekom No: 06-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam KPMR pada Tahun 2019	Pada Tahun 2019 telah dilakukan reviu dan tidak ada perubahan terhadap piagam KPMR	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KPMR dari Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KTKT telah lulus *fit & proper test* OJK serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KPMR	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Dekom No: 06-KOM/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KPMR BRI, Masa jabtan ketua dan Anggota KPMR tidak melebihi ketentuan	5	5
2	***Internal Process Perspective***	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KPMR pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	RKAP KTKT pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 4 kali rapat.	Selama Tahun 2018 dilaksanakan 4 kali Rapat KPMR. Selain itu KPMR juga ikut aktif dalam rapat bersama Dewan Komisaris	5	5
			Evaluasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris	Seluruh paket pemberian kredit di atas jumlah tertentu di evaluasi sesuai ketentuan	Rekomendasi, saran dan masukan hasil evaluasi disampaikan melalui Nota Dinas No: B. 04 -KPMR/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 (7 debitur) dan Nota Dinas B. 21 –KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 (3 debitur)	5	5
			Evaluasi atas penyediaan dana bagi pihak terkait	Seluruh penyediaan dana kepada Pihak terkait di evaluasi sesuai ketentuan	Kajian, Evaluasi, masukan dan saran KPMR disampaikan melalaui: 1. Nota Dinas No: B. 02 -KPMR/01/2018 tanggal 9 Januari 2018. 2. Nota Dinas No: R. 02-KPMR/07/2018 tanggal 03 Juli 2018. 3. Nota Dinas No:R. 32-KPMR/12/2018 tanggal 18 Desember 2018.	5	5

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Rencana Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris di evaluasi sesuai ketentuan	1. Reviu, evaluasi, masukan dan saran KPMR disampaikan melalaui: 1. Nota Dinas No. B. 06-KPMR/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 persetujuan peningkatan penyertaan modal kepada perusahaan anak melalui mekanisme kapitalisasi laba ditahan 2. Nota Dinas No. B. 05-KPMR/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 evaluasi rencana strategic partnership perusahaan anak. 3. Nota Dinas No. B. 10-KPMR/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 Persetujuan Tambahan Modal kepada perusahaan anak dan rencana program MESOP serta LTI perusahaan anak. 4. Nota Dinas No. R. 01-KPMR/04/2018 tanggal 27 April 2018 persetujuan tambahan modal kepada PT. BRI Agroniaga, Tbk dan rencana program MESOP perusahaan anak. 5. Nota Dinas No. B. 19 – KPMR/10/2018 tanggal 10 Agustus persetujuan penyertaan modal kepada perusahaan Ventura. 6. Nota Dinas No. B. 20-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 persetujuan penyertaan modal kepada perusahaan Sekuritas 7. Nota Dinas No. B. 24-KPMR/09/2018 tanggal 18 September 2018 persetujuan penyertaan modal kepada perusahaan Investment Management 8. Nodin No. B. 26-KPMR/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 persetujuan tambahan penyertaan modal kepada anak perusahaan.	10	10
		Pengawasan	Review kecukupan kebijakan umum manajemen risiko dan *Recovery Plan*	Sekali setahun	1. Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui Nota Dinas B.34-KPMR/12/2018 tanggal 19 Desember 2018. 2. Kajian, rekomendasi dan saran disampaikan melalui Nota Dinas No: B.29 –KPMR/11/2018 tanggal 27 November 2018.	5	5

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
			Review kebijakan umum perkreditan dan Evaluasi portfolio perkreditan/ *portfolio guideline*	sekali setahun	Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui 1. Nota Dinas B. 25- KPMR/09/2018 tanggal 18 September 2018. 2. Nota Dinas No: B. 12-KPMR/04/2018 tanggal 30 April 2018 3. Nota Dinas No: B. 16-KPMR/07/2018 tanggal 26 Juli 2018.	5	5
			Review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik	Setiap Semester	Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui: 1. Nota Dinas No: B. 09-KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 2. Nota Dinas No: B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018	5	5
			Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendaaan Terorisme (APU & PPT)	Setiap Semester	Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui : 1. Nota Dinas No: B. 09-KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 2. Nota Dinas No: B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018	5	5
			Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *fraud* Perseroan	Setiap Semester	Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui20/03/2019: 1. Nota Dinas No: B. 09-KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 2. Nota Dinas No: B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018	5	5
			Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan	sekali setahun	Kebijakan limit, parameter risiko dan risk statement serta penyempurnaan RCSA termuat dalam notulen rapat KPMR dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 15-17 Maret 2018	5	5

Komite Pengawas Manajemen Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
3	***Compliance Perspective***	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko Perseroan	Setiap Triwulan	Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui: 1. Nota Dinas No: B. 09- KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 2. Nota Dinas NO B. 14-KPMR/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 3. Nota Dinas No: B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 4. Nota Dinas No: B. 31-KPMR/12/2018 tanggal 14 Desember 2018	10	10
			Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai kentetuan	Setiap Semester	Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui: 1. Nota Dinas No: B. 09-KPMR/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 2. Nota Dinas No: B. 22-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018	5	5
			Evaluasi penerapan *Good Pension Fund Governance*.	Setiap Semester	Rekomendasi, saran dan masukan disampaikan disampaikan melalui Nota Dinas No: B. 15-KPMR/06/2018 tanggal 26 Juni 2018	5	5
Total						**100**	**100**

Opini KMPR Terhadap Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan

Berdasarkan hasil pengawasan aktif selama tahun 2018 melalui rapat, kunjungan kerja, konsultasi dan *review*, komite menyampaikan bahwa penerapan kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dari risiko yang diambil telah sesuai dengan *appetite risk* yang ditetapkan (*low to moderate*) sampai dengan triwulan IV tahun 2018, tingkat kesehatan Bank yang memperoleh peringkat komposit 2 (Sehat) pada Juni 2018 serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham seiring dengan perkembangan bisnis di era digital ekonomi dan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan manajemen.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) merupakan salah satu organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. KTKT bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

KTKT membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar tata kelola yang berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran diterapkan secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan.

Dasar Hukum

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Piagam Komite

Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengangkatan dan Pemberhentian

KTKT adalah Komite membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan (oversight) guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan secara terintegrasi. KTKT bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktek pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi. Ketua dan Anggota KTKT ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 10-KOM/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintergrasi (KTKT).

Struktur Komite

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama;
3. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Komite dapat dibantu oleh Staf dan/atau Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang dapat berasal dari kalangan intern maupun ekstern Bank

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari satu Komisaris dari setiap anggota konglomerasi keuangan BRI, seorang pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota;
   b. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRIsyariah sebagai anggota.

3. Setiap anggota Komite harus independen dengan pengertian:
   a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;
   c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
   d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
4. Penunjukkan dan penggantian anggota Komite ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, khusus untuk anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen, berlaku ketentuan:
   a. Dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
   b. Masa kerja ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris jangka waktu kontrak dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite; dan
6. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen	15 Maret 2017-Sekarang
2.	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama/Independen	19 Juli 2017-Sekarang
3.	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen	19 Mei 2015-Sekarang
4.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris	19 Mei 2015-22 Maret 2018
5.	Hadiyanto	Anggota	Komisaris	21 September 2018 - Sekarang
6.	Bambang Soepeno	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Agroniaga, Tbk	19 Mei 2015-2018
7.	Heru Sukanto	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Agroniaga, Tbk	7 Agustus 2018-Sekarang
8.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRIsyariah	7 Agustus 2018-Sekarang
9.	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah PT BRIsyariah	19 Mei 2015-Sekarang
10.	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	September 2017-Sekarang
11.	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia	27 Maret 2017-Sekarang
12.	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015-Sekarang
13.	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015- Sekarang

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Komite

Profil Anggota KTKT per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Mahmud Ketua KTKT/ Komisaris Independen Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Gatot Trihargo Angota KTKT / Wakil Komisaris Utama Periode: 19 Mei 2015-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Hadiyanto Angota KTKT / Komisaris Periode: 21 September 2018 - Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 21 September 2018, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Heru Sukanto Angota KTKT Komisaris Independen BRI Agro 7 Agustus 2018-Sekarang	Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya pada tanggal 05 September 1957. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1982) dan gelar Megister Pemasaran dari STM PPM lulus tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBk, berdasarkan RUPS tanggal 12 April 2017. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Bank BRI Jakarta Veteran tahun 1998-2001, Wapinwil Ritel Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya tahun 2001-2002, PJ. Kepala Divisi Bisnis Umum Bank BRI tahun 2002-2004, Pemimpin wilayah Bank BRI Makassar tahun 2004-2005, Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank BRI Jakarta tahun 2005-2007, Pemimpin Wilayah Bank BRI Jakarta 2 tahun 2007-2008, Kepala Divisi RPKB Bank BRI tahun 2008-2009, Pemimpin Wilayah Bank BRI Surabaya tahun 2009-2012, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk tahun 2012-2016 dan Direktur Bank Banten 2016.
Hermanto Siregar Angota KTKT Komisaris Utama BRIsyariah Periode: 7 Agustus 2018-Sekarang	Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1963. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1986), Gelar Master Economics dari Agricultural Economics University of New England (1991), Gelar Doktor Economics dari Macro Econometrics Lincoln University (2001). Memiliki pengalaman sebagai Dosen/ Guru Besar IPB (1988 - Sekarang) Institut Pertanian Bogor, Wakil Rektor IPB (2008 - Sekarang), Komisaris Independen PT. PNM (Persero) (2006 - 2007), Komisaris Utama PT. PNM (Persero) (2007 - 2011), Anggota Komite Ekonomi Nasional (20010 - 2014), Komisaris PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011 - 2015), Komisaris Independen (2015 - sekarang), PT. Bank BRISyariah, Komisaris Utama (2018 - sekarang), PT. Bank BRISyariah.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

M. Gunawan Yasni
Angota KTKT
Dewan Pengawas BRIsyariah
Periode: Juni 2015-Sekarang

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 17 September 1969. Menyelesaikan Strata 1(S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntasi Universitas Indonesia (1993) dan meraih gelar Magister Management Keuangan dari Prasetya Mulya pada (1995).

Selama berkarir pernah menjadi Manajer PT Pacific 2000 Investindo (Securities Financial Services), *Deputy Head of Product Development* PT Bahana Artha Ventura (Venture Capital) Jakarta (2000), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Asuransi SIMAS Syariah (2004ñ2005), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Jaminan Kredit Indonesia (2006), Advisor-Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (2009), Anggota Dewan Pengawas Syariah BRIsyariah (2008-sekarang) dan aktif sebagai konsultan dan pengajar senior dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk beberapa institusi keuangan, sebagaimana untuk institusi pendidikan (Pasca Sarjana).

Sertifikasi yang dimiliki antara lain sebagai *Certified Islamic Financial Analyst* dari Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah & Islam Universitas Indonesia, Fellow di Islamic Insurance Society (FIIS) dan pemegang Sertifikasi Level Lanjutan (Level IV) Manajemen Risiko Perbankan dan Memiliki izin Bapepam sebagai Investment Manager, Underwriter & Broker-Dealer.

Mulasaba Hutabarat
Angota KTKT
Komisaris Independen BRI Life
Periode: September 2017-Sekarang

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 6 Januari 1954. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Ekonomomi Studi Pembangunan Universitas Indonesia (1982) dan S2 di Jurusan Ekonomi, Indiana University, USA.

Beliau pernah menjabat di berbagai posisi penting di Kementerian Keuangan antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (2000-2006), Kepala Biro Dana Pensiun, Bapepam-Lk (2006-2012), Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Bapepam-Lk (2012-2013), Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2013-2014). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pelindo I Medan (2002-2007), Komisaris PT Bank BTN (2008-2012), Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (2014-2016), Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (2015-Sekarang), Komisaris Independen PT Sinar Mas Multi Finance (2014-sekarang), Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (2014-sekarang). Berbagai pelatihan yang pernah diikuti antara lain Erma Bali International Seminar *On Enterprise Risk Management* 2015, *Strategy To Be A Winner In Crisis: "Refocusing On Credit Risk Management, Pricing, Asset & Liability Management And Be Prepared In Upcoming Regulations"* Frankfurt, Jerman 2012, Manajemen Risiko Tingkat I (Satu) 2010, Diklat SPAMA 1998, *Job Evaluation Workshop* 2001.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Boyke Budiono Angota KTKT Komisaris Independen BRI Finance Periode: 27 Maret 2017-Sekarang	Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 27 Agustus 1957. Mendapatkan gelar Sarjana Pertanian di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan gelar MBA bidang Operation Management & Management Information System di University of Colorado, Boulder, USA. Pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi *Consumer Banking*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2006), Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandung, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2007), Direktur Keuangan, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (2007-2012), Direktur Utama, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (2012-2103). Saat ini menjabat sebagai Private Management Consultant, PT Makmur Jaya Kreasindo (2013-sekarang) dan Komisaris Independen PT BRI Multifinance (2017-Sekarang).
Indrayeti Angota KTKT Pihak Independen Periode: 19 Mei 2015-Sekarang	Warga Negara Indonesia. Lahir di Sungai Liat, 9 Oktober 1972. Sebelumnya berkarir di bank BUMN lain dan beberapa bank swasta dalam berbagai posisi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995) dan gelar Master of Commerce dari University of New South Wales (2000).
Tubagus Nur Ahmad Maulana Angota KTKT Pihak Independen Periode: 19 Mei 2015-Sekarang	Warga Negara Indonesia. lahir di Jakarta, 7 Mei 1971. Sebelumnya berkarir sebagai dosen dan konsultan. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari IPB (1995) dan gelar MBA Banking and Finance dari University of Birmingham (2000), MSc Finance dari University of Strathclyde (2001) dan PhD in Finance dari University of Strathclyde (2007).

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

1. Pihak Independen yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan pengamalaman
2. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan entitas anak antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinisp *Good Corporate Governance* (GCG)
4. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
5. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRIsyariah sebagai anggota

Independensi

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KTKT tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria Independensi	Mahmud	Andrinof A. Chaniago	Gatoto Trihargo	Hadiyanto	Heru Sukanto	Hermanto Siregar	M. Gunawan Yasni	Mulasaba Hutabarat	Boyke Budiono	Indrayeti	Tubagus NA. Maulana
1.	Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu;
3. Memberikan masukan *strat*egis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi *(Self Assessment)* setiap semester kepada Direksi BRI.
5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.

Wewenang

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengendalian intern secara terintegrasi;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

KPI dan Pencapaian 2018

Indikator atau kriteria kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dikukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dna tingkat kehadiran Anggota TKT dalam setiap rapat. Adapun program kerja KTKT disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan dan memberikan masukan/saran dalam hal pengelolaan manajemen risiko terintegrasi, Funsgi kepuahn terintegrasi dan audit terientegrasi di entitas utama dan entitas anak.

Secara umum seluruh KPI Komite Tata Kelola terintegrasi telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KTKT tahun 2018 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KTKT yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KTKT dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite 2018

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
1.	Perubahan dan penetapan anggota KTKT konglomerasi keuangan BRI	*Review* terhadap usulan anggota KTKT dari LJK.	· Penetapan Bapak Mahmud sebagai Ketua KTKT dan Bapak Andrinof A. Chaniago sebagai anggota KTKT berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 04-KOM/BRI/03/2017 · Penetapan Bpk Eko Bambang Suharno sebagai anggota KTKT menggantikan Bpk Indra Kesuma berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2017 · Penetapan Bapak Hadiyanto, Bapak Heru Sukanto, Bapak Hermanto Siregar sebagai anggota KTKT berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 03-KOM/BRI/08/2018

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
2.	Evaluasi dan rekomendasi pertumbuhan *non organic*/LJK	Telah dilakukan	· Nodin No. R. 01-KPMR/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 persetujuan tambahan modal kepada PT. BRIsyariah tahun 2018 · Nodin No. B. 06-KPMR/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 persetujuan peningkatan penyertaan modal kepada PT. BRIsyariah tahun 2018 melalui mekanisme kapitalisasi laba ditahan · Nodin No. B. 05-KPMR/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 evaluasi rencana st*rate*gic partnership BRI Life · Nodin No. B. 10-KPMR/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 Persetujuan Tambahan Modal kepada PT. BRI Agroniaga, Tbk dan rencana program MESOP serta LTI PT. BRI Agroniaga, Tbk · Nodin No. B. 01-KPMR/01/2018 tanggal 27 April 2018 persetujuan tambahan modal kepada PT. BRI Agroniaga, Tbk dan rencana program MESOP PT BRI Agroniaga, Tbk · Nodin No. B. 01-KPMR/01/2018 tanggal 27 April 2018 persetujuan penyertaan modal kepada PT. Sarana NTT Ventura sebesar Rp3,09 milyar dan tambahan modal sebesar Rp200 milyar · Nodin No. B. 20-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 persetujuan penyertaan modal kepada PT. Danareksa Sekuritas · Nodin No. B. 24-KPMR/08/2018 tanggal 18 September 2018 persetujuan penyertaan modal kepada PT. Danareksa Investment Management · Nodin No. B. 26-KPMR/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 persetujuan tambahan penyertaan modal kepada PT. BRI Multifinance
3	Evaluasi dan rekomendasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi		Belum terdapat usulan perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Namun demikian, komite akan menyarankan kepada manajemen untuk melakukan *review* terhadap pedoman pada rapat KTKT mendatangseiring dengan penambahan anggota konglomerasi keuangan BRI yaitu Danareksa sekuritas di mana industri sekuritas belum tercakup di dalam pedoman TKT BRI.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
4	Evaluasi Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi. Dilakukan semesteran dengan memberikan saran/ rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan/ penyempurnaan		Hasil evaluasi terkait kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui nota dinas dengan rincian sebagai berikut:
5	Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) Terintegrasi	Telah dilakukan bersamaan dengan *review* KUMR BRI pada bulan Desember 2018	Nodin B.34-KPMR/12/2018 tanggal 19 Desember 2018. Berdasarkan hasil *review*, tidak ada perubahan terhadap KUMR Terintegrasi.
6	Profil Risiko Terintegrasi secara semesteran dan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan/penyempurnaan	Evaluasi profil risiko terintegrasi telah dilakukan untuk Semester II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018	Nodin B. 09-KTKT/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan Nodin B. 12-KTKT/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018. Berdasarkan hasil evaluasi profil risiko terintegrasi, risiko terintegrasi BRI telah dikelola dengan baik yaitu tingkat risiko stabil yang berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*) di mana kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan *appetite risk* yang ditetapkan.
7	Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI Periode Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018	KTKT bertanggung jawab dan telah melakukan Self Assessment terhadap 2 faktor yaitu: • Melaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama • Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	Nodin B.01-KTKT/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 self assessment semester II/2017 BRI menilai semua aspek memperoleh skor 1 kecuali proses tugas dan tanggung jawab KTKT mendapat memperoleh skor 2. Nodin B.10-KTKT/01/2018 tanggal 7 Agustus 2018 self assessment semester I/2018 BRI menilai semua aspek memperoleh skor 1.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Tugas & Tanggung Jawab	Realisasi	Output
8	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara semesteran dan memberikan saran/ rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan/penyempurnaan - Semester II/2017- Semester I/2018	Evaluasi Semester II tahun 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017 melalui Rapat dengan Direktur Kepatuhan dan SKAI untuk membahas rencana aksi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil self Assessment Semester II tahun 2017. Evaluasi Semester I tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2018.	Komite menilai bahwa Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik selama Semester II/2017 dan Semester I/2018.Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadaiatas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
9	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Mei 2018 sesuai surat Direksi BRI B.29-DIR/KPT/ GCG/05/2018	Konglomerasi Keuangan BRi dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara sangat baik. Tata kelola terintegrasi BRI pada semester I dan semester II 2017 berperingkat 1.
10	Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan BRI	• Pemaparan Kinerja, Bisnis Model dan Strategi Bisnis BRI Finance pada tanggal 24 April 2018 • Pembahasan Kinerja dan Strategi Bisnis BRIsyariah 14 Agustus 2018 • Pemaparan Kinerja dan Strategi Bisnis BRI Life pada tanggal 25 September 2018	Secara umum Komite menilai bahwa kinerja perusahaan anak cukup baik. Komite merekomendasikan agar setiap perusahaan anak lebih agressif dalam memasarkan produknya, meningkatkan efisiensi bisnis proses dan memperkuat sinergi antar perusahaan anak sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan dan kontribusi pendapatan bagi BRI.
11	Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi - Semester II/2017 - Semester I/2018	Evaluasi dan rekomendasi telah dilakukan untuk: • Semester II tahun 2017 • Semester I tahun 2018	Nodin B. 09-KTKT/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan Nodin B. 12-KTKT/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pendidikan dan Pelatihan 2018

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota KTKT selama tahun 2018 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2018.

Rapat Komite

Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas inisiatif seorang atau lebih anggota Komite dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas. Rapat Komite dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Rapat Komite yang terjadwal harus dilakukan pemanggilan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama, sedangkan rapat yang dilakukan karena adanya hal-hal yang mendesak atau tidak terjadwal dapat dilakukan pemanggilannya secara lisan atau komunikasi melalui *video conference*;
4. Rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
5. Setiap rapat Komite dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama;
6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat;
7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
8. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
9. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.

Pelaksanaan Rapat Tahun 2018

Pada tahun 2018, KTKT telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Agenda Rapat	Tanggal	Nomor Notulen Rapat	Anggota KTKT yang Hadir	Keterangan
1	1. Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi thn. 2017: 2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahu. 2017; 3. Progres Report Terhadap Hasil *on Site Review* OJK atas Konglomerasi Keuangan BRI.	13 Maret 2018	01 - KTKT/03/2018	9	Kuorum

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Agenda Rapat	Tanggal	Nomor Notulen Rapat	Anggota KTKT yang Hadir	Keterangan
2	1. Pemaparan oleh Direktur Kepatuhan dan SKAI BRI tentang *progress* dari rencana aksi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pelaksanaan Tata kelola terintegrasi berdasarkan hasil self assessment semester II tahun 2017 2. Paparan masing-masing perusahaan anak anggota konglomerasi keuangan BRI mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pengendalian intern selama semester II tahun 2017	10 April 2018	02 - KTKT/04/2018	8	Kuorum
3	Profil Risiko Terintegrasi &Transaksi Intra Group Semester II thn. 2017	24 April 2018	03 - KTKT/04/2018	5	Kuorum
4	Pemaparan Kinerja dan Strategi Bisnis BRIsyariah	14 Agustus 2018	04 - KTKT/08/2018	6	Kuorum
5	Pemaparan kinerja dan Strategi bisnis BRI Life	25 September 2018	05 - KTKT/09/2018	6	Kuorum

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Mahmud	Ketua	5	5	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	5	4	80%
Gatot Trihargo	Anggota	5	4	80%
Vincentius Sonny Loho	Anggota	1	1	100%
Hadiyanto	Anggota	1	1	100%
Bambang Soepeno	Anggota	3	3	100%
Heru Sukanto	Anggota	1	1	100%
Hermanto Siregar	Anggota	1	1	100%
M. Gunawan Yasni	Anggota	4	4	100%
Mulabasa Hutabarat	Anggota	4	4	100%
Boyke Budiono	Anggota	3	3	100%
Indrayeti	Anggota	4	5	80%
Tubagus A. Maulana	Anggota	4	5	80%

Remunerasi KTKT

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat Honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

PENILAIAN KINERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2018

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
1	***Learning & Growth Perspective***	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KTKT sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Sesuai SK Dekom No: 03-KOM/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KTKT BRI. Komposisi Anggota KTKT telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	reviu Piagam KTKT pada Tahun 2019	Piagam KTKT telah di reviu dan di update melalui Nokep Dekom NO : 14-KOM/11/ 2018 Tentang Pedoman tata Tertib KTKT	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KTKT telah lulus Fit & Proper test OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2019	Anggota KTKT dari Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test OJK serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KTKT	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Sesuai SK Dekom No: 03-KOM/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018 2018 tentang Penetepan Ketua dan Anggota KTKT BRI, masa jabatan ketua dan Anggota KTKT tidak melebihi ketentuan	5	5
		Pelaksanaan tugas	Pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Dewan Komisaris	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	Seluruh tugas dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan	5	5
2	***Internal Process Perspective***	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KTKT pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	RKAP KTKT pada Tahun 2019 disahkan pada tanggal 28 Desember 2018	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	minimal 2 kali	Rapat dilaksanakan 5 kali	10	10
			Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Satu kali	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Mei 2018 sesuai surat Direksi BRI B.29-DIR/KPT/GCG/05/2018. Konglomerasi Keuangan BRi dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara sangat baik. Tata kelola terintegrasi BRI pada semester I dan semester II 2017 berperingkat 1.	5	5

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Kajian disampaikan minimal 14 hari ekrja sejak surat diterima	Kajian dan Saran disampaikan melalaui 1. Nota Dinas No. R. 01-KPMR/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan tambahan modal kepada PT. BRIsyariah tahun 2018 2. Nota Dinas No. B. 06-KPMR/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang persetujuan peningkatan penyertaan modal kepada PT. BRIsyariah tahun 2018 melalui mekanisme kapitalisasi laba ditahan . 3. Nota Dinas No. B. 06-KPMR/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang persetujuan peningkatan penyertaan modal kepada PT. BRIsyariah tahun 2018 melalui mekanisme kapitalisasi laba ditahan 4. Nota Dinas No. B. 10-KPMR/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Persetujuan Tambahan Modal kepada PT. BRI Agroniaga, Tbk dan rencana program MESOP serta LTI PT. BRI Agroniaga, Tbk . 5. Nota Dinas No. B. 01-KPMR/01/2018 tanggal 27 April 2018 tentang persetujuan tambahan modal kepada PT. BRI Agroniaga, Tbk dan rencana program MESOP PT BRI Agroniaga, Tbk . 6. Nota Dinas No. B. 01-KPMR/01/2018 tanggal 27 April 2018 tentang persetujuan penyertaan modal kepada PT. Sarana NTT Ventura sebesar Rp3,09 milyar dan tambahan modal sebesar Rp200 milyar . 7. Nota Dinas No. B. 20-KPMR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang persetujuan penyertaan modal kepada PT. Danareksa Sekuritas 8. Nota Dinas No. B. 24-KPMR/08/2018 tanggal 18 September 2018 tentang persetujuan penyertaan modal kepada PT. Danareksa Investment Management. 9. Nota Dinas No. B. 26-KPMR/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang persetujuan tambahan penyertaan modal kepada PT. BRI Multifinance	10	10

Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
		Pengawasan	Reviu penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi	Setiap semster	Hasil evaluasi terkait kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui nota dinas dengan rincian sebagai berikut: 1. Nota Dinas KTKT No. B.01-KTKT/01/2018 2. Nota Dinas KTKT No. B.7-KTKT/05/2018 3. Nota Dinas KTKT No. B.8-KTKT/05/2018	10	10
			reviu kebijakan umum Manajemen risiko (KUMR) terintegrasi	Sekali	Kajian dan saran KUMR Terintegrasi disampaikan melalaui B.34-KPMR/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.	5	5
			Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi	Setiap semester	Komite menilai bahwa Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik selama Semester II/2017 pada tanggal 10 April 2018 dan Semester I/2018 pada tanggal 04 Desember 2018.	5	5
			Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan Perseroan	Minimal sekali dalam setahun	Telah dilsakanakan pemaparan Kinerja, Bisnis Model dan Strategi bisnis Perusahaan anak BRI antara lain BRI Finance pada tanggal 24 April 2018, BRIsyariah 14 Agustus 2018, dan BRI Life pada tanggal 25 September 2018. Secara umum Komite menilai bahwa kinerja perusahaan anak cukup baik. Komite merekomendasikan agar setiap perusahaan anak lebih agressif dalam memasarkan produknya, meningkatkan efisiensi bisnis proses dan memperkuat sinergi antar perusahaan anak sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan dan kontribusi pendapatan bagi BRI.	5	5
			Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik	Setiap semester	Kajian dan saran disampaikan melalaui : 1. Nota Dinas KTKT No: B. 09-KTKT/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 2. Nota Dinas KTKT No: B. 12-KTKT/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018	10	10

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapian Target	Bobot	Nilai
3	***Compliance Perspective***	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko teritegrasi secara periodik sesuai ketentuan	setiap semester	Kajian dan Saran disampaikan melalaui : 1. Nota Dinas KTKT No: B. 09-KTKT/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 2. Nota Dinas KTKT No: B. 12-KTKT/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018. Berdasarkan hasil evaluasi profil risiko terintegrasi, risiko terintegrasi BRI telah dikelola dengan baik yaitu tingkat risiko stabil yang berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*) di mana kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan BRIsesuai dengan appetite risk yang ditetapkan.	5	5
			Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi sesuai ketentuan	setiap semester	1. Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI disampaikan melalaui: 1.Nota Dinas KTKT No: B.01-KTKT/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang self assessment semester II/2017. BRI menilai semua aspek memperoleh skor 1 kecuali proses tugas dan tanggung jawab KTKT mendapat memperoleh skor 2 2. Nota Dinas KTKT No: B.10-KTKT/01/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang self assessment semester I/2018. BRI menilai semua aspek memperoleh skor 1	5	5
Total						**100**	**100**

Opini KTKT Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan

Komite menilai bahwa penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara umum telah terlaksana dengan baik.Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* yang memperoleh peringkat 1 (sangat baik) pada semester II/2017 dan memperoleh peringkat 2 (baik) pada semester I/2018. Komite menilai terdapat beberapa kelemahan pada aspek struktur dan proses penyesuaian prosedur internal terkait penerapan manajemen risiko BRI dan LJK KK BRI masih berjalan. Selain itu, pengelolaan SDM pada Entitas Utama dan LJK anggota konglomerasi keuangan perlu mendapat perhatian agar risiko operasional dapat diturunkkan. Oleh karenanya, pada tahun mendatang Komite akan memastikan agar seluruh kelemahan yang ada pada struktur dan proses, yang diperlukan untuk menunjang hasil (*outcome*) Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik dapat diminimalisir.

Komite Direksi

Direksi BRI membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank.

Hingga 31 Desember 2018, BRI memiliki 10 komite dibawah Direksi sebagai berikut:

1. *Asset and Liability Committee* (ALCO)
2. *Risk Management Committee* (RMC) & *Operational Risk Management Committee* (ORMC)
3. Komite Kredit
4. Komite Permodalan dan Investasi
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi
7. Komite Kebijakan SDM
8. Komite Evaluasi Jabatan
9. Komite Pengarah *Project Management Office* (PMO)
10. Komite Produk

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) berikut penetapan tarif *Fund Transfer Price* (FTP).

Struktur Keanggotaan

Keanggotaan ALCO per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti I (merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Manajemen Risiko *Director of Risk Management*	Ketua Pengganti II (merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi Assets & Liabilities Management	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	√
1. Direktur Hubungan Kelembagaan	Anggota Tetap	√
2. Direktur Mikro & Kecil	Anggota Tetap	√
3. Direktur Ritel & Menengah	Anggota Tetap	√
4. Direktur Konsumer	Anggota Tetap	√
5. Direktur *Corporate Banking*	Anggota Tetap	√
6. Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
7. Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
8. Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
9. Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
10. Seluruh *Senior Executive Vice President* BRI	Anggota Tetap	√
11. Seluruh Kepala Divisi Bisnis Kantor Pusat	Anggota Tetap	√
12. Kepala Divisi Kebijakan Kredit	Anggota Tetap	√
13. Kepala Divisi Risiko Enterprise & Manajemen Portofolio	Anggota Tetap	√
14. Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar	Anggota Tetap	√
15. Kepala Divisi Analisa Risiko Kredit	Anggota Tetap	√
16. Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit	Anggota Tetap	√
17. Kepala Divisi *Corporate Development & Strategy*	Anggota Tetap	√
18. Kepala Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan	Anggota Tetap	√

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
19. Kepala *Desk Project Management Office*	Anggota Tetap	√
20. Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1, 2 dan 3	Anggota Tetap	√
21. Pemimpin Cabang Khusus	Anggota Tetap	√

ALCO *Supporting*

Merupakan struktur Bagian *Assets & Liabilities* yang berada dibawah Divisi *Assets & Liabilities Management*.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan evaluasi kinerja Perushaan serta menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan asset dan liability yang optimum dengan memperhatikan *potensial risk, optimum yield generation*, dan *cost efficiency*.
2. Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), *Fund Transfer Price* (FTP), dan *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *Net Interest Margin* (NIM).
3. Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutus suku bunga simpanan, pinjaman dan/atau produk bank lainnya.
4. Menentukan kebijakan *Net Open Position* (NOP).
5. Memonitor bahwa pengelolaan asset dan liability di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.

Pedoman Kerja

1. Rapat ALCO sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan maka Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti sesuai urutan.
3. Rapat ALCO harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) Anggota ALCO
4. Koordinasi dalam penyelenggaraan Rapat ALCO menjadi tanggung jawab Sekretaris ALCO.
5. Dalam hal Pemimpin Unit Kerja yang menjadi Anggota ALCO berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya setingkat Wakil Kepala Divisi atau sekurangnya setingkat Kepala Bagian.
6. Rapat ALCO terbatas dapat diselenggarakan secara insidentil untuk membahas pengelolaan *asset and liability* yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat *issue* khusus yang harus hams segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.

Rapat ALCO Terbatas

1. *Asset and Liability Committee* (ALCO) secara insidentil dapat menyelenggarakan Rapat ALCO Terbatas untuk membahas pengelolaan *asset and liability* yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat *issue* khusus yang harus segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.
2. Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti dan Sekretaris ALCO berwenang menetapkan Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas di dalam suatu Surat undangan tersendiri.
3. Rapat ALCO Terbatas harus dihadiri oleh seluruh Anggota ALCO sebagaimana yang diatur.

Rapat Komite

Pada tahun 2018, ALCO telah mengadakan Rapat sebanyak 12 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

Komite Direksi

No	Tanggal	Agenda
1.	22.01.2018	*1. Economic Briefing* 2. Kinerja Assets & Liabilities 3. Perkembangan Saham BRI 4. Putusan Rapat ALCO
2.	22.02.2018	
3.	21.03.2018	
4.	27.04.2018	
5.	23.05.2018	
6.	28.06.2018	
7.	19.07.2018	
8.	24.08.2018	
9.	05.09.2018	
10.	08.10.2018	
11.	07.11.2018	
12.	06.12.2018	

Pada tahun 2018, rapat ALCO Terbatas dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1	05.09.2018	*1. Economic Briefing* 2. Kinerja *Assets & Liabilities* 3. Rekomendasi Divisi *Assets and Liabilities Management* 4. Putusan Rapat ALCO Terbatas

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah dengan 1 (satu) orang Anggota ALCO, termasuk anggota Direksi yang salah satunya adalah Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti I atau Ketua ALCO Pengganti II.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) & *OPERATIONAL RISK MANAGEMENT COMMITTEE* (ORMC)

Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta Perubahannya termasuk penerapan kebijakan dan st*rate*gi manajemen risiko.

Struktur Komite

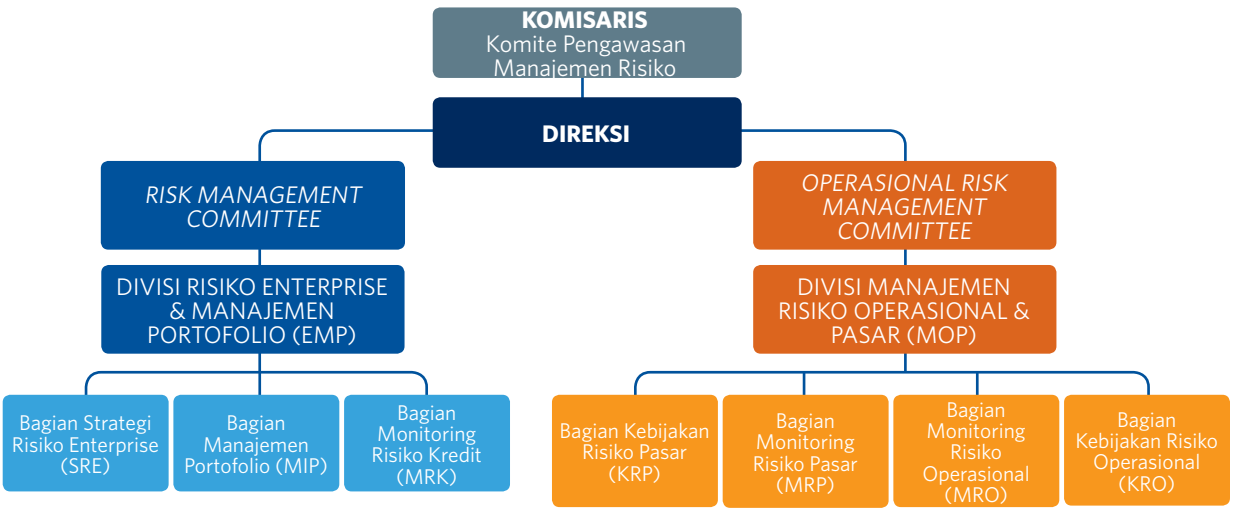

Keanggotaan Komite

1. Risk Management Committee (RMC)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti I	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti II	√
Kepala Divisi *Risiko Enterprise* & Manajemen Portofolio	Sekretaris	-
1. Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
2. Seluruh Direktur dan SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	√
3. Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

2. Integrated RMC

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti I	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti II	√
Kepala Divisi Risiko *Enterprise* & Manajemen Portofolio	Sekretaris	-
1. Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
2. Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
3. Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
4. Seluruh Direktur dan SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	√
5. Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
6. Direktur Utama BRIsyariah	Anggota Tetap	-
7. Direktur Utama BRI Agro	Anggota Tetap	-
8. Direktur Utama BRI Life	Anggota Tetap	-
9. Direktur Utama BRI Finance	Anggota Tetap	-
10. Direktur Utama BRI Remittance	Anggota Tetap	-
11. Direktur Kepatuhan BRIsyariah	Anggota Tetap	-
12. Direktur Kepatuhan BRI Agro	Anggota Tetap	-
13. Direktur Kepatuhan BRI Life	Anggota Tetap	-
14. Direktur Kepatuhan BRI Finance	Anggota Tetap	-

3. Operational Risk Management Committee (ORMC)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti I	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti II	√
Kepala Divisi Risiko *Enterprise* & Manajemen Portofolio	Sekretaris	-
1. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Anggota Tetap	√
2. Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
3. Direktur Jaringan dan Layanan	Anggota Tetap	√
4. Seluruh Direktur dan SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	√
5. Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Komite Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

Risk Management Committee memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. *Risk Management Committee* (RMC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
   c. Merekomendasikan penetapan *limit* dan perubahannya.
   d. Menyampaikan laporan profil risiko dan hasil pemantauan risiko serta apabila diperlukan rekomendasi perubahan.
2. *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi BRI atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya.
   b. Memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan kepada Direksi BRI dan Direksi Perusahaan Anak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   c. Menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi, laporan Tata Kelola Terintegrasi, laporan Audit Terintegrasi, laporan Profil Risiko Individual Perusahaan Anak serta hasil pemantauan risiko kepada Direksi BRI.
   d. Menyampaikan analisa permodalan terintegrasi serta rencana penyertaan modal kepada anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
   e. Menyampaikan simulasi *stress testing* terintegrasi dan/atau individual serta *contingency plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal kepada Direksi BRI.
3. Operational *Risk Management Committee* (ORMC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Membahas *risk issue* berdasarkan hasil penilaian *issue* risiko operasional dan risiko lainnya serta kejadian-kejadian kerugian terkini berikut efektivitas control dari proses bisnis dan operasional yang perlu segera mendapat putusan rencana tindak lanjut.
   b. Membahas penerapan MKU/BCM yang sejalan dengan tata kelola dan kebijakan yang ditetapkan pada kejadian bencana di Unit Kerja BRI Selindo.
   c. Mengkaji dan merekomendasikan kecukupan pengelolaan risiko atas setiap perubahan mendasar teknologi informasi, mencakup antara lain perubahan terhadap konfigurasi, aplikasi *core banking*, produk electronic banking, penggunaan Pihak Penyedia Jasa di dalam negeri dan perubahan mendasar lainnya yang dapat menambah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu secara signifikan.
   d. Mengkaji dan member rekomendasi atas penetapan *limit* risiko operasional dan risiko lainnya serta perubahannya.
   e. Merekomendasikan penetapan metodologi pengukuran risiko operasional dan perubahannya.

Pedoman Kerja

RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC memiliki pedoman kerja organisasi sebagai berikut:

1. Rapat RMC diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali per Triwulan, Rapat RMC Terintegrasi diselenggarakan berkala sekurangnya setiap 6 (enam) bulan, sedangkan Rapat ORMC diselenggarakan bilamana diperlukan (bersifat insidentil).
2. Penyelenggaraan rapat RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat *issue* terpenting dan mendesak, antara lain:
   a. Terjadi perubahan pada Profil Risiko BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, *factor* makro ekonomi, pelanggaran *limit* risiko internal atau faktor lain.
   b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari organisasi.
   c. Terjadi kondisi *force major* yang disebabkan *factor* alam, *factor* manusia, gangguan eksternal dan faktor disruptif lain.
   d. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan rapat RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC.

3. RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC membahas, mengkaji ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan di dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi dimaksud di antaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.
4. Rapat RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sesuai urutan sebagaimana telah diatur.
5. Dalam hal Ketua dan Ketua Pengganti I berhalangan, maka Rapat RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC dipimpin oleh Ketua Pengganti II dengan berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Penetapan Direktur Pengganti.
6. Rapat RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.
7. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
8. Hasil keputusan pada RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC dapat dianulir oleh Direksi sepanjang dilakukan pada Rapat Direksi.
9. Koordinasi penyelenggaraan Rapat RMC, RMC Terintegrasi dan ORMC menjadi tanggung jawab sekretaris RMC dan ORMC.

Rapat Komite

Pada tahun 2018, RMC telah mengadakan Rapat sebanyak 3 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanan	Agenda
1	RMC I 2018	21 Februari 2018	1. Profil Risiko 2. Tindak Lanjut Putusan RMC IV-2017 3. Analisa Permodalan BRI dan Stress Test 4. Pembahasan *Risk Issue* Eksternal dan Profil Risiko BRI 5. Pembahasan *Risk To Be Noticed* di BRI 6. Rekomendasi dan Putusan RMC I -2018
2	RMC II 2018	30 Mei 2018	1. Profil Risiko 2. Tindak Lanjut Putusan RMC I-2018 3. Analisa Permodalan dan *Stress Test* 4. Pembahasan *Risk Issue* di BRI 5. Pembahasan *Risk To Be Noticed* di BRI 6. Rekomendasi dan Putusan RMC II -2018
3	RMC III 2018	28 September 2018	1. Tindak Lanjut RMC II 2017 2. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 3. *Monitoring* Permodalan 4. *Laverage Ratio* 5. *Stress Testing* 6. Pembahasan *Risk Issue* di BRI 7. Pembahasan *Risk To Be Noticed* di BRI 8. Rekomendasi dan Putusan RMC III Tahun 2018

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

Komite Direksi

KOMITE KREDIT

Merupakan Komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Struktur Komite

1. Komite Kredit di tingkat Direksi, yaitu
   a. Komite Kredit BRI.
   b. Komite Kredit Direksi 1
   c. Komite Kredit Direksi 2
2. Komite Kredit di tingkat Divisi
3. Komite Kredit *Regional Commercial Business* (RCB)
4. Komite Kredit di Kantor Wilayah/ Kantor cabang Khusus
5. Komite Kredit Unit Kerja Luar Negri (UKLN)

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas

1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Commmittee* (ALCO) dalam aspek pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
2. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas atau diluar asas-asas perkreditan yang sehat.
3. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite kredit.

Benturan Kepentingan

Dalam pemberian putusan kredit, Komite Kredit tetap berdasarkan penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan terlepas dari benturan kepentingan terhadap Komite Kredit dan individual, dengan mekanisme yang diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal anggota pemutus Komite Kredit BRI memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), maka putusan kredit dilakukan oleh seluruh Direksi dan SEVP yang memiliki kewenangan memutus, kecuali anggota Komite Kredit BRI yang memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dimaksud. Pengambilan keputusan diambil secara unanimous dari seluruh anggota Pemutus.
2. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada anggota Komite Kredit selain Komite Kredit BRI, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pemutus kredit individual, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan sehingga putusan kredit dilaksanakan sebagaimana butir 2 dan 3 diatas, maka hal tersebut harus disampaikan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK).

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Kredit hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi quorum yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh ½ (satu per dua) + 1 dari seluruh anggota Komite Kredit.
2. Anggota Komite Kredit yang tidak dapat hadir dalam Rapat Komite karena sedang tidak berada ditempat (namun tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja) maka tidak dapat diperhitungkan dalam penetapan quorum pelaksanaan rapat Komite Kredit.
3. Pelaksanaan Komite Kredit dilaksanakan dalam forum rapat Komite Kredit dengan Unit Kerja Administrasi Kredit terkait sebagai Sekretaris Komite.

Rapat Komite

Pada tahun 2018, Komite Kredit telah mengadakan Rapat sebanyak 60 (enam puluh) kali.

KOMITE PERMODALAN DAN INVESTASI

Komite Permodalan dan Investasi merupakan Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

Struktur Komite

Dalam melaksanakan tugas, Komite *Capital & Investment* didukung oleh Tim Penunjang Komite.

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti I (merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti II (merangkap Anggota Tetap)	√
Kepala Divisi *Corporate Development Strategy*	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	-
1. Direktur atau SEVP Bisnis terkait	Anggota Tidak Tetap	√
2. Direktur atau SEVP Pembina Perusahaan Anak	Anggota Tidak Tetap	√
3. Direktur *Human Capital*	Anggota Tidak Tetap	√
4. Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Langkah Korporasi
   a. Melakukan *review* atas kajian dan analisa langkah korporasi yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
   b. Menentukan dan merekomendasikan langkah korporasi.
2. Pengelolaan Perusahaan Anak
   1. Melakukan *review* atas kajian dan analisa rencana bisnis, rencana kerja, dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak.
   2. Melakukan *review* atas kajian dan analisa kinerja Perusahaan Anak.
   3. Membahas dan merekomendasikan atas rencana bisnis, RKAP, dan kinerja Perusahaan Anak.
   4. Membahas dan merekomendasikan inisiatif strategis tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Anak.
   5. Membahas dan merekomendasikan Divestasi Perusahaan Anak.
   6. Merekomendasikan kepengurusan dan remunerasi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
   7. Pengelolaan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkup pengelolaannya dilaksanakan oleh *Desk Subsidiary Management* sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Tim Penunjang Komite sesuai ruang lingkupnya masing-masing memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan data pendukung atas usulan yang akan dilaksanakan.
2. Membuat kajian dan analisa atas usulan yang akan diajukan
3. Menyiapkan bahan presentasi yang akan disampaikan oleh anggota Komite sesuai rapat Komite *Capital & Investment*.

Pedoman Kerja

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisa sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.
2. Kajian dipresentasikan pada rapat Komite oleh Anggota Komite dan/atau Anggota Tim Penunjang dan/atau perwakilan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
3. Komite menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali per Triwulan untuk membahas usulan, kajian dan analisa yang berasal dari Tim Penunjang Komite.
4. Rapat dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% dari seluruh anggota Komite dan dihadiri oleh ketua Komite.

Komite Direksi

5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Apbila Ketua berhalangan hadir, maka rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti sesuai urutan yang telah diatur.
6. Dalam hal Ketua Komite *Capital & Investment* dan Ketua Komite Pengganti I berhalangan, maka dipimpin oleh Ketua Komite II dengan berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Penetapan Direktur Pengganti.
7. Ketua Komite memimpin Rapat Komite *Capital & Investment* dan mempunyai hak suara.
8. Sekretaris Komite bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan rapat Komite *Capital & Investment*, berupa antara lain:
   a. Mempersiapkan agenda, jadwal dan tempat rapat;
   b. Menyusun Risalah Rapat;
   c. Memantau implementasi putusan rapat.
9. Rekomendasi Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, maka rekomendasi rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara +1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
10. Apabila pada saat rapat Komite tidak dihadiri oleh Direktur Utama, maka rekomendasi rapat Komite akan dilaporkan oleh Ketua Komite Pengganti kepada Rapat Direksi untuk mendapat putusan Direksi

Rapat Komite

Pada tahun 2018, Komite Permodalan dan Investasi telah mengadakan Rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	26 Januari 2018	*Capital Management Report*, pembagian Dividen tahun 2017, *Strategic Partnership*, Kajian Permodalan	Kuorum
2	15 Februari 2018	*Progress Update Digital Bank*	Kuorum
3	1 Maret 2018	Pembahasan Rencana Investasi IT	Kuorum
4	8 Maret 2018	Rencana aksi koorporasi BRI Agro tahun 2018	Kuorum
5	19 April 2018	*Progress Report Corporate Action*	Kuorum
6	20 Agustus 2018	*Review* kinerja perusahaan anak BRI	Kuorum
7	17-18 Oktober 2018	Pemaparan RKAP 2019 dan *Corporate Plan* 2019-2023 perusahaan anak BRI	Kuorum

Pengambilan Keputusan

Rekomendasai Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka rekomendasi Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) adalah komite di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan BRI dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

Struktur Keanggotaan

Susunan Komite Kebijakan Perkreditan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti I	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti II	√
Kepala Divisi Kebijakan Kredit	Anggota Tetap	√
Direktur Hubungan Kelembagaan	Anggota Tetap	√
Direktur Mikro & Kecil	Anggota Tetap	√
Direktur Ritel & Menengah	Anggota Tetap	√
Direktur Konsumer	Anggota Tetap	√
Direktur *Corporate Banking*	Anggota Tetap	√
Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Seluruh *Senior Executive Vice President* BRI	Anggota Tetap	√
Seluruh Kepala Divisi Bisnis KP	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kebijakan Kredit	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Risiko *Enterprise* & Manajemen Portofolio	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Analisa Risiko Kredit	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi *Corporate Development & Strategy*	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan	Anggota Tetap	√
Kepala Desk *Project Management Office*	Anggota Tetap	√
Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1, 2 dan 3	Anggota Tetap	√
Pemimpin Cabang Khusus	Anggota Tetap	√

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) Bank Indonesia.
2. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala.
3. Melakukan *review* berkala Kebijakan Umum Perkreditan Bank (KUP).

Komite Direksi

4. Memantau dan mengevaluasi terhadap:
    a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
    b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
    c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu.
    d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
    e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
    f. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
    g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.
    h. Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar kredit Dalam Perhatian Khusus
5. Melakukan kajian menilai efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan masukan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).

Panduan Kerja

1. Perubahan atau revisi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib dibahas terlebih dahulu di dalam rapat. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) wajib melakukan rapat pembahasan final Draft perubahan atau revisi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) sebelum diteruskan untuk mendapat putusan Direksi.
2. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dilakukan dalam rangka pertemuan mengusulkan penyusunan, perubahan, revisi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) maupun terkait *issue* penting dan mendesak yang memerlukan tanggapan cepat dan segera dari perusahaan.
3. Apabila terdapat masalah mendesak untuk dibahas di dalam Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) maka unit kerja terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) untuk melakukan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
4. Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua KKP. Dalam hal Ketua KKP berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti.
5. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan sah apabila dihadiri sekurangnya 2/3 dari anggota KKP yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang Direktur yaitu:

a. Direktur Manajemen Risiko;
b. Direktur Kepatuhan;
c. Direktur Bidang Bisnis;
d. SEVP Satuan Kerja Audit Intern;
e. Kepala Divisi Kebijakan Kredit; dan
f. Kepala Divisi Kepatuhan

6. Apabila Kepala Divisi yang menjadi anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berhalangan hadir maka Penggantinya dapat ditunjuk.

Rapat Komite

Selama tahun 2018 tidak terdapat rapat komite kebijakan perkreditan BRI.

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) darijumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merupakan Komite di kantor pusat yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional Teknologi Informasi (TI).

Struktur Keanggotaan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Ketua Pengganti I	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti II	√
Wakil Kepala Divisi Bidang Perencanaan & Strategi Teknologi Informasi, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Sekretaris	√
1. Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
2. SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
3. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Anggota Tetap	√
4. Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi	Anggota Tetap	√
5. Kepala Divisi Satelit & Jaringan Infrastruktur	Anggota Tetap	√
6. Kepala Divisi *Digital Center of Excellence*	Anggota Tetap	√
7. Kepala Divisi Kerjasama Teknologi	Anggota Tetap	√
8. Kepala *Desk Information Security*	Anggota Tetap	√
9. Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tetap	√
10. Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Fungsi

1. Memberikan arahan kebijakan dan manajemen TI baik jangka panjang maupun jangka pendek (tahunan) dan mengacu kepada Rencana Strategis Teknologi Informasi (IT *Strategic Plan*) BRI.
2. Melakukan kontrol atas pelaksanaan pengembangan dan implementasi TI di BRI yang sedang dan akan dikembangkan dengan mengacu pada Rencan Strategis Teknologi Informasi (IT *Strategic Plan*) BRI.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan rekomendasi rencana strategi TI jangka panjang yang sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam IT *Strategic Plan* BRI.
2. Merumuskan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
3. Memastikan kesesuaian rencana strategi IT dengan proyek IT lain yang disetujui untuk dilaksanakan.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi perkerjaan proyek-proyek TI agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati (*Project Charter*).
5. Melakukan evaluasi kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen untuk operasional dan bisnis Bank.
6. Memantau efektifitas pengelolaan risiko atas investasi di bidang TI agar investasi yang ditanamkan mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan bisnis BRI.
7. Memantau performa sistem TI dan memberikan rekomendasi upaya peningkatannya.
8. Memberikan rekomendasi upaya penyelesaian masalah TI yang tidak dapat diselesaikan Unit Kerja pengguna TI dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan kecukupan atas alokasi *resources* yang dimiliki BRI.

Komite Direksi

Pedoman Kerja

1. Komite Pengarah TI mengadakan rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun.
2. Rapat Komite Pengarah TI sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
   a. Ketua
   b. Sekretaris
   c. 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite Pengarah TI yang diundang dan terkait dengan agenda rapat Komite Pengarah TI.
3. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti I.
4. Dalam hal Ketua Komite dan Ketua Komite Pengganti I berhalangan, maka Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti II dengan berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Penetapan Direktur Pengganti.
5. Ketua Komite memimpin Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan mempunyai hak suara.
6. Dalam hal Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Direktur Utama, Direktur Teknologi Informasi & Operasi bertindak sebagai Anggota Komite dengan hak suara.
7. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
   a. Mempersiapkan dan mengundang rapat.
   b. Menyusun dan mempresentasikan rapat.
   c. Menyusun dan mendistribusikan Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.
   d. Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Unit Kerja yang terkait.
8. Keputusan rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

Rapat Komite

Pada tahun 2018, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan Rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	8 Maret 2018	Migrasi kartu kredit (*Cardlink*) dari mesin Mainframe z800 ke Z13	Kuorum
2	18 April 2018	IT *Strategic Plan* 2018-2022	Kuorum

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1(satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE PELAKSANAAN *HUMAN CAPITAL*

Merupakan Komite di Kantor Pusat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional di bidang *Human Capital*.

Struktur Keanggotaan

Bidang Kebijakan *Human Capital*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang terkait	Anggota Tetap	√

Bidang Karir 1

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang terkait	Anggota Tetap	√

Bidang Karir 2

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur *Human Capital*	Ketua	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang terkait	Anggota Tetap	√

Bidang Karir 3

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Ketua	√
Kepala Bagian Pengembangan Karier	Sekretaris	√
Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier & *Culture*	Anggota Tetap	√

Bidang Talent Management

Sub Bidang Talent Identification 1

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Direksi

Sub Bidang *Talent Identification* 2

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur *Human Capital*	Ketua	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Sub Bidang *Talent Development* dan *Engagement* 1

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Sub Bidang *Talent Development* dan *Engagement* 2

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur *Human Capital*	Ketua	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√

Sub Bidang *Talent Development* dan *Engagement* 3

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Ketua	√
Kepala Bagian Pengembangan Karier	Sekretaris	√
Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier & Culture Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Anggota Tetap	√

Bidang Manajemen Kinerja dan Penetapan Sasaran Kinerja Objektif (SKO)

Sub Bidang Manajemen Kinerja

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Direksi

Sub Bidang Penetapan Sasaran Kinerja Objektif (SKO)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur *Human Capital*	Ketua	√
Wakil Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Kepala Divisi Corporate Development & Strategy	Anggota Tetap	√

Bidang Etik

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti	√
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Sekretaris	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direksi atau *Senior Executive Vice President* Bidang/Pembina terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Fungsi

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan strategik di bidang *Human Capital*.
2. Meningkatkan kualitas kebijakan strategik *human capital* yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Tugas dan Tanggung Jawab

Bidang Kebijkaan Human Capital

1. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas *human capital* BRI.
2. Memberikan rekomendasi dalam proses penetapan kebijakan strategis, manajemen karir, *corporate culture* di bidang *human capital*.

Bidang Karir

Menetapkan pengembangan karier Pekerja.

Bidang Talent Management

Menetapkan Talent dan penentuan program pengembangan yang diberikan kepada Talent termasuk pengembangan karier Talent.

Bidang Manajemen Kinerja dan Penetapan Sasaran Kinerja Objektif (SKO)

a. Menetapkan penilaian kinerja Pekerja untuk level Executive Vice President dan Vice President.
b. Menetapkan Standar SKO untuk level Executive Vice President dan Vice President.

Bidang Etik

Memutus kasus Pelanggaran Disiplin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP).

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Kebijakan *Human Capital* dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka Rapat Komite Kebijakan *Human Capital* dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti .
2. Seluruh anggota Komite Kebijakan *Human Capital* memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.
3. Apabila terdapat *issue* penting dan mendesak yang membutuhkan jalan keluar dan/atau sikap dari Komite Kebijakan *Human Capital* maka Unit Kerja yang terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite.

Rapat Komite

Selama tahun 2018, telah dilakukan 1 (satu) kali rapat Komite *Human Capital* sesuai Nota Dinas Divisi KHC No. R.318.e-KHC/REK/04/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penilaian Kinerja Pejabat EVP dan VP untuk periode penilaian tahun 2017.

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Komite *Human Capital* ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Komite Kebijakan *Human Capital* dinyatakan sah dan mengikat apabila Ketua Komite, Direktur *Human Capital* dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite yang hadir di dalam rapat Komite *Human Capital* telah memberikan suara setuju.
2. Persetujuan Komite dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite yang hadir.
3. Dalam hal rapat Komite *Human Capital* tidak dapat diselenggarakan maka Komite *Human Capital* dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.

KOMITE EVALUASI JABATAN

Merupakan Komite Kantor Pusat yang melakukan proses penilaian atau pemeringkatan suatu jabatan secara logis dan adil yang dilakukan dengan membandingkan jabatan satu dengan jabatan lainnya berdasarkan skala atau kriteria tertentu untuk menentukan nilai/bobot/ukuran relatif suatu jabatan (*job size/ score*) dan kontribusi serta hubungannya dengan jabatan lain di Perusahaan.

Struktur Keanggotaan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Wakil Kepala Divisi Bidang *Organization & Performance* Management Divisi *Corporate Development & Strategy*	Sekretaris	√
1. Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
2. Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
3. Kepala Divisi Corporate Development & Strategy	Anggota Tetap	√
4. Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital*	Anggota Tetap	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan *review*, merekomendasi, dan/atau menetapkan golongan jabatan.

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Evaluasi Jabatan dipimpin oleh Ketua Komite.
2. Seluruh anggota Komite Evaluasi Jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama didalam proses *review*, merekomendasikan, dan atau menetapkan golongan jabatan.

Rapat Komite

Pada tahun 2018, Komite Evaluasi Jabatan telah mengadakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	18 Januari 2018	Evaluasi Jabatan ke Direksi	Kuorum
2	4 Februari 2018	Evaluasi Jabatan Tim Digital Banking	Kuorum
3	12 Juli 2018	Evaluasi Jabatan untuk jabatan di BRI (baru/berubah)	Kuorum
4	17 Desember 2018	Evaluasi Jabatan BRI Ventures	Kuorum

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Komite Evaluasi Jabatan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

Dalam hal rapat Komite Evaluasi Jabatan tidak dapat diselenggarakan maka Komite Evaluasi Jabatan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.

PROJECT MANAGEMENT OFFICE STEERING COMMITTEE(PMO-SC)

Merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggung jawab memberikan arahan dan keputusan terhadap st*rate*gi dan pelaksanaan proyek-proyek di BRI.

Struktur Keanggotaan

Organisasi *Project Management Office Steering Committe* (PMO-SC) terdiri atas:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti I	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti II	√
Kepala *Desk Project Management Office*	Sekretaris	√
1. Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
2. SEVP *Subsidiary & Project Management*	Anggota Tetap	√
3. SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan	Anggota Tetap	√
4. Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Proyek	Anggota Tidak Tetap	√
5. Kepala Unit Kerja Pemilik Proyek	Anggota Tidak Tetap	-

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
6. Kepala Unit Kerja Pendukung Proyek	Anggota Tidak Tetap	-

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan arahan arahan-arahan di tingkat korporat terhadap st*rate*gi proyek-proyek di BRI.
2. Mengambil keputusan atas usul penyelesaian masalah dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat diputus oleh Head of PMO.
3. Mengambil keputusan terhadap usul relokasi anggaran antar proyek yang tercantum didalam anggaran Rencana Kerja Proyek.
4. Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur didalam Kebijakan Umum (KU) proyek dan Pedoman Pelaksanaannya (PP).
5. Menyetujui dan mengesahkan proyek yang diusulkan setelah RKAP mendapat persetujuan.
6. Memberi arahan dan putusan terkait akselerasi penyelesaian proyek.
7. Menetapkan kriteria untuk proyek yang dimonitor *Project Management Office* (PMO).
8. Memutuskan proyek-proyek yang masuk dan dikeluarkan dari *monitoring* PMO.
9. Menetapkan prioritasi proyek untuk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemilik Proyek atau Unit Kerja Pendukung proyek.
10. Memberikan keputusan dengan proyek diantaranya menyetujui, mengubah dan membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek.
11. Memberikan arahan terhadap hasil Evaluasi Pasca Implementasi Proyek (EPIP) yang sudah dilaksanakan sebagai bagian dari lessons learned dalam pelaksanaan proyek selanjutnya di BRI.

Komite Direksi

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Pengarah PMO-SC diadakan secara berkala sekurangnya 2 (dua) kali per tahun.
2. Rapat diluar rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria:
   a. Terdapat perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan perubahan secara cepat dan segera terkait pelaksanaan proyek atau penghentian proyek.
   b. Terdapat perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan secara cepat dan segera dari organisasi, khususnya dalam pelaksanaan proyek atau penghentian proyek.
   c. Terdapat kondisi yang mendorong dilakukannya rapat PMO-Sc.
3. Rapat PMO-Sc dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama sebagai Ketua PMO Sc. Apabila Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi Ketua Komite digantikan oleh Direktur atau SEVP sesuai ketentuan berlaku.
4. Kehadiran Anggota dengan Hak Suara di dalam Rapat PMO-Sc tidak dapat diwakilkan. Apabila Anggota dengan Hak suara berhalangan hadir maka posisinya di rapat dapat digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rapat PMO-Sc dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite serta dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komite dengan hak suara dengan minimal terdapat 1 (satu) orang Direktur.
6. Rapat Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Keputusan di dalam rapat PMO SC didokumentasikan pada risalah PMO SC meeting yang ditandatangani oleh Head of PMO.
8. Adapun tugas Sekretaris Komite antara lain:

a. Mengkoordinasikan persiapan materi rapat Komite.
b. Mempersiapkan agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
c. Melaksanakan fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.
d. Membuat risalah rapat komite dan berita acara.
e. Mendistribusikan keputusan komite untuk ditindaklanjuti Unit Kerja yang terkait.

Rapat Komite

Pada tahun 2018, PMO-Sc telah mengadakan Rapat sebanyak 1 kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Waktu	Agenda	Kehadiran
1	13 Desember 2018	1. Performance Proyek dalam *monitoring* PMO tahun 2018 2. Rekomendasi putusan PMO-SC: a. Portofolio proyek dalam *monitoring* PMO di tahun 2018 (*Closed, Hold, Multiyears, Carry Over*). b. Usulan proyek dalam *monitoring* PMO tahun 2019. 3. Putusan PMO-SC	Seluruh anggota Komite hadir

1. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat, Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah I (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
2. Keputusan di dalam rapat PMO SC didokumentasikan pada risalah PMO SC meeting yang ditandatangani oleh Head of PMO.

Program dan Pelaksanaan Kegiatan Komite 2019

Penerapan "Agile PMO"	▸ PemanfaatanPMO *tools* dan *dashboard* yang reliable. ▸ *Monitoring* aktif dan kolaborasi dalampengelolaanproyek. ▸ Meningkatkan kapabilitas manajemen proyekbaikdarisisi PMO, Pemilik Proyek dan Unit Kerja pendukung proyek.

KOMITE PRODUK

Komite Produk merupakan Komite yang bertanggungjawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan dan penghentian produk dan jasa eksisting, memutus produk dan jasa bundling diatas kewenangan Direktur atau, dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas st*rate*gi pengembangan produk dan jasa.

Struktur Keanggotaan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti I	√
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Ketua Pengganti II	√
Kepala Divisi Corpo*rate* Development & St*rate*gi Head of Corpo*rate* Development & St*rate*gy Division	Sekretaris	
1. Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tetap	√
2. Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap	√
3. Direktur SEVP Bidang Pemilik Produk	Anggota Tidak Tetap	√
4. Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Fungsi

Mengevaluasi kinerja produk serta memberikan rekomendasi kepada Direksi atas st*rate*gi pengembangan produk BRI.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengkaji dan memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa yang telah memenuhi kriteria produk dan jasa yang dapat diputus oleh Komite Produk.
2. Mengkaji dan memberikan putusan atas usul produk dan jasa *bundling* diatas kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk yang telah memenuhi kriteria produk dan jasa yang dapat diputus oleh Komite Produk.
3. Mengkaji dan memberikan putusan atas penghentian produk dan jasa *existing* yang telah memenuhi kriteria produk dan jasa yang dapat diputus oleh Komite Produk.
4. Mengkaji dan memberikan putusan atas permasalahan produk dan jasa yang tidak dapat diputus pada tingkat kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas st*rate*gi pengembangan produk BRI.

Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Produk diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
2. Rapat diluar dari rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteriasebagai berikut:
   a. Terjadi perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan khususnya dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
   b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan respon organisasi khususnya dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.

Komite Direksi

c. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Produk.

3. Rapat Komite Produk dipimpin oleh Wakil Direktur Utama sebagai Ketua Komite. Apabila Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi Ketua Komite dapat digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai dengan ketentuan Direktur Pengganti.
4. Dalam hal Ketua Komite dan Ketua Pengganti I berhalangan, maka Rapat Komite Produk dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti II dengan berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Penetapan Direktur Pengganti.
5. Kehadiran Anggota dengan Hak Suara di dalam Rapat Komite Produk tidak dapat diwakilkan. Apabila Anggota dengan Hak Suara berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan ketentuan.
6. Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota dengan Hak Suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur.
7. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota Komite yang mmeiliki Hak Suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
8. Apabila pada saat rapat Komite tidak dihadiri oleh Direktur Utama, maka rekomendasi rapat Komite akan dilaporkan oleh Ketua Komite Pengganti kepada Rapat Direksi untuk mendapat putusan Direksi.
9. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Produk menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite.

Rapat Komite

Pada Tahun 2018, Komite Produk telah Mengadakan Rapat Sebanyak 9 (sembilan) kali Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	07 Maret 2018	Progress realisasi PAB 2018 dalam rangka Komite Produk	Kuorum
2	28 Maret 2018	Progress realisasi PAB 2018, Usulan revisi RBB 2018-2020, dan rencana pelaksanaan Komite Produk	Kuorum
3	6 April 2018	Usulan produk BRI Swap Deposit	Kuorum
4	7 Juni 2018	Diskusi usulan kerjasama pemasaran produk asuransi Lentera	Kuorum
5	27 Agustus 2018	Diskusi usulan pengembangan produk *Repo/Reverse Repo* surat berharga Syariah	Kuorum
6	24 September 2018	Diskusi usulan produk *Forward Rate Agreement* (FRA)	Kuorum
7	15 November 2018	Rapat pra Komite Produk dalam *review* taksonomi produk (sesi produk simpanan dan fitur *owner*)	Kuorum
8	16 November 2018	Rapat pra Komite Produk dalam *review* taksonomi produk (sesi produk pinjaman)	Kuorum
9	16 November 2018	Rapat pra Komite Produk dalam *review* taksonomi produk (sesi jasa dan aktivitas bank lainnya)	Kuorum

Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota dengan Hak Suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur.
2. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota Komite yang mmeiliki Hak Suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh BRI yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung APBN atau APBD.

Komite Pengadaan I

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti I	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti I	√
Kepala Divisi MAT atau PBJ	Sekretaris	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Komite Pengadaan II

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti I (Anggota tidak Tetap)	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti I	√
Kepala Divisi MAT atau PBJ	Sekretaris	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur Mikro & Kecil/ Direktur Ritel & Menengah/ Direktur Jaringan dan Layanan/ Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur/SEVP User Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Pengadaan III

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan/ Direktur Mikro & Kecil/ Direktur Ritel & Menengah/ Direktur Jaringan dan Layanan/ Direktur Teknologi Informasi & Operasi	Anggota Tidak Tetap	√

Komite Pengadaan IV

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, objektif, akuntabel dan seksama.
2. Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian putusan pengadaan.
3. Mengevaluasi, memberi masukan atau usul pengadaan yang diajukan.
4. Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai *limit* wewenangnya.
5. Menandatangani dokumen putusan pengadaan sebagi bukti pemberian putusan pengadaan sebagai wujud tanggung jawab Komite Pengadaan.

Komite Direksi

Pedoman Kerja

1. Keputusan Komite diambil dalam suatu rapat Komite Pengadaan. Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan di Kantor Pusat atau tempat lainnya dengan fasilitator Unit Kerja Pengadaan yang terkait.
2. Putusan Komite Pengadaan diambil secara unanimous dan dianggap disetujui apabila seluruh Anggota Komite dengan suara yang hadir atau yang mewakili menyatakan setuju.
3. Dalam hal Anggota Komite Pengadaan berhalangan maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Pengadaan dimaksud digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti. Direktur atau SEVP Pengganti dapat bertindak didalam Komite sebagai dua kapasitas yaitu selaku Pejabat Pengganti dan dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite Pengadaan.

Rapat Komite

Pada tahun 2018, Komite Pengadaan barang Dan Jasa telah mengadakan Rapat sebanyak 2 kali dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pengadaan jasa kontraktor pembangunan *power house system* untuk *data centre* gedung.
b. Pengadaan kontraktor pembangunan menara BRI Gatot Subroto.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui pelapoan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam *website* dan media cetak (apabila diwajibkan), pelaksanaan RUPS serta sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya.

Per 31 Desember 2018, Sekretaris Perusahaan BRI dijabat oleh Bambang Tribaroto.

Bambang Tri Baroto
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Usia 57 tahun.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 22 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. R. 13-DIR/KPS/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: R.07-KOM/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan memulai karir BRI sejak tahun 1990. Dalam perjalanan karirnya, telah menjabat berbagai posisi antara lain Kepala Biro Direksi BRI, Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional di berbagai wilayah.

Dasar Hukum

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

Struktur Organisasi

Sekretaris Perusahaan BRI bertanggungjawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan yang juga merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Pejabat setingkat eselon 2 yang membawahi Bidang Kesekretariatan dan Protokoler, Hubungan Masyarakat, CSR dan Bina Lingkungan, serta. Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan BRI sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Pendidikan dan Pelatihan 2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan dapat mengikuti pelatihan dan Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan maupun oleh pihak professional di luar Perusahaan.

Pelatihan dan program Pendidikan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
1.	*Enhancement Special Request* Sekretaris Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018	6 -7 Oktober 2018 Denpasar	BRI Corporate University
2.	*Understanding Media Policies in Digital Era & Creative Writing For Corporate Publication*	5 – 7 Februari 2018, Padang	PR Indonesia
3.	Sertifikasi Kehumasan	6 – 7 Maret 2018, Jakarta	PERHUMAS
4.	Social Media Summit	1 – 2 Maret 2018, Bali	*Social Bakers*
5.	*Corporate Governance Officer Intermediate* 1	12 – 13 September 2018, Jakarta	*Indonesian Corporate Secretary Association*
6.	*Corporate Governance Leadership* Program	15 – 16 November 2018, Yogyakarta	*Indonesia Institute For Corporate Directorship*

Tugas dan Tanggung Jawab

Divisi Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab terhadap pengelolaam hubungan masyarakat/media relation; pengelolaan CSR dan bina lingkungan; serta pengelolaan fungsi kesekretariat Perusahaan, protokoler, dan pelayanan intern Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dalam rangka mewujudkan target kinerja dan corporate image BRI sesuai visi, misi dan strategi Perusahaan dengan perincian tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penyusunan implementasi dan evaluasi strategi & kegiatan kehumasan, seperti namun tidak terbatas pada mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang berkepentingan secara langsung atau melalui media cetak maupun elektronik, mengelola isu-isu yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap Perusahaan dan program/event/pameran, pemberian sponsorship sebagai salah satu perwujudan dalam rangka meningkatkan *corporate image* BRI.
b. Penyusunan, implementasi dan evaluasi strategi dan kegiatan CSR dan Bina Lingkungan dalam rangka kepedulian BRI terhadap lingkungan sosial masyarakat dan meningkatkan corporate image BRI.
c. Penyelenggaraan RUPS / RUPSLB, Rapat Direksi Komisaris dan Rapat Direksi, forum internal dan eksternal.
d. Penyusunan, analisis dan evaluasi kebijakan terkait pemberian layanan hak-hak dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP serta aktivitas kesekretariatan untuk memastikan terpenuhi hak dan fasilitas Komisaris, Direksi dan SEVP tersebut serta penyelenggaraan kesekretariatan Perusahaan.
e. Penatakerjaan dan pengadministrasian aktivitas kesekretariatan, administrasi dan dokumentasi Perusahaan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan lainnya yang terkait Anggaran Dasar Perusahaan)
f. Pelaksanaan dan evaluasi protokoler seluruh aktivitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
g. Sebagai *spoke person* Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan BRI telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 / POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Program Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2018, Sekretaris Perusahaan menerbitkan Kebijakan Direksi mengenai Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Program tersebut berlaku bagi direksi dan dewan komisaris baru untuk dapat lebih mengenal Bank BRI.

Sekretaris Perusahaan

Selanjutnya Selama tahun 2018 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan dengan rincian:

Tema Pendidikan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
Seminar *A Good Impression*	28 Maret 2018	Kantor Pusat BRI – Jakarta Pusat
Pendidikan *Executive Vice President*/Kepala Divisi/Pemimpin Wilayah/ Inspektur tahun 2018 "*Leading and Winning in Digital Age*"	16-18 Mei 2018	Gedung Menara 165 – Jakarta Selatan

Laporan Pelaksanaan Tugas SKP tahun 2018

Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris

1. Secara rutin dilakukan update pada Forum ALCO kepada Direksi yang dilaksanakan secara rutin bulanan dalam forum rapat Komite Asset & Liability (ALCO).
2. Secara triwulanan diupdate pada forum Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom) update kinerja perusahaan dan perkembangan pasar modal.
3. Materi komunikasi BBRI Update (pamflet) terkait pasar modal dan kinerja saham BBRI kepada Direksi dan kalangan internal perusahaan.

Pelaksanaan program Komunikasi kepada Komunitas Pasar Modal

1. Telah dilaksanakan dalam ajang *public expose* sebagaimana rincian dijelaskan di sub bab ini.
2. Analyst Meeting yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka paparan kinerja Triwulanan perusahaan.

Hubungan dengan media massa

Pelaksanaan komunikasi dengan media, baik *media online*/ digital dan media cetak, dilaksanakan melalui penerbitan *press release*, bertindak sebagai *spoke person*/juru bicara Perusahaan yang bertugas untuk menjawab pertanyaan media, melakukan wawancara/mendampingi Pejabat dalam wawancara bersama media, menjalin hubungan baik dengan komunitas media. menyelenggarakan *press conference* terkait pengumuman penting yang akan memberikan dampak positif bagi Perusahaan.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga melakukan monitoring atas frekuensi pemberitaan dan isu-isu Perusahaan yang menjadi sorotan dalam rangka meminimalisasikan pemberitaan negatif.

Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 telah melaksanakan acara/kegiatan untuk membina hubungan dengan media massa melaksanaan kegiatan yaitu Media *Gathering* pada tanggal 17 sampai 18 Maret di Bandung serta Pemimpin Redaksi *Gathering* pada tanggal 30 Januari 2018 di Jakarta.

Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS oleh Sekretaris Perusahaan BRI sebagaimana dilaporkan pada sub bab Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun luar biasa.

Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Radirkom

Pengatur jadwal, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Laporan pelaksanaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana telah disampaikan dalam sub bab RUPS. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom) dapat dilihat pada sub bab rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Program Orientasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris baru

Sekretaris Perusahaan mengkoordinasikan pelaksanaan program orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyampaikan diantaranya tugas dan tanggung jawab selaku Direksi dan Dewan Komisaris, hak dan kewajiban, peraturan dan ketentuan terkait, adapun bentuk pelaksanaan program orientasi tersebut sbb:

a. Presentasi mengenai profil perusahaan dari berbagai aspek yang dipandang perlu sesuai dengan permintaan/kebutuhan yang bersangkutan.
b. Program Orientasi Direksi dilakukan melalui forum Rapat Direksi, pertemuan tatap muka Sekretaris Perusahan dengan Direksi. Adapun masa orientasi antara lain:
   - Tugas dan tanggung jawab Direksi dan sesuai pembidangan Direksi

Sekretaris Perusahaan

- Visi dan Misi Perusahaan
- Hak dan Fasilitas Direksi

c. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris baru sebagaimana program kunjungan kerja Dewan Komisaris dan/atau rapat dewan komisaris.

Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPST tahun 2018 telah dilaksanakan program orientasi mengenai perusahaan sesuai dengan permintaan Direksi/Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Analyst Meeting

Secara triwulanan Bank BRI rutin menyelenggarakan kegiatan analyst meeting untuk memaparkan kinerja triwulanan. *Analyst Meeting* diselenggarakan di kantor Bank BRI Gedung BRI 1 lantai 21. Kegiatan analyst meeting diselenggarakan bersamaan dengan keterbukaan informasi berupa *press conference* Bersama dengan pihak media.

Selama tahun 2018, Bank BRI telah menyelenggarakan *Analyst Meeting* pada:

Analyst Meeting	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
Kinerja Triwulan I tahun 2018	3 Mei 2018*	Ruang Aula Gedung BRI 1
Kinerja Triwulan II tahun 2018	31 Juli 2018	Ruang Aula Gedung BRI 1
Kinerja Triwulan III tahun 2018	24 Oktober 2018	Ruang Aula Gedung BRI 1

*) terdapat *limited review* laporan keuangan triwulan I oleh KAP

Pelaksanaan Tugas 2018

- Pelaksanaan RUPS Tahun 2018
  Pada tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan RUPS Tahunan BRI yang mencakup persiapan pengadaaan RUPS dan pelaporan dan pengumuman setelah RUPS selesai dilaksanakan. Adapun keterangan pengumuman dan pelaporan terkait pelaksanaan RUPS dapat dilihat pada Bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

- Penyelenggaraan *Public Expose* 2018
  Pada tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali *Public Expose* dengan sebagai berikut:

Perihal	Tanggal	Tersedia di
Pemberitahuan Rencana *Public Expose*	14 Agustus 2018	Situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan
Penyampaian Materi *Public Expose*	24 Agustus 2018	
Laporan Pelaksanaan *Public Expose*	3 September 2018	

	Tanggal pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Public Expose	29 Agustus 2018	Jakarta – Gedung Bursa Efek Indonesia
	6 September 2018	Semarang – Hotel Gumaya
	28 September 2018	Makassar - Hotel Claro

Penyelenggaraan *Public Expose* tersebut telah dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- Keterbukaan Informasi
  Selama tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) kali keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan diunggah pada situs web Perusahaan dan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

No.	Perihal	Tanggal laporan
1.	Perubahan Sekretaris Perusahaan	23 Januari 2018
2.	Penyampaian Bukti Publikasi Informasi Tambahan Ringkas Dalam Rangka PUB II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018	6 Februari 2018
3.	Keterbukaan Informasi/Disclosure of Information	2 Maret 2018
4.	Pemeringkatan Perusahaan dan Pemeringkatan Surat Utang BRI	13 Maret 2018
5.	Keterbukaan Informasi / Disclosure of Information	28 September 2018
6.	Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Bank BRI	3 Oct 2018
7.	Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BRI	8 Oct 2018

Selain keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan *(corporate secretary)* juga melakukan konfirmasi serta tanggapan/jawaban atas pemberitaan di media massa yang terkait dengan rencana aksi atau berita yang menyangkut aksi korporasi yang simpang siur atau belum dapat dipastikan kebenarannya.

Press Release 2018

No	Tanggal	Judul
1	1/12/2018	BUMN Hadir Untuk Papua Salurkan Bantuan Rp. 5,4 Miliar
2	17/01/2018	BRI Jalin Kerja Sama Dengan Bank Lampung
3	17/01/2018	INKANAS Gandeng Bank BRI Sediakan Kartu Anggota Multi Fungsi
4	19/01/2018	BRI Dukung Pembinaan Olahraga Judo Indonesia
5	20/01/2018	SABRINA, Inovasi Layanan Digital Perbankan Terbaru Dari BRI
6	22/01/2018	Bambang Tribaroto, Juru Bicara Bank BRI yang Baru
7	24/01/2018	Jelang Pemaparan Kinerja Tahun 2017, Saham BBRI Tembus All Time High
8	24/01/2018	Bukukan Kinerja Positif, BRI Raup Laba Rp 29,04 Triliun Sepanjang 2017
9	24/01/2018	Sambut Asian Games 2018, BRI Luncurkan Kartu Kredit Edisi Khusus
10	30/01/2018	Leisure Economy Tumbuh Pesat, Bank BRI Luncurkan Kartu Kredit BRI World Access
11	30/01/2018	Beasiswa Nusantara Cerdas Angkatan 4, Wujud Komitmen BRI Majukan Dunia Pendidikan di Indonesia
12	31/01/2018	Gandeng Perbankan Swasta dan Daerah, BRI Kerja Sama Uang Elektronik BRIZZI
13	1/2/2018	Bank BRI Gandeng Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan
14	2/2/2018	Gandeng Perkumpulan/Komunitas, BRI Kerja Sama Uang Elektronik BRIZZI
15	8/2/2018	Sambut Tahun Baru Imlek, Bank BRI adakan Customer Gathering BRI Prioritas
16	11/2/2018	Targetkan 200.000 Pengunjung, BRI-Bekasi Jaman Now jadi Event Terbesar di Kota Bekasi.
17	11/2/2018	BRI Gandeng PWI Tingkatkan Kompetensi Wartawan
18	12/2/2018	BRI Targetkan Miliki Setengah Juta Agen BRILink Hingga Akhir Tahun 2018
19	19/2/2018	Erupsi Gunung Sinabung, BRI Alihkan Operasi Layanan Perbankan
20	21/2/2018	Bank BRI Fasilitasi Kartu Kredit Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
21	23/2/2018	BRI Raih Penghargaan Bergengsi Dari Euromoney
22	28/2/2018	Dorong UMKM Go Digital, Bank BRI Jalin Kerjasama dengan Lazada

Sekretaris Perusahaan

Press Release 2018

No	Tanggal	Judul
23	28/2/2018	Bank BRI Berpartisipasi pada Lelang Kementerian Keuangan RI
24	1/3/2018	BRI Tentukan Sikap Terkait ATM Dasar Laut
25	2/3/2018	Peran BRIsat Mendukung Program BBM Satu Harga di Pedalaman Papua
26	4/3/2018	E-Tilang Perhubungan, Dukungan BRI Wujudkan Layanan Digital Berbasis Teknologi Informasi
27	5/3/2018	Dorong Ekspor UMKM, BRI Gelar BRICRAFT 2018
28	5/3/2018	BRI Gandeng GO-PAY Perluas Penetrasi Layanan Perbankan
29	6/3/2018	Pemanfaatan Jaringan BRIsat Oleh TNI dan Polri
30	7/3/2018	BRI Beri Santunan dan Tanggung Seluruh Biaya Korban Kanopi Roboh di Banjarnegara
31	9/3/2018	Akselerasi Pemerataan Pendidikan di Wilayah Timur, Bank BRI Gelontorkan CSR di Kupang dan Flores
32	9/3/2018	IWABRI dan Bank BRI Gelar Acara "Bangga Karya Indonesia"
33	11/3/2018	BRI Luncurkan Program Pertamina BRI Cashless Society
34	12/3/2018	Jurus BRI Genjot Transaksi Cashless Hingga Rp 50 Triliun
35	12/3/2018	Bank BRI manjakan Nasabah Melalui Pagelaran Konser Fifth Harmony
36	13/3/2018	BRI Himbau Nasabah Waspada Atas Kejahatan Dengan Modus Skimming
37	15/3/2018	Bank BRI Gandeng PGN, Fasilitasi Bank Garansi Online
38	16/3/2018	Tarik Minat Traveller, Lion Air Group *Expodition* 2018 Banjir Diskon dari BRI.
39	19/3/2018	Bank BRI Salurkan Rp 13,8 Triliun KUR Dalam 2 Bulan
40	20/3/2018	BRI Lampaui Target Penjualan Sukuk Ritel 010
41	20/3/2018	Asuransi Mikro Milik BRI Jadi Buruan
42	20/3/2018	Bank BRI Gelar Forum Bersama Perusahaan Pembiayaan
43	21/3/2018	Tindak Lanjuti Instruksi Presiden, BRI Luncurkan Student Loan "BRIGUNA Pendidikan"
44	21/3/2018	Mahakarya Borobudur 2018: Wujud Komitmen BRI Majukan Pariwisata Indonesia
45	22/3/2018	Mudahkan Pembayaran, BRI Luncurkan SKCK Online Bersama Baintelkam POLRI
46	22/3/2018	Bank BRI Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
47	22/3/2018	Bank BRI Buka Peluang Bisnis Di Taiwan
48	24/3/2018	Perkuat Perekonomian Desa, BRI Implementasikan Progran Padat Karya Tunai di Klaten.
49	28/3/2018	Sinergi BRI dan TCASH Perluas Layanan Keuangan Digital di Indonesia
50	26/3/2018	BRI Utamakan Penggantian Kartu ATM bagi Nasabah yang Mendapatkan SMS Blast / SMS Notifikasi
51	27/3/2018	Sinergi BRI – Taspen, Permudah Pembayaran Pensiun Melalui Digitalisasi
52	27/3/2018	Gandeng Astra, BRI Fasilitasi Pekerja Dengan Skema KKB Khusus
53	27/3/2018	BRI Raih Predikat "*The Most Valuable Bank Brands*" di Indonesia
54	28/3/2018	BRI Siapkan 1,1 Juta Kartu ATM Teknologi Chip Hingga Akhir April 2018
55	4/2/2018	BRI Luncurkan SABRINA dan Indonesia Mall Serta Perbarui Tampilan Laman Resmi Korporat
56	4/3/2018	BUMDes Mitra BRI Tembus Pasar Global
57	4/3/2018	750 Mahasiswa Universitas Terbuka Peroleh Beasiswa Dari BRI
58	4/4/2018	BRI Dorong Gerakan Nasional Non Tunai Ke Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung
59	4/9/2018	BRI Akselerasi Penyaluran Student Loan di Kota Pendidikan

Sekretaris Perusahaan

Press Release 2018

No	Tanggal	Judul
60	4/11/2018	20 Juta Kartu Debit BRI Berlogo GPN Siap Diterbitkan Hingga Akhir 2018
61	4/13/2018	BRI Dukung Kampanye Traveling Aman Ke Luar Negeri
62	4/18/2018	BRI Luncurkan Kartu Kredit Traveller "*Wonderful* Indonesia"
63	4/18/2018	Ditjen Pajak Gandeng BRI Optimalisasi Penerimaan Negara
64	4/18/2018	BRI Permudah Pembayaran Iuran BPJS Melalui Autodebet
65	4/18/2018	BRI Prioritas Mahakarya Borobudur 2018: Wujud Komitmen BRI Majukan Pariwisata dan Budaya
66	4/20/2018	BRI Bank Pertama Di Indonesia Gunakan Sertifikat Elektonik (*Digital Signature*) Untuk Otentikasi
67	4/20/2018	Bank BRI MocoSik Festival 2018, Dukungan Nyata BRI Terhadap Industri Kreatif
68	4/20/2018	BRI Kerja Sama S*rate*gis dengan UGM dan UNAIR, Sediakan Layanan Perbankan, Corpo*rate* Card dan Student Loan Briguna Pendidikan
69	4/22/2018	BRI Ajak Kartini Jaman Now Ikuti Kartini Run 2018
70	4/24/2018	BRI Gandeng ITB, UNPAD, dan UNPAR Salurkan Student Loan
71	4/24/2018	BRI dan Lazada Didik Ribuan Pelaku UMKM Jadi *Technopreneurs*
72	4/24/2018	Digitalisasi Tingkatkan Akselerasi Penyaluran KUR BRI
73	4/26/2018	Tingkatkan *Digital Ecosystem Innovation,* Bank BRI Bekerja Sama dengan Digital Amoeba Telkom
74	4/27/2018	KPR Guru, Kado BRI Untuk Para Guru Dalam Rangka Hardiknas
75	4/27/2018	Bank BRI Perkuat Sinergi BUMN Dengan Pos Indonesia
76	4/29/2018	BRI Dukung Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Melalui Acara Zero Accident Ride 2018
77	3/14/2018	BRI AMBIL LANGKAH LINDUNGI JUTAAN NASABAH
78	5/2/2018	Tingkatkan Intermediasi dan Inklusi Keuangan, BRI Jalin Kerjasama dengan BPD Jateng
79	5/3/2018	Cetak Laba Rp.7,42 Triliun, BRI Pertahankan Pertumbuhan Kinerja Positif Berkelanjutan
80	5/4/2018	Resmikan Money Changer Di Perbatasan Malaysia, Upaya BRI Jaga Kedaulatan Rupiah
81	5/8/2018	BRI dan Bukalapak Gelar Kelas Ngelapak Di Malang
82	5/8/2018	BRI dan Bukalapak Gelar Kelas Ngelapak Di Malang
83	5/8/2018	Peran BRIsat Dongkrak Perekonomian Desa Di Halmahera Barat
84	5/8/2018	Dukung Indonesia Juara, BRI Berikan Jaminan Asuransi Kontingen Atlet Bulutangkis Thomas Cup & Uber Cup 2018
85	5/11/2018	Dorong Cashless di Pelabuhan, Bank BRI dan Pelindo III Luncurkan E-Port Card
86	5/15/2018	Bank BRI Terus Perluas Penyaluran Student Loan, Kali Ini Gandeng UT
87	5/21/2018	Geber Bisnis Konsumer, BRI Targetkan KPR Tumbuh Diatas 20% Hingga Akhir Tahun
88	5/23/2018	BANK BRI DAN GALERIES LAFAYETTE GELAR RAMADAN FASHION SOIREE
89	5/25/2018	BRI Gandeng Lion Parcel Kembangkan BUMDes di Yogyakarta
90	5/28/2018	Gelar BRI – *Nike Warehouse Sale*, BRI Beri Diskon Hingga 80%
91	5/31/2018	BRI Berikan Fasilitas Kredit Senilai Rp.7,16 Triliun Kepada Anak Usaha Waskita Karya Untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol
92	5/31/2018	Bank BRI Siapkan Rp. 62 Triliun Guna Antisipasi Libur Panjang Lebaran
93	6/5/2018	Sambut Lebaran, Bank BRI Bagikan 64 Ribu Paket Sembako Gratis
94	6/6/2018	Gandeng Mabes TNI, Bank BRI Fasilitasi Layanan Perbankan Anggota TNI
95	6/8/2018	220 Ribu Agen BRILink Siap Layani Pembayaran Zakat

Sekretaris Perusahaan

Press Release 2018

No	Tanggal	Judul
96	6/8/2018	BRI Revisi Pertumbuhan Kredit dan DPK Naik
97	6/8/2018	Baru 5 Bulan, BRI Sudah Salurkan KUR Diatas 50% Dari Target
98	6/8/2018	HIMBARA Gelar Buka Puasa Bersama Ribuan Anak Yatim Piatu
99	6/7/2018	BRI Fasilitasi Pembiayaan Rumah Bagi Anggota POLRI
100	6/22/2018	Bank BRI Sambut Baik Penurunan Tarif Pajak UMKM
101	6/26/2018	Libur Nasional Pilkada Serentak, Kantor Cabang BRI Tetap Beroperasi
102	6/28/2018	Kemnaker Gandeng Bank BRI Untuk Optimalisasi Millenial's Innovation Room
103	6/28/2018	BRI Perkuat Layanan *Virtual Account* Angkasa Pura I
104	6/29/2018	BRI Jalin Kerjasama Strategis Dengan Anak Perusahaan Pelindo III
105	7/4/2018	Bank BRI Berikan Dana Talangan Penyelenggaraan Asian Games Senilai Rp.350 Miliar
106	7/9/2018	BRI Sponsori *Event Afternoon Beauty Soiree* Yang Digelar Oleh Lafayette Galeries
107	7/12/2018	BRI Gandeng Dwiki Darmawan Gelar Event Musik Berskala Nasional Di Kota Solo
108	7/13/2018	Gandeng Bank Jatim, BRI Terus Perluas Kerjasama Strategis Dengan BPD
109	7/16/2018	Gandeng kiosTix, BRI Mudahkan Masyarakat Dapatkan Tiket Asian Games 2018
110	7/18/2018	BRI Dukung Anugerah Jurnalistik POLRI 2018 Ciptakan jurnalisme Damai
111	7/23/2018	BRI Teken Perjanjian Kerjasama Dengan BMKG
112	7/23/2018	Sukseskan Asian Games, Bank BRI Sediakan ID Card Terintegrasi BRIZZI untuk Volunteer
113	7/23/2018	BRI Lampaui Target Penyaluran KUR Semester I 2018
114	7/24/2018	BRI Meriahkan Gelaran Kirab Obor Asian Games 2018 di Denpasar
115	7/31/2018	Raup Laba Rp.14,9 T, Bank BRI Terus Torehkan Kinerja Positif Di Tengah Kondisi Ekonomi Dunia Yang Menantang
116	8/6/2018	Pasca Gempa Lombok, Bank BRI Tetap Beroperasi Layani Nasabah Serta Salurkan Bantuan
117	8/6/2018	Gandeng Garuda, Citilink dan Indonesia AirAsia, BRI Pasarkan BRIZZI di Angkasa
118	8/7/2018	BRI Terbitkan Corporate Card Dorong Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Kemlu
119	8/7/2018	BRI Gandeng UGM Bangun Laboratorium Big Data
120	8/13/2018	BRI Dan HIMBARA Dorong Transaksi Non Tunai Di Lingkungan ASDP
121	8/13/2018	Mudahkan Wartawan Meliput Selama Perhelatan Asian Games, BRI Luncurkan ID Card Press Terintegrasi BRIZZI
122	8/13/2018	Sinergi Misi Kemanusiaan, BRI dan Garuda Terbangkan 25 Tenaga Medis Ke Lombok
123	8/14/2018	BPKP Perpanjang Kerja Sama Dengan Bank BRI Dalam Pelayanan Jasa Perbankan
124	8/17/2018	Program BUMN Hadir Untuk Negeri Diselenggarakan di Sulbar, Mulai Dari Jalan Santai, Pameran UMKM Hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis
125	8/17/2018	Bank BRI Apresiasi Prestasi Tim PASKIBRAKA Nasional 2018
126	8/20/2018	BRI Apresiasi Kemenangan TIMNAS U – 16 di Piala AFF 2018
127	8/31/2018	BRI Gandeng Emtek Grup Perkuat Layanan Digital
128	8/30/2018	Raih 6 Penghargaan Internasional, Digital Innovation BRI diakui Dunia.doc
129	9/3/2018	Jokowi Ganjar Atlet, Pelatih dan Official Team Asian Games dengan Tabungan Britama
130	9/4/2018	BRI Apresiasi Nasabah dan Pekerjanya pada Peringatan Hari Pelanggan Nasional
131	9/4/2018	Bank BRI Gelar *Public Expose* di Semarang

Sekretaris Perusahaan

Press Release 2018

No	Tanggal	Judul
132	9/6/2018	Transaksi Uang Elektronik Brizzi Tumbuh Tujuh Kali Lipat
133	9/13/2018	BRI Berikan Fasilitas Kredit Kepada Trihamas Finance
134	9/13/2018	BRI Dukung Penyelenggaraan Temu Nasional Kowani Dan International Council of Women (ICW)
135	9/17/2018	BRI Bangun 300 Rumah dan 375 MCK untuk Korban Gempa Lombok
136	9/18/2018	Bank BRI Gandeng Siloam Hospital, Perkuat Layanan Perbankan dan Layanan Kesehatan
137	9/18/2018	Raih Predikat Terbaik, BRI Menangkan National Champion for Marketing 3.0
138	9/21/2018	Bank BRI Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Lion Air Group
139	9/24/2018	Peran Nyata BRI Turut Serta Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
140	9/24/2018	Sponsori Asian Para games 2018 Bank BRI Meriahkan Parade Momo
141	9/24/2018	BRI Sediakan Pembiayaan Tagihan Faskes Mitra BPJS Kesehatan
142	9/25/2018	BRI Buka Gerai Money Changer Satu Satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo
143	9/27/2018	BRI Tutup Rangkaian *Public Expose* Tahun Ini Di Makassar
144	9/27/2018	Dukung Pembangunan Proyek Strategis Nasional, BRI Ikut Resmikan Tol Desari
145	9/27/2018	Dirut BRI Bersama Menteri BUMN Beri KUR dan Serahkan Bantuan CSR untuk Petani Melon di Lamongan
146	9/28/2018	Sambut HUT Ke-63 Korlantas, BRI Berikan Tali Asih Korban Lakalantas & Polri
147	9/28/2018	Bank BRI Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Danareksa
148	9/27/2018	BRI Kantongi Penghargaan di Bidang Infrastruktur Cloud dan Transformasi Digital 2018
149	9/30/2018	Dukung Semangat Kepada Para Atlet, BRI Ikut Meriahkan Parade Obor Asian Para Games 2018
150	9/30/2018	BRI Promosikan Kopi Indonesia Melalui Ajang Barista Showcase
151	10/1/2018	Percepat Recovery Layanan Perbankan, BRI Manfaatkan Jaringan Komunikasi BRIsat
152	10/1/2018	BRI Terus Kirimkan Bantuan Bagi Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng
153	10/2/2018	Bantuan BRI Terus Bertambah Bagi Korban Bencana di Palu dan Donggala
154	10/3/2018	Bank BRI Dukung Penyelenggaraan IBD Expo di Surabaya
155	10/3/2018	Pecahkan Rekor Muri, BRI Gelar Membatik Bersama Dharma Wanita Pertiwi
156	10/4/2018	Pekerja Millenial BRI Juarai Kompetisi Inklusi Keuangan Yang Digelar Oleh OJK
157	10/5/2018	Kerja Sama Strategis Bank BRI dengan Garuda Indonesia Perkuat Rupiah
158	10/5/2018	Peran Nyata Bank BRI Sukseskan Pertemuan Tahunan IMF – WB 2018 di Bali
159	10/6/2018	Hadirkan *Flash Mob* dan Promosi Menarik, BRI Ikut Meriahkan *Opening Ceremony* APG 2018
160	10/8/2018	Layanan Perbankan BRI di Palu Berangsur Pulih
161	10/5/2018	BRI Turut Promosikan Kopi Indonesia dan Bantu Donasi lewat Program '*a Cup for Solidarity*'
162	10/9/2018	Bank BRI Dukung Kompetisi Sepak Bola Pelajar Gala Siswa Indonesia
163	10/9/2018	Lagarde Apresiasi Program '*a Cup for Solidarity*' by BRIKOPI
164	10/12/2018	Presiden Jokowi Bersama Para Menteri Kabinet Kerja Apresiasi Kopi Solidaritas
165	10/13/2018	Global Finance Nobatkan BRI Sebagai Bank Terbaik di Indonesia Selama 3 Tahun Berturut turut
166	10/13/2018	Jokowi Resmi Beri Bonus Atlet Asian Para Games 2018 Lewat Tabungan BritAma Bisnis
167	10/14/2018	Kampanye 'a Cup For Solidarity' by BRIKopi Hasilkan Jumlah Donasi hingga Rp 1,3 Miliar
168	10/20/2018	BRI dan Pemprov Jateng Perkuat Sistem Informasi Pertanian di Jawa Tengah

Sekretaris Perusahaan

Press Release 2018

No	Tanggal	Judul
169	10/20/2018	BRI Gelar Promo Belanja Gratis Pakai My QR di Ranch Market Surabaya
170	10/23/2018	BRI Luncurkan Aplikasi My Bhayangkari pada Peringatan HKGB Ke 66
171	10/24/2018	Raup Laba Rp.23,5 Triliun, Efisiensi dan FBI Topang Kinerja BRI Di Triwulan III 2018
172	10/26/2018	BRI Dukung Kemlu RI Gelar DiploFest di Yogyakarta
173	10/27/2018	Rayakan Bulan Inklusi Keuangan, BRI dan OJK Gelar FinEXPO & SunDown Run 2018
174	10/29/2018	BRI Promosikan Kopi Indonesia Sekaligus Berdonasi untuk Konservasi Laut di Acara Our Ocean Conference (OOC) 2018
175	10/30/2018	Penutupan OCC 2018, BRI Serahkan Donasi '*a Cup for Solidarity*' by BRIKopi untuk Konservasi Laut
176	10/31/2018	BRI Dukung Industri Infrastruktur Nasional Melalui Acara Konstruksi Indonesia 2018
177	10/30/2018	Rumah Kreatif BUMN Milik BRI Dinobatkan Sebagai RKB Terbaik
178	10/31/2018	BRI Berikan Tabungan Kepada Atlet Badminton Berprestasi
179	11/15/2018	BRI Dukung Keberhasilan Program Perhutanan Sosial di Jawa Barat
180	11/15/2018	BRI Teken Pemberian Fasilitas Kredit Senilai Rp. 1,2 Triliun Kepada PLN
181	11/15/2018	Bank BRI Perkuat Samsat Online untuk Tingkatkan Layanan Kepada Masyarakat
182	11/16/2018	Dirut BRI Suprajarto Dinobatkan Sebagai Tokoh Profesional Terbaik
183	11/16/2018	Bank BRI-MRA Group Beri Kemudahan Layanan Transaksi Melalui Potongan Diskon 30% Setiap Hari!
184	11/19/2018	Bidik Pertumbuhan KKB, BRI Berikan Fasilitas Kredit Rp.1 Triliun Kepada BFI Finance
185	11/19/2018	Sinergi BRI - Taspen Promosikan "Karir Kedua" Bagi ASN dan Pensiunan
186	11/21/2018	Rayakan HUT BRI ke 123 BRIRUN 2018 Solo Series Targetkan 10.000 Peserta
187	11/22/2018	Bank BRI Raih Penghargaan Emiten Penambahan Investor Karyawan Tertinggi 2018
188	11/22/2018	BRI Sabet Penghargaan dari Pemerintah sebagai Bank Penyalur KUR Terbaik
189	11/22/2018	BRI Teken Kerja Sama Str*at*egis dengan Lemhannas RI
190	11/22/2018	BRI Berikan Pinjaman ke Pupuk Indonesia
191	11/27/2018	Bank Indonesia Nobatkan BRI Sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik
192	11/29/2018	Dorong Pertumbuhan Simpanan, BRI Tambah Sentra Layanan Prioritas
193	11/29/2018	BRI Raih Penghargaan Best of the Best dari Forbes
194	11/29/2018	BRI Terima Penghargaan Terbaik di Ajang "Top 20 Financial Institutions 2018"
195	11/30/2018	Bank BRI Meresmikan Institut Teknologi dan Bisnis BRI (BRI Institute)
196	12/2/2018	10.000 Pelari Ramaikan BRIRUN 2018 Solo Series
197	12/3/2018	Bank BRI Borong Tiga Penghargaan Dealer Utama dari Kementerian Keuangan RI
198	12/3/2018	BRI New York Dukung Program Pendidikan Lanjutan bagi Mahasiswa Indonesia di Kanada dan Amerika Serikat
199	12/6/2018	Dirut Bank BRI Suprajarto Dinobatkan Sebagai Marketeer of The Year 2018
200	12/6/2018	BRI Fasilitasi Layanan Perbankan Kementerian Perdagangan RI
201	12/7/2018	Perkuat Daya Saing, BRI Dorong Sinergi Dengan BPD
202	12/10/2018	KUR Permudah Akses Pembiayaan UMKM
203	12/12/2018	Rayakan Ulang Tahun Ke-123, BRI Hadirkan Branded Sale Dengan Diskon 70%+10%

Sekretaris Perusahaan

Press Release 2018

No	Tanggal	Judul
204	12/10/2018	KUR BRI Berhasil Bikin 2,15 Juta Pelaku Usaha Mikro "Naik Kelas"
205	12/11/2018	Bank BRI Raih Penghargaan di Bidang Tata Kelola Perusahaan dari IICD
206	12/11/2018	Bank BRI Bangun Hunian Sementara bagi Masyarakat Terdampak Gempa Sulawesi Tengah
207	12/11/2018	Bank BRI Raih Penghargaan di Bidang Tata Kelola Perusahaan dari IICD
208	12/16/2018	Rayakan Puncak HUT BRI Ke-123 Tahun, 65.000 Peserta Ikuti BRIFFEST 2018
209	12/17/2018	Tata Kelola Big Data Bank BRI Raih ISO27001
210	12/18/2018	BRIncubator Optimalkan Literasi Keuangan UMKM dan Keluarga Migran
211	12/20/2018	BRI Raih Penghargaan BUMN Terbaik 2018 Versi Majalah Investor
212	12/21/2018	BRI Siapkan Rp.49,2 Triliun Jelang Natal dan Tahun Baru 2019

Detail Press Release dapat diakses di kanal Warta BRI pada website Bank BRI (https://bri.co.id/news)

Penyelenggaraan Program Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru Sekretaris Perusahaan mengkordinir pelaksanaan program orientasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyampaikan diantaranya tugas dan tanggungjawab selaku Direksi dan Dewan Komisaris, Hak dan Kewajiban, peraturan dan ketentuan terkait.
Program Orientasi yang telah dijalankan selama tahun 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris baru yaitu:

- Program Orientasi Direksi dilakukan melalui forum Rapat Direksi, dan pertemuan tatap muka Sekertaris Perusahaan dengan Direksi. Adapun materi orientasi antara lain:
  - Tugas dan tanggung jawab Direksi dan sesuai pembidangan Direksi
  - Visi dan Misi Perusahaan
  - Hak dan Fasilitas Direksi.
- Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru sebagaimana telah di jelaskan program Orientasi Dewan Komisaris.

Dividen

Kebijakan

Dalam memutuskan pemberian Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham, Bank BRI memperhatikan faktor pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor *sustainable* tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun kedepan serta mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan Bank BRI kepada pemerintah untuk pembangunan serta mempertimbangkan pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Bank BRI memiliki kebijakan pemberian Dividen kepada pemegang saham dengan rasio pemberian secara historis kisaran 40% dari laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Pembayaran Dividen

Pembayaran Dividen dilaksanakan berdasarkan hasil putusan RUPS atas mata acara persetujuan penggunaan laba. Pembayaran Dividen dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal RUPST	Tanggal pengumuman Hasil RUPST	Tanggal Pembayaran	Dividen *Payout Ratio*
23 Maret 2016	25 Maret 2016	22 April 2016	30%
15 Maret 2017	17 Maret 2017	13 April 2017	40%
22 Maret 2018	26 Maret 2018	25 April 2018	45%

Hubungan Investor

Divisi Hubungan Investor BRI memiliki peranan khusus untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan kepada Investor. Selain itu, Divisi Hubungan Investor BRI berperan dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

Achmad Royadi
Head Investor Relations

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, Achmad Royadi memperoleh gelar MBA *Finance* pada tahun 2009 dari A.B *Freeman School of Business, Tulane University*, USA dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Padjdjaran, Bandung pada tahun 1998. Beberapa sertifikasi yang telah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi *Treasury Dealer*.

Menjabat sebagai *Head of Investor Relations* sejak Juni 2018, dan memulai karier di BRI pada tahun 1999.
Dalam perjalanan karirnya, beliau sempat menjabat sebagai *Vice President Corporate Development & Strategy*, *Head of Economist Group, Group Head of Global Market*, serta Kepala Bagian Manajemen Likuiditas Divisi *Treasury*.

Contact Investor Relation

Nama : Achmad Royadi
Alamat : Gedung BRI II lantai 7
: Jl. Jendral Sudirman No-44-46 Jakarta Pusat 10210
Telp. : +62 21 575 2019
Fax : +62 21 575 2010
Email : ir@bri.co.id
Website : www.ir-bri.com

Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama *Head of Investor Relations* BRI adalah merumuskan strategi dan melakukan fungsi komunikasi terkait kinerja dan strategi perusahaan kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI.

Dalam rangka memenuhi tangung jawab dan peraturan serta meningkatkan komunikasi yang efektif, Divisi Hubungan Investor BRI melakukan beragam kegiatan yaitu:

1. *Analyst Meeting*
   Merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para analyst/ perusahaan sekuritas yang bertujuan agar analyst/perusahaan sekuritas tersebut dapat menyajikan report dengan data terkini kepada para investor.

2. *Company Visit - Field Visit*
   Menerima kunjungan dari investor/ analyst yang ingin mengupdate kinerja terkini serta ingin mengetahui dan melihat secara langsung operasi perusahaan baik di kantor pusat maupun di unit kerja operasional.

3. *Conference Call*
   Melakukan kegiatan *tele-conference* untuk mengakomodasi kebutuhan para investor/ *analyst* dalam mendapatkan informasi perusahaan maupun kondisi perekonomian yang memberikan pengaruh ke bisnis dan operasional perusahaan.

4. *Investor Newsletter*
   Update informasi terkini melalui penerbitan *newsletter* pada *website* hubungan investor BRI.

5. *Investor Conference dan Non-deal Roadshow*
   Melakukan kegiatan komunikasi melalui *1-on-1 meeting* maupun group meeting dengan para investor baik di dalam dan luar negeri terutama pada kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika.

6. *Rating Review*
   Melakukan kegiatan komunikasi dan penyampaian data BRI dalam rangka pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang digunakan BRI, baik lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch Rating, S&P) maupun lembaga pemeringkat domestik (Pefindo).

Hubungan Investor

7. Pengelolaan *Website* Hubungan Investor
   Melakukan pengelolaan informasi pada *website* hubungan investor agar pemegang saham, pemegang surat hutang, analis, lembaga pemeringkat serta masyarakat umum memiliki kemudahan dalam mengakses informasi terkini dari perusahaan. *Website* yang dikelola oleh Divisi Hubungan Investor tersebut juga terkoneksi dengan *website* perusahaan yaitu www.bri.co.id.

8. *Advisory Report*
   Melakukan penyusunan materi advisory yang berisi hasil valuasi saham BRI dan hasil identifikasi gap antara *intrinsic value* dan *target price* analis maupun hasil analisa lainnya untuk dikomunikasi secara internal kepada *Board of Management*.

9. *Market Update Advisory*
   Melakukan penyusunan materi berupa update kondisi pasar saham, harga saham BRI dan peers untuk dikomunikasikan secara internal kepada *Board of Management*.

10. *Financial Update*
    Melakukan penyusunan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para analyst/ perusahaan sekuritas pada kegiatan Analyst Meeting.

11. *Financial Brief*
    Melakukan penyusunan ringkasan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka mengkomunikasikan kinerja BRI kepada para pekerja BRI.

12. BBRI *News*
    Melakukan penyusunan materi terkait *issue* terupdate yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan untuk dikomunikasikan secara internal baik kepada *Board of Management* ataupun pekerja BRI.

Program Pelatihan Kompetensi 2018

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Head of Investor Relation dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh *Head of Investor Relations* di tahun 2018 adalah:

1. *Risk Management Certification Refresher Program* "Tantangan Utama Manajemen Risiko 2019", BARa, Batam, 2018.
2. *Training Strategic Marketing* "*Competing in the Digital Age Program*"- Ross School of Business, University of Michigan, 2017.
3. *Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution*- BSMR and PWC, Jakarta, 2017.
4. ASEAN *RISK CONFERENCE* 2017- *Asia Risk, Incisive Media*, Kuala Lumpur, 2017.
5. ACI (*The Financial Market Associate*) *World Congress*, 2016.
6. *Bond Market Analysis - School of Bonds and Fixed Income* (IBPA), Jakarta, 2016.
7. ASEAN *Conference "Connecting* ASEAN" - Bank of America Merryl Linch, Singapore, 2015.
8. *Enrichment Reksadana* - Infovesta, Jakarta, 2015.
9. *Key Risk Management Challenge* - BARa, Denpasar, 2014.
10. *Hedge Accounting by* Deloitte, Jakarta, 2014.
11. *Treasury Derivative Course* - HSBC, Jakarta, 2013.
12. *IR and Stake Holder Management* - Marcus Evans, Singapore, 2012.
13. *Basic Training of Islamic Bank* - LPPI, Jakarta, 2011.
14. *Corporate Action and Equity Analysis* - Indonesia *Investor Relations Institute*, Jakarta, 2010.

Selain itu, beberapa pelatihan juga diikuti oleh Kepala Bagian dan staff Divisi Hubungan Investor pada tahun 2018 diantaranya:

1. *Chartered Financial Analyst*
2. *Business Valuation*
3. *Querying Microsoft* SQL
4. Mini-MBA
5. Sertifikasi Manajemen Risiko
6. *Certified of Investor Relations*

Hubungan Investor

Pelaksanaan Kegiatan 2018

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor selama tahun 2018 meliputi:

1. Penyelenggaraan *Analyst* Meeting yang dilaksanakan setiap triwulan
2. Kegiatan komunikasi berupa 154 *company visit*, 16 *field visit*, 8 *roadshow* luar negeri, 8 *roadshow* dalam negeri dan 68 *conference call*.
3. Penyelenggaraan *Annual Rating Review* untuk Fitch, Moodys, S&P serta Pefindo.
4. Penyelenggaraan *Public Expose*, RUPS, RUPSLB dan 1 (satu) *Investor Newsletter*.
5. Pengelolaan informasi terkini pada *website* Investor Relations (www.ir-bri.com) meliputi:
   a. Informasi Perusahaan
   b. Kinerja Keuangan dan Presentasi Perusahaan.
   c. *Corporate Governance*
   d. Informasi Terkait RUPS
   e. *Disclosure (Regulatory Filings, Events Calender, Release)*
   f. Kinerja Saham dan Informasi Surat Berharga yang diterbitkan.

Satuan Kerja Audit Internal

Tri Wintarto
Senior Executive Vice President Satuan Kerja Audit Intern

Lahir di Cilacap, 22 Desember 1962. Lulusan Universitas UPN Veteran Yogyakarta tahun 1987 dan Universitas Lampung tahun 2002.

Pengalaman professional beliau adalah:
1. Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 2 (2013-2014)
2. Pemimpin Wilayah BRI Bandar Lampung (2014-2015)
3. Pemimpin Wilayah BRI Bandung (2015)
4. Kepala Divisi Bisnis Program (2016)
5. Inspektur Kanins BRI Jakarta 3 (2016-2017)
6. Inspektur Kanins BRI Jakarta 1 (2017)

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bringin Sejahtera Makmur (2013). Saat ini beliau aktif terlibat sebagai Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dan Ketua Yayasan Baitul Mal BRI (2013-sekarang).

Training yang diikuti
Aktif mengikuti berbagai pelathan dan seminar diantaranya Pendidikan Sekolah dan Pimpinan Bank (Sespibank) di Jakarta-Switzerland (2016), The Victoria Indonesia *Leadership* Program (VILP) di Melbourne (2016), Pendidikan dan Uji Sertifikasi QIA di Jakarta (2017), dan BARA Risk Forum di Prague & Vienna (2017).

Pembicara
Aktif sebagai pembicara dalam Konferensi X Ikatan Auditor Intern Bank di Yogyakarta (2018) dan National *Anti Fraud Conference* di Yogyakarta (2017).

Sertifikasi
Beliau telah memiliki sertifikasi *General Banking Level* 3 (2015) dan Sertifikasi Manajemen Risiko. Level 4 (2012).

Dasar Hukum

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk dengan dilandaskan ketentuan dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 Tanggal 20 September 1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan *(Compliance Director)* dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Satuan Kerja Audit Internal

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah Auditor yang memadai, pengembangan metodologi dan *tools audit* yang sesuai dengan *best practices.*

Kedepannya SKAI diharapkan dapat menjadi *Trusted Advisor* bagi Auditee dan mampu memberikan *forward looking insights* kepada *Auditee* dalam pengambilan keputusan yang bersifat st*rate*gis. Untuk dapat berperan sebagai *Trusted Advisor* bagi Auditee, maka SKAI perlu untuk meningkatkan/optimalisasi keselarasan fokus dan prioritas audit dengan key *business objectives*, memperluas *risk coverage*, lebih proaktif terhadap *current and emerging risk* yang dihadapi BRI serta meningkatkan sinergi dengan fungsi *1st line of defense & 2nd line of defense* untuk penyelarasan prioritas risiko.

SKAI telah melaksanakan beberapa program kerja untuk merespon kebutuhan tersebut melalui pelaksanaan audit tematik dengan memperhatikan st*rate*gi pengembangan bisnis perusahaan dan melibatkan seluruh jajaran Audit Intern Wilayah, pengembangan identifikasi *red flags* risiko *fraud*, pengembangan *enhanced Continuous Auditing* dan pelaksanaan forum komunikasi dengan fungsi *1st line* dan *2nd line of defense*.

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi BRI

Organisasi SKAI sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.376-DIR/CDS/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 secara struktural berada di bawah binaan Direktur Utama yang memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit), sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif.

SKAI BRI dipimpin oleh SEVP SKAI yang membawahi Audit KP/KCK/ UKLN & PA, Audit Intern Teknologi Informasi, 19 (Sembilan Belas) Audit Intern Wilayah, Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit (PSKA), dan Grup Spesial Investigasi. Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern:

Satuan Kerja Audit Internal

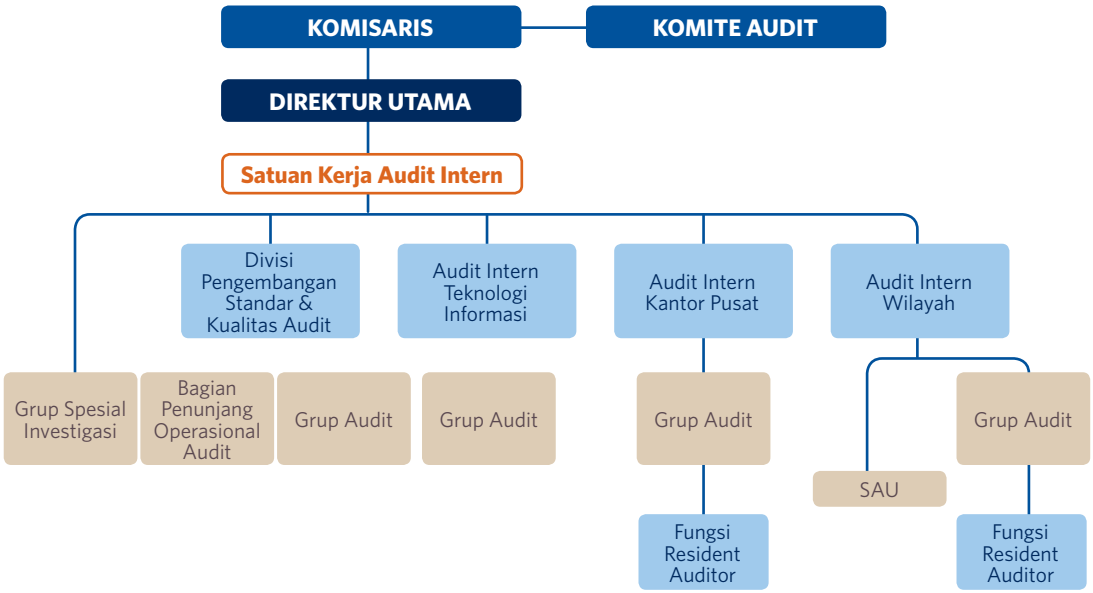

Secara struktural, SKAI terdiri dari Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit dan Unit Kerja yang melakukan pengembangan standar & kualitas audit sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit sbb :
   a. Audit Intern Wilayah (AIW)
      Dalam rangka memperkuat fungsi audit di wilayah, BRI memiliki 19 (sembilan belas) Audit Intern Wilayah yang berdampingan dengan 19 Kantor Wilayah BRI di seluruh Indonesia. AIW melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic* business partner dengan objek audit Kanwil, Kanca, KCP, Kantor Kas dan BRI Unit di wilayah kerjanya.

      Organisasi Audit Intern Wilayah juga didukung oleh keberadaan Resident Auditor (RA) yang ditempatkan di Kantor Cabang dengan melaksanakan kegiatan audit dan *monitoring* berkala secara berkesinambungan sehingga diharapkan dapat berperan untuk memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko di Unit Kerja Operasional. Pada pelaksanaan fungsinya, Audit Intern Wilayah melakukan audit terhadap Kanwil, Kanca, KCP, dan KK setiap tahun, serta BRI Unit. Sedangkan RA melakukan kegiatan audit dan *monitoring* berkala secara berkesinambungan. RA terdiri dari RA Kanca dengan objek audit Kanca, KCP dan Kantor Kas. Sedangkan RA Unit dengan objek audit BRI Unit. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Audit Intern Wilayah dan RA, maka dalam menentukan ruang lingkup audit, Audit Intern Wilayah memperhatikan ruang lingkup dan hasil audit, serta *monitoring* berkala dari RA Kanca dan RA Unit. Demikian sebaliknya. Sinergi dan komunikasi yang terbangun antar Audit Intern Wilayah dan RA merupakan faktor utama dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit.

      Sebagai bentuk *Strategic Business Partner* (SBP) dan mendorong *risk awareness* di Unit Kerja, Kepala Audit Intern Wilayah menyelenggarakan suatu forum komunikasi (Forum SBP) dengan Pemimpin Wilayah yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dengan membahas diantaranya mengenai isu-isu *strategis* atau permasalahan terkini yang terjadi di Unit Kerja, penyelesaian tindak lanjut hukuman disiplin maupun *sharing* modus operandi *fraud* terkini

Satuan Kerja Audit Internal

dengan tujuan untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilaksanakan di Kantor Wilayah BRI sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud* di masa yang akan datang. Selain penyelenggaran Forum SBP tersebut, Audit Intern Wilayah juga menyelenggarakan kegiatan "Auditor Mengajar" yang dilaksanakan oleh *Group Head* AIW dan RA Kanca dengan peserta meliputi pekerja di Unit Kerja binaan. Adapun materi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan *risk & control awareness* bagi pekerja di Unit Kerja Operasional.

b. Audit Intern KP/KCK/UKLN & Perusahaan Anak
Melaksanakan kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi), dan Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang dimiliki BRI lebih dari 50%. Dalam rangka implementasi audit terintegrasi, Audit Intern KP juga telah melaksanakan joint audit dengan perusahaan anak sehingga proses *sharing knowledge* dalam LJK Konglomerasi Keuangan BRI berjalan dengan baik. Selain pelaksanaan kegiatan audit, Audit Intern Kantor Pusat juga melaksanakan kaji ulang terhadap ruang lingkup yang bersifat *regulatory*, diantaranya terkait Manajemen Risiko, Strategi Anti *Fraud*, dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

c. Audit Intern Teknologi Informasi
Melaksanakan kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan TSI (meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi *Core* dan *Non Core Banking*; operasional infrastruktur TSI pada Data Center, *Disaster Recovery Center* & seluruh Unit Kerja; pengamanan informasi; aplikasi; infrastruktur TSI; strategi & kebijakan pengembangan TSI; manajemen risiko TI; penunjang TSI (pengelolaan aset & logistik, pengadaan barang dan jasa IT yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat BRI) serta *End User Computing*) serta Produk dan Aktivitas Baru BRI. Untuk mendukung pelaksanaan audit terintegrasi, Audit Intern Teknologi Informasi juga melakukan kolaborasi dengan Perusahaan Anak melalui kegiatan joint audit.

d. Grup Spesial Investigasi
Melakukan investigasi atas indikasi *fraud* dan pengaduan *whistleblowing system* dengan kewenangan objek audit seluruh Unit Kerja BRI. Grup Spesial Investigasi berada di bawah Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

2. Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit berperan dalam memastikan tersedianya panduan pelaksanaan audit serta meningkatkan kualitas audit dan nilai tambah peran audit sesuai ketentuan dan *best practices* audit intern. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Divisi PSKA meliputi penyusunan visi, misi dan strategi SKAI; pelaksanaan evaluasi kualitas audit oleh jajaran SKAI maupun pihak pihak independen termasuk pelaksanaan internal *quality assurance* terhadap SKAI perusahaan anak; pengkajian dan perancangan *software* maupun hardware untuk mendukung pelaksanaan audit; melakukan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen BRI dan pihak eksternal; serta melakukan pengembangan dan pengelolaan *analytical tools* data audit.

Satuan Kerja Audit Internal

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

SKAI BRI dipimpin oleh SEVP SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada regulator. Pengangkatan SEVP SKAI BRI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No B.282-SKP/SKR/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Piagam Audit Internal

BRI memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang sesuai dengan POJK 56/POJK.04/2015 dan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nokep: 02-KOM/BRI/04/2018; Nokep: S.336-DIR/SAI/04/2018 tanggal 30 April 2018.

Piagam Audit Intern disusun guna memberikan gambaran dan pedoman mengenai visi, misi, kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, Kode Etik Auditor Intern, Independensi dan Objektivitas, dan ruang lingkup pekerjaan audit intern dalam organisasi.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional. SKAI membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistimatis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*. Sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI mencakup:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang Keuangan, Akuntansi, Operasional, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Memberikan penilaian tingkat keyakinan kualitas pelaksanaan tugas atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif di seluruh Unit Kerja BRI.
7. Melaksanakan audit di semua level Unit Kerja BRI dan Perusahaan Anak yang dimiliki BRI lebih dari 50% secara independen, objektif dan profesional.

Satuan Kerja Audit Internal

8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
9. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman Audit Intern dalam melaksanakan tugasnya.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kualitas audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala SKAI

SEVP SKAI melaporkan kegiatan audit intern kepada Direktur Utama secara berkala. Sesuai Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SEVP SKAI antara lain:

1. Mengelola SKAI secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan nilai tambah bagi BRI.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan strategi SKAI untuk menjamin keselarasannya dengan visi, misi dan strategi BRI.
3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Audit Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Audit Intern.
4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit sehingga proses audit dilakukan secara independen, objektif dan profesional sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
5. Mengarahkan dan mengkoordinasikan Organisasi, Sumber Daya, Kebijakan dan Prosedur Audit untuk meningkatkan kualitas audit dan nilai tambah peran SKAI dalam organisasi.

Kode Etik Audit Internal BRI

SKAI BRI juga memiliki kode etik berupa prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang harus dipatuhi oleh Auditor Intern baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan audit untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern. Kode Etik Auditor BRI terdiri dari 4 prinsip yaitu:

1. ***Integrity principle***
   Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern yang profesional.

2. ***Objectivity principle***
   Mempraktekkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktifitas/ proses yang diuji.
   Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

3. ***Confidentiality principle***
   Menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

4. ***Competency principle***
   Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Audit Intern dan diperbaharui setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap Auditor diingatkan kembali akan adanya Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

Independensi Audit Internal BRI

SKAI sebagai *3rd line of defense* secara struktural telah independen terhadap fungsi *1st line of defense* (Unit Kerja Operasional) dan fungsi *2nd line of defense* (Jajaran Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan).

Kedudukan SKAI dalam perusahaan berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit), maka hal tersebut mendukung independensi dan objektivitas pelaksanaan dan pelaporan audit, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BRI. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. Untuk menjaga objektivitas Auditor Intern, dilakukan perubahan penugasan secara berkala.

Profil dan SDM Satuan Kerja Audit Internal BRI

Membangun auditor yang berkualitas menjadi salah satu fokus utama SKAI setiap tahun. Melalui berbagai program peningkatan kompetensi Auditor, SKAI terus berupaya

Satuan Kerja Audit Internal

menyediakan tenaga auditor yang berkualitas, memiliki kompetensi dan memahami tingkat risiko dimasing-masing wilayah kerja audit. SKAI senantiasa melakukan pengkinian profil kompetensi auditor untuk mengidentifikasi gap kompetensi dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kedepannya.

Oleh karena hal tersebut, SKAI bekerjasama dengan BRI Corporate University dalam mengembangkan kompetensi auditor yang dilakukan melalui sustainable education yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara memadai kepada auditor untuk menjalankan tugas auditnya. *Sustainable education* dilakukan melalui penugasan langsung baik sesuai dengan bidang pekerjaan dan diluar bidang pekerjaan untuk meningkatkan skill auditor melalui On The Job *Training* dan pendidikan (*Inclass, In House Training, Public Course* dan Seminar).

Secara berkala, perkembangan kompetensi auditor dilakukan *monitoring*, evaluasi dan tindak lanjut pengembangan kompetensi baik melalui penugasan, *training* dan lain sebagainya. Program pengembangan dan peningkatan kompetensi pekerja di jajaran SKAI dilakukan *monitoring* secara tertib untuk memastikan terdapatnya peningkatan kemampuan dan ketrampilan auditor.

Jumlah Auditor dan Jabatannya

Per akhir 2018 jumlah auditor SKAI adalah sebagai berikut:

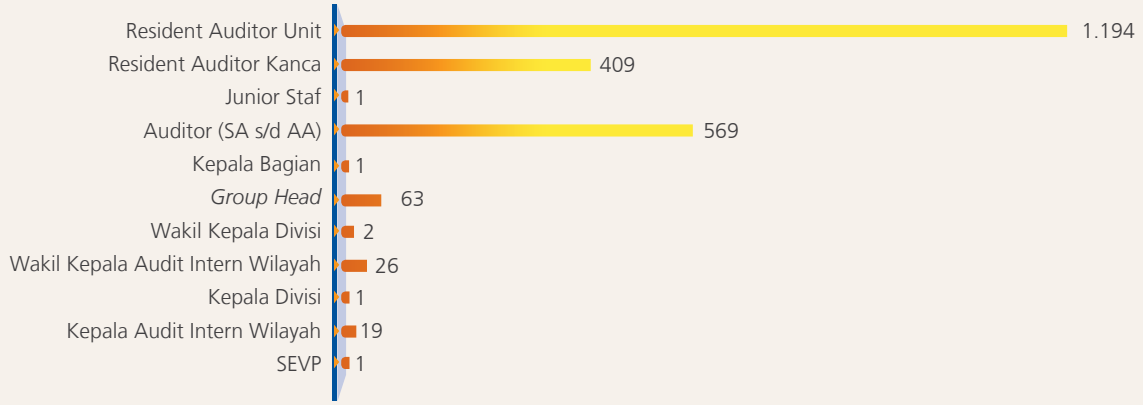

Sertifikasi Profesi Internal Audit BRI (Nasional & Internasional)

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, SKAI BRI didukung tenaga audit profesional yang diantaranya telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut:

Sertifikasi	Jumlah
CFE (*Certified Fraud Examiner*)	30
QIA (*Qualified Internal Auditor*)	32
CBIA (*Certified Bank Internal Auditor*)	41
CISA (*Certified Information System Audit*)	5
CEH (*Certified Ethical Hacker*)	1
CGEIT (*Certified In The Governance of Enterprise IT*)	1
CDCP (*Ceritified Data Center Professional*)	1
CFSS (*Certified Forensic Security Specialist*)	1
Big Data Administrator	4
C-CISO (*Certified Chief Information Security Officer*)	1
Total	117

Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi Pendidikan Formal

Kualifikasi pendidikan formal berdasarkan level jabatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	S3	S2	S1	Lainnya
SEVP	0	1	0	0
Kepala Audit Intern Wilayah	0	12	7	0
Kepala Divisi	0	1	0	0
Wakil Kepala Audit Intern Wil.	0	16	10	0
Wakil Kepala Divisi	0	2	0	0
Group Head	1	25	37	0
Kepala Bagian	0	0	0	0
Auditor (Senior Auditor s.d Associate Auditor)	0	13	553	3
Resident Auditor Kanca	0	14	395	0
Resident Auditor Unit	0	19	1.022	153
Total	**1**	**103**	**2.024**	**156**

Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Audit Intern BRI

Selama tahun 2018 SKAI telah melaksanakan pendidikan, public course dan seminar (baik yang diselenggarakan oleh lembaga internal maupun eksternal BRI) kepada 7.254 peserta didik. Adapun rekapitulasi pendidikan yang telah diselenggarakan meliputi:

No	Jenis Pendidikan	Peserta Pendidikan
1	Pendidikan *In House Training*	6.514
2	*Public course* dalam negeri	440
3	Pendidikan pembekalan audit	229
4	Pendidikan sertifikasi	65
5	*Public course* luar negeri	6
	Jumlah	**7.254**

Program Kerja SKAI BRI

Berikut adalah beberapa program kerja SKAI selama tahun 2018:

Strategi & Metodologi	a. Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) dan pelaksanaan audit yang selaras dengan tujuan & strategi perusahaan dan profil risiko. b. Pelaksanaan audit tematik dalam rangka mengawal pencapaian Rencana Bisnis Bank. c. Pelaksanaan *mandatory audit* terhadap RTGS, SKNBI, Daftar Hitam Nasional, BI-ETP (Electronic *Trading* Platform), BI SSSS, dan Produk Aktivitas Baru e-Banking. d. Pelaksanaan kaji ulang penerapan manajemen risiko, kaji ulang penerapan strategi anti *fraud*, kaji ulang penerapan APU PPT. e. Pengkinian Kebijakan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO 9001:2015. f. Pengkinian dan penyusunan program audit. g. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*. h. Penyusunan format pelaporan Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko. i. Penyusunan Petunjuk Audit Tematik untuk Kanins, Audit KP dan Audit TSI. j. Pengkinian Petunjuk Pelaksanaan *Monitoring* Berkala RA Kanca & RA Unit. k. Pengkinian *Worksheet Quality Assurance Review.* l. Pengkiniian *Worksheet Peer Review.* m. Pengkinian *Worksheet* QA *Monitoring* Berkala RA Kanca & RA Unit. n. Pemantauan fungsi SKAI LJK Konglomerasi Keuangan BRI. o. Penyusunan *key risk indicator red flags* risiko *fraud*. p. Penyusunan laporan hasil audit terintegrasi. q. Penyusunan laporan dengan tema spesifik sesuai perkembangan atau *issue-issue* terkini. r. Peningkatan *monitoring* penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari Auditor Eksternal dan Pengawas.
Organisasi	Usulan pengembangan organisasi dan manning analisis formasi SKAI.
Peningkatan Mutu Kualitas Audit	a. Resertifikasi ISO 9001:2015 b. Pelaksanaan *surveillance* ISO 9001:2015. c. Pelaksanaan *review* kesesuaian fungsi SKAI terhadap SPFAIB oleh pihak independent.
Teknologi	Pengembangan Pusat Data Elektonik (PDE), BRI Data Extractor (BRIdex), BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA Versi 2.0), dan Aplikasi *Customer Satisfaction Survey* (CSS) versi 2.0.
Sumber Daya Manusia	a. Pelaksanaan sertifikasi bagi Auditor untuk mendukung efektivitas peran *assurance* dan *strategic business partner*. b. Pelaksanaan pendidikan, seminar atau *workshop* yang mendukung strategi Perusahaan.

Metodologi Audit

Satuan Kerja Audit Intern menerapkan metode *Risk Based Audit* (RBA) yang diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Penetapan audit universe dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan risk based audit, SKAI menggunakan *Computer Assissted Audit Technique* (CAAT's) sebagai *analytical tools* audit untuk menentukan prioritas audit, ruang lingkup dan sampel audit.

Disamping kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko *fraud* melalui kegiatan *monitoring off site* yang dilaksanakan Audit Intern Wilayah serta melalui kegiatan *monitoring* berkala yang dilaksanakan Resident Auditor. Peran audit dalam *Early Warning Signal* diharapkan dapat memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko yang terjadi di Unit Kerja.

Satuan Kerja Audit Internal

Untuk mewujudkan peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* telah dilakukan beberapa hal diantaranya penyampaian saran, ide dan masukan untuk penyempurnaan draft dan kebijakan; melakukan forum komunikasi antara Audit Intern Wilayah dan Kantor Wilayah; Program Auditor Mengajar; kegiatan konsultasi; dan *sharing knowledge*; khususnya terkait dengan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Kegiatan tersebut merupakan wujud visi SKAI sebagai SBP yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya GCG di seluruh Unit Kerja serta pekerja BRI.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 2018

Program kerja & Pelaksanaan Program Kerja

Kegiatan audit dilaksanakan sesuai Perencanaan Audit Tahun yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama serta berdasarkan hasil assessment terhadap potensi risiko. Selama tahun 2018, SKAI telah melaksanakan kegiatan audit reguler, audit khusus (special audit) dan audit tematik. Secara terperinci, realisasi kegiatan audit yang telah dilaksanakan meliputi:

1. **Audit Regular**
   Obyek kegiatan audit reguler SKAI terbagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu: Unit Kerja dan Jaringan Elektronik (*electronic channel*). Realisasi kegiatan audit reguler terhadap Unit Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Audit Terhadap Unit Kerja

No	Obyek Audit	Target	Realisasi	%
1	Divisi, UKLN & Perusahaan Anak	32	32	100%
2	Kantor Wilayah	21	22	104,8%
3	Kantor Cabang	463	463	100%
4	Kantor Cabang Pembantu	610	610	100%
5	Kantor Kas	347	386	111,2%
6	BRI Unit (termasuk Teras BRI)	1847	2227	120,6%
7	SAU	19	19	100%
8	Audit Teknologi Sistem Informasi	20	24	120%

Realisasi kegiatan audit reguler terhadap jaringan elektronik (electronic channel) adalah sebagai berikut:

Realisasi Audit Terhadap Jaringan Elektronik

No	Obyek Audit	Target	Realisasi	%
1	*Electronic channel*	38.464	64.802	168,5%

2. Special Audit

Audit khusus (*special audit*) dilaksanakan dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu (baik atas inisiatif SKAI, manajemen, *auditee* atau dilaksanakan untuk tujuan pemenuhan ketentuan regulator). Pada tahun 2018 SKAI telah melaksanakan 490 audit khusus.

No	Unit Kerja	Khusus (SA)
Audit Intern Kantor Pusat dan Audit Intern Teknologi Informasi		
1	Divisi, UKLN, Perusahaan Anak	6
2	Project Audit (Oleh Audit TSI)	6
Audit Intern Wilayah		
1	Kanwil	22
2	Kanca	317
3	KCP	5
4	Kantor Kas	2
5	Unit	131
6	SAU	1

Audit Tematik

Audit tematik dilaksanakan untuk mendapatkan profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh. Pada tahun 2018, SKAI telah melaksanakan audit tematik sebagai berikut:

1. Audit Tematik *Human Capital*.
2. Audit Tematik Salary Based Loans.
3. Audit Tematik Mikro.
4. Audit Tematik Korporasi

Evaluasi Pelaksanaan Audit Intern

1. Pelaksanaan Tugas Audit

   SKAI BRI melaksanakan program *review* untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh jajaran SKAI BRI guna melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

   a. *Review Intern*

      SKAI melaksanakan *review* secara berkesinambungan atas kualitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit BRI. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya target sasaran mutu yang telah ditetapkan. *Review* dilaksanakan dengan 3 metode yakni *Quality Assurance* (QA), *Peer Review* dan Supervisi:

      1) Kegiatan QA dilakukan pada seluruh Unit Kerja Audit Fungsi *Delivery,* RA Kanca dan RA Unit.
      2) Penilaian *peer review* yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan antar tim audit.
      3) Supervisi yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan oleh atasan auditor pada setiap project audit.

      Penilaian kualitas pelaksanaan audit tersebut merupakan salah satu *Key Performance Indicator* dalam penilaian kinerja.

   b. *Review Ekstern*

      Untuk menjamin fungsi SKAI BRI telah dilaksanakan sesuai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, PT SGS Indonesia akan melakukan *surveillance* yang pelaksanaannya akan dilakukan setiap semester.

   c. *Customer Satisfaction Survey* (CSS)

      Pelaksanaan fungsi audit intern sesuai sistem manajemen mutu tetap berfokus pada kepuasan pelanggan/*stakeholders.* Salah satu pelanggan utama SKAI adalah pihak Auditee. Karenanya kepuasan Auditee tetap akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kualitas pelaksanaan audit.

Satuan Kerja Audit Internal

2. Wujud Koordinasi dengan Eksternal dan Komite Audit
   Pemeriksaan terhadap BRI dilakukan pula oleh eksternal auditor yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, SKAI berperan sebagai *liaison officer* untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor.

   SKAI BRI sebagai *Liason Officer* bagi Auditor Eksternal dan Pihak Eksternal yang berkaitan dengan kegiatan audit melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan
   b. Pemenuhan data sesuai permintaan (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
   c. Pendampingan terhadap Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
   d. Menindaklanjuti setiap tanggapan yang disampaikan oleh Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan).
   e. *Monitoring* tindak lanjut perbaikan atas temuan Pihak Eksternal secara memadai.

Dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan SKAI, maka SKAI BRI melakukan komunikasi secara berkala dengan Komite Audit dalam bentuk penyampaian Laporan Triwulanan SKAI.

Sistem Manajemen Mutu Audit

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan audit, dilakukan penilaian kualitas (*quality assurance*) oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Penilaian kualitas oleh pihak internal dilakukan melalui supervisi, *peer review,* dan *internal quality assurance*. Sedangkan penilaian kualitas oleh pihak eksternal dilakukan melalui sertifikasi dan *surveillance* ISO 9001:2015, serta untuk memastikan fungsi audit intern sesuai dengan SPFAIB dilaksanakan setiap 3 tahun oleh konsultan independen.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan re-sertifikasi dan *surveillance* ISO 9001:2015. Berdasarkan 2 (dua) kunjungan yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi, tidak terdapat temuan (*nonconformities*) minor maupun major.

Review oleh Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sebagai berikut:
1. Telaah kesesuaian pelaksanaan aktivitas *internal audit* yang dilakukan oleh SKAI BRI terhadap PBI No. 1/6/PBI/1999 mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan kesimpulan Secara Umum Sesuai *(Generally Comply)* terhadap PBI No. 1/6/PBI/1999 mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Adapun target sasaran mutu penilaian kesesuaian fungsi Audit Intern dengan SPFAIB oleh pihak eksternal adalah secara umum sesuai dengan SPFAIB.

2. Telaah kesesuaian pelaksanaan aktivitas *internal audit* yang dilakukan oleh Audit Intern Teknologi Sistem Informasi (TSI) BRI terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017, mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern TI Bank untuk meningkatkan proses kerja Audit TSI BRI dengan kesimpulan Secara Umum Sesuai (*Generally Comply*) terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 (Bab VIII–Audit Intern TI).

Kajian kesesuaian pelaksanaan aktivitas Audit Intern BRI terhadap *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) dengan kesimpulan Umumnya Sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari *The Institute of Internal Auditors*, dan SKAI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Intern.

Satuan Kerja Audit Internal

Temuan Audit 2018 dan Tindak Lanjut

SKAI secara rutin melakukan pemantauan pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern serta memberikan opini kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakanakan manajemen. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Hasil Monitoring Komitmen Manajemen

No	Hasil Monitoring RPM	%
1	Memadai	95,46%
2	Masih Dalam Proses Pemantauan	3,31%
3	Tidak Memadai	1,23%
	Jumlah	**100%**

Disamping pemantauan terhadap tindak lanjut temuan SKAI, dilakukan pemantauan *progress* tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan temuan Auditor Eksternal dan Pengawas. Hasil pemantauan komitmen manajemen terhadap temuan Auditor Eksternal dan Pengawas sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Auditor Eksternal / Pengawas	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut			
			Telah Selesai		Dalam Pemantauan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Otoritas Jasa Keuangan	168	153	91,10%	15	8,9%
2	Bank Indonesia	156	153	98,1%	3	1,9%
3	BPK RI	354	237	66,9%	117	33,1%
4	Kantor Akuntan Publik	182	164	90,1%	18	9,9%

Akuntan Publik

Fungsi Auditor Eksternal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan POJK.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank mengatur bahwa bank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) disertai dengan opini yang diberikan.

Prosedur Penunjukkan Audit Eksternal

Prosedur pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

a. Proses pengadaan jasa audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan.
b. Komite Audit bertugas sebagai Koordinator Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan serta bertanggungjawab untuk melaporkan seluruh kegiatan pengadaan jasa audit KAP kepada Dewan Komisaris.
c. Metode pengadaan jasa audit KAP dilakukan dengan Metode Seleksi Langsung berpedoman kepada ketentuntan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan Fee Jasa Audit

Nama Kantor dan Alamat Akuntan Perusahaan

Nama Akuntan Perusahaan:
Drs. Hari Purwantono (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684) / Danil Setiadi Handaja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008)

Alamat Kantor:

Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5289 5000
Fax. (62-21) 5289 4100

Nama Kantor dan Alamat Akuntan Publik

Nama Kantor Akuntan Publik:
Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)

Alamat Kantor Akuntan Publik:
Indonesian Stock Exchange Building Tower 2,Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5289 5000
Fax. (62-21) 5289 4100
www.ey.com/id

Kantor Akuntan Pubilk, Nama Akuntan dan Fee periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Nama Akuntan Publik	Nama Akuntan	Fee
2014	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.775.000.000,-
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.950.000.000,-
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.950.000.000,-
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	7.300.000.000,-
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	8.200.000.000,-

Akuntan Publik

Fee Jasa Lainnya

Jasa audit lainnya yang digunakan adalah review terbatas atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Bank Rakyat Indondesia (Persero) Tbk dan entitas anak pada tanggal dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Besar biaya jasa audit review terbatas yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik sebesar Rp.5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah).

Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan BRI selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan
2014	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memitigasi risiko dengan upaya yang bersifat preventif (ex-ante) serta mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di bank secara keseluruhan, BRI telah melaksanakan fungsi Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan, Divisi Kepatuhan Kantor Pusat serta fungsi kepatuhan kantor wilayah yang berada di bawah supervisi Bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan Kantor Wilayah dan fungsi kepatuhan Unit Kerja Luar Negeri yang berada di bawah garis koordinasi Divisi Kepatuhan Kantor Pusat. Jajaran kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI.

Struktur Organisasi Kepatuhan BRI

Struktur Organisasi Jajaran Kepatuhan Kantor Wilayah BRI

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan BRI saat ini dijabat oleh Ahmad Solichin Lutfiyanto yang menjabat sejak 22 Maret 2018 (sesuai pengangkatan saat RUPS), menggantikan Susy Liestiowaty yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 18 Oktober 2017. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diantaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BRI;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI;

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Independensi Direktur Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
   a. Bisnis dan operasional.
   b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
   c. *Treasury*.
   d. Keuangan dan Akuntansi.
   e. Logistik dan pengadaan barang & jasa.
   f. Teknologi dan informasi.
   g. Audit intern.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari oengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak professional dan objektif.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan BRI diantaranya:

1. Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BRI pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuai kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan *review* (kaji ulang) dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BRI telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
   a. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat oleh BRI kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
   b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh insan BRI mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
   c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Fungsi Kepatuhan

Profil Kepala Divisi Kepatuhan BRI

Sumihar Manullang
Kepala Divisi Kepatuhan

Lahir di Bakara, 22 Oktober 1962. Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran dan Magister Manajemen Keuangan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.

Pengalaman professional

1. Kepala Bagian ALCO Supporting Group (1998-2005)
2. Wakil Inspektur BRI Padang (2008-2010)
3. Wakil Inspektur BRI Yoyakarta (2010-2011)
4. Wakil Inspektur BRI Jakarta 2(2011)
5. Wakil Inspektur BRI Jakarta 3(2011-2014)
6. Inspektur BRI Jayapura (2015-2018)
7. Inspektur Manado (2015-2017)
8. Inspektur Medan (2017)

Training yang diikuti

1. Seminar Internasional IIA, Sidney (IIA)
2. Pendidikan QIA (YPIA)
3. *Traning for Money & Performance Auditing*, Hongkong (MiTs)
4. SIBOS, SWIFT Seminar, Dubai (SIBOS)
5. *Training Leadership Excellent for High Performance* (GMCL)

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (BSMR)
2. *International Certificate in Banking Risk and Regulation* (GARP)
3. *Qualified Internal Audit* (YPIA)

Piagam Kepatuhan (Compliance Charter)

Dalam rangka memastikan berjalannya fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan, BRI telah memiliki pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di BRI yang tertuang dalam Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*). Ruang lingkup Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) antara lain:

1. Fungsi Kepatuhan Bank dan Ketentuan umum mengenai Jajaran Kepatuhan, diantaranya Independensi Jajaran Kepatuhan, Kewenangan Jajaran Kepatuhan dan Kedudukan Jajaran Kepatuhan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan.
3. Pelaporan Fungsi Kepatuhan.

Program Pengembangan Kompetensi

Pendidikan/Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2018, pekerja di jajaran satuan kerja kepatuhan secara reguler telah mengikuti program pendidikan guna pengembangan kompetensi, antara lain:

1. Pelaksanaan *training, short course*, seminar dan/atau *workshop* dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
2. Pelaksanaan *In house training* kepada jajaran fungsi kepatuhan Kanwil.
3. Pelaksaan sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP).

Sertifikasi Kepatuhan

Sertifikasi kepatuhan pada jajaran fungsi kepatuhan selama tahun 2018 sebanyak 60 pekerja BRI.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan 2018

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020 Divisi Kepatuhan memiliki 8 (delapan) program kerja utama, antara lain:

1. *Approach*/RBA.
2. Pengembangan aplikasi identifikasi dan penilaian risiko penerapan APU dan PPT melalui pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*/RBA).
3. Pengembangan aplikasi *monitoring* penerapan program APU dan PPT di Kanca BRI Selindo.
4. Penyusunan sistem pelaporan CRS.

5. Menginisiasi pengembangan aplikasi Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru Satu Pintu.
6. Pengembangan sistem pelaporan bidang GCG secara digital.
7. Implementasi Pengujian Prinsip Kehati-hatian melalui aplikasi pengujian prinsip kehati-hatian.
8. Pengembangan budaya Kepatuhan:
   a. Merumuskan nilai budaya kepatuhan
   b. Menyusun *framework* internalisasi budaya Kepatuhan
   c. Menyusun konsep penilaian efektivitas budaya Kepatuhan.

Pada tahun 2018, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan beberapa program kerja utama guna mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsi kepatuhan yang efektif dan efisien, antara lain:

1. Bidang APU & PPT melalui pengembangan aplikasi APU & PPT berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan profil risiko APU & PPT secara *bankwide* maupun per Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
2. Penerapan aplikasi GCG online system yang digunakan oleh pekerja di seluruh unit kerja untuk menyampaikan laporan benturan kepentingan, kode etik, komitmen dan gratifikasi.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan meliputi:

1. *Review* dan pengkinian kebijakan internal bank dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan regulator yang berlaku.
2. Identifikasi risiko kepatuhan terhadap kebijakan dan putusan Direksi tidak menyimpang dari peraturan OJK/regulator/perundang-undangan yang berlaku melalui pengujian prinsip kehati-hatian.
3. Pengukuran dan pemantauan risiko berdasarkan data Manajemen Insiden atas terjadinya pelanggaran ketentuan.
4. *Monitoring* dan tindak lanjut kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada pihak regulator dan/atau pengawas lainnya yang berwenang

Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Lainnya

1. Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian
   Dalam rangka mencegah penyimpangan dari ketentuan kehati-hatian baik di bidang perkreditan maupun bidang non perkreditan, Direktur Kepatuhan BRI telah melakukan Pengujian Prinsip Kehati-hatian terhadap Rencana Kebijakan, Keputusan dan Perjanjian dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

2. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Pengujian
   Merupakan kelanjutan dari kegiatan Pengujian Prinsip Kehati-hatian yang dilaksanakan untuk memastikan kembali bahwa tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (*comply*).

3. Tanggapan Aspek Kepatuhan
   Divisi Kepatuhan menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan kepada unit kerja terkait. Tanggapan aspek kepatuhan dapat diberikan dalam hal terdapat rencana kebijakan/putusan Direksi, rencana perubahan mekanisme operasional, rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta hal lain yang memiliki *issue* terkait dengan risiko kepatuhan.

4. Resume Kebijakan Eksternal
   Baik *resume* maupun penerusan kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.

5. Analisa Dampak Kebijakan Eksternal
   Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.

6. Pelaporan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).
   Pelaporan rencana penerbitan PAB kepada regulator (dhi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dalam rangka untuk memperoleh persetujuan regulator dilakukan secara satu pintu melalui Divisi Kepatuhan.

7. Pemantauan Komitmen
   Pemantauan terhadap komitmen BRI terhadap regulator/otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Divisi Kepatuhan memantau pemenuhan seluruh komitmen dari unit kerja sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya *(multi channel marketing)* serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko APU dan PPT yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan regulator, Perseroan melakukan Penerapan Program APU dan PPT secara memadai.

Dasar Hukum

Ketentuan eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Kepala PPATK), dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Kepala Bapeten), Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 16 Mei 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Dan Pemblokiran Secara Serta Merta (DPPSPM) Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam DPPSPM.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT).
7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan *Jo.* Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 12/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 02/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 14/1.02/PPATK/11/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
13. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
14. Surat Edaran PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Ketentuan Internal

1. Surat Keputusan Direksi BRI No. PP.01-DIR/KPT08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) BRI.
2. Surat Keputusan Nokep S.001-DIR/LYN/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang BPO Unit Kerja Operasional.

Pengelola APU-PPT

Penanggungjawab Penerapan Program APU dan PPT dilaksanaan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di setiap level organisasi. UKK Kantor Pusat BRI dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan KP BRI yang merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi BRI. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Kepatuhan KP BRI melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan BRI. Sedangkan Penanggung jawab Penerapan Program APU-PPT di Unit Kerja Operasional dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab APU-PPT Unit Kerja Operasional. Dalam hal ini dijabat oleh Staff Kepatuhan Kantor Wilayah, dimana pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Divisi Kepatuhan KP BRI.

Tugas Dan Tanggung Jawab Pengelola APU-PPT

Tugas dan Tanggung Jawab UKK Kantor Pusat BRI cq. Divisi Kepatuhan KP BRI terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko.
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL);
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

9. Melakukan koordinasi pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
10. Memantau rekening efek dan pelaksanaan transaksi nasabah kustodian;
11. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi efek;
12. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank serta ketentuan regulator;
13. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
14. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
15. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja;
17. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri untuk disampaikan kepada PPATK;
18. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik;
19. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK; dan
20. Berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum)

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional terhadap Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional adalah:

1. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah di Unit Kerja Operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Transaksi Keuangan Tunai.
3. Memonitor pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
4. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *Anti Tipping-Off*.
5. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap unit kerja operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
6. Menerima, dan memverifikasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.
7. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pekerja unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.
8. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum)

Sosialisasi APU-PPT

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU PPT di BRI, Pengelola APU PPT melakukan sosialisasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mengadakan *In House Training* kepada seluruh Staf Kepatuhan, perwakilan Auditor Kantor Inspeksi BRI di seluruh indonesia, perwakilan jajaran operasional Kantor Cabang BRI dan Divisi terkait dengan menghadirkan pembicara dari pihak ekternal seperti BNN, KPK, dan Densus 88.
2. Pelaksanaan *e-learning* dengan materi APU PPT selama 2 kali dengan materi *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhance Due Dilligence* (EDD) serta Sistem AML BRI.

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Implementasi APU-PPT 2018

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
   a. Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:
      1) Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
      2) Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, seperti penetapan Nasabah yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan pengelompokan calon Nasabah, Nasabah, dan/atau *Walk In Customer* (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
      3) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat st*rate*gis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, seperti perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
      4) Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan serta pengembangan sistem pendukung Program APU dan PPT;
      5) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT;
      6) Membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT;
      7) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
      8) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
      9) Memberikan persetujuan dan/atau pendelegasian persetujuan kepada pejabat Divisi Kepatuhan KP BRI atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR), kewajiban laporan Program APU dan PPT lainnya, dan pemberian informasi data nasabah terkait program APU dan PPT kepada regulator;
      10) Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala. Adapun pegawai dimaksud adalah pegawai yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti *frontliner*, petugas pemasaran, pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU dan PPT.

   b. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
      1) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang bersifat st*rate*gis diusulkan oleh Direksi;
      2) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT; dan
      3) Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Frekuensi pembahasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko BRI.

2. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT
   a. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko *(risk based approach)* terkait dengan Nasabah, negara/area geografis, produk, jasa dan transaksi, serta jaringan distribusi *(delivery channels)*;

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

b. Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau Uji Lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan *Walk In Customer* (WIC);
c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
d. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
e. Pengkinian dan pemantauan;
f. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
g. Pelaporan kepada PPATK.

3. Pengendalian Intern
   a. Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
   b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU dan PPT; dan
   c. Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

4. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
   Aplikasi Pendukung Penerapan Program APU dan PPT
   a. Sistem APU dan PPT yang digunakan untuk melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigak (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri (TKL).
   b. Aplikasi penyediaan data untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
   c. Aplikasi mutasi rekening yang menyediakan informasi lawan transaksi.
   d. Aplikasi pencatatan profil dan transaksi *Walk In Customer* (WIC).
   e. Aplikasi pelaporan *Suspicious Transaction Report* (STR) dan *Cash Transaction Report* (CTR) WIC *online*.
   f. Aplikasi pencarian data keuangan nasabah terintegrasi.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan
   Sumber Daya Manusia (SDM)
   Dalam rangka pencegahan penggunaan BRI sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BRI wajib melakukan: Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).

   Pelatihan
   a. Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (*online base*) maupun melalui pertemuan tatap muka.
   b. Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan oleh BRI dengan materi tertentu pada setiap tahun. Pada tahun 2018, telah melaksanakan *e-learning* terkait Penerapan Customer Due Dilligent (CDD) & Enhance Due Dilligent Customer dan *e-learning* terkait Pengenalan Sistem Anti Money Laundering.
   c. Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan misalkan melalui atap muka secara interaktif (misal *In House Training/IHT*) dengan topik Penerapan Program APU dan PPT tertentu sesuai kebutuhan pekerja, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
      1) *In House Training* APU-PPT pada tahun 2018 telah dilakukan di Seluruh Kantor Wilayah BRI dan Kantor Cabang Khusus. Adapun jadwal yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

No	Kanwil	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	KCK & Jakarta 1	16-17 Apr'18	Kanwil BRI Jakarta 1
2	Jakarta 3	23-24 Apr'18	Kanwil BRI Jakarta 3
3	Jakarta 2	03-04 Mei'18	Hotel Cipta Mampang
4	Yogyakarta	07-08 Mei'18	*Campus* BRI Yogyakarta
5	Padang	05–06 Jul'18	*Campus* BRI Padang
6	Aceh	9-10 Jul'18	Hotel Grand Arabia Aceh
7	Lampung	12-13 Jul'18	Hotel Amalia Lampung
8	Banjarmasin	16-17 Jul'18	Rattan Inn Banjarmasin
9	Malang	19-20 Jul'18	Hotel Aria Gajayana
10	Denpasar	26-27 Jul'18	Haris Pop Hotel Denpasar
11	Bandung	6-7 Agst'18	Kanca BRI Bandung
12	Pekanbaru	9-10 Agst'18	*Campus* BRI Padang
13	Medan	13-14 Agst'18	Hotel Grandhika Medan
14	Makassar	27-28 Agst'18	Ibis Hotel Makassar
15	Manado	13-14 Sept'18	Swiss Bell Hotel Manado
16	Surabaya	24-25 Sept'18	Ayola La Lisa Hotel
17	Palembang	27-28 Sept'18	Fave Hotel Pelambang
18	Jayapura	8-9 Okt'18	Fave Hotel Jayapura
19	Semarang	11-12 Okt'18	Hotel Patra Jasa

2) Telah melaksanakan *In House Training* yang turut mengundang pula seluruh Perusahaan Anak untuk ikut dalam Pendidikan Enhancement Program Special Request Penerapan Program APU dan PPT Terkait Kewajiban Pelaporan Dan Pemenuhan Informasi/data Kepada PPATK atau Aparat Penegak Hukum pada tanggal 25 s/d 26 April 2018 di BRI Corporate University, dengan Nara Sumber dari PPATK.

3) Telah melaksanakan *Workshop* Penyesuaian Ketentuan Penerapan Program APU dan PPT, dengan mengundang seluruh perusahaan anak dan Divisi terkait 28 Februari s/d 02 Maret 2018 di Kantor Wilayah BRI Bandung.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan return terhadap risiko Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

Untuk bertumbuh menjadi bank terdepan, BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung dengan teknologi digital dan jaringan yang handal melalui satelit untuk mengoptimalkan layanan perbankan sampai ke pelosok negeri.

BRI menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional yang menjadikan BRI bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Surat Keputusan Nokep: 72-DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Nose: 04-DIR/DMR/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) adalah aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, secara individual maupun terinterigrasi (SK Direksi BRI Nokep: S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan telah dikaji ulang pada tahun 2017 sesuai dengan Surat Kaji Ulang KUMR Nomor B.1625-DIR/ERM/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.
2. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
   a. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional.
   b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.
   c. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar.
   d. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.
   e. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko *Enterprise Risk Management*.

Sistem Manajemen Risiko

Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko terintegrasi BRI dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris

Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang tertuang dalam Piagam Komite Pengawasan Manajemen Risiko. Tugas komite antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan.
3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.

Manajemen Risiko

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pemantau Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17 April 2018, 17 Juli 2018, dan 13 November 2018

Pengawasan Direksi

1. *Risk Management Committee* dilaksanakan berkala minimal triwulanan dan telah dilaksanakan selama periode 2018 meliputi :
   a. RMC I tanggal 21 Februari 2018
   b. RMC II tanggal 30 Mei 2018
   c. RMC III tanggal 28 September 2018
2. Forum ALCO terkait dengan pembahasan ekonomi makro serta kondisi dan pencapaian *asset & liability* yang dilakukan minimal 1 bulan sekali atau sebanyak 12 kali selama periode tahun 2018.
3. *Business Performance Review* (BPR) kegiatan *monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja BRI secara nasional, kinerja seluruh unit kerja bisnis (Kantor Wilayah dan KCK serta seluruh Divisi Bisnis Kantor Pusat) serta program-program kerja strategis yang dilakukan secara berkala 1 bulan sekali dalam rangka pencapaian kinerja melibatkan Direksi, SEVP, Pemimpin Wilayah, Inspektur, Kepala Divisi. Pelaksanaan BPR selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
   a. BPR Periode Februari tanggal 19 Maret 2018.
   b. BPR Periode Maret tanggal 9 April 2018.
   c. BPR Periode April tanggal 25 Mei 2018.
   d. BPR Periode Mei tanggal 28 Juni 2018.
   e. BPR Periode Juni tanggal 18 Juli 2018.
   f. BPR Periode Juli tanggal 10 Agustus 2018.
   g. BPR Periode September tanggal 17 Oktober 2018.
   h. BPR Periode Oktober tanggal 14 November 2018
   i. BPR Periode Oktober tanggal 21 Desember 2018

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan *Limit* telah tersedia dan sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan yang didetapkan dalam Surat Edaran S. 04 - DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pilar 3: Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Pelaporan Manajemen Risiko
   Pelaporan Manajemen Risiko kepada pihak-pihak tertentu sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   Frekuensi penyampaian laporan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mampu memberikan informasi yang memadai bagi pengambil keputusan.
   a. Laporan memuat informasi mengenai total eksposur risiko, pemantauan terhadap risiko yang bersifat material, penetapan *limit*, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pencapaian kinerja bisnis serta implementasi manajemen risiko.
2. Manajemen Data Risiko
   Manajemen data risiko merupakan pengelolaan data risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat ketersedian, akurasi serta ketepatan waktu penyaluran informasi/laporan manajemen risiko serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan manajemen Risiko.

   Sistem Informasi diantaranya meliputi: BRINETS, portal DWH, Cognos, BRISIM, *Dashboard Loan Portofolio Guideline* (LPG), *Dashboard* Profil Risiko Likuiditas, *Dashboard* Profil Risiko Pasar dan *Dashboard* Profil Risiko Per Kantor Wilayah dan lain-lain.

Manajemen Risiko

Pilar 4: Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BRI diterapkan dengan menggunakan konsep Three Line of Defense, dengan rincian sebagai berikut:

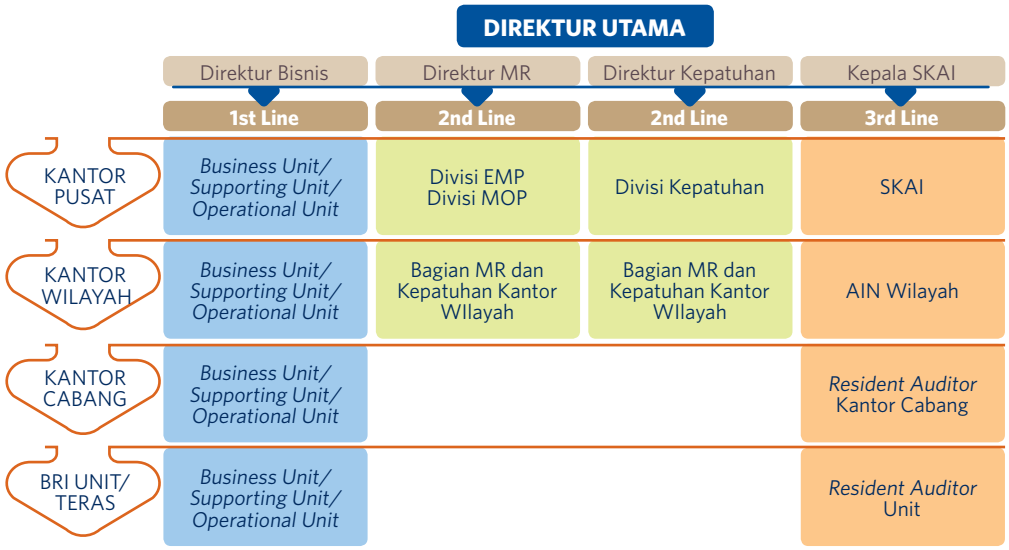

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi

Tinjauan atas efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi meliputi:

1. Ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi BRI baik risiko keseluruhan maupun per jenis risiko.
2. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* risiko.
3. Ketersediaan informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan BRI sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2018, struktur fungsi Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Manajemen Risiko dengan rincian data sebagai berikut:

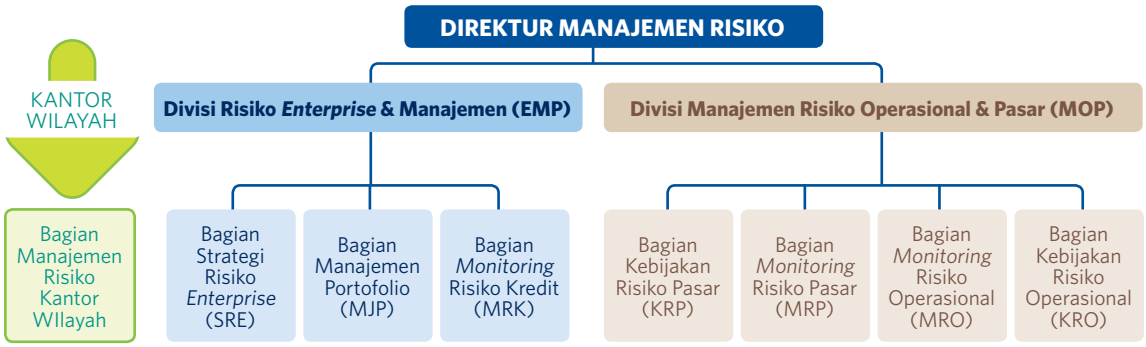

Profil Kepala Fungsi MR

Bintoro Nurcahyo
Kepala Divisi Enterprise Risk & Management Portofolio

Lahir di Jakarta 3 Oktober 1963 lulusan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta tahun 1988 dan MBA *The Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland*, OHIO - USA 1998.

Pengalaman Profesional:

1. Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi divisi Akutansi Manajemen dan Keuangan BRI
2. Wakil Pemimpin Wilayah Operasional, Kantor Wilayah Banjarmasin
3. Wakil Pemimpin Wilayah Operasional, Kantor Wilayah Surabaya
4. Ketua Tim Implementasi PSAK 71
5. Kepala Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio

Sertifikasi:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, Level 2 dan Level 3 di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Indonesia

Heri Supriyadi
Kepala Divisi Operasional & Market Risk

Lahir di Purbalingga, 10 Oktober 1965, memperoleh gelar S1 Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman dan S2 Master Manajemen Universitas Gadjah Mada, dan MBA Gatton Collage of Bussiness and Economic, University of Kentucky. Menjabat sebagai Kepala Divisi *Enterprise & Portofolio Risk Management* BRI sejak tanggal 1 Juli 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Bidang Risiko Kredit sejak tanggal 1 Maret 2016.

Pengalaman Profesional:

1. Kepala Bagian Operasional Risk Management Methodology
2. Pemimpin Cabang BRI
3. Wakil Pemimpin Wilayah BRI Denpasar
4. Wakil Kepala Divisi Manajemen Risiko BRI
5. Kepala Divisi Operasional & Market Risk BRI

Training:

1. Integration of GRC – *Governance* Risk Management Compliance, International Public Course by CRMS, New Zealand.
2. *Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared for Upcoming Regulations*. Risk Management Certification Refresher Program by BARa. Jakarta
3. *Market Innovation for Sustainable Finance: 2016 International Sustainable Finance Forum* by OJK and IFC. Denpasar
4. *Developing and Applying an Integrated Stress Testing Framework*. Seminar by KPMG and SAS Institute. Jakarta
5. *Crisis Management*. Public Course. Held by IBN International. Jakarta
6. *A Symbiotic Relationship to Achieve the Effective Risk Management*. Internal Audit and Risk Management Seminar. Held by IBI, IAIB and BARa

Sertifikasi:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 oleh BSMR
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dan 4 oleh LSPP
3. Sertifikasi *Assessor* BRI untuk Kompeternsi Pekerja

Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh risk taking unit selaku first line, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan III 2018, peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *low to moderate*, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Tugas dan Tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko adalah:

1. Penyusunan metodologi manajemen risiko enterprise dan manajemen risiko terintegrasi.
2. Penyusunan dan analisa profil risiko, tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, credit risk rating & scoring dan validasi metodologi risiko kredit.
3. Penyusunan *Risk Appetite Statement* (RAS).
4. Penyusunan *Recovery Plan* (Rencana Aksi).
5. Penyusunan dan analisa *portofolio guideline, sustainability finance, risk based pricing,* dan *stress testing.*
6. Menyusun, menyempurnakan dan melaksanakan kebijakan/ketentuan/prosedur dan metodologi proses manajemen risiko (Indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian termasuk validasi data, strategi Manajemen risiko, profil risiko, stress testing, dan menantau risiko (risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya) Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/*Bussiness Continuity Mananagement* (BCM).
7. Menilai Kecukupan pengelolalaan risiko atas produk dan atau aktiva baru yang diusulkan unit kerja.
8. Penyelenggaraan *Risk Management Comitee (RMC).*

Pengembangan Kompetensi & Pendidikan Bidang Manajemen Risiko

Program pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengantar Manajemen Risiko dan Perangkat Manajemen Risiko.
2. *Cyber Risk Management Fundamentals.*
3. *Training* Analisis Lingkungan dari OJK.
4. Sertifikasi Manajemen Risiko
5. *Public Course* Divisi Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Kanwil.

Pelaksanaan Sertifikasi dan Pejabat yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko di BRI tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Level Sertifikasi	Peserta
1	107
2	86
3	12
4	28
5	6
Kom-1	1
TOTAL	240

Jenis Risiko & Tata Cara Pengelolaannya

Dalam penerapan fungsi manajemen Risiko, Bank BRI mengelola 10 risiko dalam konglomerasi keuangan yaitu:

RISIKO KREDIT

Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Proses putusan kredit diatas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris
b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan *limit* risiko
c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan, khususnya risiko kredit.
d. Pelaporan profil risiko triwulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. Ketentuan Pasar sasaran
b. Penentuan *limit* risiko di level korporat (*risk appetite statement*) mengenai NPL, dan NPL *Coverage*
c. Ketentuan PDWK berjenjang

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. **Identifikasi** risiko kredit dilakukan menggunakan *system Credit Risk Rating* (CRR) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) sejak tahun 2001. Pemeringkatan internal (*Credit Risk Rating/Credit Risk Scoring*) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/historis dari debitur existing BRI dengan menggunakan metodologi statistik. Atas pemeringkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model internal rating tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau *review* atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode *back testing*.

b. **Pengukuran** risiko kredit dilakukan dengan internal model menggunakan metode standard yaitu dengan menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing-masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitas kreditnya. Saat ini, BRI juga sedang dalam tahap pengembangan *Internal Rating Based Approach* (IRBA). Selain itu, serangkaian Stress Test juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi *stress*. *Stress test* tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hipotesa dan asumsi antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia serta perubahan kurs Rupiah. Hal lainnya yang dilakukan adalah dengan *guidance* melalui *Loan Portofolio Guideline (LPG),* yang dimana dengan adanya LPG ini akan membuat pemberian kredit menjadi lebih terarah sesuai potensi masing-masing unit kerja.

c. **Pemantauan** risiko kredit dilakukan melalui proses *monitoring* portfolio kredit yang merupakan tanggung jawab unit kerja *monitoring* risiko kredit di kantor pusat. *Monitoring* portfolio dilakukan berdasarkan kualitas kredit, sektor ekonomi, penggunaan kredit, geografi unit kerja pemrakarsa, dan sebagainya. Pemantauan juga dilakukan untuk *limit* risiko kredit antara lain: NPL, CL, komposisi *Loan at Risk, Credit Cost*, NPL *Coverage ratio*, PH, *Recovery income*, dan *Recovery Rate*.

d. **Pengendalian** risiko kredit dilakukan melalui:
1) Putusan kredit mempertimbangkan aspek analisa agunan, di mana harus mematuhi ketentuan *minimum loan to value* atau *minimum coverage* terhadap pinjaman.
2) Penilaian agunan menjadi lebih terarah melalui aplikasi *Collateral Data Management* (CODAM).
3) Risiko kredit menjadi lebih terkendali melalui *sustainable finance (Green Banking)* yang mengintegrasikan risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola ke dalam aspek ekonomi/ bisnis yang selama ini telah berlangsung, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat memperhatikan praktek bisnis yang tidak merusak lingkungan, memperhatikan aspek sosial dan tata kelola yang baik.
4) Prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi.
5) Prosedur meminimalkan kerugian risiko kredit melalui penyelesaian kredit dan optimalisasi penagihan.
6) Prosedur penghapus bukuan kredit bermasalah.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

a. *Four Eyes Principles*: pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus
b. Pemisahan unit kerja pemrakarsa kredit (bisnis) dengan unit kerja analisis risiko kredit untuk segmen Korporasi
c. Penggunaan aplikasi *Loan Approval System* (LAS) yang meliputi identifikasi risko kredit melalui perhitungan CRR dan CRS serta putusan kredit yang telah sesuai dengan ketentuan PDWK berjenjang.
d. Penentuan CKPN secara otomatis berdasarkan internal model untuk menghitung kecukupan pencadangan risiko kredit berdasarkan portofolio kredit per segmen.

e. Integrasi antara pelampauan *limit* risiko kredit dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis dan individual.

RISIKO PASAR

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variable pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan *limit* risiko.
b. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
c. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan, prosedur, dan *limit* risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam *Treasury Policy* serta Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (KUMR dan P3MRP). *Limit* yang tercantum dalam kebijakan tersebut, antara lain *limit open position* untuk *trading, limit transaksi dealer, limit cut loss* dan *stop loss, limit uncommitted credit line, counterparty limit*, serta *limit Value at Risk* (VaR).

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi
   1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar.
   2) Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu:
      a. Risiko Spesifik (*Specific Risk*) dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi long atau posisi short. Dengan demikian proses saling hapus (*offset*) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;
      b. Risiko Umum (General Market Risk) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi long atau posisi short dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.
   3) Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan present value dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). Perhitungan *present value* atas *accrued interest* dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai present value tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik *Trading Book* dan *Banking Book* dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing, selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga dapat menimbulkan Risiko Suku Bunga (misalnya untuk instrumen *cross-currency swaps*). Dalam hal tersebut, maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) antara lain:

a) Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
b) Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (*price movement*) secara aktual dan atau potensial.
c) Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan *arbitrase (locking in arbitrage profit*).
d) Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain *Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange*

Forward, Interest Rate Options, dan *Forward Rate Agreements*/FRAs.

e) Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposits*) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (*Repo/ Securities Lending*).

f) Posisi valuta asing BRI dalam *trading book* dan banking book yang terekspos risiko nilai tukar.

b. Pengukuran

10) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam *Trading Book* dan Banking Book yang terekspos Risiko Nilai Tukar.

11) Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) antara lain menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran standardized dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA, melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil maturity surat berharga.

12) Valuasi portofolio *trading* book dan banking book dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (*mark to market*). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (*mark to market*) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-model*).

c. Pemantauan dan Pengendalian

Dalam menjalankan manajemen risiko pasar, Direksi secara rutin melakukan evaluasi risiko pasar melalui laporan harian Posisi Devisa Netto, forum *Asset & Liability Committee* (ALCO), serta laporan eksposur risiko pasar dalam Profil Risiko pasar.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

a. Pemisahan fungsi front, middle and back office.

Fungsi manajemen risiko pasar BRI terdiri dari unit kerja front office (Divisi *Treasury*), *middle office* (Divisi EMP & MOP), dan *back office* (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda.

1) Jajaran *front office* berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar.
2) Jajaran *middle office* menetapkan dan memantau *limit* risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (market price) yang digunakan untuk *mark-to-market* (MTM).
3) Jajaran *back office* melakukan settlement transaksi *treasury* dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan *limit* transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

b. Sistem pengendalian risiko pasar yang terintegrasi dengan fungsi *front office*.

c. BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* and *market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office, middle office* dan *back office*. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, BRI juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar dan *limit* transaksi antara lain *limit nominal transaksi dealer, limit open position, Limit Uncommited Credit Line (UCL), cut loss limit,* dan *stop loss limit. Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/*trading*.

d. Integrasi antara pelampauan *limit* risiko pasar dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis.

Manajemen Risiko

RISIKO LIKUIDITAS

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Pelaksanaan Rapat ad-hoc mini ALCO dan Rapat Direksi mingguan ketika kondisi likuiditas pasar atau BRI sedang cukup ketat.
b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan *limit* risiko.
c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
d. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. Penentuan *limit* minimum LCR (*risk appetite statement*)
b. Penentuan *limit* minimum NSFR
c. *Limit* likuiditas lainnya yang ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, dan *limit* risiko likuiditas antara lain tertuang dalam Kebijakan Manajemen Aset dan Liabilitas, serta Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko (KUMR), dan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (P3MRP).

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan risiko melalui *dashboard* profil likuiditas harian.
b. Pengendalian risiko melalui Protokol *liquidity contigency plan*.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

a. Sistem *monitoring* posisi likuiditas harian
b. Integrasi antara pelampauan *limit* risiko likuiditas dengan evaluasi kinerja.

RISIKO OPERASIONAL

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan *limit* risiko.
b. Pelaksanaan forum *Risk Management Committee* (RMC) triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan dan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang diselenggarakan bilamana diperlukan (bersifat insidentil) membahas *risk issue* berdasarkan penilaian *issue* risiko operasional dan risiko lainnya serta kerjadian-kejadian kerugian terkini berikut efektifitas kontrol dari proses bisnis dan operasional.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. *Limit approval* untuk transaksi yang diberikan berjenjang.
b. Parameter dan *limit* profil risiko operasional dan lainnya.

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi risiko operasional dilakukan melalui perangkat RCSA yang meliputi 7 Aktifitas fungsional bank yaitu: Kegiatan perkreditan, Tresuri dan investasi, Operasional dan jasa, Pembiayaan perdagangan, Pendanaan dan instrumen utang, Teknologi sistem informasi dan Informasi Manajemen, dan Pengelolaan sumber daya manusia.

b. Pengukuran risiko operasional dilakukan menggunakan metodologi Basic Indicator Approach (BIA). Saat ini secara bertahap, BRI sedang mempersiapkan menuju perhitungan dengan metode *Standardized Approach* (SA), yang kemudian akan

dilanjutkan dengan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA).

c. Pemantauan profil risiko dilakukan melalui perangkat Indikator Risiko Utama (IRU), berdasarkan hasil asesment profil risiko dan data kerugian operasional yang dikelola melalui perangkan Manajemen Insiden (MI).

d. Pengendalian risiko melalui :
   1) Prosedur asesmen Produk dan Aktifitas Baru untuk setiap produk maupun layanan baru, dimana setiap produk tersebut harus melalui *review* oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Hukum (jika diperlukan) sebelum didaftarkan ke regulator.
   2) Protokol *Business Continuity Management* untuk kejadian yang bersifat katastrofik. Dalam hal ini, BRI memiliki Tim Manajemen Krisis (TMK) yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Struktur TMK dibentuk di seluruh Unit Kerja BRI yaitu TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, TMK Kantor Cabang. Aspek st*rate*jik yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemangang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik BRI.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

a. Pemisahan fungsi *Maker-Checker-Signer* dalam aktifitas operasional perbankan, dimana approval sebagian besar proses operasional telah embedded dalam *system Core Banking, Asset Management* maupun HR MIS.
b. Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu
c. Implementasi SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Serta adanya sistem AML (*anti money laundering*) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan (CTR dan STR).
d. Integrasi antara pelampauan *limit* risiko operasional, hukum, st*rate*jik dan kepatuhan dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis maupun individual.

RISIKO HUKUM

Merupakan risiko yang menyebabkan oelh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat syahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan mengenai kasus hukum yang material, pengelolaan risiko hukum dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, Rapat KPMR, dan Rapat Komite Audit.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

a. Pedoman hukum disusun oleh Divisi Hukum Kantor Pusat dan disosialisasikan keseluruh Unit Kerja Operasional.
b. Pembagian kewenangan pendampingan kasus hukum di lingkungan Divisi Hukum Kantor Pusat dan Legal Officer di Kantor Wilayah.

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Setiap proses transaksi maupun produk dan aktifitas baru yang memiliki potensi risiko hukum ditelaah lebih dulu oleh Divisi Hukum.
b. *Monitoring* Risiko Hukum terhadap seluruh Unit Kerja Opersional di Indonesia dilakukan oleh Legal Officer di Kantor Wilayah melalui mekasnisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.
c. Legal Officer di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat akan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum di Unit Kerja Operasional.

Manajemen Risiko

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

Divisi Hukum secara aktif men-sosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional.

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

a. Divisi Hukum sebagai koordinator Risiko Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
b. Divisi Hukum memberikan advis/ opini hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/ *agreement* antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/agreement ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
c. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai
d. Divisi Hukum bekerja sama dengan *legal officer* (LO) di Kantor Wilayah memantau risiko hukum di seluruh Unit Kerja BRI dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
e. Divisi hukum menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
f. Pembinaan staf pada Unit Kerja operasional (UKO) di Kantor Wilayah dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan diantaranya berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku.
g. *Legal officer* (LO) di Kantor Wilayah memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi Hukum.
h. Divisi Hukum memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
i. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Divisi Hukum mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
j. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai contingency plan harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui: penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
k. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Hukum berkoordinasi dengan Divisi MOP terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui *Dashboard* Profil risiko

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko hukum, Divisi Hukum telah mengeluarkan Kompilasi Resume ketentuan yang dikeluarkan Divisi Hukum. Kompilasi tersebut memuat resume ketentuan/ panduan yang dikeluarkan oleh Divisi Hukum yang meliputi: Aktivitas Perkreditan dan Agunan, Aktivitas Operasional, *Legal Manual* dan Buku Saku Hukum. Kompilasi tsb dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja operasional untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan demi melindungi BRI dari risiko hukum.

RISIKO STRATEJIK

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan mengenai perencanaan strategi, *monitoring* pencapaian target dan evaluasi strategi dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) pada saat pembahasan mengenai persetujuan RBB, persetujuan RKAP, dan pembahasan kinerja keuangan triwulanan.

Materi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan setiap tahun untuk mendukung proses formulasi strategi juga dibahas dalam forum Rapat Direksi. Selain itu, Rapat Komite Direksi seperti ALCO juga membahas pencapaian kinerja dan upaya pencapaian kinerja keuangan.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Proses perencanaan, *monitoring* dan evaluasi strategi perusahaan tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Corporate Development and Strategy dan Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Penyelenggaraan Joint Planning session pada saat penyusunan RBB dalam rangka pembahasan strategi bisnis beserta rencana program kerja masing-masing Unit Kerja Divisi di Kantor Pusat

Penyelenggaraan *Workshop* Penyelarasan (Alignment) Rencana program kerja strategis antar Unit Kerja Kantor Pusat dalam rangka pencapaian target dalam RKAP dan RBB.

Penerapan Performance Management BRI dengan pendekatan Balanced *Scorecard*, melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan prinsip sinergi vertikal dan horisontal.

Monitoring Strategic Initiatives Perusahaan oleh Unit Kerja *Project Management Office*. *Strategic Initiatives* yang dimaksud adalah program kerja non rutin yang bersifat sangat strategis dan critical, yang harus dilakukan agar suatu target unit kerja dapat tercapai.

Pembentukan Tim *Corporate Plan* dalam menyusun Rencana Jangka Panjang BRI Periode Tahun 2018-2022

Di level Kantor Wilayah, BRI memiliki Bagian Operasional, Jaringan, Layanan & *Performance Management* yang berperan memonitor pencapaian target bisnis di wilayah kerjanya.

Monitoring dan *review* pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RKAP, RBB maupun RJP dilakukan di level korporat oleh Divisi *Corporate Development and Strategy* secara berkala. *Review* juga dilakukan terhadap pencapaian program-program kerja (Rencana Kerja Fungsional – RKF) suatu Uker di KP yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Rencana Kerja Anggaran – RKA.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

Apabila terdapat realisasi program kerja suatu Uker masih behind schedule akibat keterkaitan dengan Uker lain, akan dilakukan penyelarasan /akselerasi program kerja ke Uker yang dimintakan support. Penyelarasan dan akselerasi program kerja tersebut dimonitor oleh Divisi Corporate Development and Strategy.

RISIKO REPUTASI

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko reputasi dan pengelolaan risiko reputasi dan serta tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Divisi SKP untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Sekretariat Perusahaan.Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu.

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala oleh Divisi SKP dengan melihat

jumlah pemberitaan *negative* terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa baik cetak maupun elektronik, *call center* dan rating perusahaan.

b. Pengukuran risiko reputasi bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (*vulnerabilities*) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses identifikasi akan dilakukan pengukuran terhadap risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi dengan menggunakan beberapa parameter sesuai dengan *limit* parameter dalam Laporan Profil Risiko reputasi.
c. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Divisi SKP yaitu dengan melakukan *monitoring* secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan *negative* di media massa dan melaporkan dalam profil risiko reputasi.
d. Pemantauan risiko reputasi di Kantor Wilayah dilakukan oleh Bagian OJL Seksi Layanan masing-masing Kanwil yaitu dengan melakukan *monitoring* secara berkala terhadap kualitas layanan di Kanca, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing, dimana untuk setiap tahunnya serta dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
e. Pengendalian risiko reputasi BRI antara lain dengan terdapatnya SE mengenai kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta Divisi SKP melakukan pengendalian risiko dengan cara berkoordinasi dengan Divisi Layanan dan Uker terkait untuk menyelesaikan pemberitaan *negative* dan keluhan nasabah sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan kaji ulang independent (independent review) oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan, antara lain:

a. Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*)
b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terhadap Rencana Kebijakan dan/ atau Keputusan BRI oleh Direktur Kepatuhan dan Jajaran Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
c. Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja
d. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
e. Kebijakan tentang Benturan Kepentingan
f. Kebijakan tentang Kode Etik
g. Kebijakan tentang Program Pengendalian Gratifikasi
h. Kebijakan tentang *Whistleblowing System*
i. Divisi Kepatuhan sebagai koordinator risiko kepatuhan melakukan uji prinsip kehati-hatian terhadap seluruh kebijakan internal BRI yang ditetapkan oleh Direksi.

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Melakukan identifikasi risiko kepatuhan melalui laporan profil risiko kepatuhan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah berdasarkan kompilasi dari UKO, kepada Divisi Kepatuhan
b. Proses manajemen risiko kepatuhan didukung dengan sistem informasi yang memadai antara lain:
   1) Aplikasi AML (*Anti Money Laundering*) digunakan untuk *monitoring suspicious transaction*.
   2) Aplikasi otomasi Pengujian Kepatuhan digunakan untuk melakukan proses pengujian dan *monitoring* progress pengujian

3) Aplikasi GCG Online digunakan untuk pelaporan terhadap komitmen, gratifikasi, kode etik, benturan kepentingan dan *annual disclosure* oleh Unit Kerja

c. Penetapan Unit Kerja Khusus baik di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pusat untuk mengkoordinir pengelolaan risiko kepatuhan terutama yang terkait dengan program APU dan PPT.

d. Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Fungsi Manajemen Risiko yang mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Risiko untuk 8 jenis risiko termasuk risiko kepatuhan.

e. Sumber daya manusia yang ditunjuk untuk mengelola risiko kepatuhan memiliki kompetensi yang memadai dan mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan level jabatan.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan kaji ulang independent (*independent review*) oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan. Divisi Kepatuhan secara aktif mensosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

RISIKO TRANSAKSI INTRA GROUP

Merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.

b. Direksi BRI membentuk Risk Management Comitte Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI .

c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk :
   1) Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   2) Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelakasanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintergrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-Group.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

a. Surat Keputusan Nokep: DIR 313-DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan Anak.

b. Surat Edaran S.18-DIR/DMR/07/2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 24 Juli 2015 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Intra-Group dan Tata Kelola Terintegrasi.

c. Surat Keputusan *Risk Management Committe* Terintergrasi Nokep: 137-DIR/DMR/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.

b. Pengukuran Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya.

d. Proses manajemen risiko transaksi Intra-grup memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi Investment Service sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
b. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent *review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

RISIKO ASURANSI

Merupakan risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
b. Direksi BRI membentuk Risk Management Comitte Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI
c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk :
    1) Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
    2) Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelakasanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintergrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

a. Surat Keputusan Nokep: DIR 313-DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan Anak.
b. Surat Edaran S.04-DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Maret 2017 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Asuransi Terintergrasi dan Tata Kelola Terintegrasi.
c. Surat Keputusan Risk Management Comitte Terintergrasi Nokep: 137-DIR/DMR/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Pilar 3
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
b. Pengukuran Risiko Inheren Asuransi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

Pilar 4
Sistem Pengendalian Internal

a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan BRI
b. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent *review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

TARGET PELAKSANAAN RISIKO 2018

Kegiatan Kerja Program Kerja Risiko

1. Penyusunan *Risk Appetite Statement*

Dalam penyusunan kebijakan dan st*rate*gi Manajemen Risiko, Direksi BRI memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*), toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan *limit* Risiko BRI yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengendalian Risiko secara efektif. Penetapan toleransi Risiko dan *limit* Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan st*rate*gi BRI secara keseluruhan.

Risk Appetite ditetapkan dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidaktoleranan (*zero tolerance*) yang terkait dengan sasaran dan tujuan bisnis BRI. *Risk Appetite* dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis.

Penetapan *Risk Appetite* digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan st*rate*gis terkait dengan pengelolaan Risiko, sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen kepada Unit Kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

2. Penyusunan *Recovery Plan*

Sebagai salah satu Bank yang telah ditunjuk sebagai *Domestic-Systemically Important Banks* (D-SIB atau Bank Sistemik) di Indonesia, BRI memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi.

Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat berbagai mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial BRI sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank-bank Sistemik.

Dalam Gambaran Umum Bank, BRI telah melakukan analisis materialitas dan pemeringkatan untuk menentukan peringkat lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak. Analisis dilakukan denganmenggunakan *scorecard* materialitas berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan.Hasil pemeringkatan lini bisnis adalah sebagai berikut (1) Mikro, (2) Ritel, (3) Korporasi dan (4) *Investment Services*. Adapun peringkat perusahaan anak yang material adalah (1) BRI Life, (2) BRIsyariah, (3) BRI Multifinance, dan (4) BRIAgro.Pemeringkatan materialitas Jaringan Kantor dilakukan berdasarkan Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Bandung, Yogyakarta, Makassar, Malang, dan Jakarta 2.

Untuk keterkaitan usaha eksternal, BRI melakukan analisis berdasarkan aspek (1) *Intra-financial system assets,* (2) *Intra-financial system liabilities*, dan (3) *securities outstanding* serta 10 (Sepuluh) counterpart signifikan (Obligor, Deposan, *Treasury* Counterparties) sesuai dengan *common practice* yang ada. Untukanalisis skenario dampak perubahan sistemik, BRImelakukan aktivitas *Stress Testing* yang dibagi ke dalam 2 (dua) bagian skenario yaitu skenario *Idiosyncratic* serta skenario *Market-wide*. Untuk skenario *Idiosyncratic* BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada.Untuk skenario *Market-wide,* BRI menggunakan *Regulatory Stress Testing Financial Stress Assessment* Program (atau disingkat dengan FSAP) berdasarkan skenario yang telah ditetapkan oleh FSAP sebagai representasi atas kondisi krisis yang dapat terjadi.

3. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaianrisiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB dimaksud. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI.

Manajemen Risiko

4. Implementasi Budaya Sadar Risiko

Penerapan Budaya Sadar Risiko mencerminkan nilai-nilai serta komitmen Direksi BRI dalam rangka peningkatan kesadaran pekerja BRI terhadap pengelolaan risiko. Elemen Budaya Sadar Risiko adalah aspek-aspek dasar Budaya Sadar Risiko yang mendasari penerapan Budaya Sadar Risiko yang terdiri dari; Komitmen, Manajemen Kinerja, Tatakelola Risiko, Komunikasi, Pelatihan dan Pengembangan, Pelaporan dan Pemantauan.

Budaya Sadar Risiko dimulai dari adanya komitmen manajemen yang tertuang dalam st*rate*gi perusahaan, st*rate*gi inisiatif, dan st*rate*gi risiko dalam bentuk penetapan *risk appetitestatement*. Budaya Sadar Risiko tercermin dari adanta penetapan manajemen kinerja berbasis risiko dalam bentuk KPI (*Key Performance Indicator*) yang diturunkan dari komitmen manajemen.

Budaya Sadar Risiko memiliki tatakelola risiko yang baik dilaksanakan pada seluruh jajaran organisasi pengelola risiko mulai dari *first line of defense* (Unit Kerja Operasional dan Bisnis), *second line of defense* (Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan) serta *third line of defense* (Unit Kerja Audit Internal).

Komunikasi yang konsisten dan berkesinambungan antara manajemen dan pekerja juga dapat membangun Budaya Sadar Risiko. Setiap pekerja dapat dengan nyaman untuk berbicara terbuka dan jujur berkaitan dengan risiko dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan pemahaman pekerja terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko bagi perusahaan.

BRI telah memiliki materi pengembangan budaya sadar risiko yang dikemas dalam bentuk permainan interaktif, yang rencananya akan di implementasikan dalam acara Forum Peningkatan Kinerja (FPK) di Uker Selindo. Selain itu, sistem pelaporan dan *monitoring* risiko melalui perangkat manajemen risiko operasional menciptakan terbentuknya budaya saling memberikan *feedback* yang dapat diterima secara positif untuk membawa perusahaan kearah yang lebih baik.

5. Penyempurnaan Kebijakan *Bussiness Continuity Management* (BCM)

Penyempurnaan kebijakan BCM dilakukan melalui pengkinian dokumen *Bussiness Impact Analysis* (BIA), pelaksanaan *Risk and Threat Assessment* (RSA), penyusunan *Emergency Response Plan* (ERP) dan *Bussiness Continuity Plan* (BCP), pelaksanaan uji coba BCP, dan pengkinian kebijakan Tim Manajemen Krisis (TMK).

6. Penyempurnaan Perangkat Manajemen Risiko Operasional yang Terintegrasi

Pengembangan Perangkat Manajemen Risiko Operasional akan di integrasikan dengan aplikasi *monitoring* risiko yang telah dimiliki oleh BRI yang salah satunya bersumber dari data warehouse. Penyempurnaan perangkat manajemen risiko operasional meliputi pengembangan modul RCSA, KRI, LED, Forum Manajemen Risiko, Maturitas, serta penambahan modul lainnya yang meliputi otomasi pengkinian dokumen BCM, *Fraud Risk Assessment*, dan IT *Risk Assessment*.

7. Pengembangan Permodelan Early Warning System

Pengembangan permodelan ini meliputi modul *Know Your Employee* (KYE) bertujuan untuk mengetahui profil risiko pekerja disetiap unit kerja, dan modul *Know Your Customer* (KYC) yang bertujuan untuk mengetahui profil risiko nasabah BRI.

Kegiatan *Credit Risk Monitoring*

1. Kegiatan Perkreditan

a. Ekspansi yang sehat dan menguntungkan Pertumbuhan NPL dan DPK tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan OS pinjaman. Peningkatan OS tidak diikuti dengan peningkatan Yield Pinjaman, serta terdapat Gap pencapaian pendapatan bunga BRI sebesar Rp. 33,87 T dibanding Target RKA Desember 2018, sehingga St*rate*gi st*rate*gi akan diarahkan kepada ekspansi kredit fokus kepada yield yang tinggi, St*rate*gi Ekspansi dengan memperhatikan sektor – sektor industri yang prospektif sesuai *Loan Portfolio Guideline* (LPG), serta peningkatan

strategi dalam menghadapi habisnya anggaran KUR dan penurunan OS KUR (Mikro/Kecil) sd Desember 2018.

b. Tingginya kredit kualitas rendah di BRI
Penyebab memburuknya kualitas kredit akibat ketidakcukupan proses Analisa kredit dan kurangnya *monitoring*, sehingga pemrakarsa kredit harus mempertajam analisis pemberian kredit dengan meningkatkan pengetahuan dalam melakukan analisis 5C termasuk pemanfaatan Loan Portfolio Guideline (LPG), serta melakukan *monitoring* on site maupun off site sampai kredit lunas.

c. Tingginya NPL kredit sektor Konstruksi
Selama 3 tahun terakhir NPL BRI di sektor Konstruksi cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 6,44% dan NPL BRI di sektor Konstruksi lebih tinggi dari NPL perbankan nasional, sehingga diperlukan adanya sistem pencairan kredit & Register KMK WA yang mencakup *compliance checklist* pemenuhan dokumen persyaratan pencairan kredit, dan Sosialisasi terkait prosedur KMK Konstruksi (KMK WA) baik melalui *E-Learning* maupun materi wajib pendidikan PKL.

d. Double Financing pada Kredit Briguna Ritel
Terdapat 2.373 debitur Briguna Ritel BRI (Rp. 132M) yang mendapat fasilitas pinjaman pegawai oleh bank lain (double financing), Dari Briguna Ritel yang double financing tersebut, sebesar Rp. 78,1 M (59,51%) berada pada kolektibilitas NPL (rupiah), Sebagian besar debitur Briguna Ritel BRI yang *double financing* merupakan debitur *non payroll*, Kebijakan RPC dan jangka waktu pada bank lain lebih tinggi dibanding BRI (RPC BRI : payroll BRI 75% dan non payroll BRI 70%, dengan jangka waktu maksimal 15 tahun), sehingga perlu diusulkan kepada OJK untuk mengatur terkait pinjaman konsumer khususnya *salary base loan* , antara lain: Bank tidak boleh memberikan *double financing* Menetapkan standarisasi pengaturan RPC dan jangka waktu sebagai contoh pada KPR diatur mengenai standarisasi LTV, dan Khusus *salary base loan* dilakukan penilaian kualitas kredit menggunakan *one obligor* karena sumber pembayaran hanya berdasarkan dari satu sumber (gaji)

2. *Risk Awareness* bidang Perkreditan

a. PH Rekening dilakukan kurang dari atau sama dengan 12 bulan sejak tanggal realisasi
b. Peningkatan CKPN akibat adanya tunggakan kecil (Rp. 15 ribu).
c. Tata cara validasi KTP.
d. Pinjaman bersaldo kredit.
e. Suku bunga restruk segmen ritel konsumtif tidak sesuai ketentuan.
f. Suku bunga restruk segmen ritel komersial di bawah *counter rate.*
g. Administrasi permohonan kredit tidak lengkap atau tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
h. Pembinaan dan *monitoring* secara *off site* tidak dilakukan sesuai ketentuan.
i. PenetapanStruktur, Tipe, dan Syarat Kredit Tidak Sesuai Hasil Analisis Kredit / Tidak Sesuai Ketentuan.
j. Dampak Rekening Pinjaman Status 3 *(Maturity but Not Closed).*

3. Penyusunan *Credit Risk Managemen Handbook*

CRM *handbook* merupakan buku saku yang berisi titik kritis prosedur perkreditan, *Risk Issue* & Control pada segmen bisnis Ritkom yang disusun berdasarkan kebijakan.

4. Penyusunan Laporan Kinerja Perkreditan BRI (ERM *Report*)

Laporan Kinerja Perkreditan BRI yang dilakukan setiap bulan dalam rangka *monitoring* dan analisa pencapaian kinerja perkreditan sebagai laporan ke BOD dan Divisi Bisnis.

5. Laporan *Regulatory*

a. LBBUK Form 5 (Pelanggaran BMPK)
b. LBBUK Form 6 (Pelampauan BMPK)
c. LBBUK Form 7 (BMPK Pihak Terkait)
d. LBBUK Form 8 (Restrukturisasi Kredit)
e. LBBUK Form 10 (Top 25 debitur)
f. Laporan Perkembangan Restrukturisasi Kredit ke OJK

Manajemen Risiko

6. Laporan Rutin Bulanan

a. Laporan Reaktivasi Kredit.
b. BMPK ke BOD dan Komisaris.
c. Laporan Restrukturisasi Kredit ke BOD dan Komisaris.

Penyusunan Kebijakan *Green Banking*

Peningkatan ekonomi di seluruh dunia menyebabkan pengaruh negatif bagi lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak, baik di tingkat global dan lokal. Disadari bahwa peran perbankan sangat signifikan untuk mendorong investasi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan karena perbankan menyalurkan kredit terhadap berbagai sektor. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan Sustainable Finance (SF) di perbankan atau sering disebut perbankan hijau (*Green Banking)*.

Alasan penerapan green banking bagi BRI adalah penerapan green banking dinilai memiliki dampak positif yaitu:

1. Merupakan kontribusi nyata peran BRI terhadap dampak ekonomi yang seimbang dengan lingkungan sosial dan kelestarian alam.
2. Meningkatkan reputasi BRI sehingga akhirnya dapat meningkatkan value BRI dimata stakeholders.
3. Merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko lingkungan sosial dan tata kelola (LST) yang selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.
4. Membuka peluang bisnis, kerjasama dan pendanaan terkait *green fund* baik dengan lembaga nasional maupun international.

Roadmap *green banking* BRI akan diselaraskan kembali sesuai dengan POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sesuai POJK tersebut, BRI sebagai Bank BUKU IV wajib menerapkan SF per 1 Januari 2019. Roadmap secara umum yaitu: Tahun 2017 merupakan tahap untuk penyusunan kebijakan, peningkatan capacity buildng serta sosialisasi. Tahun 2018 menyesuaikan POJK, penyelarasan ketentuan internal BRI dan menyusun rencana aksi untuk tahun 2019. Tahun 2019 melakukan penyesuaian terhadap kebijakan turunan dan melaksanakan Rencana aksi keuangan berkelanjutan 2019 serta menyusun Laporan Keberlanjutan.

Dalam rangka menjadi *champion* green banking serta persiapan terhadap penerapan POJK, BRI telah melakukan implementasi SF secara bertahap, antara lain:

1. Mengikuti pilot project "*First Step To Be A Sustainable Finance*" hasil kerjasama dan WWF Indonesia.
2. Menyusun kebijakan terkait keberlanjutan yaitu: Kebijakan Umum Keberlanjutan (Sustainability). Kebijakan Str*ate*gi Implementasi Keberlanjutan serta Kebijakan Manajemen Risiko LST Sub sektor kelapa sawit.
3. Menyusun Laporan Keberlanjutan secara tahunan.
4. *Capacity building* bagi Pekerja BRI terutama jajaran analis kredit.
5. *Internal campaign* untuk memberikan awareness bagi pekerja BRI khususnya dan debitur BRI umumnya.
6. Keikutsertaan dan partisipasi aktif pada berbagai kegiatan yang diadakan oleh regulator dan pihak/ instansi terkait.
7. Mengikuti ajang penghargaan terkait sustainable finance antara lain *Sustainable Finance Award* yang diselenggarakan oleh OJK.

Loan Portofolio Guideline (LPG)

LPG adalah *tools* dalam Manajemen Portofolio Kredit untuk mengarahkan pertumbuhan portofolio kredit pada Industri yang prospektif dengan tingkat risiko yang dapat diterima serta melakukan diversifikasi portofolio secara optimal.

Komponen LPG terbagi 2 (dua), antara lain:

1. Pasar Sasaran, mengarahkan pembiayaan ke sektor industry yang prospektif.
2. Kriteria Risiko Yang Dapat Diterima, menyeleksi calon debitur/debitur yang akan dibiayai.

Diurut berdasarkan tingkat risiko terendah hingga tertinggi secara nasional, sub sektor ekonomi dalam PS dibagi dalam 4 (empat) warna yaitu:

1. Hijau, Sangat Prospektif, sangat direkomendasi dengan memenuhi KRD Umum
2. Biru, Prospektif, direkomendasi dengan memenuhi KRD Umum.
3. Kuning, Selektif, dapat direkomendasi dengan memenuhi KRD Umum & Khusus.
4. Merah, Sangat Selektif, dapat direkomendasi dengan memenuhi KRD Umum & Khusus.

KRD Umum adalah Daftar Kriteria yang harus dipenuhi untuk seluruh calon debitur yang dianggap layak untuk dibiayai. Syarat berlaku secara umum, atau **untuk semua sub sektor ekonomi dalam Pasar Sasaran,** sedangkan KRD Khusus adalah Daftar Kriteria yang harus dipenuhi untuk seluruh calon debitur yang memiliki warna Pasar Sasaran selektif (**kuning**) atau sangat selektif (**merah**).

Divisi EMP telah menetapkan sektor industri prospektif di masing-masing kanwil, Sektor industri prospektif adalah sektor industri potensial di masing-masing wilayah yang dapat digunakan unit kerja sebagai referensi dalam ekspansi.

Penyusunan *Market Code of Conduct* BRI

Dalam rangka membangun Pasar Keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 19/5/PBI/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. Penerapan PBI dan PADG tersebut dimaksudkan agar terdapat peningkatan standar kompetensi Pelaku Pasar, standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi; integritas Pelaku Pasar, Direksi, dan Pekerja; dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya.Direksi dan Pekerja BRI harus menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri. Kode Etik Pasar menjadi pedoman Direksi dan Pekerja berdasarkan prinsip konvensional yang mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan. Indonesia *Foreign Exchange* Market Committee (IFEMC) sebagai asosiasi profesi di Indonesia telah menerbitkan Kode Etik Pelaku Pasar dalam Buku *Market Code of Conduct* (*Guideline to Market Practices in the Financial Markets*), 3rdEdition. Berdasarkan hal tersebut, BRI telah menyusun *market code of conduct* dalam aktivitas *treasury* yang bertujuan untuk :

1. Memberikan panduan berperilaku, bertindak, meningkatkan disiplin dan integritas bagi setiap Manajemen dan Pekerja BRI dalam bertransaksi di pasar keuangan domestik dan luar negri, mencakup Manajemen Senior, Manajemen, dan Dealers yang terlibat transaksi di pasar keuangan.
2. Standar minimum perilaku yang dapat dijadikan acuan dalam market *best practices* bagi Manajemen dan Pekerja BRI. Implementasi dari Kode Etik Pasar ini disesuaikan dengan kompleksitas usaha BRI dengan tetap mengacukepada ketentuanyang berlaku.

Penyusunan *Early Warning Indicators* Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang sangat berbahaya bagi jantung sebuah bank. Regulator mensyaratkan Bank mampu memiliki High Quality Liquid Assets yang mampu mengcover *net cash outflow* dalam kondisi *stress* minimal selama 30 hari. BRI mengembangkan mekanisme sistem peringatan dini (*early warning indicators*) yang merupakan indikator untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas dan memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan, sehingga Bank memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengatasi potensi pengetatan likuiditas dalam waktu mendatang. Indikator peringatan dini dimaksud meliputi indikator internal dan eksternal yang dipantau oleh Divisi Assets & Liabilites Manajemen dan Divisi *Treasury* sebagai unit kerja pengelola risiko likuiditas, serta Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL

Perseroan telah menerapkan beberapa Pilar Basel dalam implementasi Manajemen Risiko, antara lain:

1. Permodalan
   Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI telah memastikan bahwa modal BRI telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang meliputi *Capital Conversation Buffer, Countercyclical Buffer*

dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Bank* (D-SIB), di samping itu BRI telah memenuhi persyaratan minimum *Leverage Ratio* yang telah dilaporkan kepada regulator secara triwulanan.

2. Operasional
   Perhitungan modal minimum untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

3. Pasar dan Likuiditas
   a. Perhitungan modal minimum untuk risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan POJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

   b. Pengukuran ketahanan Likuiditas Bank dengan menggunakan Basel III *Approach*: *Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio* , sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.

PENILAIAN PROFIL RISIKO

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh risk taking unit selaku first line, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku second line dan unit internal audit selaku third line. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan III 2018, peringkat profil risiko bri berada pada tingkat *low to moderate*, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Self Assessment

1. Peringkat Profil Risiko
   Posisi Risiko BRI Triwulan III - 2018 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2018 *(unaudited)* . Secara keseluruhan peringkat Profil Risiko BRI adalah *Low to Moderate* (Peringkat 2) dengan tingkat risiko *Low to Moderate* meliputi: Risiko kredit, pasar, likuiditas,hukum, st*rate*jik, dan reputasi, adapun tingkat risiko *Moderate* meliputi: risiko operasional & kepatuhan.

2. Risiko Inheren
   Predikat komposit Risiko Inheren adalah *Low to Moderate* dengan perincian peringkat risiko *Low to Moderate* untuk Risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, st*rate*jik, dan reputasi sedangkan dengan peringkat risiko *Moderate* adalah risiko operasional & kepatuhan.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
   Predikat komposit kualitas penerapan Manajemen Risiko adalah *Satisfactory* dengan dengan perincian peringkat *Satisfactory* meliputi Risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, st*rate*jik, kepatuhan dan reputasi, adapun peringkat *Fair* untuk risiko operasional.

Analisa

Peringkat Profil Risiko BRI adalah ***Low to Moderate* (Peringkat 2)** tidak mengalami perubahan peringkat risiko dibanding tahun Desember 2016 (*Low to Moderate* /peringkat 2) namun mengalami perbaikan skor risiko dari 2,02 pada Desember 2016 menjadi 2,14 pada September 2018.

REVIU EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Secara berkala dilakukan pengujian efektivitas sistem manajemen risiko melalui kaji ulang manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan terpisah dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menjaga objektivitas dan independcy penilaian efektivitas sistem manajemen risiko.

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelakasanan tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.

Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi dalam pengelolaan risiko di BRI diantaranya:

1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
   Penyusunan limit risiko dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi *Enterprise Risk&Portofolio Management* BRIterhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi *Enterprise Risk&Portofolio Management* BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau *Risk Management Committee* BRI.

2. Laporan Profil Risiko Terintegrasi
   Laporan profil risiko terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, disampaikan secara komparatif terhadap posisi semester sebelumnya. Peringkat profil risiko Konglomerasi Keuangan BRI posisi bulan Desember 2018 adalah *Low to Moderate*.

3. Kecukupan Permodalan Konglomerasi Keuangan
   Kecukupan permodalan dilakukan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi. BRI menyusun dan melaporkan Laporan Perhitungan KPMM Terintegrasi kepada OJK setiap semester. Rasio KPMM Terintegrasi konsolidasi BRI dan Perusahaan Anak posisi Desember 2018 sebesar 225.95%. Nilai Rasio KPMM Terintegrasi tersebut berada di atas batas minimum ketentuan sebesar 100%.

4. Manajamen Likuiditas Konsolidasi
   Posisi *Liquiditiy Coverage Ratio* (LCR) BRI secara konsolidasi posisi Desember 2018 sebesar 217.97%.

5. Pemantauan Transaksi Intragroup
   Total transaksi intra group terhadap total asset, dihitung semua transaksi *on balance sheet* (*borrow and placement money market*) baik dari BRI ke Perusahaan Anak ataupun sebaliknya sebesar Rp. 16,64 trilun atau 1,28% dari total asset BRI.

6. Pelaksanaan *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi
   Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi merupakan komite tertinggi dalam dalam sistem manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BRI. Pada tahun 2018, BRI telah melaksanakan RMC terintegrasi sebanyak 2 kali yaitu tanggal 28 Maret 2018 dan 5 November 2018.

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KETERANGAN
I. MODAL INTI (Tier 1)
1. Modal Inti Utama (CET 1)
1.1. Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)
a. Saham biasa
b. Saham preferen
1.2. Cadangan Tambahan Modal *)
1.2.1. Faktor Penambah :
1.2.1.1. Pendapatan Komprehensif Lainnya
1.2.1.1.1. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan
1.2.1.1.2. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
1.2.1.1.3. Saldo surplus revaluasi aset tetap
1.2.1.2. Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)
1.2.1.1.1. Agio
1.2.1.1.2. Cadangan Umum
1.2.1.1.3. Laba tahun-tahun lalu
a. Laba tahun lalu
b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan
c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi
1.2.1.1.4. Laba tahun berjalan
a. Laba tahun berjalan
b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan
c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi
1.2.1.1.5. Dana Setoran Modal
1.2.1.1.6. Lainnya
1.2.2. Faktor Pengurang :
1.2.2.1. Pendapatan Komprehensif Lainnya
1.2.2.1.1. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan
1.2.2.1.2. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
1.2.2.2. Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)
1.2.2.2.1. Disagio
1.2.2.2.2. Rugi tahun-tahun lalu
1.2.2.2.3. Rugi tahun berjalan
1.2.2.2.4. Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif
1.2.2.2.5. Selsiih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*
1.2.1.1.6. PPA aset non produktif yang wajib dibentuk
1.2.1.1.6. Lainnya

Manajemen Risiko

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 18		31 DESEMBER 17	
	Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
	164,924,546	172,358,004	154,668,699	159,087,145
	164,924,546	172,358,004	154,668,699	159,087,145
	6,111,861	6,111,861	6,111,861	6,111,861
	6,111,861	6,111,861	6,111,861	6,111,861
	173,305,084	172,705,455	158,200,691	157,400,369
	175,257,520	174,797,797	158,230,228	157,443,602
	13,873,912	13,873,912	15,500,155	15,500,155
	49,220	49,220	54,202	54,202
	0	0	1,621,261	1,621,261
	13,824,692	13,824,692	13,824,692	13,824,692
	161,383,608	160,923,885	142,730,073	141,943,447
	410,340	410,340	410,340	410,340
	3,022,685	3,022,685	3,022,685	3,022,685
	126,248,608	125,608,444	110,827,813	109,844,759
	126,248,608	125,608,444	110,827,813	109,844,759
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	31,701,975	31,882,415	28,469,235	28,665,396
	31,701,975	31,882,415	28,469,235	28,665,396
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	267
	0	0	0	0
	1,952,436	2,092,342	29,537	43,233
	1,919,488	1,971,392	0	0
	0	0	0	0
	1,919,488	1,971,392	0	0
	32,948	120,950	29,537	43,233
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	71,755	0	0
	0	0	0	0
	32,948	36,851	29,537	33,890
	0	12,344	0	9,343

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KETERANGAN
1.3. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan
1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama *)
1.4.1. Perhitungan pajak tangguhan
1.4.2. *Goodwill*
1.4.3. Selisih aset tidak berwujud lainnya
1.4.4. Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang
1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
1.4.6. Eksposur sekuritisasi
1.4.7. Faktor pengurang modal inti utama lainnya
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar
2. Modal Inti Tambahan/*Additional Tier* 1 (AT 1) *)
2.1. Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1
2.2. Agio/Disagio
2.3. Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1dan Tier 2 pada bank lain *)
2.3.1. Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
2.3.2. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar
II. MODAL PELENGKAP (Tier 2)
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2
a. Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
b. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
c. Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
d. *Mandatory convertible* bond
e. Penerbitan Tier 2 oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)
f. Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa (-/-)
2. Agio / disagio
3. Cadangan umum PPA atas aset produktfi yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)
4. Faktor pengurang modal pelengkap *)
4.1. Sinking Fund
4.2. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain
4.3. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar

Manajemen Risiko

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 18		31 DESEMBER 17	
	Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
	0	1,930,927	0	410,067
	14,492,399	8,390,238	9,643,853	4,835,152
	4,772,857	4,984,023	2,989,066	3,137,065
	0	468,722	0	65,246
	0	8,076	0	6,198
	9,719,542	2,929,417	6,654,787	1,626,643
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	8,693,875	10,029,307	7,083,240	8,306,990
	450,000	1,450,000	0	1,000,000
	0	0	0	0
	450,000	1,450,000	0	1,000,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	8,243,875	8,616,154	7,083,240	7,306,990
	0	36,847	0	0
	0	0	0	0
	0	36,847	0	0
	0	0	0	0

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KETERANGAN
TOTAL MODAL
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
ATMR RISIKO KREDIT
ATMR RISIKO PASAR
ATMR RISIKO OPERASIONAL
TOTAL ATMR
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISK (%)
ALOKASI PEMENUHAN KPMM
Dari CET 1 (%)
Dari AT1 (%)
Dari Tier 2 (%)
RASIO KPMM
Rasio CET 1 (%)
Rasio Tier 1 (%)
Rasio Tier 2 (%)
Rasio Total (%)
CET UNTUK BUFFER (%)
PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)
Capital Convertion Buffer (%)
Countercyclical Buffer (%)
Capital Surcharge untuk D-SIB (%)
1) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilanya nihil.

Manajemen Risiko

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 18		31 DESEMBER 17	
	Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
	173,618,421	182,387,311	161,751,939	167,394,135
	659,319,661	690,764,915	566,659,194	591,391,731
	11,078,731	11,229,322	6,889,063	6,986,505
	148,209,848	152,229,031	130,967,728	134,420,827
	818,608,240	854,223,268	704,515,985	732,799,063
	9.53%	9.53%	9.57%	9.57%
	8.47%	8.36%	8.56%	8.44%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	1.06%	1.17%	1.01%	1.13%
	20.15%	20.18%	21.95%	21.71%
	20.15%	20.18%	21.95%	21.71%
	1.06%	1.17%	1.01%	1.13%
	21.21%	21.35%	22.96%	22.84%
	11.68%	11.82%	13.39%	13.27%
	3.750%	3.750%	2.250%	2.250%
	1.875%	1.875%	1.250%	1.250%
	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	1.875%	1.875%	1.000%	1.000%

Manajemen Risiko

Tabel 1.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio		
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	290,583,943	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	72,258,144	3,354,518
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	87,019,078	0
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	9,371	14,537
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,140,176	482,526
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	19,930,508	63,958,293
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40,669,961	75,876,544
9	Tagihan kepada Korporasi	143,431,672	25,555,693
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	896,689	2,162,631
11	Aset Lainnya	36,120,610	11,638,859
	Total	693,060,153	183,043,601

Tabel 1.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio		
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	274,065,941	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	75,635,998	2,219,593
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	52,673,654	0
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	23,813	44,750
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,351,274	758,088
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	18,030,820	58,642,051
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	34,281,678	65,631,646
9	Tagihan kepada Korporasi	108,934,329	22,295,636
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,022,695	1,571,674
11	Aset Lainnya	34,555,430	11,095,309
	Total	601,575,632	162,258,747

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	0	0	2,544,738	293,128,681
4,904,531	0	3,216,100	3,693,366	1,106,464	88,533,123
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	107,850	87,126,928
3,444	2,794	2,834	6,887	7,006	46,873
16,391	57,950	143,632	76,280	3,518	2,920,473
13,815,174	11,081,194	15,237,800	25,163,911	5,646,570	154,833,450
29,242,575	56,117,337	44,701,934	52,022,747	10,552,347	309,183,445
11,514,390	15,733,269	18,699,369	27,634,569	8,574,864	251,143,826
665,473	768,692	1,055,156	1,776,402	262,667	7,587,710
5,326,231	5,571,022	4,643,038	7,295,083	2,783,561	73,378,404
65,488,209	89,332,258	87,699,863	117,669,245	31,589,585	1,267,882,914

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
0	0	0	0	37,291	274,103,232
9,877,247	0	2,335,915	2,225,157	4,442,045	96,735,955
0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	101,756	52,775,410
16,531	20,145	12,900	25,067	18,862	162,068
13,867	75,553	652,844	73,984	2,922	3,928,532
12,416,629	10,239,161	14,014,404	22,827,945	5,176,110	141,347,120
25,855,084	48,070,214	39,313,421	45,966,277	9,595,949	268,714,269
7,902,463	12,280,345	16,483,355	23,329,523	6,624,076	197,849,727
613,021	652,615	831,297	1,680,664	288,375	6,660,341
3,777,567	6,356,381	5,090,304	8,641,280	3,092,350	72,608,621
60,472,409	77,694,414	78,734,440	104,769,897	29,379,736	1,114,885,275

Manajemen Risiko

Tabel 1.b.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio		
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	295,046,870	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	73,096,095	3,354,518
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	89,564,987	0
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	171,586	40,451
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,327,659	482,526
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	20,024,749	63,969,537
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	41,958,732	76,309,001
9	Tagihan kepada Korporasi	153,813,861	25,590,431
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	908,236	2,178,450
11	Aset Lainnya	36,367,039	11,642,769
	Total	713,279,813	183,567,684

Tabel 1.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio		
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	279,060,280	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	76,063,264	2,219,593
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	52,742,768	20
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	132,788	62,445
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,561,082	758,088
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	18,112,880	58,650,657
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	35,475,815	66,038,867
9	Tagihan kepada Korporasi	114,625,271	22,347,460
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,030,150	1,584,418
11	Aset Lainnya	34,796,484	11,097,792
	Total	614,600,782	162,759,340

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	0	0	2,544,738	297,591,608
4,904,531	0	3,216,100	3,693,366	1,106,464	89,371,074
0	0	0	0	0	0
0	0	0	479	107,850	89,673,316
31,724	15,592	18,126	64,939	7,006	349,423
16,391	57,950	184,447	92,022	3,518	3,164,513
13,885,650	11,084,898	15,243,663	25,441,297	5,646,570	155,296,364
29,298,307	56,235,213	44,814,558	52,860,562	10,552,347	312,028,719
11,541,715	15,928,427	18,957,279	28,083,166	8,574,864	262,489,743
779,680	808,993	1,061,360	1,846,370	262,667	7,845,756
5,334,637	5,574,613	4,648,206	7,331,352	2,783,561	73,682,177
65,792,635	89,705,686	88,143,738	119,413,552	31,589,585	1,291,492,694

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
0	0	0	0	37,291	279,097,571
9,877,247	0	2,335,915	2,316,381	4,442,045	97,254,445
0	0	0	0	0	-
11	20	261	20,258	101,756	52,865,094
48,882	28,734	25,255	74,484	18,862	391,450
221,340	75,553	708,234	94,261	2,922	4,421,480
12,491,617	10,244,403	14,020,867	22,987,699	5,176,110	141,684,234
25,891,978	48,195,257	39,417,630	46,913,057	9,595,949	271,528,553
7,950,524	12,456,133	16,967,491	23,568,111	6,624,076	204,539,065
616,849	672,233	833,018	1,747,868	288,375	6,772,911
3,786,614	6,360,838	5,097,228	8,675,416	3,092,350	72,906,721
60,885,061	78,033,171	79,405,899	106,397,535	29,379,736	1,131,461,522

Manajemen Risiko

Tabel 2.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18,757	1,134
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	23,646,149	14,395,282
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	38,326,561	3,432,907
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	9
6	Kredit Beragun Properti Komersial	982	25,773
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	136,137	4,460,772
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	34,968,490	142,616,334
9	Tagihan kepada Korporasi	30,420,947	46,750,034
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	472,096	1,909,628
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	127,990,119	213,591,873

Tabel 2.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	149	1,743,686
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	21,283,761	9,557,608
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	20,254,866	3,702,778
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	392
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	26,795
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	175,735	4,789,265
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	31,408,918	129,779,138
9	Tagihan kepada Korporasi	23,984,791	38,621,552
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	406,220	1,648,073
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	97,514,440	189,869,287

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018			
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(5)	(6)	(7)	(8)
288	14,431,524	278,676,978	293,128,681
6,337,035	38,115,319	6,039,338	88,533,123
-	-	-	-
6,271,376	5,995,574	33,100,510	87,126,928
1,868	44,996	-	46,873
1,080,345	1,813,373	-	2,920,473
19,625,346	130,610,791	404	154,833,450
79,540,586	49,878,711	2,179,324	309,183,445
33,940,432	114,682,144	25,350,269	251,143,826
1,883,136	3,322,850	-	7,587,710
-	-	73,378,404	73,378,404
148,680,412	358,895,282	418,725,227	1,267,882,913

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017			
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(11)	(12)	(13)	(14)
6,696	23,113,429	249,239,272	274,103,232
4,773,132	45,818,897	15,302,557	96,735,955
-	-	-	-
5,690,279	5,641,366	17,486,121	52,775,410
7,856	153,820	-	162,068
1,453,068	2,448,669	-	3,928,532
20,357,873	116,023,777	470	141,347,120
61,895,883	43,955,700	1,674,630	268,714,269
30,306,063	99,932,771	5,004,550	197,849,727
1,544,792	3,061,256	-	6,660,341
-	-	72,608,621	72,608,621
126,035,642	340,149,685	361,316,221	1,114,885,275

Manajemen Risiko

Tabel 2.b.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4,481,684	1,134
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	24,086,354	14,793,028
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	40,822,308	3,436,907
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	949	17,095
6	Kredit Beragun Properti Komersial	11,320	165,812
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	153,408	4,548,386
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	36,034,647	142,795,884
9	Tagihan kepada Korporasi	34,272,654	47,332,992
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	570,739	1,923,484
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	140,434,062	215,014,722

Tabel 2.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
(1)	(2)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4,994,488	1,743,686
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	21,679,086	9,599,355
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	20,330,145	3,702,778
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,538	16,691
6	Kredit Beragun Properti Komersial	38,130	146,006
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	194,092	4,903,022
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	32,278,827	129,992,951
9	Tagihan kepada Korporasi	26,453,520	39,175,288
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	466,030	1,660,359
11	Aset Lainnya	-	-
	Total	106,435,856	190,940,138

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018			
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(5)	(6)	(7)	(8)
288	14,431,524	278,676,978	297,591,608
6,337,035	38,115,319	6,039,338	89,371,074
-	-	-	-
6,318,018	5,995,574	33,100,510	89,673,316
41,578	289,801	-	349,423
1,172,515	1,814,867	-	3,164,513
19,809,064	130,785,102	404	155,296,364
79,770,520	51,248,345	2,179,324	312,028,719
35,632,751	119,901,078	25,350,268	262,489,742
1,893,397	3,458,136	-	7,845,756
-	-	73,682,177	73,682,177
150,975,167	366,039,745	419,028,999	1,291,492,695

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017			
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(11)	(12)	(13)	(14)
6,696	23,113,429	249,239,272	279,097,571
4,840,279	45,833,168	15,302,557	97,254,445
-	-	-	-
5,694,279	5,651,771	17,486,121	52,865,094
25,135	348,086	-	391,450
1,531,746	2,705,597	-	4,421,480
20,500,138	116,086,511	470	141,684,234
62,079,351	45,502,794	1,674,630	271,528,553
30,809,090	103,096,616	5,004,550	204,539,065
1,557,678	3,088,844	-	6,772,911
-	-	72,906,720	72,906,720
127,044,391	345,426,818	361,614,320	1,131,461,522

Manajemen Risiko

Tabel 3.a. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kpd Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	31 DESEMBER 2018			
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	3,820,702	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	517,088	-
4	Industri pengolahan	-	10,564,119	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	25,677,691	-
6	Konstruksi	-	5,638,043	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	18,908,256	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	5,102,956	-
10	Perantara keuangan	276,042,591	6,724,830	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	65,598	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,544,738	274,638	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3,252,296	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	14,431,525	1,058,150	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	109,827	6,928,756	-
	Total	293,128,681	88,533,123	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	5,305	293,476	41,974,011	41,311,686	502,480	-
-	-	-	6,951	3,089,367	627,694	46,403	-
-	-	-	15,198	419,554	4,420,289	24,718	-
495,372	-	-	31,841	11,239,009	40,197,836	242,813	-
-	-	-	12,084	371,314	11,296,833	6,199	-
12,138	-	-	134,256	1,127,507	26,156,427	147,898	-
4,033	459	-	44,534	173,558,973	79,101,759	4,899,766	-
1,257	-	1,761,048	2,540	3,511,141	1,870,727	77,046	-
-	-	1,092,289	20,420	4,754,217	10,135,951	107,978	-
38,465,024	-	-	28,035	342,074	2,593,033	7,977	-
6,028	3,216	61,831	73,316	3,995,938	4,721,188	98,232	-
-	-	-	2,374,201	176,936	68,752	2,943	-
-	-	-	564,943	406,996	291,972	3,089	-
-	-	-	393,839	1,074,865	2,162,998	23,576	-
-	-	-	917,893	15,873,841	5,607,298	204,583	-
-	-	-	26,626	1,554,049	234,286	26,112	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,598,510	1,468	-	7,911,725	11,511,770	3,365,632	221,087	-
-	41,730	-	141,981,572	34,177,355	10,322,632	944,810	-
45,544,566	-	-	-	24,528	6,656,833	-	73,378,404
87,126,928	46,873	2,920,473	154,833,450	309,183,445	251,143,826	7,587,710	73,378,404

Manajemen Risiko

Tabel 3.a. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kpd Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	31 DESEMBER 2017			
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	4,246,842	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	23,584	-
4	Industri pengolahan	-	12,885,828	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	29,810,910	-
6	Konstruksi	-	6,541,688	-
7	Perdagangan besar dan eceran	149	12,045,369	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	271,350	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	8,327,719	-
10	Perantara keuangan	249,319,593	7,934,090	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	81,466	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	3,353,842	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	37,291	6,115,000	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	24,730,089	1,426,623	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	16,110	3,671,644	-
	Total	274,103,232	96,735,955	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	1,895	15,383	36,903,446	37,550,975	429,644	
-	-	-	1,334	2,487,130	782,415	46,864	
390,625	-	-	143	249,345	4,663,200	18,134	
1,150,753	-	-	1,337	9,075,398	41,136,702	192,484	
-	-	-	5,060	255,204	6,397,946	7,239	
10,649	-	-	4,992	957,689	17,741,137	400,174	
80,400	844	-	10,186	155,927,876	49,682,755	4,004,878	
2,884	-	1,918,036	2,775	3,498,399	1,500,412	55,659	
-	-	1,960,954	2,604	3,994,959	6,229,046	91,618	
22,790,662	-	-	5,656	160,664	2,434,927	10,258	
2,981	10,670	47,647	8,502	3,641,377	4,079,952	107,348	
-	-	-	173,941	33,577	40,776	1,923	
-	-	-	99,248	282,723	245,144	7,270	
-	471	-	188,841	807,208	1,450,130	17,054	
-	266	-	102,627	12,926,217	4,976,085	157,220	
-	-	-	2,520	1,768,842	170,087	22,370	
21	-	-	-	-	-	-	
3,207,572	3,620	-	12,363,288	6,620,095	8,840,972	299,189	
-	146,197	-	128,358,683	29,119,927	6,891,413	791,015	
25,138,863	-	-	-	4,193	3,035,653	-	72,608,621
52,775,410	162,068	3,928,532	141,347,120	268,714,269	197,849,727	6,660,341	72,608,621

Manajemen Risiko

Tabel 3.b. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	31 DESEMBER 2018			
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	4,526,297	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	517,088	-
4	Industri pengolahan	-	10,564,119	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	25,677,691	-
6	Konstruksi	-	5,638,043	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	18,908,256	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	5,102,956	-
10	Perantara keuangan	276,042,591	6,857,186	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	65,598	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,544,738	274,638	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3,252,296	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	14,431,525	1,058,150	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	4,572,754	6,928,756	-
	Total	297,591,608	89,371,074	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	18,498	293,476	43,380,974	47,817,401	524,478	-
-	-	-	6,951	3,100,203	627,694	47,364	-
-	-	-	15,198	451,088	4,421,789	25,307	-
495,372	-	-	31,841	11,334,022	42,378,653	253,780	-
-	-	-	12,084	380,248	11,699,130	6,382	-
12,138	-	115,920	134,256	1,274,444	26,418,531	158,588	-
4,033	1,234	1,209	44,534	174,244,783	80,260,562	4,956,243	-
1,257	-	1,789,311	2,540	3,593,816	1,911,700	156,940	-
-	-	1,092,289	20,420	4,810,445	10,305,448	111,122	-
41,011,412	-	-	28,035	390,538	3,173,027	7,977	-
6,028	3,216	123,840	73,316	4,132,577	4,738,670	139,327	-
-	-	-	2,374,201	176,936	68,752	2,943	-
-	-	-	564,943	408,048	291,972	3,089	-
-	-	-	393,839	1,099,422	2,162,998	23,576	-
-	-	-	917,893	15,957,472	5,634,033	211,464	-
-	-	23,445	26,626	1,557,072	234,286	26,112	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,598,510	303,243	-	8,374,639	11,534,747	3,365,632	246,253	303,773
-	41,730	-	141,981,572	34,177,356	10,322,632	944,810	-
45,544,566	-	-	-	24,528	6,656,832	-	73,378,404
89,673,316	349,423	3,164,513	155,296,364	312,028,720	262,489,742	7,845,756	73,682,177

Manajemen Risiko

Tabel 3.b. : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	31 DESEMBER 2017			
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	4,757,744	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	23,584	-
4	Industri pengolahan	-	12,893,416	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	29,810,910	-
6	Konstruksi	-	6,541,688	-
7	Perdagangan besar dan eceran	149	12,045,369	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	271,350	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	8,327,719	-
10	Perantara keuangan	249,319,593	7,934,090	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	81,466	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	3,353,842	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	37,291	6,115,000	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	24,730,089	1,426,623	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	5,010,449	3,671,644	-
	Total	279,097,571	97,254,445	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	22,172	15,383	38,373,085	41,218,850	454,754	-
-	-	-	1,334	2,494,544	782,415	47,291	-
390,625	-	-	143	276,544	4,663,321	18,618	-
1,150,753	-	-	1,337	9,181,230	42,244,731	199,533	-
-	-	-	5,060	260,620	6,450,209	7,239	-
10,649	-	136,598	4,992	1,069,339	17,861,395	408,436	-
80,400	844	-	10,186	156,559,576	50,552,521	4,031,560	-
2,884	-	2,097,357	2,775	3,573,417	1,560,885	59,414	-
-	-	1,960,954	2,604	4,097,117	6,295,761	94,482	-
22,880,346	-	-	5,656	210,699	3,152,339	10,258	-
2,981	10,670	204,399	8,502	3,722,955	4,089,812	111,389	-
-	-	-	173,941	33,577	40,776	1,923	-
-	-	-	99,248	283,904	245,161	7,270	-
-	471	-	188,841	832,464	1,450,130	17,054	-
-	266	-	102,627	13,004,913	4,992,581	161,857	-
-	-	-	2,520	1,770,076	170,087	22,370	-
21	-	-	-	-	-	-	-
3,207,572	3,620	-	12,700,402	6,660,374	8,841,026	328,449	298,099
-	146,197	-	128,358,683	29,119,927	6,891,413	791,015	-
25,138,863	229,382	-	-	4,193	3,035,653	-	72,608,621
52,865,094	391,450	4,421,480	141,684,234	271,528,553	204,539,065	6,772,911	72,906,720

Tabel 7.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat		
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)
	PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah		-	-
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional		-	-
4 Tagihan Kepada Bank		1,375,519	578,088
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6 Kredit Beragun Properti Komersial			
7 Kredit Pegawai/Pensiunan			
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9 Tagihan kepada Korporasi		1,342,114	225,424
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
11 Aset Lainnya			
TOTAL		2,717,633	803,512

Tabel 7.a.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat		
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)
	PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah		-	-
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	134,999
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional		-	-
4 Tagihan Kepada Bank		1,180,549	492,276
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6 Kredit Beragun Properti Komersial			
7 Kredit Pegawai/Pensiunan			
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9 Tagihan kepada Korporasi		531,516	106,732
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
11 Aset Lainnya			
TOTAL		1,712,065	734,007

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018				
Tagihan Bersih				
Peringkat Jangka panjang				
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3
A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)
[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-
idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	11,893,144	2,439,499	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,160,841	5,225,366	3,607,572	-	-
121,900	2,326,340	1,076,092	-	-
1,282,741	19,444,850	7,123,163	-	-

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017				
Tagihan Bersih				
Peringkat Jangka panjang				
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3
A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)
[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-
idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	16,986,522	7,622,198	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
120,000	9,360,897	1,375,387	-	-
50,000	3,498,653	4,758,838	-	-
170,000	29,846,071	13,756,423	-	-

Tabel 7.b.1 : Pengungkapan Tag Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio & Skala Peringkat-Bank secara Konsolidasi dg Perush Anak

Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat		
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)
	PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah		-	-
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		100,000	-
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional		-	-
4 Tagihan Kepada Bank		1,389,254	578,088
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6 Kredit Beragun Properti Komersial			
7 Kredit Pegawai/Pensiunan			
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9 Tagihan kepada Korporasi		1,392,114	271,097
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
11 Aset Lainnya			
TOTAL		2,881,368	849,184

Tabel 7.b.2 : Pengungkapan Tag Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio & Skala Peringkat-Bank secara Konsolidasi dg Perush Anak

Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat		
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)
	PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah		-	-
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	134,999
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional		-	-
4 Tagihan Kepada Bank		1,180,549	506,681
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6 Kredit Beragun Properti Komersial			
7 Kredit Pegawai/Pensiunan			
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9 Tagihan kepada Korporasi		531,516	106,732
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
11 Aset Lainnya			
TOTAL		1,712,065	748,412

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018				
Tagihan Bersih				
Peringkat Jangka panjang				
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3
A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)
[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-
idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	11,893,144	2,439,499	-	-
-	31,068	-	-	-
-	-	-	-	-
1,160,841	5,262,213	3,607,572	-	-
121,900	2,326,340	1,076,092	-	-
1,282,741	19,512,765	7,123,162	-	-

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017				
Tagihan Bersih				
Peringkat Jangka panjang				
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-
A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3
A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)
[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-
idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	16,986,522	7,622,198	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
120,000	9,360,897	1,375,387	-	-
50,000	3,498,653	4,758,838	-	-
170,000	29,846,071	13,756,423	-	-

Tabel 7.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Kategori Portofolio			
		A-1	A-2
		F1+ s.d F1	F2
		P-1	P-2
		F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)
		[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2
		idA1	idA2
(1)	(2)	(11)	(12)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		
6	Kredit Beragun Properti Komersial		
7	Kredit Pegawai/Pensiunan		
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		
11	Aset Lainnya		
	TOTAL	-	-

Tabel 7.a.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Kategori Portofolio			
		A-1	A-2
		F1+ s.d F1	F2
		P-1	P-2
		F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)
		[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2
		idA1	idA2
(1)	(2)	(11)	(12)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		
6	Kredit Beragun Properti Komersial		
7	Kredit Pegawai/Pensiunan		
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		
11	Aset Lainnya		
	TOTAL	-	-

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018			
Tagihan Bersih			
Peringkat Jangka Pendek		Tanpa Peringkat	Total
A-3	Kurang dari A-3		
F3	Kurang dari F3		
P-3	Kurang dari P-3		
F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	278,796,038	293,128,681
	-	-	88,533,123	88,533,123
	-	-	-	-
	-	-	75,179,542	87,126,928
	-	-	246,051,957	251,143,827
	-	-	688,560,660	719,932,559

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017			
Tagihan Bersih			
Peringkat Jangka Pendek		Tanpa Peringkat	Total
A-3	Kurang dari A-3		
F3	Kurang dari F3		
P-3	Kurang dari P-3		
F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	249,494,512	274,103,232
	-	-	96,600,956	96,735,955
	-	-	-	-
	-	-	40,246,301	52,775,410
	-	-	188,903,988	197,849,727
	-	-	575,245,757	621,464,324

Tabel 7.b.1 : Pengungkapan Tag Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio & Skala Peringkat-Bank secara Konsolidasi dg Perush Anak

Kategori Portofolio				
		A-1	A-2	
		F1+ s.d F1	F2	
		P-1	P-2	
		F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	
		[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	
		idA1	idA2	
(1)	(2)	(11)	(12)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan			
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
11	Aset Lainnya			
	TOTAL	-	-	

Tabel 7.b.2 : Pengungkapan Tag Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio & Skala Peringkat-Bank secara Konsolidasi dg Perush Anak

Kategori Portofolio				
		A-1	A-2	
		F1+ s.d F1	F2	
		P-1	P-2	
		F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	
		[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	
		idA1	idA2	
(1)	(2)	(11)	(12)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan			
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
11	Aset Lainnya			
	TOTAL	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018			
Tagihan Bersih			
Peringkat Jangka Pendek		Tanpa Peringkat	Total
A-3	Kurang dari A-3		
F3	Kurang dari F3		
P-3	Kurang dari P-3		
F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	283,258,965	297,591,608
	-	-	89,240,006	89,371,074
	-	-	-	-
	-	-	77,675,348	89,673,316
	-	-	257,302,200	262,489,743
	-	-	707,476,519	739,125,740

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017			
Tagihan Bersih			
Peringkat Jangka Pendek		Tanpa Peringkat	Total
A-3	Kurang dari A-3		
F3	Kurang dari F3		
P-3	Kurang dari P-3		
F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	254,488,852	279,097,571
	-	-	97,119,446	97,254,445
	-	-	-	-
	-	-	40,321,580	52,865,094
	-	-	195,593,326	204,539,065
	-	-	587,523,204	633,756,176

Manajemen Risiko

Tabel 8.a: Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

No	Variabel yang Mendasari	31 DESEMBER 2018							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	4,797,216	2,321,766	3,593,581	69,307	91,211	127,252	-	127,252
2	Nilai Tukar	36,686,066	164,766	1,303,205	374,364	168,737	1,104,707	-	1,104,707
3	Lainnya	-	-	-	25,671	67,944	45,095	-	45,095
	TOTAL	41,483,282	2,486,532	4,896,786	469,342	327,892	1,277,054	-	1,277,054
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	4,797,216	2,321,766	3,593,581	69,307	91,211	127,252	-	127,252
2	Nilai Tukar	36,686,066	164,766	1,303,205	374,364	168,737	1,104,707	-	1,104,707
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	25,671	67,944	45,095	-	45,095
	TOTAL	41,483,282	2,486,532	4,896,786	469,342	327,892	1,277,054	-	1,277,054

Tabel 8.a: Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) : Transaksi Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

No	Variabel yang Mendasari	31 DESEMBER 2017							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	7,294,765	2,698,900	3,390,536	60,475	54,261	124,828	-	124,828
2	Nilai Tukar	22,527,732	1,681,337	-	20,745	27,391	330,089	-	330,089
3	Lainnya	-	-	-	64,708	115,981	64,708	-	64,708
	TOTAL	29,822,497	4,380,237	3,390,536	145,928	197,633	519,625	-	519,625
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	7,294,765	2,698,900	3,390,536	60,475	54,261	124,828	-	124,828
2	Nilai Tukar	22,527,732	1,681,337	-	20,745	27,391	330,089	-	330,089
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	64,708	115,981	64,708	-	64,708
	TOTAL	29,822,497	4,380,237	3,390,536	145,928	197,633	519,625	-	519,625

Manajemen Risiko

Tabel 8.b.1 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Repo Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Tabel 8.b.2 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi Repo Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2017			
	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	12,200,619	12,136,684	996,995	448,227
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	12,200,619	12,136,684	996,995	448,227

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2017			
	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	12,200,619	12,136,684	996,995	448,227
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	36,703,287	37,379,394	3,681,056	954,471	12,200,619	12,136,684	996,995	448,227

Manajemen Risiko

Tabel 8.c.1 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi *Reverse Repo* Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Tabel 8.c.2 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) : Transaksi *Reverse Repo* Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan kepada Korporasi
	Total

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2017			
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6,723,269	-	6,723,269	-	15,068,698	-	15,068,698	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,524,128	-	1,524,128	304,826	1,427,595	-	1,427,595	285,519
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	-	-	-	-
	9,396,553	-	9,396,553	1,453,981	16,496,292	-	16,496,292	285,519

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2017			
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6,723,269	-	6,723,269	-	16,583,432	-	16,583,432	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,524,128	-	1,524,128	304,826	1,427,595	-	1,427,595	285,519
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	-	-	-	-
	9,396,553	-	9,396,553	1,453,981	18,011,026	-	18,011,026	285,519

Tabel 9.a.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	286,356,952	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1,627,557	3,699,540	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	40,361,304	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	12,742	6,992	27,139	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,253,506	18,858,390	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	20,303,139	2,545,800	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,017	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	27,170,587	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	336,712,758	65,477,776	6,992	27,139	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	478,171	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	24,449	478,171	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	46,386	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	4,587,790	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	6,747,281	4,634,176	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018							
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
-	-	-	-	-		-	-
-	69,674,646	-	-	-		35,577,231	2,846,178
-	-	-	-	-		-	-
-	23,927,858	-	-	-		20,036,190	1,602,895
-	-	-	-	-		13,795	1,104
-	-	-	2,920,473	-		2,920,473	233,638
-	154,833,450	-	-	-		77,416,725	6,193,338
-	-	288,723,154	-	-		220,314,044	17,625,124
-	109,400	-	221,982,961	-		222,546,821	17,803,746
-	-	-	1,014	7,585,679		11,379,533	910,363
-	-	-	46,161,739	46,078		46,230,856	3,698,468
-	248,545,354	288,723,154	271,066,187	7,631,757	-	636,435,668	50,914,853
-	-	-	-	-		-	-
-	13,140,348	-	-	-		6,570,174	525,614
-	-	-	-	-		-	-
-	16,482,138	-	-	-		8,336,703	666,936
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	348,395	-	-		261,296	20,904
-	-	-	4,863,633	-		4,863,633	389,091
-	-	-	-	-		-	-
-	29,622,486	348,395	4,863,633	-	-	20,031,806	1,602,544
-	-	-	-	-		-	-
-	344,645	-	-	-		181,600	14,528
-	-	-	-	-		-	-
-	1,285,904	-	3,763	-		1,429,803	114,384
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	1,338,893	-		1,338,893	107,111
-	-	-	-	-		92,268	7,381
-	1,630,550	-	1,342,656	-	-	3,042,565	243,405

Tabel 9.b.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	290,819,879	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1,627,557	3,799,540	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	42,669,475	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	12,742	82,397	254,282	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,477,403	18,858,390	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	21,123,364	2,595,800	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,017	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	27,189,913	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	342,239,133	67,935,947	82,397	254,282	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	478,171	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	2	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	9,466	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	33,915	478,171	-	2	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	46,386	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	4,587,790	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	6,747,281	4,634,176	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018							
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
-	-	-	-	-		-	-
-	70,410,397	-	-	-		35,965,106	2,877,208
-	-	-	-	-		-	-
-	24,165,695	-	-	-		20,616,743	1,649,339
-	-	-	-	-		112,146	8,972
-	-	-	3,140,274	-		3,140,274	251,222
-	155,296,312	-	-	-		77,647,414	6,211,793
-	-	291,290,197	-	-		222,239,325	17,779,146
-	155,073	-	231,973,473	-		232,570,170	18,605,614
-	-	-	16,783	7,826,032		11,755,832	940,467
-	-	-	46,442,206	50,058		46,517,292	3,721,383
-	250,027,477	291,290,197	281,572,736	7,876,090	-	650,564,302	52,045,144
-	-	-	-	-		-	-
-	13,142,548	-	-	-		6,571,273	525,702
-	-	-	-	-		-	-
-	16,482,518	-	-	-		8,336,893	666,951
-	-	-	-	-		1	0
-	-	-	24,239	-		24,239	1,939
-	52	-	-	-		26	2
-	-	402,729	-	-		301,599	24,128
-	-	-	5,293,674	-		5,293,673	423,494
-	-	-	-	1,924		2,886	231
-	29,625,118	402,729	5,317,913	1,924	-	20,530,590	1,642,447
-	-	-	-	-		-	-
-	344,645	-	-	-		181,600	14,528
-	-	-	-	-		-	-
-	1,285,904	-	3,763	-		1,429,803	114,384
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	1,338,893	-		1,338,893	107,111
-	-	-	-	-		92,268	7,381
-	1,630,550	-	1,342,656	-	-	3,042,565	243,405

Manajemen Risiko

Tabel 9.a.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio					
		0%	20%	25%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	259,015,604	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3,091,436	3,245,094	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	27,166,865	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	162,068	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	729,439	19,071,021	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	16,138,711	2,175,202	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	197	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	24,437,574	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	303,412,961	51,658,182	-	162,068	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18,930	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	480,260	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	18,930	480,260	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	15,068,698	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	2,114,790	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	15,068,698	2,114,790	-	-	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017							
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
-	-	-	-	-		-	-
-	80,234,060	-	-	-		40,766,049	3,261,284
-	-	-	-	-		-	-
-	11,223,940	-	-	-		11,045,343	883,627
-	-	-	-	-		56,724	4,538
-	-	-	3,928,532	-		3,928,532	314,283
-	141,347,120	-	-	-		70,673,560	5,653,885
-	-	248,812,007	-	-		190,423,209	15,233,857
-	119,611	-	174,080,285	-		174,575,131	13,966,010
-	-	-	6,846	6,653,298		9,986,793	798,943
-	-	-	48,064,588	106,459		48,224,278	3,857,942
-	232,924,731	248,812,007	226,080,251	6,759,757	-	549,679,619	43,974,370
-	-	-	-	-		-	-
-	10,165,365	-	-	-		5,082,683	406,615
-	-	-	-	-		-	-
-	10,960,130	-	-	-		5,576,117	446,089
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	101,802	-	-		76,352	6,108
-	-	-	5,335,918	-		5,335,918	426,873
-	-	-	-	-		-	-
-	21,125,495	101,802	5,335,918	-	-	16,071,070	1,285,686
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	829,425	-	-	-		837,671	67,014
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		70,834	5,667
-	829,425	-	-	-	-	908,505	72,680

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	262,495,209	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3,091,436	3,245,094	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	27,245,728	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	391,450	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	875,947	19,071,021	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	16,342,136	2,175,202	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	197	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	24,449,680	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	307,254,605	51,737,045	-	391,450	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18,930	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	490,736	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	36	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	2,714	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	21,680	490,736	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	16,583,432	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	2,114,790	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	16,583,432	2,114,790	-	-	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2017							
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
-	-	-	-	-		-	-
-	80,747,283	-	-	-		41,022,661	3,281,813
-	-	-	-	-		-	-
-	11,224,095	-	-	-		11,061,194	884,896
-	-	-	-	-		137,008	10,961
-	-	-	4,349,537	-		4,349,537	347,963
-	141,684,234	-	-	-		70,842,117	5,667,369
-	-	251,424,670	-	-		192,382,706	15,390,616
-	119,611	-	180,351,136	-		180,845,982	14,467,679
-	-	-	26,002	6,746,712		10,146,070	811,686
-	-	-	48,346,148	110,892		48,512,488	3,880,999
-	233,775,223	251,424,670	233,072,823	6,857,604	-	559,299,763	44,743,981
-	-	-	-	-		-	-
-	10,170,632	-	-	-		5,085,317	406,825
-	-	-	-	-		-	-
-	10,960,320	-	-	-		5,578,308	446,265
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	71,943	-		71,943	5,755
-	-	-	-	-		-	-
-	-	156,879	-	-		117,659	9,413
-	-	-	5,548,266	-		5,548,266	443,861
-	-	-	-	-		-	-
-	21,130,952	156,879	5,620,209	-	-	16,401,493	1,312,119
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	829,425	-	-	-		837,671	67,014
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		70,834	5,667
-	829,425	-	-	-	-	908,505	72,680

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penuruanan Nilai (*impaired*)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penuruanan Nilai (*impaired*)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	31 Desember 2018							
	Wilayah							
	Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	618,953,171	189,572,893	62,652,397	85,039,712	84,598,129	133,335,125	16,079,809	1,190,231,236
	16,181,395	7,323,333	1,311,365	1,414,084	2,190,480	4,918,281	2,045,055	35,383,993
	11,510,695	4,944,099	251,722	343,567	854,952	2,249,755	1,699,028	21,853,818
	4,670,700	2,379,234	1,059,643	1,070,517	1,335,528	2,668,526	346,027	13,530,175
	10,214,975	4,198,118	275,697	102,770	368,297	876,585	429,049	16,465,491
	3,884,640	4,471,467	1,765,999	2,330,120	1,906,639	3,019,311	726,213	18,104,389
	3,194,812	2,465,085	1,347,407	1,394,090	1,255,452	2,182,736	339,824	12,179,406

(dalam juta rupiah)

	31 Desember 2017							
	Wilayah							
	Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	486,312,630	164,490,857	58,252,311	72,368,597	74,717,427	116,718,289	62,367,709	1,035,227,820
	16,236,980	6,641,418	1,434,029	1,576,305	1,975,582	4,381,086	1,881,779	34,127,179
	11,390,967	4,720,845	458,467	612,594	986,741	2,031,268	1,583,401	21,784,283
	4,846,013	1,920,573	975,562	963,711	988,841	2,349,818	298,378	12,342,896
	7,174,103	3,758,889	275,906	237,393	390,282	888,625	106,215	12,831,413
	3,482,585	4,059,499	1,635,075	2,069,701	1,660,348	2,777,741	545,900	16,230,849
	2,167,823	2,075,684	1,003,485	1,115,392	1,104,708	1,739,682	321,915	9,528,689

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.4.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penuruanan Nilai (*impaired*)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

No	Keterangan
(1)	(2)
1	Tagihan
2	Tagihan Yang Mengalami Penuruanan Nilai (*impaired*)
	a. Belum Jatuh Tempo
	b. Telah jatuh Tempo
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
5	Tagihan yang hapus buku

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	31 Desember 2018							
	Wilayah							
	Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	667,817,635	193,563,352	67,094,334	87,626,848	87,347,822	138,469,337	16,081,844	1,258,001,172
	17,071,515	7,688,111	1,830,357	1,516,143	2,342,484	5,753,746	2,045,055	38,247,411
	12,247,815	5,185,717	448,558	383,700	966,611	2,828,325	1,699,028	23,759,754
	4,823,700	2,502,394	1,381,799	1,132,443	1,375,873	2,925,421	346,027	14,487,657
	10,305,307	4,205,111	393,016	105,388	394,164	994,142	429,049	16,826,177
	4,191,774	4,556,254	1,838,470	2,366,191	1,945,926	3,152,926	726,213	18,777,754
	3,458,110	2,476,722	1,373,974	1,414,545	1,267,525	2,228,284	339,824	12,558,984

(dalam juta rupiah)

	31 Desember 2017							
	Wilayah							
	Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	571,490,815	167,878,518	62,008,395	74,828,975	77,473,271	121,304,019	13,768,630	1,088,752,623
	16,993,917	6,885,341	1,861,497	1,649,050	2,099,366	5,074,355	1,881,779	36,445,305
	11,990,642	4,862,170	824,258	644,319	1,044,226	2,451,759	1,583,401	23,400,775
	5,003,275	2,023,171	1,037,239	1,004,731	1,055,140	2,622,596	298,378	13,044,530
	7,501,909	3,768,011	299,029	241,954	429,246	977,361	106,215	13,323,725
	3,737,983	4,128,800	1,677,761	2,108,036	1,695,911	2,886,829	545,900	16,781,220
	2,189,865	2,098,622	1,013,120	1,228,680	1,108,730	1,746,985	321,915	9,707,917

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
	31 Desember 2018
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	90,322,491	4,172,975	981,602	2,274,175	2,590,457	1,120,830
	4,093,319	385,803	62,295	309,460	150,935	112,190
	6,367,847	1,663,220	67,020	1,216,628	77,797	22,689
	65,906,758	8,656,791	521,378	5,969,411	1,099,296	533,264
	35,882,017	171,504	571,780	589,948	606,707	106,259
	32,444,818	1,620,898	1,649,082	2,305,856	429,280	1,385,140
	280,801,375	1,854,189	6,375,291	1,249,151	8,152,207	6,555,642
	7,670,885	845,145	151,300	449,390	182,440	164,458
	22,495,723	481,977	1,182,672	1,308,424	452,742	377,776
	3,482,796	739	8,643	112	60,655	215,349
	10,678,809	179,105	224,636	153,209	220,801	153,740
	5,386,747	197	1,758	-	154,958	2,362
	1,236,835	2,550	3,063	-	29,776	10,397
	3,636,102	82,196	31,273	13,660	64,101	15,898
	26,346,366	1,476,990	270,099	576,695	774,710	427,070
	1,836,856	1,314	30,460	-	72,349	38,602
	-	-	-	-	-	-
	6,835,161	91,485	6,382	-	271,053	111,484
	198,913,527	166,740	1,391,441	49,372	2,714,125	826,256
	385,892,804	-	-	-	-	-
	1,190,231,236	21,853,818	13,530,175	16,465,491	18,104,389	12,179,406

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
	31 Desember 2017
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	80,841,487	3,425,105	920,412	1,039,393	2,379,388	1,093,940
	3,345,548	15,365	57,904	677	132,595	130,805
	5,537,860	2,197,909	514,816	883,192	46,274	15,935
	62,795,635	7,999,558	442,759	4,808,591	1,007,663	1,097,405
	34,218,438	600,174	107,677	692,703	563,370	11,330
	25,406,212	1,686,184	1,432,348	1,656,859	343,726	161,092
	230,064,625	1,660,052	5,404,789	1,102,228	7,005,014	5,214,583
	7,729,740	1,750,512	102,773	345,636	193,250	100,433
	21,909,700	340,388	1,316,981	1,282,391	443,576	151,606
	5,754,946	213	190,555	180,288	84,318	13,568
	8,103,561	473,429	264,132	180,649	155,907	231,605
	3,604,239	258	1,604	-	47,403	2,830
	637,016	1,763	9,113	-	13,811	6,612
	2,473,050	71,105	19,413	4,641	39,615	15,245
	25,021,020	821,515	206,316	403,893	764,126	318,998
	1,974,334	1,962	27,339	-	82,013	55,502
	-					
	23,093,859	650,646	370,072	211,061	492,738	199,321
	165,489,775	88,145	953,893	39,211	2,436,062	707,879
	327,226,775	-	-	-	-	-
	1,035,227,820	21,784,283	12,342,896	12,831,413	16,230,849	9,528,689

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

No	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
	31 Desember 2018
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengilahan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	100,304,211	4,559,813	1,061,959	2,357,085	2,657,871	1,130,716
	4,471,879	406,451	68,892	309,698	161,064	112,190
	7,367,188	1,663,896	67,859	1,216,628	79,445	22,689
	72,162,139	8,987,837	650,444	5,990,716	1,333,999	566,103
	36,423,545	172,719	572,233	589,948	610,611	106,259
	35,515,380	1,782,951	1,665,168	2,350,576	466,359	1,385,479
	286,402,199	2,220,519	6,475,274	1,276,711	8,260,154	6,573,719
	8,265,111	911,083	317,825	536,180	193,222	164,485
	23,942,802	552,637	1,190,474	1,313,633	468,561	378,200
	4,767,971	191,375	79,803	35,155	86,292	233,327
	11,540,137	262,793	330,116	192,077	229,562	154,735
	5,387,366	197	2,184	-	155,009	2,362
	1,467,963	6,810	3,633	786	32,122	10,397
	3,985,312	86,690	31,396	13,766	67,807	15,898
	27,091,126	1,496,357	283,512	577,183	786,752	427,074
	1,877,548	2,865	30,679	-	73,139	38,602
	-	-	-	-	-	-
	7,955,751	96,402	253,385	13,726	347,708	123,329
	199,116,733	182,896	1,392,814	50,708	2,716,845	826,256
	419,956,811	175,463	10,007	1,601	51,232	287,164
	1,258,001,172	23,759,754	14,487,657	16,826,177	18,777,754	12,558,984

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

No	Sektor Ekonomi
(1)	(2)
	31 Desember 2017
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengilahan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10	Perantara keuangan
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya
19	Bukan Laporan Usaha
20	Lainnya
	Total

Manajemen Risiko

(dalam juta rupiah)

	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	87,716,464	3,694,642	1,007,878	1,108,476	2,467,989	1,096,921
	3,353,514	15,365	58,556	677	132,913	130,805
	5,744,546	2,198,837	522,540	883,192	47,184	15,935
	67,435,470	8,413,668	496,216	4,984,978	1,057,605	1,097,405
	34,391,709	600,727	107,901	692,703	565,346	11,330
	28,376,671	1,717,791	1,519,479	1,702,616	369,253	161,092
	235,717,047	1,988,571	5,569,892	1,130,410	7,131,734	5,231,532
	8,453,368	1,969,551	125,033	360,379	196,599	100,433
	23,013,956	355,819	1,325,316	1,387,685	451,650	151,606
	6,367,633	66,205	208,533	211,939	95,460	13,568
	9,758,800	563,445	311,349	192,878	184,426	231,605
	3,604,239	258	1,604	-	47,403	2,830
	638,169	1,763	9,113	-	13,823	6,612
	3,199,027	96,130	25,171	6,961	50,881	15,245
	25,122,455	821,515	212,967	403,893	767,675	318,998
	1,975,580	1,962	27,339	-	82,025	55,502
	-	-	-	-	-	-
	24,040,172	650,646	431,132	211,061	517,180	199,321
	165,489,775	88,145	953,893	39,211	2,436,062	707,879
	354,354,028	155,735	130,618	6,666	166,012	159,298
	1,088,752,623	23,400,775	13,044,530	13,323,725	16,781,220	9,707,917

Manajemen Risiko

Tabel 9.b.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Individual

(dalam juta rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2018	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	12,831,413	16,230,849
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	6,254,403	11,187,344
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(2,620,325)	(9,559,081)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	245,277
Saldo akhir CKPN		16,465,491	18,104,389

(dalam juta rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	7,406,236	14,538,135
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	6,753,899	9,905,798
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(1,328,722)	(8,199,967)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(13,117)
Saldo akhir CKPN		12,831,413	16,230,849

Tabel 9.b.6.b Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Konsolidasi dengan Anak Perusahaan

(dalam juta rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2018	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	13,323,725	16,781,220
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	6,163,892	11,648,849
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(2,661,440)	(9,897,544)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	245,229
Saldo akhir CKPN		16,826,177	18,777,754

(dalam juta rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	7,514,160	15,293,100
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	7,033,153	9,986,369
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(1,223,588)	(8,484,329)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(13,920)
Saldo akhir CKPN		13,323,725	16,781,220

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

No		Kategori Portofolio
(1)		(2)
I	NERACA	
	A. Aset	
	1 Kas	
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia	
	3 Penempatan pada Bank Lain	
	4 Surat Berharga	
	5 Kredit yang diberikan	
	6 Tagihan lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Aset	
	B. Kewajiban	
	1 Dana Pihak Ketiga	
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	
	3 Kewajiban pada bank lain	
	4 Surat berharga yang Diterbitkan	
	5 Pinjaman yang Diterima	
	6 Kewajiban Lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Kewajiban	
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	
II	REKENING ADMINISTRATIF	
	A. Tagihan Rekening Aministratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Tagihan Rekening Administratif	
	B. Kewajiban Rekening Administratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Kewajiban Rekening Administratif	
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)	
	Selisih Kumulatif	

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	25,922,039	25,922,039	-	-	-	-
	44,987,205	44,987,205	-	-	-	-
	6,927,459	6,607,459	120,000	200,000	-	-
	133,307,970	101,715,712	3,437,061	6,243,306	608,345	21,303,546
	690,303,000	9,387,391	5,173,406	10,523,649	44,367,713	620,850,841
	83,325,444	59,661,778	8,799,365	12,263,939	2,528,861	71,501
	57,409,715	10,221,479	4,665,947	142,556	9,454	42,370,279
	1,042,182,832	258,503,063	22,195,779	29,373,450	47,514,373	684,596,167
	781,715,291	534,708,143	227,999,440	8,945,457	3,024,348	7,037,903
	-	-	-	-	-	-
	6,611,613	6,568,603	43,010	-	-	-
	23,931,736	-	1,018,500	2,436,602	20,476,634	-
	28,528	85	6,381	-		22,062
	58,463,690	33,973,153	1,572,365	6,396,720	2,463,408	14,058,044
	5,542,456	1,079,782	3,534,245	415,959	12,311	500,159
	876,293,314	576,329,766	234,173,941	18,194,738	25,976,701	21,618,168
	165,889,518	(317,826,703)	(211,978,162)	11,178,712	21,537,672	662,977,999
	9,811,005	4,965,733	1,625,459	757,577	947,116	1,515,120
	3,823	-	-	-	-	3,823
	9,814,828	4,965,733	1,625,459	757,577	947,116	1,518,943
	108,366,650	14,705,558	10,767,016	21,081,712	13,723,501	48,088,863
	19,484,535	4,999,937	2,764,291	3,791,816	3,679,272	4,249,219
	127,851,185	19,705,495	13,531,307	24,873,528	17,402,773	52,338,082
	(118,036,357)	(14,739,762)	(11,905,848)	(24,115,951)	(16,455,657)	(50,819,139)
	47,853,161	(332,566,465)	(223,884,010)	(12,937,239)	5,082,015	612,158,860

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

No		Kategori Portofolio
(1)		(2)
I	NERACA	
	A. Aset	
	1 Kas	
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia	
	3 Penempatan pada Bank Lain	
	4 Surat Berharga	
	5 Kredit yang diberikan	
	6 Tagihan lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Aset	
	B. Kewajiban	
	1 Dana Pihak Ketiga	
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	
	3 Kewajiban pada bank lain	
	4 Surat berharga yang Diterbitkan	
	5 Pinjaman yang Diterima	
	6 Kewajiban Lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Kewajiban	
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	
II	REKENING ADMINISTRATIF	
	A. Tagihan Rekening Aministratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Tagihan Rekening Administratif	
	B. Kewajiban Rekening Administratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Kewajiban Rekening Administratif	
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)	
	Selisih Kumulatif	

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2017					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	23,431,269	23,431,269	-	-	-	-
	22,645,124	22,645,124	-	-	-	-
	4,300,000	2,725,000	1,055,000	520,000	-	-
	140,050,518	110,158,782	4,586,446	-	2,566,300	22,738,991
	614,624,489	25,541,792	33,103,280	46,325,928	75,071,883	434,581,606
	52,714,976	46,228,627	2,842,611	3,573,119	10,818	59,801
	52,500,757	8,197,076	2,460,182	1,099,400	3,012,714	37,731,385
	910,267,133	238,927,670	44,047,519	51,518,447	80,661,715	495,111,783
	694,468,700	596,139,755	69,460,788	15,128,039	6,010,330	7,729,788
	-	-	-	-	-	-
	4,292,191	4,250,981	41,210	-	-	-
	23,543,419	-	808,000	1,131,758	2,135,633	19,468,028
	28,534	85	-	6,545	21,904	-
	30,974,606	9,128,724	2,338,864	1,261,543	447,665	17,797,810
	5,442,534	1,477,194	2,666,549	470,272	824,446	4,073
	758,749,984	610,996,739	75,315,411	17,998,157	9,439,978	44,999,699
	151,517,149	(372,069,069)	(31,267,892)	33,520,290	71,221,737	450,112,084
	5,515,119	2,726,475	418,454	2,326,283	43,907	-
	1,253	-	-	-	-	1,253
	5,516,372	2,726,475	418,454	2,326,283	43,907	1,253
	90,624,540	15,652,011	19,383,065	16,782,049	9,360,329	29,447,086
	15,886,078	4,823,106	2,243,619	1,949,848	3,957,061	2,912,444
	106,510,618	20,475,117	21,626,684	18,731,897	13,317,390	32,359,530
	(100,994,246)	(17,748,642)	(21,208,230)	(16,405,614)	(13,273,483)	(32,358,277)
	50,522,903	(389,817,711)	(52,476,122)	17,114,676	57,948,254	417,753,807

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

No		Kategori Portofolio
(1)		(2)
I	NERACA	
	A. Aset	
	1 Kas	
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia	
	3 Penempatan pada Bank Lain	
	4 Surat Berharga	
	5 Kredit yang diberikan	
	6 Tagihan lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Aset	
	B. Kewajiban	
	1 Dana Pihak Ketiga	
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	
	3 Kewajiban pada bank lain	
	4 Surat berharga yang Diterbitkan	
	5 Pinjaman yang Diterima	
	6 Kewajiban Lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Kewajiban	
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	
II	REKENING ADMINISTRATIF	
	A. Tagihan Rekening Aministratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Tagihan Rekening Administratif	
	B. Kewajiban Rekening Administratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Kewajiban Rekening Administratif	
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)	
	Selisih Kumulatif	

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1,248,545	1,248,545	-	-	-	-
	17,823,278	17,823,278	-	-	-	-
	12,943,658	11,029,264	1,575,207	339,187	-	-
	42,084,796	27,305,602	4,617,466	34,512	-	10,127,216
	79,465,552	2,179,107	15,449,333	1,625,843	1,415,439	58,795,830
	36,064,958	26,904,719	4,905,528	2,980,851	1,254,215	19,645
	2,386,420	70,938	688,240	1,275,423	324	351,495
	192,017,207	86,561,453	27,235,774	6,255,816	2,669,978	69,294,186
	116,317,273	49,214,097	47,429,866	7,172,277	12,490,042	10,991
	-	-	-	-	-	-
	2,492,761	2,492,761		-	-	-
	7,142,940	-	-	-	-	7,142,940
	39,344,382	830,193	3,637,058	7,912,167		26,964,964
	10,652,247	1,360,604	5,786,880	2,562,016	940,968	1,779
	938,542	68,315	404,267	326,687	-	139,273
	176,888,145	53,965,970	57,258,071	17,973,147	13,431,010	34,259,947
	15,129,062	32,595,483	(30,022,297)	(11,717,331)	(10,761,032)	35,034,239
	10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
	-	-	-	-	-	-
	10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
	51,879,148	6,996,912	19,372,370	6,799,297	6,544,059	12,166,510
	26,329,441	1,797,166	1,692,696	5,938,963	4,345,047	12,555,569
	78,208,589	8,794,078	21,065,066	12,738,260	10,889,106	24,722,079
	(67,819,209)	(5,097,433)	(16,315,375)	(12,043,949)	(9,805,139)	(24,557,313)
	(52,690,147)	27,498,050	(46,337,672)	(23,761,280)	(20,566,171)	10,476,926

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Aministratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2017					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1,006,302	1,006,302	-	-	-	-
	18,992,969	18,857,781	135,188	-	-	-
	7,446,517	6,232,226	529,132	685,159	-	-
	50,843,265	33,624,771	206,371	-	3,291,221	13,720,901
	64,314,294	6,952,069	2,530,547	1,477,709	9,290,448	44,063,521
	20,093,583	18,190,664	1,213,421	639,799	49,699	-
	3,474,003	1,926,848	1,160,888	254,887	385	130,995
	166,170,933	86,790,661	5,775,547	3,057,554	12,631,753	57,915,417
	108,857,870	67,979,250	20,976,976	11,053,639	7,955,131	892,874
	-	-	-	-	-	-
	1,460,229	1,460,229	-	-	-	-
	6,780,383	-	6,780,383	-	-	-
	29,238,875	679,742	743,333	3,251,551	3,120,450	21,443,799
	5,359,097	1,271,528	936,748	517,671	2,562,717	70,433
	944,421	528,165	61,648	-	208,465	146,143
	152,640,875	71,918,914	29,499,088	14,822,861	13,846,763	22,553,249
	13,530,058	14,871,747	(23,723,541)	(11,765,307)	(1,215,010)	35,362,168
	6,227,490	237,454	1,542,132	1,700,900	1,065,667	1,681,337
	2,924	-	-	-	-	2,924
	6,230,414	237,454	1,542,132	1,700,900	1,065,667	1,684,261
	45,072,741	8,302,903	17,267,923	5,460,860	5,327,908	8,713,147
	17,995,548	992,318	1,467,945	3,088,909	3,059,431	9,386,945
	63,068,289	9,295,221	18,735,868	8,549,769	8,387,339	18,100,092
	(56,837,875)	(9,057,767)	(17,193,736)	(6,848,869)	(7,321,672)	(16,415,831)
	(43,307,817)	5,813,980	(40,917,277)	(18,614,176)	(8,536,682)	18,946,337

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.c Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No		Kategori Portofolio
(1)		(2)
I	NERACA	
	A. Aset	
	1 Kas	
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia	
	3 Penempatan pada Bank Lain	
	4 Surat Berharga	
	5 Kredit yang diberikan	
	6 Tagihan lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Aset	
	B. Kewajiban	
	1 Dana Pihak Ketiga	
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	
	3 Kewajiban pada bank lain	
	4 Surat berharga yang Diterbitkan	
	5 Pinjaman yang Diterima	
	6 Kewajiban Lainnya	
	7 Lain-lain	
	Total Kewajiban	
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	
II	REKENING ADMINISTRATIF	
	A. Tagihan Rekening Aministratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Tagihan Rekening Administratif	
	B. Kewajiban Rekening Administratif	
	1 Komitmen	
	2 Kontijensi	
	Total Kewajiban Rekening Administratif	
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)	
	Selisih Kumulatif	

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	26,155,113	26,155,113	-	-	-	-
	50,518,622	50,518,622	-	-	-	-
	6,071,680	5,751,680	120,000	200,000	-	-
	152,878,121	109,390,997	6,252,460	8,678,041	2,615,095	25,941,528
	728,003,382	10,805,131	8,787,727	12,158,135	47,482,455	648,769,933
	85,996,032	62,306,336	8,825,395	12,263,939	2,528,861	71,501
	53,216,461	10,691,497	4,665,947	142,556	383,087	37,333,374
	1,102,839,411	275,619,376	28,651,529	33,442,671	53,009,498	712,116,336
	826,222,359	564,139,784	241,112,477	10,877,707	3,054,488	7,037,903
	-	-	-	-	-	-
	6,743,526	6,692,865	50,661	-	-	-
	24,047,276	-	1,018,500	2,436,602	20,592,174	-
	483,123	50,085		406,382		26,656
	58,950,357	34,136,786	1,598,395	6,396,720	2,463,408	14,355,048
	16,016,772	1,746,135	3,574,501	912,616	23,290	9,760,230
	932,463,413	606,765,655	247,354,534	21,030,027	26,133,360	31,179,837
	170,375,998	(331,146,279)	(218,703,005)	12,412,645	26,876,138	680,936,500
	9,811,005	4,965,733	1,625,459	757,577	947,116	1,515,120
	112,273	17,154	21,751	5,949	20,277	47,142
	9,923,278	4,982,887	1,647,210	763,526	967,393	1,562,262
	110,132,763	14,886,748	11,073,660	21,460,727	14,156,806	48,554,822
	18,556,420	5,003,613	2,774,954	3,817,715	3,707,577	3,252,561
	128,689,183	19,890,361	13,848,614	25,278,442	17,864,383	51,807,383
	(118,765,905)	(14,907,474)	(12,201,404)	(24,514,916)	(16,896,990)	(50,245,121)
	51,610,093	(346,053,753)	(230,904,409)	(12,102,271)	9,979,148	630,691,379

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.c Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Aministratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2017					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	23,780,207	23,780,207	-	-	-	-
	26,052,984	26,052,984	-	-	-	-
	3,162,700	2,532,700	630,000	-	-	-
	157,161,887	117,147,147	7,943,906	-	3,653,527	28,417,307
	644,310,827	26,568,744	34,471,167	48,465,511	78,917,585	455,887,820
	55,418,835	48,932,486	2,842,611	3,573,119	10,818	59,801
	49,846,404	8,559,278	2,460,182	1,099,400	3,293,879	34,433,665
	959,733,844	253,573,546	48,347,866	53,138,030	85,875,809	518,798,593
	694,468,700	596,139,755	69,460,788	15,128,039	6,010,330	7,729,788
	-	-	-	-	-	-
	4,224,785	4,137,592	57,408	29,785	-	-
	30,619,658	-	7,588,383	1,131,758	2,135,633	19,763,884
	28,534	85	-	6,545	-	21,904
	31,374,738	9,240,167	2,338,864	1,264,768	447,665	18,083,274
	13,886,612	1,558,479	4,000,543	584,867	874,391	6,868,332
	774,603,027	611,076,078	83,445,986	18,145,762	9,468,019	52,467,182
	185,130,817	(357,502,532)	(35,098,120)	34,992,268	76,407,790	466,331,411
	5,515,119	2,726,475	418,454	2,326,283	43,907	-
	67,981	66,727	-	-	-	1,254
	5,583,100	2,793,202	418,454	2,326,283	43,907	1,254
	91,728,290	15,654,105	19,407,905	16,905,416	10,313,778	29,447,086
	16,033,717	4,860,902	2,260,660	1,960,113	4,006,409	2,945,633
	107,762,007	20,515,007	21,668,565	18,865,529	14,320,187	32,392,719
	(102,178,907)	(17,721,805)	(21,250,111)	(16,539,246)	(14,276,280)	(32,391,465)
	82,951,910	(375,224,337)	(56,348,231)	18,453,022	62,131,510	433,939,946

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.d Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Aministratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)
	Selisih Kumulatif

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1,266,512	1,266,512	-	-	-	-
	17,823,278	17,823,278	-	-	-	-
	12,604,471	11,029,264	1,575,207	-	-	-
	42,307,757	27,312,592	4,617,466	34,512	159,263	10,183,924
	79,991,899	2,179,822	15,449,335	1,656,501	1,428,068	59,278,173
	37,412,268	28,252,029	4,905,528	2,980,851	1,254,215	19,645
	2,652,696	71,012	688,256	1,538,892	957	353,579
	194,058,881	87,934,509	27,235,792	6,210,756	2,842,503	69,835,321
	118,046,378	49,441,160	48,914,840	7,189,170	12,490,217	10,991
	-	-	-	-	-	-
	2,387,632	2,387,632	-	-	-	-
	7,142,940	-	-	-	-	7,142,940
	39,974,306	830,193	3,637,058	8,542,091		26,964,964
	10,656,707	1,365,050	5,786,894	2,562,016	940,968	1,779
	951,585	76,831	404,267	326,687	2,083	141,717
	179,159,548	54,100,866	58,743,059	18,619,964	13,433,268	34,262,391
	14,899,333	33,833,643	(31,507,267)	(12,409,208)	(10,590,764)	35,572,930
	10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
	-	-	-	-	-	-
	10,389,380	3,696,645	4,749,691	694,311	1,083,967	164,766
	51,887,669	7,003,440	19,372,702	6,799,297	6,545,720	12,166,510
	26,329,631	1,797,166	1,692,696	5,938,963	4,345,237	12,555,569
	78,217,300	8,800,606	21,065,398	12,738,260	10,890,957	24,722,079
	(67,827,920)	(5,103,961)	(16,315,707)	(12,043,949)	(9,806,990)	(24,557,313)
	(52,928,587)	28,729,682	(47,822,974)	(24,453,157)	(20,397,754)	11,015,617

Manajemen Risiko

Tabel 9.d.1.d Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
I	NERACA
	A. Aset
	1 Kas
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia
	3 Penempatan pada Bank Lain
	4 Surat Berharga
	5 Kredit yang diberikan
	6 Tagihan lainnya
	7 Lain-lain
	Total Aset
	B. Kewajiban
	1 Dana Pihak Ketiga
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain
	4 Surat berharga yang Diterbitkan
	5 Pinjaman yang Diterima
	6 Kewajiban Lainnya
	7 Lain-lain
	Total Kewajiban
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II	REKENING ADMINISTRATIF
	A. Tagihan Rekening Aministratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Tagihan Rekening Administratif
	B. Kewajiban Rekening Administratif
	1 Komitmen
	2 Kontijensi
	Total Kewajiban Rekening Administratif
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)

Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2017					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1,017,575	1,017,575	-	-	-	-
	18,992,969	18,857,781	135,188	-	-	-
	6,897,034	6,150,822	407,025	339,187	-	-
	51,085,657	33,633,480	206,371	-	3,304,748	13,941,058
	64,921,556	6,952,489	2,534,906	1,534,056	9,371,140	44,528,965
	20,125,398	18,166,888	1,263,381	645,430	49,699	-
	3,474,409	1,926,014	1,160,888	254,887	385	132,235
	166,514,598	86,705,049	5,707,759	2,773,560	12,725,972	58,602,258
	147,187,750	106,307,123	20,978,983	11,053,639	7,955,131	892,874
	-	-	-	-	-	-
	1,368,582	1,368,582	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	29,374,475	679,742	743,333	3,251,551	3,120,450	21,579,399
	5,414,688	1,271,528	986,708	523,302	2,562,717	70,433
	952,426	533,529	61,648	2,489	208,617	146,143
	184,297,921	110,160,504	22,770,672	14,830,981	13,846,915	22,688,849
	(17,783,323)	(23,455,455)	(17,062,913)	(12,057,421)	(1,120,943)	35,913,409
	6,227,490	237,454	1,542,132	1,700,900	1,065,667	1,681,337
	2,924	-	-	-	-	2,924
	6,230,414	237,454	1,542,132	1,700,900	1,065,667	1,684,261
	45,159,416	8,303,609	17,277,854	5,460,860	5,403,946	8,713,147
	17,996,663	992,318	1,467,945	3,088,909	3,060,546	9,386,945
	63,156,079	9,295,927	18,745,799	8,549,769	8,464,492	18,100,092
	(56,925,665)	(9,058,473)	(17,203,667)	(6,848,869)	(7,398,825)	(16,415,831)
	(74,708,988)	(32,513,928)	(34,266,580)	(18,906,290)	(8,519,768)	19,497,578

Manajemen Risiko

Tabel 10.a. : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2018				
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan			
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	286,356,952	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	75,001,743	1,627,557	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	64,289,162	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	46,873	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,920,473	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	154,833,450	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	308,835,050	1,253,506	-	18,858,390	
9	Tagihan kepada Korporasi	244,941,300	20,303,139	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	7,587,710	1,017	-	-	
11	Aset Lainnya	73,378,404	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	1,218,191,117	23,185,219	-	18,858,390	-
B	Eksposur Rekening Adminsitratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	13,140,348	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	16,960,309	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	348,395	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	4,863,633	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
	Total Eksposur Rekening Administratif	35,337,134	-	-	-	-
C	Eksposur *Counterparty Credit Risk*					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	391,032	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	5,877,457	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	1,338,893	-	-	-	
	Total Eksposure *Counterparty Credit Risk*	14,354,663	-	-	-	-
Total (A+B+C)		1,267,882,914	23,185,219	-	18,858,390	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

Bagian Yang Tidak Dijamin	31 DESEMBER 2017						
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
286,356,952	259,015,604	-	-	-		259,015,604
73,374,186	86,570,590	3,091,436	-	-		83,479,154
-	-	-	-	-		-
64,289,162	38,390,805	-	-	-		38,390,805
46,873	162,068	-	-	-		162,068
2,920,473	3,928,532	-	-	-		3,928,532
154,833,450	141,347,120	-	-	-		141,347,120
288,723,154	268,612,467	729,439	-	19,071,021		248,812,007
224,638,161	192,513,809	16,138,711	-	-		176,375,098
7,586,693	6,660,341	197	-	-		6,660,144
73,378,404	72,608,621	-	-	-		72,608,621
1,176,147,508	1,069,809,957	19,959,783	-	19,071,021	-	1,030,779,153
24,449	18,930	-	-	-		18,930
13,140,348	10,165,365	-	-	-		10,165,365
-	-	-	-	-		-
16,960,309	11,440,390	-	-	-		11,440,390
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
348,395	101,802	-	-	-		101,802
4,863,633	5,335,918	-	-	-		5,335,918
-	-	-	-	-		-
35,337,134	27,062,405	-	-	-	-	27,062,405
6,747,281	15,068,698	-	-	-		15,068,698
391,032	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
5,877,457	2,944,215	-	-	-		2,944,215
-	-	-	-	-		-
1,338,893	-	-	-	-		-
14,354,663	18,012,913	-	-	-	-	18,012,913
1,225,839,305	1,114,885,275	19,959,783	-	19,071,021	-	1,075,854,471

Manajemen Risiko

Tabel 10.b. : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2018				
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan			
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	290,819,879	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	75,837,494	1,627,557	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	66,835,170	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	349,421	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	3,140,274	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	155,296,312	1,485	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	311,625,990	1,477,403	-	18,858,390	
9	Tagihan kepada Korporasi	255,847,710	21,123,364	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	7,843,832	1,017	-	-	
11	Aset Lainnya	73,682,177	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	1,241,278,259	24,230,826	-	18,858,390	-
B	Eksposur Rekening Adminsitratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24,449	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	13,142,548	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	16,960,689	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	24,239	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	52	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	402,729	597	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	5,303,140	9,466	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,924	-	-	-	
	Total Eksposur Rekening Administratif	35,859,772	10,063	-	-	-
C	Eksposur *Counterparty Credit Risk*					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6,747,281	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	391,032	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	5,877,457	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	1,338,893	-	-	-	
	Total Eksposure *Counterparty Credit Risk*	14,354,663	-	-	-	-
Total (A+B+C)		1,291,492,694	24,240,889	-	18,858,390	-

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2017						
			Bagian Yang Dijamin Dengan				
Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	Bagian Yang Tidak Dijamin
(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
290,819,879	262,495,209		-	-	-		262,495,209
74,209,937	87,083,813		3,091,436	-	-		83,992,377
-	-		-	-	-		-
66,835,170	38,469,823		-	-	-		38,469,823
349,421	391,450		-	-	-		391,450
3,140,274	4,349,537		-	-	-		4,349,537
155,294,827	141,684,234		-	-	-		141,684,234
291,290,197	271,371,637		875,947	-	19,071,021		251,424,669
234,724,346	198,988,085		16,342,136	-	-		182,645,949
7,842,815	6,772,910		197	-	-		6,772,713
73,682,177	72,906,720		-	-	-		72,906,720
1,198,189,043	1,084,513,418		20,309,716	-	19,071,021	-	1,045,132,681
24,449	18,930		-	-	-		18,930
13,142,548	10,170,632		-	-	-		10,170,632
-	-		-	-	-		-
16,960,689	11,451,056		-	-	-		11,451,056
2	-		-	-	-		-
24,239	71,943		-	-	-		71,943
52	-		-	-	-		-
402,132	156,915		36	-	-		156,879
5,293,674	5,550,980		2,714	-	-		5,548,266
1,924	-		-	-	-		-
35,849,709	27,420,456		2,750	-	-	-	27,417,706
6,747,281	16,583,432		-	-	-		16,583,432
391,032	-		-	-	-		-
-	-		-	-	-		-
5,877,457	2,944,215		-	-	-		2,944,215
-	-		-	-	-		-
1,338,893	-		-	-	-		-
14,354,663	19,527,647		-	-	-	-	19,527,647
1,248,393,415	1,131,461,521		20,312,466	-	19,071,021	-	1,092,078,034

Manajemen Risiko

Tabel 11.a.1 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 DESEMBER 2018					
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. *Senior tranche*	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. *Junior tranche*						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-

Tabel 11.b.1 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 DESEMBER 2018					
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. *Senior tranche*	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. *Junior tranche*						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-

Manajemen Risiko

Tabel 11.a.2 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 DESEMBER 2017					
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. Senior tranche	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Junior tranche						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-

Tabel 11.b.2 : Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 DESEMBER 2017					
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				-		
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. Senior tranche	-	-	-	-	-	-
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)						
	b. Junior tranche						
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-

Manajemen Risiko

Tabel 12.a. : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu

No	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2017	
		Niai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Niai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* & Lembaga Internasional				
4.	Tagihan Kepada Bank				
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6.	Kredit Beragun Properti Komersial				
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9.	Tagihan Kepada Korporasi				
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo				
11.	Aset Lainnya				
TOTAL					

Tabel 12.b. : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2017	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* & Lembaga Internasional				
4.	Tagihan Kepada Bank				
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6.	Kredit Beragun Properti Komersial				
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9.	Tagihan Kepada Korporasi				
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo				
11.	Aset Lainnya				
TOTAL					

Manajemen Risiko

Tabel 13.a. : Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual

a. Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan Kepada Bank
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6.	Kredit Beragun Properti Komersial
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9.	Tagihan Kepada Korporasi
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11.	Aset Lainnya
TOTAL	

b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan kepada Bank
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6.	Kredit Beragun Properti Komersial
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9.	Tagihan Kepada Korporasi
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
TOTAL	

c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan kepada Bank
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6.	Tagihan Kepada Korporasi
7.	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*)
TOTAL	

Manajemen Risiko

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
286,356,952	-	-	259,015,604	-	-
75,001,743	36,391,010	35,577,231	86,570,590	42,311,767	40,766,049
-	-	-	-	-	-
64,289,162	20,036,190	20,036,190	38,390,805	11,045,343	11,045,343
46,873	13,795	13,795	162,068	56,724	56,724
2,920,473	2,920,473	2,920,473	3,928,532	3,928,532	3,928,532
154,833,450	77,416,725	77,416,725	141,347,120	70,673,560	70,673,560
308,835,050	231,626,288	220,314,044	268,612,467	201,459,350	190,423,209
244,941,300	242,849,960	222,546,821	192,513,809	190,713,842	174,575,131
7,587,710	11,381,058	11,379,533	6,660,341	9,987,089	9,986,793
73,378,404	-	46,230,856	72,608,621	-	48,224,278
1,218,191,117	622,635,499	636,435,668	1,069,809,957	530,176,207	549,679,619
-	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24,449	-	-	18,930	-	-
13,140,348	6,570,174	6,570,174	10,165,365	5,082,683	5,082,683
-	-	-	-	-	-
16,960,309	8,336,703	8,336,703	11,440,390	5,576,117	5,576,117
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
348,395	261,296	261,296	101,802	76,352	76,352
4,863,633	4,863,633	4,863,633	5,335,918	5,335,918	5,335,918
-	-	-	-	-	-
35,337,134	20,031,806	20,031,806	27,062,405	16,071,070	16,071,070
-	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6,747,280	-	-	15,068,698	-	-
391,032	181,600	181,600	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,877,457	1,429,803	1,429,803	2,944,215	837,671	837,671
-	-	-	-	-	-
1,338,893	1,338,893	1,338,893	-	-	-
		92,268			70,834
14,354,663	2,950,297	3,042,564	18,012,913	837,671	908,505
-	-	(0)	-	-	-

Manajemen Risiko

d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1.	*Delivery versus payment*
a.	Beban Modal 8% (5-15 hari)
b.	Beban Modal 50% (16-30 hari)
c.	Beban Modal 75% (31-45 hari)
d.	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
2.	Non-delivery versus payment
TOTAL	

e. Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2017	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	*First Loss Facility*				
b.	*Second Loss Facility*				
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	Bank merupakan Kreditur Asal				
b.	Bank bukan merupakan Kreditur Asal				
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan		-		-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	Bank merupakan Kreditur Asal				
b.	Bank bukan merupakan Kreditur Asal				
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
a.	*Senior Trance*				
b.	*Junior Tranche*				
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.		-		-
TOTAL		-	-	-	-

	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-		-			
	-		-			
	-		-			
	-	-				
	-	-				
	-	-	-	-	-	-

f. Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	659,319,661	566,659,194
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL		

Manajemen Risiko

Tabel 13.b. : Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dg Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dg Perusahaan Anak

a. Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan Kepada Bank
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6.	Kredit Beragun Properti Komersial
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9.	Tagihan Kepada Korporasi
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11.	Aset Lainnya
TOTAL	

b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio
(1)	2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan kepada Bank
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6.	Kredit Beragun Properti Komersial
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9.	Tagihan Kepada Korporasi
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
TOTAL	

Manajemen Risiko

k

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	290,819,879	-	-	262,495,209	-	-
	75,837,494	36,778,885	35,965,107	87,083,813	42,568,379	41,022,661
	-	-	-	-	-	-
	66,835,170	20,616,744	20,616,744	38,469,823	11,061,194	11,061,194
	349,421	112,146	112,146	391,450	137,008	137,008
	3,140,274	3,140,274	3,140,274	4,349,537	4,349,537	4,349,537
	155,296,312	77,648,156	77,647,414	141,684,234	70,842,117	70,842,117
	311,625,990	233,719,493	222,239,326	271,371,638	203,528,729	192,382,707
	255,847,710	253,693,534	232,570,170	198,988,085	197,188,118	180,845,982
	7,843,832	11,757,357	11,755,831	6,772,911	10,146,365	10,146,070
	73,682,177	-	46,517,294	72,906,720	-	48,512,486
	1,241,278,259	637,466,589	650,564,306	1,084,513,420	539,821,447	559,299,762
	-	-	-	-	-	-

	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	24,449	-	-	18,930	-	-
	13,142,548	6,571,274	6,571,274	10,170,632	5,085,316	5,085,316
	-	-	-	-	-	-
	16,960,689	8,336,893	8,336,893	11,451,056	5,578,307	5,578,307
	2	1	1	-	-	-
	24,239	24,239	24,239	71,943	71,943	71,943
	52	26	26	-	-	-
	402,729	302,047	301,599	156,914	117,686	117,659
	5,303,139	5,303,140	5,293,674	5,550,979	5,550,979	5,548,266
	1,924	2,886	2,886	-	-	-
	35,859,771	20,540,506	20,530,592	27,420,454	16,404,231	16,401,491
	-	-	-	-	-	-

c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1. Tagihan Kepada Pemerintah	
a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3. Tagihan kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	
4. Tagihan kepada Bank	
a. Tagihan Jangka Pendek	
b. Tagihan Jangka Panjang	
5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	
6. Tagihan Kepada Korporasi	
7. Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*)	
TOTAL	

d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1. Delivery versus payment	
a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	
b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	
c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	
d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	
2. Non-delivery versus payment	
TOTAL	

e. Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1. Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	
2. Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	
3. Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	
4. Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	
5. Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	
6. Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	
7. Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sek	
TOTAL	

f. Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

(dalam jutaan rupiah)

		31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2017	
No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Total Eksposur	-	16,817,831	-	14,781,970

	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6,747,280	-	-	16,583,432	-	-
	6,747,280	-	-	16,583,432	-	-
	-	-	-	-	-	-
	391,032	181,600	181,600	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	5,877,458	1,429,804	1,429,804	2,944,215	837,670	837,670
	4,857,917	978,455	978,455	2,114,790	422,958	422,958
	1,019,541	451,349	451,349	829,425	414,712	414,712
	-	-	-	-	-	-
	1,338,893	1,338,893	1,338,893	-	-	-
			92,268			70,834
	14,354,663	2,950,298	3,042,566	19,527,647	837,670	908,504
	-	-	-	-	-	-

	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-			-	-	
	-	-	-	-	-	-

	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2017		
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR	
	(3)	(4)	(5)	(6)	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
		-		-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
uritisasi aset bagi bank umum.		-	-	-	
	-	-	-	-	

g. Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	690,764,915	591,391,731
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL		

Manajemen Risiko

Tabel 14 : Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 DESEMBER 2018				31 DESEMBER 2017			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	699	8,732	699	8,732	500	6,248	500	6,248
	b. Risiko Umum	15,152	189,397	21,926	274,082	4,296	53,697	7,965	99,559
2	Risiko Nilai Tukar	870,448	10,880,601	875,721	10,946,508	546,329	6,829,117	550,456	6,880,697
3	Risiko Ekuitas*)			-	-				-
4	Risiko Komoditas*)			-	-				-
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	886,298	11,078,730	898,346	11,229,322	551,125	6,889,062	558,920	6,986,504

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Tabel 15 : Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

2018	NILAI LCR (%)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Secara Individu	217.77%	217.46%	196.25%	217.44%
Bank Secara Konsolidasi	218.25%	214.98%	199.47%	217.97%

2017	NILAI LCR (%)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Secara Individu	211.47%	222.14%	230.14%	241.97%
Bank Secara Konsolidasi	209.56%	222.36%	231.46%	243.65%

Manajemen Risiko

Tabel 16.a. : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	79,045,252	11,856,788	148,209,848	69,849,455	10,477,418	130,967,728
	Total	79,045,252	11,856,788	148,209,848	69,849,455	10,477,418	130,967,728

Tabel 16.b. : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	81,188,816	12,178,322	152,229,031	71,691,108	10,753,666	134,420,827
	Total	81,188,816	12,178,322	152,229,031	71,691,108	10,753,666	134,420,827
	Agro	464,178	69,627	870,333	373,808	56,071	700,890
	BBS	1,679,386	251,908	3,148,850	1,467,845	220,177	2,752,209

Manajemen Risiko

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)		
Modal Inti Utama (Common Equity Tier I) / CET 1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor		
1.	Saham biasa (termasuk *stock surplus*)	6,522,201
2.	Laba ditahan	157,490,859
3.	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	14,925,205
4.	Modal yang termasuk *phase out* dari CET 1	N/A
5.	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	1,930,927
6.	CET 1 sebelum *regulatory adjustment*	180,869,192
	CET 1 : Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)	
7.	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	0
8.	*Goodwill*	468,722
9.	Aset tidak berwujud lainnya (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	8,076
10.	Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*	N/A
11.	*Cash-flow hedge reserve*	N/A
12.	*Shortfall of provisions to expected losses*	N/A
13.	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	0
14.	Peningkatan / penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	0
15.	Aset pensiun manfaat pasti	N/A
16.	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di neraca)	N/A
17.	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	0
18.	Investasi pada modal bank, entiatas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A
19.	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan (jumlah diatas batasan 10%)	N/A
20.	Mortgage servicing rights	0
21.	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10% net dari kewajiban pajak)	N/A
22.	Jumlah melebihi batasan 15% dari :	N/A
23.	investasi signifikan pada saham biasa financials	N/A
24.	Mortgage servicing rights	N/A
25.	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A
26.	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	8,034,389
26a.	Selisih PPA dan CKPN	71,755
26b.	PPA atas aset non produktif	36,851
26c.	Aset Pajak Tangguhan	4,984,023
26d.	Penyertaan	2,929,417
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	0
26.f	Eksposur sekuritisasi	0
26.g	Lainnya	12,344

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)		
27.	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT1 dan Tier 2 lebih kecil daripapa faktor pengurangnya.	0
28.	Jumlah pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap CET 1	8,511,188
29.	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	172,358,004
	Modal Inti Tambahan (AT 1) : instrumen	
30.	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk *stock surplus*)	0
31.	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	0
32.	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	0
33.	Modal yang termasuk *phase out* dari AT 1	N/A
34.	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	0
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	N/A
36.	Jumlah AT 1 sebelum *regulatory adjustment*	0
	Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)	
37.	Invetasi pada instrumen AT 1 sendiri	N/A
38.	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain.	0
39.	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A
40.	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diiperkenakan)	N/A
41.	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	
41.a	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	0
42.	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	0
43.	Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT 1	0
44.	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	0
45.	Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)	172,358,004
	Modal Pelengkap (Tier 2) : Instrumen dan cadangan	
46.	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh bank (termasuk *stock surplus*)	1,450,000
47.	Modal yang termasuk *phase out* Tier 2	N/A
48.	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	0
49.	Modal yng diterbitkan entitas anak yang termasuk *phase out*	N/A
50.	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR Risiko Kredit	8,616,154
51.	Jumlah Modal Pelengkap (Tier2) sebelum faktor pengurang	10,066,154
	Modal Pelengkap (Tier 2) : Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)	
52.	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri	N/A
53.	Kepemilikan silang pada *instrumen Tier 2* pada entitas lain	0

Manajemen Risiko

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)		
54.	Investasi pada modal bank, entiatas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A
55.	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi *short* yang diiperkenakan)	N/A
56.	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	
56.a	Sinking Fund	0
56.b	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain	36,847
57.	Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap	36,847
58.	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah *regulatory adjustment*	10,029,307
59.	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	182,387,310
60.	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	854,223,268
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)	
61.	Rasio Modal Inti Utama (CET 1) - persentase terhadap ATMR	20.18%
62.	Rasio Modal Inti (Tier 1) - persentase terhadap ATMR	20.18%
63.	Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR	21.35%
64.	Tambahan modal (buffer) - persentase terhadap ATMR	
65.	*Capital conservation Buffer*	1.88%
66.	*Countercyclical Buffer*	0.00%
67.	*Capital surcharge* untuk D-SIB	1.88%
68.	Untuk bank umum konvensional: Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (Buffer) – persentase terhadap ATMR Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi Buffer.	
	National minimal (jika berbeda dari Basel 3)	
69.	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A
70.	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A

Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

31 DESEMBER 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)		
71.	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A
	Jumlah dibawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)	
72.	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	N/A
73.	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A
74.	Mortgage servicing rights (net dari kewajiban pajak)	N/A
75.	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A
	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2	
76.	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A
77.	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A
78.	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	N/A
79.	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A
	Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 sd 1 Jan 2022)	
80.	Cap pada CET 1 yang termasuk *phase out*	N/A
81.	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A
82.	Cap pada AT1 yang termasuk *phase out*	N/A
83.	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	N/A
84.	Cap pada Tier2 yang termasuk *phase out*	N/A
85.	Jumlah yang dikecualikan dari T2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A

Note :
1) Diisi oleh Bank berdasarkan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara komponen permodalan sesuai Format Standar Pengungkapan Perhitungan Permodalan dengan pos-pos yang sama dalam Neraca yang dipublikasikan (hanya ditampilkan jika terdapat rekonsiliasi sebagaiman pada Bagian 2).

Manajemen Risiko

Rekonsiliasi Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS		Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		BI	Posisi 31-Dec-18	Posisi 31-Dec-18
ASET				
1.	Kas	100	27,170,584	27,421,625
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	131,360,496	139,433,897
3.	Penempatan pada Bank Lain	130	28,378,628	28,583,614
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	135	469,342	485,810
5.	Surat Berharga			
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	138	1,978,938	3,762,448
	b. Tersedia untuk dijual	143	92,580,009	98,560,399
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	34,733,979	46,763,950
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	145	27,442,690	27,442,690
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	160	36,703,287	36,703,287
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	164	9,396,553	9,396,553
8.	Tagihan Akseptasi	166	11,583,506	11,643,003
9.	Kredit			
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-	-
	b. Tersedia untuk dijual	172	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	173	-	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	175	804,356,813	820,028,537
10.	Pembiayaan Syariah	174	-	19,681,260
11.	Piutang Sewa Pembiayaan		-	3,321,846
12.	Penyertaan	200	9,721,187	460,146
	Diakui dalam CET 1 (Sebagai pengurang)			(2,929,417)
	Diakui dalam perhitungan ATMR			1,646
	Penyertaan Perusahaan Anak			298
	Tidak diakui dalam CET 1			3,387,618
13.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-			
	a. Surat Berharga	201	-	(758)
	b. Kredit	202	(34,569,880)	(35,017,981)
	c. Lainnya	206	-	(50)
14.	Aset Tidak Berwujud	212		
	Goodwill		-	490,464
	Diakui dalam CET 1 (Sebagai pengurang)			(468,722)
	Diakui dalam CET 1 (Sebagai pengurang)			(8,076)
	Tidak diakui dalam CET 1			967,263
	Aset Tidak Berwujud Lainnya			
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -/-	213	-	(21,742)

Rekonsiliasi Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS		Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		BI	Posisi 31-Dec-18	Posisi 31-Dec-18
15.	Aset Tetap dan Inventaris	214	36,448,565	37,925,236
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	215	(10,383,777)	(11,010,377)
16.	Aset non produktif			
	a. Properti Terbengkalai	217	21,322	21,322
	b. Aset yang diambil alih	218	44,440	231,783
	c. Rekening Tunda	219	-	-
	d. Aset Antar Kantor			
17.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Keuangan -/-	225	-	-
18.	Sewa Pembiayaan	227	-	-
19.	Aset Pajak Tangguhan	228	4,772,857	5,114,653
	Diakui dalam Tier 1			4,984,023
	Tidak diakui dalam Tier 1			130,630
20.	Aset Lainnya	230	21,990,500	25,476,677
	TOTAL ASET		1,234,200,039	1,296,898,292
LIABILITAS DAN EKUITAS				
1.	Giro	300	176,404,505	178,097,981
2.	Tabungan	320	378,908,837	379,918,705
3.	Simpanan Berjangka	330	342,719,222	357,413,513
4.	Dana Investasi revenue sharing		-	28,838,538
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	218,788	218,788
6.	Pinjaman dari Bank Lain	350	9,771,783	9,798,567
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif	351	327,892	332,343
8.	Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	352	37,379,394	37,379,394
9.	Utang Akseptasi	353	11,583,506	11,643,003
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	355	31,074,676	31,190,215
11.	Pinjaman yang diterima		39,856,808	41,915,043
	a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai Modal		500,000	500,000
	b. Pinjaman yang diterima Lainnya	360	39,356,808	41,415,043
	Diakui dalam Tier 2			1,450,000
	Tidak diakui dalam Tier 2			39,965,043
12.	Setoran Jaminan	370	14,684	17,800
13.	Liabilitas Antar Kantor			
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	393	-	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	394	-	-
14.	Liabilitas Pajak Tangguhan	396	-	-
15.	Liabilitas Lainnya	400	24,921,364	34,859,071
	TOTAL LIABILITAS		1,053,181,459	1,111,622,962

Manajemen Risiko

Rekonsiliasi Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS		Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		BI	Posisi 31-Dec-18	Posisi 31-Dec-18
17.	Modal Disetor			
	a. Modal dasar	421	15,000,000	15,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(8,832,709)	(8,832,709)
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-		(2,418,948)	(2,418,948)
18.	Tambahan modal disetor			
	a. Agio	431	2,773,858	2,773,858
	b. Disagio -/-	432	-	(81,195)
	e. Lainnya		425,334	437,641
	i. Faktor penambah	453		
	1) Waran yang diterbitkan			
	a) Berbasis saham biasa		-	-
	b) Lainnya		-	-
	2) Opsi Saham			
	a) Berbasis saham biasa		-	10,969
	b) Berbasis saham biasa yang khusus diterbitkan dalam rangka program kompensasi pegawai/manajemen		-	-
	c) Lainnya		-	-
	3) Lainnya		425,334	426,673
	ii. Faktor pengurang -/-	454	-	-
	Lainnya		-	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya			
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan		49,220	49,850
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(1,919,488)	(2,070,378)

Rekonsiliasi Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS		Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		BI	Posisi 31-Dec-18	Posisi 31-Dec-18
	i. Faktor penambah	440	(1,919,488)	(2,070,378)
	ii. Faktor pengurang -/-	445	-	-
	Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yg dilaporkan di CET 1		(1,919,488)	(1,971,392)
	Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yg tidak dilaporkan di CET 1		-	(98,986)
d.	Selisih penilaian kembali aset tetap		13,824,692	13,824,692
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti		1,143,354	1,154,343
23.	Cadangan			
a.	Cadangan Umum	451	3,022,685	3,022,685
24.	Laba/rugi			
a.	Tahun-tahun lalu	461	126,248,607	127,689,218
	Diakui dalam Tier 1			125,608,444
	Tidak diakui dalam Tier 1			2,080,774
b.	Tahun berjalan	465	31,701,975	32,418,486
	Diakui dalam Tier 1			31,882,415
	Tidak diakui dalam Tier 1			536,071
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		181,018,580	182,967,543
25.	Kepentingan minoritas (*minority interest*)	398	-	2,307,788
	Diakui dalam CET 1			1,930,927
	Tidak diakui dalam CET 1			376,861
	TOTAL EKUITAS		181,018,580	185,275,331
	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL		1,234,200,039	1,296,898,292

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Penerbit	BRI	Diisi dengan penerbit dari instrumen
2.	Nomor identifikasi	BBRI	Diisi dengan *unique identification* atas penerbitan instrumen tersebut (misalnya nomor yang tercatat dibursa ISIN, dll)
3.	Hukum yang digunakan	Indonesia	Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya : hukum Indonesia
	Perlakuan instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	Modal Disetor	
4.	Pada saat masa transisi	N/A	PBI tidak mengadopsi masa transisi
5.	Setelah masa transisi	N/A	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; AT2; atau Tidak *Eligible*
6.	Apakah instrumen *eligible* untuk Solo/Group atau Group dan Solo	N/A	Diisi dengan pilihan : Solo; Group; atau Group dan Solo
7.	Jenis instrumen	Saham biasa	Diisi dengan jenis instrumen dengan pilihan; Saham Biasa; Saham Preferen; Surat Berharga Subordinasi; Pinjaman Subordinasi; surat berharga atau pinjaman lainnya
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM		Diisi dalam Jutaan Rupiah
9.	Nilai Par dari instrumen	6,167,290.50	Diisi dalam Jutaan Rupiah
10.	Klasifikasi akuntansi	Ekuitas	Diisi dengan pilihan :Ekuitas, Liabilitas - *Amortised Cost*; Liabilitas - Fair Value Option; Non-Pengendali
11.	Tanggal penerbitan	10-Nov-03	Diisi : hh/bb/yyyy
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Diisi dengan pilihan : Perpetual; Dengan Jatuh Tempo
13.	Tanggal jatuh tempo	N/A	Untuk instrumen dengan jatuh tempo,Diisi tanggal jatuh tempo; hh/bb/yyyy, untuk instrumen perpetual Diisi : Tidak ada tanggal jatuh tempo
14.	Eksekusi *call option* atas persetujuan Pengawas Bank	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
15.	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (bila ada)	Tidak	Diisi dengan tanggal *call option* (hh/bb/yyyy), persyaratan *Call Option* lainnya dan jumlah penarikan (Dalam juta rupiah)
16.	*Subsequent call option*	N/A	Diisi bila da fitur jumlah *subsequent call option* (berapa kali *call option* dalam dilakukan)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
	Kupon/dividen	N/A	
17.	*Fixed* atau *floating*	N/A	Diisi dengan pilihan :
18.	Tingkat dari kupon *rate* atau *index* lain yang menajdi acuan	N/A	Diisi dengan tingkat dari kupon atau *index* yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau dividen
19.	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
20.	*Fully discretionary*, *partial* atau *mandatory*	N/A	Apakah bank memiliki hak penuh atau *partial* untuk membatalkan kupon atau dividen atau tidak dapat mebatalkan kupon/dividen.
			Diisi dengan pilihan : *Fully discretionary*; *Partial*ly Discretionary; *Mandatory*
21.	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain	N/A	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
22.	*Noncumulative* atau *cumulative*	N/A	Diisi dengan pilihan : *Noncumulative*; atau *Cumulative*
23.	*Convertible* atau non-*convertible*	N/A	Diisi dengan pilihan : *Convertible*; Non-*convertible*
24.	Jika, *convertible*, sebutkan *trigger point*-nya	N/A	Diisi dengan kondisi (*trigger point*) kapan instrumen dikonversi , termasuk point of *non-viability*.
25.	Jika, *convertible*, apakah seluruh atau sebagian	N/A	Diisi dengan penjelasan untuk setiap *trigger point* apakah instrumen akan : (i) pasti dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau (iii) pasti dikonversi sebagian
26.	Jika dikonversi, bagaiman *rate* konversinya	N/A	Diisi dengan penjelasan *rate* konversi atas instrumen
27.	Jika dikonversi, apakah *mandatory* atau *optional*	N/A	Diisi dengan penjelasan *rate* konversi atas instrumen
28.	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	Diisi dengan pilihan : *Mandatory*; *Optional*; N/A
29.	Jika dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into*	N/A	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; T2; atau N/A
30.	Fitur *write-down*	N/A	Diisi dengan penjelasan *issuer of instrument it converts into*
31.	Jika *write-down* sebutkan trigger-nya	N/A	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
32.	Jika *write-down* apakah penuh atau sebagian	N/A	Diisi dengan penjelasan kondisi atau *trigger point* fitur write-dow, termasuk ponit of *non-viability*.
33.	Jika *write-down* permanen atau temporer	N/A	Diisi dengan pilihan : Permanen; atau Temporer
34.	Jika *write-down* temporer, jelaskan mekanisme *write-up*	N/A	Diisi dengan penjelasasn mekanisme *write-up*
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	N/A	Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi
36.	Apakah transisi untuk fitur yang *non-compliant*	N/A	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
37.	Jika Ya, jelaskan fitur *non-compliant*	N/A	Diisi dengan penjelasan fitur yang *non-compliant*
1.	Penerbit	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK	Diisi dengan penerbit dari instrumen
2.	Nomor identifikasi	IDA000091201 (ISIN CODE)	Diisi dengan *unique identification* atas penerbitan instrumen tersebut (misalnya nomor yang tercatat dibursa ISIN, dll)
3.	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya : hukum Indonesia
	Perlakuan instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4.	Pada saat masa transisi	-	PBI tidak mengadopsi masa transisi
5.	Setelah masa transisi	AT2	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; AT2; atau Tidak *Eligible*
6.	Apakah instrumen *eligible* untuk Solo/Group atau Group dan Solo	Solo	Diisi dengan pilihan : Solo; Group; atau Group dan Solo
7.	Jenis instrumen	Obligasi Subordinasi	Diisi dengan jenis instrumen dengan piliha; Saham Biasa; Saham Preferen; Surat Berharga Subordinasi; Pinajman Subordinasi; surat berharga atau pinjaman lainnya
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	50%	Diisi dalam Jutaan Rupiah
9.	Nilai Par dari instrumen	100%	Diisi dalam Jutaan Rupiah
10.	Klasifikasi akuntansi	Liabilitas	Diisi dengan pilihan :Ekuitas, Liabilitas - *Amortised Cost*; Liabilitas - Fair Value Option; Non-Pengendali

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
11.	Tanggal penerbitan	6/26/2018	Diisi : hh/bb/yyyy
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo		Diisi dengan pilihan : Perpetual; Dengan Jatuh Tempo
13.	Tanggal jatuh tempo	6/26/2023	Untuk instrumen dengan jatuh tempo,Diisi tanggal jatuh tempo; hh/bb/yyyy, untuk instrumen perpetual Diisi : Tidak ada tanggal jatuh tempo
14.	Eksekusi *call option* atas persetujuan Pengawas Bank	-	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
15.	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (bila ada)	-	Diisi dengan tanggal *call option* (hh/bb/yyyy), persyaratan *Call Option* lainnya dan jumlah penarikan (Dalam juta rupiah)
16.	*Subsequent call option*	-	Diisi bila da fitur jumlah *subsequent call option* (berapa kali *call option* dalam dilakukan)
	Kupon/dividen	7.70%	
17.	*Fixed* atau *floating*	*Fixed*	Diisi dengan pilihan : - *Fixed* : bila kupon atau dividen adalah *fixed* selama jangka waktu instrumen; - *Floating* : bila kupon atau dividen adalah *floating* selama jangka waktu instrumen; - *Fixed* to *floating* : bila kupon/ dividen saat ini adalah *fixed*, namun bisa berubah menjadi *floating* dimasa mendatang atau ; - *Floating* to *fixed* : bila kupon/ dividen saat ini adalah *floating*, namun bisa berubah menjadi *fixed* dimasa mendatang.
18.	Tingkat dari kupon *rate* atau *index* lain yang menajdi acuan	-	Diisi dengan tingkat dari kupon atau *index* yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau dividen
19.	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	-	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
20.	*Fully discretionary*, *partial* atau *mandatory*	*Fully discretionary*, *partial* atau *mandatory* call by OJK	Apakah bank memiliki hak penuh atau *partial* untuk membatalkan kupon atau dividen atau tidak dapat mebatalkan kupon/dividen.

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
			Diisi dengan pilihan : *Fully discretionary*; *Partial*ly Discretionary; *Mandatory*
21.	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
22.	*Noncumulative* atau *cumulative*	cummulative	Diisi dengan pilihan : *Noncumulative*; atau *Cumulative*
23.	*Convertible* atau non-*convertible*	Non -*convertible*	Diisi dengan pilihan : *Convertible*; Non-*convertible*
24.	Jika, *convertible*, sebutkan *trigger point*-nya	-	Diisi dengan kondisi (*trigger point*) kapan instrumen dikonversi , termasuk point of *non-viability*.
25.	Jika, *convertible*, apakah seluruh atau sebagian	-	Diisi dengan penjelasan untuk setiap *trigger point* apakah instrumen akan : (i) pasti dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau (iii) pasti dikonversi sebagian
26.	Jika dikonversi, bagaiman *rate* konversinya	-	Diisi dengan penjelasan *rate* konversi atas instrumen
27.	Jika dikonversi, apakah *mandatory* atau *optional*	-	Diisi dengan penjelasan *rate* konversi atas instrumen
28.	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	-	Diisi dengan pilihan : *Mandatory*; *Optional*; N/A
29.	Jika dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into*	-	Diisi dengan pilihan : CET1; AT1; T2; atau N/A
30.	Fitur *write-down*	Ya	Diisi dengan penjelasan *issuer of instrument it converts into*
31.	Jika *write-down* sebutkan trigger-nya	Ya	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian
No.	Pertanyaan	Jawaban	
32.	Jika *write-down* apakah penuh atau sebagian	1. rasio modal inti utama (CET 1) Bank induk secara konsolidasi <= 5,125% 2. terdapat rencana otoritas untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank induk yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan 3. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan *write down*.	Diisi dengan penjelasan kondisi atau *trigger point* fitur *write-down*, termasuk ponit of *non-viability*.
33.	Jika *write-down* permanen atau temporer	Permanen/Temporer	Diisi dengan pilihan : Permanen; atau Temporer
34.	Jika *write-down* temporer, jelaskan mekanisme *write-up*	Perintah OJK	Diisi dengan penjelasasn mekanisme *write-up*
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun	Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi
36.	Apakah transisi untuk fitur yang *non-compliant*	Tidak	Diisi dengan pilihan : Ya; atau Tidak
37.	Jika Ya, jelaskan fitur *non-complain*	Tidak	Diisi dengan penjelasan fitur yang *non-compliant*

Pedoman pengisian	
1.	Setiap instrumen permodalan yang diterbitkan bank harus diungkapkan dalam Pengungkapan Rincian Fitur Permodalan.
2.	Pengungkapan tersebut menggunakan format yang disediakan oleh Basel, dan merupakan standar minimum. Bank dapat menambahkan fitur-fitur penting lain dalam bank berdasarkan penilaian bank atau pengawas Bank fitur tersebut penting untuk diungkapkan.
3.	Bank diminta untuk mengkinikan pengungkapan tersebut bila terdapat perubahan fitur dari instrumen permodalan, misalnya bila terdapat penerbitan instrumen baru, permbayaran, penarikan atau konversi atau *write down*, atau perubahan lain yang material dari intrumen permodalan yang ada.
4.	Dalam hal terdapat fitur yang tidak *applicable* atau tidak relevan, maka diisi dengan N/A.
5.	Penjelasan definisi pos-pos dalam Pengungkapan Rincian Fitur Permodalan dapat dilihat pada Annex 3 pada dokumen *Composition of Capital Disclosure Requirements* yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, Juni 2012.

Manajemen Risiko

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 18	
	BRI	Konsolidasi
I. MODAL INTI (Tier 1)	164,924,546	172,358,004
1. Modal Inti Utama (CET 1)	164,924,546	172,358,004
1.1. Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)	6,111,861	6,111,861
a. Saham biasa	6,111,861	6,111,861
b. Saham preferen	0	0
1.2. Cadangan Tambahan Modal *)	173,305,084	172,705,454
1.2.1. Faktor Penambah :	175,257,520	174,797,796
1.2.1.1. Pendapatan Komprehensif Lainnya	13,873,912	13,873,912
1.2.1.1.1. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	49,220	49,220
1.2.1.1.2. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0	0
1.2.1.1.3. Saldo surplus revaluasi aset tetap	13,824,692	13,824,692
1.2.1.2. Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	161,383,608	160,923,885
1.2.1.2.1. Agio	410,340	410,340
1.2.1.2.2. Cadangan Umum	3,022,685	3,022,685
1.2.1.2.3. Laba tahun-tahun lalu	126,248,608	125,608,444
a. Laba tahun lalu	126,248,608	125,608,444
b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan	0	0
c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	0	0
1.2.1.2.4. Laba tahun berjalan	31,701,975	31,882,415
a. Laba tahun berjalan	31,701,975	31,882,415
1.2.1.2.5. Dana Setoran Modal	0	0
1.2.1.2.6. Lainnya	0	0
1.2.2. Faktor Pengurang :	1,952,436	2,092,342
1.2.2.1. Pendapatan Komprehensif Lainnya	1,919,488	1,971,392
1.2.2.1.1. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	0	0
1.2.2.1.2. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,919,488	1,971,392

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 18	
	BRI	Konsolidasi
1.2.2.2. Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	32,948	120,950
1.2.2.2.1. Disagio	0	0
1.2.2.2.2. Rugi tahun-tahun lalu	0	0
1.2.2.2.3. Rugi tahun berjalan	0	0
1.2.2.2.4. Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	0	71,755
1.2.2.2.5. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*	0	0
1.2.2.2.6. PPA aset non produktif yang wajib dibentuk	32,948	36,851
1.2.2.2.7. Lainnya	0	12,344
1.3. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	0	1,930,927
1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama *)	14,492,399	8,390,238
1.4.1. Perhitungan pajak tangguhan	4,772,857	4,984,023
1.4.2. *Goodwill*	0	468,722
1.4.3. Selisih aset tidak berwujud lainnya	0	8,076
1.4.4. Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	9,719,542	2,929,417
1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	0	0
1.4.6. Eksposur sekuritisasi	0	0
1.4.7. Faktor pengurang modal inti utama lainnya	0	0
2. Modal Inti Tambahan/*Additional Tier* 1 (AT 1) *)	0	0
2.1. Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1	0	0
2.2. Agio/Disagio	0	0
2.3. Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1dan Tier 2 pada bank lain *)	0	0

Sistem Pengendalian Internal

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) BRI adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Selain itu SPI BRI juga mengacu kepada:

1. Kode Etik, Budaya Kepatuhan, Kebijakan GcG, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, Strategi Anti*Fraud* dan Kebijakan WBS
2. Struktur Organisasi, Penetapan Formasi & Daftar Uraian Jabatan Seluruh Unit Kerja.
3. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional.
4. Kebijakan & Pedoman Operasional Manajemen Risiko Atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru.
5. Buku Pedoman Operasional.
6. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Organisasi.
7. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang & Rencana Bisnis Bank.
8. Kebijakan Tata Kelola & Manajemen Risiko TI.
9. Kebijakan Umum Teknologi Informasi.
10. Kebijakan Umum & Pedoman Pelaksanaan Kredit.
11. Ketentuan Pembukuan dan Verifikasi Serta Kewenangan User di BRINETS Piagam Audit Intern.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Dengan COSO

Bank BRI telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan *COSO IC framework* (*Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring*).

Internal Environment

Merupakan elemen pertama dari struktur pengendalian intern BRI mencakup komitmen, kebijakan, perilaku termasuk kepedulian Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Dewan Komisaris BRI memastikan bahwa Direksi BRI telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern melalui pertemuan berkala secara berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pekerja.

Dalam melakukan pengawasan, manajemen BRI membentuk *culture* pengendalian meliputi:

1. Pembentukan struktur organisasi BRI yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan *human capital* BRI mencakup perencanaan, rekruitmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja.
3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* BRI dan Kode Etik BRI yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*.

Objective Setting

Bank BRI telah menerapkan objective setting perusahaan melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) pada setiap unit kerja yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. KPI disosialisasikan kepada pekerja dan di*review* secara berkala untuk mencapai target dan sasaran perusahaan.

Event Indication

Bank BRI telah menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam identifikasi kejadian dan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Penerapan RCSA dilakukan oleh seluruh unit kerja BRI dalam penetapan profil risiko unit kerja tersebut atas kejadian dan risiko yang dihadapi untuk dilakukan evaluasi.

Risk Assessment

Merupakan rangkaian kesadaran seluruh pekerja BRI terhadap budaya sadar risiko meliputi tindakan evaluasi, menilai dan memitigasi risiko. Penjelasan lebih rinci terkait Sistem pengendalian internal terhadap seluruh jenis risiko Bank disampaikan pada pilar 4 Bab Manajemen Risiko.

Sistem Pengendalian Internal

Bank BRI melakukan evaluasi terhadap profil risiko secara periodik sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam pelaksanaan manajamen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI melakukan pengelolaan termasuk penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko kredit
   Penilaian dilakukan dengan internal model menggunakan model standard yaitu menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing – masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitasnya. Selain itu, serangkaian stress test juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi stress.
2. Risiko pasar
   Dilakukan penilaian secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dengan menghitung risiko pasar meliputi pendekatan dengan metode standar dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA dan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil maturity surat berharga. Pendekatan dengan metode standar dilakukan dengan melakukan perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas
   Identifikasi, pengukuran dan pemantauan dilakukan melalui *dashboard* profil likuiditas harian sedangkan pengendalian dilakukan melalui *protocol liquidity contigency plan*. Penilaian risiko likuiditas meliputi penilian rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, NSFR dan LCR, penetapan *limit* risiko likuiditas dan *stress test*.
4. Risiko Operasional
   Menilai risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum
   Meliputi penilaian terhadap risiko yang disebabkan adanya kelemahan yuridis meliputi tuntutan hukum, ketiadaan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.
6. Risiko Strategik
   Penilaian meliputi penetapan dan pelaksanaan startegi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif pada bank terhadap perubahan eksternal.
7. Risiko Reputasi
   Meliputi risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Pengukuran bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan risiko reputasi yang dihadapi BRI. Penilaian meliputi parameter berupa pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank dan frekuensi serta materialitas pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.
8. Risiko Kepatuhan
   Merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan terhadap parameter jenis, signifikansi, nominal dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
9. Risiko Asuransi
   Menilai risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.
10. Risiko Transaksi Intra Group
    Menilai risiko akibat ketergantunag suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Selain melakukan penilaian risiko secara berkala, manajemen juga melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan *Early Warning System* pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

Risk Response

Manajemen melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan *Early Warning System* pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

Control Activities

Mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan suatu risiko pada semua tingkatan organisasi dan berbagai proses bisnis yang ada di BRI. Aktivitas pengendalian dapat membantu Direksi dan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bentuk aktivitas pengendalian BRI antara lain:

1. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh pekerja BRI di semua jenjang organisasi. Aktivitas pengendalian BRI tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur BRI seperti yang tertuang dalam Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BRI. Sistem pengendalian pada setiap proses bisnis, meliputi:
   a. Penerapan fungsi MCS (*maker*, *checker*, *signer*) dalam aktivitas otorisasi dan verifikasi.
   b. Penerapan *segregation of duties* berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
   c. Penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus.
   d. Penerapan *three line of defense* untuk aktivititas pertahanan berlapis.
2. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi:
   a. Pelaksanan Kaji Ulang Manajemen (Top Management *Reviews*)
   b. Kegiatan pengendalian pada penerapan Manajemen Risiko, meliputi:
      1) Pengendalian risiko kredit meliputi prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur meminimalkan kerugian kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur penghapusbukuan kredit bermasalah.
      2) Pengendalian risiko pasar meliputi penyusunan disain manajemen risiko pasar, menyusun dan menganalisa laporan berkala atas output yang dihasilkan model internal seperti analisa laporan harian posisi devisa netto, laporan eksposur risiko pasar, pelaksanaan forum Market *Risk Management Committe*e dan forum Asset & Liability Committe (ALCO).
      3) Pengendalian risiko likuiditas meliputi *Protocol Liquidity Contigency Plan*.
      4) Pengendalian risiko operasional meliputi prosedur asesmen produk, *Protocol Liquidity Contigency Plan* untuk kejadian yang bersifat katastrofik.
      5) Pengendalian risiko hukum dengan melakukan telaah terhadap aspek hukum pada produk dan aktivitas baru.
      6) Pengendalian risiko st*rate*gik tertuang pada kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang, Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
      7) Pengendalian risiko reputasi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI mengenai Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
      8) Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap regulasi eksternal dan dilakukan analisa dampak bagi perusahaan untuk selanjurnya dituangkan pada setiap ketentuan internal perusahaan.
      9) Pengendalian risiko asuransi sebagai bagian dari risiko yang melekat pada BRI sebagai entitas utama yang membawahi perusahaan anak yang bergerak pada bidang asuransi adalah melalui pelaksanaan Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak.
   c. Pengendalian risiko intra grup dilaksanakan oleh Desk Subsidiary yang ditunjuk oleh manajemen sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Information & Communication

Bank BRI telah memiliki sistem informasi yang relevan dan berkualitas terkait kondisi keuangan, kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan,

kondisi pasar, dan kondisi lainnya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Monitoring

Meliputi proses penilaian secara berkelanjutan atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi struktur pengandalian intern dan kinerja manajemen telah dilaksanakan dan berfungsi. *Monitoring* sistem pengendalian intern BRI dilakukan melalui *Three line of defenses,* yaitu:

1. 1st *line of defense* selaku *risk owner* yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi (a.l.Unit Kerja Operasional)
2. 2nd *line of defense* yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional (a.l.Jajaran MR Kantor Pusat & Wilayah, Divisi Kepatuhan dan Divisi Kebijakan & Prosedur).
3. 3rd *line of defense* yaitu Unit Kerja yang melakukan *assurance*. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas *monitoring* sistem pengendalian intern.

Hasil pelaksanaan pengawasan dan *monitoring* SKAI tehadap sistem pengendalian intern disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Elemen Sistem Pengendalian Internal

BRI telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen :

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BRI antara lain 1st *line of defense* (Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI), 2nd *line of defense* (Jajaran Manajemen Risiko termasuk Fungsi Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan), dan 3rd *line of defense* (Jajaran SKAI termasuk Resident Auditor Kanca dan Resident Auditor Unit).

Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Implementasi Pengendalian Internal BRI mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017.

Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian

Direksi dan Komisaris telah berperan aktif melakukan pegawasan dan membentuk budaya pengendalian di perusahaan.

a. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
b. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh seluruh pekerja.

Adapun implementasi dari pengawasan oleh manajemen, diantaranya:

a. BRI telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank. Dewan Komisaris ikut berperan dalam menetapkan tingkat toleransi risiko perusahaan.
b. BRI memiliki struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. BRI telah memiliki arsitektur kebijakan yang didalamnya terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional.
d. Melakukan *monitoring* terhadap perbaikan temuan audit internal dan eksternal.
e. Melaksanakan komunikasi pada seluruh jenjang organisasi secara berkala, termasuk komunikasi antara Direksi dan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

f. Pemantauan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
g. Pelaksanaan Kaji Ulang

Budaya pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pengendalian intern. Adapun implentasinya meliputi:

a. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh seluruh pekerja, melalui:
   1) Aplikasi BRIPEDIA
   2) Aplikasi BRISHARE
   3) Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS
b. Kebijakan terkait Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* BRI, Kebijakan GCG BRI, Kode Etik BRI dan Pedoman Benturan Kepentingan yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
c. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan *human capital* BRI mencakup perencanaan, rekruitmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi, manajemen kinerja dan hukuman disiplin.
d. Penandatanganan pakta integritas dalam putusan bank.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

BRI secara periodik dan berkelanjutan melakukan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Penilaian risiko juga dilakukan oleh jajaran audit internal dalam pelaksanaan kegiatan audit melalui *risk based audit*. Identifikasi dan penilaian risiko secara lebih rinci disampaikan pada BAB Manajemen Risiko.

Pengendalian intern dilaksankan kaji ulang oleh SKAI setiap tahunnya melalui kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi BRI.

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Review*)

BRI secara berkala setiap tahunnya melaksanakan top level *review* terkait Strategi Anti *Fraud*. Hasil kaji ulang tersebut meliputi evaluai menyeluruh terkait pilar penerapan strategi anti *fraud* perusahaan sehingga dapat mendeteksi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

2. Kaji Ulang Operasional (*Functional Review*)

Satuan Kerja Audit Intern melakukan kegiatan *assurance* dan pemberian jasa konsultansi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan *corporate governance*. Kegiatan audit dilakukan secara berkala untuk setiap level Unit Kerja BRI. SKAI menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama, dan Komite Audit dengan tindasan kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh Auditee.

Selain pelaksanaan kegiatan audit, secara berkala SKAI BRI telah melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko dan penerapan Strategi Anti *Fraud*.

3. Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) menerapkan praktik - praktik pengendalian yang memadai sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko TI secara keseluruhan dengan memperhatikan diantaranya:

a. Hasil penilaian risiko.
b. Kriteria penanganan risiko dan rekomendasi bentuk penaganan risiko.
c. Ketentuan perundang-undangan dan persyaratan hukum atau kontrak lainnya.
d. Praktik-praktik pengendalian antara lain:
   1) Penerapan kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi termasuk alur kerjanya.
   2) Pengendalian intern yang efektif yang dapat memitigasi risiko dalam proses TI.
   3) Penetapan kebijakan, standar, prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan BRI untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaran dan penggunaan TI.
   4) Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas *Disaster Recovery Plan.*

5) Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.
6) Evaluasi kemampuan penyedia jasa TI untuk menjaga tingkat keamanan yang diterapkan oleh BRI dari kerahasiaan, integritas data dan ketersediaan informasi.
7) Pengawasan dan pemantauan sebagai tanggung jawab manajemen BRI dengan melakukan alih daya (*outsourching*) operasional TI kepada pihak penyedia jasa TI.
8) Pemakaian asuransi sebagai upaya dalam mitigasi potensi kerugian dalam penyelenggaraan TI.

4. Pengendalian Asset Fisik

Pengendalian aset fisik BRI tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL). KEMAL memuat kebijakan manajemen aktiva tetap dan pengelolaan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

5. Dokumentasi

Perseroan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut di-*update* secara berkala untuk menggambarkan kegiatan operasional Perseroan dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Akurasi dan ketersediaan dokumen juga dilaksanakan penilaian pada pelaksanaan audit oleh auditor intern.

Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties)

Pemisahan dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di seluruh jenjang organisasi dan seluruh kegiatan operasional. Implementasinya meliputi:

1. Penerapan fungsi *Dual Control* dalam kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan
2. Penetapan kewenangan *limit* dalam akses dan pemberian keputusan atas transaksi.
3. Menghindari pemberian tanggung jawab dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
4. Pemisahan fungsi *Maker, Checker, dan Signer* ke beberapa orang dalam mitigasi risiko operasional dan bisnis.

Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi

Bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing – masing pekerja. Implementasinya meliputi:

1. Sistem akuntansi telah didukung dengan penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
2. BRI memiliki sistem informasi yang memadai diantaranya BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), Loan Approval System (LAS) yang merupakan sistem informasi meliputi kegiatan usaha bank di bidang perkreditan, aplikasi BRIOPRA yang merupakan sistem informasi terkait manajemen risiko, aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA), Sistem Informasi *Human Capital* BRISTARS, dll.
3. BRI telah memiliki *Disaster Recovery Plan* dan sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang beresiko tinggi. Secara berkala dilakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat bekerja secara efektif.
4. Sistem Komunikasi dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* baik pihak ekstern maupun intern dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif.
   a. BRI telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang berisikan pedoman dalam memberikan layanan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
   b. Tersedia media komunikasi untuk sosialiasi kebijakan kepada seluruh pekerja (BRISHARE, BRIPEDIA dan Pusataka SDM).
   c. Pelaksanaan forum komunikasi (informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja) terkait informasi eksposur risiko, kinerja operasional, dan strategi perusahaan seperti Forum *Risk Management Committee*, Business Performance *Review*, Support Performance *Review*, Focus Group Discussion dan Forum Peningkatan Kinerja.

Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

BRI secara terus menerus melaksanakan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pengendalian intern baik yang dilakukan oleh unit kerja operasional maupun jajaran Satuan Kerja Audit Intern. SKAI telah melaksanakan pemantauan tehadap sistem pengendalian intern yang disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Reviu Sistem Pengendalian Internal 2018

BRI melakukan evaluasi efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan, baik yang dilakukan oleh fungsi 1st *line of defense* sebagai *risk owner* yang melakukan evaluasi secara terus menerus dalam kegiatan operasional bank, fungsi 2nd *line of defense* yakni jajaran Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang secara berkala memastikan kecukupan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan, serta fungsi 3rd *line of defense* yang melakukan kegiatan audit.

Jajaran Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan evaluasi kecukupan struktur pengendalian intern dilakukan dengan tujuan untuk menilai keandalan sistem pengendalian intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan secara memadai bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. Evaluasi kecukupan sistem pengendalian intern dilakukan melalui kajian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem atau mekanisme yang dikembangkan BRI dalam rangka mencapai tujuan kepatuhan, tujuan informasi dan tujuan operasional.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil evaluasi SKAI, Secara umum kecukupan struktur pengendalian intern BRI telah memadai dengan hasil evaluasi sbb:

1. Tujuan Kepatuhan
   Fungsi Kepatuhan BRI telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengujian prinsip kehati-hatian atas rencana kebijakan dan/atau keputusan BRI (termasuk produk dan/atau aktivitas baru).
   b. Dilaksanakan pemantauan dan tindak lanjut atas hasil pengujian prinsip kehati-hatian (*monitoring*).
   c. Dilaksanakan *review* terhadap kebijakan internal BRI.
   d. Dilaksanakan analisa dampak ketentuan eksternal.

   Seluruh hasil kegiatan tersebut di atas telah disampaikan secara berkala sebagai laporan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan BRI.

2. Tujuan Informasi
   BRI telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

   Lebih lanjut, BRI telah memiliki kebijakan tentang Pengelolaan Dokumen (administrasi dokumen, pengelolaan kontrol/ register, penyimpanan serta retensi dokumen). Disamping itu, BRI telah memiliki mekanisme terkait komunikasi kebijakan ke seluruh jenjang organisasi sebagai berikut:
   a. Divisi pembuat kebijakan (*policy owner*) dapat melakukan upload kebijakan pada aplikasi BRI Share (Knowledge Management).
   b. Terkait kebijakan bidang SDM, disosialisasikan melalui Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS.
   c. Terkait kebijakan bidang perkreditan dilakukan *upload* pada Aplikasi Bisnis Information System (BIS).
   d. Terkait bidang operasional, seluruh kebijakan yang disusun Divisi Kebijakan dan Prosedur dapat diakses melalui ftp://10.202.100.202.
   e. Terdapat Aplikasi BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM) yang dapat menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh Manajemen dan atau Unit Kerja BRI.

3. Tujuan Operasional
   BRI telah memiliki kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan usaha BRI, antara lain:
   a. Bidang operasional
      Telah disusun Buku Pedoman Operasional (BPO) dan kebijakan operasional lainnya sebagai pedoman bagi pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. BRI telah memiliki kebijakan pengelolaan aktiva tetap,

kebijakan pengadaan barang dan jasa.

b. Bidang perkreditan
   BRI telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan kebijakan kredit lainnya sebagai pedoman bagi Pejabat Kredit dalam melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman.
c. Bidang SDM
   BRI memiliki arsitektur *human capital*, kebijakan pengelolaan *human capital*, kebijakan pengembangan *human capital,* kebijakan penilaian kinerja dan remunerasi.
d. Bidang teknologi informasi
   Dalam rangka mengembangkan dan mengelola operasional teknologi informasi, BRI telah memiliki kebijakan teknologi informasi yang disusun dengan mengacu prinsip-prinsip IT *Governance*.

4. Tujuan Budaya Risiko
   BRI telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko, terdapat Fungsi Manajemen Risiko di masing-masing Unit Kerja yang bertanggungjawab mengkoordinasikan proses penerapan Manajemen Risiko di masing-masing Unit Kerja.

   BRI telah memiliki beberapa kebijakan, st*rate*gi, dan kerangka Manajemen Risiko antara lain:
   a. Kebijakan Umum Manajemen Risiko
   b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*)
   c. Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Kelapa Sawit
   d. Kebijakan Umum dan St*rate*gi Implementasi Keberlanjutan (*Sustainability*)

BRI telah memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan operasional melalui pengkinian buku *top risk issue* secara berkala yang disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Operasional. Dalam rangka pengelolaan risiko yang dihadapi, BRI didukung dengan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan *core banking system*, antara lain: BRIOPRA, LAS dan Guava.

Pernyataan Direksi dan Komisaris Atas Kecukupan Pengendalian Internal BRI

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa bahwa sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

Perkara Penting Yang Dihadapi Perseroan

Perkara hukum material yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan Hukum	Jumlah				
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial	PTUN	Pailit
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	469	35	7	2	1
2	Perkara/Permasalahan Hukum selesai (telah memiliki kekuatan hukum tetap)	294	14	12	3	0

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan:

1	**Perkara Gugatan Lelang**	
	Pokok Perkara	Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diajukan oleh Sdr. SM (Penggugat) Nomor: 366/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Bar tanggal 21 Juni 2017 dengan Pokok Gugatan sebagai berikut: Penggugat berdalil bahwa pada tahun 2001, kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Penggugat (melalui PT RBPI) adalah KMK Co. Menurun sebesar Rp700.000.000, KMK Eksport Co Menurun sebesar USD1.494.986, dan KMK Import dan PJI Co. Menurun sebesar USD1.350.000. Keseluruhan fasilitas kredit tersebut pada tahun 2001 apabila dinilai dengan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah pada saat itu adalah sebesar Rp11.042.000.000, namun pada saat Penggugat akan melunasi kredit tersebut pada tahun 2010 nilainya berubah menjadi Rp39.083.195.528. Sehingga Penggugat ybs pada saat mengajukan gugatan dimaksud mendalilkan bahwa sampai dengan saat gugatan tersebut didaftarnya ybs menganggap besaran hutang Kurs Mata Uang Asing milik ybs tetap menggunakan Kurs Nilai Tukar Rupiah yang sama dengan tahun yang sama pada saat ybs mengajukan kredit.
	Posisi Perkara	a. Terhadap perkara dengan pokok gugatan serupa sebelumnya telah didaftarkan oleh Sdr. SM kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor : 448/Pdt.G/2014 tanggal 9 September 2014 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 November 2015 dengan amar putusan yang pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya. b. Terhadap perkara perdata Nomor: 366/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Bar, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan dengan amar yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
	Status Penyelesaian	a. Terhadap Putusan Pengadilan Jakarta Barat dimaksud Penggugat mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. b. Terhadap Asset milik PT RBPI telah dilakukan viat eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
	Pengaruh terhadap Perusahaan	Potensi Kerugian akibat selisih Nilai Tukar Rupiah – USD dari tahun 2001 dengan Kurs Nilai Tukar Rupiah berjalan dari fasilitas kredit : a. USD 1.350.000 b. USD 1.494.986
	Sanksi Administratif	Nihil

Perkara Penting Yang Dihadapi Perseroan

2	**Perkara Pensiunan BRI**
Pokok Perkara	Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHI) pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat yang diajukan oleh beberapa Pensiunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Para Penggugat) atas nama Sdr. TK , dkk (298 orang) No: 93/ Pdt. Sus-PHI/2017/PN.JKt.Pst tanggal 3 April 2017 dengan Materi Gugatan yang pada pokoknya menyatakan: a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan Tindakan Melawan Hukum dengan tidak melakukan pembayaran atas kekurangan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada para Penggugat. b. Atas perbuatan dimaksud Para Penggugat mengajukan ganti kerugian materiil sebesar Rp 27.333.319.597,-. c. Mengajukan uang pengembangan kompensasi pensiuan kepada Para Penggugat sebesar Rp 14.624.364.086. d. Mengajukan ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000. e. Mengajukan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 setiap hari apabila Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk keterlambatan dan/atau tidak menjalankan permohonan dari Para Penggugat.
Posisi Perkara	a. Terhadap gugatan PHI tersebut telah diputus dengan Putusan Sela oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Amar Putusan sebagai berikut : "MENGADILI" i. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif; ii. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini; iii. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);". b. Para Pensiunan (TK , dkk) mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

Perkara Penting Yang Dihadapi Perseroan

2	**Perkara Pensiunan BRI**	
	Status Penyelesaian	a. Terhadap Upaya Kasasi Para Pensiunan (TK, dkk) , MA RI telah menjatuhkan Putusan berdasarkan Putusan MA RI Nomor 177 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut : "MENGADILI" i. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Thamrin Kasim, dkk) ii. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pisat Nomor 93/ Pdt.Sus-PHI/2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2017. "MENGADILI SENDIRI" i. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang Kewenangan Mengadili secara absolut dan relatif; ii. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; iii. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; iv. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b. Berdasarkan Putusan Kasasi MA RI tersebut, perkara kembali diperiksa pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Pengaruh terhadap Perusahaan	Potensi atas Gugatan Kerugian Material sebesar Rp 41.957.683.683.
	Sanksi Administratif	Nihil

Permasalahan Hukum yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2018, tidak ada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI yang menjabat memiliki perkara hukum terkait Perdata dan Pidana dengan kegiatan bisnis BRI.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2018, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Akses Informasi Data Perusahaan

Bank BRI memiliki kebijakan dalam pengelolaan keterbukaan informasi yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.08-DIR/SKP/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Ketersediaan Akses Informasi Perusahaan

Bank BRI secara transparan menyediakan informasi laporan keuangan dan informasi perusahaan terkini yang dapat diakses publik melalui berbagai media cetak dan elektronik termasuk diantaranya situs Perusahaan, Bursa Efek Indonesia, dan portal BUMN.

Sekretaris Perusahan

Bambang Tribaroto
Telepon : (+62 21) 575 1966
Faksimil : (+62 21) 570 0916
Email : humas@bri.co.id

Alamat Perusahaan

Kantor Pusat Bank BRI
Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 1210, Indonesia
Telp : (+62 21) 251 0244, 251 0254
Fax : (+62 21) 250 0065, 250 0077

Situs Perusahaan

www.bri.co.id

Call Centre

14017, 1500017, (+62 5798 7400)

Customer Care

callbri@bri.co.id

Media Sosial

Facebook : @BRIofficial page
Twitter : @kontak_bri
Instagram : @bankbri_id

Siaran Pers

Siaran pers yang telah dilakukan Bank BRI selama tahun 2018 dapat dilihat pada sub bab pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan dan dapat dilihat pada situs *website* Perusahaan.

Majalah BRI

Bank BRI memiliki majalah yaitu "BRIta Kita" yang diterbitkan setiap bulan dalam bentuk media cetak dan aplikasi yang dapat diakses secara *online*. Majalah "BRIta Kita" yang terbit selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Edisi Bulan	Tema
1	Oktober 2017	Mengelola manajemen risiko
2	November 2017	Strategi menuju transformasi digital
3	Desember 2017	122 tahun BRI
4	Januari 2018	Tantangan *Human Capital* di 2018
5	Februari 2018	Strategi Bisnis dan Keuangan
6	Maret 2018	Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
7	April 2018	Pertumbuhan kredit kecil dan mikro
8	Mei 2018	Strategi kredit konsumer
9	Juni 2018	Menumbuhkan integritas dalam bekerja
10	Juli 2018	Manajemen risiko di zaman now
11	Agustus 2018	Operasional *excellent*
12	September 2018	Dorong potensi bisnis ritel dan menengah

Akses Informasi Data Perusahaan

Transparansi Penyampaian Laporan

Jenis Laporan	Periode Laporan	Jumlah	Tujuan Pelaporan
Laporan Tahunan	Tahunan	1	OJK dan BEI
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak	Triwulan	4	OJK, BI Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	Bulanan	12	OJK
Laporan Hutang Valas	Bulanan	12	OJK
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Bulanan	12	OJK dan BEI
Laporan Registrasi Pemegang Efek	Bulanan	12	BEI

Keterbukaan Informasi

No	Tanggal	Laporan
1	23.01.2018	Perubahan Sekretaris Perusahaan
2	22.01.2018	Penyampaian Rencana Pelaksanaan RUPST BRI Tahun 2018
3	06.02.2018	Penyampaian Bukti Publikasi Informasi Tambahan Ringkas Dalam Rangka PUB II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018
4	07.02.2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
5	08.02.2018	Pengangkatan Efektif Sdri Rofikoh Rokhim Sebagai Komisaris Independen BRI
6	13.02.2018	Pengumuman dan Bukti Publikasi RUPST BRI Tahun 2018
7	13.02.2018	Perubahan Jadwal Pelaksanaan RUPST BRI Thn 2018
8	15.02.2018	Tanggapan atas permintaan Pemberitaan Media Massa
9	22.02.2018	Pemenuhan Permintaan Email Resmi
10	28.02.2018	Pemanggilan RUPST BRI Tahun 2018 dan Bukti Publikasi Pemanggilan
11	01.03.2018	Laporan Pemanggilan dan Mata Acara RUPST BRI Tahun 2018
12	02.03.2018	Keterbukaan Informasi/*Disclosure of Information*
13	13.03.2018	Pemeringkatan Perusahaan dan Pemeringkatan Surat Utang BRI
14	21.03.2018	Pengangkatan Efektif Sdri. Handayani sebagai Direktur Konsumer PT BRI
15	26.03.2018	Laporan Pelaksanaan dan Bukti Publikasi Hasil Keputusan RUPST BRI
16	29.03.2018	Laporan Hasil RUPST 2018
17	29.03.2018	Tanggapan Permintaan *Track Record* Direksi dan Komasaris BRI

Akses Informasi Data Perusahaan

Keterbukaan Informasi

No	Tanggal	Laporan
18	10.0.4.2018	Tanggapan konfirmasi atas pemberitaaan media
19	16.04.2018	Tanggapan konfirmasi atas pemberitaaan media
20	27.04.2018	Pengangkatan Efektif Sdri. R. Sophia Alizsa sebagai Direktur *Human Capital* BRI
21	27.04.2018	Pemberitahuan *Review* Terbatas atas Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2018
22	03.05.2018	Laporan Bukti Iklan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2018
23	11.05.2018	Laporan Bukti Iklan Prospektus ringkas Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2018
24	18.05.2018	Penyampaian Bukti Pengumuman dan Dokumen Pendukung atas Transaksi Afiliasi
25	21.05.2018	Surat Pernyataan Direktur mengenai Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan
26	04.07.2018	Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham Direktur Hubungan kelembagaan BRI.
27	24.07.2018	Keterbukaan Informasi
28	31.07.2018	Pengangkatan Efektif Osbal Saragi sebagai Direktur Jaringan & Layanan dan Ahmad Solichin Sebagai Direktur Kepatuhan BRI
29	24.08.2018	Penyampaian Materi *Public Expose* BRI Tahun 2018
30	03.09.2018	Laporan Pelaksanaan *Public Expose*
31	26.09.2018	Pelaporan Pengangkatan Efektif Sdr. Hadiyanto Sebagai Anggota Dewan Komisaris BRI
32	28.09.2018	Keterbukaan Informasi
33	03.10.2018	Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Bank BRI
34	08.10.2018	Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BRI
35	25.10.2018	Laporan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Bank BRI TW III Tahun 2018
36	06.11.2018	Penyelenggaraan RUPS Terkait Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris BRI
37	14.11.2018	Laporan Bukti Iklan Penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI
38	19.11.2018	Penyampaian Rencana Pelaksanaan RUPSLB Bank BRI ke OJK
39	27.11.2018	Laporan Bukti Iklan Pengumuman Pelaksanaan RUPSLB Bank BRI
40	14.12.2018	pengangkatan efektif Sdr. Supari sebagai Direktur Ritel dan Menengah BRI
41	20.12.2018	Keterbukaan Informasi / *Disclousure of Information*
42	26.12.2018	Keterbukaan Informasi / *Disclousure of Information* (PT Dana Reksa Investment Management)

Kode Etik

Dasar Hukum

Dalam mewujudkan insan BRI yang disiplin dan bertangung jawab serta memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan bisnis bank, BRI memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh pekerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik BRI. Kode etik BRI merupakan bagian penting dari kerangka kerja GCG BRI dan memberikan pedoman etika bagi insan BRI dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya.

Komitmen Kode Etik

Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI diseluruh jenjang organisasi perusahaan. Penerapan kode etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya perusahaan.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode etik BRI memiliki 9 (sembilan) elemen yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank
   Komitmen Bank patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penguatan budaya kepatuhan Bank.
2. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
   a. Etika terhadap Nasabah
      Komitmen Bank memberikan pelayanan prima kepada Nasabah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
   b. Etika terhadap Mitra Kerja
      Komitmen Bank dengan Mitra Kerja berdasarkan praktik-praktik usaha yang sah dan wajar dan menjujunjung tinggi sikap profesionalisme dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan.
   c. Etika terhadap Pesaing
      Komitmen Bank mengedepankan persaingan yang sehat dalam menjalankan usahanya, dengan meningkatkan Bank pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja.
   d. Etika terhadap Regulator
      Komitmen Bank memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan dan otoritas berwenang lainnya.
   e. Etika terhadap Pemegang Saham
      Komitmen Bank dalam upaya meberikan kontribusi positif dan optimal kepada Pemegang saham (*shareholders*).
3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
   Komitmen Bank menjunjung nilai-nilai masyarakat setempat (*local wisdom*) dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan operasionalnya.
4. Hubungan Perusahaan dengan Karyawan Bank
   a. Komitmen Bank dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua pekerja untuk berpartisipasi dalam mencapai visi dan misi Bank.
   b. Komitmen Bank untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktifitas dan etika sesama pekerja.
5. Kerahasiaan Informasi Bank
   Komitmen Bank melindungi seluruh informasi nasabah dan internal Bank dari pihak luar/tidak berkepentingan.
6. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank
   Komitmen insan BRI menyampaikan laporan Bank secara tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
7. Benturan Kepentingan
   Komitmen insan BRI menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan dan tidak menempatkan pada kondisi/situasi timbulnya benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank, Nasabah, dan Pihak Ketiga yang dapat merugikan perusahaan.
8. Kontribusi dan Aktifitas Politik
   Komitmen insan BRI untuk tidak berkontribusi dalam aktifitas politik atau usaha sejenis lainnya.
9. Larangan Menerima Hadiah
   Insan BRI tidak diperkenenankan meminta dan memnerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode Etik

Pernyataan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

1. Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI (insan BRI) wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BRI.
2. Seluruh insan Bank wajib secara tertulis untuk menyatakan kepatuhannya atas Kode Etik BRI. Surat Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI yang ditandatangani merupakan syarat keberlanjutan hubungan kerja dengan Bank.

Penyebarluasan Kode Etik

BRI telah melakuan sosialisasi kebijakan kode etik kepada pekerja BRI pada tahun 2018 melalui program pendidikan, kegiatan *workshop*, *In House Training*, Pembinaan dan *Monitoring* secara *onsite* ke unit kerja BRI, pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRI, dan pelaksanaan Forum Peningkatan Kinerja (FPK) di seluruh unit kerja BRI.

Upaya Penegakan Kode Etik Perusahaan

Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:

1. Penerapan Kode Etik berlaku bagi seluruh insan BRI di seluruh jenjang organisasi dan unit kerja luar negeri.
2. Seluruh insan BRI diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kepatuhan terhadap Kode Etik BRI.
3. Setiap Pelanggaran Kode Etik akan di berikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku.
4. Sosialisasi Kode Etik kepada Pekerja BRI.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2018

Selama tahun 2018 terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 212 pekerja tetap. Pelanggaran terhadap Kode Etik BRI telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.

Budaya Perusahaan

BRI merumuskan Nilai-Nilai Utama perusahaan baru yang digunakan untuk membentuk perilaku dan karakter kerja selaras dengan strategi perusahaan terkini. Nilai-nilai utama perusahaan tersebut yakni BRI dengan 5 (lima) nilai atau biasa disebut BRILIAN yang tercermin dalam 10 sikap dan perilaku. Adapun BRILIAN serta sikap dan perilakunya adalah sebagai berikut:

1. *Integrity*

Senantiasa berfikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan dan taat aturan. Adapun sikap perilaku dari nilai *Integrity* adalah sebagai berikut:

a. Terbuka, Jujur dan tulus; dan
b. Patuh Terhadap Peraturan.

2. *Profesionalism*

Berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Adapun sikap perilaku dari nilai *Profesionalism* adalah sebagai berikut:

a. Continous Learner
b. Fairness

3. *Trust*

Membangun keyakinan dan sangka baik di antara stakeholders dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. Adapun sikap perilaku dari Nilai Trust adalah sebagai berikut:

a. Saling menghargai
b. Mengutamakan kepentingan Perusahaan dan Negeri

4. *Innovation*

Mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk atau kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan perusahaan. Adapun sikap perilaku dari nilai *Innovation* adalah sebagai berikut:

a. Visioner
b. Pionir Perubahan

5. *Customer Centric*

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Adapun sikap perilaku dari nilai *Customer Centric* adalah sebagai berikut:

a. Melayani Lebih dari Ekspektasi Nasabah dengan setulus hati.
b. Collaborative

Pelanggaran Internal

Jumlah pelanggaran internal yang dilakukan oleh pekerja BRI selama tahun 2018 dari hasil pemeriksaan unit kerja investigasi BRI adalah sebagai berikut:

Internal Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pekerja Tetap		Pekerja Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total	-	-	-	-	142	212	145	123
Telah diselesaikan	-	-	-	-	136	171	89	97
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	6	41	56	26

Whistleblowing System

Dalam penerapan GCG, BRI secara transparan dan adil dalam menerima dan mengelola laporan pelanggaran melalui sarana *Whistleblowing System*.

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana pelaporan bagi insan BRI secara khususnya dan masyarakat untuk melaporkan adanya prilaku atau tindakan yang terindikasi melanggar kode etik, prinsip GCG serta ketentuan yang berlaku baik internal BRI maupun perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh insan BRI.

Kebijakan WBS

Kebijakan *Whistleblowing System* BRI telah diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE:S.08-DIR/KPT/05/2018 yang mengatur sistem, mekanisme dan prosedur penanganan laporan indikasi pelanggaran yang dikelola secara rahasia dan independen.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Sarana pelaporan *Whistleblowing System* dapat dilaporkan melalui:

a. SMS dengan nomor 0812 8200 600
b. Surat tertulis dengan alamat PO BOX 1895 JKP 10900
c. Webmail dengan alamat whistleblower@corp.bri.co.id
d. *Website* dengan alamat www.bri.co.id/whistleblowing-system

Sosialisasi WBS

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:

1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Memasang poster informasi WBS di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
3. Menyampaikan materi WBS pada *in-class training* Program pengembangan Staff (PPS) BRI.
4. Melaksanakan pembelajaran *e-learning* WBS kepada seluruh pekerja BRI.
5. Penyampaian informasi WBS melalui *website* perseroan.
6. Sosialisasi WBS secara *onsite* ke Unit Kerja.
7. Memasang *Pop Up* pada *dashboard* aplikasi Bristars (portal internal BRI).

Perlindungan Pelapor

BRI memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada Pelapor internal dari adanya tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, hingga tindakan fisik.

Penanganan dan Mekanisme Pengaduan

Penanganan WBS

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana WBS.
2. Laporan diterima oleh Unit Pengelola WBS.
3. Petugas WBS akan melakukan verifikasi dan analisa awal informasi indikasi pelanggaran paling lambat 20 hari kerja kemudian menyampaikan ke Pemimpin Unit Pengelola WBS.
4. Memeriksa dan memastikan laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan WBS. Selanjutnya memutuskan tindak lanjut laporan WBS ke Unit Kerja Investigasi. Apabila laporan tidak sesuai kriteria maka laporan indikasi pelanggaran tidak akan ditindaklanjuti.
5. Unit Kerja Investigasi melakukan investigasi terhadap informasi indikasi pelanggaran. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi ke Unit Pengelola WBS.
6. Unit Pengelola WBS akan menyurati Unit Kerja Berwenang untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi atas rekomendasi dari Unit Kerja Investigasi.
7. Unit Kerja Berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi kepada Terlapor.
8. Unit Pengelola WBS melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan Unit Kerja Berwenang.
9. Unit Kerja Berwenang menyampaikan laporan realisasi perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.
10. Unit Pengelola WBS memastikan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan secara memadai.
11. Unit Pengelola WBS melaporkan rekapitulasi dan evaluasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit setiap Triwulan.

Whistleblowing System

Mekanisme Pelaporan WBS

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana yang telah ditentukan.
2. Laporan indikasi pelanggaran diterima oleh Unit Pengelola *Whistleblowing System* untuk ditindaklanjuti ke Unit Kerja Investigasi.
3. Unit Kerja Investigasi melakukan investigasi terhadap laporan indikasi pelanggaran dan hasil investigasi disampaikan kembali ke Unit Pengelola *Whistleblowing System*.
4. Unit Pengelola *Whistleblowing System* akan melaporkan secara berkala ke Direktur Utama.

Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Pihak pengelola WBS berada dibawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direktur Utama membentuk Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

Laporan WBS

Rekapitulasi Laporan WBS

Jumlah laporan pengaduan pelanggaran yang diterima selama tahun 2018 sebanyak 124 pengaduan pelaporan yang terdiri dari 180 sub pengaduan indikasi pelanggaran. Adapun perkembangan laporan WBS selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu:

Tahun	Jumlah Laporan	Media Penyampaian				Status	
		SMS	Surat	Telp/Lisan	Email	Open	Closed
2016	99	84	14	1	0	0	99
2017	65	48	23	2	2	1	64
2018	124	77	4	0	43	75	49

Dari 124 pengaduan pelaporan yang masuk selama tahun 2018 dapat diidentifikasi menjadi 180 sub pengaduan indikasi pelanggaran dengan kategori sebagai berikut:

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelanggaran terhadap proses akuntansi dan laporan keuangan BRI	0
2	Tindakan *Fraud*	22
3	Perbuatan Melanggar Hukum	3
4	Pelanggaran SOP Perusahaan	99
5	Pelanggaran Kode Etik BRI dan GCG	40
6	Pelanggaran Etika	3
7	Perbuatan yang Membahayakan	13
	Total	180

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi diwujudkan dalam bentuk keberagaman kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum pengangkatannya oleh RUPS atas usulan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris BRI telah memenuhi kebijakan keberagaman yang berlaku di Perseroan.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi secara terperinci dari sisi kompetensi, pengalaman kerja/ kedirekturan serta latar belakang pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan pada bagian Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan & Prosedur Anti Korupsi

BRI telah memiliki kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.25DIR/ DMR/12/2016 tentang Str*ate*gi Anti *Fraud* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kebijakan dimaksud merupakan wujud komitmen manajemen BRI dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Program Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan tata perilaku dalam hubungan bisnis antara hubungan bisnis dan mitra perusahaan, BRI berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi dilingkungan perusahaan. Bank BRI memiliki pedoman gratifikasi yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep: S.11-DIR/DKP/03/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI. Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI mengatur tentang:

1. Prinsip dasar pengendalian gratifikasi
2. Klasifikasi gratifikasi
3. Sosialisasi, pelaporan, *monitoring* dan evaluasi
4. Mekanisme pengelolaan gratifikasi
5. Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi.
6. Perlindungan kepada Pelapor Gratifikasi

Larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Insan BRI dan batasan-batasan penerimaan gratifikasi.

Penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai perusahaan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh Insan BRI kepada nasabah, vendor, rekanan dan seluruh stakeholder. Bank BRI senantiasa terus berupaya melakukan pengingkatan pengendalian gratifikasi diantaranya:

a. Penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi KPK dengan BRI dan Konglomerasi Keuangan.
b. Penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi seluruh *Executive Vice President* BRI.
c. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 13- 15 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor Jawa Barat.
d. Revisi petunjuk teknis pelaporan gratifikasi.
e. Penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi oleh seluruh pekerja dalam agenda Forum Peningkatan Kinerja BRI tahun 2018.
f. Mengikuti kegiatan Hari Anti Korupsi International Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Desember 2018 di Jakarta.
g. Mengikuti International Business Integrity Conference (IBIC) 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Desember 2017 di Jakarta.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Merupakan suatu unit atau fungsi di lingkungan BRI yang menjalankan fungsi pengendalian praktik penerimaan maupun pemberian gratifikasi.

Struktur Unit Pengelola Gratifikasi:

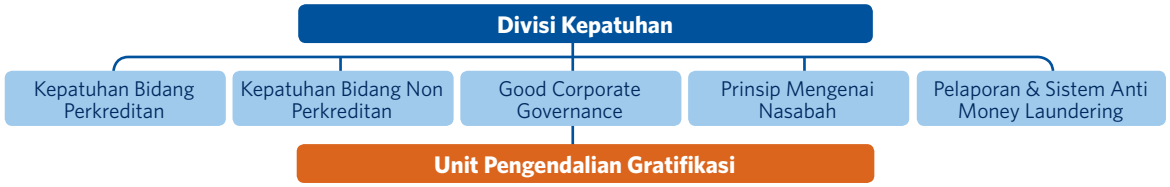

Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:
1. Menyusun kebijakan, pedoman, serta petunjuk teknis penerapan gratifikasi.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan gratifikasi.
3. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi.
4. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK.
5. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi sesuai dengan kewenangan BRI.
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Jenis Gratifikasi

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan merupakan penerimaan yang diterima oleh insan BRI bukan berdasarkan/tidak terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan tidak berlawanan dengan kewajiban.
3. Gratifikasi terkait kedinasan merupakan pemberian gratifikasi kepada insan BRI dari pihak manapun dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Pakta Integritas

Bank BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan, salah satu diantaranya BRI memiliki pakta integritas dalam bentuk komitmen pengendalian gratifikasi yang ditandatangani oleh seluruh pekerja BRI pada Forum Peningkatan Kinerja (FPK) 2018. Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan kepada seluruh vendor dan rekanan BRI untuk menjaga integritas dan independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sosialisasi dan Program Awareness Gratifikasi

1. Pelaksanaan *E-learning* kepada seluruh pekerja BRI tentang program pengendalian gratifikasi.
2. Launching video sosialisasi gratifikasi.
3. Sosialisasi pengendalian gratifikasi secara onsite ke seluruh kantor wilayah BRI dan 56 Kantor Cabang BRI.
4. Sosialisasi pengendalian gratifikasi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BRI dan Serikat Pekerja BRI
5. Sosialisasi pedoman gratifikasi pada anak perusahaan.

E-learning

Pada tahun 2018, Unit Penendalian gratifikasi telah menyusun pendidikan pedoman pengendalian gratifikasi berupa *e-learning* yang diikuti oleh 107.303 pekerja BRI. Pelaksanaan *e-learning* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengendalikan dan melaporkan gratifikasi di unit kerja.

Program Pengendalian Gratifikasi pada Konglomerasi Keuangan

Bank BRI telah menerapkan program pengendalian gratifikasi pada konglomerasi keuangan BRI melalui penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh seluruh Direktur Utama konglomerasi keuangan dengan KPK. Selanjutnya, seluruh konglomerasi keuangan BRI menyusun program pengendalian gratifikasi diantaranya:

1. Menyusun kebijakan program pengendalian gratifikasi di Perusahaan Anak.
2. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja di Perusahaan Anak.

Program Pengendalian Gratifikasi

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Standar pelaporan gratifikasi merujuk dengan standar dan prosedur pelaporan di KPK dengan rincian sebagai berikut:

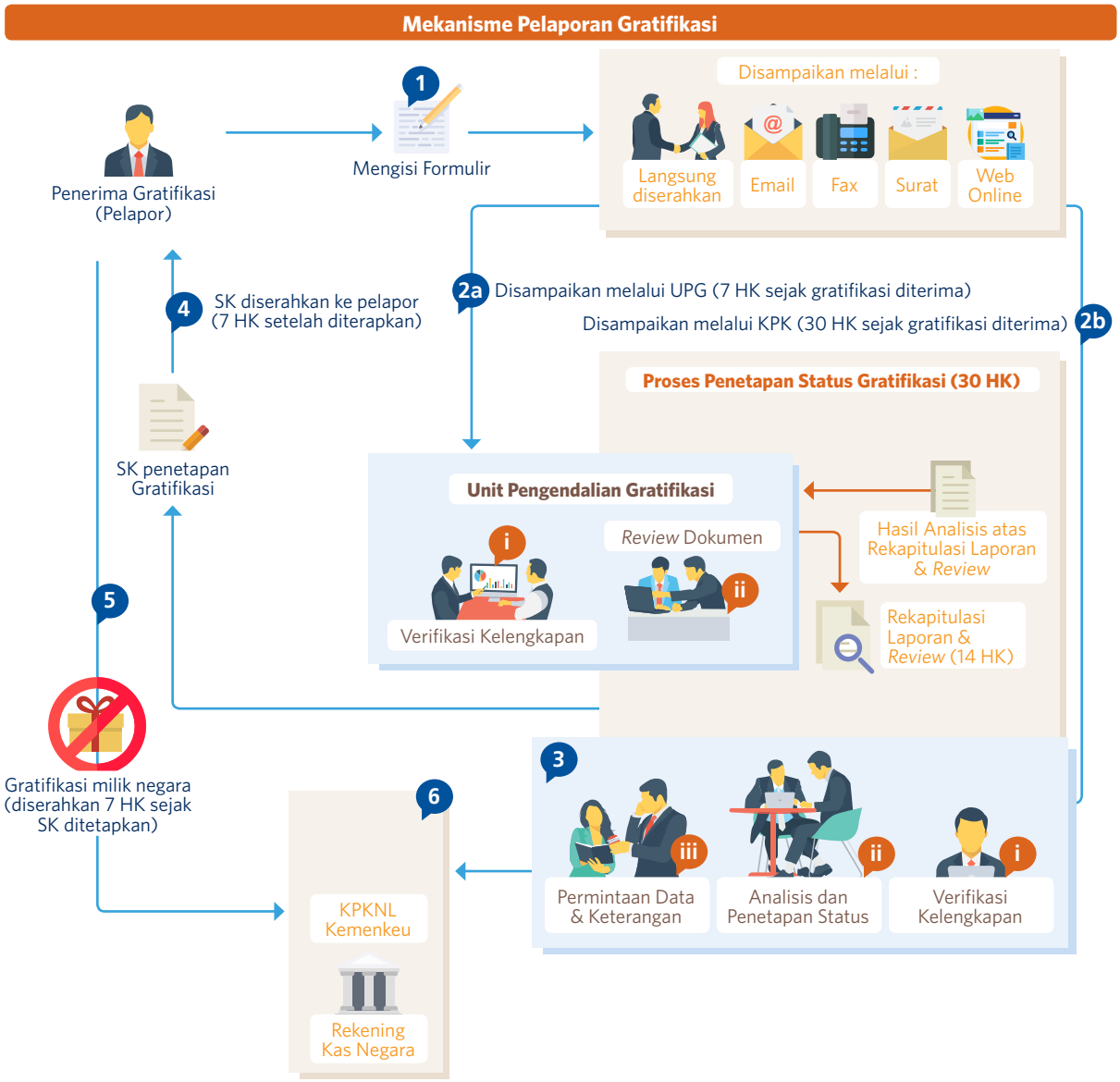

Laporan Penerimaan Gratifikasi 2018

Pada tahun 2018, jumlah laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi sebanyak 23 laporan diantaranya 17 (tujuh belas) laporan penerimaan gratifikasi dan 6 (enam) laporan penolakan gratifikasi.

Kebijakan Perlindungan Hak Kreditur

Dalam menjalankan salah satu fasilitas bisnisnya BRI memberikan pinjaman kepada masyarakat, dimana hak BRI sebagai kreditur dilindungi dan diatur berdasarkan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam masingmasing perjanjian kredit. Bank BRI senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan hak dan perlindungan terhadap nasabahnya dengan melakukan beberapa aktivitas dalam rangka perlindungan kreditur diantaranya:

a. Memperoleh informasi terkait perkembangan kinerja dan laporan keuangan BRI.
b. Memperoleh informasi terhadap syarat dan ketentuan produk & jasa bank kepada nasabah.
c. Penjelasan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan perihal kredit yang diajukan oleh pegawai bank dan notaris rekanan bank pada saat akan akad kredit.
d. Memperoleh informasi dan bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Perjanjian kredit dibuat rangkap 2 untuk kedua pihak.

Kebijakan Perlindungan Nasabah

Dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada konsumen, BRI mengacacu pada beberapa ketentuan di antaranya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP/2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Usaha. Selanjutnya BRI juga telah menyusun pedoman kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah melalui Surat Keputusan NOKEP S. 1051-DIR/LCC/12/2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kebijakan pelayanan kepada nasabah di BRI juga dituangkan dalam sebuah panduan pelayanan yang disebut Budaya Layanan BRI "CAKRAM" yang berarti Cepat AKurat Ramah Aman nyaMan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Cepat

1. Melayani nasabah dengan segera sesuai dengan *Service Level Agreement* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Menanggapi keluhan nasabah sesegera mungkin sesuai dengan *Service Level Agreement* dengan winwin solution.

Akurat

1. Melakukan pencatatan transaksi nasabah secara benar.
2. Menyediakan informasi nasabah dengan dukungan sistem yang terintegrasi.

Ramah

1. Menjadikan nilai kekeluargaan sebagai ciri khas BRI dalam memberikan layanan kepada nasabah melalui sentuhan Pribadi.
2. Memberikan kesan positif kepada nasabah melalui sikap, tutur kata yang santun dan penampilan yang menarik.
3. Berkomunikasi dengan penuh keakraban dan profesional.

Kebijakan Perlindungan Nasabah

Aman

1. Memberikan rasa aman kepada nasabah dengan dukungan sistem yang handal dan mendayagunakan sumber daya manusia profesional & berintegritas tinggi.
2. Menjaga kerahasiaan data nasabah.
3. Melakukan pencatatan keuangan nasabah secara teratur dan benar.
4. Senantiasa menjaga keselamatan dan keamanan atas segala sesuatu yang dipercayakan nasabah.

Nyaman

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang bersih, rapi terpelihara dan lingkungan yang menyenangkan.
2. Menyediakan infrastruktur yang senantiasa berfungsi sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam pelayanannya kepada nasabah, BRI berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah secara baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan/ atau *service level agreement* yang berlaku. Dalam hal penilaian kepuasan pelanggan, BRI rutin mengadakan survei kepuasan pelanggan yang diharapkan dapat terus menjadi evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah yang pada akhirnya berujung pada peningkatan loyalitas nasabah terhadap perusahaan.

BRI memandang setiap pengaduan nasabah merupakan masukan yang penting untuk peningkatan kualitas layanan dan produk. Melalui sistem sentralisasi *complaint handling*, BRI menyediakan sarana bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan dan menjadi rekomendasi perbaikan di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap keluhan nasabah dapat diidentifikasi dan diketahui secara cepat, saat ini BRI menggunakan media *omni-channel*, yaitu sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui saluran yang tersedia yaitu:

1. Tatap muka melalui *Customer Service* di seluruh Unit kerja operasional BRI;
2. Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400/Premium call melalui 021-5758899 dan 08001017017;
3. *Webchat* melalui website www.bri.co.id;
4. Email di callbri@bri.co.id;
5. Internet banking di https://ib.bri.co.id;
6. Media sosial twitter di @kontakbri;
7. Media sosial facebook di BANK BRI@BRIofficialpage;
8. Telegram dan SMS di 0812 12 14017.
9. Layanan *Toll Free* khusus Agen BRILink 0800 10 14017

Kebijakan Perlindungan Nasabah

Dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah, BRI menetapkan *service level agreement* (SLA) yaitu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Adapun mekanisme pengaduannya nasabah BRI adalah sebagai berikut:

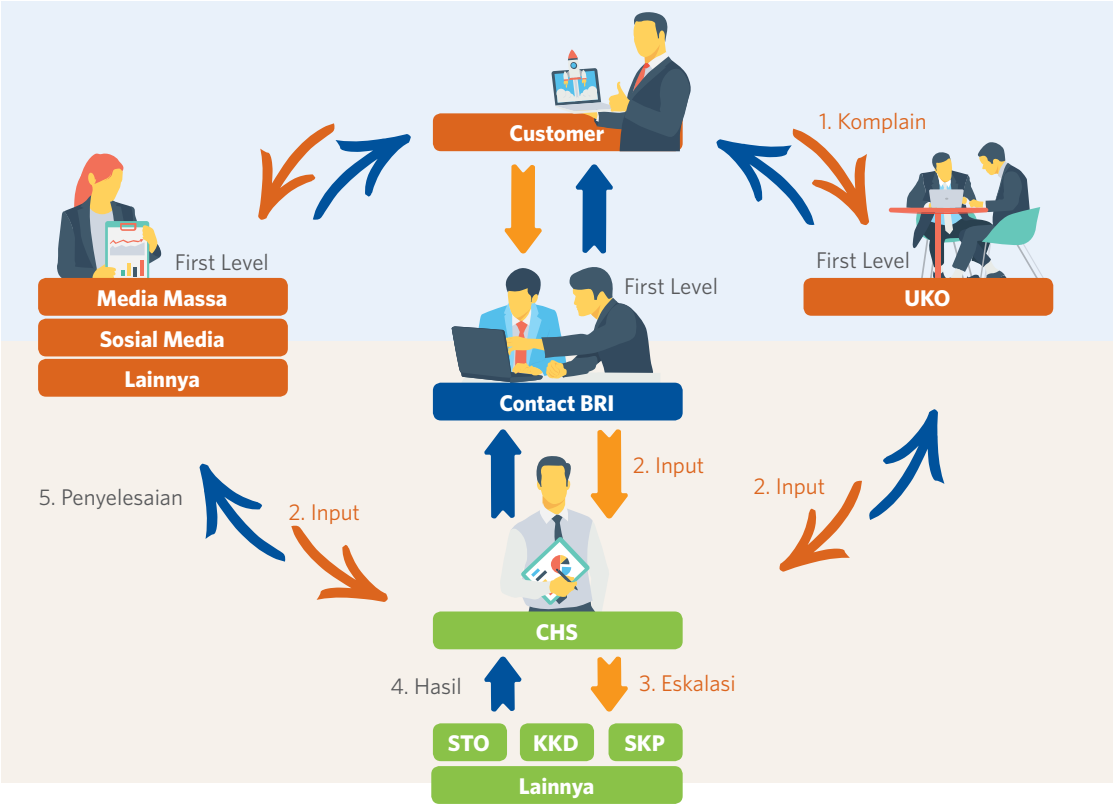

Tata Cara Pengaduan:

1. Pengaduan nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial/pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.
2. Nasabah dapat segera melaporkan pengaduannya kepada BRI melalui sarana yang telah ditentukan sesegera mungkin apabila nasabah mengalami kondisi pada poin 1.
3. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui sarana media yang telah tersedia.
4. Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dilengkapi dengan informasi data nasabah dan permasalahan yang diadukan.
5. Pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan di Unit Kerja Operasional/melalui *fax* harus dilengkapi dengan:
   a. Formulir pengaduan nasabah dan permasalahan yang diadukan.
   b. Fotocopy kartu identitas nasabah.
   c. Bukti transaksi keuangan di BRI yang terkait dengan permasalahan yang diadukan/dokumen pendukung lainnya yang terkait pengaduan.
6. Pengaduan melalui email harus dilengkapi dengan
   a. Data nasabah dan permasalahan yang diadukan.
   b. Scan file/data capture bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan pengaduan yang diajukan.
7. Batas waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan adalah 2 (dua) hari kerja sedangkan penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara tertulis adalah 20 (dua puluh) hari kerja.
8. Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian finansial belum memuaskan nasabah, maka dapat diselesaikan dengan difasilitasi melalui media perbankan.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif.

Kebijakan

Bank BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertian dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prinsip dasar penananganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani benturan kepentingan.

Komitmen

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan BRI berkomitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penangangan benturan kepentingan. Sebagai wujud komitmen insan BRI dalam implementasi kebijakan dan pengungkapan benturan kepentingan diantaranya:

1. Seluruh insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclousure*) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan perilaku yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan.

Sosialisasi

BRI senantiasa melakuan sosialisasi kebijakan GCG dan benturan kepentingan kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, kegiatan *workshop*, *In House Training*, Pembinaan dan *Monitoring* secara onsite ke unit kerja BRI, pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRI, dan pernyataan benturan kepentingan.

Laporan Transaksi Benturan Kepentingan 2018

Selama tahun 2018, terdapat 4 (empat) pengungkapan transaksi benturan kepentingan yaitu laporan penyewaan kantor milik pekerja BRI, 1 (satu) laporan pengadaan barang dan jasa, dan 2 (dua) laporan terkait pemberian kredit yang mengandung benturan kepentingan. Setiap laporan benturan kepentingan telah dilaporkan ke Kantor Pusat dan disampaikan pada laporan semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pencegahan *Insider Trading*

Insider *Trading* merupakan perdagangan saham perusahaan atau surat berharga lainnya (obligasi atau opsi saham) yang dilakukan individu perusahaan yang memiliki akses informasi non publik terhadap perusahaan.

Kebijakan

Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan *insider trading* bagi seluruh insan BRI. Kebijakan *insider trading* tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.

Kebijakan terkait kegiatan *insider trading* mengatur bahwa:

1. Setiap insan BRI harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak tidak terbuka untuk umum.
2. Seluruh insan BRI tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
3. Seluruh insan BRI dilarang melakukan segala aktifitas yang terkait dengan *insider trading* yang merujuk pada kegiatan *illegal* di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan/aksi korporasi yang dipublikasikan.
4. Pelanggaran terhadap kegiatan diatas akan dikenakan sanksi disiplin sesuai yang berlaku di BRI.

Dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh insan BRI diwajibkan membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure)* diantaranya pengungkapan terhadap transaksi *insider trading* yang dilakukan oleh insan BRI.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan adalah proses kegiatan dalam rangka memenuhi atau menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa perusahaan dengan cara membeli atau sewa atau kerja sama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya dilakukan melalui rekanan perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk.

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BRI bertujuan untuk mendukung operasional bank dan kinerja bisnis secara umum. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang aman, efektif, dan efisien.

Kebijakan

Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) merupakan pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta tetap memperhatikan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).

KEMAL BRI diberlakukan terhitung mulai tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara. Tujuan dari disusunnya KEMAL BRI adalah:

a. Sebagai pedoman dalam pengelolaan aktiva tetap dan pelayanan logistik yang berkualitas kepada seluruh unit kerja BRI.
b. Sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa di BRI sehingga proses pengadaan di BRI.

Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan mekanisme kontrol dan tantangan perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan proses pengadaan, Bank mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan meliputi:

a. Efisien
Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan daya kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

b. Efektif
Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.

c. Kompetitif
Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.

e. Adil dan Wajar
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.

f. Akuntabel
Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BRI dilakukan sebagai berikut:

a. Dalam rangka menunjang kegiatan operasional BRI diperlukan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur tersebut dibutuhkan suatu proses pengadaan.
b. Dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan dibutuhkan penetapan Harga Perkiraan Sendiri yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan metode pengadaan. Pada tahun 2017 telah dibentuk Grup Estimasi, yaitu unit kerja independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan HPS pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.
c. Proses pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa Metode, diantaranya adalah Swakelola, Pembelian langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbuka.
d. Dalam proses pengadaan tersebut akan dilakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh kualitas dan harga terbaik.
e. Dalam rangka memperoleh kesesuaian antara kebutuhan BRI dengan penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa maka dalam proses pengadaan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi sampai ditentukannya pemenang penyedia barang/jasa.
f. Apabila telah ditetapkan pemenang, BRI menyediakan waktu sanggah apabila ada pihak yang berkeberatan dalam proses pengadaan yang telah dilakukan atau terhadap penetapan pemenang. Hal tersebut dilakukan oleh BRI dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kaidah *Good Corporate Governance*.

Pengelolaan Rekanan

a. Penyedia barang dan/atau jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa di BRI pada prinsipnya perlu memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR) BRI. TDR (Tanda Daftar Rekanan) adalah keterangan dalam format sertifikat atau surat yang berisi penjelasan bahwa pihak penyedia barang/

Pengadaan Barang dan Jasa

jasa yang tercantum di dalamnya telah terdaftar sebagai Rekanan BRI, sebagai syarat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di BRI.

b. BRI telah memiliki daftar rekanan penyedia barang/jasa yang dapat digunakan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa di BRI. Daftar rekanan tersebut diperoleh dari seleksi atas kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi rekanan BRI sampai dengan penyedia barang/jasa yang lolos seleksi menjadi rekanan telah dilakukan secara transparan, guna menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.
c. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi rekanan BRI telah dilakukan sesuai pinsip pengadaan seperti:
   1) Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku
   2) Laporan kinerja keuangan rekanan dalam kategori baik
   3) Memiliki pengalaman terhadap bidang pekerjaan yang akan dilakukan.
d. Aplikasi Pegelolaan rekanan, BRI telah mengembangkan aplikasi pengelolaan TDR (Tanda Daftar Rekanan) yang terintegrasi dengan BRISMILE mulai dari pendaftaran rekanan yang dilakukan secara mandiri oleh vendor (melalui intranet BRI), proses evaluasi legalitas dan usaha vendor sampai penerbitan Tanda Daftar Rekanan BRI (TDR BRI) oleh BRI.

Penjelasan Terkait Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa serta Implementasi e-procurement

BRI melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dengan selalu menekankan pentingnya penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, untuk menciptakan proses pengadaan yang berkualitas, salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga transparansi dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan.

Program kerja yang telah dilakukan untuk mendukung transparansi pelaksanaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Finansial menggunakan Aplikasi *E-Procurement Modul E-Auction*
2. Pengumuman lelang pengadaan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik.
3. Sertifikasi ISO 9001:2015

Sertifikasi ISO 9001:2015

Sertifikasi tersebut telah diraih oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Cq Bagian Manajemen Persediaan dan Pembayaran pada proses pengelolaan persediaan, administrasi pengadaan, serta pembayaran. Dengan diraihnya Sertifikasi ISO 9001:2015 tersebut, diharapkan tingkat kepercayaan mitra kerja kepada BRI akan meningkat karena transparansi terhadap prosedur pengadaan yang lebih baik.

Nama sertifikasi	ISO 9001:2015
Tanggal terbit sertifikasi	13 Januari 2018
Badan pemberi sertifikasi	LQRA
Masa berlaku	9 Desember 2020

Laporan Pengadaan Barang dan Jasa 2018

Sampai Bulan Desember 2018, jumlah total pengadaan dan nilai total pengadaan khusus untuk pekerjaan renovasi dan/ atau pembangunan gedung yang dilakukan oleh BRI Kantor Pusat adalah 82 pengadaan dan total nilai pengadaan sebesar Rp 191.466.210.000.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, maka untuk pengadaan barang dan jasa dalam batas nilai tertentu, diterapkan mekanisme pengambilan keputusan bersama oleh para Pejabat Pemutus Pengadaan dalam suatu forum Komite Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan adanya Putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa, diharapkan putusan pengadaan barang dan jasa dapat diberikan secara lebih seksama, akuntabel dengan tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien serta dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berikut data Komite Pengadaan Barang dan Jasa di BRI selama tahun 2018 sebagai berikut :

No.	Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan	Jumlah Pengadaan
A	B	C	D
1	Komite Pengadaan I	> Rp. 200 Miliar	-
2	Komite Pengadaan II	> Rp. 75 Miliar sd. Rp. 200 Miliar	1
3	Komite Pengadaan III	> Rp. 20 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	-
4	Komite Pengadaan IV	> Rp. 7,5 Miliar sd. Rp. 20 Miliar	1

Strategi dan Program Kerja Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa berperan sebagai pendukung bisnis dan operasional BRI. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan yang aman, efektif, dan efisien.

Berikut beberapa strategi yang diterapkan selama tahun 2018:

1. **Pengadaan dengan *multi vendor***
   Strategi multi vendor mempercepat proses pemenuhan barang dan/atau jasa.
2. **Pengadaan dengan *blanket order***
   Penerapan strategi tersebut mempercepat proses pemenuhan barang dan jasa yang bersifat rutin dengan jumlah yang relatif besar, serta mengefisiensikan biaya operasional pengadaan.
3. **Sinergi BUMN**
4. **Penggunaan Aplikasi BRISMILE**
   Dengan menggunakan sistem tersebut, *monitoring* proses dan *reporting* hasil pengadaan dapat dilakukan secara elektronik/system.

Tanggung Jawab kepada Pemasok

1. **Audit Pengadaan Barang dan Jasa**
   Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, Bank BRI senantiasa melakukan audit secara berkala yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal BRI.

2. **Vendor *Gathering***
   Pada tahun 2018, BRI telah melakukan *Vendor Gathering* melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dan *Business Partner Gathering* rekanan Bank BRI. Adapun pemaparan materi dari kegiatan vendor gathering yang dilakukan sebagai berikut:
   a. *Sharing* mengenai visi dan misi Bank BRI ke depan.
   b. Sarana untuk mempererat jalinan kerjasama yang harmonis antara BRI dengan mitra kerja Bank BRI.
   c. Forum komunikasi untuk mendapatkan masukan dari vendor untuk perbaikan proses pengadaan di BRI.
   d. *Cross selling/ Sharing product knowledge* BRI

Pengadaan Barang dan Jasa

3. *Index* Kepuasan Pelanggan Internal dan Eksternal

Dalam peningkatan standar kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Bank BRI, Bank BRI telah melakukan survey kepada pemasok/vendor dengan hasil survey sebagai berikut:

No.	*Survey*	Responden	Hasil *Survey* FGD Tahap I 2018 FGD *Survey Result Stage* I 1018		Hasil *Survey* Tahap II 2018 FGD *Survey Result Stage* I 1018		*Max* Skala	Ket.
			Index	Ket.	*Index*	Ket.		
1	BRI *Internal Service Survey* (BISS)	Divisi Kantor Pusat	4.48	Sangat Puas	4.60	Sangat Puas	5,00	0,12
2	BRI *External Service Survey* (BESS)	Rekanan/ Mitra Kerja	4.15	Sangat Puas	4.50	Sangat Puas	5,00	0,35

Pengelolaan Aktiva Tetap

Pengelolaan aktiva tetap BRI saat ini menggunakan aplikasi BRISmile (Sistem Manajemen Informasi Logistik Elektronik) yang merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yaitu Portal Logistik yang dikembangkan secara inhouse oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan TSI. Dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa modul yaitu:

1. Modul pengadaan aktiva tetap.
2. Modul pengelolaan aktiva tetap yang terdiri antara lain asuransi aktiva tetap, relokasi, reclass aktiva tetap dan penghapusbukuan aktiva tetap.
3. Modul anggaran.

Berbeda dengan SIM AT sebelumnya yaitu SAP *Fixed asset management* (FAM) yang hanya dapat di akses di level Kanwil BRI dan Kanpus, BRISmile dapat diakses sampai di level Kanca/ Campus sehingga pengelolaan aktiva tetap dapat lebih efisien dan efektif. Adapun efisiensi yang didapatkan atas pengelolaan AT melalui BRISmile adalah sebagai berikut:

1. Unit kerja BRI dapat melihat dan melakukan *monitoring* atas pencatatan aktiva tetap di unit kerjanya secara *on line* sehingga permasalahan terutama yang berkaitan dengan selisih antara fisik aktiva tetap dan rincian data di BRISmile dapat segera diselesaikan. Unit kerja dapat memastikan bahwa aktiva tetap yang diterima sudah tercatat di BRISmile.
2. Bertambahnya unit kerja BRI dan adanya resupervisi unit kerja BRI membutuhkan pengelolaan aktiva tetap yang bersifat desentralisasi terutama yang berkaitan dengan relokasi (perpindahan) aktiva tetap antar unit kerja. Kanca BRI dapat melakukan relokasi atas aktiva tetap yang dimilikinya tanpa melalui Kanwil atau Kanpus sehingga permasalahan terutama yang berkaitan dengan selisih antara fisik aktiva tetap dan rincian data di BRISmile dapat diminimalisir.
3. Proses asuransi aktiva tetap termasuk didalamnya penutupan asuransi dan pembayaran klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap dapat dilakukan secara *on line* dengan pihak penanggung (asuradur) sehingga proses penutupan asuransi dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pada saat dilakukan secara manual sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian aktiva tetap BRI. Selain itu, progress klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap BRI dapat dimonitor oleh unit kerja yang melakukan pengajuan klaim asuransi melalui BRISmile. Selanjutnya setelah terdapat persetujuan klaim dari asuradur maka pembayaran klaim dilakukan secara otomatis ke rekening GL Titipan Klaim AT unit kerja pemilik aktiva tetap. Dengan demikian, unit kerja tidak perlu lagi melakukan pelimpahan dari rekening IA uker ke GL Titipan Klaim AT.
4. Proses penghapusbukuan dapat dilakukan sendiri oleh unit kerja BRI mulai dari usulan sampai dengan penghapusan dari pencatatan di BRISmile. Proses ini memberikan kemudahan unit kerja untuk melakukan *monitoring* atas *progress* setiap usulan penghapusbukuan yang diajukan.
5. Modul anggaran dalam BRISmile memberikan kemudahan dalam penyusunan RKAP. Hal ini dikarenakan usulan dari setiap unit kerja dilakukan melalui sistem sehingga kebutuhan unit kerja dapat langsung di*monitoring* dan di analisa oleh Kantor Pusat untuk kebutuhan penyusunan RKAP BRI.
6. Proses pengadaan aktiva tetap dimulai dari input ijin prinsip pengadaan, ijin prinsip hasil pengadaan dan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan pengiriman/ distribusi aktiva tetap ke unit kerja BRI dapat dilakukan melalui Aplikasi BRISmile sehingga dapat diketahui *progress* semua pengadaan aktiva tetap yang sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan di Kanpus, Kanwil, Kanins, dan BRI Corpo*rate* University sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas setiap pengadaan aktiva tetap yang dilakukan termasuk waktu dan kendala yang dihadapi.

Pengelolaan Aktiva Tetap

7. Proses pengajuan usulan sampai dengan pencatatan aktiva tetap sewa/beli properti dan pembangunan/renovasi Gedung BRI sudah dapat dilakukan melalui BRISmile sehingga *progress* usulan atau pembangunan/renovasi dapat langsung dimonitor oleh unit kerja BRI.
8. Saat ini modul BRISmile telah terhubung (*interface)* langsung dengan Brinets, dimana seluruh transaksi pembukuan dilakukan otomatis melalui BRISmile, sehingga tidak diperlukan lagi pembukuan manual oleh unit kerja (kecuali transaksi pembayaran ke rek.vendor/pihak ketiga, pelimpahan ke Hutang Pengadaan Investasi dan pelimpahan ke rekening titipan lelang AT). Adapun modul BRISmile yang telah *interface* ke Brinets antara lain:
    a. Pembebanan Biaya Penyusutan.
    b. Relokasi & Reklasifikasi Aktiva Tetap.
    c. Penghapusbukuan AT.
    d. Pembayaran Klaim Asuransi.
    e. Pengadaan Barang/Distribusi Barang.
    f. Realisasi pembangunan/renovasi dan realisasi pembelian bangunan kantor/rudin.
9. Kebutuhan informasi mengenai aktiva tetap BRI baik untuk kepentingan internal maupun eksternal terutama data yang terkait dengan laporan keuangan BRI dapat lebih cepat dan akurat. Adapun laporan yang dapat dihasilkan dari BRISmile ini antara lain laporan rincian aktiva tetap, laporan mutasi aktiva tetap, laporan penghapus bukuan aktiva tetap, laporan penutupan asuransi aktiva tetap, dll.
10. Untuk memudahkan pihak manajemen dalam mengambil st*rate*gi kebijakan yang berkaitan dengan aktiva tetap telah dibuatkan *dashboard* pengadaan, usulan sewa/beli properti, pembangunan/renovasi gedung sehingga kebijakan yang diambil tepat waktu dan tepat sasaran.

Rencana Strategis Bank 2018

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang BRI 2018 – 2022, Aspirasi yang akan dicapai dituangkan ke dalam visi BRI yaitu menjadi *The Most Valuable* Bank di Asia Tenggara dan *Home to the Best Talent*.

Dalam penyusunan *Corporate Plan* 2018 – 2022, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI juga beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan, antara lain:

a. Kondisi demografis Indonesia dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif kelas menengah dengan daya beli yang semakin tinggi dan semakin didominasi oleh generasi *millenial* yang akrab dengan teknologi digital.
b. Arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang akan membutuhkan pendanaan dari perbankan serta pengembangan dan pemberdayaan pedesaan.
c. Integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan perdagangan bebas antar-negara ASEAN yang akan berpengaruh terhadap persaingan bank-bank baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.
d. Perubahan preferensi nasabah yang berpengaruh kepada pertumbuhan nasabah yang *digitally savvy. Digitally Savvy* yang dimaksud adalah perubahan perilaku para nasabah yang lebih menyukai cara digital yang membuat bisnis mereka lebih cepat, lebih aman dan hemat waktu. Para nasabah menyukai cara bertransaksi yang tidak lagi dibatasi waktu dan juga tempat.

Rencana Strategis Jangka Panjang

Dalam penyusunan *Corporate Plan* 2018-2022, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI, penyusunan Rencana Jangka Panjang tersebut akan menjadi *guideline* proses transformasi BRI. Sampai dengan Tahun 2022, BRI memiliki aspirasi untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent*.

Rencana Strategis Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan bagian dari sasaran jangka panjang BRI (lima tahunan) yang merupakan implementasi Visi dan Misi Bank BRI. Target jangka menengah meliputi sasaran usaha yang akan ditempuh dalam tiga tahun ke depan, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 melalui st*rate*gi 5C's (CASA, *Customer Focus, Credit Excellence, Capabilities, Culture*).

a. CASA (*Liabilities*)
b. Customer Focus (Fee-Based Income)
c. Credit Excellence (Asset)
d. Capabilities (IT, Data & Network)
e. Culture (Human Capital)

Rencana strategis Jangka Pendek

BRI menetapkan tema tahunan pada penyusunan perencanaan perusahaan di Tahun 2019 dengan tema ***Leading Consumer Loan in Indonesia.*** Fokus dari tema tersebut adalah BRI sebagai *market leader* penyaluran kredit konsumer yang didukung dengan pengembangan TI dan *re-engineering* proses bisnis untuk menghadapi perubahan dan menangkap peluang bisnis di masa mendatang agar aspirasi menjadi *The Most Valuable Bank in Southeast Asia* dan *Home to the Best Talent* dapat dicapai. Adapun *stakeholders* yang dipertimbangkan dalam penentuan ukuran keberhasilan tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, nasabah, pekerja dan masyarakat.

Rencana Jangka Pendek yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 (tahun) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan *Market Share* Pinjaman Konsumer
b. Tetap Menjaga Fokus Pertumbuhan Aset di segmen UMKM
c. Menjaga Kualitas Aset
d. Meningkatkan Pertumbuhan Dana Murah dan Menjaga Komposisi CASA
e. Menerapkan *Operational Excellence*
f. Membangun Sinergi BUMN untuk meningkatkan daya saing

Kebijakan Lainnya

KEBIJAKAN AKUTANSI

Dalam rangka proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan operasional bank yang optimal, dibutuhkan suatu pedoman kebijakan akuntansi yang didasari oleh ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Kebijakan akuntansi BRI disusun dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menyempurnakan akuntansi BRI untuk disesuaikan dengan ketentuan PSAK, PAPI, dan Peraturan OJK;
2. Memberikan pedoman bagi bank dalam melaksanakan praktik akuntansi yang sehat;
3. Menyeragamkan penerapan perlakuan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
4. Mempermudah penyusunan dan penyajian laporan keuangan BRI, sehingga Laporan Keuangan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat, serta dapat memberikan informasi yang mudah dipahami bagi manajemen dan pihak-pihak lain yang memerlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, peraturan dan praktik yang diterapkan bank sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan OJK. Dengan adanya Kebijakan Akuntansi yang dibuat secara tertulis, maka BRI mempunyai pedoman/acuan standard untuk melaksanakan dan menerapkan asas-asas akuntansi yang sehat.

Selanjutnya, sehubungan dengan standard akuntansi keuangan yang terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan, maka BRI pun juga terus melakukan penyempurnaan atas pedoman kebijakan akuntansi agar comply terhadap ketentuan yang berlaku

Penerapan Konvergensi PSAK ke IFRS

Dalam rangka proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, BRI berpedoman pada kebijakan akuntansi yang salah satunya didasari oleh ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dimana DSAK-IAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke IFRS secara bertahap dengan dukungan dari para regulator.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK yang berlaku

Tidak terdapat ketidaksesuain Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK yang berlaku.

Perubahan & Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi 2018

BRI dan entitas anak telah menerapkan standard akuntansi pada tanggal 1 Januari 2018, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

1. PSAK No. 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas Tentang Prakarsa Pengungkapan", mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non kas.
2. PSAK No. 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan Tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Untuk Rugi Yang Belum Direalisasi", mengklarifikasi:
   a. bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrument utang melalui penjualan atau penggunaan,
   b. bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak,

c. bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut,
d. bahwa beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar bahwa entitas akan mencapai hal tersebut.

3. PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investee-nya pada nilai wajar atas dasar investasi per investasi.
4. PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain", persyaratan pengungkapan dalam PSAK No. 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP 10 - PP 16, juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK No. 58 "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
5. PSAK No. 13 (Amendemen 2017), "Properti Investasi", mengamendemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah property memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi property investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Selain itu, Amendemen PSAK No. 13 tentang Pengalihan Properti Investasi juga mengkarakteristik ulang daftar keadaan dalam paragraf 57(a) - (d) sebagai daftar contoh yang tidak komprehensif.
6. PSAK No. 53 (Amendemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham", Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham", bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
7. PSAK No.111, "Akuntansi Wa'd", mengatur entitas yang member atau menerima wa'd tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd ketika menjadi akad. PSAK No.111 ini dilengkapi dengan contoh penerapan wa'd pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.

Penerapan PSAK di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN ANAK

Bank BRI memiliki kebijakan pengelolaan perusahaan anak yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.759-DIR/CDS/09/2017 tentang Kebijakan Umum Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak BRI. Didalam kebijakan tersebut diantaranya mengatur tentang:

1. Prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan pengelolaan perusahaan anak.
2. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia
3. Penyertaan modal
4. Perencanaan dan strategi perusahaan anak
5. Keselarasan bisnis dan *Joint Infrastructure*
6. Pelaporan, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Perusahaan Anak dan Perusahaan Partisipasi
7. Integrasi manajemen risiko dengan perusahaan anak, Integrasi Kepatuhan dengan Perusahaan Anak
8. Integrasi Tata Kelola (*Governance*) dengan Perusahaan
9. Akuntansi dan Perpajakan
10. Komunikasi Korporasi
11. Integrasi Audit Intern dengan Perusahaan Anak
12. Pengelolaan Perusahaan Anak di Luar Negeri

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan

Bank BRI secara transparan melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi kondisi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan (www.bri.co.id/laporan) sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada situs perusahaan.
2. Laporan Keuangan Triwulan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
3. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
4. Informasi tata kelola perusahaan meliputi
   a. Visi dan Misi Perusahaan
   b. Komposisi dan profil Dewan Komisaris
   c. Komposisi dan profil Direksi
   d. Penerapan Tata Kelola BRI
5. Transparansi informasi produk Bank yang disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan situs perusahaan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Dana Besar (*Large Exposure*)

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam, Bank wajib mengatur maksimum penyediaan dana sesuai prinsip kehati-hatian karena diperlukan diversifikasi portofolio pemberian kredit/ penyediaan dana dan penetapan maksimum kredit.

Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atau Penyediaan Dana Besar (*large exsposure*) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE:S.32-DIR/ ADK/09/2007 tentang Batas Minimum Pemberian kredit (BMPK).

Kebijakan Pemberian Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris termasuk kedalam penyediaan kepada pihak terkait, dan hal ini wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada pihak terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Perseroan yaitu kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit BRI.

Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank BRI pada umumnya dan diberikan sesuai bunga pasar (*market rate*) dan wajar (arm length basis) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Dana Besar (*Large Exposure*)

Kewajaran Transaksi kepada Pihak Terkait

Berdasarkan ketentuan PSAK No.7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", pihak berelasi didefinisikan antara lain:

1. Orang yang:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
   b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
   d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1); atau
   g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas.

Mekanisme Penyediaan dana kepada Pihak Terkait

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait termasuk yang bersifat material dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan *review* oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pembahasan pada rapat Dewan Komisaris.
3. Penyediaan dana kepada pihak terkait wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Ketentuan tentang pengaturan *limit* BMPK adalah sebagai berikut:

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Perseroan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Ketentuan pihak lainnya yang diatur adalah:

1. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.
2. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.
3. Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait.
4. Apabila kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:
   a. Pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana dan atau
   b. Melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas penyediaan dana.
5. Penyediaan dana kepada peminjam yang bukan merupakan pihak terkait yang disalurkan dan atau digunakan untuk keuntungan pihak terkait digolongkan sebagai penyediaan dana kepada pihak terkait.
6. Peminjam yang bukan merupakan pihak terkait yang menerima penyediaan dana sebagaimana dimaksud ada butir 5) dikategorikan sebagai pihak terkait.
7. Dalam hal bank akan memberikan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal yang mengakibatkan pihak tempat bank melakukan penyertaan modal (*investee*) menjadi pihak terkait, bank wajib memastikan:
   a. Rencana Penyediaan dana tersebut tidak melanggar ketentuan pemberian dana kepada pihak terkait.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Dana Besar (*Large Exposure*)

b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada *investee* tersebut setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan.
c. Persyaratan sebagaimana dimaksud sesuai Butir 1, 2, 3 dan 4 telah dipenuhi.

Pihak terkait meliputi:
1. Perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank.
2. Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali.
3. Perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan
4. Perusahaan dimana:
   a. Perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertindak sebagai pengendali.
   b. Perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 3 bertindak sebagai pengendali;
5. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank.
6. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal.
7. Perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2,3 dan 4.
8. Perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
   a. Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank.
   b. Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2,3,dan 4.
9. Perusahaan/badan yang 50 % (lima puluh per seratus) atau lebih Komisaris dan Direksinya merupakan Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan atau 4.
10. Perusahaan/badan dimana:
    a. Komisaris, Direksi , dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e) bertindak sebagai pengendali.
    b. Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3, dan atau 4 bertindak sebagai pengendali;
11. Perusahaan/badan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai 10 diatas.
12. Kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai 10 memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
13. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12.
14. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak -pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12.
15. Bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12 sepanjang terdapat *counterguarantee* dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12 kepada bank lain tersebut.
16. Perusahan/badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 6.

Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait

Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Tidak Terkait Kelompok

Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

Penyediaan Dana kepada BUMN

Penyediaan Dana kepada kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.

Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam apabila Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

BMPK	Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Tidak Terkait (Kelompok Peminjam)	BUMN
Pelanggaran BMPK	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelampauan BMPK	N/A	N/A	N/A	N/A

Transaksi kepada Pihak terkait

Pada tahun 2018, transaksi kepada pihak terkait (*Related Party Transaction)* telah dilakukan secara adil, berlaku umum (*normal commercial terms)*, wajar (*arm length basis)* dengan rincian sebagai berikut:

Penyediaan dana	Jumlah Debitur	OS
Pihak Terkait	574	5.322.650
Individu	50	154.887.635
top 25 BUMN	25	89.462.392
top 25 non BUMN	25	65.425.242
Group	50	156.798.861
Top 25 Group BUMN	25	99.428.280
Top 25 Group Non BUMN	25	57.370.581

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Kegiatan Politik

Selama periode pelaporan, Bank tidak memberikan/menyalurkan dana untuk kegiatan politik.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan

a. Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN
   Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisaris, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal Surat Direksi Nokep: S.07-DIR/KPS/02/2017 tanggal 22 Februari 2017. Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi harta kekayaan sebelum saat dan setelah selesai menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbaharui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

b. Koordinator Pelaporan LHKPN
   Koordinator pelaporan yang ditunjuk oleh BRI untuk mengelola dan memonitor proses pelaporan LHKPN adalah Kepala Bidang Kesekretariatan dan Protokoler dan Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan *Human Capital*. Berdasarkan struktur organisasi saat ini, terdapat 285 pekerja BRI (di luar Direksi dan Dewan Komisaris) yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari seluruh pejabat tersebut, mayoritas telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kewajiban pelaporan pada LHKPN.

Pelaporan LHKPN

BRI telah menyampaikan laporan LHKPN selama tahun 2018 sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Wajib LHKPN	Jumlah yang telah Melaporkan		Jumlah yang Belum	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	8	8	100%	0	0%
2	Direksi	12	12	100%	0	0%
3	Pekerja BRI	285	111	39%	174	61%
	Total	**305**	**131**		**174**	

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Transaksi Intra Group

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan diberbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan POJK Nomor:17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group.

Kebijakan transaksi intra group diatur dalam ketentuan internal BRI yang ditetapkan dalam SK Direksi BRI No:S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi BRI. Pengendalian risiko intra group bertujuan agar dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan ketergantungan LJK baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam konglomerasi keuangan.

BRI senantiasa mengawasi kinerja dan risiko bisnis yang timbul pada perusahaan anak dengan memastikan transaksi intra group sesuai aturan dan *limit* yang ditetapkan oleh regulator.

Struktur Konglomerasi Keuangan

Sesuai surat BRI kepada OJK No.B.140-DKP/GCG/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Struktur Konglomerasi Keuangan BRI adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan, Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Struktur Kepemilikan

Perusahaan Anak	Kepemilikan Saham	Tanggal Operasional (tgl.bln.thn)	Alamat
BRIsyariah	73%	16.10.2008	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	86.83%	08.02.1990	Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139, Jakarta
BRI Life	91%	28.10.1987	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950, Indonesia
BRI Finance	99%	01.08.1983	Wisma 46, Lantai 10 – Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Komite TKT	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
BRIsyariah	√	√	√	√
BRI Agro	√	√	√	√
BRI Life	√	√	√	√
BRI Finance	√	√	√	√

Struktur Organisasi Entitas Utama dan Anggota LJK

Entitas Utama

Struktur Organisasi Entitas Utama dibahas dalam BAB Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Anggota LJK : BRIsyariah	
Dewan Komisaris	
Hermanto Siregar	Komisaris Utama
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
Eko Suwardi	Komisaris Independen
Fahmi Subandi	Komisaris Independen

Dewan Pengawas Syariah - BRIsyariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan BRISyariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru BRISyariah, namun DPS juga melakukan kepastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intenal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Komposisi DPS BRIsyariah

Organisasi DPS BRIsyariah terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut:

Didin Hafidudin	Ketua DPS
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota DPS
Direksi	
Moch. Hadi Santoso	Direktur Utama
Agus Katon Eko S.	Direktur
Widodo Januarso W.	Direktur
Kokok Alun Akbar	Direktur
Wildan	

Anggota LJK : BRI Agro	
Dewan Komisaris	
Anna Maria Tjiadarma	Komisaris Independen
Edwin Sinaga	Komisaris
Heru Sukanto	Komisaris Independen
Direksi	
Agus Noorsanto	Direktur Utama
Bambang Krisminarno	Direktur
Ebeneser Girsang	Direktur
Herry Prayudi	Direktur
Anggota LJK: BRI Life	
Dewan Komisaris	
Tri Wintarto	Komisaris Utama
M. Rizqi R. Nasution	Komisaris Independen
Mulabasa Hutabarat	Komisaris Independen
Siswarin D. Hendarsapti	Komisaris
Sapto Haryono Wahyu	Komisaris

Dewan Pengawas Syariah - BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life merupakan Organ Perusahaan yang direkomendasikan DSN MUI yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan majelis pengawas aspek syariah, dimana setiap Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah didukung oleh Perangkat Dewan Pengawas Syariah yaitu sekretaris dan atau staff khusus Dewan Pengawas Syariah.

Komposisi DPS BRI Life

Organisasi DPS BRI Life terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota, sebagaimana tabel berikut:

Mohamad Hidayat	Ketua DPS
Agus Haryadi	Anggota DPS
Siti Haniatunnisa	
Direksi	
Gatot Mardiwasisto Trisnadi	Direktur Utama
Sugeng Sudibjo	Direktur
Khairi Setiawan	Direktur
Ansar Arifin	Direktur
Danny Cahya Rukmana	Direktur
Anik Hidayati	Direktur
Anggota LJK	
Dewan Komisaris	
I Komang Sudiarsa**)	Komisaris Utama
Ngalim Sawego**)	Komisaris
Boyke Budiono	Komisaris

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

Direksi	
Wisto Prihadi	Direktur Utama
Handayatni Ariefiana Harjanti	Direktur
Achmad Chairul Ganie	Direktur
Willy Halim Sugiarda	Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BRI, Entitas Utama memiliki pedoman untuk mendorong LJK Konglomerasi keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam implementasi pedoman tersebut, seluruh organ entitas utama dan LJK konglomerasi keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam fungsi pengawasan dan pengendalian intern.

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRI atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
3. Evaluasi pedoman dan penerapan tata kelola terintegrasi.

Direksi Entitas Utama

1. Menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan evaluasi pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap pedoman dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
4. Memastikan temuan dan rekomendasi dari pengawasan OJK atau regulator, auditor eksternal, satuan kerja audit terintegrasi, telah ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris dan Direksi Anggota LJK

Dewan Komisaris LJK Konglomerasi Keuangan

1. Pengawasan penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi, serta tindak lanjut temuan audit.
2. Membentuk Komite Pemantauan Audit dan Komite Pemantauan Kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Dewan Pengawas Syariah BRIsyariah

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank;
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran DPS BRIsyariah

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas Syariah akan melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah minimal sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Dalam risalah rapat memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat tersebut.

Dewan Pengawas Syariah BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara teknis disupport oleh manajemen, terhadap:

1. Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dan atau baru, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
2. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi; dan
3. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewajiban untuk:

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah;
3. Menyelenggarakan rapat rutin antara DPS dan/atau dengan manajemen paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun;
4. Membuat Risalah Rapat dengan lengkap, melalui bantuan manajemen, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan kepada seluruh DPS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir;
5. Menyusun laporan tahunan melalui bantuan manajemen, tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh Regulator.
6. Menyampaikan hasil laporan pengawasan tersebut kepada OJK dan menyampaikan salinannya kepada Manajemen serta menjadi bagian dari isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan berkala tersebut;
8. Meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan prinsip syariah;
9. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
10. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 tersebut, DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 10, DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Dewan Pengawas Syariah BRI Life

Dalam memberikan nasihat dan saran, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat yang berpedoman pada Piagam Dewan Pengawas Syariah yang diatur sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akandibicarakan.
3. Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
4. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Direksi LJK Konglomerasi Keuangan

1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menindaklanjuti temuan audit dari pihak internal dan eksternal.

Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi

3. Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di LJK Konglomerasi Keuangan.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi termasuk peemnuhan prinsip syariah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Memberikan masukan st*rate*gis kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI sebagai Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI BRI.

Tugas dan tanggung jawab SKAI BRI sbb :

1. Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris BRI sebagai Entitas Utama melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern atas LJK Konglomerasi Keuangan BRI dalam rangka penerapan kerangka tata kelola terintegrasi.
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Dalam melaksanakan pemantauan, SKAI BRI dapat melakukan hal-hal sbb:
   a. Pemantauan berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK Konglomerasi Keuangan BRI.
   b. Audit secara individual pada LJK Konglomerasi Keuangan BRI, atau
   c. Audit secara bersama atau *joint audit* pada LJK Konglomerasi Keuangan BRI.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko BRI. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bersifat independen, terpisah dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan unit kerja operasional (*risk taking unit*) di BRI. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan BRI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak. Koordinasi dilakukan antara lain dengan cara penyampaian informasi eksposur masing-masing Perusahaan Anak kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi BRI dan kepada RMC Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, danpengendalian risiko
3. Melakukan pemantauan risiko pada Perusahaan Anak berdasarkan hasil penilaian :
   a. profil Risiko setiap Perusahaan Anak
   b. tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
   c. profil Risiko Terintegrasi
4. Melakukan *stress testing* terintegrasi
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
   a. keakuratan metodologi penilaian risiko
   b. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen
   c. ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan *limit* risiko

Pelaksanaan kaji ulang secara berkala bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor internal dan faktor eksternal terhadap Konglomerasi Keuangan BRI

6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat st*rate*jik dan berpengaruh signifikan terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   Pengkajian usulan lini bisnis baru difokuskan pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan
7. Memberikan informasi kepada RMC Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi BRI atau Perusahaan Anak.
   Menyusun dan menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan BRI dan kepada RMC Terintegrasi. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan jika kondisi pasar berubah dengan cepat.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 2018

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan dua kali rapat bersama LJK Konglomerasi Keuangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Evaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2017.
2. Laporan Tahunan tahun 2017.
3. Progres Report Terhadap Hasil On Site *Review* OJK atas Konglomerasi Keuangan BRI .

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi selama tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menjaga struktur TKT telah memenuhi prinsip TKT dan ketentuan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan kebijakan/prosedur.
2. Evaluasi pelaksanaan Satuan Kerja Terintegrasi yaitu Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Audit Intern pada konglomerasi keuangan.
3. Penilaian *self assessment* TKT pada konglomerasi keuangan BRI.
4. Penyampaian pelaporan pelaksanaan TKT kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi selama tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja dan rencana audit intern terintegrasi (menjadi satu kesatuan dengan Perencanaan Audit Tahunan SKAI Entitas Utama).
2. Memonitor pelaksanaan fungsi audit intern Perusahaan Anak secara berkala setiap Triwulanan dengan ruang lingkup pelaksanaan *monitoring* sbb. :
   a. *Monitoring* pencapaian kinerja Perusahaan Anak
   b. *Monitoring* Laporan Hasil Audit Perusahaan Anak
   c. *Monitoring* tindak lanjut temuan signifikan Perusahaan Anak
   d. *Monitoring* pemenuhan SDM Audit Perusahaan Anak
3. Melaksanakan *joint audit* dengan ruang lingkup sebagai berikut:
   a. Melaksanakan audit terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa kredit BRI Life;
   b. Melaksanakan audit terhadap *core system* BRI Finance;dan
   c. Melaksanakan *Joint Audit* dengan SKAI BRI Life.
4. Melaksanakan *Quality Assurance* terhadap SKAI Perusahaan Anak.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi selama periode tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Risk Management Committe*e (RMC) Terintegrasi.
2. Pelaksanaan Profil Risiko Terintegrasi.
3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi BRI
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi.
5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

KEGIATAN CSR BRI MERUPAKAN BENTUK KEPEDULIAN DAN TANGGUNG JAWAB BRI YANG DILAKSANAKAN DENGAN SEMANGAT NASIONAL “BUMN HADIR UNTUK NEGERI” YANG MENGAKOMODIR SEMANGAT KEBERAGAMAN. KEGIATAN INI TERFOKUS PADA EMPAT BIDANG, YAKNI PENDIDIKAN, LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN.

BRI
Peduli
Pendidikan
Bangga BERINDONESIA
Simpedes

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BRI menjadikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social responsibility/CSR* sebagai kegiatan yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat, baik dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kegiatan *CSR* selanjutnya adalah bentuk kepedulian BRI serta cermin dari tanggung jawab BRI terhadap para pemangku kepentingan, masyarakat dan bangsa. Sejalan dengan semangat nasional, kegiatan *CSR* dilakukan dengan semangat "BUMN Hadir Untuk Negeri" yang mengakomodir semangat keberagaman masyarakat Indonesia. Pelaksanaan strategis *CSR* BRI terdiri dari 3(tiga) unsur, yaitu *people*, planet dan profit, serta terfokus pada 4(empat) bidang yakni pendidikan, lingkungan, kesehatan dan pengembangan kewirausahaan.

Tujuan dari *CSR* BRI adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan maupun masyarakat sekitar. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, wujud kepedulian BRI juga dilakukan melalui program Bina Lingkungan yang merupakan program pemberdayaan sosial masyarakat.

Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan,
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap pengembangan Sosial & Kemasyarakatan, dan
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen.

Kebijakan dan Acuan Pelaksanaan CSR

BRI berkomitmen penuh dalam melaksanakan kegiatan *CSR* yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam melaksanakan program kepedulian masyarakat, Perusahaan berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

a. UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
b. UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
d. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
e. UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
f. PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas
g. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
h. Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 beserta perubahannya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

BRI telah menetapkan *roadmap* implementasi green banking sesuai dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yakni mengintegrasikan risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) ke dalam aspek ekonomi/bisnis. BRI memiliki kebijakan khusus yang terkait kerangka LST Sub Sektor Kelapa Sawit sebagai sub sektor yang berdampak besar bagi lingkungan.

Sepanjang 2018 BRI menjalankan sejumlah program *CSR* yang bersentuhan langsung dengan lingkungan. BRI menyadari bahwa kepedulian terhadap lingkungan sangat penting mengingat hal ini berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem alam yang berdampak kepada kehidupan manusia. Beberapa kegiatan yang dilakukan BRI diantaranya adalah Program Mangrovisasi, Pengembangbiakkan Terumbu Karang, dan Aksi Tanam Pohon.

Selain itu, BRI memiliki divisi khusus yang mengelola aspek lingkungan yang berada di bawah Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Divisi Pengadaan Barang & Jasa. Divisi ini menjalankan fungsi kebijakan, pemantauan, dan pengawasan strategis. Pengelolaan kelestarian lingkungan dalam hal operasional BRI dilakukan terhadap efisiensi air, pemakaian kertas, energi dan sumber daya alam lainnya.

Sejak 2017, Perusahaan telah menetapkan *roadmap* implementasi *green banking* sesuai dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan OJK. Sesuai Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, bahwa pada Januari 2019 BRI sebagai bank BUKU 4 harus telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. BRI juga telah menyusun *Sustainability Report* sejak tahun 2012 untuk menjelaskan kontribusi BRI terhadap Lingkungan, sosial dan tata kelola sesuai *Global Reporting Iniative* (GRI).

Berdasarkan kebijakan tersebut, pada prinsipnya bank harus mengintegrasikan risiko lingkungan sosial dan tata kelola ke dalam aspek ekonomi/bisnis yang selama ini telah berlangsung. BRI memiliki kebijakan khusus yang terkait kerangka LST dalam proses pelayanan nasabah dan proses assesmen kredit dan termasuk kebijakan sektoral terhadap sektor komoditas yang terekspos risiko hutan.

Kebijakan tersebut dituangkan kembali ke dalam Kebijakan Umum Keberlanjutan BRI melalui SK Nokep.S.16-DIR/DMR/04/2017 yang merupakan Kebijakan tertinggi implementasi *Sustainable Finance* BRI. Sedangkan Strategi Implementasi Keberlanjutan BRI melalui SK Nokep.17-DIR/DMR/04/2017), merupakan strategi untuk masing-masing bidang yaitu : *Asset, Liabilities*, Operasional dan *Human Capital*.

Terkait *green banking*, BRI menerbitkan salah satu kebijakan khusus, yakni Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Sub Sektor Kelapa Sawit (SE Nose.S.27-DIR/DMR/04/2017). Sub sektor kelapa sawit sebagai sub sektor yang berdampak besar bagi lingkungan. Kebijakan ini mengatur Indikator Penerapan LST yang harus dipertimbangkan di sektor kelapa sawit, dan *Checklist* persyaratan dokumen.

Dalam memberikan layanan kepada nasabah Perusahaan berpedoman kepada kebijakan yang diatur oleh regulator, serta kebijakan internal perusahaan meliputi:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/DKSP/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Usaha.
3. Surat Kebijakan Direksi BRI Nokep: S.1051-DIR/LCC/12/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

Target dan Kegiatan yang Ditetapkan Manajemen untuk Tahun 2018

BRI berperan aktif mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan dilakukan sesuai dengan misi CSR BRI yakni memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

OJK telah menetapkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia dapat berperan serta dan aktif mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program keuangan berkelanjutan. Strategi BRI dalam implementasi *Sustainable Finance* / Keuangan Berkelanjutan adalah untuk memastikan BRI memiliki bisnis yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

Impementasinya antara lain:
1. Mengedepankan prinsip-prinsip penghematan energi, pelestarian lingkungan, memperhatikan aspek sosial dan tata kelola yang baik serta senantiasa mengutamakan konservasi energi
2. Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat disusun dalam rangka menunjang kemajuan perusahaan dari segi *corporate image* dilakukan dengan efisien terhadap sumber daya
3. Strategi: *paperless*, *e-office*, *green building*, *green IT infrastructure*, *digital operation*, *3R* (*Reduce, Reuse, Recycle)* dan lain-lain.

Adapun Implementasi *sustainability* pada operasional di BRI antara lain:
a) *E-Office*
b) CSR BRI Peduli
c) *E-Learning*
d) Parkir sepeda "*Bike To Work*"

Dalam melaksanakan berbagai program *CSR*, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target/rencana kegiatan. Adapun target/rencana kegiatan yang ditetapkan manajemen dan terealisasi sepanjang 2018 meliputi:

a. Program Mangrovisasi
Program ini telah dijalankan sejak 2013 dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pelajar, pemerintah, yayasan, maupun komunitas peduli lingkungan. Daerah cakupan program meliputi Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur. BRI juga melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat setempat berupa pengenalan tentang manfaat mangrove serta pengolahan hasil mangrove untuk meningkatkan perekonomian.

b. Pengembangbiakkan Terumbu Karang
BRI terlibat secara aktif dalam melestarikan terumbu karang melalui implementasi budidaya terumbu karang. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah wilayah, diantaranya Kepulauan Seribu, dan Manado, Sulawesi Utara. Selain memberikan manfaat ekologis, dengan adanya terumbu karang masyarakat dapat memperoleh alternatif atau tambahan pendapatan melalui pendirian pusat-pusat penyelaman, restoran, dan penginapan yang menjadi alternatif pendapatan bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan misi *CSR* BRI dalam Program BRI Peduli, yakni memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Aksi Tanam Pohon
Pada 2018, BRI menggelar aksi tanam pohon di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pada kegiatan itu, dilakukan aksi tanam 123 pohon dari jenis tanaman pinus. Tanaman Pinus diyakini merupakan jenis tanaman yang cepat tumbuh dan mudah dibudidayakan sehingga selain untuk konservasi lahan, tanaman ini juga bermanfaat secara ekonomis.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan

Sejalan dengan strategi *CSR* BRI, sepanjang 2018, BRI berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berdampak positif dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal itu sejalan dengan komitmen BRI tumbuh dengan tetap menjunjung kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaannya, BRI juga menggarisbawahi komitmen untuk mengimplementasikan *green banking* guna mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Kebijakan-kebijakan Tanggung Jawab Lingkungan BRI dalam Operasional Perusahaan:

a. *Paperless System*

Secara khusus, penerapan kebijakan *paperless* dan teknologi informasi sangat relevan dengan kondisi industri perbankan saat ini, termasuk BRI. Kedua hal ini juga menjadi fokus perhatian BRI dan dengan demikian efisiensi penggunaan energi, termasuk juga efisiensi pemakaian air, terus dilakukan. Himbauan ini tertuang dalam Surat Divisi JBR No. B.612-JBR/KJR/07/2013, tanggal 9 Juli 2013, dan mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang penghematan Energi dan Air serta Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012 tentang penghematan pemakaian listrik.

BRI berkomitmen meningkatkan efisiensi operasional melalui penghematan pemakaian kertas tentunya dengan dukungan sistem teknologi yang selalu dikembangkan oleh BRI. Sistem Informasi yang terintegrasi secara baik untuk kepentingan internal BRI dan Nasabah dengan ditunjang aplikasi-aplikasi yang secara implementasi sangat menunjang efisiensi operasional.

Aplikasi yang Mendukung Efisiensi Operasional BRI

1. Intranet dan internet terhubung *real* untuk yang memungkinkan komunikasi secara *real time*.
2. Presensi pekerja BRI dilakukan dengan EDC
3. Aplikasi terintegrasi BRISTARS yang mengimplementasikan efisiensi operasional, terdiri dari aplikasi terintegrasi sebagai berikut:
   a. *e*-Rekrutmen, sarana bagi para calon tenaga kerja yang ingin bergabung dengan BRI, melalui lamaran secara *online*.
   b. Digitalisasi *Assessment*, penilaian kompetensi pekerja dilakukan secara *online*.
   c. *e*-Mutasi, perpindahan pekerja antar unit kerja BRI yang diproses secara otomasi.
   d. Data pribadi pekerja aplikasi data pribadi secara otomasi.
   e. *e*-Cuti, untuk pekerja mengajukan permohonan pelaksanaan cuti serta proses persetujuan oleh atasan secara *online*.
   f. *e*-SPJ, dimana pengajuan perjalanan dinas pekerja BRI tidak lagi menggunakan kertas namun menggunakan aplikasi untuk dokumentasi dan persetujuan pemutus.
   g. *e*-Fasilitas Pinjaman Pekerja, untuk mengajukan permohonan fasiltas pinjaman secara *online*.
   h. *e*-Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, untuk mengajukan penggantian klaim biaya pengobatan dan proses penggantian secara *online*.
   i. *e*-Lembur, untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja Lembur secara *online* dan pembayaran upah lembur secara otomasi.
4. BRIHC (BRI *Human Capital*), untuk mengelola proses bisnis SDM.
5. SMK (Sistem Manajemen Kinerja) *online* untuk monitoring kinerja pekerja.
6. Portal Hubungan Industrial, untuk monitoring pelanggaran disiplin pekerja.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

7. *e*-Pensiun, untuk informasi benefit yang diperoleh untuk masa pensiun normal.
8. *e-Corporate Culture*, untuk monitoring implementasi budaya kerja pekerja BRI.
9. Konsultasi dan Informasi SDM, untuk informasi terkini mengenai SDM.
10. *e-Filing*, untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagai wajib pajak.
11. *Digital Office*, untuk efisiensi dan efektivitas surat menyurat internal.
12. Survey *Online*, survei kepuasan pelanggan dengan responden pekerja/unit kerja BRI.
13. BRISMILE (Sistem Manajemen Informasi Logistik Elektronik), yang terdiri dari Modul Pengadaan Aktiva Tetap, Modul Pengelolaan Aktiva Tetap, dan Modul Anggaran.
14. BRIPEDIA, merupakan aplikasi tentang ensiklopedia kebijakan dan prosedur BRI.
15. Portal inovasi, aplikasi sebagai wadah ide dan inovasi bagi Pekerja BRI.
16. BRISmart, aplikasi *e-learning management system* untuk Pekerja BRI.
17. BRIShare, aplikasi *knowledge management system* bagi Pekerja BRI.
18. BRISPOT, aplikasi *credit approval system* untuk kredit mikro.

Aplikasi *Paperless* untuk Nasabah BRI:

1. *e-tax*, aplikasi pelaporan pajak bagi nasabah. BRI yang pertama di Indonesia;
2. *e-Form*, *formless* untuk pelayanan *Frontliner* di Unit Kerja BRI;
3. *e-statement*, memberikan informasi melalui email yang didaftarkan;
4. *New account swap* untuk membantu nasabah menghubungkan produk pinjaman dan giro, tanpa harus memiliki dua rekening terpisah;
5. Menerapkan ATM 'tanpa bukti cetak' (*printreceipt*);
6. BRISPOT, merupakan aplikasi menggunakan system berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinan putusan pinjaman mikro untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*;
7. MY BRI, merupakan aplikasi yang menggunakan system berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinan putusan pinjaman konsumer untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*.

Data Pemakaian Kertas

Keterangan	Satuan	2017	2018
Pemakaian Kertas	Rim	30.800	13.641
Biaya Pengadaan	Rp Juta	1.007	652

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

b. Konsumsi Energi Listrik

BRI menyadari akan besarnya penggunaan energi dalam bidang operasional Bank, dan berkomitmen menjaga fasilitas energi dalam keadaan stabil. Dalam hal ini, BRI mengeluarkan kebijakan penghematan konsumsi listrik melalui pemakaian lampu hemat energi serta *setting* suhu udara yang wajar, dengan tetap menjaga kualitas *near zero downtime*. Selanjutnya, dalam hal penambahan unit kerja penambahahan *server* yang terintegrasi dengan teknologi dilakukan, sehingga pengelolaan data menjadi terpusat.

Pada akhir 2017, penggunaan konsumsi listrik di kantor pusat tercatat sebesar 7.993.500 Kwh, turun 3% dari tahun sebelumnya 8.484.520 Kwh. Penurunan ini dapat terjadi karena terdapat penggantian seluruh lampu di gedung BRI 1 dari lampu konvensional menjadi lampu *LED*.

Pada akhir 2018, penggunaan konsumsi listrik di kantor pusat tercatat sebesar 10,613,440 Kwh.

c. Penggunaan Kendaraan Operasional

Komitmen BRI dalam menjaga lingkungan yang bersih juga diwujudkan dengan penggunaan Pertamax sebagai bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah sejak tahun 2012 yang mengharuskan kendaraan operasional semua badan usaha milik negara (BUMN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

No	Keterangan (Kiloliter)	2017	2018
1	Konsumsi Bahan Bakar	219,47	230,51

d. Pengelolaan Dampak Lingkungan

Bentuk kepedulian BRI untuk mengurangi dampak lingkungan lain juga dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pengelolaan limbah padat bekerja sama dengan perusahaan berizin;
2. Pemakaian alat pemadam api ringan (APAR) berbahan yang ramah lingkungan;
3. Mengganti freon mengandung chlorofluocarbon (CFC), dengan freon jenis halotron.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan di BRI selalu diselaraskan dengan kebutuhan dan strategi perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap Pekerja memiliki peluang dan kesempatan yang sama baik dari sisi peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir maupun pengupahan. BRI memegang teguh kesetaraan (*equality*) dengan tidak membedakan suku, agama, maupun gender dalam setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilakukan oleh Divisi yang berada di bawah Direktur *Human Capital* dan Direktur Manajemen Risiko meliputi Divisi Kebijakan dan Pengembangan *Human Capital*, Divisi Operasional *Human Capital*, Divisi Pengelolaan Pekerja Kontrak dan *Outsourcing*, BRI *Corporate University* dan Divisi Manajemen Risiko Operational & Pasar.

Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

Untuk membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dan Pekerja, BRI secara rutin melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja untuk menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku 2 tahun sekali dengan maksimum perpanjangan selama satu tahun. Adapun PKB yang saat ini berlaku adalah PKB Periode tahun 2017-2019. PKB BRI telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh ketentuan didalam PKB BRI telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Perusahaan pun mengatur hak dan kewajiban Pekerja melalui kebijakan-kebijakan internal yang di antaranya meliputi:
1. Pengembangan Karier;
2. Kompensasi dan Benefit;
3. Manajemen Kinerja; dan
4. Hubungan Industrial.

Secara umum, baik PKB maupun kebijakan internal BRI lainnya, merupakan wujud komitmen Perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab secara maksimal kepada para Pekerja. Lebih lanjut implementasi dari hal tersebut dapat dijelaskan melalui hal-hal sebagai berikut:

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja yang Sama

Strategi pengelolaan *human capital* di BRI dijalankan dalam koridor arsitektur pengelolaan sumber daya manusia dengan budaya berbasis kinerja. Dalam kegiatan operasionalnya, Perusahaan menjamin tidak terdapat diskriminasi dalam hal gender, suku, agama, serta ras. Pekerja tetap wanita boleh menanggung keluarga tanpa syarat apapun. Kesempatan kerja dan pengembangan karier dilakukan dengan memerhatikan kompetensi setiap individu melalui metode yang terukur.

Jika dilihat berdasarkan komposisinya, komposisi pekerja wanita mencapai 42,98% dan pekerja pria mencapai 57,01%.

Jenis Kelamin	2016	Jun 2017	Des 2018
Wanita	40.859	41.035	38.662
Pria	52.474	52.644	51.281
Total	**93.333**	**93.679**	**89.943**

Pemberian kesempatan kerja yang sama di BRI juga ditunjukkan melalui rekrutmen penyandang difabel sebagai Pekerja. Kebijakan manajemen untuk merekrut penyandang difabel sebagai Pekerja baru diterapkan sejak tahun 2016.

Jenis Kelamin	2017	2018
Wanita	64 pekerja	41 pekerja
Pria	37 pekerja	56 pekerja
Total Pekerja Difabel	**101 pekerja**	**97 Pekerja**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Selanjutnya, terkait dengan pemberdayaan potensi SDM lokal, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk dapat bergabung dan memberikan kontribusi kepada BRI. Adapun persebaran jumlah pekerja berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

Kantor Wilayah	Jumlah Pekerja	
	Desember 2016	Desember 2018
Kantor Wilayah Banda Aceh	2070	1936
Kantor Wilayah Bandung	9055	2706
Kantor Wilayah Banjarmasin	4475	8888
Kantor Wilayah Denpasar	4822	4332
Kantor Wilayah Jakarta 1	3110	4766
Kantor Wilayah Jakarta 2	4529	2911
Kantor Wilayah Jakarta 3	4457	4276
Kantor Wilayah Jayapura	1660	4264
Kantor Wilayah Bandar Lampung	2909	1625
Kantor Wilayah Makassar	5257	5161
Kantor Wilayah Malang	7865	7617
Kantor Wilayah Manado	3448	3281
Kantor Wilayah Medan	4665	4405
Kantor Wilayah Padang	2376	2260
Kantor Wilayah Palembang	3626	3505
Kantor Wilayah Pekanbaru	3029	2894
Kantor Wilayah Semarang	6747	6541
Kantor Wilayah Surabaya	5118	4923
Kantor Wilayah Yogyakarta	8521	8091
Kantor Pusat	2393	2687
Audit Intern	2681	2352
Kantor Anak Perusahaan BRI	23	75
Kantor Bank Syariah	16	10
Kantor Cabang Khusus	157	150
Kantor Cabang Luar Negeri	16	37
BRI Corporate University	308	250
Grand Total	**93.333**	**89.943**

Kesempatan Pengembangan Diri

BRI menyadari bahwa industri perbankan merupakan industri dengan tingkat perubahan dan perkembangan yang sangat cepat terutama di tengah tren digitalisasi seperti saat ini, sehingga pengembangan kebijakan maupun kompetensi sumber daya manusia di industri perbankan perlu terus diperbaharui agar tetap relevan dengan kondisi pasar.

Pada 2018, BRI telah memfasilitasi pekerja dari berbagai jenjang jabatan untuk memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan dengan realisasi anggaran sebesar Rp603.053.000.000, dengan biaya per pekerja adalah sebesar Rp203.000/peserta. Sejak 2016 BRI mengimplementasikan *Blended Learning*, yaitu metode pendidikan dengan perpaduan *in-class learning* secara tatap muka langsung dan *e-learning*. Perusahaan telah menyelenggarakan berbagai program *training* dengan realisasi jumlah peserta pendidikan pada periode

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Januari – Desember 2018 sejumlah 2.803.224 peserta. Dimana jumlah tersebut merupakan jumlah dari peserta pendidikan *In Class* yaitu 131.114 dan peserta pendidikan *E-Learning* sebesar 2.672.110.

Remunerasi dan Benefit

Kompetisi dalam mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas semakin ketat, sesuai dengan perkembangan industri, hadirnya industri digital dan tuntutan perkembangan jaman. Dalam mengelola pengupahan, remunerasi dan benefit, BRI senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan perusahaan.

Perusahaan memberikan kompensasi secara adil, kompetitif, serta memperhatikan strategi dan perkembangan bisnis perusahaan. Struktur pengupahan BRI dirancang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan kompetensi pekerja dan bobot jabatannya, tanpa membedakan gender pekerja. Kompensasi kepada pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kompensasi yang bersifat tetap terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan, serta kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pencapaian kinerja.

Perusahaan menerapkan kebijakan kenaikan upah berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*), sehingga pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kenaikan upah yang tinggi pula. Selain itu, guna mendorong prestasi kerja yang optimal, BRI memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variable sama sekali.

BRI senantiasa memastikan bahwa upah minimum yang diberikan kepada pekerja sejak bergabung telah berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap wilayah Perusahaan. Penambahan jumlah pekerja dan pemenuhan kompensasi dan benefitnya berdampak pada peningkatan alokasi dana bagi pekerja. Namun demikian, BRI memandang alokasi yang juga diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi pekerja secara komprehensif ini merupakan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya Pengelolaan Ketenagakerjaan

Komponen	Angka Bank Saja (Rp Juta)		
	2016	2017	2018
Gaji, Upah, dan Tunjangan	8.542.413	9.096.616	10,590,613
Bonus,Insentif, dan Tantiem	5.816.691	6.234.168	5,874,193
Pendidikan dan Pengembangan	578.568	534.097	603.053
Tunjangan Kesehatan	358.918	371.686	397,009
Jaminan Jamsostek	522.249	606.823	678,206
Pemutusan Hubungan Kerja	153.281	304.976	309,403
Pensiun Iuran Pasti	231.105	256.675	291,569
Cuti Besar	308.429	289.150	442,565
Pensiun Imbalan Pasti	513.384	457.552	744,509
Penghargaan Tanda Jasa	150.349	155.894	129,291
Lain-lain	472.964	508.695	1,157,543
Total	17.648.351	18.816.332	21,217,954

Turnover Karyawan

Setiap tahun BRI menyelenggarakan survei keterikatan Pekerja yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterikatan Pekerja terhadap Perusahaan. Untuk menjaga independensi dan menghindari *conflict of interest*, survei keterikatan Pekerja di BRI dilaksanakan oleh Unit Kerja di luar Direktorat Human Capital yang membidangi riset korporasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam menganalisis *engagement* Pekerja adalah *Aon Hewitt Engagement Model*. Pendekatan ini mencoba melihat pengaruh dari *engagement drivers*, yang merupakan area di mana manajemen dapat melakukan kontrol dan tindakan, dalam memengaruhi keterikatan Pekerja. Adapun *engagement drivers* yang digunakan dalam survey ini di antaranya adalah :

1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Komunikasi
3. Kepemimpinan
4. Kerja Tim
5. Keseimbangan Kerja dan Pribadi
6. Kesempatan Berkembang
7. Kompensasi
8. Kondisi Tempat Kerja dan Sumber Daya

Kedelapan *engagement drivers* tersebut dikemas menjadi 54 (lima puluh empat) pertanyaan tertutup yang terkait langsung dengan *engagement drivers* dan 6 (enam) pertanyaan tentang komponen *Say, Stay,* dan *Strive* (3S) yang merupakan *engagement outcomes*.

Hasil survey menunjukkan bahwa indeks keterikatan Pekerja BRI pada tahun 2018 adalah sebesar 3.14 dari skala 4 atau naik sebesar 0.02 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 3,12. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan yang telah dilakukan manajemen di sisi pengelolaan human capital telah dirasakan oleh Pekerja di Perusahaan.

Kepuasan Pekerja BRI terhadap pengelolaan *human capital* salah satunya tercermin dari tingkat *turnover*. Pada tahun 2018, tingkat *turnover* Pekerja BRI tercatat sebesar 2.97%, nilai ini masih lebih rendah dari tingkat *turnover* Pekerja di industri yang mencapai 7%.

Jumlah Pekerja berdasarkan Status Kepegawaian

Status pekerja BRI umumnya adalah Pekerja Tetap (Termasuk pekerja dalam masa percobaan) 60.973, Pekerja Kontrak 28.970, *trainee* 63 dan Pekerja *Outsourcing* 33.949. Adapun komposisi pekerja BRI menurut status Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Status	2016	2017	Des 2018
Pekerja Tetap	58.811	60.764	60.973
Pekerja Kontrak	34.262	31.994	28.970
Trainee	64	100	63
Outsourcing	36.197	37.929	33.949
Total	**129.334**	**130.787**	**125.039**

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Penanganan komplain Pekerja merupakan salah satu perhatian Manajemen BRI. Hal ini merupakan bentuk penegasan komitmen Perusahaan dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Manajemen dengan seluruh Pekerja. Penegasan komitmen Manajemen terhadap penanganan komplain Pekerja tersebut diwujudkan melalui penerbitan kebijakan mengenai *Whistle Blowing System* (*WBS*). WBS sendiri merupakan alat monitoring dan pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja melalui pesan singkat (*Short Message Service*/SMS), surat tertulis, atapun melalui elektronik *form* di *website* yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama BRI dan dikelola langsung oleh *Top Management* Perusahaan.

Selain melalui *Whistleblowing System* (*WBS*), BRI pun memiliki saluran komunikasi *Call Center* SDM untuk penanganan komplain Pekerja di bidang SDM. Melalui *Call Center* SDM, pekerja dapat menyampaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan terkait pekerjaan maupun permasalahan pribadi yang membawa dampak secara langsung terhadap pekerjaan. Kedua sarana dan fasilitas komunikasi tersebut menunjukkan komitmen kuat Perusahaan dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Perusahaan dan pekerja.

Jumlah Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Jumlah Telepon Melalui Call Center SDM

	2017	2018
Telepon diterima	23.649	15.337
Telepon diselesaikan/ditanggapi	23.649	15.337

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Agen Penerimaan Telepon Melalui *Call Center* SDM

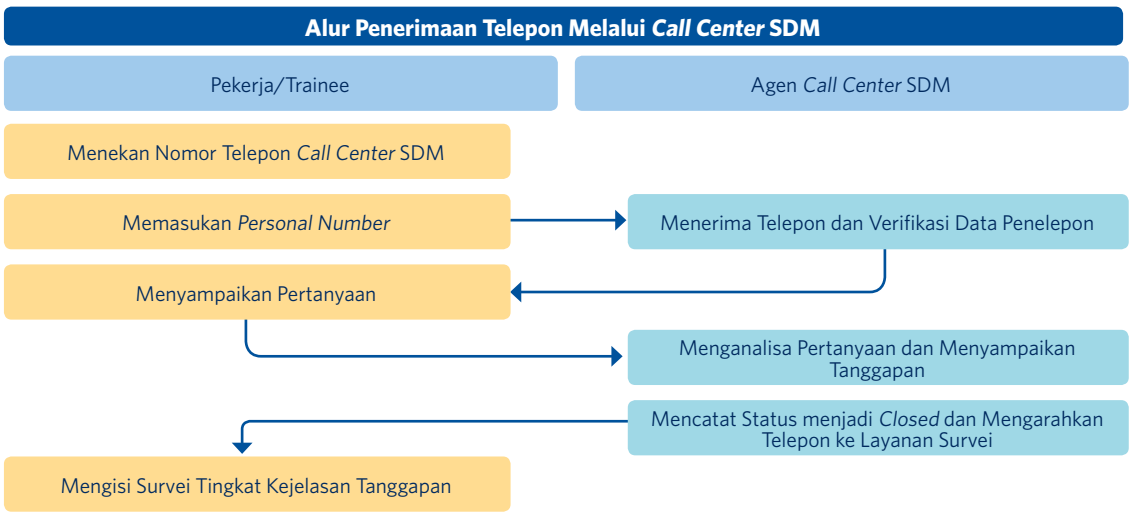

KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu risiko operasional yang penting. BRI berupaya dalam mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para karyawan dan seluruh *stakeholders* yang berada di lingkungan BRI. BRI memiliki kebijakan untuk memberikan lingkungan bekerja yang aman dan nyaman. Kebijakan dimaksud telah tercantum di dalam beberapa dokumen perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Surat Edaran (SE) *Business Continuity Management* (BCM)
  SE BCM merupakan pedoman umum dalam mempersiapkan BRI untuk menghadapi dan melindungi dari berbagai potensi kerugian finansial dan non finansial yang bersifat *catastrophic* sebagai dampak dari kejadian bencana.

- Petunjuk Pelaksananaan (Juklak) *Emergency Response Plan* (ERP)
  Juklak ERP merupakan salah satu komponen BCM sebagai pedoman/panduan dalam menjaga kemanan dan keselamatan jiwa seluruh pegawai, nasabah, dan pihak ketiga pada saat terjadi gangguan/bencana. Prosedur ERP terfokus pada pengamanan dan penyelamatan jiwa.

Bentuk pengelolaan K3 yang telah dilakukan BRI meliputi:

Pencegahan

Kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan, kebakaran, penanganan situasi darurat dan pemberian pertolongan pertama pada Kecelakaan (P3K) kepada pekerja yang telah dilakukan BRI antara lain:

1. Melakukan *asessment* potensi risiko, kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya apa yang dapat timbul di tempat kerja.
2. Melakukan sosialisasi dan uji coba terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
3. Melakukan pelatihan pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
4. Melakukan sosialisasi tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran dan gempa bumi.
5. Melakukan uji coba tanggap darurat evakuasi kebakaran.
6. Melakukan uji coba tanggap darurat evakuasi gempa bumi.
7. Penyediaan peralatan tanggap darurat dan keselamatan di tempat kerja.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan Risiko Kecelakaan Kerja di BRI

Di Area Bisnis (*Business Area*)	Di Luar Area Bisnis (*Non Business Area*)
Gedung bertingkat, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), maupun unit kerja mobile berbasis *e-channel*	Lokasi peninjauan pembangunan proyek dan kegiatan kunjungan nasabah
· Pelaksanaan K3 difasilitasi kebijakan pengelolaan gedung	· Pelaksanaan K3 difasilitasi pengelola proyek
· Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala	· Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti *safety induction*
· Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran	· Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup personal *accident* dan program Jaminan Kecelakaan Kerja
· Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung	
· Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung Oksigen (O2), kotak obat P3K, perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (*exit window*)	
· Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang diikuti oleh pekerja, sekuriti, dan pengelola gedung	
· Penyediaan dua mobil ambulans di kantor pusat dan bekerja sama dengan BRI Medika (Anak perusahaan Dapen BRI)	

Fasilitas *General Medical Check Up* (GMCU) dan Santunan

Faktor kesehatan menjadi sangat penting dan ikut berdampak terhadap produktifitas kinerja sumber daya manusia. Untuk itu, BRI berupaya memberikan berbagai fasilitas kesehatan kepada karyawan, baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk mengobati karyawan yang sakit. BRI juga memberikan fasilitas *general medical check up* dan fasilitas jaminan kesehatan. Kepada pekerja yang menderita cacat ringan, BRI menempatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan memberikan fasilitas *general medical check up* dan fasilitas jaminan kesehatan.

BRI memberikan fasilitas asuransi jiwa dan *personal accident* bagi seluruh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan pekerjaan sepanjang dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, dengan manfaat meninggal dunia atau cacat.

Dalam hal terdapat pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud, maka fasilitas tersebut diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Program BRI Peduli merupakan induk program tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan kepentingan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program BRI Peduli adalah implementasi dari program Bina Lingkungan yang secara internal mengacu pada Surat Edaran NOSE. S. 12 – DIR/ SKP/ 01/ 2018, tanggal 31 Januari 2018, perihal Pelaksanaan Program BRI Peduli Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dimana Surat Edaran tersebut berpedoman pada Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri BUMN tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) No. Per-09/ MBU/ 07/ 2015 tanggal 03 Juli 2015 beserta perubahannya yang terakhir yakni Peraturan Menteri BUMN No Per-02/ MBU/ 7/ 2017 tanggal 5 Juli 2017.

Terdapat 7 sektor yang menjadi obyek sasaran pelaksanaan Program BRI Peduli yaitu:

- Sektor bantuan untuk korban bencana alam, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA PEDULI
- Sektor bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA CERDAS
- Sektor peningkatan kesehatan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA SEHAT
- Sektor pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA MEMBANGUN
- Sektor sarana ibadah, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA TAKWA
- Sektor pelestarian alam, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA LESTARI
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA SEJAHTERA

Bank BRI melaksanakan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan melalui Program Bina Lingkungan yang disebut dengan Program BRI Peduli.

Kenaikan realisasi penyaluran program BRI Peduli Periode 2016-2018

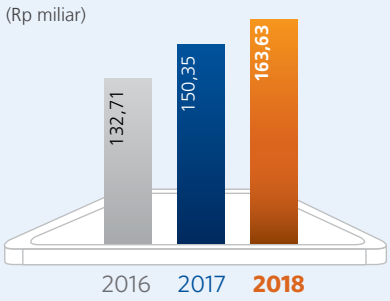

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Anggaran Program BRI Peduli dan Pengalokasiannya

Pada tahun 2018, BRI menyalurkan dana sebesar Rp 163,63 miliar untuk Program BRI Peduli.

Sepanjang tahun 2018, Bank BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp163,63 Milyar untuk pelaksanaan program BRI Peduli yang meliputi 7 (tujuh) sektor. Adapun rincian penyaluran Program BRI Peduli selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Sektor	2016	%	2017	%	2018	%
Indonesia Peduli	1.414.781.307	1,07%	2.394.042.761	1,59%	**6.845.484.366**	4,18%
Indonesia Cerdas	27.027.916.471	20,37%	32.990.028.609	21,94%	**53.087.712.848**	32,44%
Indonesia Sehat	22.827.520.022	17,20%	21.596.164.343	14,36%	**22.384.597.948**	13,68%
Indonesia Membangun	26.463.322.958	19,94%	31.455.378.146	20,92%	**22.895.422.555**	13,99%
Indonesia Takwa	27.177.503.630	20,48%	29.095.446.575	19,35%	**27.404.110.789**	16,75%
Indonesia Lestari	1.992.366.872	1,50%	723.303.800	0,48%	**722.965.000**	0,44%
Indonesia Sejahtera	25.724.377.567	19,38%	32.094.333.268	21,35%	**30.294.264.189**	18,51%
Indonesia Bermitra*	80.795.000	0,06%	-	-	-	-
Total	**132.708.583.827**	**100,00%**	**150.348.697.502**	**100,00%**	**163.634.557.695**	**100,00%**

*sejak tahun 2017 Indonesia Bermitra dialihkan ke Divisi Bisnis Kecil & Kemitraan.

Realisasi Anggaran Program BRI Peduli 2018

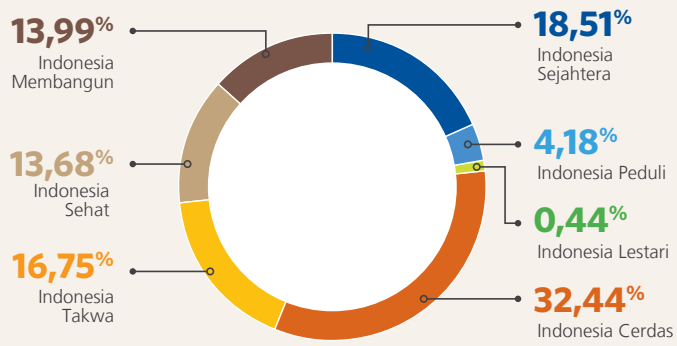

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Penghargaan Program BRI Peduli

Pada tahun 2018, pelaksanaan Program tanggung jawab sosial perusahaan Bank BRI telah mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan atau *award* dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun penghargaan atau *award* terkait kinerja Program BRI Peduli adalah sebagai berikut :

- **Asia Money – *Best Bank For CSR 2018***
- **Top CSR – *Top Leader On CSR Commitment 2018***
- **Top CSR – Top CSR 2018 Program PKBL BUMN**
- **Universitas Trisakti - *Overall CSR Performance kategori Finance Industry***
- **Universitas Trisakti – *Best Community Involvement and Development***

Kegiatan Selama Tahun 2018

Bank BRI melaksanakan kegiatan BRI Peduli melalui 7 (tujuh) program utama yaitu Program Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Membangun, Indonesia Takwa, Indonesia Lestari, dan Indonesia Sejahtera.

Sepanjang tahun 2018, Bank BRI telah melaksanakan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di bawah payung Program BRI Peduli, kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

A. Indonesia Peduli

Sepanjang tahun 2018, Indonesia mengalami beberapa kejadian bencana alam, antara lain; Gempa Bumi di Lombok, NTB dan sekitarnya; Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu, Sigi, Donggala Sulawesi Tengah dan sekitarnya; dan Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Banten dan Lampung.

Bank BRI melalui program Indonesia Peduli memberikan respon cepat atas musibah tersebut dengan memberikan bantuan tanggap darurat bencana alam berupa kebutuhan dasar masyarakat (sembako, selimut, obat-obatan, susu bayi, air bersih, dll), dan pembangunan Rumah Hunian Sementara (Huntara).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Selama tahun 2018, Bank BRI telah melaksanakan Program Indonesia Peduli di berbagai tempat yang mengalami bencana alam dengan total dana yang direalisasikan mencapai Rp 6,85 Milyar. Adapun rincian beberapa kegiatan Program Indonesia Peduli atau kegiatan tanggap darurat bencana diantaranya sebagai berikut :

No	Nama Program	Daerah	Realisasi (Rp)
1	Tanggap darurat bencana gempa bumi Lombok Nusa Tenggara Barat dalam bentuk kebutuhan dasar dan hunian sementara	Lombok, NTB	4.035.152.925
2	Tanggap Darurat Bencana Banjir;	Wajo Sulawesi Selatan, Solok Selatan, Padang, Aceh Selatan, Brebes, Lampung Selatan, Mandailing Natal Sumatera Utara, Pasaman Sumatera Barat, Pacitan, Bojonegoro, Aceh Tenggara, Tasikmalaya, Tuban, Cirebon, Demak, Mamuju.	1.036.853.106
3	Tanggap darurat bencana gempa bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah	Palu, Donggala, Sigi	605.438.391
4	Tanggap Darurat Gempa	Sumenep, Poso, Banjarnegara, Mamuju, Parigi, Mamasa	509.107.400
5	Tanggap Darurat Tanah Longsor	Kutacane, Kuningan, Pacitan, Banjarnegara, Wonogiri	405.064.050
6	Tanggap darurat bencana tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau	Pandeglang	252.174.192

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

B. Indonesia Cerdas

Bank BRI berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan dunia pendidikan di Indonesia melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk merealisasikan Program Indonesia Cerdas di tahun 2018, Bank BRI telah mengalokasikan dana sebesar Rp 53,09 Milyar. Adapun beberapa Program Indonesia Cerdas antara lain:

1) Program Beasiswa

Sebagai salah satu wujud kepedulian Bank BRI untuk turut berperan serta dalam memajukan sektor pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, BRI secara konsisten memberikan bantuan beasiswa pendidikan dengan kategori berprestasi dan/atau kurang mampu. Program beasiswa BRI secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) program utama, meliputi:

- **Beasiswa Indonesia Cerdas**

Program Beasiswa Indonesia Cerdas merupakan program bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/i pada jenjang Pendidikan Strata 1 (S-1) dan Diploma-3 (D3).

Total anggaran yang dialokasikan oleh Bank BRI untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp. 10 Milyar yang disalurkan kepada 2.000 mahasiswa/i dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	Beasiswa Indonesia Cerdas	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	10.000.000.000

- **Beasiswa Lainnya**

Selain Program Beasiswa Indonesia Cerdas, Bank BRI juga memiliki program beasiswa lainnya bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain :

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Peserta
1	Beasiswa kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi	- Universitas Padjajaran Bandung - Yakespen - Universitas Terbuka - Universitas Negeri Malang - Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang - Universitas Airlangga	11.674.420.000	1.309

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Peserta
2	Beasiswa pendidikan untuk siswa/ i Sekolah Menengah Atas/ sederajat	Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Denpasar	6.511.400.000	1050
3	Beasiswa Nusantara Cerdas/ BNC Angkatan IV bekerjasama dengan Kemendikbud (Program lanjutan tahun 2017)	- Universitas Syiah Kuala - Universitas Mataram - Universitas Hasanuddin - Universitas Tanjung Pura - Universitas Mulawarman	962.596.200	25
4	Beasiswa Jurnalis Cerdas (Program lanjutan tahun 2017)	Jabodetabek	515.550.000	29

2) Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan lainnya

Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya ketersediaan sarana infrastruktur dan sarana penunjang pendidikan. Melalui Program Indonesia Cerdas, Bank BRI berperan aktif memberikan bantuan dalam bentuk perbaikan gedung sekolah & pondok pesantren, penambahan kelengkapan alat penunjang pendidikan, pemberian bus penunjang pendidikan, Perpustakaan keliling, pengadaan peralatan laboratorium, buku literatur, alat multimedia, komputer, dan komponen pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya. Adapun beberapa bantuan sarana infrastruktur dan sarana penunjang pendidikan yang telah disalurkan oleh Bank BRI, antara lain:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Bantuan Pembangunan dan atau perbaikan gedung sekolah, pondok pesantren dan institusi pendidikan lainnya	- Universitas Surabaya, Universitas Panca Budi Medan, Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Universitas Teknologi Sumbawa - SMK Muhammadiyah 1 Wanareja, SMK Raudlatul Jannah Probolinggo, SMK Bangun Nusantara - SMP di PulaiLiran Maluku Barat Daya, SMP Adhyaksa 2 Kupang, SMP Plus Daanul Jannah Jakarta, SMP PGRI 1 Cianjur, SMP Maswati Cikalong Wetan, MTs.Sunan Ampel Gresik, Mts Darussalam, MTS Al Karimi 1, Mts Darululum II Pamekasan, MTs Muchtarul Ulum Sampang, Madrasah Raudhatul Muata'llimin, MTS Mathbaul Huda, MTs N Kualuh Hulu Medan - SD Negeri 105 Bengkulu, SD Hang Tuah Piabung Pesawaran Lampung, SD Negeri Lalawang Mamuju, SDN Belendung II Cikampek, SDN Cengkong III Cikampek, SDIT Iqro Stabat Medan, MI Nurul Falah Cibalongsari, MI Al Ikhlas Karawang, MI Hidayatus Shibyan - Taman Kanak-Kanak Kartika Yonif Raider Khusus 111, TK Kartika Kodim 1412 Kolaka, TK Angkasa Lanud Iswahjudi Malang, Sekolah TK Kartika XXIX-12 Yonarmed 4 105 GS, Gita Adhyaksa dan TK Adhyaksa X Kupang, PAUD dan TK Aisyiyyah, PAUD Aisyiyyah Bustanul Athfal, Paud Al Idrus Bekasi, - MDTA Ar-Rasyidin Kisaran, DTA Baitul Ankis Subang, TPQ Al Jamaah Masjid Al Jamaah, TPQ Tarbiyatus Shibyan, Pesantren Usysyaqul Quran, Pondok Pesantren Assalam Solo, Ponpes Al-Muttaqin Ponorogo,Yayasan Tabungan Surga Cibinong, Yayasan Perwanida Kemenag Madiun, Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng, INSAN MUMAYAZ (YAISMU) Bogor, Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran Annayyiroh	16.148.930.602

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)
2.	Bantuan kendaraan Penunjang Pendidikan (Bis, Mobil, dll)	- Mobil Pintar sejumlah 3 unit untuk Kemendikbud - Fakultas Teknik & Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya - Bus Universitas Negeri Jember - Bus Penunjang Pendidikan Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang - Bus Penunjang Pendidikan untuk IAIN Bengkulu - Bus penunjang pendidikan Politeknik Negeri Ujung Pandang - Bus penunjang pendidikan untuk Universitas HKBP Nommensen Medan - Mini bus mahasiswa merk Toyota Hiace mahasiswa untuk Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang - Bus Penunjang Pendidikan Untuk Iain Batusangkar - Mini bus penunjang pendidikan untuk Universitas Kristen Duta Wacana (UKDM)	7.022.300.000
3.	Bantuan pemberian perlengkapan pendidikan, seperti pengadaan peralatan laboratorium, buku literatur, alat multimedia, komputer, dan komponen pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya	- Universitas Respati Yogyakarta - Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI) - Pondok Pesantren Buntet Cirebon - ISBI Bandung - PPPK Petra Surabaya - SMP Negeri 2 Bawen Kab.Semarang - SLTP/SLTA binaan dinas pendidikan Kabupaten Kerinci - Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah Jagakarsa-Jakarta Selatan	6.248.009.795

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

3) Siswa Mengenal Nusantara

Program Siswa Mengenal Nusantara merupakan program pertukaran pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memupuk rasa bangga terhadap bangsa dan tanah airnya.

Selain diperkenalkan dengan budaya daerah lain, siswa-siswa tersebut juga diberikan pembekalan berupa *capacity building*, pengenalan bisnis BUMN, studi banding ke sekolah unggulan, dan kunjungan kepada nasabah mitra BUMN. Dengan adanya program ini, diharapkan siswa-siswi dapat memahami peran dan fungsi BUMN dalam menyejahterakan masyarakat, menambah wawasan dan pengetahuan tentang kekayaan alam dan budaya nusantara, serta menumbuhkan rasa nasionalisme.

No	Bantuan	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Peserta
1.	Siswa Mengenal Nusantara (SMN)	Mengirimkan 25 pelajar SMA/ Sederajat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat ke provinsi Bengkulu dan menerima pertukaran pelajar SMN sebanyak 25 pelajar SMA/ Sederajat asal provinsi Bengkulu ke provinsi Sulawesi Barat	469.603.500	50 orang siswa-siswi

4) Taman Bacaan Sekolah

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Penerima
1	10 Taman Baca untuk SDN 22 Ternate, SDN 7 Namlea, SD Inpress Wayabula, MTS Negeri Majenang, SDN 3 Pongo, SDN 01 Ngabang, SDN 1 Gelogor, SDN 13 Muara Siberut, SDN 004 Sebatik Tengah, SMPN 17 Serang	1.104.300.000	10 Sekolah di 8 provinsi

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

C. Indonesia Sehat

Indonesia Sehat adalah program tanggung jawab sosial Bank BRI yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Sepanjang tahun 2018, Bank BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 22,38 milyar,- untuk pelaksanaan program ini. Beberapa jenis bantuan terkait Indonesia Sehat antara lain:

1) Bantuan Sarana Penunjang Kesehatan

Bantuan sarana penunjang kesehatan kepada Pemda, Rumah Sakit, TNI, Polri, atau yayasan dan instansi lainnya dalam bentuk mobil *ambulance*, dan peralatan penunjang kesehatan lainnya.

Pada tahun 2018 BRI telah memberikan bantuan sarana penunjang kesehatan, yaitu:

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Penerima
1.	Bantuan Pemberian 72 mobil *ambulance*	Meulaboh; Tapaktuan; Bandung; Purwakarta; Sukabumi; Cimahi; Cibadak; Bandung; Banjarmasin; Samarinda; Balikpapan; Tarakan; Martapura; Tanjung Selor; Jakarta Karawang; Depok; Pandeglang; Serang; Sanggau; Biak; Jayapura; Merauke; Bengkulu; Metro; Kendari; Sengkang; Pinrang; Makassar Somba Opu; Malang; Jember; Magetan; Nganjuk; Pacitan ; Lumajang; Malang; Manado; Gorontalo; Limboto; Medan Sisingamangaraja; Rembang; Bojonegoro; Jombang; Lamongan; Pamekasan; Sampang; Sumenep; Surabaya; Yogyakarta; Magelang; Surakarta; Temanggung; Wonosari	18.628.541.400	72 Rumah Sakit/ Instansi/ Lembaga lainnya
2.	Bantuan pemberian alat penunjang kesehatan Rumah Sakit	- RS. Dharmais - Polres Lahat - RS PKU Muhammadiyah	1.181.831.712	3 Rumah Sakit/ Poliklinik/ Lembaga Kesehatan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

2) Layanan Kesehatan

Bank BRI memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang dilaksanakan secara berkala dengan cakupan yang terus bertambah. Layanan kesehatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak, dalam bentuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori layanan kesehatan antara lain :

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Penerima
1.	Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bantuan Makanan Tambahan Gizi	Jakarta	361.891.150	1.000 orang

D. Indonesia Membangun

Indonesia Membangun adalah Program BRI Peduli untuk membantu masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan fasilitas umum. Beberapa kegiatan dalam program ini diantaranya pembangunan sarana air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

Realisasi anggaran yang telah dikeluarkan untuk program Indonesia Membangun pada tahun 2018 mencapai Rp22,90 milyar. Program Indonesia Membangun antara lain:

1) Teras BRI Nusantara

Teras BRI Nusantara adalah program desa binaan Bank BRI yang fokus kepada pengembangan klaster usaha, dan/atau kawasan wisata. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi suatu kawasan atau komunitas bisnis agar dapat lebih maju dan berkembang di tengah iklim persaingan usaha yang semakin ketat. Adapun Program Teras BRI Nusantara ini dilaksanakan di 19 Kanwil seluruh Indonesia.

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Teras BRI Nusantara	Wilayah supervisi 19 Kanwil BRI : Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	17.100.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

2) Sarana umum lainnya

Selain pembangunan Teras BRI Nusantara, BRI juga melakukan pembangunan sarana umum lainnya. Pembangunan tersebut diprioritaskan pada fasilitas umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung, beberapa diantaranya:

No	Kegiatan	Lokasi	Realisasi (Rp)
1	Sarana Air Bersih	Soe, Cibinong, Palembang, Tanjung Balai Karimun, Jepara	505.858.393
2	Pembangunan Jalan Desa	Subang, Majalengka, Cianjur, Jepara, Bandung, Buleleng, Ponorogo, Tulungagung, Jepara, Klaten, Sragen	1.239.679.000
3	Perbaikan dan Pembangunan Pasar, Posko Keamanan, Balai Warga	Bandung, Subang, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Bekasi, Aceh, Malang	947.583.500

E. Indonesia Takwa

Melalui program Indonesia Takwa, Bank BRI turut serta berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kultur masyarakat yang religius dengan memberikan bantuan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah serta memenuhi kelengkapan penunjang kegiatan peribadatan. Total realisasi anggaran untuk Program Indonesia Takwa pada tahun 2018 mencapai Rp27,40Milyar. Adapun implementasi Program Indonesia Takwa ini meliputi :

1) Pembangunan dan perbaikan Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Pura, dsb),
2) Bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peribadatan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

F. Indonesia Lestari

Bank BRI melalui Indonesia Lestari turut serta berperan aktif dalam menggalakkan upaya-upaya menjaga kelestarian alam. Sepanjang tahun 2018, Bank BRI telah menyalurkan dana untuk Program Indonesia Lestari sebesar Rp722,97Juta. Adapun beberapa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Lestari yaitu :

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pembangunan wisata bunga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran Bandung	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNPAD	267.840.000
2	Program penghijauan penanaman mangrove di Peukan Badakerjasama dengan Kudam IM Banda Aceh	Kudam IM Banda Aceh	80.000.000
3	Bantuan dana BL pengadaan pot tanaman Kampung Glintung Malang	Kampung Glintung	43.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

G. Indonesia Sejahtera

Indonesia Sejahtera merupakan program BRI Peduli terkait bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Total dana yang disalurkan oleh Bank BRI pada tahun 2018 melalui program Indonesia Sejahtera mencapai Rp30,29 Milyar. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Bisnis UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Pada tahun 2018, Bank BRI melalui program Indonesia Sejahtera turut mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM melalui beberapa kegiatan diantaranya :

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan dan pelatihan dalam rangka Program Rumah Kreatif BUMN Bank BRI Tahun 2018	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banajrmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	2.000.000.000
2.	Program Apresiasi Difabel Berkarya	Jabodetabek	250.000.000
3.	Bantuan pengadaan 50 unit gerobak UMKM Pangkep	Sulawesi Selatan	240.000.000
4.	Bantuan Renovasi kios pujasera Pantai Padang	Sumatera Barat	150.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
5.	bantuan 10 unit gerobak UMKM Tanah Laut, Banjarmasin	Kalimantan Selatan	120.000.000
6.	Bantuan Mesin Pemotong Rumput Untuk 20 Kelurahan Tani di Payakumbuh	Sumatera Barat	76.000.000
7.	Pendidikan & pelatihan UMKM Hebat, berani Ekspor di era MEA	Sulawesi Selatan	65.130.000
8.	Pelatihan membatik Se-Kabupaten Gresik	Gresik, Jawa Timur	23.625.000

2) Bantuan Sosial Lainnya

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Bank BRI juga memberikan bantuan sosial lainnya antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan sembako gratis, buka bersama dan santunan anak yatim di 19 Kantor Wilayah BRI	Wilayah supervise Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	11.931.389.246
2.	Bantuan Bedah Rumah atau Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	Majalengka, Cianjur Subang, Pamanukan, Banjarmasin,Denpasar Denpasar, Pinrang, Bondowoso Medan, Rembang	1.164.707.000
3	Bedah Rumah Veteran sebanyak 39 unit (lanjutan program 2017)	Jawa Barat	1.520.000.000
4	Bantuan Pasar Murah	Bau-Bau, Sulawesi Selatan, Sukabumi, Kepulauan Riau	650.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Total Anggaran BRI Peduli

Realisasi anggaran BRI Peduli pada tahun 2018 mencapai Rp163,63 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar 8,83% dari tahun 2017 sebesar Rp150,35 milyar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32.44% disalurkan untuk program pendidikan, 18.51% untuk Bantuan Sosial pengentasan kemiskinan, 16.75% untuk perbaikan dan pembangunan sarana ibadah, 13.99% untuk perbaikan dan pembangunan sarana umum, 13.68% untuk kesehatan, 4.18% untuk bantuan bencana alam, dan 0.44% untuk pelestarian alam.

Program Kemitraan

Melalui Program Kemitraan (PK), BRI berupaya meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Kemitraan diantaranya disalurkan melalui skema pinjaman berbunga lunak dan hibah.

Sebagai BUMN, BRI memiliki tugas dan tanggung jawab sosial terhadap negara untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Kemitraan. Program Kemitraan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Kemitraan tersebut Pelaksanaanya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 beserta perubahannya, pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan salah satunya melalui skema penyaluran Pinjaman Kemitraan.

Sepanjang 2018, BRI melaksanakan penyaluran dana Program Kemitraan melalui dua skema yaitu:

- Pemberian pinjaman berbunga lunak.
- Pembinaan kepada mitra binaan dalam bentuk hibah

Tujuan pemberian pinjaman lunak adalah membantu tumbuh dan berkembangnya potensi perekonomian masyarakat di sekitar Unit Kerja BRI, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif yang dijalani. Setelah diberikan pinjaman lunak maka mitra binaan dapat diberikan bantuan berupa hibah pembinaan, yang bertujuan untuk membantu mitra binaan meningkatkan kompetensi kewirausahaan, melalui pemberian pendidikan, pelatihan maupun pemasaran produk mitra binaan yang salah satunya melalui kegiatan pameran.

Agar penyaluran Dana Program Kemitraaan memberi dampak yang baik dan optimal terhadap masyarakat maupun terhadap bisnis Perseroan, BRI menerapkan kebijakan umum dalam merealisasikan penyaluran dana Program Kemitraaan sebagai berikut:

- Kriteria komoditas calon mitra yang diprioritaskan untuk dibantu diantaranya mencakup: komoditas yang mampu memanfaatkan potensi sekitarnya, komoditas yang menjadi unggulan daerah, dan komoditas yang mampu menyerap tenaga kerja/padat karya.
- Penyaluran pinjaman kemitraan dilaksanakan secara selektif, mempertimbangkan kondisi calon mitra binaan di antaranya karakter, jiwa kewirausahaan yang dimiliki, kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- Pemilihan calon mitra binaan dilakukan secara transparan dan obyektif, untuk menjaring usaha kecil baik individu maupun kelompok yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi calon nasabah komersial.
- Dilaksanakan guna membantu perkembangan perekonomian rakyat dan secara umum berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN

Dengan berpegang pada seluruh kebijakan internal tersebut, pada umumnya jenis usaha yang dibantu masih dalam skala kecil, baru mulai berkembang, berkemampuan pemasaran yang masih terbatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan mengembangkan usahanya.

Program Kemitraan

Oleh karena itu, BRI menyalurkan Program Kemitraan melalui dua skema agar usaha para Mitra Binaan terus berkembang dan pada akhirnya mampu bermigrasi menjadi usaha kecil maupun menengah, bahkan besar dengan skala ekonomi yang lebih baik yang memungkinkan untuk menjadi nasabah komersial BRI yang loyal.

Cakupan sektor usaha Mitra Binaan yang menjadi sasaran penyaluran dana Program Kemitraan tersebar pada berbagai sektor, mencakup sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan jasa. Persyaratan umum untuk menjadi calon mitra binaan BRI, antara lain:

- Aset calon mitra binaan tidak melebihi Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Omset usaha maksimal Rp2,5 miliar per tahun.
- Belum memenuhi persyaratan perbankan (non-*bankable*).

Realisasi Penyaluran

Sepanjang tahun 2018 jumlah realisasi penyaluran dana Program Kemitraan mencapai Rp344.152 miliar. Angka ini naik sebesar 64,38% (dibandingkan dengan realisasi tahun 2017.

Penyaluran dana dalam Program Kemitraan diberikan melalui 2 (dua) skema, yakni pinjaman berbunga lunak dan dana hibah untuk pembinaan para mitra binaan. Sampai dengan Desember 2018 jumlah realisasi penyaluran dana Program Kemitraan senilai Rp344.152 miliar. Penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebesar 64,38% (*year on* year) dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel realisasi penyaluran Dana Program Kemitraan dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Sektor Usaha	Realisasi 2016 (Rp miliar)	%	Realisasi 2017 (Rp miliar)	%	Desember 2018 (Rp miliar)	%
Industri	5,88	6,55	7.060	3,37	15.832	4,60
Perdagangan	59,17	65,92	102.491	48,95	217.970	63,34
Pertanian	3,65	4,06	58.289	27,84	11.680	3,39
Peternakan	9,27	10,33	19.956	9,53	34.479	10,02
Perkebunan	1,89	2,10	4.085	1,95	18.852	5,48
Perikanan	3,58	3,99	3.876	1,85	7.794	2,26
Jasa	6,33	7,05	13.602	6,50	33.929	9,86
Lainnya	0,00	0,00	-	0,00	3.615	1,05
Subtotal	**89,76**	**100**	**209.359**	**100**	**344.152**	**100**
Dana Pembinaan			198		323	
Total	**89,76**		**209.557**		**344.475**	

Program Kemitraan

Gambaran komposisi penyaluran Dana Program Kemitraan per sektor posisi Desember 2018 adalah sebagai berikut.

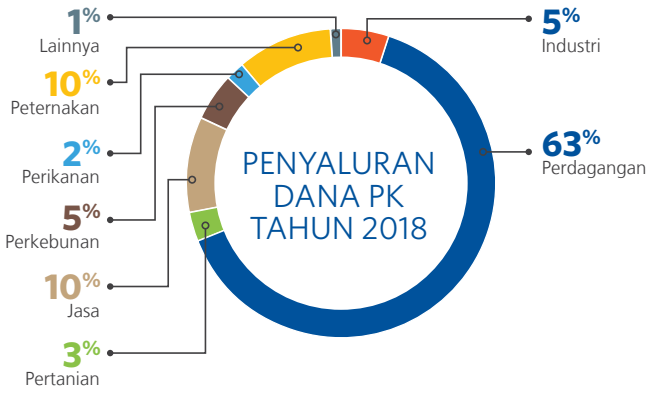

Perkembangan Penyaluran Dana Program Kemitraan

Penyaluran	Tahun		
	2016	2017	Des 2018
Realisasi (Rp dalam Juta)	89.760	209.359	344.152
Mitra Binaan	1.634	3.070	5.470

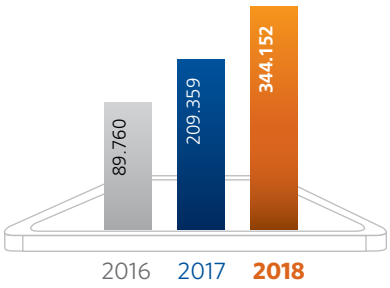

GRAFIK PERKEMBANGAN MITRA BINAAN

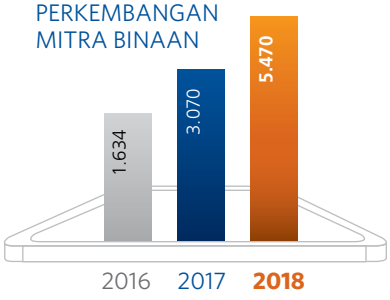

Metode Penyaluran Pinjaman Kemitraan

Penyaluran dana Program Kemitraan ke calon mitra binaan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perbankan yang terstruktur sebagaimana layaknya pemberian kredit bank. Pengenalan calon mitra binaan dilakukan dari berbagai aspek, meliputi: pengenalan produk unggulan, proses kreatif yang dilakukan untuk menambah nilai produk, ketersediaan sekaligus kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal.

Mitra Binaan yang telah mendapatkan dana Program Kemitraan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, juga akan memperoleh dana hibah program pembinaan. Hibah pembinaan diberikan berupa pendampingan dan pembinaan kewirausahaan dari BRI atau pihak ketiga yang ditunjuk, tanpa biaya. Setelah melewati masa pembinaan dan pendampingan diharapkan para mitra binaan telah mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan mampu mengakses pembiayaan bank dengan skim komersial.

Program Kemitraan

Pembinaan Kemitraan

Untuk mendukung dan memastikan tumbuh dan berkembangnya usaha mitra binaan, BRI juga memberikan dana hibah progam pembinaan kemitraan yang ditujukan untuk pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan program lain yang dapat meningkatkan produktivitas maupun perkembangan usaha Mitra Binaan BRI.

Dengan dukungan dana tersebut, para Mitra Binaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis usaha, menambah wawasan dan ikut serta berpartisipasi dalam pameran-pameran untuk membuka pemasaran produknya.

Realisasi dana hibah pembinaan kemitraan sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp309 juta. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan promosi pemasaran produk mitra binaan melalui pameran dan pelatihan yang diselenggarakan di berbagai tempat.

Melalui keikutsertaan pada berbagai event tersebut, baik pelatihan maupun pameran, diharapkan para mitra binaan memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasar produknya dan memperluas jaringan usaha. Selain itu, diharapkan mitra binaan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gambaran maupun informasi mengenai tren selera pasar terkini.

Tabel Kegiatan Pameran dan Pelatihan

No	Tanggal	Kegiatan	Rp	Lokasi	Keterangan
1	2 - 4 Mei 2018	Pameran Dhawafest 2018	5.225.000	Kemenkeu	Penyelenggara Kementerian Keuangan
2	14 - 16 Mei 2018	Bazaar KBUMN	21.855.991	KBUMN	Penyelenggara Kementerian BUMN
3	22 -25 Mei 2018	Bazaar Ramadhan	9.002.500	Lapangan Tenis BRI	Penyelenggara IWABRI dan Koperasi BRI
4	26 - 27 Juli 2018	Pelatihan Mitra Binaan Kanwil Denpasar	87.237.900	Denpasar	Penyelenggara Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan
5	22 - 23 November 2018	Pelatihan Mitra Binaan Kanwil Makassar	186.000.000	Makassar	Penyelenggara Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Target dan Kegiatan yang Direncanakan Manajemen Tahun 2018

BRI senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah yang berbasis *Customer Centric* dengan melakukan peningkatan performa pada jaringan komunikasi dan revitalisasi standar layanan. Dengan langkah tersebut, diharapkan peringkat di Industri perbankan nasional akan terus meningkat. Kinerja BRI terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan kinerja diikuti oleh kualitas layanan yang semakin baik. Pada 2018, kinerja Perusahaan selalu tumbuh diatas rata-rata industri.

Hasil Kinerja Pengawasan Layanan

Uraian	2016	2017	2018
Kinerja BRI	4.0205	4.0046	4.0665
Industri Perbankan	3.9979	3.9951	3.9999

Sumber: Service Quality Index By CAREE

Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan

Untuk mendukung kualitas layanan, BRI meningkatan sistem layanan agar dapat melayani pengaduan nasabah dengan lebih baik, cepat, dan memuaskan. Penanganan pengaduan nasabah dilaksanakan dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan standar pengaduan dan penanganan nasabah yang telah ditetapkan oleh regulator dan kebijakan manajemen. BRI juga terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelayanan dan pengaduan nasabah agar pengaduan dapat direspon dengan cepat dan hasilnya memuaskan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait tanggung jawab produk kepada nasabah selama 2018 adalah sebagai berikut:

Membangun *Chatbot Artificial Intelligence* yang diberi nama "Sabrina"

Sabrina merupakan *Chatbot* berbasis *artificial intelligence* yang memberikan layanan informasi produk; promo dan event; lokasi ATM, Kantor dan Top-up BRIZZI; dan bantuan langsung oleh Agen *Contact Center*.
Sabrina memiliki tujuan agar nasabah dapat dengan mudah berkomunikasi dan mendapat informasi terkait perbankan.

Revitalisasi dan Reinterpretasi Standar Layanan Berbasis *Customer Centric*

BRI telah melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi dua pendekatan strategi Layanan Bank BRI menjadi "*Customer Centric Service*" yakni:

1. *Service Architecture* yang terdiri dari:
   - *Branch Service Design* (Standar Layanan melalui Unit Kerja Operasional)
   - *E-Channel Service Design* (Standar Layanan melalui E Channel dan E Banking)
   - *Contact Center Service* (Standar Layanan melalui Contact Center)
2. *Service & Operational Quality* yang terdiri dari aspek *People, Process, Product* serta *Premises* untuk lebih fokus pada *customer* baik eksternal maupun internal

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Revitalisasi Standar Layanan sebagai salah satu Strategi Inisiatif yang tidak menggantikan atau meniadakan standar kualitas yang sudah ada, namun lebih kepada meningkatkan Kualitas Mutu yang lebih baik sesuai harapan Nasabah yang meliputi berbagai aspek sehingga terjadi peningkatan standar kualitas yang terintegrasi mulai dari aspek *People, Process, Product* dan *Premises* yang akan memberikan *experience* yang lebih baik.

Membangun Sistem *Complain Handling* Yang Terintegrasi

Sistem *complain handling* yang terintegrasi di Bank BRI diimplementasikan melalui pemanfaatan aplikasi BRICare dan BRISolutions. Aplikasi BRICare digunakan untuk mencatat, mengeskalasi, menyelesaikan, dan melaporkan pengaduan nasabah. Aplikasi BRICare digunakan oleh setiap *frontliner* Bank BRI yang meliputi *customer service* di setiap Unit Kerja Operasional serta *agent contact center*. Melalui aplikasi BRICare, layanan pengaduan nasabah BRI menjadi terintegrasi dan memungkinkan nasabah menyampaikan keluhannya dimanapun dan kapanpun. Aplikasi BRICare juga menghubungkan fungsi *frontliner* dengan tim *back-office* yang berfungsi menyelesaikan setiap pengaduan yang diterima Bank BRI. Dengan sistem penanganan pengaduan nasabah yang terintegrasi maka tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan nasabah menjadi terpantau dan mendukung upaya peningkatan kualitas layanan Bank BRI kepada nasabahnya.

Untuk permasalahan yang dialami oleh internal di Unit Kerja Operasional terkait sistem dan aplikasi, proses pencatatan dan eskalasi atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah melalui aplikasi BRISolutions. Fungsi sentral tim helpdesk dalam memberikan solusi dan penyelesaian setiap permasalahan sistem dan aplikasi, dapat lebih efektif termonitor untuk memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Dengan diimplementasikannya aplikasi BRISolutions maka jajaran Unit Kerja Operasional dalam lebih optimal dalam memberikan layanan ke nasabah.

Penyelenggaraan Hari Pelanggan Nasional

Sebagain Apresiasi terhadap nasabah BRI atas kesetiaan dalam menggunakan layanan dan produk perbankan BRI serta apresiasi terhadap pegawai yang berprestasi, Bank BRI menyelenggarakan Hari Pelanggan Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 04 September 2018.

Hari Pelanggan Nasional merupakan komitmen seluruh Direksi selaku Pembina untuk mewujudkan *Customer Experience* yang *excellent* dengan beorientasi pada *Core Values* BRI *"Customer Centric"* serta momentum untuk menciptakan *service awareness* mengenai pentingnya perbaikan Layanan di seluruh Unit Kerja Operasional.

Pada kegiatan Hari Pelanggan Nasional, Bank BRI memberikan apresiasi kepada nasabah berupa pemberian souvenir seperti coklat, bunga, dll yang diselenggarakan di seluruh UKO BRI (KC, KCP, KK dan BRI Unit) dan pengangkatan Pegawai kontrak dengan jabatan Frontliner yang berprestasi menjadi pegawai tetap.

Rincian Penyelesaian Keluhan

Sepanjang 2018, BRI mencatatkan kenaikan permintaan informasi & pengaduan nasabah. Dari sejumlah keluhan yang masuk ke BRI senantiasa di respon dengan cepat sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang masuk, sampai dengan Desember 2018 permintaan informasi & pengaduan nasabah yang masuk mencapai 3,544,225 keluhan, sementara yang telah diselesaikan mencapai 3,488,797 (98.4%).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Berikut adalah rincian penyelesaian keluhan nasabah

Jenis Keluhan	2016		2017		2018	
	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Diselesaikan	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Diselesaikan	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Diselesaikan
Keuangan	725,657	714,904	831,586	759,718	997,629	968,791
Ketersediaan Informasi	735,051	734,767	888,687	884,065	1,212,812	1,209,197
Non Keuangan	1,183,413	1,177,845	1,272,962	1,284,117	1,328,864	1,306,394
Kualitas Layanan	4,239	4,193	5,719	3,263	4,920	4,415
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**2,648,363**	**2,631,709**	**2,998,954**	**2,931,163**	3,544,225	3,488,797

Tata Cara Pengaduan

1. Pengaduan nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank
2. Nasabah agar segera melaporkan pengaduannya kepada BRI melalui sarana yang telah ditentukan sesegera mungkin apabila nasabah mengalami kondisi pada poin 1.
3. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada:
   a. Kantor Cabang Khusus/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/BRI Unit/Kantor Kas/Teras BRI diterima oleh *customer service*;
   b. Sentra Layanan Prioritas dan Unit Kerja Digital Banking BRI (BRI Digital Branch) diterima oleh Priority Banking Assistant;
   c. Call Center BRI Nomor Telepon 14017 atau 1500017;
   d. E-mail BRI (melalui menu hubungi kami pada website www.bri.co.id dan atau callbri@bri.co.id);
   e. Melalui media sosial resmi bank BRI
4. Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dilengkapi dengan informasi:
   a. Data Nasabah;
   b. Permasalahan yang diadukan.
5. Pengaduan yang dilakukan yang secara tertulis yang disampaikan di UKO/melalui *fax* harus dilengkapi dengan:
   a. Formulir pengaduan nasabah yang berisi data nasabah dan permasalahan yang diadukan;
   b. Fotocopy kartu identitas nasabah (KTP);
   c. Bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan permasalahan yang diadukan atau dokumen pendukung lainnya yang terkait pengaduan.
6. Pengaduan melalui Email harus dilengkapi dengan:
   a. Data nasabah dan permasalahan yang diadukan;
   b. Scan file/data capture bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan pengaduan yang diajukan;
7. Batas waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan adalah 2 (dua) hari kerja sedangkan penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara tertulis adalah 20 (dua puluh) hari kerja.
8. Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian finansial belum memuaskan nasabah maka dapat diselesaikan dengan difasilitasi melalui mediasi perbankan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Survey Kepuasan Pelanggan 2018

Perusahaan secara periodik melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah. Hasil survey umumnya digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan kepada nasabah. Untuk memperoleh hasil survey yang akurat serta mampu menggambarkan kondisi seusungguhnya, BRI menggunakan 2 (dua) metode survey, yaitu:

1. Survey internal
   Survey internal adalah survey yang dilakukan oleh fungsi *assurance* di Kantor Pusat bekerja sama dengan fungsi *assurance* di Kantor Wilayah BRI Selindo.

2. Survey eksternal
   Survey yang dilakukan oleh lembaga independen dengan menggunakan *variable* pembanding, yaitu layanan yang dilakukan oleh kompetitor di industri perbankan

Berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2018 oleh Lembaga Independen *Financial Wealth Group*, diperoleh hasil tingkat kepuasan nasabah Bank BRI mencapai 96.3% Pencapaian tersebut naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 94,1%. Faktor yang mendukung pencapaian tersebut di antaranya:

1. Program perbaikan layanan berbasis *customer centric* yang diimplementasikan di seluruh Indonesia.
2. Sistem *complain handling* yang terintegrasi, sehingga mempercepat proses penyelesaian *complain* nasabah.
3. Perbaikan Jaringan sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal dan cepat

Pada Tahun 2018 BRI telah memperoleh penghargaan di bidang kualitas layanan diantaranya sebagai berikut:

1. Predikat *Diamond* pada kategori Reguler Banking, Priority Banking, Silver Credit Card dalam penghargaan Service Quality Index 2018 yang diselenggarakan oleh lembaga Carre.
2. Predikat *Excellent* pada kategori *Regular Banking, Platinum Credit Card, Regular Credit Card*, KPR dan *Personal Loan* dalam penghargaan *Contact Centre Service Excellence Index* (CCSEI) yang diselenggarakan oleh lembaga Carre
3. *In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand* dalam penghargaan Top Brand Award 2018 yang diselenggarakan oleh Frontier dan Majalah Marketing
4. *Silver Champion* dalam penghargaan *Indonesia Brand Award* 2018 yang diselenggarakan oleh Markplus Inc.
5. Performa Terbaik Chatbot dalam penghargaan *Bank Service Excellence Monitor* (BSEM) 2018 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia.
6. *Award Winning for Customer Recommendation* dalam penghargaan *Banking Service Achievement Award* 2018 yang diselenggarakan oleh FW Media Group & FW Research.

BANK BRI
BALKONDES DU
DESA TANJ

Laporan Keuangan Konsolidasian 2018

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

Model 54

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Telepon: 021 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279
Faksimili: 021 2500077 Kawat: KANPUSBRI
Telex: 65293, 65456, 65459, 65461

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Suprajarto
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
   Alamat Domisili : Jl. Sumenep No. 11 Menteng, Jakarta Pusat
   Nomor Telepon : 021 -575 1705
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Haru Koesmahargyo
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
   Alamat Domisili : Jl. MPR III / 09 Cilandak, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021 - 575 1751
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Januari 2019
Atas nama dan mewakili Direksi

METERAI TEMPEL
DAFF161910166
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Suprajarto	Haru Koesmahargyo
Direktur Utama	Direktur

Integrity, Profesionalism, Trust, Innovation, Costumer Centric

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	922 - 925
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	926 - 928
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	929 - 931
Laporan Arus Kas Konsolidasian	932 - 933
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	934 - 1213
Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	Lampiran 1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk	Lampiran 2
Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk	Lampiran 3
Laporan Arus Kas - Entitas Induk	Lampiran 4
Catatan atas Informasi Keuangan - Entitas Induk	Lampiran 5

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/I/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/I/2019 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Danil Setiadi Handaja, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008

30 Januari 2019

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2018	2017*)	2016*)
ASET				
Kas	2a,2c,3	27.421.625	24.798.037	25.212.226
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	71.159.442	58.155.479	55.635.946
Giro pada Bank lain	2a,2c,2d,2e,2f, 5,44	12.677.355	6.132.512	11.280.795
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2a,2c,2d,2e,2g, 6,44	87.018.051	55.156.762	78.248.833
Efek-efek	2a,2c,2d, 2e,2h, 7,44	184.284.810	186.939.596	132.086.758
Cadangan kerugian penurunan nilai		(758)	(758)	(758)
		184.284.052	186.938.838	132.086.000
Tagihan Wesel Ekspor dan Wesel Tagih	2c,2d,2e,2i,8,44	27.442.690	10.654.353	11.580.175
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2c,2d,2h,9,44	1.505.273	3.317.840	3.318.434
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2d,2u, 10,44	9.396.553	18.011.026	1.557.370
Tagihan Derivatif	2c,2e,2ak,11	485.810	162.912	103.907
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e,2j, 12,44	820.010.157	718.982.668	643.470.975
Cadangan kerugian penurunan nilai		(35.017.982)	(29.423.380)	(22.184.296)
		784.992.175	689.559.288	621.286.679
Piutang dan Pembiayaan Syariah	2c,2d,2e, 2k, 13,44	20.178.401	17.864.869	17.748.943
Cadangan kerugian penurunan nilai		(497.141)	(577.257)	(492.156)
		19.681.260	17.287.612	17.256.787

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2018	2017*)	2016*)
ASET (lanjutan)				
Piutang Sewa Pembiayaan	2c,2e,2*l*,	3.409.846	2.488.983	2.200.300
Cadangan kerugian penurunan nilai	14	(88.000)	(103.500)	(130.000)
		3.321.846	2.385.483	2.070.300
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e,2m, 15,44	11.643.003	5.693.425	5.692.583
Penyertaan Saham	2c,2d,2e,2n,	460.146	83.150	11.768
Cadangan kerugian penurunan nilai	16, 44	(50)	(50)	(50)
		460.096	83.100	11.718
Aset Tetap	2d,2o,2p,			
Biaya perolehan	17,44	37.925.236	33.990.807	32.280.793
Akumulasi penyusutan		(11.010.377)	(9.238.772)	(7.756.660)
Nilai buku - neto		26.914.859	24.752.035	24.524.133
Aset Pajak Tangguhan - neto	2al,38c	5.114.653	3.286.732	2.539.713
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2p, 2q,2r,18	23.379.549	21.072.055	12.396.074
TOTAL ASET		**1.296.898.292**	**1.127.447.489**	**1.004.801.673**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember		
	Catatan	**2018**	**2017*)**	**2016*)**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	2c,2s,19	8.462.958	6.584.201	5.410.313
Simpanan Nasabah	2c,2d,2t,44			
Giro	20	178.097.981	145.529.168	141.419.020
Giro *Wadiah*		2.277.850	1.766.901	1.127.843
Giro *Mudharabah*		293.264	139.535	-
Tabungan	21	379.918.705	343.420.737	298.110.406
Tabungan *Wadiah*		5.601.811	4.749.652	4.176.761
Tabungan *Mudharabah*		1.659.109	1.270.484	983.121
Deposito Berjangka	22	357.413.513	326.417.937	293.029.378
Deposito Berjangka *Mudharabah*		19.006.504	18.362.036	15.679.845
Total Simpanan Nasabah		944.268.737	841.656.450	754.526.374
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2c,2d,2t, 23,44	9.131.158	5.593.367	2.229.538
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2u, 7,24,44	37.379.394	12.136.684	7.302.398
Liabilitas Derivatif	2c,2ak,11	332.343	200.858	347.217
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2m,15,44	11.643.003	5.693.425	5.692.583
Utang Pajak	2al,38a	153.833	569.016	956.553
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,25	31.190.216	30.619.658	24.800.781
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2w,26,44	40.457.429	29.408.694	35.013.680
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2e,2ao, 27,44	1.222	2.134	895
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2af, 28,42,44	11.789.366	12.194.261	9.479.930
Liabilitas Lain-lain	2c,2y,2z,2ae, 29,45b	15.339.787	13.794.513	10.498.804
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	2c,2x,30	1.473.515	986.450	1.008.510
TOTAL LIABILITAS		**1.111.622.961**	**959.439.711**	**857.267.576**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember		
	Catatan	2018	2017*)	2016*)
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016				
Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 60.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 24.669.162.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.669.161.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016	1,31a	6.167.291	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor saham	31b	2.692.663	2.773.858	2.773.858
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	2o,17	13.824.692	13.824.692	13.824.692
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2aj,31c	49.850	54.199	23.490
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	2h	(2.070.378)	1.813.625	75.618
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	2af	1.154.343	706.403	665.870
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	1d	(2.418.948)	(2.418.948)	(2.418.948)
Opsi Saham		10.971	-	-
Cadangan Kompensasi atas Saham Bonus	31f	426.670	-	-
Ekuitas *merging entity*		-	443.016	483.908
Saldo laba	31d,31e			
Telah ditentukan penggunaannya		3.022.685	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya		160.107.704	140.805.012	122.286.786
Total Saldo Laba		163.130.389	143.827.697	125.309.471
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk		182.967.543	167.191.833	146.905.250
Kepentingan non-pengendali	2b	2.307.788	815.945	628.847
TOTAL EKUITAS		**185.275.331**	**168.007.778**	**147.534.097**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.296.898.292**	**1.127.447.489**	**1.004.801.673**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	Catatan	**2018**	**2017*)**	**2016*)**
Pendapatan Bunga dan Syariah	32			
Pendapatan bunga	2aa	108.458.358	100.093.333	91.379.317
Pendapatan syariah	2k,2ac	3.124.446	2.819.042	2.636.677
Total Pendapatan Bunga dan Syariah		111.582.804	102.912.375	94.015.994
Beban Bunga dan Syariah	33			
Beban bunga	2aa	(32.541.395)	(28.652.691)	(27.541.302)
Beban syariah	2ac	(1.375.637)	(1.241.590)	(1.035.502)
Total Beban Bunga dan Syariah		(33.917.032)	(29.894.281)	(28.576.804)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto		77.665.772	73.018.094	65.439.190
Pendapatan premi	2ad	4.178.213	3.788.965	3.038.864
Beban klaim	2ad	(3.232.491)	(3.403.551)	(2.760.154)
Pendapatan premi - neto		945.722	385.414	278.710
Pendapatan Operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	2ab	12.018.941	10.442.411	9.226.076
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		6.209.435	5.050.717	4.496.838
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2h,7,9	534.952	784.501	450.895
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2ai,2aj	951.009	184.077	-
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7	338.097	55.555	34.602
Lain-lain		3.372.996	2.754.026	3.079.446
Total Pendapatan Operasional lainnya		23.425.430	19.271.287	17.287.857
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,34	(17.792.693)	(16.994.115)	(13.700.241)
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	2ao,27b	912	(1.239)	347
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	(528.982)	(258.524)	(103.705)

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	2017*)	2016*)
Beban Operasional lainnya				
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2af,35, 42,44	(22.423.271)	(20.440.958)	(18.593.976)
Umum dan administrasi	2o,36	(14.364.278)	(13.199.431)	(12.043.907)
Kerugian transaksi mata uang asing - neto	2ai,2aj	-	-	(274.109)
Lain-lain		(5.202.735)	(4.973.687)	(4.244.845)
Total Beban Operasional lainnya		(41.990.284)	(38.614.076)	(35.156.837)
LABA OPERASIONAL		**41.725.877**	**36.806.841**	**34.045.321**
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	37	27.817	216.395	1.714
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		41.753.694	37.023.236	34.047.035
BEBAN PAJAK	2al, 38b,38c	(9.335.208)	(7.978.187)	(7.761.784)
LABA TAHUN BERJALAN		32.418.486	29.045.049	26.285.251
Penghasilan komprehensif lainnya:				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		601.819	61.655	159.569
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(150.455)	(15.414)	(530.727)
Surplus revaluasi aset tetap	17	-	-	14.315.527
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2aj	(4.349)	30.709	(25.579)
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	2h	(5.141.381)	2.286.250	1.658.696
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		1.216.705	(527.459)	(416.966)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak		**(3.477.661)**	**1.835.741**	**15.160.520**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**28.940.825**	**30.880.790**	**41.445.771**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	Catatan	**2018**	**2017*)**	**2016*)**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk		32.351.133	28.997.141	26.234.256
Kepentingan non-pengendali		67.353	47.908	50.995
TOTAL		**32.418.486**	**29.045.049**	**26.285.251**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk		28.910.721	30.808.443	41.384.558
Kepentingan non-pengendali		30.104	72.347	61.213
TOTAL		**28.940.825**	**30.880.790**	**41.445.771**
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	2ah,49	**264,66**	**236,93**	**214,04**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Ekuitas *Merging Entity*	Tambahan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan	Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan pasti - Setelah pajak Tangguhan	Saham Treasuri	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
										Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 (dilaporkan sebelumnya)		**6.167.291**	**-**	**2.773.858**	**49.069**	**(1.145.471)**	**541.468**	**(2.286.375)**	**-**	**18.115.741**	**88.617.280**	**112.832.861**	**294.318**	**113.127.179**
Ekuitas entitas penggabungan		-	483.276	-	-	-	-	-	-	-	-	483.276	237.467	720.743
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 (setelah penyajian kembali)		**6.167.291**	**483.276**	**2.773.858**	**49.069**	**(1.145.471)**	**541.468**	**(2.286.375)**	**-**	**18.115.741**	**88.617.280**	**113.316.137**	**531.785**	**113.847.922**
Laba tahun berjalan		-	38.484	-	-	-	-	-	-	-	26.195.772	26.234.256	50.995	26.285.251
:nghasilan komprehensif lainnya	2h,2aj	-	5.698	-	(25.579)	1.221.089	124.402	-	13.824.692	-	-	15.150.302	10.218	15.160.520
:tal penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan		-	44.182	-	(25.579)	1.221.089	124.402	-	13.824.692	-	26.195.772	41.384.558	61.213	41.445.771
:mbagian laba Dividen	31d	-	(43.550)	-	-	-	-	-	-	-	(7.619.322)	(7.662.872)	(23.444)	(7.686.316)
:klasifikasi cadangan tujuan	31e	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.093.056)	15.093.056	-	-	-
:ntribusi modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.698	63.698
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	1d	-	-	-	-	-	-	(132.573)	-	-	-	(132.573)	-	(132.573)
Perubahan kepentingan non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.405)	(4.405)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 (setelah penyajian kembali)		**6.167.291**	**483.908**	**2.773.858**	**23.490**	**75.618**	**665.870**	**(2.418.948)**	**13.824.692**	**3.022.685**	**122.286.786**	**146.905.250**	**628.847**	**147.534.097**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Ekuitas *Merging Entity*	Tambahan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan	Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan pasti - Setelah pajak Tangguhan	Saham Treasuri	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
										Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 (setelah penyajian kembali)		**6.167.291**	**483.908**	**2.773.858**	**23.490**	**75.618**	**665.870**	**(2.418.948)**	**13.824.692**	**3.022.685**	**122.286.786**	**146.905.250**	**628.847**	**147.534.097**
Laba tahun berjalan		-	606	-	-	-	-	-	-	-	28.996.535	28.997.141	47.908	29.045.049
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2aj	-	2.053	-	30.709	1.738.007	40.533	-	-	-	-	1.811.302	24.439	1.835.741
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan		-	2.659	-	30.709	1.738.007	40.533	-	-	-	28.996.535	30.808.443	72.347	30.880.790
mbagian laba Dividen	31d	-	(43.551)	-	-	-	-	-	-	-	(10.478.309)	(10.521.860)	(26.920)	(10.548.780)
ntribusi modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.613	133.613
rubahan kepentingan non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.058	8.058
ldo pada tanggal 31 Desember 2017 (setelah penyajian kembali)		**6.167.291**	**443.016**	**2.773.858**	**54.199**	**1.813.625**	**706.403**	**(2.418.948)**	**13.824.692**	**3.022.685**	**140.805.012**	**167.191.833**	**815.945**	**168.007.778**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Ekuitas *Merging Entity*	Tambahan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan	Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	Saham Treasuri	Cadangan Kompensasi atas Saham Bonus	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Opsi Saham	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
												Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 (setelah penyajian kembali)		**6.167.291**	**443.016**	**2.773.858**	**54.199**	**1.813.625**	**706.403**	**(2.418.948)**	**-**	**13.824.692**	**-**	**3.022.685**	**140.805.012**	**167.191.833**	**815.945**	**168.007.778**
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.351.133	32.351.133	67.353	32.418.486
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2aj	-	-	-	(4.349)	(3.884.003)	447.940	-	-	-	-	-	-	(3.440.412)	(37.249)	(3.477.661)
Total penghasilan mprehensif untuk riode berjalan		-	-	-	(4.349)	(3.884.003)	447.940	-	-	-	-	-	32.351.133	28.910.721	30.104	28.940.825
bagian laba viden	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.048.441)	(13.048.441)	(21.655)	(13.070.096)
m Bonus	31f	-	-	-	-	-	-	-	426.670	-	-	-	-	426.670	3.157	429.827
Saham		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.971	-	-	10.971	1.286	12.257
bahan kepentingan n-pengendali pada ntitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.550	166.550
ntingan non-pengendali ...ibat akuisisi entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.548	55.548
Kontribusi modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.474.122	1.474.122
Pembalikan ekuitas entitas sepengendali		-	(443.016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(443.016)	(217.269)	(660.285)
Transaksi akuisisi atas entitas sepengendali	31b	-	-	(81.195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81.195)	-	(81.195)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018		**6.167.291**	**-**	**2.692.663**	**49.850**	**(2.070.378)**	**1.154.343**	**(2.418.948)**	**426.670**	**13.824.692**	**10.971**	**3.022.685**	**160.107.704**	**182.967.543**	**2.307.788**	**185.275.331**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	2017*)	2016*)
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI				
Pendapatan yang diterima				
Penerimaan bunga dan investasi		102.362.129	100.171.404	91.595.203
Pendapatan syariah		3.124.446	2.819.042	2.636.677
Pendapatan premi		4.178.213	3.788.965	3.038.864
Beban yang dibayar				
Beban bunga		(32.166.798)	(28.319.937)	(26.038.559)
Beban syariah		(1.375.637)	(1.241.591)	(1.035.502)
Beban klaim		(3.232.491)	(3.403.551)	(2.760.154)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		6.209.437	5.050.713	4.511.717
Pendapatan operasional lainnya		16.764.733	13.720.663	9.789.533
Beban operasional lainnya		(42.230.943)	(32.309.044)	(35.031.871)
Pendapatan non operasional - neto		27.818	216.325	479
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(9.668.009)	(9.037.947)	(6.182.996)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**43.992.898**	**51.455.042**	**40.523.391**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		190.262	(390.262)	100.000
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		(2.566.448)	(702.761)	231.711
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih		(16.788.338)	925.822	(3.713.521)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		8.614.473	(16.453.656)	(712.245)
Kredit yang diberikan		(113.206.894)	(85.060.312)	(87.463.887)
Piutang dan pembiayaan syariah		(2.600.698)	(258.240)	(1.254.192)
Piutang sewa pembiayaan		(949.203)	(305.667)	(2.214.946)
Aset lain-lain		4.631.594	(9.154.866)	265.580
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera		1.878.757	1.153.159	264.342
Simpanan:				
Giro		32.568.814	4.110.149	27.989.677
Giro *Wadiah*		510.949	639.058	190.098
Giro *Mudharabah*		153.729	139.535	-
Tabungan		36.497.967	45.310.331	30.051.541
Tabungan *Wadiah*		852.159	572.891	460.832
Tabungan *Mudharabah*		388.625	287.363	286.923
Deposito berjangka		30.995.577	33.388.560	25.144.974
Deposito berjangka *Mudharabah*		644.468	2.682.191	1.406.950
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		3.537.792	3.363.829	(8.935.535)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		25.242.710	4.834.286	(4.075.560)
Liabilitas lain-lain		2.673.187	2.530.874	3.632.605
Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi		**57.262.380**	**39.067.326**	**22.178.738**

*) Setelah reklasifikasi (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2018	2017*)	2016*)
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI				
Penerimaan dividen	16	12.534	40	235
Perolehan aset tetap	17	(1.822.703)	(2.006.347)	(3.654.340)
Penurunan (kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(25.188.955)	(28.915.361)	328.455
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi		**(26.999.124)**	**(30.921.668)**	**(3.325.650)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima		10.829.393	(5.663.083)	(652.860)
Pembelian kembali saham beredar (saham treasuri)	1d	-	-	(132.573)
Pembagian laba untuk dividen		(13.048.441)	(10.483.777)	(7.621.316)
Penerimaan (pembayaran) pinjaman dan surat berharga subordinasi		487.065	(22.060)	952.042
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	25	9.600.185	10.242.963	15.510.825
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	25	(8.939.750)	(4.921.000)	(980.000)
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan		**(1.071.548)**	**(10.846.957)**	**7.076.118**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**29.191.708**	**(2.701.299)**	**25.929.206**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		(52.076)	(427)	1.279
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		186.617.516	189.319.242	163.388.757
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**215.757.148**	**186.617.516**	**189.319.242**
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:	2a			
Kas	3	27.421.625	24.798.037	25.212.226
Giro pada Bank Indonesia	4	71.159.442	58.155.479	55.635.946
Giro pada bank lain	5	12.677.355	6.132.512	11.280.795
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	86.818.051	54.766.500	78.248.835
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	17.680.675	42.764.988	18.941.440
Total Kas dan Setara Kas		**215.757.148**	**186.617.516**	**189.319.242**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 5 tanggal 3 Desember 2018, mengenai perubahan-perubahan terhadap beberapa ketentuan dari Anggaran Dasar BRI, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000 (Catatan 9).

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (Stock Split)

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering ("IPO")) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 31b).

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (Stock Split) (lanjutan)

Berdasarkan akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan Saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

Berdasarkan akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp50 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017. Pemecahan Saham dilakukan pada tahun 2017 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 9 November 2017 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 10 November 2017.

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri)

BRI melalui surat No. R.224-DIR/DIS/09/2015 tanggal 25 September 2015 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp5.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-101/PB.31/2015 tanggal 6 Oktober 2015. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000 melalui surat No. B.696-DIR/SKP/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015. Pembelian kembali tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, antara tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016. Sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 221.718.000 lembar saham (nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp2.418.498.

e. Struktur dan Manajemen

Kantor pusat BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Kantor Wilayah	19	19	19
Kantor Audit Intern Pusat	1	1	1
Kantor Audit Intern Wilayah	19	19	19
Kantor Cabang Dalam Negeri	462	462	462
Kantor Cabang Khusus	1	1	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	5	5	4
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	609	610	609
Kantor Kas	1.137	992	984
BRI Unit	5.381	5.382	5.380
Teras dan Teras Keliling	2.688	3.171	3.180
Teras Kapal	3	3	3

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta 7 (tujuh) entitas anak yaitu PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT BRI Ventura Investama.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta 5 (lima) entitas anak yaitu PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life dan PT BRI Multifinance Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2016 BRI memiliki 2 (dua) Kantor Cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan Singapura, 2 (dua) Kantor Perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta 5 (lima) entitas anak yaitu PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT BRI Multifinance Indonesia.

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, *senior executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan inspektur, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang. Total karyawan BRI adalah 60.553, 60.683 dan 58.885 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Susunan Dewan Komisaris BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 4 tanggal 3 Desember 2018, pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan dan Luar Biasa BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 55 tanggal 27 Oktober 2017, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan RUPS Tahunan BRI tanggal 23 Maret 2016 yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1, adalah sebagai berikut:

		31 Desember		
		2018	2017	2016
Komisaris Utama/Independen	:	Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo	Gatot Trihargo	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	Mahmud	Mahmud	Ahmad Fuad
Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany	A. Fuad Rahmany	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf	A. Sonny Keraf	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim	Adhyaksa Dault
Komisaris	:	Jeffry J. Wurangian	Jeffry J. Wurangian	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Mahmud
Komisaris	:	Hadiyanto	Vincentius Sonny Loho	Vincentius Sonny Loho

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa dan Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 4 tanggal 3 Desember 2018, pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan dan Luar Biasa BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 55 tanggal 27 Oktober 2017, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI tanggal 23 Maret 2016 yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1, adalah sebagai berikut:

		31 Desember		
		2018	2017	2016
Direktur Utama	:	Suprajarto	Suprajarto	Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	:	-*)	-*)	Sunarso
Direktur	:	Haru Koesmahargyo	Haru Koesmahargyo	Haru Koesmahargyo
Direktur	:	Kuswiyoto	Susy Liestiowaty	Susy Liestiowaty
Direktur	:	Mohammad Irfan	Kuswiyoto	Kuswiyoto
Direktur	:	Sis Apik Wijayanto	Donsuwan Simatupang	Donsuwan Simatupang
Direktur	:	Priyastomo	Mohammad Irfan	Mohammad Irfan
Direktur	:	Indra Utoyo	Sis Apik Wijayanto	Sis Apik Wijayanto
Direktur	:	R. Sophia Alizsa	Priyastomo	Priyastomo
Direktur	:	Handayani	Indra Utoyo	Zulhelfi Abidin
Direktur	:	Supari	R. Sophia Alizsa	Randi Anto
Direktur	:	Osbal Saragi Rumahorbo	Handayani	-
Direktur	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto	-	-

*) Jabatan wakil direktur utama ditiadakan (perubahan nomenklatur jabatan) sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No.55

Susunan Komite Audit BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep.1101-DIR/KHC/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan Surat Keputusan Komisaris No.R.58-KOM/11/2017 tanggal 15 November 2017, dan pada tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 1059-DIR/KPS/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Surat Keputusan Komisaris No. R.57-KOM/11/2016 tanggal 22 November 2016, adalah sebagai berikut:

		31 Desember		
		2018	2017	2016
Ketua	:	A. Fuad Rahmany	A. Fuad Rahmany	A. Fuad Rahmany
Anggota	:	A. Sonny Keraf	A. Sonny Keraf	A. Sonny Keraf
Anggota	:	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim	Adhyaksa Dault
Anggota	:	Pamuji Gesang Raharjo	Pamuji Gesang Raharjo	Pamuji Gesang Raharjo
Anggota	:	I Gde Yadnya Kusuma	I Gde Yadnya Kusuma	I Gde Yadnya Kusuma
Anggota	:	Sunuaji Noor Widiyanto	Sunuaji Noor Widiyanto	Sunuaji Noor Widiyanto

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan BRI pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Surat No. R.13-DIR/KHC/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 adalah Bambang Tribaroto, sedangkan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Hari Siaga Amijarso, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 887-DIR/KPS/12/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Tri Wintarto, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 427-DIR/KPS/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Adi Setyanto dan Bardiyono Wiyatmojo, yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep. S.147.e-DIR/KPS/12/2016 tanggal 7 Desember 2016.

f. Entitas Anak

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS)

Pada tanggal 29 Juni 2007, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Bank Jasa Arta (“BJA”) untuk mengakuisisi 100% saham BJA dengan harga pembelian sebesar Rp61 miliar. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 3 tanggal 5 September 2007 Notaris Imas Fatimah, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BJA tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 9/188/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Desember 2007 dan No. 9/1326/DPIP/Prz tanggal 28 Desember 2007. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan akta Akuisisi No. 61 Notaris Imas Fatimah, S.H., dimana BRI memiliki 99,99875% dari total saham yang dikeluarkan BJA dan sebesar 0,00125% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BJA berdasarkan akta No. 45 tanggal 22 April 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah berubah menjadi PT Bank Syariah BRI (“BSB”). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, BSB memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, BSB wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, BSB wajib menyelesaikan seluruh kredit dan liabilitas debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan (spin-off) atas Unit Usaha Syariah BRI (“UUS BRI”) kedalam BSB yang telah diaktakan dengan “Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI” No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka:

1. Semua aset dan liabilitas UUS BRI yang dimiliki oleh BRI, karena hukum telah beralih kepada dan menjadi hak atau kepunyaan, serta liabilitas atau beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BSB, selaku perseroan yang menerima pemisahan.

2. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BSB atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSB.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka (lanjutan):

3. Semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSB.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BSB No. 18 tanggal 14 April 2009, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRISyariah ("BRIS") dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRIS antara lain mengenai peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp7,5 triliun terdiri atas 15 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dan perubahan nama dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018. Akta tersebut juga mencantumkan persetujuan pemegang saham antara lain:

1. Rencana Bank untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
2. Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 beserta perubahannya, dan POJK No. 33/POJK.04/2014.
3. Pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen dan Karyawan, dengan jumlah maksimal 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran PT Bank BRISyariah atas penawaran umum perdana saham sesuai dengan surat terakhir yang disampaikan ke OJK No. S.B.147-PDR/04-2018 tanggal 24 April 2018, OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Penawaran umum perdana saham BRIS (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (Rupiah penuh) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum Pasal 4 Ayat 2 dan 3, yang antara lain menetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan, maka sebanyak 97.161.135 lembar saham BRIS yang dimiliki oleh BRI tidak dicatatkan di Bursa, sehingga total saham BRIS yang dicatatkan di Bursa adalah 9.618.952.363 lembar saham. Setelah IPO BRIS, berdasarkan surat No. DE/V/18-2545 tanggal 24 Mei 2018 dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, kepemilikan BRI atas saham BRIS adalah sebesar 73,00%.

Anggaran Dasar BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah Tbk No. 92 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil penawaran umum perdana saham Bank dari sebelumnya (setelah memperhitungkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui kapitalisasi laba ditahan yang tidak ditentukan penggunaannya hingga 31 Desember 2017 dan setoran tunai oleh BRI sebesar Rp1 triliun sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BRIS No. 2 tanggal 2 Maret 2018 Notaris Fathiah Helmi, S.H.) sejumlah 7.092.762.898 lembar saham atau sebesar Rp3.546.381.449.000 (Rupiah penuh) menjadi 9.716.113.498 lembar saham atau sebesar Rp4.858.056.749.000 (Rupiah penuh). Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0211334 tanggal 31 Mei 2018.

Struktur kepemilikan saham BRIS pada tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari BRI sebesar 73,00%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 8,67% dan masyarakat (publik) sebesar 18,33%.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRIS yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Total aset BRIS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp37.926.776, Rp31.543.384 dan Rp27.687.188 atau 2,92%, 2,80% dan 2,76% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan pengelolaan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.120.416, Rp2.816.524 dan Rp2.634.201 atau 2,70%, 2,64% dan 2,71% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Total karyawan BRIS adalah 2.941, 3.048 dan 3.091 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRIS berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dan memiliki 54 kantor cabang dan 207 kantor cabang pembantu.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham PT Bank Agroniaga Tbk ("Bank Agro") untuk mengakuisisi saham Bank Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Komposisi kepemilikan saham Bank Agro nantinya adalah BRI akan memiliki 76%, Dapenbun 14% dan publik 10%.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru Bank Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham Bank Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham Bank Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (Rupiah penuh) per lembar.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun, namun khusus untuk Bank Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10%, dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2011, saham Bank Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Agro per 31 Desember 2011 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%. Selama tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat penjualan saham, kemudian pada tahun 2014 terdapat penjualan saham sebesar 130.000 lembar saham, sehingga per tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 24 Mei 2013 belum dapat dipenuhi BRI karena tidak aktifnya harga saham Bank Agro di pasar modal.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Pada tanggal 11 Mei 2015, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.588.085.883 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 17 Juni 2015, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-259/D.04/2015 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.028.934.521 lembar saham.

Hasil dari PUT V menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 87,23%, Dapenbun 9,10% dan publik 3,67%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015.

Pada tanggal 17 Oktober 2016, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Pada tanggal 25 November 2016, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-695/D.04/2016 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.845.996.122 lembar saham. Waran Seri II dapat dikonversi menjadi saham BRI Agro dengan nilai Rp130 per lembar (Rupiah penuh) dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Hasil dari PUT VI menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 27 Desember 2016, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro tetap sebesar 87,23%, Dapenbun 7,08% dan publik 5,69%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0112637 tanggal 27 Desember 2016.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 (akhir dari konversi waran), jumlah waran yang telah dikonversi menjadi saham sejumlah 612.937.654 lembar, sehingga meningkatkan modal saham Bank sebesar Rp61.294.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 2.515.555.707 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 12 Juni 2017, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-293/D.04/2017 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.515.555.707 lembar saham.

Hasil dari PUT VII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juli 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,16%, Dapenbun 6,44% dan publik 6,39%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017.

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-113/D.04/2018 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VIII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.889.085.049 lembar saham.

Hasil dari PUT VIII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 2 Oktober 2018, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0249178 tanggal 4 Oktober 2018.

Atas konversi saham Waran Seri II dan hasil PUT VIII BRI Agro mengakibatkan kepemilikan saham BRI pada 31 Desember 2018 di BRI Agro adalah sebesar 87,10%, Dapenbun 6,33% dan publik 6,57%.

Anggaran Dasar BRI Agro telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 02 Oktober 2018, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0249178 tanggal 4 Oktober 2018.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Total aset BRI Agro pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp23.327.019, Rp16.325.247 dan Rp11.377.960 atau 1,80%, 1,45% dan 1,13% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.660.449, Rp1.252.069 dan Rp965.085 atau 1,43%, 1,17% dan 0,99% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Agro adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan. BRI Agro berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Total karyawan BRI Agro adalah 515, 499 dan 444 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Agro berlokasi di Gedung BRI Agro, Jl. Warung Jati Barat No.139, Jakarta, dan memiliki 18 kantor cabang dan 20 kantor cabang pembantu.

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh *Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region*, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Total aset BRI Remittance pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp6.865, Rp8.370 dan Rp5.952 atau 0,0005%, 0,0007% dan 0,0006% dari total aset konsolidasian.

Ruang lingkup kegiatan BRI Remittance adalah menjalankan layanan remitansi untuk pekerja migran Indonesia serta lingkup layanan operasional lain terkait dengan rekening BRI yang dimiliki oleh nasabah BRI yang berdomisili di Hong Kong sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan oleh otoritas Hong Kong.

Total karyawan BRI Remittance adalah 6 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Remittance berlokasi di Shop 3 G/F, 24-36 Causeway Road, Causeway Bay, Hong Kong.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Pada tanggal 6 Oktober 2015, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BRI Life") untuk mengakuisisi 91,001% saham BRI Life dengan harga pembelian sebesar Rp1.627 miliar. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Life tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-151/PB.31/2015 tanggal 23 Desember 2015. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan akta Pengambilalihan Saham dalam PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 91,001% dari total saham yang dikeluarkan BRI Life dan sebesar 8,999% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life dan sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-140/NB.11/2017 tanggal 20 Maret 2017, BRI Life memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama perusahaan.

Anggaran Dasar BRI Life telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan atas penyebutan jenis saham yaitu saham Seri A sejumlah 1 saham dan saham Seri B sejumlah 2.199.999 saham (jumlah penuh). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0004875.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Life adalah menyelenggarakan usaha di bidang perasuransian.

BRI Life mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-181/KMK.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

BRI Life mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dan unit Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Life pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp9.384.976, Rp8.162.961 dan Rp6.176.329 atau 0,72%, 0,72% dan 0,61% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp4.380.817, Rp3.797.723 dan Rp3.027.256 atau 3,74%, 3,56% dan 3,12% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Total karyawan BRI Life adalah 530, 489 dan 422 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 15, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2, Jakarta, dan memiliki 6 kantor regional dengan jumlah keseluruhan sebanyak 34 kantor penjualan.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Pada tanggal 12 Juli 2016, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") dalam rangka peningkatan kepemilikan saham BRI pada PT BTMU-BRI Finance ("BBF") dari semula sebesar 45% menjadi 99%, dengan harga pembelian sebesar Rp378.548, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-102/PB.31/2016 tanggal 21 September 2016. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 75 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 99% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") dan sebesar 1% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Atas akuisisi BRI Finance, BRI mencatat *goodwill* sebesar Rp51.915 yang diklasifikasikan dalam akun Aset Lain-lain.

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia, dan sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sehubungan dengan perubahan nama tersebut maka BRI Finance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sanwa-BRI Finance, yang selanjutnya berubah nama menjadi PT UFJ-BRI Finance dan PT BTMU-BRI Finance.

Anggaran Dasar BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BRI Multifinance Indonesia No.117 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat di hadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui setoran tunai oleh BRI sebesar Rp100 miliar. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BRI Multifinance Indonesia No. AHU-AH.01.03-0279579 tanggal 24 Desember 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Finance adalah melakukan usaha di bidang pembiayaan.

Total aset BRI Finance pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp3.626.760, Rp2.607.098 dan Rp2.399.828 atau 0,28%, 0,23% dan 0,24% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp298.737, Rp206.304 dan Rp101.345 atau 0,26%, 0,19% dan 0,10% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Total karyawan BRI Finance adalah 262, 157 dan 137 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Finance berlokasi di Gedung Wisma 46, lantai 10, Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat dan memiliki 4 cabang yaitu Bandung, Surabaya, Samarinda dan Medan serta 16 kantor pemasaran yaitu Bekasi, Jakarta, Balikpapan, Solo, Palembang, Makassar, Denpasar, Semarang, Pekanbaru, Banjarmasin, Lampung, Depok, Tangerang, Malang, Cirebon dan Banyuwangi.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventura)

Pada tanggal 29 Juni 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Dalam PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura (”Sarana NTT Ventura”) dengan PT Bahana Artha Ventura (”BAV”) dalam rangka pengambilalihan seluruh kepemilikan saham BAV dalam Sarana NTT Ventura menjadi milik BRI sebanyak 97,61%, dengan harga pembelian sebesar Rp3.090, dan telah mendapatkan persetujuan masing-masing dari Dewan Komisaris BRI selaku wakil dari pemegang saham lewat suratnya No. R. 67-KOM/09/2018 tanggal 26 September 2018 serta persetujuan dari OJK melalui surat No. S-112/PB.31/2018 tanggal 25 September 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 70 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana BRI memiliki 97,61% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Ventura Investama (dahulu Sarana NTT Ventura).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Zantje Mathilda Voss Tomasowa, S.H., M.Kn, Notaris di Kupang, telah dilakukan perubahan nama dari PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura menjadi PT BRI Ventura Investama (“BRI Ventura”), beserta perubahan tempat kedudukan Perusahaan dari semula di kota Kupang ke kota Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030398.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018. Sehubungan perubahan nama tersebut saat ini Perusahaan sedang dalam proses untuk memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang usaha modal ventura atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura dengan izin usaha No. 75/KMK.017/1998 tanggal 19 Februari 1998.

Anggaran Dasar BRI Ventura telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 71 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan Peralihan Saham Perusahaan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0278583 tanggal 20 Desember 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Ventura adalah menyelenggarakan usaha modal ventura termasuk mengelola dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK serta kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu pasangan usaha dan atau debitur yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Total aset BRI Ventura pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp7.204, Rp7.834 dan Rp7.182 atau 0,0006%, 0,0007% dan 0,0007% dari total aset konsolidasian.

Total karyawan BRI Ventura adalah 8, 7 dan 7 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Ventura berlokasi di Gedung AD Premier, lantai 6, Jl. TB Simatupang No. 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Danareksa Sekuritas

Pada tanggal 27 September 2018, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 67%, dengan harga pembelian sebesar Rp446.888, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1496/PM.21/2018 tanggal 21 Desember 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengambilalihan Saham No. 53 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 67% dari total saham Danareksa Sekuritas dan sebesar 33% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero).

Anggaran Dasar Danareksa Sekuritas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., No. 91 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Th.2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 9870 tanggal 7 April 2009.

Pada tahun 2017 terdapat perubahan pada maksud dan tujuan Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn, No. 1 tanggal 5 Juli 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013998.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 52 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Peralihan Saham dan Pergantian Nama Pemegang Saham Perusahaan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0279737 tanggal 26 Desember 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Danareksa Sekuritas adalah sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, serta kegiatan usaha penunjang lainnya yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 dan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992.

Sebagai bagian dari perijinan yang telah dimiliki, Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penatalaksana (Arranger) *Medium Term Notes* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Hybrid Product* seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, *Global Medium Term Notes* (GMTN), *Global Bond* dan Penasihat Keuangan (Financial Advisory) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Danareksa Sekuritas (lanjutan)

Total aset Danareksa Sekuritas pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp869.102, Rp1.191.212 dan Rp1.150.064 atau 0,07%, 0,11% dan 0,11% dari total aset konsolidasian.

Total karyawan Danareksa Sekuritas adalah 197, 192 dan 202 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kantor pusat Danareksa Sekuritas berlokasi di Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta dan memiliki 10 cabang, 13 Gerai dan 3 kemitraan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Amandemen 2015), ”Penyajian Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan”.

BRIS (entitas anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang “Akuntansi *Murabahah*”, PSAK No. 104 tentang “Akuntansi *Istishna*”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi *Mudharabah*”, PSAK No. 106 (Revisi 2016) tentang “Akuntansi *Musyarakah*” dan PSAK No. 107 tentang “Akuntansi *Ijarah*” yang menggantikan PSAK No. 59 tentang “Akuntansi Perbankan Syariah” yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk”, PSAK No. 111 tentang “Akuntansi *Wa’d”* dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), .

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki hal berikut ini:

a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak.
c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012) ”Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” dimana selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun tambahan modal disetor di ekuitas. Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012) tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung dalam sepengendalian. Kombinasi bisnis entitas sepengendali yang terjadi di tahun 2018 dijelaskan di Catatan 50.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan BRI terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain serta pinjaman dan surat berharga subordinasi.

(i) Klasifikasi

BRI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki BRI terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh BRI untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- Dalam hal BRI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana BRI mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Investasi tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian . Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian .

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

BRI pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindung nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- BRI mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan antara (a) BRI telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian .

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh BRI sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
b. Terjadi setelah BRI memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau BRI telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau;
c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BRI, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BRI.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus (lanjutan)

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, BRI menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

BRI untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 40).

(x) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), BRI menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut :

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), BRI menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut (lanjutan):

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:

1) secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
2) suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan entitas anak;
3) suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;
4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan entitas anak atau induk;
5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu”, pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian . Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
    1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
    2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

BRI pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika BRI menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka BRI memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, BRI melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang memiliki nilai signifikan sesuai dengan ketentuan BRI dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang memiliki nilai signifikan sesuai ketentuan BRI yang direstrukturisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang memiliki nilai signifikan sesuai dengan ketentuan BRI dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang memiliki nilai tidak signifikan sesuai ketentuan BRI.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (probability of default). Kredit yang mempunyai data dan informasi kerugian historis yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia dan didukung oleh kebijakan internal BRI, maka perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan dengan menghitung tingkat kerugian secara keseluruhan yang meliputi tingkat kerugian aktual ditambah dengan faktor-faktor risiko terkait yang relevan berdasarkan survei yang dilakukan secara periodik kepada pihak eksternal maupun internal BRI.

BRI menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. BRI menggunakan rata-rata bergerak (moving average) data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *probability of default* (PD) dan *loss of given default* (LGD).

BRI menggunakan *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, BRI dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralized financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK) adalah sebagai berikut:

a) 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
b) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
c) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
d) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
e) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility, Term Deposit* dan *Deposit Facility Syariah*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (inter-bank call money), deposito berjangka, dan *banker's acceptance*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Pemerintah, wesel tagih, obligasi subordinasi, unit penyertaan reksadana, *Medium-Term Notes*, *U.S.Treasury Bonds*, *Singapore Government Securities*, *Negotiable Certificate of Deposits, Monetary Authority of Singapore (MAS) bills* dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (lanjutan)

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank umum yang terdiri dari obligasi dalam rangka rekapitalisasi BRI dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Penilaian efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. BRI tidak mengklasifikasikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, BRI telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian . Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih

Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh bank lainnya sedangkan wesel tagih merupakan tagihan ataupun dokumen penagihan dalam bentuk wesel/*bill of exchange* kepada pihak tertagih/*drawee* atas dasar diskonto ataupun suatu pembiayaan tertentu. Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian .

Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian .

k. Piutang dan pembiayaan syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS, dimana BRIS membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antara BRIS sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (pre-determined ratio) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna.*

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

l. Piutang sewa pembiayaan

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Piutang sewa pembiayaan diakui sebesar investasi bersih yang merupakan nilai wajar dikurangi pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan suku bunga efektif.

m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit* (L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

n. Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian .

Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

(i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
(ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Komputer dan mesin	3 - 5
Perlengkapan kantor	5
Satelit	15

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomik masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 17).

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif maka perlu dilakukan revaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap terkait, bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan diperlukan penurunan atas nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka BRI akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

BRI mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (reconditioning cost) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan BRIS. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai sarana perintah pembayaran yang telah disepakati. Giro *mudharabah* dicatat sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya (lanjutan)

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan BRI Agro. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dan BRIS. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan entitas anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan BRI adalah Obligasi dan *Medium-Term Note* (MTN).

Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman dan surat berharga subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR), sedangkan BRIS (entitas anak) pengukuran biaya perolehan diamortisasi dengan mengunakan metode garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Provisi

Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling terkini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

z. Cadangan dan pembayaran bunga tepat waktu pada BRI Unit

Pembayaran Bunga Tepat Waktu (PBTW) adalah insentif yang diberikan kepada para debitur Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang melunasi kreditnya dengan membayar kembali kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati bersama. Besarnya PBTW adalah sebesar 25% dari bunga yang diterima baik untuk Kupedes Modal Kerja maupun Kupedes Investasi. PBTW disajikan sebagai pengurang pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. BRI membentuk Cadangan Pembayaran Bunga Tepat Waktu (CPBTW) atas PBTW tersebut dan menyajikan pada akun “Liabilitas Lain-lain” (Catatan 29).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

aa. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

ab. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian .

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ac. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari transaksi *ijarah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode margin efektif. Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, BRIS mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Pendapatan premi dan beban klaim

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak asuransi bukan jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi atau tanggal premi jatuh tempo dicatat sebagai titipan premi.

Premi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai deposit melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

Klaim dan manfaat asuransi merupakan klaim-klaim yang telah disetujui (approved claim). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai klaim reasuransi pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Klaim dan manfaat asuransi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai penarikan (withdrawal) melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

ae. Liabilitas kontrak asuransi, kontrak investasi dan reasuransi

Liabilitas kontrak asuransi

a. Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi bukan jangka pendek.

Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

b. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan klaim dalam proses penyelesaian yang ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (“IBNR”).

Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ae. Liabilitas kontrak asuransi, kontrak investasi dan reasuransi (lanjutan)

Liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian premi yang telah dilunasi, namun belum merupakan pendapatan karena masa pertanggungan asuransi masih berjalan pada akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi jangka pendek.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungan yang besarnya ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah proteksi yang diberikan selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi asuransi jangka pendek.

Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Liabilitas kontrak investasi

Liabilitas kontrak investasi merupakan liabilitas yang dihitung atas kontrak investasi (termasuk jumlah komponen risiko keuangan dalam kontrak asuransi yang telah dipisahkan) dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2014). Deposit dan penarikan terkait kontrak investasi (termasuk jumlah komponen risiko keuangan dalam kontrak asuransi yang telah dipisahkan) dicatat langsung sebagai penyesuaian atas liabilitas kontrak investasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan tidak dicatat sebagai pendapatan premi di laba rugi. Kecuali deposit dan penarikan, seluruh perubahan liabilitas kontrak investasi diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Reasuransi

BRI Life mensesikan risiko asuransi dalam bisnis normal pada setiap lini bisnisnya.

Manfaat BRI Life atas kontrak reasuransi yang dimiliki diakui sebagai aset reasuransi. Aset ini terdiri dari piutang yang bergantung pada klaim yang diperkirakan dan manfaat yang timbul dalam kontrak reasuransi terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 62, aset reasuransi tidak saling hapus dengan liabilitas kontrak asuransi terkait.

Piutang reasuransi diestimasi secara konsisten dengan klaim yang disetujui terkait dengan kebijakan reasuradur dan sesuai dengan kontrak reasuransi terkait.

BRI Life mereasuransikan sebagian risiko atas ekspektasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak asuransi tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ae. Liabilitas kontrak asuransi, kontrak investasi dan reasuransi (lanjutan)

Reasuransi (lanjutan)

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

BRI Life menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas liabilitas manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan, dan estimasi liabilitas klaim.

Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti obyektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BRI Life tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BRI Life mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset atau liabilitas reasuransi dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktualnya hilang atau berakhir, atau ketika kontrak dialihkan kepada pihak lain.

af. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Merupakan iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar dan program kesehatan pasca kerja BPJS dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan persyaratan minimum Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

af. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

ag. Opsi saham

Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun “Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan” berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (cliff-vesting scheme) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai “Opsi Saham” dalam bagian ekuitas.

Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes.*

ah. Laba per lembar saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk (BRI) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

ai. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ai. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	31 Desember		
	2018	2017	2016
1 Dolar Amerika Serikat	14.380,00	13.567,50	13.472,50
1 Pound Sterling Inggris	18.311,50	18.325,62	16.555,01
1 Yen Jepang	130,62	120,52	115,07
1 Euro Eropa	16.440,66	16.236,23	14.175,77
1 Dolar Hong Kong	1.836,28	1.736,21	1.737,34
1 Riyal Arab Saudi	3.833,50	3.617,71	3.591,90
1 Dolar Singapura	10.554,91	10.154,56	9.311,93
1 Ringgit Malaysia	3.476,79	3.352,07	3.003,23
1 Dolar Australia	10.162,35	10.594,19	9.723,11
1 Renminbi	2.090,57	2.083,64	1.939,19
1 Baht Thailand	443,62	416,31	376,12
1 Franc Swiss	14.595,28	13.901,13	13.208,98
1 Dolar Kanada	10.560,72	10.821,97	9.986,29
1 Dolar Brunei Darussalam	10.453,24	10.083,61	9.311,29
1 Kroner Denmark	2.201,84	2.180,78	1.906,86
1 Won Korea Selatan	12,92	12,74	11,20
1 Dolar Selandia Baru	9.659,05	9.650,57	9.362,72
1 Kina Papua Nugini	4.270,90	4.219,51	4.243,86
1 Dirham Uni Emirat Arab	3.914,90	3.693,95	3.667,98
1 Kroner Swedia	1.605,04	1.650,05	1.482,52
1 Kroner Norwegia	1.653,52	1.649,87	1.560,42
1 Rupee India	206,12	212,49	198,40
1 Peso Filipina	273,85	272,13	271,63
1 Rupee Pakistan	1,99	1,99	1,99
1 Dolar Taiwan	471,51	457,19	416,86
1 Dong Vietnam	0,62	0,60	0,59

aj. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Entitas Anak di Hong Kong, 3 (tiga) Kantor Cabang di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan masing-masing di New York dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun Entitas Anak, Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir tahun merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan kurs historis.
- Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai “Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing”.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (quoted price) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2c).

al. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai “Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan” dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. *Item-item* segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi dan lainnya serta entitas anak, juga berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura dan Timor Leste.

an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen BRI telah melakukan penilaian atas kemampuan BRI dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa BRI dan entitas anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen BRI tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BRI dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Manajemen BRI dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgement* yang signifikan. Dalam membuat *judgement* ini, BRI dan entitas anak mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika BRI dan entitas anak gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang tidak signifikan saat mendekati jatuh tempo, BRI dan entitas anak harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Kontinjensi

Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan

Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan setiap tahun, untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, BRI dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Manajemen BRI memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, yang disebabkan karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;

b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan

c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas imbalan kerja

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan liabilitas yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (policies in force). Pertimbangan manajemen BRI diperlukan untuk menentukan jumlah estimasi liabilitas klaim yang dapat diakui.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

BRI mencatat liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dengan metode nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu dan tingkat diskonto.

ao. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI dan BRI Agro tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*).

ap. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2018, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

a. PSAK No. 2 (Amandemen 2016), ”Laporan Arus Kas Tentang Prakarsa Pengungkapan”, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

b. PSAK No. 46 (Amandemen 2016), ”Pajak Penghasilan Tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Untuk Rugi Yang Belum Direalisasi”, mengklarifikasi:
   - bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan,
   - bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak,

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ap. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2018, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu: (lanjutan)

b. PSAK No. 46 (Amandemen 2016), ”Pajak Penghasilan Tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Untuk Rugi Yang Belum Direalisasi”, mengklarifikasi: (lanjutan)
   - bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut,
   - bahwa beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar bahwa entitas akan mencapai hal tersebut.

c. PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”, saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur *investee*-nya pada nilai wajar atas dasar investasi per investasi.

d. PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), ”Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”, persyaratan pengungkapan dalam PSAK No. 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP 10 - PP 16, juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK No. 58 ”Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”.

e. PSAK No. 13 (Amendemen 2017), “Properti Investasi”, mengamendemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Selain itu, Amendemen PSAK No. 13 tentang Pengalihan Properti Investasi juga mengkarakteristik ulang daftar keadaan dalam paragraf 57(a)-(d) sebagai daftar contoh yang tidak komprehensif.

f. PSAK No. 53 (Amendemen 2017), “Pembayaran Berbasis Saham”, Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham”, bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.

g. PSAK No. 111, ”Akuntansi *Wa’d*”, mengatur entitas yang memberi atau menerima *wa’d* tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa’d* ketika menjadi akad. PSAK No. 111 ini dilengkapi dengan contoh penerapan wa’d pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.

Penerapan PSAK diatas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

3. KAS

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		26.155.113		23.780.462		24.499.705
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	34.541.940	496.713	24.518.731	332.658	25.130.556	338.571
Riyal Arab Saudi	82.420.172	315.958	44.538.523	161.128	27.860.774	100.072
Dolar Singapura	17.361.429	183.248	12.426.367	126.185	8.179.992	76.171
Dolar Australia	9.900.880	100.616	9.523.110	100.890	4.901.050	47.653
Euro Eropa	3.460.220	56.888	5.057.112	82.108	3.703.923	52.506
Renminbi	14.311.263	29.919	8.298.458	17.291	7.706.154	14.944
Ringgit Malaysia	4.810.352	16.725	21.343.230	71.544	5.869.535	17.628
Yen Jepang	126.504.293	16.524	107.417.978	12.945	113.550.640	13.066
Dirham Uni Emirat Arab	2.735.641	10.694	2.264.530	8.365	1.805.500	6.623
Kina Papua Nugini	2.424.145	10.353	20.351.860	85.875	6.273.700	26.625
Pound Sterling Inggris	312.286	5.718	279.611	5.124	324.900	5.379
Dolar Selandia Baru	585.883	5.659	143.509	1.385	109.491	1.025
Dolar Brunei Darussalam	436.918	4.567	196.065	1.977	237.922	2.215
Franc Swiss	242.859	3.545	165.269	2.297	130.200	1.720
Dolar Hong Kong	1.665.711	3.059	2.558.587	4.442	2.981.757	5.180
Baht Thailand	4.042.015	1.793	3.624.785	1.509	5.394.605	2.029
Dolar Kanada	160.735	1.698	140.265	1.518	72.670	726
Peso Filipina	5.247.730	1.437		-		-
Dolar Taiwan	1.572.870	742		-		-
Won Korea Selatan	31.093.164	402	25.910.970	330	34.316.799	384
Dong Vietnam	361.623.064	224		-		-
Rupee India	146.077	30	19.307	4	19.307	4
		1.266.512		1.017.575		712.521
Total		**27.421.625**		**24.798.037**		**25.212.226**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, saldo kas sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp7.701.794, Rp8.572.694 dan Rp9.148.888, serta ASD960.269 (angka penuh), ASD187.828 (angka penuh) dan ASDNihil.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		57.318.490		47.081.113		44.066.637
Dolar Amerika Serikat	962.513.784	13.840.952	816.242.160	11.074.366	858.735.147	11.569.309
Total		71.159.442		58.155.479		55.635.946

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, didalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah, masing-masing sebesar Rp1.498.333, Rp1.797.626 dan Rp1.201.177.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM BRI (Entitas Induk) (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
GWM - Rupiah	7,16%	6,52%	6,94%
GWM - Valuta Asing	8,01	8,15	8,03
GWM Sekunder - Rupiah	-	15,09	9,96
PLM	10,31	-	-

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2018 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Juli 2018, sedangkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", yang mengatur perubahan istilah GWM sekunder menjadi PLM dan GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR), menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2017 dihitung berdasarkan PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang "Perubahan Kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang "Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, BRI harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk PLM dan GWM sekunder dalam Rupiah masing-masing sebesar 4%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, BRI juga diharuskan memenuhi RIM dan GWM LFR, jika RIM dan GWM LFR BRI kurang dari batas bawah target BI sebesar 80% atau melebihi batas atas target BI sebesar 92% dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BRI lebih kecil dari KPMM insentif BI yang sebesar 14%.

BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang rasio-rasio tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga						
Rupiah		154.669		172.765		235.413
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	674.135.360	9.694.067	241.576.730	3.277.592	442.035.654	5.955.324
Euro Eropa	45.049.368	740.641	30.492.030	495.075	216.459.901	3.068.485
Renminbi	348.797.098	729.185	368.054.977	766.894	289.301.367	561.010
Yen Jepang	3.005.682.949	392.602	2.640.107.545	318.173	1.850.099.200	212.882
Dolar Singapura	28.114.685	296.748	32.967.208	334.767	44.289.848	412.424
Dolar Australia	25.707.794	261.252	5.448.385	57.721	14.336.181	139.392
Franc Swiss	8.192.718	119.575	3.707.809	51.543	2.559.185	33.804
Dolar Hong Kong	39.110.165	71.817	186.764.137	324.261	91.641.803	159.213
Pound Sterling Inggris	4.135.264	75.723	3.124.408	57.257	9.564.477	158.340
Riyal Arab Saudi	3.737.692	14.328	33.258.310	120.319	13.268.872	47.660
Dirham Uni Emirat Arab	2.642.819	10.346	3.057.362	11.294	26.818.881	98.371
Dolar Kanada	827.592	8.740	527.067	5.704	1.152.637	11.511
Dolar Selandia Baru	850.227	8.212	1.624.150	15.674	1.349.992	12.640
Kroner Norwegia	2.493.816	4.124	3.170.148	5.230	4.765.927	7.437
Kroner Swedia	1.038.835	1.667	439.543	725	2.249.280	3.335
Ringgit Malaysia	250.179	870	-	-	-	-
Baht Thailand	838.250	372	-	-	-	-
		12.430.269		5.842.229		10.881.828
		12.584.938		6.014.994		11.117.241
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah		68.348		100.720		149.390
Mata uang asing						
Dolar Hong Kong	8.754.394	16.075	5.669.667	9.844	5.273.792	9.162
Dolar Amerika Serikat	555.894	7.994	512.577	6.954	371.230	5.002
		24.069		16.798		14.164
		92.417		117.518		163.554
		12.677.355		6.132.512		11.280.795

b) Berdasarkan Bank:

	31 Desember		
	2018	2017*)	2016*)
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	71.142	85.742	102.839
PT Bank Central Asia Tbk	54.561	57.458	43.033
BPR Warga Dani Bringin Dana Sejahtera	6.747	6.587	6.431
PT Bank Permata Tbk	6.712	4.019	4.868
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.426	7.442	9.560
Lainnya	10.081	11.517	68.682
	154.669	172.765	235.413

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):

	31 Desember		
	2018	2017*)	2016*)
Pihak ketiga (lanjutan)			
Mata uang asing			
JP Morgan Chase Bank, N.A.	6.693.664	1.647.615	5.344.626
Citibank, N.A.	1.350.672	176.120	31.620
Standard Chartered Bank	841.259	785.300	863.323
Bank of China, Ltd.	714.754	705.571	490.368
Bank of America, N.A.	572.241	243.081	446.363
Lainnya	2.257.679	2.284.542	3.705.528
	12.430.269	5.842.229	10.881.828
	12.584.938	6.014.994	11.117.241
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.425	89.673	142.311
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.067	6.953	6.926
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.809	3.982	5
PT Bank Syariah Mandiri	44	33	74
PT Bank BNI Syariah	3	79	74
	68.348	100.720	149.390
Mata uang asing			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.224	10.476	9.627
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.845	6.322	4.537
	24.069	16.798	14.164
	92.417	117.518	163.554
Total	12.677.355	6.132.512	11.280.795

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua giro pada bank lain diklasifikasikan “Lancar”.

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Rupiah	0,18%	0,37%	0,27%
Mata uang asing	1,52	0,35	0,26

e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa giro pada bank lain dapat ditagih.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga						
Rupiah						
Bank Indonesia						
Term Deposit		42.987.847		12.997.000		5.997.961
Deposit Facility		4.398.775		11.087.984		52.359.589
Deposit Facility Syariah		3.132.000		1.968.000		963.000
		50.518.622		26.052.984		59.320.550
Inter-bank call money						
PT Bank Mega Tbk		500.000		100.000		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		439.000		110.000		245.000
PT Bank DKI		350.000		-		-
PT Bank Riau Kepri		250.000		150.000		25.000
Citibank, N.A.		200.000		-		-
PT Bank Aceh Syariah		200.000		200.000		200.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		200.000		400.000		70.000
PT Bank HSBC Indonesia		200.000		-		-
PT Bank OCBC NISP Tbk		200.000		300.000		80.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia		200.000		180.000		250.000
PT BPD Sumatera Selatan		150.000		-		-
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		130.000		85.000		-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		125.000		-		20.000
PT Bank Nasionalnobu Tbk		100.000		-		-
PT BPD Jawa Tengah		100.000		20.000		50.000
PT BPD Sulawesi Tengah		100.000		50.000		50.000
PT Bank KEB Hana Indonesia		80.000		30.000		-
PT Bank Victoria International Tbk		80.000		-		30.000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.		70.000		-		-
PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk		60.000		-		-
PT BPD Maluku dan Maluku Utara		50.000		-		50.000
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk		50.000		-		-
PT BPD Sulawesi Tenggara		47.000		75.000		-
PT Bank Yudha Bhakti Tbk		40.000		-		-
PT Bank CIMB Niaga Tbk		20.000		50.000		70.000
PT Bank Sinarmas Tbk		20.000		-		80.000

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)						
Rupiah (lanjutan)						
Inter-bank call money (lanjutan)						
PT Bank Pan Indonesia Tbk		-		300.000		60.000
PT BPD Jambi		-		100.000		50.000
PT BPD Jawa Timur Tbk		-		100.000		50.000
PT Bank ANZ Indonesia		-		100.000		-
PT Bank ICBC Indonesia		-		100.000		-
J.P. Morgan Chase Bank N.A.		-		100.000		100.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk		-		75.000		-
PT Bank CTBC Indonesia		-		50.000		-
Standard Chartered Bank Indonesia		-		-		200.000
PT Bank Bukopin Tbk		-		-		80.000
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		-		-		70.000
PT BPD Lampung		-		-		50.000
PT Bank DBS Indonesia		-		-		20.000
PT Bank Victoria Syariah		-		-		20.000
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi		-		-		20.000
		3.961.000		2.675.000		1.940.000
Deposito berjangka						
PT BPD Sumatera Selatan		45.000		-		-
PT Bank Pan Indonesia Tbk		45.000		-		-
PT Bank OCBC NISP Tbk		45.000		-		-
PT Bank CIMB Niaga Tbk		45.000		-		-
PT BPD Sulselbar		41.000		-		-
PT BPD Sumatera Utara		36.000		-		-
PT Bank DKI		36.000		-		-
PT BPD Jambi		27.000		-		-
PT BPD Sulutgo		20.000		-		-
PT Bank Permata Tbk		9.650		-		-
PT Bank Capital Indonesia Tbk		5.000		-		-
PT Bank Sahabat Sampoerna		2.000		2.000		2.000
PT Bank Bukopin Tbk		750		9.250		3.300
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk		330		-		-
PT Bank Danamon Syariah		150		-		-

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)						
Rupiah (lanjutan)						
Deposito berjangka (lanjutan)						
PT Bank Ganesha Tbk		-		4.800		-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		-		4.800		-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		-		2.200		-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk		-		1.700		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		-		1.300		-
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk		-		825		1.850
PT Bank Riau Kepri		-		300		-
PT Bank Bukopin Tbk		-		250		1.000
PT Bank HSBC Indonesia		-		200		-
		357.880		27.625		8.150
Deposits on call						
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		50.000		-		50.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		-		50.000		-
PT Bank MNC Internasional		-		-		40.000
PT Bank Bukopin Tbk		-		-		230
		50.000		50.000		90.230
Penempatan lainnya (Banker's Acceptance)						
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia		-		400.000		-
PT Bank KEB Hana Indonesia		-		-		130.000
		-		400.000		130.000
		54.887.502		29.205.609		61.488.930

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)						
Dolar Amerika Serikat						
Bank Indonesia						
Term Deposit	1.239.449.071	17.823.278	1.399.887.185	18.992.969	999.961.670	13.471.984
Inter-bank call money						
Wells Fargo Bank, N.A.	400.700.000	5.762.066	261.100.000	3.542.474	70.300.000	947.117
Citibank, N.A.	184.320.000	2.650.521	27.530.000	373.513	29.940.000	403.367
Federal Reserve Bank	104.507.840	1.502.823	101.662.902	1.379.311	62.352.096	840.039
The Bank of New York Mellon Corporation	34.200.000	491.796	52.900.000	717.721	33.700.000	454.023
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	17.000.000	244.460		-		-
The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited	11.792.260	169.573		-		-
PT Bank ICBC Indonesia	10.017.618	144.053		-		-
PT Bank Commonwealth	7.000.000	100.660		-		-
PT Bank CTBC Indonesia	5.000.000	71.900		-		-
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	4.000.000	57.520		-		-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3.000.000	43.140		-		-
ING Bank N.V.	2.530.000	36.381		-		-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	911.420	13.106		-	1.310.193	17.651
JP Morgan Chase Bank, N.A.	660.000	9.491		-		-
TD Bank, N.A.	29.799	429	119.787	1.625	627.068	8.448
		11.297.919		6.014.644		2.670.645
Deposito berjangka						
U.S. Bank	35.802.938	514.846	9.776.443	132.643	228.828	3.083
TD Bank, N.A.	56.040	806	260.475	3.534	511.630	6.893
		515.652		136.177		9.976
Penempatan lainnya (Banker's Acceptance)						
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10.000.000	143.800	25.000.000	339.188		-
PT Bank Mega Tbk		-	10.000.000	135.675	9.996.546	134.678
		143.800		474.863		134.678
		29.780.649		25.618.653		16.287.283
		84.668.151		54.824.262		77.776.213

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Inter-bank call-money						
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		1.200.000		-		200.000
PT BNI Multifinance		100.000		-		-
PT Mandiri Utama Finance		200.000		-		-
PT Sarana Multigriya Finansial		100.000		-		-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		-		-		40.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		-		-		200.000
		1.600.000		-		440.000
Deposits on call						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		-		-		13.000
Deposito berjangka						
PT Bank Mandiri Syariah		36.000		-		-
PT BTN Syariah		30.200		8.550		4.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		29.500		7.200		8.220
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3.100		43.400		5.400
PT Bank BNI Syariah		2.000		2.000		2.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		2.000		-		-
		102.800		61.150		19.620
		1.702.800		61.150		472.620

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)						
Dolar Amerika Serikat						
Inter-bank call-money						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	45.000.000	647.100		-		-
Penempatan lainnya (Banker's Acceptance)						
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		-	10.000.000	135.675		-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		-	10.000.000	135.675		-
		647.100		271.350		-
		2.349.900		332.500		472.620
Total		**87.018.051**		**55.156.762**		**78.248.833**

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	2017*)	2016*)
Pihak ketiga			
Rupiah			
≤ 1 bulan	54.865.502	28.575.609	61.358.930
> 1 bulan - 3 bulan	22.000	630.000	130.000
	54.887.502	29.205.609	61.488.930
Mata Uang Asing			
≤ 1 bulan	28.205.442	25.008.603	16.287.283
> 1 bulan - 3 bulan	1.575.207	270.863	-
> 3 bulan - 1 tahun	-	339.187	-
	29.780.649	25.618.653	16.287.283
	84.668.151	54.824.262	77.776.213

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
≤ 1 bulan	1.365.600	61.150	472.620
> 1 bulan - 3 bulan	115.000	-	-
> 3 bulan - 1 tahun	222.200	-	-
	1.702.800	61.150	472.620
Dolar Amerika Serikat			
≤ 1 bulan	647.100	-	-
> 1 bulan - 3 bulan	-	271.350	-
	647.100	271.350	-
	2.349.900	332.500	472.620
Total	**87.018.051**	**55.156.762**	**78.248.833**

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan “Lancar”.

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rupiah			
Penempatan pada Bank Indonesia	5,58%	3,83%	4,35%
Penempatan pada Bank lain	7,75	5,13	6,56
Mata Uang Asing			
Penempatan pada Bank Indonesia	2,50%	0,69%	0,44%
Penempatan pada Bank lain	2,71	1,40	0,62

BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang mengalami penurunan nilai dan yang dibatasi penggunaannya.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

7. EFEK-EFEK

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui laba rugi						
Pihak ketiga						
Rupiah						
Reksadana		1.228.656		812.205		273.602
Sertifikat Bank Indonesia		569.017		-		-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		99.272		385.040		-
Obligasi Subordinasi		55.957		50.976		45.880
Obligasi		26.213		35.833		54.416
Lainnya		125.672		134.493		111.525
		2.104.787		1.418.547		485.423
Dolar Amerika Serikat						
Reksadana	538.620	7.745	542.921	7.366		-
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Obligasi Pemerintah		1.453.780		169.425		85.722
Obligasi		102.556		35.545		10.329
Reksadana		14.699		21.264		19.786
Lainnya		77.980		82.796		72.988
		1.649.015		309.030		188.825
Dolar Amerika Serikat						
Obligasi Pemerintah	49.313	709	1.989.302	26.990		-
Reksadana	-	-	154.753	2.100	147.263	1.984
		709		29.090		1.984
		3.762.256		1.764.033		676.232
Tersedia untuk dijual						
Pihak ketiga						
Rupiah						
Sertifikat Bank Indonesia		12.020.153		-		8.895.833
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		3.557.671		35.482.251		6.023.957
Obligasi		3.369.218		2.994.315		2.141.239
Reksadana		1.669.202		1.086.590		552.481
Negotiable Certificate of Deposit		1.007.337		686.354		-
Obligasi Subordinasi		723.860		796.981		812.649
Medium-Term Note		14.163		-		40.000
Lainnya		132.255		121.918		104.186
		22.493.859		41.168.409		18.570.345
Dolar Amerika Serikat						
Sertifikat Bank Indonesia	99.760.983	1.434.563	445.640.048	6.046.221	276.240.564	3.721.651
Obligasi	24.482.413	352.057	32.756.717	444.427	59.913.082	807.179
U.S. Treasury Bonds	18.728.295	269.313	17.316.502	234.941	25.822.008	347.887
		2.055.933		6.725.589		4.876.717

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Tersedia untuk dijual (lanjutan)						
Pihak ketiga (lanjutan)						
Dolar Singapura						
Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills	69.855.211	737.315	42.460.236	431.165	35.000.048	325.918
Singapore Government Securities (SIGB)	18.154.080	191.615	18.167.760	184.486	21.338.863	198.706
		928.930		615.651		524.624
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Obligasi Pemerintah		72.339.882		50.412.771		21.158.568
Obligasi		6.603.043		6.078.903		2.408.561
Negotiable Certificate of Deposit		496.120		77.807		-
Medium-Term Note		402.114		207.000		155.074
Reksadana		151.369		418.278		373.303
Lainnya		241.911		102.264		77.508
		80.234.439		57.297.023		24.173.014
Dolar Amerika Serikat						
Obligasi Pemerintah	1.566.688.576	22.528.982	1.739.665.407	23.602.910	1.441.010.726	19.414.017
Obligasi	63.674.426	915.638	53.137.755	720.946	106.060.345	1.428.898
		23.444.620		24.323.856		20.842.915
Euro Eropa						
Obligasi Pemerintah	48.235.752	793.027	50.205.906	815.155	37.108.474	526.041
		129.950.808		130.945.683		69.513.656
Dimiliki hingga jatuh tempo						
Pihak ketiga						
Rupiah						
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)		1.200.000		250.000		1.650.000
Obligasi		754.432		1.182.953		1.444.330
Sukuk Bank Indonesia		100.000		-		-
Medium-Term Note		100.000		150.000		150.000
Obligasi Subordinasi		56.847		20.000		60.000
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		21.671		597.476		-
Negotiable Certificate of Deposit		9.678		106.968		660.243
Sertifikat Bank Indonesia		-		-		2.009.192
		2.242.628		2.307.397		5.973.765

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017*)		31 Desember 2016*)	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)						
Pihak ketiga (lanjutan)						
Dolar Amerika Serikat						
Wesel Tagih		-		-	2.000.000	26.945
Lainnya		430.421	37.463.410	508.285	43.108.406	580.778
		430.421		508.285		607.723
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Obligasi						
Pemerintah		30.275.259		30.170.232		32.185.729
Obligasi		2.785.335		3.027.090		2.567.989
Negotiable Certificate of Deposit		190.975		155.453		808.282
Medium-Term Note		-		-		99.710
		33.251.569		33.352.775		35.661.710
Dolar Amerika Serikat						
Obligasi						
Pemerintah	979.170.928	14.080.478	1.302.517.859	17.671.911	1.391.260.144	18.743.752
Obligasi	25.724.245	369.915	14.344.879	194.624	54.871.034	739.250
		14.450.393		17.866.535		19.483.002
Euro Eropa						
Obligasi						
Pemerintah	11.966.390	196.735	12.003.295	194.888	12.039.541	170.670
		50.571.746		54.229.880		61.896.870
Total		184.284.810		186.939.596		132.086.758
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(758)		(758)		(758)
Bersih		**184.284.052**		**186.938.838**		**132.086.000**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

Atas hal tersebut di atas, manajemen BRI Life per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp758.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Pihak ketiga			
Rupiah			
≤ 1 bulan	25.069.700	43.057.941	19.441.393
> 1 bulan - 3 bulan	500.000	782.535	308.968
> 3 bulan - 1 tahun	760.778	437.140	4.168.321
> 1 tahun	510.796	616.737	1.110.851
	26.841.274	44.894.353	25.029.533
Mata Uang Asing			
≤ 1 bulan	3.133.047	7.507.182	5.401.340
> 1 bulan - 3 bulan	255.470	206.371	267.955
> 3 bulan - 1 tahun	34.512	143.338	339.769
	3.423.029	7.856.891	6.009.064
	30.264.303	52.751.244	31.038.597
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
≤ 1 bulan	81.389.780	57.984.198	25.395.119
> 1 bulan - 3 bulan	2.351.524	4.557.673	4.151.328
> 3 bulan - 1 tahun	7.062.989	2.091.387	3.685.462
> 1 tahun	24.330.730	26.325.570	26.791.640
	115.135.023	90.958.828	60.023.549
Mata Uang Asing			
≤ 1 bulan	24.180.301	26.127.056	21.362.145
> 1 bulan - 3 bulan	4.361.996	-	504.355
> 3 bulan - 1 tahun	159.264	3.161.410	996.873
> 1 tahun	10.183.923	13.941.058	18.161.239
	38.885.484	43.229.524	41.024.612
	154.020.507	134.188.352	101.048.161
Total	184.284.810	186.939.596	132.086.758
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(758)	(758)	(758)
Bersih	**184.284.052**	**186.938.838**	**132.086.000**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds* dan *Singapore Government Securities.* Rincian obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Rupiah			
Obligasi Pemerintah Sukuk	604.270	44.439	21.498
Obligasi Republik Indonesia	332.962	54.568	462
Surat Perbendaharaan Negara	241.770	-	-
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	224.861	70.418	63.762
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	49.917	-	-
	1.453.780	169.425	85.722
Mata uang asing			
Obligasi Republik Indonesia	709	26.990	-
	709	26.990	-
	1.454.489	196.415	85.722
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	38.397.808	31.565.767	16.299.512
Obligasi Pemerintah Sukuk	16.286.957	9.383.086	3.249.526
Surat Perbendaharaan Negara	15.379.111	8.568.221	888.536
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.283.799	-	-
Obligasi Republik Indonesia	992.207	895.697	720.994
	72.339.882	50.412.771	21.158.568
Mata uang asing			
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*			
Dolar Amerika Serikat	18.744.013	19.407.161	14.539.987
Obligasi Pemerintah Sukuk	3.784.969	4.195.749	4.874.030
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	793.027	815.155	526.041
U.S. Treasury Bonds	269.313	234.941	347.887
Singapore Government Securities (SIGB)	191.615	184.486	198.706
	23.782.937	24.837.492	20.486.651
	96.122.819	75.250.263	41.645.219
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Rupiah			
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	17.901.317	15.772.583	14.005.826
Obligasi Pemerintah Sukuk	11.746.682	12.676.512	14.933.145
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	626.126	-	-
Obligasi Republik Indonesia	1.134	133.719	918.949
Surat Perbendaharaan Negara	-	1.587.418	2.327.809
	30.275.259	30.170.232	32.185.729

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Mata uang asing			
Obligasi Pemerintah Sukuk	8.706.260	11.524.572	11.579.660
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*			
Dolar Amerika Serikat	5.374.218	6.147.339	7.164.092
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	196.735	194.888	170.670
	14.277.213	17.866.799	18.914.422
	44.552.472	48.037.031	51.100.151
Total	**142.129.780**	**123.483.709**	**92.831.092**

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Rupiah			
Obligasi Pemerintah Sukuk			
IFR0006	10,25	10,25	10,25
PBS005	6,75	6,75	6,75
PBS006	8,25	8,25	8,25
PBS011	8,75	8,75	8,75
PBS012	8,88	8,88	8,88
PBS013	6,25	6,25	6,25
PBS015	8,00	-	-
PBS016	6,25	-	-
SR008	8,30	8,30	8,30
SR009	6,90	6,90	-
SR010	5,90	-	-
Obligasi Republik Indonesia			
ORI012	-	9,00	-
ORI013	6,60	-	-
ORI014	5,85	5,85	-
ORI015	8,25	-	-
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	-	-
Fixed Rate			
FR0053	8,25	-	-
FR0061	7,00	7,00	-
FR0064	6,13	6,13	6,13
FR0065	6,63	6,63	6,63
FR0068	8,38	-	-
FR0069	7,88	-	-
FR0072	8,25	-	-
FR0074	7,50	7,50	-
FR0075	7,50	7,50	-
FR0077	8,13	-	-
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	-	-
Mata uang asing			
Obligasi Republik Indonesia			
RI0123	-	2,95	-
RI0827	4,35	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Fixed Rate			
FR0035	12,90	12,90	12,90
FR0052	10,50	10,50	10,50
FR0053	8,25	8,25	8,25
FR0059	7,00	7,00	7,00
FR0061	7,00	7,00	7,00
FR0063	5,63	5,63	5,63
FR0064	6,13	6,13	6,13
FR0065	6,63	6,63	6,63
FR0069	7,88	7,88	7,88
FR0074	7,50	7,50	7,50
Obligasi Pemerintah Sukuk			
PBS004	6,10	6,10	6,10
PBS006	8,25	8,25	8,25
PBS011	8,75	8,75	8,75
PBS012	8,88	8,88	8,88
PBS013	6,25	6,25	6,25
PBS014	6,50	6,50	6,50
PBS016	6,25	-	-
PBS017	6,13	-	-
SR008	8,30	8,30	8,30
SR009	6,90	6,90	6,90
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	Beragam	Beragam
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam	Beragam
Obligasi Republik Indonesia			
ORI013	6,60	6,60	6,60
ORI014	5,85	5,85	5,85
Mata uang asing			
Fixed Rate Dolar Amerika Serikat			
RI0125	4,13	4,13	4,13
RI0126	4,75	4,75	4,75
RI0320	5,88	5,88	5,88
RI0319	11,63	11,63	11,63
RI0422	3,75	3,75	3,75
RI0423	3,38	3,38	3,38
RI0521	4,88	4,88	4,88
RI0822	-	3,70	3,70
RI1023	5,38	5,38	5,38
RI1320	5,88	5,88	5,88
Obligasi Pemerintah Sukuk			
INDOIS 18	-	4,00	4,00
INDOIS 19	6,13	6,13	6,13
INDOIS 21	3,40	3,40	3,40
INDOIS 21A	3,40	3,40	3,40
INDOIS 22	3,40	3,40	3,40
INDOIS 22 SL	3,40	3,30	3,30
INDOIS 24	4,35	4,35	4,35
INDOIS 25	4,35	4,33	4,33
INDOIS 26	4,55	4,55	4,55
INDOIS 27 SL	4,15	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
Obligasi Pemerintah Euro Eropa			
RIEUR0623	2,63	2,63	2,63
RIEUR0721	2,88	2,88	2,88
RIEUR0724	2,15	2,15	-
RIEUR0725	3,38	2,15	-
RIEUR0275	-	3,38	3,38
U.S. Treasury Bonds	Beragam	Beragam	Beragam
Singapore Government Securities			
SIGB 060126	2,13	2,13	2,13
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Rupiah			
Fixed Rate			
FR0034	12,80	12,80	12,80
FR0039	11,75	11,75	11,75
FR0040	11,00	11,00	11,00
FR0042	10,25	10,25	10,25
FR0043	10,25	10,25	10,25
FR0044	10,00	10,00	10,00
FR0045	9,75	9,75	9,75
FR0046	9,50	9,50	9,50
FR0047	10,00	10,00	10,00
FR0038	-	11,60	11,60
Obligasi Pemerintah Sukuk			
SR008	8,30	8,30	8,30
PBS004	6,10	6,10	6,10
PBS005	6,75	6,75	6,75
PBS006	8,25	8,25	8,25
PBS007	9,00	9,00	9,00
PBS011	8,75	8,75	8,75
PBS014	6,50	6,50	6,50
IFR0006	10,25	10,25	10,25
IFR0007	10,25	10,25	10,25
IFR0010	10,00	10,00	10,00
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam	Beragam
Obligasi Republik Indonesia			
ORI013	6,60	6,60	6,60
ORI012	-	9,00	9,00
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam	Beragam
Mata uang asing			
Obligasi Pemerintah Sukuk			
INDOIS 19	6,13	6,13	6,13
INDOIS 19S	6,13	6,13	6,13
INDOIS 21	3,40	3,40	3,40
INDOIS 21A	3,40	3,40	3,40
INDOIS 22	3,40	3,40	3,40
INDOIS 24	4,35	4,35	4,35
INDOIS 25	4,33	4,33	4,33
INDOIS 26	4,55	4,55	4,55
INDOIS 18	-	4,00	4,00

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
Fixed Rate Dolar Amerika Serikat			
RI0124	5,88	5,88	5,88
RI0125	4,12	4,12	4,12
RI0126	4,75	4,75	4,75
RI0237	6,63	6,63	6,63
RI0319	11,63	11,63	-
RI0320	5,88	5,88	5,88
RI0422	3,75	3,75	3,75
RI0521	4,88	4,88	4,88
RI1023	5,38	5,38	5,38
RI190304	11,63	11,63	11,63
USDFR0002	4,05	4,05	4,05
Obligasi Pemerintah Euro Eropa			
RIEUR0623	2,62	2,62	2,62
RIEUR0721	2,87	2,87	2,87
RIEUR0725	3,37	3,37	3,37

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Rupiah			
Obligasi Pemerintah Sukuk			
IFR0006	15 Maret 2030	15 Maret 2030	15 Maret 2030
PBS005	15 April 2043	15 April 2043	15 April 2043
PBS006	15 September 2020	15 September 2020	15 September 2020
PBS011	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023
PBS012	15 November 2031	15 November 2031	15 November 2031
PBS013	15 Mei 2019	15 Mei 2019	15 Mei 2019
PBS015	15 Juli 2047	-	-
PBS016	15 Maret 2020	-	-
SR008	10 Maret 2019	10 Maret 2019	10 Maret 2019
SR009	10 Maret 2020	10 Maret 2020	-
SR010	10 Maret 2021	-	-
Obligasi Republik Indonesia			
ORI013	15 Oktober 2019	-	-
ORI014	15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	-
ORI015	15 Oktober 2021	-	-
ORI012	-	15 Oktober 2018	-
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	-	-
Fixed Rate			
FR0053	15 Juli 2021	-	-
FR0061	15 Mei 2022	15 Mei 2022	-
FR0064	15 Mei 2028	15 Mei 2028	15 Mei 2028
FR0065	15 Mei 2033	15 Mei 2033	15 Mei 2033
FR0068	15 Maret 2034	-	-
FR0069	15 April 2019	-	-
FR0072	15 Mei 2036	-	-
FR0074	15 Agustus 2032	15 Agustus 2032	-
FR0075	15 Mei 2038	15 Mei 2038	-
FR0077	15 Mei 2024	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	-	-
Mata uang asing			
Obligasi Republik Indonesia			
RI0827	8 Januari 2027	-	-
RI0123	-	11 Januari 2023	-
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Fixed Rate			
FR0035	15 Juni 2022	15 Juni 2022	15 Juni 2022
FR0052	15 Agustus 2030	15 Agustus 2030	15 Agustus 2030
FR0053	15 Juli 2021	15 Juli 2021	15 Juli 2021
FR0059	15 Mei 2027	15 Mei 2027	15 Mei 2027
FR0061	15 Mei 2022	15 Mei 2022	15 Mei 2022
FR0063	15 Mei 2023	15 Mei 2023	15 Mei 2023
FR0064	15 Mei 2028	15 Mei 2028	15 Mei 2028
FR0065	15 Mei 2033	15 Mei 2033	15 Mei 2033
FR0069	15 April 2019	15 April 2019	15 April 2019
FR0074	15 Agustus 2032	15 Agustus 2032	15 Agustus 2032
Obligasi Pemerintah Sukuk			
PBS004	15 Februari 2037	15 Februari 2037	15 Februari 2037
PBS006	15 September 2020	15 September 2020	15 September 2020
PBS011	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023
PBS012	15 November 2031	15 November 2031	15 November 2031
PBS013	15 Mei 2019	15 Mei 2019	15 Mei 2019
PBS014	15 Mei 2021	15 Mei 2021	15 Mei 2021
PBS016	15 Maret 2020	-	-
PBS017	15 Oktober 2025	-	-
SR008	10 Maret 2019	10 Maret 2019	10 Maret 2019
SR009	10 Maret 2020	10 Maret 2020	10 Maret 2020
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	Beragam	Beragam
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam	Beragam
Obligasi Republik Indonesia			
ORI013	15 Oktober 2019	15 Oktober 2019	15 Oktober 2019
ORI014	15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	15 Oktober 2020
Mata uang Asing			
Fixed Rate Dolar Amerika Serikat			
RI0125	15 Januari 2025	15 Januari 2025	15 Januari 2025
RI0126	8 Januari 2026	8 Januari 2026	8 Januari 2026
RI0319	4 Maret 2019	4 Maret 2019	4 Maret 2019
RI0320	13 Maret 2020	13 Maret 2020	13 Maret 2020
RI0422	25 April 2022	25 April 2022	25 April 2022
RI0423	15 April 2023	15 April 2023	15 April 2023
RI0521	5 Mei 2021	5 Mei 2021	5 Mei 2021
RI1023	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023
RI0822	-	8 Januari 2022	8 Januari 2022
RI1320	-	13 Maret 2020	13 Maret 2020

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
Obligasi Pemerintah Sukuk			
INDOIS 19S	15 Maret 2019	15 Maret 2019	15 Maret 2019
INDOIS 21	31 Maret 2021	31 Maret 2021	31 Maret 2021
INDOIS 21A	29 Maret 2021	29 Maret 2021	29 Maret 2021
INDOIS 22	29 Maret 2022	29 Maret 2022	29 Maret 2022
INDOIS 22 SL	21 November 2022	21 November 2022	21 November 2022
INDOIS 24	10 September 2024	10 September 2024	10 September 2024
INDOIS 25	28 Mei 2025	28 Mei 2025	28 Mei 2025
INDOIS 26	29 Maret 2026	29 Maret 2026	29 Maret 2026
INDOIS 27 SL	29 Maret 2027	-	-
INDOIS 18	-	21 November 2018	21 November 2018
Obligasi Pemerintah Euro Eropa			
RIEUR0721	8 Juli 2021	8 Juli 2021	8 Juli 2021
RIEUR0724	18 Juli 2024	18 Juli 2024	-
RIEUR0725	30 Juli 2025	-	-
RIEUR0275	-	30 Juli 2025	30 Juli 2025
RIEUR0623	-	14 Juni 2023	14 Juni 2023
U.S. Treasury Bonds	Beragam	Beragam	Beragam
Singapore Government Securities			
SIGB 060126	1 Juni 2026	1 Juni 2026	1 Juni 2026
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Rupiah			
Fixed Rate			
FR0034	15 Juni 2021	15 Juni 2021	15 Juni 2021
FR0039	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023
FR0040	15 September 2025	15 September 2025	15 September 2025
FR0042	15 Juli 2027	15 Juli 2027	15 Juli 2027
FR0043	15 Juli 2022	15 Juli 2022	15 Juli 2022
FR0044	15 September 2024	15 September 2024	15 September 2024
FR0045	15 Mei 2037	15 Mei 2037	15 Mei 2037
FR0046	15 Juli 2023	15 Juli 2023	15 Juli 2023
FR0047	15 Februari 2028	15 Februari 2028	15 Februari 2028
FR0038	-	15 Agustus 2018	15 Agustus 2018
Obligasi Pemerintah Sukuk			
SR008	10 Maret 2019	10 Maret 2019	10 Maret 2019
PBS004	15 Februari 2037	15 Februari 2037	15 Februari 2037
PBS005	15 April 2043	15 April 2043	15 April 2043
PBS006	15 September 2020	15 September 2020	15 September 2020
PBS007	15 September 2040	15 September 2040	15 September 2040
PBS011	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023
PBS014	15 Mei 2021	15 Mei 2021	15 Mei 2021
IFR0006	15 Maret 2030	15 Maret 2030	15 Maret 2030
IFR0007	15 Januari 2025	15 Januari 2025	15 Januari 2025
IFR0010	15 Februari 2036	15 Februari 2036	15 Februari 2036
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam	Beragam
Obligasi Republik Indonesia			
ORI013	15 Oktober 2019	15 Oktober 2019	15 Oktober 2019
ORI012	-	15 Oktober 2018	15 Oktober 2018

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Mata uang asing			
Obligasi Pemerintah Sukuk			
INDOIS 19	15 Maret 2019	15 Maret 2019	15 Maret 2019
INDOIS 19S	15 Maret 2019	15 Maret 2019	15 Maret 2019
INDOIS 21	31 Maret 2021	31 Maret 2021	31 Maret 2021
INDOIS 21A	29 Maret 2021	29 Maret 2021	29 Maret 2021
INDOIS 22	21 November 2022	21 November 2022	21 November 2022
INDOIS 24	10 September 2024	10 September 2024	10 September 2024
INDOIS 25	28 Mei 2025	28 Mei 2025	28 Mei 2025
INDOIS 26	29 Maret 2026	29 Maret 2026	29 Maret 2026
INDOIS 18	-	21 November 2018	21 November 2018
Fixed Rate Dolar Amerika Serikat			
RI0124	15 Januari 2024	15 Januari 2024	15 Januari 2024
RI0125	15 Januari 2025	15 Januari 2025	15 Januari 2025
RI0126	8 Januari 2026	8 Januari 2026	8 Januari 2026
RI0237	17 Februari 2037	17 Februari 2037	17 Februari 2037
RI0319	4 Maret 2019	4 Maret 2019	-
RI0320	13 Maret 2020	13 Maret 2020	13 Maret 2020
RI0422	25 April 2022	25 April 2022	25 April 2022
RI0521	5 Mei 2021	5 Mei 2021	5 Mei 2021
RI1023	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023
RI190304	4 Maret 2019	4 Maret 2019	4 Maret 2019
USDFR0002	24 Juni 2026	24 Juni 2026	24 Juni 2026
Obligasi Pemerintah Euro Eropa			
RIEUR0721	8 Juli 2021	8 Juli 2021	8 Juli 2021
RIEUR0725	30 Juli 2025	30 Juli 2025	30 Juli 2025
RIEUR0623	14 Juni 2023	14 Juni 2023	14 Juni 2023

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual” berkisar dari 91,60% sampai dengan 134,25%, 84,99% sampai dengan 149,63% dan 74,48% sampai dengan 135,63%, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Indosat Tbk	12.018	3.120	5.103
PT Medco Energi Internasional Tbk	7.139	7.491	10.160
PT XL Axiata Tbk	5.020	-	-
PT Summarecon Agung Tbk	2.036	2.639	2.597
Lainnya	-	22.583	36.556
	26.213	35.833	54.416
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	68.315	-	-
PT Pegadaian (Persero)	19.742	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	9.870	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	4.629	4.912	1.812
Lainnya	-	30.633	8.517
	102.556	35.545	10.329
	128.769	71.378	64.745
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	463.748	294.642	106.133
PT Bank OCBC NISP Tbk	382.478	404.543	246.165
PT Bank Pan Indonesia Tbk	337.141	264.344	243.247
PT Indosat Tbk	264.262	-	51.673
PT Bank CIMB Niaga Tbk	243.432	274.488	129.375
PT Astra Sedaya Finance	191.414	232.123	365.786
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	163.428	76.516	146.727
PT BFI Finance Indonesia Tbk	144.083	-	-
PT Bank UOB Indonesia	125.656	156.774	132.589
PT Maybank Indonesia Finance	119.362	187.393	35.581
Lainnya	934.214	1.103.492	683.963
	3.369.218	2.994.315	2.141.239
Mata uang asing			
Alibaba Group Holding Ltd.	70.490	69.971	66.622
Oversea-Chinese Banking Corporation	58.120	56.307	54.283
Xerox Corporation	35.200	40.117	38.655
Province of Ontario	15.704	12.987	12.978
Citigroup Inc.	12.117	10.164	9.792
Bank of America	10.457	10.245	9.786
Wells Fargo & Company	10.071	9.774	9.669
The Federal Home Loan Mortgage Corporation	8.822	8.436	28.859
JP Morgan Chase Bank, N.A.	8.695	80.834	105.320
Verizon	7.924	8.034	6.857
Lainnya	114.457	137.558	464.358
	352.057	444.427	807.179

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.360.765	1.126.131	535.518
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	746.852	783.305	349.854
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	744.313	450.181	157.814
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	707.878	682.133	48.979
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	426.530	461.890	-
PT Pegadaian (Persero)	360.295	299.507	105.224
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	339.471	280.192	144.717
PT Indonesia Power	313.101	383.547	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	298.701	202.223	287.893
PT Mandiri Tunas Finance	234.795	187.700	139.510
Lainnya	1.070.342	1.222.094	639.052
	6.603.043	6.078.903	2.408.561
Mata uang asing			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	363.151	237.779	146.181
PT Pertamina (Persero)	354.250	352.610	257.029
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	105.965	36.918	100.613
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	78.719	79.766	100.658
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	13.553	13.873	209.527
Lainnya	-	-	614.890
	915.638	720.946	1.428.898
	11.239.956	10.238.591	6.785.877
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Pan Indonesia Tbk	185.339	185.441	147.385
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	125.000	75.000	199.713
PT Indosat Tbk	110.304	114.009	118.855
PT Bank OCBC NISP Tbk	85.008	145.046	145.157
PT Indonesia Infrastructure Finance	50.000	49.998	50.000
PT Bank UOB Indonesia	40.114	85.242	85.369
PT Toyota Astra Financial Services	33.000	32.998	33.000
PT Global Mediacom Tbk	26.888	-	-
PT BPD Jawa Tengah	25.000	-	-
PT Astra Sedaya Finance	24.000	28.020	39.221
Lain-lain	49.779	467.199	625.630
	754.432	1.182.953	1.444.330
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Pupuk Indonesia (Persero)	940.084	940.237	116.011
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	471.344	506.341	506.239
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	315.112	260.186	308.272
PT Pegadaian (Persero)	254.092	328.125	464.436
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	236.899	237.256	231.282
PT Angkasa Pura I (Persero)	100.000	100.000	100.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.000	30.000	138.766
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	98.474	58.331	172.418
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	75.000	95.000	95.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	53.859	66.947	105.008
Lain-lain	140.471	404.667	330.557
	2.785.335	3.027.090	2.567.989

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Mata uang asing			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	221.739	55.314	62.902
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	57.081	53.727	52.148
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	37.495	35.126	33.863
PT Pertamina (Persero)	30.571	28.646	34.514
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	23.029	21.811	21.353
Lainnya	-	-	534.470
	369.915	194.624	739.250
	3.909.682	4.404.667	4.751.569
Total	15.278.407	14.714.636	11.602.191

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Indosat Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	10,30	10,30	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	8,70	-	-
PT Medco Energi Internasional Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	11,30	11,30	11,30
PT XL Axiata Tbk			
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	8,25	-	-
PT Summarecon Agung Tbk			
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014	11,50	11,50	11,50
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	8,60	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	6,85	-	-
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	7,40	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri A	7,60	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Sukuk *Ijarah* V Tahun 2010 Seri B	10,40	10,40	10,40
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	8,00	8,00	8,00
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,70	8,70	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B	10,25	10,25	10,25
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2015 Seri C	10,25	10,25	10,25
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B	8,75	8,75	8,75
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri B	8,60	8,60	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	8,90	8,90	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri B	8,10	8,10	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri C	8,40	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri B	7,45	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri C	7,55	7,55	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri D	7,50	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri C	8,50	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri D	9,00	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	8,25	8,25
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	7,70	7,70	-
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri A	6,00	-	-
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri B	6,90	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,15	9,15	9,15
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,75	8,75	8,75
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018	7,60	-	-
PT Indosat Tbk			
Indosat VIII Tahun 2012 Seri A	8,63	8,63	-
Indosat VIII Tahun 2012 Seri B	8,88	8,88	8,88
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	10,30	10,30	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	10,25	-	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	11,20	11,20	11,20
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	8,65	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	7,65	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	8,70	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	10,30	10,30	10,30
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	10,50	10,50	10,50
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	8,25	8,25
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri B	7,70	7,70	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,15	8,15	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	7,75	7,75	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	9,25	-	-
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,50	8,50	8,50
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	7,95	7,95	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri B	8,50	8,50	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri C	8,75	8,75	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	7,50	7,50	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018 Seri B	7,50	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak ketiga (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	8,25	-	8,25
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri A	8,00	-	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	7,15	-	-
PT BFI Finance Indonesia			
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri B	7,25	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018 Seri B	7,75	-	-
PT Bank UOB Indonesia			
Tahap I Tahun 2015 Seri C	9,60	9,60	9,60
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,00	8,00	-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	8,25	8,25
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri A	6,15	-	-
PT Maybank Indonesia Finance			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 Seri A	9,10	-	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2016 Seri A	8,30	8,30	-
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2017 Seri B	7,90	-	-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	7,75	-	-
Mata uang asing			
Alibaba Group Holding Ltd.	3,60	3,60	3,60
Oversea-Chinese Banking Corporation	4,25	4,25	4,25
Xerox Corporation	3,80	3,80	3,80
Province of Ontario	4,40	4,40	4,40
Citigroup Inc.			
Citigroup Inc.	3,52	-	-
Citigroup Inc.	2,65	2,65	2,65
Citigroup Inc.	3,75	3,75	3,75
Bank of America			
Bank of America	3,30	3,30	3,30
Bank of America	3,00	3,00	3,00
Bank of America	3,50	3,50	3,50
Wells Fargo & Company			
Wells Fargo & Company	2,60	2,60	2,60
Wells Fargo & Company	3,50	3,50	3,50
The Federal Home Loan Mortgage Corporation	2,38	2,38	2,38
JP Morgan Chase Bank, N.A.			
JP Morgan Chase Bank, N.A.	4,95	4,95	-
JP Morgan Chase Bank, N.A.	3,20	3,20	-
Verizon			
Verizon	3,38	3,38	3,38
Verizon	4,33	4,33	4,33

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014 Seri D	9,75	9,75	9,75
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	9,50	9,50	9,50
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	9,50	9,50	9,50
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri B	9,25	9,25	9,25
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri C	9,60	9,60	9,60
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,20	8,20	8,20
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,70	8,70	8,70
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	7,95	7,95	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri B	7,85	7,85	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri C	8,20	8,20	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri D	8,50	8,50	8,50
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	8,40	8,40	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri C	8,90	8,90	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri B	7,90	-	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	8,25	8,25	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018 Seri B	6,70	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri A	7,00	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri A	8,25	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri B	7,50	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri C	8,40	-	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri B	8,75	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Tahap XIV Tahun 2010	10,25	10,25	10,25
Tahap XV Tahun 2011	9,50	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,90	7,90	7,90
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,88	9,88	9,88
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	10,00	10,00	10,00
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	8,20	8,20	8,20
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	8,75	8,75	8,75
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	8,30	8,30	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	8,50	-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B	9,13	-	9,13
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2016 Seri B	8,20	-	8,20
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	8,60	8,60	8,60
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2017 Seri B	8,40	8,40	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri B	7,80	7,80	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2017 Seri B	7,25	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	6,85	-	-
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2018 Seri B	6,95	-	-
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2018 Seri A	8,25	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri A	7,95	7,95	7,95
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	8,00	8,00	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	8,50	8,50	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018 Seri A	8,50	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	8,00	8,00	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	9,00	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	7,75	7,75	7,75
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,00	8,00	8,00
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	9,50	9,50	9,50
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	7,40	7,40	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri C	7,70	7,70	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	6,90	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri C	7,10	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahap XI Tahun 2010 Seri B	12,55	-	12,55
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	10,40	-	10,40
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri A	8,00	-	8,00
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	-	9,60
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,20	8,20	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri D	8,70	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	7,25	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	8,75	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	8,00	-	8,00
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	-	9,60
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri A	7,70	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri B	7,25	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	-	-
PT Indonesia Power			
Eba Danareksa I Tahun 2017 Kelas A	8,02	8,02	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri B	11,10	-	-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,25	-	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,50	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B	9,00	-	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	8,00	-	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	-	-
PT Mandiri Tunas Finance			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	8,95	8,95	8,95
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	9,25	9,25	9,25
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri A	8,20	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 Seri A	8,50	8,50	8,50
Mata uang asing			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2021	5,50	5,50	5,50
Tahun 2027	4,13	4,13	-
Tahun 2028	5,45	-	-
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2021	5,25	5,25	5,25
Tahun 2022	4,88	4,88	4,88
Tahun 2023	5,25	5,25	5,25

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2023	4,50	-	-
Tahun 2024	4,88	4,88	4,88
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	5,13	5,13	5,13
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	4,25	4,25	4,25
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,15	9,15	9,15
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,75	8,75	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	8,25	8,25	8,25
PT Indosat Tbk			
Tahap VIII Tahun 2012 Seri B	8,88	8,88	8,88
Sukuk *Ijarah* Indosat V Tahun 2012	8,63	8,63	8,63
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	10,50	10,50	10,50
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	11,20	11,20	11,20
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	8,25	8,25
PT Indonesia Infrastructure Finance			
Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,70	8,70	8,70
PT Bank UOB Indonesia			
Tahap I Tahun 2015 Seri C	9,60	9,60	9,60
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,00	8,00	8,00
PT Toyota Astra Financial Services			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,40	8,40	8,40
PT Global Mediacom Tbk			
Tahun 2017 Seri A	11,50	-	-
Berkelanjutan Tahap II Tahun 2017	9,95	-	-
PT BPD Jawa Tengah			
Tahun 2017	8,05	-	-
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,50	8,50	8,50
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	7,50	7,50	-
Tahap I Tahun 2014 Seri B	9,95	9,95	9,95

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Tahap XIV Tahun 2010	10,25	10,25	10,25
Tahap XV Tahun 2011	9,50	9,50	9,50
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	7,90	7,90	7,90
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,90	7,90	7,90
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,88	9,88	9,88
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	10,00	10,00	10,00
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	8,20	8,20	8,20
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	8,75	8,75	8,75
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2014 Seri C	9,75	9,75	9,75
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	9,50	9,50	9,50
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	9,50	9,50	9,50
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018 Seri C	6,90	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri A	8,25	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	8,75	-	-
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	9,00	9,00	9,00
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	7,75	7,75	7,75
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014 Seri C	9,75	9,75	9,75
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	9,50	9,50	9,50
Obligasi XIII Tahun 2009 Seri C	12,88	12,88	12,88
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,93	9,93	9,93
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri D	11,00	11,00	11,00
Obligasi II Tahun 2010 Seri B	10,00	10,20	10,20
PT Angkasa Pura I (Persero)			
Sukuk *Ijarah* Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	8,10	8,10	8,10
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Tahun 2017	7,50	-	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri T	9,85	-	-
Tahap XIV Tahun 2010 Seri JM-10	9,35	-	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahun 2011 Seri B	9,05	9,05	9,05
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25	8,25	8,25
Tahap VIII Tahun 2006 Seri B	13,75	13,75	13,75
Tahap IX Tahun 2007 Seri B	10,90	10,90	10,90
Tahap XI Tahun 2010 Seri B	12,55	12,55	12,55
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	10,40	10,40	10,40
Sukuk *Ijarah* Tahap IV	12,55	12,55	12,55
Sukuk *Ijarah* Tahap V Tahun 2010 Seri B	10,40	10,40	10,40
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	8,00	8,00	8,00
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	9,60	9,60
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	8,50	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri A	6,50	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat suku bunga per Tahun (%)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Mata uang asing			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2020	7,75	7,75	7,75
Tahun 2021	5,50	5,50	5,50
Tahun 2029	5,38	-	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	5,13	5,13	5,13
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	4,25	4,25	4,25
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2023	4,30	4,30	4,30
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2024	4,88	4,88	4,88

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Indosat Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	12 Desember 2019	12 Desember 2019	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	3 Mei 2028	-	-
PT Medco Energi International Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	15 Juli 2021	15 Juli 2021	15 Juli 2021
PT XL Axiata Tbk			
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	26 Oktober 2019	-	-
PT Summarecon Agung Tbk			
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	27 September 2021	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	20 Februari 2021	-	-
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	3 Oktober 2020	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri A	15 Agustus 2020	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Sukuk *Ijarah* V Tahun 2010 Seri B	8 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	5 Juli 2020	5 Juli 2020	5 Juli 2020
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	3 November 2032	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B	30 Juni 2020	30 Juni 2020	30 Juni 2020
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2015 Seri C	25 Agustus 2020	25 Agustus 2020	25 Agustus 2020
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B	26 Juli 2019	26 Juli 2019	26 Juli 2019
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri B	22 Maret 2020	22 Maret 2020	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	22 Maret 2022	22 Maret 2022	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri B	14 Juli 2020	14 Juli 2020	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri C	14 Juli 2022	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri B	12 Desember 2020	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri C	12 Desember 2022	12 Desember 2022	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri D	21 Maret 2023	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri C	16 Agustus 2021	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri D	16 Agustus 2022	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	11 Mei 2019	11 Mei 2019	11 Mei 2019
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020	-
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri A	20 April 2019	-	-
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri B	10 April 2021	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	28 Juni 2021	28 Juni 2021	28 Juni 2021
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	27 Oktober 2021	27 Oktober 2021	27 Oktober 2021
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018	27 Februari 2023	-	-
PT Indosat Tbk			
Tahap VIII Tahun 2012 Seri A	27 Juni 2019	27 Juni 2019	-
Tahap VIII Tahun 2012 Seri B	27 Juni 2022	27 Juni 2022	27 Juni 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	12 Desember 2019	12 Desember 2019	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	8 Desember 2020	-	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	9 November 2027	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	3 Mei 2023	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	3 Mei 2028	-	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	12 Desember 2019	12 Desember 2019	12 Desember 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	12 Desember 2021	12 Desember 2021	12 Desember 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	3 November 2021	3 November 2021	3 November 2021
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri B	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	23 Agustus 2022	23 Agustus 2022	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	2 November 2022	2 November 2022	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	15 November 2021	-	-
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	11 Mei 2019	11 Mei 2019	11 Mei 2019
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	18 Oktober 2019	18 Oktober 2019	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri B	3 Maret 2020	3 Maret 2020	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri C	3 Maret 2022	3 Maret 2022	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	2 November 2020	2 November 2020	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018 Seri B	25 Mei 2021	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak ketiga (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	10 Juni 2019	-	10 Juni 2019
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri A	11 Juli 2022	-	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	15 Maret 2023	-	-
PT BFI Finance Indonesia Tbk			
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri B	9 November 2019	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018 Seri B	26 Juni 2021	-	-
PT Bank UOB Indonesia			
Tahap I Tahun 2015 Seri C	1 April 2020	1 April 2020	1 April 2020
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	25 November 2019	25 November 2019	-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri C	30 Juni 2021	30 Juni 2021	30 Juni 2021
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri A	3 Juni 2019	-	-
PT Maybank Indonesia Finance			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 Seri A	13 April 2019	-	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2016 Seri A	3 November 2019	3 November 2019	-
Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2017 Seri B	15 November 2022	-	-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	17 Mei 2021	-	-
Mata uang asing			
Alibaba Group Holding Ltd.			
Alibaba Group Holding Ltd.	28 November 2024	28 November 2024	28 November 2024
Oversea-Chinese Banking Corporation			
OCBCSP 061924	19 Juni 2024	19 Juni 2024	19 Juni 2024
Xerox Corporation			
Xerox Corporation	15 Mei 2024	15 Mei 2024	15 Mei 2024
Province of Ontario			
Province of Ontario	14 April 2020	14 April 2020	14 April 2020
Citigroup Inc.			
Citigroup Inc.	27 Oktober 2028	-	-
Citigroup Inc.	26 Oktober 2020	26 Oktober 2020	26 Oktober 2020
Citigroup Inc.	16 Juni 2024	16 Juni 2024	16 Juni 2024
Bank of America			
Bank of America	11 Januari 2023	11 Januari 2023	11 Januari 2023
Bank of America	20 Desember 2023	20 Desember 2023	20 Desember 2023
Bank of America	19 April 2026	19 April 2026	19 April 2026
Wells Fargo & Company			
Wells Fargo & Company	22 Juli 2020	22 Juli 2020	22 Juli 2020
Wells Fargo & Company	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022
The Federal Home Loan			
Mortgage Corporation	13 Januari 2022	13 Januari 2022	13 Januari 2022
JP Morgan Chase Bank, N.A.			
JP Morgan Chase Bank, N.A.	25 Maret 2020	25 Maret 2020	-
JP Morgan Chase Bank, N.A.	15 Juni 2026	15 Juni 2026	-
Verizon			
Verizon	15 Februari 2025	15 Februari 2025	15 Februari 2025
Verizon	21 September 2028	21 September 2028	21 September 2028

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014 Seri D	5 Juni 2019	5 Juni 2019	5 Juni 2019
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	13 Maret 2020	13 Maret 2020	13 Maret 2020
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	16 September 2020	16 September 2020	16 September 2020
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri B	19 Februari 2019	19 Februari 2019	19 Februari 2019
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri C	19 Februari 2021	19 Februari 2021	19 Februari 2021
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	8 Juni 2019	8 Juni 2019	8 Juni 2019
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri C	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	25 Agustus 2019	25 Agustus 2019	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri B	22 November 2019	22 November 2019	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri C	22 November 2021	22 November 2021	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri D	22 November 2023	22 November 2023	22 November 2023
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	23 Februari 2020	23 Februari 2020	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri C	23 Februari 2022	23 Februari 2022	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri B	15 Agustus 2022	-	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	15 Agustus 2024	15 Agustus 2024	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018 Seri B	14 Februari 2023	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri A	15 September 2019	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri A	18 November 2019	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri B	5 September 2021	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri C	05 September 2023	-	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri B	8 November 2021	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Tahap XIV Tahun 2010	11 Juni 2020	11 Juni 2020	11 Juni 2020
Tahap XV Tahun 2011	28 Juni 2021	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2023	27 Maret 2023	27 Maret 2023
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	8 Juli 2020	8 Juli 2020	8 Juli 2020
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	8 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	30 Agustus 2021	30 Agustus 2021	30 Agustus 2021
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	13 Juli 2020	13 Juli 2020	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	13 Juli 2022	13 Juli 2022	-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B	11 Maret 2019	-	11 Maret 2019
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2016 Seri B	17 Juni 2019	-	17 Juni 2019
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	27 September 2021	27 September 2021	27 September 2021
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2017 Seri B	2 Maret 2020	2 Maret 2020	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri B	20 Juni 2020	20 Juni 2020	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2017 Seri B	13 Oktober 2020	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	20 Februari 2021	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri C	20 Februari 2023	-	-
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2018 Seri A	29 Oktober 2019	-	-
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2018 Seri B	18 Mei 2021	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri A	30 September 2021	30 September 2021	30 September 2021
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	15 Juni 2022	15 Juni 2022	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	15 Juni 2024	15 Juni 2024	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018 Seri A	21 September 2023	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	11 Juli 2022	11 Juli 2022	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	11 Oktober 2021	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	14 Februari 2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 Seri D	9 Juli 2020	9 Juli 2020	9 Juli 2020
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	7 Mei 2020	7 Mei 2020	7 Mei 2020
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	3 Oktober 2020	3 Oktober 2020	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri C	3 Oktober 2022	3 Oktober 2022	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	16 Maret 2021	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri C	16 Maret 2023	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahap XI Tahun 2010 Seri B	12 Januari 2020	-	12 Januari 2020
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	8 Juli 2022	-	8 Juli 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri A	5 Juli 2020	-	5 Juli 2020
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	5 Juli 2023	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	10 Desember 2023	-	10 Desember 2023
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	3 November 2027	3 November 2027	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri D	3 November 2032	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	22 Februari 2028	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	22 Februari 2038	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	10 Oktober 2025	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	5 Juli 2020	-	5 Juli 2020
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	10 Desember 2023	-	10 Desember 2023
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri A	11 Juli 2022	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri B	22 Februari 2028	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	10 Oktober 2025	-	-
PT Indonesia Power			
Eba Danareksa I Tahun 2017 Kelas A	19 September 2022	19 September 2022	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri B	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	10 Juni 2019	10 Juni 2019	10 Juni 2019
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	28 September 2021	28 September 2021	28 September 2021
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 seri B	21 Februari 2022	-	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 seri A	6 Oktober 2020	-	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	6 Oktober 2022	-	-
PT Mandiri Tunas Finance			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	1 Juni 2021	1 Juni 2021	1 Juni 2021
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri A	7 Oktober 2019	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 Seri A	6 Juni 2020	6 Juni 2020	6 Juni 2020
Dolar Amerika Serikat			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2021	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021
Tahun 2027	15 Mei 2027	15 Mei 2027	-
Tahun 2028	21 Mei 2028	-	-
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2021	23 Mei 2021	23 Mei 2021	23 Mei 2021
Tahun 2022	3 Mei 2022	3 Mei 2022	3 Mei 2022
Tahun 2023	20 Mei 2023	20 Mei 2023	20 Mei 2023

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Dolar Amerika Serikat			
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2023	2 Mei 2023	-	-
Tahun 2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	16 Mei 2024	16 Mei 2024	16 Mei 2024
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	5 Mei 2025	5 Mei 2025	5 Mei 2025
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	28 Juni 2021	28 Juni 2021	28 Juni 2021
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	27 Oktober 2021	27 Oktober 2021	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	10 Juni 2019	10 Juni 2019	10 Juni 2019
PT Indosat Tbk			
Tahap VIII Tahun 2012 Seri B	27 Juni 2022	27 Juni 2022	27 Juni 2022
Sukuk *Ijarah* Indosat V Tahun 2012	27 Juni 2019	27 Juni 2019	27 Juni 2019
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	12 Desember 2021	12 Desember 2021	12 Desember 2021
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	11 Mei 2019	11 Mei 2019	11 Mei 2019
PT Indonesia Infrastructure Finance			
Tahap I Tahun 2016 Seri B	19 Juli 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021
PT Bank UOB Indonesia			
Tahap I Tahun 2015 Seri C	1 April 2020	1 April 2020	1 April 2020
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	25 November 2019	25 November 2019	25 November 2019
PT Toyota Astra Financial Services			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019
PT Global Mediacom Tbk			
Tahun 2017 Seri A	7 Juli 2022	-	-
Berkelanjutan Tahap II Tahun 2017	19 September 2020	-	-
PT BPD Jawa Tengah			
Tahun 2017	12 Desember 2020	-	-
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	11 Mei 2019	11 Mei 2019	11 Mei 2019
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	9 November 2020	9 November 2020	-
Tahap I Tahun 2014 Seri B	8 Juli 2019	8 Juli 2019	8 Juli 2019

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Tahap XIV Tahun 2010	11 Juni 2020	11 Juni 2020	11 Juni 2020
Tahap XV Tahun 2011	28 Juni 2021	28 Juni 2021	28 Juni 2021
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	5 Juni 2022	5 Juni 2022	5 Juni 2022
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2023	27 Maret 2023	27 Maret 2023
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	8 Juli 2020	8 Juli 2020	8 Juli 2020
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	8 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	30 Agustus 2021	30 Agustus 2021	30 Agustus 2021
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2014 Seri C	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	16 September 2020	16 September 2020	16 September 2020
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	13 Maret 2020	13 Maret 2020	13 Maret 2020
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018 Seri C	14 Februari 2025	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri A	18 November 2019	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	8 November 2021	-	-
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	14 Februari 2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014 Seri C	11 Juli 2019	11 Juli 2019	11 Juli 2019
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	7 Mei 2020	7 Mei 2020	7 Mei 2020
Obligasi XII Tahun 2009 Seri C	1 Juli 2019	1 Juli 2019	1 Juli 2019
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri A	23 Juni 2022	23 Juni 2022	23 Juni 2022
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri D	23 Juni 2045	23 Juni 2045	23 Juni 2045
Obligasi II Tahun 2010 Seri B	6 Juli 2020	6 Juli 2020	6 Juli 2020
PT Angkasa Pura I (Persero)			
Sukuk *Ijarah* Angkasa Pura I Tahun 2016 Tahun 2016 Seri A	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahun 2017	16 Juni 2019	-	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri T	19 September 2019	-	-
Tahap XIV Tahun 2010 Seri JM-10	12 Oktober 2020	-	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahun 2011 Seri B	14 Desember 2021	14 Desember 2021	14 Desember 2021
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	5 Juli 2023	5 Juli 2023	5 Juli 2023
Tahap VIII Tahun 2006 Seri B	21 Juni 2021	21 Juni 2021	21 Juni 2021
Tahap IX Tahun 2007 Seri B	10 Juli 2022	10 Juli 2022	10 Juli 2022
Tahap XI Tahun 2010 Seri B	12 Januari 2020	12 Januari 2020	12 Januari 2020
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	8 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
Sukuk *Ijarah* Tahap IV	12 Januari 2020	12 Januari 2020	12 Januari 2020
Sukuk *Ijarah* Tahap V Tahun 2010 Seri B	8 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	5 Juli 2020	5 Juli 2020	5 Juli 2020
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	10 Desember 2023	10 Desember 2023	10 Desember 2023
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri B	11 Juli 2027	11 Juli 2027	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri A	23 Februari 2023	-	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	10 Oktober 2025	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tanggal Jatuh Tempo		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Mata uang asing			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2020	20 Januari 2020	20 Januari 2020	20 Januari 2020
Tahun 2021	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021
Tahun 2029	25 Januari 2029	-	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	16 Mei 2024	16 Mei 2024	16 Mei 2024
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	5 Mei 2025	5 Mei 2025	5 Mei 2025
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2023	20 Mei 2023	20 Mei 2023	20 Mei 2023
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Indosat Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	idAAA	-	-
PT Medco Energi Internasional Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	idA+	idA+	idAA-
PT XL Axiata Tbk			
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	AAA(idn)	-	-
PT Summarecon Agung Tbk			
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014	idA(sy)	idA+(sy)	idA+(sy)
Pihak berelasi (catatan 44)			
Rupiah			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	idAAA	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri A	idAAA	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Sukuk *Ijarah* V Tahun 2010 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 seri C	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2015 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri C	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri D	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri C	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri D	idAAA	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	idAA	idAA	idAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	idA+	idAA	idAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018	idAA	-	-
PT Indosat Tbk			
Tahap VIII Tahun 2012 Seri A	idAAA	idAAA	-
Tahap VIII Tahun 2012 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	idAAA	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	idAAA	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	idAAA	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A	idAAA	idAAA	idAAA
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	-	-
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	AAA(***)
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak ketiga (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	idAAA	-	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri A	idAAA	-	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	idAAA	-	-
PT BFI Finance Indonesia Tbk			
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018 Seri B	idA-	-	-
PT Bank UOB Indonesia			
Tahap I Tahun 2015 Seri C	idAA	AAA(***)	AAA(***)
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	idAA+	AAA(***)	-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	AAA(***)	AAA(***)
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
PT Maybank Indonesia Finance			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 Seri A	idAAA	-	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2016 Seri A	idAAA	idAA+(*)	-
Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2017 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
Mata uang asing			
Alibaba Group Holding Ltd.			
Alibaba Group Holding Ltd.	A1(**)	A1(**)	A1(**)
Oversea-Chinese Banking Corporation			
OCBCSP 061924	-	Aaa(***)	AA-(***)
Xerox Corporation			
Xerox Corporation	Ba1(**)	Baa3(**)	Baa2(**)
Province of Ontario			
Province of Ontario	Aa3	Aa2(**)	Aa2(**)
Citigroup Inc.			
Citigroup Inc.	Baa1(**)	-	-
Citigroup Inc.	Baa1(**)	Baa1(**)	Baa1(**)
Citigroup Inc.	Baa1(**)	Baa1(**)	Baa1(**)
Bank of America			
Bank of America	A3(**)	-	-
Bank of America	A3(**)	A3(**)	Baaa1(**)
Bank of America	A3(**)	A3(**)	Baaa1(**)
Wells Fargo & Company			
Wells Fargo & Company	A2(**)	A2(**)	A2(**)
Wells Fargo & Company	A2(**)	A2(**)	A2(**)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak ketiga (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
The Federal Home Loan			
Mortgage Corporation	AAA***)	AAA***)	Aaa****)
JP Morgan Chase Bank, N.A.			
JP Morgan Chase Bank, N.A.	A2**)	A3**)	-
JP Morgan Chase Bank, N.A.	A2**)	A3**)	-
Verizon			
Verizon	Baa1	Baa1	Baa1
Verizon	Baa1	Baa1	Baa1
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014 Seri D	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri D	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri C	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Tahap XIV Tahun 2010	idAA+	idAA+	idAA+
Tahap XV Tahun 2011	idAA+	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	idAA+	idAA+	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	idAA+	idAA+	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B	idAAA	-	idAA+
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2016 Seri B	idAAA	-	idAA+
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	idAAA	idAAA	idAA+
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2017 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri A	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	idAAA	idAAA	-
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	idAAA	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	idAAA	idAAA	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAAA	idAAA	idAA+
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	idAAA	idAAA	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	-	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri C	idAAA	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahap XI Tahun 2010 Seri B	-	-	idAAA
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	idAAA	-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri A	idAAA	-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	idAAA	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	idAAA	-	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	idAAA	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri D	idAAA	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	idAAA	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	idAAA	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	idAAA(sy)	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	idAAA(sy)	-	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri A	idAAA(sy)	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	-	-
PT Indonesia Power			
Eba Danareksa I Tahun 2017 Kelas A	idAAA	idAAA(sf)	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri B	idA-	-	-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	idA-	-	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	idA-	-	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B	idA-	-	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	idA-	-	-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	idA-	-	-
PT Mandiri Tunas Finance			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	idAA+	AA	idAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	idAAA	AA+	idAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri A	idAAA	-	-
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 Seri A	idA	AA+	-
Mata uang asing			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2021	BBB(***)	Baa3(**)	BBB-(***)
Tahun 2027	BBB(***)	Baa3(**)	-
Tahun 2028	BBB(***)	-	-
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2021	Baa2(*)	Baa3(**)	Baa3(**)
Tahun 2022	BBB-(***)	Baa3(**)	Baa3(**)
Tahun 2023	BBB(***)	Baa3(**)	Baa3(**)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2023	BBB(***)	-	-
Tahun 2024	BBB(***)	Baa3(**)	BB+(****)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	Baa2	Baa3(**)	Baa3(**)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	BBB(***)	Baa3(**)	B1(**)
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	A+	AA	idAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	A+	AA	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	idAAA	idAAA(sy)	idAAA
PT Indosat Tbk			
Tahap VIII Tahun 2012 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Sukuk *Ijarah* Indosat V Tahun 2012	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)	AAA(idn)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Pihak ketiga (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
PT Indonesia Infrastructure Finance			
Tahap I Tahun 2016 Seri B	idAAA	idAAA	AAA(idn)
PT Bank UOB Indonesia			
Tahap I Tahun 2015 Seri C	AA**)	AAA***)	AAA***)
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	AA+**)	AAA***)	AAA***)
PT Toyota Astra Financial Services			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	AAA***)	AAA***)	AAA***)
PT Global Mediacom Tbk			
Tahun 2017 Seri A	A+**)	-	-
Tahap II Tahun 2017	idA+	-	-
PT BPD Jawa Tengah			
Tahun 2017	idAA-(sy)	-	-
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	AAA***)	AAA***)	AAA***)
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	AAA***)	AAA***)	-
Tahap I Tahun 2014 Seri B	AA***)	AAA***)	AAA***)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Tahap XIV Tahun 2010	idAA+	idAA+	idAA+
Tahap XV Tahun 2011	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	idAA+	idAA+	idAA+
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2014 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri A	idAAA	-	-
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B	idAAA	-	-
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	idAAA	idAAA	idAA+
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	idAAA	idAAA	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014 Seri C	idAAA	idAAA	idAA+
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	idAAA	idAAA	idAA+
Obligasi XIII Tahun 2009 Seri C	idAAA	idAAA	idAA+

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peringkat (*)		
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri A	idAAA	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	idAAA	idAAA
Obligasi II Tahun 2010 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
PT Angkasa Pura I (Persero)			
Sukuk *Ijarah* Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Tahun 2017	idAAA	-	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Tahap XIV Seri JM-10 Tahun 2010	idAA	-	-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri T	idAA	-	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri T	AA	-	-
Tahap XIV Tahun 2010 Seri JM-10	AA	-	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahun 2011 Seri B	idA-	idBBB+	idBBB+
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Tahap VIII Tahun 2006 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Tahap IX Tahun 2007 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Tahap XI Tahun 2010 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	idAAA	idAAA	idAAA
Sukuk *Ijarah* Tahap IV	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Tahap V Tahun 2010 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri B	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri A	idAAA(sy)	-	-
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	-	-
Mata uang asing			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2020	BBB-	Baa3(**)	Baa3(**)
Tahun 2021	BBB-	Baa3(**)	Baa3(**)
Tahun 2029	BBB-	-	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	BBB-	Baa3(**)	Baa3(**)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	BBB	Baa3(**)	Baa3(**)
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2023	BBB	Baa3(**)	Baa3(**)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2024	BBB	Baa3(**)	Baa3(**)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings
****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Nilai wajar melalui laba rugi			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Schroder Investment Management Indonesia	1.111.354	678.836	135.961
PT Insight Investments Management	32.035	10.316	-
PT Trimegah Asset Management	29.732	32.761	29.558
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	16.776	17.130	14.772
PT Sinarmas Asset Management	16.359	17.708	56.402
PT BNP Paribas Investment Partners	15.651	16.305	12.042
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	3.864	5.406	5.227
PT Mega Capital Investama	2.885	-	-
PT Maybank Asset Management	-	17.356	16.651
PT Ciptadana Asset Management	-	16.387	-
PT Kresna Asset Management	-	-	2.989
	1.228.656	812.205	273.602
Dolar Amerika Serikat			
PT Schroder Investment Management Indonesia	7.745	7.366	-
	1.236.401	819.571	273.602
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT Danareksa Investment Management	8.957	15.356	14.255
PT PNM Investment Management	3.225	3.452	3.287
PT Mandiri Manajemen Investasi	1.261	1.253	1.194
PT Bahana TCW Investment Management	1.256	1.203	1.050
	14.699	21.264	19.786
Dolar Amerika Serikat			
PT Danareksa Investment Management	-	2.100	1.984
	14.699	23.364	21.770
	1.251.100	842.935	295.372
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Trimegah Asset Management	456.620	24.748	48.643
PT Insight Investments Management	313.898	306.601	108.164
PT EMCO Asset Management	262.470	-	-
PT Samuel Aset Manajemen	192.217	33.861	-
PT Syailendra Capital	68.545	-	-
PT Ashmore Asset Management Indonesia	64.139	33.614	-
PT Mega Capital Investama	57.997	60.862	40.099
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	51.322	58.032	7.134
PT Panin Asset Management	46.866	49.614	4.227
PT Henan Putihrai Asset Management	42.039	29.362	-
PT Maybank Asset Management	40.413	113.613	61.425
PT Sinarmas Asset Management	24.186	145.908	103.965
PT RHB Asset Management Indonesia	13.094	115.364	4.902
PT Mega Asset Management	9.798	-	-
PT Majoris Asset Management	9.745	-	-
PT CIMB Principal Asset Management	7.293	7.788	8.040
PT BNP Paribas Investment Partners	5.253	18.341	15.790
PT Pratama Capital Assets Management	1.999	2.117	1.843

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana (lanjutan)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Pihak ketiga (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Schroder Investment Management Indonesia	1.308	1.341	98.189
PT Mega Capital Sekuritas	-	-	-
PT Syailendra Asset Management	-	81.838	48.542
PT Ciptadana Asset Management	-	3.020	-
PT Indo Premier Sekuritas	-	566	-
PT MNC Asset Management	-	-	1.054
PT Indo Premier Investment Management	-	-	464
	1.669.202	1.086.590	552.481
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
PT BNI Asset Management	75.337	75.291	50.105
PT Mandiri Manajemen Investasi	60.412	60.710	50.017
PT Danareksa Investment Management	10.147	276.548	268.100
PT Bahana TCW Investment Management	5.473	5.729	5.081
	151.369	418.278	373.303
	1.820.571	1.504.868	925.784
Total	**3.071.671**	**2.347.803**	**1.221.156**

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)

Penerbit	**Nilai Nominal**	**Tingkat Bunga Per Tahun (%)**	**Tanggal Jatuh Tempo**	**Nilai Tercatat**		
				31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Tersedia untuk dijual						
Pihak ketiga						
Rupiah						
PT Bank Commonwealth						
Tahap I Tahun 2018 Seri B	150.000	6,23	19 April 2019	147.021	-	-
Tahap II Tahun 2018	50.000	6,76	24 Mei 2019	48.651	-	-
Tahap III Tahun 2018	200.000	8,30	22 Okt 2019	189.210	-	-
Tahap I 2017	70.000	6,55	31 Ags 2018	-	67.114	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.						
Tahap I Tahun 2018 Seri B	100.000	6,07	14 Mei 2019	97.483	-	-
Tahap II Tahun 2018 Seri C	100.000	8,00	22 Mei 2019	97.334	-	-
Tahap I Tahun 2017 Seri A	35.000	7,10	23 Feb 2018	-	39.659	-
Tahap I Tahun 2017 Seri B	40.000	7,20	29 Mei 2018	-	38.979	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia						
Tahap II Tahun 2018 Seri A	150.000	8,30	23 April 2019	146.809	-	-
Tahap I Tahun 2017 Seri A	50.000	5,85	11 April 2018	-	49.184	-
Tahap I Tahun 2017 Seri B	50.000	6,00	11 Juli 2018	-	48.399	-
Tahap I Tahun 2017 Seri C	50.000	6,15	11 Okt 2018	-	47.559	-
PT BPD Jawa Tengah						
Tahun 2018 Seri A	100.000	8,50	21 Mei 2019	97.353	-	-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk						
Tahap III Tahun 2018 Seri A	50.000	6,30	5 April 2019	49.137	-	-
Tahap I Tahun 2017 Seri A	20.000	7,50	21 Maret 2018	-	19.776	-
Tahap I Tahun 2017 Seri B	20.000	7,60	21 Juni 2018	-	19.430	-
Tahap II Tahun 2017 Seri A	100.000	6,85	2 Okt 2018	-	95.287	-
PT Bank Mizuho Indonesia						
Tahap IV Tahun 2018	50.000	6,50	17 Mei 2019	48.828	-	-
Tahap III Tahun 2017	50.000	5,95	17 Mei 2018	-	48.950	-
PT Bank KEB Hana Indonesia						
Tahun 2018	50.000	7,88	25 Sep 2019	47.537	-	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.4.*Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) (lanjutan)

Penerbit	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat 31 Desember 2018	Nilai Tercatat 31 Desember 2017	Nilai Tercatat 31 Desember 2016
Tersedia untuk dijual (lanjutan)						
Pihak ketiga (lanjutan)						
Rupiah (lanjutan)						
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk						
Tahap I Tahun 2018	40.000	7,88	3 Okt 2019	37.974	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur						
Tahap I 2017 Seri A	20.000	7,50	13 Nov 2018	-	18.899	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk						
Tahap III 2017 Seri C	50.000	5,95	19 Mei 2018	-	48.798	-
PT Bank KEB Hana Indonesia						
Tahap III 2017 Seri B	50.000	6,31	27 Maret 2018	-	49.394	-
Tahap III 2017 Seri C	50.000	6,52	26 Sep 2018	-	47.953	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk						
Tahap IV 2017	50.000	6,15	12 Des 2018	-	46.973	-
				1.007.337	686.354	-
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk						
Tahap I Tahun 2018 Seri B	100.000	6,20	2 April 2019	98.324	-	-
Tahap II Tahun 2018 Seri A	105.000	7,60	15 Jan 2019	104.713	-	-
Tahap III Tahun 2018 Seri A	300.000	8,30	7 Mei 2019	293.083	-	-
Tahap I 2017 Seri B	50.000	7,43	16 Feb 2018	-	49.629	-
Tahap IV 2017 Seri B	30.000	6,20	13 Des 2018	-	28.178	-
				496.120	77.807	-
Dimiliki hingga jatuh tempo						
Pihak ketiga						
Rupiah						
PT BPD Jawa Tengah						
Tahun 2018 Seri A	10.000	8,50	21 Mei 2019	9.678	-	-
PT Bank Mizuho Indonesia						
Tahap III 2017	60.000	7,50	17 Mei 2018	-	58.347	-
Tahap II 2016	50.000	7,50	22 Mei 2017	-	-	43.717
PT Bank CIMB Niaga Tbk						
Tahap II 2016 Seri B	50.000	7,60	13 Jan 2017	-	-	49.869
Tahap II 2016 Seri C	50.000	8,25	3 Nov 2021	-	48.621	49.233
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia						
Tahap II 2016 Seri C	100.000	7,76	22 Sep 2017	-	-	94.704
Tahap II 2016 Seri B	100.000	7,66	11 Juli 2017	-	-	96.154
Tahap II 2016 Seri A	50.000	7,50	22 Maret 2017	-	-	49.187
PT Bank Commonwealth						
Tahap III 2016 Seri B	100.000	7,60	14 Juli 2017	-	-	96.132
Tahap III 2016 Seri C	100.000	7,60	13 Okt 2017	-	-	94.358
Tahap III 2016 Seri A	50.000	7,44	13 April 2017	-	-	48.974
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk						
Tahap II 2016 Seri A	10.000	7,30	8 Mei 2017	-	-	9.750
Tahap II 2016 Seri B	30.000	8,25	8 Nov 2017	-	-	28.165
				9.678	106.968	660.243

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.4.*Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) (lanjutan)

Penerbit	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat 31 Desember 2018	Nilai Tercatat 31 Desember 2017	Nilai Tercatat 31 Desember 2016
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)						
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk						
Tahap III Tahun 2018 Seri A	50.000	8,30	7 Mei 2019	48.577	-	-
Tahap III Tahun 2018 Seri B	50.000	8,40	2 Ags 2019	47.621	-	-
Tahap III Tahun 2018 Seri C	50.000	8,50	5 Nov 2019	46.598	-	-
Tahap IV Tahun 2018 Seri B	50.000	8,40	11 Jun 2019	48.179	-	-
Tahap V Tahun 2016	500.000	7,55	3 Jul 2017	-	-	481.000
Tahap II Tahun 2016	100.000	7,50	10 Ags 2017	-	-	95.547
Tahap VI Tahun 2016	50.000	7,75	29 Mar 2017	-	-	49.071
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk						
Tahun 2016 Seri A	60.000	7,55	15 Mar 2018	-	59.095	-
Tahun 2016 Seri E	100.000	8,25	15 Jun 2018	-	96.358	89.573
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
Tahap II Tahun 2016 Seri A	100.000	7,65	21 Des 2017	-	-	93.091
				190.975	155.453	808.282
Total				**1.704.110**	**1.026.582**	**1.468.525**

d.5. Wesel Tagih

Penerbit	Nilai Tercatat 31 Desember 2018	Nilai Tercatat 31 Desember 2017	Nilai Tercatat 31 Desember 2016
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga			
Dolar Amerika Serikat			
Morgan Stanley	-	-	26.945

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat 31 Desember 2018	Peringkat 31 Desember 2017	Peringkat 31 Desember 2016
Dimiliki hingga jatuh tempo					
Pihak ketiga					
Dolar Amerika Serikat					
Morgan Stanley	4,00	31 Agustus 2017	-	-	A-****)

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor.

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. Obligasi Subordinasi

Penerbit	Nilai Tercatat		
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Nilai wajar melalui laba rugi			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank KEB Hana Indonesia			
Tahap I Tahun 2016	30.936	33.115	30.956
PT Bank Central Asia Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	13.676	-	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	7.915	8.433	7.786
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	2.012	2.065	2.014
Seri III Tahun 2010	-	-	3.058
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Seri II Tahun 2010	1.418	1.498	1.454
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
Sukuk *Mudharabah*			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	-	5.252	-
PT Bank Permata Tbk			
Seri II Tahun 2011	-	613	612
	55.957	50.976	45.880
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Permata Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	10.052	5.107	4.961
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012	187.051	151.752	124.008
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013	5.277	5.568	5.425
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	36.833	39.173	42.814
Seri II Tahun 2011	-	57.971	56.421
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	114.331	96.465	91.136
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	39.370	30.248	-
Seri III Tahun 2010	-	-	147.662
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Seri II Tahun 2010	148.369	143.859	118.924
Seri I Tahun 2010	-	-	8.084
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012	67.340	65.242	64.029
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014	31.375	33.032	31.657
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	14.840	10.542	9.733
Tahap I Tahun 2011	-	15.958	15.648
Tahap II Tahun 2012	-	57.907	50.218
PT Bank UOB Indonesia			
Seri I Tahun 2014	40.763	30.772	29.252
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	19.278	20.706	-
PT Bank KEB Hana Indonesia			
Seri I Tahun 2016	8.981	9.613	8.987
PT Bank Bukopin Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	-	10.078	989
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	-	5.348	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
Mudharabah Berkelanjutan I Tahun 2012	-	-	877
Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	-	7.640	1.824
	723.860	796.981	812.649

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

Penerbit	Nilai Tercatat		
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT BPD Jawa Tengah	36.847	-	-
Tahap I Tahun 2015		-	-
PT Bank Permata Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012	20.000	20.000	20.000
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Seri III	-	-	40.000
	56.847	20.000	60.000
Total	**836.664**	**867.957**	**918.529**

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)		
			31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Nilai wajar melalui laba rugi					
Pihak ketiga					
Rupiah					
PT Bank KEB Hana Indonesia					
Tahap I Tahun 2016	9,95	21 Des 2023	AA(idn)	AA(idn)	idAA
PT Bank Central Asia Tbk					
Tahap I Tahun 2016	8,00	5 Jul 2030	idAA	-	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk					
Berkelanjutan II Tahap II					
Tahun 2016	9,63	10 Juni 2023	AA(idn)	idAA	idAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk					
Seri III Tahun 2010	10,50	9 Nov 2017	-	-	idAA-
Berkelanjutan I Tahap I					
Tahun 2012	9,40	20 Des 2019	idAA-	idAA-	idAA-
PT Bank CIMB Niaga Tbk					
Seri II Tahun 2010	10,85	23 Des 2020	AA(idn)	AA(idn)	idAA
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk					
Sukuk *Mudharabah*					
Berkelanjutan I Tahap II					
Tahun 2013	7,61	28 Maret 2023	-	idA-(sy)	-
PT Bank Permata Tbk					
Seri II Tahun 2011	11,00	28 Juni 2018	-	idAA+	idAA+
Tersedia untuk dijual					
Pihak ketiga					
Rupiah					
PT Bank Permata Tbk					
Tahap II Tahun 2012	9,40	19 Des 2019	idAA+	idAA+	idAA+
Seri II Tahun 2011	11,00	28 Juni 2018	-	idAA+	idAA+
Berkelanjutan I Tahap I					
Tahun 2012	8,90	15 Juni 2019	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I					
Tahun 2013	12,00	24 Des 2020	idAA+	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II					
Tahun 2014	11,75	24 Okt 2021	idAA	idAA	idAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk					
Seri III Tahun 2010	10,50	9 Nov 2017	-	-	idAA-
Tahap I Tahun 2012	9,40	20 Des 2019	idAA-	idAA-	idAA-
Tahap II Tahun 2017	10,25	17 Maret 2024	idA+	idA+	-

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*) 31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tersedia untuk Dijual (lanjutan)					
Pihak ketiga (lanjutan)					
Rupiah (lanjutan)					
PT Bank CIMB Niaga Tbk					
Seri II Tahun 2010	10,85	23 Des 2020	AA(idn)	AA(idn)	idAA
Seri I Tahun 2010	11,30	8 Juli 2017	-	-	idAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk					
Tahap I Tahun 2011	10,00	6 Des 2018	-	idAA+	idAA+
Tahap II Tahun 2012	9,25	31 Okt 2019	AA(idn)	idAA+	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012	9,25	6 Des 2018	-	idAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	11,35	8 Juli 2021	AA(idn)	idAA	idAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	9,63	10 Juni 2023	AA(idn)	idAA	AA(idn)
PT Bank UOB Indonesia					
Seri I Tahun 2014	11,35	28 Mei 2021	AA(idn)	AA(idn)	idAA
Tahap II Tahun 2017	9,25	17 Okt 2024	AA(idn)	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank KEB Hana Indonesia					
Tahap I Tahun 2016	9,95	21 Des 2023	AA(idn)	AA(idn)	idAA
PT Bank Bukopin Tbk					
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	9,25	6 Maret 2019	-	idA	idA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	11,00	28 Feb 2024	-	idA-	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk					
Mudharabah Berkelanjutan I Tahun 2012	11,17	29 Juni 2022	-	-	idA-(sy)
Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	9,60	28 Maret 2023	-	idA-(sy)	idA-(sy)
Dimiliki hingga jatuh tempo					
Pihak ketiga					
Rupiah					
PT BPD Jawa Tengah					
Tahap I Tahun 2015	12,25	18 Des 2022	idA	-	-
PT Bank Permata Tbk					
Tahap II Tahun 2012	9,40	19 Des 2019	idAA+	idAA+	idAA+
PT Bank OCBC NISP Tbk					
Seri III	11,35	30 Juni 2017	-	-	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings.

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.7. *Medium-Term Notes* (MTN)

Penerbit	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat 31 Desember 2018	Nilai Tercatat 31 Desember 2017	Nilai Tercatat 31 Desember 2016
Tersedia untuk dijual						
Pihak ketiga						
Rupiah						
PT Indonesia Infrastructure Finance						
Tahap I Tahun 2018	15.000	8,35	10 Nov 2019	14.163	-	-
PT Bank Bukopin Tbk						
Tahap I Tahun 2016	40.000	10,00*)	4 Sep 2017	-	-	40.000
				14.163	-	40.000
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk						
Tahap I Tahun 2018 Seri A	50.000	7,25	14 Sep 2019	50.450	-	-
Tahap I Tahun 2018 Seri B	50.000	8,00	4 Sep 2020	50.450	-	-
Tahap I Tahun 2018 Seri C	50.000	8,35	4 Sep 2021	50.350	-	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk						
Tahap I Tahun 2018	100.000	10,50*)	28 Des 2021	100.000	-	-
PT Kimia Farma (Persero) Tbk						
Tahap I Tahun 2017	57.000	8,10*)	15 Sep 2020	56.567	57.000	-
Tahap II Tahun 2018	36.000	7,75*)	15 Maret 2021	35.305	-	-
Perum Perumnas						
Tahap III Seri A Tahun 2018	60.000	10,75	10 Des 2021	58.992	-	-
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	150.000	10,00*)	21 Des 2018	-	150.000	155.074
				402.114	207.000	155.074
				416.277	207.000	195.074
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo						
Pihak ketiga						
Rupiah						
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk						
Seri VII Tahun 2018	50.000	10,25	20 April 2021	50.000	-	-
PT Indonesia Infrastructure Finance						
Seri I Tahun 2018	50.000	8,35	10 Nov 2019	50.000	-	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia I Tahun 2015	100.000	9,85	3 Feb 2018	-	100.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk						
Seri I Tahun 2016	25.000	7,00*)	18 April 2016	-	50.000	50.000
				100.000	150.000	150.000
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk						
Seri II Tahun 2014	100.000	9,80*)	24 Des 2017	-	-	99.710
				-	-	99.710
				100.000	150.000	249.710
Total				**516.277**	**357.000**	**444.784**

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali.

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

e) BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai efek-efek secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah memadai.

f) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Rupiah	7,57%	8,04%	8,65%
Dolar Amerika Serikat	4,91	4,98	5,08
Euro Eropa	2,77	2,77	2,87
Dolar Singapura	2,03	2,13	2,12

g) BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laba Rugi" sebesar Rp338.097, Rp55.555 dan Rp34.602 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek sebesar Rp534.952, Rp784.501 dan Rp450.895 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah-neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i) Efek-efek sejumlah nominal Rp37.950.853, Rp13.064.976 dan Rp7.935.345 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 24).

8. TAGIHAN WESEL EKSPOR DAN WESEL TAGIH

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga						
Rupiah						
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		6.972.662		3.435.946		6.112.978
Wesel Ekspor		4.009.507		1.534.057		649.730
Wesel Tagih		2.795.744		2.283.330		1.094.511
		13.777.913		7.253.333		7.857.219

8. TAGIHAN WESEL EKSPOR DAN WESEL TAGIH (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)						
Mata uang asing						
Wesel Ekspor						
Dolar Amerika Serikat	219.507.845	3.156.523	41.649.765	565.083	47.917.829	645.573
Yen Jepang	17.993.921	2.350	32.343.467	3.898	513.619.647	59.100
Renminbi	297.628	622	31.642.266	65.932	823.503.667	1.596.930
Euro Eropa	36.627	602	499.255	8.106	2.540.997	36.021
Pound Sterling Inggris		-		-	267.500	4.428
		3.160.097		643.019		2.342.052
Wesel Tagih						
Dolar Amerika Serikat	214.185.325	3.079.985	97.280.457	1.319.853	43.465.143	585.584
Renminbi	258.459.000	540.327	229.784.941	478.789	57.778.825	112.044
Yen Jepang	165.385.979	21.603	167.901.713	20.235	4.061.239	467
Euro Eropa	249.964	4.110	1.853.896	30.100	2.214.128	31.387
Pound Sterling Inggris		-	851.548	15.605	916.017	15.165
		3.646.025		1.864.582		744.647
		6.806.122		2.507.601		3.086.699
		20.584.035		9.760.934		10.943.918
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Wesel Tagih		4.812.064		881.432		384.908
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		1.360.666		3.150		77.494
Wesel Ekspor		650.624		6.427		-
		6.823.354		891.009		462.402
Mata uang asing						
Wesel Tagih						
Dolar Amerika Serikat	2.390.196	34.371	95.224	1.292	789.521	10.637
Wesel Ekspor						
Dolar Amerika Serikat	64.649	930	82.425	1.118	12.114.895	163.218
		35.301		2.410		173.855
		6.858.655		893.419		636.257
Total		**27.442.690**		**10.654.353**		**11.580.175**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua tagihan wesel ekspor dan wesel tagih diklasifikasikan “Lancar”.

8. TAGIHAN WESEL EKSPOR DAN WESEL TAGIH (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan wesel ekspor dan wesel tagih berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
≤ 1 bulan	3.467.751	1.491.539	2.741.638
> 1 bulan - 3 bulan	8.727.350	3.700.998	3.985.384
> 3 bulan - 1 tahun	8.388.934	4.568.397	4.216.896
	20.584.035	9.760.934	10.943.918
Pihak berelasi (Catatan 44)			
≤ 1 bulan	2.047.761	839.412	273.467
> 1 bulan - 3 bulan	2.246.497	23.349	166.316
> 3 bulan - 1 tahun	2.564.397	30.658	196.474
	6.858.655	893.419	636.257
Total	**27.442.690**	**10.654.353**	**11.580.175**

BRI melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan wesel ekspor dan wesel tagih secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan wesel ekspor dan wesel tagih dapat ditagih.

9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi BRI dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Sehubungan dengan program rekapitalisasi, BRI menerima obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sejumlah nominal Rp29.149.000 yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000, yang seluruhnya merupakan obligasi tingkat bunga tetap (Catatan 1b). Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-84/MK.01/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang “Pelaksanaan Konversi Obligasi Seri FR Menjadi Obligasi Seri VR”, pada tanggal 26 Maret 2002 BRI telah menukarkan sebagian Obligasi Pemerintah tingkat bunga tetap dengan Obligasi Pemerintah tingkat bunga variabel.

9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan Kepemilikan dan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tersedia untuk Dijual			
≤ 1 bulan	30.273	717.840	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo			
≤ 1 tahun	375.000	1.125.000	-
> 1 tahun - 5 tahun	1.100.000	1.475.000	2.600.000
	1.475.000	2.600.000	2.600.000
Total	**1.505.273**	**3.317.840**	**3.318.434**

b) Berdasarkan Klasifikasi dan Jenis:

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat		
			31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tersedia untuk Dijual					
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	30.273	268.785	269.109
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	-	449.055	449.325
			30.273	717.840	718.434
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	1.100.000	1.100.000	1.100.000
VR0029	SPN 3 bulan	25 Agustus 2019	375.000	375.000	375.000
VR0028	SPN 3 bulan	25 Agustus 2018	-	375.000	375.000
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	-	375.000	375.000
VR0026	SPN 3 bulan	25 Januari 2018	-	375.000	375.000
			1.475.000	2.600.000	2.600.000
Total			**1.505.273**	**3.317.840**	**3.318.434**

c) Informasi Signifikan Lainnya:

Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Nilai pasar untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan “Tersedia untuk dijual” berkisar dari 99,87% sampai dengan 99,87%, 99,55% sampai dengan 99,79% dan 99,67% sampai dengan 99,85% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 terdiri dari:

	31 Desember 2018				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0063	6,55	2 November 2018	3 Mei 2019	2.629.134	2.657.357
FR0063	6,35	9 November 2018	8 Februari 2019	1.784.336	1.800.702
FR0064	6,35	12 Oktober 2018	11 Januari 2019	813.616	825.097
FR0063	6,20	24 Agustus 2018	22 Februari 2019	441.274	451.078
FR0063	6,60	28 September 2018	28 Juni 2019	429.611	437.015
FR0064	5,85	27 Juli 2018	25 Januari 2019	255.678	262.201
FR0047	5,80	6 Juli 2018	4 Januari 2019	111.740	114.944
FR0064	6,00	27 Juli 2018	25 Januari 2019	85.226	87.456
FR0064	5,90	27 Juli 2018	25 Januari 2019	85.226	87.419
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah					
Obligasi Pemerintah					
FR0068	7,25	26 Desember 2018	9 Januari 2019	89.906	89.997
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah					
Obligasi Pemerintah					
FR0065	7,25	19 Desember 2018	2 Januari 2019	505.148	506.368
FR0059	7,30	20 Desember 2018	3 Januari 2019	504.225	505.350
FR0070	7,00	27 Desember 2018	10 Januari 2019	319.951	320.200
				8.055.071	8.145.184
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
PT Bank Mandiri Taspen					
Obligasi Pemerintah					
FR0061	7,40	3 Oktober 2018	3 Januari 2019	100.377	102.213
PT Asuransi Jiwasraya					
Obligasi Pemerintah					
FR0059	7,59	10 September 2018	11 Maret 2019	350.586	358.864
FR0074	7,59	14 September 2018	13 Maret 2019	244.307	249.869
FR0061	7,59	12 September 2018	12 Maret 2019	193.242	197.724
FR0065	7,59	14 September 2018	13 Maret 2019	45.385	46.419
FR0068	7,59	14 September 2018	13 Maret 2019	13.048	13.345
FR0063	7,59	19 September 2018	12 Maret 2019	8.053	8.228
FR0044	7,59	19 September 2018	12 Maret 2019	5.750	5.875
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	7,59	24 September 2018	22 Maret 2019	173.119	176.696
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A	7,59	24 September 2018	22 Maret 2019	48.475	49.476
Obligasi Berkelanjutan I Telkom					
Tahap I Tahun 2015 Seri A	7,59	24 September 2018	22 Maret 2019	12.124	12.375
Tahap I Tahun 2015 Seri B	7,59	24 September 2018	22 Maret 2019	6.116	6.243
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial					
Tahap V Tahun 2016 Seri B	7,59	24 September 2018	22 Maret 2019	8.977	9.162
Tahap VII Tahun 2017 Seri B	7,59	24 September 2018	22 Maret 2019	5.951	6.074
Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017	7,59	24 September 2018	22 Maret 2019	8.627	8.806
				1.224.137	1.251.369
Total				**9.279.208**	**9.396.553**

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 terdiri dari (lanjutan):

	31 Desember 2017				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0066	4,77	13 Oktober 2017	12 Januari 2018	97.113	98.130
FR0034	4,45	27 Desember 2017	10 Januari 2018	1.743.116	1.743.978
FR0052	4,60	27 Desember 2017	24 Januari 2018	955.856	956.344
FR0054	4,60	20 Desember 2017	17 Januari 2018	3.019.546	3.023.790
FR0065	4,55	6 Desember 2017	3 Januari 2018	271.414	272.271
FR0068	4,60	6 Desember 2017	3 Januari 2018	1.604.687	1.609.813
FR0068	4,60	13 Desember 2017	10 Januari 2018	2.554.503	2.560.354
FR0070	4,85	8 Desember 2017	9 Maret 2018	320.827	321.821
SPN12180809	4,80	10 November 2017	9 Februari 2018	273.786	275.648
SPN03180118	4,25	27 Desember 2017	3 Januari 2018	2.836.382	2.837.722
SPN12180412	4,45	20 Desember 2017	3 Januari 2018	2.333.619	2.336.792
SPN12180809	4,80	13 Oktober 2017	12 Februari 2018	90.878	91.835
SPN12181004	4,84	10 November 2017	9 Februari 2018	451.835	454.933
PT Bank CIMB Niaga Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0061	5,10	12 Desember 2017	12 Januari 2018	280.249	281.004
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD240818364S	4,95	6 Desember 2017	5 Januari 2018	172.954	173.548
PT Bank CTBC Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
ORI012	5,10	12 Desember 2017	12 Januari 2018	139.182	139.556
PT Bank J Trust Indonesia Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0064	5,30	30 November 2017	28 Februari 2018	42.611	42.805
Sertifikat Deposito Bank Indonesia					
IDSD060418273S	5,30	30 November 2017	28 Februari 2018	132.192	132.795
IDSD040518182S	5,00	13 Desember 2017	3 Januari 2018	88.219	88.440
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah					
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD110518182S	4,70	28 Desember 2017	8 Januari 2018	66.238	66.264
PT Bank Pan Indonesia Tbk					
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD090318182S	5,20	19 Desember 2017	19 Januari 2018	502.312	503.183
Total				**17.977.519**	**18.011.026**

	31 Desember 2016				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0066	5,60	30 Desember 2016	31 Maret 2017	924.996	925.140
PT Bank J Trust Indonesia Tbk					
Sertifikat Deposito Bank Indonesia					
IDSD130117182C	8,50	28 Desember 2016	11 Januari 2017	89.749	89.812
				1.014.745	1.014.952

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 terdiri dari (lanjutan):

	31 Desember 2016				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga (lanjutan)					
Mata uang asing					
PT Bank BNP Paribas Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
RI1023	6,15	19 Desember 2016	26 Januari 2017	58.835	58.955
RI0320	6,15	19 Desember 2016	26 Januari 2017	74.733	74.886
RI0237	6,15	19 Desember 2016	26 Januari 2017	111.868	112.097
RI0319	6,15	19 Desember 2016	26 Januari 2017	66.360	66.497
				311.796	312.435
				1.326.541	1.327.387
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	6,50	17 November 2016	6 Januari 2017	228.170	229.983
Total				**1.554.711**	**1.557.370**

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Transaksi	31 Desember 2018	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang dan suku bunga	25.671	67.944
Swap suku bunga	69.307	91.211
Option mata uang	23.951	20.774
Option saham	16.468	-
Swap mata uang asing	276.071	56.195
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	72.275	94.922
Pembelian dan penjualan *Spot* mata uang asing	2.067	1.297
Total	**485.810**	**332.343**

Transaksi	31 Desember 2017*)	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang dan suku bunga	64.708	115.981
Swap suku bunga	60.475	54.261
Option saham	16.984	-
Option mata uang	10.218	11.341
Swap mata uang asing	2.740	3.334
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	6.883	15.156
Pembelian dan penjualan *Spot* mata uang asing	904	785
Total	**162.912**	**200.858**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut (lanjutan):

Transaksi	31 Desember 2016*)	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang dan suku bunga	32.204	179.286
Swap suku bunga	59.443	53.780
Option saham	12.250	-
Pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing	10	-
Swap mata uang asing	-	112.160
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	-	1.991
Total	**103.907**	**347.217**

a. *Swap* Mata Uang dan Suku Bunga

Pada tanggal 31 Desember 2018, BRI melakukan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga (cross currency interest rate swap) terhadap beberapa *counterparties*, di mana BRI sepakat untuk menukarkan dana masing-masing sebesar ASD20.000.000 (angka penuh), ASD60.000.000 (angka penuh), EUR45.000.000 (angka penuh), EUR50.000.000 (angka penuh), EUR57.000.000 (angka penuh) dan CHF20.000.000 (angka penuh), yang nilainya setara pada tanggal efektif kontrak masing-masing dengan Rp279.500, RMB386.118.000 (angka penuh), Rp748.225, RMB392.725.000 (angka penuh), ASD64.625.500 (angka penuh) dan RMB137.650.000 (angka penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI melakukan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga (cross currency interest rate swap) terhadap beberapa *counterparties*, di mana BRI sepakat untuk menukarkan dana masing-masing sebesar RMB1.062.730.500 (angka penuh), RMB750.000.000 (angka penuh), ASD64.625.500 (angka penuh), ASD100.000.000 (angka penuh), ASD10.000.000 (angka penuh), Rp1.288.440 dan Rp269.400 yang nilainya setara pada tanggal efektif kontrak masing-masing dengan ASD165.000.000 (angka penuh), Rp1.522.990, EUR57.000.000 (angka penuh), Rp1.328.250, RMB68.346.000 (angka penuh), EUR80.000.000 (angka penuh) dan ASD20.000.000 (angka penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2016, BRI melakukan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga (cross currency interest rate swap) terhadap beberapa *counterparties*, di mana BRI sepakat untuk menukarkan dana masing-masing sebesar RMB2.065.304.000 (angka penuh), Rp541.400, ASD53.167.500 (angka penuh) dan ASD159.483.894 (angka penuh) yang nilainya setara pada tanggal efektif kontrak masing-masing dengan ASD315.000.000 (angka penuh), ASD40.000.000 (angka penuh), EUR47.000.000 (angka penuh) dan Rp2.101.181.

Para pihak yang melakukan kontrak pertukaran mata uang berkewajiban membayar bunga sesuai dengan dana yang diterimanya. Apabila dana yang diterima ASD, maka pihak penerima berkewajiban membayar bunga tetap (fixed rate) atau bunga mengambang (floating rate) sebesar LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah dengan marjin tertentu. Sebaliknya penerima dana Rupiah, Renminbi atau Euro berkewajiban membayar *fixed rate*.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

b. *Swap* Suku Bunga

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, BRI melakukan kontrak pertukaran suku bunga (interest rate swap) terhadap beberapa *counterparties*, di mana BRI dan *counterparties* sepakat untuk saling menukarkan bunga dengan suku bunga tetap (fixed rate) atau bunga mengambang (floating rate) dengan total nilai kontrak masing-masing sebesar ASD474.901.309 (angka penuh), ASD418.651.309 (angka penuh), dan ASD373.125.000 (angka penuh).

c. *Option* Saham

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Danareksa Sekuritas (entitas anak) memiliki opsi untuk menjual sejumlah saham perusahaan publik pada harga tertentu yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Nilai wajar opsi tersebut pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.468, Rp16.984 dan Rp12.250.

d. *Option* Mata Uang

Pada tanggal 31 Desember 2018, BRI memiliki kontrak pembelian *call spread option* dengan nilai nosional sebesar ASD187.358.879 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp2.823.836 serta kontrak penjualan *call spread option* dengan nilai nosional sebesar ASD187.358.879 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp2.785.165.

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki kontrak pembelian *call spread option* dengan nilai nosional sebesar ASD64.710.461 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp548.082 serta kontrak penjualan *option* termasuk *call spread option* dengan nilai nosional sebesar ASD149.710.461 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp2.067.752.

e. Pembelian dan Penjualan *Spot* dan *Forward* Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2018, BRI memiliki kontrak pembelian *spot* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD17.322.157 (angka penuh), ASD1.000.000 (angka penuh), EUR12.500.000 (angka penuh), dan GBP4.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp249.838, JPY111.040.000 (angka penuh), ASD14.275.000 (angka penuh), dan ASD5.080.000 (angka penuh), serta kontrak penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional ASD20.000.000 (angka penuh), ASD1.000.000 (angka penuh), EUR10.500.000 (angka penuh), dan GBP4.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp289.094, JPY110.860.000 (angka penuh), ASD12.015.000 (angka penuh) dan ASD5.080.000 (angka penuh). Selain itu, BRI memiliki kontrak pembelian *forward* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD284.390.596 (angka penuh) dan EUR12.561.688 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.203.384 dan ASD14.568.260 (angka penuh), serta kontrak penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional ASD253.890.615 (angka penuh) dan EUR12.506.492 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp3.747.010 dan Rp216.839.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

e. Pembelian dan Penjualan *Spot* dan *Forward* Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki kontrak pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD62.000.000 (angka penuh) dan EUR5.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp840.389 dan Rp81.073 serta kontrak penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional ASD45.500.000 (angka penuh) dan EUR5.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp616.803 dan Rp80.918. Selain itu, BRI memiliki kontrak pembelian *forward* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD95.427.140 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.299.745 serta kontrak penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional ASD392.015.599 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp5.338.694.

Pada tanggal 31 Desember 2016, BRI memiliki kontrak pembelian dan penjualan spot mata uang asing dengan nilai nosional masing-masing sebesar ASD105.000.000 (angka penuh) dan ASD121.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp1.414.887 dan Rp1.630.457. Selain itu, BRI memiliki kontrak pembelian *forward* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD117.700.000 (angka penuh) dan EUR60.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp1.588.919 dan Rp845.491 serta kontrak penjualan *forward* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD381.682.492 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp5.124.359.

f. *Swap* Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2018, BRI memiliki kontrak pembelian *swap* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD782.858.750 (angka penuh), ASD8.034.182 (angka penuh), ASD20.138.961 (angka penuh), EUR61.694 (angka penuh), EUR40.000.000 (angka penuh), dan GBP292.930 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp11.546.038, SGD11.000.000 (angka penuh), CHF20.000.000 (angka penuh), ASD70.000 (angka penuh), RMB313.966.020 (angka penuh) dan Rp5.453, serta kontrak penjualan *swap* mata uang asing dengan nilai nosional ASD243.500.000 (angka penuh), ASD22.513.595 (angka penuh), dan EUR400.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp3.559.731, SGD31.000.000 (angka penuh) dan ASD457.373.041 (angka penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki kontrak pembelian *swap* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD68.000.000 (angka penuh) dan RMB10.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp922.295 dan Rp20.680 serta kontrak penjualan *swap* mata uang asing dengan nilai nosional ASD365.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.952.199.

Pada tanggal 31 Desember 2016, BRI memiliki kontrak pembelian *swap* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD295.000.000 (angka penuh) dan EUR310.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp3.998.890 dan Rp4.479.072 serta kontrak penjualan *swap* mata uang asing dengan nilai nosional ASD25.000.000 (angka penuh) dengan nilai kontrak sebesar Rp333.740.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
Rupiah			
Kupedes	274.265.895	239.446.222	211.417.693
Modal kerja	155.123.610	137.253.555	123.647.784
Konsumsi	131.094.876	115.226.118	101.016.417
Investasi	61.687.748	56.554.806	54.536.901
Program	19.794.242	15.132.136	10.547.008
Sindikasi	483.441	376.908	1.136.189
	642.449.812	563.989.745	502.301.992
Mata uang asing			
Investasi	40.467.186	35.517.455	27.477.766
Modal kerja	25.082.627	22.585.002	19.362.729
Sindikasi	662.306	571.560	615.873
Konsumsi	561.112	82.785	-
	66.773.231	58.756.802	47.456.368
	709.223.043	622.746.547	549.758.360
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Modal kerja	46.809.988	38.485.484	37.739.884
Investasi	35.086.557	30.682.594	27.960.891
Sindikasi	7.930.481	14.305.128	17.116.441
Karyawan kunci	34.092	38.457	43.174
Konsumsi	9.934	11.118	14.871
	89.871.052	83.522.781	82.875.261
Mata uang asing			
Modal kerja	17.502.447	8.482.183	5.573.961
Investasi	2.752.795	3.418.191	4.286.304
Sindikasi	660.820	812.966	977.089
	20.916.062	12.713.340	10.837.354
	110.787.114	96.236.121	93.712.615
Total	820.010.157	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(35.017.982)	(29.423.380)	(22.184.296)
Bersih	**784.992.175**	**689.559.288**	**621.286.679**

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		732.320.864		647.512.526		585.177.253
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	5.993.964.948	86.193.216	5.198.485.778	70.530.456	4.265.605.843	57.468.374
Euro Eropa	72.146.581	1.186.137	35.917.796	583.169	40.702.251	576.986
Dolar Singapura	19.841.207	209.422	28.764.567	292.091	21.521.459	200.406
Pound Sterling Inggris	3.930.218	71.968	2.507.085	45.943	2.090.463	34.608
Yen Jepang	103.593.998	13.531	117.832.413	14.201	90.820.000	10.450
Renminbi	4.457.638	9.319		-		-
Franc Swiss	390.517	5.700	308.006	4.282	205.338	2.712
Dolar Australia		-		-	19.099	186
		87.689.293		71.470.142		58.293.722
Total		820.010.157		718.982.668		643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(35.017.982)		(29.423.380)		(22.184.296)
Bersih		**784.992.175**		**689.559.288**		**621.286.679**

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Pihak ketiga			
Rupiah			
Perdagangan, perhotelan dan restoran	256.219.193	226.186.153	201.932.238
Pertanian	77.912.574	67.543.304	61.298.365
Jasa dunia usaha	31.464.535	25.831.990	21.669.972
Perindustrian	27.767.807	24.177.058	23.131.242
Konstruksi	16.578.154	14.975.663	13.352.157
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	10.992.513	9.364.498	7.411.834
Jasa pelayanan sosial	9.475.464	5.885.751	4.570.127
Listrik, gas dan air	3.562.846	1.574.646	1.235.411
Pertambangan	2.550.965	2.115.257	2.223.852
Lain-lain	205.925.761	186.335.425	165.476.794
	642.449.812	563.989.745	502.301.992
Mata uang asing			
Perindustrian	25.161.096	25.665.775	23.302.570
Pertanian	17.667.723	16.070.541	8.994.684
Listrik, gas dan air	9.095.537	5.831.595	4.465.298
Pertambangan	3.203.206	1.962.466	3.951.956
Perdagangan, perhotelan dan restoran	3.170.984	2.432.355	1.742.852
Konstruksi	2.742.913	1.529.935	1.669.253
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2.616.944	2.828.184	1.581.561
Jasa dunia usaha	2.018.103	2.097.505	1.681.920
Jasa pelayanan sosial	466.899	47.496	-
Lain-lain	629.826	290.950	66.274
	66.773.231	58.756.802	47.456.368
	709.223.043	622.746.547	549.758.360

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Listrik, gas dan air	23.631.348	26.866.643	27.396.425
Perdagangan, perhotelan dan restoran	19.643.364	10.821.560	15.784.788
Konstruksi	13.495.108	9.280.503	6.272.142
Perindustrian	9.408.455	8.667.951	9.804.224
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.343.126	9.234.581	8.699.909
Pertanian	7.473.930	6.243.108	7.673.124
Jasa dunia usaha	6.971.996	11.913.867	6.315.017
Pertambangan	590.995	108.341	466.620
Jasa pelayanan sosial	274.683	346.347	418.524
Lain-lain	38.047	39.880	44.488
	89.871.052	83.522.781	82.875.261
Mata uang asing			
Perdagangan, perhotelan dan restoran	11.575.627	2.031.732	25.829
Perindustrian	5.811.609	5.681.336	4.979.352
Jasa pelayanan sosial	2.544.738	3.007.495	3.707.071
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	769.019	632.312	524.255
Jasa dunia usaha	107.850	-	176.577
Konstruksi	79.983	3.715	77.020
Pertambangan	27.236	1.356.750	1.347.250
	20.916.062	12.713.340	10.837.354
	110.787.114	96.236.121	93.712.615
Total	820.010.157	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(35.017.982)	(29.423.380)	(22.184.296)
Bersih	**784.992.175**	**689.559.288**	**621.286.679**

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
Rupiah			
≤ 1 bulan	20.330.742	16.086.535	13.537.435
> 1 bulan - 3 bulan	29.348.601	23.003.072	18.772.288
> 3 bulan - 1 tahun	120.035.107	110.806.225	97.065.113
> 1 tahun - 2 tahun	89.107.704	86.191.035	80.029.683
> 2 tahun - 5 tahun	189.939.235	157.904.624	142.332.825
> 5 tahun	193.688.423	169.998.254	150.564.648
	642.449.812	563.989.745	502.301.992
Mata uang asing			
≤ 1 bulan	5.724.232	5.382.236	2.441.291
> 1 bulan - 3 bulan	1.546.241	2.244.541	1.521.131
> 3 bulan - 1 tahun	16.843.596	5.174.926	5.505.601
> 1 tahun - 2 tahun	3.762.848	11.410.051	5.977.606
> 2 tahun - 5 tahun	12.132.848	8.737.745	12.608.850
> 5 tahun	26.763.466	25.807.303	19.401.889
	66.773.231	58.756.802	47.456.368
	709.223.043	622.746.547	549.758.360

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
≤ 1 bulan	8.337.635	11.019.644	1.890.341
> 1 bulan - 3 bulan	3.959.650	11.150.941	19.986.637
> 3 bulan - 1 tahun	10.058.371	17.130.693	16.731.440
> 1 tahun - 2 tahun	21.668.042	3.145.595	2.638.472
> 2 tahun - 5 tahun	9.772.338	5.891.373	7.727.466
> 5 tahun	36.075.016	35.184.535	33.900.905
	89.871.052	83.522.781	82.875.261
Mata uang asing			
≤ 1 bulan	1.315.772	2.000.424	242.395
> 1 bulan - 3 bulan	-	407.025	1.347.250
> 3 bulan - 1 tahun	16.701.061	5.862.809	2.736.744
> 1 tahun - 2 tahun	423.105	1.344.479	-
> 2 tahun - 5 tahun	2.476.124	2.999.687	4.967.027
> 5 tahun	-	98.916	1.543.938
	20.916.062	12.713.340	10.837.354
	110.787.114	96.236.121	93.712.615
Total	820.010.157	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(35.017.982)	(29.423.380)	(22.184.296)
Bersih	**784.992.175**	**689.559.288**	**621.286.679**

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Individual	27.145.695	27.226.560	28.871.177
Kolektif			
Lancar	762.445.946	661.911.830	587.285.896
Dalam perhatian khusus	20.787.067	21.928.300	20.523.521
Kurang lancar	1.573.704	1.290.701	1.056.103
Diragukan	1.777.038	1.408.731	1.128.476
Macet	6.280.707	5.216.546	4.605.802
	792.864.462	691.756.108	614.599.798
Total	820.010.157	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:			
Individual	(16.780.413)	(13.013.036)	(7.510.899)
Kolektif	(18.237.569)	(16.410.344)	(14.673.397)
	(35.017.982)	(29.423.380)	(22.184.296)
Bersih	**784.992.175**	**689.559.288**	**621.286.679**

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
Rupiah			
Ritel	311.654.641	274.283.085	241.315.169
Mikro	291.615.908	252.850.654	221.802.205
Korporasi	39.179.263	36.856.006	39.184.618
	642.449.812	563.989.745	502.301.992
Mata uang asing			
Korporasi	52.255.050	47.520.666	37.452.816
Ritel	14.518.181	11.236.136	10.003.552
	66.773.231	58.756.802	47.456.368
	709.223.043	622.746.547	549.758.360
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Korporasi	85.459.930	81.742.983	81.332.459
Ritel	4.411.122	1.779.798	1.542.802
	89.871.052	83.522.781	82.875.261
Mata uang asing			
Korporasi	20.866.043	12.576.130	10.709.197
Ritel	50.019	137.210	128.157
	20.916.062	12.713.340	10.837.354
	110.787.114	96.236.121	93.712.615
Total	820.010.157	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(35.017.982)	(29.423.380)	(22.184.296)
Bersih	**784.992.175**	**689.559.288**	**621.286.679**

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Bunga Kontrak			
Rupiah	11,19%	11,78%	11,91%
Mata uang asing	4,20	4,11	4,23
Bunga Efektif			
Rupiah	13,46%	14,14%	14,59%
Mata uang asing	4,30	4,20	4,38

2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 20, 21 dan 22).

3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pegawai dan pensiun, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya.

5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit. Sasaran kredit ini adalah usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.

7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp52.765.949, Rp38.340.157 dan Rp45.054.012 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar dari 24,50% sampai dengan 77,00%, 22,65% sampai dengan 63,65% dan 24,50% sampai dengan 63,65% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar dari 1% sampai dengan 36%, 10,89% sampai dengan 50,00% dan 2,97% sampai dengan 59,97% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (tidak diaudit).

8) Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp2.251.490, Rp617.834 dan Rp565.480 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 18).

9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi diluar kredit yang diberikan kepada karyawan kunci (Catatan 44) adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	23.616.099	27.039.931	27.446.991
Perum BULOG	16.316.937	9.049.660	16.112.248
PT Pertamina (Persero)	11.575.627	1.760.382	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	3.032.393	1.776.795	1.621.845
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.897.733	2.375.195	1.968.132
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.893.383	2.438.770	1.735.635
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	2.804.944	3.450.797	4.307.997
PT Trans Jabar Tol	2.438.362	748.931	-
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	2.338.069	-	-
PT Petrokimia Gresik	2.222.289	1.428.976	980.595
Lain-lain	40.617.187	46.128.227	39.495.998
Total	**110.753.023**	**96.197.664**	**93.669.441**

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

10) Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI (Entitas Induk) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp49.102.800, Rp42.175.770 dan Rp37.131.753 (tidak diaudit). Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 kepada Bank Indonesia, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.

12) Rincian kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Perdagangan, perhotelan dan restoran	9.614.317	9.898.334	9.589.255
Perindustrian	9.343.139	8.457.660	9.306.203
Pertanian	6.034.872	4.727.530	4.345.008
Konstruksi	3.374.882	3.183.411	3.725.349
Jasa dunia usaha	2.060.793	1.589.408	1.629.211
Pertambangan	1.730.752	2.712.370	3.116.077
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.677.441	1.671.117	1.653.314
Listrik, gas dan air	743.514	707.437	723.688
Jasa pelayanan sosial	506.673	676.383	135.594
Lain-lain	1.690.761	1.518.888	1.437.859
Total	36.777.144	35.142.538	35.661.558
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(19.170.366)	(15.239.033)	(9.224.013)
Bersih	**17.606.778**	**19.903.505**	**26.437.545**

13) Rasio-rasio

a. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

(i) BRI Induk dan BRI Agro

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Total kredit *non-performing*	17.680.729	15.147.081	13.117.282
Total kredit yang diberikan	820.010.057	718.982.668	643.470.975
% kredit *non-performing* (NPL)	2,16%	2,11%	2,04%

(ii) BRI (Entitas Induk)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Total kredit *non-performing*	17.232.672	14.862.646	12.882.913
Total kredit yang diberikan	804.338.433	708.001.045	635.291.221
% kredit *non-performing* (NPL)	2,14%	2,10%	2,03%

b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah masing-masing sebesar 45,82%, 45,58% dan 44,48% pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (tidak diaudit).

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	29.423.380	22.184.296	17.162.183
Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	17.592.892	16.800.820	13.454.979
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(12.243.478)	(9.548.619)	(8.473.450)
Selisih kurs	245.188	(13.117)	40.584
Saldo akhir	**35.017.982**	**29.423.380**	**22.184.296**

Dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (Entitas Induk) termasuk cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebesar Rp1.365.090, Rp926.267 dan Rp857.060, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 2e).

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Catatan 2e) adalah sebesar Rp22.354.615, Rp18.507.786 dan Rp15.652.514, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat kredit yang diberikan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan yang dibentuk telah memadai.

13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

a) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
Lancar	15.494.736	14.285.886	14.553.293
Dalam perhatian khusus	874.130	1.382.563	1.870.297
Kurang lancar	331.900	505.223	160.261
Diragukan	213.122	89.184	178.264
Macet	826.082	604.915	479.990
	17.739.970	16.867.771	17.242.105
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Lancar	2.430.525	996.779	506.483
Dalam perhatian khusus	6.355	319	355
Diragukan	1.357	-	-
Macet	194	-	-
	2.438.431	997.098	506.838
Total	20.178.401	17.864.869	17.748.943
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(497.141)	(577.257)	(492.156)
Bersih	**19.681.260**	**17.287.612**	**17.256.787**

13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
Rupiah			
≤ 1 bulan	804.824	530.569	282.806
> 1 bulan - 3 bulan	1.137.238	236.409	449.395
> 3 bulan - 1 tahun	1.706.078	2.421.838	1.399.649
> 1 tahun - 2 tahun	2.145.029	960.678	1.265.385
> 2 tahun - 5 tahun	6.390.455	7.331.402	2.728.868
> 5 tahun	5.556.346	5.386.875	11.116.002
	17.739.970	16.867.771	17.242.105
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
≤ 1 bulan	250.516	-	6
> 1 bulan - 3 bulan	604.905	-	3.400
> 3 bulan - 1 tahun	99.570	4.004	328.777
> 1 tahun - 2 tahun	633.184	801.366	1.936
> 2 tahun - 5 tahun	364.348	100.938	41.675
> 5 tahun	485.908	90.790	131.044
	2.438.431	997.098	506.838
Total	20.178.401	17.864.869	17.748.943
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(497.141)	(577.257)	(492.156)
Bersih	**19.681.260**	**17.287.612**	**17.256.787**

Piutang dan pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pendapatan piutang *murabahah* yang belum diakui pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp4.436.203, Rp4.200.027 dan Rp4.322.067.

Perubahan cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	577.257	492.156	352.252
Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	186.998	202.008	244.267
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	20.050	25.407	14.892
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(287.164)	(142.314)	(119.255)
Saldo akhir	**497.141**	**577.257**	**492.156**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan pembiayaan syariah yang dibentuk telah memadai.

13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

Jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas piutang dan pembiayaan konsumen berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan properti lainnya.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat piutang dan pembiayaan syariah yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

14. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

a) Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 terdiri dari:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
Piutang sewa pembiayaan-bruto	3.944.313	2.828.510	2.465.843
Nilai sisa yang terjamin	1.972.808	1.656.302	1.750.061
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(520.761)	(342.419)	(266.044)
Simpanan jaminan	(1.986.514)	(1.653.410)	(1.749.560)
Total	3.409.846	2.488.983	2.200.300
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(88.000)	(103.500)	(130.000)
Bersih	**3.321.846**	**2.385.483**	**2.070.300**

b) Piutang sewa pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak ketiga			
Rupiah			
≤ 1 tahun	286.955	217.083	192.212
> 1 tahun - 2 tahun	658.579	522.974	480.529
> 2 tahun - 5 tahun	2.333.899	1.234.645	929.023
	3.279.433	1.974.702	1.601.764
Dolar Amerika Serikat			
≤ 1 tahun	21.791	45.397	71.824
> 1 tahun - 2 tahun	66.407	45.663	179.561
> 2 tahun - 5 tahun	42.215	423.221	347.151
	130.413	514.281	598.536
Total	3.409.846	2.488.983	2.200.300
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(88.000)	(103.500)	(130.000)
Bersih	**3.321.846**	**2.385.483**	**2.070.300**

14. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	103.500	130.000	128.000
Pembentukan (pembalikan) penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	12.803	(8.713)	16.669
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(28.341)	(16.984)	(14.646)
Selisih kurs	38	(803)	(23)
Saldo akhir	**88.000**	**103.500**	**130.000**

*) Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode berjalan setelah akuisisi tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp995 (catatan 34)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat piutang sewa pembiayaan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan yang dibentuk telah memadai.

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)**	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)**	**Ekuivalen Rp**
Pihak ketiga						
Rupiah						
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		7.105.174		2.739.683		3.192.249
Mata uang asing						
L/C Impor dan SKBDN						
Dolar Amerika Serikat	205.140.355	2.949.919	116.065.536	1.574.719	147.121.912	1.982.100
Euro Eropa	6.532.906	107.405	2.157.759	35.034	1.406.631	19.940
Pound Sterling Inggris	126.463	2.316		-		-
Yen Jepang	3.800.000	496	38.445.000	4.634	30.124.000	3.466
Dolar Singapura		-	23.550	239	19.600	183
		3.060.136		1.614.626		2.005.689
		10.165.310		4.354.309		5.197.938
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
L/C Impor dan SKBDN		335.085		427.335		363.963

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)						
Mata uang asing						
L/C Impor dan SKBDN						
Dolar Amerika Serikat	78.905.049	1.134.655	66.226.205	898.524	7.433.691	100.150
Yen Jepang	60.890.000	7.953		-		-
Euro Eropa		-	816.480	13.257	2.153.788	30.532
		1.142.608		911.781		130.682
		1.477.693		1.339.116		494.645
Total		**11.643.003**		**5.693.425**		**5.692.583**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai “Lancar”.

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pihak ketiga			
≤ 1 bulan	797.543	1.101.957	955.776
> 1 bulan - 3 bulan	2.477.018	1.593.129	1.935.035
> 3 bulan - 1 tahun	6.890.749	1.659.223	2.307.127
	10.165.310	4.354.309	5.197.938
Pihak berelasi (Catatan 44)			
≤ 1 bulan	193.709	792.676	89.867
> 1 bulan - 3 bulan	208.324	390.110	171.292
> 3 bulan - 1 tahun	1.075.660	156.330	233.486
	1.477.693	1.339.116	494.645
Total	**11.643.003**	**5.693.425**	**5.692.583**

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan akseptasi dapat ditagih.

16. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2018			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	35,00	71.325	1.282	72.607
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	371.959	312	372.271
			443.284	1.594	444.878
Metode Biaya					
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	7,97			7.978
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17,50			3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	2,00			1.000
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga keuangan non Bank	8,00			536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			220
PT Menara Proteksi Indonesia	Infrastruktur	2,00			200
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,87			135
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana olahraga	0,64			50
PT Kendari Expressindo Bahari	Transportasi	8,33			50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75			35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana olahraga	0,24			25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13			23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03			20
PT Danareksa Finance	Lembaga keuangan	0,01			1
					15.268
Total					460.146
Cadangan kerugian Penurunan nilai					(50)
Total - Neto					**460.096**

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

		31 Desember 2017*)			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bahana Artha Ventura	Modal Ventura	35,00	71.326	56	71.382
Metode Biaya					
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	7,97			7.978
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia	Lembaga kliring	2,00			1.000
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga keuangan non Bank	8,00			536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			220
PT Menara Proteksi Indonesia	Infrastruktur	2,00			200
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,50			135
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana olahraga	0,64			50
PT Kendari Expressindo Bahari	Transportasi	8,33			50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75			35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana olahraga	0,24			25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13			23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03			20
PT Danareksa Finance	Lembaga Keuangan	0,01			1
					11.768
Total					83.150
Cadangan kerugian Penurunan nilai					(50)
Total - Neto					**83.100**

		31 Desember 2016*)	
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Kepemilikan (%)**	**Nilai Tercatat**
Metode Biaya			
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek	4,30	1.275
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	8,00	536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Keanggotaan golf	1,68	220
PT Kliring Berjangka Indonesia	Lembaga kliring	2,00	1.000
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	7,97	7.978
PT Menara Proteksi Indonesia	Infrastruktur	2,00	200

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2016*)		
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Kepemilikan (%)**	**Nilai Tercatat**
Metode Biaya (lanjutan)			
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00	77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana olahraga	0,64	50
PT Kendari Expressindo Bahari	Transportasi	8,33	50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75	35
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,50	135
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana olahraga	0,24	25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13	23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03	20
PT Danareksa Finance	Non-Bank	0,03	1
Total			11.768
Cadangan kerugian penurunan nilai			(50)
Total - neto			**11.718**

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua penyertaan diklasifikasikan “Lancar” kecuali penyertaan yang dilakukan PT BRI Ventura Investama (entitas anak) pada PT Kendari Expressindo Bahari.

Pada Pada tahun 2018, BRI telah menerima dividen tunai dari PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia sebesar Rp11.720 sedangkan tahun 2016, menerima dividen tunai dari PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp170 dan Rp11.

Pada tahun 2018, BRI Agro (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp7, Rp6, dan Rp25, sedangkan pada tahun 2017, dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp8, Rp13 dan Rp19, dan pada tahun 2016, dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp7, Rp21 dan Rp26.

Pada tahun 2018, PT Danareksa Sekuritas (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari PT Pemeringkat Efek Indonesia sebesar Rp776.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 jumlah cadangan kerugian nilai atas penyertaan saham yang dibentuk adalah masing-masing sebesar Rp50. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham yang dibentuk telah memadai.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

17. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

	31 Desember 2018			
Keterangan	**Saldo Awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Hak atas tanah	16.134.127	1.167.827	1.365	17.300.589
Bangunan	3.675.421	1.387.341	102.770	4.959.992
Kendaraan bermotor	2.204.637	88.353	8.111	2.284.879
Komputer dan mesin	7.097.817	1.243.266	54.297	8.286.786
Perlengkapan kantor	1.593.957	248.210	34.025	1.808.142
Aset tetap museum	184	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	-	3.284.664
	33.990.807	4.134.997	200.568	37.925.236
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.529.321	258.567	2.212	1.785.676
Kendaraan bermotor	1.705.407	258.165	7.977	1.955.595
Komputer dan mesin	4.607.771	962.466	53.743	5.516.494
Perlengkapan kantor	1.268.536	167.141	29.780	1.405.897
Satelit	127.737	218.978	-	346.715
	9.238.772	1.865.317	93.712	11.010.377
Nilai buku - neto	**24.752.035**			**26.914.859**

	31 Desember 2017*)			
Keterangan	**Saldo Awal**	**Penambahan **)**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Hak atas tanah	15.799.496	340.373	5.742	16.134.127
Bangunan	3.160.913	617.484	102.976	3.675.421
Kendaraan bermotor	2.153.644	84.034	33.041	2.204.637
Komputer dan mesin	6.407.952	750.309	60.444	7.097.817
Perlengkapan kantor	1.482.991	125.049	14.083	1.593.957
Aset tetap museum	184			184
Satelit	-	3.284.664		3.284.664
Satelit dalam pengembangan	3.275.613	183.877	3.459.490	
	32.280.793	5.385.790	3.675.776	33.990.807
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.359.559	173.013	3.251	1.529.321
Kendaraan bermotor	1.420.049	316.903	31.545	1.705.407
Komputer dan mesin	3.835.864	823.816	51.909	4.607.771
Perlengkapan kantor	1.141.188	141.282	13.934	1.268.536
Satelit	-	127.737	-	127.737
	7.756.660	1.582.751	100.639	9.238.772
Nilai buku - neto	**24.524.133**			**24.752.035**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Termasuk di dalamnya properti investasi BRI Life (entitas anak) yang digunakan oleh BRI dan BRISyariah sebesar Rp94.779 pada tanggal 31 Desember 2017.

17. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2016*)			
Keterangan	**Saldo Awal**	**Penambahan **)**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Hak atas tanah	1.107.163	14.709.604	17.271	15.799.496
Bangunan	2.900.001	455.660	194.748	3.160.913
Kendaraan bermotor	1.943.674	245.530	35.560	2.153.644
Komputer dan mesin	5.065.582	1.426.345	83.975	6.407.952
Perlengkapan kantor	1.354.292	156.154	27.455	1.482.991
Aset tetap museum	184	-	-	184
Satelit dalam pengembangan	2.316.572	959.041	-	3.275.613
	14.687.468	17.952.334	359.009	32.280.793
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.220.467	141.656	2.564	1.359.559
Kendaraan bermotor	1.123.409	331.979	35.339	1.420.049
Komputer dan mesin	3.276.548	637.723	78.407	3.835.864
Perlengkapan kantor	1.027.764	140.826	27.402	1.141.188
	6.648.188	1.252.184	143.712	7.756.660
Nilai buku - neto	**8.039.280**			**24.524.133**

*) Termasuk di dalamnya properti investasi BRI Life (entitas anak) yang digunakan oleh BRI dan BRISyariah sebesar Rp94.779 pada tanggal 31 Desember 2017.

**) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah surplus revaluasi hak atas tanah sebesar Rp14.261.442 (setelah dikurangi penurunan nilai akibat revaluasi sebesar Rp54.085) dan saldo awal entitas anak yang diakuisisi (Biaya Perolehan sebesar Rp19.376, Akumulasi Penyusutan sebesar Rp16.901 dan Biaya Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp1.589).

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp1.865.317, Rp1.582.751 dan Rp1.227.754 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 36).

BRI telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah dan satelit) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, vandalis, *force majeur* dan lain-lain kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (pihak berelasi - Catatan 44), Tbk dan PT Asuransi Purna Artanugraha dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp13.174.911, Rp12.283.482, dan Rp10.530.478 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

BRI telah mengasuransikan aset tetap satelit kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (pihak berelasi - Catatan 44) dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar ASD224.000.000 (angka penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

NJOP bangunan yang dimiliki BRI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing senilai Rp2.562.289, Rp2.196.353 dan Rp2.038.098. NJOP dianggap sebagai estimasi terbaik yang mencerminkan nilai wajar bangunan.

Nilai tercatat bruto aset tetap yang telah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan oleh BRI adalah masing-masing sebesar Rp6.157.653, Rp4.777.039 dan Rp3.666.122 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

17. ASET TETAP (lanjutan)

Tidak ada aset tetap yang dimiliki BRI yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Pada tahun 2017, Satelit dalam pengembangan telah siap digunakan sebagai penunjang bisnis sesuai dengan maksud manajemen BRI. Oleh karena itu, BRI melakukan reklasifikasi atas satelit dalam pengembangan sebesar Rp3.459.490 ke aset tetap satelit sebesar Rp3.284.664, bangunan sebesar Rp79.722, perlengkapan kantor sebesar Rp1.360 serta komputer dan mesin sebesar Rp93.744.

Atas aset tetap satelit, BRI mengalokasikan pemanfaatan 144 MHz kapasitas transponder kepada beberapa instansi pemerintah yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Adapun instansi pemerintah yang dapat memanfaatkan kapasitas tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2016, manufaktur satelit (BRIsat) telah selesai dilaksanakan dan telah berhasil diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2016 dari Kourou, French Guiana. BRIsat telah mencapai orbit yang dituju dan telah dilakukan pengujian (in orbit test). Terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016 telah dilakukan "*BRIsat operational handover*" dari SSL (sebagai manufaktur satelit BRIsat). Hingga tanggal 31 Desember 2016, telah dilakukan *Final Acceptance* untuk perangkat *ground* (gRCS) untuk memastikan perangkat-perangkat tersebut dapat digunakan secara optimal oleh BRI. Sesuai dengan kontrak, performa satelit akan terus dimonitor oleh SSL dan BRI sampai *milestone* terakhir (satellite performance) diselesaikan pada pertengahan tahun 2017. Persentase jumlah tercatat satelit dalam pengembangan terhadap nilai kontrak adalah sebesar ±96%.

Pada tanggal 1 April 2016, BRI melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi dan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

- Tujuan akuntansi: BRI mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya,
- Tujuan perpajakan: kenaikan nilai tercatat aset tetap tanah sebesar Rp14.315.527 telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-479/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp13.824.692 (setelah dikurangi pajak final sebesar Rp490.835). Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi sebesar Rp54.085 diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nilai wajar hak atas tanah termasuk pada hierarki nilai wajar level 2.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Abdullah, Fitriantoro dan Rekan, KJPP Aditya, Iskandar dan Rekan, KJPP Aksa, Nelson dan Rekan, KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan, KJPP Iwan Bachron dan Rekan, KJPP Nanang, Rahayu dan Rekan, KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan, KJPP Satria, Iskandar, Setiawan dan Rekan serta KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, dengan berbagai tanggal penilaian.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya masing-masing sebesar Rp2.939.298, Rp1.810.249 dan Rp1.538.053.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

18. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Rupiah			
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 12f)	2.251.490	617.834	565.480
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	1.843.475	2.100.850	1.726.840
Aset *ijarah*	1.676.682	1.146.920	286.181
Biaya dibayar di muka	1.597.777	1.221.753	636.619
Uang muka pajak (Catatan 38b)	1.371.867	927.453	-
Tagihan atas penyaluran bantuan sosial pemerintah	1.295.093	657.815	-
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR generasi II	1.174.619	4.176.707	595.562
Piutang bunga			
Efek-efek	999.167	1.089.898	725.662
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	393.271	389.617	417.562
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.345	8.292	80.864
Lain-lain	60.496	52.042	76.757
Sewa kantor, gudang, dan ruang kelas	800.740	914.088	845.247
Persekot intern	321.870	381.897	611.471
Aset reasuransi	311.677	269.007	232.332
Tagihan kepada Perum BULOG	297.846	228.682	328.559
Persediaan kantor	273.496	235.827	296.038
Agunan yang diambil alih	231.776	362.576	257.769
Estimasi tagihan pajak (Catatan 38b)	185.435	140.235	75.198
Tagihan pinalti pokok dan bunga kredit	79.543	68.864	68.009
Piutang premi	28.031	20.465	46.511
Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan prinsip syariah	2.066	191.236	170.519
Lain-lain	5.519.091	4.276.706	3.626.133
	20.726.853	19.478.764	11.669.313
Mata uang asing			
Piutang bunga			
Efek-efek	569.610	547.626	535.611
Lain-lain	331.451	42.859	34.164
Tagihan *refinancing*	271.121	817.573	115.386
Lain-lain	1.480.514	185.233	41.600
	2.652.696	1.593.291	726.761
Total	**23.379.549**	**21.072.055**	**12.396.074**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

19. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri atas:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rupiah			
Titipan *advance payment*	2.276.993	2.127.026	1.492.074
Titipan setoran pajak	734.288	424.823	379.554
Titipan ATM dan kartu kredit	499.165	300.175	460.036
Penampungan dana bantuan sosial	353.128	66.937	559
Titipan asuransi	178.005	162.907	152.213
Titipan kerjasama pihak ketiga	96.985	200.525	103.527
Titipan pinjaman kelolaan	62.853	57.321	51.265
Titipan setoran kliring	43.214	22.252	26.807
Titipan pengiriman uang	24.774	26.587	35.703
Lain-lain	3.639.171	2.964.982	2.501.684
	7.908.576	6.353.535	5.203.422
Mata uang asing			
Titipan *advance payment*	71.752	61.720	56.120
Titipan ATM dan kartu kredit	55.068	48.686	52.597
Titipan setoran pajak	35.757	15.867	12.273
Lain-lain	391.805	104.393	85.901
	554.382	230.666	206.891
Total	**8.462.958**	**6.584.201**	**5.410.313**

20. GIRO

Giro terdiri atas:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)**	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)**	**Ekuivalen Rp**
Pihak ketiga						
Rupiah		103.332.732		81.525.195		79.314.862
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	1.374.006.418	19.754.744	1.362.520.346	18.485.995	1.153.376.172	15.538.860
Euro Eropa	104.729.955	1.721.829	11.802.883	191.634	113.890.839	1.614.490
Dolar Singapura	13.327.865	140.674	12.039.022	122.251	2.777.138	25.861
Renminbi	22.545.386	47.133	7.318.360	15.249	56.984.608	110.504
Pound Sterling Inggris	1.810.762	33.158	2.679.707	49.107	3.764.194	62.316
Yen Jepang	142.213.970	18.576	79.572.861	9.590	223.500.953	25.717
Dolar Australia	258.082	2.623	3.039.571	32.202	21.415.159	208.222
Dolar Hong Kong	930.433	1.709	511.954	889	528.967	919
Dirham Uni Emirat Arab	6.250	24		-		-
Riyal Arab Saudi	824	3	37.625	136	2.306.560	8.285
		21.720.473		18.907.053		17.595.174
		125.053.205		100.432.248		96.910.036
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah		34.903.376		29.089.518		29.618.921
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat		16.364.300	11.161.516.707	15.758.878	1.081.759.223	14.574.001
Euro Eropa		1.573.786	14.932.009	242.439	22.240.029	315.269
Yen Jepang		203.314	50.489.759	6.085	6.890.431	793
		18.141.400		16.007.402		14.890.063
		53.044.776		45.096.920		44.508.984
Total		**178.097.981**		**145.529.168**		**141.419.020**

20. GIRO (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Rupiah	2,44%	2,32%	2,33%
Mata uang asing	0,20	0,33	0,49

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp344.799, Rp238.264 dan Rp127.809 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

21. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga						
Rupiah						
Simpedes		229.394.411		205.658.448		183.909.412
Britama		134.397.305		126.653.884		108.269.980
Lain-lain		10.891.846		9.432.599		4.260.239
		374.683.562		341.744.931		296.439.631
Mata uang asing						
Britama						
Dolar Amerika Serikat	335.612.125	4.826.102	96.426.361	1.308.264	94.648.979	1.275.158
Dolar Singapura	4.555.166	48.079	4.047.720	41.103	5.506.164	51.273
Euro Eropa	2.241.412	36.850	4.319.864	70.138	15.504.444	219.787
Dolar Australia	761.405	7.738	497.747	5.273	807.929	7.856
Renminbi	2.019.925	4.223	684.461	1.426	672.164	1.304
Pound Sterling Inggris	83.525	1.530	76.103	1.394	66	1
Yen Jepang	10.181.661	1.330	33.461.987	4.033	10.923.961	1.257
Dolar Hong Kong	9.368	36	29.476	51	12.547	22
Riyal Arab Saudi	3.478	6	960	3	328	1
Dirham Uni Emirat Arab	306	1	147	1	365	1
		4.925.895		1.431.686		1.556.660
Lain-lain						
Dolar Amerika Serikat	588.483	8.462	324.787	4.407	195.196	2.630
		4.934.357		1.436.093		1.559.290
		379.617.919		343.181.024		297.998.921
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Britama		168.687		160.589		96.035
Simpedes		7.180		3.562		2.680
Lain-lain		106.037		54.560		6.476
		281.904		218.711		105.191

21. TABUNGAN (lanjutan)

Tabungan terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)						
Mata uang asing						
Britama						
Dolar Amerika Serikat	1.307.242	18.798	1.538.170	20.869	466.872	6.290
Euro Eropa	3.498	58	64	1		-
Dolar Singapura	1.724	18	80	1	242	3
Riyal Arab Saudi	1.564	6	-	-	-	-
Renminbi	814	2	357	1	607	1
Dolar Australia	-	-	195	2	-	-
Pound Sterling Inggris	-	-	51	1	-	-
		18.882		20.875		6.294
Lain-lain						
Dolar Amerika Serikat		-	9.346	127		-
		18.882		21.002		6.294
		300.786		239.713		111.485
Total		**379.918.705**		**343.420.737**		**298.110.406**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Rupiah	0,84%	0,86%	1,14%
Mata uang asing	0,17	0,21	0,22

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp99.506, Rp83.430 dan Rp84.937 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

22. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga						
Rupiah		221.071.235		179.634.460		159.195.095
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	3.145.348.545	45.230.112	3.756.779.689	50.970.108	3.126.352.845	42.119.789
Euro Eropa	164.662.217	2.707.154	2.983.283	48.437	803.857.776	11.395.299
Dolar Australia	26.740.800	271.749	6.452.966	68.364	4.553.424	44.273
Dolar Singapura	23.203.837	244.914	20.713.546	210.337	17.812.319	165.867
Renminbi	6.188.661	12.938	9.277.833	19.332	50.220.204	97.387
Pound Sterling Inggris	308.276	5.645	125.209	2.295	118.604	1.963
Yen Jepang	4.030.000	526	1.135.000	137	388.000	45
Riyal Arab Saudi		-	5.258.518	19.024	5.258.518	18.888
		48.473.038		51.338.034		53.843.511
		269.544.273		230.972.494		213.038.606

22. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah		63.111.013		68.918.906		60.898.562
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	1.681.439.370	24.179.098	1.912.908.304	25.953.383	1.376.645.507	18.546.856
Dolar Singapura	44.511.414	469.815	44.162.297	448.449	43.793.922	407.806
Euro Eropa	6.649.000	109.314	7.649.000	124.191	9.703.047	137.548
Dolar Australia		-	48.532	514		-
		24.758.227		26.526.537		19.092.210
		87.869.240		95.445.443		79.990.772
Total		**357.413.513**		**326.417.937**		**293.029.378**

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Pihak ketiga			
Rupiah			
Deposits on call	7.579.408	7.846.255	9.577.885
Deposito			
1 bulan	132.937.328	71.521.847	66.562.883
3 bulan	67.086.988	73.908.929	59.117.884
6 bulan	9.649.807	19.467.302	17.829.486
12 bulan	2.961.301	6.123.449	5.647.297
Lebih dari 12 bulan	856.403	766.678	459.660
	221.071.235	179.634.460	159.195.095
Mata uang asing			
Deposits on call	2.457.146	3.858.989	3.823.613
Deposito			
1 bulan	23.008.396	12.810.631	6.845.138
3 bulan	8.233.970	5.859.042	5.329.468
6 bulan	2.727.620	13.393.642	26.618.525
12 bulan	12.034.915	15.411.619	10.607.111
Lebih dari 12 bulan	10.991	4.111	619.656
	48.473.038	51.338.034	53.843.511
	269.544.273	230.972.494	213.038.606
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Deposits on call	16.941.003	14.117.304	7.975.541
Deposito			
1 bulan	24.374.120	24.736.012	29.547.145
3 bulan	14.449.930	14.274.439	12.669.883
6 bulan	1.071.273	2.560.592	2.456.474
12 bulan	93.187	1.659.159	5.289.119
Lebih dari 12 bulan	6.181.500	11.571.400	2.960.400
	63.111.013	68.918.906	60.898.562

22. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Mata uang asing			
Deposits on call	2.168.901	7.275.615	1.377.187
Deposito			
1 bulan	9.738.302	8.742.183	9.196.247
3 bulan	7.934.172	4.072.443	3.306.531
6 bulan	4.461.550	5.367.913	5.030.168
12 bulan	455.302	948.989	182.077
Lebih dari 12 bulan	-	119.394	-
	24.758.227	26.526.537	19.092.210
	87.869.240	95.445.443	79.990.772
Total	**357.413.513**	**326.417.937**	**293.029.378**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rupiah	6,17%	6,20%	7,49%
Mata uang asing	2,14	1,43	1,19

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp948.588, Rp334.019 dan Rp257.410 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)**	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)**	**Ekuivalen Rp**
Pihak ketiga						
Rupiah						
Deposits on call		4.981.000		3.473.000		810.000
Deposito berjangka		966.011		523.193		84.630
Giro		241.978		169.262		152.260
Tabungan		3.407		6.709		6.497
Inter-bank call money		-		-		536.729
		6.192.396		4.172.164		1.590.116
Dolar Amerika Serikat						
Inter-bank call money	3.500.000	2.236.090	6.000.000	81.405		-
Giro	7.038.414	101.213	13.272.017	180.068	6.387.630	86.057
Deposito berjangka	155.500.000	50.330	1.000.000	13.568	4.000.000	53.890
		2.387.633		275.041		139.947
		8.580.029		4.447.205		1.730.063

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Inter-bank call money		1.250.000		-		20.000
Giro		1.129		2.621		689
Deposits on call		-		50.000		80.000
		1.251.129		52.621		100.689
Dolar Amerika Serikat						
Inter-bank call money		-	80.600.000	1.093.541	29.600.000	398.786
		1.251.129		1.146.162		499.475
Total		**9.131.158**		**5.593.367**		**2.229.538**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	Rupiah			Dolar Amerika Serikat		
	31 Desember			31 Desember		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Giro	1,44%	1,31%	1,21%	0,07%	0,03%	0,05%
Tabungan	1,48	1,37	1,46	0,14	-	-
Deposits on call	5,88	5,23	5,97	-	-	-
Deposito berjangka	6,00	5,90	6,47	0,32	0,45	0,44
Inter-bank call money	7,40	-	4,74	0,02	0,92	0,46

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call	4.981.000	-	-	4.981.000
Deposito berjangka	915.350	50.661		966.011
Giro	241.978	-	-	241.978
Tabungan	3.407	-	-	3.407
	6.141.735	50.661	-	6.192.396
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	2.236.090	-	-	2.236.090
Giro	101.213	-	-	101.213
Deposito berjangka	50.330	-	-	50.330
	2.387.633	-	-	2.387.633
	8.529.368	50.661	-	8.580.029

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2018			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Inter-bank call money	1.250.000	-	-	1.250.000
Giro	1.129	-	-	1.129
	1.251.129	-	-	1.251.129
Total	**9.780.496**	**50.661**	**-**	**9.131.158**

	31 Desember 2017			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call	3.473.000	-	-	3.473.000
Deposito berjangka	436.000	57.408	29.785	523.193
Giro	169.262	-	-	169.262
Tabungan	6.709	-	-	6.709
	4.084.971	57.408	29.785	4.172.164
Dolar Amerika Serikat				
Giro	180.068	-	-	180.068
Inter-bank call money	81.405	-	-	81.405
Deposito berjangka	13.568	-	-	13.568
	275.041	-	-	275.041
	4.360.012	57.408	29.785	4.447.205
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Deposits on call	50.000	-	-	50.000
Giro	2.621	-	-	2.621
	52.621	-	-	52.621
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	1.093.541	-	-	1.093.541
	1.146.162	-	-	1.146.162
Total	**5.506.174**	**57.408**	**29.785**	**5.593.367**

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2016			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call	810.000	-	-	810.000
Inter-bank call money	536.729	-	-	536.729
Giro	152.260	-	-	152.260
Deposito berjangka	41.250	42.057	1.323	84.630
Tabungan	6.497	-	-	6.497
	1.546.736	42.057	1.323	1.590.116
Dolar Amerika Serikat				
Giro	86.057	-	-	86.057
Deposito berjangka	53.890	-	-	53.890
	139.947	-	-	139.947
	1.686.683	42.057	1.323	1.730.063
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Deposits on call	80.000	-	-	80.000
Inter-bank call money	20.000	-	-	20.000
Giro	689	-	-	689
	100.689	-	-	100.689
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	398.786	-	-	398.786
	499.475	-	-	499.475
Total	**2.186.158**	**42.057**	**1.323**	**2.229.538**

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

	31 Desember 2018				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0063	21 Desember 2018	18 Januari 2019	5.000.000	4.344.620	4.353.056
FR0077	26 Desember 2018	2 Januari 2019	2.000.000	2.932.122	2.934.684
FR0069	12 Desember 2018	9 Januari 2019	1.500.000	2.806.512	2.816.866
FR0061	19 Desember 2018	16 Januari 2019	3.000.000	2.781.465	2.787.946
FR0069	18 Mei 2015	15 April 2019	571.000	500.047	500.047
FR0069	21 Mei 2015	15 April 2019	568.000	499.714	499.714
FR0069	9 September 2016	15 April 2019	540.000	498.000	498.000
FR0071	20 Desember 2018	3 Januari 2019	500.000	473.503	474.552
FR0077	19 Desember 2018	21 Januari 2019	500.000	455.098	456.236
FR0077	19 Desember 2018	21 Januari 2019	500.000	455.098	456.236
FR0077	18 Desember 2018	18 Januari 2019	500.000	454.309	455.539
FR0069	10 Desember 2018	10 Januari 2019	500.000	452.289	454.215
FR0069	13 Desember 2018	14 Januari 2019	500.000	452.089	453.739
FR0063	7 November 2017	15 Mei 2023	500.000	446.090	446.090
FR0053	6 September 2016	15 Juli 2021	450.000	437.025	437.025
FR0063	12 Desember 2018	14 Januari 2019	500.000	409.007	410.582
FR0063	12 Desember 2018	14 Januari 2019	500.000	409.007	410.582
FR0064	27 Desember 2018	3 Januari 2019	500.000	396.369	396.657
FR0053	9 September 2016	15 Juli 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	28 Februari 2017	15 Juli 2021	440.000	382.690	382.690
FR0034	6 September 2016	15 Juni 2021	300.000	344.315	344.315
FR0070	20 Desember 2018	3 Januari 2019	350.000	319.958	320.672
FR0061	28 Februari 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0068	31 Desember 2018	14 Januari 2019	300.000	271.541	271.541
FR0068	31 Desember 2018	15 Januari 2019	300.000	271.541	271.541
FR0077	19 Desember 2018	2 Januari 2019	250.000	227.549	228.095
FR0059	28 Desember 2018	11 Januari 2019	250.000	210.308	210.431
FR0047	19 Desember 2018	2 Januari 2019	200.000	199.756	200.242
FR0064	27 Desember 2018	3 Januari 2019	250.000	198.185	198.329
FR0059	28 Desember 2018	11 Januari 2019	200.000	168.247	168.345
FR0061	27 Desember 2018	12 Mei 2022	150.000	147.093	147.093
FR0053	21 Desember 2018	21 Januari 2019	100.000	91.288	91.473
			22.497.000	22.729.557	22.771.255
Surat Perbendaharaan Negara					
SPN12190314	7 Desember 2018	4 Januari 2019	2.000.000	2.800.439	2.813.491
SPN12190314	17 Desember 2018	17 Januari 2019	500.000	443.287	444.580
SPN12190606	10 Desember 2018	10 Januari 2019	500.000	436.200	438.058
SPN12190704	10 Desember 2018	10 Januari 2019	500.000	434.702	436.553
SPN12190704	10 Desember 2018	10 Januari 2019	500.000	434.702	436.553
SPN12190801	18 Desember 2018	18 Januari 2019	500.000	432.450	433.636
SPN12191010	17 Desember 2018	16 Januari 2019	350.000	298.420	299.278
SPN12190606	5 Desember 2018	4 Januari 2019	300.000	261.801	263.181
SPN12190606	5 Desember 2018	7 Januari 2019	300.000	261.801	263.181
SPN12190913	17 Desember 2018	17 Januari 2019	200.000	171.428	171.928
SPN12190411	17 Desember 2018	17 Januari 2019	170.000	149.980	150.411
SPN12190606	14 Desember 2018	14 Januari 2019	150.000	130.959	131.417
SPN12191010	13 Desember 2018	14 Januari 2019	150.000	127.798	128.264
SPN12190314	29 November 2018	28 Februari 2019	100.000	88.468	89.050
SPN12191010	12 Desember 2018	11 Januari 2019	100.000	85.186	85.515
			6.320.000	6.557.621	6.585.096
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD220319364S	30 November 2018	1 Maret 2019	300.000	265.605	267.297

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2018				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
Pihak ketiga (lanjutan)					
Dolar Amerika Serikat					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
SNI19	6 Juni 2018	6 Maret 2019	1.217.986	1.006.600	1.023.757
SNI19	6 Juni 2018	6 Maret 2019	1.064.120	934.700	950.632
RI0521	9 November 2018	9 Mei 2019	872.147	719.000	722.116
RI0422	9 November 2018	9 Mei 2019	904.502	719.000	722.116
RI0521	16 Mei 2018	14 Februari 2019	656.030	575.200	585.994
RI0521	20 Desember 2018	20 Maret 2019	575.200	480.683	480.138
RI0521	17 Mei 2018	11 Februari 2019	522.181	431.405	439.465
RI0521	17 Mei 2018	19 Februari 2019	522.713	431.400	439.460
SNI19	6 Juni 2018	6 Maret 2019	221.452	215.700	219.314
RI0428	20 Desember 2018	22 Januari 2019	158.180	123.874	123.767
RI0320	20 Desember 2018	20 Maret 2019	139.342	114.517	114.387
			6.853.853	5.752.079	5.821.146
			35.970.853	35.304.862	35.444.794
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
Non Bank					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	20 Maret 2015	15 April 2019	1.000.000	972.093	997.688
FR0069	29 Juni 2015	15 April 2019	480.000	466.545	478.816
FR0070	20 Desember 2018	3 Januari 2019	500.000	457.083	458.096
			1.980.000	1.895.721	1.934.600
Total			**37.950.853**	**37.200.583**	**37.379.394**

	31 Desember 2017				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	18 Mei 2015	15 April 2019	571.000	500.047	500.047
FR0069	21 Mei 2015	15 April 2019	568.000	499.714	499.714
FR0069	9 September 2016	15 April 2019	540.000	498.000	498.000
FR0061	28 Februari 2017	15 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0063	7 November 2017	15 Mei 2023	500.000	446.090	446.090
FR0066	13 September 2016	15 Mei 2018	539.000	489.000	489.000
FR0053	9 September 2016	15 Juli 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	6 September 2016	15 Juli 2021	450.000	437.025	437.025
FR0053	28 Februari 2017	15 Juli 2021	440.000	382.690	382.690
FR0034	6 September 2016	15 Juni 2021	300.000	344.315	344.315
FR0048	6 September 2016	15 September 2018	100.000	98.570	98.570
			4.786.000	4.390.173	4.390.173
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD240818364S	21 Desember 2017	5 Januari 2018	2.000.000	2.021.328	2.024.388
IDSD090318182S	5 Desember 2017	5 Februari 2018	500.000	443.495	445.161
IDSD160318182S	30 November 2017	28 Februari 2018	500.000	442.923	444.944
IDSD060418273S	5 November 2017	5 Maret 2018	500.000	440.638	442.325
IDSD290618277S	30 November 2017	30 Mei 2018	500.000	436.495	438.637
			4.000.000	3.784.879	3.795.455

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2017				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
Pihak ketiga (lanjutan)					
Dolar Amerika Serikat					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	6 Desember 2017	6 Juni 2018	474.863	444.804	445.966
RI0320	6 Desember 2017	6 September 2018	367.679	339.188	340.109
RI0319	6 Desember 2017	6 September 2018	349.363	339.188	340.109
RI0521	11 Desember 2017	9 November 2018	788.272	678.375	679.929
RI0422	11 Desember 2017	9 November 2018	818.799	678.375	679.929
			2.798.976	2.479.930	2.486.042
			11.584.976	10.654.982	10.671.670
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
Non Bank					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	29 Juni 2015	15 April 2019	480.000	466.545	474.927
FR0069	20 Maret 2015	15 April 2019	1.000.000	972.093	990.087
			1.480.000	1.438.638	1.465.014
Total			**13.064.976**	**12.093.620**	**12.136.684**

	31 Desember 2016				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	18 Mei 2015	15 April 2019	571.000	500.047	500.047
FR0069	21 Mei 2015	15 April 2019	568.000	499.714	499.714
FR0069	9 September 2016	15 April 2019	540.000	498.000	498.000
FR0060	15 September 2016	15 April 2017	615.000	574.000	574.000
ORI011	14 September 2016	15 Oktober 2017	718.000	670.000	670.000
FR0066	13 September 2016	15 Mei 2018	539.000	489.000	489.000
FR0053	9 September 2016	15 Juli 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	6 September 2016	15 Juli 2021	450.000	437.025	437.025
FR0034	6 September 2016	15 Juni 2021	300.000	344.315	344.315
FR0048	6 September 2016	15 September 2018	100.000	98.570	98.570
			4.817.000	4.500.671	4.500.671
Dolar Amerika Serikat					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0028	16 Maret 2015	15 Juli 2017	670.000	538.900	538.900
FR0028	26 Maret 2015	15 Juli 2017	166.000	134.725	134.725
FR0053 & FR0061	26 Februari 2015	24 Februari 2017	802.345	673.625	673.625
			1.638.345	1.347.250	1.347.250
			6.455.345	5.847.921	5.847.921
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
Non Bank					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	29 Juni 2015	15 April 2019	480.000	466.545	471.361
FR0069	20 Maret 2015	15 April 2019	1.000.000	972.093	983.116
			1.480.000	1.438.638	1.454.477
Total			**7.935.345**	**7.286.559**	**7.302.398**

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI dan Entitas Anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rupiah			
Obligasi Berkelanjutan I BRI			
Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.078, Rp2.091 dan Rp3.358 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016	1.398.564	2.321.788	2.321.811
Tahap II Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.435, Rp2.125 dan Rp2.430 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016	3.662.611	3.839.875	4.647.570
Tahap III Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp585, Rp1.372 dan Rp2.508 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016	3.068.194	3.069.111	4.281.750
Obligasi Berkelanjutan II BRI			
Tahap I Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.411, Rp4.116 dan Rp5.466 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016	3.932.181	3.927.592	4.544.019
Tahap II Tahun 2017 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.786 dan Rp2.579 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	3.947.236	5.076.914	-
Tahap III Tahun 2017 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.695 dan Rp3.293 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	5.128.304	5.126.187	-
Tahap IV Tahun 2018 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp2.099 pada tanggal 31 Desember 2018	2.430.992	-	-
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.397 dan Rp2.035 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	479.194	477.808	-
Medium-Term Notes (MTN)			
Tahap I Tahun 2014 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp191 pada tanggal 31 Desember 2016	-	-	359.809
Tahap I Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp992 pada tanggal 31 Desember 2016	-	-	1.924.008
	24.047.276	23.839.275	18.078.967

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Dolar Amerika Serikat			
Obligasi BRI setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp4.231 dan 21.055 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	-	6.780.383	6.721.814
Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp47.060 pada 31 Desember 2018	7.142.940	-	-
Total	**31.190.216**	**30.619.658**	**24.800.781**

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp14.041, Rp23.830 dan Rp22.526.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI

Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 19 Januari 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.650.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp808.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.018.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.823.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 4 Mei 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI (lanjutan)

Pada tanggal 4 Mei 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.350.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.212.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.437.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp701.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Obligasi Berkelanjutan I BRI memperoleh *rating* idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri A, dan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp655.000, Rp925.000, Rp808.000, dan Rp1.212.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 2 Desember 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 12 April 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 22 Februari 2018, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.442.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.837.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Mei 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Obligasi Berkelanjutan II BRI memperoleh *rating* idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A dan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp616.000 dan Rp1.131.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

c) Obligasi I BRI Agro

Pada tanggal 7 Juli 2017, setelah menerima Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK No. S-348/D.04/2017 tertanggal 22 Juni 2017, BRI Agro menerbitkan Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp261.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp239.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2022.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Oktober 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Obligasi I BRI Agro memperoleh *rating* idAA dari Pefindo. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi I BRI Agro tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

d) *Medium-Term Notes* (MTN)

MTN Tahun 2014

Pada tanggal 10 Oktober 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap I Tahun 2014 dengan nilai pokok MTN sebesar Rp720.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok MTN sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2015.
- Seri B: Nilai pokok MTN sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Seri C: Nilai pokok MTN sebesar Rp360.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2017.

Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 10 Januari 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan *rating* AAA(idn) dan F1+(idn).

Pada tanggal 24 Desember 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap II Tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp520.000 untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga tetap 8,90% per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 Maret 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan *rating* AAA(idn) dan F1+(idn).

Pada tanggal 31 Desember 2016, MTN BRI Tahap I memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

MTN Tahap I Tahun 2014 dan MTN Tahap II Tahun 2014 dengan total nilai pokok masing-masing sebesar Rp720.000 dan Rp520.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

MTN Tahun 2016

Pada tanggal 16 September 2016, BRI menerbitkan MTN Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp1.925.000 untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 21 September 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% per tahun. Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 Desember 2016. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* AAA(idn).

Pada tanggal 31 Desember 2016, MTN BRI Tahap I Tahun 2016 memperoleh peringkat AAA(idn) dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

d) *Medium-Term Notes* (MTN) (lanjutan)

MTN Tahun 2016 (lanjutan)

Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

MTN Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp1.925.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

e) Obligasi BRI

Pada tanggal 28 Maret 2013, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI tahun 2013 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tingkat bunga tetap 2,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,196% setara dengan ASD495.980.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2013. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa3 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Obligasi BRI tahun 2013 memperoleh peringkat Baa3 dan BBB- dari Fitch dan Moody's.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Obligasi BRI tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

f) *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)*

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI tahun 2018 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited (*SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tingkat bunga tetap 4,63% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,696% setara dengan ASD498.400.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Januari 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, *Senior Unsecured Notes Due* 2023 (Global Bond BRI) tahun 2018 memperoleh peringkat Baa3 dan BBB- dari Fitch dan Moody's.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Pihak ketiga			
Rupiah			
Bank Indonesia			
Pinjaman likuiditas	15.910	15.890	15.890
Pinjaman lainnya	12.618	12.644	12.307
	28.528	28.534	28.197
Mata uang asing			
Pinjaman dari China Development Bank Corporation setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	13.061.900	13.402.803	13.047.548
Pinjaman Sindikasi *Club Loan* setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	12.096.414	7.394.230	7.300.061
Pinjaman dari Bilateral	1.800.666	684.214	417.508
Pinjaman dari BNP Paribas setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	728.151	782.365	-
Pinjaman Sindikasi *Club Deal* setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	-	-	3.725.183
Pinjaman lainnya	12.287.175	7.110.863	10.389.673
	39.974.306	29.374.475	34.879.973
	40.002.834	29.403.009	34.908.170
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	400.000	-	-
Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.000	-	-
Pinjaman dari PT Bahana Artha Ventura	3.902	4.227	4.552
Pinjaman dari PT Angkasa Pura II (Persero)	693	1.458	958
Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	-	100.000
	454.595	5.685	105.510
Total	**40.457.429**	**29.408.694**	**35.013.680**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Pihak ketiga			
Rupiah			
≤ 1 bulan	85	85	-
> 1 bulan - 3 bulan	-	1.294	515
> 3 bulan - 1 tahun	6.381	6.545	7.573
> 1 tahun - 5 tahun	8.136	7.966	7.802
> 5 tahun	13.926	12.644	12.307
	28.528	28.534	28.197
Mata uang asing			
≤ 1 bulan	830.193	679.742	320.647
> 1 bulan - 3 bulan	3.637.058	743.333	6.201.529
> 3 bulan - 1 tahun	8.542.091	6.372.001	7.996.715
> 1 tahun - 5 tahun	13.174.913	7.394.230	7.313.534
> 5 tahun	13.790.051	14.185.169	13.047.548
	39.974.306	29.374.475	34.879.973
	40.002.834	29.403.009	34.908.170
Pihak berelasi (Catatan 44)			
Rupiah			
≤ 1 bulan	50.000	-	-
> 3 bulan - 1 tahun	400.000	-	100.000
> 1 tahun - 5 tahun	4.595	5.685	5.510
	454.595	5.685	105.510
Total	**40.457.429**	**29.408.694**	**35.013.680**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk periode tiga bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 0,02%.

b) Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pinjaman kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan fasilitas pembiayaan Mudharabah yang diperoleh BRISyariah (entitas anak) pada tanggal 14 Desember 2012 untuk modal kerja pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pembiayaan tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 dan telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya. Porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 63,46% untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan 36,54% untuk BRISyariah.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

c) Pinjaman Sindikasi *Club Deal*

Pada tanggal 12 September 2014, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Club Deal* dengan total pinjaman sebesar ASD370.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh BNP Paribas cabang Singapura (agent), yang terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD320.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD60.000.000,
   - Wells Fargo Bank, National Association sebesar ASD60.000.000,
   - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD50.000.000,
   - BNP Paribas sebesar ASD50.000.000,
   - DBS Bank Ltd. sebesar ASD50.000.000, dan
   - United Overseas Bank Limited sebesar ASD50.000.000.

b. Fasilitas B sebesar ASD50.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini hanya dibiayai oleh Commerzbank Aktiengesellschaft.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan ke-3 (tiga) sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi.

Pinjaman sindikasi ini memiliki jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 12 September 2017. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

BRI telah melakukan pembayaran sebagian pinjaman masing-masing sebesar ASD80.000.000 (angka penuh) dan ASD12.500.000 (angka penuh) untuk Fasilitas A dan B pada tanggal 30 September 2015.

BRI telah melunasi sisa pinjaman masing-masing sebesar ASD240.000.000 (angka penuh) dan ASD37.500.000 (angka penuh) untuk Fasilitas A dan B pada tanggal 12 September 2017.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman Sindikasi *Club Loan*

Pada tanggal 30 September 2015, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Club Loan* dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (agent), yang terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Bank of America N.A. sebesar ASD50.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
   - The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar ASD50.000.000,
   - Westpac Banking Corporation sebesar ASD25.000.000,
   - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
   - BNP Paribas sebesar ASD20.000.000,
   - CTBC Bank Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000,
   - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000, dan
   - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000.

b. Fasilitas B sebesar ASD155.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
   - BNP Paribas sebesar ASD30.000.000,
   - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
   - DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000,
   - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000,
   - Westpac Banking Corporation sebesar ASD15.000.000.

c. Fasilitas C sebesar ASD70.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - CTBC Bank Co., Ltd. sebesar ASD30.000.000,
   - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD10.000.000,
   - DBS Bank Ltd. sebesar ASD10.000.000,
   - United Overseas Bank Limited sebesar ASD10.000.000, dan
   - Westpac Banking Corporation sebesar ASD10.000.000.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile*. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman Sindikasi *Club Loan* (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal 19 Desember 2018, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Club Loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (agent), yang terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah,
   - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
   - Commerzbank AG, sebesar ASD20.000.000,
   - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD10.000.000,
   - PT Bank HSBC Indonesia, sebesar ASD10.000.000,
   - Mizuho Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD55.000.000,
   - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000,
   - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD22.500.000,
   - Wells Fargo Bank, N.A., cabang London sebesar ASD52.500.000.

b. Fasilitas B sebesar ASD235.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Cathay United Bank, sebesar ASD30.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD10.000.000,
   - Commerzbank AG, sebesar ASD30.000.000,
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD30.000.000,
   - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD20.000.000,
   - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
   - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD32.500.000,
   - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD32.500.000.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman Sindikasi *Club Loan* (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2015, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Club Loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (agent), yang terbagi atas (lanjutan):

c. Fasilitas C sebesar ASD265.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - Cathay United Bank, sebesar ASD20.000.000,
   - Citibank, N.A., cabang Hong Kong sebesar ASD20.000.000,
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD36.000.000,
   - DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000,
   - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
   - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
   - Standard Chartered Bank, cabang Singapura ASD63.500.000,
   - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD25.000.000,
   - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD20.500.000

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile*. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

e) Pinjaman dari China Development Bank Corporation

Pada tanggal 16 September 2015, BRI menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari China Development Bank Corporation untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang serta transaksi lintas batas antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas, yaitu:

- Fasilitas Tranche A senilai ASD700.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan penarikan pertama pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar ASD223.953.383 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar ASD476.046.617 (angka penuh).
- Fasilitas Tranche B senilai RMB1.906.080.000 (ekuivalen ASD300.000.000) (angka penuh), dengan suku bunga SHIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan penarikan pertama pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar RMB609.818.661 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar RMB1.296.261.339 (angka penuh).

Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas Tranche A, jumlah angsuran pokok adalah sebesar ASD46.666.667 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 hingga jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas Tranche B, jumlah angsuran pokok adalah sebesar RMB127.072.000 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 hingga jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

e) Pinjaman dari China Development Bank Corporation (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio modal inti (Tier 1) minimum 6%,
- Rasio modal inti utama (Core Tier 1) minimum 5%,
- Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimum 6,5%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%,
- Rasio *Return On Assets* (ROA) minimum 0,6%.

f) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, BRI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECA) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRIsat yang dilakukan oleh Arianespace Perancis. Pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas, yaitu:
- Fasilitas Tranche Banque Publique d'Investissement (BPI) senilai ASD49.961.501,23 (angka penuh), dengan suku bunga tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Fasilitas Tranche Hermes senilai ASD9.901.308,77 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas Tranche BPI, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.767 (angka penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas Tranche Hermes, jumlah angsuran pokok adalah sebesar ASD660.087 (angka penuh) dimulai pada tanggal 5 Februari 2018 hingga jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

g) Pinjaman bilateral

Pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Pada tanggal 24 Februari 2015, yang kemudian diubah pada tanggal 15 Desember 2015, BRI dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI. Perjanjian fasilitas tersebut maksimum bernilai ASD100.000.000 (angka penuh) dan telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 17 Desember 2015. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar ICE LIBOR 1 (satu) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 19 Januari 2016.

Pada tanggal 19 Juni 2015, BRI Finance (entitas anak) dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD1.000.000 (angka penuh) untuk pembiayaan *Cross Currency Swap*. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin 0,50% per tahun yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 21 Juni 2017.

Pinjaman dari Emirates NBD Bank

Pada tanggal 7 April 2016, BRI (cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD10.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar tertentu per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 30 Maret 2017.

Pada tanggal 14 November 2017, BRI (cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD50.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2018.

Pada tanggal 28 Agustus 2018, BRI (cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD50.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2019.

Pada tanggal 11 Oktober 2018, BRI (cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD25.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2019.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

g) Pinjaman bilateral (lanjutan)

Pinjaman dari United Overseas Bank

Pada tanggal 12 Desember 2016, BRI (cabang Singapura) dan United Overseas Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD20.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 13 Maret 2017.

Pinjaman dari Bank of America

Pada tanggal 2 Desember 2018, BRI (cabang Singapura) dan Bank of America menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD50.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 23 November 2019.

h) Pinjaman lainnya

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga						
Rupiah						
Bank Indonesia		12.618		12.644		12.307
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat						
Bank of Montreal	325.000.000	4.673.500	220.000.000	2.984.850	210.000.000	2.829.225
Bank of America, N.A.	150.000.000	2.157.000	75.000.000	1.017.562	36.875.880	496.810
Wells Fargo Bank, N.A.	100.000.000	1.438.000	25.999.776	339.188		-
United Overseas Bank Limited	75.000.000	1.078.500		-		-
Citibank, N.A	50.000.000	719.000	75.000.000	1.017.562	75.000.000	1.010.437
CoBank	50.000.000	719.000		-		-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	32.732.486	470.693	24.511.666	332.562	76.004.562	1.023.971
The Bank of New York Mellon	25.000.000	359.500	65.000.000	881.888	90.000.000	1.212.525
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	22.658.032	325.823	10.000.000	135.600		-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	21.147.497	304.101		-	21.900.810	295.059
Standard Chartered Bank		-	25.000.000	339.188	100.000.000	1.347.250
Commerzbank, A.G.		-		-	60.000.000	808.350
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation		-		-	50.000.000	673.625
National Bank of Abu Dhabi		-		-	25.000.000	336.813
PT Bank BNP Paribas Indonesia		-		-	19.982.976	269.221
		12.245.117		7.048.400		10.303.286

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

h) Pinjaman lainnya (lanjutan)

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)						
Mata uang asing (lanjutan)						
Euro Eropa						
CTBC Bank Co., Ltd.	2.558.176	42.058	2.864.858	46.514	3.104.913	44.015
Commerzbank, A.G.		-	982.320	15.949	2.989.067	42.372
		42.058		62.463		86.387
		12.287.175		7.110.863		10.389.673
Total		**12.299.793**		**7.123.507**		**10.401.980**

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau EURIBOR ditambah marjin tertentu, termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Bank dan Entitas Anak telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) Rincian Estimasi Kerugian atas Transaksi Komitmen dan Kontinjensi yang Mempunyai Risiko Kredit:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Rupiah			
Garansi yang diterbitkan	1.222	2.134	895

b) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Rupiah			
Saldo awal tahun	2.134	895	1.242
(Pembalikan)/penyisihan beban estimasi kerugian selama tahun berjalan	(912)	1.239	(347)
Saldo akhir	1.222	2.134	895

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan):

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp1.222, Rp2.134 dan Rp895 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut telah memadai.

c) Kolektibilitas Bank Garansi yang diterbitkan dan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor pada Rekening Administratif dikategorikan ”Lancar” (Catatan 2ao dan 43):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga						
Rupiah						
Garansi yang diterbitkan		11.344.155		5.622.512		4.342.053
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.149.214		719.945		514.596
		12.493.369		6.342.457		4.856.649
Mata uang asing						
Garansi yang diterbitkan						
Dolar Amerika Serikat	871.820.691	12.536.782	783.830.900	10.634.626	440.361.405	5.932.769
Euro Eropa	17.613.512	289.578	15.756.226	255.821	16.835.180	238.652
Dolar Australia	50.909	517		-	676.419	6.577
Riyal Arab Saudi		-		-	1.000.000	3.592
		12.826.877		10.890.447		6.181.590
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor						
Dolar Amerika Serikat	122.061.543	1.755.245	155.008.887	2.103.083	107.112.073	1.443.067
Euro Eropa	32.483.692	534.053	20.769.936	337.225	7.789.354	110.420
Renminbi	60.910.689	127.338	2.400.000	5.001	2.646.926	5.133
Yen Jepang	138.769.250	18.126	57.180.643	6.891	45.373.091	5.221
Pound Sterling Inggris	827.200	15.147	511.882	9.381	342.912	5.677
Dolar Singapura	532.684	5.622	588.866	5.980	313.839	2.922
Dolar Australia	198.000	2.012		-		-
Franc Swiss	55.140	805	18.380	255		-
		2.458.348		2.467.816		1.572.440
		15.285.225		13.358.263		7.754.030
		27.778.594		19.700.720		12.610.679

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c) Kolektibilitas Bank Garansi yang diterbitkan dan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor pada Rekening Administratif dikategorikan ”Lancar” (Catatan 2ao dan 43) (lanjutan):

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44)						
Rupiah						
Garansi yang diterbitkan		8.266.656		10.411.205		7.637.064
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.204.545		919.438		571.900
		9.471.201		11.330.643		8.208.964
Mata uang asing						
Garansi yang diterbitkan						
Dolar Amerika Serikat	800.687.150	11.513.881	479.169.690	6.501.135	394.079.942	5.309.242
Yen Jepang	3.160.126.352	412.776	324.000.000	39.047	74.828.897	8.610
Ringgit Malaysia	87.500.000	304.219	8.500.000	28.493	8.500.000	25.527
Baht Thailand	348.208.000	154.472		-		-
Euro Eropa	3.036.383	49.920	32.281.032	524.122	71.004.683	1.006.546
Dolar Kanada	1.240.000	13.095	1.240.000	13.419	1.240.000	12.383
		12.448.363		7.106.216		6.362.308
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor						
Dolar Amerika Serikat	162.569.130	2.337.744	239.833.977	3.253.948	334.073.051	4.500.799
Euro Eropa	77.746.394	1.278.202	89.256.297	1.449.185	63.038.569	893.620
Pound Sterling Inggris	7.603.524	139.232	6.038.100	110.652	5.307.740	87.870
Yen Jepang	943.002.510	123.175	374.485.163	45.131	3.406.896.610	392.015
Dolar Singapura	155.840	1.645	182.613	1.854	266.951	2.486
Renminbi	400.000	836		-	2.798.000	5.426
Franc Swiss	51.374	750		-		-
Dolar Australia		-	1.199.000	12.702		-
		3.881.584		4.873.472		5.882.216
		16.329.947		11.979.688		12.244.524
		25.801.148		23.310.331		20.453.488
Total		**53.579.742**		**43.011.051**		**33.064.167**

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Bonus dan Insentif	7.405.332	7.962.072	5.889.022
Cadangan cuti besar (Catatan 42e)	1.849.533	1.563.223	1.352.409
Program pemutusan hubungan kerja (Catatan 42d)	1.404.235	1.349.689	1.283.544
Cadangan penghargaan tanda jasa (Catatan 42e)	1.130.266	1.076.018	954.955
Program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 42e)	-	243.259	-
Total	**11.789.366**	**12.194.261**	**9.479.930**

29. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Pihak ketiga			
Rupiah			
Liabilitas manfaat polis masa depan	5.233.977	4.823.808	3.764.582
Dana subsidi kemenpupera	1.908.918	1.291.497	692.560
Utang bunga	1.540.041	1.311.391	1.025.594
Liabilitas kontrak investasi	1.122.086	699.564	401.903
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 45b)	1.060.301	971.354	613.720
Liabilitas kartu kredit	335.634	151.406	88.063
Pendapatan diterima di muka	334.630	64.590	92.768
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu (Catatan 2z)	291.935	669.194	758.697
Premi yang belum merupakan pendapatan	151.125	136.658	98.374
Estimasi liabilitas klaim	87.315	91.697	91.135
Dana syirkah temporer	78.673	63.967	52.550
Bagi hasil yang masih harus dibayar	57.896	35.683	34.991
Utang reasuransi	31.687	20.481	9.761
Cadangan pajak hadiah simpedes	25.052	24.222	21.756
Setoran jaminan	17.628	18.476	14.343
Lain-lain	2.111.304	2.468.099	2.011.747
	14.388.202	12.842.087	9.772.544
Mata uang asing			
Utang bunga	473.606	327.659	249.908
Pendapatan diterima di muka	202.451	164.541	148.591
Lain-lain	275.528	460.226	327.761
	951.585	952.426	726.260
Total	**15.339.787**	**13.794.513**	**10.498.804**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

30. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Rupiah			
Sukuk *mudharabah* subordinasi I	973.717	972.065	973.039
Pinjaman *two-step loan*	3.609	14.385	35.471
Obligasi Subordinasi III	496.189	-	-
	1.473.515	986.450	1.008.510

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I

Pada tanggal 17 November 2016, BRISyariah menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dengan pendapatan bagi hasil, dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari gross revenue tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Pada saat diterbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi I ini diperingkat oleh Fitch dengan peringkat A+(Idn).

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi memperoleh peringkat A+(Idn) dari Fitch. Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pembatasan dan kewajiban BRISyariah tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya BRISyariah, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.
- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik BRISyariah kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik BRISyariah berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan BRISyariah atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh BRISyariah dari pihak ketiga yang bukan terafiliasinya dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

30. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

b. Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United States Agency for International Development (USAID) dan Islamic Development Bank (IDB). Tingkat bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan masing-masing perjanjian dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Tingkat suku bunga rata-rata untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 2,47%, 4,06% dan 4,27% untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

c. Obligasi Subordinasi III tahun 2018

Pada tanggal 27 Juni 2018, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi III tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,70% per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Bunga Obligasi Subordinasi III tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 26 Juni 2018. Pada saat diterbitkan Obligasi Subordinasi III tahun 2018 ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* AA.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Obligasi Subordinasi III tahun 2018 mendapatkan peringkat AA dari Pefindo.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rupiah			
≤ 1 bulan	-	-	-
> 3 bulan - 1 tahun	-	10.312	-
> 1 tahun - 5 tahun	-	-	30.935
> 5 tahun	1.473.515	976.138	977.575
Total	**1.473.515**	**986.450**	**1.008.510**

31. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018			
	Total Lembar Saham	**Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)**	**Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)**	**Persentase Kepemilikan Saham**
Modal Dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		**15.000.000.000.000**	**100,00%**

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2018			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A Dwiwarna				
Negara Republik Indonesia	1	50	50	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Direksi:				
- Sis Apik Wijayanto	1.328.700	50	66.435.000	0,00
- Mohammad Irfan	698.700	50	34.935.000	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	585.000	50	29.250.000	0,00
- Kuswiyoto	528.700	50	26.435.000	0,00
- Haru Koesmahargyo	528.700	50	26.435.000	0,00
- Priyastomo	528.700	50	26.435.000	0,00
- Suprajarto	466.100	50	23.305.000	0,00
- Indra Utoyo	419.500	50	20.975.000	0,00
- Osbal Saragi Rumahorbo	410.500	50	20.525.000	0,00
- R. Sophia Alizsa	142.100	50	7.105.000	0,00
- Handayani	106.600	50	5.330.000	0,00
Masyarakat	52.231.476.700	50	2.611.573.835.000	42,35
	122.237.220.000		**6.111.861.000.000**	
Saham treasuri (Catatan 1d)	1.108.590.000		55.429.500.000	0,90
Total	**123.345.810.000**		**6.167.290.500.000**	**100,00%**

	31 Desember 2017			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		**15.000.000.000.000**	**100,00%**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A Dwiwarna				
Negara Republik Indonesia	1	50	50	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Direksi:				
- Susy Liestiowaty	2.900.000	50	145.000.000	0,00
- Sis Apik Wijayanto	700.000	50	35.000.000	0,00
- Mohammad Irfan	170.000	50	8.500.000	0,00
- Donsuwan Simatupang	142.500	50	7.125.000	0,00
- R. Sophia Alizsa	25.000	50	1.250.000	0,00
Masyarakat	52.233.282.500	50	2.611.664.125.000	42,35
	122.237.220.000		**6.111.861.000.000**	
Saham treasuri (Catatan 1d)	1.108.590.000		55.429.500.000	0,90
Total	**123.345.810.000**		**6.167.290.500.000**	**100,00%**

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2016			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B	59.999.999.999	250	14.999.999.999.750	100,00
Total	**60.000.000.000**		**15.000.000.000.000**	**100,00%**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A Dwiwarna				
Negara Republik Indonesia	1	250	250	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	13.999.999.999	250	3.499.999.999.750	56,75
Direksi:				
- Randi Anto	661.000	250	165.250.000	0,00
- Susy Liestiowaty	580.000	250	145.000.000	0,00
- Sis Apik Wijayanto	140.000	250	35.000.000	0,00
- Mohammad Irfan	34.000	250	8.500.000	0,00
- Donsuwan Simatupang	28.500	250	7.125.000	0,00
Masyarakat	10.446.000.500	250	2.611.500.125.000	42,35
	24.447.444.000		**6.111.861.000.000**	
Saham treasuri (Catatan 1d)	221.718.000		55.429.500.000	0,90
Total	**24.669.162.000**		**6.167.290.500.000**	**100,00%**

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5
Agio saham dari IPO	589.762
Eksekusi atas opsi saham	
Tahun 2004	49.514
Tahun 2005	184.859
Tahun 2006	619.376
Tahun 2007	140.960
Tahun 2008	29.013
Tahun 2009	14.367
Tahun 2010	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2018	(81.195)
Total	**2.692.663**

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah", Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun "Tambahan Modal Disetor" bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003, jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasikan ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (Rupiah penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (Rupiah penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	**589.762**

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Management Stock Option Plan (MSOP)).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pegawai BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham,

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas (lanjutan).

tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

Transaksi entitas sepengendali.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan saham PT BRI Ventura sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f). Berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, PT Danareksa (Persero) telah menjual kepemilikannya atas PT Danareksa Sekuritas sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f)

Transaksi jual beli tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
Danareksa Sekuritas	446.888	366.359	80.529
BRI Ventura	3.090	2.424	666
Jumlah	449.978	368.783	81.195

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York, Hong Kong, Singapura dan Timor Leste) dan entitas anak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong dan Dolar Singapura ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2aj). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

31. EKUITAS (lanjutan)

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 22 Maret 2018, 15 Maret 2017 dan 23 Maret 2016 pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan		
	2017	**2016**	**2015**
Dividen	13.048.441	10.478.309	7.619.322

e. Reklasifikasi Saldo Laba - Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam rangka menjaga struktur permodalannya, BRI telah melakukan reklasifikasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan tujuan) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.093.056. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 pada tanggal 26 September 2016 tentang ”Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum”.

f. Program Saham Bonus

Memperhatikan perkembangan kinerja bisnis BRI serta dalam rangka meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang kepada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Direksi BRI memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi manajemen dan pekerja/*Management and Employee Stock Ownership Program* (MESOP). Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.

Program MESOP akan diselesaikan paling lambat pada 31 Maret 2020 dan akan dibayarkan dengan saham.

Nilai wajar dari MESOP pada saat pemberian (1 Januari 2018) adalah sebesar Rp541.925. Nilai wajar MESOP diamortisasi selama masa vesting dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sedangkan akumulasi alokasi biaya selama periode vesting diakui dalam ekuitas.

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Rupiah			
Kredit yang diberikan			
Mikro	47.356.385	42.392.633	40.946.075
Ritel	38.440.746	34.069.909	29.804.038
Korporasi	7.669.723	9.134.968	8.428.432
Efek-efek			
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
Obligasi Pemerintah	65.336	60.522	18.472
Obligasi	1.675	1.309	11.983
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	58.206
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	12.635

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Rupiah (lanjutan)			
Tersedia untuk Dijual			
Obligasi Pemerintah	3.466.583	2.613.410	2.153.086
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	907.717	1.025.495	384.725
Obligasi	676.706	492.943	134.390
Sertifikat Bank Indonesia	364.142	219.361	424.375
Negotiable Certificate of Deposits	63.055	16.726	-
Medium-Term Notes	13.111	18.648	26.617
Reksadana	2.393	-	-
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			
Obligasi Pemerintah	1.665.214	2.506.018	2.558.389
Obligasi	250.938	282.125	235.228
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	3.294	-	11.425
Negotiable Certificate Deposit	9.645	89.962	34.660
Medium-Term Notes	4.255	23.959	18.008
Sertifikat Bank Indonesia	-	9.350	87.678
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah			
Dimiliki hingga Jatuh Tempo	84.520	65.394	173.129
Tersedia untuk Dijual	15.844	12.626	28.112
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Deposit Facility/*Term Deposit*	320.230	643.369	460.282
Lain-lain	235.160	37.231	183.915
Inter-bank call money	231.157	159.434	155.010
Giro pada Bank Indonesia	100.677	158.770	158.570
Lain-lain	1.607.031	1.282.183	914.898
	103.555.537	95.316.345	87.422.338
Mata uang asing			
Kredit yang diberikan			
Korporasi	2.111.936	2.246.515	1.347.607
Ritel	646.151	264.091	531.801
Efek-efek			
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
Obligasi Pemerintah	3.368	32.300	724
Sertifikat Bank Indonesia	-	205	-
Tersedia untuk Dijual			
Obligasi Pemerintah	817.529	693.803	629.431
Sertifikat Bank Indonesia	58.068	72.824	40.105
Obligasi	20.836	29.677	26.162
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			
Obligasi Pemerintah	652.009	674.298	647.443
Obligasi	37.038	38.129	23.347
Wesel Tagih	-	1.374	57.082
Credit Link Notes	-	-	7.628
Sertifikat Bank Indonesia	-	11.517	7.992

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Mata uang asing (lanjutan)			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Inter-bank call money	132.779	68.768	45.424
Deposit Facility/*Term Deposit*	74.445	158.401	62.019
Lain-lain	119.832	77.659	75.637
Lain-lain	228.830	407.427	454.577
	4.902.821	4.776.988	3.956.979
	108.458.358	100.093.333	91.379.317
Pendapatan syariah diperoleh dari:			
Murabahah	1.480.934	1.507.098	1.533.339
Musyarakah	640.468	528.286	526.506
Lain-lain	1.003.044	783.658	576.832
Total Pendapatan Syariah	3.124.446	2.819.042	2.636.677
Total	**111.582.804**	**102.912.375**	**94.015.994**

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Rupiah			
Deposito berjangka	16.558.159	15.394.210	16.429.029
Tabungan	3.010.436	2.700.285	2.880.441
Giro	2.528.625	2.021.036	1.572.976
Surat berharga yang diterbitkan	2.167.787	1.989.118	1.015.247
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	887.657	509.300	356.224
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	482.089	400.517	496.936
Pinjaman yang diterima	354.594	1.989.118	1.015.247
Lain-lain	2.772.149	868.754	1.437.076
	28.761.496	25.872.338	25.203.176
Mata uang asing			
Deposito berjangka	1.399.085	1.035.328	685.944
Pinjaman yang diterima	1.215.528	1.050.731	1.091.202
Surat berharga yang diterbitkan	210.547	237.413	114.238
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	332.275	176.402	141.315
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	169.382	24.685	22.006
Giro	108.120	80.974	88.276
Tabungan	3.801	3.166	5.717
Lain-lain	341.161	171.654	189.428
	3.779.899	2.780.353	2.338.126
	32.541.395	28.652.691	27.541.302

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Akun ini merupakan beban bunga atas (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Beban syariah terdiri atas:			
Deposito *mudharabah*	1.202.503	1.077.056	990.710
Lain-lain	173.134	164.534	44.792
Total Beban Syariah	1.375.637	1.241.590	1.035.502
Total	**33.917.032**	**29.894.281**	**28.576.804**

34. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban (pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Kredit yang diberikan (Catatan 12)	17.592.892	16.800.820	13.454.979
Piutang dan pembiayaan syariah (Catatan 13)	186.998	202.008	244.267
Piutang Sewa Pembiayaan (Catatan 14)	12.803	(8.713)	995
Total	**17.792.693**	**16.994.115**	**13.700.241**

35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Gaji, upah dan tunjangan	11.787.842	10.455.636	9.293.453
Bonus, insentif dan *tantiem*	5.881.638	6.441.267	5.904.569
Pensiun imbalan pasti (Catatan 42a)	848.359	246.012	513.384
Iuran Jamsostek	695.893	623.454	525.477
Pendidikan dan pelatihan	633.758	557.236	593.654
Cuti besar (Catatan 42e)	463.478	306.843	317.957
Tunjangan kesehatan	425.894	397.363	368.137
Pemutusan hubungan kerja (Catatan 42d)	348.502	342.567	189.899
Pensiun iuran pasti (Catatan 42c)	292.444	257.441	231.801
Program pemeliharaan kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 42e)	141.390	243.259	-
Penghargaan tanda jasa (Catatan 42e)	131.063	157.013	152.480
Lain-lain	773.010	412.867	503.165
Total	**22.423.271**	**20.440.958**	**18.593.976**

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp362.081, Rp92.556 dan Rp74.062 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta Dewan Komisaris adalah sebesar Rp128.603, Rp29.863 dan Rp27.543 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 44).

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN (lanjutan)

Jumlah bonus, insentif dan *tantiem* Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan kunci BRI yang dibayarkan adalah masing-masing sebesar Rp407.604, Rp433.539 dan Rp404.642 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 44).

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Jasa *outsourcing*	3.128.971	3.247.488	2.918.089
Penyusutan aset tetap (Catatan 17)	1.865.317	1.582.751	1.227.754
Sewa	1.712.520	1.589.032	1.764.788
Perbaikan dan pemeliharaan	1.189.443	1.176.969	965.726
Transportasi	869.560	833.997	465.264
Listrik dan air	612.098	601.279	580.366
Peralatan kantor	316.782	302.473	298.711
Percetakan dan benda pos	330.999	379.085	306.174
Komunikasi	155.343	173.226	182.397
Jasa profesional	267.230	163.839	142.640
Instalasi komputer	54.453	70.705	67.588
Penelitian dan pengembangan produk	24.105	20.600	21.367
Lain-lain	3.837.457	3.057.987	3.103.043
Total	**14.364.278**	**13.199.431**	**12.043.907**

37. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Laba penjualan aset tetap	5.741	13.419	7.934
Pendapatan sewa	7.118	9.502	9.833
Distribusi kas kecil likuidasi BRI finance limited, Hong Kong	-	-	1.656
Lain-lain - neto	14.958	193.474	(17.709)
Total	**27.817**	**216.395**	**1.714**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

38. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
BRI (Entitas Induk)			
Pajak penghasilan			
Pasal 29	3.499	470.272	881.207
Entitas Anak			
Pajak penghasilan dan pajak lainnya			
Pasal 21	17.579	14.155	11.598
Pasal 22	53	51	116
Pasal 23	3.276	1.565	1.146
Pasal 25	-	677	6.162
Pasal 26	-	-	157
Pasal 29	88.530	50.485	28.085
Pasal 4 ayat 2	37.213	27.317	23.604
Pajak Pertambahan Nilai	3.683	4.494	4.478
	150.334	98.744	75.346
Total	**153.833**	**569.016**	**956.553**

b) Beban Pajak

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
BRI (Entitas Induk)			
Beban pajak kini dari:			
Tahun berjalan	9.120.880	8.983.257	8.165.498
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	724.829	81.393	466.188
(Manfaat) beban pajak penghasilan tangguhan	(749.620)	(1.183.155)	(943.499)
	9.096.089	7.881.495	7.688.187
Entitas Anak			
Beban pajak kini dari:			
Tahun berjalan	218.841	198.254	151.088
Periode lalu dari hasil Pemeriksaan pajak	12.180	5.091	672
Beban (manfaat) pajak tangguhan	8.098	(106.653)	(78.163)
	239.119	96.692	73.597
Total	**9.335.208**	**7.978.187**	**7.761.784**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim	41.753.694	37.023.236	34.047.035
Bagian laba Entitas Anak	(955.630)	(672.506)	(605.392)
Laba sebelum beban pajak BRI (Entitas Induk)	40.798.064	36.350.730	33.441.643
Perbedaan temporer:			
Cadangan kerugian kredit yang diberikan	1.660.792	4.262.620	3.154.390
Pembentukan penyisihan beban pegawai	731.940	535.764	651.210
Saham bonus	425.332	-	-
Penyusutan aset tetap	178.752	(62.549)	(24.727)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.664	(3.217)	(6.879)
	2.998.480	4.732.618	3.773.994
Perbedaan permanen:			
Humas	301.784	233.789	298.147
Representasi dan sumbangan	180.567	177.116	159.361
Pembinaan jasmani dan rohani	52.800	48.825	46.622
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan tarif final	(1.905)	(6.316)	(7.302)
Bagian laba Entitas Asosiasi	(1.482)	(56)	(18.564)
Lain-lain	1.276.095	3.379.578	3.133.588
	1.807.859	3.832.936	3.611.852
Taksiran penghasilan kena pajak	**45.604.403**	**44.916.284**	**40.827.489**
Entitas Induk			
Beban pajak-kini	(9.120.880)	(8.983.257)	(8.165.498)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	9.094.487	8.487.061	7.263.072
Kredit pajak luar negeri	22.894	25.924	21.219
Estimasi tagihan (utang) pajak penghasilan - Pasal 29	(3.499)	(470.272)	(881.207)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2018 untuk masa Januari dan Februari 2019 dan tahun 2017 untuk masa Januari dan Februari 2018 (Catatan 18)	1.371.867	927.453	-

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Entitas Anak			
Beban pajak-kini	(218.841)	(198.254)	(146.475)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan Selama tahun berjalan	257.211	182.608	181.560
Tagihan/(utang) pajak penghasilan - Pasal 29**	**38.370**	**(15.646)**	**35.085**

**) Pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk utang pajak sebesar Rp88.530, pada 31 Desember 2017 termasuk tagihan pajak penghasilan sebesar Rp34.839, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk utang pajak sebesar Rp28.085.

Berdasarkan surat Kepala KPP No. PBK-00002/I/WPJ.19/KP.0403/2019 dan No. PBK-00003/I/WPJ.19/KP.0403/2019 masing-masing pada tanggal 8 Januari 2019, atas permohonan BRI, telah disetujui untuk dipindahbukukan angsuran PPh Pasal 25 masa Desember 2018 sebesar Rp614.804 dan Rp757.062 ke masa Januari dan Februari 2019.

Berdasarkan surat Kepala KPP No. PBK-00005/I/WPJ.19/KP.0403/2018, No. PBK-00006/I/WPJ.19/KP.0403/2018 dan No. PBK-00004/I/WPJ.19/KP.0403/2018 masing-masing pada tanggal 5 Januari 2018, atas permohonan BRI, telah disetujui untuk dipindahbukukan angsuran PPh Pasal 25 masa Januari 2017 dan Februari 2017 sebesar Rp618.302 ke masa Januari 2018 dan pemindahbukuan angsuran PPh pasal 25 masa Maret 2017 sebesar Rp309.151 ke masa Februari 2018.

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim	41.753.694	37.023.236	34.047.035
Bagian laba entitas anak	(955.630)	(672.506)	(605.392)
Laba sebelum beban pajak BRI (Entitas Induk)	40.798.064	36.350.730	33.441.643
Beban pajak dengan tarif pajak 20%	8.159.613	7.270.146	6.688.329
Pengaruh pajak atas beda tetap	361.571	766.587	722.370
Pengaruh perbedaan penggunaan tarif dalam perhitungan pajak tangguhan	(149.924)	(236.631)	(188.700)
Koreksi hasil pemeriksaan pajak penghasilan tahun sebelumnya	724.829	81.393	466.188
Beban pajak - Entitas Induk	9.096.089	7.881.495	7.688.187
Beban pajak - Entitas Anak	239.119	96.692	73.597
	9.335.208	**7.978.187**	**7.761.784**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2017 dan 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan BRI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sampai dengan tanggal 30 Januari 2019, BRI belum melaporkan SPT tahun 2018 kepada KPP. Namun dasar pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2018 akan sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tersebut diatas.

Pemeriksaan tahun pajak 2010

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp1.484.041, yang telah disetujui oleh BRI sebesar Rp34.529. Manajemen berpendapat bahwa kekurangan pembayaran pajak yang masih belum disetujui oleh BRI perlakuannya sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 27 Februari 2013, BRI telah mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012. Untuk memenuhi syarat pengajuan keberatan tersebut, BRI telah membayar deposit sebesar Rp1.449.512 ke Kas Negara pada tanggal 28 Februari 2013. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-229/WPJ.19/2014 tanggal 18 Februari 2014, permohonan tersebut ditolak, kemudian pada tanggal 12 Mei 2014, BRI mengajukan permohonan banding kepada Badan Pengadilan Pajak.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah terjadi pada tanggal 17 November 2014 dan 8 Desember 2014, dimana BRI mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa perpajakan tersebut ditingkat banding, maka manajemen BRI berpendapat bahwa pembentukan biaya atas kemungkinan kerugian dari proses pengajuan permohonan banding tersebut sampai dengan putusan banding sebesar Rp724.756, yang telah dibebankan pada tahun 2013 sebesar Rp483.171 dan pada tahun 2014 sebesar Rp241.585, sisanya sebesar Rp724.756 masih dicatat dalam akun aset lain-lain - uang muka pajak (Catatan 18).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-63381/PP/M.XVA/15/2015 yang diucapkan oleh Majelis Hakim dalam Sidang Terbuka untuk Umum tanggal 24 Agustus 2015, Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan banding BRI atas keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-229/WPJ.19/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00003.PPH/WPJ.19/KP.0403/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. 80006/093-0006-2016 tanggal 8 Januari 2016, BRI telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp1.448.498 setelah memperhitungkan pajak terhutang yang dimiliki BRI sebesar Rp1.013, pada tanggal 24 Februari 2016.

Pajak atas Penilaian Kembali Aset Tetap

BRI melalui surat No.830-DIR/AMK/11/2015 tanggal 30 November 2015 mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar “Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan tahun 2015 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aset tetap“.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Pajak atas Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah diubah dengan PMK No.233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015, permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa penurunan tarif pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%. Sehubungan dengan hal tersebut BRI melakukan estimasi atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan, dan kemudian atas kenaikan nilai wajar dibanding dengan nilai buku aset tetap yang ada, dilakukan pembayaran pajak sebesar Rp245.357 pada tanggal 2 Desember 2015, karena belum mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Pada tanggal 1 April 2016, BRI melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah dimana terdapat kenaikan nilai tercatat sebesar Rp14.315.527 dan dikenakan pajak final sebesar Rp490.835. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-479/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Pemeriksaan tahun pajak 2011

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00025/207/11/093/16 tanggal 2 Juni 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp3.284 serta dendanya sebesar Rp443 dan telah ditagih dengan Surat Tagihan Pajak No. 00025/107/11/093/16 tanggal 2 Juni 2016 yang telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/201/11/093/16 tanggal 30 Mei 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp49.656 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00005/203/11/093/16 tanggal 1 Juni 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp8.015 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00005/206/11/093/16 tanggal 30 Mei 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp466.188 dan telah disetujui oleh BRI.

Surat Tagihan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 90002/106/14/093/15 tanggal 29 Desember 2015, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp1.603.100, serta sanksi administrasi sebesar Rp256.496, sehubungan dengan koreksi atas saldo Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) minimum Bank Indonesia.

Manajemen berpendapat bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut tidak tepat dan perlakuannya di BRI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 13 Januari 2016, BRI mengajukan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak tersebut. Untuk memenuhi syarat pengajuan pembatalan Surat Tagihan Pajak tersebut, pada tanggal 30 Desember 2015 BRI telah membayar deposit sebesar Rp1.603.100.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Surat Tagihan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-90001/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 1 Februari 2016 "Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak", seluruh permohonan BRI dikabulkan.

Pada tanggal 4 Februari 2016, BRI mengajukan permohonan agar pembatalan Surat Tagihan Pajak sebesar Rp1.603.100 dapat dikompensasikan ke angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Januari dan Februari 2016 masing-masing sebesar Rp800.000 dan Rp803.100.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Pajak No. KEP-00019.PPH/WPJ.19/KP.0403/2016 tanggal 15 Februari 2016 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. 80095/093-0095-2016 tanggal 15 Februari 2016 Direktorat Jenderal Pajak menyetujui permohonan kompensasi yang diajukan BRI.

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00009/206/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran sebesar Rp54.995 serta sanksi administrasinya sebesar Rp26.398 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00009/201/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp32.159 serta sanksi administrasinya sebesar Rp15.436 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00011/203/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp10.313 serta sanksi administrasi sebesar Rp4.950 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00002/204/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.839 serta sanksi administrasinya sebesar Rp1.363 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00081/207/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp109 serta sanksi administrasi sebesar Rp52 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 00077/107/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa sebesar Rp21 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00020/277/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp448 serta sanksi administrasinya sebesar Rp215 dan telah disetujui oleh BRI.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2015

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00006/206/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran sebesar Rp489.749 serta sanksi administrasi sebesar Rp235.080 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/201/15/093/18 dan 00003/243/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp26.353 dan Rp1.167 serta sanksi administrasi sebesar Rp12.650 dan Rp560 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00013/203/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp7.783 serta sanksi administrasi sebesar Rp3.736 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00002/204/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp534 serta sanksi administrasi sebesar Rp256 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00066/207/15/093/18, 00067/207/15/093/18, 00068/207/15/093/18, 00069/207/15/093/18, 00070/207/15/093/18, 00071/207/15/093/18, 00072/207/15/093/18, 00073/207/15/093/18, 00074/207/15/093/18, 00075/207/15/093/18, 00076/207/15/093/18, dan 00077/207/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masing-masing sebesar Rp160 serta sanksi administrasi sebesar Rp77 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 00041/107/15/093/18, 00042/107/15/093/18, 00043/107/15/093/18, 00044/107/15/093/18, 00045/107/15/093/18, 00046/107/15/093/18, 00047/107/15/093/18, 00048/107/15/093/18, 00049/107/15/093/18, 00050/107/15/093/18, 00051/107/15/093/18, dan 00052/107/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp66, Rp46, Rp86, Rp55, Rp73, Rp70, Rp51, Rp67, Rp55, Rp54, Rp43 dan Rp108 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/277/15/093/18 tanggal 17 Desember 2018, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp1.121 serta sanksi administrasi sebesar Rp538 dan telah disetujui oleh BRI.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

c) Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan (beban) manfaat pajak tangguhan BRI adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Entitas Induk			
Pembalikan cadangan kerugian aktiva produktif	415.198	1.065.655	788.598
Pembalikan penyisihan beban pegawai	182.985	133.941	162.803
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	416	(804)	(1.720)
Saham bonus	106.333	-	-
Penyusutan aset tetap	44.688	(15.637)	(6.182)
	749.620	1.183.155	943.499
Entitas Anak	(8.098)	106.653	78.163
Total	**741.522**	**1.289.808**	**1.021.662**

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun “Aset Pajak Tangguhan”) adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017*)**	**2016*)**
Entitas Induk			
Cadangan kerugian aset produktif	3.097.640	2.682.442	1.616.787
Penyisihan beban pegawai	1.426.783	1.243.798	1.109.857
Penyusutan aset tetap	(116.220)	(160.908)	(145.271)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(381.118)	(235.040)	(218.213)
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(388)	(804)	-
Saham bonus	106.333	-	-
(Keuntungan)/Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	639.829	(540.422)	(34.630)
	4.772.859	2.989.066	2.328.530
Entitas Anak	341.794	297.666	211.183
Total	**5.114.653**	**3.286.732**	**2.539.713**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

c) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25%.

Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2019-0140 tanggal 4 Januari 2019 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2019 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2018) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2018-0155 tanggal 5 Januari 2018 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 5 Januari 2018 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2017) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/17-0128 tanggal 5 Januari 2017 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No.X.H.I-2 tanggal 5 Januari 2017 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2016) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah terpenuhi.

39. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis, BRI dituntut untuk mengelola risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) individual dan RMC terintegrasi (konsolidasi dengan entitas anak sebagai komite dalam sistem manajemen risiko BRI yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

Untuk membahas permasalahan operasional bank yang membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat *Operational Risk Management Committee* (ORMC) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko operasional.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI termasuk kegagalan *settlement*. BRI melakukan identifikasi dan mengukur tingkat risiko calon debitur melalui pengembangan Internal *Risk Rating*. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui kebijakan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. BRI menyusun kebijakan manajemen risiko kredit diantaranya tata kelola, pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit pada batasan geografis, dan pengelolaan limit konsentrasi per industri. *Rating* risiko kredit diperbarui secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit selain bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, juga merupakan suatu keharusan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktek di perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI namun tetap menperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh unit kerja bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak saat kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas kredit untuk mencegah terjadinya *Non Performing Loan* (NPL).

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.

BRI senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi penilaian risiko kredit dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengelolaan risiko kredit khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

   Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

   Untuk membahas permasalahan operasional bank yang membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat *Operational Risk Management Committee* (ORMC) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko operasional.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

   Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

	31 Desember 2018		
	Eksposur Maksimum	**Agunan**	**Net Eksposur**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.396.553	9.279.208	117.345

	31 Desember 2017		
	Eksposur Maksimum	**Agunan**	**Net Eksposur**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	17.443.973	567.053

	31 Desember 2016		
	Eksposur Maksimum	**Agunan**	**Net Eksposur**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.557.370	1.576.958	-

Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan properti.
b. *Financial collateral,* berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

   Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans* namun tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans,* tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

   Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

2. Analisa konsentrasi risiko

   a. Sektor geografis

      Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	31 Desember 2018							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	71.120.304	1.922	192	7.431	1.668	3.457	24.468	71.159.442
Giro pada bank lain	10.781.543	1.650	65.200	52.116	320.188	576.506	880.152	12.677.355
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	84.963.140	-	-	-	-	-	2.054.911	87.018.051
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	3.762.256	-	-	-	-	-	-	3.762.256
Tersedia untuk dijual	127.854.025	-	-	-	-	-	2.096.783	129.950.808
Dimiliki hingga jatuh tempo	50.141.326	-	-	-	-	-	430.420	50.571.746
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	23.075.870	17.636	483.019	484.924	544.278	1.855.247	981.716	27.442.690
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	30.273	-	-	-	-	-	-	30.273
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.475.000	-	-	-	-	-	-	1.475.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.396.553	-	-	-	-	-	-	9.396.553
Tagihan derivatif	485.810	-	-	-	-	-	-	485.810
Kredit yang diberikan								
Mikro	23.894.433	27.951.167	47.404.873	38.505.902	60.949.420	92.910.113	-	291.615.908
Ritel	90.791.700	24.112.655	34.851.642	39.769.259	56.360.320	84.182.426	565.961	330.633.963
Korporasi	146.587.491	8.978.283	2.219.943	5.772.684	16.525.026	9.232.656	8.444.203	197.760.286
Piutang dan pembiayaan Syariah	6.722.287	3.232.084	2.109.215	1.982.097	3.025.149	3.107.569	-	20.178.401
Piutang sewa pembiayaan	1.611.880	779.147	79.890	349.894	273.015	316.020	-	3.409.846
Tagihan akseptasi	10.527.697	800.627	74.814	137.690	87.234	14.941	-	11.643.003
Penyertaan saham*)	15.268	-	-	-	-	-	-	15.268
Aset lain-lain**)	4.580.779	1.219.163	338.060	285.825	383.039	1.364.417	603.230	8.774.513
Total	**667.817.635**	**67.094.334**	**87.626.848**	**87.347.822**	**138.469.337**	**193.563.352**	**16.081.844**	**1.258.001.172**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(35.603.931)
Bersih								**1.222.397.241**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	3.797.245	3.166.172	17.088	865.149	450.131	397.906	-	8.693.691
Garansi yang diterbitkan	37.305.912	3.597.330	417.968	516.451	1.767.018	1.281.372	-	44.886.051
Total	**41.103.157**	**6.763.502**	**435.056**	**1.381.600**	**2.217.149**	**1.679.278**	**-**	**53.579.742**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

	31 Desember 2017*)							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	-	-	-	58.155.479
Giro pada bank lain	5.339.375	59	137	1.891	234	8.583	782.233	6.132.512
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	53.140.678	6.587	544	-	-	1.075	2.007.878	55.156.762
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	1.764.033	-	-	-	-	-	-	1.764.033
Tersedia untuk dijual	129.095.450	-	-	-	-	-	1.850.233	130.945.683
Dimiliki hingga jatuh tempo	53.994.290	-	-	-	-	-	235.590	54.229.880
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	8.791.888	518.211	279.121	293.157	459.860	208.924	103.192	10.654.353
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	-	-	-	-	-	-	18.011.026
Tagihan derivatif	162.912	-	-	-	-	-	-	162.912
Kredit yang diberikan								
Mikro	20.361.828	24.638.871	40.371.919	33.385.745	53.269.609	80.822.682	-	252.850.654
Ritel	72.811.460	21.195.987	29.623.872	37.429.335	50.867.566	75.420.193	87.816	287.436.229
Korporasi	130.600.725	11.953.348	2.286.366	4.118.838	13.609.258	8.215.230	7.912.020	178.695.785
Piutang dan pembiayaan Syariah	5.758.078	2.874.036	2.093.955	1.765.856	2.625.028	2.747.916	-	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	1.410.880	435.594	7.486	278.529	244.868	111.626	-	2.488.983
Tagihan akseptasi	4.757.849	542.649	134.108	156.304	102.515	-	-	5.693.425
Penyertaan saham**)	11.718	-	-	-	-	50	-	11.768
Aset lain-lain***)	4.140.508	40.924	31.442	43.516	122.054	351.011	789.667	5.519.122
Total	**571.626.017**	**62.206.266**	**74.828.950**	**77.473.171**	**121.300.992**	**167.887.290**	**13.768.629**	**1.089.091.315**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(30.104.945)
Bersih								**1.058.986.370**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	5.188.328	2.091.479	103.479	403.997	1.093.134	99.502	752	8.980.671
Garansi yang diterbitkan	29.483.331	1.929.418	322.367	411.173	1.099.907	784.184	-	34.030.380
Total	**34.671.659**	**4.020.897**	**425.846**	**815.170**	**2.193.041**	**883.686**	**752**	**43.011.051**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

	31 Desember 2016*)							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	-	-	-	55.635.946
Giro pada bank lain	10.509.038	6.593	1.066	294	262	46.414	717.128	11.280.795
Penempatan pada Bank								
Indonesia dan bank lain	77.234.959	-	-	-	-	3.080	1.010.794	78.248.833
Nilai wajar melalui laba rugi	492.008	-	-	-	-	-	184.224	676.232
Tersedia untuk dijual	67.833.912	-	-	-	-	-	1.679.744	69.513.656
Dimiliki hingga jatuh tempo	61.286.147	-	-	-	-	-	610.723	61.896.870
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	9.556.450	198.567	147.953	960.666	710.207	6.332	-	11.580.175
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.557.370	-	-	-	-	-	-	1.557.370
Tagihan derivatif	103.907	-	-	-	-	-	-	103.907
Kredit yang diberikan								
Mikro	17.333.003	21.577.469	35.655.855	28.925.252	47.381.058	70.929.568	-	221.802.205
Ritel	61.738.137	18.263.167	27.318.709	32.540.023	46.571.908	66.557.034	702	252.989.680
Korporasi	124.221.578	9.842.962	2.157.765	4.257.485	12.058.423	8.262.540	7.878.337	168.679.090
Piutang dan pembiayaan Syariah	5.562.328	3.096.990	1.967.988	1.838.606	2.558.727	2.724.304	-	17.748.943
Piutang sewa pembiayaan	1.107.160	415.637	-	314.227	273.494	89.782	-	2.200.300
Tagihan akseptasi	4.939.982	114.705	78.217	557.509	632	1.538	-	5.692.583
Penyertaan saham**)	11.718	-	-	-	-	50	-	11.768
Aset lain-lain***)	2.771.617	39.280	29.707	33.947	57.933	98.637	275.066	3.306.187
Total	**505.213.694**	**53.555.370**	**67.357.260**	**69.428.009**	**109.612.644**	**148.719.279**	**12.356.718**	**966.242.974**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(22.807.260)
Bersih								**943.435.714**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.313.266	1.303.388	57.293	381.770	463.165	22.270	-	8.541.152
Garansi yang diterbitkan	20.227.433	2.244.394	341.443	573.537	737.002	395.993	3.213	24.523.015
Total	**26.540.699**	**3.547.782**	**398.736**	**955.307**	**1.200.167**	**418.263**	**3.213**	**33.064.167**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

	31 Desember 2018							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	71.159.442	-	-	-	-	-	-	71.159.442
Giro pada bank lain	-	12.677.355	-	-	-	-	-	12.677.355
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	68.341.900	18.676.151	-	-	-	-	-	87.018.051
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	2.122.778	1.404.983	-	9.176	-	21.667	203.650	3.762.254
Tersedia untuk dijual	113.872.520	12.496.819	-	1.991.375	-	1.437.131	152.964	129.950.809
Dimiliki hingga jatuh tempo	45.785.025	2.891.134	-	1.152.895	-	740.805	1.888	50.571.747
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	990.406	-	-	1.869.269	49.654	10.549.548	13.983.813	27.442.690
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	30.273	-	-	-	-	-	-	30.273
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.475.000	-	-	-	-	-	-	1.475.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.723.269	2.673.284	-	-	-	-	-	9.396.553
Tagihan derivatif	-	485.810	-	-	-	-	-	485.810
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	43.637.386	9.557.768	133.762.059	18.812.359	85.846.336	291.615.908
Ritel	-	3.723.543	20.708.920	20.298.614	121.146.436	11.083.004	153.673.446	330.633.963
Korporasi	260.206	794.892	38.704.505	38.026.558	35.599.579	6.298.657	78.075.889	197.760.286
Piutang dan pembiayaan Syariah	1.255	947.488	-	2.567.746	-	118.899	16.543.013	20.178.401
Piutang sewa pembiayaan	-	39.299	96.353	646.133	688.317	811.393	1.128.351	3.409.846
Tagihan akseptasi	1.045.015	-	-	176.210	2.968	16.515	10.402.295	11.643.003
Penyertaan saham**)	-	278	-	-	-	14.990	-	15.268
Aset lain-lain***)	1.855.818	554.185	-	-	-	219.291	6.145.219	8.774.513
Total	**313.662.907**	**57.365.221**	**103.147.164**	**76.295.744**	**291.249.013**	**50.124.259**	**366.156.864**	**1.258.001.172**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(35.603.931)
Bersih								**1.222.397.241**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.493.172	-	-	265.371	5.009	30.421	3.899.718	8.693.691
Garansi yang diterbitkan	21.071.088	1.281	562.020	1.609.874	1.355.784	77.354	20.208.650	44.886.051
Total	**25.564.260**	**1.281**	**562.020**	**1.875.245**	**1.360.793**	**107.775**	**24.108.368**	**53.579.742**

	31 Desember 2017*)							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	-	-	-	58.155.479
Giro pada bank lain	-	6.132.512	-	-	-	-	-	6.132.512
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	45.045.953	10.110.809	-	-	-	-	-	55.156.762

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan):

	31 Desember 2017*)							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset (lanjutan)								
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	579.868	541.586	30.633	-	-	393.071	218.876	1.764.034
Tersedia untuk dijual	117.209.900	10.393.823	-	1.346.737	-	1.792.656	202.566	130.945.682
Dimiliki hingga jatuh tempo	48.884.507	2.618.577	-	2.018.980	-	511.908	195.908	54.229.880
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	18.420	-	-	2.128.717	110.129	28.725	8.368.362	10.654.353
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	16.583.431	1.427.595	-	-	-	-	-	18.011.026
Tagihan derivatif	-	145.928	-	-	-	-	16.984	162.912
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	37.841.570	7.475.754	115.976.898	13.849.550	77.706.882	252.850.654
Ritel	258.751	256.146	15.465.399	18.434.337	107.772.072	10.854.136	134.395.388	287.436.229
Korporasi	443.302	9.833.219	36.276.635	37.863.665	17.498.159	6.142.339	70.638.466	178.695.785
Piutang dan pembiayaan Syariah	404.574	500.946	-	7.016.107	9.511.713	337.966	93.563	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	-	-	8.454	729.517	375.209	281.491	1.094.312	2.488.983
Tagihan akseptasi	1.030.279	-	-	338.662	21.868	-	4.302.616	5.693.425
Penyertaan saham**)	-	1.034	-	-	-	975	9.759	11.768
Aset lain-lain***)	1.930.438	1.056.167	-	-	-	257.640	2.274.878	5.519.123
Total	**293.862.742**	**43.018.342**	**89.622.691**	**77.352.476**	**251.266.048**	**34.450.457**	**299.518.559**	**1.089.091.315**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(30.104.945)
Bersih								**1.058.986.370**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.696.968	-	-	354.114	19.077	-	3.910.512	8.980.671
Garansi yang diterbitkan	16.195.739	640	543.925	245.615	265.164	146.452	16.632.845	34.030.380
Total	**20.892.707**	**640**	**543.925**	**599.729**	**284.241**	**146.452**	**20.543.357**	**43.011.051**

	31 Desember 2016							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	-	-	-	55.635.946
Giro pada bank lain	-	11.280.795	-	-	-	-	-	11.280.795
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	72.792.533	5.456.300	-	-	-	-	-	78.248.833
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	84.746	329.944	-	-	-	18.029	243.513	676.232
Tersedia untuk dijual	60.612.578	4.627.494	-	2.293.191	-	1.633.416	346.977	69.513.656
Dimiliki hingga jatuh tempo	54.759.343	4.674.843	-	1.446.121	-	746.500	270.063	61.896.870

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

   b. Sektor industri (lanjutan)

   Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan):

	31 Desember 2016*)							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset (lanjutan)								
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	272.507	-	-	3.102.788	174.899	22.825	8.007.156	11.580.175
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	925.140	632.230	-	-	-	-	-	1.557.370
Tagihan derivatif	-	91.657	-	-	-	-	12.250	103.907
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	32.354.043	6.532.381	101.384.386	11.236.469	70.294.926	221.802.205
Ritel	348.026	1.270.563	10.146.991	18.459.090	96.606.690	8.672.342	117.485.978	252.989.680
Korporasi	600.926	4.650.036	35.089.990	35.621.255	21.279.907	4.590.913	66.846.063	168.679.090
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	1.455.136	398.661	2.443.509	4.812.794	757.641	7.881.202	17.748.943
Piutang sewa pembiayaan	-	4.607	2.362	1.105.236	-	866.959	221.136	2.200.300
Tagihan akseptasi	428.155	89.740	-	301.789	5.127	632	4.867.140	5.692.583
Penyertaan saham**)	-	1.034	-	-	-	975	9.759	11.768
Aset lain-lain***)	1.501.389	393.192	-	-	-	314.152	1.097.454	3.306.187
Total	**251.279.723**	**34.957.571**	**77.992.047**	**71.305.360**	**224.263.803**	**28.860.853**	**277.583.617**	**966.242.974**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(22.807.260)
Bersih								**943.435.714**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	5.505.442	-	377	226.337	20.707	-	2.788.289	8.541.152
Garansi yang diterbitkan	12.990.267	737	443.271	907.353	195.202	92.565	9.893.620	24.523.015
Total	**18.495.709**	**737**	**443.648**	**1.133.690**	**215.909**	**92.565**	**12.681.909**	**33.064.167**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

   a. Giro pada bank lain

   Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

   b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

   Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

   c. Efek-efek

   Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, seluruh efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan)

d. Piutang sewa pembiayaan

Per tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Mengalami penurunan nilai	96.854	103.445	217.115
Telah jatuh tempo tetapi mengalami penurunan nilai	49.938	110.585	221.851
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	3.263.054	2.274.953	1.761.334
	3.409.846	**2.488.983**	**2.200.300**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(88.000)	(103.500)	(130.000)
Mengalami penurunan nilai	**3.321.846**	**2.385.483**	**2.070.300**

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	243.698.940	12.333.709	11.652.571	9.640.398	277.325.618
Pertanian	76.946.221	1.155.680	2.162.279	6.069.755	86.333.935
Perindustrian	36.324.097	940.481	1.210.062	2.116.775	40.591.415
Jasa dunia usaha	31.212.507	612.823	795.653	4.689.141	37.310.124
Listrik, gas dan air	27.917.041	27.468	55.044	86.307	28.085.860
Konstruksi	30.280.757	354.463	544.635	2.431.610	33.611.465
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	20.294.647	339.506	444.159	1.651.908	22.730.220
Jasa pelayanan sosial	8.679.905	341.862	251.239	507.449	9.780.455
Pertambangan	3.448.521	194.851	84.995	1.054.770	4.783.137
Lain-lain	201.845.650	3.568.705	4.422.858	2.109.823	211.947.036
	680.648.286	19.869.548	21.623.495	30.357.936	752.499.265

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2018				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Mata uang asing					
Perindustrian	26.305.394	11.874	-	4.655.438	30.972.706
Pertanian	17.667.723	-	-	-	17.667.723
Perdagangan, perhotelan dan restoran	8.372.659	-	-	722.878	9.095.537
Listrik, gas dan air	14.588.147	7.615	42.331	108.517	14.746.610
Jasa pelayanan sosial	3.161.915	-	-	224.048	3.385.963
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2.491.811	-	-	738.631	3.230.442
Pertambangan	3.011.637	-	-	-	3.011.637
Jasa dunia usaha	2.108.698	-	-	17.255	2.125.953
Konstruksi	1.429.101	66.974	1.726	1.325.096	2.822.897
Lain-lain	629.825	-	-	-	629.825
	79.766.910	86.463	44.057	7.791.863	87.689.293
Total	**760.415.196**	**19.956.011**	**21.667.552**	**38.149.799**	**840.188.558**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(35.515.123)
Bersih					**804.673.435**

	31 Desember 2017				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	208.941.190	9.219.724	13.130.011	9.840.619	241.131.544
Pertanian	66.580.203	1.630.968	1.978.945	4.776.126	74.966.242
Jasa dunia usaha	35.806.525	658.828	1.404.509	1.290.482	39.160.344
Perindustrian	30.027.023	477.416	866.830	4.217.950	35.589.219
Listrik, gas dan air	28.500.509	8.438	24.373	25.402	28.558.722
Konstruksi	23.493.510	354.850	245.389	1.972.233	26.065.982
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	17.310.995	281.006	672.142	1.263.900	19.528.043
Jasa pelayanan sosial	5.763.160	182.779	278.949	707.128	6.932.016
Pertambangan	1.024.116	56.059	60.801	1.103.730	2.244.706
Lain-lain	183.835.359	949.376	4.616.378	1.799.464	191.200.577
	601.282.590	13.819.444	23.278.327	26.997.034	665.377.395

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Mata uang asing					
Perindustrian	26.665.130	11.873	-	4.670.108	31.347.111
Pertanian	16.070.541	-	-	-	16.070.541
Listrik, gas dan air	5.148.785	-	-	682.810	5.831.595
Perdagangan, perhotelan dan restoran	4.043.006	7.199	22.149	391.733	4.464.087
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	3.044.175	-	-	416.321	3.460.496
Pertambangan	1.706.282	3.193	-	1.609.741	3.319.216
Jasa pelayanan sosial	3.054.991	-	-	-	3.054.991
Jasa dunia usaha	1.735.827	-	10.706	350.972	2.097.505
Konstruksi	310.509	-	-	1.223.141	1.533.650
Lain-lain	290.950	-	-	-	290.950
	62.070.196	22.265	32.855	9.344.826	71.470.142
Total	**663.352.786**	**13.841.709**	**23.311.182**	**36.341.860**	**736.847.537**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(30.000.637)
Bersih					**706.846.900**

	31 Desember 2016				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	194.421.942	6.713.103	12.197.071	9.197.709	222.529.825
Pertanian	62.778.609	948.799	2.061.115	4.321.466	70.109.989
Perindustrian	29.205.165	345.519	1.130.893	4.697.397	35.378.974
Jasa dunia usaha	27.111.516	649.859	1.129.198	1.307.191	30.197.764
Listrik, gas dan air	28.677.845	10.184	23.344	32.519	28.743.892
Konstruksi	17.552.083	204.414	242.271	2.473.659	20.472.427
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	14.927.759	217.035	649.998	1.270.357	17.065.149
Jasa pelayanan sosial	8.712.795	150.190	550.859	273.676	9.687.520
Pertambangan	1.397.823	38.171	41.345	1.297.754	2.775.093
Lain-lain	159.567.402	705.909	4.186.671	1.505.581	165.965.563
	544.352.939	9.983.183	22.212.765	26.377.309	602.926.196

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2016				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Mata uang asing					
Perindustrian	23.536.391	-	-	4.745.531	28.281.922
Pertanian	8.789.899	-	177.628	27.157	8.994.684
Pertambangan	3.474.378	-	3.434	1.821.394	5.299.206
Listrik, gas dan air	3.773.707	-	-	691.591	4.465.298
Jasa pelayanan sosial	3.707.071	-	-	-	3.707.071
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.681.947	-	-	423.869	2.105.816
Jasa dunia usaha	1.406.898	1.347	-	450.252	1.858.497
Konstruksi	484.670	-	-	1.261.603	1.746.273
Perdagangan, perhotelan dan restoran	1.080.091	6.877	346	681.367	1.768.681
Lain-lain	66.274	-	-	-	66.274
	48.001.326	8.224	181.408	10.102.764	58.293.722
Total	**592.354.265**	**9.991.407**	**22.394.173**	**36.480.073**	**661.219.918**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(22.676.452)
Bersih					**638.543.466**

f. Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

g. Tagihan akseptasi

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

h. Aset lain-lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan)

i. Rekening administratif

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rupiah			
Garansi yang diterbitkan	19.610.811	16.033.717	11.979.117
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	2.353.758	1.639.383	1.086.496
	21.964.569	17.673.100	13.065.613
Mata uang asing			
Garansi yang diterbitkan	25.275.240	17.996.663	12.543.898
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.339.932	7.341.288	7.454.656
	31.615.172	25.337.951	19.998.554
	53.579.741	43.011.051	33.064.167
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.221)	(2.134)	(895)
Total	**53.578.520**	**43.008.917**	**33.063.272**

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross.*

	31 Desember 2018				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
	High Grade	*Standard Grade*			**Total**
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	71.159.442	-	-	-	71.159.442
Giro pada bank lain	12.575.906	101.449	-	-	12.677.355
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	87.018.051	-	-	-	87.018.051
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	3.762.254	-	-	-	3.762.254
Tersedia untuk dijual	128.909.408	1.041.401	-	-	129.950.809
Dimiliki hingga jatuh tempo	50.201.832	369.915	-	-	50.571.747
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	27.442.690	-	-	-	27.442.690
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	30.273	-	-	-	30.273
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.475.000	-	-	-	1.475.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.396.553	-	-	-	9.396.553
Tagihan derivatif	485.810	-	-	-	485.810

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross* (lanjutan).

	31 Desember 2018				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset (lanjutan)					
Kredit yang diberikan					
Mikro	271.488.534	7.038.815	10.137.656	2.950.903	291.615.908
Ritel	295.110.821	12.413.639	10.438.190	12.671.313	330.633.963
Korporasi	176.327.164	66.973	211.221	21.154.928	197.760.286
Piutang dan pembiayaan syariah	17.488.677	436.584	880.485	1.372.655	20.178.401
Piutang sewa pembiayaan	3.263.054	-	49.938	96.854	3.409.846
Tagihan akseptasi	11.583.506	59.497	-	-	11.643.003
Penyertaan saham*)	15.268	-	-	-	15.268
Aset lain-lain**)	8.710.014	64.499	-	-	8.774.513
Total	**1.176.444.257**	**21.592.772**	**21.717.490**	**38.246.653**	**1.258.001.172**

	31 Desember 2017*)				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	58.155.479
Giro pada bank lain	5.925.713	206.799	-	-	6.132.512
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.106.762	50.000	-	-	55.156.762
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	1.762.263	1.771	-	-	1.764.034
Tersedia untuk dijual	127.515.291	3.430.391	-	-	130.945.682
Dimiliki hingga jatuh tempo	53.461.707	768.173	-	-	54.229.880
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	10.654.353	-	-	-	10.654.353
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	-	-	-	18.011.026
Tagihan derivatif	145.928	16.984	-	-	162.912
Kredit yang diberikan					
Mikro	236.294.763	3.482.707	10.226.251	2.846.933	252.850.654
Ritel	254.805.588	9.653.287	11.593.072	11.384.282	287.436.229
Korporasi	157.675.485	-	108.977	20.911.323	178.695.785
Piutang dan pembiayaan syariah	14.576.950	705.715	1.382.882	1.199.322	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	2.274.953	-	110.585	103.445	2.488.983
Tagihan akseptasi	5.693.425	-	-	-	5.693.425
Penyertaan saham**)	2.439	9.279	-	50	11.768
Aset lain-lain***)	5.490.267	28.855	-	-	5.519.122
Total	**1.010.870.232**	**18.353.961**	**23.421.767**	**36.445.355**	**1.089.091.315**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross* (lanjutan).

	31 Desember 2016*)				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	55.635.946
Giro pada bank lain	10.998.783	282.012	-	-	11.280.795
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	78.145.833	103.000	-	-	78.248.833
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	674.966	1.266	-	-	676.232
Tersedia untuk dijual	67.702.626	1.811.030	-	-	69.513.656
Dimiliki hingga jatuh tempo	61.028.620	868.250	-	-	61.896.870
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	11.580.175	-	-	-	11.580.175
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.557.370	-	-	-	1.557.370
Tagihan derivatif	91.657	12.250	-	-	103.907
Kredit yang diberikan					
Mikro	206.999.682	2.496.361	9.958.341	2.347.821	221.802.205
Ritel	225.594.155	6.880.476	10.484.935	10.030.114	252.989.680
Korporasi	145.315.222	-	80.245	23.283.623	168.679.090
Piutang dan pembiayaan syariah	14.445.206	614.570	1.870.652	818.515	17.748.943
Piutang sewa pembiayaan	1.761.334	-	221.851	217.115	2.200.300
Tagihan akseptasi	5.692.583	-	-	-	5.692.583
Penyertaan saham*)	2.439	9.279	-	50	11.768
Aset lain-lain**)	3.295.316	10.871	-	-	3.306.187
Total	**893.840.347**	**13.089.365**	**22.616.024**	**36.697.238**	**966.242.974**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (High Grade)
   a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa.
   b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturisasi.
   c) Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih serta tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
   d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi dengan *rating* minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), A- (Standard & Poor's), atau A3 (Moody's).
   e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

2. Tingkat Standar (Standard Grade)

a) Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.
b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.
c) Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih serta tagihan akseptasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan memiliki kapasitas finansial yang memadai dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek dan obligasi dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), BBB+ sampai dengan BBB- (Standard & Poor's), atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).
e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

5. Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2018			
	≤ 30 hari	**> 30 – 60 hari**	**> 60 – 90 hari**	**Total**
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.330.615	2.525.918	3.281.123	10.137.656
Ritel	5.022.322	2.418.228	2.997.640	10.438.190
Korporasi	211.221	-	-	211.221
Piutang dan pembiayaan syariah	407.770	177.920	294.795	880.485
Piutang sewa pembiayaan	40.092	3.184	6.662	49.938
Total	**10.012.020**	**5.125.250**	**6.580.220**	**21.717.490**

	31 Desember 2017			
	≤ 30 hari	**> 30 – 60 hari**	**> 60 – 90 hari**	**Total**
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.613.769	2.481.527	3.130.955	10.226.251
Ritel	5.666.894	2.673.799	3.252.379	11.593.072
Korporasi	108.977	-	-	108.977
Piutang dan pembiayaan syariah	905.650	187.999	289.233	1.382.882
Piutang sewa pembiayaan	83.351	5.216	22.018	110.585
Total	**11.378.641**	**5.348.541**	**6.694.585**	**23.421.767**

	31 Desember 2016			
	≤ 30 hari	**> 30 – 60 hari**	**> 60 – 90 hari**	**Total**
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.548.784	2.399.345	3.010.212	9.958.341
Ritel	5.463.764	2.229.201	2.791.970	10.484.935
Korporasi	80.245	-	-	80.245
Piutang dan pembiayaan syariah	1.471.901	176.717	222.034	1.870.652
Piutang sewa pembiayaan	179.860	18.679	23.312	221.851
Total	**11.744.554**	**4.823.942**	**6.047.528**	**22.616.024**

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BRI untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BRI.

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPPMRL) yang mencakup kebijakan manajemen likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas (maturity gap), *net stable funding ratio* dan *liquidity coverage ratio*, pedoman penetapan limit risiko likuiditas, *stress test* risiko likuiditas, *contingency funding plan* dan sistem informasi risiko likuiditas.

Pedoman ini bertujuan untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko likuiditas harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi dan penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris BRI melalui *Risk Management Committee* (RMC). Tujuan dari *stress testing* yaitu untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama kondisi krisis (stress). Selain itu, *stress test* juga digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendanaan darurat (contingency plan), dan limit risiko likuiditas.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi mismatch likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

	31 Desember 2018					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Aset						
Kas	27.421.625	-	-	-	-	27.421.625
Giro pada Bank Indonesia	71.159.442	71.159.442	-	-	-	-
Giro pada bank lain	12.677.355	12.575.906	-	-	-	101.449
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	87.018.051	85.083.644	1.712.207	222.200	-	-
Efek-efek	184.284.810	133.772.828	7.468.990	8.017.543	35.025.449	-
Cadangan kerugian	(758)	-	-	-	-	(758)
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	27.442.690	5.515.512	10.973.847	10.953.331	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	1.505.273	30.273	-	375.000	1.100.000	-

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan):

	31 Desember 2018					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Aset (lanjutan)						
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.396.553	2.901.245	3.400.936	3.094.372	-	-
Tagihan Derivatif	485.810	214.804	71.734	108.126	91.146	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	291.615.910	3.013.113	6.271.320	35.184.332	247.147.145	-
Ritel	330.633.963	21.068.739	22.779.770	91.452.047	195.333.407	-
Korporasi	197.760.286	11.626.529	5.803.401	37.001.755	143.328.601	-
Cadangan kerugian	(35.017.982)	-	-	-	-	(35.017.982)
Piutang dan pembiayaan syariah	20.178.401	1.055.340	1.742.143	1.805.648	15.575.270	-
Cadangan kerugian	(497.141)	-	-	-	-	(497.141)
Piutang sewa pembiayaan	3.409.846	-	-	308.746	3.101.100	-
Cadangan kerugian	(88.000)	-	-	-	-	(88.000)
Tagihan akseptasi	11.643.003	991.252	2.685.342	7.966.409	-	-
Penyertaan saham*)	15.268	-	-	-	-	15.268
Aset lain-lain**)	8.774.513	611.446	1.619.843	954.377	22.009	5.566.838
	1.249.818.916	**620.081**	**64.529.533**	**197.443.886**	**640.724.127**	**(2.498.701)**
Liabilitas						
Liabilitas segera	8.462.958	8.462.958	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	178.097.981	178.097.981	-	-	-	-
Giro *Wadiah*	2.277.850	2.277.850	-	-	-	-
Giro *Mudharabah*	293.264	293.264	-	-	-	-
Tabungan	379.918.705	379.918.705	-	-	-	-
Tabungan *Wadiah*	5.601.811	5.601.811	-	-	-	-
Tabungan *Mudharabah*	1.659.109	1.659.109	-	-	-	-
Deposito berjangka	357.413.513	29.146.459	287.763.205	33.454.955	7.048.894	-
Deposito berjangka *Mudharabah*	19.006.504	16.585.766	2.264.111	156.627	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	9.131.158	9.080.497	50.661	-	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	37.379.394	25.995.013	4.650.068	4.282.376	2.451.937	-
Liabilitas derivatif	332.343	52.612	49.879	114.327	115.525	-
Liabilitas akseptasi	11.643.003	991.253	2.685.341	7.966.409	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	31.190.216	-	-	2.436.706	28.753.510	-
Pinjaman yang diterima	40.457.429	880.278	3.637.058	8.948.472	26.991.621	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.473.515	-	-	-	1.473.515	-
Liabilitas lain-lain***)	3.324.974	1.123.697	562.360	519.200	1.111.962	7.755
	1.087.663.727	**660.167.253**	**301.662.683**	**57.879.072**	**67.946.964**	**7.755**
Perbedaan Jatuh Tempo	**162.155.189**	**(311.160.554)**	**(238.274.083)**	**139.814.941**	**574.281.341**	**(2.506.456)**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru' dan dana syirkah temporer.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan):

	31 Desember 2017*)					
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	24.798.037	-	-	-	-	24.798.037
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	58.155.479	-	-	-	-
Giro pada bank lain	6.132.512	6.132.512	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.156.762	53.644.287	1.173.288	339.187	-	-
Efek-efek	186.939.596	134.676.377	5.546.579	5.833.275	40.883.365	-
Cadangan kerugian	(758)	-	-	-	-	(758)
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	10.654.352	2.330.950	3.724.347	4.599.055	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.317.840	717.840	375.000	750.000	1.475.000	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	16.691.189	1.319.837	-	-	-
Tagihan derivatif	162.912	24.766	33.611	44.734	59.801	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	252.850.654	2.291.479	5.218.530	32.882.324	212.458.321	-
Ritel	287.436.229	12.058.635	17.288.925	77.933.581	180.155.088	-
Korporasi	178.695.785	20.138.725	14.298.124	28.158.748	116.100.188	-
Cadangan kerugian	(29.423.380)	-	-	-	-	(29.423.380)
Piutang dan pembiayaan						
Syariah	17.864.869	530.569	236.409	2.425.842	14.672.049	-
Cadangan kerugian	(577.257)	-	-	-	-	(577.257)
Piutang sewa pembiayaan	2.488.983	106.308	16.802	139.370	2.226.503	-
Cadangan kerugian	(103.500)	-	-	-	-	(103.500)
Tagihan akseptasi	5.693.425	1.894.633	1.983.239	1.815.553	-	-
Penyertaan saham*)	11.768	-	-	-	-	11.768
Aset lain-lain**)	5.519.123	569.472	2.202.645	889.598	15.050	1.842.358
	1.083.784.457	**309.963.221**	**53.417.336**	**155.811.267**	**568.045.365**	**(3.452.732)**
Liabilitas						
Liabilitas segera	6.584.201	6.584.201	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	145.529.168	145.529.168	-	-	-	-
Giro *Wadiah*	1.766.901	1.766.901	-	-	-	-
Giro *Mudharabah*	139.535	139.535	-	-	-	-
Tabungan	343.420.737	343.420.737	-	-	-	-
Tabungan *Wadiah*	4.749.652	4.749.652	-	-	-	-
Tabungan *Mudharabah*	1.270.484	1.270.484	-	-	-	-
Deposito berjangka	326.417.937	178.534.567	96.297.623	40.992.107	10.593.640	-
Deposito berjangka *Mudharabah*	18.362.036	14.272.754	3.949.195	140.087	-	-

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan):

	31 Desember 2017*)					
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas (lanjutan)						
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	5.593.367	5.506.174	57.408	29.785	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.136.684	2.024.388	1.332.430	3.512.249	5.267.617	-
Liabilitas derivatif	200.858	8.472	9.903	58.219	124.264	-
Liabilitas akseptasi	5.693.425	1.894.633	1.983.239	1.815.553	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	30.619.658	-	7.588.383	3.267.391	19.763.884	-
Pinjaman yang diterima	29.408.694	679.827	744.627	6.378.546	21.605.694	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	986.450	-	-	10.312	976.138	-
Liabilitas lain-lain**)	2.461.869	792.645	531.439	353.778	-	784.007
	935.341.656	**707.174.138**	**112.494.247**	**56.558.027**	**58.331.237**	**784.007**
Perbedaan Jatuh Tempo	**148.442.801**	**(397.210.917)**	**(59.076.911)**	**99.253.240**	**509.714.128**	**(4.236.739)**

	31 Desember 2016*)					
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	25.212.226	-	-	-	-	25.212.226
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	55.635.946	-	-	-	-
Giro pada bank lain	11.280.795	11.280.795	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	78.248.833	78.115.753	-	133.080	-	-
Efek-efek	132.086.758	71.599.997	5.232.606	9.190.425	46.063.730	-
Cadangan kerugian	(758)	-	-	-	-	(758)
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	11.580.175	3.015.105	4.151.700	4.413.370	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.318.434	718.434	-	-	2.600.000	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.557.370	632.230	925.140	-	-	-
Tagihan derivatif	103.907	44.464	-	489	58.954	-

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru' dan dana syirkah temporer.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lanjutan):

	31 Desember 2016*)					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Aset (lanjutan)						
Kredit yang diberikan						
Mikro	221.802.205	1.942.248	4.449.159	30.293.610	185.117.188	-
Ritel	252.989.680	10.772.881	13.610.761	65.274.471	163.331.567	-
Korporasi	168.679.090	5.396.333	23.567.386	26.470.817	113.244.554	-
Cadangan kerugian	(22.184.296)	-	-	-	-	(22.184.296)
Piutang dan pembiayaan						
Syariah	17.748.943	282.812	452.795	1.728.426	15.284.910	-
Cadangan kerugian	(492.156)	-	-	-	-	(492.156)
Piutang sewa pembiayaan	2.200.300	-	-	264.036	1.936.264	-
Cadangan kerugian	(130.000)	-	-	-	-	(130.000)
Tagihan akseptasi	5.692.583	1.045.643	2.106.327	2.540.613	-	-
Penyertaan saham**)	11.768	-	-	-	-	11.768
Aset lain-lain***)	3.306.187	335.747	1.199.076	954.797	478	816.089
	968.647.990	**240.818.388**	**55.828.030**	**141.131.054**	**527.637.645**	**3.232.873**
Liabilitas						
Liabilitas segera	5.410.313	5.410.313	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	141.419.021	141.419.021	-	-	-	-
Giro *Wadiah*	1.127.843	1.127.843	-	-	-	-
Tabungan	298.110.406	298.110.406	-	-	-	-
Tabungan *Wadiah*	4.176.761	4.176.761	-	-	-	-
Tabungan *Mudharabah*	983.121	983.121	-	-	-	-
Deposito berjangka	293.029.378	239.316.486	37.907.214	13.639.996	2.165.682	-
Deposito berjangka *Mudharabah*	15.679.845	13.791.599	1.670.222	214.638	3.386	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.229.538	2.186.158	42.057	1.323	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7.302.398	-	673.625	1.917.625	4.711.148	-
Liabilitas derivatif	347.217	-	114.152	-	233.065	-
Liabilitas akseptasi	5.692.583	1.045.643	2.106.327	2.540.613	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	24.800.781	-	807.927	4.110.712	19.882.142	-
Pinjaman yang diterima	35.013.680	320.647	6.202.044	8.104.288	20.386.701	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.008.510	-	-	-	1.008.510	-
Liabilitas lain-lain****)	1.861.761	1.064.120	73.376	241.664	-	482.601
	838.193.157	**708.952.118**	**49.596.944**	**30.770.859**	**48.390.635**	**482.601**
Perbedaan Jatuh Tempo	**130.454.833**	**(468.133.730)**	**6.231.086**	**110.360.195**	**479.247.010**	**2.750.272**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru' dan dana syirkah temporer.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. *Middle Office* dapat melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (Value-at-Risk) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, *Middle Office* juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar dan *limit* transaksi antara lain *limit* nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit*, *stop loss limit* dan *Value-at-Risk* (VaR) *limit*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan (trading).

1. *Value-at-Risk* (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model internal untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

2. Asumsi *Value-at-Risk* (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confidence level) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (holding period). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Delta Gamma.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2018, 2017 dan 2016 sampai dengan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (tidak diaudit).

	2018	
	Nilai Tukar*)	**Suku Bunga**
Rata-rata Harian	51.671,99	5.893,22
Tertinggi	79.747,46	24.908,51
Terendah	13.449,78	90,95

	2017	
	Nilai Tukar*)	**Suku Bunga**
Rata-rata Harian	39.407,73	3,293,16
Tertinggi	67.226,24	8,366,41
Terendah	26.745,25	468,63

*) Termasuk *trading* dan *banking book*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

2. Asumsi *Value-at-Risk* (VaR) (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2018, 2017 dan 2016 sampai dengan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (tidak diaudit) (lanjutan).

	2016	
	Nilai Tukar*)	**Suku Bunga**
Rata-rata Harian	58.421,11	851,78
Tertinggi	134.093,77	4.153,38
Terendah	20.170,30	7,00

*) Termasuk *trading* dan *banking book*.

3. *Back Testing*

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model.*

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book*

a. Risiko Tingkat Suku Bunga

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

Direksi dan Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* atas penetapan suku bunga dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk periode tiga bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Rupiah (%)	Valas (%)	Rupiah (%)	Valas (%)	Rupiah (%)	Valas (%)
Aset						
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,31	2,36	3,63	1,05	5,46	0,53
Efek-efek	7,57	3,24	8,04	3,30	8,65	3,36
Kredit yang diberikan	11,19	4,20	11,78	4,11	11,91	4,23
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	6,71	-	6,72	-	6,63	-
Piutang sewa Pembiayaan	14,61	6,73	13,62	6,38	13,43	5,93
Liabilitas						
Simpanan nasabah						
Giro	2,44	0,20	2,32	0,33	2,33	0,49
Tabungan	0,84	0,17	0,86	0,21	1,14	0,22
Deposito	6,17	2,14	6,20	1,43	7,49	1,19
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	4,44	0,14	3,45	0,47	3,97	0,32
Pinjaman yang diterima	0,02	3,34	3,79	2,51	4,04	2,35
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	5,56	-	4,06	-	4,27	-
Surat berharga yang diterbitkan	8,51	4,63	8,44	2,95	8,56	2,95

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book* (tidak diaudit), dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI.

2018	
Perubahan Persentase	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**
+/-1 %	+/- 1.687.437

2017	
Perubahan Persentase	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**
+/-1 %	+/- 1.703.685

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book*, dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI (lanjutan).

2016	
Perubahan Persentase	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**
+/-1 %	+/- (1.103.509)

Tingkat sensitivitas digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio *banking book*. Pada analisa sensitivitas di atas, asumsi perubahan suku bunga untuk portofolio *banking book* dengan basis 1%.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

31 Desember 2018						
	Suku bunga mengambang					
Keterangan	**Tidak lebih dari 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Suku bunga tetap**	**Tidak dikenakan bunga**	**Total**
Aset						
Kas	-	-	-	-	27.421.625	27.421.625
Giro pada Bank Indonesia	71.159.442	-	-	-	-	71.159.442
Giro pada Bank Lain	12.575.906	-	-	-	101.449	12.677.355
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	85.122.844	1.895.207	-	-	-	87.018.051
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	3.762.254	-	3.762.254
Tersedia untuk dijual	-	-	-	129.950.809	-	129.950.809
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	50.571.747	-	50.571.747
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	27.442.690	-	-	-	-	27.442.690
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	30.273	-	-	-	-	30.273
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.475.000	-	-	-	-	1.475.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	9.396.553	-	9.396.553
Tagihan Derivatif	-	-	-	-	485.810	485.810

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2018

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset (lanjutan)						
Kredit yang diberikan						
Mikro	9.284.431	51.315.957	-	231.015.520	-	291.615.908
Ritel	43.848.509	153.138.746	37.768.887	95.877.821	-	330.633.963
Korporasi	17.429.932	180.330.354	-	-	-	197.760.286
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	-	-	-	20.178.401	20.178.401
Piutang sewa pembiayaan	9.393	51.011	1.184.662	2.164.780	-	3.409.846
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	11.643.003	11.643.003
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	15.268	15.268
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	8.774.513	8.774.513
	268.378.420	**386.731.275**	**38.953.549**	**522.739.484**	**68.620.069**	**1.285.422.797**
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	8.462.958	8.462.958
Simpanan nasabah						
Giro	125.213.788	-	-	52.884.193	-	178.097.981
Giro *Wadiah*	-	-	-	-	2.277.850	2.277.850
Giro *Mudharabah*	-	-	-	-	293.264	293.264
Tabungan	180.877.412	-	-	199.041.293	-	379.918.705
Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	1.659.109	1.659.109
Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	5.601.811	5.601.811
Deposito berjangka	316.909.665	33.454.955	7.048.894	-	-	357.413.514
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	-	-	-	19.006.504	19.006.504
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	9.131.158	-	-	-	-	9.131.158
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.513.036	1.308.110	-	31.558.248	-	37.379.394
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	332.343	332.343
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	11.643.003	11.643.003
Surat berharga yang diterbitkan	-	2.436.706	28.753.510	-	-	31.190.216
Pinjaman yang diterima	4.517.336	8.948.472	26.991.621	-	-	40.457.429
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	499.798	973.717	1.473.515
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	3.324.974	3.324.974
	641.162.395	**46.148.243**	**62.794.025**	**283.983.532**	**53.575.533**	**1.087.663.728**
Perbedaan (gap) *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	**(372.783.975)**	**340.583.032**	**(23.840.476)**	**238.755.952**	**15.044.536**	**197.759.069**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2017*)

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset						
Kas	-	-	-	-	24.798.037	24.798.037
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	-	58.155.479
Giro pada Bank Lain	5.925.713	-	-	206.799	-	6.132.512
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.156.762	-	-	-	-	55.156.762
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	1.762.263	1.771	1.764.034
Tersedia untuk dijual	-	-	-	130.927.293	18.389	130.945.682
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	54.229.880	-	54.229.880
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	10.654.353	-	-	-	-	10.654.353
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	18.011.026	-	18.011.026
Tagihan derivatif	-	-	-	-	162.912	162.912
Kredit yang diberikan						
Mikro	7.510.009	45.099.796	-	200.240.849	-	252.850.654
Ritel	29.347.560	141.940.025	29.309.168	86.839.476	-	287.436.229
Korporasi	34.436.851	144.258.934	-	-	-	178.695.785
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	-	-	-	17.864.869	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	19.744	141.583	770.715	1.556.941	-	2.488.983
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	5.693.425	5.693.425
Penyertaan saham**)	-	-	-	-	11.768	11.768
Aset lain-lain***)	-	-	-	-	5.519.123	5.519.123
	204.524.311	**331.440.338**	**30.079.883**	**493.774.527**	**54.070.294**	**1.113.889.353**
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	6.584.201	6.584.201
Simpanan nasabah						
Giro	96.798.129	-	-	48.731.039	-	145.529.168
Giro *Wadiah*	-	-	-	-	1.766.901	1.766.901
Giro *Mudharabah*	-	-	-	-	139.535	139.535
Tabungan	171.075.330	-	-	172.345.407	-	343.420.737
Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	4.749.652	4.749.652
Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	1.270.484	1.270.484
Deposito berjangka	274.832.190	40.992.107	10.593.640	-	-	326.417.937
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	-	-	-	18.362.036	18.362.036

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2017*)

Keterangan	Suku bunga mengambang: Tidak lebih dari 3 bulan	Suku bunga mengambang: Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Suku bunga mengambang: Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Liabilitas (lanjutan)						
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	5.563.581	29.786	-	-	-	5.593.367
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	2.486.042	-	-	9.650.642	12.136.684
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	200.858	200.858
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	5.693.425	5.693.425
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	30.619.658	-	30.619.658
Pinjaman yang diterima	1.423.160	6.378.546	21.606.989	-	-	29.408.695
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	14.385	972.065	986.450
Liabilitas lain-lain**)	-	-	-	-	2.461.869	2.461.869
	549.692.390	**49.886.481**	**32.200.629**	**251.710.489**	**51.851.668**	**935.341.657**
Perbedaan (gap) *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	**(345.168.079)**	**281.553.857**	**(2.120.746)**	**242.064.038**	**2.218.626**	**178.547.696**

31 Desember 2016*)

Keterangan	Suku bunga mengambang: Tidak lebih dari 3 bulan	Suku bunga mengambang: Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Suku bunga mengambang: Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	-	-	-	-	25.212.226	25.212.226
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	-	55.635.946
Giro pada Bank Lain	11.022.749	-	-	258.046	-	11.280.795
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	78.248.833	-	-	-	-	78.248.833
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	676.232	-	676.232
Tersedia untuk dijual	-	-	-	69.513.656	-	69.513.656
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	61.896.870	-	61.896.870
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	11.580.175	-	-	-	-	11.580.175

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru' dan dana *syirkah* temporer.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2016*)

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset (lanjutan)						
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1.557.370	-	1.557.370
Tagihan derivatif	-	-	-	-	103.907	103.907
Kredit yang diberikan						
Mikro	6.391.407	39.348.602	-	176.062.196	-	221.802.205
Ritel	24.383.642	127.623.404	23.750.225	77.232.409	-	252.989.680
Korporasi	28.963.719	139.715.371	-	-	-	168.679.090
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	-	-	-	17.748.943	17.748.943
Piutang sewa pembiayaan	31.206	155.746	935.350	1.077.998	-	2.200.300
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	5.692.583	5.692.583
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	11.768	11.768
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	3.306.187	3.306.187
	219.576.111	**306.843.123**	**24.685.575**	**388.274.777**	**52.075.614**	**991.455.200**
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	5.410.313	5.410.313
Simpanan nasabah						
Giro	97.490.396	-	-	43.928.624	-	141.419.020
Giro *Wadiah*	-	-	-	-	1.127.843	1.127.843
Tabungan	155.940.955	-	-	142.169.451	-	298.110.406
Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	4.176.761	4.176.761
Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	983.121	983.121
Deposito berjangka	215.329.405	51.934.654	25.765.319	-	-	293.029.378
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	-	-	-	15.679.845	15.679.845
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.186.158	42.057	1.323	-	-	2.229.538
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	673.625	673.625	-	5.955.148	-	7.302.398
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	347.217	347.217
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	5.692.583	5.692.583

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)
**) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2016*)

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Liabilitas (lanjutan)						
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	24.800.781	-	24.800.781
Pinjaman yang diterima	320.647	14.304.899	20.288.134	-	100.000	35.013.680
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	35.471	973.039	1.008.510
Liabilitas lain-lain**)	-	-	-	-	1.861.761	1.861.761
	471.941.188	**66.955.235**	**46.054.776**	**216.889.475**	**36.352.483**	**838.193.157**
Perbedaan (gap) *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	**(252.365.077)**	**239.887.888**	**(21.369.201)**	**171.385.302**	**15.723.131**	**153.262.043**

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 50)

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 perubahan keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, per mata uang, sebagai berikut:

Mata Uang	31 Desember 2018		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	202.779.020	198.605.581	4.173.439
Dolar Singapura	6.669.876	5.910.615	759.261
Yen Jepang	471.610	253.175	218.435
Pound Sterling Inggris	229.202	128.721	100.481
Dolar Australia	359.154	284.098	75.056
Euro Eropa	10.329.347	9.810.831	518.516
Renminbi	3.871.986	3.921.420	49.434
Dolar Kanada	10.435	88	10.347
Lain-lain	926.258	333.078	593.180
			6.498.149
Modal (Catatan 48a)			173.831.121
Rasio PDN			**3,74%**

Mata Uang	31 Desember 2017		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	154.683.931	151.009.523	3.674.408
Renminbi	4.974.959	4.185.484	789.475
Euro Eropa	2.657.026	3.109.627	452.601
Dolar Singapura	1.367.530	711.167	656.363
Yen Jepang	368.820	29.103	339.717
Pound Sterling Inggris	123.919	53.640	70.279
Dolar Australia	145.894	107.965	37.929
Dolar Kanada	7.196	62	7.134
Lain-lain	899.315	98.105	801.210
			6.829.116
Modal (Catatan 48a)			161.751.939
Rasio PDN			**4,22%**

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, per mata uang, sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2016		
Mata Uang	**Aset**	**Liabilitas**	**PDN**
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	138.725.987	137.134.766	1.591.221
Renminbi	6.598.517	4.678.412	1.920.105
Euro Eropa	10.065.634	14.520.265	4.454.631
Dolar Australia	185.862	262.620	76.758
Dolar Singapura	1.377.990	574.284	803.706
Yen Jepang	315.709	301.684	14.025
Pound Sterling Inggris	212.224	66.595	145.629
Dolar Kanada	12.211	116	12.095
Lain-lain	564.675	47.416	517.259
			9.535.429
Modal (Catatan 48a)			142.910.432
Rasio PDN			**6,67%**

5. Analisa Sensitivitas BRI Agro

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas (tidak diaudit) terhadap kemungkinan perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar BRI Agro terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan.

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Perubahan Persentase	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**	**Perubahan Persentase**	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**	**Perubahan Persentase**	**Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**
Risiko tingkat suku bunga	+/- 1%	+/-73.399	+/- 1%	+/-49.012	+/- 1%	+/- 33.410
Risiko nilai tukar	+/- 1%	+/-83	+/- 1%	+/-70	+/- 1%	+/-23

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksud ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian intern dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari *level* Kantor Pusat (Divisi/*Desk*) , Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang mencakup bidang operasional, pemasaran dan bisnis mikro, dan Kantor Cabang Pembantu, Sentra Layanan BRI Prioritas dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Manajemen risiko baik yang berada di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah BRI bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Disamping itu juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi anti *fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dimaksud. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko mengkoordinasikan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang dilaksanakan setiap triwulanan bersama Divisi/*Desk* dan unit kerja terkait.

Audit Intern selaku *third line of defence* yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Kantor Inspektorat BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di unit kerja operasional dan konsistensi atas penerapan manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa BRI *Operational Risk Assessor* (BRI OPRA) yang mencakup *modul Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI), Forum MR dan Maturitas. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional telah dikinikan dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.17- DIR/DMR/02.2016.

Upaya peningkatan pemahaman atas manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko dan sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

1. *Risk Control and Self Assessment* (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian (likelihood), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk* Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah (KanWil), Kantor Cabang Khusus (KCK), Kantor Cabang (KanCa) yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Sentra Layanan BRI Prioritas.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap triwulan, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

Laporan hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada seluruh Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Manajemen Insiden (MI) dan *Loss Event Database* (LED)

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss* dan *near misses* sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaian, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (event type) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasiskan pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Data kerugian operasional BRI yang didokumentasikan mulai dari tahun 2007 disusun secara konsisten dan sistematis dalam bentuk matriks *database* kerugian yang diklasifikasikan berdasarkan delapan lini bisnis dan tujuh *event type*/kategori kejadian dan dilihat dari dimensi frekuesi kejadian dan *severity/loss.*

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan *The Standardised Approach* (TSA) dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). LED BRI juga telah digunakan dalam simulasi perhitungan beban modal risiko operasional dengan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA), baik dengan menggunakan *Extreme Value Theory* (EVT) maupun *Loss Distribution Approach* (LDA). Dalam rangka menuju perhitungan beban modal risiko operasional yang lebih *advanced*, BRI telah menyusun *gap analysis* terkait penerapan TSA dan AMA.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI)

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko/tren risiko baik yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau *limit* risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (risk appetite) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (threshold) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner* dan Unit Kerja terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko KanWil yang dimonitor secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI.

5. Maturitas

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemapanan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

6. *Business Continuity Management* (BCM)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan BCM diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.26-DIR/DMR/12/2016.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. *Business Continuity Management* (BCM) (lanjutan)

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Pelaksanaan uji coba BCM dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana termasuk di dalamnya Gedung Kantor Pusat yaitu Gedung BRI 1 dan 2, Gedung IT dan Gedung BRI *Corporate University* serta Asrama Siswa di Ragunan.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Unit Kerja BRI, dimana di Triwulan III dan IV Tahun 2018 terjadi bencana alam gempa bumi di Lombok sebesar 7 SR dan gempa bumi di Palu dan Donggala sebesar 7,4 SR yang berdampak pada operasional dan bisnis Unit Kerja BRI di Lombok, Palu dan sekitarnya.

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan/atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB yang dimaksud.

Divisi Manajemen Risiko BRI bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PAB diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.89-DIR/MOP/11/2017.

8. Penerapan Strategi Anti *Fraud* BRI

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap penyelesaian kasus-kasus *fraud* yang terjadi untuk menunjukkan intoleransi manajemen BRI terhadap *fraud* (zero tolerance). Penetapan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pencegahan dan pengelolaan kejadian *fraud* di BRI mencakup 4 (empat) pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi, pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut.

Komitmen Anti *Fraud* ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI sebagai bentuk peningkatan *employee awareness* dan pencegahan *fraud*. Kebijakan Strategi Anti *Fraud* diatur melalui Surat Keputusan BRI No. S.25-DIR/DMR/12/2016.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET						
Kas	27.421.625	27.421.625	24.798.037	24.798.037	25.212.226	25.212.226
Giro pada Bank Indonesia	71.159.442	71.159.442	58.155.479	58.155.479	55.635.946	55.635.946
Giro pada bank lain	12.677.355	12.677.355	6.132.512	6.132.512	11.280.795	11.280.795
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	87.018.051	87.018.051	55.156.762	55.156.762	78.248.833	78.248.833
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	3.762.256	3.762.256	1.762.263	1.762.263	674.966	674.966
Tersedia untuk dijual	129.981.081	129.981.081	130.927.293	130.927.293	69.492.266	69.492.266
Dimiliki hingga jatuh tempo	50.540.715	50.608.601	54.229.122	56.701.981	61.896.112	62.452.483
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	27.442.690	27.442.690	10.654.353	10.654.353	11.580.175	11.580.175
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	30.273	30.273	717.840	717.840	718.434	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.475.000	1.468.395	2.600.000	2.575.239	2.600.000	2.592.245
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.396.553	9.396.553	18.011.026	18.011.026	1.557.370	1.557.370
Tagihan derivatif	485.810	485.810	162.912	162.912	103.907	103.907
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	804.673.435	744.066.835	706.846.900	667.849.222	638.543.466	601.402.821
Piutang sewa pembiayaan	3.321.846	3.223.990	2.385.483	2.405.495	2.070.300	2.059.460
Tagihan akseptasi	11.643.003	11.643.003	5.693.425	5.693.425	5.692.583	5.692.583
Penyertaan saham *)	15.218	15.218	11.718	11.718	11.718	11.718
Aset lain-lain **)	8.774.513	8.774.513	5.484.806	5.484.806	3.291.918	3.291.918
Total	**1.249.818.866**	**1.189.175.691**	**1.083.729.931**	**1.047.200.363**	**968.611.015**	**932.008.146**
LIABILITAS						
Liabilitas segera	8.462.958	8.462.958	6.584.201	6.584.201	5.410.313	5.410.313
Simpanan nasabah ***)						
Giro	180.669.095	180.669.095	147.435.604	147.435.604	142.546.863	142.546.863
Tabungan	387.179.625	387.179.625	349.440.873	349.440.873	303.270.288	303.270.288
Deposito berjangka	376.420.017	376.420.017	344.779.973	344.779.973	308.709.223	308.709.223
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya						
Giro	344.319	344.419	351.951	351.951	239.006	239.006
Tabungan	3.407	3.407	6.709	6.709	6.497	6.497
Deposito berjangka dan *on call*	5.997.341	5.997.341	4.059.761	4.059.761	1.028.520	1.028.520
Inter-bank call money	2.786.091	2.786.091	1.174.946	1.174.946	955.515	955.515
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	37.379.394	37.379.394	12.136.684	12.136.684	7.302.398	7.302.398
Liabilitas derivatif	332.343	332.343	200.858	200.858	347.217	347.217
Liabilitas akseptasi	11.643.003	11.643.003	5.693.425	5.693.425	5.692.583	5.692.583
Surat berharga yang diterbitkan	31.190.216	30.749.094	30.619.658	31.472.743	24.800.781	25.123.300
Pinjaman yang diterima	40.457.429	40.457.429	29.408.694	29.408.694	35.013.680	35.013.680
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.473.515	1.473.575	986.450	986.450	1.008.510	1.007.148
Liabilitas lain-lain ****)	3.324.974	3.324.974	2.454.031	2.454.031	1.851.087	1.851.087
Total	**1.087.663.727**	**1.087.222.765**	**935.333.818**	**936.186.903**	**838.182.481**	**838.503.638**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.
***) Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.
****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru*' dan dana *syirkah* temporer.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

a) Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan tagihan dan liabilitas derivatif, serta pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

   Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

   Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

b) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

   Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

c) Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah

   Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

   Portofolio piutang dan pembiayaan syariah secara umum memiliki tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan syariah yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap.

d) Piutang Sewa Pembiayaan

   Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

e) Tagihan dan liabilitas derivatif

   Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

f) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi

   Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c):

	31 Desember 2018			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset Keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	1.454.489	1.454.489	-	-
Reksadana	1.251.100	1.251.100	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	569.017	569.017	-	-
Tagihan derivatif	485.810	-	485.810	-
Obligasi	128.769	128.769	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	99.272	99.272	-	-
Obligasi Subordinasi	55.957	55.957	-	-
Lainnya	203.652	203.652	-	-
	4.248.066	3.762.256	485.810	-
Tersedia untuk dijual				
Obligasi Pemerintah	95.661.891	95.661.891	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	13.454.716	13.454.716	-	-
Obligasi	11.239.956	11.339.956	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	3.557.671	3.557.671	-	-
Reksadana	1.820.571	1.820.571	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	1.503.457	1.503.457	-	-
MAS Bills	737.315	737.315	-	-
Obligasi Subordinasi	723.860	723.860	-	-
Medium-Term Note	416.277	316.277	-	-
U.S. Treasury Bonds	269.313	269.313	-	-
Singapore Government Securities	191.615	191.615	-	-
Oblligasi Rekapitalisasi Pemerintah	30.273	30.273	-	-
Lainnya	374.166	374.166	-	-
	129.981.081	129.981.081	-	-
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Obligasi Pemerintah	44.652.472	44.652.472	-	-
Obligasi	3.846.529	3.846.529	-	-
Oblligasi Rekapitalisasi Pemerintah	1.468.395	1.468.395	-	-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	1.200.000	1.200.000	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	200.653	200.653	-	-
Sukuk Bank Indonesia	100.000	100.000	-	-
Medium-Term Note	100.000	100.000	-	-
Obligasi Subordinasi	56.847	56.847	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	21.679	21.679	-	-
Lainnya	430.421	430.421	-	-
	52.076.996	52.076.996	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	744.066.835	-	733.498.500	10.568.335
Piutang sewa pembiayaan	3.223.990	-	-	3.223.990
	747.290.825	-	733.498.500	13.792.325
Total Aset Keuangan	**933.596.968**	**185.820.333**	**733.984.310**	**13.792.325**

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2018			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Liabilitas Keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	332.343	-	332.343	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	30.749.094	30.749.094	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.437.575	1.437.575	-	-
	32.186.669	32.186.669	-	-
Total Liabilitas Keuangan	**32.519.012**	**32.186.669**	**332.343**	**-**

	31 Desember 2017			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset Keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Reksadana	842.935	842.935	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	385.040	385.040	-	-
Obligasi Pemerintah	196.415	196.415	-	-
Tagihan derivatif	162.912	-	162.912	-
Obligasi	71.378	71.378	-	-
Obligasi subordinasi	50.976	50.976	-	-
Lainnya	217.289	217.289	-	-
	1.926.945	1.764.033	162.912	-
Tersedia untuk dijual				
Obligasi Pemerintah	74.830.836	74.830.836	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	35.482.251	35.482.251	-	-
Obligasi	10.238.591	10.238.591	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	6.046.221	6.046.221	-	-
Reksadana	1.504.868	1.504.868	-	-
Obligasi subordinasi	796.981	796.981	-	-
Negotiable Certificate of Deposits	764.161	764.161	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	717.840	717.840	-	-
MAS Bills	431.165	431.165	-	-
U.S. Treasury Bonds	234.941	234.941	-	-
Medium-Term Notes	207.000	207.000	-	-
Singapore Government Securities	184.486	184.486	-	-
Lainnya	224.182	224.182	-	-
	131.663.523	131.663.523	-	-

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2017			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset Keuangan (lanjutan)				
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Obligasi Pemerintah	50.457.329	50.457.329	-	-
Obligasi	4.453.319	4.453.319	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2.575.239	2.575.239	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	597.605	597.605	-	-
Negotiable Certificate of Deposits	265.083	265.083	-	-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	250.000	250.000	-	-
Medium-Term Notes	150.360	150.360	-	-
Obligasi subordinasi	20.000	20.000	-	-
Lainnya	508.285	508.285	-	-
	59.277.220	59.277.220	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	667.849.222	-	653.265.720	14.583.502
Piutang Sewa Pembiayaan	2.405.495	-	-	2.405.495
	670.254.717	-	653.265.720	16.988.997
Total Aset Keuangan	**863.122.405**	**192.704.776**	**653.428.632**	**16.988.997**
Liabilitas Keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	200.858	-	200.858	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	31.472.743	31.472.743	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	986.450	986.450	-	-
	32.459.193	32.459.193	-	-
Total Liabilitas Keuangan	**32.660.051**	**32.459.193**	**200.858**	**-**

	31 Desember 2016			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset Keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Reksadana	295.372	295.372	-	-
Tagihan derivatif	103.907	-	103.907	-
Obligasi Pemerintah	85.722	85.722	-	-
Obligasi	64.745	64.745	-	-
Obligasi subordinasi	45.880	45.880	-	-
Lainnya	184.513	184.513	-	-
	780.139	676.232	103.907	-

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2016			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset Keuangan (lanjutan)				
Tersedia untuk dijual				
Obligasi Pemerintah	41.098.626	41.098.626	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	12.617.484	12.617.484	-	-
Obligasi	6.785.877	6.785.877	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	6.023.957	6.023.957	-	-
Reksadana	925.784	925.784	-	-
Obligasi subordinasi	812.649	812.649	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	718.434	718.434	-	-
U.S. Treasury Bonds	347.887	347.887	-	-
MAS Bills	325.918	325.918	-	-
Singapore Government Securities	198.706	198.706	-	-
Medium-Term Notes	195.074	195.074	-	-
Lainnya	181.694	181.694	-	-
	70.232.090	70.232.090	-	-
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Obligasi Pemerintah	51.737.965	51.737.965	-	-
Obligasi	4.663.814	4.663.814	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2.592.245	2.592.245	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	2.009.884	2.009.884	-	-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	1.650.000	1.650.000	-	-
Negotiable Certificate of Deposits	1.468.526	1.468.526	-	-
Medium-Term Notes	254.022	254.022	-	-
Obligasi subordinasi	60.549	60.549	-	-
Wesel Tagih	26.945	26.945	-	-
Lainnya	580.778	580.778	-	-
	65.044.728	65.044.728	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	601.402.821	-	579.128.986	22.273.835
Piutang Sewa Pembiayaan	2.059.460	-	-	2.059.460
	603.462.281	-	579.128.986	24.333.295
Total Aset Keuangan	**739.519.238**	**135.953.050**	**579.232.893**	**24.333.295**
Liabilitas Keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	347.217	-	347.217	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	25.123.300	25.123.300	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.007.148	1.007.148	-	-
	26.130.448	26.130.448	-	-
Total Liabilitas Keuangan	**26.477.665**	**26.130.448**	**347.217**	**-**

41. INFORMASI SEGMEN

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak:

a.

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Konvensional
PT Bank BRISyariah Tbk	Perbankan Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan Konvensional
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong	Jasa Keuangan
PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa
PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan pembiayaan
PT Danareksa Sekuritas	Perusahaan sekuritas
PT BRI Ventura Investama	Perusahaan modal ventura

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit):

	Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut					
Keterangan	**Mikro**	**Ritel**	**Korporasi**	**Lainnya**	**Entitas Anak**	**Total**
Pendapatan bunga dan premi - neto	39.104.644	26.914.595	6.304.292	2.584.829	3.703.134	78.611.494
Pendapatan operasional lainnya	8.090.685	10.098.711	1.631.316	2.956.094	652.432	23.429.238
Total pendapatan	47.195.329	37.013.306	7.935.608	5.540.923	4.355.566	102.040.732
Beban operasional lainnya	(17.223.314)	(17.338.436)	(3.443.732)	(1.460.548)	(2.528.062)	(41.994.092)
Beban CKPN	(7.920.968)	(6.011.336)	(3.509.445)	-	(879.014)	(18.320.763)
Total beban	(25.144.282)	(23.349.772)	(6.953.177)	(1.460.548)	(3.407.076)	(60.314.855)
Pendapatan non operasional - neto	50.956	9.316	5.055	(44.650)	7.140	27.817
Laba sebelum beban pajak	22.102.003	13.672.850	987.486	4.035.725	955.630	41.753.694
Beban pajak	(4.927.729)	(3.048.416)	(220.164)	(899.780)	(239.119)	(9.335.208)
Laba tahun berjalan	**17.174.274**	**10.624.434**	**767.322**	**3.135.945**	**716.511**	**32.418.486**
Aset segmen						
Kredit	291.615.907	320.045.884	192.676.641	-	39.259.972	843.598.404
CKPN	(13.835.533)	(4.894.052)	(15.840.295)	-	(1.033.243)	(35.603.123)
Non kredit	-	-	-	459.658.630	24.129.728	483.788.358
	277.780.374	**315.151.832**	**176.836.346**	**459.658.630**	**62.356.457**	**1.291.783.639**
Liabilitas segmen						
Pendanaan	271.646.940	341.329.004	285.056.620	-	46.236.173	944.268.737
Non pendanaan	-	-	-	155.148.895	12.205.329	167.354.224
	271.646.940	**341.329.004**	**285.056.620**	**155.148.895**	**58.441.502**	**1.111.622.961**

41. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

b. Segmen Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit):

	Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut					
Keterangan	**Mikro**	**Ritel**	**Korporasi**	**Lainnya**	**Entitas Anak**	**Total**
Pendapatan bunga dan premi - neto	36.447.777	23.067.911	6.857.906	4.054.952	2.974.962	73.403.508
Pendapatan operasional lainnya	6.453.398	8.985.018	899.231	2.355.189	578.450	19.271.286
Total pendapatan	42.901.175	32.052.929	7.757.137	6.410.141	3.553.412	92.674.794
Beban operasional lainnya	(15.371.678)	(15.048.835)	(3.541.484)	(2.350.602)	(2.301.477)	(38.614.076)
Beban CKPN	(7.642.460)	(5.738.482)	(3.278.755)	-	(594.181)	(17.253.878)
Total beban	(23.014.138)	(20.787.317)	(6.820.239)	(2.350.602)	(2.895.658)	(55.867.954)
Pendapatan non operasional - neto	88.970	185.381	327	(73.034)	14.751	216.395
Laba sebelum beban pajak	19.976.007	11.450.993	937.225	3.986.505	672.505	37.023.235
Beban pajak	(4.331.159)	(2.482.782)	(203.207)	(864.347)	(96.692)	(7.978.187)
Laba tahun berjalan	**15.644.848**	**8.968.211**	**734.018**	**3.122.158**	**575.813**	**29.045.048**
Aset segmen						
Kredit	252.850.653	270.601.420	184.548.972	-	31.335.475	739.336.520
CKPN	(11.827.384)	(3.202.568)	(14.032.310)	-	(1.041.875)	(30.104.137)
Non kredit	-	-	-	394.510.217	20.418.157	414.928.374
	241.023.269	**267.398.852**	**170.516.662**	**394.510.217**	**50.711.757**	**1.124.160.757**
Liabilitas segmen						
Pendanaan	243.794.632	304.439.989	255.091.949	-	38.329.880	841.656.450
Non pendanaan	-	-	-	108.064.289	9.718.972	117.783.261
	243.794.632	**304.439.989**	**255.091.949**	**108.064.289**	**48.048.852**	**959.439.711**

	Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut					
Keterangan	**Mikro**	**Ritel**	**Korporasi**	**Lainnya**	**Entitas Anak**	**Total**
Pendapatan bunga dan premi - neto	34.477.951	19.488.591	6.006.200	3.122.328	2.622.830	65.717.900
Pendapatan operasional lainnya	6.517.052	7.674.882	972.169	1.515.107	608.647	17.287.857
Total pendapatan	40.995.003	27.163.473	6.978.369	4.637.435	3.231.477	83.005.757
Beban operasional lainnya	(14.921.582)	(13.814.825)	(2.994.735)	(1.296.931)	(2.128.764)	(35.156.837)
Beban CKPN	(6.624.372)	(3.355.030)	(3.340.361)	-	(483.836)	(13.803.599)
Total beban	(21.545.954)	(17.169.855)	(6.335.096)	(1.296.931)	(2.612.600)	(48.960.436)
Pendapatan non operasional - neto	123.338	232.923	292.580	(633.642)	(13.485)	1.714
Laba sebelum beban pajak	19.572.387	10.226.541	935.853	2.706.862	605.392	34.047.035
Beban pajak	(4.499.665)	(2.351.067)	(215.151)	(622.304)	(73.597)	(7.761.784)
Laba tahun berjalan	**15.072.722**	**7.875.474**	**720.702**	**2.084.558**	**531.795**	**26.285.251**
Aset segmen						
Kredit	221.802.205	237.808.490	175.680.526	-	28.128.997	663.420.218
CKPN	(10.556.250)	(2.920.658)	(8.467.463)	-	(862.081)	(22.806.452)
Non kredit	-	-	-	348.325.310	13.322.884	361.648.194
	211.245.955	**234.887.832**	**167.213.063**	**348.325.310**	**40.589.800**	**1.002.261.960**
Liabilitas segmen						
Pendanaan	213.208.779	285.574.629	225.062.050	-	30.680.916	754.526.374
Non pendanaan	-	-	-	94.697.514	155.577.785	250.275.299
	213.208.779	**285.574.629**	**225.062.050**	**94.697.514**	**186.258.701**	**1.004.801.673**

41. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

c. Segmen Geografi

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografi (tidak diaudit):

	Total pendapatan		
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
Keterangan	**2018**	**2017**	**2016**
Indonesia	101.556.169	92.115.998	82.478.838
Amerika Serikat	416.697	500.743	473.146
Hong Kong	7.037	5.653	4.452
Singapura	12.222	47.246	49.321
Timor Leste	48.606	5.155	-
Total	**102.040.731**	**92.674.795**	**83.005.757**

	Laba sebelum beban pajak		
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
Keterangan	**2018**	**2017**	**2016**
Indonesia	41.592.245	36.660.678	33.682.912
Amerika Serikat	315.385	365.318	346.335
Hong Kong	298	199	167
Singapura	(174.233)	4.964	17.621
Timor Leste	19.999	(7.924)	-
Total	**41.753.694**	**37.023.235**	**34.047.035**

	Total aset		
Keterangan	**31 Desember 2018**	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Indonesia	1.269.539.970	1.105.560.539	985.395.191
Amerika Serikat	15.912.076	14.847.364	14.065.978
Singapura	5.526.456	3.365.196	2.794.839
Timor Leste	798.272	379.288	-
Hong Kong	6.865	8.370	5.952
Total	**1.291.783.639**	**1.124.160.757**	**1.002.261.960**

	Total liabilitas		
Keterangan	**31 Desember 2018**	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Indonesia	1.089.462.564	941.356.592	840.812.030
Amerika Serikat	15.690.108	14.330.575	13.656.808
Singapura	5.682.716	3.362.659	2.798.400
Timor Leste	787.151	387.328	-
Hong Kong	422	2.557	338
Total	**1.111.622.961**	**959.439.711**	**857.267.576**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Oktober 2017 adalah sebesar 26,65% (sebelumnya 25,02%).

Penilaian aktuaria atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,40%	7,60%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,50	7,50	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI 2011	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	56 tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

Mutasi atas nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti awal tahun	16.749.997	15.032.520	13.221.843
Beban bunga	1.252.182	1.191.806	1.151.483
Biaya jasa kini	310.856	316.354	286.216
Biaya jasa lalu	505.778	-	300.295
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(858.680)	(954.113)	(853.894)
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	(876.882)	1.163.430	926.577
Kurtailment	(1.539.054)	-	-
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti akhir tahun	**15.544.197**	**16.749.997**	**15.032.520**

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Nilai wajar aset program awal tahun	17.665.697	16.230.759	14.287.884
Hasil pengembangan riil	75.221	2.068.135	2.469.674
Pembayaran iuran-iuran (contributions) pemberi kerja	273.725	250.759	255.787
Pembayaran iuran-iuran (contributions) peserta program	70.845	70.157	71.308
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(858.680)	(954.113)	(853.894)
Penyelesaian	(1.642.904)	-	-
Aset program akhir tahun	**15.583.904**	**17.665.697**	**16.230.759**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	-	-	-
Beban program pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 35)	848.359	246.012	513.384
Pembayaran iuran periode berjalan	(273.725)	(250.759)	(255.787)
Pengukuran kembali liabilitas/ (aset) pensiun imbalan pasti - neto	(574.634)	4.747	(257.597)
Saldo akhir	**-**	**-**	**-**

Pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	(1.042.811)	(1.047.558)	(789.961)
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria	(876.882)	1.163.430	926.577
Imbal hasil atas aset program	1.247.835	(779.088)	(1.221.494)
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto liabilitas/(aset)	(945.587)	(379.595)	37.320
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	**(1.617.445)**	**(1.042.811)**	**(1.047.558)**

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	310.856	316.354	286.216
Iuran peserta program	(70.845)	(70.157)	(71.308)
Beban bunga - neto	(1.280)	(185)	(1.819)
Biaya jasa lalu	505.778	-	300.295
(Keuntungan) kerugian aktuaria	103.850	-	-
Beban pensiun imbalan pasti (Catatan 35)	**848.359**	**246.012**	**513.384**

b. Program Tunjangan Hari Tua

Karyawan BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuaria atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,80%	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2011	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Status THT sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Nilai wajar aset	4.024.261	3.696.006	3.286.981
Nilai kini kewajiban THT	(1.977.557)	(1.927.967)	(1.374.984)
Surplus	**2.046.704**	**1.768.039**	**1.911.997**

Mutasi atas kewajiban Tunjangan Hari Tua masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	-	-	-
Beban tunjangan hari tua	108.534	59.067	16.809
Pengukuran kembali liabilitas tunjangan hari tua - neto	53.959	37.473	74.546
Pembayaran iuran periode berjalan	(162.493)	(96.540)	(91.355)
Saldo akhir kewajiban	**-**	**-**	**-**

Pengukuran kembali atas liabilitas Tunjangan Hari Tua masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	239.574	202.101	127.555
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	(76.313)	478.657	335.918
Imbal hasil atas (aset)/liabilitas program	(12.253)	(138.530)	150.663
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga - neto	142.525	(302.654)	(412.035)
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas tunjangan hari tua - neto	**293.533**	**239.574**	**202.101**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Perhitungan beban THT untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	154.721	106.604	63.621
Iuran peserta program	(49.838)	(46.043)	(43.571)
Beban bunga - neto	3.651	(1.494)	(3.241)
Beban THT	**108.534**	**59.067**	**16.809**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar dimuka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan BRI juga tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

(i) BRI (Entitas Induk)

Karyawan BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp291.569, Rp256.675 dan Rp231.105 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 35). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh DPBRI.

(ii) BRI Agro (entitas anak)

BRI Agro menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah kontribusi BRI Agro untuk dana pensiun adalah sebesar 87,8% dari iuran yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat dari masing-masing karyawan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sebesar Rp875, Rp766 dan Rp696 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 35).

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

(i) BRI (Entitas Induk)

Perhitungan PHK menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuaria atas kewajiban BRI berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian disusun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, untuk tahun buku masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,70%	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2011	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	1.212.209	1.109.732	997.669
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	309.403	304.706	153.280
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(87.447)	(92.705)	(61.297)
Pengukuran kembali liabilitas/ (aset) pemutusan hubungan kerja - neto	(155.727)	(109.524)	20.080
Saldo akhir (Catatan 28)	**1.278.438**	**1.212.209**	**1.109.732**

Pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	(136.918)	(27.394)	(47.474)
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	(155.727)	(109.524)	20.080
Jumlah pengukuran kembali atas aset pemutusan hubungan kerja neto	**(292.645)**	**(136.918)**	**(27.394)**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(i) BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Perhitungan beban program PHK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	210.632	207.821	144.737
Beban bunga	98.771	96.885	93.544
Biaya jasa lalu	-	-	(85.001)
Beban PHK (Catatan 35)	**309.403**	**304.706**	**153.280**

(ii) BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuaria atas program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai perhitungan PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 4 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,10%	7,10%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00	5,00	5,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	12.829	58.108	46.966
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	12.190	13.214	12.599
Pembayaran manfaat aktual oleh BRISyariah	(24.333)	(68.254)	(2.723)
Pengukuran kembali (aset)/ liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	(686)	9.761	1.266
Saldo akhir (Catatan 28)	**-**	**12.829**	**58.108**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(ii) BRISyariah (Entitas Anak) (lanjutan)

Pengukuran kembali atas (aset)/liabilitas pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	(4.602)	(14.363)	(15.629)
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	(686)	9.761	1.266
Jumlah pengukuran kembali atas aset pemutusan hubungan kerja - neto	**(5.288)**	**(4.602)**	**(14.363)**

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	12.440	9.528	8.034
Beban bunga	(250)	3.686	4.565
Beban PHK (Catatan 35)	**12.190**	**13.214**	**12.599**

(iii) BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuaria atas program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,20%	7,50%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00	8,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari TMI 2011

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(iii) BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja pada tanggal-tanggal tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	39.057	35.519	27.420
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	7.401	8.052	10.245
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Agro	(881)	(2.245)	(1.540)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pemutusan hubungan kerja - neto	(4.611)	(2.269)	(606)
Saldo akhir (Catatan 28)	**40.966**	**39.057**	**35.519**

Pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	(1.827)	442	1.048
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	(4.611)	(2.269)	(606)
Jumlah pengukuran kembali atas (aset)/liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	**(6.438)**	**(1.827)**	**442**

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	5.991	4.991	3.212
Beban bunga	3.072	3.061	2.542
Biaya jasa lalu	(1.662)	-	4.491
Beban PHK (Catatan 35)	**7.401**	**8.052**	**10.245**

(iv) BRI Life (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(iv) BRI Life (Entitas Anak) (lanjutan)

Perhitungan aktuaria atas program pemutusan hubungan kerja pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen dalam laporannya pada tanggal-tanggal 2 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 6 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,25%	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI III 2011	10,00% dari TMI III 2011	10,00% dari TMI III 2011

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	60.706	48.692	41.044
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	9.972	8.098	4.711
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Life	(2.555)	(44)	(760)
Pengukuran kembali (aset)/liabilitas pemutusan hubungan kerja-neto	(4.194)	3.960	3.697
Saldo akhir (Catatan 28)	**63.929**	**60.706**	**48.692**

Pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) pemutusan hubungan kerja pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	10.558	6.598	2.901
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	(4.194)	3.960	3.697
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	**6.364**	**10.558**	**6.598**

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	5.520	4.124	2.798
Beban bunga	4.452	3.974	3.682
Biaya jasa lalu	-	-	(1.769)
Beban PHK (Catatan 35)	**9.972**	**8.098**	**4.711**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(v) BRI Finance (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuaria atas program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, sesuai perhitungan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 4 Januari 2019, 2 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	7,00%	7,00%	8,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	5,00% dari TMI 2011	5,00% dari TMI 2011	5,00% dari TMI 2011

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	10.676	9.168	16.055
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	3.096	1.871	2.490
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Finance	(2.024)	(971)	(5.074)
Pengukuran kembali (aset)/ liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	(1.438)	608	(4.303)
Saldo akhir (Catatan 28)	**10.310**	**10.676**	**9.168**

Pengukuran kembali atas (aset) liabilitas Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**	**31 Desember 2016**
Saldo awal	(5.134)	(5.742)	(1.439)
(Keuntungan)/kerugian	(1.438)	608	(4.303)
Jumlah pengukuran kembali atas aset pemutusan hubungan kerja - neto	**(6.572)**	**(5.134)**	**(5.742)**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(v) BRI Finance (Entitas Anak) (lanjutan)

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	1.326	1.133	1.061
Beban bunga	1.673	733	1.429
Biaya jasa lalu	97	5	-
Beban PHK (Catatan 35)	**3.096**	**1.871**	**2.490**

(vi) Danareksa Sekuritas (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuaria atas program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, sesuai perhitungan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 17 Januari 2019, 9 Februari 2018 dan 23 Februari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,50%	7,00%	8,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	10,00	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI II 1999	TMI II 1999	TMI II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	1,00% dari TMI II 1999	1,00% dari TMI II 1999	1,00% dari TMI II 1999

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	14.212	22.325	12.505
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	6.440	6.626	8.441
Iuran yang dibayarkan	(6.411)	(4.786)	(3.737)
Pengukuran kembali (aset)/ liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	(2.346)	(7.670)	6.045
Pembayaran manfaat aktual oleh Danareksa Sekuritas	(1.303)	(2.283)	(929)
Saldo akhir (Catatan 28)	**10.592**	**14.212**	**22.325**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(vi) Danareksa Sekuritas (Entitas Anak) (lanjutan)

Pengukuran kembali atas (aset) liabilitas Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal	2.884	(4.786)	1.259
(Keuntungan)/kerugian	2.346	7.670	(6.045)
Jumlah pengukuran kembali atas aset pemutusan hubungan kerja - neto	**5.230**	**2.884**	**(4.786)**

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	5.423	5.189	7.549
Beban bunga	996	1.401	889
Biaya jasa lalu	21	36	3
Beban PHK (Catatan 35)	**6.440**	**6.626**	**8.441**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain dana manfaat tambahan.

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,70%	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI 2011	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp1.115.960, Rp1.061.952 dan Rp940.341 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	1.061.952	940.341	833.576
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	129.290	155.894	150.349
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(75.282)	(34.283)	(43.584)
Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)	**1.115.960**	**1.061.952**	**940.341**

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	96.549	83.175	72.442
Beban bunga	81.762	86.831	76.320
(Keuntungan)/kerugian aktuaria yang diakui	(49.021)	(14.112)	1.587
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	**129.290**	**155.894**	**150.349**

ii. BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program penghargaan tanda jasa kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019 dan 4 Januari 2018, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember	
	2018	**2017**
Tingkat diskonto	8,00%	7,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	5,00	5,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI III 2011	10,00% dari TMI III 2011

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

ii. BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp390 dan Rp297 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2018	2017
Saldo awal kewajiban	297	-
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	194	719
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Agro	(101)	(422)
Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)	**390**	**297**

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Biaya jasa kini	148	274
Beban bunga	22	-
Kerugian aktuaria yang diakui	24	25
Biaya jasa lalu	-	420
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	**194**	**719**

iii. BRI Life (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program penghargaan tanda jasa kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa entitas anak masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 6 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Tingkat diskonto	8,25%	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI III 2011	10% dari TMI III 2011	10% dari TMI III 2011

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

iii. BRI Life (Entitas Anak) (lanjutan)

Nilai kini kewajiban atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp10.733, Rp10.289 dan Rp10.623 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	10.289	10.623	9.764
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	1.101	(51)	2.131
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Life	(657)	(283)	(1.272)
Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)	**10.733**	**10.289**	**10.623**

Perhitungan beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	1.210	935	729
Beban bunga	728	765	602
Kerugian /(keuntungan) aktuaria yang diakui	(837)	(1.305)	1.709
Biaya jasa lalu	-	(446)	(909)
Beban/(pendapatan) penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	**1.101**	**(51)**	**2.131**

iv. BRI Finance (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program penghargaan tanda jasa kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

iv. BRI Finance (Entitas Anak) (lanjutan)

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa entitas anak dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2019, 2 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Harga emas (nilai Rupiah penuh)	618.311	568.320	502.750
Rata-rata usia di bawah usia pensiun	36	37	36
Rata-rata usia di atas usia pensiun	58	-	-
Rata-rata masa kerja	7,90	8,63	7,71

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuaria masing-masing sebesar Rp711, Rp264 dan Rp244 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	264	244	356
Beban/(pendapatan) yang diakui dalam laba rugi (Catatan 35)	478	26	(65)
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Finance	(31)	(6)	(47)
Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)	**711**	**264**	**244**

Perhitungan beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	55	25	26
Beban bunga	18	20	(122)
Kerugian/(keuntungan) aktuaria yang diakui	405	(19)	31
Beban/(pendapatan) Penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	**478**	**26**	**(65)**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

v. Danareksa Sekuritas (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program penghargaan tanda jasa kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa entitas anak dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019, 9 Februari 2018 dan 23 Februari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,50%	7,00%	8,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	10,00	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI II 1999	TMI II 1999	TMI II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	1,00% dari TMI II 1999	1,00% dari TMI II 1999	1,00% dari TMI II 1999

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuaria masing-masing sebesar Rp2.471, Rp3.216 dan Rp3.747 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	3.216	3.747	5.017
Beban/(pendapatan) yang diakui dalam laba rugi (Catatan 35)	(201)	374	(248)
Pembayaran manfaat aktual	(543)	(905)	(1.022)
Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)	**2.472**	**3.216**	**3.747**

Perhitungan beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	316	358	385
Beban bunga	225	300	451
Kerugian/(keuntungan) aktuaria yang diakui	(742)	(284)	(1.084)
Beban/(pendapatan) Penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	**(201)**	**374**	**(248)**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.* Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,70%	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2011	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp1.788.260, Rp1.517.614 dan Rp1.314.399 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	1.517.614	1.314.399	1.119.535
Beban cuti besar (Catatan 35)	442.565	292.476	308.428
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(171.919)	(89.261)	(113.564)
Kewajiban cuti besar (Catatan 28)	**1.788.260**	**1.517.614**	**1.314.399**

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	195.947	217.623	187.174
Beban bunga	118.591	114.422	104.070
Kerugian/(keuntungan) aktuaria yang diakui	128.027	(39.569)	17.184
Beban cuti besar (Catatan 35)	**442.565**	**292.476**	**308.428**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

ii. BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 2 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 4 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,10%	7,10%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00	5,00	5,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI III 2011	10,00% dari TMI III 2011	10,00% dari TMI III 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar entitas anak berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebesar Rp44.466, Rp30.304 dan Rp25.294 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	30.304	25.294	32.828
Beban cuti besar (Catatan 35)	15.493	10.046	985
Pembayaran manfaat aktual oleh BRISyariah	(1.331)	(5.036)	(8.519)
Kewajiban cuti besar (Catatan 28)	**44.466**	**30.304**	**25.294**

Beban cuti besar entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	7.379	5.372	6.485
Beban bunga	2.366	1.721	2.927
Kerugian/(keuntungan) aktuaria yang diakui	5.748	2.953	(8.427)
Beban cuti besar (Catatan 35)	**15.493**	**10.046**	**985**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

iii. BRI Agro (entitas anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar entitas anak pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	7,70%	6,00%	7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	6,50	8,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar entitas anak berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebesar Rp3.501, Rp3.026 dan Rp2.202 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	3.026	2.202	1.957
Beban cuti besar (Catatan 35)	961	1.304	1.046
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Agro	(486)	(480)	(801)
Kewajiban cuti besar (Catatan 28)	**3.501**	**3.026**	**2.202**

Beban cuti besar entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	1.046	1.081	844
Beban bunga	182	188	172
(Keuntungan)/kerugian aktuaria yang diakui	(267)	35	30
Beban cuti besar (Catatan 35)	**961**	**1.304**	**1.046**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

iv. BRI Life (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dilakukan oleh PT Padma Raya Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 2 Januari 2019, 4 Januari 2018 dan 6 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,25%	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI III 2011	10% dari TMI III 2011	10% dari TMI III 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar entitas anak berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebesar Rp10.131, Rp9.050 dan Rp7.542 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	9.050	7.542	2.221
Beban cuti besar (Catatan 35)	3.895	2.086	6.161
Pembayaran manfaat aktual	(2.814)	(578)	(840)
Kewajiban cuti besar (Catatan 28)	**10.131**	**9.050**	**7.542**

Perhitungan beban cuti besar entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	3.030	2.619	1.990
Biaya jasa lalu	-	-	2.678
Beban Bunga	536	533	412
(Keuntungan)/kerugian aktuaria yang diakui	329	(1.066)	1.081
Beban cuti besar (Catatan 35)	**3.895**	**2.086**	**6.161**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

v. BRI Finance (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2019, 2 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	7,00%	7,00%	8,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	5,00% dari TMI 2011	5,00% dari TMI 2011	5,00% dari TMI 2011

Mutasi atas kewajiban cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	654	317	485
Beban cuti besar (Catatan 35)	153	385	181
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Finance	(150)	(48)	(349)
Kewajiban cuti besar (Catatan 28)	**657**	**654**	**317**

Perhitungan beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	93	83	48
Beban bunga	46	25	43
(Keuntungan)/kerugian aktuaria yang diakui	14	277	90
Beban cuti besar (Catatan 35)	**153**	**385**	**181**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

vi. Danareksa Sekuritas (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen dalam laporannya masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019, 9 Februari 2018 dan 23 Februari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Tingkat diskonto	8,50%	7,00%	8,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	10,00	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI II 1999	TMI II 1999	TMI II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	1,00% dari TMI II 1999	1,00% dari TMI II 1999	1,00% dari TMI II 1999

Mutasi atas kewajiban cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Saldo awal kewajiban	2.575	2.655	2.157
Beban cuti besar (Catatan 35)	411	546	1.292
Pembayaran manfaat aktual	(468)	(626)	(794)
Kewajiban cuti besar (Catatan 28)	**2.518**	**2.575**	**2.655**

Perhitungan beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Biaya jasa kini	406	403	413
Beban bunga	181	213	193
(Keuntungan)/kerugian aktuaria yang diakui	(176)	(70)	686
Beban cuti besar (Catatan 35)	**411**	**546**	**1.292**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuaria atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 3 Januari 2019 dan 4 Januari 2018 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember	
	2018	**2017**
Tingkat diskonto	8,70%	7,60%
Skala kenaikan iuran BPJS	4,88	4,00
Tingkat kematian	TMI 2011	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011	10,00% dari CSO 1958

Status program kesehatan pasca kerja BPJS sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2018	**2017**
Nilai kini kewajiban program kesehatan pasca kerja BPJS	795.084	790.946
Nilai wajar aset	(917.435)	(547.687)
(Defisit)/Surplus	**(122.351)**	**243.259**

Mutasi untuk cadangan atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2018	**2017**
Saldo awal kewajiban	243.259	-
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	141.390	243.259
Pembayaran iuran periode berjalan	(372.884)	-
Pengukuran kembali liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	(11.765)	-
Kewajiban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 28)	**-**	**243.259**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas program kesehatan pasca kerja di BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2018	**2017**
Saldo awal	-	-
(Keuntungan) aktuaria	(174.249)	-
Imbal hasil atas aset program	40.133	-
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto liabilitas	122.351	-
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	**(11.765)**	**-**

Beban program kesehatan pasca kerja di BPJS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Biaya jasa kini	29.959	2.450
Beban bunga - neto	5.456	-
Biaya jasa lalu	105.975	240.809
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	**141.390**	**243.259**

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan

i. BRI (Entitas Induk)

Penilaian aktuaria atas beban pensiun BRI pada tanggal 31 Desember 2018 dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 3 Januari 2019 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode Projected Unit Credit serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2018
Tingkat diskonto	8,40%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00
Tingkat kematian	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2011
Usia pensiun normal	56 tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Mutasi atas nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti awal tahun	-
Biaya jasa lalu	1.696.462
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(157.408)
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti akhir tahun	**1.539.054**

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018
Nilai wajar aset program awal tahun	-
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(157.408)
Penyelesaian	1.800.312
Aset program akhir tahun	**1.642.904**

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018
Saldo awal	-
Pendapatan program pensiun imbalan pasti – neto	(103.850)
Pengukuran kembali liabilitas/ (aset) pensiun imbalan pasti - neto	103.850
Saldo akhir	**-**

Pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018
Saldo awal	-
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto liabilitas/(aset)	103.850
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	**103.850**

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Biaya jasa lalu	1.696.462
(Keuntungan) kerugian aktuaria	(1.800.312)
Pendapatan pensiun imbalan pasti	**(103.850)**

43. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Komitmen			
Tagihan komitmen			
Pembelian *spot* dan berjangka mata uang asing	16.316.902	4.038.459	12.219.746
Liabilitas komitmen			
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	130.854.091	107.073.032	120.916.072
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 27c)	8.693.691	8.980.671	8.541.152
Penjualan spot dan berjangka mata uang asing	18.476.485	13.000.508	7.109.202
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	65.330	105.497	254.649
	158.089.597	129.159.708	136.821.075
Komitmen - neto	**(141.772.695)**	**(125.121.249)**	**(124.601.329)**
Kontinjensi			
Tagihan kontinjensi			
Tagihan bunga dalam penyelesaian	112.273	70.905	45.208
Liabilitas kontinjensi			
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27c) dalam bentuk:			
Standby L/C	13.535.519	10.841.726	3.838.190
Garansi bank	31.350.532	23.188.654	20.684.825
	44.886.051	34.030.380	24.523.015
Kontinjensi - neto	**(44.773.778)**	**(33.959.475)**	**(24.477.807)**

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Kementerian Pertahanan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
Karyawan kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan Syariah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Adhimix Precast Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Aerotrans Services Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Angkasa Pura I (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Piutang dan Pembiayaan Syariah
PT Asuransi Jiwasraya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Asuransi Jasa Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Aset Tetap
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Aset Tetap
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Bank BNI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bank Mandiri Taspen	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT Bank Syariah Mandiri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT BTN Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT BNI Multifinance	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Citra Waspphutowa	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan Pembiayaan Syariah
PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Kredit yang diberikan, Tagihan Akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor,
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Tagihan akseptasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Kimia Farma (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Kimia Farma Trading dan Distribusi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Koperasi Karyawan BRISyariah	Hubungan kepengurusan	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan	Tagihan akseptasi
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Len Industri (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Len Railways System	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Mandiri Utama Finance	Hubungan kepemilikanpembang Melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Kredit yang diberikan, Tagihan Akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pertamina Patraniaga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, tagihan wesel ekspor dan wesel tagih

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Perkebunan Nusantara XI	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pembangkitan Jawa-Bali	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek
PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Telekomunikasi Selular Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Beton Precast Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih, Piutang dan pembiayaan syariah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi
Yayasan Pendidikan Telkom	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Aset			
Giro pada bank lain (Catatan 5)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.270	95.995	146.848
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.291	17.429	16.553
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.809	3.982	5
PT Bank Syariah Mandiri	44	33	74
PT Bank BNI Syariah	3	79	74
	92.417	117.518	163.554
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain (Catatan 6)			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.200.000	135.675	200.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	650.200	43.400	58.400
PT Mandiri Utama Finance	200.000	-	-
PT BNI Multifinance	100.000	-	-
PT Sarana Multigriya Finansial	100.000	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	36.000	-	-
PT BTN Syariah	30.200	8.550	4.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29.500	7.200	8.220
PT Bank BNI Syariah	2.000	2.000	2.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.000	135.675	200.000
	2.349.900	332.500	472.620
Efek-efek (Catatan 7)			
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	141.668.852	123.064.282	92.284.499
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.905.291	1.367.453	1.481.711
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.685.747	1.386.317	843.790
PT Pupuk Indonesia (Persero)	990.581	990.729	116.011
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	982.849	645.144	460.620
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	912.628	480.181	296.580
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	707.878	682.133	142.070
PT Pegadaian (Persero)	634.129	627.632	569.660
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	426.530	617.343	89.573
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	388.149	237.256	231.282
Lain-lain	3.717.873	4.089.882	4.532.365
	154.020.507	134.188.352	101.048.161
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih (Catatan 8)			
PT Pertamina (Persero)	2.429.223	799.827	932
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.000.000	-	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	801.173	18.267	190.513
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	665.197	-	-
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	497.832	-	-
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	122.201	3.134	-
PT Waskita Beton Precast Tbk	69.447	7.797	167.995
PT Angkasa Pura I (Persero)	58.105	-	-
PT Wijaya Karya Beton Tbk	51.060	14.134	30.455
PT Aerotrans Services Indonesia	39.009	4.719	-
Lainnya	125.408	45.541	246.362
	6.858.655	893.419	636.257
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (Catatan 9)			
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	1.505.273	3.317.840	3.318.434

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Aset (lanjutan)			
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10)			
PT Asuransi Jiwasraya	1.149.156	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	102.213	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	229.983
	1.251.369	-	229.983
Kredit yang diberikan (Catatan 12)			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	23.616.099	27.039.931	27.446.991
Perum BULOG	16.316.937	9.049.660	16.112.248
PT Pertamina (Persero)	11.575.627	1.760.382	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	3.032.393	1.776.795	1.621.845
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.897.733	2.375.195	1.968.132
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.893.383	2.438.770	1.735.635
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	2.804.944	3.450.797	4.307.997
PT Trans Jabar Tol	2.438.362	748.931	-
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	2.338.069	-	-
PT Petrokimia Gresik	2.222.289	1.428.976	980.595
Lain-lain	40.651.278	46.166.684	39.539.172
	110.787.114	96.236.121	93.712.615
Piutang dan Pembiayaan Syariah (Catatan 13)			
PT Waskita Beton Precast Tbk	512.000	400.000	-
PT Pegadaian (Persero)	400.000	400.000	300.000
PT Adhimix Precast Indonesia	314.043	-	-
PT Angkasa Pura I (Persero)	229.824	-	-
PT Citra Waspphutowa	213.515	-	-
PT Kimia Farma (Persero)	110.000	-	-
PT Kimia Farma Trading and Distribusi	100.000	-	-
PT Koperasi Karyawan BRISyariah	92.410	105.436	112.576
PT Prima Armada Raya	85.798	-	-
Yayasan Pendidikan Telkom	85.370	-	-
Karyawan kunci	9.946	17.180	13.346
Lain-lain	285.525	74.482	80.916
	2.438.431	997.098	506.838
Tagihan Akseptasi (Catatan 15)			
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	716.140	-	-
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	421.000	274.365	66.490
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	173.595	136.471	-
PT Pertamina (Persero)	57.812	607.723	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	51.003	189.270	119.260
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	12.031	-	-
PT Pertamina Patra Niaga	11.326	-	23.759
PT Len Industri (Persero)	7.975	2.379	6.459
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	7.953	241	-
PT Len Railways System	7.593	2.131	-
Lainnya	11.265	126.536	278.677
	1.477.693	1.339.116	494.645
Penyertaan saham (Catatan 16)			
PT Danareksa Investment Management	372.271	-	-
PT Bahana Artha Ventura	72.607	71.382	-
	444.878	71.382	-
Total aset dari pihak-pihak berelasi	**281.226.237**	**237.493.346**	**200.583.107**
Total aset konsolidasian	**1.296.898.292**	**1.127.447.489**	**1.004.801.673**
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	**21,68%**	**21,06%**	**19,96%**

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Liabilitas			
Giro (Catatan 20)			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	53.016.669	45.075.744	44.484.819
Karyawan kunci	26.672	1.547	632
Lain-lain	1.435	19.629	23.533
	53.044.776	45.096.920	44.508.984
Tabungan (Catatan 21)			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	89.093	80.414	18.806
Karyawan kunci	167.112	147.366	86.529
Lain-lain	44.581	11.933	6.150
	300.786	239.713	111.485
Deposito Berjangka (Catatan 22)			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	85.832.772	93.732.744	79.043.913
Karyawan kunci	157.555	120.479	118.601
Lain-lain	1.878.913	1.592.220	828.258
	87.869.240	95.445.443	79.990.772
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 23)			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.251.129	1.146.162	499.475
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 24)			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.934.600	1.465.014	1.454.477
Liabilitas Akseptasi (Catatan 15)			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.477.693	1.339.116	494.645
Pinjaman yang Diterima (Catatan 26)			
Entitas dan Lembaga Pemerintah	454.595	5.685	105.510
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci (Catatan 42)			
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	366.707	275.514	369.514
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	129.433	61.379	80.094
Nilai kini kewajiban tunjangan hari tua	92.444	61.989	68.082
Nilai kini kewajiban cuti besar	54.069	37.813	42.531
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	42.492	29.720	37.807
Nilai kini kewajiban program manfaat lain pembayaran manfaat pasti	11.523	-	-
	696.668	466.415	598.028
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	**147.029.487**	**145.204.468**	**127.763.376**
Total liabilitas konsolidasian	**1.111.622.961**	**959.439.711**	**857.267.576**
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	**13,23%**	**15,13%**	**14,90%**

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2017	2016
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif			
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27c)			
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.479.242	2.516.028	2.348.096
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.361.314	2.316.148	2.457.968
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2.333.382	714.859	225.841
PT Pertamina (Persero)	1.922.168	1.428.608	141.439
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.254.834	1.252.015	1.507.044
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.178.058	407.897	298.690
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.003.360	572.200	640.776
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	882.663	1.897.681	2.310.583
PT Pertamina Hulu Rokan	719.000	-	-
PT Telekomunikasi Selular Tbk	519.702	492.264	463.357
Lain-lain	5.061.296	5.919.721	3.605.578
	20.715.019	17.517.421	13.999.372
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 27c)			
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.263.630	1.512.405	947.591
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	748.692	-	270.468
PT Pindad (Persero)	542.655	514.038	62.824
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	426.691	248.777	1.477.564
Kementerian Pertahanan	409.729	93.905	541.153
PT Pupuk Kalimantan Timur	260.822	53.504	-
PT Pertamina (Persero)	196.051	756.452	835.210
PT Perkebunan Nusantara XI	190.210	4.344	-
PT Petrokimia Gresik	168.222	38.430	86.325
PT Pembangkitan Jawa-Bali	123.510	107.853	103.498
Lain-lain	755.917	2.463.202	2.129.483
	5.086.129	5.792.910	6.454.116

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2017	2016
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 35)			
Gaji dan tunjangan Direksi	362.081	92.556	74.062
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	128.603	29.863	27.543
Total	**490.684**	**122.419**	**101.605**
***Tantiem*, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci (Catatan 35)**			
Tantiem Direksi	268.226	239.461	217.443
Tantiem Dewan Komisaris	99.290	99.622	84.028
Bonus dan insentif karyawan kunci	40.088	94.456	103.171
Total	**407.604**	**433.539**	**404.642**

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Aset			
Giro pada Bank lain	0,007%	0,010%	0,016%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0,181	0,029	0,047
Efek-efek	11,876	11,902	10,057
Tagihan Wesel Ekspor dan wesel tagih	0,529	0,079	0,063
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	0,116	0,294	0,330
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	0,096	-	0,023
Kredit yang Diberikan	8,542	8,536	9,326
Piutang dan Pembiayaan Syariah	0,188	0,088	0,050
Tagihan Akseptasi	0,114	0,119	0,049
Penyertaan Saham	0,034	0,006	-
Total	**21,683%**	**21,063%**	**19,961%**
Liabilitas			
Giro	4,772%	4,700%	5,192%
Tabungan	0,027	0,025	0,013
Deposito Berjangka	7,905	9,948	9,331
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,113	0,119	0,058
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	0,174	0,153	0,170
Liabilitas Akseptasi	0,133	0,140	0,058
Pinjaman yang Diterima	0,041	0,001	0,012
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan Kunci	0,063	0,049	0,070
Total	**13,228%**	**15,134%**	**14,904%**

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Siginifikan

Pada tanggal 29 Desember 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT PP (Persero) sehubungan dengan pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto Paket 2 (dua) untuk jangka waktu 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp845.950.

Pada tanggal 12 Oktober 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan 600 (enam ratus) Unit CRM (Cash Recycling Machine) untuk RBB BRI tahun 2018 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp92.400

Pada tanggal 12 Oktober 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pengadaan *upgrade* 230 unit *server* di DC GTI dan Tabanan untuk jangka waktu 19 (sembilan belas) minggu dengan nilai kontrak sebesar Rp69.027.

Pada tanggal 14 Februari 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT PP (Persero) sehubungan dengan pengadaan jasa kontraktor pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto Paket 1 (satu) untuk jangka waktu 380 (tiga ratus delapan puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp112.900.

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Siginifikan (lanjutan)

Pada tanggal 24 Januari 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sehubungan dengan pengadaan sewa saluran komunikasi pejabat kredit lini sebagai sarana pendukung aplikasi BRISPOT dan MYBRI untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp275.895.

Pada tanggal 15 November 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Asaba Computer Centre sehubungan dengan pengadaan 780 (tujuh ratus delapan puluh) unit CRM untuk RBB BRI tahun 2017 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp100.558.

Pada tanggal 13 September 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara sehubungan dengan pengadaan jasa *maintenance agreement* 2 (dua) unit mesin IBM AS400 Power8 E880 periode 2017 sampai dengan 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.

Pada tanggal 17 Mei 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Anabatic Technologies Tbk sehubungan dengan pengadaan 2 (dua) unit mesin *mainframe* Z13S N10 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp69.000.

Pada tanggal 9 Mei 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan pengadaan sewa perangkat *Hub* dan *Remote* VSAT Fase-1 Integrasi BRIsat untuk 2.278 (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) lokasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp67.994.

Pada tanggal 13 April 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Ingenico International Indonesia sehubungan dengan pengadaan 45.750 (empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) unit EDC untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp74.572.

Pada tanggal 23 Desember 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan sewa perangkat *Hub* dan *Remote* VSAT Fase-1 Integrasi BRIsat untuk 6.836 (enam ribu delapan ratus tiga puluh enam) lokasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp210.549.

Pada tanggal 9 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara sehubungan dengan pengadaan 2 (dua) unit Mesin AS/400 Power-8 (E880) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp220.000.

Pada tanggal 1 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan Koperasi Swakarya BRI sehubungan dengan pengadaan 3.000 (tiga ribu) unit ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp250.805.

Pada tanggal 1 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Titan Sarana Niaga sehubungan dengan pengadaan 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) unit ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp188.073.

Pada tanggal 1 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Asaba Computer Centre sehubungan dengan pengadaan 1.500 (seribu lima ratus) unit ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp125.382.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, di mana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Liabilitas Kontinjensi (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp1.060.301, Rp971.354 dan Rp613.720 (Catatan 29). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebankan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Program penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan pasal 29 bahwa "Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (angka penuh)."

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 6,75%, 5,75% dan 6,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 2,00%, 0,75% dan 0,75%.

47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:

a. ISAK No. 33, ”Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”, mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

b. ISAK No. 34, ”Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”, mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

c. PSAK No. 24 (Amandemen 2018), ”Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”, memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada saat awal pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK No.24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlibat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak atas aset berubah.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

a. PSAK No. 62 (Amandemen 2017), ”Kontrak Asuransi”, Amandemen ini mengizinkan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK No.71 (deferral approach) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (overlay approach).

b. PSAK No. 71, ”Instrumen Keuangan”, mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

c. PSAK No. 72, ”Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”, yang diadopsi dari IFRS 15, merupakan standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

d. PSAK No. 73, ”Sewa”, menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilai rendah.

e. PSAK No. 15 (Amandemen 2017), ”Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”, mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38.

Saat ini BRI dan entitas anak sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

48. INFORMASI TAMBAHAN

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, BRI wajib membentuk tambahan modal penyangga (buffer) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge*, yang wajib dibentuk secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2018, pembentukan modal penyangga (buffer) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* yang wajib dibentuk oleh BRI berdasarkan persentase tertentu dari ATMR adalah masing-masing sebesar 1,875%, 0,000% dan 1,875%.

Berdasarkan profil risiko BRI pada tanggal-tanggal 30 Juni 2018, 2017 dan 2016 yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Penentuan kepatuhan BRI terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (Entitas Induk) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Modal Inti (Tier 1)			
Modal Inti Utama (CET 1)	164.924.546	154.668.699	136.670.139
Modal Pelengkap (Tier 2)	8.693.875	7.083.240	6.240.293
Total Modal	**173.618.421**	**161.751.939**	**142.910.432**
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			
ATMR untuk Risiko Kredit *)	659.319.661	566.659.194	502.423.401
ATMR untuk Risiko Pasar **)	11.078.731	6.889.063	9.535.428
ATMR untuk Risiko Operasional ***)	148.209.848	130.967.728	111.898.899
Total ATMR	**818.608.240**	**704.515.985**	**623.857.728**

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

CAR BRI (Entitas Induk) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dihitung sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rasio CAR			
Rasio CET 1	20,15%	21,95%	21,91%
Rasio Tier 1	20,15	21,95	21,91
Rasio Tier 2	1,06	1,01	1,00
Rasio Total	21,21	22,96	22,91
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50	4,50	4,50
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00	9,00	9,00

*) Risiko Kredit dihitung berdasarkan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.
**) Risiko Pasar dihitung berdasarkan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.
***) Risiko Operasional dihitung berdasarkan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016.

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, rasio NPL BRI adalah sebagai berikut:

(i) Konsolidasian (termasuk piutang dan pembiayaan syariah)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rasio NPL - kotor	2,27%	2,22%	2,11%
Rasio NPL - neto	1,04	0,98	1,15

(ii) BRI (Entitas Induk)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Rasio NPL - kotor	2,14%	2,10%	2,03%
Rasio NPL - neto	0,92	0,88	1,09

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

c. Kegiatan Jasa Kustodian

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Jasa Kustodian (lanjutan)

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa penyimpanan (safe keeping services) dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (settlement handling);
- Jasa penagihan penghasilan (income collection), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (reporting services);
- Jasa *Custody Unit Link* dan DPLK;
- Jasa Kustodian untuk sekuritisasi aset; dan
- Jasa Kustodian Global untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri.

BRI memiliki 287 (dua ratus delapan puluh tujuh), 258 (dua ratus lima puluh delapan) dan 210 (dua ratus sepuluh) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, terutama dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan asuransi, perusahaan sekuritas, reksadana dan institusi lainnya.

Aset milik nasabah yang dititipkan pada Kustodian BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp363.679.331, Rp298.786.806 dan Rp320.285.896 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1996. Izin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pemantau

BRI memiliki 35 (tiga puluh lima), 31 (tiga puluh satu) dan 26 (dua puluh enam) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Jumlah obligasi yang diwaliamanati oleh BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp78.155.596, Rp69.044.870 dan Rp66.099.135 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

e. Jasa *Trust*

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset *financial* untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa *Trust* di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa *Trust* BRI meliputi:

- Layanan Jasa Agen Pembayar
- Layanan Jasa Agen Peminjaman
- Layanan Jasa Agen Investasi
- Layanan Jasa Keagenan Lainnya, seperti misalnya Agen Penampungan dan Agen Jaminan

BRI saat ini telah memberikan pelayanan Jasa *Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan Jasa *Trust*, BRI juga memberikan layanan jasa Agen Pembayar dan Agen Penampungan (non Trust) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, Jasa *Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

Nilai proyek kelolaan Jasa *Trust* BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp89.623.809, Rp67.285.809 dan Rp37.515.581, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

f. Agen Sindikasi

BRI saat ini memberikan pelayanan Jasa Agen Sindikasi untuk pembiayaan kredit sindikasi dari beberapa sektor/industri diantaranya sektor agribisnis, infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, minyak & gas, tekstil, properti dan manufaktur yang melibatkan proyek-proyek pemerintah (BUMN) maupun proyek-proyek swasta.

Jasa agen sindikasi ini merupakan bagian dari kegiatan *Trust and Corporate Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- *Arranger*
- Agen Fasilitas
- Agen Jaminan
- Agen Penampungan

Jasa Agen Sindikasi BRI telah mengelola berbagai proyek sindikasi dengan total nilai proyek (tidak diaudit) adalah sebesar Rp235.100.303, Rp142.304.126 dan Rp141.670.733, masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

49. LABA PER LEMBAR SAHAM

Perhitungan laba tahun berjalan per lembar saham dasar adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	32.351.133	122.237.220.000	264,66

	31 Desember 2017		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	28.997.141	122.386.510.666	236,93

	31 Desember 2016		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	26.234.256	122.387.068.383	214,07

Jumlah saham biasa yang beredar sebelum pemecahan saham dan penerbitan saham bonus, dimana saham biasa yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan disesuaikan dengan perubahan tersebut seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan saham PT BRI Ventura sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f). Berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, PT Danareksa (Persero) telah menjual kepemilikannya atas PT Danareksa Sekuritas sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f).

Transaksi-transaksi jual beli tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Untuk penyajian transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan metode penyatuan kepemilikan, laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan seakan-akan penggabungan usaha tersebut terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas. Ekuitas dari Danareksa Sekuritas dan BRI Ventura sebelum tanggal penggabungan disajikan sebagai "ekuitas *merging entities*" pada bagian ekuitas. Rincian jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
Danareksa Sekuritas	446.888	366.359	80.529
BRI Ventura	3.090	2.424	666
Jumlah	449.978	368.783	81.195

Pengaruh penyajian kembali pada laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017		
	Sebelum Penyesuaian akun	Penyesuaian akun	Setelah Penyesuaian akun
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Aset			
Kas	24.797.782	255	24.798.037
Giro pada Bank lain	5.925.684	206.828	6.132.512
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	55.105.687	51.075	55.156.762
Efek-efek	186.919.436	20.160	186.939.596
Tagihan derivatif	145.928	16.984	162.912
Penyertaan saham	73.821	9.329	83.150
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(50)	(50)
Aset tetap			
Biaya perolehan	33.972.363	18.444	33.990.807
Akumulasi penyusutan	(9.226.057)	(12.715)	(9.238.772)
Aset pajak tangguhan - neto	3.270.231	16.501	3.286.732
Aset lain-lain - neto	20.199.819	872.236	21.072.055
Liabilitas			
Utang pajak	564.798	4.218	569.016
Pinjaman yang diterima	29.403.009	5.685	29.408.694
Liabilitas lain-lain	13.285.656	508.857	13.794.513
Liabilitas imbalan kerja	12.174.258	20.003	12.194.261
Ekuitas			
Ekuitas *merging entity*	-	443.016	443.016
Kepentingan non-pengendali	598.677	217.268	815.945

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Pengaruh penyajian kembali pada laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017		
	Sebelum Penyesuaian akun	Penyesuaian akun	Setelah Penyesuaian akun
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			
Pendapatan bunga	100.080.250	13.083	100.093.333
Beban bunga	(28.652.214)	(477)	(28.652.691)
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	10.442.240	171	10.442.411
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	5.050.713	4	5.050.717
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	784.667	(166)	784.501
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	183.974	103	184.077
Lain-lain	2.578.558	175.468	2.754.026
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan-neto	(239.132)	(19.392)	(258.524)
Beban operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	(20.352.004)	(88.954)	(20.440.958)
Umum dan administrasi	(13.146.944)	(52.487)	(13.199.431)
Lain-lain	(4.942.700)	(30.987)	(4.973.687)
Pendapatan non operasional - neto	216.323	72	216.395
Beban pajak	(7.977.823)	(364)	(7.978.187)
Penghasilan komprehensif lainnya			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	53.985	7.670	61.655
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(13.496)	(1.918)	(15.414)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	2.289.836	(3.586)	2.286.250
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(528.353)	894	(527.459)
Laporan Arus Kas Konsolidasian			
Arus kas dari kegiatan operasi			
Pendapatan operasional lainnya	13.745.727	(25.064)	13.720.663
Beban operasional lainnya	(32.263.843)	(45.201)	(32.309.044)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(339.187)	(51.075)	(390.262)
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(720.255)	17.494	(702.761)
Aset lain-lain	(8.932.144)	(222.722)	(9.154.866)
Liabilitas lain-lain	2.418.063	112.811	2.530.874
Arus kas dari kegiatan pendanaan			
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	(5.663.258)	175	(5.663.083)

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Pengaruh penyajian kembali pada laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2016		
	Sebelum Penyesuaian akun	Penyesuaian akun	Setelah Penyesuaian akun
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Aset			
Kas	25.212.024	202	25.212.226
Giro pada Bank lain	11.022.715	258.080	11.280.795
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	78.142.754	106.079	78.248.833
Efek-efek	132.064.102	22.656	132.086.758
Tagihan derivatif	91.657	12.250	103.907
Penyertaan saham	2.439	9.329	11.768
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(50)	(50)
Aset tetap			
Biaya perolehan	32.262.349	18.444	32.280.793
Akumulasi penyusutan	(7.747.290)	(9.370)	(7.756.660)
Aset pajak tangguhan	2.520.930	18.783	2.539.713
Aset lain-lain	11.675.230	720.844	12.396.074
Liabilitas			
Utang pajak	942.401	14.152	956.553
Pinjaman yang diterima	35.008.170	5.510	35.013.680
Liabilitas lain-lain	10.111.453	387.351	10.498.804
Liabilitas imbalan kerja	9.451.203	28.747	9.479.930
Ekuitas			
Ekuitas *merging entity*	-	483.908	483.908
Kepentingan non-pengendali	391.248	237.599	628.847
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			
Pendapatan bunga	91.358.338	20.979	91.379.317
Beban bunga	(27.541.214)	(88)	(27.541.302)
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	9.222.558	3.518	9.226.076
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	4.496.825	13	4.496.838
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah - neto	447.580	3.315	450.895
Lain-lain	2.800.801	278.645	3.079.446
Beban penyisihan kerugian penurunan Nilai atas aset non-keuangan-neto	(90.757)	(12.948)	(103.705)
Beban operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	(18.485.014)	(108.962)	(18.593.976)
Umum dan administrasi	(11.975.745)	(68.162)	(12.043.907)
Lain-lain	(4.206.014)	(38.831)	(4.244.845)
Pendapatan non operasional - neto	9.228	(7.514)	1.714
Beban pajak	(7.745.779)	(16.005)	(7.761.784)

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Pengaruh penyajian kembali pada laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2016		
	Sebelum Penyesuaian akun	Penyesuaian akun	Setelah Penyesuaian akun
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (lanjutan)			
Penghasilan komprehensif lainnya			
Pengukuran kembali atas program Imbalan pasti	165.615	(6.046)	159.569
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(532.239)	1.512	(530.727)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia Untuk dijual	1.641.313	17.383	1.658.696
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(412.621)	(4.345)	(416.966)
Laporan Arus Kas Konsolidasian			
Arus kas dari kegiatan operasi			
Pendapatan operasional lainnya	9.333.633	455.900	9.789.533
Beban operasional lainnya	(35.311.295)	279.424	(35.031.871)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi			
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	254.367	(22.656)	231.711
Aset lain-lain	986.421	(720.841)	265.580
Liabilitas lain-lain	3.216.527	416.078	3.632.605
Arus kas dari kegiatan investasi			
Perolehan aset tetap	(3.653.072)	(1.268)	(3.654.340)
Arus kas dari kegiatan pendanaan			
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	(647.350)	(5.510)	(652.860)

51. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN

	31 Desember 2017	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2018
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	29.408.694	11.251.381	(421.988)	219.342	40.457.429
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	986.450	497.377	(10.312)	-	1.473.515
Surat berharga yang diterbitkan	30.619.658	9.600.185	(8.939.750)	(89.877)	31.190.216
Total	**61.014.802**	**21.348.943**	**(9.372.050)**	**129.465**	**73.121.160**

51. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)

	31 Desember 2016	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2017
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	35.013.680	1.801.080	(187.889)	(7.218.177)	29.408.694
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.008.510	141	(22.399)	198	986.450
Surat berharga yang diterbitkan	24.800.781	10.242.963	(4.921.000)	496.914	30.619.658
Total	**60.822.971**	**12.044.184**	**(5.131.288)**	**(6.721.065)**	**61.014.802**

	31 Desember 2015	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2016
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	35.480.358	7.718.818	(5.680.867)	(2.504.629)	35.013.680
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	56.468	973.038	(35.843)	14.847	1.008.510
Surat berharga yang diterbitkan	10.521.103	15.510.825	(980.000)	(251.147)	24.800.781
Total	**46.057.929**	**24.202.681**	**(6.696.710)**	**(2.740.929)**	**60.822.971**

52. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Perubahan Pengurus BRI

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI (entitas induk) pada tanggal 3 Januari 2019, pemegang saham menyetujui perubahan pengurus, adalah sebagai berikut:

a. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Jeffry J. Wurangian sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal 20 September 2018.
b. Memberhentikan dengan hormat Kuswiyoto sebagai Direktur *Corporate Banking*, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.
c. Mengangkat Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama.

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
ASET			
Kas	27.170.584	24.437.571	24.865.133
Giro pada Bank Indonesia	68.617.459	55.598.024	53.398.240
Giro pada Bank lain	11.277.405	5.803.057	10.792.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	82.681.600	53.384.610	77.574.246
Efek-efek	164.490.940	171.079.651	120.083.644
Tagihan Wesel Ekspor dan Wesel Tagih	27.442.690	10.654.353	11.580.175
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	1.505.273	3.317.840	3.318.434
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9.396.553	16.496.292	1.557.370
Tagihan Derivatif	469.342	145.928	93.649
Kredit yang Diberikan	804.338.432	708.001.045	635.291.221
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.569.880)	(29.062.262)	(21.944.371)
	769.768.552	678.938.783	613.346.850
Tagihan Akseptasi	11.583.506	5.637.833	5.602.843
Penyertaan Saham	9.721.187	6.727.814	5.783.220
Aset Tetap			
Biaya perolehan	36.448.565	32.692.513	31.232.047
Akumulasi penyusutan	(10.383.777)	(8.674.305)	(7.255.098)
Nilai buku - neto	26.064.788	24.018.208	23.976.949
Aset Pajak Tangguhan - neto	4.772.859	2.989.066	2.328.530
Aset Lain-lain - neto	19.237.301	17.209.036	9.698.826
TOTAL ASET	**1.234.200.039**	**1.076.438.066**	**964.000.690**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	8.332.783	6.472.759	5.328.446
Simpanan Nasabah			
Giro	176.404.505	144.432.274	140.764.079
Tabungan	378.908.837	342.759.191	297.649.283
Deposito Berjangka	342.719.222	316.135.105	285.432.096
Total Simpanan Nasabah	898.032.564	803.326.570	723.845.458
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	9.104.374	5.752.420	1.784.932
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	37.379.394	12.136.684	7.302.398
Liabilitas Derivatif	327.892	197.633	344.865
Liabilitas Akseptasi	11.583.506	5.637.833	5.602.843
Utang Pajak	3.499	470.272	881.207
Surat Berharga yang Diterbitkan	31.074.676	30.323.802	24.936.730
Pinjaman yang Diterima	39.372.910	29.267.409	34.599.638
Liabilitas Imbalan Kerja	11.492.362	11.888.794	9.181.163
Liabilitas Lain-lain	5.977.701	5.902.298	4.699.821
Pinjaman dan surat berharga Subordinasi	499.798	14.385	35.471
TOTAL LIABILITAS	**1.053.181.459**	**911.390.859**	**818.542.972**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember		
	2018	2017	2016
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016			
Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 60.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 24.669.162.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.669.161.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016	6.167.291	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor saham	2.773.858	2.773.858	2.773.858
Surplus revaluasi aset tetap	13.824.692	13.824.692	13.824.692
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	49.220	54.199	23.490
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - Bersih	(1.919.488)	1.621.265	103.891
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	1.143.354	705.117	654.637
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(2.418.948)	(2.418.948)	(2.418.948)
Cadangan Kompensasi atas Saham Bonus	425.334	-	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	157.950.582	139.297.048	121.306.122
Total Saldo Laba	160.973.267	142.319.733	124.328.807
TOTAL EKUITAS	**181.018.580**	**165.047.207**	**145.457.718**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.234.200.039**	**1.076.438.066**	**964.000.690**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	106.336.827	98.253.779	90.015.450
Beban Bunga	(31.428.467)	(27.825.233)	(26.920.380)
Pendapatan Bunga - neto	74.908.360	70.428.546	63.095.070
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	11.900.466	10.303.072	9.209.654
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	6.200.141	5.044.147	4.461.473
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	932.449	175.531	-
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	575.500	705.361	373.720
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	1.554	3.217	-
Lain-lain	3.166.696	2.461.508	2.634.363
Total Pendapatan Operasional lainnya	22.776.806	18.692.836	16.679.210
Beban penyisihan kerugian Penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(17.441.749)	(16.659.697)	(13.319.763)
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	(21.356.381)	(19.436.502)	(17.648.351)
Umum dan administrasi	(13.602.246)	(12.468.540)	(11.324.949)
Kerugian transaksi mata uang asing - neto	-	-	(271.661)
Lain-lain	(4.507.403)	(4.407.557)	(3.783.112)
Total Beban Operasional lainnya	(39.466.030)	(36.312.599)	(33.028.073)
LABA OPERASIONAL	**40.777.387**	**36.149.086**	**33.426.444**
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	**20.677**	**201.644**	**15.199**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**40.798.064**	**36.350.730**	**33.441.643**
BEBAN PAJAK	**(9.096.089)**	**(7.881.495)**	**(7.688.187)**
LABA TAHUN BERJALAN	**31.701.975**	**28.469.235**	**25.753.456**

Lampiran 2

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
Penghasilan komprehensif lainnya:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	584.314	67.307	162.970
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(146.078)	(16.827)	(531.578)
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	14.315.527
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(4.979)	30.709	(25.579)
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	(4.721.004)	2.023.166	1.524.025
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1.180.251	(505.792)	(381.006)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	**(3.107.496)**	**1.598.563**	**15.064.359**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**28.594.479**	**30.067.798**	**40.817.815**
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	**259,35**	**232,62**	**210,45**

Lampiran 2

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	(Kerugian) Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan	Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	Saham Treasuri	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk
								Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015	**6.167.291**	**2.773.858**	**49.069**	**(1.039.128)**	**532.410**	**(2.286.375)**	**-**	**18.115.741**	**88.078.932**	**112.391.798**
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	25.753.456	25.753.456
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(25.579)	1.143.019	122.227	-	13.824.692	-	-	15.064.359
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(25.579)	1.143.019	122.227	-	13.824.692	-	25.753.456	40.817.815
Pembagian laba dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.619.322)	(7.619.322)
Realisasi cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	-	(15.093.056)	15.093.056	-
Saham diperoleh kembali (saham treasuri)	-	-	-	-	-	(132.573)	-	-	-	(132.573)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	**6.167.291**	**2.773.858**	**23.490**	**103.891**	**654.637**	**(2.418.948)**	**13.824.692**	**3.022.685**	**121.306.122**	**145.457.718**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan	Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	Saham Treasuri	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk
								Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	**6.167.291**	**2.773.858**	**23.490**	**103.891**	**654.637**	**(2.418.948)**	**13.824.692**	**3.022.685**	**121.306.122**	**145.457.718**
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	28.469.235	28.469.235
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	30.709	1.517.374	50.480	-	-	-	-	1.598.563
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	30.709	1.517.374	50.480	-	-	-	28.469.235	30.067.798
Pembagian laba										
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.478.309)	(10.478.309)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	**6.167.291**	**2.773.858**	**54.199**	**1.621.265**	**705.117**	**(2.418.948)**	**13.824.692**	**3.022.685**	**139.297.048**	**165.047.207**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan	Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	Saham Treasuri	Cadangan Kompensasi atas Saham Bonus	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk
									Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	**6.167.291**	**2.773.858**	**54.199**	**1.621.265**	**705.117**	**(2.418.948)**	**-**	**13.824.692**	**3.022.685**	**139.297.048**	**165.047.207**
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.701.975	31.701.975
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(4.979)	(3.540.753)	438.237	-	-	-	-	-	(3.107.495)
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	(4.979)	(3.540.753)	438.237	-	-	-	-	31.701.975	28.594.480
Pembagian laba											
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.048.441)	(13.048.441)
Saham Bonus	-	-	-	-	-	-	425.334	-	-	-	425.334
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	**6.167.291**	**2.773.858**	**49.220**	**(1.919.488)**	**1.143.354**	**(2.418.948)**	**425.334**	**13.824.692**	**3.022.685**	**157.950.582**	**181.018.580**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan bunga	100.072.121	98.344.933	90.236.423
Pembayaran bunga	(31.074.638)	(27.509.119)	(25.499.702)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	6.200.141	5.044.147	4.461.473
Pendapatan operasional lainnya	14.790.574	13.096.801	8.545.173
Beban operasional lainnya	(39.094.811)	(31.549.214)	(33.435.736)
Pendapatan non operasional - neto	20.676	201.646	6.450
Pembayaran pajak penghasilan badan dan tagihan pajak	(10.734.001)	(8.897.996)	(6.012.928)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**40.180.062**	**48.731.198**	**38.301.153**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	641.463	(1.205.159)	100.000
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(1.194.222)	(116.427)	273.714
Tagihan wesel ekspor dan wesel tagih	(16.788.337)	925.824	(3.713.520)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.099.739	(14.938.922)	(712.245)
Kredit yang diberikan	(108.516.793)	(82.238.513)	(85.301.450)
Aset lain-lain	4.259.649	(7.850.128)	1.629.757
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera	1.860.024	1.123.584	320.350
Simpanan:			
Giro	31.972.231	3.668.195	27.775.358
Tabungan	36.149.646	45.109.908	30.042.245
Deposito berjangka	26.584.117	30.703.009	23.253.851
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	3.351.954	3.967.488	(8.580.300)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	25.242.710	4.834.286	(4.075.560)
Liabilitas lain-lain	1.222.209	457.053	1.850.135
Kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi	**52.064.452**	**33.171.396**	**21.163.488**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Penerimaan dividen	207.412	41.903	27.290
Penyertaan saham	(2.169.955)	(944.539)	(814.668)
Perolehan aset tetap	(1.475.229)	(1.460.466)	(3.339.807)
Kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	(19.619.963)	(25.583.756)	3.750.731
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi	**(23.057.735)**	**(27.946.858)**	**(376.454)**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	**2017**	**2016**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	9.886.159	(5.390.326)	(955.882)
Pembelian kembali saham beredar (saham treasuri)	-	-	(132.573)
Pembagian laba untuk dividen	(13.048.441)	(10.478.309)	(7.619.322)
Pembayaran pinjaman dan surat berharga subordinasi	485.413	(21.086)	(20.997)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	9.600.184	10.242.963	15.510.825
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(8.939.750)	(4.921.000)	(980.000)
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan pendanaan	**(2.016.435)**	**(10.567.758)**	**5.802.051**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	26.990.282	(5.343.220)	26.589.085
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(57.870)	3.195	5.012
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	179.931.615	185.271.640	158.677.543
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	**206.864.027**	**179.931.615**	**185.271.640**
Kas dan Setara Kas akhir periode/tahun terdiri dari:			
Kas	27.170.584	24.437.571	24.865.133
Giro pada Bank Indonesia	68.617.459	55.598.024	53.398.240
Giro pada bank lain	11.277.405	5.803.057	10.792.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	82.117.904	52.179.451	77.574.246
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	17.680.675	41.913.512	18.641.440
Total Kas dan Setara Kas	**206.864.027**	**179.931.615**	**185.271.640**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas dengan menggunakan metode biaya perolehan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak sebagai berikut:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank BRISyariah Tbk	3.004.375	73,00%	2.004.375	99,99%	2.004.375	99,99
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	3.467.706	87,10	2.397.751	86,82	1.524.538	87,23
BRI Remittance Co. Limited	2.289	100,00	2.289	100,00	2.289	100,00
PT Asuransi BRI life	1.626.643	91,00	1.626.643	91,00	1.626.643	91,00
PT BRI Multifinance Indonesia	760.003	99,00	660.003	99,00	660.003	99,00
PT Danareksa Sekuritas	446.888	67,00	-	-	-	-
PT BRI Ventura Investama	3,090	97,61	-	-	-	-

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/
Partnership and Community Development Program
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Laporan keuangan Tanggal 31 Desember 2018 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2018 and
for the year then ended with independent auditors' report

Model 64

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
Telepon : 5751502, 5751504, 5751506, 5751507, 5751508, 5751510
Facsimile : 2500126, Kawat : KANPUSBRI
Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED

Nomor: S. 356-DIR/SKP/03/2019
Nomor: S. 357-DIR/BKC/03/2019

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : / *We, the undersigned :*

Nama	Supari	*Name*
Jabatan	Direktur Ritel dan Menengah/*Director of Retail and Intermediate*	*Title*
Alamat Kantor	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI I Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	*Office Address*
Nama	**Bambang Tribaroto**	*Name*
Jabatan	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan/ *Head of Corporate Secretary Division*	*Title*
Alamat Kantor	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	*Office Address*
Nama	**Hari Purnomo**	*Name*
Jabatan	Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan/ *Head of Small Business and Partnership Division*	*Title*
Alamat Kantor	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	*Office Address*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;*
2. *The Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability and based on the Circular Letter of Ministry of State Owned Enterprises No SE-02/MBU/WK/2012 dated February 23, 2012 Concerning Guidance of Accounting Standards for Partnership and Community Development Program;*
3. a. *All information in the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The Financial Statements of the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;*
4. *We are responsible for the Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 6 Maret 2019/*March 6, 2019*

Supari Direktur/ *Director*	Bambang Tribaroto Kepala Divisi/ *Head of Division*	Hari Purnomo Kepala Divisi/ *Head of Division*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ *Pages*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statement of Financial Position*
Laporan Aktivitas	2	*Statement of Activities*
Laporan Arus Kas	3	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	4-35	*Notes to the Financial Statements*
Lampiran 1 - Laporan penyaluran dana program bina lingkungan	36-37	*Appendix 1 - Statement of community development program funds distribution*
Lampiran 2 - Laporan kualitas piutang pinjaman menurut wilayah dan sektor usaha program kemitraan	38-57	*Appendix 2 - Statement of loan receivables partnership program's collectibility classified by regional and economic sector*

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

This original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00452/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/III/2019

Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00452/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/III/2019

Management of Partnership and Community Development Program
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

We have audited the accompanying financial statements of Partnership and Community Development Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statements of activities and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00452/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/III/2019 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00452/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/III/2019 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Partnership and Community Development Program of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of December 31, 2018, and its activities and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Danil Setiadi Handaja, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/*Public Accountant Registration No. AP.1008*

6 Maret 2019/*March 6, 2019*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2018
(Expressed in Rupiah)

	31 Desember/ *December 31, 2018*	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2017*	
ASET				***ASSETS***
Kas pada Bank	501.031.012.832	2b,4,19	848.287.476.264	*Cash in Bank*
Piutang kepada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") pembina lain/ lembaga penyalur (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp34.399.323.366 dan Rp16.362.150.268 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	32.100.676.634	2c,2d,5,19	51.137.854.732	*Receivables from other fostering State-Owned Enterprises ("SOE")/distributing partners (net of allowance for impairment losses amounting to Rp34,399,323,366 and Rp16,362,150,268 as of December 31, 2018 and 2017, respectively)*
Piutang pinjaman mitra binaan (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp39.811.872.234 dan Rp36.174.341.728 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	415.600.739.266	2c,2d,6	227.527.762.828	*Loan receivables from foster partners (net of allowance for impairment losses amounting to Rp39,811,872,234 and Rp36,174,341,728 as of December 31, 2018 and 2017, respectively)*
Pendapatan jasa administrasi pinjaman yang masih akan diterima	2.524.736.588	2j,7	1.026.296.072	*Accrued loan administration services income*
Piutang lain-lain	15.814.348.189	2c,8	24.974.479.409	*Other receivables*
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp71.089.105 dan Rp71.057.855 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	-	2e,9	31.250	*Fixed assets (net of accumulated depreciation amounting to Rp71,089,105 and Rp71,057,855 as of December 31, 2018 and 2017, respectively)*
JUMLAH ASET	**967.071.513.509**		**1.152.953.900.555**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN ASET NETO				***LIABILITIES AND NET ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Beban yang masih harus dibayar	41.160.843.365	2f,10,19	54.054.085.143	*Accrued expenses*
ASET NETO				***NET ASSETS***
Aset neto tidak terikat	925.910.670.144	2g,11	1.098.899.815.412	*Unrestricted net assets*
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	**967.071.513.509**		**1.152.953.900.555**	***TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF ACTIVITIES
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Rupiah)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2018	**Catatan/ *Notes***	**2017**	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT				***CHANGES IN UNRESTRICTED NET ASSETS***
PENDAPATAN				***REVENUE***
Pendapatan bunga	11.030.925.817	2i,13,19	16.379.026.105	*Interest income*
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	13.807.717.720	2j,14	7.029.970.301	*Loan administration services income*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain	-	2n,5	543.724.213	*Reversal for impairment losses on receivables from other fostering SOE expenses*
Pendapatan lain-lain	203.489.840	2l,15,19	3.457.515.961	*Other income*
JUMLAH PENDAPATAN	**25.042.133.377**		**27.410.236.580**	***TOTAL REVENUE***
BEBAN				***EXPENSES***
Dana pembinaan kemitraan	323.438.491	2m,16	197.510.500	*Fostering partnership funds*
Penyaluran dana program bina lingkungan	163.634.557.695	17	150.348.697.502	*Community development program funds distribution*
Beban penyusutan aset tetap	31.250	9	863.125	*Fixed assets depreciation expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman	3.637.530.506	2n,6d	1.576.025.351	*Allowance for impairment losses of loan receivables expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain	18.037.173.098	2n,5	-	*Allowance for impairment losses on receivable from other fostering SOE expenses*
Beban pembalikan piutang dari BUMN pembina	-	12,19	253.977.420.000	*Reversal of receivables from Fostering SOE expenses*
Beban atas pembalikan piutang lain-lain	12.398.547.605	18,19	-	*Reversal of other receivable expenses*
JUMLAH BEBAN	**198.031.278.645**		**406.100.516.478**	***TOTAL EXPENSES***
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	**(172.989.145.268)**		**(378.690.279.898)**	***DECREASE IN UNRESTRICTED NET ASSETS***
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AWAL TAHUN	**1.098.899.815.412**		**1.477.590.095.310**	***UNRESTRICTED NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR***
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AKHIR TAHUN	**925.910.670.144**		**1.098.899.815.412**	***UNRESTRICTED NET ASSETS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Rupiah)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2018	**Catatan/ *Notes***	**2017**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan	154.203.750.655	20	59.051.365.649	*Collection of foster partners loan receivables*
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	12.143.732.370	14	6.690.750.577	*Loan administration services income*
Pendapatan bunga	11.030.925.817	13	16.379.026.105	*Interest income*
Pendapatan lain-lain	-	15	3.457.515.961	*Other income*
Pengembalian dari BUMN pembina lain	1.000.005.000	5	3.499.995.000	*Repayment from other fostering SOE*
Penyaluran piutang pinjaman mitra binaan	(344.151.895.500)		(209.359.335.950)	*Loan receivables from foster partners distribution*
Penyaluran dana pembinaan kemitraan	(323.438.491)	16	(197.510.500)	*Fostering partnership distribution fund*
Penyaluran dana program bina lingkungan	(180.572.883.470)	17	(117.435.482.710)	*Community development program funds distribution*
Beban lain-lain	(586.659.813)		-	*Other expense*
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**(347.256.463.432)**		**(237.913.675.868)**	***Net Cash Used in Operating Activities***
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	**(347.256.463.432)**		**(237.913.675.868)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**848.287.476.264**		**1.086.201.152.132**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**501.031.012.832**		**848.287.476.264**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), selanjutnya disebut "PKBL BRI" berdiri dan beroperasi sejak tahun 1990 dengan nama Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPELK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989, jo No. 306/KMK.013/1991 tanggal 20 Maret 1991, jo No. 368/KMK.013/1991 tanggal 19 April 1991 yang ditinjau kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan ini merupakan kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh BUMN dengan maksud agar BUMN disamping menjalankan operasional bisnisnya, juga melaksanakan tugas sosial sebagai pembina usaha kecil koperasi berupa akses permodalan dan pendampingan, sehingga pada akhirnya bisa mandiri atau akses pembebanan komersial/perbankan.

Peraturan tersebut selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, kemudian di amandemen berturut-turut oleh PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang berlaku untuk tahun buku 2013. Peraturan selanjutnya yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang mengatur penghentian pelaksanaan kegiatan BUMN peduli mulai tahun 2013.

1. *GENERAL DESCRIPTION*

a. *Establishment and General Information*

Partnership and Community Development Program (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), hereinafter referred to as "PKBL BRI" was established and started its operations in 1990 with the name Entrepreneur Small Economy and Cooperative Coaching (PPELK) according to the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 dated November 11, 1989, in conjunction with No. 306/KMK.013/1991 dated March 20, 1991, in conjunction with No. 368/KMK.013/1991 dated April 19, 1991 which was revisited with the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 316/KMK.016/1994 dated June 27, 1994 regarding the Fostering Guidelines for Small Businesses and Cooperatives through the utilization of funds from the profit of the State-Owned Enterprises (SOEs). This activity is a government policy that is implemented by all SOEs with the intention that in addition to conducting its business operations, SOEs, also carry out social duties as a foster for small business cooperatives in the form of access to capital and mentoring, so that they in the end can be independent or commercial loading access/banking.

The regulation was subsequently amended by Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-236/MBU/2003 dated June 17, 2003 regarding the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program and the Circular Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. SE-433/MBU/2003 dated September 16, 2003 regarding the Implementation Guidelines of Partnership Program for SOEs with Small Business and Community Development Program. The regulation was later amended by the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, subsequently amended successively by PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012 regarding amendments to the Minister of SOEs' Regulation No. PER-05/MBU/2007, which applies to the fiscal year 2013. The subsequent regulations issued is the Minister of SOEs' Regulation No. PER-05/MBU/2013 dated May 1, 2013 governing the termination of the SOEs care activities begin in 2013.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Peraturan Kementerian diatas, terakhir kembali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 antara lain, mengatur tentang sumber dana Progam Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berasal dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal (masing-masing) 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, menyatakan bahwa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-92/DS.MBU/2013 tanggal 3 April 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 3 Juli 2015 Kementerian BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri No. PER-09/MBU/07/2015 yang menggantikan PER-07/MBU/05/2015.

Pada tanggal 19 Desember 2016 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-03/MBU/12/2016 yang merupakan perubahan atas peraturan No. PER-09/MBU/07/2015.

Terakhir, pada tanggal 5 Juli 2017 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-02/MBU/7/2017 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan No. PER-09/MBU/07/2015.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN Pembina.

1. *GENERAL DESCRIPTION (continued)*

a. *Establishment and General Information (continued)*

The Ministry Regulation above, last amended by the Minister of SOEs' Regulation No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 among others, regulates the funding sources of the Partnership and Community Development Program derived from the company's budget that is calculated as expense, maximum (each) of 2% from the previous year's net income.

Based on Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-07/MBU/05/2015 dated May 22, 2015 regarding the Partnership Program for State-Owned Enterprises with small business and community development program, it is stated that the previous regulation, which is the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, No. PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012, No. PER-05/MBU/2013 dated May 1, 2013, No. PER-07/MBU/2013 dated June 27, 2013, No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 and the Letter of Deputy for Restructuring and SOEs Strategic Planning No. S-92/DS.MBU/2013 dated April 3, 2013 are revoked and declared invalid.

On July 3, 2015 the Ministry of State-Owned Enterprises issued the Ministrial Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 which replaced PER-07/MBU/05/2015.

On December 19, 2016 the Ministry of State-Owned Enterprises issued another Ministral Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 which is an amendment of No. PER-09/MBU/07/2015.

Latest, on July 5, 2017 the Ministry of State-Owned Enterprises issued another Ministrial Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 which is a second amendment of No. PER-09/MBU/07/2015.

Partnership Program for SOEs' and with small business, hereinafter called Partnership Program (PK) is a program to improve the ability of Small Business to be resilient and independent through the utilization of funds that are part of the profits of Fostering SOEs.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

b. Kegiatan Utama

Kegiatan utama yang dilakukan PKBL BRI meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan (PK) meliputi kegiatan penyaluran dana berupa:
   a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
   b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
2. Program Bina Lingkungan (BL) meliputi kegiatan penyaluran dana berupa:
   a) Bantuan korban bencana alam;
   b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
   c) Bantuan peningkatan kesehatan;
   d) Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;
   e) Bantuan sarana ibadah;
   f) Pelestarian alam;
   g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
      1) Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
      2) Penyediaan sarana air bersih;
      3) Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
      4) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
      5) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
      6) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
      7) Bantuan peralatan usaha

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

Community Development Program (BL) is SOE's community program whose objective is to empower the social condition of the community's business.

b. Primary Activities

The primary activities of PKBL BRI include the following:

1. *Partnership Program (PK) includes the distribution of funds in the form of:*
   a) *Loans to finance working capital and/or purchasing of fixed asset in order to increase production and sales;*
   b) *Additional loan distribution to finance the short-term funding, to fulfill orders from business partner of the Foster Partners.*
2. *Community Development Program (BL) includes the distribution of funds in the form of:*
   a) *Aid for victims of natural disaster;*
   b) *Aid for education and/or training;*
   c) *Aid for health improvement;*
   d) *Development of public facilities and infrastructure;*
   e) *Improvement of worship facilities;*
   f) *Nature preservation;*
   g) *Social assistance in order to alleviate poverty, including:*
      1) *Electrification in areas that have not been electrified;*
      2) *Providing facilities for clean water;*
      3) *Providing facilities for toilet washing;*
      4) *Educational assistance, training, internship, promotion and other assistance related to improving the economic independence of small businesses other than Partnership Program Foster Partners;*
      5) *Housing reparation for people living in poverty;*
      6) *Assistance for agriculture, animal husbandry and fisheries; or*
      7) *Assistance in the form of business equipments*

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

b. Kegiatan Utama (lanjutan)

3. Melakukan pengawasan atas kegiatan penyaluran dana PKBL di unit kerja BRI dan pengawasan kegiatan usaha Mitra Binaan;

4. Melakukan pelaporan kegiatan PKBL.

c. Sumber Dana

Sumber dana PKBL BRI berasal dari:

1. Penyisihan sebagian laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

2. Saldo dana PKBL BRI yang berasal dari penyisihan sebagian laba PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;

3. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil Program Kemitraan, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PKBL;

4. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

d. Susunan Pengelola

Sebelum tanggal 27 April 2011, PKBL BRI adalah unit kerja bernama Bagian PKBL dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang secara struktural berada dibawah Divisi Bisnis Program dan Kemitraan, Direktorat Bisnis UMKM BRI yang bertugas mengelola dana PKBL BRI.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP. S.16-DIR/REN/04/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan tentang penambahan fungsi Bagian *Corporate Social Responsibilty* (CSR) di bawah Divisi Sekretariat Perusahaan yang bertugas untuk mengelola dana Bina Lingkungan.

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

b. Primary Activities (continued)

3. Monitoring of PKBL funds distribution in BRI working unit activities and the monitoring of Foster Partners' business activities;

4. Reporting PKBL activities.

c. Funding Resources

Source of PKBL BRI's funding is derived from:

1. Provision of net income of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and/or budget which was calculated as expense in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

2. The PKBL funds balance that is derived from provision of the profits of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk allocated until the end of 2012;

3. Administrative services from Partnership Program loan/margin/profit-sharing, time deposits interest and/or current account services from PKBL funds;

4. Partnership Program funds handed over from other SOEs, if any.

d. Management Structure

Before April 27, 2011, PKBL BRI was a working unit called PKBL and Supervision of Microfinance Institution (MFI) Department that was structurally under the Partnership and Business Program Division, Directorate of MSME Business in charge of managing the PKBL BRI funds.

Based on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Board of Directors' Decree NOKEP. S.16-DIR/REN/04/2011 dated April 27, 2011 regarding the Organization of Corporate Secretary Division of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, it was stated that functionality of Corporate Social Responsibilty (CSR) was added under the Corporate Secretary Division that is in charge of managing the Community Development funds.

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengelola (lanjutan)

Pembentukan Bagian CSR Divisi Sekretariat Perusahaan telah ada sejak tanggal 27 April 2011, akan tetapi Pengelolaan Dana Program Bina Lingkungan yang dulunya dikelola oleh Bagian PKBL dan Pengawasan LKM Divisi Bisnis Program dan Kemitraan dilimpahkan kepada Bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) Divisi Sekretariat Perusahaan efektif pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan Nota Dinas No. B.64.SKP/CSR/03/2012 dan No. B.148.PRG/KBL/03/2012 tanggal 30 Maret 2012.

Sejak bulan Agustus 2018 telah terbentuk *Desk Corporate Social Responsibility* & Bina Lingkungan yang terdiri atas Bagian Perencanaan CSR & Bina Lingkungan dan bagian Operasional CSR & Bina Lingkungan melalui NOKEP: 603-DIR/CDS/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018. Namun, pemenuhan formasi Kepala Desk dan Kepala Bagian Operasional CSR & Bina Lingkungan baru dipenuhi pada 1 Februari 2019.

Susunan Pengelola PKBL BRI untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

d. Management Structure (continued)

CSR Department has been established as a part of Corporate Secretary Division since April 27, 2011, but the Community Development Programs Funds Management that was once managed by PKBL and Supervision of MFI Department of Partnership and Business Program Division was effectively transferred to the Corporate Social Responsibility (CSR) Department of Corporate Secretary Division effective on March 30, 2012 in accordance with the Official Memo No. B.64.SKP/CSR/03/2012 and No. B.148.PRG/KBL/03/2012 dated March 30, 2012.

Desk Corporate Social Responsibility & Community Development was founded which consists of CSR & Community Development Planning department and CSR & Community Development Operational department through NOKEP: 603-DIR/CDS/08/2018, dated August 3, 2018. Nevertheless, the occupancy of Desk Head and CSR & Community Development Operational Department Head positions can only be fulfilled on February 1, 2019.

Management structure of PKBL BRI for the years ended December 31, 2018 and 2017 is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2018	**2017**	
Direktur Mikro dan Kecil	Priyastomo	Priyastomo	*Director of Micro and Small*
Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan	Sony Harsono	Supardi Santoso	*Division Head of Small Business and Partnership*
Wakil Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan	Agus Sunaryo	Agus Sunaryo	*Vice Division Head of Small Business and Partnership*
Kepala Bagian PK dan Pengawasan LKM	M. Abdi Rahman	Gafyunedi	*Department Head of PK and MFI Supervision*
- Staf	Fitri Septianingsih	Renatasia Sari	*Staff -*
- Staf	Juni Agung Sukoco	Fitri Septianingsih	*Staff -*
- Supervisor PK dan Pengawasan LKM	Mulyatno	Mulyatno	*PK and MFI - Supervision Supervisor*
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	Bambang Tribaroto	Hari Siaga Amijarso	*Division Head of Corporate Secretary*
Kepala Bagian *Corporate Social Responsibility*	Zainuddin Thalib Burutu	Zainuddin Thalib Burutu	*Department Head of Corporate Social Responsibility*
Wakil Kepala Bagian *Corporate Social Responsibility*	Endra Tri Subehi	Endra Tri Subehi	*Deputy Department Head of Corporate Social Responsibility*
- Staf	Adi Rifqi Husada	Abas Wahyudi	*Staff -*
- Staf	Agusman Muhammad Latif	Agusman Muhammad Latif	*Staff -*
- Staf	Adnan Dianda Prima	Adnan Dianda Prima	*Staff -*
- Staf	Nugroho Pamungkas	Salvandi Qito Pratama	*Staff -*
- Staf	Dito Adi Pratama	-	*Staff -*
- Supervisor Operasional CSR	Nurhidayati	Nurhidayati	*Operational Supervisor CSR -*

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengelola (lanjutan)

Seluruh pegawai adalah pegawai yang memperoleh gaji dan manfaat lainnya dari BRI sehingga masalah penetapan Imbalan Kerja (PSAK No. 24) dilaksanakan oleh dan menjadi beban BRI.

Pemotongan dan penyetoran atas PPh Pasal 21 atas pegawai BRI yang ditempatkan di PKBL BRI dilakukan oleh BRI.

e. Unit Kerja Penyalur PKBL BRI

Unit PKBL BRI terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian PK dan Pengawasan LKM, Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan berlokasi di Gedung BRI II Lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat sebagai penyalur dana pinjaman kemitraan.

2. Bagian Corporate Social Responsibility (CSR), Divisi Sekretariat Perusahaan berlokasi di Gedung BRI II Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat sebagai penyalur dana Bina Lingkungan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 penyaluran dana PKBL BRI dilakukan di unit kerja BRI dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

d. Management Structure (continued)

All employees are employees who earn salaries and other benefits from BRI so that the application of Employee Benefits (SFAS No. 24) is implemented by and charged to BRI.

Withholding and deposit of Income Tax Article 21 of BRI employees placed in PKBL BRI is conducted by BRI.

e. Distributor Working Units PKBL BRI

PKBL BRI units consists of 2 (two) departments:

1. *The PK and Supervision of MFI Department, Small Business and Partnership Division located in BRI II Building 28th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Central Jakarta as the distributor of partnerships receivables funds.*
2. *Corporate Social Responsibility (CSR) Department, Corporate Secretariat Division located at BRI II Building 8th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Central Jakarta as the distributor of Community Development funds.*

As of December 31, 2018 and 2017 the distribution of funds of PKBL BRI conducted by BRI working unit are detailed as follows (unaudited):

No.	Unit Kerja	Jumlah Kantor Cabang/ *Total Branches*	Jumlah Kantor Cabang Pembantu/ *Total Sub Branches*	*Working Units*	*No.*
1.	Kantor Wilayah Aceh	11	15	*Aceh Regional Office*	*1.*
2.	Kantor Wilayah Medan	24	34	*Medan Regional Office*	*2.*
3.	Kantor Wilayah Padang	14	8	*Padang Regional Office*	*3.*
4.	Kantor Wilayah Pekanbaru	22	20	*Pekanbaru Regional Office*	*4.*
5.	Kantor Wilayah Palembang	21	29	*Palembang Regional Office*	*5.*
6.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 1	26	54	*DKI Jakarta 1 Regional Office*	*6.*
7.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 2	32	69	*DKI Jakarta 2 Regional Office*	*7.*
8.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 3	36	55	*DKI Jakarta 3 Regional Office*	*8.*
9.	Kantor Wilayah Bandung	30	45	*Bandung Regional Office*	*9.*
10.	Kantor Wilayah Semarang	22	38	*Semarang Regional Office*	*10.*
11.	Kantor Wilayah Yogyakarta	33	34	*Yogyakarta Regional Office*	*11.*
12.	Kantor Wilayah Surabaya	25	39	*Surabaya Regional Office*	*12.*
13.	Kantor Wilayah Malang	24	36	*Malang Regional Office*	*13.*
14.	Kantor Wilayah Denpasar	31	27	*Denpasar Regional Office*	*14.*
15.	Kantor Wilayah Banjarmasin	31	31	*Banjarmasin Regional Office*	*15.*
16.	Kantor Wilayah Makassar	36	28	*Makassar Regional Office*	*16.*
17.	Kantor Wilayah Manado	17	18	*Manado Regional Office*	*17.*
18.	Kantor Wilayah Jayapura	13	13	*Jayapura Regional Office*	*18.*
19.	Kantor Wilayah Bandar Lampung	14	16	*Bandar Lampung Regional Office*	*19.*
	Jumlah	**462**	**609**	***Total***	

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

e. Unit Kerja Penyalur PKBL BRI (lanjutan)

Unit Kerja penyalur meliputi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di bawah kelolaan masing-masing Kantor Wilayah BRI.

f. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Pengelola PKBL BRI pada tanggal 6 Maret 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia, dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam satu periode yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disusun dengan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah.

1. GENERAL DESCRIPTION (continued)

e. Distributor Working Units PKBL BRI (continued)

Distributor Working Units includes Branches and Sub-Branches each managed by BRI Regional Office.

f. Authorization of the Issuance of Financial Statements

The financial statements were completed and authorized for issuance by PKBL BRI management on March 6, 2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies adopted in preparing the financial statements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

a. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements were prepared in accordance with Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) as issued by The Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants, and considered Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") Circular No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012 Concerning Guidance of Accounting Standards for Partnership Program and Community Development.

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for certain accounts prepared based on other measurement as explained in related accounting policy.

The statement of cash flows presents information on receipts and payments of cash and cash equivalents during the year classified by operating, investing and financing activities, which is prepared using the direct method.

The currency used in the presentation of the financial statements is the Indonesian rupiah.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas, bank dan semua investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, setelah dikurangi cerukan, dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang

Piutang pinjaman Mitra Binaan merupakan pinjaman yang disalurkan oleh PKBL lewat unit kerja penyalur PKBL kepada Mitra Binaan sesuai ketentuan yang berlaku. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina Lain/Lembaga Penyalur Lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Lembaga Penyalur lain sebagai bentuk sinergi antar unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Piutang kepada BUMN Pembina merupakan alokasi dana dari BUMN Pembina untuk Program Bina Lingkungan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Piutang selain dijelaskan di atas disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada akun Piutang Lain-lain.

Penggolongan kualitas piutang kemitraan ditetapkan sebagai berikut:

1. Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

2. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash, bank and all short-term investment with maturities in 3 (three) months or less from the acquisition date, after netted for overdraft, not pledged as collateral, and also not restricted in use.

c. Receivables

Foster Partners loan receivables are loans distributed by PKBL through PKBL working units to Foster Partners according to applicable regulations. Foster partners loan receivables are recognized when the loans are disbursed to foster partners, and are measured and recorded at the net amount after deducting allowance for impairment losses.

Receivables from other Fostering SOEs Distribution Partners represent loans given to Partnership and Community Development Program (PKBL) units/other distributing Partners as a form of synergy among Partnership and Community Development Program units.

Receivables from Fostering SOE are funds allocation for Community Development Program which are decided in the General Meeting of Shareholders ("GMS").

Loans other than those described above are presented in the Other Receivables account in the Statement of Financial Position.

The classifications of partnership receivables based on collectibillity are as follows:

1. *Current, if the principal installment and administration service income payment are paid on time or those whose late payments of principal and/or administration service are paid at the latest 30 (thirty) days from the agreed payment date.*

2. *Substandard, if the late payment of principal and/or administration service income payment are between 30 (thirty) days and 180 (one hundred eighty) days from the agreed payment date.*

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Piutang (lanjutan)

Penggolongan kualitas piutang kemitraan ditetapkan sebagai berikut: (lanjutan)

3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

4. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cadangan atas estimasi kerugian terhadap piutang yang mungkin tidak tertagih di masa yang akan datang.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun) sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain dihitung secara individual.

e. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan digunakan dalam operasi PKBL BRI serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Receivables (continued)

The classifications of partnership receivables based on collectibillity are as follows: (continued)

3. Doubtful, if the late payment of principal and/or administration service income payment are between 180 (one hundred and eighty) days and 270 (two hundred and seventy) days from the agreed payment date.

4. Loss, if the late payment of principal and/or administration service income payment are over 270 (two hundred and seventy) days from the agreed payment date.

d. Allowance for Impairment Losses on Receivables

Allowance for impairment losses on receivables is the provision for estimated losses that may become uncollectible receivables in the future.

Allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners is calculated collectively based on specific percentage of available historical collectibility rate (minimum 2 years of historical data) while allowance for impairment losses on receivables to other Fostering SOEs Distribution Partners is calculated individually.

e. Fixed Assets

Fixed assets are tangible assets acquired off-the-shelf or are built for use in PKBL operations and have a useful life of more than one year.

Fixed assets are recognized at their historical costs less accumulated depreciation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tarif Penyusutan/tahun/ *Depreciation Rate/year*	Masa Manfaat/ *Useful Life*	*Fixed Asset Type*
Inventaris dan Peralatan	25%	4	*Premises and Equipment*

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan, dikapitalisasi ke akun aset tetap yang bersangkutan. Jika aset tetap dihentikan pengakuannya, PKBL BRI harus menentukan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dengan menghitung perbedaan, antara hasil penjualan neto (jika ada) dan jumlah tercatatnya.

f. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar PKBL BRI karena telah diterimanya jasa atau prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi karena pembayarannya akan jatuh tempo pada tahun berikutnya.

g. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat (ANT) dan Aset Neto Tidak Terikat (ANTT).

ANT adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. ANT diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat Temporer (ANTT) dan Aset Neto Terikat Permanen (ANTP).

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

e. *Fixed Assets (continued)*

Fixed assets except for land are depreciated using straight-line method based on the estimated useful life as follows:

Repairs and maintenance expense are charged as incurred while, significant amount of renewal and addition is capitalized to relevant fixed assets account. If the fixed asset is derecognized, PKBL BRI should determine the gain or loss arising from the derecognition of fixed assets by calculating the difference between the net sale proceeds (if any) and the carrying amount.

f. *Accrued Expenses*

Accrued expenses are expenses that have to be paid by PKBL BRI as service that have been received in the current period have not been paid for at the end of current accounting period because payment will due in the next year.

g. *Net Assets*

Net assets are assets less liabilities. Net assets are classified as Restricted Net Assets (ANT) and Unrestricted Net Assets (ANTT).

ANT are resources which are restricted for a specific purpose or cannot be used for normal operating activities. ANT is classified into Temporary-Restricted Net Assets (ANTT) and Permanent-Restricted Net Assets (ANTP).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Neto (lanjutan)

Termasuk dalam pembatasan temporer adalah penyisihan dana BUMN Peduli yaitu dana program bina lingkungan yang disisihkan PKBL BRI untuk program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang berasal dari saldo awal kas dana program bina lingkungan, pengembalian dana bina lingkungan yang gagal terealisasi dan alokasi laba BRI untuk program bina lingkungan.

ANTT adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

h. Aset Neto Terikat Temporer (ANTT) - Berakhir Pemenuhan Program

ANTT - berakhir pemenuhan program adalah dana aset neto terikat - alokasi BUMN peduli yang menurut ketentuan telah digunakan dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan BUMN Peduli (telah dipenuhi pembatasan programnya). Akun ini merupakan kontra akun ANTT - terbebaskan.

i. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penempatan dana program kemitraan pada rekening giro bank. Pendapatan bunga disajikan setelah dikurangi pajak yang bersifat final dan biaya administrasi rekening.

j. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

k. Pendapatan dari BUMN Pembina

Pendapatan dari BUMN pembina adalah pendapatan yang berasal dari alokasi dana yang ditetapkan oleh RUPS untuk dana PKBL.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

g. *Net Assets (continued)*

Temporary restriction consists of provision for SOEs Care fund which is community development fund that is set aside by PKBL BRI for Community Development program of SOEs Care that is derived from the beginning balance of the cash funds of Community Development program, the refund from community development which fails to realize and allocation of BRI profit for community development program.

ANTT are resources whose usage are unrestricted for a specific purpose.

h. *Temporary Restricted Net Assets - Ending Realization Program*

ANTT - ending realization program is restricted net assets fund - allocation of SOE Care according to the provisions which have been used in the implementation of community development program of SOEs Care (program restrictions have been met). This account is the contra of ANTT account - released.

i. *Interest Income*

Interest income is the income generated from fund placement partnership program on current account. Interest income presented after being deducted with final tax and administrative cost.

j. *Loan Administration Services Income*

Loan administration services income is service income from partnership program funds which is distributed to Foster Partner. Loan administration services income is measured and recognized based on the values that have matured according to the contract. Loan administration services income is only recognised using accrual basis for loan with current and substandard collectibility.

k. *Revenue from Fostering SOE*

Revenue from fostering SOE is an income from allocation of fund which is set by GMS for PKBL funds.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pendapatan dari BUMN Pembina (lanjutan)

Alokasi dana dari BUMN pembina diakui pada saat ditetapkan oleh RUPS dan diukur serta dicatat sebesar jumlah dana yang dialokasikan untuk PKBL sesuai dengan keputusan RUPS.

l. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi dari pendapatan di atas. Pendapatan ini diakui menggunakan basis akrual.

m. Dana pembinaan kemitraan (Hibah)

Dana pembinaan kemitraan (Hibah) adalah penyaluran dana PKBL BRI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan, yang disalurkan melalui beberapa program yang disusun untuk membantu Mitra Binaan dalam rangka mengembangkan usahanya dengan besaran maksimal 20% dari dana Program Kemitraan tahun berjalan dan hanya diberikan kepada Mitra Binaan. Beban diakui pada saat dana disalurkan.

n. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah beban yang timbul akibat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL BRI, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini yang telah terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Revenue from Fostering SOE (continued)

Allocation of fund from fostering SOEs is recognized when decided by GMS and it was measured and recorded at the amount of funds allocated in accordance with the GMS's decision.

l. Other Income

Other income is an income that cannot be classified according to the classification of income stated above. The income is recognized on an accrual basis.

m. Fostering Partnership Funds (Grant)

Fostering partnership funds (Grant) is a form through which Partnership Program is implemented. The grant, which is PKBL distribution fund is distributed through several programs designed to help the Foster Partner to expand its business with the maximum amount of 20% of current year partnership program funds and is only given to Foster Partners. The expenses are recognized when the funds are distributed.

n. Allowance for Impairment Losses on Loan Receivables

Allowance for impairment losses on loan receivables expenses is an expense that arises from the allowance for impairment losses on loan receivables which may become uncollectible.

3. ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATION AND ASSUMPTION

a. Judgment

In the implementation process of PKBL BRI's accounting policies, Management has prepared these judgments, apart from estimation and assumption, which have significant impact to the amounts recognized in the financial statements:

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Implementasi PER-09/MBU/07/2015

Sehubungan dengan penerapan PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, disyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina.

Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh PKBL BRI dalam Laporan Aktivitas.

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2015, yang telah diungkapkan dalam Catatan 12, dinyatakan bahwa PER-09/MBU/07/2015 diberlakukan pada tahun 2016.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman mitra binaan, PKBL BRI mengestimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang kepada BUMN Pembina lain, tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

PKBL BRI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL BRI dengan Mitra Binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman kemitraan.

3. ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATION AND ASSUMPTION (continued)

a. Judgment (continued)

The implementation of PER-09/MBU/07/2015

In relation to the implementation of PER-09/MBU/07/2015 as disclosed in Note 1a, required that the operational expenses of Partnership and Community Development Program to be recognized by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Fostering SOE.

Therefore, such expense was not recorded by PKBL BRI in the Statement of Activities.

In accordance with Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") that was held at December 14, 2015 as disclosed in Note 12, it was stated that PER-09/MBU/07/2015 was enacted in 2016.

Allowance for impairment losses on loan receivables

If there is an objective evidence that impairment losses has incurred on loan to foster partners, PKBL BRI estimates an allowance for impairment losses of those loans specifically identified as possibly uncollectible. The level of allowance is examined by Management based on several factors influencing the receivables collectibility.

If there is an objective evidence that impairment losses has been incurred on Loan to other Fostering SOEs, the level of allowance for impairment losses of those loans is evaluated by the Management on the basis of an adverse event has occurred after the initial recognition and impact on the future cash flows that can be reliably estimated.

PKBL BRI uses judgments based on available facts and circumstances, including but not limited to, PKBL BRI's period of relationship with Foster Partners and fostering partnerhip's loan status based on collectibility of loans.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi

PKBL BRI berkesinambungan mengevaluasi adanya bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat cadangan ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Dalam kasus ini, PKBL BRI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui cadangan spesifik (individu) terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang PKBL BRI ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara individual berdasarkan estimasi arus kas masa yang akan datang.

PKBL BRI juga meneliti cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit Mitra Binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada Mitra Binaan. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Cadangan piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Cadangan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

3. ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATION AND ASSUMPTION (continued)

b. Estimations and Assumptions

PKBL BRI continually assesses the existence of objective evidence that the receivables are impaired at the end of each reporting period. The level of allowance is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of said receivables.

In this case, PKBL BRI uses judgment based on the best facts available to recognize a specific allowance (individual) against the due amount to lower PKBL BRI's receivables to the expected collectible amount.

Allowance for impairment losses on loans receivables from other Fostering SOE are calculated based on the estimated losses that cannot be collected individually based on the estimated future cash flows.

PKBL BRI also assesses the allowance for impairment losses collectively towards credit risks of Foster Partners which are grouped based on the same credit risk, regardless whether an allowance has not been specifically identified, have a higher risk of uncollectibility compared to loan given to Foster Partners. Allowance for impairment losses on loan is measured based on the evaluation of current value and historical rate of loan collectibility. Allowance for impairment losses on loan receivables is recognised based on the estimation of uncollectible amount which is done collectively based on a specific percentage (two years minimum) of historical rate of loan collectibility. This allowance is adjusted periodically to reflect actual result and estimation.

4. KAS PADA BANK

Kas pada Bank merupakan penempatan dana PKBL pada rekening giro di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

4. *CASH IN BANK*

Cash in Bank is PKBL fund placement in the following current account of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Program Kemitraan			***Partnership Program***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - sebelum Tbk	53.321.894.440	52.745.332.034	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - setelah Tbk	44.574.812.750	32.018.180.704	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - setelah Tbk	34.069.114.985	159.937.757.887	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - setelah Tbk	13.074.526.684	78.525.929.102	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - sebelum Tbk	4.958.426.365	4.904.811.576	*PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk Interest Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - sebelum Tbk	4.018.775.121	3.975.320.651	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operasional	326.505.586	328.188.552	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operational*
	154.344.055.931	332.435.520.506	
Bina Lingkungan			***Community Development***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli	287.761.584.307	283.197.057.267	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan	58.167.917.645	231.905.633.801	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI	757.454.949	749.264.690	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI*
	346.686.956.901	515.851.955.758	
Jumlah	**501.031.012.832**	**848.287.476.264**	***Total***

Tingkat suku bunga giro pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar 2,00%.

The current account's interest rate for December 31, 2018 and 2017 are 2.00%.

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR

Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

5. *RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING SOE/DISTRIBUTING PARTNERS*

Receivables from other Fostering SOE/Distributing Partners as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
PKBL PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	66.500.000.000	67.500.005.000	*PKBL PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur	(34.399.323.366)	(16.362.150.268)	*Less: allowance for impairment losses on receivables from other fostering SOE/ distributing partners*
Neto	**32.100.676.634**	**51.137.854.732**	***Net***

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Saldo awal tahun	16.362.150.268	16.905.874.481	***Beginning balance***
Pembentukan/(pembalikan) cadangan selama tahun berjalan	18.037.173.098	(543.724.213)	*Allowance/(reversal) for impairment losses during the year*
Saldo akhir tahun	**34.399.323.366**	**16.362.150.268**	***Ending balance***

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)

Berdasarkan Persetujuan Kredit No. B.171-DIR/PRG/03/2013 dan No. PTPN IX-0/KOTR/009/2013 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) tanggal 11 Maret 2013, PKBL BRI menyalurkan pinjaman kemitraan sebesar Rp75.000.000.000 yang diperuntukkan kepada petani/kelompok petani untuk budidaya tanaman tebu untuk masa tanam 2013/2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6% per tahun dan memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2015.

Pada tanggal 10 November 2014, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) mengajukan permohonan perpanjangan pengembalian pinjaman kemitraan tersebut sampai dengan Desember 2015, yang disetujui oleh PKBL BRI pada tanggal 17 Februari 2015.

Pada tanggal 8 Januari 2016, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) mengajukan kembali permohonan perpanjangan pengembalian pinjaman kemitraan sampai dengan Desember 2019.

Pada tanggal 4 April 2017, dilakukan pembahasan antara PKBL BRI dengan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman kemitraan sampai dengan triwulan keempat 2020 dengan jumlah pembayaran cicilan setiap bulan yang sudah ditentukan diawal. Telah terdapat pembayaran pokok di bulan April dan Oktober 2017 sebesar Rp3.499.995.000.

5. RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING SOE/DISTRIBUTING PARTNERS (continued)

Movements in allowance for impairment losses on receivables from other fostering SOE/distributing partners are as follows:

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)

Based on Credit Agreement No. B.171-DIR/PRG/03/2013 and No. PTPN IX-0/KOTR/009/2013 between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dated March 11, 2013, PKBL BRI grants partnership loan amounting to Rp75,000,000,000 for farmers/farmers group for cultivation of sugar cane for 2013/2014 planting season with a fixed annual interest rate of 6% for 24 (twenty four) months that would mature on March 11, 2015.

On November 10, 2014, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) proposed extending the partnership of loan repayment until December 2015, which was approved by PKBL BRI dated February 17, 2015.

On January 8, 2016, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) reproposed extending the partnership of loan repayment until December 2019.

On April 4, 2017, a discussion was held between PKBL BRI and PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) which resulted in an agreement to re-extend the term of repayment of the partnership loan up to the fourth quarter of 2020 with the amount of monthly installment payment determined at the earliest. There have been payments of principal in April and October 2017 amounting to Rp3,499,995,000.

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR (lanjutan)

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (lanjutan)

Pada tahun 2018, dilakukan kembali restrukturisasi PTPN IX yang merupakan program strategis *Holding* PTPN (PTPN III). Kewajiban pembayaran pinjaman kemitraan PTPN IX telah masuk menjadi program restrukturisasi PTPN IX, dengan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tahun 2027 dan jadwal pembayaran cicilan per tahun yang sudah ditentukan pada perjanjian. Telah terdapat pembayaran pokok di bulan Februari 2018 sebesar Rp1.000.005.000.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

5. *RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING SOE/DISTRIBUTING PARTNERS (continued)*

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (continued)

In 2018, a restructurization of PTPN IX was held as PTPN Holding's (PTPN III) strategic program. PTPN IX's partnership loans installment obligation was included in PTPN IX's restructuring program, with a period extension until 2027 and an annual payment schedule that was decided on the agreement. There have been payment of principal in February 2018 amounting to Rp1,000,005,000.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables from the other fostering SOE/distributing partners is adequate to cover losses from uncollectible receivables.

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Berdasarkan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	Regional Offices
Malang	68.195.425.925	51.813.615.414	*Malang*
Yogyakarta	49.442.875.287	31.827.800.724	*Yogyakarta*
Denpasar	39.305.214.095	22.232.211.901	*Denpasar*
Makassar	38.358.414.881	20.097.795.695	*Makassar*
Semarang	27.189.102.405	16.782.724.252	*Semarang*
Surabaya	26.312.641.466	16.284.001.566	*Surabaya*
Bandung	23.732.531.742	14.736.833.772	*Bandung*
Manado	22.336.126.164	7.779.257.383	*Manado*
Banjarmasin	21.936.048.501	13.166.650.545	*Banjarmasin*
Palembang	21.669.834.308	9.325.182.479	*Palembang*
Bandar Lampung	17.799.279.220	10.675.182.414	*Bandar Lampung*
Medan	19.491.606.071	7.995.134.780	*Medan*
DKI Jakarta 2	15.859.764.935	9.684.413.313	*DKI Jakarta 2*
Banda Aceh	12.567.637.420	7.692.663.901	*Banda Aceh*
Padang	12.318.522.212	6.979.482.709	*Padang*
DKI Jakarta 3	10.939.644.428	6.216.283.515	*DKI Jakarta 3*
Pekanbaru	10.356.821.033	4.603.904.551	*Pekanbaru*
DKI Jakarta 1	8.909.074.106	2.050.022.075	*DKI Jakarta 1*
Jayapura	8.692.047.301	3.758.943.567	*Jayapura*
Jumlah	**455.412.611.500**	**263.702.104.556**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(39.811.872.234)	(36.174.341.728)	*Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners*
Neto	**415.600.739.266**	**227.527.762.828**	***Net***

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan) / *LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS (continued)*

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi / *By Economic Sector*

	31 Desember/ *December 31,* 2018	31 Desember/ *December 31,* 2017	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	264.186.808.092	138.036.980.180	*Trading, Restaurants and Hotels*
Pertanian	133.155.391.421	98.086.350.346	*Agriculture*
Jasa Lainnya	28.183.358.155	13.128.802.141	*Services Industry*
Industri Pengolahan	19.707.613.794	10.107.208.031	*Processing Industries*
Sosial Masyarakat	6.392.165.156	2.845.106.677	*Community Services*
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.831.748.965	1.141.410.201	*Transportation, Warehousing and Communications*
Listrik, Gas dan Air	598.044.617	234.024.380	*Electricity, Gas and Water*
Konstruksi	231.786.400	122.222.600	*Construction*
Pertambangan	125.694.900	-	*Mining*
Jumlah	**455.412.611.500**	**263.702.104.556**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(39.811.872.234)	(36.174.341.728)	*Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners*
Neto	**415.600.739.266**	**227.527.762.828**	***Net***

c. Berdasarkan Kualitas Piutang Pinjaman / *Loan Receivables By Collectibility*

	31 Desember/ *December 31,* 2018	31 Desember/ *December 31,* 2017	
Piutang Pinjaman Mitra Binaan			***Loan Receivables from Foster Partners***
Lancar	407.436.297.761	223.730.374.569	*Current*
Kurang Lancar	8.055.209.157	3.559.145.897	*Substandard*
Diragukan	1.885.132.936	1.633.098.360	*Doubtful*
Macet	38.035.971.646	34.779.485.730	*Loss*
Jumlah	**455.412.611.500**	**263.702.104.556**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(39.811.872.234)	(36.174.341.728)	*Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners*
Neto	**415.600.739.266**	**227.527.762.828**	***Net***

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan / *Allowance for Impairment Losses on Loan Receivables from Foster Partners*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2018	31 Desember/ *December 31,* 2017	
Saldo awal tahun	36.174.341.728	34.598.316.377	***Beginning balance***
Pembentukan cadangan selama tahun berjalan	3.637.530.506	1.576.025.351	*Allowance for impairment during the year*
Saldo akhir tahun	**39.811.872.234**	**36.174.341.728**	***Ending balance***

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan (lanjutan)

Alokasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

6. *LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS (continued)*

d. *Allowance for Impairment Losses on Loan Receivables from Foster Partners (continued)*

Allocation for allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners are as follows:

	31 Desember 2018/*December 31, 2018*			
	Saldo Piutang Pinjaman/ *Loan Receivables Balance*	Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai/ *Accumulated allowance for impairment losses*	Neto/*Net*	
Lancar	407.436.297.761	(934.082.925)	406.502.214.836	*Current*
Kurang lancar	8.055.209.157	(451.085.884)	7.604.123.273	*Substandard*
Diragukan	1.885.132.936	(390.731.779)	1.494.401.157	*Doubtful*
Macet	38.035.971.646	(38.035.971.646)	-	*Loss*
Jumlah	**455.412.611.500**	**(39.811.872.234)**	**415.600.739.266**	*Total*

	31 Desember 2017/*December 31, 2017*			
	Saldo Piutang Pinjaman/ *Loan Receivables Balance*	Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai/ *Accumulated allowance for impairment losses*	Neto/*Net*	
Lancar	223.730.374.569	(835.015.598)	222.895.358.971	*Current*
Kurang lancar	3.559.145.897	(208.207.628)	3.350.938.269	*Substandard*
Diragukan	1.633.098.360	(351.632.772)	1.281.465.588	*Doubtful*
Macet	34.779.485.730	(34.779.485.730)	-	*Loss*
Jumlah	**263.702.104.556**	**(36.174.341.728)**	**227.527.762.828**	*Total*

Manajemen berpendapat bahwa saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada mitra binaan cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the balance of allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners is adequate to cover losses from uncollectible loan.

7. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan jasa administrasi pinjaman yang masih akan diterima berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

7. *ACCRUED LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME*

Accrued loan administration services income by regional offices are as follows:

Kantor Wilayah	31 Desember/ *December 31,* 2018	31 Desember/ *December 31,* 2017	*Regional Offices*
Malang	1.327.311.228	193.822.689	*Malang*
Yogyakarta	223.694.716	131.924.981	*Yogyakarta*
Semarang	111.855.322	93.696.143	*Semarang*

7. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN YANG MASIH AKAN DITERIMA (lanjutan)

Pendapatan jasa administrasi pinjaman yang masih akan diterima berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

7. *ACCRUED LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME (continued)*

Accrued loan administration services income by regional offices are as follows: (continued)

Kantor Wilayah	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	Regional Offices
Denpasar	105.023.023	46.419.512	*Denpasar*
Bandung	98.558.036	81.888.270	*Bandung*
Makassar	95.312.219	57.295.875	*Makassar*
Surabaya	93.435.716	72.809.646	*Surabaya*
Banjarmasin	80.681.373	81.317.727	*Banjarmasin*
Bandar Lampung	74.596.557	64.012.684	*Bandar Lampung*
Manado	71.871.854	56.438.854	*Manado*
Medan	40.816.279	14.177.420	*Medan*
Palembang	39.073.178	22.642.852	*Palembang*
DKI Jakarta 2	36.273.336	31.509.327	*DKI Jakarta 2*
Banda Aceh	33.095.962	21.235.815	*Banda Aceh*
Padang	25.128.496	17.513.795	*Padang*
Pekanbaru	20.308.611	14.583.775	*Pekanbaru*
DKI Jakarta 3	18.519.916	10.949.496	*DKI Jakarta 3*
Jayapura	18.039.291	9.063.163	*Jayapura*
DKI Jakarta 1	11.141.475	4.994.048	*DKI Jakarta 1*
Jumlah	**2.524.736.588**	**1.026.296.072**	***Total***

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp15.814.348.189 dan Rp24.974.479.409 terdiri atas alokasi dana pinjaman kemitraan dari PKBL BRI kepada Unit Kerja (cabang) Penyalur PKBL BRI tetapi belum disalurkan kepada Mitra Binaan sampai dengan masing-masing akhir periode pelaporan.

8. *OTHER RECEIVABLES*

Other receivables as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp15,814,348,189 and Rp24,974,479,409, respectively, consist of allocated funds of partnership loan from PKBL BRI to PKBL BRI distributor working unit (branches) but not yet distributed to foster partner until the end of the reporting period, respectively.

9. ASET TETAP

Aset tetap adalah sebagai berikut:

9. *FIXED ASSETS*

Fixed assets are as follows:

	31 Desember/December 31, 2018				
	Saldo 1 Januari 2018/ *Balance January 1, 2018*	Mutasi/*Movement*		Saldo 31 Desember 2018/ *Balance December 31, 2018*	
		Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*		
Harga Perolehan					*Acquisition Cost*
Inventaris dan peralatan	71.089.105	-	-	71.089.105	*Premises and equipment*
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Inventaris dan peralatan	(71.057.855)	31.250	-	(71.089.105)	*Premises and equipment*
Nilai Buku Neto	**31.250**			-	***Net Book Value***

9. ASET TETAP (lanjutan) / *FIXED ASSETS (continued)*

Aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *Fixed assets are as follows: (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2017				
	Saldo 1 Januari 2017/ *Balance January 1, 2017*	Mutasi/*Movement*		Saldo 31 Desember 2017/ *Balance December 31, 2017*	
		Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*		
Harga Perolehan					*Acquisition Cost*
Inventaris dan peralatan	71.089.105	-	-	71.089.105	*Premises and equipment*
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Inventaris dan peralatan	(70.194.730)	863.125	-	(71.057.855)	*Premises and equipment*
Nilai Buku Neto	**894.375**			**31.250**	***Net Book Value***

10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *ACCRUED EXPENSES*

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp41.160.843.365 dan Rp54.054.085.143, yang terdiri atas bina lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Unit Kerja (cabang) BRI namun belum diganti atau dibayar kembali oleh Unit PKBL BRI.

Accrued expenses as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp41,160,843,365 and Rp54,054,085,143 respectively, which consist of community development that have been or are being performed by the BRI working unit (branches) but not yet reimbursed by PKBL BRI Unit.

11. ASET NETO / *NET ASSETS*

Aset Neto Tidak Terikat / *Unrestricted Net Assets*

	31 Desember/ *December 31,* 2018	31 Desember/ *December 31,* 2017	
Saldo awal tahun	1.098.899.815.412	1.477.590.095.310	***Beginning balance***
Penurunan Aset Neto Tidak Terikat	(172.989.145.268)	(378.690.279.898)	*Decrease in Unrestricted Net Assets*
Saldo akhir tahun	**925.910.670.144**	**1.098.899.815.412**	***Ending balance***

12. ALOKASI DANA DARI BUMN PEMBINA / *ALLOCATION OF FUND FROM FOSTERING SOE*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta perubahan terakhir pada PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.

Based on the Minister of Finance Decree Letter No. 316/KMK.016/1994 regarding Guidelines for Small Business Enterprise and Cooperation through the Utilization of fund from SOE's profit as amended several times with Minister of SOEs' Copy Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 regarding SOEs Partnership Program with Small Business Enterprises and Community Development Program, as well as the latest amendment No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013.

12. ALOKASI DANA DARI BUMN PEMBINA (lanjutan)

Dinyatakan bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebelum tahun 2013 salah satunya bersumber dari penyisihan laba setelah pajak dan pada tahun 2013 berasal dari Anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, yang menyatakan bahwa dana PKBL bersumber dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang terbaru No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang menambahkan bahwa dana PKBL juga bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina.

Alokasi dana pada tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tahun 2018

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 50 tanggal 22 Maret 2018 yang telah disahkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fathiah Helmi, SH, dinyatakan tidak ada pembentukan biaya untuk PKBL untuk tahun 2018.

Tahun 2017

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 37 tanggal 15 Maret 2017 yang telah disahkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fathiah Helmi, SH, dinyatakan tidak ada pembentukan biaya untuk PKBL untuk tahun 2017.

Per tanggal 31 Desember 2017, telah dilakukan pembalikan atas piutang alokasi dana dari BUMN Pembina yang tidak direalisasikan ke rekening bank PKBL BRI sebesar Rp253.977.420.000 berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017 yang menyatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2016 telah diputuskan alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan tahun 2016 menjadi beban Perseroan, namun oleh karena masih terdapat sisa saldo dana bina lingkungan yang teralokasi pada tahun 2015 maka penggunaan anggaran program bina lingkungan tahun 2016 menggunakan sisa saldo dana bina lingkungan yang masih tersisa pada tahun 2016.

12. ALLOCATION OF FUND FROM FOSTERING SOE (continued)

It was stated that one of the fund sources of Partnership and Community Development Program before 2013 is from the provision from profit after tax and the source in 2013 is from the Company's budget calculated as expense, maximum of 2% from prior year's net profit.

In 2015, Ministry of SOEs' issued Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 which stated that PKBL fund derived from the provision of net income after tax which is set by GMS/Ministry's Approval of Annual Report of Fostering SOEs is at maximum of 4% (four percent) from the prior year's net profit after tax.

Ministry of SOEs' recently developed Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 on December 19, 2016. This new regulation further adds the source through which PKBL fund can be derived, that is from Fostering SOE's budget expenditure or expense.

Allocation of fund in 2018 and 2017 are as follows:

Year 2018

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders No. 50 dated March 22, 2018 that was legalised by Notary and Land Registar Fathiah Helmi, SH, it was stated that there is no expense created for PKBL BRI for the fiscal year 2018.

Year 2017

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders No. 37 dated March 15, 2017 that was legalised by Notary and Land Registar Fathiah Helmi, SH, it was stated that there is no expense created for PKBL BRI for the fiscal year 2017.

As of December 31, 2017, funds allocation receivable from fostering SOE which is not realized to PKBL's Bank account has been reversed as an expense amounting to Rp253,977,420,000 based on the Annual GMS dated March 15, 2017 stating that at the General Meeting of Shareholders held in 2016 it has been decided the allocation of funds for the Community Development Program 2016 becomes the expense of the Company, but because there is still remaining balance of Community Development Program funds allocated in 2015 then the use of Community Development Program budget in 2016 using the remaining balance of Community Development Program funds in 2016.

13. PENDAPATAN BUNGA / *13. INTEREST INCOME*

Pendapatan bunga dari jasa giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Interest income from current account for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the years ended December 31*		
	2018	**2017**	
Program Kemitraan			***Partnership Program***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - setelah Tbk	2.497.543.180	6.972.197.441	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - setelah Tbk	460.887.693	316.494.246	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - sebelum Tbk	720.703.006	786.060.907	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - setelah Tbk	746.656.053	558.883.469	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - after Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - sebelum Tbk	67.018.488	73.096.149	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - sebelum Tbk	54.318.087	59.243.995	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - before Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operasional	4.427.540	7.268.359	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operational*
	4.551.554.047	8.773.244.566	
Bina Lingkungan			***Community Development***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan	3.522.368.098	6.104.909.810	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli	5.705.658.798	5.586.149.502	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI	10.237.822	11.166.253	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI*
	9.238.264.718	11.702.225.565	
Jumlah	**13.789.818.765**	**20.475.470.131**	***Total***

Pendapatan bunga disajikan pada Laporan Aktivitas setelah dikurangi pajak yang bersifat final dan biaya administrasi rekening yaitu sebesar Rp2.758.892.948 dan Rp4.096.444.026 untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Interest income presented in the Statement of Activities is after deducting final tax and administrative expense amounting to Rp2,758,892,948 and Rp4,096,444,026, for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

14. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN / *14. LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME*

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Loan administration services income of Partnership Program for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Kantor Wilayah	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the years ended December 31.*		***Regional Offices***
	2018	**2017**	
Malang	2.448.230.062	452.775.237	*Malang*
Yogyakarta	1.587.299.565	807.293.323	*Yogyakarta*
Bandung	1.457.386.103	672.394.121	*Bandung*
Surabaya	1.203.275.257	634.345.304	*Surabaya*

14. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN (lanjutan)

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut (lanjutan):

14. LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME (continued)

Loan administration services income of Partnership Program for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows (continued):

Kantor Wilayah	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the years ended December 31.* 2018	2017	*Regional Offices*
DKI Jakarta 2	778.096.801	402.541.731	*DKI Jakarta 2*
Semarang	775.062.518	499.595.601	*Semarang*
Denpasar	745.554.850	319.831.357	*Denpasar*
DKI Jakarta 3	613.854.695	153.756.726	*DKI Jakarta 3*
Makassar	603.995.727	597.896.550	*Makassar*
Medan	596.566.146	156.392.967	*Medan*
Banjarmasin	592.408.666	461.987.991	*Banjarmasin*
Pekanbaru	472.742.900	254.071.712	*Pekanbaru*
Palembang	418.215.953	235.959.642	*Palembang*
Padang	313.466.379	228.854.542	*Padang*
DKI Jakarta 1	298.623.843	53.012.227	*DKI Jakarta 1*
Bandar Lampung	250.538.709	436.945.828	*Bandar Lampung*
Jayapura	223.286.812	128.613.683	*Jayapura*
Banda Aceh	217.212.887	385.576.659	*Banda Aceh*
Manado	211.899.847	147.125.100	*Manado*
Kantor Cabang Khusus	-	1.000.000	*Kantor Cabang Khusus*
Jumlah	**13.807.717.720**	**7.029.970.301**	***Total***

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Jasa Administrasi Pinjaman Kemitraan, PKBL BRI menerbitkan surat edaran Nota No. B.79-DIR/PRG/12/2007 tanggal 19 Desember 2007 perihal Bunga Pinjaman Kemitraan dan telah diperbaharui dengan Surat No. B.176-DIR/PRG/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang perubahan distribusi/komposisi bunga Pinjaman Kemitraan.

Based on Minister of SOEs' Circular Letter No. SE-01/MBU/2007 dated August 31, 2007 regarding the Application of Partnership Loan Administration Services, PKBL BRI issued Memorandum Circular No. B.79-DIR/PRG/12/2007 dated December 19, 2007 regarding Interest Partnership Loan and that has been updated with Letter No. B.176-DIR/PRG/03/2013 dated March 13, 2013 regarding changes in distribution/composition of Partnership Loan interest.

Berikutnya perubahan atas distribusi/komposisi bunga Pinjaman Kemitraan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan PER-02/MBU/07/2017 dimana PKBL BRI menerbitkan Surat No. B.136.e-PPK/KPL/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan perubahan sebagai berikut:

Subsequent changes to the distribution/ composition of the Partnership Loan interest shall be made in accordance with the Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 and the latest amendment was made pursuant to PER-02/MBU/07/2017 where PKBL BRI issued Letter No. B.136.e-PPK/KPL/08/2017 dated August 18, 2017 with the following changes:

	Setelah 18 Agustus/ *After August 18, 2017*	Setelah 31 Desember/ *After December 31, 2015*	
Jasa Administrasi/Suku Bunga	3%	6%	*Administration Services/Interest Rates*
Distribusi jasa administrasi/ suku bunga sebagai berikut:			*Distribution of administration services/ interest rates are as follows:*
Pelimpahan ke Kantor Pusat	3%	6%	*Transferred to Head Office*

15. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *15. OTHER INCOME*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the year ended December 31,*		
	2018	**2017**	
Pengembalian dana dari koordinator sektor BUMN Peduli	-	2.711.795.876	*Refund from BUMN Peduli coordinator*
Pengembalian dana pinjaman kemitraan karena tidak jadi realisasi	50.000.000	-	*Refund from unrealized foster partners Loan*
Pengembalian kelebihan dana bina lingkungan	153.489.840	745.720.085	*Return of excess fund from community development*
Jumlah	**203.489.840**	**3.457.515.961**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2018, pengembalian kelebihan dana bina lingkungan terdiri atas kegiatan Rehabilitasi Mushola Kodim dan denda kepada Vendor atas keterlambatan Pengadaan Sembako. Pada tanggal 31 Desember 2017, pengembalian dana dari koordinator sektor BUMN Peduli terutama berasal dari PT Pos Indonesia dan Perum Perumnas.

As of December 31, 2018, refund of excess fund from community development consist of Kodim Mosque Rehabilitation and penalty to Vendor for the delay in Procuring Sembako. As of December 31, 2017, refund from BUMN Peduli coordinator is mainly from PT Pos Indonesia and Perum Perumnas.

16. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN / *16. FOSTERING PARTNERSHIP FUNDS*

Dana pembinaan kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp323.438.491 dan Rp197.510.500 digunakan masing-masing untuk kegiatan pelatihan mitra binaan dan penyelenggaraan pameran atas usaha Mitra Binaan.

Fostering partnership funds for the year ended December 31, 2018 and 2017 which amounted Rp323,438,491 and Rp197,510,500, respectively, were used for training the foster partners and the business exhibitions of foster partners.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015, dana pembinaan kemitraan menjadi bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan dengan nama "Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan".

Based on Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015, dated July 3, 2015, the fostering partnership fund is a part of funds ditribution for community development under the name of "Funds for education, training, internship, marketing, promotion and other forms of assistance related to the efforts of increasing the capacity of foster entrepreneur of Partnership Program."

Sesuai dengan Berita Acara RUPS LB No. 13 tanggal 14 Desember 2015 dinyatakan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan diberlakukan pada tahun 2016 di PKBL BRI.

According to Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 13 dated December 14, 2015 it was stated that the Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 regarding Pertnership and Community Development Program will be enacted by PKBL BRI in 2016.

Perkembangan berikutnya, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016, dana pembinaan kemitraan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan berubah menjadi program yang didanai dari dana program kemitraan.

The next development, based on Minister of SOE Decree No. PER-03/MBU/12/2016, dated December 19, 2016, the fostering partnership fund previously classified as part of funds ditribution for community development turned into a program funded by a partnership program fund.

16. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN (lanjutan)

Sesuai dengan Berita Acara RUPS No. 37 tanggal 15 Maret 2017, dinyatakan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diberlakukan pada tahun 2017 di PKBL BRI.

16. FOSTERING PARTNERSHIP FUNDS (continued)

According to Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 37 dated March 15, 2017, it was stated that the Minister of SOE Decree No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 19, 2016 concerning amendment to Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015 regarding Partnership and Community Development Program will be enacted by PKBL BRI in 2017.

17. PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Penyaluran dana program bina lingkungan adalah sebagai berikut:

17. COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION

Community development program funds distribution are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the year ended December 31.*		
	2018	**2017**	
Bantuan Pendidikan	53.087.712.848	32.990.028.609	*Aid for Education Donation*
Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan	30.294.264.189	32.094.333.268	*Social Assistance for Poverty Alleviation*
Bantuan Sarana Ibadah	27.404.110.789	29.095.446.575	*Improvement of Worship Facilities*
Bantuan Peningkatan Kesehatan	22.384.597.948	21.596.164.343	*Aid for Health Improvement*
Bantuan Sarana Umum	22.895.422.555	31.455.378.146	*Public Facility Donation*
Bantuan Korban Bencana Alam	6.845.484.366	2.394.042.761	*Aid for Victims of Natural Disaster*
Pelestarian Alam	722.965.000	723.303.800	*Nature Preservation*
Jumlah	**163.634.557.695**	**150.348.697.502**	***Total***

18. BEBAN ATAS PEMBALIKAN PIUTANG LAIN-LAIN

Beban atas pembalikan piutang lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp12.398.547.605 dan Rp Nihil.

Beban atas pembalikan piutang lain-lain adalah beban yang timbul akibat pembalikan atau penghapusan atas piutang lain-lain jangka panjang.

18. REVERSAL OF OTHER RECEIVABLE EXPENSES

Reversal of other receivable expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017, amounting to Rp12,398,547,605 and Rp Nil respectively.

Reversal of other receivable expenses are expenses occurred due to reversal or write off from long outstanding other receivables.

19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *19. RELATED PARTIES TRANSACTIONS*

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak-pihak berelasi / *a. Type of relationships and transactions with related parties*

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationship*	Unsur transaksi pihak berelasi/ *Transactions with related parties*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN Pembina/*Fostering SOE*	Kas, pendapatan bunga dan beban yang masih harus dibayar kepada BUMN Pembina/*Cash, interest income and accrued expenses to Fostering SOE*
PT Perkebunan Nusantara IX	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Common control through central government*	Piutang kepada BUMN Pembina lain dan beban lain-lain/*Receivables from other fostering SOE and other expenses*
PT Pos Indonesia Perum Perumnas	Pengendalian melalui Kementerian BUMN/*Common control through Ministry of SOE*	Pengembalian dana program BUMN Peduli/*Refund from BUMN Peduli coordinator*

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi / *b. Details of transaction balances with related parties*

	31 Desember/ *December 31,* 2018	31 Desember/ *December 31,* 2017	
Aset			***Asset***
Kas pada Bank	501.031.012.832	848.287.476.264	*Cash in Bank*
Piutang kepada BUMN pembina lain - bersih	32.100.676.634	51.137.854.732	*Receivables from other fostering SOE/distributing partners - net*
Jumlah	**533.131.689.466**	**899.425.330.996**	***Total***
Jumlah aset	**967.071.513.509**	**1.152.953.900.555**	***Total assets***
Persentase jumlah aset kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset	**55,13%**	**78,01%**	***Percentage of total assets to related party of total assets***
Liabilitas			***Liability***
Beban yang masih harus dibayar	41.160.843.365	54.054.085.143	*Accrued Expenses*
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	**100,00%**	**100,00%**	***Percentage of total liabilities to related party of total liabilities***
Pendapatan			***Revenue***
Pendapatan bunga	11.030.925.817	16.379.026.105	*Interest Income*
Pendapatan lain-lain - pengembalian dana dari koordinator sektor BUMN Peduli	-	2.711.795.876	*Other Income - refund from BUMN Peduli coordinator*
Jumlah	**11.030.925.817**	**19.090.821.981**	***Total***
Jumlah pendapatan	**25.042.133.377**	**27.410.236.580**	***Total revenue***
Persentase jumlah pendapatan dari pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan	**44,05%**	**69,65%**	***Percentage total revenue from related party of total revenue***

19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

19. *RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)*

b. Details of transaction balances with related parties (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2018	31 Desember/ *December 31,* 2017	
Beban lain-lain	12.398.547.605	-	*Other expenses*
Beban pembalikan piutang kepada BUMN Pembina	-	253.977.420.000	*Reversal of receivables from Fostering SOE expenses*
Jumlah	**12.398.547.605**	**253.977.420.000**	***Total***
Jumlah beban	**198.031.278.645**	**406.100.516.478**	***Total expenses***
Persentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	**6,26%**	**62,54%**	***Percentage total expense to related party of total expense***

20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA

Kep.100/MBU/2002

Program Kemitraan

a. Penilaian Efektivitas

Penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektabilitas Pengembalian Pinjaman.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas pinjaman modal kerja. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri atas saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga dari program kemitraan.

Tabel skor tingkat penyerapan dana

20. *RESTRICTED FUND USAGE*

Kep.100/MBU/2002

Partnership Program

a. Effectivity Performance

The performance evaluation of partnership and community development program is based on the Minister of SOE Decree No. Kep.100/ MBU/ 2002 dated June 4, 2002 regarding The Effectiveness Indicator of Partnership Program Loan Distribution and the Collectability of the Loan Repayments.

The effectiveness of loan distribution is calculated by dividing the amount of distributed funds by the amount of the utilizable funds. Amount of distributed funds represents all current year funds distribution to small enterprise businesses and cooperation. The funds are distributed as working capital loans. Utilizable funds is calculated by adding the beginning balance with loan repayments (principal and the interest repayments) and with interest income from partnership program.

Score of funds absorption table

Penyerapan %	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80	*% of absorption*
Skor	3	2	1	0	*Score*

20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan) / *RESTRICTED FUND USAGE (continued)*

Kep.100/MBU/2002 (lanjutan) / ***Kep.100/MBU/2002 (continued)***

Program Kemitraan (lanjutan) / ***Partnership Program (continued)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ *Year ended December 31, 2018*	
Distribusi dana		***Fund distribution***
Jumlah dana yang disalurkan	344.151.895.500	*Distribution of Funds*
Dana Pembinaan Kemitraan (Catatan 16)	323.438.491	*Fostering Partnership Funds (Note 16)*
	344.475.333.991	
Dana yang tersedia		***Fund available***
Saldo awal kas Program Kemitraan (Catatan 4)	332.435.520.506	*Cash of Partnership Program Beginning balance (Note 4)*
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	154.203.750.655	*Repayments from Foster Partners*
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	12.143.732.370	*Administration Service Income of Loan*
Pengembalian dari BUMN pembina lain (Catatan 5)	1.000.005.000	*Repayments from other fostering SOE (Note 5)*
	499.783.008.531	
Tingkat efektivitas penyaluran (prosentase distribusi dana terhadap dana yang tersedia)	**68,92%**	***Level of the effectiveness of the loan distribution (percentage fund distribution to fund available)***
Skor tingkat efektivitas penyaluran pinjaman	**0**	***Score of level of the effectiveness of the loan distribution***

b. Tingkat Kolektabilitas Penyaluran Pinjaman / *b. Collectability level of the Loan Distribution*

Indikator lain dalam penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan yaitu tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman yang memberikan indikasi adanya kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektabilitas dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Bobot kolektabilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), diragukan (25%) dan macet (0%).

Another performance indicator of partnership and community development program is the collectability of repayments which indicates the probability of a loan to be fully paid. The collectability level is calculated by comparing the weighted average collectability funds with distributed funds. Weighted average funds is the result of multiplying the collectability weightage with the balance of each quality of the loan (e.g: current: 100%, substandard: 75%, doubtful: 25% and loss: 0%)

20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan) / *RESTRICTED FUND USAGE (continued)*

Kep.100/MBU/2002 (lanjutan) / ***Kep.100/MBU/2002 (continued)***

Program Kemitraan (lanjutan) / ***Partnership Program (continued)***

b. Tingkat Kolektabilitas Penyaluran Pinjaman (lanjutan) / ***b. Collectability level of the Loan Distribution (continued)***

Tingkat Pengembalian (%)	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10	% of Collectability Level
Skor	3	2	1	0	Score

Rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: / *Weighted average amount of the collectability of the loan as of December 31, 2018 is as follows:*

Kualitas Pinjaman	Saldo pinjaman (Catatan 6)/ *Loan balance (Note 6)*	%	Jumlah rata-rata tertimbang/ *Weighted Average Amount* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	*Loan Quality*
Lancar	407.436.297.761	100%	407.436.297.761	*Current*
Kurang Lancar	8.055.209.157	75%	6.041.406.868	*Substandard*
Diragukan	1.885.132.936	25%	471.283.234	*Doubtful*
Macet	38.035.971.646	0%	-	*Loss*
Jumlah	**455.412.611.500**		**413.948.987.863**	*Total*
Tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman (prosentase jumlah rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman terhadap saldo pinjaman yang disalurkan)		**90,90%**		*Loan repayment collectability level (percentage of weighted average loan collectability to loan distribution)*
Nilai tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman		**3**		*Score of repayments collectability level*

PER-03/MBU/12/2016 / ***PER-03/MBU/12/2016***

Program Kemitraan / ***Partnership Program***

Prosentase dana pembinaan terhadap dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan / ***The percentage of fostering partnership funds to current year funds distribution for partnership program***

Berdasarkan PER-09/MBU//07/2015 pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa besarnya dana pembinaan kemitraan yang terdiri atas biaya pendidikan, pemasaran, promosi dan hal lain-lain besarnya maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Dana pembinaan menjadi bagian dari program bina lingkungan. / *Based on PER-09/MBU/07/2015 art 9 paragraph 4 specified that the amount of fostering partnership funds which consists of education, marketing, promotion expense, etc is 20% (twenty percent) at maximum of the partnership program distribution during the year. Development funds is part of community development program.*

Pada tanggal 19 Desember 2016, PER-09/MBU/07/2015 direvisi dengan PER-03/MBU/12/206, dimana beban pembinaan kemitraan menjadi bagian dari realisasi program kemitraan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 9 ayat 1c, efektif 19 Desember 2016. / *As of December 19, 2016, PER-09/MBU/07/2015 revised with PER-03/MBU/12/2016, which stipulates that fostering partnership expense is a part of partnership program as stated in Art 9 paragraph 1c, effective December 19, 2016.*

20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

PER-03/MBU/12/2016 (lanjutan)

Program Kemitraan (lanjutan)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, presentase beban dana pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan adalah sebagai berikut:

20. RESTRICTED FUND USAGE (continued)

PER-03/MBU/12//2016 (continued)

Partnership Program (continued)

For the year ended December 31, 2018, the percentage of fostering partnership funds to current year partnership program funds distribution is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ *Year ended December 31, 2018*	
Dana pembinaan kemitraan (Catatan 16)	323.438.491	*Fostering partnership funds (Note 16)*
Penyaluran program kemitraan	344.151.895.500	*Partnership distribution*
	344.475.333.991	
Prosentase dana pembinaan kemitraan terhadap dana program kemitraan yang disalurkan	**0,09%**	***Percentage of fostering partnership funds to partnership funds distribution***

21. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan susunan Pengelola PKBL BRI

Pada tanggal 1 Februari 2019, terdapat perubahan posisi Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Kemitraan dari Sony Harsono WS menjadi Hari Purnomo.

Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No: PER-02/MBU/7/2017 dinyatakan bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, BUMN Pembina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN Khusus dalam hal ini adalah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri BUMN pada Surat No: S-822/MBU/12/2018 tanggal 13 Desember 2018.

21. EVENT AFTER THE DATE OF REPORTING PERIOD

Changes in the composition of management of PKBL BRI

Dated February 1, 2019, there was a change in Division Head of Small Business and Partnership position from Sony Harsono WS to Hari Purnomo.

Distribution of Partnership Program Funds through Special SOE

In accordance with SOE Minister Regulation No: PER-02/MBU/7/2017 it was stated that to accelerate and increase professionalism in the development and empowerment of micro and small economies, Fostering SOE can provide non interest bearing loans or Partnership Program funding grants to Special SOEs in this matter is PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) as determined by the Minister of SOE on Letter No: S-822/MBU/12/2018 dated December 13, 2018.

21. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun melalui BUMN Khusus (lanjutan)

Pada tanggal 26 Desember 2018, merujuk Surat Nomor: B-2127-DIR/BKC/12/2018, BUMN Pembina mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana program kemitraan kepada PT. PNM selaku BUMN khusus melalui mekanisme hibah sebesar Rp50 miliar kepada Dewan Komisaris.

Pada tanggal 12 Februari 2019, merujuk Surat Nomor: R.06-KOM/02/2019, Dewan Komisaris pada prinsipnya mendukung kebijakan Kementerian BUMN terkait dengan penyaluran dana PK melalui BUMN khusus sebesar Rp50 miliar dan meminta Direksi untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri BUMN.

Pada tanggal 6 Maret 2019, merujuk Surat Nomor: B-354-DIR/BKC/03/2019, BUMN Pembina mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana program kemitraan melalui BUMN Khusus kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sampai dengan tanggal pelaporan, BUMN Pembina masih menunggu persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

21. EVENT AFTER THE DATE OF REPORTING PERIOD (continued)

Distribution of Partnership Program Funds through Special SOE (continued)

On December 26, 2018, referring to Letter Number: B-2127-DIR/BKC/12/2018, the Fostering SOE submitted an application for approval of the partnership program fund distribution to PT. PNM as a special SOE through a grant mechanism of Rp50 billion to the Board of Commissioners.

On February 12, 2019, referring to Letter Number: R.06-KOM/02/2019, the Board of Commissioners principally supported the policy of the Ministry of SOE related to the distribution of PK funds through a special SOE amounting to Rp50 billion and asked the Directors to submit an application for approval to the Minister of SOE.

On March 6, 2019, referring to Letter Number: B-354-DIR/BKC/03/2019, the Fostering SOE submitted an application for approval of the distribution of partnership program funds through Special SOEs to the Minister of State-Owned Enterprises.

As of the reporting date, the Fostering SOE is still awaiting approval from the Minister of State-Owned Enterprises.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PENYALURAN DANA
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2018

Statement of Community Development Program Funds Distribution Year 2018

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Offices*	Bantuan Sarana Umum/ *Public Facility Donation*	Bantuan Korban Bencana Alam/ *Aid for Victims of Nature Disaster*	Bantuan Pendidikan/ *Aid for Education Donation*	Bantuan Peningkatan Kesehatan/ *Aid for Health Improvement*	Bantuan Sarana Ibadah/ *Improvement of Worship Facilities*	Pelestarian Alam/ *Nature Preservation*	Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan/ *Social Assistance in order to Alleviate Poverty*	Jumlah/ *Total*
1	Banda Aceh	1.121.166.784	23.650.000	991.308.750	186.000.000	1.386.778.000	80.000.000	309.090.295	4.097.993.829
2	Bandar Lampung	829.422.000	19.900.000	1.427.844.653	675.130.000	561.127.500	-	317.369.575	3.830.793.728
3	Bandung	4.307.688.700	226.421.298	3.842.806.038	3.839.167.940	2.512.092.700	267.840.000	3.734.959.500	18.730.976.176
4	Banjarmasin	324.048.460	-	692.531.500	1.823.044.570	1.237.430.000	-	1.255.478.250	5.332.532.780
5	Denpasar	1.513.063.193	3.958.152.925	2.253.749.850	50.000.000	1.652.522.999	86.000.000	1.098.811.278	10.612.300.245
6	DKI Jakarta 1	14.629.000	-	1.065.792.700	1.021.660.500	1.700.958.591	-	191.949.050	3.994.989.841
7	DKI Jakarta 2	1.705.907.000	-	2.491.710.000	694.107.500	4.349.131.500	-	1.268.742.500	10.509.598.500
8	DKI Jakarta 3	613.365.000	400.000.000	1.132.070.138	141.754.991	1.346.000.000	-	440.634.323	4.073.824.452
9	Jayapura	33.117.043	-	598.650.000	883.500.000	-	-	1.709.633.680	3.224.900.723
10	Kantor Pusat	804.700.000	324.699.402	17.401.685.844	1.354.083.597	4.008.850.000	3.900.000	9.431.905.800	33.329.824.643
11	Makassar	2.436.900.000	454.939.391	2.631.848.400	1.364.345.000	929.835.000	-	2.422.773.000	10.240.640.791
12	Malang	1.566.195.864	352.600.000	5.325.327.000	4.442.564.150	1.669.055.000	43.000.000	821.571.475	14.220.313.489
13	Manado	778.035.000	393.704.000	508.845.255	1.036.482.400	43.303.000	-	2.046.412.825	4.806.782.480
14	Medan	995.000.000	50.000.000	1.482.103.950	205.000.000	1.121.351.000	-	1.272.207.000	5.125.661.950
15	Padang	214.761.000	80.875.000	1.537.770.000	-	149.000.000	-	401.800.000	2.384.206.000
16	Palembang	320.213.403	-	1.219.065.925	153.995.000	2.744.364.700	-	317.709.319	4.755.348.347
17	Pekanbaru	1.062.861.350	-	619.000.000	115.000.000	853.163.000	45.375.000	1.223.732.000	3.919.131.350
18	Semarang	1.970.590.000	397.725.000	1.720.160.250	141.759.600	317.830.999	196.850.000	1.704.747.525	6.449.663.374
19	Surabaya	428.010.000	63.797.400	2.999.202.500	2.158.701.700	17.690.000	-	113.912.000	5.781.313.600
20	Yogyakarta	1.855.748.758	99.019.950	3.146.240.095	2.098.301.000	803.626.800	-	210.824.794	8.213.761.397
	Jumlah/ *Total*	**22.895.422.555**	**6.845.484.388**	**63.087.712.848**	**22.384.587.948**	**27.404.110.789**	**722.965.000**	**30.294.264.188**	**163.834.557.886**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PENYALURAN DANA
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2017

Statement of Community Development Program Funds Distribution Year 2017

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Offices*	Bantuan Sarana Umum/ *Public Facility Donation*	Bantuan Korban Bencana Alam/ *Aid for Victims of Nature Disaster*	Bantuan Pendidikan/ *Aid for Education Donation*	Bantuan Peningkatan Kesehatan/ *Aid for Health Improvement*	Bantuan Sarana Ibadah/ *Improvement of Worship Facilities*	Pelestarian Alam/ *Nature Preservation*	Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan/ *Social Assistance in order to Alleviate Poverty*	Jumlah/ *Total*
1	Banda Aceh	941.650.816	224.976.000	739.903.116	365.000.000	412.520.000	-	552.312.000	3.236.361.932
2	Bandar Lampung	827.200.000	-	1.162.248.886	487.700.000	474.672.000	-	1.468.516.000	4.420.336.886
3	Bandung	1.625.414.289	50.450.925	736.363.000	1.917.900.000	205.836.200	-	1.063.238.900	5.599.203.314
4	Banjarmasin	1.015.993.950	44.410.000	841.985.850	886.550.000	383.295.550	-	266.434.700	3.438.670.050
5	Denpasar	4.261.789.620	769.535.000	1.521.782.800	1.956.038.245	1.146.501.000	-	1.523.658.500	11.179.305.165
6	DKI Jakarta 1	1.580.700.000	-	344.539.684	1.715.618.257	397.680.000	-	1.294.938.760	5.333.476.701
7	DKI Jakarta 2	290.215.444	-	1.854.059.900	1.580.014.500	2.867.350.000	-	529.126.560	7.120.766.404
8	DKI Jakarta 3	103.920.544	58.986.000	353.462.684	2.466.470.368	3.364.990.000	-	943.884.686	7.291.714.282
9	Jayapura	924.702.000	-	906.171.721	529.172.883	350.000.000	-	785.792.000	3.495.838.604
10	Kantor Pusat	1.330.620.279	107.116.286	9.240.293.161	909.292.500	8.025.330.475	-	12.981.872.216	32.594.524.917
11	Makassar	3.723.073.713	55.000.000	1.793.729.250	1.723.639.090	721.368.000	65.000.000	1.505.592.500	9.587.402.553
12	Malang	3.644.380.500	221.330.800	2.486.291.796	3.769.915.000	1.902.988.000	83.500.000	1.804.640.000	13.913.046.096
13	Manado	355.750.000	48.355.000	616.436.115	309.818.000	979.760.000	196.500.000	35.320.000	2.541.939.115
14	Medan	1.570.872.773	-	744.420.000	130.000.000	729.000.000	-	746.700.000	3.920.992.773
15	Padang	1.514.283.000	225.000.000	902.165.000	108.000.000	350.000.000	-	555.050.000	3.654.498.000
16	Palembang	2.360.748.017	30.175.000	248.959.500	375.250.000	265.693.600	-	671.425.000	3.952.251.117
17	Pekanbaru	227.504.000	-	263.415.000	417.000.000	-	-	612.592.775	1.520.511.775
18	Semarang	1.884.758.826	87.578.650	2.485.094.746	68.990.400	3.197.975.000	378.303.800	926.475.000	9.029.176.422
19	Surabaya	2.095.125.000	205.085.000	3.588.029.400	855.295.100	2.295.714.250	-	992.532.500	10.031.781.250
20	Yogyakarta	1.176.675.375	266.044.100	2.160.677.000	1.024.500.000	1.024.772.500	-	2.834.231.171	8.486.900.146
	Jumlah/ *Total*	**31.455.378.148**	**2.384.042.781**	**32.990.028.608**	**21.686.184.343**	**28.096.448.675**	**723.303.800**	**32.094.333.288**	**150.348.697.502**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurant and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
1	**Banda Aceh**										
	Lancar/ *Current*	517.828.535	583.891.538	-	47.917.316	-	7.978.122.316	1.161.846.921	-	254.861.700	10.544.468.326
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	13.333.600	-	-	-	116.164.604	58.647.500	-	47.222.200	235.367.904
	Diragukan/ *Doubtful*	4.433.500	-	-	-	-	15.750.000	-	-	-	20.183.500
	Macet/ *Loss*	-	121.031.845	-	-	59.800.200	1.450.789.778	130.439.067	-	5.556.800	1.767.617.690
	Sub jumlah/ *Sub total*	**522.262.035**	**718.256.983**	-	**47.917.316**	**59.800.200**	**9.560.826.698**	**1.350.933.488**	-	**307.640.700**	**12.567.637.420**
2	**Bandar Lampung**										
	Lancar/ *Current*	696.193.828	1.037.931.380	-	58.320.833	-	9.300.203.818	5.253.916.914	-	162.500.600	16.509.067.373
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	156.937.900	133.748.256	-	-	290.686.156
	Diragukan/ *Doubtful*	32.982.200	-	-	-	-	16.666.400	47.235.293	-	-	96.883.893
	Macet/ *Loss*	-	14.609.667	-	-	-	404.170.829	449.821.302	-	34.040.000	902.641.798
	Sub jumlah/ *Sub total*	**729.176.028**	**1.052.541.047**	-	**58.320.833**	-	**9.877.978.947**	**5.884.721.765**	-	**196.540.600**	**17.799.279.220**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
3	**Bandung**										
	Lancar/ *Current*	1.024.169.600	1.071.752.419	-	12.501.000	-	13.089.095.296	3.625.831.610	-	106.944.300	18.930.294.225
	Kurang Lancar/ *Substandard*	12.380.000	81.541.905	-	-	-	216.277.991	173.743.300	-	-	483.943.196
	Diragukan/ *Doubtful*	63.361.100	-	-	-	-	69.900.919	-	-	-	133.262.019
	Macet/ *Loss*	197.004.087	217.759.468	-	-	-	1.454.536.048	2.186.565.134	-	129.167.565	4.185.032.302
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.296.914.787**	**1.371.053.792**	-	**12.501.000**	-	**14.829.810.254**	**5.986.140.044**	-	**236.111.865**	**23.732.531.742**
4	**Banjarmasin**										
	Lancar/ *Current*	655.318.967	1.196.529.382	44.722.800	-	170.834.200	12.971.502.056	3.468.362.181	-	569.584.400	19.076.853.986
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	19.444.200	-	-	-	180.296.200	147.326.546	-	-	347.066.946
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	115.972.200	154.635.000	-	-	270.607.200
	Macet/ *Loss*	75.341.800	222.237.269	-	-	-	1.487.549.106	410.259.994	-	46.132.200	2.241.520.369
	Sub jumlah/ *Sub total*	**730.660.767**	**1.438.210.851**	**44.722.800**	-	**170.834.200**	**14.755.319.562**	**4.180.583.721**	-	**615.716.600**	**21.936.048.501**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
5	**Denpasar**										
	Lancar/ *Current*	2.290.998.884	1.597.869.152	-	75.000.000	383.717.501	19.269.103.687	9.764.897.239	48.611.100	219.340.413	33.649.537.976
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	295.861.520	-	-	-	295.861.520
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	52.282.000	-	-	52.282.000
	Macet/ *Loss*	83.050.422	105.197.832	-	-	14.442.800	668.752.842	4.436.088.703	-	-	5.307.532.599
	Sub jumlah/ *Sub total*	**2.374.049.306**	**1.703.066.984**	**-**	**75.000.000**	**398.160.301**	**20.233.718.049**	**14.253.267.942**	**48.611.100**	**219.340.413**	**39.305.214.095**
6	**DKI Jakarta 1**										
	Lancar/ *Current*	38.888.900	1.139.791.217	-	-	-	7.007.953.156	73.750.300	-	116.666.800	8.377.050.373
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	120.966.100	-	-	-	120.966.100
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ *Loss*	1.257.201	23.719.233	-	-	-	295.027.299	91.053.900	-	-	411.057.633
	Sub jumlah/ *Sub total*	**40.146.101**	**1.163.510.450**	**-**	**-**	**-**	**7.423.946.555**	**164.804.200**	**-**	**116.666.800**	**8.909.074.106**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Industries*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
7	**DKI Jakarta 2**										
	Lancar/ *Current*	668.756.828	2.570.125.922	-	66.666.668	53.333.336	9.639.541.403	420.885.517	-	458.713.371	13.878.023.045
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	263.988.266	6.405.243	-	40.833.000	311.226.509
	Diragukan/ *Doubtful*	27.331.406	7.150.000	-	-	-	151.871.647	-	-	39.336.300	225.689.353
	Macet/ *Loss*	9.768.048	255.240.170	-	-	3.434.767	943.678.404	178.074.694	-	54.629.945	1.444.826.028
	Sub jumlah/ *Sub total*	**705.856.282**	**2.832.516.092**	**-**	**66.666.668**	**56.768.103**	**10.999.079.720**	**605.365.454**	**-**	**593.512.616**	**15.859.764.935**
8	**DKI Jakarta 3**										
	Lancar/ *Current*	316.780.758	899.430.402	-	45.833.300	47.917.316	6.373.540.610	804.421.769	-	272.340.359	8.760.264.514
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	90.164.985	67.950.000	-	-	158.114.985
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	29.166.500	-	-	-	29.166.500
	Macet/ *Loss*	87.105.680	688.898.459	-	-	-	1.001.098.052	214.996.238	-	-	1.992.098.429
	Sub jumlah/ *Sub total*	**403.886.438**	**1.588.328.861**	**-**	**45.833.300**	**47.917.316**	**7.493.970.147**	**1.087.368.007**	**-**	**272.340.359**	**10.939.644.428**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
9	**Jayapura**										
	Lancar/ *Current*	87.750.600	550.748.667	-	-	60.416.900	4.815.632.388	1.366.691.089	-	148.541.900	7.029.781.544
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	53.257.929	-	-	-	53.257.929
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	48.691.065	20.100.000	-	-	68.791.065
	Macet/ *Loss*	76.505.433	354.657.634	-	-	49.414.034	956.050.492	89.845.167	-	13.744.003	1.540.216.763
	Sub jumlah/ *Sub total*	**164.256.033**	**905.406.301**	-	-	**109.830.934**	**5.873.631.874**	**1.476.636.256**	-	**162.285.903**	**8.692.047.301**
10	**Makassar**										
	Lancar/ *Current*	1.168.162.462	2.049.715.684	71.875.000	50.000.400	489.154.716	24.437.034.859	6.132.122.190	77.083.800	588.115.827	35.063.264.938
	Kurang Lancar/ *Substandard*	74.924.227	-	-	--	-	299.258.345	134.223.600	-	47.213.888	555.620.060
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	149.160.548	66.666.800	-	-	215.827.348
	Macet/ *Loss*	158.844.267	241.972.408	-	-	-	1.233.000.899	874.183.262	-	15.701.699	2.523.702.535
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.401.930.956**	**2.291.688.092**	**71.875.000**	**50.000.400**	**489.154.716**	**26.118.454.651**	**7.207.195.852**	**77.083.800**	**651.031.414**	**38.358.414.881**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
11	**Malang**										
	Lancar/ *Current*	1.295.746.855	1.256.252.620	56.437.800	-	108.331.900	16.012.100.404	46.694.653.885	-	335.535.667	65.759.059.131
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	184.318.440	120.843.700	-	-	305.162.140
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ *Loss*	20.908.733	26.564.750	-	-	10.000.000	656.396.125	1.417.335.046	-	-	2.131.204.654
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.316.655.588**	**1.282.817.370**	**56.437.800**	-	**118.331.900**	**16.852.814.969**	**48.232.832.631**	-	**335.535.667**	**68.195.425.925**
12	**Manado**										
	Lancar/ *Current*	720.817.318	1.366.668.445	-	-	186.505.794	12.098.199.350	3.269.805.649	-	245.207.322	17.887.203.878
	Kurang Lancar/ *Substandard*	85.332.000	141.666.668	-	-	-	1.307.490.430	573.570.495	-	93.716.300	2.201.775.893
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	141.614.800	19.775.000	-	-	161.389.800
	Macet/ *Loss*	211.966.429	325.022.300	-	-	-	975.260.689	553.423.275	-	20.083.900	2.085.756.593
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.018.115.747**	**1.833.357.413**	-	-	**186.505.794**	**14.522.565.269**	**4.416.574.419**	-	**359.007.522**	**22.336.126.164**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
13	**Medan**										
	Lancar/ *Current*	571.802.759	1.701.828.263	-	72.916.700	200.000.400	11.154.301.021	4.272.774.085	-	148.245.800	18.121.869.028
	Kurang Lancar/ *Substandard*	41.665.322	60.416.900	-	-	-	242.037.000	-	-	-	344.119.222
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	68.750.100	-	-	-	68.750.100
	Macet/ *Loss*	104.190.658	117.768.867	-	-	-	314.861.174	273.319.156	-	146.727.866	956.867.721
	Sub jumlah/ *Sub total*	**717.658.739**	**1.880.014.030**	-	**72.916.700**	**200.000.400**	**11.779.949.295**	**4.546.093.241**	-	**294.973.666**	**19.491.606.071**
14	**Padang**										
	Lancar/ *Current*	1.155.974.300	655.972.178	-	-	28.889.000	7.562.262.361	1.112.459.344	-	102.083.156	10.617.640.339
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	163.334.734	99.712.000	-	11.110.800	274.157.534
	Diragukan/ *Doubtful*	15.179.000	-	-	-	-	19.622.224	-	-	-	34.801.224
	Macet/ *Loss*	191.508.046	69.015.867	-	-	-	566.082.522	565.316.680	-	-	1.391.923.115
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.362.661.346**	**724.988.045**	-	-	**28.889.000**	**8.311.301.841**	**1.777.488.024**	-	**113.193.956**	**12.318.522.212**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
15	**Palembang**										
	Lancar/ *Current*	1.036.711.206	1.432.721.460	-	91.944.300	109.166.700	13.212.609.468	3.269.903.718	-	337.164.920	19.490.221.772
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	11.110.800	-	-	-	305.930.098	20.583.000	-	-	337.623.898
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	64.583.500	41.773.200	-	-	106.356.700
	Macet/ *Loss*	480.101.866	109.951.166	-	-	-	766.239.490	375.363.898	-	3.975.518	1.735.631.938
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.516.813.072**	**1.553.783.426**	-	**91.944.300**	**109.166.700**	**14.349.362.556**	**3.707.623.816**	-	**341.140.438**	**21.669.834.308**
16	**Pekanbaru**										
	Lancar/ *Current*	245.141.400	580.348.200	-	-	68.750.000	6.149.589.289	2.469.450.891	-	217.482.655	9.730.762.435
	Kurang Lancar/ *Substandard*	3.334.160	-	-	-	-	-	-	-	-	3.334.160
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	51.875.643	31.178.490	-	-	83.054.133
	Macet/ *Loss*	1.766.200	57.962.133	-	-	-	435.907.572	44.034.400	-	-	539.670.305
	Sub jumlah/ *Sub total*	**250.241.760**	**638.310.333**	-	-	**68.750.000**	**6.637.372.504**	**2.544.663.781**	-	**217.482.655**	**10.356.821.033**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
17	**Semarang**										
	Lancar/ *Current*	1.066.966.056	923.356.800	-	30.000.100	44.306.301	17.118.072.762	6.246.737.783	-	437.167.400	25.866.607.202
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	23.332.600	53.299.900	267.718.981	-	-	344.351.481
	Diragukan/ *Doubtful*	-	42.860.000	-	-	-	-	79.014.682	-	-	121.874.682
	Macet/ *Loss*	83.511.463	179.870.601	-	-	-	412.123.193	180.763.783	-	-	856.269.040
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.150.477.519**	**1.146.087.401**	-	**30.000.100**	**67.638.901**	**17.583.495.855**	**6.774.235.229**	-	**437.167.400**	**27.189.102.405**
18	**Surabaya**										
	Lancar/ *Current*	993.196.308	1.420.714.926	10.417.700	-	322.639.200	15.338.729.185	4.474.938.114	-	620.798.282	23.181.433.715
	Kurang Lancar/ *Substandard*	18.750.900	14.164.393	-	-	-	523.250.293	6.073.903	-	2.777.400	565.016.889
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	47.917.100	3.916.519	-	-	51.833.619
	Macet/ *Loss*	288.526.100	144.653.000	-	-	-	1.316.381.704	727.546.539	-	37.249.900	2.514.357.243
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.300.473.308**	**1.579.532.319**	**10.417.700**	-	**322.639.200**	**17.226.278.282**	**5.212.475.075**	-	**660.825.582**	**26.312.641.466**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2018 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2018 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
19	**Yogyakarta**										
	Lancar/ *Current*	2.374.341.750	1.992.906.781	48.333.100	46.944.000	397.361.300	27.169.300.308	12.736.215.122	-	197.491.600	44.962.893.961
	Kurang Lancar/ *Substandard*	68.750.100	106.292.100	-	-	-	371.094.800	281.419.635	-	-	827.556.635
	Diragukan/ *Doubtful*	12.374.000	38.422.200	-	-	-	56.083.600	37.500.000	-	-	144.379.800
	Macet/ *Loss*	249.912.132	342.267.284	-	-	-	2.160.452.356	691.253.719	-	64.159.400	3.508.044.891
	Sub jumlah/ *Sub total*	**2.705.377.982**	**2.479.888.365**	**48.333.100**	**46.944.000**	**397.361.300**	**29.756.931.064**	**13.746.388.476**	**-**	**261.651.000**	**49.442.875.287**
	Jumlah/*Total*	**19.707.613.794**	**28.183.358.155**	**231.786.400**	**598.044.617**	**2.831.748.965**	**264.186.808.092**	**133.155.391.421**	**125.694.900**	**6.392.165.156**	**455.412.611.500**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurant and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
1	**Banda Aceh**										
	Lancar/ *Current*	216.758.323	466.182.169	-	72.916.700	-	4.503.683.933	475.359.276	-	165.000.600	5.899.901.001
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	73.522.677	17.708.100	-	-	91.230.777
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	57.000.200	136.433.070	-	-	-	193.433.270
	Macet/ *Loss*	-	121.031.845	-	-	16.300.000	1.252.479.241	112,730.967	-	5.556.800	1.508.098.853
	Sub jumlah/ *Sub total*	**216.758.323**	**587.214.014**	**-**	**72.916.700**	**73.300.200**	**5.966.118.921**	**605.798.343**	**-**	**170.557.400**	**7.692.663.901**
2	**Bandar Lampung**										
	Lancar/ *Current*	326.402.565	470.907.334	-	-	-	4.221.773.510	4.665.764.607	-	5.207.700	9.690.055.716
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	87.666.329	39.904.000	-	34.040.000	161.610.329
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	66.767.000	-	-	-	66.767.000
	Macet/ *Loss*	-	14.609.667	-	-	-	299.431.800	442.707.902	-	-	756.749.369
	Sub jumlah/ *Sub total*	**326.402.565**	**485.517.001**	**-**	**-**	**-**	**4.675.638.639**	**5.148.376.509**	**-**	**39.247.700**	**10.675.182.414**

Lampiran/*Appendix* 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
3	**Bandung**										
	Lancar/ *Current*	555.908.216	190.278.802	-	37.500.600	-	6.654.984.186	2.699.832.866	-	85.277.800	10.223.782.470
	Kurang Lancar/ *Substandard*	37.500.187	-	-	-	-	307.937.244	75.000.000	-	-	420.437.431
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	135.416.900	73.678.601	-	-	209.095.501
	Macet/ *Loss*	166.203.900	217.759.468	-	-	-	1.137.350.473	2.233.036.964	-	129.167.565	3.883.518.370
	Sub jumlah/ *Sub total*	**759.612.303**	**408.038.270**	-	**37.500.600**	-	**8.235.688.803**	**5.081.548.431**	-	**214.445.365**	**14.736.833.772**
4	**Banjarmasin**										
	Lancar/ *Current*	205.193.600	514.013.373	68.055.600	-	218.750.100	7.379.030.099	2.713.342.150	-	15.625.834	11.114.010.756
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	222.265.541	-	-	-	222.265.541
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	97.377.954	-	-	-	97.377.954
	Macet/ *Loss*	75.341.800	178.432.269	-	-	-	1.111.170.754	321.919.271	-	46.132.200	1.732.996.294
	Sub jumlah/ *Sub total*	**280.535.400**	**692.445.642**	**68.055.600**	-	**218.750.100**	**8.809.844.348**	**3.035.261.421**	-	**61.758.034**	**13.166.650.545**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
5	**Denpasar**										
	Lancar/ *Current*	1.140.688.053	683.876.303	-	-	48.611.100	10.501.537.310	4.348.427.673	-	72.916.667	16,796.057.106
	Kurang Lancar/ *Substandard*	46.650.400	-	-	-	-	142.918.059	109.098.484	-	-	298.666.943
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ *Loss*	9.983.322	107.197.832	-	-	14.442.800	559.828.218	4.446.035.680	-	-	5.137.487.852
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.197.321.775**	**791.074.135**	**-**	**-**	**63.053.900**	**11.204.283.587**	**8.903.561.837**	**-**	**72.916.667**	**22.232.211.901**
6	**DKI Jakarta 1**										
	Lancar/ *Current*	-	20,000,000	16.666.400	-	-	1.648.873.427	47.916.700	-	-	1.733.456.527
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	20.199.632	-	-	-	20.199.632
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	16.667.200	-	-	-	16.667.200
	Macet/ *Loss*	1.257.201	23.719.233	-	-	-	163.668.382	91.053.900	-	-	279.698.716
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.257.201**	**43.719.233**	**16.666.400**	**-**	**-**	**1.849.408.641**	**138.970.600**	**-**	**-**	**2.050.022.075**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Industries*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
7	**DKI Jakarta 2**										
	Lancar/ *Current*	258.768.821	1.034.504.337	-	-	-	6.554.380.199	310.371.913	-	224.846.317	8.382.871.587
	Kurang Lancar/ *Substandard*	16.733.500	-	-	-	-	51.249.500	-	-	48.130.315	116.113.315
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	72.250.000	63.313.334	-	-	135.563.334
	Macet/ *Loss*	7.234.548	175.336.533	-	-	3.434.767	742.598.239	114.761.360	-	6.499.630	1.049.865.077
	Sub jumlah/ *Sub total*	**282.736.869**	**1.209.840.870**	-	-	**3.434.767**	**7.420.477.938**	**488.446.607**	-	**279.476.262**	**9.684.413.313**
8	**DKI Jakarta 3**										
	Lancar/ *Current*	195.676.476	450.543.491	-	-	72.916.700	3.092.072.818	346.528.203	-	23.958.300	4.181.695.988
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	72.225.063	-	-	-	72.225.063
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	56.249.400	18.958.337	-	-	75.207.737
	Macet/ *Loss*	87.105.680	688.898.459	-	-	-	913.479.354	197.671.234	-	-	1.887.154.727
	Sub jumlah/ *Sub total*	**282.782.156**	**1.139.441.950**	-	-	**72.916.700**	**4.134.026.635**	**563.157.774**	-	**23.958.300**	**6.216.283.515**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
9	**Jayapura**										
	Lancar/ *Current*	39.833.500	145.276.900	-	-	-	1.590.717.741	430.229.635	-	-	2.206.057.776
	Kurang Lancar/ *Substandard*	7.080.728	-	-	-	-	4.167.300	11.667.400	-	-	22.915.428
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	19.444.200	-	-	-	19.444.200
	Macet/ *Loss*	76.505.433	354.657.634	-	-	49.414.034	936.606.292	79.598.767	-	13.744.003	1.510.526.163
	Sub jumlah/ *Sub total*	**123.419.661**	**499.934.534**	-	-	**49.414.034**	**2.550.935.533**	**521.495.802**	-	**13.744.003**	**3.758.943.567**
10	**Makassar**										
	Lancar/ *Current*	749.749.980	798.090.654	-	75.000.000	292.082.600	11.988.514.973	3.037.056.828	-	328.052.360	17.268.547.395
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	9.722.219	-	.-	-	297.751.437	104.076.571	-	-	411.550.227
	Diragukan/ *Doubtful*	5.825.000	22.222.000	-	-	-	18.053.800	50.079.900	-	-	96.180.700
	Macet/ *Loss*	157.127.267	219.637.908	-	-	-	1.098.781.137	830.269.362	-	15.701.699	2.321.517,.373
	Sub jumlah/ *Sub total*	**912.702.247**	**1.049.672.781**	-	**75.000.000**	**292.082.600**	**13.403.101.347**	**4.021.482.661**	-	**343.754.059**	**20.097.795.695**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas, dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
11	**Malang**										
	Lancar/ *Current*	133.333.600	371.527.000	-	-	86.361.000	6.400.386.082	42.502.603.877	-	61.320.000	49.555.531.559
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	137.589.259	299.487.667	-	-	437.076.926
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ *Loss*	5.753.233	26.564.750	-	-	10.000.000	613.936.366	1.164.752.580	-	-	1.821.006.929
	Sub jumlah/ *Sub total*	**139.086.833**	**398.091.750**	-	-	**96.361.000**	**7.151.911.707**	**43.966.844.124**	-	**61.320.000**	**51.813.615.414**
12	**Manado**										
	Lancar/ *Current*	406.615.988	235.125.800	-	-	180.000.000	3.421.100.958	999.126.800	-	261.874.569	5.503.844.115
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	14.784.228	236.263.600	-	-	251.047.828
	Diragukan/ *Doubtful*	17.382.224	-	-	-	-	4.253.975	66.343.000	-	-	87.979.199
	Macet/ *Loss*	194.584.205	325.022.300	-	-	-	985.756.164	410.939.672	-	20.083.900	1.936.386.241
	Sub jumlah/ *Sub total*	**618.582.417**	**560.148.100**	-	-	**180.000.000**	**4.425.895.325**	**1.712.673.072**	-	**281.958.469**	**7.779.257.383**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
13	**Medan**										
	Lancar/ *Current*	443.795.921	362.727.508	-	-	-	4.426.137.979	1.481.311.911	-	224.883.400	6.938.856.719
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	10.900.628	7.770.000	-	-	18.670.628
	Macet/ *Loss*	104.190.658	117.768.867	-	-	-	348.370.886	270.549.156	-	196.727.866	1.037.607.433
	Sub jumlah/ *Sub total*	**547.986.579**	**480.496.375**	-	-	-	**4.785.409.493**	**1.759.631.067**	-	**421.611.266**	**7.995.134.780**
14	**Padang**										
	Lancar/ *Current*	286.668.100	164.402.600	-	-	-	4.432.011.798	643.879.284	-	58.333.000	5.585.294.782
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	50.433.565	-	-	27.777.600	78.211.165
	Diragukan/ *Doubtful*	9.849.514	13.334.000	-	-	-	50.456.000	-	-	-	73.639.514
	Macet/ *Loss*	133.308.132	55.681.867	-	-	-	489.285.685	564.061.564	-	-	1.242.337.248
	Sub jumlah/ *Sub total*	**429.825.746**	**233.418.467**	-	-	-	**5.022.187.048**	**1.207.940.848**	-	**86.110.600**	**6.979.482.709**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
15	**Palembang**										
	Lancar/ *Current*	94.444.200	542.094.190	-	48.607.080	-	5.681.881.802	983.593.259	-	78.750.259	7.429.370.790
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	17.027.800	67.397.465	-	-	84.425.265
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	48.681.669	170.167.000	-	-	218.848.669
	Macet/ *Loss*	480.101.866	109.951.166	-	-	-	829.123.590	173.361.133	-	-	1.592.537.755
	Sub jumlah/ *Sub total*	**574.546.066**	**652.045.356**	-	**48.607.080**	-	**6.576.714.861**	**1.394.518.857**	-	**78.750.259**	**9.325.182.479**
16	**Pekanbaru**										
	Lancar/ *Current*	262.022.430	315.544.800	-	-	-	2.349.742.038	1.070.333.509	-	15.555.800	4.013.198.577
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	-	15.277.500	-	-	15.277.500
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ *Loss*	1.766.200	70.561.633	-	-	-	467.379.072	35.721.569	-	-	575.428.474
	Sub jumlah/ *Sub total*	**263.788.630**	**386.106.433**	-	-	-	**2.817.121.110**	**1.121.332.578**	-	**15.555.800**	**4.603.904.551**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
17	**Semarang**										
	Lancar/ *Current*	785.921.032	685.657.411	-	-	73.333.000	9.375.921.409	4.678.287.616	-	197.638.300	15.796.758.768
	Kurang Lancar/ *Substandard*	-	-	-	-	-	18.889.100	102.460.000	-	1.665.600	123.014.700
	Diragukan/ *Doubtful*	-	162.903	-	-	-	47.494.448	-	-	-	47.657.351
	Macet/ *Loss*	83.511.463	181.870.601	-	-	-	398.468.245	151.443.124	-	-	815.293.433
	Sub jumlah/ *Sub total*	**869.432.495**	**867.690.915**	-	-	**73.333.000**	**9.840.773.202**	**4.932.190.740**	-	**199.303.900**	**16.782.724.252**
18	**Surabaya**										
	Lancar/ *Current*	804.436.636	430.525.800	37.500.600	-	13.542.300	9.034.744.209	2.757.985.067	-	199.277.843	13.278.012.455
	Kurang Lancar/ *Substandard*	48.213.710	-	-	-	-	193.906.601	37.500.000	-	19.444.200	299.064.511
	Diragukan/ *Doubtful*	-	46.256.000	-	-	-	159.058.947	6.251.156	-	-	211.566.103
	Macet/ *Loss*	288.526.100	155.522.900	-	-	-	1.291.957.080	722.102.517	-	37.249.900	2.495.358.497
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.141.176.446**	**632.304.700**	**37.500.600**	-	**13.542.300**	**10.679.666.837**	**3.523.838.740**	-	**255.971.943**	**16.284.001.566**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN
MENURUT WILAYAH DAN
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR
As of December 31, 2018 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah)

Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)

Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)

No.	Kantor Wilayah/ *Regional Office*	Industri Pengolahan/ *Processing Industries*	Jasa Lainnya/ *Other Services*	Konstruksi/ *Construction*	Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communications*	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ *Trading, Restaurants and Hotels*	Pertanian/ *Agriculture*	Pertambangan/ *Mining*	Sosial Masyarakat/ *Community Services*	Jumlah/ *Total*
19	Yogyakarta										
	Lancar/ *Current*	854.695.187	1.604.063.548	-	-	-	16.324.409.311	9.162.402.386	-	187.500.050	28.133.070.482
	Kurang Lancar/ *Substandard*	29.167.000	59.951.100	-	-	-	196.321.700	111.206.916	-	37.166.600	433.813.316
	Diragukan/ *Doubtful*	-	-	-	-	-	-	65.000.000	-	-	65.000.000
	Macet/ *Loss*	255.392.132	347.586.967	-	-	5.221.600	1.967.045.194	620.671.033	-	-	3.195.916.926
	Sub jumlah/ *Sub total*	**1.139.254.319**	**2.011.601.615**	-	-	**5.221.600**	**18.487.776.205**	**9.959.280.335**	-	**224.666.650**	**31.827.800.724**
	Jumlah/*Total*	**10.107.208.031**	**13.128.802.141**	**122.222.600**	**234.024.380**	**1.141.410.201**	**138.036.980.180**	**98.086.350.346**	-	**2.845.106.677**	**263.702.104.556**

AKSELERASI PERTUMBUHAN UMKM Melalui **DIGITALISASI LAYANAN PERBANKAN** Untuk MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Head Office
Gedung BRI I
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Indonesia

Tel. : (62 21) 251 0244, 251 0254
Fax. : (62 21) 250 0065,250 0077
Website : www.bri.co.id